SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASER

RENJA PERUBAHAN

TAHUN 2025

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan R.M. Noto Sunardi Nomor 01, Tanah Grogot, Kab. Paser, 76251
Telp. (0543) 21150, Fax. (0543) 21079, Website http://www.paserkab.go.id,
(E-mail) humas.kab.paser@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DERAH
KABUPATEN PASER
NOMOR : 050/1045/Setda/PK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
TAHUN 2025

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka kelancaran Tugas Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Paser;

b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005 Nomor) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser;
16. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangja menegah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA keputusan ini bertugas mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA keputusan ini harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Paser

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Bagian Perencanaan dan KeuanganTahun Anggaran 2025

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal, 04 Februari 2025
PENGGUNA ANGGARAN



Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196612111986091002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 050/1045/Setda/PK/2025
TANGGAL : 04 Februari 2025

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025

Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
Penanggung Jawab	:	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
Ketua	:	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
Sekretaris	:	Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
Anggota	:	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

1. Nurmalia Rasyida, SP (Analis Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser)
2. Anwar, SE (Perencana Ahli Pertama pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah)
3. Selamet Riyadi. SR (Pengelola Data pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser)
4. Raihan Farah Diva, S.Kom (Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser).
5. Siti Rohmatin, SE (Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Paser)
6. Akibah Takdiriah (Verifikator Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser).

PENGGUNA ANGGARAN,

Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si
NIP. 196612111986091002

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini disusun dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab dan komitmen kami di Sekretariat Daerah Kabupaten Paser. Dokumen ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah peta jalan yang akan memandu setiap langkah kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kami percaya bahwa dengan perencanaan yang matang, kita dapat menghadapi berbagai tantangan dengan optimisme dan memanfaatkan setiap peluang untuk kemajuan daerah.

Melalui Rencana Kerja ini, kami menetapkan prioritas strategis yang berfokus pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan sinergi antar-OPD, dan percepatan digitalisasi pelayanan. Setiap program dan kegiatan yang tercantum di dalamnya merupakan hasil dari analisis mendalam dan diskusi kolaboratif, yang bertujuan untuk menciptakan dampak positif yang signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Paser. Kami mengajak seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Daerah untuk bersama-sama mengimplementasikan rencana ini dengan penuh dedikasi dan integritas.

Kami berharap, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini menjadi kompas yang mengarahkan kita menuju pencapaian visi dan misi Kabupaten Paser. Dengan kerja keras, inovasi, dan semangat gotong royong, kami yakin dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun Paser yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya dalam setiap upaya baik yang kita lakukan.

Tana Paser, . Agustus 2025
Sekretaris Daerah

Drs. Katsul Wijaya M. SI
NIP. 19661211 198609 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 3

1.4 SISTEMATIKA 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN LALU **6**

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER 6

2.2 ANALIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 44

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER 48

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 49

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ... 80

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER 91

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 91

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER 93

3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 95

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER 116

BAB V PENUTUP 120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagaiacuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;

d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Sekretariat Daerah hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2025 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal:
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;

22.Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser;
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun; Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaanprogram dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan programtahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseranmata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Sekretariat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah, keterkaitan antara Renja Sekretariat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Sekretariat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Sekretariat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2025 hingga Triwulan I baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2025 yang disertai perubahan target

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akandilakukan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1
FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT
DAERAHSEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5 6		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya Kualitas Layanan Aministrasi Umum**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indek Kepuasan Layanan Sekretariat**	**80**	**225.411.128.160**	**72**	**Rp299.616.265.611**	**70**	**Rp95.188.032.446**	**0**	**Rp 14.980.419.534**	**0**	**Rp 14.732.985.204**	**0,00**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp29.713.404.738**		**Rp 329.329.670.349**	**0,00%**	**146,10%**	
		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	**Persentase fasilitasi dokumen perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja**	**100**	**496.202.614**	**100**	**Rp 874.434.732**	**100**	**Rp 506.657.822**	**25**	**Rp 106.279.390**	**0**	**Rp 100.704.600**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**25**	**Rp 206.983.990**	**100**	**Rp 1.081.418.722**	**100,00%**	**217,94%**	**Bagian Perencanaan & Keuangan**

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5 6		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	223.533.100	12	588.716.149	6	Rp 333.584.601	2	Rp 97.779.390	1	Rp 94.036.100	0	Rp -	0	Rp -	3	Rp 191.815.490	15	Rp 780.531.639	50,00%	349,18%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	60	83.125.000	24	122.801.584	12	Rp 87.183.692	0	Rp -	12	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	12	Rp -	36	Rp 122.801.584	60,00%	147,73%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25	189.544.514	10	162.916.999	5	Rp 85.889.529	1	Rp 8.500.000	0	Rp 6.668.500	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 15.168.500,00	11	Rp 178.085.499	44,00%	93,95%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5 6		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**136.417.508.635**	**235,89**	**Rp 60.284.063.830**	**100**	**Rp 44.029.194.588**	**15,9**	**Rp7.714.863.735**	**0**	**Rp 11.426.679.317**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**15,9**	**Rp 19.141.543.052**	**251,79**	**Rp 79.425.606.882**	**251,79%**	**58,22%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1134 0	134.073.726.614	4.388	58.817.932.696	2268	Rp 42.949.301.742	715	Rp 7.372.485.175	780	Rp 11.368.324.796	0	Rp -	0	Rp -	1495	Rp 18.740.809.971	5883	Rp 77.558.742.667	51,88%	57,85%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	60	259.145.752	12	48.206.900	12	Rp 174.153.189	1	Rp 26.097.900	4	Rp 58.354.521	0	Rp -	0	Rp -	5	Rp 84.452.421	17	Rp 132.659.321	28,33%	51,19%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5 6		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3625	2.259.145.752	979	1.381.084.954	950	Rp 882.701.606	113	Rp 316.280.660	354	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	467	Rp 316.280.660	1.446	Rp 1.697.365.614	39,89%	75,13%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	umlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	84.636.269	4	36.839.280	2	Rp 23.038.051	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	4	Rp 36.839.280	40,00%	43,53%	
		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	**Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Eakil Kepala Daerah yang difasilitasi**	**100**	**5.373.354.076**	**73**	**Rp 2.643.702.827**	**100**	**Rp 2.579.401.688**	**12,64**	**Rp307.451.732**	**0**	**Rp 213.152.783**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**12,64**	**Rp 520.604.515**	**85,77**	**Rp 3.164.307.342**	**85,77%**	**58,89%**	

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5 6		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	140	1.483.388.698	56	342.229.335	28	Rp 657.465.688	4	Rp 49.645.732	6	Rp 101.553.645	0	Rp -	0	Rp -	10	Rp 151.199.377	66	Rp 493.428.712	47,14%	33,26%	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	50	326.333.015	18	1.075.234.600	10	Rp 1.021.936.000	3	Rp 201.306.000	0	Rp 7.269.750	0	Rp -	0	Rp -	3	Rp 208.575.750	Rp3	Rp 1.283.810.350	6,00%	393,40%	
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40	1.018.180.675	4	77.718.892	8	Rp 300.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	4	Rp 77.718.892	10,00%	7,63%	
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil	60	2.545.451.688	25	1.148.520.000	12	Rp 600.000.000	1	Rp 56.500.000	8	Rp 104.329.388	0	Rp -	0	Rp -	9	Rp 160.829.388	34	Rp 1.309.349.388	56,67%	51,44%	**Bagian Umum**

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5 6		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kepala Daerah	Kepala Daerah																					
		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	**Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah**	**100**	**228.515.634**	**-**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp0**	**0**	**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**	**0**	Rp -	**0**	**Rp -**	**0,00 %**	**0,00 %**	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15	224.651.384	-	-	0	**Rp -**	0	Rp -	0	Rp -		Rp -		Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0,00%	0,00%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100**	**1.032.027.932**	**83,36**	**Rp 513.840.261**	**100**	**Rp 776.000.000**	**25**	**Rp35.915.809**	**0**	**Rp 65.384.000**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**25**	**Rp 101.299.809**	**108,36**	**Rp 615.140.070**	**108,36%**	**59,60%**	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	500	714.966.470	233	339.776.590	100	Rp 365.000.000	3	Rp 35.915.809	3	Rp 65.384.000	0	Rp -	0	Rp -	6	Rp 101.299.809	239	Rp 441.076.399	47,80%	61,69%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5 6		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	900	317.061.462	131	174.063.671	180	Rp 411.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	131	Rp 174.063.671	14,56%	54,90%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**30.072.791.472**	**81,08**	**Rp 62.763.078.153**	**100**	**Rp 14.077.203.006**	**25**	**Rp 2.117.465.378**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**25**	**Rp 2.117.465.378**	**106,08**	**Rp 64.880.543.531**	**106,08%**	**215,74%**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	80	445.504.954	32	625.807.900	6	Rp 87.000.000	1	Rp 14.907.300	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 14.907.300	33	Rp 640.715.200	41,25%	143,82%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	85	1.553.725.383	34	28.694.809.224	17	Rp 2.962.968.400	4	Rp 167.727.038	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	4	Rp 167.727.038	38	Rp 28.862.536.262	44,71%	1857,63%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5 6		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	125	2.600.050.608	43	1.276.654.789	25	Rp 850.000.000	2	Rp 56.000.700	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	2	Rp 56.000.700	45	Rp 1.332.655.489	36,00%	51,25%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150	6.340.976.227	35	877.602.650	30	Rp 103.116.947	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	35	Rp 877.602.650	23,33%	13,84%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	45	239.314.204	32	107.672.300	9	Rp 23.159.948	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	32	Rp 107.672.300	71,11%	44,99%	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	750	5.123.930.102	300	20.952.659.513	150	Rp 6.614.284.715	5	Rp 1.235.530.772	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	5	Rp 1.235.530.772	305	Rp 22.188.190.285	40,67%	433,03%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750	13.219.472.430	300	10.081.185.777	12	Rp 3.436.672.996	6	Rp 643.299.568	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	6	Rp 643.299.568	306	Rp 10.724.485.345	40,80%	81,13%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5 6		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60	549.817.565	12	146.686.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -		Rp -	0	Rp -	0	Rp -	12	Rp 146.686.000	20,00%	26,68%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah**	**100**	**510.203.718**	**-**	**Rp 777.220.400**	**100**	**Rp -**	**25**	**Rpo**	**0**	**Rp -**		**Rp -**		**Rp -**	**25**	**Rp -**	**25**	**Rp 777.220.400**	**25,00%**	**152,34%**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	60	510.203.718	12	777.220.400	0	Rp -	0	Rpo	0	Rp -		Rp -		Rp -	0	Rp -	12	Rp 777.220.400	20,00%	152,34%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100**	**16.907.786.107**	**75**	**Rp 116.744.596.578**	**100**	**Rp 20.340.181.234**	**25**	**Rp 2.224.531.311**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**25**	**Rp 2.224.531.311**	**100**	**Rp 118.969.127.889**	**100,00%**	**703,64%**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor	5600	50.909.034	-	-	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -		Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0,00%	0,00%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5 6		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	9.896.492.161	24	5.147.635.985	12	Rp 3.756.893.854	6	Rp 780.107.937	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	6	Rp 780.107.937	30	Rp 5.927.743.922	50,00%	59,90%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	6.960.384.912	20	96.219.594.593	5	Rp 8.583.287.380	4	Rp 113.146.800	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	4	Rp 113.146.800	24	Rp 96.332.741.393	96,00%	1384,01%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tidak ada didalam renstra		24	15.377.366.000	12	Rp 8.000.000.000	4	Rp 1.331.276.574	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	4	Rp 1.331.276.574	28	Rp 16.708.642.574	#VALUE!	#DIV/0!	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**11.274.732.231**	**221,11**	**Rp 34.835.320.490**	**100**	**Rp 5.152.274.190**	**25**	**Rp 801.442.600**	**0**	**Rp 1.146.774.288**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**25**	**Rp 1.948.216.888**	**246,11**	**Rp 36.783.537.378**	**246,11%**	**326,25%**	

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5 6		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	1.823.714.316	23	1.497.010.134	3	Rp 640.072.100	2	Rp 96.603.600	0	Rp 87.342.400	0	Rp -	0	Rp -	2	Rp 183.946.000	25	Rp 1.680.956.134	166,67%	92,17%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	5.010.110.738	49	2.832.672.926	20	Rp 1.068.165.450	3	Rp 176.404.600	0	Rp 198.143.908	0	Rp -	0	Rp -	3	Rp 374.548.508	52	Rp 3.207.221.434	52,00%	64,01%	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	4.440.907.177	9	30.505.637.430	3	Rp 3.444.036.640	4	Rp 528.434.400	0	Rp 861.287.980	0	Rp -	0	Rp -	4	Rp 1.389.722.380	13	Rp 31.895.359.810	86,67%	718,22%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5 6		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi**	**100**	**10.691.735.857**	**97**	**Rp 5.155.519.673**	**100**	**Rp 2.914.477.000**	**25**	**Rp 375.776.380**	**0**	**Rp 1.131.566.575**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**25**	**Rp 1.507.342.955**	**122**	**Rp 6.662.862.628**	**122,22%**	**62,32%**	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	60	3.962.658.387	25	2.590.017.167	12	Rp 1.343.700.000	5	Rp 342.766.800	0	Rp 629.427.935	0	Rp -	0	Rp -	5	Rp 972.194.735	30	Rp 3.562.211.902	50,00%	89,89%	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	60	3.314.336.933	24	1.978.452.731	12	Rp 1.105.777.000	4	Rp 10.389.100	0	Rp 381.318.160	0	Rp -	0	Rp -	4	Rp 391.707.260	28	Rp 2.370.159.991	46,67%	71,51%	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	60	1.787.065.921	22	587.049.775	12	Rp 465.000.000	2	Rp 22.620.480	0	Rp 120.820.480	0	Rp -	0	Rp -	2	Rp 143.440.960	24	Rp 730.490.735	40,00%	40,88%	**Bagian Organisasi**
		PENATAAN ORGANISASI	**Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik**	**100**	**4.040.714.399**	**100**	**3.153.461.283**	**100**	**Rp 954.983.240**	**25**	**Rp 194.186.049**	**0**	**Rp 80.170.203**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**25**	**Rp 274.356.252**	**125**	**Rp 3.427.817.535**	**125,00%**	**84,83%**	

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5 6		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	205	1.302.098.320	82	1.195.295.144	41	Rp 273.186.541	24	Rp 67.236.254	0	Rp 23.238.850	0	Rp -	0	Rp -	24	Rp 90.475.104	106	Rp 1.285.770.248	51,71%	98,75%	
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20	1.262.318.147	8	748.459.201	12	Rp 366.797.000	3	Rp 49.730.545	0	Rp 41.106.353	0	Rp -	0	Rp -	3	Rp 90.836.898	11	Rp 839.296.099	55,00%	66,49%	
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	10	681.748.835	4	759.248.073	2	Rp 153.688.699	1	Rp 52.596.632	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 52.596.632	5	Rp 811.844.705	50,00%	119,08%	
		Monitoring, Evaluasi & Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik & Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5	184.193.054	2	119.287.230	2	Rp 48.712.000	0	Rp -	0	Rp 2.775.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp 2.775.000	2	Rp 122.062.230	40,00%	66,27%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5 6		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	15	610.356.043	6	331.171.635	3	Rp 112.599.000	0	Rp 24.622.618	0	Rp 13.050.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp 37.672.618	6	Rp 368.844.253	40,00%	60,43%	
		PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	**Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**100**	**8.365.555.485**	**100**	**11.871.027.384**	**100**	**Rp3.857.659.678**	**25**	**Rp 1.102.507.150**	**0**	**Rp 568.553.438**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**25**	**Rp 1.671.060.588**	**125**	**Rp 13.542.087.972**	**125,00%**	**161,88%**	**Bagian Protokol**
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kegiatan/acara yang terlaksana	60	3.506.165.782	24	4.830.964.358	12	Rp 2.298.885.566	3	Rp 485.862.000	0	Rp 278.995.400	0	Rp -	0	Rp -	3	Rp 764.857.400	27	Rp 5.595.821.758	45,00%	159,60%	
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	180	2.449.029.978	48	2.721.498.349	36	Rp 699.194.013	9	Rp 267.953.400	0	Rp 107.841.200	0	Rp -	0	Rp -	9	Rp 375.794.600	57	Rp 3.097.292.949	31,67%	126,47%	
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah dokumentasi tugas pimpinan	60	2.410.359.725	24	4.318.564.677	12	Rp 859.580.099	3	Rp 348.691.750	0	Rp 181.716.838	0	Rp -	0	Rp -	3	Rp 530.408.588	27	Rp 4.848.973.265	45,00%	201,17%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5 6		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	**Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti**	**100**	**140.592.769.988**	**106,4**	**Rp64.227.543.065**	**100**	**Rp32.557.348.903**	**22,98**	**Rp1.330.463.736**		**Rp 180.022.586**		**Rp -**		**Rp -**	22,98	**Rp 1.510.486.322**	**129,35**	Rp 65.738.029.387	**129,35%**	**46,76%**	
			Nilai LPPD	**3,33**		**2,77**		**2,75**		**0**								0		**2,77**				
		Administrasi Tata Pemerintahan	**Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi**	**100**	**1.147.638.721**	**100**	**6.444.348.724**	**100**	**Rp 1.969.866.414**	**25**	**Rp 272.799.204**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**25**	**Rp 272.799.204**	**125**	**Rp 6.717.147.928**	**125,00%**	**585,30%**	**Bagian Tata Pemerintahan**
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	115	279.300.593	0	4.005.363.344	8	Rp 1.200.234.498	1	Rp 84.733.138	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 84.733.138	0	Rp 4.090.096.482	0,00%	1464,41%	
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	45	382.556.698	0	1.389.206.784	9	Rp 300.125.175	4	Rp 60.482.276	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	4	Rp 60.482.276	0	Rp 1.449.689.060	0,00%	378,95%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5 6		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	15	466.374.604	0	1.049.778.596	3	Rp 469.506.741	3	Rp 127.583.790	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	3	Rp 127.583.790	0	Rp 1.177.362.386	0,00%	252,45%	
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi**	**100**	**2.443.421.838**	**142,2**	**4.119.375.267**	**100**	**Rp 981.985.346**	**25**	**Rp67.833.280**	**0**	**Rp 180.022.586**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**25**	**Rp 247.855.866**	**167,16**	**Rp 4.367.231.133**	**167,16%**	**178,73%**	
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3750	840.719.420	2022	1.219.052.888	805	Rp 439.278.634	201	Rp 31.782.580	230	Rp 88.294.172	0	Rp -	0	Rp -	431	Rp 120.076.752	2453	Rp 1.339.129.640	65,41%	159,28%	
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	21	999.838.150	7	2.500.165.680	3	Rp 364.802.172	0	Rp 16.199.900	1	Rp 28.108.780	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 44.308.680	8	Rp 2.544.474.360	38,10%	254,49%	**Bagian Hukum**
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4370	602.864.269	194	400.156.699	100	Rp 177.904.540	24	Rp 19.850.800	28	Rp 63.619.634	0	Rp -	0	Rp -	52	Rp 83.470.434	246	Rp 483.627.133	5,63%	80,22%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5 6		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun Kebijakan**	**100**	**135.673.694.847**	**100**	**52.613.008.957**	**100**	**Rp 29.219.114.908**	**25**	**Rp 935.386.956**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**25**	**Rp 935.386.956**	**125**	**Rp 53.548.395.913**	**125,00%**	**39,47%**	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1785	20.674.670.340	630	34.355.984.181	180	Rp 24.170.415.847	20	Rp 833.122.156	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	20	Rp 833.122.156	650	Rp 35.189.106.337	36,41%	170,20%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5 6		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	500	25.882.458.007	196	17.192.456.398	100	Rp 4.767.814.440	7	Rp 26.304.800	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	7	Rp 26.304.800	203	Rp 17.218.761.198	40,60%	66,53%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5 6		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	75	1.210.097.476	35	1.064.568.378	15	Rp 280.884.621	2	Rp 75.960.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	2	Rp 75.960.000	37	Rp 1.140.528.378	49,33%	94,25%	
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	**Cakupan Kerjasama Daerah yang terfasilitasi**	**60**	**1.328.014.582**	**83,33**	**1.050.810.117**	**100**	**Rp 386.382.235**	**25**	**Rp 54.444.296**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**25**	**Rp 54.444.296**	**108,33**	**Rp 1.105.254.413**	**180,55%**	**83,23%**	**Bagian Kerjasama**
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah MoU Kerja sama Dalam Negeri yang terlaksanakan	150	593.746.970	49	542.086.784	25	Rp 194.265.000	3	Rp 20.750.900	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	3	Rp 20.750.900	52	Rp 562.837.684	34,67%	94,79%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5 6		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah MoU yang telah dievaluasi pada Pelaksanaan Kerja sama	150	734.267.612	37	508.723.333	12	Rp 192.117.235	1	Rp 33.693.396	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 33.693.396	38	Rp 542.416.729	25,33%	73,87%		
3	**Meningkatnya Koordinasi Kebijakan daerah BidangPerekonomian dan Pembangunan**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100**	**5.616.603.462**	**114,63**	**Rp11.039.552.583**	**100**	**Rp3.720.156.176**		**Rp605.611.492**		**Rpo**		**Rpo**		**Rpo**	0	**Rp 605.611.492**	**#VALUE!**	**Rp 11.645.164.075**	**#VALUE!**	**207,33%**		
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Persentase Hasil Proses PBJ**	**100**	**2.222.326.959**	**158,5**	**4.923.880.977**	**100**	**Rp 2.157.342.044**	**25**	**Rp333.752.306**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**25**	**Rp 333.752.306**	**183,52**	**Rp 5.257.633.283**	**183,52%**	**236,58%**	**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	8612	617.577.489	7083	1.898.711.082	2300	Rp 664.433.165	9	Rp 38.140.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	9	Rp 38.140.000	7092	Rp 1.936.851.082	82,35%	313,62%		
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1236	1.470.985.984	862	2.041.308.382	250	Rp 1.019.344.000	3	Rp 218.561.805	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	3	Rp 218.561.805	865	Rp 2.259.870.187	69,98%	153,63%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5 6		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	108	535.053.945	28	983.861.513	20	Rp 473.564.879	0	Rp 77.050.501	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp 77.050.501	28	Rp 1.060.912.014	25,93%	198,28%	
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi**	**100**	**1.167.517.235**	**100**	**2.257.860.122**	**100**	**Rp 512.430.796**	**25**	**Rp110.861.335**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**25**	**Rp 110.861.335**	**125**	**Rp 2.368.721.457**	**125,00%**	**202,89%**	
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100	393.119.559	37	613.517.487	24	Rp 161.144.317	4	Rp48.237.066	0	Rp0	0	Rp -	0	Rp -	4	Rp 48.237.066	41	Rp 661.754.553	41,00%	168,33%	**Bagian Perekonomian**
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	210	282.718.228	82	611.741.070	36	Rp 145.404.757	0	Rp 24.190.469	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp 24.190.469	82	Rp 635.931.539	39,05%	224,93%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5 6		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	100	229.090.652	52	753.612.407	24	Rp 145.405.062	4	Rp 36.033.800	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	4	Rp 36.033.800	56	Rp 789.646.207	56,00%	344,69%	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	125	262.588.796	52	278.989.158	12	Rp 60.476.660	2	Rp 2.400.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	2	Rp 2.400.000	54	Rp 281.389.158	43,20%	107,16%	
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Persentase SKPD tertib dalam Adminiatrasi Pembangunan**	**100**	**1.368.265.600**	**100**	**2.224.337.573**	**100**	**Rp 545.887.819**	**25**	**Rp53.147.916**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**25**	**Rp 53.147.916**	**125**	**Rp 2.277.485.489**	**125,00%**	**166,45%**	**Bagian Administrasi Pembangunan**
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	10	512.664.961	14	608.246.641	2	Rp 176.437.005	0	Rp 31.494.415	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp 31.494.415	14	Rp 639.741.056	140,00%	124,79%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5 6		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	60	366.035.953	24	537.276.339	12	Rp 169.946.592	0	Rp 10.037.821	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp 10.037.821	24	Rp 547.314.160	40,00%	149,52%	
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	60	489.564.687	24	1.078.814.593	12	Rp 199.504.222	0	Rp 11.615.680	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp 11.615.680	24	Rp 1.090.430.273	40,00%	222,73%	
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam**	**100**	**858.493.667**	**100**	**1.633.473.911**	**100**	**Rp 504.495.517**	**25**	**Rp107.849.935**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**0**	**Rp -**	**25**	**Rp 107.849.935**	**125**	**Rp 1.741.323.846**	**125,00%**	**202,83%**	**Bagian Sumber Daya Alam**

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5 6		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian,Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	171	384.830.926	77	702.297.177	40	Rp 232.541.580	0	Rp 41.070.140	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp 41.070.140	77	Rp 743.367.317	45,03%	193,17%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5 6		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	144	235.922.644	60	505.160.155	35	Rp 133.262.000	0	Rp 30.315.940	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp 30.315.940	60	Rp 535.476.095	41,67%	226,97%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5 6		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air,Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	171	237.740.097	70	426.016.579	40	Rp 138.691.937	0	Rp 36.463.855	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp 36.463.855	70	Rp 462.480.434	40,94%	194,53%	

Berdasarkan Tabel 2.2 Realisasi RKPD Tahun 2024 Semester I dapat ijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan I adalah 20,61 %, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.419.394.939 (Enam belas milyar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 145.090.032.930 (Seratus empat puluh lima milyar sembilan puluh juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) atau sebesar 11,32%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Sekretariat Daerah sebesar 35,73% dengan predikat kinerja Sangat Rendah (penentuan peringkat disesuaikan skala pada Tabel T-E.1 PMDN Halaman 494).
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 1 indikator, capaian kinerja >70%-100% =7 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 10 indikator capaian kinerja 0%-50% = 106 indikator

2.1. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. penyusunan perencanaan program lingkup Sekretariat Daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
2. penetapan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan lembaga TeknisDaerah;
4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. penyelenggaraan pembinaan administrasi Pemerintahan, kelembagaan, tatalaksanaan dan aparatur Pemerintah Daerah;
6. pengelolaan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah;
7. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan keuangan Sekretariat Daerah; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Sekretariat Daerah adalah:

Sekretaris Daerah

A. Asisten pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahaan dan Kesejateraan Rakyat membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kerja sama, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.

Untuk melaksanakan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama ;
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra ;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang tata pemerintahan,hukum, kesra dan kerja sama ;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama ;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan

kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesra ; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan :

1. Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi.

Untuk melaksanakan tugasnya Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi daerah menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

d. pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional dan daerah (HUT RI, HUT Provinsi, HUTKabupaten dan HUT OTDA);

e. pelaksanaan fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;

f. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan;

g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, penggabungan danpemekaran wilayah kecamatan dan/atau kelurahan;

h. pelaksanaan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, kelurahan, serta nama

laindan/atau pemindahan ibukota kecamatan;

i. pelaksanaan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;

j. penyiapan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;

k. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan KepalaDaerah kepada Camat;

l. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan batas daerah, kecamatan dan desa;

n. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembangunan wilayah perbatasan;

o. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan;

p. pelaksanaan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

q. pelaksanaan penghimpunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(ILPPD);

r. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Organisasi Perangkat Daerah;

s. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

t. pelaksanaan fasilitasi pengusulan Izin dan Cuti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

u. pelaksanaan penyusunan bahan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah;

v. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum;

q. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi proses administrasipergantian antar waktu pimpianan dan anggota legislatif;

r. Pelaksanaan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawabantahunan dan

akhir masa jabatan Kepala Daerah;

s. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang otonomidaerah;

t. pelaksaaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat

a. penyiapan dan pengoordinasian bahan pedoman pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;

b. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;

c. penyiapan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan umat beragama dan kerja sama antar lembagakeagamaan;

d. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan pertemuan/rapat-rapat koordinasi di bidang kerukunan umat beragama dan serta kerja sama antar lembaga keagamaan;

e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran serta kerja sama antar lembaga keagamaan;

f. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan musyawarah antar umat beragama dan aliran kepercayaan;

g. penyiapan bahan dan pengoordinasian kegiatan forum kerukunan umat beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;

h. pelaksanaan koordinasi kerja sama sosial kemasyarakatan dan konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;

i. pelaksanaan evaluasi kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan; penyiapan bahan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan

j. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

k. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

l. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

m. penyiapan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

n. penyiapan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, Ormas, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga; dan

o. penyiapan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, Ormas, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga;

p. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidangkepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;

a. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintahdaerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;

b. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;

c. penyiapan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan

kemasyarakatan lainnya;

d. pelaksaaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Untuk melaksanakan tugasnya Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan produk hukum daerah;

b. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah;

c. penyiapan bahan penjelasan Kepala Daerah dalam proses penetapan PeraturanDaerah;

d. penyiapan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah

e. pelaksanaaan pembinaan penyusunan produk hukum Daerah.

f. penyiapan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukumdaerah

g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah;

h. pelaksanaan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

i. pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur pemerintah daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

j. pelaksanaaan koordinasi dan fasilitasi kerja sama dalam penanganan perkara hukum;

k. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia(HAM);

l. penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum (legal opinion); dan

m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan perkara sengketahukum;

n. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan peraturanperundang-undangan lainnya;

o. pelaksanaan penghimpunan serta pengolahandata dan informasi sebagai bahan dalamrangka pembentukan kebijakan daerah;

p. pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

q. melaksanakan pemberian pelayanan administrasi informasi produk hukum;

r. pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi produk hukum daerah maupunperaturan perundang-undangan lainnya; dan

s. pelaksanaan evaluasidan pelaporan terhadap dokumentasi dan informasi produk hukumdaerah;

t. pelaksaaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bagian Kerja Sama

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, dan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kerja sama dalam negeri dan luar negeri, dan evaluasi kerja sama.

Untuk melaksanakan tugasnya Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dalam negeridan luar negeri;

b. pelaksanaan pengolahan data kerja sama daerah dalam negeri dan luar negeri;

c. pelaksanaan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama daerah dalam negeridan luar negeri;
d. pelaksanaan fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah Daerah;
e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah dalam negeri dan luar negeri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten/kota;
f. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama daerah dalam negeri danluar negeri;
g. penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasikerja sama luar negeri dan dalam negeri;
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama daerah dalam dan luar negeri; dan
i. pelaksanaan penyusunan laporan hasil evaluasi kerja sama daerah dalam dan luar negeri;
j. pelaksaaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian , administrasipembangunan, dan sumber daya alam
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang jasa dan sumber daya alam.
c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang danjasa

e. Pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam

f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah perekonomian,administarsi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan :

1. Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengorganisasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian pendistribusian perekonomian dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Bagian perekonomian menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan Badan Usaha MilikDaerah dan Badan Layanan Umum Daerah;

b. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan LayananUmum Daerah;

c. pelaksanaan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja Badan Usaha Milik Daerahdan dan Badan Layanan Umum Daerah;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan LayananUmum Daerah;

e. penyusunan bahan dan data serta analisa di bidang pengendalian dan

distribusiperekonomian;

f. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan distribusiperekonomian;

g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatanpengendalian dan distribusi perekonomian;

h. penyusunan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatanpengendalian dan distribusi perekonomian;

i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian dandistribusi perekonomian;

k. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan di bidang pengendalian dan distribusi perekonomian;

l. penyusunan bahan dan data serta analisa di bidang perencanaan dan pengawasanekonomi mikro kecil;

m. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengawasanekonomi mikro kecil;

n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatanperencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;

o. penyusunan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatanperencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;

p. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan danpengawasan ekonomi mikro kecil;

q. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengawasan ekonomimikro kecil;

r. pelaksaaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Adiminstrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan dan mempersiapkan rencana kegiatan penyusunan program pembangunan daerah
b. penyusunan bahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan program pembangunan daerah;
c. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan programpembangunan daerah;
d. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan sinergitas program pembangunan daerah;
e. pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunandaerah;
f. pelaksanaan penyusunan program pembangunan dalam rangka mengembangkan akses pembangunan daerah;
g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan dalam rangka mengurangi resiko dan kerugian pihak lain dalam rangka kelancaran program pembangunan daerah;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah;
i. penyusunan dan mempersiapkan rencana kegiatan penyusunan program pembangunandaerah;
j. penyusunan bahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan program pembangunandaerah;
k. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan programpembangunan daerah;

l. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan sinergitas program pembangunan daerah;

m. pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunandaerah;

n. pelaksanaan penyusunan program pembangunan dalam rangka mengembangkan aksespembangunan daerah;

o. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan dalam rangka mengurangi resiko dan kerugian pihak lain dalam rangka kelancaran program pembangunan daerah;

p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah;

q. penyusunan rencana monitoring dan pelaporan program pembangunan daerah;

r. pelaksanaan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah;

s. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan monitoring danevaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;

t. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasiprogram pembangunan daerah;

u. pelaksanaan pencatatan, penyusunan rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuanmonitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;

v. pelaksanaan pengolahan dan penyajian data hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;

w. penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan kebijakan programpembangunan daerah;

x. pelaksaaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
d. penyiapan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya daninformasi yang dibutuhkan;
e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
g. pelaksanaan pembantuan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
i. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
j. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
k. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
l. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;

m. pelaksanaan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);

n. pelaksanaan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;

o. pengelolaan informasi kontrak;

p. pengelolaan informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;

q. pelaksanaan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);

r. pelaksanaan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;

s. pelaksanaan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;

t. pelaksanaan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);

u. pelaksanaan analisis beban kerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);

v. pengelolaan personil Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);

w. pelaksanaan pengembangan sistem insentif personel Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa(UKPBJ);

x. pelaksanaan fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;

y. pelaksanaan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;

z. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa;

aa. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sistem Pengadaan Secara Elektronik

(SPSE), e- katalog, e- monev, Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP);

ab. pelaksanaan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;. pelaksaaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahkan :

a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

4. **Bagian Sumber Daya Alam, membawahkan**

Bagian Sumber daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasiaan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam peertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Sumber daya Alam menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan dan data serta analisa di bidang sumber daya alam pertanian,kehutanan, kelautan dan perikanan;
b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
c. pelaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan sumberdaya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
d. penyusunan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatansumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang sumber daya alampertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
f. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan,kelautan dan perikanan;
g. penyusunan bahan dan data serta analisa di bidang sumber daya alam

pertambangan danlingkungan hidup;

h. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya alam pertambangan danlingkungan hidup;

i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan sumberdaya alam pertambangan dan lingkungan hidup;

j. penyusunan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatansumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup;

k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang sumber daya alampertambangan dan lingkungan hidup;

l. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan di bidang sumber daya alam pertambangan danlingkungan hidup;

m. penyusunan bahan dan data serta analisa di bidang sumber daya alam energi dan air;

n. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya alam energi dan air;

o. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan sumberdaya alam energi dan air;

p. penyusunan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatansumber daya alam energi dan air;

q. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang sumber daya alamenergi dan air;

r. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan di bidang sumber daya alam energi dan air;

s. pelaksaaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

C. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Administrasi Umum (Asisten III)menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang organisasi;
d. Penyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokoldan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
f. Penyiapan pelaksaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum,dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya;

Asisten Administrasi Umum membawahkan :

a. Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, danrapat-rapat dinas;
b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah,Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;

c. pelaksanaan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkup Setda;

d. pelaksanaan kebijakan pengadaan perlengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Setda;

e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Kepala Daerah dan Wakil serta Setda serta kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan;

f. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga kebersihan dan pemeliharaan Rumah Dinas Kepala Daerah dan Wakil serta Rumah Dinas Setda;

g. pelaksanaan urusan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Setda;

h. pelaksanaan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan rapat-rapat;

i. pelaksanakan pengelolaan kearsipanelaksaaan;

j. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Bagian Organisasi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);

b. penyiapan bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi jabatan organisasi perangkat daerah;

c. penyusunan bahan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan unit pelaksana teknis

dinas/badan;

d. penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);

e. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;

f. penyusunan kajian akademik terhadap usulan penataan organisasi perangkat daerah;dan

g. penyusunan profil kelembagaan perangkat daerah;

h. penyusunan pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja;

i. penyiapan bahan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerja/organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;

k. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik ;

l. pelaksanaan penghimpunan dan fasilitasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yangdisusun oleh masing-masing Perangkat Daerah;

m. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik;

n. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik;

o. penyusunan bahan kebijakan teknis Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

p. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten;

q. penyusunan road map reformasi birokrasi;

r. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

t. pelaksaaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan komunikasi pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaankebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaaan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu Pemerintah Daerah;
b. penyiapan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
c. penyiapan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
d. pelaksanaan penginformasian jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati
f. pelaksanaan jalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicarapimpinan daerah;
g. pemberian masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian informasi tertentu;
h. pemberian informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhandan atau atas arahan pimpinan;
i. pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan informasi yang yang bersifat penting danmendesak sesuai kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
j. pelaksanaan penyiapan dan penggandaan bahan materi rapat;
k. pelaksanaan penyiapan dan penggandaan bahan materi kebijakan;
l. penyusunan naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
m. pendokumentasian kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
n. penyusunan notulensi rapat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
o. pelaksanaan fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Kepala Daerah dan Wakil

KepalaDaerah;

p. pelaksaaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan membawahkan :

a) Subbagian Protokol

b. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Bagian perencanaan dan keuanganmenyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan Setda yang meliputi penyusunan rencana strategis (Renstra), rencana kinerja (Renja) tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA);
b. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanakaan asistensi dan verifikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranDPPA Perangkat Daerah;
c. penyusunan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah;
d. pelaksanaan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah;
e. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah;
f. pelaksanaan teknis pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dilingkungan Sekretariat Daerah;
g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah;
h. pelaksanaan sistem pengendalian intern;
i. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) Sekretariat Daerah;
j. penyusunan bahan Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
k. penyusunan bahan laporan SPIP;
l. penyusunan bahan laporan keuangan Sekretariat Daerah;

m. pelaksaaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya Sekretariat Daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Rata – Rata Nilai Akip Perangkat Daerah;
2. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi;
3. Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang – Undangan;
4. Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah;
5. Bidang pemerintah umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan;dan
6. Persentase kebijakan Perekonomian dan pembangunan yang terlaksana secara efektif.

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah terdapat dalam Tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah
sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026		
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi umum	Rata – rata Nilai Akip Perangkat Daerah	B	B	BB	BB	A		
	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi	68	70	72	75	77		
Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesra	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidangkesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang undangan.	85	85	90	90	95		
	Persentasi hasil koordinasi kebijakan daerah Bidang pemerintah umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan	85	85	90	90	95		
Meningkatnya Koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana Secara Efektif.	100	100	100	100	100		

Berdasarkan Tabel 2.… Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Umum memiliki 2 indikator kinerja yaitu :
   1. Rata – Rata Nilai Akip Perangkat Daerah; dan
   2. Indeks Kepuasanan Layanan Administrasi telah melampaui/mencapai/belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar dari target sebesar ……dengan capaian kinerja sebesar %;
b. Sasaran Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesra memiliki 2 indikator kinerja yaitu :
   1. Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang – undangan; dan
   2. Persentasi hasil koordinasi kebijakan daerah Bidang pemerintah umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang –undangan telah melampaui/mencapai/belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar dari target sebesar…….dengan capaian kinerja sebesar %
c. Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan memiliki 1 indikator kinerja yaitu :
   1. Persentase Kebijakan Perekonimian dan Pembangunan yang terlaksana secara efektif telah melampaui/mencapai/belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar ……. dari target sebesar ……dengan capaian kinerja sebesar %

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PDTahun 2025

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan.

Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Periode Juni 2025 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah denganstakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Respon dari Penerima Hibah/Lembaga/ perorangan belum memadai atau terlambat melengkapi dokumen yang diperlukan.
2. Ada beberapa dokumen yang realisasi kinerjanya dilaksakan pada triwulan berikutnya
3. Proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai jadwal
4. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan perangkat daerah
5. Perubahan pejabat/personil sehubungan dengan adanya pergantian pejabat

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2025.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Paser mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

NO	TUJUAN / SASARAN	Indikator Tujuan / Sasaran	FORMULASI	Target	
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025
1	Meningkatkan kualitas kebijakan publik pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM dari Ombudsman		
2	Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesra	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	Jumlah hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang pemerintahan umum yang dirumuskan menjadi draf Perda/perbup/surat keputusan kepala daerah/instruksi kepala daerah/surat	90	90

			edaran kepala daerah dibagi Jumlah rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang pemerintahan umum dikalikan 100%		
		Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	Jumlah hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang kesejahteraan rakyat yang dirumuskan menjadi draf Perda/perbup/surat keputusan kepala daerah/instruksi kepala daerah/surat edaran kepala daerah dibagi Jumlah rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang kesejahteraan rakyat dikalikan 100%	90	90
3	Meningkatnya koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan	Jumlah hasil rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang perekonomian dan pembangunan yang dirumuskan menjadi draf Perda/perbup/surat keputusan kepala daerah/instruksi kepala daerah/surat edaran kepala daerah dibagi Jumlah rapat-rapat koordinasi/konsultasi bidang	100	100

			perekonomian dan pembangunan dikalikan 100%		
4	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum	Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah	umlah nilai AKIP seluruh Perangkat daerah dibagi Jumlah perangkat daerah dikalikan 100%	**BB**	**BB**
			Hasil Survei Kepuasan atas layanan Bagian Umum, Bagian Protokol Pimpinan, Bagian Perencanaan dan Keuangan	**72**	**72**

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 yaitu ““PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DI SELURUH KABUPATEN PASER”” yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat

Kesejahteraan Masyarakat.

3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah mendukung pencapaiansasaran ke 3 dan 4, yaitu "Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik".

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Sekretariat Daerah telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel Berikut :

Tabel 3.2

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Cap aian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sekretariat Daerah				145.090.033.210	Sekretariat Daerah				181.362.541.513	
I	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Paser	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	5.826.151.386	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Paser	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	7.282.689.233	
A	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa										
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Paser	Persentase Hasil Proses PBJ	100	2.946.294.879	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Paser	Persentase Hasil Proses PBJ	100	3.682.868.599	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1722	890.000.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1722	1.112.500.000	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	247	1.200.000.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	247	1.500.000.000	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	12	856.294.879	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	12	1.070.368.599	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Cap aian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bagian Perekonomian										
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Paser	Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi	100	919.551.594	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Paser	Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi	100	1.149.439.493	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12	286.558.634	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12	358.198.293	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12	273.679.515	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	42	342.099.394	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		273.680.125	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		342.100.156	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Pase r	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD		85.633.320	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Pase r	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD		107.041.650	
	Bagian Administrasi Pembangunan										
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Paser	Persentase SKPD tertib dalam Adminiatrasi Pembangunan	100	985.219.399	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Paser	Persentase SKPD tertib dalam Adminiatrasi Pembangunan	100	1.231.524.249	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Cap aian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2	341.924.340	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2	427.405.425	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12	303.119.159	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12	378.898.949	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	340.175.900	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	425.219.875	
	Bagian Sumber Daya Alam										
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Paser	Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	100	975.085.514	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Paser	Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	100	1.218.856.893	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian,Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	37	431.177.640	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian,Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	37	538.972.050	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Cap aian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	30	266.524.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	30	333.155.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air,Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	35	277.383.874	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air,Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	35	346.729.843	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Paser	1. Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti	100	35.365.436.783	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Paser	1. Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti	100	44.206.795.979	
	Bagian Tata Pemerintahan										
	Administrasi Tata Pemerintahan	Paser	Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi	100	2.562.310.191	Administrasi Tata Pemerintahan	Paser	Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi	100	3.202.887.739	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Cap aian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	8	1.383.223.960	Penataan Administrasi Pemerintahan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	8	1.729.029.950	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9	532.739.309	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9	665.924.136	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3	646.346.922	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3	807.933.653	
	Bagian Hukum										
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Paser	Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi	100	1.611.369.611	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Paser	Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi	100	2.014.212.014	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Paser	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	750	602.401.748	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Paser	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	750	753.002.185	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Paser	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4	729.604.343	Fasilitasi Bantuan Hukum	Paser	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4	912.005.429	
	Pendokumenta sian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Paser	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	674	279.363.520	Pendokumenta sian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Paser	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	674	349.204.400	
	Bagian Kesejahteraan Rakyat										

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Cap aian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pase r	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun kebijakan	100	30.353.247.512	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pase r	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun kebijakan	100	37.941.559.390	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	357	27.446.867.146	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	357	34.308.583.933	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi,Keseh atan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	100	2.454.800.945	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi,Keseh atan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	100	3.068.501.181	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan,Kebuday	15	451.579.421	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan,Kebuday aan, Perpustakaan, Kearsipan,	15	564.474.276	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Cap aian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			aan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas					Trantibum Linmas			
	Bagian Kerjasama										
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Pase r	Cakupan Kerjasama Daerah	100	838.509.469	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Pase r	Cakupan Kerjasama Daerah	100	1.048.136.836	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	33	489.765.000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		612.206.250	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Paser	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	30	348.744.469	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Paser	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		435.930.586	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Paser	Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat	74	103.898.445.041	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Paser	Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat	74	129.873.056.301	
	Bagian Organisasi	Paser									
	Penataan Organisasi	Paser	Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan	100	1.418.217.839	Penataan Organisasi	Paser	Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan	100	1.772.772.299	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Paser	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	41	405.830.541	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Paser	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	41	507.288.176	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan tata Laksana	4	508.766.730	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan tata Laksana	4	635.958.413	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Cap aian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Paser	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	215.097.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Paser	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	268.871.250	
	Monitoring, Evaluasi & Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik & Tata Laksana	Paser	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	79.853.000	Monitoring, Evaluasi & Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik & Tata Laksana	Paser	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	99.816.250	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Paser	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3	208.670.568	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah		260.838.210	
	Bagian Umum										
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Paser	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100	776.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Paser	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100	970.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Paser	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	365.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Paser	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	456.250.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	180	411.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	180	513.750.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Cap aian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paser	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	100	18.843.809.046	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paser	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	100	23.554.761.308	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan BangunanKantor	Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	87.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan BangunanKantor	Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	108.750.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	17	4.650.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	17	5.812.500.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paser	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	25	850.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paser	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	1.062.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pase r	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	30	280.000.000	Penyediaan Bahan Logistik	Pas er	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	30	350.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	9	47.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	9	58.750.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Paser	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150	7.677.187.550	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pase r	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150	9.596.484.438	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	150	5.252.621.496	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	150	6.565.776.870	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Cap aian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SKPD		Konsultasi SKPD			SKPD		SKPD			
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paser	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100	21.315.867.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paser	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100	26.644.834.750	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lsitrik	Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	5.256.330.420	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lsitrik	Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	6.570.413.025	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6	8.059.537.380	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6	10.074.421.725	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12	8.000.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12	10.000.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Paser Daerah	Paser	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	5.352.274.200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Paser Daerah	Paser	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	6.690.342.750	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Cap aian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Paser	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	740.072.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Paser	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	925.090.125	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	1.168.165.460	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	1.460.206.825	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3.444.036.640	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si		4.305.045.800	
	Fasilitasi Kerumahtangga an Sekretariat Daerah	Paser	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi	100	3.049.477.000	Fasilitasi Kerumahtangga an Sekretariat Daerah	Paser	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi	100	3.811.846.250	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Paser	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	12	1.343.700.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	1.679.625.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah	Paser	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah	12	1.105.777.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah	Paser	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil	12	1.382.221.250	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Cap aian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tangga Wakil Kepala Daerah		Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan			Tangga Wakil Kepala Daerah		Kepala Daerah yang disediakan			
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Paser	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	12	600.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Paser	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	12	750.000.000	
	Administrasi Keuangan dan Opersional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang difasilitasi	100	1.421.936.000	Administrasi Keuangan dan Opersional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang difasilitasi	100	1.777.420.000	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10	1.121.936.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10	1.402.420.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	300.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	375.000.000	
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan										
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Paser	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	5.227.475.606	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Paser	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	6.534.344.508	
	Fasilitasi	Pase	Jumlah Laporan Hasil	12		Fasilitasi	Paser	Jumlah Laporan Hasil	12		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Cap aian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keprotokolan	r	Fasilitasi Keprotokolan		2.298.885.566	Keprotokolan		Fasilitasi Keprotokolan		2.873.606.958	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	1.398.388.026	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	1.747.985.033	
	Pendokumenta sian Tugas Pimpinan	Pase r	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	1.530.202.014	Pendokumenta sian Tugas Pimpinan	Paser	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		1.912.752.518	
	Bagian Perencanaan Dan Keuangan										
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Paser	Perencanaan,Jumla hPenganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	923.675.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Paser	Perencanaan,Jumla hPenganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	1.154.594.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	609.478.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	761.848.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12	171.947.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12	214.934.250	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Cap aian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	142.249.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	177.811.750	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100	44.312.246.762	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Paser	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100	55.390.308.453	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2268	42.949.301.742	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2268	53.686.627.178	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	12	329.192.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	12	411.491.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verif ikasi Keuangan SKPD	Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	950	988.685.820	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verif ikasi Keuangan SKPD	Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	950	1.235.857.275	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	Progra/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Cap aian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	45.066.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	56.333.000	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi	100	1.257.465.588	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi	100	1.571.831.985	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28	657.465.588	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil	Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28	821.831.985	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	600.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	750.000.000	

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagaimana tabelberikut:

Tabel 3...
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

Diisi Matriks Renja yang bersumber dari SIPD

Tabel 3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Bagian Pengadaan Barang dan Jasa							2.946.294.879,00	2.946.294.879,00	2.727.342.044,00							557.477.104,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							2.946.294.879,00	2.946.294.879,00	2.727.342.044,00							557.477.104,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							2.946.294.879,00	2.946.294.879,00	2.727.342.044,00							557.477.104,00	
1	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	2.946.294.879,00	2.946.294.879,00	2.727.342.044,00							557.477.104,00	
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	-	2.946.294.879,00	2.946.294.879,00	2.946.294.879,00			-	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal	-		557.477.104,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				2300 Dokumen	2300 Dokumen	890.000.000,00	890.000.000,00	814.433.165,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			131.225.425,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																	
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				250 Dokumen	250 Dokumen	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.139.344.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			312.561.199,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				20 Orang	20 Orang	856.294.879,00	856.294.879,00	773.564.879,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			113.690.480,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Bagian Tata Pemerintahan							2.562.310.191,00	2.562.310.191,00	3.123.949.097,00							919.175.296,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							2.562.310.191,00	2.562.310.191,00	3.123.949.097,00							919.175.296,00	

SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							2.562.310.191,00	2.562.310.191,00	3.123.949.097,00							919.175.296,00	
2	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	2.562.310.191,00	2.562.310.191,00	3.123.949.097,00							919.175.296,00	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	-	2.562.310.191,00	2.562.310.191,00	2.562.310.191,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	-		919.175.296,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				8 Dokumen	8 Dokumen	1.416.823.960,00	1.383.223.960,00	1.905.539.181,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			296.734.739,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																	

SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				9 Dokumen	9 Dokumen	532.739.309,00	532.739.309,00	422.903.175,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			325.148.931,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	612.746.922,00	646.346.922,00	795.506.741,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			297.291.626,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Bagian Hukum							1.461.369.611,00	1.611.369.611,00	2.091.022.590,00							519.188.399,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							1.461.369.611,00	1.611.369.611,00	2.091.022.590,00							519.188.399,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							1.461.369.611,00	1.611.369.611,00	2.091.022.590,00							519.188.399,00	
3	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	1.461.369.611,00	1.611.369.611,00	2.091.022.590,00							519.188.399,00	
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-			-	-	1.461.369.611,00	1.611.369.611,00	1.611.369.611,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan	-		519.188.399,00	SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			Kepuasan Pelayanan Publik				
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																	
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				805 Dokumen	805 Dokumen	602.401.748,00	602.401.748,00	597.566.634,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			178.639.547,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																	
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				3 Kasus	3 Kasus	579.604.343,00	729.604.343,00	1.212.385.984,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			212.449.754,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																	

SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				100 Dokumen	100 Dokumen	279.363.520,00	279.363.520,00	281.069.972,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			128.099.098,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Bagian Organisasi							1.418.217.839,00	1.418.217.839,00	1.258.367.240,00							850.168.587,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							1.418.217.839,00	1.418.217.839,00	1.258.367.240,00							850.168.587,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							1.418.217.839,00	1.418.217.839,00	1.258.367.240,00							850.168.587,00	
4	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	1.418.217.839,00	1.418.217.839,00	1.258.367.240,00							850.168.587,00	
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-			-	-	1.418.217.839,00	1.418.217.839,00	1.418.217.839,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	-		850.168.587,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																	
							Jumlah Dokumen Pengelolaan				41 Dokume	41 Dokume	405.830.541,00	405.830.541,00	494.111.541,00	Kab. Paser,	Dana Alok	-	Pemantapan Tata			268.239.342,00	SEKRETARIAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Kelembagaan dan Analisis Jabatan				n	n				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	asi Umum (DAU)		Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik				DAERAH
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4 Laporan	4 Laporan	508.766.730,00	508.766.730,00	366.797.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			268.239.342,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	215.097.000,00	215.097.000,00	236.147.699,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			144.860.818,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	1 Dokumen	79.853.000,00	79.853.000,00	48.712.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			39.138.103,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	208.670.568,00	208.670.568,00	112.599.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			129.690.982,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Bagian Umum							50.369.974.566,00	50.759.363.666,00	76.314.655.509,00							21.919.965.391,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							50.369.974.566,00	50.759.363.666,00	76.314.655.509,00							21.919.965.391,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							50.369.974.566,00	50.759.363.666,00	76.314.655.509,00							21.919.965.391,00	
5	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	50.369.974.566,00	50.759.363.666,00	76.314.655.509,00							21.919.965.391,00	

SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	776.000.000,00	776.000.000,00	776.000.000,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	-		221.568.359,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				100 Dokumen	12 Dokumen	365.000.000,00	365.000.000,00	584.240.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			154.197.825,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				180 Orang	180 Orang	411.000.000,00	411.000.000,00	411.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			67.370.534,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	19.588.609.046,00	18.843.809.046,00	18.843.809.046,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan	-		6.389.991.379,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			Pelayanan Publik				
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				16 Paket	6 Paket	87.000.000,00	87.000.000,00	177.285.542,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			94.662.740,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	4.300.000.000,00	4.650.000.000,00	7.376.279.028,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			330.142.009,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			552.469.530,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	1.374.800.000,00	280.000.000,00	582.027.552,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			1.347.356.911,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	47.000.000,00	47.000.000,00	85.094.930,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			50.850.474,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				150 Laporan	150 Laporan	7.677.187.550,00	7.677.187.550,00	10.427.218.465,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan			1.088.753.906,00	SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			Pelayanan Publik				
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	12 Laporan	5.252.621.496,00	5.252.621.496,00	6.310.930.997,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			2.808.928.294,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			116.827.515,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujud	-		108.410.201,00	SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			kan Kepuasan Pelayanan Publik				
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			108.410.201,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	20.181.678.320,00	21.315.867.420,00	21.315.867.420,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	-		10.592.636.473,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1200 Laporan	1200 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			10.817.363,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.756.330.040,00	5.256.330.040,00	5.673.157.699,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			2.102.847.674,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	0,00	8.059.537.380,00	11.821.122.980,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan			1.478.971.436,00	SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			Pelayanan Publik				
	4					NON URUSAN							50.369.974.566,00	50.759.363.666,00	76.314.655.509,00							21.919.965.391,00	
	4	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							50.369.974.566,00	50.759.363.666,00	76.314.655.509,00							21.919.965.391,00	
6	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	50.369.974.566,00	50.759.363.666,00	76.314.655.509,00							21.919.965.391,00	
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	20.181.678.320,00	21.315.867.420,00	21.315.867.420,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	-		10.592.636.473,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							50.369.974.566,00	50.759.363.666,00	76.314.655.509,00							21.919.965.391,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							50.369.974.566,00	50.759.363.666,00	76.314.655.509,00							21.919.965.391,00	
7	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	50.369.974.566,00	50.759.363.666,00	76.314.655.509,00							21.919.965.391,00	

SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	20.181.678.320,00	21.315.867.420,00	21.315.867.420,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	-		10.592.636.473,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	9.688.893.756,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			7.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	5.352.274.200,00	5.352.274.200,00	5.352.274.200,00			-	-	-		2.395.701.835,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	740.072.100,00	740.072.100,00	990.135.600,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			387.510.377,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	1.168.165.460,00	1.168.165.460,00	1.419.628.950,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			1.064.569.095,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	0,00	3.444.036.640,00	12.640.286.050,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			943.622.363,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4					NON URUSAN							50.369.974.566,00	50.759.363.666,00	76.314.655.509,00							21.919.965.391,00	
	4	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							50.369.974.566,00	50.759.363.666,00	76.314.655.509,00							21.919.965.391,00	

SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	50.369.974.566,00	50.759.363.666,00	76.314.655.509,00							21.919.965.391,00	
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	5.352.274.200,00	5.352.274.200,00	5.352.274.200,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	-		2.395.701.835,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							50.369.974.566,00	50.759.363.666,00	76.314.655.509,00							21.919.965.391,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							50.369.974.566,00	50.759.363.666,00	76.314.655.509,00							21.919.965.391,00	
9	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	50.369.974.566,00	50.759.363.666,00	76.314.655.509,00							21.919.965.391,00	
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	-	1.421.936.000,00	1.421.936.000,00	1.421.936.000,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujud	-		285.687.842,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			kan Kepuasan Pelayanan Publik				
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	1.121.936.000,00	1.121.936.000,00	1.231.676.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			69.340.592,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				8 Orang	8 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			216.347.250,00	SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	-	3.049.477.000,00	3.049.477.000,00	3.049.477.000,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	-		1.925.969.302,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																	
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	1.343.700.000,00	2.654.410.650,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			842.002.079,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4					NON URUSAN							50.369.974.566,00	50.759.363.666,00	76.314.655.509,00							21.919.965.391,00	
	4	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							50.369.974.566,00	50.759.363.666,00	76.314.655.509,00							21.919.965.391,00	
10	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	50.369.974.566,00	50.759.363.666,00	76.314.655.509,00							21.919.965.391,00	

SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	-	3.049.477.000,00	3.049.477.000,00	3.049.477.000,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	-		1.925.969.302,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							50.369.974.566,00	50.759.363.666,00	76.314.655.509,00							21.919.965.391,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							50.369.974.566,00	50.759.363.666,00	76.314.655.509,00							21.919.965.391,00	
11	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	50.369.974.566,00	50.759.363.666,00	76.314.655.509,00							21.919.965.391,00	
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	-	3.049.477.000,00	3.049.477.000,00	3.049.477.000,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	-		1.925.969.302,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																	

SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.105.777.000,00	1.105.777.000,00	2.491.267.310,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			704.244.049,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																	
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			379.723.174,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4					NON URUSAN							50.369.974.566,00	50.759.363.666,00	76.314.655.509,00							21.919.965.391,00	
	4	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							50.369.974.566,00	50.759.363.666,00	76.314.655.509,00							21.919.965.391,00	
12	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	50.369.974.566,00	50.759.363.666,00	76.314.655.509,00							21.919.965.391,00	

SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	-	3.049.477.000,00	3.049.477.000,00	3.049.477.000,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	-		1.925.969.302,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																	
						Bagian Kesejahteraan Rakyat							19.387.767.512,00	30.353.247.512,00	36.712.627.323,00							29.355.923.811,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							19.387.767.512,00	30.353.247.512,00	36.712.627.323,00							29.355.923.811,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							19.387.767.512,00	30.353.247.512,00	36.712.627.323,00							29.355.923.811,00	
13	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	19.387.767.512,00	30.353.247.512,00	36.712.627.323,00							29.355.923.811,00	
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	-	19.387.767.512,00	30.353.247.512,00	30.353.247.512,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	-		29.355.923.811,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				400 Dokumen	400 Dokumen	18.581.387.145,40	27.446.867.146,00	30.923.531.597,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			18.058.161.924,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																	
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				200 Dokumen	200 Dokumen	354.800.945,60	2.454.800.945,00	5.410.484.105,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			10.846.182.466,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																	

SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				50 Dokumen	50 Dokumen	451.579.421,00	451.579.421,00	378.611.621,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			451.579.421,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Bagian Kerjasama							688.509.469,00	838.509.469,00	436.382.235,00							2.821.820.432,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							688.509.469,00	838.509.469,00	436.382.235,00							2.821.820.432,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							688.509.469,00	838.509.469,00	436.382.235,00							2.821.820.432,00	
14	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	688.509.469,00	838.509.469,00	436.382.235,00							2.821.820.432,00	
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-			-	-	688.509.469,00	838.509.469,00	838.509.469,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	-		2.821.820.432,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				25 Dokumen	25 Dokumen	339.765.000,00	489.765.000,00	244.265.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			1.261.618.176,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				12 Laporan	12 Laporan	348.744.469,00	348.744.469,00	192.117.235,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			1.560.202.256,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Bagian Perekonomian							919.551.594,00	919.551.594,00	789.243.691,00							248.078.902,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							919.551.594,00	919.551.594,00	789.243.691,00							248.078.902,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							919.551.594,00	919.551.594,00	789.243.691,00							248.078.902,00	
15	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	919.551.594,00	919.551.594,00	789.243.691,00							248.078.902,00	

SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	-	919.551.594,00	919.551.594,00	919.551.594,00			-	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal	-		248.078.902,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				24 Dokumen	24 Dokumen	286.558.634,00	286.558.634,00	222.090.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi			83.531.674,00	SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			Lokal				
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				36 Laporan	36 Laporan	273.679.515,00	273.679.515,00	256.778.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			60.073.141,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																	
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				24 Dokumen	24 Dokumen	273.680.125,00	273.680.125,00	249.899.031,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi			48.678.131,00	SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal				
	4	01	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				12 Dokumen	12 Dokumen	85.633.320,00	85.633.320,00	60.476.660,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			55.795.956,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Bagian Administrasi Pembangunan							985.219.399,00	985.219.399,00	772.655.819,00							290.734.747,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							985.219.399,00	985.219.399,00	772.655.819,00							290.734.747,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							985.219.399,00	985.219.399,00	772.655.819,00							290.734.747,00	
16	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	985.219.399,00	985.219.399,00	772.655.819,00							290.734.747,00	

SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-			-	-	985.219.399,00	985.219.399,00	985.219.399,00			-	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal	-		290.734.747,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	305.394.399,00	341.924.340,00	248.633.005,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi			108.933.176,00	SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			Lokal				
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	310.993.500,00	303.119.159,00	236.666.592,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			77.776.837,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	368.831.500,00	340.175.900,00	287.356.222,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi			104.024.734,00	SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal				
						Bagian Sumber Daya Alam							935.085.514,00	975.085.514,00	672.747.727,00							182.416.292,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							935.085.514,00	975.085.514,00	672.747.727,00							182.416.292,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							935.085.514,00	975.085.514,00	672.747.727,00							182.416.292,00	
17	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	935.085.514,00	975.085.514,00	672.747.727,00							182.416.292,00	
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-			-	-	935.085.514,00	975.085.514,00	975.085.514,00			-	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal	-		182.416.292,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																	

SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				40 Dokumen	20 Dokumen	391.177.640,00	431.177.640,00	346.793.790,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			81.770.470,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				35 Dokumen	17 Dokumen	266.524.000,00	266.524.000,00	162.262.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi			50.129.821,00	SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			Lokal				
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				40 Dokumen	20 Dokumen	277.383.874,00	277.383.874,00	163.691.937,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			50.516.001,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Bagian Protokol dan Pimpinan							5.227.475.606,00	5.227.475.606,00	4.182.391.895,00							1.718.296.306,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							5.227.475.606,00	5.227.475.606,00	4.182.391.895,00							1.718.296.306,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							5.227.475.606,00	5.227.475.606,00	4.182.391.895,00							1.718.296.306,00	
18	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.227.475.606,00	5.227.475.606,00	4.182.391.895,00							1.718.296.306,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	-	5.227.475.606,00	5.227.475.606,00	5.227.475.606,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	-		1.718.296.306,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	2.298.885.566,00	2.298.885.566,00	1.323.617.783,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			720.171.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				36 Laporan	36 Laporan	1.398.388.026,00	1.398.388.026,00	1.499.194.013,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan			503.034.039,00	SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			Pelayanan Publik				
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																	
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.530.202.014,00	1.359.580.099,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			495.091.117,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4					NON URUSAN							5.227.475.606,00	5.227.475.606,00	4.182.391.895,00							1.718.296.306,00	
	4	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.227.475.606,00	5.227.475.606,00	4.182.391.895,00							1.718.296.306,00	
19	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.227.475.606,00	5.227.475.606,00	4.182.391.895,00							1.718.296.306,00	
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	-	5.227.475.606,00	5.227.475.606,00	5.227.475.606,00			-	-	-		1.718.296.306,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																	
						Bagian Perencanaan dan Keuangan							35.036.393.226,00	46.493.387.650,00	45.892.871.298,00							30.428.090.206,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							35.036.393.226,00	46.493.387.650,00	45.892.871.298,00							30.428.090.206,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							35.036.393.226,00	46.493.387.650,00	45.892.871.298,00							30.428.090.206,00	
20	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	35.036.393.226,00	46.493.387.650,00	45.892.871.298,00							30.428.090.206,00	

SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	923.675.200,00	923.675.200,00	923.675.200,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	-		105.435.188,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	609.478.400,00	609.478.400,00	380.532.601,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			47.703.734,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	171.947.400,00	171.947.400,00	92.843.692,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan			17.456.250,00	SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			Pelayanan Publik				
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	142.249.400,00	142.249.400,00	85.889.529,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			40.275.204,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	33.204.022.526,00	44.312.246.762,00	44.312.246.762,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	-		29.466.590.314,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2268 Orang/bulan	2268 Orang/bulan	31.847.977.506,00	42.949.301.742,00	42.949.301.742,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujud			28.488.541.142,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			kan Kepuasan Pelayanan Publik				
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				725 Dokumen	725 Dokumen	981.785.820,00	988.685.820,00	929.646.806,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			480.032.653,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	45.066.400,00	45.066.400,00	23.038.051,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			17.983.866,00	SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	329.192.800,00	329.192.800,00	174.153.189,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			60.032.653,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	-	908.695.500,00	1.257.465.688,00	1.257.465.688,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	-		856.064.704,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	308.695.500,00	657.465.688,00	657.465.688,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan			315.196.579,00	SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			Pelayanan Publik				
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			540.868.125,00	SEKRETARIAT DAERAH
	JUMLAH												**2.946.294.879,00**	**2.946.294.879,00**	**2.727.342.044,00**							**557.477.104,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daeraho1 Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

1.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Tana Paser, . Agustus 2025
Sekretaris Daerah

Drs. Katsul Wijaya M. SI
NIP. 19661211 198609 1 002

KABUPATEN PASER

RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2025



SEKRETARIAT DPRD

RENCANA KERJA PERUBAHAN

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas lsimpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2025 dapat dilaksanakan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja SKPD) ini disusun sebagai acuan perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser dalam penentuan program dan kegiatan tahun 2025. Adapun penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD ini berpedoman pada Revisi Renstra Sekretariat DPRD tahun 2021-2026, hasil evaluasi Renja tahun 2022, dan hasil evaluasi Renja tahun 2023.

Adapun penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Harapan kami semoga Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser ini bisa digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tana Paser, 22 Agustus 2025

SEKRETARIS DPRD,

M. ISKANDAR ZULKARNAIN, M.Sc

NIP 19780817 200312 1 011

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD s.d Triwulan II Tahun 2025..... 8

2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD 28

2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Serta Solusi Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025 30

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD 34

3.1 Tujuan dan Sasaran 34

3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 36

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025 54

BAB IV PENUTUP 69

4.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan..... 69

4.2 Rencana Tindak Lanjut..... 70

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Evaluasi terhadap Hasil Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025.....	9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.....	29
Tabel 3.1	Penyesuaian Target Tujuan/ Sasaran Perubahan Renja 2025.....	34
Tabel 3.2	Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 Sekretariat DPRD.....	37
Tabel 3.3	Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025.....	55

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap OPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-OPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD. Renstra-OPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran dari Renstra-OPD tersebut, maka OPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Paser dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026
19. Peraturan Bupati Paser Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser
20. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Paser ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan DPRD sehingga dapat semakin mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan *Good and Clean Governance*. Disamping itu Renja Perubahan ini juga dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Sekretariat DPRD pada akhir tahun anggaran. Sedangkan tujuan penyusunan Renja Perubahan ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efesien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;

5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro

perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser, perlu disampaikan sistematika penyusunan Renja ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja, proses perubahan penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Sekretariat DPRD dengan dokumen RKPD, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Paser serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2025

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Sekretariat DPRD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser tahun 2025 hingga triwulan II

baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambaryang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat serta Solusi Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025.

Memuat penjelasan mengenai factor mendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Tujuan dan Sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2025 yang disertai perubahan target.

3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025.

Memuat review dan Analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan terget capaian indikator serta pagu indikatif.

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dengan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD s.d Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi terhadap Hasil Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:
Sasaran RKPD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Indikator dan target kinerja :
1. Nilai evaluasi SAKIP dari APIP
2. Persentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DRPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					82.284.293.494		**13.902.531.764**		**27.629.862.493**						**27.629.862.493**		279.315.630.425		**82,33%**	**Sekretariat DPRD**
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel		**Nilai evaluasi SAKIP dari APIP**	**BB (74)**		**0**										**0**	-			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	**Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat**	**92**	**49.677.649.262**	**0**	**9.135.297.275**	**0**	**18.504.164.904**					**0**	**18.504.164.904**	**0**	175.149.481.035	**0,00 %**	**83,36%**	**Bagian Umum dan Keuangan**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten**	**BB (74)**	**25.280.090**	**0**	**12.307.504**	**0**	**12.307.504**					**0**	**12.307.504**	**0**	300.948.395	**0,00 %**	**47,46%**	**Bagian Umum dan Keuangan**
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	13.050.682	0 dokumen	3.080.484	0 dokumen	3.080.484					0 dokumen	3.080.484	10 dokumen	181.947.017	**90,91%**	**51,97%**	Subbag Program dan Keuangan
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	2.131.887	0 laporan	0	6 laporan	0					6 laporan	0	34 laporan	8.335.300	**377,78%**	**50,12%**	Subbag Program dan Keuangan
3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	10.097.521	1 laporan	9.227.020	2 laporan	9.227.020					2 laporan	9.227.020	11 laporan	110.666.078	**73,33%**	**41,39%**	Subbag Program dan Keuangan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat**	**100%**	**10.990.549.810**	**17%**	**1.737.068.279**	**45%**	**4.289.052.596**					**45%**	**4.289.052.596**	**144 %**	28.871.305.438	**144,01%**	**82,89%**	**Bagian Umum dan Keuangan**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Daerah																	
4		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	630 orang/14 bulan	10.983.279.724	172 orang	1.737.068.279	531 orang	4.289.052.596					531 orang	4.289.052.596	2965 orang/14 bulan	28.788.080.073	**117,66%**	**83,40%**	Subbag Program dan Keuangan
5		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	5.574.000	3 dokumen	0	6 dokumen	0					6 dokumen	0	46 dokumen	62.052.585	**95,83%**	**43,64%**	Subbag Program dan Keuangan
6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	1.696.086	0 laporan	0	0 laporan	0					0 laporan	0	5 laporan	21.172.780	**62,50%**	**12,41%**	Subbag Program dan Keuangan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**444.587.000**	**110%**	**261.585.647**	**130%**	**261.585.647**					**130%**	**261.585.647**	**249%**	1.880.651.925	**248,75%**	**131,65%**	**Bagian Umum dan Keuangan**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	444.587.000	22 orang	261.585.647	26 orang	261.585.647					26 orang	261.585.647	132 orang	1.880.651.925	**165,00%**	**131,65%**	Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**100%**	**2.416.450.151**	**13%**	**328.302.182**	**37%**	**643.950.095**					**37%**	**643.950.095**	**159%**	15.019.902.781	**159,41%**	**135,17%**	**Bagian Umum dan Keuangan**
8		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	42.641.200	0 paket	0	0 paket	0					0 paket	0	19 paket	213.148.670	**237,50%**	**120,84%**	Subbag Rumah Tangga
9		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	1.381.894.084	1 paket	68.225.000	2 paket	231.306.400					2 paket	231.306.400	56 paket	10.279.560.768	**140,00%**	**158,39%**	Subbag Rumah Tangga
10		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	132.740.545	1 paket	37.333.650	3 paket	37.333.650					3 paket	37.333.650	68 paket	670.925.984	**242,86%**	**111,53%**	Subbag Rumah Tangga

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
11		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	42.505.162	0 paket	0	2 paket	20.584.515					2 paket	20.584.515	24 paket	255.063.567	**120,00%**	**124,53%**	Subbag Rumah Tangga
12		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	140.540.500	1 dokumen	7.020.000	2 dokumen	41.106.000					2 dokumen	41.106.000	18 dokumen	452.356.585	**112,50%**	**66,33%**	Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian
13		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	36.589.660	3 laporan	12.985.748	6 laporan	19.710.207					6 laporan	19.710.207	45 laporan	356.152.557	**93,75%**	**83,41%**	Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian
14		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 laporan	520.869.500	7 laporan	184.337.784	20 laporan	275.509.323					20 laporan	275.509.323	260 laporan	2.322.448.383	**144,44%**	**120,68%**	Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian
15		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 dokumen	118.669.500	1 dokumen	18.400.000	4 dokumen	18.400.000					4 dokumen	18.400.000	43 dokumen	470.246.267	**107,50%**	**77,67%**	Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik**	**100%**	**444.004.375**	**0%**	**9.200.000**	**9%**	**144.630.400**					**9%**	**144.630.400**	**109 %**	6.882.285.425	**108, 82%**	**143, 13%**	**Bagian Umum dan Keuangan**
16		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	0	0	0					0	0	3 unit	2.669.775.400	**100, 00%**	**136, 69%**	Subbag Rumah Tangga
17		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	34 unit	444.004.375	0 unit	9.200.000	6 unit	144.630.400					6 unit	144.630.400	104 unit	4.212.510.025	**61,1 8%**	**147, 53%**	Subbag Rumah Tangga
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor**	**100%**	**3.342.733.328**	**17%**	**171.912.602**	**44%**	**321.084.594**					**44%**	**321.084.594**	**144 %**	8.016.793.035	**144, 44%**	**74,54%**	**Bagian Umum dan Keuangan**
18		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	22.514.000	3 laporan	0	6 laporan	0					6 laporan	0	6 laporan	-	**16,67%**	**0,00 %**	Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
19		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	961.735.200	3 laporan	156.055.266	6 laporan	305.227.258					6 laporan	305.227.258	61 laporan	2.783.802.308	**127,08%**	**63,51%**	Subbag Rumah Tangga
20		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.358.484.128	0 laporan	15.857.336	4 laporan	15.857.336					4 laporan	15.857.336	43 laporan	5.232.990.727	**89,58%**	**82,55%**	Subbag Rumah Tangga
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang inventaris peralatan dan mesin serta gedung bangunan yang terpelihara**	**100%**	**4.083.795.700**	**0%**	**195.703.027**	**0**	**417.795.023**					**0**	**417.795.023**	**138%**	14.015.998.846	**138,00%**	**173,92%**	**Bagian Umum dan Keuangan**
21		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	329.117.300	0 unit	28.072.358	2 unit	37.476.571					2 unit	37.476.571	16 unit	1.103.077.432	**80,00%**	**51,49%**	Subbag Rumah Tangga

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
22		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	247.607.800	0 unit	16.230.669	1 unit	71.381.892					1 unit	71.381.892	21 unit	879.987.531	**140,00%**	**68,63%**	Subbag Rumah Tangga
23		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	0	0	0 unit	0					0 unit	0	160 unit	43.769.000	**64,00%**	**51,30%**	Subbag Rumah Tangga
24		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 unit	216.441.600	0 unit	0	0 unit	0					0 unit	0	370 unit	972.007.790	**89,16%**	**102,03%**	Subbag Rumah Tangga
25		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	3.073.078.000	0 unit	151.400.000	2 unit	271.458.000					2 unit	271.458.000	26 unit	10.122.939.012	**104,00%**	**345,61%**	Subbag Rumah Tangga
26		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	27 unit	217.551.000	0 unit	0	18 unit	37.478.560					18 unit	37.478.560	617 unit	894.218.081	**457,04%**	**134,02%**	Subbag Rumah Tangga

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Persentase Terlaksanaya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**	**100%**	**26.474.154.508**	**10%**	**6.199.614.034**	**17%**	**11.841.750.045**					**17%**	**11.841.750.045**	**116 %**	93.675.026.953	**116,11%**	**72,06%**	**Bagian Umum dan Keuangan**
27		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	420 orang/14 bulan	25.395.295.108	120 orang	6.199.614.034	210 orang	11.796.045.208					210 orang	11.796.045.208	1888 orang/14 bulan	90.681.421.986	**112,38%**	**72,48%**	Subbag Program dan Keuangan
28		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 paket	560.500.000	0 paket	0	0 paket	27.714.998					0 paket	27.714.998	360 paket	1.767.256.513	**48,00%**	**62,92%**	Subbag Rumah Tangga
29		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up* DPRD	30 orang	518.359.400	0 orang	0	0 orang	17989839					0 orang	17989839	116 orang	1.226.348.454	**77,33%**	**59,51%**	Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian
		Layanan Administrasi DPRD	**Persentase Terlaksanaya layanan administrasi DPRD**	**100%**	**1.456.094.300**	**22%**	**219.604.000**	**43%**	**572.009.000**					**43%**	**572.009.000**	**143 %**	6.486.568.237	**143,33%**	**76,41%**	**Bagian Umum dan Keuangan**
30		Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 laporan	30.997.200	3 laporan	2.790.000	6 laporan	4.910.000					6 laporan	4.910.000	39 laporan	323.917.496	**81,25%**	**106,63%**	Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
31		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20 laporan	303.792.700	3 laporan	44.400.000	6 laporan	104.064.000					6 laporan	104.064.000	112 laporan	2.564.566.167	**112,00%**	**66,36%**	Subbag Rumah Tangga
32		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	36 paket	1.121.304.400	9 paket	172.414.000	18 paket	463.035.000					18 paket	463.035.000	129 paket	3.598.084.574	**71,67%**	**83,27%**	Subbag Rumah Tangga
	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		**Persentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DRPD**	**80%**		**6%**		**9%**						**15%**		**114%**		**126,71%**		
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**Persentase perda yang ditetapkan tepat waktu**	**100%**	**32.606.644.232**	**0%**	**4.767.234.489**	**0%**	**9.125.697.589**					**0%**	**9.125.697.589**	**0%**	104.166.149.390	**0,00%**	**80,65%**	
			Dokumen KUA, PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu	**6 dokumen**		**0 dokumen**		**0 dokumen**						**0 dokumen**		**dokumen**	-	**0,00%**		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV										
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti	**100%**		**19%**		**45%**						**45%**		**23 %**	-	**22,58%**		
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan**	**10 dokumen perda**	**4.266.044.000**	**0 dokumen perda**	**356.982.298**	**0 dokumen perda**	**1.926.194.341**					**0 dokumen perda**	**1.926.194.341**	**34 dokumen perda**	18.561.536.574	**68,00%**	**89,53%**	**Bagian Persidangan dan Perundang-undangan**
33		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	11.135.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0					0 dokumen	0	4 dokumen	24.354.000	**80,00%**	**46,24%**	Subbag Kajian dan Perundang-undangan
34		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 dokumen	3.181.835.000	0 dokumen	216.116.146	0 dokumen	1.736.884.706					0 dokumen	1.736.884.706	35 dokumen	14.780.761.075	**70,00%**	**94,39%**	Subbag Kajian dan Perundang-undangan
35		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 dokumen	492.456.000	0 dokumen	140.866.152	0 dokumen	189.309.635					0 dokumen	189.309.635	11 dokumen	1.436.568.764	**64,71%**	**70,35%**	Subbag Kajian dan Perundang-undangan

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
36		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 dokumen	575.358.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0					0 dokumen	0	10 dokumen	2.073.693.591	**66,67%**	**84,16%**	Subbag Kajian dan Perundang-undangan
37		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	5.260.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0					0 dokumen	0	3 dokumen	246.159.144	**60,00%**	**47,89%**	Subbag Kajian dan Perundang-undangan
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Rekomendasi hasil pembahasan kebijakan anggaran**	**5 rekomendasi**	**1.846.238.899**	**0 rekomendasi**	**99.932.706**	**0 rekomendasi**	**407.155.414**					**0 rekomendasi**	**407.155.414**	**20 rekomendasi**	4.223.133.409	**80,00%**	**65,43%**	**Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan**
38		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	37.233.500	0 dokumen	0	0 dokumen	0					0 dokumen	0	4 dokumen	235.902.926	**80,00%**	**49,02%**	Subbag Fasilitasi Penganggaran
39		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	31.945.831	0 dokumen	0	0 dokumen	0					0 dokumen	0	4 dokumen	262.730.295	**80,00%**	**148,32%**	Subbag Fasilitasi Penganggaran

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV										
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
40		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	803.103.378	0 dokumen	18.880.000	0 dokumen	18.880.000					0 dokumen	18.880.000	4 dokumen	1.896.802.065	**80,00%**	**56,67%**	Subbag Fasilitasi Penganggaran
41		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	491.410.915	0 dokumen	0	0 dokumen	0					0 dokumen	0	4 dokumen	388.057.721	**80,00%**	**224,03%**	Subbag Fasilitasi Penganggaran
42		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	482.545.275	0 dokumen	81.052.706	0 dokumen	388.275.414					0 dokumen	388.275.414	4 dokumen	1.439.640.402	**80,00%**	**63,27%**	Subbag Fasilitasi Penganggaran
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Rekomendasi Pengawasan penyelenggaran pemerintah yang ditindaklanjuti**	**26 rekomendasi**	**9.904.454.788**	**6 rekomendasi**	**1.640.189.158**	**14 rekomendasi**	**2.683.526.636**					**14 rekomendasi**	**2.683.526.636**	**100 rekomendasi**	33.093.581.462	**70,42%**	**67,36%**	**Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan**
43		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 laporan	1.584.635.000	1 laporan	193.589.553	2 laporan	393.987.665					2 laporan	393.987.665	15 laporan	5.269.340.674	**68,18%**	**57,44%**	Subbag Fasilitasi Pengawasan

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
44		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 laporan	1.587.041.000	1 laporan	306.536.856	2 laporan	350.209.722					2 laporan	350.209.722	15 laporan	5.741.904.796	**68,18%**	**68,47%**	Subbag Fasilitasi Pengawasan
45		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 laporan	1.553.441.000	1 laporan	279.180.128	2 laporan	313.800.761					2 laporan	313.800.761	15 laporan	4.983.643.056	**68,18%**	**66,88%**	Subbag Fasilitasi Pengawasan
46		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 laporan	1.585.641.000	1 laporan	166.472.078	2 laporan	462.550.128					2 laporan	462.550.128	15 laporan	5.366.463.026	**68,18%**	**76,54%**	Subbag Fasilitasi Pengawasan
47		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 laporan	1.555.564.000	1 laporan	158.659.362	2 laporan	490.920.495					2 laporan	490.920.495	15 laporan	4.873.449.494	**68,18%**	**69,51%**	Subbag Fasilitasi Pengawasan

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
48		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 dokumen	31.665.888	0 dokumen	6.300.000	1 dokumen	18.900.000					1 dokumen	18.900.000	5 dokumen	135.462.306	**100,00%**	**35,09%**	Subbag Fasilitasi Penganggaran
49		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	3 laporan	1.585.823.000	1 laporan	251.151.880	2 laporan	362.933.564					2 laporan	362.933.564	15 laporan	4.955.968.046	**68,18%**	**67,30%**	Subbag Fasilitasi Pengawasan
50		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	420.643.900	1 dokumen	278.299.301	1 dokumen	290.224.301					01 dokumen	290.224.301	5 dokumen	1.767.350.064	**100,00%**	**75,39%**	Subbag Fasilitasi Penganggaran
		Peningkatan Kapasitas DPRD	**Terwujudnya fasilitasi dukungan terhadap peningkatan kapasitas DPRD yang optimal**	**100%**	**7.213.185.970**	**25%**	**272.540.736**	**39%**	**597.277.868**					**39%**	**597.277.868**	**108%**	18.976.917.748	**108,29%**	**78,16%**	**Bagian Persidangan dan Perundang-undangan**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV										
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
51		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0	-	0	0	0	0					0	0	1 dokumen	477.739.687	**100,00%**	**191,10%**	Subbag Humas, Protokol dan Publikasi
52		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 dokumen	3.804.558.000	0 dokumen	130.692.552	1 dokumen	415.429.684					1 dokumen	415.429.684	39 dokumen	4.211.632.554	**325,00%**	**47,94%**	Subbag Humas, Protokol dan Publikasi
53		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 orang	261.607.532	1 orang	27.600.000	1 orang	39.600.000					1 orang	39.600.000	9 orang	1.180.840.853	**75,00%**	**42,38%**	Subbag Persidangan dan Risalah
54		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	229.650.076	4 orang	42.000.000	4 orang	70.000.000					4 orang	70.000.000	26 orang	941.794.934	**108,33%**	**52,70%**	Subbag Persidangan dan Risalah
55		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 dokumen	2.572.720.000	3 dokumen	9.600.000	6 dokumen	9.600.000					6 dokumen	9.600.000	104 dokumen	6.154.880.930	**173,33%**	**393,81%**	Subbag Humas, Protokol dan Publikasi
56		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	2.510.162	0 dokumen	0	0 dokumen	0					0 dokumen	0	15 dokumen	5.018.530.000	**300,00%**	**55,44%**	Subbag Persidangan dan Risalah

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
57		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	24 dokumen	342.140.200	6 dokumen	62.648.184	12 dokumen	62.648.184					12 dokumen	62.648.184	108 dokumen	991.498.790	**90,00%**	**1772,18%**	Subbag Humas, Protokol dan Publikasi
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Dokumen laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah**	**92 dokumen**	**3.730.773.103**	**31 dokumen**	**833.964.292**	**31 dokumen**	**916.507.292**					**31 dokumen**	**916.507.292**	**414 dokumen**	8.074.918.702	**89,42%**	**67,30%**	**Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan**
58		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 laporan	69.369.620	0 laporan	10.113.500	0 laporan	13.869.500					0 laporan	13.869.500	4 laporan	142.066.450	**50,00%**	**36,00%**	Subbag Kerjasama dan Aspirasi
59		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 dokumen	154.986.932	1 dokumen	96.518.792	1 dokumen	96.518.792					1 dokumen	96.518.792	5 dokumen	359.630.947	**100,00%**	**74,39%**	Subbag Kerjasama dan Aspirasi
60		Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	90 dokumen	3.506.416.551	30 dokumen	727.332.000	30 dokumen	806.119.000					30 dokumen	806.119.000	405 dokumen	7.573.221.305	**90,00%**	**68,11%**	Subbag Kerjasama dan Aspirasi

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Dokumen kode etik DPRD dan laporan hasil pengawasan kode etik DPRD**	**4 dokumen**	**254.485.000**	**1 dokumen**	**84.311.821**	**2 dokumen**	**120.760.547**					**2 dokumen**	**120.760.547**	**11 dokumen**	1.431.755.639	**68,75%**	**110,88%**	**Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan**
61		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	0	-	0	0	dokumen	0					dokumen	0	1 dokumen	656.995.722	**33,33%**	**132,73%**	Subbag Fasilitasi Pengawasan
62		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 laporan	254.485.000	1 laporan	84.311.821	2 laporan	120.760.547					2 laporan	120.760.547	9 dokumen	774.759.917	**69,23%**	**97,30%**	Subbag Fasilitasi Pengawasan
		Pembahasan Kerja Sama Daerah	**Dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**10 dokumen**	**109.999.898**	**0 dokumen**	**0**	**2 dokumen**	**0**					**2 dokumen**	**0**	**02 dokumen**	-	**6,67%**	**0,00%**	**Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan**
63		Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	10 dokumen	109.999.898	0 dokumen	0	2 dokumen	0					2 dokumen	0	02 dokumen	-	**6,67%**	**0,00%**	Subbag Kerjasama dan Aspirasi

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi Tugas DPRD	**Dokumen laporan fasilitasi tugas DPRD**	**29 dokumen**	**5.281.462.574**	**7 dokumen**	**1.479.313.478**	**14 dokumen**	**2.474.275.491**					**14 dokumen**	**2.474.275.491**	**90 dokumen**	19.804.305.856	**59,60%**	**132,45%**	**Bagian Persidangan dan Perundang-undangan**
64		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 dokumen	1.235.429.500	1 dokumen	387.164.717	2 dokumen	405.136.117					2 dokumen	405.136.117	21 dokumen	5.362.287.059	**80,77%**	**123,47%**	Subbag Humas, Protokol dan Publikasi
65		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	1.010.479	0 laporan	0	0 laporan	0					0 laporan	0	3 laporan	33.091.100	**60,00%**	**23,27%**	Subbag Persidangan dan Risalah
66		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 dokumen	1.417.549.600	3 dokumen	390.143.859	6 dokumen	700.804.567					6 dokumen	700.804.567	58 dokumen	5.450.113.756	**96,67%**	**94,96%**	Subbag Persidangan dan Risalah
67		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 dokumen	2.627.472.995	3 dokumen	702.004.902	6 dokumen	1.368.334.807					6 dokumen	1.368.334.807	43 dokumen	8.958.813.941	**71,67%**	**189,47%**	Subbag Humas, Protokol dan Publikasi
Rata-rata capaian kinerja (%)						18,76%	16,90%	35,76%	33,58%					35,76%	33,58%					
Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah					

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2025 Triwulan II dapat dijelaskan bahwa :

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 35,76% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.629.862.493 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) dari total pagu Rp. 82.284.293.494 (*Delapan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*.) atau sebesar 33,58%
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Sekretariat DPRD sebesar 35,76% dengan predikat Sangat Rendah
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 1 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 4 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 11 indikator, capaian kinerja 0%-50% = 47 indikator

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD adalah:

1. Penyusunan perencanaan program sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
2. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
3. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
4. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;

5. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Upaya Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari sasaran sebagai berikut:

1.1.1. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel

1.1.2. Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra Sekretariat DPRD							Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026	Tw 1	Tw 2	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kapasitas dan Kinerja DPRD	Persentase Kinerja DPRD meningkat	70%	72%	75%	77%	80%	6%	9%	15%
Sasaran 1: Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	Nilai evaluasi SAKIP dari APIP	B	B (70)	BB (72)	BB (74)	A (80)	-	-	-

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra Sekretariat DPRD							Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026	Tw 1	Tw 2	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sasaran 2: Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	75%	80%	82%	85%	90%	6%	9%	15%

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD sampai dengan triwulan II Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan "Meningkatkan Kualitas Layanan Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kapasits Kinerja DPRD" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase Kinerja DPRD Meningkat", belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 15% dari target sebesar 77%;
b. Sasaran "Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel" memiliki indikator "Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP" belum mencapai target, dimana realisasinya masih 0 dari target nilai (BB) 74 dikarenakan nilai SAKIP masih dalam proses penilaian oleh pihak Inspektorat.
c. Sasaran "Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD" belum mencapai target, di mana realisasinya sebesar 15% dari target sebesar 85%.

2.3. Faktor Pendorong dan Penghambat Serta Solusi Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Tugas yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD melayani segala kegiatan anggota maupun pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik itu sifatnya pemberian informasi berkenaan dengan aturan, pelayanan kegiatan rapat-rapat, pelayanan pendampingan kegiatan kunjungan kerja maupun peningkatan sumber daya manusia, serta pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana yang kesemuanya itu bertujuan

menunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan.

Fungsi pertama diwujudkan dalam membentuk dan menetapkan Peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah beserta jajarannya, fungsi kedua untuk mewujudkan suatu kesepahaman Bersama di alam penyusunan an penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sedangkan fungsi ketiga diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan produk peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang kesemuanya dijalankan semata-mata sebagai fungsi control pihak legislatif terhadap eksekutif dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, di dalam menjalankan pencapaian visi dan misi Pemerintah, yang selanjutnya diimplementasikan oleh semua Satuan Kerja Perangkat baik dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten, dengan kata lain DPRD merupakan partner pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan di segala bidang.

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan perlu dilengkapi dengan analisis dan identifikasi isu-isu strategis guna meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis yang diuraikan dalam perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser ini merupakan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang pada dasarnya terdiri dari potensi, peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat DPRD di masa yang akan dating. Isu-isu strategis yang dapat diindetifikasikan dalam perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Paser sebagai berikut :

a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretarariat DPRD yang belum optimal
b. Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

c. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD
d. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.
e. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 di atas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Periode Juni 2025 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan administratif dan SOP fasilitasi tugas fungsi DPRD
5. Sub kegiatan dilaksanakan dengan mengacu kepada rencana aksi yang sudah dibuat serta berdasarkan matriks jadwal kegiatan DPRD

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Terbatasnya personil/Sumber Daya Manusia untuk beberapa jenis jabatan fungsional pelaksana
2. Untuk pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah masih dalam tahap akan dilaksanakan pembahasan oleh Pansus Raperda DPRD serta diharapkan dapat selesai sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun.

3. Untuk beberapa sub kegiatan yang melibatkan pihak ketiga masih dalam tahap penawaran dan permintaan Kerjasama serta akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Implikasi yang timbul akibat kondisi di atas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2025.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota serta pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Revisi Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Paser mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Penyesuaian Target Tujuan/Sasaran Perubahan Renja 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025
1	2	3	4	5
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kapasitas Kinerja DPRD	Persentase Kinerja DPRD meningkat	$\frac{Agenda\ DPRD\ yang\ terselesaikan\ tepat\ waktu}{target\ agenda\ DPRD\ dalam\ 1\ tahun}\ x\ 100\%$	77%	77%
Sasaran 1: Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai evaluasi SAKIP dari APIP	Hasil Evaluasi SAKIP	BB (74)	BB (74)

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025
1	2	3	4	5
Sasaran 2: Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi 1. Fasilitasi Fungsi Pembentukan Perda : $\frac{jumlah\ raperda\ yang\ ditetapkan\ tepat\ waktu}{jumlah\ raperda\ yang\ dibahas}\ x\ 100\%$ 2. Fasilitasi Fungsi Penganggaran : $\frac{jumlah\ dokumen\ KUA, PPAS\ dan\ perda\ APBD\ yang\ ditetapkan\ tepat\ waktu}{batas\ waktu\ penetapan}\ x\ 100\%$ 3. Fasilitasi Fungsi Pengawasan : $\frac{jumlah\ rekomendasi\ pengawasan\ DPRD\ yang\ ditindaklanjuti\ pemerintah\ daerah}{jumlah\ rekomendasi\ pengawasan\ yang\ disampaikan\ DPRD}\ x\ 100\%$	85%	93%

3.2. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Sekretariat DPRD telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Perubahan RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 Sekretariat DPRD

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Pagu pergeseran	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Sekretariat DPRD	**Tana Paser**	**Nilai evaluasi SAKIP dari APIP**	**BB (74)**	**87.569.480.653**	**82.284.293.494**	**Sekretariat DPRD**	**Tana Paser**	**Nilai evaluasi SAKIP dari APIP**	**BB (74)**	**79.554.492.393**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tana Paser**	**Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat**	**92**	**55.083.836.421**	**49.677.649.262**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tana Paser**	**Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat**	**92**	**50.856.550.624**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tana Paser**	**Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten**	**BB (74)**	**47.530.180**	**25.280.090**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tana Paser**	**Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten**	**BB (74)**	**124.999.503**	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tana Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	25.091.364	13.050.682	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tana Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	72.390.823	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	2 laporan	3.253.774	2.131.887	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	13 laporan	2.131.887	

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Pagu pergeseran	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tana Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	19.185.042	10.097.521	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tana Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	50.476.793	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tana Paser**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**10.874.329.896**	**10.990.549.810**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tana Paser**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**11.440.549.810**	
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tana Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	630 orang/14 bulan	10.861.809.724	10.983.279.724	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tana Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 orang/ bulan	11.433.279.724	
5.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tana Paser	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	10.138.000	5.574.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tana Paser	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	5.574.000	
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 laporan	2.382.172	1.696.086	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 laporan	1.696.086	

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Pagu pergeseran	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tana Paser**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**889.358.000**	**444.587.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tana Paser**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**949.743.000**	
7.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	
8.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar kabupaten dan luar provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	889.358.000	444.587.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar kabupaten dan luar provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 orang	949.743.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tana Paser**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**100%**	**3.117.603.628**	**2.416.450.151**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tana Paser**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**100%**	**2.953.258.638**	
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tana Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	42.641.200	42.641.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tana Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	67.641.200	

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Pagu pergeseran	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tana Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	1.416.040.084	1.381.894.084	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tana Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	1.558.296.904	
11.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tana Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	182.523.700	132.740.545	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tana Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	121.725.510	
12.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tana Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	84.000.324	42.505.162	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tana Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	84.442.820	
13.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tana Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	140.571.000	140.540.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tana Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	140.540.500	
14.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tana Paser	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	72.169.320	36.589.660	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tana Paser	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	105.246.404	
15.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 laporan	1.007.929.000	520.869.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 laporan	802.695.800	

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Pagu pergeseran	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
16.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tana Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersusunnya Arsip Dinamis Sekretariat DPRD	8 dokumen	171.729.000	118.669.500	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tana Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersusunnya Arsip Dinamis Sekretariat DPRD	8 dokumen	72.669.500	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tana Paser**	**Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik**	**100%**	**503.946.375**	**444.004.375**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tana Paser**	**Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik**	**100%**	**388.804.375**	
17.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tana Paser	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tana Paser	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	
18.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tana Paser	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	34 unit	503.946.375	444.004.375	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tana Paser	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	34 unit	388.804.375	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tana Paser**	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor**	**100%**	**3.468.208.328**	**3.342.733.328**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tana Paser**	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor**	**100%**	**4.050.306.944**	

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Pagu pergeseran	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
19.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	37.148.000	22.514.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12.756.700	
20.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	961.735.200	961.735.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	646.832.721	
21.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.469.325.128	2.358.484.128	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3.390.717.523	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tana Paser**	**Persentase barang inventaris peralatan dan mesin serta gedung bangunan yang terpelihara**	**100%**	**4.137.453.700**	**4.083.795.700**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tana Paser**	**Persentase barang inventaris peralatan dan mesin serta gedung bangunan yang terpelihara**	**100%**	**3.516.995.700**	
22.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Tana Paser	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	4 unit	358.385.300	329.117.300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Tana Paser	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	4 unit	279.117.300	

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Pagu pergeseran	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	atau Kendaraan Dinas Jabatan		dan dibayarkan Pajaknya				atau Kendaraan Dinas Jabatan		dan dibayarkan Pajaknya			
23.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tana Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	271.997.800	247.607.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tana Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	262.607.800	
24.	Pemeliharaan Mebel	Tana Paser	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 unit	0	0	Pemeliharaan Mebel	Tana Paser	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 unit	0	
25.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tana Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 unit	216.441.600	216.441.600	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tana Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 unit	253.441.600	
26.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tana Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	3.073.078.000	3.073.078.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tana Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7 unit	2.354.278.000	
27.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tana Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	27 unit	217.551.000	217.551.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tana Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	27 unit	367.551.000	

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Pagu pergeseran	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Tana Paser**	**Persentase Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**	**100%**	**30.341.318.114**	**26.474.154.508**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Tana Paser**	**Persentase Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**	**100%**	**25.570.561.354**	
28.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tana Paser	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	420 orang/14 bulan	29.173.568.714	25.395.295.108	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tana Paser	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 orang/ bulan	24.626.066.358,00	
29.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tana Paser	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 paket	649.390.000	560.500.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tana Paser	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30 paket	560.500.000	
30.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Luar kabupaten	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up* DPRD	30 orang	518.359.400	518.359.400	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Luar kabupaten	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up* DPRD	30 orang	383.994.996	
	Layanan Administrasi DPRD	**Tana Paser**	**Persentase Terlaksananya layanan administrasi DPRD**	**100%**	**1.704.088.200**	**1.456.094.300**	**Layanan Administrasi DPRD**	**Tana Paser**	**Persentase Terlaksananya layanan administrasi DPRD**	**100%**	**1.861.331.300**	
31.	Fasilitasi Fraksi DPRD	Tana Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 laporan	60.984.400	30.997.200	Fasilitasi Fraksi DPRD	Tana Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 laporan	30.997.200	
32.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tana Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan	20 laporan	565.799.400	303.792.700	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tana Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan	20 laporan	740.029.700	

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Pagu pergeseran	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Konsultasi DPRD						Konsultasi DPRD			
33.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tana Paser	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	36 paket	1.077.304.400	1.121.304.400	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tana Paser	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	36 paket	1.090.304.400	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**Tana Paser**	**Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu**	**100%**	**32.485.644.232**	**32.606.644.232**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Tana Paser**	**Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu**	**100%**	**28.697.941.769**	
		Tana Paser	**Dokumen KUA PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu**	**6 dokumen**				**Tana Paser**	**Dokumen KUA PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu**	**6 dokumen**		
		Tana Paser	**Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti**	**100%**				**Tana Paser**	**Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti**	**100%**		
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Tana Paser**	**Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan**	**10 dok perda**	**4.145.044.000**	**4.266.044.000**	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Tana Paser**	**Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan**	**9 dok perda**	**4.601.823.144**	
34.	Penyusunan dan Pembahasan Program	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan	1 dokumen	11.135.000	11.135.000	Penyusunan dan Pembahasan Program	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan	1 dokumen	11.135.000	

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Pagu pergeseran	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembentukan Peraturan Daerah		Program Pembentukan Peraturan Daerah				Pembentukan Peraturan Daerah		Program Pembentukan Peraturan Daerah			
35.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 dokumen	3.181.835.000	3.181.835.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 dokumen	3.528.105.000	
36.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Tana Paser	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 dokumen	444.056.000	492.456.000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Tana Paser	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4 dokumen	481.965.144	
37.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 dokumen	502.758.000	575.358.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 dokumen	575.358.000	
38.	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tana Paser	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	5.260.000	5.260.000	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tana Paser	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	5.260.000	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Tana Paser**	**Rekomendasi hasil pembahasan kebijakan anggaran**	**5 rekomendasi**	**1.846.238.899**	**1.846.238.899**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Tana Paser**	**Rekomendasi hasil pembahasan kebijakan anggaran**	**5 rekomendasi**	**1.108.760.000**	

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Pagu pergeseran	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
39.	Pembahasan KUA dan PPAS	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	37.233.500	37.233.500	Pembahasan KUA dan PPAS	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	19.460.000	
40.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	31.945.831	31.945.831	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	28.010.000	
41.	Pembahasan APBD	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	803.103.378	803.103.378	Pembahasan APBD	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	440.746.000	
42.	Pembahasan APBD Perubahan	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	491.410.915	491.410.915	Pembahasan APBD Perubahan	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	216.276.000	
43.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	482.545.275	482.545.275	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	404.268.000	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Tana Paser**	**Rekomendasi Pengawasan penyelenggaran pemerintah yang ditindaklanjuti**	**26 rekomendasi**	**9.904.454.788**	**9.904.454.788**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Tana Paser**	**Rekomendasi Pengawasan penyelenggaran pemerintah yang ditindaklanjuti**	**26 rekomendasi**	**6.720.889.000**	

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Pagu pergeseran	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
44.	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Tana Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 laporan	1.584.635.000	1.584.635.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Tana Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 laporan	1.026.467.000	
45.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Tana Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 laporan	1.587.041.000	1.587.041.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Tana Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 laporan	1.099.455.000	
46.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Tana Paser	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 laporan	1.553.441.000	1.553.441.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Tana Paser	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 laporan	1.047.231.000	
47.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Tana Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 laporan	1.585.641.000	1.585.641.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Tana Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 laporan	1.085.383.000	
48.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Tana Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan	3 laporan	1.555.564.000	1.555.564.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Tana Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan	4 laporan	1.118.514.000	

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Pagu pergeseran	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Bidang Sumber Daya Alam						Bidang Sumber Daya Alam			
49.	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 dokumen	31.665.888	31.665.888	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 dokumen	12.755.000	
50.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	3 laporan	1.585.823.000	1.585.823.000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 laporan	1.039.313.000	
51.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Tana Paser	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	420.643.900	420.643.900	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Tana Paser	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	291.771.000	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	**Tana Paser**	**Terwujudnya fasilitasi dukungan terhadap peningkatan kapasitas DPRD yang optimal**	**100%**	**7.213.185.970**	**7.213.185.970**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Tana Paser**	**Terwujudnya fasilitasi dukungan terhadap peningkatan kapasitas DPRD yang optimal**	**100%**	**6.535.682.650**	

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Pagu pergeseran	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
52.	Orientasi DPRD	Luar kabupaten dan luar provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 dokumen	0	0	Orientasi DPRD	Luar kabupaten dan luar provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 dokumen	0	
53.	Bimbingan Teknis DPRD	Luar kabupaten dan luar provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 dokumen	3.804.558.000	3.804.558.000	Bimbingan Teknis DPRD	Luar kabupaten dan luar provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 dokumen	1.844.792.000	
54.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tana Paser	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 orang	261.607.532	261.607.532	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tana Paser	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 orang	102.988.800	
55.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tana Paser	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	229.650.076	229.650.076	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tana Paser	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	4 orang	179.220.000	
56.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 dokumen	2.572.720.000	2.572.720.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 dokumen	4.187.610.000	
57.	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tana Paser	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	2.510.162	2.510.162	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tana Paser	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	1.010.000	
58.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tana Paser	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan	24 dokumen	342.140.200	342.140.200	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tana Paser	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan	24 dokumen	220.061.850,00	

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Pagu pergeseran	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Dokumentasi Dewan						Dokumentasi Dewan			
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Tana Paser**	**Dok laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah**	**92 dokumen**	**3.730.773.103**	**3.730.773.103**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Tana Paser**	**Dok laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah**	**92 dokumen**	**3.326.173.103**	
59.	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Tana Paser	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 laporan	69.369.620	69.369.620	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Tana Paser	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 laporan	69.369.620	
60.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tana Paser	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 dokumen	154.986.932	154.986.932	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tana Paser	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 dokumen	214.986.932	
61.	Pelaksanaan Reses	Tana Paser	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	90 dokumen	3.506.416.551	3.506.416.551	Pelaksanaan Reses	Tana Paser	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	90 dokumen	3.041.816.551	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Tana Paser**	**Dok kode etik DPRD dan laporan hasil pengawasan kode etik DPRD**	**4 dokumen**	**254.485.000**	**254.485.000**	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Tana Paser**	**Dok kode etik DPRD dan laporan hasil pengawasan kode etik DPRD**	**4 dokumen**	**298.573.000**	

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Pagu pergeseran	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
62.	Penyusunan Kode Etik DPRD	-	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-	0	0	Penyusunan Kode Etik DPRD	-	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-	0	
63.	Pengawasan Kode Etik DPRD	Tana Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 laporan	254.485.000	254.485.000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Tana Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	4 laporan	298.573.000	
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	**Tana Paser**	**Dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**10 dokumen**	**109.999.898**	**109.999.898**	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Tana Paser**	**Dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**10 dokumen**	**49.999.898**	
64.	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Luar kabupaten dan luar provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	10 dokumen	109.999.898	109.999.898	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Luar kabupaten dan luar provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	10 dokumen	49.999.898	
	Fasilitasi Tugas DPRD	**Tana Paser**	**Dok laporan fasilitasi tugas DPRD**	**29 dokumen**	**5.281.462.574**	**5.281.462.574**	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Tana Paser**	**Dok laporan fasilitasi tugas DPRD**	**29 dokumen**	**6.056.040.974**	
65.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Luar kabupaten dan luar provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 dokumen	1.235.429.500	1.235.429.500	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Luar kabupaten dan luar provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 dokumen	935.429.500	
66.	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tana Paser	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan	1 laporan	1.010.479	1.010.479	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tana Paser	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan	1 laporan	1.010.479	

No.	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Pagu pergeseran	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan Kinerja DPRD yang Disusun						dan Kinerja DPRD yang Disusun			
67.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 dokumen	1.417.549.600	1.417.549.600	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	15 dokumen	1.363.282.000	
68.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 dokumen	2.627.472.995	2.627.472.995	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 dokumen	3.756.318.995	
					87.569.480.653	**82.284.293.494**					**79.554.492.393**	

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil dari review dan Analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan Perubahan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD pada Perubahan APBD Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perubahan Renja
Sekretariat DPRD Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran			Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Pagu pergeseran	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sekretariat DPRD						**87.569.480.653**	**82.284.293.494**	**79.554.492.393**	**-2.729.801.101**
04.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat**	**92**	**Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat**	**92**	**Tana Paser**	**55.083.836.421**	**49.677.649.262**	**50.856.550.624**	**1.178.901.362**
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten**	**BB (74)**	**Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten**	**BB (74)**	**Tana Paser**	**47.530.180**	**25.280.090**	**124.999.503**	**99.719.413**
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	Tana Paser	25.091.364	13.050.682	72.390.823	59.340.141
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan	Tana Paser	3.253.774	2.131.887	2.131.887	0

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran			Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Pagu pergeseran	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	Tana Paser	19.185.042	10.097.521	50.476.793	40.379.272
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**Tana Paser**	**10.874.329.896**	**10.990.549.810**	**11.440.549.810**	**450.000.000**
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	630 orang/14 bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 orang/ bulan	Tana Paser	10.861.809.724	10.983.279.724	11.433.279.724	**450.000.000**
4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	Tana Paser	10.138.000	5.574.000	5.574.000	**0**
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	Tana Paser	2.382.172	1.696.086	1.696.086	**0**
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**Tana Paser**	**889.358.000**	**444.587.000**	**949.743.000**	**505.156.000**
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-	0	0	-	0

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran			Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Pagu pergeseran	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 orang	Luar kabupaten dan luar provinsi	889.358.000	444.587.000	949.743.000	505.156.000
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**100%**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**100%**	**Tana Paser**	**3.117.603.628**	**2.416.450.151**	**2.953.258.638**	**536.808.487**
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	Tana Paser	42.641.200	42.641.200	67.641.200	25.000.000
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	Tana Paser	1.416.040.084	1.381.894.084	1.558.296.904	176.402.820
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	Tana Paser	182.523.700	132.740.545	121.725.510	-11.015.035
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	Tana Paser	84.000.324	42.505.162	84.442.820	41.937.658

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran			Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Pagu pergeseran	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	Tana Paser	140.571.000	140.540.500	140.540.500	0
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	Tana Paser	72.169.320	36.589.660	105.246.404	68.656.744
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 laporan	Tana Paser	1.007.929.000	520.869.500	802.695.800	281.826.300
4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersusunnya Arsip Dinamis Sekretariat DPRD	8 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersusunnya Arsip Dinamis Sekretariat DPRD	8 dokumen	Tana Paser	171.729.000	118.669.500	72.669.500	-46.000.000
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik**	**100%**	**Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik**	**100%**	**Tana Paser**	**503.946.375**	**444.004.375**	**388.804.375**	**-55.200.000**
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Tana Paser	0	0	-	0

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran			Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Pagu pergeseran	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	34 unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	34 unit	Tana Paser	503.946.375	444.004.375	388.804.375	-55.200.000
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor**	**100%**	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan kantor**	**100%**	**Tana Paser**	**3.468.208.328**	**3.342.733.328**	**4.050.306.944**	**707.573.616**
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Tana Paser	37.148.000	22.514.000	12.756.700	-9.757.300
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Tana Paser	961.735.200	961.735.200	646.832.721	-314.902.479
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Tana Paser	2.469.325.128	2.358.484.128	3.390.717.523	1.032.233.395
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang inventaris peralatan dan mesin serta gedung bangunan yang terpelihara**	**100%**	**Persentase barang inventaris peralatan dan mesin serta gedung bangunan yang terpelihara**	**100%**	**Tana Paser**	**4.137.453.700**	**4.083.795.700**	**3.516.995.700**	**-566.800.000**

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran			Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Pagu pergeseran	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	Tana Paser	358.385.300	329.117.300	279.117.300	-50.000.000
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	Tana Paser	271.997.800	247.607.800	262.607.800	15.000.000
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 unit	Tana Paser	0	0	-	0
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 unit	Tana Paser	216.441.600	216.441.600	253.441.600	37.000.000
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7 unit	Tana Paser	3.073.078.000	3.073.078.000	2.354.278.000	-718.800.000
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	27 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	27 unit	Tana Paser	217.551.000	217.551.000	367.551.000	150.000.000
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan**	**Persentase Terlaksananya layanan keuangan**	**100%**	**Persentase Terlaksananya layanan keuangan**	**100%**	**Tana Paser**	**30.341.318.114**	**26.474.154.508**	**25.570.561.354**	**-903.593.154**

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran			Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Pagu pergeseran	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	DPRD	**dan kesejahteraan DPRD**		**dan kesejahteraan DPRD**						
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	420 orang/14 bulan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 orang/14 bulan	Tana Paser	29.173.568.714	25.395.295.108	24.626.066.358	-769.228.750
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	30 paket	Tana Paser	649.390.000	560.500.000	560.500.000	0
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 orang	Luar kabupaten	518.359.400	518.359.400	383.994.996	-134.364.404
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Terlaksananya layanan administrasi DPRD**	**100%**	**Persentase Terlaksananya layanan administrasi DPRD**	**100%**	**Tana Paser**	**1.704.088.200**	**1.456.094.300**	**1.861.331.300**	**405.237.000**
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 laporan	Tana Paser	60.984.400	30.997.200	30.997.200	0
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20 laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20 laporan	Tana Paser	565.799.400	303.792.700	740.029.700	436.237.000
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	36 paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	36 paket	Tana Paser	1.077.304.400	1.121.304.400	1.090.304.400	-31.000.000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran			Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Pagu pergeseran	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
04.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu**	**100%**	**Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu**	**100%**	**Tana Paser**	**32.485.644.232**	**32.606.644.232**	**28.697.941.769**	**-3.908.702.463**
		Dokumen KUA PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu	**6 dokumen**	**Dokumen KUA PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu**	**6 dokumen**	**Tana Paser**	**0**	**0**	**-**	0
		Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti	**100%**	**Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti**	**100%**	**Tana Paser**	**0**	**0**	**-**	0
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan**	**10 dok perda**	**Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang disetujui dan diundangkan**	**9 dok perda**	**Tana Paser**	**4.145.044.000**	**4.266.044.000**	**4.601.823.144**	**335.779.144**
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	Tana Paser	11.135.000	11.135.000	11.135.000	0
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 dokumen	Tana Paser	3.181.835.000	3.181.835.000	3.528.105.000	346.270.000
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 dokumen	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4 dokumen	Tana Paser	444.056.000	492.456.000	481.965.144	-10.490.856

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran			Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Pagu pergeseran	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 dokumen	Tana Paser	502.758.000	575.358.000	575.358.000	0
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	Tana Paser	5.260.000	5.260.000	5.260.000	0
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Rekomendasi hasil pembahasan kebijakan anggaran**	**5 rekomendasi**	**Rekomendasi hasil pembahasan kebijakan anggaran**	**5 rekomendasi**	**Tana Paser**	**1.846.238.899**	**1.846.238.899**	**1.108.760.000**	**-737.478.899**
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	Tana Paser	37.233.500	37.233.500	19.460.000	-17.773.500
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	Tana Paser	31.945.831	31.945.831	28.010.000	-3.935.831
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	Tana Paser	803.103.378	803.103.378	440.746.000	-362.357.378
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	Tana Paser	491.410.915	491.410.915	216.276.000	-275.134.915

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran			Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Pagu pergeseran	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	Tana Paser	482.545.275	482.545.275	404.268.000	-78.277.275
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Rekomendasi Pengawasan penyelenggaran pemerintah yang ditindaklanjuti**	**26 rekomendasi**	**Rekomendasi Pengawasan penyelenggaran pemerintah yang ditindaklanjuti**	**26 rekomendasi**	**Tana Paser**	**9.904.454.788**	**9.904.454.788**	**6.720.889.000**	**-3.183.565.788**
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 laporan	Tana Paser	1.584.635.000	1.584.635.000	1.026.467.000	-558.168.000
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 laporan	Tana Paser	1.587.041.000	1.587.041.000	1.099.455.000	-487.586.000
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 laporan	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 laporan	Tana Paser	1.553.441.000	1.553.441.000	1.047.231.000	-506.210.000
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	3 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	4 laporan	Tana Paser	1.585.641.000	1.585.641.000	1.085.383.000	-500.258.000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran			Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Pagu pergeseran	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Perekonomian		Perekonomian						
4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 laporan	Tana Paser	1.555.564.000	1.555.564.000	1.118.514.000	-437.050.000
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 dokumen	Tana Paser	31.665.888	31.665.888	12.755.000	-18.910.888
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	3 laporan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 laporan	Tana Paser	1.585.823.000	1.585.823.000	1.039.313.000	-546.510.000
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	Tana Paser	420.643.900	420.643.900	291.771.000	-128.872.900
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Terwujudnya fasilitasi dukungan terhadap peningkatan kapasitas DPRD yang optimal**	**100%**	**Terwujudnya fasilitasi dukungan terhadap peningkatan kapasitas DPRD yang optimal**	**100%**	**Tana Paser**	**7.213.185.970**	**7.213.185.970**	6.535.682.650	**-677.503.320**

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran			Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Pagu pergeseran	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 dokumen	Luar kabupaten dan luar provinsi	**0**	**0**	0	0
4.02.02.2.04.0002	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 dokumen	Luar kabupaten dan luar provinsi	**3.804.558.000**	**3.804.558.000**	1.844.792.000	-1.959.766.000
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 orang	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 orang	Tana Paser	**261.607.532**	**261.607.532**	102.988.800	-158.618.732
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	4 orang	Tana Paser	**229.650.076**	**229.650.076**	179.220.000	-50.430.076
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 dokumen	Tana Paser	**2.572.720.000**	**2.572.720.000**	4.187.610.000	1.614.890.000
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	Tana Paser	**2.510.162**	**2.510.162**	1.010.000	-1.500.162
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	24 dokumen	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	24 dokumen	Tana Paser	**342.140.200**	**342.140.200**	220.061.850	-122.078.350

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran			Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Pagu pergeseran	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Dok laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah**	**92 dokumen**	**Dok laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah**	**92 dokumen**	**Tana Paser**	**3.730.773.103**	**3.730.773.103**	**3.326.173.103**	**-404.600.000**
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 laporan	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 laporan	**Tana Paser**	69.369.620	69.369.620	69.369.620	0
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 dokumen	**Tana Paser**	154.986.932	154.986.932	214.986.932	60.000.000
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	90 dokumen	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	90 dokumen	**Tana Paser**	3.506.416.551	3.506.416.551	3.041.816.551	-464.600.000
4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Dok kode etik DPRD dan laporan hasil pengawasan kode etik DPRD**	**4 dokumen**	**Dok kode etik DPRD dan laporan hasil pengawasan kode etik DPRD**	**4 dokumen**	**Tana Paser**	**254.485.000**	**254.485.000**	**298.573.000**	**44.088.000**
4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-	**-**	0	0	-	0
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	4 laporan	Tana Paser	254.485.000	254.485.000	298.573.000	44.088.000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran			Bertambah/ Berkurang
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Pagu pergeseran	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.02.2.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**10 dokumen**	**Dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**10 dokumen**	**Tana Paser**	**109.999.898**	**109.999.898**	**49.999.898**	**-60.000.000**
4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	10 dokumen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	10 dokumen	Luar kabupaten dan luar provinsi	109.999.898	109.999.898	49.999.898	-60.000.000
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Dok laporan fasilitasi tugas DPRD**	**29 dokumen**	**Dok laporan fasilitasi tugas DPRD**	**29 dokumen**	**Tana Paser**	**5.281.462.574**	**5.281.462.574**	**6.056.040.974**	**774.578.400**
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 dokumen	Luar kabupaten dan luar provinsi	1.235.429.500	1.235.429.500	935.429.500	-300.000.000
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	Tana Paser	1.010.479	1.010.479	1.010.479	0
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	15 dokumen	Tana Paser	1.417.549.600	1.417.549.600	1.363.282.000	-54.267.600
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 dokumen	Tana Paser	2.627.472.995	2.627.472.995	3.756.318.995	1.128.846.000

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta hasil analisis kebutuhan pada Sekretariat DPRD untuk anggaran perubahan tahun 2025 dan telah disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan aktual. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai tujuan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD mempunyai tanggung jawab untuk:
   a) melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b) menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025

4.1 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya memastikan implementasi Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Paser Tahun 2025 ini, maka disusun tindak lanjut sebagai berikut :

4. Penjabaran Renja Perubahan ke dalam RKA Perubahan sebagai dasar penyusunan APBD Perubahan
5. Koordinasi dan konsolidasi dengan bagian penanggung jawab kegiatan
6. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan
7. Menyusun laporan berkala
8. Penguatan kapasitas SDM agar lebih siap, adaptif dan berkinerja tinggi.

Dokumen perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Tana Paser, 22 Agustus 2025

SEKRETARIS DPRD,

M. ISKANDAR ZULKARNAIN, M.Sc
NIP 19780817 200312 1 011

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
SEKRETARIAT DPRD
Jalan Gajah Mada Nomor: 36, Tanah Grogot, Kab. Paser, 76211
Telp. (0543) 21013, Fax. (0543) 22887,
Website http://dprd.paserkab.go.id (Email) sekretariat.dprdkabpaser@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 138 /SKEP-SETWAN/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2033 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Paser Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggung Jawab	:	Sekretaris DPRD
Ketua	:	Kepala Bagian Umum dan Keuangan
Sekretaris	:	Perencana Ahli Pertama
Anggota	:	1. Roslan, SE
		2. Nur Syahda' Amalia, SH
		3. Ahmad Mursid
Sekretariat	:	1. Moh. Sholeh, SE
		2. Agus Ashari
		3. Muhimmatul Khalishah, S.Kom

KEDUA Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
2. Mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
3. Melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
4. Merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
5. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
7. Melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser selaku Pengguna Anggaran

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 09 April 2025

SEKRETARIS DPRD,

M. ISKANDAR ZULKARNAIN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua DPRD Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

RENJA PERUBAHAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2025

Jl. R.M. Noto Sunardi, Tanah Grogot. 76251
Telp: 0543-27681

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen "**Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025"** yang akan memuat indikator kinerja kegiatan (Input), Keluaran (Output) dan hasil (Outcome). Pada tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Merencanakan 2 Program yang dijabarkan pada 9 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan total Anggaran Murni Rp 32.296.144.785,-

Akhir kata semoga Renja Perubahan Tahun 2024 yang sederhana ini dapat menjadi manfaat khususnya Bagu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser pada umumnya.

Tana Paser, 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Paser

H. Muhammad Guntur, S.Sos, MM
Nip. 19670717 198602 1 001

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang.....1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan.....6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.....9

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser.....18

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 23

3.1. Tujuan dan Sasaran.....23

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 202524

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025 30

BAB IV PENUTUP 37

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....37

4.2. Rencana tindak lanjut.....37

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Kabupaten Paser 10
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser s/d Triwulan II Tahun 2025 20
Tabel 3. 1 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran 23
Tabel 3. 2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser 26
Tabel 3. 3 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Paser th 2025 31

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisisampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2025 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser;
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser, proses penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokokbahasa dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2025 hingga Triwulan I baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2025 yang disertai perubahan target.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan Ii Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2. 1 Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Kabupaten Paser

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Peraangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya Tata Kelola Akuntabilitas Pemerintahan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**100**	**12.457.235.579**	**93**	**17.507.381.285**	**90**	**26.589.493.803**	**15**	**4.547.515.654**	**26**	**6.883.435.576**					**41**	**11.430.951.230**	**134**	**28.938.332.515**	**134**	**232**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	37.801.325	90	251.475.859	90	141.759.980	25	34.016.578	25	26.081.260					50	60.097.838	140	311.573.697	140	824	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	95	19.668.446	8 Dok	160.570.886	8	56.059.980	2	9.879.378	1	-					3	9.879.378	#VALUE!	170.450.264	#VALUE!	867	Satuan Polisi Pamong Praja
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	95	18.132.879	12 Lap	90.904.973	12	85.700.000	3	24.137.200	4	26.081.260					7	50.218.460	#VALUE!	141.123.433	#VALUE!	778	Satuan Polisi Pamong Praja
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	95	11.664.329.280	90	13.205.619.627	90	19.136.076.006	14	3.087.323.129	22	4.739.221.856					36	7.826.544.985	126	21.032.164.612	133	180	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	11.554.219.718	85 Org/ Bln	13.050.741.523	85	19.053.044.977	85	3.056.039.568	85	4.728.914.504					170	7.784.954.072	#VALUE!	20.835.695.595	#VALUE!	180	Satuan Polisi Pamong Praja

		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	110.109.562	24 Lap	154.878.104	12	83.031.029	3	31.283.561	3	10.307.352					6	41.590.913	#VALUE!	196.469.017	#VALUE!	178	Satuan Polisi Pamong Praja
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	-	418.203.049	50	6.001.200	86	26.294.904	-	-	-	-					-	-	50	6.001.200	#DIV/0!	1	Satuan Polisi Pamong Praja
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	26.420.524	5	1.140.000	10	23.800.000	-	-		-					-	-	5	1.140.000	#DIV/0!	4	Satuan Polisi Pamong Praja
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Undangan	-	25.757.525	5	4.861.200	10	2.494.904	-	-		-					-	-	5	4.861.200	#DIV/0!	19	Satuan Polisi Pamong Praja
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	95	175.991.061	65	3.683.189.451	80	6.707.174.846	14	1.123.898.884	21	2.095.569.930					35	3.219.468.814	100	6.902.658.265	105	3.922	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	2	20.606.020	47	3.192.881.600	5	3.092.842.800	-	-	2	1.232.744.250					2	1.232.744.250	49	4.425.625.850	2.450	21.477	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5	1.030.291	20	6.798.800	5	12.779.124	-	-	5	12.751.300					5	12.751.300	25	19.550.100	500	1.898	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	40	70.801.460	50	53.994.100	42	3.387.977.922	10	1.048.140.000	8	795.287.500					18	1.843.427.500	68	1.897.421.600	170	2.680	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan	12	7.727.258	12	4.540.000	12	7.500.000	-	-		-					-	-	12	4.540.000	100	59	Satuan Polisi Pamong Praja

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	3.704.962	12	2.370.000	12	5.050.000	3	560.000	3	560.000					6	1.120.000	18	3.490.000	150	94	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	72.121.070	12	422.604.951	20	201.025.000	4	75.198.884	3	54.226.880					7	129.425.764	19	552.030.715	475	765	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan atas Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	81.577.997	48 Lap	110.434.296	48	197.618.617	6	23.730.413	3	22.562.530					9	46.292.943	#VALUE!	156.727.239	#VALUE!	192	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Benda/Jasa Surat Menyurat	12	1.854.542	12 Lap	995.600	12	1.000.000	-	-	-	-					-	-	#VALUE!	995.600	#VALUE!	54	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	79.723.455	36 Lap	109.438.696	36	196.618.617	9	23.730.413	9	22.562.530					18	46.292.943	#VALUE!	155.731.639	#VALUE!	195	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSENTASE PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)	95	79.332.868	80	250.660.852	80	380.569.450	58	278.546.650	-	-					58	278.546.650	138	529.207.502	145	667	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	72.120.782	10 Unit	242.580.852	10	365.869.360	3	278.546.650		-					3	278.546.650	#VALUE!	521.127.502	#VALUE!	723	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	2	7.212.086	4 Unit	8.080.000	6	14.700.090	-	-		-					-	-	#VALUE!	8.080.000	#VALUE!	112	Satuan Polisi Pamong Praja

2	**Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kabupaten Paser**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA**	**70**	**2.919.463.944**	**75**	**13.224.856.601**	**100**	**5.706.650.982**	**24**	**1.356.169.736**	**29**	**518.346.409**					**53**	**1.874.516.145**	**128**	**15.099.372.746**	**183**	**517**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/ Kota	100	340.659.461	81	9.975.001.870	100	2.673.356.468	35	482.697.236	15	372.747.909					50	855.445.145	131	10.830.447.015	131	3.179	Satuan Polisi Pamong Praja
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	10	17.753.193	30	139.342.000	20	32.992.500	2	8.500.000	-	-					2	8.500.000	31	147.842.000	310	833	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	66	113.820.106	28	111.916.000	100	472.740.500	20	122.451.996	12	77.472.000					32	199.923.996	60	311.839.996	91	274	Satuan Polisi Pamong Praja
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	23	36.661.433	13	51.760.000	806	1.319.449.500	200	330.089.240	20	57.224.581					220	387.313.821	233	439.073.821	1.013	1.198	Satuan Polisi Pamong Praja

		Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																						
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12	46.745.929	235	7.935.392.800	20	107.000.000	5	11.390.000	12	56.700.000					17	68.090.000	252	8.003.482.800	2.100	17.121	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	6	5.000.000	1.615	1.478.251.070	2	4.000.000	-	-	-	-					-	-	1.615	1.478.251.070	26.917	29.565	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	87	73.204.867	20	193.320.000	30	50.000.000	2	5.506.000	4	8.520.000					6	14.026.000	26	207.346.000	30	283	Satuan Polisi Pamong Praja

		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	39	73.832.821	15	59.550.000	25	96.000.000	-	-	2	9.010.000					2	9.010.000	17	68.560.000	44	93	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	6	5.000.000	1	3.600.000	10	491.333.551	1	4.760.000	2	161.871.328					3	166.631.328	4	170.231.328	67	3.405	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	13	15.302.546	2	1.870.000	13	99.840.417	-	-	1	1.950.000					1	1.950.000	3	3.820.000	23	25	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Sosialisasi PERDA dan Cakupan Penegakan Perda dan Perkada	100	2.549.522.482	88	3.180.810.723	100	2.983.770.000	29	856.282.000	3	137.595.000					32	993.877.000	120	4.174.687.723	120	164	Satuan Polisi Pamong Praja
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	5	22.220.000	9	65.330.800	5	12.500.000	-	-	2	6.800.000					2	6.800.000	11	72.130.800	220	325	Satuan Polisi Pamong Praja

		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	30	142.553.189	36	2.837.558.800	40	137.450.000	5	16.362.000	5	24.995.000					10	41.357.000	46	2.878.915.800	153	2.020	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	48	2.384.749.293	30	277.921.123	24	2.833.820.000	8	839.920.000	1	105.800.000					9	945.720.000	39	1.223.641.123	81	51	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio Jumlah PPNS Terhadap Kasus Yang Ditangani	0	29.282.000	0,42	69.044.008	0,42	49.524.514	-	17.190.500	-	8.003.500					-	25.194.000	0	94.238.008	100	322	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	3	21.210.000	4	69.044.008	10	49.524.514	1	17.190.500	1	8.003.500					2	25.194.000	6	94.238.008	200	444	Satuan Polisi Pamong Praja
Rata-rata capaian kinerja (%)										39	5.903.685.390	55	7.401.781.985					94	13.305.467.375					
Predikat Kinerja										39		55						94						

Berdasarkan Tabel 2.2 Realisasi RKPD Tahun 2025 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan I adalah 55%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.564.818.606,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Enam rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 21.008.289.022,- (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Dua rupiah) atau sebesar 50,29%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 45% dengan predikat kinerja Sedang.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 10 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 5 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 1 indikator capaian kinerja 0%-50% = 1 indikator

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1 Pengoordinasian penyusunan rencana strategis Satuan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;

2 pengoordinasian penyusunan rencana kerja Satuan berdasarkan rencana strategis Satuan sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;

3 pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Satuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4 pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Satuan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Satuan;

5 penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan

di lingkungan Satuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;

6 perumusan kebijakan di Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;

7 pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;

8 pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;

9 pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Satuan guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

10 pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11 pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Satuan sesuai ketentuan yang berlaku;

12 penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Satuan;

13 pembinaan kelompok jabatan fungsional pada Satuan sesuai dengan kewenangan yang diberikan;

14 pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana pada Satuan;

15 pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;

16 penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintah di Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindu ngan Masyarakat;

17 pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

18 pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah; dan

19 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser adalah:

1 Pelayanan Publik (Call Center 112)

2 Penyediaan Layanan Dampak Dalam Rangka Penegakan Perda & Perkada (SPM TRANTIBUMLINMAS)

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

"RASIO KASUS PELANGGARAN TRANTIBUM"

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser s/d Triwulan II Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026		
Tujuan: Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kabupaten Paser	Indeks Rasa Aman	100	100	100	100	100	100	100
Sasaran: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	Rasio kasus pelanggaran trantibum	13,16	12,90	12.64	12,38	12,14	18.87	50,64

umum masyarakat								

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a) Tujuan “Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kabupaten Paser “memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Rasa Aman”, mencapai target, dimana realisasinya sebesar 100 dari target sebesar 100 dengan capaian kinerja sebesar 100%;
b) Sasaran “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat”, mencapai target, dimana Rasio realisasinya sebesar 18,87 dari target sebesar 12,64 dengan capaian kinerja sebesar 50,64%

Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan telah mencapai 55 % dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Periode Juni 2025 :

1. Kerjasama Antar Bidang dalam Penyusunan Rencana Kerja Masing-masing
2. Koordinasi lintas sektor dan antar stakeholder baik
3. Adanya dukungan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
4. Adanya penyelengaraan Bimtek Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP;

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan

perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2025.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser/tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025
Tujuan: Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Umum	Indeks Rasa Aman	**Nilai Indeks Rasa Aman (IRA) Keterangan 0<=IRA<=20 Rasa Aman Sangat Rendah** 20<IRA<=40 Rasa AmanRendah 40<IRA<=60 Rasa Aman Sedang 60<IRA<=80 Rasa Aman Tinggi 80<IRA<=100 Rasa Aman Sangat Tinggi	100	100
Sasaran: Meningkatnya Ketentraman & ketertiban Umum masyarakat Kabupaten Paser	Rasio Kasus Pelanggaran Trantibum	**Jumlah Kasus Setahun x 100.000** Jumlah Penduduk	12,38	13,60

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan

dan sasaran pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Kabupaten Paser Tahun 2024 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 yaitu "PENINGKATAN DAYA SAING SDM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN UNTUK KABUPATEN PASER YANG SEJAHTERA" yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan

9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser mendukung pencapaian sasaran ke-5 (Lima), yaitu "Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif".

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3. 2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Satpol PP**	**INDEKS KEPUASAN PELAYANAN SEKRETARIAT**	**100**	**28.061.333.823,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Satpol PP**	**INDEKS KEPUASAN PELAYANAN SEKRETARIAT**	**90**	**,-**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Satpol PP**	**Persentase Ketepatan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**100**	**264.319.960,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Satpol PP**	**Persentase Ketepatan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**100**	**303.584.996,-**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	82.033.980,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	121.674.996, ,-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	85.700.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	181.910.000,-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Satpol PP**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**95%**	**19.170.855.552,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Satpol PP**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**380**	**19.239.147.552,-**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan	19.053.044.977,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	0	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	83.031.029,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18	186.102.575,-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Satpol PP**	***TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH***	**89 Persen**	**38.000.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Satpol PP**	**TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**365**	**63.366.350,-**	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	10 Orang	23.800.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	15	42.200.000,-	

			Perundang-Undangan					Peraturan			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	2.494.904,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25	21.166.350,-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Satpol PP**	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	89 Persen	**7.044.803.600,-**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Satpol PP**	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	29,67	**8.953.210.211,-**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	3.292.842.800,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22	3.622.097.739,-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	12,779,124.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	4,472,585,942.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50	4.670.816.372,-	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.500.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	0	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satpol PP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5,050,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satpol PP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	251,025,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	625.995.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Satpol PP**	**TERPENUHINYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**48 Laporan**	**197.618.617,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Satpol PP**	TERPENUHINYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	48	**197.618.617,-**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	196.618.617,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	**Satpol PP**	**PERSENTASE TERPELIHARANYA BARANG MILIK DAERAH (BMD)**	**95 Laporan**	**381.498.300,-**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	PERSENTASE TERPELIHARANYA BARANG MILIK DAERAH (BMD)	265	**511.219.501,-**	

	Daerah										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	477.127.360,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP			511.219.501,-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	14,700,090.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP			0	
2	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Satpol PP**	**Persentase penurunan pelanggaran perda**	**100 Persen**	**6.254.617.946,00**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Satpol PP**	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota	100%	**15.680.973.400,-**	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Satpol PP**	**Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota**	100%	**4.794.755.000,-**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Satpol PP**	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	100%	**6.995.431.600,-**	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Satpol PP	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	30 Laporan	148.490.301,00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Satpol PP	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	100	746.732.000,-	
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satpol PP	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	60 laporan	170.000.000,00	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satpol PP	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24	688.390.301,-	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	28 Dokumen	56.004.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25	90.504.000,-	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan	125 Dokumen	637.615.500,00	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka	Satpol PP	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah	100	1.935.682.939,-	

	rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Ketentraman dan Ketertiban Umum		dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota			
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan SatuanPerlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yangBernuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	810 Orang	1.419.449.500,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1680	2.191.313.360,-	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	24 Dokumen	127.000.000,00	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	50	500.000.000,-	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	13 Unit	99.840.417,00	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	13	148.840.417	
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satpol PP	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	2 Dokumen	4.000.000,-	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satpol PP	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	2	0	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Satpol PP	Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	77 Laporan	491.333.551,00	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Satpol PP	Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2	242.818.000,-	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Satpol PP**	**TERLAKSANANYA SOSIALISASI PERDA DAN CAKUPAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA**	**100%**	**3.164.320.000,00**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Satpol PP**	TERLAKSANANYA SOSIALISASI PERDA DAN CAKUPAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	100%	**3.665.278.810,-**	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8 Laporan	27.009.753,00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5	27.001.886,-	
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah danPeraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	26 Laporan	2.849.038.924,00	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap	30	3.245.198.924,-	

								Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	44 Laporan	158.508.000,00	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	55	393.078.000,-	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten /Kota	**Satpol PP**	**Rasio Jumlah PPNS Terhadap Kasus Yang Ditangani**	**1 Orang**	**90.000.000,-**	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Satpol PP**	Rasio Jumlah PPNS Terhadap Kasus Yang Ditangani	0,42	**147.117.000,-**	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	12 Laporan	66.328.000,00	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	15	147.117.000,-	

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

Tabel 3. 3 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Paser th 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**28.659.750.331,00**	**35.146.171.029,00**	**34.315.951.769,00**	**5.656.201.438,00**							**21.042.309.429,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**28.659.750.331,00**	**35.146.171.029,00**	**34.315.951.769,00**	**5.656.201.438,00**							**21.042.309.429,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**28.659.750.331,00**	**35.146.171.029,00**	**34.315.951.769,00**	**5.656.201.438,00**							**21.042.309.429,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan Layanan Kesekretariatan**				**-**	**100 Persen**	**20.660.675.331,00**	**27.097.096.029,00**	**28.061.333.823,00**	**-6.862.585.902,00**							**13.798.089.429,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Ketepatan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				-	100 Persen	364.319.960,50	264.319.960,00	167.733.980,00	-196.585.980,50			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	ASN Satpol PP		157.056.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	192.919.960,50	92.919.960,00	82.033.980,00	-110.885.980,50	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			65.656.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	171.400.000,00	171.400.000,00	85.700.000,00	-85.700.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			91.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	95 Persen	19.494.824.513,50	19.170.855.552,00	19.136.076.006,00	-358.748.507,50			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	ASN Satpol PP		12.966.103.255,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	19.327.013.938,50	19.053.044.977,00	19.053.044.977,00	-273.968.961,50	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			12.884.675.959,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	167.810.575,00	117.810.575,00	83.031.029,00	-84.779.546,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			81.427.296,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	89 Persen	38.000.000,00	38.000.000,00	26.294.904,00	-11.705.096,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	ASN Satpol PP		56.827.577,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	33.000.000,00	33.000.000,00	23.800.000,00	-9.200.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			28.774.827,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	2.494.904,00	-2.505.096,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			28.052.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	**NON URUSAN**							**28.659.750.331,00**	**35.146.171.029,00**	**34.315.951.769,00**	**5.656.201.438,00**							**21.042.309.429,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**28.659.750.331,00**	**35.146.171.029,00**	**34.315.951.769,00**	**5.656.201.438,00**							**21.042.309.429,00**	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	89 Persen	418.204.440,00	7.044.803.600,00	8.041.782.866,00	7.623.578.426,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	ASN Satpol PP		278.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	21.633.900,00	0,00	0,00	-21.633.900,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**28.659.750.331,00**	**35.146.171.029,00**	**34.315.951.769,00**	**5.656.201.438,00**							**21.042.309.429,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**28.659.750.331,00**	**35.146.171.029,00**	**34.315.951.769,00**	**5.656.201.438,00**							**21.042.309.429,00**	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	7 Paket	0,00	3.192.523.300,00	3.292.842.800,00	3.292.842.800,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			62.194.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	12.801.100,00	12.801.100,00	12.779.124,00	-21.976,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			6.801.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				42 Paket	48 Paket	60.219.440,00	3.415.929.200,00	4.472.585.942,00	4.412.366.502,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			54.004.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			6.150.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.500.000,00	6.500.000,00	5.050.000,00	-1.450.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	24 Laporan	302.050.000,00	402.050.000,00	251.025.000,00	-51.025.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			147.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan tersedianya Jasa Penunjang Urusan PD*				-	48 Laporan	197.618.617,00	197.618.617,00	197.618.617,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	ASN Satpol PP		198.454.797,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			1.836.180,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	196.618.617,00	196.618.617,00	196.618.617,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			196.618.617,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan BMD*				-	95 Laporan	147.707.800,00	381.498.300,00	491.827.450,00	344.119.650,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	ASN Satpol PP		140.947.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	13 Unit	132.707.800,00	366.498.300,00	477.127.360,00	344.419.560,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			132.707.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	14.700.090,00	-299.910,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			8.240.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**				**-**	**100 Persen**	**7.999.075.000,00**	**8.049.075.000,00**	**6.254.617.946,00**	**-754.855.000,00**							**7.244.220.000,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota*				-	100 Persen	4.744.755.000,00	4.794.755.000,00	3.153.733.269,00	-1.591.021.731,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Masyarakat, Mitra Instansi Terkait ASN		4.303.380.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				20 Dokumen	28 Dokumen	66.000.000,00	66.000.000,00	56.004.000,00	-9.996.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			17.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100 Dokumen	125 Dokumen	945.481.000,00	945.481.000,00	637.615.500,00	-307.865.500,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			3.902.380.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				806 Orang	810 Orang	2.638.899.000,00	2.638.899.000,00	1.419.449.500,00	-1.219.449.500,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			180.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*				20 Dokumen	24 Dokumen	80.000.000,00	130.000.000,00	127.000.000,00	47.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			43.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				30 laporan	60 laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	170.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				25 Laporan	30 Laporan	92.000.000,00	92.000.000,00	148.490.301,00	56.490.301,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			62.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				15 Laporan	77 Laporan	700.000.000,00	700.000.000,00	491.333.551,00	-208.666.449,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				13 Unit	13 Unit	118.375.000,00	118.375.000,00	99.840.417,00	-18.534.583,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota*				-	100 Persen	3.164.320.000,00	3.164.320.000,00	3.034.556.677,00	-129.763.323,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Masyarakat		2.918.620.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				5 Laporan	8 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	27.009.753,00	2.009.753,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				40 Laporan	44 Laporan	263.000.000,00	263.000.000,00	158.508.000,00	-104.492.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			148.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				24 Laporan	26 Laporan	2.876.320.000,00	2.876.320.000,00	2.849.038.924,00	-27.281.076,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			2.745.120.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Rasio Jumlah PPNS Terhadap Kasus Yang Ditangani*				-	1 Orang	90.000.000,00	90.000.000,00	66.328.000,00	-23.672.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN		22.220.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				10 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	66.328.000,00	-23.672.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			22.220.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	J U M L A H								**28.659.750.331,00**	**35.146.171.029,00**	**34.315.951.769,00**	**1.754.212.427.619,00**							**21.042.309.429,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Tanah Grogot, 29 April 2025
Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja

H. MUHAMMAD GUNTUR, S.Sos,MM
Pembina TK.I
NIP. 19670717 198602 1 001

PEMERINTAH
KABUPATEN PASER

PERUBAHAN RENJA

TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
TAHUN 2025

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangkapendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Bappedalitbang Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappedalitbang, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Bappedalitbang sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Renja Bappedalitbang Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappedalitbang Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2025 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir

dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
22. Peraturan Bupati Paser Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Paser;
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Bappedalitbang Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1) Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Bappedalitbang, proses penyusunan Perubahan Renja Bappedalitbang, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Bappedalitbang, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

2) Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

3) Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

4) Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

1) Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025 Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2025 hingga Triwulan I baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.
2) Analisis Kinerja Pelayanan Bappedalitbang Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.
3) Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025 Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1) Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2025 yang disertai perubahan target

2) Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3) Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja Bappedalitbang Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (TA 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Th Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)	
1	2	3		4	7		8		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	SASARAN 1 : Mewujudkan keselarasan antar Dok perencanaan pembangunan daerah			Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan									97		97%	
A		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD**	96	2,495,000,000	-	182,255,268	-	182,255,268	0%	7%	301	7,071,266,410	63%	79%
				Persentase kesesuaian capaian kinerja dan target pembangunan daerah	96		-		-		0%		135		28%	
I.		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodir di dalam APBD	35	1,785,000,000	-	124,624,188	-	124,624,188	0%	7%	55	5,292,277,170	37%	95%
				Konsistensi ketepatan waktu dan pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah	100		40		40		40%		340		72%	
1.		5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang masuk kedalam Ranwal Dok perencanaan	65	75,000,000	86	9,000,000	86	9,000,000	132%	12%	252	60,434,397	101%	19%
				Jumlah Dok Rancangan Awal RKPD	1		1		1		100%		3		75%	
2.		5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dok Kebijakan Lainnya	Persentase keselarasan antara Dok RKPD dengan Dok Kebijakan lainnya	100	265,000,000	97	78,366,230	97	78,366,230	97%	30%	388	869,500,402	78%	60%
				Jumlah Telaahan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah	1		1		1		100%		3		75%	
3.		5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase masukan stakeholders (pemangku kepentingan) yang disepakati menjadi rancangan awal Dok perencanaan	100	60,000,000	80	11,663,232	80	11,663,232	80%	19%	260	124,096,550	65%	35%
				Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2		2		2		100%		4		67%	
4.		5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Persentase hasil musrenbang RKPD yang di tindak lanjuti kedalam Renja PD	50	60,000,000	21	10,000,000	21	10,000,000	42%	17%	140	38,826,900	97%	11%
				Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2		2		2		100%		4		80%	
5.		5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang sesuai Tema RKPD	95	300,000,000	99	-	99	-	104%	0%	379	728,007,363	84%	108%
				Persentase Usulan Musrenbang Kabupaten disetujui dalam RKPD	95		99		99		104%		379		84%	
				Persentase muatan rancangan awal Dok Perencanaan Daerah yang disetujui sebagai rancangan Akhir	100		-		-		0%		298		60%	
				Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2		1		1		50%		4		67%	
6.		5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dok Panduan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1	25,000,000	1	15,594,726	1	15,594,726	100%	62%	3	58,144,726	75%	53%
				Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh kecamatan	1,000		1,133		1,133		113%		3,399		85%	
7.		5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Konsistensi ketepatan waktu pelaksanaan tahapan penyusunan RKPD	100	1,000,000,000	25	-	25	-	25%	0%	295	3,413,266,832	59%	149%
				Dok RKPD	2		-		-		0%		7		140%	
				Dok RPJPD	-		-		-		#DIV/0!		-		0%	
				Dok RPJMD	2		-		-		0%		-		0%	
				Jumlah Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4		-		-		0%		8		47%	
							-		-							
II.		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan data perencanaan	97	375,000,000	100	5,847,400	100	5,847,400	103%	2%	320	806,892,730	67%	45%

1.		5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase ketersediaan data kinerja perangkat daerah	86	145,000,000	-	4,272,400	-	4,272,400	0%	3%	175	322,946,200	41%	48%
				Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	45		38		38		84%		183		102%	
2.		5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data& informasi perencanaan yang dipublikasikan	100	230,000,000	6	1,575,000	6	1,575,000	6%	1%	160	483,946,530	32%	43%
				Profil Pembangunan Daerah	-		-		-		#DIV/0!		3		60%	
				Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan	1		-		-		0%		2		40%	
							-		-							
III.		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian kinerja sasaran RPJMD	100	335,000,000	99	51,783,680	99	51,783,680	99%	15%	405	972,096,510	89%	59%
1.		5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Tingkat capaian target program prioritas per sasaran RPJMD	100	165,000,000	-	11,700,000	-	11,700,000	0%	7%	2,363	546,958,509	473%	67%
				Persentase ketepatan waktu pengendalian Dok perencanaan	100		-		-		0%		260		52%	
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1		-		-		0%		2		50%	
2.		5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase realisasi program prioritas KDH	100	170,000,000	645	40,083,680	645	40,083,680	645%	24%	829	425,138,001	230%	51%
				Persentase program dengan capaian kinerja yang telah >=76%	100		29		29		29%		212		42%	
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2		-		-		0%		4		50%	
							-		*Rata - rata capaian kinerja (%)*		61%	6%			66%	50%
							-		*Predikat kinerja*		Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah
							-									
B.		**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD**	**95**	**3,198,000,000**	**97**	**567,559,669**	**97**	**567,559,669**	**102%**	**18%**	**328**	**12,991,742,741**	**70%**	**82%**
I.		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Konsistensi Dok perencanaan PD dengan Dok pembangunan daerah	90	1,219,000,000	-	222,774,472	-	222,774,472	0%	18%	237	5,387,162,374	56%	90%
1.		5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Pemerintahan	100	300,000,000	100	92,508,772	100	92,508,772	100%	31%	384	1,070,334,875	77%	70%
				Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Pemerintahan	100		100		100		100%		392		78%	
				Jumlah Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidan Pemerintahan yang diakomodir penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	3		-		-		0%		6		50%	
2.		5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan Dok perencanaan PD Bidang Pemerintahan	87	40,000,000	85	13,725,000	85	13,725,000	98%	34%	279	118,553,066	81%	72%
				Persentase konsistensi tolok ukur dalam Dok Renja dengan Renstra Bidang Pemerintahan	100		100		100		100%		274		69%	
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3		-		-		0%		6		50%	
3.		5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dok Evaluasi Bidang Pemerintahan	95	40,000,000	94	19,920,000	94	19,920,000	99%	50%	390	157,013,622	82%	73%
				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang Pemerintahan	94		85		85		90%		337		75%	
				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Pemerintahan	94		85		85		90%		362		81%	
				Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4		-		-		0%		8		50%	
4.		5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Pemerintahan	100	40,000,000	100	13,342,700	100	13,342,700	100%	33%	300	381,866,316	89%	225%
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2		-		-		0%		4		50%	
5.		5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan	Persentase muatan Renja yang	100	450,000,000			89		89%	11%	373	1,659,256,469	75%	72%

			Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	diakomodir kedalam RKPD Bidang Pembangunan Manusia			**89**	49,880,000		**49,880,000**						
				Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Pembangunan Manusia	100		**100**		**100**		**100%**		**392**		**78%**	
				Jumlah Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Diakomodir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6		**-**		**-**		**0%**		**6**		**25%**	
6.		5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan Dok perencanaan PD Bidang Pembangunan Manusia	87		**69**		**69**		**79%**		**339**		**80%**	
				Persentase konsistensi tolok ukur dalam Dok Renja dengan Renstra Bidang Pembangunan Manusia	100	40,000,000	**77**	5,850,000	**77**	**5,850,000**	**77%**	**15%**	**321**	**156,992,334**	**64%**	**70%**
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6		**-**		**-**		**0%**		**5**		**21%**	
7.		5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dok Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia	95		**7**		**7**		**7%**		**300**		**63%**	
				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang Pembangunan Manusia	94		**3**		**3**		**3%**		**271**		**61%**	
				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Pembangunan Manusia	94	100,000,000	**758**	24,848,000	**758**	**24,848,000**	**806%**	**25%**	**1,104**	**328,868,364**	**247%**	**66%**
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6		**-**		**-**		**0%**		**6**		**25%**	
8.		5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Pembangunan Manusia	100		**100**		**100**		**100%**		**400**		**96%**	
				Jumlah Laporan Hasil SInkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2	209,000,000	**-**	2,700,000	**-**	**2,700,000**	**0%**	**1%**	**2**	**1,514,277,328**	**25%**	**169%**
							-									
II.		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Konsistensi Dok perencanaan PD dengan Dok pembangunan daerah	90	1,084,000,000	**97**	160,155,600	**97**	**160,155,600**	**108%**	**15%**	**382**	**3,937,970,293**	**90%**	**75%**
1.		5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Perekonomian	100		**100**		**100**		**100%**		**389**		**78%**	
				Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Perekonomian	100	250,000,000	**98**	34,542,100	**98**	**34,542,100**	**98%**	**14%**	**392**	**815,837,271**	**78%**	**59%**
				Jumlah Dok Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang dikordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6		**-**		**-**		**0%**		**6**		**25%**	
2.		5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan Dok perencanaan PD Bidang Perekonomian	87		**88**		**88**		**101%**		**364**		**86%**	
				Persentase konsistensi tolok ukur dalam Dok Renja dengan Renstra Bidang Perekonomian	100	35,000,000	**94**	2,250,000	**94**	**2,250,000**	**94%**	**6%**	**351**	**141,373,528**	**70%**	**79%**
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8		**-**		**-**		**0%**		**4**		**13%**	
3.		5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dok Evaluasi Bidang Perekonomian	95		**100**		**100**		**105%**		**383**		**81%**	
				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang Perekonomian	94		**31**		**31**		**33%**		**313**		**70%**	
				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Perekonomian	94	60,000,000	**36**	9,510,000	**36**	**9,510,000**	**38%**	**16%**	**322**	**205,832,780**	**72%**	**72%**
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	8		**1**		**1**		**13%**		**7**		**22%**	

				Perekonomian												
4.		5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Perekonomian	100	174,000,000	100	26,379,200	100	26,379,200	100%	15%	400	902,483,416	96%	108%
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4		-		-		0%		4		25%	
5.		5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang SDA	100	240,000,000	100	55,836,500	100	55,836,500	100%	23%	396	820,344,314	79%	69%
				Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang SDA	100		96		96		96%		378		76%	
				Jumlah Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3		-		-		0%		4		33%	
6.		5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan Dok perencanaan PD Bidang SDA	87	40,000,000	100	2,985,000	100	2,985,000	115%	7%	382	176,618,914	90%	95%
				Persentase konsistensi tolok ukur dalam Dok Renja dengan Renstra Bidang SDA	100		97		97		97%		367		73%	
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4		-		-		0%		5		31%	
7.		5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dok Evaluasi Bidang SDA	95	85,000,000	100	5,508,000	100	5,508,000	105%	6%	380	233,065,320	80%	66%
				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang SDA	94		33		33		35%		313		70%	
				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang SDA	94		40		40		42%		316		71%	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4		1		1		25%		6		38%	
8.		5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang SDA	100	200,000,000	100	23,144,800	100	23,144,800	100%	12%	400	642,414,750	96%	76%
				Jumlah Laporan Hasil SInkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2		-		-		0%		3		38%	
III.		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Konsistensi Dok perencanaan PD dengan Dok pembangunan daerah	90	895,000,000	-	184,629,597	-	184,629,597	0%	21%	262	3,666,610,074	62%	80%
1.		5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Infrastruktur	100	160,000,000	97	63,746,921	97	63,746,921	97%	40%	376	1,319,814,141	75%	120%
				Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Infrastruktur	100		93		93		93%		447		89%	
				Jumlah Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Diakomodir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6		1		1		17%		5		21%	
2.		5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan Dok perencanaan PD Bidang Infrastruktur	87	90,000,000	83	20,055,200	83	20,055,200	95%	22%	300	171,719,746	71%	50%
				Persentase konsistensi tolok ukur dalam Dok Renja dengan Renstra Bidang Infrastruktur	100		46		46		46%		235		47%	
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	8		-		-		0%		5		16%	
3.		5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dok Evaluasi Bidang Infrastruktur	95	126,000,000	50	28,159,439	50	28,159,439	53%	22%	278	563,070,746	58%	108%
				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang Infrastruktur	94		31		31		33%		249		56%	
				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Infrastruktur	94		67		67		71%		286		64%	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	8		1		1		13%		8		25%	

4.		5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Infrastruktur	100	270,000,000	**100**	36,668,598	**100**	**36,668,598**	**100%**	**14%**	**400**	**624,238,888**	**96%**	**148%**
				Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4		-		-		**0%**		**2**		**13%**	
5.		5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase muatan Renja yang diakomodir kedalam RKPD Bidang Kewilayahan	100	90,000,000	-	24,779,439	-	**24,779,439**	**0%**	**28%**	**277**	**395,312,468**	**55%**	**46%**
				Persentase muatan Renstra yang selaras dengan RPJMD Bidang Kewilayahan	100		-		-		**0%**		**235**		**47%**	
				Jumlah Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3		-		-		**0%**		**6**		**50%**	
6.		5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase konsistensi tahapan dan ketepatan waktu dalam penyusunan Dok perencanaan PD Bidang Kewilayahan	87	35,000,000	-	-	-	-	**0%**	**0%**	**256**	**92,326,221**	**60%**	**29%**
				Persentase konsistensi tolok ukur dalam Dok Renja dengan Renstra Bidang Kewilayahan	100		-		-		**0%**		**170**		**34%**	
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4		-		-		**0%**		**6**		**38%**	
7.		5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dok Evaluasi Bidang Kewilayahan	95	64,000,000	-	11,220,000	-	**11,220,000**	**0%**	**18%**	**231**	**282,085,732**	**49%**	**44%**
				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Bidang Kewilayahan	94		-		-		**0%**		**244**		**55%**	
				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Bidang Kewilayahan	94		-		-		**0%**		**281**		**63%**	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4		-		-		**0%**		**7**		**44%**	
8.		5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Lingkup Bidang Kewilayahan	100	60,000,000	-	-	-	-	**0%**	**0%**	**300**	**218,042,132**	**72%**	**56%**
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1		-		-		**0%**		**3**		**75%**	
							-		***Rata - rata capaian kinerja (%)***		**36%**	**18%**			**69%**	**82%**
							-		***Predikat kinerja***		**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			**Sedang**	**Tinggi**
	SASARAN 2 : Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah			Persentase implementasi hasil kelitbangan			-						**74**		**74%**	
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah			-						**73**		**81%**	
C.		**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan**	75	2,316,000,000	**21**	185,758,066	**21**	**185,758,066**	**28%**	**8%**	**248**	**16,956,755,451**	**71%**	**139%**
I.		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dalam Ranwal RKPD	65	732,000,000	**25**	78,048,600	**25**	**78,048,600**	**38%**	**11%**	**251**	**1,785,652,165**	**84%**	**71%**
1.		5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Dok Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1	352,000,000	-	78,048,600	-	**78,048,600**	**0%**	**22%**	**3**	**1,361,962,257**	**60%**	**78%**
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Dok Naskah Akademik	1	380,000,000	-	-	-	-	**0%**	**0%**	**1**	**423,689,908**	**25%**	**55%**
				Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1		-		-		**0%**		**1**		**25%**	
II.		5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dalam Ranwal RKPD	65	352,000,000	**25**	20,151,000	**25**	**20,151,000**	**38%**	**6%**	**225**	**570,002,629**	**92%**	**40%**
1.		5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dok penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	352,000,000	-	20,151,000	-	**20,151,000**	**0%**	**6%**	**2**	**570,002,629**	**50%**	**40%**
III.		5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dalam Ranwal RKPD	65	352,000,000	**25**	9,411,223	**25**	**9,411,223**	**38%**	**3%**	**310**	**12,247,781,135**	**103%**	**311%**
			Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dok Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1	352,000,000	-	9,411,223	-	**9,411,223**	**0%**	**3%**	**2**	**318,194,581**	**67%**	**29%**
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan	1	407,992,000	-	20,711,254								
IV.		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang difasilitasi untuk diterapkan	40	880,000,000	**33**	78,147,243	**33**	**78,147,243**	**83%**	**9%**	**227**	**2,353,319,522**	**121%**	**54%**

1.		5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase Uji Coba Inovasi yang Memenuhi Standar	65	250,000,000	38	8,390,000	38	8,390,000	58%	3%	291	435,549,649	97%	37%
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan uji coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi dan Penerapan Teknologi	1		-		-		0%		2		50%	
2.		5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Persentase inovasi yang memenuhi standar	40	430,000,000	33	60,557,243	33	60,557,243	83%	14%	290	1,553,397,182	193%	73%
				Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	4		-		-		0%		2		13%	
3.		5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dalam Ranwal Renja PD	65	200,000,000	25	9,200,000	25	9,200,000	38%	5%	265	364,372,691	88%	36%
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1		-		-		0%		2		50%	
							-		*Rata - rata capaian kinerja (%)*		53%	7%			100%	119%
							-		*Predikat kinerja*		Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	SASARAN 1 : Meningkatnya tata kelola dan pelayanan Bappedalitbang			Capaian atas hasil evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Bappedalitbang			-						29.2		86%	
D.		**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat**	76	12,900,568,280	82	3,256,674,354	82	3,256,674,354	108%	25%	325	29,094,560,172	87%	62%
I.		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan tahapan penyusunan Dok perencanaan Perangkat Daerah	100	765,000,000	75	46,223,388	75	46,223,388	75%	6%	369	659,128,866	74%	29%
				Persentase capaian sasaran strategis Bappedalitbang	95		54		54		57%		343	-	74%	
				Capaian nilai penyelenggaraan SPIP pada Bappedalitbang	4		4		4.0		100%		15	-	84%	
				Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP	84		67		67.40		80%		280	-	70%	
				Persentase rata-rata capaian area perubahan RB	80		75		75		94%		296	-	85%	
1.		5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase konsistensi Renja dengan Renstra tahun berkenaan	100	450,000,000	100	46,223,388	100	46,223,388	100%	10%	397	268,145,268	79%	40%
				Dok Perencanaan PD sesuai ketentuan	-		2		2		#DIV/0!		15		94%	
				Persentase keselarasan muatan Renstra dengan RPJMD	100		-		-		0%		-		0%	
				Persentase ketersediaan data kinerja	100		25		25		25%		297		59%	
				Jumlah Dok Perencanaan Perangkat Daerah	7		2		2		29%		14		56%	
2.		5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Persentase RKA-SKPD disusun sesuai KAK	100	65,000,000	-	-	-	-	0%	0%	256	69,904,140	58%	9%
				Persentase RKA disusun menggunakan SSH&ASB	90		-		-		0%		250		64%	
				Jumlah Dok RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	2		2		2		100%		6		75%	
3.		5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Kegiatan diakomodir dalam DPA-SKPD	100	25,000,000	50	-	50	-	50%	0%	350	19,049,800	70%	22%
				Persentase KAK per Kegiatan pada DPA	100		50		50		50%		313		71%	
				Jumlah Dok DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	2		2		2		100%		6		75%	
4.		5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja tepat waktu	-	225,000,000	1	-	1	-	#DIV/0!	0%	15	302,029,658	60%	42%
				Persentase capaian kinerja dan anggaran kegiatan ≥ 80%	100		-		-		0%		269		57%	
				Persentase pengendalian resiko kegiatan	60		6		6		10%		113		49%	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5		1		1		20%		11		55%	
II.		5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti	100	9,865,000,000	-	2,437,635,879	-	2,437,635,879	0%	25%	236	23,042,569,581	47%	60%
				Persentase LHP nihil	100		-		-		0%		245	-	49%	
1.		5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kesesuaian data kepegawaian dengan Daftar Gaji ASN	100	9,500,000,000	96	2,340,976,933	96	2,340,976,933	96%	25%	388	21,816,312,562	78%	59%
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51		51		51		100%		157		77%	
2.		5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Capaian realisasi kinerja keuangan	97	90,000,000	14	23,396,012	14	23,396,012	14%	26%	238	433,827,919	50%	95%
				Persentase Dok SPJ yang	10				-		139%		11		16%	

				dikembalikan			-									
				Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	450		108		108		24%		864		48%	
3.		5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan Laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu	100	275,000,000	100	73,262,934	100	73,262,934	100%	27%	333	792,429,100	67%	59%
				Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2		-		-		0%		2		25%	
III.		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80	100	740,000,000	60	435,779,100	60	435,779,100	60%	59%	207	1,685,437,947	47%	74%
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannnya	Persentase jumlah ASN yang memiliki pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	100	30,000,000	-	-	-	-	0%	0%	100	-	20%	0%
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	86		-		-		0%		86		#DIV/0!	
1.		5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang mendapatkan Sosialisasi	87	110,000,000	-	39,364,100	-	39,364,100	0%	36%	237	248,877,947	56%	46%
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	45		-		-		0%		69		41%	
2.		5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian	90	600,000,000	-	396,415,000	-	396,415,000	0%	66%	260	1,436,560,000	61%	92%
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	87		-		-		0%		187		54%	
IV.		5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	701,000,000	22	303,545,087	22	303,545,087	22%	43%	244	2,790,350,742	49%	88%
1.		5.01.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan bulanan bahan instalasi listrik dan penerangan	100	3,000,000	-	-	-	-	0%	0%	300	3,000,000	60%	21%
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	10		-		-		0%		135		375%	
2.		5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan Peralatan dan perlengkapan kantor non aset	100	20,000,000	-	-	-	-	0%	0%	18	186,520,844	4%	128%
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	55		-									
3.		5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan peralatan rumah tangga	100	27,500,000	-	-	-	-	0%	0%	-	76,778,000	0%	83%
				Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6		-									
4.		5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan bulanan ATK dan alat/bahan kebersihan kantor	100	120,000,000	-	32,630,887	-	32,630,887	0%	27%	296	272,616,987	59%	44%
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	55		-		-		0%		2,118		963%	
5.		5.01.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan	100	25,000,000	-	1,232,000	-	1,232,000	0%	5%	114	50,580,400	23%	42%
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6		-		-		0%		18		75%	
6.		5.01.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah media cetak berlangganan	-	5,500,000	-	1,110,000	-	1,110,000	#DIV/0!	20%	2,484	11,050,000	59%	42%
				Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	837		-		-		0%		1,647		49%	
7.		5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kebutuhan makan dan minum rapat pegawai	3,050	400,000,000	-	177,481,126	-	177,481,126	0%	44%	5,869	1,572,365,299	39%	82%
				Kebutuhan menghadiri Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi antar pemerintahan	-		-		-		#DIV/0!		283		52%	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105		-		-		0%		220		52%	
8.		5.01.01.2.06.0011	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Update berita dan informasi per bulan pada website Bappedalitbang	40	100,000,000	-	91,091,074	-	91,091,074	0%	91%	119	659,501,456	60%	264%
				Jumlah akses laman website	1,500		-		-		0%		######		241%	
				Jumlah Dok Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1		-		-		0%		2		50%	
V.		5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	85	696,568,280	90	-	90	-	106%	0%	291	615,849,180	73%	193%
1.		5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan kebutuhan Peralatan dan perlengkapan kantor	85	696,568,280	-	-	-	-	0%	0%	206	615,849,180	52%	193%
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	7		-		-		0%		36		129%	
VI.		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang inventaris dalam	50	133,000,000			90.0		180%	25%	272	301,223,856	119%	46%

			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kondisi baik			**90**	33,490,900		**33,490,900**					
1.		5.01.01.2.09.0002	Penyediaan jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Persentase Kendaraan dinas operasional layak pakai	100	85,000,000	-	33,490,900	-	**33,490,900**	**0%**	**39%**	**300**	**192,655,356**	**71%**	**45%**
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3		-		-		**0%**		**6**		**50%**	
2.		5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan kantor kondisi baik	95	48,000,000	-	-	-	-	**0%**	**0%**	**259**	**108,568,500**	**145%**	**47%**
				Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	85		-		-		**0%**		**180**		**53%**	
									Rata - rata capaian kinerja (%)		**70%**	**14%**			**70%**	**45%**
									Predikat kinerja		**Sedang**	**Sangat Rendah**			**Sedang**	**Sangat Rendah**
								TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**47.52%**	**14.58%**			**63.93%**	**72.23%**
									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			**Rendah**	**Sedang**

Berdasarkan Tabel 2.2 Realisasi RKPD Tahun 2025 Triwulan I dapat dijelaskan bahwa;

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan I adalah 14,54%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.212.958.611 (empat milyar dua ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 29.458.211.159 (Dua pulih sembilan milyar empat ratus lima puluh delapan ratus juta dua ratus sebelas ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Bappedalitbang sebesar 47.52% dengan predikat kinerja Sangat Rendah.

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Bappedalitbang

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja (Bappedalitbang Kabupaten Paser, maka Bappedalitbang Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

Tugas :

Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Badan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
b. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Badan berdasarkan rencana strategis Badan sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
c. pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Badan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Badan;
e. penetapan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan dilingkungan Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
f. perumusan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

g. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Badan guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
l. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Badan ;
m. pembinaan kelompok jabatan fungsional pada Badan sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
n. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana pada Badan ;
o. pengendalian pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
p. penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
q. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
r. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan daerah; dan
s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Bappedalitbang adalah:

1. Pelayanan Kesekretariatan;
2. Pelayanan Perumusan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
3. Pelayanan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

4. Pelayanan pembinaan kelompok jabatan fungsional Perencana;
5. Pelayanan penyelenggaraan kerjasama dengan pihak atau instansi terkait dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

Upaya Bappedalitbang dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Mewujudkan keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah;
   Dengan indikator kinerja : Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan
2. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah;
   Dengan indikator kinerja:
   a. Persentase implementasi rencana kelitbangan;
   b. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah;
3. Meningkatnya tata kelola dan pelayanan Bappedalitbang.
   Dengan indikator kinerja : Capaian komponen pengungkit nilai IRB pada Bappedalitbang

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Bappedalitbang Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Bappedalitbang terdapat dalam Tabel 2.1 di bawah ini

Tabel
2.1

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bappedalitbang sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026		
Tujuan: Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	7	7,8	8,5	9	9,5	8,13	86%
Mewujudkan keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan	90	93	96	99	100	98	98%
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase implementasi hasil kelitbangan	58	60	62	64	66	20	32%
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	60	65	70	75	80	0	0%
Meningkatnya tata kelola dan pelayanan Bappedalitbang	Capaian komponen pengungkit nilai IRB pada Bappedalitbang	27	29	31	32	34	31,8	99%

Berdasarkan Tabel 2.1 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Bappedalitbang sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "**Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah**" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "**Indeks Kualitas Perencanaan**", belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 8,13 dari target sebesar 8,5 dengan capaian kinerja sebesar 86%;

b. Sasaran "**Mewujudkan keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah**" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "**Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan**",

belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 98 dari target sebesar 100 dengan capaian kinerja sebesar 98 %

c. Sasaran "**Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah"** memiliki 2 indikator kinerja yaitu "**Persentase implementasi hasil kelitbangan",** belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 2 0 dari target sebesar 64 dengan capaian kinerja 32%. **"Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah" ,** belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar
0 dari target 75 dengan capaian kinerja 0%.

d. Sasaran **"Meningkatnya tata kelola dan pelayanan Bappedalitbang"** memiliki indikator kinerja yaitu "**Capaian komponen pengungkit nilai IRB pada Bappedalitbang",** belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 31.8 dari target sebesar 32 dengan capaian kinerja 99%.

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan belum mencapai di atas 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja

Bappedalitbang Kabupaten Paser Periode April 2025 :

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan menyusun agenda lebih awal
2. Melakukan pendampingan dan konsultasi dengan pihak terkait/instansi yang relevan serta kerjasama dengan tenaga ahli/akademisi
3. Pemanfaatan TI dalam kegiatan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Progress realisai keuangan lambat karena beberapa kegiatan diagendakan selesai pada akhir tahun.
2. Kondisi SDM Perencana kurang
3. Tata Kerja pasca penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fugsional belum berjalan

4. Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2025.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappedalitbang sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran Bappedalitbang Kabupaten Paser mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tujuan/Sasaran	Indikator	Rumus	Targ	
			Renja 2025	P Renja 2025
Tujuan: Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	$IKP = \sum_{i=1}^{3} A_i$ $A_i = \sum_{n=1}^{9} U_n . b_n$ Ket : A_i = Aspek penilaian kualitas perencanaan b_n = Bobot masing-masing unsur U_n = Unsur penyusun Aspek kualitas perencanaan IKP diukur dari 3 Aspek, yaitu: 1. Aspek Proses 2. Aspek Isi, dan 3. Aspek Tindak Lanjut	8,5	8,5
Mewujudkan keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan	$\frac{h\ p}{pph\ h}{}_{h} \quad 100\%$	100	100
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase implementasi hasil kelitbangan	$\frac{h\ rr/r}{r\ hr}{}_{h\ hr} \quad 100\%$	100	100
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	$\frac{hr\ rp}{h\ r\ r} \quad 100\%$	85	85

Meningkatnya tata kelola dan pelayanan Bappedalitbang	Capaian komponen pengungkit nilai IRB pada Bappedalitbang	$r\ p$	32	32

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Bappedalitbang Kabupaten Paser Tahun 2025 tidak mengalami perubahan hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja (Target Akhir RENSTRA) juga penyesuaian anggaran belanja sesuai dengan Inpres No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 yaitu "PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN UNTUK KABUPATEN PASER YANG SEJAHTERA" yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

1. peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata, peningkatan kualitas hidup anak, perempuan dan pemuda.
2. Penurunan kemiskinan melalui penguatan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial, peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal.
3. Pemantapan tata kelola pemerintahan melalui penguatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan kepuasan pelayanan publik.
4. Pemantapan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan konektivitas untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan ketangguhan terhadap bencana.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (multiplierеffect) sektor pertanian

2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Bappedalitbang mendukung pencapaian sasaran ke-3, yaitu "Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah".

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Bappedalitbang telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 3.2
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Bappedalitbang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							**24,851,707,830.00**	**29,458,211,159.00**	**33,331,997,252.00**	**8,480,289,422.00**							**21,841,900,000.00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**24,851,707,830.00**	**29,458,211,159.00**	**33,331,997,252.00**	**8,480,289,422.00**							**21,841,900,000.00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**22,127,715,830.00**	**26,092,534,959.00**	**26,298,986,480.00**	**4,171,270,650.00**							**19,781,900,000.00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat**				-	**76 %**	**13,600,568,280.00**	**19,071,236,200.00**	**19,158,169,066.00**	**776,331,720.00**							**14,376,900,000.00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Capaian nilai penyelenggaraan SPIP pada Bappedalitbang* *Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP* *Persentase capaian sasaran strategis Bappedalitbang* *Persentase ketepatan tahapan penyusunan Dok perencanaan Perangkat Daerah* *Persentase rata-rata capaian area perubahan RB*				- 	100 % 4 80 % 84 95 %	765,000,000.00	698,874,500.00	430,544,748.00	-334,455,252.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Pegawai Bappedalitbang		525,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	450,000,000.00	450,000,000.00	249,318,460.00	-200,681,540.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			145,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil				2 Dokumen	2 Dokumen	65,000,000.00	13,508,500.00	7,877,216.00	-57,122,784.00	Semua Kota/Kab, Semua	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik,	Pemantapan Tata Kelola			185,000,000.00	BADAN PERENCANAAN

			Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik				PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	25,000,000.00	10,366,000.00	5,071,641.00	-19,928,359.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			20,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	225,000,000.00	225,000,000.00	168,277,431.00	-56,722,569.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			175,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase LHP nihil Persentase temuan ditindaklanjuti*				-	100 %	10,465,000,000.00	15,751,823,420.00	15,512,618,017.00	5,047,618,017.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk	Pegawai Bappedalitbang		12,395,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

															san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik				
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	10,000,000,000.00	15,442,997,420.00	15,211,597,420.00	5,211,597,420.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			12,000,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				450 Dokumen	450 Dokumen	190,000,000.00	114,394,000.00	112,323,053.00	-77,676,947.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			110,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	275,000,000.00	194,432,000.00	188,697,544.00	-86,302,456.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			285,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

																Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik				
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase rata-rata capaian I K I d e n g a*				-	100 %	740,000,000.00	980,130,000.00	1,341,302,038.00	601,302,038.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Pegawai Bappedalitbang		550,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				86 Paket	86 Paket	30,000,000.00	30,000,000.00	39,964,790.00	9,964,790.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			55,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				45 Orang	45 Orang	110,000,000.00	110,000,000.00	101,902,000.00	-8,098,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan			120,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

																Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik				
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				87 Orang	87 Orang	600,000,000.00	840,130,000.00	1,199,435,248.00	599,435,248.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			375,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran*				-	100 %	1,001,000,000.00	1,010,840,000.00	1,247,130,935.00	246,130,935.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Pegawai Bappedalitbang		683,900,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	3,000,000.00	3,000,000.00	2,996,602.00	-3,398.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan			3,200,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

															Publik				
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				55 Paket	55 Paket	20,000,000.00	11,840,000.00	11,823,997.00	-8,176,003.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			22,500,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	27,500,000.00	27,500,000.00	27,493,007.00	-6,993.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			22,500,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				55 Paket	55 Paket	120,000,000.00	120,000,000.00	144,777,871.00	24,777,871.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			135,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket				6 Paket	6 Paket	25,000,000.00	25,000,000.00	18,963,958.00	-6,036,042.00	Semua	DANA	Memperkuat	Pemantap			25,000,000.00	BADAN

			Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan										Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	an Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik				PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				837 Dokumen	837 Dokumen	5,500,000.00	5,500,000.00	5,487,500.00	-12,500.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			5,700,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				105 Laporan	105 Laporan	500,000,000.00	484,399,842.00	421,440,921.00	-78,559,079.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			420,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000.00	333,600,158.00	614,147,079.00	314,147,079.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui			50,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN

			pada SKPD												memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik				DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik*				-	85 %	446,568,280.00	446,568,280.00	392,445,965.00	-54,122,315.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Pegawai Bappedalitbang		90,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	446,568,280.00	446,568,280.00	392,445,965.00	-54,122,315.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			90,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang inventaris dalam kondisi baik*				-	50 %	183,000,000.00	183,000,000.00	234,127,363.00	51,127,363.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Pegawai Bappedalitbang		133,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

																Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik				
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	135,000,000.00	135,000,000.00	169,742,363.00	34,742,363.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			85,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				85 Unit	85 Unit	48,000,000.00	48,000,000.00	64,385,000.00	16,385,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			48,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase kesesuaian capaian kinerja dan target pembangunan daerah**				**-**	**96 %**	**3,339,276,050.00**	**2,922,322,050.00**	**3,089,038,674.00**	**-1,184,276,050.00**							**2,155,000,000.00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Konsistensi ketepatan waktu dan pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodir di dalam APBD*				-	100 Persen 35 Persen	2,239,276,050.00	2,035,642,050.00	2,376,043,714.00	136,767,664.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan	OPD, Masyarakat		1,445,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

															an.	Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik				
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000.00	75,000,000.00	365,635,920.00	290,635,920.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			75,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	265,000,000.00	265,000,000.00	211,778,960.00	-53,221,040.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			265,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				0 0	2 0	72,246,800.00	72,246,800.00	52,734,800.00	-19,512,000.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerinta			60,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

																han Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik				
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				2 Berita Acara	2 Berita Acara	60,000,000.00	60,000,000.00	40,300,000.00	-19,700,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			60,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	398,170,250.00	398,170,250.00	396,731,094.00	-1,439,156.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			210,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				1000 Usulan	1000 Usulan	25,000,000.00	25,000,000.00	15,595,000.00	-9,405,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi			25,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

																Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik				
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	3 Dokumen	1,343,859,000.00	1,140,225,000.00	1,293,267,940.00	-50,591,060.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			750,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Ketersediaan data perencanaan*				-	97 %	465,000,000.00	362,694,000.00	339,429,960.00	-125,570,040.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	OPD		375,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				45 Orang	45 Orang	235,000,000.00	235,000,000.00	258,859,960.00	23,859,960.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			145,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	230,000,000.00	127,694,000.00	80,570,000.00	-149,430,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			230,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Rata-rata capaian kinerja sasaran RPJMD*				-	100 %	635,000,000.00	523,986,000.00	373,565,000.00	-261,435,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	OPD		335,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	315,000,000.00	282,780,000.00	186,746,000.00	-128,254,000.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			165,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	2 Laporan	320,000,000.00	241,206,000.00	186,819,000.00	-133,181,000.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			170,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

													Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD**				**-**	**95 %**	**5,187,871,500.00**	**4,098,976,709.00**	**4,051,778,740.00**	**-1,937,871,500.00**							**3,250,000,000.00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Konsistensi Dok perencanaan PD dengan Dok pembangunan daerah*				-	90 %	1,728,871,500.00	1,459,575,000.00	1,423,610,166.00	-305,261,334.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	OPD		1,225,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	300,000,000.00	400,000,000.00	366,625,000.00	66,625,000.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			300,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen				3 Laporan	3 Laporan	40,000,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan	Pemantapan Tata Kelola Pemerinta			45,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUN

			Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan										Semua Kel/Desa	(DAU)	birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	han Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik				AN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																	
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				4 Laporan	4 Laporan	40,000,000.00	40,000,000.00	25,035,000.00	-14,965,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			45,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	40,000,000.00	271,104,000.00	267,718,500.00	227,718,500.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			45,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD				6 Dokumen	6 Dokumen	567,580,000.00	287,879,750.00	351,122,666.00	-216,457,334.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi			450,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

			dan RKPD)												pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik				
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				6 Laporan	6 Laporan	76,650,000.00	30,000,000.00	15,000,000.00	-61,650,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			40,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				6 Laporan	6 Laporan	200,000,000.00	100,000,000.00	47,565,000.00	-152,435,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			100,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	2 Laporan	464,641,500.00	290,591,250.00	330,544,000.00	-134,097,500.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan			200,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

															an.	Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik				
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Konsistensi Dok perencanaan PD dengan Dok pembangunan daerah*				-	90 %	2,084,000,000.00	1,349,909,767.00	1,287,661,440.00	-796,338,560.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	OPD		1,130,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	400,000,000.00	273,048,000.00	217,886,000.00	-182,114,000.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			250,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				8 Laporan	8 Laporan	185,000,000.00	21,017,000.00	56,017,000.00	-128,983,000.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui			45,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

																Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik				
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				8 Laporan	8 Laporan	160,000,000.00	65,174,209.00	90,174,209.00	-69,825,791.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			65,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	324,000,000.00	192,960,000.00	186,380,000.00	-137,620,000.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			200,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	390,000,000.00	540,599,500.00	457,437,883.00	67,437,883.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudka			240,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

																n Kepuasan Pelayanan Publik				
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				4 Laporan	4 Laporan	130,000,000.00	28,117,000.00	56,327,833.00	-73,672,167.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			45,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				4 Laporan	4 Laporan	165,000,000.00	67,800,000.00	73,782,000.00	-91,218,000.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			85,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				2 Laporan	2 Laporan	330,000,000.00	161,194,058.00	149,656,515.00	-180,343,485.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			200,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Konsistensi Dok perencanaan PD dengan Dok pembangunan daerah*				-	90 %	1,375,000,000.00	1,289,491,942.00	1,340,507,134.00	-34,492,866.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	OPD		895,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	450,000,000.00	450,000,000.00	437,194,613.00	-12,805,387.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			160,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				8 Laporan	8 Laporan	110,000,000.00	110,488,247.00	155,913,749.00	45,913,749.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			70,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan				8 Laporan	8 Laporan	196,000,000.00	176,196,847.00	221,016,424.00	25,016,424.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			110,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

			Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur												serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				4 Laporan	4 Laporan	270,000,000.00	283,405,000.00	256,980,500.00	-13,019,500.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			85,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	120,000,000.00	80,401,848.00	80,401,848.00	-39,598,152.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			150,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				4 Laporan	4 Laporan	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk			80,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

															san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik				
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				4 Laporan	4 Laporan	134,000,000.00	94,000,000.00	94,000,000.00	-40,000,000.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			150,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			90,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**2,723,992,000.00**	**3,365,676,200.00**	**7,033,010,772.00**	**4,309,018,772.00**							**2,060,000,000.00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan**				**-**	**75 %**	**2,723,992,000.00**	**3,365,676,200.00**	**7,033,010,772.00**	**-663,992,000.00**							**2,060,000,000.00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dalam Ranwal RKPD*				-	65 %	732,000,000.00	1,285,905,200.00	2,662,506,400.00	1,930,506,400.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi	OPD, Masyarakat, Akademisi		685,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBAN

															dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik				GAN
	5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				1 Laporan	1 Laporan	352,000,000.00	998,569,200.00	2,219,228,400.00	1,867,228,400.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			450,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	380,000,000.00	287,336,000.00	443,278,000.00	63,278,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			235,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dalam Ranwal RKPD*				-	65 %	352,000,000.00	469,269,000.00	634,533,300.00	282,533,300.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	OPD, Masyarakat, Akademisi		450,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

																Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik				
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	352,000,000.00	469,269,000.00	634,533,300.00	282,533,300.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			450,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dalam Ranwal RKPD*				-	65 %	759,992,000.00	650,502,000.00	2,698,357,700.00	1,938,365,700.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	OPD, Masyarakat, Akademisi		0.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	407,992,000.00	352,508,000.00	962,015,200.00	554,023,200.00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan			0.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

																Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik				
	5.05.02.2.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				1 Dokumen	1 Dokumen	352,000,000.00	297,994,000.00	1,736,342,500.00	1,384,342,500.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			0.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Persentase inovasi dan teknologi yang difasilitasi untuk diterapkan*				-	40 %	880,000,000.00	960,000,000.00	1,037,613,372.00	157,613,372.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	OPD, Masyarakat, Akademisi		925,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	1 Laporan	250,000,000.00	250,000,000.00	273,756,000.00	23,756,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan			265,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

															Publik				
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				4 Laporan	4 Laporan	430,000,000.00	430,000,000.00	416,761,372.00	-13,238,628.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			435,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	200,000,000.00	280,000,000.00	347,096,000.00	147,096,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			225,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	J U M L A H								**24,851,707,830.00**	**29,458,211,159.00**	**33,331,997,252.00**	**1,754,212,427,619.00**						**21,841,900,000.00**	

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Bappedalitbang pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan							24.851.707.830,00	29.458.211.159,00	33.331.997.252,00							21.841.900.000,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							24.851.707.830,00	29.458.211.159,00	33.331.997.252,00							21.841.900.000,00	
	5	01				PERENCANAAN							22.127.715.830,00	26.092.534.959,00	26.298.986.480,00							19.781.900.000,00	
1	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat				-	76 %	13.600.568.280,00	19.071.236.200,00	19.158.169.066,00							14.376.900.000,00	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai penyelenggaraan SPIP pada Bappedalitbang Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP Persentase capaian sasaran strategis Bappedalitbang Persentase ketepatan tahapan penyusunan Dok perencanaan Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian area perubahan RB	-			- 	100 % 4 undefined 80 % 84 undefined 95 %	765.000.000,00	698.874.500,00	698.874.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Pegawai Bappedalitbang		525.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	450.000.000,00	450.000.000,00	249.318.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			145.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	65.000.000,00	13.508.500,00	7.877.216,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan			185.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

																		narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelayanan Publik				
	5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	10.366.000,00	5.071.641,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	225.000.000,00	225.000.000,00	168.277.431,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase LHP nihil Persentase temuan ditindaklanjuti	-			-	100 %	10.465.000.000,00	15.751.823.420,00	15.751.823.420,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Pegawai Bappedalitbang		12.395.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	10.000.000.000,00	15.442.997.420,00	15.211.597.420,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			12.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				450 Dokumen	450 Dokumen	190.000.000,00	114.394.000,00	112.323.053,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN

																		pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik				PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	275.000.000,00	194.432.000,00	188.697.544,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			285.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80	-			-	100 %	740.000.000,00	980.130.000,00	980.130.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Pegawai Bappedalitbang		550.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				86 Paket	86 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	39.964.790,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				45 Orang	45 Orang	110.000.000,00	110.000.000,00	101.902.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan				87 Orang	87 Orang	600.000.000,00	840.130.000,00	1.199.435.248,00	Semua Kota/Kab, Semua	Dana Alokasi Umum	Memperkuat reformasi politik, hukum	Pemantapan Tata Kelola Pemerintaha			375.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA

							Perundang-Undangan									Kecamatan, Semua Kel/Desa	(DAU)	dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	n Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik				N DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	-			-	100 %	1.001.000.000,00	1.010.840.000,00	1.010.840.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Pegawai Bappedalitbang		683.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	2.996.602,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			3.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				55 Paket	55 Paket	20.000.000,00	11.840.000,00	11.823.997,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			22.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	27.500.000,00	27.500.000,00	27.493.007,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			22.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																

		1	1	6	4																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				55 Paket	55 Paket	120.000.000,00	120.000.000,00	144.777.871,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			135.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	18.963.958,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				837 Dokumen	837 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	5.487.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			5.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				105 Laporan	105 Laporan	500.000.000,00	484.399.842,00	421.440.921,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			420.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	333.600.158,00	614.147.079,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

																	narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelayanan Publik				
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	-			-	85 %	446.568.280,00	446.568.280,00	446.568.280,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Pegawai Bappedalitbang		90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	446.568.280,00	446.568.280,00	392.445.965,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	-			-	50 %	183.000.000,00	183.000.000,00	183.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Pegawai Bappedalitbang		133.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	135.000.000,00	135.000.000,00	169.742.363,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				85 Unit	85 Unit	48.000.000,00	48.000.000,00	64.385.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudka			48.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

																	n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	n Kepuasan Pelayanan Publik					
2	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja dan target pembangunan daerah				-	96 %	3.339.276.050,00	2.922.322.050,00	3.089.038.674,00							2.155.000.000,00	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Konsistensi ketepatan waktu dan pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodir di dalam APBD	-			-	100 Persen 35 Persen	2.239.276.050,00	2.035.642.050,00	2.035.642.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	OPD, Masyarakat		1.445.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																	
							Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	365.635.920,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																	
							Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	265.000.000,00	265.000.000,00	211.778.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			265.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																	
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				0 0	2 0	72.246.800,00	72.246.800,00	52.734.800,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																	

							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				2 Berita Acara	2 Berita Acara	60.000.000,00	60.000.000,00	40.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	398.170.250,00	398.170.250,00	396.731.094,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			210.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																
							Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				1000 Usulan	1000 Usulan	25.000.000,00	25.000.000,00	15.595.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	3 Dokumen	1.343.859.000,00	1.140.225.000,00	1.293.267.940,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			750.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan data perencanaan	-			-	97 %	465.000.000,00	362.694.000,00	362.694.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	OPD		375.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

																		.					
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				45 Orang	45 Orang	235.000.000,00	235.000.000,00	258.859.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			145.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	230.000.000,00	127.694.000,00	80.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			230.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian kinerja sasaran RPJMD	-			-	100 %	635.000.000,00	523.986.000,00	523.986.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	OPD		335.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	315.000.000,00	282.780.000,00	186.746.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			165.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	2 Laporan	320.000.000,00	241.206.000,00	186.819.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamata	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan			170.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

																n, Semua Kel/Desa		narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelayanan Publik				
3	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD				-	95 %	5.187.871.500,00	4.098.976.709,00	4.051.778.740,00							3.250.000.000,00	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Konsistensi Dok perencanaan PD dengan Dok pembangunan daerah	-			-	90 %	1.728.871.500,00	1.459.575.000,00	1.459.575.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	OPD		1.225.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	400.000.000,00	366.625.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				3 Laporan	3 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																	
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				4 Laporan	4 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	25.035.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																	

							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	271.104.000,00	267.718.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	567.580.000,00	287.879.750,00	351.122.666,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				6 Laporan	6 Laporan	76.650.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				6 Laporan	6 Laporan	200.000.000,00	100.000.000,00	47.565.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	2 Laporan	464.641.500,00	290.591.250,00	330.544.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

																	dan penyeludupan.	Publik				
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Konsistensi Dok perencanaan PD dengan Dok pembangunan daerah	-			-	90 %	2.084.000.000,00	1.349.909.767,00	1.349.909.767,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	OPD		1.130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	400.000.000,00	273.048.000,00	217.886.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				8 Laporan	8 Laporan	185.000.000,00	21.017.000,00	56.017.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				8 Laporan	8 Laporan	160.000.000,00	65.174.209,00	90.174.209,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	324.000.000,00	192.960.000,00	186.380.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

																		pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik				
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	390.000.000,00	540.599.500,00	457.437.883,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			240.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				4 Laporan	4 Laporan	130.000.000,00	28.117.000,00	56.327.833,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				4 Laporan	4 Laporan	165.000.000,00	67.800.000,00	73.782.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				2 Laporan	2 Laporan	330.000.000,00	161.194.058,00	149.656.515,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Konsistensi Dok perencanaan PD dengan Dok pembangunan daerah	-			-	90 %	1.375.000.000,00	1.289.491.942,00	1.289.491.942,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan	OPD		895.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN

																		memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik				DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	450.000.000,00	450.000.000,00	437.194.613,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				8 Laporan	8 Laporan	110.000.000,00	110.488.247,00	155.913.749,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				8 Laporan	8 Laporan	196.000.000,00	176.196.847,00	221.016.424,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				4 Laporan	4 Laporan	270.000.000,00	283.405.000,00	256.980.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	

							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	120.000.000,00	80.401.848,00	80.401.848,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				4 Laporan	4 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				4 Laporan	4 Laporan	134.000.000,00	94.000.000,00	94.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								2.723.992.000,00	3.365.676.200,00	7.033.010.772,00							2.060.000.000,00	
4	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan				-	75 %	2.723.992.000,00	3.365.676.200,00	7.033.010.772,00								2.060.000.000,00	
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dalam Ranwal RKPD	-			-	65 %	732.000.000,00	1.285.905.200,00	1.285.905.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi	OPD, Masyarakat, Akademisi		685.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGA

																		dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik				N
	5	05	02	2.01	0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				1 Laporan	1 Laporan	352.000.000,00	998.569.200,00	2.219.228.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																	
							Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	380.000.000,00	287.336.000,00	443.278.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			235.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dalam Ranwal RKPD	-			-	65 %	352.000.000,00	469.269.000,00	469.269.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	OPD, Masyarakat, Akademisi		450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	352.000.000,00	469.269.000,00	634.533.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dalam Ranwal RKPD	-			-	65 %	759.992.000,00	650.502.000,00	650.502.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi	OPD, Masyarakat, Akademisi		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN

																		pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik				PENGEMBANGAN
	5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	407.992.000,00	352.508.000,00	962.015.200,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	02	2.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				1 Dokumen	1 Dokumen	352.000.000,00	297.994.000,00	1.736.342.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang difasilitasi untuk diterapkan	-			-	40 %	880.000.000,00	960.000.000,00	960.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	OPD, Masyarakat, Akademisi		925.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	273.756.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			265.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode				4 Laporan	4 Laporan	430.000.000,00	430.000.000,00	416.761.372,00	Semua Kota/Kab, Semua	Dana Alokasi Umum	Memperkuat reformasi politik, hukum	Pemantapan Tata Kelola Pemerintaha			435.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA

							Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif									Kecamatan, Semua Kel/Desa	(DAU)	dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	n Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik				N DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																	
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	280.000.000,00	347.096.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			225.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	JUMLAH												**24.851.707.830,00**	**29.458.211.159,00**	**33.331.997.252,00**							**21.841.900.000,00**	

Analisis kebutuhan tambahan alokasi pagu indikatif :

1. Kebutuhan tambahan gaji/tunjangan ASN, dimana terdapat penyesuaian
2. Tunjangan Fungsional dan penyesuaian kelas jabatan;
3. Tambahan belanja pendukung kegiatan penelitian dan pengembangan;
4. Tambahan belanja pendukung kegiatan koordinasi dan konsultasi;

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Bappedalitbang Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bappedalitbang mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik- baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

5.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Tanah Grogot, 22 Agustus 2025

Kepala Bappedalitbang,

Rusdian Nor SE., M.Si. NIP. 19770309 199803 1 004

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2025

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. RM Noto Sunardi TANAH GROGOT
Telp : (0543) 24060

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. RM Noto Sunardi TANAH GROGOT
Telp : (0543) 24060

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan limpahan rahmat dan anugerah- NYA sehingga dapat tersusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser yang mengacu pada peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan 2025 ini, oleh karena itu sumbang saran dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan Renja Perubahan Kami.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i
DAFTAR TABEL..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar Belakang..... 2
1.2. Landasan Hukum..... 2
1.3. Maksud dan Tujuan..... 5
1.4. Sistematika Penulisan..... 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025. 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025..... 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 21
2.3. Faktor Pendorong dan Penghambat dan Solusi Permasalahan dalam pelaksanaan hasil renja PD tahun 2025..... 25
2.3. Penelaah usulan program dan kegiatan masyarakat 27

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan..... 29
3.1. Tujuan dan Sasaran..... 29
3.2. Review terhadap rancangan perubahan RKPD 2025..... 30

BAB IV PENUTUP..... 50
4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan..... 50
4.2. Catatan Startegis..... 50
4.2. Rencana Tindak Lanjut..... 51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Evaluasi terhadap hasil kerja Renja Perangkat Daerah ……	9
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah ……	24
Tabel .2.3.	Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 ……	28
Tabel .3.1.	Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Paser……	29
Tabel .3.2.	Review terhadap rancangan perubahan RKPD 2025……	32
Tabel 3.3.	Rencana Program dan Kegiatan perubahan rencana kerja PD tahun 2025….	41
Tabel 3.4.	Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 Kabupaten Paser……	46
Tabel 3.5.	Matrik Kontribusi Perangkat Daerah Terhadap Asta Cita dalam RPJMN 2025-2029……	47

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah..

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi

daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Renstra Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Renja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2025 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonersia Tahun 2022 nomor 180;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah

daerah;

3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2025

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2025 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

1.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Paser 2021-2026.

BAB IV Penutup

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan 2 tahun 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser
Triwulan II tahun 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntanbel
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Tata kelola Aset Daerah

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
I	**Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan**	**80**	**34.749.145.250**	**169,983**	**64.333.744.422**	**0**	**54.402.763.024**	**0**	**2.498.328.480**	**0**	**11.585.959.542**							**0**	**14.084.288.022**	**213,74**	**78.418.032.444**	**2,6716875**	**2,26**
A		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	80	170.561.018	144,25	415.812.930	74	247.625.801	0	41.451.200	-	18.643.600					0	60.094.800	144,25	475.907.730	**1,80**	**2,79**
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	95.504.734	12	336.451.628	6	224.545.993	4	36.307.600	-	18.643.600					4	54.951.200	16,00	391.402.828	**0,53**	**4,10**

2		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	10	73.859.401	7	77.594.702	2	20.873.306	0	5.143.600	-	-					0	5.143.600,00	7,00	82.738.302	**0,70**	**1,12**
3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	1.196.883	5	1.766.600	2	2.206.502	0	-	-	-					0	-	5,00	1.766.600	**0,50**	**1,48**
B		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80	33.731.347.784	169,46	60.869.499.184	74	52.176.264.594	0	2.227.689.990	0	11.283.663.927					0	13.511.353.917	213,27	74.380.853.101	**2,67**	**2,21**
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	230	33.231.590.692	56	59.970.920.727	46	51.712.055.894	44	2.059.274.290	69	11.263.152.467					57	13.322.426.757	102,00	73.293.347.484	**0,44**	**2,21**
2		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20	238.891.499	5	610.971.130	4	357.307.800	1	136.056.100	1	20.511.460					2	156.567.560	9,00	767.538.690	**0,45**	**3,21**
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15	23.937.669	5	140.965.423	3	53.826.464	0	17.736.000	0	-					0	17.736.000	6,00	158.701.423	**0,40**	**6,63**
4		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	25	16.879.340	20	46.075.410	5	25.745.768	3	-	2	-					5	-	20,00	46.075.410	**0,80**	**2,73**
5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	90	52.740.044	35	100.566.494	18	27.328.668	4	14.623.600	5	-					9	14.623.600	41,00	115.190.094	**0,46**	**2,18**
C		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80	749.111.973	168,37	2.622.668.055	74	1.379.198.035	0	168.530.582	0	234.107.972		0			0	402.638.554	211,72	3.025.306.609	**2,65**	**4,04**

1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	5.228.392	2	9995900	2	10.000.000	1	-	0	9.879.000					1	9.879.000	4,00	19.874.900	**0,40**	**3,80**
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35	119.377.613	75	848.853.350	7	363.292.531	3	-	2	6.160.500					5	6.160.500	75,00	855.013.850	**2,14**	**7,16**
3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	220.616.324	322	324.954.100	6	503.103.503	2	46.000.000	1	38.745.900					3	84.745.900	324,00	409.700.000	**10,80**	**1,86**
4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	6.326.354	723	62.915.000	3	119.047.406	1	-	1	102.443.750					2	102.443.750	724,00	165.358.750	**48,27**	**26,14**
5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Diadakan	3600	2.419.783	400	342.179.610	720	1.800.000	205	-	206	450.000					411	450.000	550,00	342.629.610	**0,15**	**141,60**
6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	203.568.902	840	604.699.383	40	277.257.000	20	99.699.182	0	73.418.822					20	173.118.004	856,00	777.817.387	**4,28**	**3,82**
7		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4000	97.463.551	1594	306.093.922	800	46.338.000	140	16.986.400	380	3.010.000					520	19.996.400	2157,00	326.090.322	**0,54**	**3,35**
8		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70	94.111.054	14	122976790	14	58.359.595	3	5.845.000	4	-					7	5.845.000	23,00	128.821.790	**0,33**	**1,37**
D		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100	235.271.300	188,91	359.867.643	100	325.821.660	0	55.776.708	0	49544043					0,00	105.320.751	188,91	465.188.394	**1,89**	**1,98**

1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300	1.568.518	210	2.300.000	60	800.000	15	800.000	15	-					30	800.000	225,00	3.100.000	**0,75**	**1,98**
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240	233.702.782	50	357.567.643	48	325.021.660	9	54.976.708	9	49.544.043					18	104.520.751	65,00	462.088.394	**0,27**	**1,98**
E		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD	52	30.161.715	79	65.896.610	47	273.852.934	0	4.880.000	0	0					0	4.880.000	79,00	70.776.610	**1,52**	**2,35**
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	16.651.551	4	40.796.610	1	24.517.434	0	-	0	-					0	-	4,00	40.796.610	**0,27**	**2,45**
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	5.238.849	14	9.980.000	10	8.185.000	0	-	0	-					0	-	14,00	9.980.000	**0,47**	**1,90**
3		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	55	8.271.316	32	15.120.000	15	241.150.500	10	4.880.000	0	-					10	4.880.000	40,00	20.000.000	**0,73**	**2,42**
II	**Meningkatnya Kwalitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase penurunan temuan administratif atas laporan keuangan pemerintah daerah**	**10**	**281.751.930.067**	**12,5**	**677.520.404.793**	**10**	**464.013.935.188**	**-**	**45.359.689.423**	**-**	**79539086408**					**0**	**124.898.775.831**	**12,50**	**802.419.180.624**	**1,25**	**2,85**
A		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	30	4.302.271.043	12	4.578.778.599	6	2.741.980.300	0	692.520.466	0	193.163.680					0	885.684.146	12,00	5.464.462.745	**0,40**	**1,27**
1		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10	535.439.737	4	238.764.150	2	292.005.000	0	-	0	-					0	-	4,00	238.764.150	**0,40**	**0,45**

2		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	10	350.231.944	4	316.719.870	2	174.895.000	0	-	0	-					0	-	4,00	316.719.870	**0,40**	**0,90**
3		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	210	464.279.107	84	158.066.478	42	245.905.000	0	22.016.600	0	-					0	22.016.600	84,00	180.083.078	**0,40**	**0,39**
4		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	210	371.571.354	84	179.338.161	42	134.185.000	0	-	0	-					0	-	84,00	179.338.161	**0,40**	**0,48**
5		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10	1.117.240.420	4	2.426.048.297	2	1.517.765.300	0	653.905.566	0	155.618.780					0	809.524.346	4,00	3.235.572.643	**0,40**	**2,90**
6		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10	514.082.259	4	796.204.630	2	350.355.000	0	-	0	37.544.900					0	37.544.900	4,00	833.749.530	**0,40**	**1,62**
7		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10	299.901.008	52	44.482.162	2	26.870.000	0	16.598.300	0	-					0	16.598.300	52,00	61.080.462	**5,20**	**0,20**
B		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Jumlah Pengajuan SPM yang sesuai ketentuan	100	917.637.568	200	2.715.364.649	100	1.288.408.900	9	171.978.988	10,30	398.537.700					19,10	570.516.688	219,10	3.285.881.337	**2,19**	**3,58**

1		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	20	219.395.767	8	639.756.319	4	276.777.700	0	61.768.058	1	78.057.200					1	139.825.258	9,00	779.581.577	**0,45**	**3,55**
2		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	30	143.257.937	13	298.170.379	6	186.832.000	0	51.181.600	1	78.906.800					1	130.088.400	13,00	428.258.779	**0,43**	**2,99**
3		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	10	132.921.407	0	102.631.701	2	71.806.000	0	-	0	-					0	-	0,00	102.631.701	**0,00**	**0,77**
4		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	210	121.079.099	1008	434.817.212	504	304.155.000	123	23.203.000	123	95.696.000					246	118.899.000	1176,00	553.716.212	**5,60**	**4,57**

5		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5	143.634.382	2	340.682.130	1	130.780.450	1	15.375.280	-	111.575.600					1	126.950.880	3,00	467.633.010	**0,60**	**3,26**
6		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	210	157.348.976	84	899.306.908	42	318.057.750	0	20.451.050	21	34.302.100					21	54.753.150	126,00	954.060.058	**0,60**	**6,06**
C		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Dokumen Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	10	995.648.939	4	1.921.467.314	2	1.029.222.785	0	165.646.800	2	198.962.511					2	364.609.311	4,00	2.286.076.625	**0,40**	**2,30**
1		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5	73.209.616	2	202.550.595	1	127.176.000	0	15.873.200	-	51.455.440					0	67.328.640	2,00	269.879.235	**0,40**	**3,69**
2		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5	114.768.639	2	249.255.213	1	227.535.676	1	18.843.600	-	20.188.600					1	39.032.200	3,00	288.287.413	**0,60**	**2,51**

3		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5	464.959.112	2	999.859.834	1	511.269.109	0	130.930.000	1	87.817.051					1	218.747.051	3,00	1.218.606.885	**0,60**	**2,62**
4		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5	305.593.022	2	431.221.672	1	133.567.000	0	-	1	17.191.420					1	17.191.420	2,00	448.413.092	**0,40**	**1,47**
5		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	55	37.118.550	11	38.580.000	11	29.675.000	0	-	-	22.310.000					0	22.310.000	11,00	60.890.000	**0,20**	**1,64**
D		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	275.536.372.518	2	668.304.794.231	1	458.954.323.203	0	44.329.543.169	-	78.748.422.517					0	123.077.965.686	2,00	791.382.759.917	**0,40**	**2,87**
1		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5	264.052.629.368	2	642.259.496.251	1	444.043.856.003	0	43.422.938.669	-	76.340.226.667					0	119.763.165.336	2,00	762.022.661.587	**0,40**	**2,89**
2		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5	6.000.000.000	2	9.681.995.230	1	10.000.000.000	0	-	-	-					0	-	2,00	9.681.995.230	**0,40**	**1,61**

3		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	5	5.483.743.150	140	16.363.302.750	1	4.910.467.200	0	906.604.500	-	2.408.195.850					0	3.314.800.350	140,00	19.678.103.100	**28,00**	**3,59**
III	**Meningkatnya Kwalitas Tata kelola Aset Daerah**	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase permasalahan pengelolaan barang milik daerah selesai ditindaklanjuti**	**70**	**1.872.034.048**	**105**	**11.837.196.159**	**60**	**5.151.924.647**	**-**	**394.926.777**	**-**	**1.752.216.974**					**0**	**2.147.143.751**	**105,00**	**13.984.339.910**	**1,50**	**7,47**
A		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan BMD	210	1.872.034.048	84	11.837.196.159	42	5.151.924.647	0	394.926.777	-	1.752.216.974					0	2.147.143.751	84,00	13.984.339.910	**0,40**	**7,47**
1		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	5	142.268.726	2	1.064.029.846	1	523.274.000	0	129.281.151	-	157.585.502					0	286.866.653	2,00	1.350.896.499	**0,40**	**9,50**
2		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5	167.930.196	1	16250000	1	6.750.000	0	5.625.000	1	-					0	5.625.000	1,00	21.875.000	**0,20**	**0,13**
3		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	146.606.806	1	4920000	1	355.973.770	0	56.562.510	-	89.259.300					0	145.821.810	1,00	150.741.810	**0,20**	**1,03**
4		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	10	95.276.107	4	135.591.824	2	32.160.000	0	3.420.000	1	3.852.400					1	7.272.400	4,00	142.864.224	**0,40**	**1,50**
5		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	10	108.258.978	4	155.700.282	2	166.838.200	0	7.630.000	1	44.988.380					1	52.618.380	4,00	208.318.662	**0,40**	**1,92**
6		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10	306.035.553	30	4.768.099.390	2	552.079.351	0	72.556.000	1	109.115.687					1	181.671.687	30,00	4.949.771.077	**3,00**	**16,17**
7		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	10	161.212.235	12	258.410.603	2	55.508.000	0	-	0	37.661.099					0	37.661.099	13,00	296.071.702	**1,30**	**1,84**
8		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	10	296.950.616	12	542.384.072	2	272.084.500	0	13.196.200	1	33.244.870					1	46.441.070	12,00	588.825.142	**1,20**	**1,98**

		Barang Milik Daerah																				
9		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	20	257.505.696	6	3.904.203.137	4	2.637.569.081	1	25.771.716	3	1.147.020.116					4	1.172.791.832	7,00	5.076.994.969	**0,35**	**19,72**
10		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	10	169.342.384	44	359.005.763	2	78.468.000	0	6.750.000	1	42.875.200					1	49.625.200	44,00	408.630.963	**4,40**	**2,41**
11		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	10	20.646.752	4	628.601.242	2	471.219.745	0	74.134.200	1	86.614.420					1	160.748.620	4,00	789.349.862	**0,40**	**38,23**
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**12,69**	**28,34**
Predikat Kinerja																					**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2025 Triwulan II hasil interprestasi adalah sebagai berikut :

1. Total persentase realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 22,56 %, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 141.130.207.604 (Seratus empat puluh satu milyar seratus tiga puluh juta dua ratus tujuh ribu enam ratus empat rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 527.761.851.556 (Lima ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) atau sebesar 27%.
2. Rata-rata capaian kinerja Program pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser sebesar 19,66% dengan predikat kinerja sangat rendah.
3. Rata-rata capaian kinerja Kegiatan pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser sebesar 13,70% dengan predikat kinerja sangat rendah.
4. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser sebesar 24% dengan predikat kinerja sangat rendah.
5. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 0 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 8 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 3 indikator capaian kinerja 0%-50% = 44 indikator.
6. Pada capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota realisasi dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan capaian realisasi adalah 0 dari target 74%, Realisasi Belum Mencapai Target karena Perhitungan Baru Akan dihitung pada Akhir Triwulan Ke 4.
7. Pada capaian Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator Persentase penurunan temuan administratif atas laporan keuangan pemerintah daerah capaian realisasi adalah 0 dari target 10%, Realisasi Belum Mencapai Target karena Perhitungan Komulaitf Baru Akan dihitung pada Akhir Triwulan Ke 4.
8. Pada capaian Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator Persentase permasalahan pengelolaan barang milik daerah

selesai ditindaklanjuti capaian realisasi adalah 0 dari target 60%, Realisasi Belum Mencapai Target karena masih dalam koordinasi dengan OPD penanggung jawab hasil temuan

9. Pada capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupatenrealisasi capaian adalah 0 dari target 74, Realisasi Belum Mencapai Target karena Dikarenkan Hasil Nilai Evaluasi SAKIP baru dikeluarkan Pada Triwulan Ke 3.
10. Pada capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Indikator Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah realisasi capaian adalah 0 dari target 74, Realisasi Belum Mencapai Target karena Perhitungan Baru Akan dihitung pada Akhir Triwulan Ke 4.
11. Pada capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Indikator Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah realisasi capaian adalah 0 dari target 74, Realisasi Belum Mencapai Target karena Perhitungan Baru Akan dihitung pada Akhir Triwulan Ke 4.
12. Pada capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi realisasi capaian adalah 0 dari target 100, Realisasi Belum Mencapai Target karena Perhitungan Baru Akan dihitung secara Komulatif pada Akhir Triwulan Ke 4.
13. Pada capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Persentase pemeliharaan BMD realisasi capaian adalah 0 dari target 47, Realisasi Belum Mencapai Target karena Perhitungan Baru Akan dihitung secara Komulatif pada Akhir Triwulan Ke 4.
14. Pada capaian Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan Indikator Jumlah dokumen anggaran yang disusun tepat waktu realisasi capaian adalah 0 dari target 6 dokumen, Realisasi Belum Mencapai Target karena dalam penyusunan dokumen belum masuk

tahapan penyusunan sesuai dengan Tahapan permendagri no 77 tahun 2020 dan Permendagri no 15 tahun 2024

15. Pada capaian Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan Indikator Persentase Jumlah Pengajuan SPM yang sesuai ketentuan realisasi capaian adalah 19,10% dari target 100%, Realisasi Belum Mencapai Target karena proses pengajuan SPM yang masuk masih terus dalam proses sampai dengan akhir triwulan 4.
16. Pada capaian Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan Indikator Dokumen Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD realisasi capaian adalah 2 dokumen dari target 2 dokumen, Realisasi sudah Mencapai Target karena sesuai dengan PP No 12 tahun 2019.
17. Pada capaian Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah realisasi capaian adalah 0 dokumen dari target 1 dokumen, Realisasi belum Mencapai Target karena Karena capaian kinerja baru dihitung hingga triwulan ke 4
18. Pada capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan BMD realisasi capaian adalah 0 Dokumen dari target 42 dokumen, Realisasi Belum Mencapai Target karena masih dalam proses pertriwulan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser, maka Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Kepala badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi

   dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Keuangan dan Aset Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

a. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis Badan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja.
b. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Badan berdasarkan rencana strategis Badan sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran.
c. Pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
d. Pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Badan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Badan
e. Penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi
f. Perumusan kebijakan di Bidang Keuangan dan Aset Daerah
g. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Keuangan dan Aset Daerah
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan dan Aset Daerah
i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Badan guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
k. Pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku
l. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Badan
m. Pembinaan Jabatan Fungsional pada Badan sesuai dengan kewenangan yang diberikan
n. Pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan Jabatan Fungsional dan pelaksana pada Badan
o. Pengendalian pelaksanaan tugas UPTD

p. Penyelengaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang Keuangan dan Aset Daerah
q. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi
r. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan daerah; dan
s. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser adalah melaksanakan pengoordinasian di bidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang meliputi anggaran. Perbendaharaan akuntansi dan pelaporan serta pengelolaan barang Milik Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kreteria yang ditetapkan pemerintah dengan kinerja pelayanan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.

Upaya Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah
2. Meningkatnya kualitas tata kelola aset Daerah
3. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel.

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Opini BPK terhadap LKPD			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Persentase Dokumen Anggaran yang di susun tepat waktu sesuai ketentuan perundangan			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase SP2D Perangkat Daerah yang diterbitkan tepat waktu sesuai ketentuan perundangan			100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu sesuai ketentuan perundangan			100	100	100	100	87,41	100	100	100	
5	Persentase Penyajian Laporan BMD tepat waktu sesuai sesuai ketentuan perundangan			100	100	100	100	92,85	100	100	100	
7	Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP			74	74	74	74	72,25	74,44	74	74	
8	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan		√	-	-	-	-	11,42	12,69	-	-	
9	Assets Management Kabupaten Paser Tahun 2024		√	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	opini laporan keuangan kabupaten paser 10 tahun terakhir		√	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola keuangan dan aset daerah memiliki 1 indikator kinerja yaitu “ Opini BPK terhadap LKPD belum mencapai target, dimana target yang ditetapkan adalah WTP dengan realisasinya WTP.
b. Sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah memiliki 3 indikator kinerja yaitu :
    1. Persentase Dokumen Anggaran yang disusun tepat waktu sesuai ketentuan perundangan belum mencapai target. Dimana realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100 % dengan capaian kinerja sebesar 0 % dikarenakan saat sekarang ini masih dalam proses penyusunan KUA DAN PPAS tahapan penyusunan APBD.
    2. Persentase SP2D perangkat daerah yang diterbitkan tepat waktu sesuai ketentuan perundangan belum mencapat target dimana realisasinya sampai dengan bulan Maret sebesar 8,80% dari target sebesar 100 % dengan capaian kinerja sebesar 8,80%.
    3. Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu sesuai ketentuan perundangan belum mencapai target, dimana realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 0%
c. Meningkatnya kualitas tata kelola aset daerah memiliki 1 indikator, yaitu persentase penyajian laporan BMD tepat waktu sesuai ketentuan perundangan belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 100% dan target sebesar 100 dengan capaian kinerja sebesar 0 %
d. Sasaran Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel memiliki 1 indikator yaitu Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP dari target nilai 76 dengan capaian 0

2.3. Faktor Pendorong dan Penghambat dan Solusi Permasalahan dalam pelaksanaan hasil renja PD tahun 2025.

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih

di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser Periode Maret 2025 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Belum optimalnya proses belanja modal karena belum menggunakan E-Katalog versi 6.
2. Belum optimalnya penyerapan anggaran belanja tidak terduga dikarenakan tidak terjadi kondisi darurat mendesak sepanjang tahun 2025.
3. Belum optimalnya penyerapan anggaran Bantuan Keuangan dikarenakan desa-desa masih melakukan proses verifikasi dikecamatan.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut maka diusulkan beberapa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan proritas tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Koordinasi dengan Penyedia Barang untuk menggunakan E-Katalog versi 6
2. Peningkatan Koordinasi evaluasi untuk mencari hambatan dalam penyerapan dana

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan

Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2025.

Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah no 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Paser nomor 26 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Anggaran.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah tidak bersentuhan dalam hal pelayanan langsung terhadap masyarakat, hal ini di duga menyebabkan selama pelaksanaan musrenbang, tidak ada usulan masyarakat yang berkaitan langsung dengan program kegiatan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser.

Meskipun demikian dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Keuangan dan Aset Daerah diupayakan untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. **Penelaah usulan program dan kegiatan masyarakat**

Penelaah usulan program dan kegiatan masyarakat adalah pejabat atau pegawai yang bertugas memeriksa, menilai, mengklarifikasi, dan memverifikasi usulan-usulan program dan kegiatan yang diajukan oleh

masyarakat melalui berbagai forum partisipasi publik, dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Paser tidak melakukan telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat.

Tabel 2.3. Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Nama Perangakat Daerah: BKAD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Tidak ada			

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025
Meningkatnya Kwalitas Tata Kelola keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP
Meningkatnya Kwalitas tata Kelola Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Anggaran yang di susun tepat waktu sesuai ketentuan perundangan	∑ Jumlah Dokumen Anggaran disusun tepat waktu/ Jumlah Dokumen Anggaran x 100	100	100
	Persentase SP2D Perangkat Daerah yang diterbitkan tepat waktu sesuai ketentuan perundangan	∑ SP2D yang telah diterbitkan tepat waktu/ ∑ Jumlah Seluruh SP2d Yang Diterbitkan x 100	100	100
	Persentase Laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu sesuai ketentuan perundangan	∑ PD yang menyusun Laporan Keuangan Tepat Waktu/ ∑ Keseluruhan Perangkat Daerah x 100	100	100
Meningkatnya kualitas tata kelola aset daerah	Persentase Penyajian Laporan BMD tepat waktu sesuai ketentuan perundangan	∑ PD yang menyampaikan Laporan BMD Tepat Waktu/ ∑ Keseluruhan Perangkat Daerahx 100	100	100
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja organisasi yang akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP	Hasil Evaluasi Sakip Dari APIP Tahun Sebelumnya	100	100

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD 2025

Sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2025 yaitu "PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN UNTUK KABUPATEN PASER YANG SEJAHTERA" Tema ini kemudian dijabarkan ke dalam 4 (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Merata, Peningkatan Kualitas Hidup Anak, Perempuan serta Pemuda.
2. Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal.
3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik.
4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan

penanggulangan Bencana

8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser mendukung pencapaian sasaran ke sasaran ke-3 Yaitu.” Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah”

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Paser telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Review terhadap rancangan perubahan RKPD tahun 2025 BKAD Kab. Paser

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	BKAD										
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dibidang Keuangan										
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab Paser	Tingkat kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	80%	76.877.726.380	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab Paser	Tingkat kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	80%	76.877.726.380	
A.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Paser	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	*74*	389.995.122	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Paser	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	*74*	389.995.122	
A1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	349.027.812	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	349.027.812	
A1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab Paser	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	36.364.340	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab Paser	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	36.364.340	
A1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	4.602.970	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	4.602.970	
A2	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Kab Paser*	*Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*80*	73.648.947.154	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Kab Paser*	*Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*80*	73.648.947.154	

A2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 orang/bulan	73.030.521.554	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 orang/bulan	73.030.521.554	
A2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab Paser	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dokumen	384.757.600	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab Paser	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dokumen	384.757.600	
A2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	88.052.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	88.052.000	
A2.4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab Paser	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 dokumen	84.026.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab Paser	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 dokumen	84.026.000	
A2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	61.590.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	61.590.000	
A3	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kab Paser*	*Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*80*	1.999.291.404	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kab Paser*	*Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*80*	1.999.291.404	
A3.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000	
A3.2	Penyediaan Peralatan dan	Kab Paser	Jumlah Paket Peralatan dan	7 Paket	645.509.714	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	7 Paket	645.509.714	

	Perlengkapan Kantor		Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Kantor		Disediakan			
A3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Disediakan	Kab Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	528.221.062	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Disediakan	Kab Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	528.221.062	
A3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Paser	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	141.797.118	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Paser	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	141.797.118	
A3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab Paser	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang diadakan	720 Dokumen	1.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Paser	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang diadakan	720 Dokumen	1.800.000	
A3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	363.133.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	363.133.000	
A3.7	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kab Paser	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14 Dokumen	169.997.295	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kab Paser	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14 Dokumen	169.997.295	
A3.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	800 dokumen	. 46.338.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	800 dokumen	. 46.338.000	
A.4	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kab Paser*	*Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi*	*100 %*	326.221.192	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kab Paser*	*Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi*	*100 %*	326.221.192	
A4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 laporan	1.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Paser	Jumlah Laporan enyediaan Jasa Surat Menyurat	60 laporan	1.200.000	
A4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	325.021.192	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	325.021.192	

A5	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Kab Paser	*Persentase Pemeliharaan BMD*	*50 %*	513.271.508	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kab Paser*	*Persentase Pemeliharaan BMD*	*50 %*	513.271.508	
A5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.480.508	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.480.508	
A5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	8.150.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	8.150.000	
A5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	15 Unit	480.641.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	15 Unit	480.641.000	
B	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Paser	Prosentase penurunan temuan Administratif atas laporan keuangan	10 %	466.345.135.848	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Paser	Prosentase penurunan temuan Administratif atas laporan keuangan	10 %	466.345.135.848	
B1	*Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah*	*Kab Paser*	*Jumlah Dokumen Anggaran yang disusun tepat waktu*	*6 Dokumen*	3.317.027.700	*koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah*	*Kab Paser*	*Jumlah Dokumen Anggaran yang disusun tepat waktu*	*6 Dokumen*	3.317.027.700	
B1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab Paser	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	292.005.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab Paser	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	292.005.000	
B1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab Paser	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	174.895.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab Paser	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	174.895.000	
B1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab Paser	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	42 dokumen	245.905.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab Paser	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	42 dokumen	245.905.000	
B1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab Paser	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	42 dokumen	134.185.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Kab Paser	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	42 dokumen	134.185.000	

B1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab Paser	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	1.809.116.350	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab Paser	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	1.809.116.350	
B1.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab Paser	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	634.051.350,	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab Paser	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	634.051.350,	
B1.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab Paser	Jumlah Dokumen Regulasi serta bijakan Bidang Anggaran	2 dokumen	26.870.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab Paser	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 dokumen	26.870.000	
B1 .10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	-	-	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	-	-	
B1 .11	koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	-	-	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	-	-	
B1 .12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	-	-	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	-	-	
B2	*Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*	Kab Paser	*Persentase Jumlah Pengajuan SPM yang sesuai ketentuan*	*100 %*	1.995.993.484,	*Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*	*Kab Paser*	*Persentase Jumlah Pengajuan SPM yang sesuai ketentuan*	*100 %*	1.995.993.484,	
B2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 dokumen	361.372.100	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 dokumen	361.372.100	

B2.2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 dokumen	250.214.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 dokumen	250.214.000	
B2.3	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 dokumen	163.684.240	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 dokumen	163.684.240	
B2.4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	504 dokumen	539.102.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	504 dokumen	539.102.000	
B2.5	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab Paser	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 dokumen	230.165.432	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Sub Kegiatan	Kab Paser	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 dokumen	230.165.432	
B2.6	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	42 orang	451.455.712	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	Kab Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	42 orang	451.455.712	

			Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota					
B3	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*	Kab Paser	*Dokumen Perda dan Perbub Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD*	*2 dokumen*	1.577.791.461	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*	*Kab Paser*	*Dokumen Perda dan Perbub Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD*	*2 dokumen*	1.577.791.461	
B3.1	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab Paser	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	254.352.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab Paser	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	254.352.000	
B3.2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 laporan	455.071.352	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 laporan	455.071.352	
B3.3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab Paser	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 dokumen	614.419.109	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab Paser	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 dokumen	614.419.109	
B3.4	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	224.274.000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab Paser	Jumlah dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	224.274.000	
B3.5	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten / Kota	Kab Paser	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	21 Lembaga	29.675.000,	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten / Kota	Kab Paser	Jumlah BLUD Kabupaten/ Kota yang Dibina	21 Lembaga	29.675.000,	

B4	*Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah*	Kab Paser	*Jumlah Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah*	*1 dokumen*	459.454.323.203	*Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah*	*Kab Paser*	*Jumlah Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah*	*1 dokumen*	459.454.323.203	
B4.1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 laporan	444.543.856.003	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 laporan	444.543.856.003	
B4.2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	10.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	10.000.000.000	
B4.3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 laporan	4.910.467.200,	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 laporan	4.910.467.200,	
C	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Persentase Permasalahan Pengelolaan Barang Milik Daerah selesai ditindaklanjuti	65 %	5.804.579.614	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Persentase Permasalahan Pengelolaan Barang Milik Daerah selesai ditindaklanjuti	65 %	5.804.579.614	
C1	*Pengelolaan Barang Milik Daerah*	*Kab Paser*	*Jumlah dokumen Laporan Pengelolaan BMD*	*42 dokumen*	5.804.579.614	*Pengelolaan Barang Milik Daerah*	*Kab Paser*	*Jumlah dokumen Laporan Pengelolaan BMD*	*42 dokumen*	5.804.579.614	
C1.1	Penyusunan Standar Harga	Kab Paser	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	523.782.676	Penyusunan Standar Harga	Kab Paser	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	523.782.676	
C1.2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	6.750.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	6.750.000	
C1.3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	355.973.770	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	355.973.770	
C1.4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 laporan	32.160.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 laporan	32.160.000	
C1.5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 laporan	166.838.200	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 laporan	166.838.200	

C1.6	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 laporan	718.284.244	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 laporan	718.284.244	
C1.7	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 laporan	95.194.000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 laporan	95.194.000	
C1.8	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	312.584.500	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	312.584.500	
C1.9	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 dokumen	2.889.993.079	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 dokumen	2.889.993.079	
C1 .10	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	144.312.000	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	144.312.000	
C1 .11	Peyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 laporan	558.707.145	Peyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab Paser	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 laporan	558.707.145	

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Rencana program dan kegiatan perubahan rencana kerja PD tahun 2025

KODE	KEUANGAN	U R A I A N		SEBELUM	SESUDAH SIPD	BERKURANG/ BERTAMBAH SIPD
				527.761.851.556	527.313.445.530	**- 448.406.026**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	80%	55.520.734.736	**76.877.726.380**	**34.184.869.830**
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	74	395.851.600	389.995.122	-5.856.478,
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	343.777.600	349.027.812	5.250.212
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	47.446.000,	36.364.340	-11.081.660
5.02.001.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	4.628.000	4.602.970	-25.030
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80%	52.942.851.119	73.648.947.154	20.706.096.035
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang / bulan	52.345.715.679	73.030.521.554	20.684.805.875
5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dokumen	383.341.440	384.757.600	1.416.160
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	82.050.000	88.052.000	6.002.000
5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 dokumen	81.303.000	84.026.000	2.723.000

5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	50.441.000	61.590.000	11.149.000
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80%	1.582.357.423	1.999.291.404	416.933.981
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000	9.997.835	-2.165
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	407.668.150	645.509.714	237.841.564
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	357.349.919	528.221.062	170.871.143
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	121.098.054	141.797.118	20.699.064
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang diadakan	720 Dokumen	1.800.000	1.800.000	0
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	375.000.000	363.133.000	-11.867.000
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	800 Dokumen	170.002.900	169.997.295	-5.605
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14 Dokumen	139.438.400	138.835.380	-603.020
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100%	325.821.660	326.221.192	399.532
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	800.000	1.200.000	400.000
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	325.021.660	325.021.192	-468
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD	50%	273.852.934	513.271.508,00	- 239.418.574
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.517.434	24.480.508	-36.926

5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	8.185.000	8.150.000	-35.000
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	15 Unit	241.150.500	480.641.000	239.490.500
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Prosentase penurunan temuan Administratif atas laporan keuangan	10%	**466.152.432.820**	**466.345.135.848**	**192.703.028**
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran yang disusun tepat waktu	6 Dokumen	3.600.360.600	3.317.027.700	-283.332.900
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	302.190.000	292.005.000	-10.185.000
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	186.080.000	174.895.000	- 11.185.000
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	42 Dokumen	268.370.000	245.905.000	-22.465.000
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	42 dokumen	156.650.000	134.185.000	-22.465.000
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	1.978.220.600	1.809.116.350	- 169.104.250
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	655.110.000	634.051.350	-21.058.650
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 dokumen	53.740.000	26.870.000	- 26.870.000
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	25 Dokumen	-	-	
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	42 Dokumen	-	-	
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	-	-	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Jumlah Pengajuan SPM yang sesuai ketentuan	100%	1.878.949.400	1.995.993.484	- 117.044.084
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen	281.716.000	361.372.100	79.656.100
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana	6 Dokumen	254.232.000	250.214.000	- 4.018.000

		Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 Dokumen	164.444.000	163.684.240	-759.760,00
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	504 Dokumen	497.740.000	539.102.000	41.362.000
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	229.360.900	230.165.432	804.532
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	42 Orang	451.456.500	451.455.712	- 788
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Dokumen Perda dan Perbub Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 dokumen	1.699.009.120	1.577.791.461	- 121.217.659
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	265.766.600	254.352.000	-11.414.600
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	408.723.420	455.071.352	- 46.347.932
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 dokumen	710.516.600	614.419.109	-96.097.491
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	265.799.800	224.274.000	-41.525.800
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	21 lembaga	48.202.700	29.675.000	-18.527.700
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 dokumen	458.974.113.700	459.454.323.203	480.209.503

5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	444.063.646.500	444.543.856.003	480.209.503
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	10.000.000.000	10.000.000.000	0
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	4.910.467.200,	4.910.467.200	0
5.02.03	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase Permasalahan Pengelolaan Barang Milik Daerah selesai ditindaklanjuti	65%	6.088.684.000	5.804.579.614	-284.104.386
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Laporan Pengelolaan BMD	42 Dokumen	6.088.684.000	5.804.579.614	-284.104.386
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	423.272.000	523.782.676	100.510.676
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	18.400.000	6.750.000	-11.650.000
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	266.100.000	355.973.770	89.873.770
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	60.000.000	32.160.000	-27.840.000
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	282.577.000	166.838.200	- 115.738.800
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	766.617.000	718.284.244	-48.332.756
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	98.616.000	95.194.000	-3.422.000
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	386.374.000	312.584.500	-73.789.500
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	2.976.764.000	2.889.993.079	339.194.919
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	157.686.000	144.312.000	-13.374.000
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	652.278.000	558.707.145	-93.570.855

3.2.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Paser terpilih periode 2021-2024 yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser, adalah:

"Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera"

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan tata kelola permerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan
3. Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Untuk mewujudkan visi dan kelima misi tersebut dirumuskan tujuh tujuan dengan 12 sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.4

Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 Kabupaten Paser

TUJUAN		SASARAN
1	Mening.katkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing.	Sasaran 1.1. Meningkatnya *multiplier effect* sektor pertanian
		Sasaran 1.2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
2	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas**	**Sasaran 2.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah**
		Sasaran 2.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		Sasaran 2.3. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
3	Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, kualitas	Sasaran 3.1. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur

TUJUAN		SASARAN
	pemukiman dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Sasaran 3.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
4	Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata	Sasaran 4.1. Meningkatnya kualitas Pendidikan
		Sasaran 4.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Sasaran 4.3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati serta rumusan tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan dalam melaksanakan misi ke-2 (dua) yaitu "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan", pada tujuan ke-2 (dua), "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas", dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya akuntabiltas kinerja pemerintah.

Tabel 3.5.

Matrik Kontribusi Perangkat Daerah Terhadap Asta Cita dalam RPJMN 2025-2029

No	ASTA CITA	URUSAN	SUBKEGIATAN
1	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
			Penatausahaan Pembiayaan Daerah
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
			Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
			Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Penyusunan Standar Harga
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
			Penilaian Barang Milik Daerah
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan , Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
			Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Penatausahaan Barang Milik Daerah
			Inventarisasi Barang Milik Daerah
			Pengamanan Barang Milik Daerah
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.2. Catatan Strategis

Dalam pelaksanaan renja 2026, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut :

1. Pentingnya Penyesuaian Terhadap Dinamika Ekonomi dan Politik, RENJA Perubahan 2025 BKAD harus mampu mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi dalam tataran ekonomi dan politik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Penyusunan anggaran yang lebih responsif terhadap perubahan ini akan meningkatkan daya adaptasi BKAD dalam menjalankan program kerja yang mendukung pembangunan daerah secara optimal.
2. Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka pelaksanaan program dan kegiatan BKAD perlu menekankan pada skala prioritas yang paling strategis dan mendesak sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
3. Target kinerja pada indikator dan kegiatan yang direncanakan dapat disesuaikan secara proporsional dengan ketersediaan anggaran, agar tidak menimbulkan deviasi yang signifikan antara perencanaan dan realisasi.
4. Perlu disiapkan langkah-langkah mitigasi risiko atas kemungkinan terhambatnya pelaksanaan kegiatan akibat keterbatasan anggaran, sehingga pelayanan publik tetap terjamin dengan standar minimum yang telah ditetapkan.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Tana Paser, 31 Juli 2025
Kepala Badan,

Nur Asni, SE, MM
Pembina TK I
NIP 197212151998032008

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PASER

PERUBAHAN RENJA 2025



CREATED BY:
BKPSDM KABUPATEN PASER

Jl. R.M. Noto Soenardi, Tana Paser Kab. Paser
0543 - 22696, 21072
bkpsdm.kab.paser@gmail.com
www.kepegawaian.paserkab@gmail.com

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PASER

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Alah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta hidayah-Nya kami dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja ini memuat target tujuan, sasaran, program serta strategi impelementasi yang ditetapkan untuk dapat direalisasikan. Perubahan Renja ini diharapkan dapat dijadikan Pedoman Pelaksanaan tugas bagi seluruh ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operaisonalnya memiliki nilai kinerja yang mengarah pada tercapainya sasaran dan tujuan yang ditetapkan.
Kami sadar bahwa dalam dokumen ini masih terdapat kekurangan sehingga atas segala saran dan kritik masukannya dari semua pihak kami ucapkan terimakasih

Demikian Perubahan Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2025 ini dibuat, semoga dapat memberikan arah bagi kelancaran tugas dan peningkatan kinerja aparat.

Tana Paser, 22 Agustus 2025
Kepala Badan,

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Drs. Suwito
Pembina Utama Muda
NIP. 19650808 199203 1 019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II (dua) Tahun 2025 7

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 16

2.3. Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024 24

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran 29

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 34

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 41

3.4. Pendanaan 43

BAB IV PENUTUP

4.1. Catatan Penting 55

4.2. Kaidah Pelaksanaan 56

4.3. Rencana tindak lanjut 57

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendasari ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sesungguhnya Rencana Kerja (Renja) merupakan cerminan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan stakeholders terhadap masyarakat. Rencana Kerja Perubahan menjadi salah satu langkah untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah untuk integrasi dan optimalisasi sumber daya manusia serta sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Rencana Kerja Perubahan akan menjadi acuan dasar perencanaan, implementasi dan pemantauan gerak langkah pembangunan yang akan menjadi alat pemersatu hati dan gerak laju ke depan, serta menjadi alat koordinasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah dan satuan terkait.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang mengacu pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih pada tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 yaitu :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;

15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Negara;
16. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025;
21. Peraturan Bupati Paser Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Paser;
22. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser;
23. Surat Edaran Bupati Paser Nomor 000.7.2.4/II/P2EP-Bapplitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah untuk menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran dan target kinerjanya sebagai akibat dari adanya perubahan asumsi kondisi daerah dan monitoring yang telah dilakukan sampai dengan triwulan I (satu) Tahun 2025.

1.3.2.Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah untuk:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, proses penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, keterkaita antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2025

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2025 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3. Faktor Pendorong, penghambat dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2025 yang disertai perubahan target.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan.

BAB IV PENUTUP

Memuat catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II (dua) Tahun 2025

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah merupakan bagian penting dalam siklus manajemen kinerja, yang bertujuan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara efektif dan efisien. Evaluasi ini dilaksanakan secara periodik, khususnya pada akhir tahun anggaran, sebagai dasar untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam proses evaluasi ini, dilakukan penilaian terhadap kesesuaian antara rencana dan realisasi pelaksanaan program/kegiatan, baik dari sisi fisik maupun keuangan. Selain itu, dilakukan pula analisis terhadap pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, guna mengetahui capaian output dan outcome dari setiap kegiatan. Evaluasi Renja juga menjadi instrumen untuk mengidentifikasi berbagai kendala, tantangan, serta faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil dari evaluasi ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan, yang akan sangat berguna dalam merumuskan rencana kerja tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik.

Melalui Evaluasi Renja, perangkat daerah dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, sejalan dengan prinsip transparansi dan efisiensi pengelolaan sumber daya. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dilakukan sebagai bentuk pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja dan serapan anggaran pada pertengahan tahun anggaran, serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang mungkin menghambat pencapaian target hingga akhir tahun.

Sampai dengan Triwulan II, sebagian besar program dan kegiatan telah mulai dilaksanakan, meskipun terdapat beberapa kegiatan yang masih dalam tahap persiapan administrasi maupun proses pengadaan. Realisasi anggaran dan kinerja fisik menunjukkan tren progresif, namun belum merata pada seluruh unit kerja atau bidang. Beberapa indikator kinerja telah menunjukkan capaian yang cukup baik, terutama pada kegiatan rutin dan pelayanan dasar. Namun, masih terdapat gap antara target dan realisasi pada beberapa kegiatan

prioritas, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterlambatan proses administrasi, dinamika kebijakan, serta kendala teknis di lapangan.

Dari sisi anggaran, realisasi belanja sampai dengan akhir Juni 2025 tercatat sebesar Rp5.027.356.248,00 atau 28,41% dari total pagu anggaran Rp17.696.880.052,00. Dengan realisasi fisik capaian kinerja program 64,83, capaian kinerja kegiatan 63,24 dan capaian kinerja sub kegiatan 55,05. Capaian ini masih memerlukan akselerasi pada Triwulan III dan IV untuk memastikan target tahunan dapat tercapai sesuai perencanaan.

Hasil evaluasi ini menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan strategis pada semester kedua, termasuk dalam penyesuaian rencana kerja, percepatan pelaksanaan kegiatan, serta perbaikan tata kelola pelaksanaan program. Diharapkan dengan langkah tindak lanjut yang tepat, kinerja perangkat daerah pada akhir tahun dapat mencapai target yang telah ditetapkan secara optimal Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja program dan kegiatan. Termasuk di dalamnya adalah:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau bahkan melebihinya target kinerja yang telah direncanakan, baik yang bersifat internal (seperti kendala sumber daya, proses administrasi) maupun eksternal (seperti perubahan kebijakan).
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang dapat berupa perlambatan atau percepatan pencapaian sasaran strategis.
3. Kebijakan dan tindakan korektif yang perlu segera diambil dalam aspek perencanaan dan penganggaran, guna mengatasi hambatan serta memperkuat pelaksanaan kegiatan yang berjalan baik.
4. Pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar dalam proses penyesuaian atau perubahan Rencana Kerja dan pendanaan Tahun 2025, dengan tetap mengacu pada mekanisme pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Dengan dilaksanakannya evaluasi secara komprehensif dan tepat waktu, diharapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser dapat melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta mendorong pencapaian target kinerja secara optimal sesuai prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun hasil evaluasi Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II (Dua) Tahun 2025
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				-	72,242,530,984.06	-	64,439,327,520.00	-	17,696,880,052.00	-	2,236,918,588.00	-	2,790,437,660.00	-	5,027,356,248.00	-	69,466,683,768.00	-	-	-
A.	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Indeks**	**75.00**	**4,364,680,068.14**	**71.51**	**25,045,239,222.00**	**71.51**	**9,998,389,602.00**	**71.51**	**1,659,116,267.00**	**71.51**	**2,113,671,960.00**	**71.51**	**3,772,788,227.00**	**143.02**	**28,818,027,449.00**	**190.69**	**660.26**	**Sekretariat**
		PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**Indeks**	**80.00**	**4,364,680,068.14**	**82.81**	**25,045,239,222.00**	**77.00**	**9,998,389,602.00**	**87.86**	**1,659,116,267.00**	**87.86**	**2,113,671,960.00**	**87.86**	**3,772,788,227.00**	**170.67**	**28,818,027,449.00**	**213.34**	**660.26**	**Sekretariat**
		Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu**	**Persen**	**100.00**	**1,145,679,650.00**	**93.10**	**840,798,523.00**	**100.00**	**157,577,646.00**	**70.59**	**12,600,000.00**	**35.29**	**14,140,800.00**	**105.88**	**26,740,800.00**	**198.98**	**867,539,323.00**	**198.98**	**75.72**	**Sekretariat**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	14.00	365,052,000.00	14.00	422,438,085.00	5.00	92,820,646.00	7.00	2,250,000.00	3.00	-	10.00	2,250,000.00	24.00	424,688,085.00	171.43	116.34	Sekretariat
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	29.00	580,627,650.00	29.00	418,360,438.00	12.00	64,757,000.00	5.00	10,350,000.00	3.00	14,140,800.00	8.00	24,490,800.00	37.00	442,851,238.00	127.59	76.27	Sekretariat
		Administasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Indeks**	**80.00**	**957,929,481.60**	**83.84**	**17,204,314,354.00**	**85.00**	**9,225,323,504.00**	**84.94**	**1,579,867,899.00**	**84.78**	**2,088,740,348.00**	**84.86**	**3,668,608,247.00**	**168.70**	**20,872,922,601.00**	**210.87**	**2,178.96**	**Sekretariat**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	155.00	27,337,074,835.86	101.00	16,585,480,815.00	576.00	9,108,695,704.00	108.00	1,565,665,499.00	150.00	2,080,416,648.00	258.00	3,646,082,147.00	359.00	20,231,562,962.00	231.61	74.01	Sekretariat
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1,000.00	957,929,481.60	965.00	618,833,539.00	180.00	116,627,800.00	64.00	14,202,400.00	65.00	8,323,700.00	129.00	22,526,100.00	1,094.00	641,359,639.00	109.40	66.95	Sekretariat
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Indeks**	**80.00**	**40,000,000.00**	**81.96**	**64,092,701.00**	**85.00**	**7,500,000.00**	**-**	**4,840,000.00**	**-**	**-**	**-**	**4,840,000.00**	**81.96**	**68,932,701.00**	**102.45**	**172.33**	**Sekretariat**
		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	300.00	40,000,000.00	110.00	64,092,701.00	60.00	7,500,000.00	-	4,840,000.00	-	-	-	4,840,000.00	110.00	68,932,701.00	36.67	172.33	Sekretariat
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Indeks**	**80.00**	**1,316,816,678.04**	**80.02**	**3,003,422,112.00**	**85.00**	**312,507,224.00**	**87.33**	**52,608,368.00**	**87.33**	**8,490,812.00**	**87.33**	**61,099,180.00**	**167.35**	**3,064,521,292.00**	**209.18**	**232.72**	**Sekretariat**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	29.00	8,302,440.00	12.00	945,367,176.00	4.00	10,024,518.00	-	-	-	-	-	-	12.00	945,367,176.00	-	-	Sekretariat
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	42.00	84,920,000.00	21.00	602,478,300.00	2.00	26,080,791.00	-	-	-	-	-	-	21.00	602,478,300.00	50.00	709.47	Sekretariat
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	230.00	200,008,050.00	139.00	334,969,578.00	4.00	36,392,487.00	-	-	3.00	-	3.00	-	142.00	334,969,578.00	61.74	167.48	Sekretariat
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	50.00	38,022,200.00	26.00	51,141,095.00	7.00	5,616,428.00	-	-	1.00	-	1.00	-	27.00	51,141,095.00	54.00	134.50	Sekretariat
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	10.00	22,968,000.00	16.00	10,800,000.00	2.00	3,798,000.00	-	-	-	-	-	-	16.00	10,800,000.00	160.00	47.02	Sekretariat
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	213.00	681,335,482.04	152.00	620,151,124.00	50.00	115,068,000.00	2.00	24,608,368.00	4.00	8,490,812.00	6.00	33,099,180.00	158.00	653,250,304.00	74.18	95.88	Sekretariat
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	5.00	289,562,946.00	3.00	438,514,839.00	1.00	115,527,000.00	-	28,000,000.00	-	-	-	28,000,000.00	3.00	466,514,839.00	60.00	161.11	Sekretariat

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100.00**	**288,801,797.50**	**95.00**	**3,182,861,665.00**	**100.00**	**47,859,031.00**	**100.00**	**-**	**100.00**	**-**	**100.00**	**-**	**195.00**	**3,182,861,665.00**	**195.00**	**1,102.09**	**Sekretariat**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	29.00	39,217,397.50	204.00	514,468,855.00	9.00	21,333,688.00	-	-	-	-	-	-	204.00	514,468,855.00	703.45	1,311.84	Sekretariat
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	31.00	249,584,400.00	255.00	2,668,392,810.00	3.00	26,525,343.00	-	-	1.00	-	1.00	-	256.00	2,668,392,810.00	825.81	1,069.13	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100.00**	**7,727,500.00**	**100.00**	**21,107,230.00**	**100.00**	**12,249,250.00**	**100.00**	**-**	**100.00**	**-**	**100.00**	**-**	**100.00**	**21,107,230.00**	**100.00**	**273.14**	**Sekretariat**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	45.00	2,282,500.00	20.00	816,430.00	10.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	20.00	816,430.00	44.44	35.77	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	53.00	5,445,000.00	36.00	20,290,800.00	12.00	11,749,250.00	-	-	-	-	-	-	36.00	20,290,800.00	67.92	372.65	Sekretariat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100.00**	**607,724,961.00**	**100.00**	**728,642,637.00**	**100.00**	**235,372,947.00**	**100.00**	**9,200,000.00**	**100.00**	**2,300,000.00**	**100.00**	**11,500,000.00**	**100.00**	**740,142,637.00**	**100.00**	**121.79**	**Sekretariat**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	20.00	217,473,001.00	4.00	59,418,912.00	3.00	34,931,792.00	3.00	-	3.00	-	-	-	4.00	59,418,912.00	20.00	27.32	Sekretariat
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	37.00	87,716,000.00	27.00	206,671,750.00	32.00	40,755,000.00	-	-	17.00	-	17.00	-	44.00	206,671,750.00	118.92	235.61	Sekretariat
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5.00	285,455,960.00	3.00	410,166,265.00	1.00	144,866,155.00	1.00	9,200,000.00	1.00	2,300,000.00	-	11,500,000.00	3.00	421,666,265.00	60.00	147.72	Sekretariat
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	40.00	17,080,000.00	18.00	52,385,710.00	19.00	14,820,000.00	-	-	12.00	-	12.00	-	30.00	52,385,710.00	75.00	306.71	Sekretariat
B	**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen ASN**		**Hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit**	**Nilai**	**200.00**		**246.50**		**250.00**		**246.50**		**246.50**		**246.50**		**493.00**		**246.50**		
			Indeks Survei Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	**Indeks**	**80.00**		**81.27**		**82.00**		**86.64**		**86.64**		**86.64**		**167.91**		**209.89**		
			Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (diklat teknis, fungsional dan sosio kultural)	**Persen**	**95.00**	**67,877,850,915.92**	**95.17**	**39,394,088,298.00**	**95.00**	**7,698,490,450.00**	**5.67**	**577,802,321.00**	**-**	**676,765,700.00**	**5.67**	**1,254,568,021.00**	**100.84**	**40,648,656,319.00**	**106.15**	**59.89**	
			Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	**Persen**	**98.00**		**87.03**		**90.00**		**-**		**-**		**-**		**87.03**		**88.80**		
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**Persentase Kesesuaian Jabatan Pegawai Berdasarkan Pendidikan**	**Persen**	**90.00**		**89.63**		**88.00**		**95.36**		**95.38**		**95.38**		**185.01**		**205.57**		
			Persentase ASN Bekerja sesuai Kompetensi dan Kualifikasi di dalam Jabatan	**Persen**	**90.00**	**30,347,072,544.00**	**72.01**	**28,629,679,949.00**	**75.00**	**4,544,558,456.00**	**17.56**	**539,449,585.00**	**27.68**	**443,473,800.00**	**45.24**	**982,923,385.00**	**117.25**	**29,612,603,334.00**	**130.27**	**97.58**	
			Persentase Pegawai Berkinerja Baik	**Persen**	**100.00**		**87.07**		**100.00**		**97.00**		**95.70**		**96.35**		**183.42**		**183.42**		
		Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Persentase Formasi Kebutuhan Pegawai yang Terpenuhi Berdasarkan Jumlah Bezzeting/Formasi yang diusulkan**	**Persen**	**80.00**	**7,791,894,135.00**	**174.11**	**4,425,648,063.00**	**80.00**	**1,063,106,825.00**	**90.73**	**101,668,800.00**	**90.76**	**265,156,850.00**	**90.76**	**366,825,650.00**	**264.86**	**4,792,473,713.00**	**331.08**	**61.51**	**Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase Data Kepegawaian yang ter-update/diremajakan	**Persen**	**90.00**		**95.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**195.00**		**216.67**		**Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	dokumen	15.00	3,487,676,526.00	5.00	2,149,155,864.00	2.00	724,825,323.00	-	45,000,000.00	-	206,030,200.00	-	251,030,200.00	5.00	2,400,186,064.00	33.33	68.82	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
		Koordinasi Pelaksanaan Administasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	dokumen	5.00	372,717,339.00	2.00	406,118,893.00	1.00	39,789,000.00	-	10,930,800.00	-	7,023,600.00	-	17,954,400.00	2.00	424,073,293.00	40.00	113.78	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
		Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	dokumen	5.00	438,585,460.00	2.00	150,902,353.00	1.00	39,904,500.00	-	-	-	6,903,600.00	-	6,903,600.00	2.00	157,805,953.00	40.00	35.98	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	lembaga	5.00	806,718,350.00	3.00	436,207,612.00	1.00	51,226,086.00	1.00	10,795,800.00	1.00	11,933,850.00	1.00	22,729,650.00	4.00	458,937,262.00	80.00	56.89	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	5.00	1,053,872,000.00	2.00	635,461,361.00	1.00	97,052,000.00	-	14,081,400.00	-	26,242,000.00	-	40,323,400.00	2.00	675,784,761.00	40.00	64.12	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	dokumen	5.00	1,242,163,660.00	2.00	491,002,177.00	1.00	93,299,916.00	-	20,860,800.00	-	7,023,600.00	-	27,884,400.00	2.00	518,886,577.00	40.00	41.77	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	laporan	5.00	390,160,800.00	2.00	156,799,803.00	1.00	17,010,000.00	-	-	-	-	-	-	2.00	156,799,803.00	40.00	40.19	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
		Mutasi dan Promosi ASN	**Persentase Penempatan ASN Berdasarkan Kualifikasi Sesuai Syarat Jabatan**	**Persen**	**90.00**	**6,238,561,850.00**	**78.32**	**2,722,938,251.00**	**92.00**	**698,851,650.00**	**19.66**	**33,591,400.00**	**24.45**	**65,021,600.00**	**44.11**	**98,613,000.00**	**122.43**	**2,821,551,251.00**	**136.03**	**45.23**	**Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi ASN**
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	dokumen	2,000.00	700,208,250.00	1,310.00	215,516,900.00	1.00	102,801,650.00	-	1,375,000.00	-	-	-	1,375,000.00	1,310.00	216,891,900.00	65.50	30.98	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi ASN
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	dokumen	4.00	4,711,205,600.00	2,555.00	506,672,296.00	1,000.00	177,378,000.00	197.00	9,600,000.00	245.00	47,024,800.00	442.00	56,624,800.00	2,997.00	563,297,096.00	74,925.00	11.96	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi ASN
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	dokumen	3,200.00	827,148,000.00	3.00	2,000,749,055.00	1.00	418,672,000.00	-	22,616,400.00	-	17,996,800.00	-	40,613,200.00	3.00	2,041,362,255.00	0.09	246.80	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi ASN
		Pengembangan Kompetensi ASN	**Persentase ASN yang Telah Mengikuti**	**Persen**	**90.00**	**12,271,132,059.00**	**87.07**	**18,290,121,671.00**	**92.00**	**2,166,119,981.00**	**15.45**	**298,971,405.00**	**30.91**	**64,194,600.00**	**46.36**	**363,166,005.00**	**133.44**	**18,653,287,676.00**	**148.26**	**152.01**	**Bidang Pengembangan**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Peningkatan Kompetensi sesuai dengan Syarat Kompetensi dalam Jabatan																		**, Mutasi dan Promosi ASN**
		Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	dokumen	4.00	3,700,834,059.00	6.00	1,256,651,692.00	1.00	276,840,981.00	-	-	-	-	-	-	6.00	1,256,651,692.00	150.00	33.96	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi ASN
		Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	dokumen	4.00	5,426,019,400.00	2.00	15,718,600,866.00	1.00	1,194,557,000.00	-	270,319,605.00	-	20,547,800.00	-	290,867,405.00	2.00	16,009,468,271.00	50.00	295.05	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi ASN
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	orang	470.00	2,667,436,600.00	366.00	1,028,099,690.00	8.00	482,474,000.00	2.00	10,543,800.00	1.00	26,188,000.00	3.00	36,731,800.00	369.00	1,064,831,490.00	78.51	39.92	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi ASN
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	orang	250.00	476,842,000.00	719.00	286,769,423.00	50.00	178,040,000.00	9.00	11,052,600.00	22.00	17,458,800.00	31.00	28,511,400.00	750.00	315,280,823.00	300.00	66.12	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi ASN
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	orang	600.00	-	88.46	3,190,971,964.00	50.00	34,208,000.00	6.00	7,055,400.00	11.00	-	17.00	7,055,400.00	105.46	3,198,027,364.00	17.58	#DIV/0!	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi ASN
									110.00												
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Persentase ASN dengan Nilai SKP Baik**	**Persen**	**85.00**	**4,045,484,500.00**	**88.46**	**3,190,971,964.00**	**90.00**	**616,480,000.00**	**97.00**	**105,217,980.00**	**95.70**	**49,100,750.00**	**96.35**	**154,318,730.00**	**184.81**	**3,345,290,694.00**	**217.43**	**82.69**	**Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**
			Persentase ASN yang Mendapatkan Penghargaan (SLKS dan ASN Berprestasi)	**Persen**	**90.00**		**88.46**		**90.00**		**86.25**		**36.33**		**122.58**		**211.04**		**234.49**		**Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**
			Persentase ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kinerja/Disiplin Pegawai	**Persen**	**90.00**		**92.50**		**85.00**		**-**		**70.00**		**70.00**		**162.50**		**180.56**		**Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**
		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	dokumen	5.00	396,168,000.00	3.00	252,524,501.00	1.00	43,594,500.00	-	13,251,680.00	-	-	-	13,251,680.00	3.00	265,776,181.00	60.00	67.09	Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	dokumen	5.00	1,339,967,500.00	3.00	610,961,045.00	1.00	98,078,500.00	-	-	-	37,310,750.00	-	37,310,750.00	3.00	648,271,795.00	60.00	48.38	Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	dokumen	5.00	457,617,000.00	3.00	325,061,344.00	1.00	62,252,000.00	-	-	-	11,790,000.00	-	11,790,000.00	3.00	336,851,344.00	60.00	73.61	Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	orang	6,400.00	580,286,000.00	4,786.00	923,813,505.00	800.00	191,727,000.00	956.00	63,761,100.00	436.00	-	1,392.00	63,761,100.00	6,178.00	987,574,605.00	96.53	170.19	Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	orang	2,000.00	578,660,000.00	687.00	703,702,948.00	400.00	36,617,000.00	79.00	-	-	-	79.00	-	766.00	703,702,948.00	38.30	121.61	Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	laporan	5.00	692,786,000.00	3.00	319,022,238.00	1.00	101,568,500.00	-	18,962,400.00	-	-	-	18,962,400.00	3.00	337,984,638.00	60.00	48.79	Bidang Penilaian dan Evaluasi

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																					Kinerja Aparatur
		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	dokumen	-	-	6.00	14,944,200.00	50.00	24,626,924.00	-	-	1.00	-	1.00	-	7.00	14,944,200.00	-	-	Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	laporan	-	-	1.00	40,942,183.00	1.00	58,015,576.00	-	9,242,800.00	-	-	-	9,242,800.00	1.00	50,184,983.00	-	-	Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi**	**Persen**	**90.00**	**37,530,778,371.92**	**75.63**	**10,764,408,349.00**	**80.00**	**3,153,931,994.00**	**-**	**38,352,736.00**	**-**	**233,291,900.00**	**-**	**271,644,636.00**	**75.63**	**11,036,052,985.00**	**84.03**	**29.41**	**Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi ASN**
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**Persentase Calon ASN dan ASN yang Telah Lulus Memenuhi Diklat Perjenjangan**	**Persen**	**97.00**	**37,530,778,371.92**	**89.54**	**10,764,408,349.00**	**92.00**	**3,153,931,994.00**	**-**	**38,352,736.00**	**-**	**233,291,900.00**	**-**	**271,644,636.00**	**89.54**	**11,036,052,985.00**	**92.31**	**29.41**	**Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi ASN**
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan FungsionalPeningkatan Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan FungsionalPeningkatan Kepemimpinan, dan Prajabatan	laporan	5.00	37,530,778,371.92	3.00	10,764,408,349.00	2.00	3,153,931,994.00	-	38,352,736.00	-	233,291,900.00	-	271,644,636.00	3.00	10,764,408,349.00	60.00	28.68	Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi ASN
						72,242,530,984.06	-	**64,439,327,520.00**	-	**17,696,880,052.00**	-	**2,236,918,588.00**	-	**2,790,437,660.00**	-	**5,027,356,248.00**	-	**69,466,683,768.00**			

Berdasarkan Tabel di atas Realisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

a) Capaian kinerja sub kegiatan (>100%)

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai

b) Capaian kinerja sub kegiatan >70%-100%

1. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

c) Capaian kinerja sub kegiatan >50%-70%

1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN

d) Capaian kinerja sub kegiatan 0%-50%

1. Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
9. Pengadaan Mebel
10. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
14. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
15. Koordinasi Pelaksanaan Administasi Pemberhentian
16. Evaluasi Pemberhentian ASN
17. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
18. Pengelolaan Data Kepegawaian
19. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian

20. Pengelolaan Mutasi ASN
21. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
22. Pengelolaan Promosi ASN
23. Pengelolaan Assessment Center
24. Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
25. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
26. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
27. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
28. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
29. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
30. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
31. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
32. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
33. Evaluasi Disiplin ASN
34. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional Peningkatan Kepemimpinan, dan Prajabatan

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu penyebab utama dari ketidaktercapaian ini adalah ketidaktepatan dalam proses penetapan target.

Kesalahan ini menunjukkan pentingnya evaluasi awal yang mendalam dan berbasis data dalam proses perencanaan, agar target yang ditetapkan tidak hanya ambisius, tetapi juga realistis dan terukur. Penyesuaian target melalui Renja Perubahan menjadi langkah korektif yang penting untuk memastikan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan program secara menyeluruh.

Selain itu terdapat pula indikator yang menunjukkan capaian kinerja yang positif. Beberapa indikator kinerja berhasil memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas perencanaan, komitmen pelaksana, serta koordinasi yang baik antarunit kerja dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan merupakan proses evaluasi terhadap sejauh mana suatu unit kerja atau organisasi, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan layanan kepada publik atau internal pemerintah, serta pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Analisis kinerja pelayanan sesuai tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser termuat dalam tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten paser yang dirumuskan sebagai berikut:



Untuk dapat mewujudkan Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang dimaksudkan diatas, maka BKPSDM menetapkan indikator sasaran yang ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja pejabat eselon II tahun 2025 ada 5 (lima) yaitu:

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2. Hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit
3. Indeks Survei Kepuasan Pelayanan Kepegawaian
4. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
5. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pada Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang

Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Paser Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris dan Sekretariat terdiri dari:
   a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, membawahkan Jabatan Fungsional
4. Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi, membawahkan Jabatan Fungsional
5. Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin ASN dan Penghargaan membawahkan Jabatan Fungsional
6. UPTD, dan
7. Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Paser

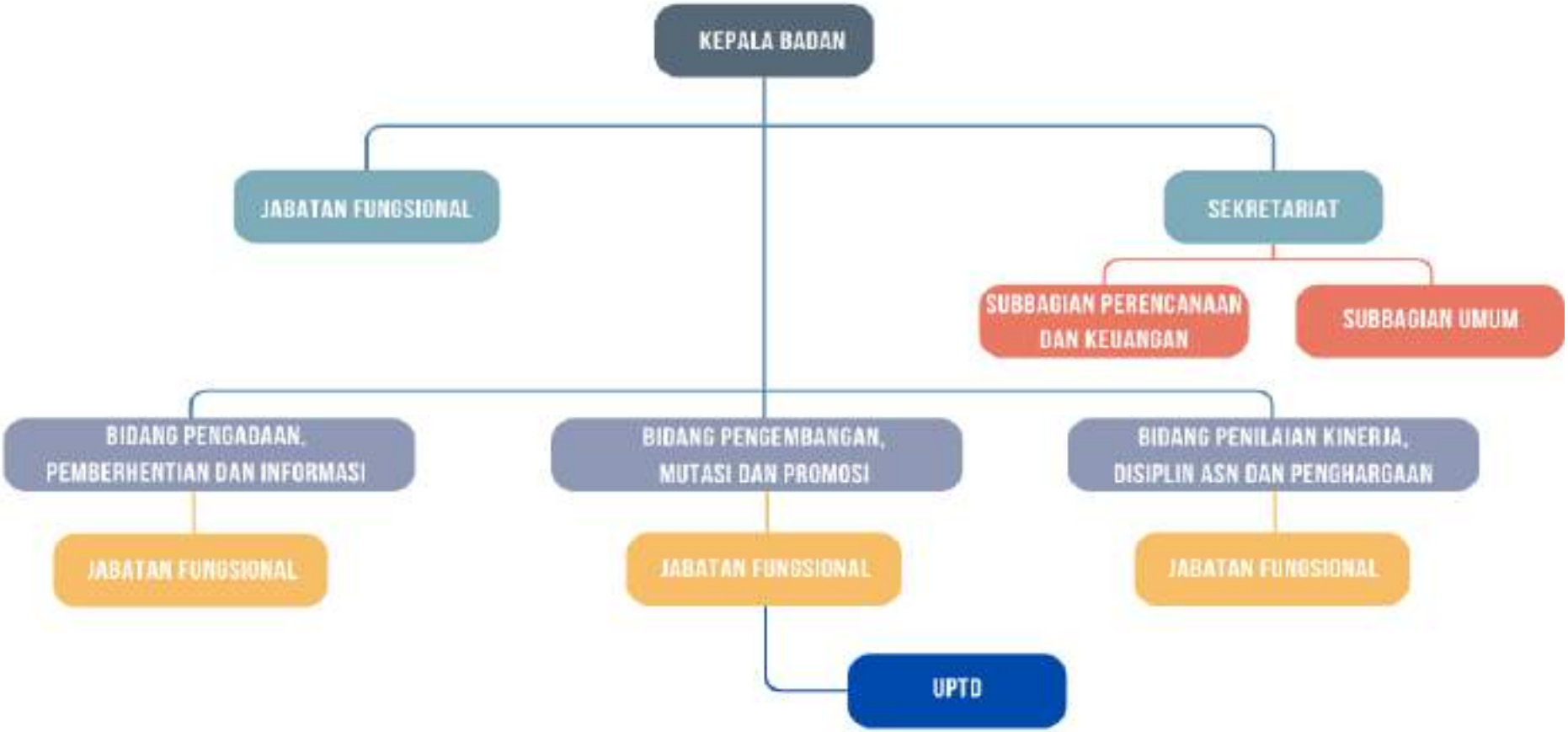

Dalam penyusunan program dan kegiatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Paser senantiasa mengacu pada indikator-indikator kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Tahun 2021–2026. Dokumen Renstra tersebut memuat tujuan, sasaran, serta tolok ukur dan indikator kinerja yang menjadi dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Pengukuran kinerja pelayanan BKPSDM sebagai salah satu perangkat daerah dilakukan dengan mengacu pada indikator yang bersifat terukur dan relevan terhadap tugas dan fungsi organisasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dikaitkan secara langsung dengan pencapaian sasaran strategis yang telah dirumuskan.

Secara umum, pencapaian target kinerja BKPSDM Kabupaten Paser pada periode pelaporan menunjukkan adanya kemajuan yang positif, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target sebagaimana direncanakan. Capaian ini mencerminkan pelaksanaan program yang telah berjalan sesuai arah kebijakan, namun tetap membutuhkan perbaikan dan penyesuaian di beberapa aspek, baik dari sisi pelaksanaan teknis maupun efektivitas sumber daya.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini. Tabel tersebut menyajikan perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja, yang selanjutnya menjadi dasar dalam melakukan analisis terhadap keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

Tabel. 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	SDG's/TPB Indikator 16.6.1.[c]	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	66,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2	Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	60,00	62,00	65,00	70,00	75,00	70,60	79,00	40,80	117,67	127,42	62,77
3	Hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit	-	-	-	0,00	125,00	150,00	175,00	200,00	0,00	185,50	246,50	-	148,40	164,33
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	SDG's/TPB Indikator 16.6.1.[b]	60,00	63,00	65,00	70,00	70,00	63,00	65,18	71,51	105,00	103,46	110,02
5	Indeks Survei Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	-	-	-	0,00	72,00	74,00	76,00	80,00	0,00	80,92	81,62	-	112,39	110,30
6	Presentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	-	0,00	80,00	85,00	90,00	95,00	0,00	190,69	95,00	-	238,36	111,76
7	Presentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	-	-	-	0,00	85,00	90,00	95,00	98,00	0,00	84,055	90,00	-	98,89	100,00
8	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	-	-	-	70,00	72,00	74,00	78,00	80,00	77,65	99,53	77,04	110,93	138,24	104,11
9	Persentase kesesuaian jabatan pegawai berdasarkan pendidikan	-	-	-	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	83,78	98,75	88,00	119,69	131,67	110,00
10	Persentase ASN bekerja sesuai kompetesi dan kualifikasi dalam jabatan	-	-	-	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	62,25	75,78	75,00	88,93	101,04	93,75
11	Persentase pegawai berkinerja baik	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	68,00	85,38	97,45	68,00	85,38	97,45
12	Persentase ASN Manajerial dan fungsional memiliki sertifikasi	-	-	-	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00	83,06	59,45	80,00	118,66	79,27	100,00
13	Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan Keuangan yang Material BPK RI dan APIP Inspektorat	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	100,00	-	-
14	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	-	-	-	70,00	-	-	-	-	55,92	-	-	79,89	-	-
15			Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan	-	-	-	-	-	-	1.957	1.899	1.810	-	-	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)												
16			Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan	-	-	-	-	-	-	427	438	395	-	-	-
17			Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

❖ **Interpretasi Indikator Kinerja BKPSDM**

- ✓ Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
  Target setiap tahun meningkat dari 60 pada 2022 menjadi 80 pada 2026. Realisasi tahun 2022 mencapai 66 (rasio 110%). Ini menunjukkan kinerja reformasi birokrasi cukup baik dan melebihi target awal.

- ✓ Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan Keuangan
  Targetnya 0 sepanjang tahun, dan realisasi juga 0. Artinya tidak ada temuan signifikan terkait keuangan maupun aset, sehingga aspek akuntabilitas berjalan baik.

- ✓ Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi
  Target awal 70% (2022), tetapi realisasi baru 55,92% (rasio 79,89%). Masih ada gap signifikan, menunjukkan perlunya dorongan percepatan sertifikasi ASN.

- ✓ Nilai SAKIP Perangkat Daerah
  Target meningkat dari 60 (2022) ke 70 (2026). Realisasi 2022 = 63 (rasio 105%), 2023 = 65,16 (103%), dan 2024 = 71,51 (110%). Kinerja akuntabilitas meningkat dan melampaui target.

- ✓ Indeks Profesionalitas ASN
  Target dari 60 (2022) ke 75 (2026). Realisasi 2022 = 70,60 (117%), 2023 = 79 (127%), tetapi 2024 turun drastis ke 40,80 (rasio 62%). Ini menjadi alarm bahwa profesionalitas ASN perlu perhatian khusus.

- ✓ Indeks Survei Kepuasan Pelayanan Kepegawaian
  Target mulai muncul 2023 = 72, lalu naik ke 80 (2026). Realisasi 2023 = 80,92 (112%) dan 2024 = 81,62 (110%). Ini sangat positif, menunjukkan kepuasan pegawai terhadap layanan BKPSDM sudah tinggi.

- ✓ Hasil Penilaian Mandiri Sistem Merit
  Target 125 (2023) → 200 (2026). Realisasi 2023 = 185,50 (148%), 2024 = 246,50 (164%). Capaian jauh melebihi target, artinya penerapan sistem merit berjalan sangat baik.

- ✓ Persentase Pejabat ASN Mengikuti Diklat Formal
  Target 80% (2023) → 95% (2026). Realisasi 2023 = 95,35% (119%) dan 2024 = 95% (111%). Target terlampaui, menandakan komitmen peningkatan kompetensi berjalan baik.

- ✓ Persentase Pejabat ASN Mengikuti Diklat Struktural
  Target 85% (2023) → 98% (2026). Realisasi 2023 = 84,05% (rasio 98%), 2024 = 90% (100%). Hampir sesuai target, meski tahun 2023 sedikit di bawah target.

- ✓ Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretaria
  Target 70 (2022) → 80 (2026). Realisasi 2022 = 77,65 (111%), 2023 = 99,53 (138%), 2024 = 77,04 (104%). Secara umum melebihi target, meski 2024 ada sedikit penurunan.

- ✓ Persentase Kesesuaian Jabatan dengan Pendidikan
  Target 70% (2022) → 90% (2026). Realisasi 2022 = 83,78% (119%), 2023 = 98,75% (132%), 2024 = 88% (110%). Terus di atas target, artinya penempatan pegawai sudah semakin sesuai dengan latar pendidikan.

- ✓ Persentase ASN Bekerja Sesuai Kompetensi & Kualifikasi
  Target 70% (2022) → 90% (2026). Realisasi 2022 = 62,25% (89%), 2023 = 75,78% (101%), 2024 = 75% (94%). Ada peningkatan, tetapi capaian masih perlu konsistensi.

- ✓ Persentase Pegawai Berkinerja Baik
  Target 100% setiap tahun. Realisasi 2022 = 68% (68%), 2023 = 85,38% (85%), 2024 = 97,45% (97%). Tren naik, tetapi belum mencapai 100% sesuai target.

- ✓ Persentase ASN Manajerial dan Fungsional Bersertifikasi
  Target 70% (2022) → 85% (2026). Realisasi 2022 = 83,06% (119%), 2023 = 59,45% (79%), 2024 = 80% (100%). Terlihat fluktuasi: 2023 turun drastis, tapi 2024 kembali sesuai target.

- ✓ Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi vs Menengah/Dasar
  Data menunjukkan jumlah ASN non-guru/kesehatan dengan pendidikan tinggi lebih dominan, yaitu 1.957 (2022), 1.899 (2023), dan 1.810 (2024). Ada tren penurunan jumlah pegawai berpendidikan tinggi, perlu perhatian rekrutmen.

- ✓ Rasio Pegawai Fungsional (non guru/kesehatan)
  Tahun 2022 tercatat 427 orang, 2023 = 438, 2024 = 395. Ada fluktuasi, dengan penurunan di 2024.

Secara umum, kinerja BKPSDM Kabupaten Paser menunjukkan capaian yang baik, dengan banyak indikator melebihi target, terutama pada reformasi birokrasi, akuntabilitas, sistem merit, serta pelatihan dan pendidikan ASN. Pelayanan kepegawaian juga mendapat respons positif dari pegawai. Namun, indeks profesionalitas ASN menurun pada 2024, sertifikasi kompetensi belum optimal, dan jumlah ASN berpendidikan tinggi menurun. Oleh karena itu, perlu perhatian pada peningkatan profesionalitas, percepatan sertifikasi, dan strategi rekrutmen untuk menjaga kualitas SDM aparatur.

2.3. Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan sudah di atas 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

2.3.1.Faktor Pendorong

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser sampai dengan Juni Tahun 2024:

1. Salah satu faktor utama yang mendorong keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Paser adalah keterlibatan aktif pegawai dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi sistem merit.

   Keterlibatan pegawai dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan kepegawaian tidak hanya menciptakan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan, tetapi juga meningkatkan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip sistem merit, seperti objektivitas, transparansi, dan kompetensi. Hal ini mendorong terciptanya budaya kerja yang partisipatif dan meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia aparatur.

   Dengan memberikan ruang partisipasi bagi pegawai, baik melalui forum diskusi internal, tim teknis, maupun mekanisme umpan balik, BKPSDM mampu membangun komunikasi dua arah yang lebih efektif. Langkah ini terbukti memperkuat komitmen ASN terhadap pencapaian tujuan organisasi serta mempercepat penerimaan terhadap kebijakan-kebijakan strategis yang sedang dan akan dijalankan.

2. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Paser juga didukung oleh tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang memadai terhadap program pendidikan dan pelatihan formal. Upaya untuk memastikan ketersediaan fasilitas ini tidak hanya mencakup dukungan pembiayaan, tetapi juga mencakup kemudahan akses terhadap program-program yang relevan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN.
   BKPSDM Kabupaten Paser secara konsisten berupaya membuka ruang seluas-luasnya bagi ASN untuk mengikuti pelatihan, baik melalui kerja sama dengan lembaga pelatihan pemerintah maupun pihak ketiga yang terakreditasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelatihan daring menjadi solusi yang memperluas jangkauan sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan diklat.
   Fasilitas pelatihan yang representatif, penyediaan modul yang sesuai, serta pemilihan program pelatihan yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan jabatan, menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan peningkatan kapasitas ASN. Dengan dukungan tersebut, diharapkan kompetensi ASN terus berkembang secara sistematis dan berkelanjutan guna menunjang profesionalisme, inovasi, dan integritas aparatur.

3. Faktor penting lainnya yang turut mendorong keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Paser adalah penerapan perhitungan dan evaluasi secara berkelanjutan. Evaluasi dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, dengan tujuan untuk mengukur efektivitas capaian serta mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan.
   Melalui proses evaluasi ini, BKPSDM memperoleh umpan balik *(feedback)* yang sangat berguna dalam memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan di periode berikutnya. Evaluasi juga membantu dalam mengantisipasi potensi risiko dan hambatan yang mungkin timbul, sehingga langkah-langkah korektif dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.
   Selain itu, evaluasi yang berbasis data dan indikator kinerja memungkinkan organisasi untuk lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan organisasi, kebijakan nasional, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Dengan demikian, perhitungan dan evaluasi berkelanjutan tidak hanya menjadi mekanisme kontrol, tetapi juga instrumen pembelajaran organisasi menuju tata kelola yang lebih efektif dan akuntabel.

2.3.2.Hambatan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diantaranya:

1. Belum dilaksanakannya perhitungan mandiri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser sehingga nilai untuk tahun ini belum mencapai target yang ditentukan. Salah satu hambatan utama dalam pencapaian target kinerja BKPSDM Kabupaten Paser adalah belum dilaksanakannya perhitungan mandiri terhadap penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. Perhitungan mandiri ini sejatinya diperlukan sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana penerapan prinsip-prinsip sistem merit, seperti kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN telah diimplementasikan secara objektif dan konsisten. Ketiadaan perhitungan mandiri menyebabkan nilai sistem merit belum dapat ditentukan secara pasti, sehingga pencapaian target indikator kinerja pada aspek ini belum terpenuhi sesuai dengan yang direncanakan untuk tahun berjalan. Selain itu, keterlambatan dalam pelaksanaan perhitungan ini juga berdampak pada keterbatasan data dan informasi yang dapat dijadikan dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan kepegawaian berbasis kinerja. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah strategis dan terkoordinasi untuk segera melaksanakan perhitungan mandiri secara rutin dan sistematis, agar upaya peningkatan kualitas manajemen ASN dapat terukur dan diarahkan dengan lebih tepat sasaran.

2. Ketidaktersediaan Program yang Relevan, terbatasnya program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan ASN dan bidang pekerjaan. terbatasnya program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan nyata para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bidang pekerjaan mereka. Meskipun pelatihan merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN, namun ketersediaan program yang sesuai dengan spesifikasi jabatan atau kebutuhan unit kerja masih belum optimal. Sebagian besar program pelatihan yang tersedia bersifat umum dan tidak sepenuhnya menjawab tuntutan teknis atau manajerial yang spesifik, sehingga pemanfaatan hasil pelatihan dalam praktik kerja tidak maksimal. Selain itu, tidak semua program pelatihan yang dibutuhkan tersedia dalam waktu dan format yang fleksibel, baik secara daring maupun luring, sehingga menyulitkan ASN untuk mengikuti pelatihan sesuai jadwal kerja dan beban tugas. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya penguatan kerja sama antara BKPSDM dengan lembaga penyelenggara diklat yang kompeten, serta pengembangan program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata organisasi, agar peningkatan kualitas SDM dapat berjalan secara lebih efektif dan berdampak langsung pada kinerja pelayanan publik.

3. Penyelenggaraan Pelaksanaan Pelatihan dengan jadwal ditentukan oleh pihak penyelenggara pelatihan.
   Hambatan lain yang turut memengaruhi capaian kinerja BKPSDM Kabupaten Paser adalah terkait penyelenggaraan pelatihan yang jadwalnya ditentukan sepenuhnya oleh pihak penyelenggara. Kondisi ini menyulitkan penyesuaian dengan jadwal dan kebutuhan internal perangkat daerah, terutama ketika pelatihan diselenggarakan pada waktu yang bersamaan dengan beban kerja tinggi atau kegiatan prioritas lainnya.
   Ketidaksesuaian jadwal ini berdampak pada rendahnya partisipasi ASN dalam pelatihan, karena banyak yang tidak dapat meninggalkan tugas pokoknya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Akibatnya, target pengembangan kapasitas ASN tidak tercapai secara optimal, dan distribusi peningkatan kompetensi pun menjadi tidak merata di lingkungan kerja. Permasalahan ini mengindikasikan perlunya komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara BKPSDM dengan lembaga penyelenggara pelatihan agar pelaksanaan pelatihan lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah, termasuk kemungkinan pengaturan jadwal yang lebih fleksibel, berbasis permintaan, atau melalui mekanisme pelatihan dalam jaringan (online) yang lebih mudah diakses oleh ASN kapan pun dibutuhkan.

Setelah dilakukan identifikasi terhadap berbagai faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan rencana kerja BKPSDM Kabupaten Paser hingga pertengahan tahun 2024, maka diperlukan pula upaya pemecahan masalah (solusi) yang bersifat strategis dan berkelanjutan agar pencapaian target kinerja dapat lebih optimal. Beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Meningkatkan Koordinasi antara Pimpinan dan Pegawai
   Untuk memperkuat pelaksanaan sistem merit, diperlukan peningkatan koordinasi yang lebih intensif antara pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan kerja. Kolaborasi ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama serta komitmen dalam pelaksanaan kebijakan berbasis sistem merit, termasuk dalam proses perhitungan mandiri dan pemenuhan indikator yang telah ditentukan. Melalui koordinasi yang efektif, diharapkan terjadi sinergi antarunit kerja dalam mendukung capaian indikator kinerja yang telah ditargetkan.
2. Memastikan Ketersediaan Fasilitas dan Akses terhadap Program yang Relevan
   Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi ASN adalah dengan memastikan bahwa program pendidikan dan pelatihan yang tersedia benar-benar sesuai dengan kebutuhan jabatan dan bidang pekerjaan. BKPSDM perlu mendorong penyusunan kurikulum pelatihan berbasis kebutuhan (training need analysis), serta menjalin kerja sama dengan lembaga diklat yang kompeten dan adaptif. Selain itu, aksesibilitas pelatihan

juga harus diperluas, baik dari sisi pembiayaan, waktu pelaksanaan, maupun format pelatihan yang fleksibel, seperti pelatihan daring, blended learning, atau pelatihan in-house.

Berdasarkan berbagai kondisi dan hambatan yang telah diidentifikasi, baik dari aspek pencapaian kinerja, keterbatasan sumber daya, maupun dinamika pelaksanaan program dan kegiatan, maka terdapat implikasi penting yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser. Implikasi tersebut utamanya terkait perlunya penyesuaian arah perencanaan dan penganggaran agar tetap sejalan dengan target pembangunan daerah yang ditetapkan.

Tindakan yang dilakukan sebagai respons terhadap kondisi tersebut adalah dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2025. Penyesuaian ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirancang tetap relevan dan responsif terhadap capaian aktual dan kebutuhan yang berkembang.

Selanjutnya, dalam aspek penganggaran, dilakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025, yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025, serta disesuaikan dengan mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser Tahun 2025.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjamin keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, serta memungkinkan optimalisasi pelaksanaan program kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam proses perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah, tidak hanya mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi utama perangkat daerah, tetapi juga dilakukan penelaahan secara cermat terhadap arah kebijakan nasional. Hal ini bertujuan agar perencanaan perangkat daerah tidak berjalan sendiri, melainkan selaras dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.

Isu-isu penting yang muncul dari evaluasi kinerja masa lalu, tantangan aktual, serta kebutuhan masyarakat menjadi dasar dalam menetapkan fokus tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, isu-isu tersebut dikaitkan secara langsung dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, agar pengukuran kinerja dapat dilakukan secara objektif dan terarah.

Disamping itu, penelaahan terhadap dokumen perencanaan tingkat nasional, seperti RPJMN, Rencana Aksi Reformasi Birokrasi, maupun kebijakan sektoral lainnya, menjadi bagian integral dalam memastikan bahwa perangkat daerah berada dalam jalur yang konsisten dengan kerangka pembangunan nasional. Dengan demikian, tujuan dan sasaran yang dirumuskan mencerminkan sinkronisasi vertikal antara pusat dan daerah, serta sinkronisasi horizontal antarperangkat daerah dalam satu wilayah pemerintahan.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan Daerah perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan : Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas					
Sasaran	**Indikator Sasaran**	**Definisi Operasional**	**Formulasi**	**Target**	
				Renja 2025	**Perubahan Renja 2025**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sakip adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcome dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. sebagai upaya peningkatan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat kegiatan dan sub kegiatan urusan penunjang yang presentasenya didapat dengan menjumlahkan seluruh capaian kinerja kegiatan	*Formulasi Pengukuran:* Nilai capaian SAKIP berdasarkan hasil penilaian pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) APIP oleh Inspektorat. *Tipe Penghitungan: Non kumulatif* $Nilai\ SAKIP = \sum_{i=1}^{n} Skor\ aspek_i$	BB (71,51)	BB (71,51)

Tujuan : Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas					
Sasaran	**Indikator Sasaran**	**Definisi Operasional**	**Formulasi**	**Target**	
				Renja 2025	**Perubahan Renja 2025**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit	Sebagai tolok ukur untuk menilai penerapan Sistem merit atas pemenuhan dokumen penilaian mandiri penerapan Sistem merit yang memuat 8 (delapan) aspek penilaian. Sebelum menyelenhgarakan pelaksanaan sistem merit diwajibkan memenuhi penilaian penerapan sistem merit dengan kategori IV yaitu predikat *Baik.*	*Formulasi Pengukuran:* Jumlah aspek dan sub aspek dalam komponen penilaian mandiri sistem merit yang telah terpenuhi, yang terdiri atas aspek perencanaan kebutuhan pegawai, aspek pelaksanaan pengadaan pegawai, aspek pengembangan karir, aspek promosi, aspek mutasi dan rotasi, aspek manajemen kinerja, aspek penggajian, aspek penghargaan dan penegakan disiplin, aspek perlindungan dan pelayanan serta aspek ketersediaan sistem informasi. *Tipe Penghitungan: Non kumulatif* $Index = \sum_{i=1}^{n} Skor\ aspek_i$	250	250

Tujuan : Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas					
Sasaran	**Indikator Sasaran**	**Definisi Operasional**	**Formulasi**	**Target**	
				Renja 2025	**Perubahan Renja 2025**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Indeks Survei Kepuasan Masyarakat	Sebagai tolok Ukur untuk menilai tingkat kepuasan layanan atas pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat pengguna layanan terhadap beberapa unsur layanan kepegawaian yang sudah ditetapkan sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan perbaikan dan menjadi pendorong bagi setiap unsur dalam hal peningkatan kulaitas layanan kepegawaian	*Formulasi Pengukuran:* Perkalian antara skor survey pelayanan kepegawaian dengan jumlah frekuensi dibagi dengan jumlah sampel keseluruhan. *Tipe Penghitungan: Non kumulatif/ kuantitatif* 	BB (82)	BB (82)

Tujuan : Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas					
Sasaran	**Indikator Sasaran**	**Definisi Operasional**	**Formulasi**	**Target**	
				Renja 2025	**Perubahan Renja 2025**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Suatu ukuran perbandingan yang digunakan untuk mengukur Jumlah Aparatur Sipil Negara yang telah mendapatkan pelatihan teknis dengan maksimal pelatihan setia Aparatur Sipil Negara yaitu 20 JP dalam dua tahun dengan jumlah ASN.	*Formulasi Pengukuran:* Jumlah Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti atau mendapatkan fasilitas pendidikan dan pelatihan formal baik diklat teknis, fungsional maupun struktural sesuai dengan kebutuhan dibagi dengan jumlah pegawai secara keseluruhan dikali seratus persen. T*ipe Penghitungan: Kumulatif* $X = \frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal}}{\text{Jumlah total ASN}} \times 100\%$	95%	95%
	ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Suatu ukuran perbandingan yang digunakan untuk mengukur Jumlah Aparatur Sipil Negara yang telah mendapatkan pelatihan sruktural dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas dengan jumlah jabatan serta mengukur jumlah Aparatur Sipil Negara yang telah mendapatkan pelatihan dasar yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja dengan jumlah total jabatan.	*Formulasi Pengukuran:* Jumlah Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti atau mendapatkan fasilitas diklat kepemimpinan atau diklat struktural sesuai dengan kebutuhan dalam jenjang jabatan baik diklat kepemimpinan tingkat IV, III, II maupun I. *Tipe Penghitungan: Kumulatif* $X = \frac{\text{Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural}}{\text{Jumlah total jabatan}} \times 100\%$	90%	90%

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Review terhadap rancangan Perubahan RKPD Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser merupakan review terhadap program dan anggaran pada tahun 2025 yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan mempedomani Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025. Review ini diiringi dengan penentuan target dari indikator program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dari target yang ditentukan terdapat jumlah pagu indikatif. Pagu indikatif ini dapat dibandingkan dengan kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh program dan kegiatan. Adapun Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser

No.	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang												
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					**18,953,949,068.00**						**20,374,083,776.61**	
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec. Tanah Grogot**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**Indeks**	**87.00**	**10,022,791,347.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec. Tanah Grogot**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**Indeks**	**84.00**	**10,405,902,963.61**	
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Tanah Grogot**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu**	**Persen**	**100.00**	**178,029,166.00**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Tanah Grogot**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu**	**Persen**	**100.00**	**266,305,292.00**	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	16.00	104,505,292.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	14.00	148,691,292.00	
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanah Grogot	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (termasuk sektoral dan CaLK)	Dokumen	13.00	73,523,874.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanah Grogot	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (termasuk sektoral dan CaLK)	Dokumen	13.00	117,614,000.00	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Tanah Grogot**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan PD**	**Indeks**	**85.00**	**9,224,195,464.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Tanah Grogot**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan PD**	**Indeks**	**85.00**	**9,276,437,464.00**	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanah Grogot	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	OB	658.00	9,108,695,704.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanah Grogot	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	OB	50.00	9,108,695,704.00	
2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	Dokumen	300.00	115,499,760.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	Dokumen	180.00	167,741,760.00	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec. Tanah Grogot**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian PD**	**Indeks**	**85.00**	**7,500,000.00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec. Tanah Grogot**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian PD**	**Indeks**	**85.00**	**31,494,000.00**	
3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tanah Grogot	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	OB	50.00	7,500,000.00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tanah Grogot	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	OB	60.00	**31,494,000.00**	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Tanah Grogot**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum PD**	**Indeks**	**87.00**	**339,555,489.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Tanah Grogot**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum PD**	**Indeks**	**85.00**	**486,979,026.00**	
4.1	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tanah Grogot	Jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2.00	10,024,518.00	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tanah Grogot	Jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4.00	10,024,518.00	
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tanah Grogot	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1.00	26,080,791.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tanah Grogot	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	5.00	88,478,005.00	
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tanah Grogot	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3.00	39,713,002.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tanah Grogot	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3.00	41,470,672.00	

No.	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Tanah Grogot	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4.00	13,807,178.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Tanah Grogot	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4.00	13,806,831.00	
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2.00	3,798,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2.00	3,798,000.00	
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanah Grogot	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12.00	195,855,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanah Grogot	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12.00	195,855,000.00	
4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	2.00	50,277,000.00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	2.00	133,546,000.00	
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Tanah Grogot**	**Persentase Ketersediaan BMD Penunjang Urusan PD**	**Persen**	**100.00**	**52,859,031.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Tanah Grogot**	**Persentase Ketersediaan BMD Penunjang Urusan PD**	**Persen**	**100.00**	**98,572,751.00**	
5.1	Pengadaan Mebel	Kec. Tanah Grogot	Jumlah mebel yang diadakan	Unit	4.00	21,333,688.00	Pengadaan Mebel	Kec. Tanah Grogot	Jumlah mebel yang diadakan	Unit	12.00	27,993,898.00	
5.2	Penggandaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec. Tanah Grogot	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	2.00	31,525,343.00	Penggandaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec. Tanah Grogot	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	9.00	70,578,853.00	
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Tanah Grogot**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan PD**	**Persen**	**100.00**	**12,249,250.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Tanah Grogot**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan PD**	**Persen**	**100.00**	**11,998,500.00**	
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tanah Grogot	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	10.00	500,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tanah Grogot	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	10.00	500,000.00	
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanah Grogot	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	3.00	11,749,250.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanah Grogot	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	3.00	11,498,500.00	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Tanah Grogot**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD**	**Persen**	**100.00**	**208,402,947.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Tanah Grogot**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD**	**Persen**	**100.00**	**234,115,930.61**	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tanah Grogot	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3.00	34,931,792.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tanah Grogot	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3.00	**34,931,792.00**	
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanah Grogot	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	32.00	40,755,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanah Grogot	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	64.00	**63,385,000.00**	
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tanah Grogot	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1.00	113,016,155.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tanah Grogot	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1.00	**116,099,138.61**	
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tanah Grogot	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	32.00	19,700,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tanah Grogot	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	32.00	**19,700,000.00**	

No.	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
B.	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Kec. Tanah Grogot**	**Persentase Kesesuaian Jabatan Pegawai Berdasarkan Pendidikan**	**Persen**	**100.00**	**5,836,319,736.00**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Kec. Tanah Grogot**	**Persentase Kesesuaian Jabatan Pegawai Berdasarkan Pendidikan**	**Persen**	**88.00**	**6,338,027,374.00**	
		Kec. Tanah Grogot	**Persentase ASN Bekerja sesuai Kompetensi dan Kualifikasi dalam Jabatan**	**Persen**	**80.00**			**Kec. Tanah Grogot**	**Persentase ASN Bekerja sesuai Kompetensi dan Kualifikasi dalam Jabatan**	**Persen**	**75.00**		
		Kec. Tanah Grogot	**Persentase Pegawai Berkinerja Baik**	**Persen**	**100.00**			**Kec. Tanah Grogot**	**Persentase Pegawai Berkinerja Baik**	**Persen**	**100.00**		
1	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Kec. Tanah Grogot**	**Persentase Formasi Kebutuhan Pegawai yang Terpenuhi Berdasarkan Jumlah Bezzeting/Formasi yang Diusulkan**	**Persen**	**100.00**	**1,198,981,979.00**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Kec. Tanah Grogot**	**Persentase Formasi Kebutuhan Pegawai yang Terpenuhi Berdasarkan Jumlah Bezzeting/Formasi yang Diusulkan**	**Persen**	**100.00**	**1,376,794,424.00**	
		Kec. Tanah Grogot	**Persentase Data Kepegawaian yang Terupdate/diremajakan**	**Persen**	**100.00**			**Kec. Tanah Grogot**	**Persentase Data Kepegawaian yang Terupdate/diremajakan**	**Persen**	**100.00**		
1.1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	2.00	626,943,274.00	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	2.00	724,825,323.00	
1.2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Dokumen	1.00	57,928,253.00	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Dokumen	1.00	79,578,000.00	
1.3	Evaluasi Pemberhentian ASN	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil evaluasi pemberhentian ASN	Dokumen	4.00	69,160,183.00	Evaluasi Pemberhentian ASN	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil evaluasi pemberhentian ASN	Dokumen	1.00	59,809,000.00	
1.4	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kec. Tanah Grogot	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	Lembaga	1.00	121,617,699.00	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kec. Tanah Grogot	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	Lembaga	1.00	71,204,101.00	
1.5	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Dokumen	1.00	164,098,000.00	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Dokumen	1.00	178,350,000.00	
1.6	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	Dokumen	1.00	108,016,570.00	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	Dokumen	1.00	172,662,000.00	
1.7	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	Laporan	4.00	51,218,000.00	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	Laporan	4.00	90,366,000.00	
2	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Kec. Tanah Grogot**	**Persentase Penempatan ASN berdasarkan kualifikasi sesuai syarat jabatan**	**Persen**	**92.00**	**1,012,414,000.00**	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Kec. Tanah Grogot**	**Persentase Penempatan ASN berdasarkan kualifikasi sesuai syarat jabatan**	**Persen**	**92.00**	**826,462,000.00**	
2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	Dokumen	3.00	86,236,000.00	Pengelolaan Mutasi ASN	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	Dokumen	3.00	98,236,000.00	
2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kec. Tanah Grogot	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Dokumen	800.00	164,540,000.00	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kec. Tanah Grogot	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Dokumen	700.00	215,708,000.00	

No.	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
2.3	Pengelolaan Promosi ASN	Kec. Tanah Grogot	Jumlah pengelolaan promosi ASN	Dokumen	2.00	761,638,000.00	Pengelolaan Promosi ASN	Kec. Tanah Grogot	Jumlah pengelolaan promosi ASN	Dokumen	2.00	512,518,000.00	
3	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Kec. Tanah Grogot**	**Persentase ASN yang Telah Mengikuti Peningkatan Kompetensi sesuai dengan Syarat Kompetensi dalam Jabatan**	**Persen**	**92.00**	**2,881,227,094.00**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Kec. Tanah Grogot**	**Persentase ASN yang Telah Mengikuti Peningkatan Kompetensi sesuai dengan Syarat Kompetensi dalam Jabatan**	**Persen**	**92.00**	**2,839,174,000.00**	
3.1	Pengelolaan Assesment Center	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen pengelolaan assesment center	Dokumen	1.00	229,044,981.00	Pengelolaan Assesment Center	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen pengelolaan assesment center	Dokumen	1.00	358,887,000.00	
3.2	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	Dokumen	7.00	2,000,670,113.00	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	Dokumen	7.00	1,692,261,000.00	
3.3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kec. Tanah Grogot	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	Orang	10.00	499,204,000.00	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kec. Tanah Grogot	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	Orang	10.00	524,500,000.00	
3.4	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kec. Tanah Grogot	Jumlah ASN fungsional yang dibina	Orang	100.00	118,100,000.00	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kec. Tanah Grogot	Jumlah ASN fungsional yang dibina	Orang	50.00	229,318,000.00	
3.5	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kec. Tanah Grogot	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	Orang	60.00	34,208,000.00	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kec. Tanah Grogot	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	Orang	50.00	34,208,000.00	
4	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Kec. Tanah Grogot**	**Persentase ASN dengan Nilai SKP Baik**	**Persen**	**100.00**	**743,696,663.00**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Kec. Tanah Grogot**	**Persentase ASN dengan Nilai SKP Baik**	**Persen**	**100.00**	**1,295,596,950.00**	
		Kec. Tanah Grogot	**Persentase ASN yang Mendapatkan Penghargaan (SLKS dan ASN Berprestasi)**	**Persen**	**92.00**			**Kec. Tanah Grogot**	**Persentase ASN yang Mendapatkan Penghargaan (SLKS dan ASN Berprestasi)**	**Persen**	**90.00**		
		Kec. Tanah Grogot	**Persentase ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kinerja/Disiplin Pegawai**	**Persen**	**85.00**			**Kec. Tanah Grogot**	**Persentase ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kinerja/Disiplin Pegawai**	**Persen**	**85.00**		
4.1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Dokumen	3.00	58,594,500.00	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Dokumen	3.00	77,080,500.00	
4.2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Dokumen	13.00	120,394,500.00	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Dokumen	13.00	147,230,500.00	
4.3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Laporan	13.00	77,252,000.00	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Laporan	13.00	136,576,000.00	
4.4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kec. Tanah Grogot	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	Orang	2,000.00	279,627,713.00	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kec. Tanah Grogot	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	Orang	2,000.00	450,872,000.00	
4.5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kec. Tanah Grogot	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	Orang	300.00	37,708,200.00	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kec. Tanah Grogot	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	Orang	300.00	94,634,200.00	

No.	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
4.6	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kec. Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Laporan	13.00	80,293,500.00	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kec. Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Laporan	15.00	215,071,500.00	
4.7	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen pelayanan proses izin perceraian pegawai	Dokumen	5.00	26,505,674.00	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kec. Tanah Grogot	Jumlah dokumen pelayanan proses izin perceraian pegawai	Dokumen	15.00	70,281,674.00	
4.8	Evaluasi Disiplin ASN	Kec. Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil evaluasi disiplin ASN	Laporan	13.00	63,320,576.00	Evaluasi Disiplin ASN	Kec. Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil evaluasi disiplin ASN	Laporan	13.00	103,850,576.00	
C	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Kec. Tanah Grogot**	**Persentase ASN Manajerial dan Fungsional memiliki Sertifikasi**	**Persen**	**85.00**	**3,094,837,985.00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Kec. Tanah Grogot**	**Persentase ASN Manajerial dan Fungsional memiliki Sertifikasi**	**Persen**	**80.00**	**3,630,153,439.00**	
1	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Kec. Tanah Grogot**	**Persentase Calon ASN dan ASN yang Telah Lulus Memenuhi Diklat Perjenjangan**	**Persen**	**95.00**	**3,094,837,985.00**	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Kec. Tanah Grogot**	**Persentase Calon ASN dan ASN yang Telah Lulus Memenuhi Diklat Perjenjangan**	**Persen**	**92.00**	**3,630,153,439.00**	
1.1	Penyelenggaran Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Kec. Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Laporan	2.00	3,094,837,985.00	Penyelenggaran Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Kec. Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Laporan	2.00	3,630,153,439.00	

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun Anggaran berjalan, diperoleh total kebutuhan pagu perubahan sebesar Rp20.374.083.776,61. Jumlah tersebut mencerminkan estimasi kebutuhan riil berdasarkan beban kerja organisasi, rencana pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, serta proyeksi pembiayaan terhadap target kinerja yang ingin dicapai sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian, dalam rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, total alokasi anggaran yang tersedia bagi BKPSDM ditetapkan sebesar Rp18.953.949.068,00. Dengan demikian, terdapat selisih atau gap antara kebutuhan riil dan pagu indikatif sebesar Rp1.420.134.708,61. Selisih ini menggambarkan adanya penyesuaian fiskal yang harus dilakukan untuk menyeimbangkan antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan belanja strategis perangkat daerah.

Secara keseluruhan, struktur perencanaan anggaran BKPSDM dalam rancangan perubahan RKPD mencakup 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 44 (empat puluh empat) subkegiatan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa dari sisi struktur, BKPSDM tetap fokus pada tiga program utama yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi instansi, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
2. Program Peningkatan Kualitas Aparatur, dan
3. Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur.

Dari hasil pemutakhiran data perencanaan dan penyesuaian pagu, terdapat dinamika dalam komposisi subkegiatan yang meliputi subkegiatan yang bertambah, tetap, dan bergeser. Penyesuaian yang dilakukan melalui proses perubahan RKPD ini mencerminkan upaya BKPSDM untuk menjaga keseimbangan antara keterbatasan fiskal dan tuntutan kinerja. Walaupun kebutuhan riil organisasi sedikit lebih besar dibandingkan dengan alokasi pagu dalam rancangan perubahan RKPD, BKPSDM tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efisien, efektif, dan akuntabel.

Seluruh proses analisis kebutuhan dan penyesuaian anggaran tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan sinkronisasi terhadap dokumen perencanaan strategis, baik Renstra BKPSDM, RPJMD Kabupaten Paser, maupun arah kebijakan nasional terkait penguatan tata kelola dan peningkatan profesionalisme ASN. Dengan demikian, struktur program, kegiatan, dan subkegiatan dalam rancangan perubahan RKPD tidak hanya mencerminkan kebutuhan operasional, tetapi juga mendukung pencapaian sasaran strategis daerah pada urusan kepegawaian dan urusan pengembangan sumber daya manusia. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa BKPSDM Kabupaten Paser telah melakukan proses perencanaan anggaran secara

terukur, adaptif, dan responsif terhadap perubahan kebijakan dan kondisi keuangan daerah. Meskipun terjadi perbedaan antara kebutuhan ideal dan ketersediaan anggaran, arah kebijakan belanja tetap diarahkan pada pemenuhan target kinerja prioritas dengan mengutamakan efisiensi, sinergitas antarprogram, dan peningkatan nilai manfaat bagi pelayanan publik di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM aparatur.

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Kebijakan dijabarkan dalam program. Kegiatan dan Sub Kegiatan. Rencana Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2026 sebagai berikut:

A. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Kepegawaian Daerah
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

B. Kegiatan

1. Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kegawaian ASN
9. Mutasi dan Promosi ASN
10. Pengembangan Kompetensi ASN
11. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
12. Sertifikasi. Kelembagaan. Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

C. Sub Kegiatan

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Evaluasi kinerja perangkat daerah
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Penyediaan komponen listrik/Penerangan Bangunan kantor

7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8. Penyediaan bahan logistik kantor
9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
12. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
13. Pengadaan Meubelair
14. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
16. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
18. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
19. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
20. Pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya
21. Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK
22. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
23. Evaluasi pemberhentian ASN
24. Fasilitasi Lembaga profesi ASN
25. Evaluasi data. informasi dan sistem informasi kepegawaian
26. Pengelolaan data kepegawaian
27. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian
28. Pengelolaan mutasi ASN
29. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN
30. Pengelolaan Promosi ASN
31. Pengelolaan Assesment Center
32. Pengelolaan Administrasi Diklat dan sertifikasi ASN
33. Pengelolaan Pendidikan lanjutan ASN
34. Pembinaan jabatan fungsional ASN
35. Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional
36. Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
37. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
38. Evaluasi hasil penilaian dan kinerja aparatur
39. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai
40. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
41. Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN
42. Evaluasi Disiplin ASN
43. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
44. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Fungsional. Kepemimpinan dan Prajabatan.

3.4. Pendanaan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya. maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. program dan kegiatan tahun 2025 yang akan dilaksanakan dilakukan dengan menyelaraskan dengan tujuan strategis organisasi dan prioritas Kabupaten.

Berikut rencana kerja pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Paser tahun anggaran 2025 yang terdiri atas 3 program 12 kegiatan dan 44 sub kegiatan. yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah. maupun kegiatan yang bersifat rutin. maka setiap tahun dirumuskan indikator kinerja kegiatan yang dapat dilihat dalam rencana kinerja tahunan (RKT).

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan. dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Sebelum				Sesudah		Selisih (+/-)	Lokasi	Sumber Dana
				Target Kinerja	Anggaran Murni	Target Kinerja	Anggaran Pergeseran	Target Kinerja	Anggaran Perubahan			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				**20,094,096,616.00**		**17,696,880,052.00**		**18,953,949,068.00**	**1,257,069,016.00**	**Kec. Tanah Grogot**	**APBD**
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**Indeks**	**77.00**	**10,315,486,756.00**	**77.00**	**9,998,389,602.00**	**87.00**	**10,022,791,347.00**	**24,401,745.00**	**Kec. Tanah Grogot**	**APBD**
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu**	**Persen**	**100.00**	**266,305,292.00**	**100.00**	**157,577,646.00**	**100.00**	**178,029,166.00**	**20,451,520.00**	**Kec. Tanah Grogot**	**APBD**
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5.00	148,691,292.00	5.00	92,820,646.00	16.00	104,505,292.00	11,684,646.00	Kec. Tanah Grogot	APBD
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (termasuk sektoral dan CaLK)	Dokumen	12.00	117,614,000.00	12.00	64,757,000.00	13.00	73,523,874.00	8,766,874.00	Kec. Tanah Grogot	APBD
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan PD**	**Indeks**	**85.00**	**9,276,437,464.00**	**85.00**	**9,225,323,504.00**	**85.00**	**9,224,195,464.00**	**(1,128,040.00)**	**Kec. Tanah Grogot**	**APBD**
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	OB	48.00	9,108,695,704.00	48.00	9,108,695,704.00	658.00	9,108,695,704.00	-	Kec. Tanah Grogot	APBD

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Sebelum				Sesudah		Selisih (+/-)	Lokasi	Sumber Dana
				Target Kinerja	Anggaran Murni	Target Kinerja	Anggaran Pergeseran	Target Kinerja	Anggaran Perubahan			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	Dokumen	180.00	167,741,760.00	180.00	116,627,800.00	300.00	115,499,760.00	(1,128,040.00)	Kec. Tanah Grogot	APBD
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian PD**	**Indeks**	**85.00**	**15,000,000.00**	**85.00**	**7,500,000.00**	**85.00**	**7,500,000.00**	**-**	**Kec. Tanah Grogot**	**APBD**
3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	OB	60.00	15,000,000.00	60.00	7,500,000.00	50.00	7,500,000.00	-	Kec. Tanah Grogot	APBD
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum PD**	**Indeks**	**85.00**	**457,609,448.00**	**85.00**	**312,507,224.00**	**87.00**	**339,555,489.00**	**27,048,265.00**	**Kec. Tanah Grogot**	**APBD**
4.1	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4.00	8,626,000.00	4.00	10,024,518.00	2.00	10,024,518.00	-	Kec. Tanah Grogot	APBD
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2.00	25,000,000.00	2.00	26,080,791.00	1.00	26,080,791.00	-	Kec. Tanah Grogot	APBD
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3.00	48,197,448.00	3.00	36,392,487.00	3.00	39,713,002.00	3,320,515.00	Kec. Tanah Grogot	APBD
4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4.00	10,000,000.00	4.00	5,616,428.00	4.00	13,807,178.00	8,190,750.00	Kec. Tanah Grogot	APBD

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Sebelum				Sesudah		Selisih (+/-)	Lokasi	Sumber Dana
				Target Kinerja	Anggaran Murni	Target Kinerja	Anggaran Pergeseran	Target Kinerja	Anggaran Perubahan			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2.00	3,996,000.00	2.00	3,798,000.00	2.00	3,798,000.00	-	Kec. Tanah Grogot	APBD
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	50.00	230,136,000.00	50.00	115,068,000.00	12.00	195,855,000.00	80,787,000.00	Kec. Tanah Grogot	APBD
4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	1.00	131,654,000.00	1.00	115,527,000.00	2.00	50,277,000.00	(65,250,000.00)	Kec. Tanah Grogot	APBD
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan BMD Penunjang Urusan PD**	**Persen**	**100.00**	**45,004,676.00**	**100.00**	**47,859,031.00**	**100.00**	**52,859,031.00**	**5,000,000.00**	**Kec. Tanah Grogot**	**APBD**
5.1	Pengadaan Meubel	Jumlah mebel yang diadakan	Unit	9.00	19,643,688.00	9.00	21,333,688.00	4.00	21,333,688.00	-	Kec. Tanah Grogot	APBD
5.2	Penggandaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	2.00	25,360,988.00	2.00	26,525,343.00	2.00	31,525,343.00	5,000,000.00	Kec. Tanah Grogot	APBD
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan PD**	**Persen**	**100.00**	**12,500,000.00**	**100.00**	**12,249,250.00**	**100.00**	**12,249,250.00**	**-**	**Kec. Tanah Grogot**	**APBD**
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	10.00	500,000.00	10.00	500,000.00	10.00	500,000.00	-	Kec. Tanah Grogot	APBD

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Sebelum				Sesudah		Selisih (+/-)	Lokasi	Sumber Dana
				Target Kinerja	Anggaran Murni	Target Kinerja	Anggaran Pergeseran	Target Kinerja	Anggaran Perubahan			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	3.00	12,000,000.00	3.00	11,749,250.00	3.00	11,749,250.00	-	Kec. Tanah Grogot	APBD
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD**	**Persen**	**100.00**	**242,629,876.00**	**100.00**	**235,372,947.00**	**100.00**	**208,402,947.00**	**(26,970,000.00)**	**Kec. Tanah Grogot**	**APBD**
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4.00	35,000,000.00	4.00	34,931,792.00	3.00	34,931,792.00	-	Kec. Tanah Grogot	APBD
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	32.00	40,940,000.00	32.00	40,755,000.00	32.00	40,755,000.00	-	Kec. Tanah Grogot	APBD
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1.00	151,689,876.00	1.00	144,866,155.00	1.00	113,016,155.00	(31,850,000.00)	Kec. Tanah Grogot	APBD
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	24.00	15,000,000.00	24.00	14,820,000.00	32.00	19,700,000.00	4,880,000.00	Kec. Tanah Grogot	APBD
B.	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Kesesuaian Jabatan Pegawai Berdasarkan Pendidikan**	**Persen**	**88.00**	**5,676,143,360.00**	**88.00**	**4,544,558,456.00**	**100.00**	**5,836,319,736.00**	**1,291,761,280.00**	**Kec. Tanah Grogot**	**APBD**
		Persentase ASN Bekerja sesuai Kompetensi dan Kualifikasi dalam Jabatan	**Persen**	**75.00**		**75.00**		**80.00**			**Kec. Tanah Grogot**	**APBD**

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Sebelum				Sesudah		Selisih (+/-)	Lokasi	Sumber Dana
				Target Kinerja	Anggaran Murni	Target Kinerja	Anggaran Pergeseran	Target Kinerja	Anggaran Perubahan			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase Pegawai Berkinerja Baik	**Persen**	**100.00**		**100.00**		**100.00**			**Kec. Tanah Grogot**	**APBD**
1	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase Formasi Kebutuhan Pegawai yang Terpenuhi Berdasarkan Jumlah Bezzeting/Formasi yang Diusulkan**	**Persen**	**80.00**	**1,352,175,160.00**	**80.00**	**1,063,106,825.00**	**100.00**	**1,198,981,979.00**	**135,875,154.00**	**Kec. Tanah Grogot**	**APBD**
		Persentase Data Kepegawaian yang Terupdate/diremajakan	**Persen**	**100.00**		**100.00**		**100.00**			**Kec. Tanah Grogot**	**APBD**
1.1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	2.00	805,064,500.00	2.00	724,825,323.00	2.00	626,943,274.00	(97,882,049.00)	Kec. Tanah Grogot	APBD
1.2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Dokumen	1.00	79,578,000.00	1.00	39,789,000.00	1.00	57,928,253.00	18,139,253.00	Kec. Tanah Grogot	APBD
1.3	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah dokumen hasil evaluasi pemberhentian ASN	Dokumen	1.00	69,809,000.00	1.00	39,904,500.00	4.00	69,160,183.00	29,255,683.00	Kec. Tanah Grogot	APBD
1.4	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	Lembaga	1.00	83,120,660.00	1.00	51,226,086.00	1.00	121,617,699.00	70,391,613.00	Kec. Tanah Grogot	APBD
1.5	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Dokumen	1.00	150,604,000.00	1.00	97,052,000.00	1.00	164,098,000.00	67,046,000.00	Kec. Tanah Grogot	APBD

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Sebelum				Sesudah		Selisih (+/-)	Lokasi	Sumber Dana
				Target Kinerja	Anggaran Murni	Target Kinerja	Anggaran Pergeseran	Target Kinerja	Anggaran Perubahan			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	Dokumen	1.00	129,979,000.00	1.00	93,299,916.00	1.00	108,016,570.00	14,716,654.00	Kec. Tanah Grogot	APBD
1.7	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan hasil evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	Laporan	1.00	34,020,000.00	1.00	17,010,000.00	4.00	51,218,000.00	34,208,000.00	Kec. Tanah Grogot	APBD
2	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase Penempatan ASN berdasarkan kualifikasi sesuai syarat jabatan**	**Persen**	**92.00**	**766,137,000.00**	**92.00**	**698,851,650.00**	**92.00**	**1,012,414,000.00**	**313,562,350.00**	**Kec. Tanah Grogot**	**APBD**
2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	Dokumen	1.00	56,395,000.00	1.00	102,801,650.00	3.00	86,236,000.00	(16,565,650.00)	Kec. Tanah Grogot	APBD
2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Dokumen	700.00	125,344,000.00	700.00	177,378,000.00	800.00	164,540,000.00	(12,838,000.00)	Kec. Tanah Grogot	APBD
2.3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah pengelolaan promosi ASN	Dokumen	1.00	584,398,000.00	1.00	418,672,000.00	2.00	761,638,000.00	342,966,000.00	Kec. Tanah Grogot	APBD
3	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase ASN yang Telah Mengikuti Peningkatan Kompetensi sesuai dengan Syarat Kompetensi dalam Jabatan**	**Persen**	**92.00**	**2,579,821,200.00**	**92.00**	**2,166,119,981.00**	**92.00**	**2,881,227,094.00**	**715,107,113.00**	**Kec. Tanah Grogot**	**APBD**
3.1	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah dokumen pengelolaan assesment center	Dokumen	1.00	375,145,200.00	1.00	276,840,981.00	1.00	229,044,981.00	(47,796,000.00)	Kec. Tanah Grogot	APBD

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Sebelum				Sesudah		Selisih (+/-)	Lokasi	Sumber Dana
				Target Kinerja	Anggaran Murni	Target Kinerja	Anggaran Pergeseran	Target Kinerja	Anggaran Perubahan			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	Dokumen	1.00	1,459,722,000.00	1.00	1,194,557,000.00	7.00	2,000,670,113.00	806,113,113.00	Kec. Tanah Grogot	APBD
3.3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	Orang	8.00	491,185,000.00	8.00	482,474,000.00	10.00	499,204,000.00	16,730,000.00	Kec. Tanah Grogot	APBD
3.4	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN fungsional yang dibina	Orang	25.00	229,195,000.00	25.00	178,040,000.00	100.00	118,100,000.00	(59,940,000.00)	Kec. Tanah Grogot	APBD
3.5	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	Orang	50.00	24,574,000.00	50.00	34,208,000.00	60.00	34,208,000.00	-	Kec. Tanah Grogot	APBD
4	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase ASN dengan Nilai SKP Baik**	**Persen**	**90.00**	**978,010,000.00**	**90.00**	**616,480,000.00**	**100.00**	**743,696,663.00**	**127,216,663.00**	**Kec. Tanah Grogot**	**APBD**
		Persentase ASN yang Mendapatkan Penghargaan (SLKS dan ASN Berprestasi)	**Persen**	**90.00**		**90.00**		**92.00**			**Kec. Tanah Grogot**	**APBD**
		Persentase ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kinerja/Disiplin Pegawai	**Persen**	**85.00**		**85.00**		**85.00**			**Kec. Tanah Grogot**	**APBD**

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Sebelum				Sesudah		Selisih (+/-)	Lokasi	Sumber Dana
				Target Kinerja	Anggaran Murni	Target Kinerja	Anggaran Pergeseran	Target Kinerja	Anggaran Perubahan			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Dokumen	1.00	87,189,000.00	1.00	43,594,500.00	3.00	58,594,500.00	15,000,000.00	Kec. Tanah Grogot	APBD
4.2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Dokumen	1.00	123,307,000.00	1.00	98,078,500.00	13.00	120,394,500.00	22,316,000.00	Kec. Tanah Grogot	APBD
4.3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Laporan	1.00	124,504,000.00	1.00	62,252,000.00	13.00	77,252,000.00	15,000,000.00	Kec. Tanah Grogot	APBD
4.4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	Orang	800.00	288,154,000.00	800.00	191,727,000.00	2,000.00	279,627,713.00	87,900,713.00	Kec. Tanah Grogot	APBD
4.5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	Orang	400.00	73,234,000.00	400.00	36,617,000.00	300.00	37,708,200.00	1,091,200.00	Kec. Tanah Grogot	APBD
4.6	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Laporan	1.00	156,337,000.00	1.00	101,568,500.00	13.00	80,293,500.00	(21,275,000.00)	Kec. Tanah Grogot	APBD

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Sebelum				Sesudah		Selisih (+/-)	Lokasi	Sumber Dana
				Target Kinerja	Anggaran Murni	Target Kinerja	Anggaran Pergeseran	Target Kinerja	Anggaran Perubahan			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.7	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah dokumen pelayanan proses izin perceraian pegawai	Dokumen	50.00	49,253,848.00	50.00	24,626,924.00	5.00	26,505,674.00	1,878,750.00	Kec. Tanah Grogot	APBD
4.8	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi disiplin ASN	Laporan	1.00	76,031,152.00	1.00	58,015,576.00	13.00	63,320,576.00	5,305,000.00	Kec. Tanah Grogot	APBD
C	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN Manajerial dan Fungsional memiliki Sertifikasi**	**Persen**	**80.00**	**4,102,466,500.00**	**80.00**	**3,153,931,994.00**	**85.00**	**3,094,837,985.00**	**(59,094,009.00)**	**Kec. Tanah Grogot**	**APBD**
1	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase Calon ASN dan ASN yang Telah Lulus Memenuhi Diklat Perjenjangan**	**Persen**	**92.00**	**4,102,466,500.00**	**92.00**	**3,153,931,994.00**	**95.00**	**3,094,837,985.00**	**(59,094,009.00)**	**Kec. Tanah Grogot**	**APBD**
1.1	Penyelenggaran Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Laporan	2.00	4,102,466,500.00	2.00	3,153,931,994.00	2.00	3,094,837,985.00	(59,094,009.00)	Kec. Tanah Grogot	APBD

Pada Tahun Anggaran 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan serta penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN). Dalam tahap awal perencanaan, alokasi anggaran murni BKPSDM ditetapkan sebesar Rp20.094.096.616,00. Angka tersebut mencerminkan kebutuhan dasar organisasi dalam melaksanakan program prioritas yang diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2025.

Namun, seiring dengan berjalannya tahun anggaran dan adanya kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi serta penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah, dilakukan pergeseran anggaran *(refocusing).* Dalam proses ini, dilakukan identifikasi terhadap kegiatan dan subkegiatan yang masih dapat dioptimalkan melalui efisiensi belanja, tanpa mengurangi esensi capaian kinerja. Hasil dari kebijakan efisiensi tersebut menyebabkan total pagu BKPSDM bergeser menjadi Rp17.696.880.052,00. Pergeseran ini tidak hanya bersifat pengurangan semata, melainkan merupakan upaya penataan ulang alokasi anggaran agar lebih fokus pada kegiatan yang memiliki urgensi dan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan manajemen kepegawaian. Selain itu, langkah efisiensi ini juga merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan fiskal dan memastikan kesinambungan pembiayaan program prioritas lintas perangkat daerah.

Selanjutnya, pada tahap Perubahan Anggaran Tahun 2025, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan hingga semester pertama, hasil kinerja yang telah dicapai, serta proyeksi kebutuhan untuk sisa tahun anggaran. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa kegiatan dan subkegiatan yang memerlukan tambahan dukungan anggaran karena faktor peningkatan volume kerja, penyesuaian terhadap kebijakan nasional, maupun kebutuhan operasional yang belum sepenuhnya tertampung dalam anggaran hasil efisiensi sebelumnya. Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut, BKPSDM Kabupaten Paser memperoleh tambahan alokasi dalam Perubahan Anggaran Tahun 2025 menjadi sebesar Rp18.953.949.068,00. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar Rp1.257.069.016,00 dibandingkan dengan hasil pagu setelah efisiensi (pergeseran). Penambahan ini menunjukkan adanya reorientasi kebijakan anggaran dari efisiensi menuju optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih produktif dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Perubahan pagu ini juga mencerminkan dinamika penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah, terutama dalam mendukung agenda reformasi birokrasi, peningkatan

kapasitas ASN, serta penguatan sistem manajemen kepegawaian berbasis kinerja.

Secara keseluruhan, pola perubahan anggaran BKPSDM Tahun 2025 menggambarkan proses penyesuaian yang adaptif, efisien, dan akuntabel. Penurunan anggaran pada tahap efisiensi menunjukkan komitmen BKPSDM dalam mendukung kebijakan rasionalisasi belanja daerah, sedangkan peningkatan kembali pada tahap perubahan menggambarkan upaya organisasi dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program prioritas tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian fiskal.

Dengan demikian, perubahan dari anggaran murni sebesar Rp20.094.096.616,00 menjadi Rp17.696.880.052,00, dan akhirnya meningkat kembali menjadi Rp18.953.949.068,00, menunjukkan adanya siklus perencanaan dan penganggaran yang dinamis namun tetap terarah. Seluruh proses tersebut dilakukan melalui mekanisme perencanaan partisipatif dan evaluasi berbasis kinerja, dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur di Kabupaten Paser.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta memuat program, kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Renja ini bertujuan untuk menjaga konsistensi capaian kinerja perangkat daerah terhadap prioritas pembangunan dan Visi serta Misi Kepala Daerah, sekaligus memastikan adanya keselarasan antara perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM tetap berada dalam kerangka pembangunan yang terintegrasi dan mendukung tujuan strategis daerah secara keseluruhan.

4.1. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Paser Tahun 2025 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021–2026, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025. Renja ini memuat arah kebijakan teknis tahunan yang mendukung pencapaian tujuan, sasaran, serta indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagaimana tertuang dalam Renstra.

Pada Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025, terdapat 3 program, 12 kegiatan, dan 44 sub kegiatan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan organisasi serta mendukung pencapaian kinerja prioritas pembangunan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, apabila terjadi perubahan kebijakan maupun keterbatasan ketersediaan anggaran yang menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana dan kemampuan riil, maka dilakukan penyesuaian terhadap susunan kegiatan dan sub kegiatan. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kontribusi masing-masing sub kegiatan terhadap pencapaian IKU dan IKK tahunan. Sub kegiatan dengan tingkat prioritas paling rendah dalam mendukung indikator kinerja akan menjadi sasaran utama pengurangan atau penyesuaian, sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program tetap dapat terjaga.

Langkah ini merupakan bentuk adaptasi terhadap dinamika perencanaan dan penganggaran daerah yang tetap menjaga konsistensi antara perencanaan strategis, operasional, dan realisasi anggaran secara berkesinambungan.

4.2. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025. merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu. dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tanggung jawab untuk:
   a) Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Paser memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 secara optimal sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. Dalam pelaksanaannya, BKPSDM juga berkewajiban untuk menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renja Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Konsistensi tersebut menjadi kunci agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

   b) Menjaga konsistensi antara RKPD. Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Guna menjamin efektivitas implementasi Renja Perubahan Tahun 2025, BKPSDM akan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai capaian indikator kinerja, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan, serta memberikan umpan balik bagi perbaikan strategi dan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan publik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser akan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala. Pemantauan dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

   Melalui mekanisme evaluasi yang terstruktur, diharapkan dapat diidentifikasi secara dini berbagai hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat segera dilakukan langkah korektif dan penyesuaian yang diperlukan. Selain itu, proses ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas perencanaan di masa yang akan datang.

4.3. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini disusun sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser. Penyusunan RKA tersebut mengacu pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian, dokumen ini memiliki peran strategis dalam menjaga keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Tana Paser, 22 Agustus 2025
Kepala Badan,

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Drs. Suwito
Pembina Utama Muda
NIP. 19650808 199203 1 019

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan R.M.Noto Sunardi Telp. (0543) 21072 – 22696, Tanah Grogot (Kode Pos 76211)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER
NOMOR: 000.7.2/972/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b. Bahwa sebagai penjabaran dan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser, perlu disusun dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2015-2019;
12. Peraturan Bupati Paser Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Awal Rencana Kerja 2026 dan Perubahan Rencana Kerja 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Awal Rencana Kerja 2026 dan Perubahan Rencana Kerja 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut:

1. Penanggungjawab mempunyai tugas yaitu:
   a. Bertanggungjawab dan memberi keputusan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja 2026 dan Perubahan Rencana Kerja 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser;
   b. Bertanggungjawab dalam setiap tahapan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja 2026 dan Perubahan Rencana Kerja 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser;
   c. Bertanggungjawab serta memimpin penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja 2026 dan Perubahan Rencana Kerja 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser;
   d. Bertanggungjawab dalam penelaahan terhadap Aspirasi/Pokok-Pokok pikiran DPRD;
   e. Melakukan validasi terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja 2026 dan Perubahan Rencana Kerja 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser;
   f. Melakukan input indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, serta Kelompok sasaran kegiatan pada setiap kegiatan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

2. Ketua mempunyai tugas yaitu:
   a. Memimpin penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja 2026 dan Perubahan Rencana Kerja 2025 berdasarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026;
   b. Mengkoordinir secara operasional dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja 2026 dan Perubahan Rencana Kerja 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser;
   c. Mengkoordinir penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja 2026 dan Perubahan Rencana Kerja 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser;
   d. Mengkoordinir penelaahan terhadap Aspirasi/Pokok Pikiran DPRD
   e. Mengkoordinir terhadap penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja 2026 dan Perubahan Rencana Kerja 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI);
   f. Menyampaikan laporan perkembangan dan hasil akhir penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja 2026 dan Perubahan Rencana Kerja 2025 kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.

3. Sekretaris mempunyai tugas yaitu:
   a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja 2026 dan Perubahan Rencana Kerja 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser;
   b. Mengatur teknis operasional dalam penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja 2026 dan Perubahan Rencana Kerja 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser;
   c. Mengkordinasikan pengumpulan dan menganalisa data dan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk deskripsi, tabel, grafik, gambar dan sebagainya, sesuai tugas pokok dan fungsi sub unit;
   d. Menelaah Rancangan Awal Rencana Kerja 2026 dan Perubahan Rencana Kerja 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser dengan dasar Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (RENSTRA), RKPD Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026;
   e. Menelaah dan menerapkan tahapan-tahapan perencanaan/pengendalian dan evaluasi serta konsep perencanaan dalam penyusunan dokumen sesuai peraturan yang berlaku;
   f. Melakukan sinkronisasi dan keselarasan penulisan serta substansi pada masing-masing Bab dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja 2026 dan Perubahan

Rencana Kerja 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser;

g. Melakukan koordinasi dalam mendukung kelancaran proses penyusunan dokumen perencanaan antara lain dalam bentuk administrasi, penyediaan sarana dan prasarana, penyajian dokumen, publikasi dan distribusi serta penyebarluasan dokumen.

4. Anggota mempunyai tugas yaitu:
   a. Membantu dalam menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja 2026 dan Perubahan Rencana Kerja 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser;
   b. Melakukan perumusan dan penyusunan substansi dalam bentuk data dan informasi sesuai dengan kebutuhan melalui deskripsi, tabel, grafik, gambar dan sebagainya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
   c. Melakukan analisis kinerja pelayanan organsiasi perangkat daerah BKPSDM;
   d. Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi organsiasi perangkat daerah (OPD) BKPSDM;
   e. Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi organsiasi perangkat daerah (OPD) BKPSDM;
   f. Merumuskan tujuan, sasaran dan program/kegiatan berdasarkan Rencana Strategis BKPSDM tahun 2021-2026;
   g. Merumuskan kegiatan prioritas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 08 Januari 2025

KEPALA,

Drs. Suwito
Pembina Utama Muda
NIP. 196508081992031 019

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Inpektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser di Tana Paser;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Badan BKPSDM Kabupaten Paser
Nomor : 000.7.2/972/2025
Tanggal : 08 Januari 2025

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RANCANGAN AWAL RENJA 2026 DAN PERUBAHAN RENJA 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER

Penangung Jawab : Kepala BKPSDM Kabupaten Paser

Ketua : Sekretaris BKPSDM Kabupaten Paser

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan BKPSDM Kabupaten Paser

Anggota :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Paser
2. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Sistem Informasi Kepegawaian
3. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Mutasi dan Promosi ASN
4. Kepala Bidang Penilaian Kinerja, Penghargaan dan Disiplin ASN

KEPALA,

Drs. Suwito
Pembina Utama Muda
NIP.196508081992031019

Pemerintah Kabupaten Paser





RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

bpbdkabpaser@gmail.com

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

Rancangan Renja Perubahan Tahun 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub. Kegiatan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser merupakan Rencana Kerja periode satu tahunan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser untuk tahun berikutnya, dimana dalam Renja Perangkat Daerah menggambarkan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk masa satu tahun kedepan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja lima tahun kedepan yang terdapat dalam Renstra tahun 2021-2026.

Dalam Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah akan menganalisa setiap tujuan dan sasaran yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai tupoksi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Demikian Rancnagan Rencana Akhir Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dibuat dan kami berharap agar Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025.

Tana Paser, Juli 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Paser

Ruslan, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19681025 199303 1 005

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1-2
1.2 Landasan Hukum..... 3
1.3 Maksud Dan Tujuan..... 5
1.4 Sistematika Penyusunan..... 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU..... 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 7
Tabel T-C. 29..... 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 14
Tabel T-C. 30..... 15
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi..... 18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 19
Tabel T-C. 31..... 20
2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 27
Tabel T-C. 32..... 27

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 28

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 28
3.3 Program dan Kegiatan..... 29
Tabel T-C. 33..... 30

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.. 38

BAB V PENUTUP..... 41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Paser. Berdasarkan diktum kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan kepada daerah yang telah menetapkan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Dan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021-2026, sehingga terdapat konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sebagai bagian dari evaluasi audit kinerja yang mulai dilaksanakan Tahun 2025.

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan bagian dari dokumen Perencanaan yang berisi rencana kerja program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun kedepan. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, serta program-program dan kegiatan pembangunan yang terukur disertai pagu indikatif dan pendanaannya. Rencana Kerja Pembangunan Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja Perangkat Daerah akan menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan. Dengan demikian Renja merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Seperti yang tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004, mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Paser, yang mana telah tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

"TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK BENCANA "

Untuk mewujudkan Visi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menetapkan misi dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Adapun Misi yang diemban antara lain :

a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang handal dan tangguh dalam menghadapi Pra bencana, Tanggap darurat dan Pascabencana.
b. Memaksimalkan keterlibatan semua stakeholder dalam penyelenggaraan bencana.
c. Mewujudkan pelayanan penanganan kedaruratan yang lebih baik dan cepat kepada masyarakat yang terdampak bencana dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan.
d. Mewujudkan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana dan berkoordinasi dengan instansi terkait .

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 akan mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan yang di dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ada beberapa landasan hukum yang digunakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 yang merubah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat DaerahPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Mendagri Nomor 86 Tahun 2017 tata cara perencanaan, pengendalian danevaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan

rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Akhir Kerja (RENJA) Tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu satu tahun kedepan guna tercapainya efektifitas dan efisiensi sumber daya yang dimiliki dan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan program kegiatan dan Sub. Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta pemenuhan SPM .

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

a. Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi acuan kegiatan dan Sub. Kegiatan.
b. Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan dan Sub. Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana.
c. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan, dan alokasi sumber dana serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan penanggulangan bencana.
d. Terlaksananya SPM yang menjadi Tanggung jawab Pemerintah Daerah khususnya bidang kebencanaan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan susunan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TRIWULAN II

Menggambarkan uraian pengukuran kinerja kegiatan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan tahun sebelumnya.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB I V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah bertujuan untuk :

1. Peningkatan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Umpan balik peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap lingkungannya.

Proses penyusunan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dilakukan melalui proses perhitungan pengukuran kinerja untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan penyebab kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan melalui capaian target kinerja.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C. 29

Adapun tabel rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra SKPD

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai denganRenja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
1	*3*	4	5			6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Resiko Bencana	193,5		10.916.297.198	287,69	10.604.553.047	194	4.479.326.100,00		630.165.400,00		178.011.556,00		-		-		808.176.956,00	-	18,04	287,7	11.412.730.003,00	148,68	104,55	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase layanan informasi Rawan Bencana	100 %		1.279.460.814	0	-	100 %	270.000.000,00	3	9.290.000,00	4	11.086.000,00					7,5	20.376.000,00	7,55	7,55	7,5	20.376.000,00	754,67	1,59	

	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten /Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	8.500	Warga/Peserta	300.000.000	0	-	8.500	Warga/peserta	270.000.000,00	-	9.290.000,00	4.325	11.086.000,00					4325	20.376.000,00	50,88	7,55	4.325,0	20.376.000,00	50,88	6,79	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100		3.192.361.817	45	1.711.993.854	100	%	744.230.320,00	12	91.725.800,00	5	40.322.804,00		-		-	17,3249	132.048.604,00	17,32	17,74	62,3	1.844.042.458,00	62,32	57,76	
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten /Kota yang tertangani	75	Lokasi	1.353.300.000	45	1.044.724.148	15	Kegiatan	459.630.320,00	3	84.122.800,00	5	33.778.004,00					8	117.900.804,00	53,33	25,65	53,0	1.162.624.952,00	70,67	85,91	

	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	322	Anggota	558.921.000	242	523.264.020	105 Orang	104.600.000,00			-					0	-	-	-	242,0	523.264.020,00	75,16	93,62		
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kot	Jumlah PeralatanPenyelamatan Diri bagiIndividu Warga Negara,Keluarga, maupun Petugassesuai dengan jenisancaman bencana dikawasan tempat tinggalnya	63	Unit	250.000.000	0	-	59 unit	10.000.000,00			-					0	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikutigladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100	orang	300.000.000	0	-	100 Orang	150.000.000,00		7.603.000,00		6.544.800,00				0	14.147.800,00	-	9,43	-	14.147.800,00	0,00	4,72		

	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	4	Laporan	500.000.000	0	-	4 laporan	10.000.000,00									0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100	%	230.140.817	63	144.005.686	1 Kawasan	10.000.000,00									0	-	-	-	63,0	144.005.686,00	63,00	62,57	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	%	6.435.161.606	100%	7.051.053.781	100 %	2.449.811.520,00	19	464.599.600,00	21	98.846.352,00	-	-	-	-	40,24	563.445.952,00	40,24	23,00	41,2	7.614.499.733,00	41,24	118,33	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	100	%	4.572.271.960	10	4.709.087.087	5 Dokumen	1.402.042.520,00		319.530.000,00	1	36.146.352,00					1	355.676.352,00	20,00	25,37	11,0	5.064.763.439,00	11,00	110,77	

	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100	%	1.562.889.646	1342	2.341.966.694	500 orang	659.832.000,00	216	104.830.000,00	489	62.700.000,00					705	167.530.000,00	141,00	25,39	2.047,0	2.509.496.694,00	2047,00	160,57	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500	Orang	600.000.000	0	-	500 orang	387.937.000,00	216	40.239.600,00	489	13.807.200,00					705	54.046.800,00	141,00	13,93	705,0	54.046.800,00	141,00	9,01	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100	%	456.858.208	21	1.841.505.412	1 Dokumen	1.015.284.260,00	7	73.840.000,00	53	38.842.400,00	-	-	-	-	59,8763	112.682.400,00	5.987,63	11,10	80,9	1.954.187.812,00	80,88	427,74	
	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	50	Kecamatan	456.858.208	21	1.841.505.412	1 Dokumen	664.284.260,00		73.840.000,00		38.842.400,00					0	112.682.400,00	-	16,96	21,0	1.954.187.812,00	42,00	427,74	

	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	5	Dokumen	360.728.000	0	-	1 Dokumen	34.040.000,00									0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	5	Dokumen	550.960.000	0	-	2 Dokumen	316.960.000,00									0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP (BPBD)	85		30.673.646.546	100	20.727.145.113	70	9.798.319.536,00	-	1.336.510.817,00	18	2.501.460.303,00	-	-	-	-	17,87	3.837.971.120,00	25,53	39,17	117,9	24.565.116.233,00	138,67	80,09	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	595.000.000	64	263.773.783	100 %	174.850.000,00		-		40.708.000,00		-		-	0	40.708.000,00	-	23,28	64,0	304.481.783,00	64,00	51,17	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	110.134.910	49,00	121.680.439	16 Dokumen	99.800.000,00			6	22.590.000,00					6	22.590.000,00	37,50	22,64	55,0	144.270.439,00	550,00	130,99	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Dokumen	214.045.677	51,00	142.093.344	Laporan 17	75.050.000,00			6	18.118.000,00					6	18.118.000,00	35,29	24,14	57,0	160.211.344,00	380,00	74,85	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi administrasi keuangan yang terlaksana	100	%	27.963.966.122	100%	19.005.899.403	% 100	8.919.992.596,00	14	1.242.582.390,00	26	2.339.543.625,00	-	-	-	-	40,16	3.582.126.015,00	40,16	40,16	41,2	22.588.025.418,00	41,16	80,78	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Dokumen	26.698.423.765	56	18.094.676.313	Bulan 14	8.606.221.636,00	3	1.184.356.954	5	2.325.892.025,00					8	3.510.248.979,00	57,14	40,79	64,0	21.604.925.292,00	91,43	80,92	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	Dokumen	1.265.542.357	48	911.223.090	Laporan 12	313.770.960,00	3	58.225.436	3	13.651.600,00					6	71.877.036,00	50,00	22,91	54,0	983.100.126,00	90,00	77,68	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	1.094.512.025	96	759.572.297	% 100	252.437.948,00	3	8.618.700,00	13	32.913.400,00	-	-	-	-	16,45	41.532.100,00	16,45	16,45	112,5	801.104.397,00	112,45	73,19	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	26	Jenis	290.931.180	1	2.989.200	Paket 1	3.000.000,00									0	-	-	-	1,0	2.989.200,00	3,85	1,03	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	198	Jenis	290.931.180	47	214.685.785	12 Paket	30.036.000,00									0	-	-	-	47,0	214.685.785,00	23,74	73,79	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	198	Jenis	290.931.180	11	116.599.200	11 Paket	113.501.948,00									0	-	-	-	11,0	116.599.200,00	5,56	40,08	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	Jenis	57.070.497	47	29.528.286	12 Paket	12.700.000,00									0	-	-	-	47,0	29.528.286,00	313,33	51,74	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2500	Eksemplar	19.488.054	995	11.842.760	12 Dokumen	3.200.000,00									0	-	-	-	995,0	11.842.760,00	39,80	60,77	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87	Kali	427.831.969	48	601.602.051	12 Laporan	90.000.000,00	3	8.618.700,00	3	32.913.400,00					6	41.532.100,00	50,00	46,15	54,0	643.134.151,00	62,07	150,32	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadministrasian umum Berjalan Baik	100	%	270.176.163	146,513	313.583.785	100 %	101.199.992,00	14	14.595.199,00	16	16.332.378,00	-	-	-	-	31	30.927.577,00	30,56	30,56	177,1	344.511.362,00	177,07	127,51	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	785	lembar	5.100.000	180	1.750.000	Laporan 12	1.199.992,00									0	-	-	-	180,0	1.750.000,00	22,93	34,31	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bulan	265.076.163	48	311.833.785	Laporan 12	100.000.000,00	3	14.595.199,00	3	16.332.378,00					6	30.927.577,00	50,00	30,93	54,0	342.761.362,00	450,00	129,31	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	991.711.649	100%	384.315.845	% 100	349.839.000,00	20	70.714.528,00	21	71.962.900,00	-	-	-	-	40,78	142.677.428,00	40,78	40,78	41,8	526.993.273,00	41,78	53,14	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55	Unit	126.800.000	31	229.049.725	Unit 18	339.839.000,00	5	70.714.528,00	5	71.962.900,00					10	142.677.428,00	55,56	41,98	41,0	371.727.153,00	74,55	293,16	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99	Unit	58.252.419	95	31.620.160	Unit 11	10.000.000,00									0	-	-	-	95,0	31.620.160,00	95,96	54,28	
Rata-rata capaian kinerja (%)							**92,32**		**14.277.645.636,00**						**Jumlah Realisasi Program**			**163,86**	**4.666.524.076,00**			**269,90**		**167,55**	**89,23**	
Predikat kinerja							Rendah																	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

2.1 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser dilakukan penilaian terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dalam pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, penilaian disusun dengan melakukan pendekatan terhadap kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan sistem kinerja tersebut didasarkan pada input, output dan outcome, terhadap pelaksanaan kegiatan dalam mencapai visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Secara rinci capaian capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser disajikan pada tabel berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Paser

No.	Indikator	SPM /Standar nasional	IKK	Target Capaian	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026
	PENANGGULANGAN BENCANA											
1.	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang di legalisasi	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten/Kota	-	100 %	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-
2.	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (perjenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada dikawasan tempat tinggalnya	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten Paser (Perjenis Bencana) Rawan Bencana	-	150 orang	25 orang	25 orang	50 orang	50 orang	-	-	-	150 orang
3.	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang dilegalisasi	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	100 %	1 dokumen	-	-	-	-	-	100 %	100 %

4.	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	-	145 orang	40 orang	25 orang	50 orang	30 orang	-	-	-	25 orang
5.	Jumlah dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen
6.	Jumlah peralatan penyelematan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	10 unit	-	10 unit	10 unit	10 unit	-	-	-	10 unit
7.	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang dilegalisasi	Penyusunan Rencana Kontijensi	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen
8.	Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-	50 orang	-	50 orang	50 orang	50 orang	-		50 orang	50 orang
9.	SK Penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-		1 dokumen	1 dokumen
10.	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan di evakuasi per jenis	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	-	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100 %	100 %	100%	30 orang

	kejadian bencana											
11.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Penyediaan Logistik dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	-	10 orang	-	10 orang	10 orang	-	-	-	-	10 orang
12.	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		-	-	-	1 laporan	1 laporan	-	-	-	-

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sebagai perangkat daerah yang menangani kebencanaan maka dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser, harus memprogramkan kegiatan - kegiatan yang tidak hanya bersifat responsive (tanggap darurat) namun juga menitikberatkan pada preventif atau pencegahan (siaga bencana).

Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma penanggulangan kebencanaan yang diusung pemerintah saat ini yaitu penanganan bencana yang bersifat reaktif atau telah berubah menjadi pengelolaan bencana secara manajerial.

Beberapa isu - isu strategis yang terkait dengan penanggulangan bencana saat ini, antara lain :

1. Kebijakan penanggulangan bencana di daerah belum optimal;
2. Masih tingginya tingkat kerentanan bencana;
3. Masih lemahnya kapasitas masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana;
4. Masih minimnya informasi risiko bencana dan sistem informasi kebencanaan;
5. Belum efektifnya kesiapsiagaan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana;
6. Terbatasnya alokasi pembiayaan anggaran di sektor kebencanaan.

Meskipun perencanaan dalam hal penanganan bencana telah dilaksanakan untuk meminimalkan dampak kerusakan yang terjadi pada lingkungan, serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana, namun pada saat pelaksanaannya masih seringkali terkendala upaya penanganan yang kurang koordinatif.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap Rancangan RKPD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan. Hasil Review terhadap rancangan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 terlihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025
Kabupaten Paser

No.	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Rancangan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
A.	**PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pelayanan kesekretariatan		9.615.430.800		Tingkat kepuasan pelayanan kesekretariatan		**9.899.394.061**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		**87.425.000**		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		**108.399.000**
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tana Paser	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	16 dokumen	49.900.000	Tana Paser	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	16 dokumen	70.874.000
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tana Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 laporan	37.525.000	Tana Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 laporan	37.525.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah**		**8.884.937.756**		Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah		**8.899.937.756**

1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tana Paser	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 Orang/ 14bulan	8.606.221.636	Tana Paser	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 Orang/ 14bulan	8.606.221.636
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	12 laporan	278.716.120	Tana Paser	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	12 laporan	293.716.120
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tingkat kepuasan administrasi umum perangkat daerah		**192.029.052**				**318.224.814**
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tana Paser	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	3.000.000	Tana Paser	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	3.000.000
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tana Paser	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	113.501.948	Tana Paser	Jumlah paket peralatan dan perlegkapan kantor yang disediakan	11 paket	154.147.710
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tana Paser	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	20.977.104	Tana Paser	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	25.977.104
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tana Paser	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	12 Paket	6.350.000	Tana Paser	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	12 paket	6.350.000

			disediakan				disediakan		
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tana Paser	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	500 Exemplar	3.200.000	Tana Paser	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 dokumen	3.200.000
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tana Paser	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	45.000.000	Tana Paser	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	125.550.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pengadministrasian umum berjalan baik	**100%**	**101.199.992**				**158.199.992**
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tana Paser	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	1.199.992	Tana Paser	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	1.199.992
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	100.000.000	Tana Paser	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	157.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan BMD	**100%**	**349.839.000**		Persentase Pemeliharaan BMD		**414.632.499**

1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tana Paser	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18 Unit	339.839.000	Tana Paser	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dna dibayarkan pajak dan perizinannya	11 unit	404.632.499
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tana Paser	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 Unit	10.000.000	Tana Paser	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 unit	10.000.000
B.	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**		- **Cakupan layanan penanggulangan bencana** - **Indeks ketahanan daerah** - **Indeks Ketahanan Daerah** - **Indeks Resiko Bencana**	**75** **100%**	3.295.191.731		- **Cakupan layanan penanggulangan bencana** - **Indeks ketahanan daerah** - **Indeks Ketahanan Daerah** - **Indeks Resiko Bencana**	**100%**	**4.072.117.851**
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				**183.967.250**		**Meningkatnya Informasi kepada masyarakat tentang bencana**	**Tercapainya informasi bencana kepada masyarakat**	**183.967.250**

1.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten Paser (Perjenis Bencana)	Kabupaten Paser	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	200 orang	183.967.250	Kabupaten Paser	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	200 orang	183.967.250
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		**Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif**	**70%**	**561.928.523**		**Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif**	**Jumlah daerah yang rawan bencana 10 Kecamatan**	**1.172.364.643**
1.	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/kota	Kabupaten Paser	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	15 kegiatan	341.630.320	Kabupaten Paser	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	15 kegiatan	374.552.320

2.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 unit	9.059.828	Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	59 unit	324.806.018
3.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	100 orang	114.732.120	Tana Paser	Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	100 orang	114.732.120
4.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	Tana Paser	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	105 Anggota	84.400.000	Tana Paser	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	105 Anggota	84.400.000
6.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	4 laporan	7.106.255	Kabupaten Paser	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	4 laporan	130.290.025

7.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	5.000.000	Kabupaten Paser	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	2 Kawasan	143.584.160
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase penanganan bencana	100%	**1.878.188.879**		Presentase warga negara yang mendapat penyelamatan dan evakuasi	100%	**2.044.678.879**
1.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	5 dokumen	1.164.456.420	Kabupaten Paser	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	5 dokumen	1.272.946.420
2.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	500 orang	514.783.880	Kabupaten Paser	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan di evakuasi per jenis kejadian bencana	500 orang	572.783.880

3.	Penyediaan Logistik dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 orang	198.948.579	Kabupaten Paser	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 orang	198.948.579
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		**Persentase sistem dasar penanggulangan bencana**	**100%**	**671.107.079**				**671.107.079**
1.	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota	Kabupaten Paser	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan	461.960.234	Kabupaten Paser	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan	461.960.234
2.	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	17.020.000	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	17.020.000

3.	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	192.126.845	Kabupaten Paser	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	192.126.845
	JUMLAH				**12.910.622.531**	**JUMLAH**			**13.971.511.912**

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan, program prioritas dan adanya rekapitulasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025.

Hasil perumusan program, kegiatan dan Sub. Kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan sebagai berikut :

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

No.	Prioritas Daerah	Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Rp.	Ket
1	2	3	4	5
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan Penanggulangan Bencana	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**4.072.117.851,00**	
1.		***Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota***	**183.967.250,00**	
		- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten Paser (Perjenis Bencana)	183.967.250,00	
2.		***Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana***	**1.172.364.643,00**	

		- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten Paser	143.584.160,00	0
		- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten	130.290.025,00	0
		- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	324.806.018,00	0
		- Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten /Kota	374.552.320,00	0
		- Sub. Kegiata Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	84.400.000,00	0
		- Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	114.732.120,00	0
3.		***Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	**2.044.678.879,00**	
		- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.272.946.420,00	0
		- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	572.783.880,00	0

		-	Penyediaan Logistik dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	198.948.579,00	0
4.			***Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana***	**671.107.079,00**	
		-	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota	461.960.234,00	
		-	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	17.020.000,00	
		-	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	192.126.845,00	
			Jumlah	**4.006.601.048,00**	

Perkiraan maju berdasarkan indikator kinerja dan pagu indikatif yang telah disusun, dalam rumusan rencana program/kegiatan dan Sub. Kegiatan maka diharapkan pada tahun berikutnya dengan program , kegiatan dan Sub. Kegiatan yang telah ditetapkan dapat meningkat seiring dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser dalam hal penanggulangan bencana.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) sangat penting dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dapat dirasakan sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser adalah Program Tahunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran program BPBD Kabupaten Paser. Dalam pelaksanaan program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) menjadi pedoman untuk peningkatan kinerja bagi seluruh jajaran BPBD dan untuk memulihkan dampak buruk masyarakat yang terkena bencana menjadi lebih baik di Kabupaten Paser dan pemenuhan SPM tentang kebencanaan.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf BPBD Kabupaten Paser agar menjadi lebih baik dimasa datang.

Demikian diharapkan rencana kinerja tahunan ini dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan dan semoga dapat bermanfaat serta mendukung keberhasilan pembangunan Kabupaten Paser.

Tana Paser, Juli 2025

Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Paser

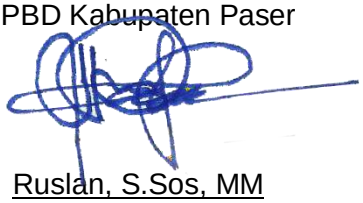

Ruslan, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19681025 199303 1 005

LAMPIRAN – LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman Telp/Fax. 0543-22469 Tana Paser 76211
E-mail: bpbdpaser@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR : 050/ 46 /BPBD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA PELAKSANA,

Menimbang : a. bahwa menjamin terwujudnya konsistensi perencanaan pembangunan Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025;

c. Tim sebagaimana dimaksud di tetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Tim Penyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA keputusan ini terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan Renja PD

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : Februari 2024

Kepala Pelaksana,

Ruslan, S.Sos, MM
Pembina Tk.I (IV b
NIP 19681025 199303 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nomor : 050/ 46 /BPBD/2024
Tanggal : Februari 2024
Tentang : **Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025**

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASER
TAHUN 2025

Jabatan Dalam Tim		Nama / Jabatan
Pengarah	:	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser
Penanggungjawab	:	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Anggota	:	1. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik 3. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi 4. Hermansyah 5. Marianti, A. Md 6. Yossy Yulianingsih, S.Sos 7. Nor Octavia Saputri

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,

Ruslan, S.Sos, MM
Pembina Tk.I / IV b
NIP 19681025 199303 1 005

Nomor : 050/ 46 **/BPBD/2024**
Tanggal : Februari 2024
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASER

TAHUN 2025

1. Pengarah, yaitu:

    a. Memberikan arahan, masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 202**5**, baik dalam hal persiapan, mekanisme penyelenggaraan, pelaksanaan penyusunan, hasil akhir dokumen maupun legalisasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 202**5**;
    b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim kelompok kerja Renja Tahun 202**5**;
    c. Menyampaikan laporan kegiatan perkembangan penyusunan Renja melalui Sekretaris BPBD Kabupaten Paser.

1. Penanggungjawab, yaitu:
    a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan Tim Penyusun Renja BPBD Kabupaten Paser Tahun 202**5**;
    b. Membantu Penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Renja Tahun 202**5** BPBD;
    c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun kepada Kepala BPBD Kabupaten Paser.

2. Ketua, yaitu:
    a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusuna Renja Tahun 202**5** BPBD Kabupaten Paser;
    b. Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim penyusun Renja Tahun 202**5** BPBD;
    c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusun kepada Penanggungjawab penyusunan Renja BPBD Kabupaten Paser

3. Anggota, yaitu:

    a. Mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah (PD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser;
    b. Melakukan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser;
    c. Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser;
    d. Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
    e. Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan;
    f. Merumuskan program prioritas;

g. Menyesuaikan dokumen rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,

Ruslan, S.Sos, MM
Pembina Tk.I / IV b
NIP 19681025 199303 1 005

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASER

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud Dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Denga Triwulan I 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18
2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 20

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 22
3.1 Tujuan dan Sasaran 22
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 23

BAB IV PENUTUP 36

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra 2022 s/d 2024 10

Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kab. Paser 19

Tabel 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 21

Tabel 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 29

Tabel 5 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangun Tahun 2025 33

Tabel 6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 44

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja.

Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara keseluruhan terdiri dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir, dan Penetapan Ranwal Renja. Penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, dimana Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ke empat dalam periode Renstra Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

Adapun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode dalam 1 (satu) tahun, yang

bertujuan untuk merencanakan pembangunan tahunan perangkat daerah, memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Pasal 4 ayat (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Inspektorat Daerah Kabupaten Daerah, hasil pengendalian pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Ranhir Renja Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Inspektorat Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Inspektorat yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser antara lain :

1. Untuk mengoptimlkan peran, fungsi dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser yang akan dilaksanakan pada triwulan II, triwulan III dan triwulan IV Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

1.1 Latar Belakang.

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, proses penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah kabupaten Paser, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra Inspektorat Daerah kabupaten Paser, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2025 hingga Triwulan I baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025.

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat :

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2025 yang disertai perubahan target.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikanTelaahan terhadap Kebijakan Nasional;

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat :

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 1

Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Ke 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	3	4	5			6			7			8		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
			K		RP	K		RP	K		RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
INSPEKTORAT DAERAH					**92.876.637.602**			**42.100.229.362**			**31.624.951.060**		**4.953.339.140**		**4.953.339.140**					
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan		**Tingkat Maturitas SPIP**	**3 (3.000)**	**Level**	**14.195.221.594**	**3 (3.432)**	**Level**	**13.684.219.414**	**3 (3.000)**	**Level**	**6.833.393.909**	**3 (3.432)**	**422.463.946**	**3 (3.432)**	**422.463.946**	**3 (3.432)**	**14.106.683.360**	**114**	**99,38**	
		Tingkat Kapabiltas APIP	**3 (3.000)**	**Level**		**3 (3.000)**	**Level**		**3 (3.000)**	**Level**		**3 (3.000)**		**3 (3.000)**		**3 (3.000)**		**100**		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Indeks Penerapan Manajemen Resiko**	**4,00**	**Level**	**12.967.950.581**	**3,51**	**Level**	**12.249.278.460**	**3,9**	**Persen**	**4.245.972.323**	**3,51**	**367.631.943**	**3,51**	**367.631.943**	**3,513**	**12.616.910.403**	**87,83**	**97,29**	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Disusun Tepat Waktu**	**100**	**Persen**	**11.237.499.714**	**100**	**Persen**	**10.682.444.197**	**100**	**Persen**	**3.329.123.323**	**25,08**	**367.631.943**	**25,08**	**367.631.943**	**81,27**	**11.050.076.140**	**81,27**	**98,33**	
		Persentase Temuan Eksternal Yang Ditindaklanjuti	**93**	**Persen**		**92,09**	**Persen**		**92**	**Persen**		**92,09**		**92,09**		**92,09**		**99,02**		
		Persentase Temuan Internal yang Ditindaklanjuti	**60**	**Persen**		**52**	**Persen**		**58**	**Persen**		**51,60**		**51,60**		**51,60**		**86,00**		
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	490	Laporan	2.053.370.000	182	Laporan	1.910.075.703	96	Laporan	513.986.000	43	103.815.203	43	103.815.203	225	2.013.890.906	46	98,08	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	440	Laporan	2.140.329.867	166	Laporan	1.364.486.733	126	Laporan	910.417.000	5	79.451.400	5	79.451.400	171	1.443.938.133	39	67,46	
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	42	Laporan	1.776.053.150	36	Laporan	1.449.616.923	2	Laporan	251.685.500	2	94.993.140	2	94.993.140	38	1.544.610.063	90	86,97	

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Triwulan Ke 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	89	Laporan	1.094.800.000	52	Laporan	2.233.984.456	19	Laporan	417.757.000	14	32.810.000	14	32.810.000	66	2.266.794.456	74	207,05	
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	160	Laporan	1.313.098.697	65	Laporan	789.394.608	67	Laporan	461.565.500	15	28.400.000	15	28.400.000	80	817.794.608	50	62,28	
	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yangTerbentuk	8	Kesepakatan	664.820.000	6	Kesepakatan	749.369.851	1	Kesepakatan	139.008.000	0	0	0	0	6	749.369.851	75	112,72	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20	Laporan	2.195.028.000	12	Laporan	2.185.515.923	4	Dokumen	634.704.323	0	28.162.200	0	28.162.200	12	2.213.678.123	60	100,85	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Disusun Tepat Waktu**	**100**	**Persen**	**1.730.450.867**	**100**	**Persen**	**1.566.834.263**	**100**	**Persen**	**916.849.000**	**20,00**	**54.832.003**	**20,00**	**54.832.003**	**80,00**	**1.621.666.266**	**80,00**	**93,71**	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	121	Laporan	1.730.450.867	63	Laporan	1.566.834.263	5	Laporan	916.849.000	1	54.832.003	1	54.832.003	64	1.621.666.266	53	93,71	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB**	**90**	**Persen**	**1.227.271.013**	**39,02**	**Persen**	**1.434.940.954**	**85**	**Persen**	**2.587.421.586**	**39,02**	**210.192.820**	**39,02**	**210.192.820**	**39,02**	**1.645.133.774**	**43,36**	**134,05**	
		Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan peringkat minimal B	**90**	**Persen**		**80**	**Persen**		**85**	**Persen**		**80**		**80,00**		**80,00**		**88,89**		
	Pendampingan dan Asistensi	**Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi**	**100**	**Persen**	**1.227.271.013**	**100**	**Persen**	**1.434.940.954**	**100**	**Persen**	**2.587.421.586**	**25,29**	**210.192.820**	**25,29**	**210.192.820**	**81,32**	**1.645.133.774**	**81,32**	**134,05**	

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Triwulan Ke 1								
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41	Perangkat Daerah	193.800.000	41	Perangkat Daerah	45.367.255	41	Perangkat Daerah	261.026.000	16	48.625.000	16	48.625.000	41	93.992.255	100	48,50	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	42	Perangkat Daerah	538.090.000	42	Perangkat Daerah	369.830.298	42	Perangkat Daerah	600.414.000	4	149.030.235	4	149.030.235	42	518.860.533	100	96,43	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8	Kegiatan	403.581.013	4	Kegiatan	955.690.381	3	Kegiatan	1.488.289.586	2	12.537.585	2	12.537.585	6	968.227.966	75	239,91	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1	Perangkat Daerah	91.800.000	1	Perangkat Daerah	64.053.020	1	Perangkat Daerah	237.692.000	0	0	0	0	1	64.053.020	100	69,77	
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel		**Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat**	**BB (71)**	**Nilai**	**78.681.416.008**	**B (67,89)**	**Nilai**	**28.416.009.948**	**B B(70,5)**	**Nilai**	**24.791.557.151**	**B (67,89)**	**4.320.682.374**	**B (67,89)**	**4.320.682.374**	**B (67,89)**	**32.736.692.322**	**95,62**	**41,61**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**84**	**Persen**	**78.681.416.008**	**72**	**Persen**	**28.416.009.948**	**80**	**Persen**	**24.791.557.151**	**76**	**4.320.682.374**	**76**	**4.320.682.374**	**76,00**	**32.736.692.322**	**90,48**	**41,61**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**1.092.730.000**	**100**	**Persen**	**395.378.960**	**100**	**Persen**	**396.966.000**	**43,75**	**39.573.505**	**43,75**	**39.573.505**	**71,88**	**434.952.465**	**71,88**	**39,80**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29	Dokumen	251.230.000	15	Dokumen	62.148.700	7	Dokumen	130.740.000	4	20.373.505	4	20.373.505	19	82.522.205	66	32,85	

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Triwulan Ke 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	99.000.000	4	Laporan	0	4	Laporan	140.706.000	1	0	1	0	5	0	42	0,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35	Laporan	742.500.000	25	Laporan	333.230.260	5	Laporan	125.520.000	2	19.200.000	2	19.200.000	27	352.430.260	77	47,47	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**67.754.164.572**	**100**	**Persen**	**24.267.137.230**	**100**	**Persen**	**16.946.877.679**	**70,50**	**3.506.242.287**	**70,50**	**3.506.242.287**	**85,25**	**27.773.379.517**	**85,25**	**40,99**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang/Bulan	66.764.814.572	60	Orang/Bulan	23.858.138.840	60	Orang/Bulan	16.582.934.479	60	3.476.657.487	60	3.476.657.487	60	27.334.796.327	100	40,94	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1000	Dokumen	720.850.000	600	Dokumen	319.681.590	200	Dokumen	309.073.200	123	29.584.800	123	29.584.800	723	349.266.390	72	48,45	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19	Laporan	268.500.000	17	Laporan	89.316.800	1	Laporan	54.870.000	1	0	1	0	18	89.316.800	95	33,27	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**90.000.000**	**100**	**Persen**	**0**	**100**	**Persen**	**35.568.000**	**10,00**	**0**	**10,00**	**0**	**55,00**	**0**	**55,00**	**0,00**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	45.000.000	4	Laporan	0	4	Laporan	6.300.000	1	0	1	0	5	0	42	0,00	
	Penatausahaan BMD SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18	Laporan	45.000.000	6	Laporan	0	6	Laporan	29.268.000	0	0	0	0	6	0	33	0,00	

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Triwulan Ke 1								
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	**100**	**Persen**	**4.344.070.000**	**100**	**Persen**	**1.591.510.819**	**100**	**Persen**	**4.197.820.500**	**84,13**	**491.018.797**	**84,13**	**491.018.797**	**92,06**	**2.082.529.616**	**92,06**	**47,94**	
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	Dokumen	90.000.000	1	Dokumen	0	1	Dokumen	669.395.500	0	23.749.000	0	23.749.000	1	23.749.000	33	26,39	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	34	Orang	635.710.000	26	Orang	271.171.358	3	Orang	282.066.000	0	0	0	0	26	271.171.358	76	42,66	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	Orang	3.618.360.000	55	Orang	1.320.339.461	59	Orang	3.246.359.000	53	467.269.797	53	467.269.797	108	1.787.609.258	179	49,40	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**3.120.262.336**	**100**	**Persen**	**1.389.558.346**	**100**	**Persen**	**2.323.603.537**	**21,19**	**187.866.917**	**21,19**	**187.866.917**	**60,60**	**1.577.425.263**	**60,60**	**50,55**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	4	Paket	396.000.000	15	Paket	364.332.400	14	Paket	1.266.227.232	0	0	0	0	15	364.332.400	375	92,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5	Paket	1.028.436.336	3	Paket	429.001.830	3	Paket	328.291.535	1	133.380.500	1	133.380.500	4	562.382.330	80	54,68	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	294.920.000	3	Paket	100.250.250	3	Paket	59.691.750	0	0	0	0	3	100.250.250	60	33,99	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	754	Dokumen	25.000.000	274	Dokumen	5.400.000	240	Dokumen	5.100.000	60	450.000	60	450.000	334	5.850.000	44	23,40	

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Triwulan Ke 1								
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	303	Laporan	130.000.000	103	Laporan	23.445.000	100	Laporan	81.408.020	20	0	20	0	123	23.445.000	41	18,03	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	241	Laporan	1.239.910.000	127	Laporan	461.553.866	60	Laporan	582.885.000	8	54.036.417	8	54.036.417	135	515.590.283	56	41,58	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**207.678.000**	**100**	**Persen**	**19.460.400**	**100**	**Persen**	**377.090.843**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**50,00**	**19.460.400**	**50,00**	**9,37**	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	109.678.000	2	Unit	0	29	Unit	175.133.843	0	0	0	0	2	0	50	0,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	98.000.000	2	Unit	19.460.400	3	Unit	201.957.000	0	0	0	0	2	19.460.400	50	19,86	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**100**	**Persen**	**1.203.380.000**	**100**	**Persen**	**433.417.599**	**100**	**Persen**	**321.272.000**	**25,00**	**76.310.000**	**25,00**	**76.310.000**	**62,50**	**509.727.599**	**62,50**	**42,36**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Laporan	1.203.380.000	36	Laporan	433.417.599	12	Laporan	321.272.000	3	76.310.000	3	76.310.000	39	509.727.599	65	42,36	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Persen**	**869.131.100**	**100**	**Persen**	**319.546.594**	**100**	**Persen**	**192.358.592**	**6,45**	**19.670.868**	**6,45**	**19.670.868**	**53,23**	**339.217.462**	**53,23**	**39,03**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	814.231.500	7	Unit	263.023.294	6	Unit	174.508.592	2	19.670.868	2	19.670.868	9	282.694.162	144	34,72	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	45.000.000	0	Unit	0	25	Unit	17.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

Berdasarkan Tabel 1 diatas Realisasi RKPD Tahun 2025 Triwulan I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan I adalah 15,66%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.953.339.140,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 31.624.951.060,- (Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah).
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sebesar 36,56% dengan predikat kinerja sangat rendah.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 0 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 5 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 3 indikator capaian kinerja 0%-50% = 26 indikator

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok yaitu:

"Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah".

Dalam melaksanakan tugas Inspektorat daerah juga menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Tingkat Maturitas SPIP;
2. Tingkat Kapabilitas APIP; dan
3. Nilai Evaluasi SAKIP.

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser terdapat dalam Tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi		
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	71	71,25	71,5	71,75	72	71,51	74,00	N/A
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.309)	Level 3 (3.432)	N/A
	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	N/A
Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	B (65)	B (68)	B (70)	BB (70,5)	BB (71)	B (67,89)	N/A	N/A

Berdasarkan Tabel 2 di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)”, pada Tahun 2024 telah melampaui target, dimana realisasinya

sebesar 74,00 dari target sebesar 71,5 dengan capaian kinerja sebesar 103%, sedangkan pada Tahun 2025 belum dilaksanakan penilaian;

b. Sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan” memiliki 2 indikator kinerja yang pertama yaitu “Tingkat Maturitas SPIP”, pada Tahun 2023 telah melampaui target, dimana realisasinya sebesar Level 3 (3.432) dari target sebesar Level 3 (3.000) dengan capaian kinerja sebesar 114% dan indikator kinerja yang kedua yaitu “Tingkat Kapabilitas APIP” pada Tahun 2023 telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar Level 3 (3.000) dari target sebesar Level 3 (3.000) dengan capaian kinerja sebesar 100%, sedangkan pada Tahun 2025 belum dilaksanakan penilaian; dan

c. Sasaran 2 “Meningkatnya Pengelolaan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat”, pada Tahun 2023 belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar B (67,89) dari target sebesar B (68) dengan capaian kinerja sebesar 99,83%, sedangkan pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 belum dilaksanakan penilaian.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Periode sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 :

1. SDM dan APIP yang berkompeten dan telah bersertifikasi;
2. Koordinasi pelaksanaan pengawasan berjalan dengan baik;dan
3. Koordinasi internal di bidang maupun antar struktural berjalan lancer.

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya :

1. Adanya kegiatan mandatori dari Pusat yang mengharuskan pelaksanaan kegiatan menggeser kegiatan yang sudah dijadwalkan pada PKPT;

2. Kurangnya SDM Pengawasan serta SDM yang melaksanakan ketugasan administrasi (JFU), sehingga pekerjaan administrasi juga dihandle oleh beberapa JFT;dan
3. Belum memadainya saran prasarana penunjang pengawasan.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2025.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Pengawasan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3

Target Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator	Formulasi	Target Renja 2025
Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Hasil Survei dari 3 sumber data, yaitu : Hasil Survei dari 3 sumber data, yaitu : 1. Sumber internal yang merupakan pegawai di K/L/PD; 2. Sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan 3. tugas dan fungsi K/L/PD;dan Sumber ekspert atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman.	71,75
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Laporan Hasil Evaluasi dari BPKP Provinsi Kalimantan Timur	Level 3 (3.000)
	Tingkat Kapabilitas APIP	Laporan Hasil Evaluasi dari BPKP Provinsi Kalimantan Timur	Level 3 (3.000)
Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Paser	BB (70,5)

Memperhatikan tabel 3 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada

APBD Tahun Anggaran 2025, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 yaitu “PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DI SELURUH KABUPATEN PASER”” yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Paser mendukung pencapaian sasaran ke-3 yaitu “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah”.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Inspektorat Daerah Kabupaten Paser telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Paser

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	Kab. Paser	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	71,75 (Nilai)		Kab. Paser	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	71,75 (Nilai)		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Kab. Paser	Tingkat Maturitas SPIP	level 3 (3.000)	31.624.951.060	Kab. Paser	Tingkat Maturitas SPIP	level 3 (3.000)	31.624.951.060	
	Kab. Paser	Tingkat Kapabiltas APIP	level 3 (3.000)		Kab. Paser	Tingkat Kapabiltas APIP	level 3 (3.000)		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Paser	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	3,9 (Nilai)	4.245.972.323	Kab. Paser	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	3,9 (Nilai)	4.245.972.323	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Paser	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Disusun Tepat Waktu	100%	3.329.123.323	Kab. Paser	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Disusun Tepat Waktu	100%	3.329.123.323	
	Kab. Paser	Persentase Temuan Eksternal Yang Ditindaklanjuti	92%		Kab. Paser	Persentase Temuan Eksternal Yang Ditindaklanjuti	92%		
	Kab. Paser	Persentase Temuan Internal yang Ditindaklanjuti	58%		Kab. Paser	Persentase Temuan Internal yang Ditindaklanjuti	58%		
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	135 Laporan	513.986.000	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	96 Laporan	513.986.000	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	140 Laporan	910.417.000	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	126 Laporan	910.417.000	
Reviu Laporan Kinerja	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	251.685.500	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	251.685.500	

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Reviu Laporan Keuangan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	20 Laporan	417.757.000	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	19 Laporan	417.757.000	
Pengawasan Desa	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	50 Laporan	461.565.500	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	67 Laporan	461.565.500	
Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab. Paser	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	139.008.000	Kab. Paser	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	139.008.000	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Laporan	634.704.323	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Laporan	634.704.323	
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Paser	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Disusun Tepat Waktu	100%	916.849.000	Kab. Paser	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Disusun Tepat Waktu	100%	916.849.000	
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan	916.849.000	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan	916.849.000	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Paser	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB	85%	2.587.421.586	Kab. Paser	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB	85%	2.587.421.586	
	Kab. Paser	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan peringkat minimal B	85%		Kab. Paser	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan peringkat minimal B	85%		

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pendampingan dan Asistensi	Kab. Paser	Persentase Pelaksanaan Hasil Pendampingan dan Asistensi	100%	2.587.421.586	Kab. Paser	Persentase Pelaksanaan Hasil Pendampingan dan Asistensi	100%	2.587.421.586	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 Perangkat Daerah	261.026.000	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 Perangkat Daerah	261.026.000	
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	42 Perangkat Daerah	600.414.000	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	42 Perangkat Daerah	600.414.000	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Paser	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	1.488.289.586	Kab. Paser	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	1.488.289.586	
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Perangkat Daerah	237.692.000	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Perangkat Daerah	237.692.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tana Paser	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80%	24.791.557.151	Tana Paser	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80%	24.791.557.151	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tana Paser	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi	100%	396.966.000	Tana Paser	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi	100%	396.966.000	

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kinerja Perangkat Daerah				Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tana Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	130.740.000	Tana Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	130.740.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	140.706.000	Tana Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	140.706.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tana Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	125.520.000	Tana Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	125.520.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tana Paser	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	16.946.877.679	Tana Paser	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	16.946.877.679	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tana Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bulan	16.582.934.479	Tana Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/Bulan	16.582.934.479	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	200 Dokumen	309.073.200	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	200 Dokumen	309.073.200	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	54.870.000	Tana Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	54.870.000	

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tana Paser	Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	35.568.000	Tana Paser	Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	35.568.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	6.300.000	Tana Paser	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	6.300.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	29.268.000	Tana Paser	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	29.268.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tana Paser	Persentase Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	4.197.820.500	Tana Paser	Persentase Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	4.197.820.500	
Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Tana Paser	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	669.395.500	Tana Paser	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	669.395.500	

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tana Paser	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	282.066.000	Tana Paser	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	282.066.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tana Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	3.246.359.000	Tana Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	63 Orang	3.246.359.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tana Paser	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.323.603.537	Tana Paser	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.323.603.537	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tana Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	1 Paket	1.266.227.232	Tana Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	8 Paket	1.266.227.232	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tana Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	328.291.535	Tana Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Paket	328.291.535	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tana Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	59.691.750	Tana Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	59.691.750	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tana Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240 Dokumen	5.100.000	Tana Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.100.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tana Paser	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	81.408.020	Tana Paser	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	81.408.020	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	582.885.000	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	582.885.000	

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tana Paser	Persentaase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	377.090.843	Tana Paser	Persentaase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	377.090.843	
Pengadaan Mebel	Tana Paser	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	175.133.843	Tana Paser	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit	175.133.843	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tana Paser	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	201.957.000	Tana Paser	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	201.957.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tana Paser	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100%	321.272.000	Tana Paser	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100%	321.272.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	321.272.000	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	321.272.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tana Paser	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	192.358.592	Tana Paser	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	192.358.592	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tana Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	174.508.592	Tana Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	174.508.592	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tana Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	17.850.000	Tana Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	17.850.000	

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	Kab. Paser	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	71,75 (Nilai)	29.665.248.262
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Kab. Paser	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	level 3	
	Kab. Paser	Tingkat Kapabiltas APIP	level 3	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Paser	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	3,9 (Nilai)	6.210.181.300
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Paser	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Disusun Tepat Waktu	100%	5.177.851.300
	Kab. Paser	Persentase Temuan Eksternal Yang Ditindaklanjuti	92%	
	Kab. Paser	Persentase Temuan Internal yang Ditindaklanjuti	58%	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	135 Laporan	949.372.000
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	140 Laporan	992.282.000
Reviu Laporan Kinerja	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	410.060.000
Reviu Laporan Keuangan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	20 Laporan	676.894.000
Pengawasan Desa	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	50 Laporan	729.335.300
Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab. Paser	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	355.107.000
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan	4 Laporan	1.064.801.000

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Paser	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Disusun Tepat Waktu	100%	1.032.330.000
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan	1.032.330.000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Paser	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB	85%	1.655.184.700
	Kab. Paser	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan peringkat minimal B	85%	
Pendampingan dan Asistensi	Kab. Paser	Persentase Pelaksanaan Hasil Pendampingan dan Asistensi	100%	1.655.184.700
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 Perangkat Daerah	110.424.000
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	42 Perangkat Daerah	437.528.000
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Paser	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	1.008.502.700
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Perangkat Daerah	98.730.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tana Paser	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80%	21.799.882.262
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tana Paser	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	236.857.800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tana Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	63.036.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	39.024.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tana Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	134.797.800
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tana Paser	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	14.847.875.162

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tana Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/Bulan	14.639.736.062
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	200 Dokumen	153.269.100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	54.870.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tana Paser	Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	35.268.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	6.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	29.268.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tana Paser	Persentase Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	2.822.103.400
Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Tana Paser	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	101.357.400
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tana Paser	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	68.896.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tana Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	63 Orang	2.651.850.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tana Paser	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.953.995.400
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tana Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	8 Paket	1.017.311.700
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tana Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Paket	284.305.300
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tana Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	81.929.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tana Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.058.600
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tana Paser	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	47.493.800

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	517.897.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tana Paser	Persentaase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.411.175.900
Pengadaan Mebel	Tana Paser	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit	150.745.100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tana Paser	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1.260.430.800
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tana Paser	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100%	293.297.800
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	293.297.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tana Paser	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	199.308.800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tana Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	199.308.800

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

5.1 Catatan Penting

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pengawasan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi belanja daerah diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD inspektorat.

Dalam hal ini ketersedian anggaran pada Inspektorat Daerah kabupaten Paser belum mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga

kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Paser mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

5.3 Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Tana Paser, 5 Mei 2025

INSPEKTUR DAERAH,

Hj. DHARNI HARYATI, SE. M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19720126 199703 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

RENJA PERUBAHAN



2025

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Sudirman 76251
Email : dkpuspaser@gmail.com

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

DAFTAR ISI

Daftar Isi			i
Daftar Tabel			ii
Bab I	PENDAHULUAN		1
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2.	Landasan Hukum	3
	1.3.	Maksud dan Tujuan	4
	1.4.	Sistematika Penulisan	5
Bab II	HASIL EVALUASI RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025		6
	2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025	6
	2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan PD	13
	2.3.	Faktor Pendorong & Penghambat dan Solusi Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025	29
Bab III	RENCANA KERJA DAN DAN PENDANAAN		33
	3.1.	Tujuan dan Sasaran Renja PD	33
	3.2.	Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025	35
	3.3.	Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perubahan Renja pada Tahun 2025	46
Bab IV	PENUTUP		60

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat penyesuaian terhadap Rencana Kerja (Renja) PD yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyusunan Renja Perubahan PD ini menjadi krusial dalam merespons dinamika perubahan lingkungan strategis, baik yang berasal dari kebijakan pemerintah pusat dan daerah, maupun perubahan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang mungkin muncul di tengah tahun berjalan. Selain itu, Renja Perubahan PD juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengakomodasi perubahan alokasi anggaran, hasil evaluasi kinerja semester sebelumnya, serta penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah yang mungkin mengalami pergeseran. Dengan demikian, Renja Perubahan PD menjamin bahwa rencana kerja perangkat daerah tetap relevan, efektif, dan responsif terhadap perkembangan terkini dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD jangka menengah.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perubahan Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis dalam menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan dan subkegiatan PD. Kualitas dokumen Renja Perubahan sangat ditentukan oleh kualitas program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah sang at ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program, kegiatan dan subkegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penetapan renja Perubahan Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD

dan Renja Perubahan Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perubahan Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah yang definitif.

Proses penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan. Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perubahan Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program, kegiatan dan subkegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Paser memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan misi "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efesien" dan "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing" dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Paser MAS 2021- 2026 yaitu "Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera".

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser, maka disusunlah Renja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program, kegiatan dan subkegiatan masyarakat dan penelaahan kebijakan nasional.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kab. Pasir menjadi Kab. Paser Prov.Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Paser;
17. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan ini adalah untuk melakukan penyesuaian terhadap Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian ini diperlukan sebagai respons terhadap adanya perubahan kebijakan, prioritas pembangunan daerah, alokasi anggaran, serta isu-isu strategis terkini yang mungkin timbul setelah penetapan Renja awal.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser Tahun 2025, yaitu:

a. Menyelaraskan kembali program, kegiatan dan subkegiatan Dinas dengan perubahan kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Paser tahun 2025.
b. Mengakomodasi perubahan alokasi anggaran yang terjadi, sehingga program, kegiatan dan subkegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
c. Merespon isu-isu strategis baru yang relevan dengan bidang kearsipan dan perpustakaan, serta mengintegrasikannya ke dalam rencana kerja.
d. Memastikan ketercapaian target kinerja Dinas yang lebih realistis dan sesuai dengan kondisi terkini.
e. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Paser.

f. Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antara program, kegiatan dan subkegiatan di lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
g. Menyediakan dokumen perencanaan yang lebih akuntabel dan dapat diukur sebagai dasar pelaksanaan dan evaluasi kinerja Dinas selama tahun 2025.

Dengan adanya Renja Perubahan ini, diharapkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser dapat lebih adaptif terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis dan mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2025
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Faktor Pendorong & Penghambat Dan Solusi Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD
- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.2. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025
- 3.3. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Bab IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

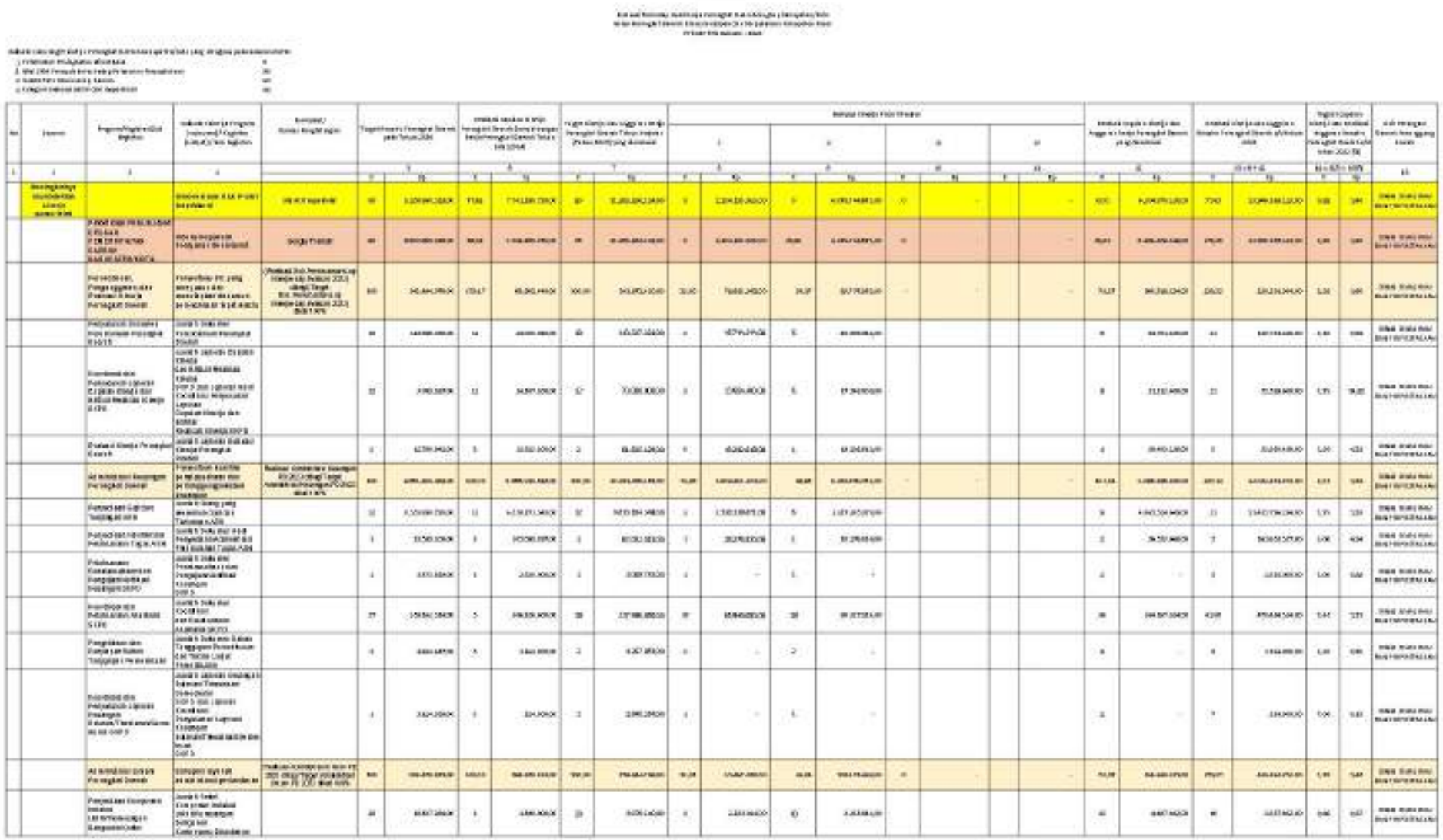

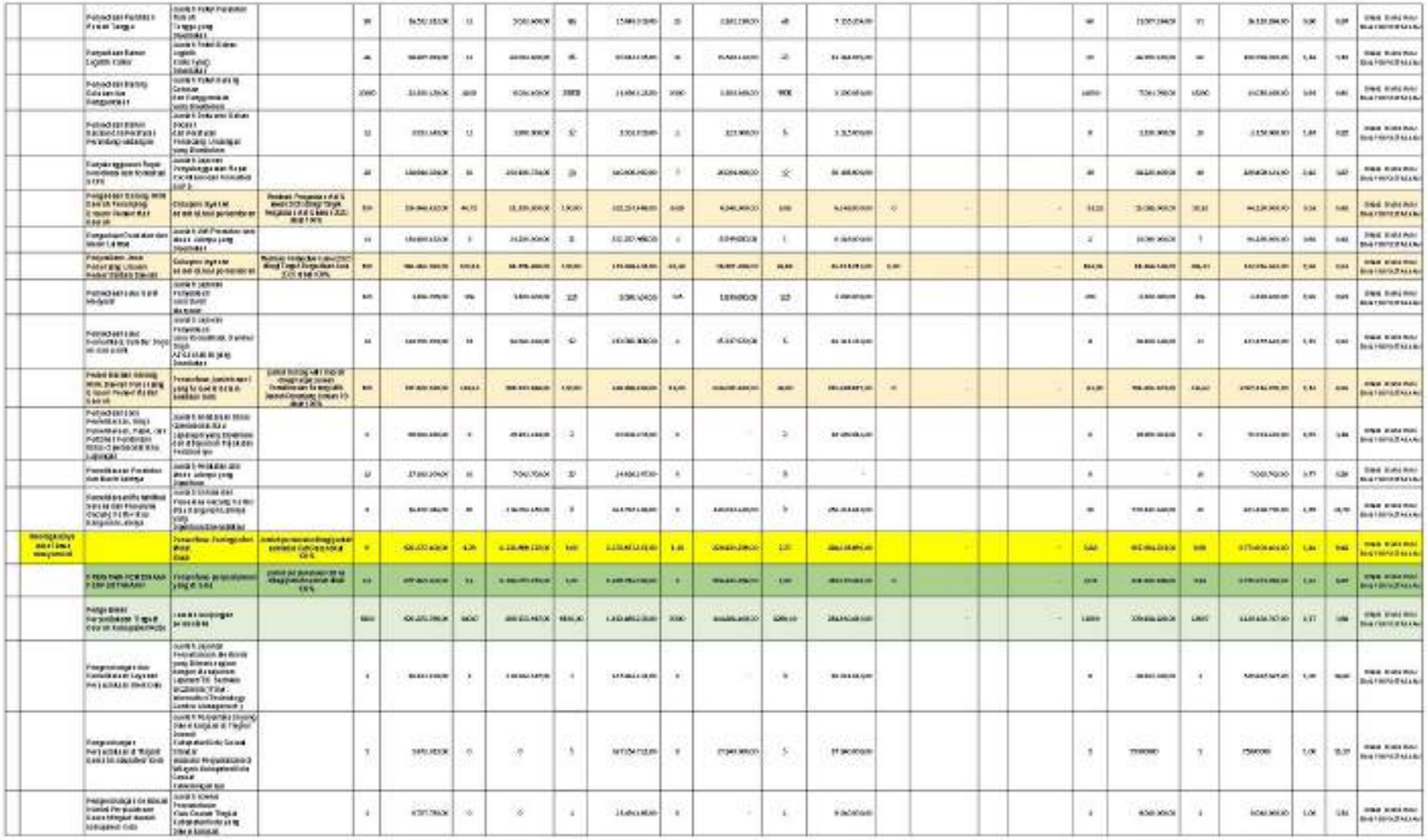

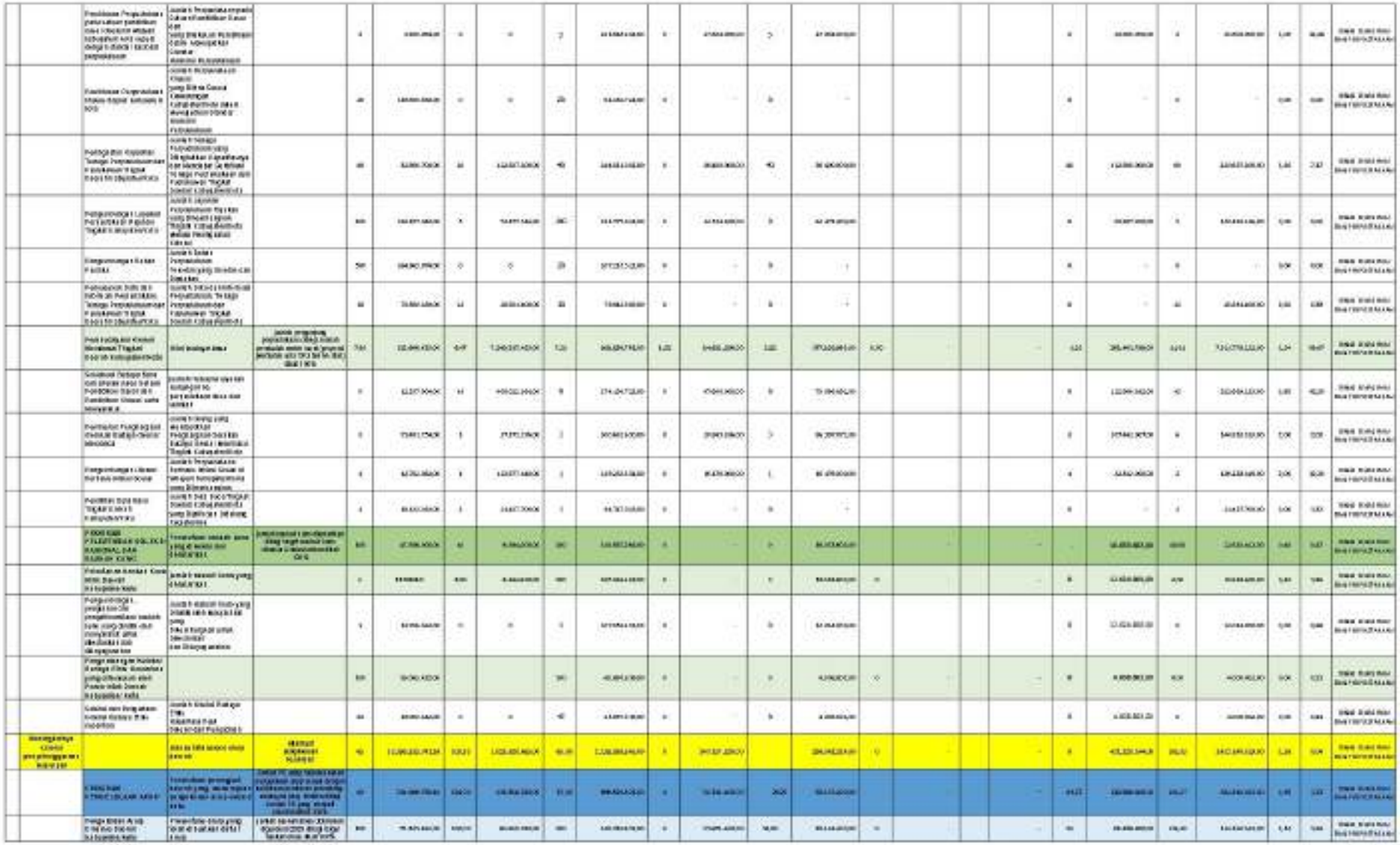

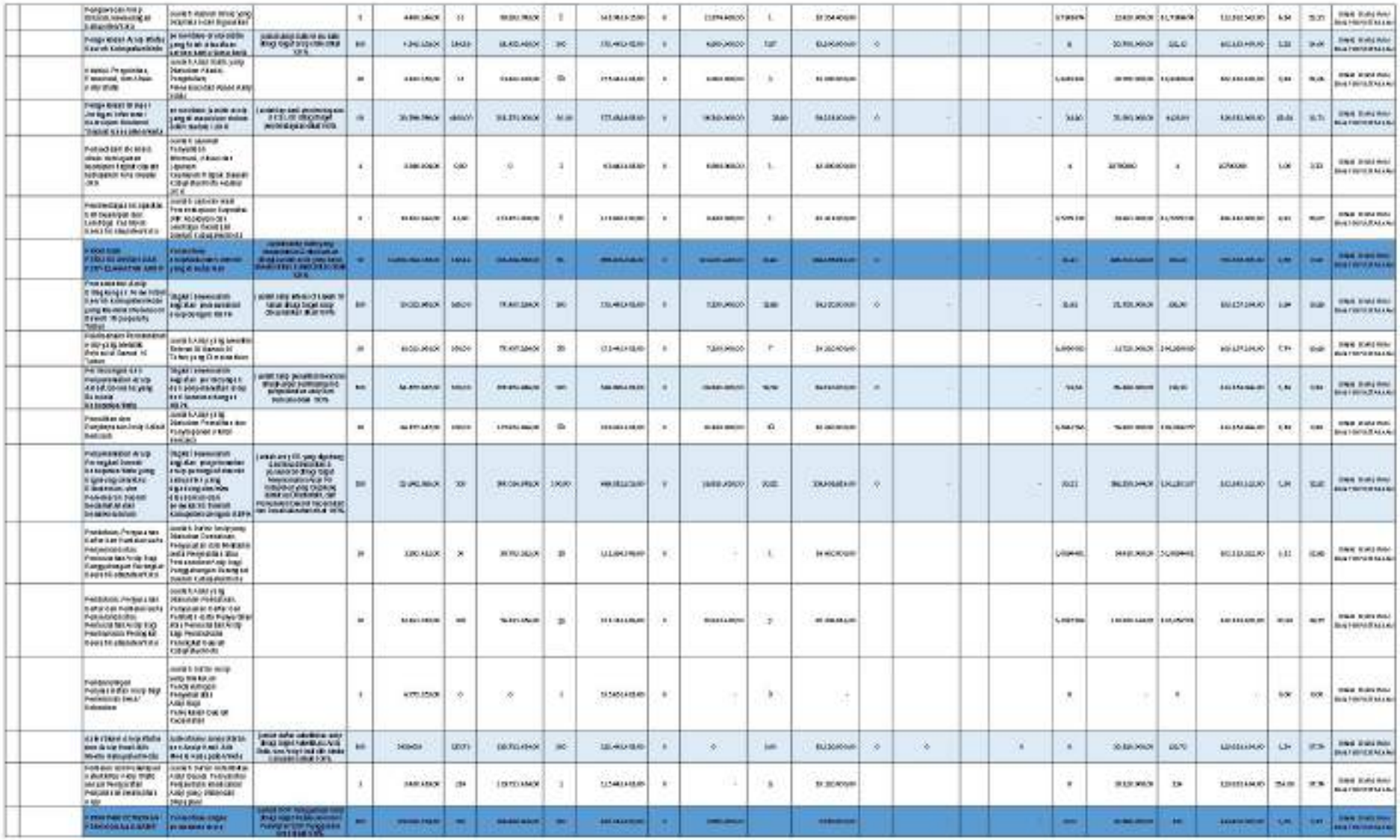



Berdasarkan dokumen Evaluasi Renja TW II 2025 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser, dapat dijelaskan bahwa:

1. Total Realisasi Kinerja dan Keuangan hingga Triwulan II Tahun 2025.

Berdasarkan Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah, total realisasi kinerja dan keuangan hingga Triwulan II (TW II) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Realisasi Anggaran (keuangan): Rp.7.294.032.703,00 dari total pagu Renja sebesar Rp.16.941.786.028,00

2. Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Pada bagian akhir tabel, terdapat ringkasan Rata-rata Capaian Kinerja (%) untuk seluruh sub kegiatan:

- Rata-rata Capaian Kinerja (fisik): 37,34%

3. Klasifikasi Capaian Kinerja Sub Kegiatan Berdasarkan Tingkat Pencapaian.

Berdasarkan analisis terhadap kolom "Realisasi Kinerja Pada Triwulan III (TW II)" dari setiap sub kegiatan, maka klasifikasi pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan dengan Capaian Kinerja >100% (Melampaui Target)

(Tidak ada sub kegiatan yang mencapai >100% hingga TW II 2025)

b. Sub Kegiatan dengan Capaian Kinerja >70% - 100%

Sub kegiatan dengan capaian >70% hingga 100%: 11 Indikator

c. Sub Kegiatan dengan Capaian Kinerja >50% - 70%

Sub kegiatan dengan capaian >50% hingga 70%: 4 Indikator

d. Sub Kegiatan dengan Capaian Kinerja 0% - 50%

Sub kegiatan dengan capaian ≤50% (sebagian besar): 33 Indikator

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya terus berupaya untuk memberikan kinerja pelayanan kepada masyarakat, aparatur, pihak-pihak lainnya yang memerlukan pelayanan perpustakaan maupun pelayanan kearsipan.

Tolak ukur kinerja yang dapat diterapkan dalam penetapan Indikator Kinerja adalah berdasarkan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Perpustakaan: Mengukur secara langsung kepuasan masyarakat dan pihak lain terhadap kualitas layanan perpustakaan.
2. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kearsipan: Mengukur secara langsung kepuasan aparatur dan pihak lain terhadap kualitas layanan kearsipan.
3. Waktu Tanggap Layanan: Mengukur kecepatan dinas dalam memberikan layanan (misalnya, peminjaman buku, penyediaan informasi arsip).
4. Jumlah Pengguna Aktif Layanan Digital Perpustakaan: Mengukur adopsi dan pemanfaatan layanan perpustakaan berbasis teknologi.
5. Jumlah Permintaan Informasi Arsip yang Terlayani: Mengukur kemampuan dinas dalam memenuhi kebutuhan informasi arsip dari pengguna.

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser terdapat dalam Tabel 2.2. di bawah ini :

TABEL 2.2.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2025

KABUPATEN PASER

Nama Perangkat Daerah : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcames)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*100*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*100*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**INDEKS KEPUASAN PELAYANAN SEKRETARIAT**	*70*	*%*	*61,34*	*72*	*98,12*	*136%*	*74*	*233,46*	*58,37*

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	**PERSENTASE PD YANG MENYUSUN DAN MENETAPKAN DOKUMEN PERENCANAAN TEPAT WAKTU**	**100**	**%**	**98,50**	**100**	**179,17**	*179%*	**100**	**400**	*100*
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dokumen	10	10	12	*120%*	10	32	*8*
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	laporan	12	12	12	*100%*	12	36	*9*
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	laporan	**2**	2	2	*100%*	2	6	*2*
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**PERSENTASE KUALITAS DAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN**	**100**	**%**	**88,72**	**100**	**100**	*100%*	**100**	**400**	*100*
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	penyediaan gaji dan tunjangan yang terpenuhi	12	bulan	*12*	12	12	*100%*	12	36	*9*
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	dokumen	**2**	3	3	*100%*	1	6	*1,5*
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	dokumen	*0*	1	1	*100%*	1	2	*0,5*

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18	dokumen	**16,8**	5	5	*100%*	17	38	*9,5*
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	dokumen	*5*	5	5	*100%*	2	12	*3*
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	laporan	**3**	5	5	*100%*	1	9	*2,25*
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**100**	**%**	*97,31*	**100**	100	*100%*	**100**	**400**	*100*
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	paket	**2**	1	1	*100%*	20	23	*5,75*
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	90	paket	*8*	13	13	*100%*	90	111	*27,75*
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	46	paket	**50**	33	33	*100%*	46	129	*32,25*
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20000	paket	*8200*	4200	4200	*100%*	20000	324000	*8100*

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dokumen	**12**	12	12	*100%*	12	36	*9*
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	kali	*18*	30	30	*100%*	20	68	*17*
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**100**	**%**	**99,35**	**100**	40,75	*41%*	**100**	**400**	*100*
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	unit	*4*	5	5	*100%*	11	20	*5*
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**100**	**%**	**84,04**	**100**	**105,36**	*105%*	**100**	**400**	*100*
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	125	laporan	*100*	100	106	*106%*	125	331	*82,75*
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	bulan	**12**	12	12	*100%*	12	36	*9*
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**PERSENTASE JUMLAH ASET YANG TERSEDIA DALAM KUALITAS BAIK**	**100**	**%**	*60,15*	**100**	129,63	*130%*	**100**	**400**	*100*
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	unit	*3*	5	5	*100%*	3	11	*2,75*

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	unit	**8**	10	10	*100%*	13	31	*7,75*
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	unit	*20*	12	20	*167%*	9	49	*12,25*
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG DIBINA**	**3**	**%**	**1,48**	**2**	*2,42*	*121%*	**2,5**	**6,4**	*1,6*
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	**JUMLAH KUNJUNGAN PEMUSTAKA**	**9150**	**orang**	*8671*	**8950**	*14017*	*157%*	**9050**	**31738**	*7935*
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1	dokumen	**1**	1	1	*100%*	1	3	*0,75*
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah kabupaten/ kota sesuai standar nasional perpustakaan diwilayah kabupaten/ kota sesuai kewenangannya	5	desa	*0*	0	0	*0%*	5	5	*1,25*
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat kabupaten/ kota yang dikembangkan	***1***	***0***	**0**	***0***	0	*0%*	***1***	***1***	*0,25*
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	5	sekolah	*0*	0	0	*0%*	5	5	*1,25*

Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan khusus yang dibina sesuai kewenangan kabupaten/ kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	20	orang	**0**	0	0	*0%*	20	20	*5*
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40	orang	*20*	20	20	*100%*	40	80	*20*
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	200	layanan	**0**	*5*	5	*0%*	*200*	*205*	*51,25*
Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan	*500*	*bahan pustaka*	*0*	*0*	0	*0%*	*500*	*500*	*125*
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan Perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keragaman koleksi perpustakaan	20	bahan pustaka	**15**	30	38	*0%*	0	53	*13,25*
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10	dokumen	*20*	25	*25*	*0%*	10	55	*13,75*

PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	**NILAI BUDAYA BACA**	**7,55**	**%**	**7,21**	**7,35**	*6,47*	*88%*	**7,45**	**21,13**	*5,28*
Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	*8*	*lokus*	*40*	45	45	*100%*	*8*	*93*	*23,25*
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*0*	*perpustakaan*	*0*	1	1	*100%*	*0*	*1*	*0,25*
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	*3*	*orang*	**0**	*3*	3	*0%*	*3*	*6*	*1,5*
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	*1*	*lokus*	*0*	***1***	1	*0%*	*1*	*2*	*0,5*
Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	*1*	*0*	**0**	*2*	2	*0%*	*1*	*3*	*0,75*
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	**PERSENTASE NASKAH KUNO YANG DIKELOLA DAN DILESTARIKAN**	**100**	**%**	*96,92*	**5**	*2*	*40%*	**100**	**400**	*100*
PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA	**JUMLAH NASKAH KUNO YANG DILESTARIKAN**	**5**	**Naskah**	*5*	**100**	*40*	*40%*	**5**	**50**	*12,5*

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	0	orang	**2**	2	**2**	**0**	0	4	*1*
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan didayagunakan	1	dokumen	*0*	*0*	0	*0%*	1	1	*0,25*
PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA YANG DITEMUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PERSENTASE KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA YANG DIKELOLA DAN DILESTARIKAN**	*100*	*%*	**0**	*0*	*0*	*0%*	*100*	*400*	*100*
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	jumlah koleksi buku budaya etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	***45***	***0***	*0*	***0***	0	*0%*	***45***	***45***	*11,25*
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN ARSIP SECARA BAKU**	**70**	**%**	**39,88**	**50**	*124*	*248%*	**60**	**223,88**	*55,97*
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PERSENTASE ARSIP YANG TELAH DIBUATKAN DIGITAL ARSIP**	**100**	**%**	*99,71*	**100**	*100*	*100%*	**100**	**400**	*100*
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/ kota	5	laporan	**21**	31	31	*100%*	5	57	*14,25*
PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PERSENTASE ARSIP STATIS YANG TELAH DIBUATKAN SECARA BANTU TEMU BALIK**	**100**	**%**	*0*	**100**	*214,29*	*214%*	**100**	**400**	*100*

Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	50	arsip	**0**	7	15	*214%*	50	65	*16,25*
PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA	**PERSENTASE JUMLAH ARSIP YANG DIMASUKKAN DALAM SIKN MELALUI JIKN**	**50**	**%**	*49,91*	**50**	*4100*	*8200%*	**50**	**50**	*12,5*
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabuoaten/kota melalui JIKN	1	OPD	**42**	0	0	*0%*	1	43	*10,75*
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	5	laporan	**42**	1	41	*4100%*	5	88	*22*
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**PERSENTASE ARSIP/ DOKUMEN DAERAH YANG DILESTARIKAN**	**65**	**%**	**46,91**	**55**	*172,44*	*314%*	**60**	**279,35**	*69,84*
PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN PEMUSNAHAN ARSIP DENGAN NSPK**	**100**	**%**	*94,05*	**100**	*380*	*380%*	**100**	**400**	*100*
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	50	berkas	**380**	20	380	*1900%*	50	810	*202,5*
PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA YANG BERSKALA KABUPATEN/KOTA	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DARI BENCANA NSPK**	**100**	**%**	*98,98*	**100**	*100*	*100%*	**100**	**400**	*100*

Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	50	arsip	**385**	100	100	*100%*	50	535	*133,75*
PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIGABUNG DAN/ATAU DIBUBARKAN, DAN PEMEKARAN DAERAH KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN	**TINGKAI KESESUAIAN KEGIATAN PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG DIGABUNG DAN/ ATAU DIBUBARKAN DAN PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN DENGAN NSPK**	**100**	**%**	*0*	**100**	*100*	*100%*	**100**	**400**	*100*
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	10	daftar	**85**	50	50	*100%*	10	145	*36,25*
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	10	arsip	*254*	100	100	*100%*	10	364	*91*
Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar arsip yang dilakukan pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran desa/ kelurahan	1	arsip	*0*	0	0	*0%*	1	1	*0,25*
AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA KABUPATEN/KOTA	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA DENGAN NSPK**	**100**	**%**	**0**	**100**	*133,75*	*134%*	**100**	**400**	*100*

Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	1	arsip	*150*	160	214	*134%*	1	365	*91,25*
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	**PERSENTASE ANGKA PEMAKAIAN ARSIP**	**100**	**%**	*0*	**100**	*150*	*150%*	**100**	**400**	*100*
PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP DI KABUPATEN/KOTA	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN PENERBITAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP DENGAN SNPK**	**100**	**%**	**0**	**100**	***102,27***	*102%*	**100**	**400**	*100*
Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	1	SOP	*4*	2	***3***	*150%*	1	8	*2*
Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	1	Arsip	**42**	42	*42*	*100%*	1	85	*21,25*

Analisis Kinerja Program/Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Berdasarkan data, semua program dan kegiatannya secara spesifik telah mencapai target kinerja yang ditetapkan, yaitu 100%, atau bahkan melebihi target. Namun, terdapat satu program yang realisasi anggarannya tidak mencapai 100%, meskipun target kinerjanya tercapai:

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya: Target kinerjanya adalah 9 unit, namun realisasi hanya 6 unit. Ini menunjukkan capaian kinerja sebesar 66,67%. Meskipun begitu, realisasi anggarannya mencapai 97,17% dari alokasi yang direncanakan.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sebagian besar program dan kegiatan dalam dokumen ini berhasil memenuhi target kinerja yang direncanakan, yaitu 100%. Beberapa di antaranya adalah:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Target 10 dokumen, realisasi 10 dokumen (100% capaian).
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Target 12 bulan, realisasi 12 bulan (100% capaian).
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Target 46 paket, realisasi 46 paket (100% capaian).
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Target 11 unit, realisasi 11 unit (100% capaian).
- Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun: Target 50 berkas, realisasi 50 berkas (100% capaian).

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Beberapa program dan kegiatan menunjukkan kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan:

- Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Target sasaran 8.950 orang, namun realisasinya mencapai 18.142 orang, melebihi target sebesar 202,70%.
- Program Pembinaan Perpustakaan: Realisasi target kinerja mencapai 3,02%, melebihi target 2,50% atau sebesar 120,80%.
- Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN): Target capaian 50%, realisasi 100%, melebihi target sebesar 200%.

- Program Pengelolaan Arsip: Realisasi target kinerja mencapai 97,56%, melebihi target 60% atau sebesar 162,60%.
- Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip: Realisasi target kinerja mencapai 100%, melebihi target 60% atau sebesar 166,67%.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

- Faktor Melebihi Target: Kinerja yang melebihi target, terutama pada program perpustakaan dan kearsipan, menunjukkan adanya efisiensi dan respons yang tinggi terhadap kebutuhan publik. Hal ini bisa disebabkan oleh tingginya minat masyarakat terhadap layanan yang diberikan, strategi promosi yang efektif, atau optimalisasi sumber daya yang ada sehingga dapat menjangkau lebih banyak sasaran.
- Faktor Tidak Tercapai: Untuk kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Dalam hal ini, realisasi fisiknya hanya mencapai 6 dari target 9 unit. Beberapa faktor penyebab potensial yang bisa jadi tidak tercapainya target ini antara lain: adanya kendala administratif dalam proses pengadaan. Faktor-faktor ini sering kali menjadi hambatan umum dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

- Peningkatan Kepercayaan Publik: Pencapaian target kinerja yang tinggi, terutama pada program perpustakaan dan kearsipan, menunjukkan bahwa dinas ini berjalan efektif dan memberikan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi lebih lanjut.
- Evaluasi Proses Anggaran: Untuk kegiatan yang realisasinya tidak mencapai target fisik (unit/jumlah) meskipun anggaran terserap hampir 100%, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar menghasilkan output yang diharapkan.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

1. Revisi Target Kinerja: Untuk program-program yang secara konsisten melebihi target, lakukan revisi target dalam dokumen Renstra untuk mencerminkan potensi dan kebutuhan nyata. Target yang lebih ambisius dapat memotivasi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya.

2. Evaluasi Anggaran dan Output: Lakukan audit terhadap program yang realisasi anggarannya tinggi namun outputnya tidak tercapai sepenuhnya. Identifikasi hambatan-hambatan spesifik dan buat kebijakan untuk mempercepat proses pengadaan atau pelaksanaan di masa mendatang.
3. Optimalisasi Anggaran: Alokasikan kembali kelebihan anggaran dari program yang efisien ke program-program lain yang memiliki potensi dampak lebih besar atau yang masih membutuhkan dukungan finansial.
4. Studi Keberhasilan: Lakukan studi mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan program yang melebihi target (misalnya, Pengelolaan Perpustakaan). Dokumentasikan praktik terbaik tersebut dan replikasikan modelnya ke program atau kegiatan lain.
5. Peningkatan Kapasitas SDM: Adakan pelatihan atau bimbingan teknis bagi staf perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan akurasi dalam penetapan target kinerja yang terukur dan realistis.

Selama beberapa tahun terakhir pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser dapat dilihat pada TABEL 2.3. berikut ini :

TABEL 2.3.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PASER

NO.	Indikator		SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (Tahun n-3)	Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2023 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai		v						46,27	52,18	60	60,5	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai		v						22,96	79,42	77	77,5	
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%		v						53,85	55,2	58	58,5	
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%		v						56,67	73,33	73,5	73,75	
5	Persentase Peningkatan Minat Baca	%			1,05	1,75	4,75	6	6,5	4,09	4,69	6	6,5	
6	Nilai SKM Pemustaka terhadap Pelayanan Perpustakaan	Nilai			71	75	80	90	91	84,249	90,54	90	91	
7	Indeks Tata Kelola Arsip Daerah	Nilai			12	16	55	65	66	36	124	65	66	
8	Kategori Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai			B	BB	74	78	80	BB	BB	78	80	
9	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	%			70	72	74	76	80	70	98,12	76	80	
10	Persentase perpustakaan yang di bina	%			1,5	2	2,5	3	3,5	1,5	2,42	3	3,5	
11	Persentase naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%			40	50	60	70	80	40	124	70	80	
13	Persentase arsip/dokumen daerah yang dilestarikan	%			50	55	60	65	65	50	172,44	65	65	
14	Persentase angka pemakaian arsip	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT DAN SOLUSI PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN HASIL RENJA PD TAHUN 2025

2.3.1. FAKTOR PENDORONG

1. Komitmen Tinggi dalam Tata Kelola Administrasi dan Keuangan
    - Capaian kinerja pada program Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum menunjukkan realisasi mencapai 100% untuk sebagian besar indikator, seperti penyediaan gaji ASN, dokumen penatausahaan keuangan, dan laporan keuangan bulanan/triwulanan.
    - Ini menunjukkan sistem internal yang solid, SDM yang kompeten, dan dukungan teknis yang baik dalam pengelolaan anggaran.
2. Peningkatan Infrastruktur dan Layanan Digital
    - Pada program Pengelolaan Arsip Dinamis, tercapainya 99,71% arsip telah dibuatkan digital arsip, menunjukkan kemajuan signifikan dalam transformasi digital.
    - Juga, capaian tinggi pada Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (SIKN/JIKN) dengan 100% realisasi dari target menunjukkan optimalisasi sistem informasi arsip nasional.
3. Efektivitas Pelaksanaan Pemusnahan dan Penyelamatan Arsip
    - Realisasi pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 tahun mencapai 100% dari target, menunjukkan kesiapan dan kepatuhan terhadap NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria).
    - Penyelamatan arsip akibat bencana mencapai 100%, menunjukkan kesiapsiagaan dan respons cepat dalam manajemen risiko.
4. Dukungan Kebijakan dan Regulasi
    - Penerbitan SOP penggunaan arsip tertutup dan penetapan daftar izin penggunaan arsip mencapai 100–150% dari target, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Literasi
    - Sosialisasi budaya baca mencapai 100% realisasi (45 dari 8 lokus), menunjukkan efektivitas program pembudayaan membaca di sekolah dan masyarakat.

2.3.2. FAKTOR PENGHAMBAT

1. Keterlambatan atau Belum Tercapainya Target pada Program Pengembangan Perpustakaan
    - Beberapa indikator seperti pengembangan perpustakaan di tingkat daerah, pengembangan kekhasan koleksi, dan pembinaan perpustakaan pendidikan dasar menunjukkan stagnasi pelaksanaan.
    - Hal ini mengindikasikan terbatasnya anggaran, SDM, atau koordinasi dengan instansi terkait (seperti Dinas Pendidikan).
2. Rendahnya Capaian pada Pengembangan Literasi Inklusif dan Duta Baca
    - Meskipun target Duta Baca dan literasi inklusi sosial telah tercapai secara kuantitas (2 orang), namun realisasi masih rendah dari target menunjukkan bahwa program ini belum menjadi prioritas atau belum terintegrasi dalam perencanaan operasional.
3. Belum Optimalnya Pengelolaan Arsip Statis
    - Meskipun capaian fisik mencapai 100%, namun persentase arsip statis yang dibuatkan bantu temu balik masih rendah, menunjukkan keterbatasan dalam pengolahan metadata, katalogisasi, dan aksesibilitas arsip.
4. Ketergantungan pada Anggaran dan Alokasi Sumber Daya
    - Banyak kegiatan yang bersifat paket pengadaan barang (logistik, cetakan, peralatan) yang sangat bergantung pada proses pengadaan yang sering mengalami keterlambatan atau pembatalan karena ketersediaan anggaran.
5. Minimnya Data dan Evaluasi Berkala terhadap Budaya Baca
    - Indikator Nilai Budaya Baca menurun dari 7,35 (2023) menjadi 6,47 (2024), menunjukkan penurunan tren minat baca, meskipun jumlah lokus sosialisasi meningkat. Ini menunjukkan bahwa kualitas dan dampak program belum terukur secara memadai.
6. Belum Tersentuhnya Koleksi Budaya Etnis Nusantara
    - Program Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara memiliki target 100%, namun realisasi masih rendah, menunjukkan kurangnya inisiatif atau sumber daya untuk dokumentasi budaya lokal.

2.3.3. SOLUSI DAN REKOMENDASI

1. Penguatan Koordinasi antar PD dan Stakeholder
    - Membentuk Forum Koordinasi Literasi dan Kearsipan Daerah yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Camat, dan Kepala Sekolah untuk mendorong pembinaan perpustakaan sekolah dan pengembangan koleksi lokal.
2. Integrasi Digitalisasi Arsip dan Perpustakaan
    - Mempercepat pengembangan sistem manajemen arsip dan perpustakaan berbasis digital yang terintegrasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan preservasi arsip/koleksi.
3. Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan dan Sertifikasi
    - Meningkatkan anggaran pelatihan bagi pustakawan dan petugas arsip, khususnya dalam bidang digitalisasi, katalogisasi, dan manajemen koleksi, serta mendorong sertifikasi profesi.
4. Optimalisasi Anggaran dan Percepatan Proses Pengadaan
    - Melakukan perencanaan pengadaan lebih awal (awal tahun) dan memanfaatkan skema swakelola atau e-purchasing untuk menghindari keterlambatan.
5. Pengembangan Program Literasi Berbasis Komunitas
    - Mendorong perpustakaan keliling, pojok baca desa, dan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk menjangkau masyarakat marjinal, disabilitas, dan wilayah terpencil.
6. Pemetaan dan Dokumentasi Koleksi Budaya Lokal
    - Melakukan ekspedisi budaya ke desa-desa untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengalihmedia naskah kuno serta koleksi budaya etnis lokal, bekerja sama dengan komunitas adat dan akademisi.
7. Evaluasi Berkala dan Sistem Monitoring Kinerja
    - Membangun dashboard kinerja digital yang memantau realisasi program secara real-time, serta melakukan evaluasi triwulanan untuk mengidentifikasi hambatan lebih dini.
8. Penguatan Fungsi Pelayanan dan Promosi
    - Meningkatkan pelayanan arsip dan perpustakaan berbasis aplikasi mobile dan media sosial untuk menarik minat generasi muda, serta memberikan penghargaan bagi desa/kelurahan dengan inovasi layanan literasi.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, terutama dalam bidang tata kelola administrasi, keuangan, dan pengelolaan arsip. Pelaksanaan kegiatan operasional berjalan secara tertib dan terstruktur, dengan sistem penatausahaan keuangan yang terkelola dengan baik serta penyusunan laporan yang dilakukan secara tepat waktu dan akuntabel. Upaya dalam pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan dokumen arsip juga terlihat sangat responsif, terutama dalam menghadapi potensi risiko seperti bencana atau perubahan struktur organisasi perangkat daerah. Pemanfaatan sistem informasi kearsipan nasional telah memberikan dampak positif dalam memperluas akses informasi dan memperkuat transparansi pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas telah mampu menjaga fungsi arsip sebagai alat akuntabilitas, bukti pertanggungjawaban, dan memenuhi prinsip penyelamatan warisan dokumenter daerah.

Terdapat tantangan yang cukup signifikan dalam pengembangan layanan perpustakaan dan penguatan budaya literasi masyarakat. Beberapa program strategis yang bertujuan untuk membina perpustakaan di satuan pendidikan, mengembangkan koleksi khas daerah, serta mendorong inklusi sosial melalui literasi belum menunjukkan progres yang berarti. Minat baca masyarakat secara umum masih belum mengalami peningkatan yang optimal, meskipun berbagai kegiatan sosialisasi dan kampanye telah dilakukan. Selain itu, upaya pelestarian naskah kuno dan dokumentasi budaya etnis lokal masih terbatas, baik dari sisi jangkauan maupun kedalaman pelaksanaannya. Keterbatasan sumber daya manusia, ketergantungan pada proses pengadaan barang, serta kurangnya sinergi dengan instansi terkait turut menjadi faktor yang menghambat percepatan pencapaian tujuan pembangunan di bidang literasi dan kearsipan.

Memperkuat peran strategis Dinas di masa mendatang, diperlukan pendekatan yang lebih kolaboratif, inovatif, dan berbasis komunitas. Penguatan jejaring dengan sekolah, desa, lembaga budaya, dan organisasi masyarakat dapat menjadi kunci dalam memperluas dampak program. Pengembangan layanan perpustakaan yang lebih dinamis, seperti perpustakaan keliling, pojok baca di ruang publik, dan layanan digital, perlu dipercepat agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan wilayah terpencil. Selain itu, penting untuk membangun kesadaran kolektif tentang nilai arsip dan budaya baca sebagai bagian dari identitas daerah dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Dengan komitmen yang berkelanjutan, inovasi dalam pelayanan, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser memiliki potensi besar untuk menjadi garda terdepan dalam membangun masyarakat yang literat, informatif, dan peduli terhadap warisan budaya bangsa.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

Berdasarkan Renstra PD periode 2021-2026 tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sejalan dengan kebijakan ANRI, Perpusnas serta Dinas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser adalah sebagai berikut : Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah dan merupakan suatu hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Paser pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021-2026, tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas.

Keterkaitannya dengan Renja Perubahan 2025 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser akan berfokus pada:

1. Meningkatkan kualitas layanan kearsipan dan perpustakaan kepada masyarakat, aparatur, dan pihak terkait lainnya.
2. Mewujudkan sistem pengelolaan kearsipan yang efektif dan efisien di seluruh lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
3. Meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat Kabupaten Paser.
4. Melestarikan arsip dan naskah kuno sebagai warisan budaya dan sumber informasi daerah.
5. Memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat informasi, pendidikan, dan rekreasi bagi masyarakat.
6. Mengembangkan infrastruktur dan sumber daya kearsipan dan perpustakaan yang memadai.

Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser adalah sebagai berikut, sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai dan memiliki kurun waktu tertentu. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatnya minat baca masyarakat.
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan kearsipan.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser menetapkan sasaran-sasaran yang lebih terukur pada Renja Perubahan 2025, seperti:

Bidang Kearsipan:

a. Meningkatnya persentase Perangkat Daerah (PD) yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai standar (misalnya, mencapai target tertentu setiap tahun hingga 2026).
b. Meningkatnya jumlah arsip statis yang telah diinventarisasi dan dideskripsikan.
c. Meningkatnya jumlah arsip statis yang telah didigitalisasi dan dapat diakses melalui sistem informasi kearsipan.
d. Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan PD terhadap Jadwal Retensi Arsip (JRA).
e. Terwujudnya sarana dan prasarana kearsipan yang memenuhi standar.
f. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia pengelola arsip.

Bidang Perpustakaan:

a. Meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka ke perpustakaan daerah dan perpustakaan lainnya di kabupaten.
b. Meningkatnya jumlah anggota perpustakaan aktif.
c. Meningkatnya jumlah dan variasi koleksi perpustakaan yang relevan dan up-to-date.
d. Meningkatnya pemanfaatan layanan perpustakaan digital.
e. Meningkatnya nilai budaya baca masyarakat (diukur melalui survei atau indikator lain).
f. Terlaksananya program-program pembudayaan gemar membaca dan literasi yang efektif.
g. Meningkatnya jumlah perpustakaan (termasuk perpustakaan desa/sekolah) yang memenuhi standar nasional perpustakaan.
h. Meningkatnya kompetensi tenaga perpustakaan dan pustakawan.

3.2. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja PD. Proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan PD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser dikaitkan dengan sasaran pada RPJMD 2021-2026 Kabupaten Paser serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berkaitan dengan sasaran secara keseluruhan, hasil review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 3.1. sebagai berikut:

TABEL 3.1.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

KABUPATEN PASER

Nama Perangkat Daerah : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian 2025	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian 2025	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(2)	*(3)*	*(4)*		*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*		*(10)*	*(11)*	*(12)*
		TOTAL			***16.631.777.018,00***						***17.987.841.306,49***	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**INDEKS KEPUASAN PELAYANAN SEKRETARIAT**	*%*	*74*	***11.935.850.154,00***	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**INDEKS KEPUASAN PELAYANAN SEKRETARIAT**	*%*	*74*	***12.237.860.661,50***	**Kegiatan Lanjutan**
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE PD YANG MENYUSUN DAN MENETAPKAN DOKUMEN PERENCANAAN TEPAT WAKTU**	**%**	**100**	*241.972.450,00*	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE PD YANG MENYUSUN DAN MENETAPKAN DOKUMEN PERENCANAAN TEPAT WAKTU**	**%**	**100**	*303.392.902,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Tanah Grogot**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	10	*110.337.321,00*	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Tanah Grogot**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	10	*110.442.691,00*	**Kegiatan Lanjutan**

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Tanah Grogot**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	*70.000.000,00*	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Tanah Grogot**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	*138.054.358,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tanah Grogot**	jumlah dokumen Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	2	*61.635.129,00*	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tanah Grogot**	jumlah dokumen Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	2	*54.895.853,00*	**Kegiatan Lanjutan**
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE KUALITAS DAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN**	**%**	**100**	***10.021.390.167,00***	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE KUALITAS DAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN**	**%**	**100**	***10.053.185.801,00***	**Kegiatan Lanjutan**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Tanah Grogot**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	12	*9.610.164.348,00*	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Tanah Grogot**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	12	*9.610.164.348,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Tanah Grogot**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	*63.052.011,00*	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Tanah Grogot**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	*32.125.249,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Tanah Grogot**	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1	*3.068.753,00*	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Tanah Grogot**	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1	*2.274.312,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**Tanah Grogot**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	17	*337.996.850,00*	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**Tanah Grogot**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	17	*405.230.262,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	**Tanah Grogot**	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	2	*4.267.851,00*	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	**Tanah Grogot**	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	2	*2.041.592,00*	**Kegiatan Lanjutan**

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**Tanah Grogot**	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	1	*2.840.354,00*	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**Tanah Grogot**	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	1	*1.350.038,00*	**Kegiatan Lanjutan**
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**Tanah Grogot**	**CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**%**	**100**	***279.844.798,00***	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Tanah Grogot**	**CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**%**	**100**	***413.890.300,60***	**Kegiatan Lanjutan**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Tanah Grogot**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	20	9.370.240,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Tanah Grogot**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	20	9.370.240,00	**Kegiatan Lanjutan**
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Tanah Grogot**	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	90	15.048.019,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Tanah Grogot**	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	90	15.048.019,80	**Kegiatan Lanjutan**
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Tanah Grogot**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	46	90.825.355,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Tanah Grogot**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	46	55.420.018,00	**Kegiatan Lanjutan**
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Tanah Grogot**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	20000	21.098.325,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Tanah Grogot**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	20000	10.549.163,00	**Kegiatan Lanjutan**
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Tanah Grogot**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	3.502.859,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Tanah Grogot**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	53.502.859,80	**Kegiatan Lanjutan**
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Tanah Grogot**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	20	140.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Tanah Grogot**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	20	270.000.000,00	**Kegiatan Lanjutan**

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Tanah Grogot**	**CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**%**	**100**	**532.257.466,00**	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Tanah Grogot**	**CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**%**	**100**	**509.532.249,00**	**Kegiatan Lanjutan**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Tanah Grogot**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	11	532.257.466,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Tanah Grogot**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	11	509.532.249,00	**Kegiatan Lanjutan**
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Tanah Grogot**	**CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**%**	**100**	**411.096.434,00**	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tanah Grogot**	**CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**%**	**100**	**221.096.434,90**	**Kegiatan Lanjutan**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Tanah Grogot**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	125	1.096.434,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Tanah Grogot**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	125	1.096.434,90	**Kegiatan Lanjutan**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Tanah Grogot**	jumlah item jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar	laporan	12	410.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Tanah Grogot**	jumlah item jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar	laporan	12	220.000.000,00	**Kegiatan Lanjutan**
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE JUMLAH ASET YANG TERSEDIA DALAM KUALITAS BAIK**	**%**	**100**	***449.288.839,00***	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE JUMLAH ASET YANG TERSEDIA DALAM KUALITAS BAIK**	**%**	**100**	***736.762.974,00***	**Kegiatan Lanjutan**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Tanah Grogot**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	3	60.804.073,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Tanah Grogot**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	3	148.278.208,00	**Kegiatan Lanjutan**
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Tanah Grogot**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	13	24.699.367,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Tanah Grogot**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	13	24.699.367,00	**Kegiatan Lanjutan**
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Tanah Grogot**	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	9	363.785.399,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Tanah Grogot**	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	9	563.785.399,00	**Kegiatan Lanjutan**
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG DIBINA**	**%**	**2,5**	***2.406.059.746,00***	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG DIBINA**	**%**	**2,5**	***2.644.992.616,99***	**Kegiatan Lanjutan**
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**JUMLAH KUNJUNGAN PEMUSTAKA**	**orang**	**9050**	***1.597.222.985,00***	**PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**JUMLAH KUNJUNGAN PEMUSTAKA**	**orang**	**9050**	***1.728.470.978,00***	**Kegiatan Lanjutan**

Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	**Tanah Grogot**	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	dokumen/ layanan	1	255.962.241,00	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	**Tanah Grogot**	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	dokumen/ layanan	1	237.700.308,00	**Kegiatan Lanjutan**
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah kabupaten/ kota sesuai standar nasional perpustakaan diwilayah kabupaten/ kota sesuai kewenangannya	perpustakaan	5	167.354.722,00	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah kabupaten/ kota sesuai standar nasional perpustakaan diwilayah kabupaten/ kota sesuai kewenangannya	perpustakaan	5	186.926.226,00	**Kegiatan Lanjutan**
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat kabupaten/ kota yang dikembangkan	*eksemplar*	*1*	23.491.466,00	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat kabupaten/ kota yang dikembangkan	*eksemplar*	*1*	11.745.733,00	**Kegiatan Lanjutan**
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	**Tanah Grogot**	Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	perpustakaan	5	281.649.282,00	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	**Tanah Grogot**	Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	perpustakaan	5	295.692.786,00	**Kegiatan Lanjutan**
Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah perpustakaan khusus yang dibina sesuai kewenangan kabupaten/ kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	perpustakaan	20	45.684.429,00	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah perpustakaan khusus yang dibina sesuai kewenangan kabupaten/ kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	perpustakaan	20	112.213.723,00	**Kegiatan Lanjutan**
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	orang	40	244.021.582,00	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	orang	40	313.395.828,00	**Kegiatan Lanjutan**

Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	layanan	200	292.777.933,00	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	layanan	200	241.379.698,00	**Kegiatan Lanjutan**
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	**Tanah Grogot**	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	*eksemplar*	*20*	207.235.522,00	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	**Tanah Grogot**	Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan	*eksemplar*	*20*	197.768.771,00	**Kegiatan Lanjutan**
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	**Tanah Grogot**	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	10	79.045.808,00	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	**Tanah Grogot**	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	10	131.647.905,00	**Kegiatan Lanjutan**
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**NILAI BUDAYA BACA**	**%**	**7,45**	***808.836.761,00***	**PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**NILAI BUDAYA BACA**	**%**	**7,45**	***916.521.639,00***	
Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	**Tanah Grogot**	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada satuan pendidikan.	*lokus*	*8*	274.154.722,00	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	**Tanah Grogot**	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada satuan pendidikan.	*lokus*	*8*	287.791.961,00	**Kegiatan Lanjutan**
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	**Tanah Grogot**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	*orang*	*3*	300.681.650,00	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	**Tanah Grogot**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	*orang*	*3*	279.209.292,00	**Kegiatan Lanjutan**
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	**Tanah Grogot**	Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	*lokus*	*1*	139.253.354,00	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	**Tanah Grogot**	Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	*lokus*	*1*	242.110.242,00	**Kegiatan Lanjutan**

Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	*perpustakaan*	*1*	94.747.035,00	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	*perpustakaan*	*1*	107.410.144,00	**Kegiatan Lanjutan**
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	**Tanah Grogot**	**JUMLAH NASKAH KUNO YANG DILESTARIKAN**	**Naskah**	**5**	***150.927.268,00***	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Tanah Grogot**	**JUMLAH NASKAH KUNO YANG DILESTARIKAN**	**Naskah**	**5**	***82.226.234,00***	**Kegiatan Lanjutan**
PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE NASKAH KUNO YANG DIKELOLA DAN DILESTARIKAN**	**%**	**100**	***107.059.452,00***	**PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE NASKAH KUNO YANG DIKELOLA DAN DILESTARIKAN**	**%**	**100**	***53.529.726,00***	**Kegiatan Lanjutan**
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	**Tanah Grogot**	Jumlah naskah kono yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan didayagunakan	eksemplar	1	107.059.452,00	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	**Tanah Grogot**	Jumlah naskah kono yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan didayagunakan	eksemplar	1	53.529.726,00	**Kegiatan Lanjutan**
PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA YANG DITEMUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA YANG DIKELOLA DAN DILESTARIKAN**	*%*	*100*	***43.867.816,00***	**PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA YANG DITEMUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA YANG DIKELOLA DAN DILESTARIKAN**	*%*	*100*	***28.696.508,00***	**Kegiatan Lanjutan**
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	**Tanah Grogot**	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara hasil seleksi dan pengadaan	*eksemplar*	*45*	43.867.816,00	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	**Tanah Grogot**	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara hasil seleksi dan pengadaan	*eksemplar*	*45*	28.696.508,00	**Kegiatan Lanjutan**
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN ARSIP SECARA BAKU**	**%**	**60**	***696.625.621,00***	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN ARSIP SECARA BAKU**	**%**	**60**	***744.208.407,00***	**Kegiatan Lanjutan**
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE ARSIP YANG TELAH DIBUATKAN DIGITAL ARSIP**	**%**	**100**	***143.743.615,00***	**PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE ARSIP YANG TELAH DIBUATKAN DIGITAL ARSIP**	**%**	**100**	***71.871.808,00***	**Kegiatan Lanjutan**
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	5	143.743.615,00	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	5	71.871.808,00	**Kegiatan Lanjutan**

PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE ARSIP STATIS YANG TELAH DIBUATKAN SECARA BANTU TEMU BALIK**	**%**	**100**	*175.443.403,00*	**PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE ARSIP STATIS YANG TELAH DIBUATKAN SECARA BANTU TEMU BALIK**	**%**	**100**	*363.693.200,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	**Tanah Grogot**	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	50	175.443.403,00	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	**Tanah Grogot**	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	50	363.693.200,00	**Kegiatan Lanjutan**
PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE JUMLAH ARSIP YANG DIMASUKKAN DALAM SIKN MELALUI JIKN**	**%**	**50**	*377.438.603,00*	**PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE JUMLAH ARSIP YANG DIMASUKKAN DALAM SIKN MELALUI JIKN**	**%**	**50**	*308.643.399,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	**Tanah Grogot**	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/ kota melalui JIKN	pengguna	1	65.443.403,00	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	**Tanah Grogot**	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/ kota melalui JIKN	pengguna	1	123.040.602,00	**Kegiatan Lanjutan**
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	laporan	5	311.995.200,00	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	laporan	5	185.602.797,00	**Kegiatan Lanjutan**
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE ARSIP/ DOKUMEN DAERAH YANG DILESTARIKAN**	**%**	**60**	*999.203.024,00*	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE ARSIP/ DOKUMEN DAERAH YANG DILESTARIKAN**	**%**	**60**	*2.017.830.740,00*	**Kegiatan Lanjutan**
PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN	**Tanah Grogot**	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN PEMUSNAHAN ARSIP DENGAN NSPK**	**%**	**100**	*175.443.403,00*	**PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN**	**Tanah Grogot**	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN PEMUSNAHAN ARSIP DENGAN NSPK**	**%**	**100**	*399.315.140,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	**Tanah Grogot**	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	berkas	50	175.443.403,00	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	**Tanah Grogot**	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	berkas	50	399.315.140,00	**Kegiatan Lanjutan**

PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA YANG BERSKALA KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DARI BENCANA NSPK**	**%**	**100**	*199.283.403,00*	**PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA YANG BERSKALA KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DARI BENCANA NSPK**	**%**	**100**	*890.605.299,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	**Tanah Grogot**	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	arsip	50	199.283.403,00	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	**Tanah Grogot**	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	arsip	50	890.605.299,00	**Kegiatan Lanjutan**
PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIGABUNG DAN/ATAU DIBUBARKAN, DAN PEMEKARAN DAERAH KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN	**Tanah Grogot**	**TINGKAI KESESUAIAN KEGIATAN PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG DIGABUNG DAN/ ATAU DIBUBARKAN DAN PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN DENGAN NSPK**	**%**	**100**	*499.032.815,00*	**PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIGABUNG DAN/ATAU DIBUBARKAN, DAN PEMEKARAN DAERAH KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN**	**Tanah Grogot**	**TINGKAI KESESUAIAN KEGIATAN PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG DIGABUNG DAN/ ATAU DIBUBARKAN DAN PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN DENGAN NSPK**	**%**	**100**	*580.584.301,00*	**Kegiatan Lanjutan**
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	daftar	10	132.268.806,00	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	daftar	10	197.923.000,00	**Kegiatan Lanjutan**
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	arsip	10	181.112.606,00	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	arsip	10	320.465.301,00	**Kegiatan Lanjutan**
Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	**Tanah Grogot**	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	arsip	1	185.651.403,00	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	**Tanah Grogot**	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	arsip	1	62.196.000,00	**Kegiatan Lanjutan**

AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA DENGAN NSPK**	**%**	**100**	**125.443.403,00**	**AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA DENGAN NSPK**	**%**	**100**	**147.326.000,00**	**Kegiatan Lanjutan**
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	**Tanah Grogot**	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	arsip	1	125.443.403,00	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	**Tanah Grogot**	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	arsip	1	147.326.000,00	**Kegiatan Lanjutan**
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE ANGKA PEMAKAIAN ARSIP**	**%**	**100**	***443.111.200,00***	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE ANGKA PEMAKAIAN ARSIP**	**%**	**100**	***260.722.647,00***	**Kegiatan Lanjutan**
PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP DI KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN PENERBITAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP DENGAN SNPK**	**%**	**100**	***443.111.200,00***	**PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP DI KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN PENERBITAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP DENGAN SNPK**	**%**	**100**	***260.722.647,00***	**Kegiatan Lanjutan**
Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	**Tanah Grogot**	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	SOP	1	168.084.200,00	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	**Tanah Grogot**	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	SOP	1	91.017.100,00	**Kegiatan Lanjutan**
Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	**Tanah Grogot**	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip	1	275.027.000,00	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	**Tanah Grogot**	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip	1	169.705.547,00	**Kegiatan Lanjutan**

3.3. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2025

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, arah kebijakan dan strategi, maka disusunlah program-program Dinas Kearsipan dan Perputakaan Kabupaten Paser untuk tahun 2025 yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Peningkatan Daya Saing Daerah dan Keberlanjutan Lingkungan. Beberapa faktor yang mendukung dalam menentukan rumusan program, kegiatan dan subkegiatan selama tahun 2025 yang tidak bisa dilepaskan dengan RPJMD Kabupaten Paser meliputi pencapaian visi dan misi kepala daerah : Visi kepala Daerah Kabupaten Paser "Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil,dan Sejahtera". Adapun Misi yang terkait dengan Dinas kearsipan dan Perpustakaan adalah :

1. Misi kedua : meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efesien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan.
2. Misi keempat : meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

Penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser untuk tahun 2025 didasarkan pada berbagai regulasi, prioritas pembangunan daerah, serta visi dan misi kepala daerah. Keterkaitan program, kegiatan dan subkegiatan Dinas dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2025, berikut adalah bagaimana program, kegiatan dan subkegiatan dinas dapat mendukung prioritas pembangunan:

Keterkaitan dengan Misi Kepala Daerah:

a. Misi kedua: meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan.

   Kearsipan: Program pengelolaan arsip yang sistematis, digitalisasi arsip, dan penyediaan akses arsip yang mudah mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Pelatihan kearsipan bagi aparatur juga meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan informasi.

b. Misi keempat: meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

   Perpustakaan: Program pembudayaan gemar membaca, pengembangan literasi (termasuk literasi digital), penyediaan koleksi yang beragam dan berkualitas, serta pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial secara langsung berkontribusi pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan daya saing masyarakat.

Selain prioritas pembangunan daerah dan misi kepala daerah, berikut adalah faktor-faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser untuk tahun 2025:

1. Pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals):
   b. SDG 4 (Pendidikan Berkualitas): Program peningkatan literasi dan akses informasi melalui perpustakaan.
   c. SDG 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh): Pengelolaan arsip yang baik mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
2. Pengentasan Kemiskinan:

   Program perpustakaan berbasis inklusi sosial yang menyediakan keterampilan dan informasi untuk meningkatkan peluang ekonomi masyarakat rentan.
3. Pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal):
   a. Memastikan layanan perpustakaan memenuhi standar minimal yang ditetapkan, seperti ketersediaan koleksi, jam layanan, dan tenaga perpustakaan yang kompeten.
   b. Menerapkan standar pengelolaan arsip yang ditetapkan oleh ANRI.
4. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah:
   a. Penyediaan informasi dan referensi melalui perpustakaan yang mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan daerah (misalnya, informasi tentang pertanian, pariwisata, UMKM lokal).
   b. Pengelolaan arsip yang berkaitan dengan sejarah perkembangan ekonomi daerah sebagai bahan kajian dan promosi.
5. Penguatan Pelayanan Publik:
   a. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan (misalnya, layanan digital, jam layanan yang fleksibel, fasilitas yang nyaman).
   b. Peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan kearsipan (misalnya, sistem temu balik arsip yang cepat, layanan informasi arsip).

6. Pemerataan Infrastruktur Daerah:
    a. Pengembangan perpustakaan di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau (misalnya, perpustakaan keliling, pojok baca di desa).
    b. Memastikan sarana dan prasarana kearsipan yang memadai di seluruh unit kerja pemerintah daerah.

Apabila program, kegiatan dan subkegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program, kegiatan dan subkegiatan, pagu indikatif, maka program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan mengacu pada pencapaian indikator yang akan dicapai pada tahun 2025.

Pada tahun 2025 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser melaksanakan **6 Program** dengan **18 Kegiatan dan 48 Subkegiatan**. Secara rinci diuraikan sebagai berikut:Rincian program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.2. di bawah ini :

TABEL 3.2.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PERANGKAT DAERAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA PD TAHUN 2025

KABUPATEN PASER

Nama Perangkat Daerah : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PAGU MURNI						PAGU PERUBAHAN					
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Murni	Pagu Murni	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Perubahan	Pagu Perubahan
(2)	*(3)*	*(4)*		*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*		*(10)*	*(11)*
Urusan Wajib Pekerjaan Umum											
		TOTAL			*16.648.447.311,00*						*17.987.841.306,49*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tanah Grogot	INDEKS KEPUASAN PELAYANAN SEKRETARIAT	*%*	*74*	*11.935.850.154,00*	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tanah Grogot	INDEKS KEPUASAN PELAYANAN SEKRETARIAT	*%*	*74*	*12.237.860.661,50*
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tanah Grogot	PERSENTASE PD YANG MENYUSUN DAN MENETAPKAN DOKUMEN PERENCANAAN TEPAT WAKTU	%	100	*241.972.450,00*	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tanah Grogot	PERSENTASE PD YANG MENYUSUN DAN MENETAPKAN DOKUMEN PERENCANAAN TEPAT WAKTU	%	100	*303.392.902,00*
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	10	*110.337.321,00*	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	10	*110.442.691,00*

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Tanah Grogot**	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**laporan**	**12**	***70.000.000,00***	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**laporan**	**12**	***138.054.358,00***
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tanah Grogot**	**jumlah dokumen Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**laporan**	**2**	***61.635.129,00***	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tanah Grogot**	**jumlah dokumen Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**laporan**	**2**	***54.895.853,00***
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE KUALITAS DAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN**	**%**	**100**	***10.021.390.167,00***	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE KUALITAS DAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN**	**%**	**100**	***10.053.185.801,00***
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Tanah Grogot**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**orang/bulan**	**12**	***9.610.164.348,00***	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**orang/bulan**	**12**	***9.610.164.348,00***
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Tanah Grogot**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	**dokumen**	**1**	***63.052.011,00***	**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	**dokumen**	**1**	***32.125.249,00***
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Tanah Grogot**	**Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**dokumen**	**1**	***3.068.753,00***	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**dokumen**	**1**	***2.274.312,00***
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**Tanah Grogot**	**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**	**dokumen**	**17**	***337.996.850,00***	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**	**dokumen**	**17**	***405.230.262,00***

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	**Tanah Grogot**	**Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan**	**dokumen**	**2**	***4.267.851,00***	**Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan**	**dokumen**	**2**	***2.041.592,00***
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**Tanah Grogot**	**Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**	**laporan**	**1**	***2.840.354,00***	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**	**laporan**	**1**	***1.350.038,00***
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**Tanah Grogot**	**CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**%**	**100**	***279.844.798,00***	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Tanah Grogot**	**CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**%**	**100**	***413.890.300,60***
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Tanah Grogot**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**paket**	**20**	**9.370.240,00**	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**paket**	**20**	**9.370.240,00**
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Tanah Grogot**	**Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan**	**paket**	**90**	**15.048.019,00**	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan**	**paket**	**90**	**15.048.019,80**
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Tanah Grogot**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**paket**	**46**	**90.825.355,00**	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**paket**	**46**	**55.420.018,00**
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Tanah Grogot**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**paket**	**20000**	**21.098.325,00**	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**paket**	**20000**	**10.549.163,00**
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Tanah Grogot**	**Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan**	**dokumen**	**12**	**3.502.859,00**	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan**	**dokumen**	**12**	**53.502.859,80**

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Tanah Grogot**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**laporan**	**20**	**140.000.000,00**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**laporan**	**20**	**270.000.000,00**
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Tanah Grogot**	**CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**%**	**100**	**532.257.466,00**	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Tanah Grogot**	**CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**%**	**100**	**509.532.249,00**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Tanah Grogot**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**unit**	**11**	**532.257.466,00**	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**unit**	**11**	**509.532.249,00**
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Tanah Grogot**	**CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**%**	**100**	**411.096.434,00**	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tanah Grogot**	**CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**%**	**100**	**221.096.434,90**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Tanah Grogot**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**laporan**	**125**	**1.096.434,00**	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**laporan**	**125**	**1.096.434,90**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Tanah Grogot**	**jumlah item jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar**	**laporan**	**12**	**410.000.000,00**	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Tanah Grogot**	**jumlah item jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar**	**laporan**	**12**	**220.000.000,00**
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE JUMLAH ASET YANG TERSEDIA DALAM KUALITAS BAIK**	**%**	**100**	***449.288.839,00***	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE JUMLAH ASET YANG TERSEDIA DALAM KUALITAS BAIK**	**%**	**100**	***736.762.974,00***
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Tanah Grogot**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya**	**unit**	**3**	**60.804.073,00**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya**	**unit**	**3**	**148.278.208,00**
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Tanah Grogot**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**unit**	**13**	**24.699.367,00**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**unit**	**13**	**24.699.367,00**

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Tanah Grogot**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**unit**	**9**	**363.785.399,00**	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**unit**	**9**	**563.785.399,00**
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG DIBINA**	**%**	**2,5**	***2.422.730.039,00***	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG DIBINA**	**%**	**2,5**	***2.644.992.616,99***
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**JUMLAH KUNJUNGAN PEMUSTAKA**	**orang**	**9050**	***1.613.893.278,00***	**PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**JUMLAH KUNJUNGAN PEMUSTAKA**	**orang**	**9050**	***1.728.470.978,00***
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	**Tanah Grogot**	**Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK**	**dokumen/ layanan**	**1**	**255.962.241,00**	**Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK**	**dokumen/ layanan**	**1**	**237.700.308,00**
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	**Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah kabupaten/ kota sesuai standar nasional perpustakaan diwilayah kabupaten/ kota sesuai kewenangannya**	**perpustakaan**	**5**	**167.354.722,00**	**Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tanah Grogot**	**Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah kabupaten/ kota sesuai standar nasional perpustakaan diwilayah kabupaten/ kota sesuai kewenangannya**	**perpustakaan**	**5**	**186.926.226,00**
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	**Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat kabupaten/ kota yang dikembangkan**	***eksemplar***	***1***	**23.491.466,00**	**Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tanah Grogot**	**Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat kabupaten/ kota yang dikembangkan**	***eksemplar***	***1***	**11.745.733,00**
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	**Tanah Grogot**	**Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan**	**perpustakaan**	**5**	**281.649.282,00**	**Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan**	**Tanah Grogot**	**Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan**	**perpustakaan**	**5**	**295.692.786,00**

Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	**Jumlah perpustakaan khusus yang dibina sesuai kewenangan kabupaten/ kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan**	**perpustakaan**	**20**	**62.354.722,00**	**Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota**	**Tanah Grogot**	**Jumlah perpustakaan khusus yang dibina sesuai kewenangan kabupaten/ kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan**	**perpustakaan**	**20**	**112.213.723,00**
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	**Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**orang**	**40**	**244.021.582,00**	**Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**orang**	**40**	**313.395.828,00**
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	**Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi**	**layanan**	**200**	**292.777.933,00**	**Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi**	**layanan**	**200**	**241.379.698,00**
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	**Tanah Grogot**	**Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan**	***eksemplar***	***20***	**207.235.522,00**	**Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan**	**Tanah Grogot**	**Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan**	***eksemplar***	***20***	**197.768.771,00**
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	**Tanah Grogot**	**Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**dokumen**	**10**	**79.045.808,00**	**Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**dokumen**	**10**	**131.647.905,00**
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**NILAI BUDAYA BACA**	**%**	**7,45**	***808.836.761,00***	**PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**NILAI BUDAYA BACA**	**%**	**7,45**	***916.521.639,00***

Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	**Tanah Grogot**	**Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada satuan pendidikan.**	***lokus***	***8***	**274.154.722,00**	**Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada satuan pendidikan.**	***lokus***	***8***	**287.791.961,00**
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	**Tanah Grogot**	**Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota**	***orang***	***3***	**300.681.650,00**	**Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota**	***orang***	***3***	**279.209.292,00**
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	**Tanah Grogot**	**Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan**	***lokus***	***1***	**139.253.354,00**	**Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan**	***lokus***	***1***	**242.110.242,00**
Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	**Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya**	***perpustakaan***	***1***	**94.747.035,00**	**Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya**	***perpustakaan***	***1***	**107.410.144,00**
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	**Tanah Grogot**	**JUMLAH NASKAH KUNO YANG DILESTARIKAN**	**Naskah**	**5**	***150.927.268,00***	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Tanah Grogot**	**JUMLAH NASKAH KUNO YANG DILESTARIKAN**	**Naskah**	**5**	***82.226.234,00***
PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE NASKAH KUNO YANG DIKELOLA DAN DILESTARIKAN**	**%**	**100**	***107.059.452,00***	**PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE NASKAH KUNO YANG DIKELOLA DAN DILESTARIKAN**	**%**	**100**	***53.529.726,00***
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	**Tanah Grogot**	**Jumlah naskah kono yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan didayagunakan**	**eksemplar**	**1**	**107.059.452,00**	**Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan**	**Tanah Grogot**	**Jumlah naskah kono yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan didayagunakan**	**eksemplar**	**1**	**53.529.726,00**
PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA YANG DITEMUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA YANG DIKELOLA DAN DILESTARIKAN**	***%***	***100***	***43.867.816,00***	**PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA YANG DITEMUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA YANG DIKELOLA DAN DILESTARIKAN**	***%***	***100***	***28.696.508,00***

Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	**Tanah Grogot**	**Jumlah koleksi budaya etnis nusantara hasil seleksi dan pengadaan**	***eksemplar***	***45***	**43.867.816,00**	**Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara**	**Tanah Grogot**	**Jumlah koleksi budaya etnis nusantara hasil seleksi dan pengadaan**	***eksemplar***	***45***	**28.696.508,00**
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN ARSIP SECARA BAKU**	**%**	**60**	***696.625.621,00***	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN ARSIP SECARA BAKU**	**%**	**60**	***744.208.407,00***
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE ARSIP YANG TELAH DIBUATKAN DIGITAL ARSIP**	**%**	**100**	***143.743.615,00***	**PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE ARSIP YANG TELAH DIBUATKAN DIGITAL ARSIP**	**%**	**100**	***71.871.808,00***
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota**	**laporan**	**5**	**143.743.615,00**	**Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota**	**laporan**	**5**	**71.871.808,00**
PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE ARSIP STATIS YANG TELAH DIBUATKAN SECARA BANTU TEMU BALIK**	**%**	**100**	***175.443.403,00***	**PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE ARSIP STATIS YANG TELAH DIBUATKAN SECARA BANTU TEMU BALIK**	**%**	**100**	***363.693.200,00***
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	**Tanah Grogot**	**Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis**	**Arsip**	**50**	**175.443.403,00**	**Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis**	**Arsip**	**50**	**363.693.200,00**
PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE JUMLAH ARSIP YANG DIMASUKKAN DALAM SIKN MELALUI JIKN**	**%**	**50**	***377.438.603,00***	**PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE JUMLAH ARSIP YANG DIMASUKKAN DALAM SIKN MELALUI JIKN**	**%**	**50**	***308.643.399,00***
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	**Tanah Grogot**	**Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/ kota melalui JIKN**	**pengguna**	**1**	**65.443.403,00**	**Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN**	**Tanah Grogot**	**Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/ kota melalui JIKN**	**pengguna**	**1**	**123.040.602,00**

Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	**Tanah Grogot**	**Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota**	**laporan**	**5**	**311.995.200,00**	**Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota**	**laporan**	**5**	**185.602.797,00**
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE ARSIP/ DOKUMEN DAERAH YANG DILESTARIKAN**	**%**	**60**	***999.203.024,00***	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE ARSIP/ DOKUMEN DAERAH YANG DILESTARIKAN**	**%**	**60**	***2.017.830.740,00***
PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN	**Tanah Grogot**	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN PEMUSNAHAN ARSIP DENGAN NSPK**	**%**	**100**	***175.443.403,00***	**PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN**	**Tanah Grogot**	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN PEMUSNAHAN ARSIP DENGAN NSPK**	**%**	**100**	***399.315.140,00***
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	**Tanah Grogot**	**Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan**	**berkas**	**50**	**175.443.403,00**	**Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan**	**berkas**	**50**	**399.315.140,00**
PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA YANG BERSKALA KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DARI BENCANA NSPK**	**%**	**100**	***199.283.403,00***	**PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA YANG BERSKALA KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DARI BENCANA NSPK**	**%**	**100**	***890.605.299,00***
Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	**Tanah Grogot**	**Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana**	**arsip**	**50**	**199.283.403,00**	**Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana**	**arsip**	**50**	**890.605.299,00**
PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIGABUNG DAN/ATAU DIBUBARKAN, DAN PEMEKARAN DAERAH KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN	**Tanah Grogot**	**TINGKAI KESESUAIAN KEGIATAN PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG DIGABUNG DAN/ ATAU DIBUBARKAN DAN PEMEKARAN DAERAH**	**%**	**100**	***499.032.815,00***	**PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIGABUNG DAN/ATAU DIBUBARKAN, DAN PEMEKARAN DAERAH KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN**	**Tanah Grogot**	**TINGKAI KESESUAIAN KEGIATAN PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG DIGABUNG DAN/ ATAU DIBUBARKAN DAN PEMEKARAN DAERAH**	**%**	**100**	***580.584.301,00***

		KABUPATEN DENGAN NSPK						KABUPATEN DENGAN NSPK			
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tanah Grogot	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	daftar	10	132.268.806,00	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tanah Grogot	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	daftar	10	197.923.000,00
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tanah Grogot	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	arsip	10	181.112.606,00	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tanah Grogot	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	arsip	10	320.465.301,00
Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Tanah Grogot	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	arsip	1	185.651.403,00	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Tanah Grogot	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	arsip	1	62.196.000,00
AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA KABUPATEN/KOTA	Tanah Grogot	TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA DENGAN NSPK	%	100	125.443.403,00	AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA KABUPATEN/KOTA	Tanah Grogot	TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA DENGAN NSPK	%	100	147.326.000,00

Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	**Tanah Grogot**	**Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan**	**arsip**	**1**	**125.443.403,00**	**Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan**	**arsip**	**1**	**147.326.000,00**
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE ANGKA PEMAKAIAN ARSIP**	**%**	**100**	***443.111.200,00***	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Tanah Grogot**	**PERSENTASE ANGKA PEMAKAIAN ARSIP**	**%**	**100**	***260.722.647,00***
PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP DI KABUPATEN/KOTA	**Tanah Grogot**	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN PENERBITAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP DENGAN SNPK**	**%**	**100**	***443.111.200,00***	**PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP DI KABUPATEN/KOTA**	**Tanah Grogot**	**TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN PENERBITAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP DENGAN SNPK**	**%**	**100**	***260.722.647,00***
Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	**Tanah Grogot**	**Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan**	**SOP**	**1**	**168.084.200,00**	**Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup**	**Tanah Grogot**	**Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan**	**SOP**	**1**	**91.017.100,00**
Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	**Tanah Grogot**	**Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup**	**Arsip**	**1**	**275.027.000,00**	**Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup**	**Tanah Grogot**	**Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup**	**Arsip**	**1**	**169.705.547,00**

BAB IV
P E N U T U P

4.1. CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser tahun 2025 adalah merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dalam rangka menjaga kesinambungan rencana strategis tahun 2021-2026 untuk pencapaian pembangunan daerah. Rencana Kerja ini akan menjadi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan program, kegiatan dan subkegiatan untuk kegiatan 1 (satu) tahun, sehingga apa yang diprogramkan dapat terwujud dan mencapai tujuan serta sasaran. Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Paser dengan memperhatikan potensi, peluang, hambatan, ancaman dan kekuatan yang ada atau yang mungkin muncul disaat berjalannya kegiatan tersebut.

Berikut adalah penjelasan mengapa catatan ini penting dalam penyusunan Renja Perubahan 2025:

1. Mempertahankan Arah Strategis: Renstra PD 2021-2026 telah menetapkan tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi jangka menengah dinas. Renja Perubahan 2025, meskipun bersifat tahunan dan dapat mengakomodasi penyesuaian, harus tetap berada dalam koridor strategis yang telah digariskan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa upaya dinas setiap tahunnya berkontribusi pada pencapaian tujuan jangka menengah.
2. Menghindari Perbedaan Perencanaan: Penyusunan Renja Perubahan yang tidak mengindahkan Renstra dapat menyebabkan ketidakselarasan antara rencana tahunan dengan rencana jangka menengah. Hal ini berpotensi menghambat pencapaian sasaran strategis dan membuat upaya pembangunan menjadi kurang efektif.
3. Optimalisasi Sumber Daya: Kesinambungan dengan Renstra memungkinkan PD untuk mengalokasikan sumber daya (anggaran, SDM) secara lebih efisien dan efektif. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja Perubahan harus mendukung prioritas yang telah ditetapkan dalam Renstra.
4. Pengukuran Kinerja Jangka Menengah: Renja tahunan menjadi alat untuk mengukur kemajuan pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dengan menjaga kesinambungan, evaluasi kinerja tahunan dapat diakumulasikan untuk melihat tren pencapaian tujuan jangka menengah.

5. Adaptasi dan Penyesuaian yang Terukur: Meskipun harus menjaga kesinambungan, Renja Perubahan 2025 juga memiliki ruang untuk melakukan adaptasi dan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan strategis, kebutuhan masyarakat yang berkembang, atau kebijakan baru yang muncul. Namun, penyesuaian ini harus tetap dalam kerangka strategis Renstra, kecuali jika ada perubahan mendasar pada Renstra itu sendiri (yang biasanya memerlukan proses revisi yang formal).

4.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser Tahun 2025 akan menjadi acuan dalam rencana pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2025 yang berorientasi pada terwujudnya Kabupaten Paser gemar membaca dan tertib arsip. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser Tahun 2025 yang telah disusun menjadi acuan dasar atau pedoman dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program kegiatan dan subkegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2025 yang akan datang.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Melalui Rencana Kerja ini pula diharapkan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser pada tahun 2025 yang merupakan bagian dari Renstra Perangkat daerah dapat bersinergi dengan program dan

kegiatan Pemerintah Kabupaten Paser dalam mendukung pembangunan Kabupaten Paser sesuai dengan RPJMD Kabupaten Paser. Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa mendatang demi tercapainya visi dan misi serta kebijakan dan prioritas pembangunan.

Mengingat dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah, Renja Perubahan 2025 perlu bersifat fleksibel. Mekanisme review secara berkala harus ditetapkan, sehingga jika terjadi perubahan kebijakan yang signifikan dan berdampak pada program atau kegiatan dinas, Renja dapat dievaluasi dan disesuaikan agar tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan.

Ketersediaan anggaran seringkali menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan rencana kerja. Jika alokasi anggaran yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan, langkah-langkah prioritisasi harus segera dilakukan. Dinas perlu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang paling strategis dan memiliki dampak terbesar terhadap pencapaian target kinerja utama serta visi dan misi kepala daerah. Kegiatan-kegiatan yang kurang prioritas atau dapat ditunda perlu dievaluasi kembali alokasi anggarannya untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser tahun 2025 ini dibuat sebagai acuan rencana pelaksanaan yang akan dilaksanakan pada perubahan tahun 2025 sebagai bagian tahapan dalam pelaksanaan Rencana Strategis PD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Tana Paser, 22 Agustus 2025

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Paser

H.M Yusuf Sumako, SH,M.Hum

NIP. 196705201997031007

RENJA PERUBAHAN 2025

PEMERINTAH
KABUPATEN PASER

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER

Alamat :

- Jl. Kesuma Bangsa, Komplek Perkantoran, Gedung E Lantai 1 Tana Paser , Kabupaten Paser Kalimantan Timur
- Website : diskominfo.paserkab.go.id
- Email : kominfo@paserkab.go.id

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 ..... **6**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 6

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 14

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025 23

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **25**

3.1. Tujuan dan Sasaran 25

3.2. Rencana Kerja dan kebutuhan anggaran 26

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025 37

BAB IV PENUTUP **51**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Triwulan 1 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kabupaten Paser 7

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser sampai Triwulan I 22

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser 25

Tabel 3. 2 Kebutuhan Anggaran pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupatena Paser 27

Tabel 3. 3 Matriks Renja 38

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya, kita telah dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Tahun 2025 ini merupakan bentuk perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser dalam 1 tahun kedepan, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah merupakan perbaikan dari penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Perogram Kerja Kabupaten Paser. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini mungkin ditemui data, informasi dan cara penyajian yang belum optimal, untuk itu atas kekurangan dan kelemahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap dokumen ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tana Paser, September 2025

Kepala,

Drs. H. Arief Rahman
Pembina Utama Muda
NIP. 19680206 198803 1 005

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser pada Triwulan I Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2025 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
22. Peraturan Bupati Paser Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Kabupaten Paser;
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Paser Tentang Perubahan RKPD Nomor 20 Tahun 2025 Tgl 18 Juli 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser, proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser, keterkaitan antaraRenja Bappeda dengan dokumen RKPD,

Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser), serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025 Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2025 hingga Triwulan I baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025 Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2025 yang disertai perubahan target Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

3.2. Rencana Kerja dan kebutuhan anggaran

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja Tujuan dan sasaran Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2. 1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Triwulan II Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kabupaten Paser

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Persentase
					I		II				
1	2	3	4		5		6		12		7
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**76**	**10.738.340.430**	**20**	**1.828.060.859**	**18**	**2.836.029.281**	**38**	**4.664.090.140**	**43,43%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran Diskominfostaper**	**100**	**128.514.924**	**25**	**28.489.400**	**25**	**35.555.849**	**50**	**64.045.249**	**49,83%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	69.723.424	0	19.794.600	1	3.225.000	1	23.019.600	33,02%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	19.634.250	0	0	0	15.028.000	0	15.028.000	76,54%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	19.806.250	0	8.694.800	0	10.270.849	0	18.965.649	95,76%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1.032.500	1	0	0	1.032.500	1	1.032.500	100,00%

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	649.000	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	8.900.000	0	0	0	449.500	0	449.500	5,05%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	8.769.500	0	0	0	5.550.000	0	5.550.000	63,29%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase ketersedian gaji dan Tunjangan ASN	100	10.168.819.199	25	1.716.596.912	25	**2.713.400.265**	50	4.429.997.177	43,56%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	32	9.962.969.213	32	1.652.859.769	0	2.702.898.933	32	4.355.758.702	43,72%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8	205.849.986	2	63.737.143	2	10.501.332	4	74.238.475	36,06%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelayanan Adm dalam menunjang kinerja aparatur	100	318.924.307	25	63.315.767	25	**69.883.167**	50	133.198.934	41,77%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	159.260.349	0	20.216.000	1	32.265.500	1	52.481.500	32,95%

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	8.975.910	0	0	1	5.526.500	1	5.526.500	61,57%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	146.888.048	3	43.099.767	6	32.091.167	9	75.190.934	51,19%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan	100	66.550.000	25	18.800.000	35	**0**	60	18.800.000	28,25%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	66.550.000	15	18.800.000	15	0	30	18.800.000	28,25%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Milik Daerah yang disediakan	5	701.000	0	0	0	**0**	0	0	0,00%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5	701.000	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD	100	54.831.000	25	858.780	25	**17.190.000**	50	18.048.780	32,92%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	48.421.000	0	858.780	4	16.730.000	4	17.588.780	36,32%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35	6.410.000	0	0	4	460.000	4	460.000	7,18%

2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	100	3.836.708.126	100	243.539.413	0	**227.206.254**	100	470.745.667	12,27%
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang dapat mengakses Informasi	65	3.836.708.126	0	243.539.413	30	**227.206.254**	30	470.745.667	12,27%
	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	10	134.597.514	0	28.000.000	0	17.414.851	0	45.414.851	33,74%
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	10	83.083.024		0	5	13.545.680	5	13.545.680	16,30%
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	10	166.213.740		28.400.000	1	26.686.152	1	55.086.152	33,14%
	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100	33.244.300		0	20	0	20	0	0,00%
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	5	55.975.490		0	5	0	5	0	0,00%
	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100	2.777.931.145		43.514.300	40	90.816.600	40	134.330.900	4,84%
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	20	183.783.606		28.000.000	10	35.517.424	10	63.517.424	34,56%
	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	100	401.879.307		115.625.113	60	43.225.547	60	158.850.660	39,53%

3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi yang terintegrasi	60	10.305.759.554		279.472.887	45	**2.462.267.869**	45	2.741.740.756	26,60%
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan nama domain dan subdomain di Pemerintah Daerah Kab.Paser	65	129.555.900		22.085.200	35	**4.827.400**	35	26.912.600	20,77%
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	10	129.555.900		22.085.200	5	4.827.400	5	26.912.600	20,77%
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sistem E-Government yang terbangun	65	10.176.203.654		257.387.687	35	**2.457.440.469**	35	2.714.828.156	26,68%
	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang ditempatkan di Pusat Data Nasional	1	59.984.727		9.600.000	1	12.826.000	1	22.426.000	37,39%
	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1	142.070.500		42.658.586	0	14.818.142	0	57.476.728	40,46%
	Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1	1.001.938.870		17.626.500	0	729.644.400	0	747.270.900	74,58%
	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1	90.879.500		0	0	52.741.500	0	52.741.500	58,03%
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi Khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	2	249.940.000		27.420.000	1	13.009.000	1	40.429.000	16,18%
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1	122.302.542		19.200.000	1	27.707.895	1	46.907.895	38,35%
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Sosialisasi Program Kabupaten/ Kota Cerdas	42	96.164.420		14.110.701	0	60.230.236	0	74.340.937	77,31%

	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	42	4.209.944.343		66.336.900	42	229.369.779	42	295.706.679	7,02%
	Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang Memanfaatkan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah Terintegrasi, Yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	2	27.280.000		0	1	0	1	0	0,00%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK sesuai Kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1	110.719.900		19.475.000	0	3.390.000	0	22.865.000	20,65%
	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	42	4.064.978.852		40.960.000	42	1.313.703.517	42	1.354.663.517	33,33%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rasio perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral	100	430.920.626		73.465.800	50	**51.387.200**	50	124.853.000	28,97%
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terhimpunya data dalam mendukung penyelenggaraan Statistik Sektoral	100	430.920.626	25	73.465.800	25	**51.387.200**	50	124.853.000	28,97%
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	42	97.526.728	42	6.095.000	0	12.252.400	42	18.347.400	18,81%
	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	140.903.351	0%	39.148.400	100%	13.704.800	100%	52.853.200	37,51%
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%	76.419.319	0,00%	0	0	24.530.000	0,00%	24.530.000	32,10%
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	10	11.277.614	0	9.022.400	10	900.000	10	9.922.400	87,98%

	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	5	104.793.614	0	19.200.000	5	0	5	19.200.000	18,32%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi	75	136.250.900		11.896.000	40	**12.135.000**	40	24.031.000	17,64%
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	65	133.444.450		9.200.000	35	**12.135.000**	35	21.335.000	15,99%
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	9.783.600		0	0	1.755.000	0	1.755.000	17,94%
	Pelaksanaaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	10	112.104.150		9.200.000	6	0	6	9.200.000	8,21%
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	26	11.556.700	26	0	0	10.380.000	26	10.380.000	89,82%
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	65	2.806.450	25	2.696.000	25	**0**	50	2.696.000	96,06%
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	12	2.806.450		2.696.000	9	0	9	2.696.000	96,06%
				25.447.979.636		2.436.434.959		5.589.025.604		8.025.460.563	
Rata-rata capaian kinerja (%)						9,57		21,96		31,54%	
Predikat Kinerja											

Berdasarkan Tabel 2.2 Realisasi RKPD Tahun 2025 Triwulan II dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 31,54%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.025.460.563 (Delapan milyar dua puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 25.447.979.636 (Dua puluh lima milyar empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan enam ratus tiga puluh enam rupiah)
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser sebesar dengan predikat kinerja
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = *0 indikator*, capaian kinerja >70%-100% = *9 indikator*, capaian kinerja >50%-70% = 3 Indikator, capaian kinerja 0%-50% = *37 indikator*

2.2. **Analisis Capaian Kinerja Pelayanan** Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser, maka Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
b. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
c. pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas;
e. penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
f. perumusan kebijakan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
g. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
l. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas;
m. pembinaan Jabatan Fungsional pada Dinas sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
n. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan Jabatan Fungsional dan pelaksana pada Dinas;
o. pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;
p. penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
q. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
r. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan daerah; dan
s. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser

1. Pelayanan di bidang Komunikasi dan Informasi Publik

   Dalam melaksanakan tugas, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi

   a. perencanaan dan keuangan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas;
   b. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
   c. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Informasi dan Komunikasi Publik berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
   d. pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
   e. pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
   f. pelaksanaan kebijakan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
   g. pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
   h. pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik;
   i. pelaksanaan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
   j. pelaksanaan pelayanan informasi publik;pelaksanaan penguatan tata kelola komisi informasi di Daerah;
   k. pelaksanaan penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
   l. pelaksanaan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
   m. pelaksanaan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;

n. pelaksanaan manajemen komunikasi krisis;
o. pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik;
p. pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
q. pelaksanaan layanan hubungan media;
r. pelaksanaan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
s. pelaksanaan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
t. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
u. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
v. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan
w. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Pelayanan di Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi

a. perencanaan dan keuangan bidang aplikasi informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas;
b. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Aplikasi Informatika berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
d. pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Aplikasi Informatika guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
e. pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Aplikasi Informatika;
f. pelaksanaan kebijakan di Bidang Aplikasi Informatika;
g. pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Aplikasi Informatika;
h. pelaksanaan pendaftaran nama domain Pemerintah Daerah;

i. pelaksanaan penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
j. pelaksanaan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
k. pelaksanaan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
l. pelaksanaan penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
m. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas;
n. pelaksanaan pengelolaan pusat data pemerintahan Daerah;
o. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
p. pelaksanaan pengelolaan *government chief information officer*;
q. monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE;
r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Aplikasi Informatika;
s. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
t. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Aplikasi Informatika; dan
u. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Pelayanan di Bidang Teknologi Komunikasi dan informatika

Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan dan keuangan Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas;
b. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
d. pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
e. pemberian petunjuk pemberian petunjuk Komunikasi dan Informatika;
f. pelaksanaan kebijakan di Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika;
g. pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika;
h. pelaksanaan penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah;
i. pelaksanaan penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
j. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;
k. pelaksanaan penyelenggaran sistem penghubung layanan pemerintah;
l. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika;
n. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
o. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang teknologi komunikasi dan informatika; dan
p. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Pelayanan di Bidang Statistik dan Persandian

   Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi

   a. perencanaan dan keuangan Bidang Statistik dan Persandian sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas;
   b. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
   c. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Statistik dan Persandian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

d. pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Statistik dan Persandian guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
e. pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Statistik dan Persandian;
f. pelaksanaan kebijakan di Bidang Statistik dan Persandian;
g. pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Statistik dan Persandian;
h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
i. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik Daerah yang terintegrasi;
j. pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
k. pelaksanaan membangun metadata statistik sektoral;
l. pelaksanaan pengembangan infrastruktur;
m. pelaksanaan penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di Daerah;
n. pelaksanaan penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah;
o. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah;
p. pelaksanaan keamanan informasi Pemerintahan Daerah berbasis elektronik dan non elektronik;
q. pelaksanaan penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah;
r. pelaksanaan operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah;
s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan Persandian;
t. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
u. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Statistik dan Persandian; dan
v. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Upaya Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Indeks SPBE
2. Persentase desa yang bisa mengakses Internet
3. Persentase Instansi pemerintah yang bisa mengakses internet
4. Persentase perangkat daerah yang menyediakan pelayanan publik dan pemerintahan berbasis TIK
5. Persentase website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah
6. Persentase jaringan dan Sistem Aplikasi dalam kondisi aman
7. Persentase penanganan umpan balik atas informasi publik yang disebarluaskan

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser sampai Triwulan I

No	Tujuan/sasaran	Indikator	Target Renstra Thn 2025	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(7)	(9)	(10)
A	**Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik**	**Indeks SPBE**	**2,70**		
1	Meningkatnya pelayanan publik dan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Persentase desa yang bisa mengakses Internet	85%		
		Persentase Instansi pemerintah yang bisa mengakses internet	98%		
		Persentase perangkat daerah yang menyediakan pelayanan publik dan pemerintahan berbasis TIK	75%		
		Persentase website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah	95,23%		
2	Meningkatkan pengamanan informasi dilingkungan instansi pemerintah dan publik	Persentase jaringan dan Sistem Aplikasi dalam kondisi aman	80%		
3	Meningkatnya ketersediaan data informasi statistik daerah	Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah	85%		
4	Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Persentase penanganan umpan balik atas informasi publik yang disebarluaskan	92%		

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan **Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik** memiliki 1 indikator kinerja yaitu **Indeks SPBE** yang pengukuaran indeks penilaian dilakukan tiap akhir tahun;
b. Sasaran kinerja yang terdiri dari 4 sasaran juga belum dilakukan pengukuran kinerja karena pengukuran kinerja keseluruhan di lakukan pada akhir tahun

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Kabupaten Paser Periode Juni 2025 :

1. Dinas Komunikasi, Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser memiliki visi dan misi yang jelas dan terukur sehingga menjadi pedoman dalam pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun;
2. Dinas Komunikasi,Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser memilki Struktur Organisasi yang efisien yang memungkinkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas;
3. Dinas Komunikasi,Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser memilki Sumber Daya Manusia yang Kompeten guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan walaupun guna pelaksanaan pekerjaan kedepannya jumlah SDM kompeten perlu dilakukan peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya;
4. Dinas Komunikasi,Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser memiliki kultur kerja yang positif dan kondusif sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi pegawainya;

5. Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pengembangan teknologi informasi di Kabupaten Paser;

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian dan Keterampilan di Bidang Teknologi Informasi menyebabkan Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser belum maksimal dalam pelayanan kepada Perangkat Daerah maupun masyarakat;
2. Perkembangan teknologi yang begitu cepat menyebabkan rencana kerja yang disusun menjadi tidak relevan dan perlu perubahan perubahan kebijakan.
3. Keterbatasan infrastruktur yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi,Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2025.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Statistik dan Persandian perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Kabupaten Paser mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	**Indeks SPBE**	**Indeks SPBE**	**3,25**	**3,25**
1	Meningkatnya pelayanan publik dan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi				
		Persentase desa yang bisa mengakses Internet	Persentase desa yang bisa mengakses Internet	85%	85%
		Persentase Instansi pemerintah yang bisa mengakses internet	Persentase Instansi pemerintah yang bisa mengakses internet	98%	98%
		Persentase perangkat daerah yang menyediakan pelayanan publik dan pemerintahan berbasis TIK	Persentase perangkat daerah yang menyediakan pelayanan publik dan pemerintahan berbasis TIK	75%	75%

		Persentase website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah	Persentase website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah	95,23%	95,23%
2	Meningkatkan pengamanan informasi dilingkungan instansi pemerintah dan publik	Persentase jaringan dan Sistem Aplikasi dalam kondisi aman	Persentase jaringan dan Sistem Aplikasi dalam kondisi aman	80%	80%
3	Meningkatnya ketersediaan data informasi statistik daerah	Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah	Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah	85%	85%
4	Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Persentase penanganan umpan balik atas informasi publik yang disebarluaskan	Persentase penanganan umpan balik atas informasi publik yang disebarluaskan	92%	92%

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Tahun 2025 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Rencana Kerja dan kebutuhan anggaran

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser mendukung pencapaian sasaran ke 2, yaitu "**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien melalui Pemerintahan yang Profesional, Partisipatif dan Transparan**".

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3. 2 Kebutuhan Anggaran pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupatena Paser

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI		ANGGARAN PERUBAHAN		SUMBER DANA
1	2	3	10	4	5		Outcome/Output	RP	11
					K	Rp			
SEKRETARIAT									
1	**Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel**	**e**		**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**76**	**11.074.056.958**	**76**	**11.456.245.685**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran Diskominfostaper**	**100**	**336.379.855**	**100**	**249.740.517**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	71.277.855	1	126.402.916	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	140.068.500	1	19.634.250	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	39.612.500	1	19.806.250	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	27.483.000	1	1.032.500	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	25.636.000	1	649.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI		ANGGARAN PERUBAHAN		SUMBER DANA
1	2	3	10	4	5		Outcome/Output	RP	11
					K	Rp			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	12.950.000	1	38.121.101	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	19.352.000	1	44.094.500	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**persentase ketersedian gaji dan Tunjangan ASN**	**100**	**10.087.589.186**	**100**	**10.416.869.899**	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	32	9.962.969.213	32	10.212.969.213	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8	124.619.973	8	203.900.686	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**persentase pelayanan Adm dalam menunjang kinerja aparatur**	**100**	**496.426.968**	**100**	**618.452.762**	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	3.968.226	1	165.738.610	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	184.429.391	1	164.260.349	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	14.253.255	1	14.253.255	Dana Alokasi Umum (DAU)

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI		ANGGARAN PERUBAHAN		SUMBER DANA
1	2	3	10	4	5		Outcome/Output	RP	11
					K	Rp			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	293.776.096	25	274.200.548	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan**	**100**	**67.300.000**	**100**	**19.550.000**	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	67.300.000	60	19.550.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Paket Barang Milik Daerah yang disediakan**	**5**	**21.029.949**	**5**	**46.984.034**	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Pengadaan Mebel	Kab. Paser	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5	21.029.949	1	46.984.034	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemeliharaan BMD**	**100**	**65.331.000**	**100**	**104.648.473**	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	48.421.000	4	59.214.473	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35	16.910.000	9	45.434.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
TOTAL SEKRETARIAT						**11.074.056.958**		**11.456.245.685**	

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI		ANGGARAN PERUBAHAN		SUMBER DANA
1	2	3	10	4	5		Outcome/Output	RP	11
					K	Rp			
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK									
2	**Meningkatnya akses terhadap informasi publik**	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**		**Persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani**	**100**	**4.339.084.135**	**100**	**5.831.555.667**	
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Masyarakat yang dapat mengakses Informasi**	**60**	**4.339.084.135**	**65**	**5.831.555.667**	
		Relasi Media	Kab. Paser	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	10	171.195.029	10	159.689.514	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	10	142.466.047	10	138.836.574	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Pelayanan Informasi Publik	Kab. Paser	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	10	233.027.480	10	142.213.740	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Paser	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100	66.488.600	100	33.244.300	Dana Alokasi Umum (DAU)

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI		ANGGARAN PERUBAHAN		SUMBER DANA
1	2	3	10	4	5		Outcome/Output	RP	11
					K	Rp			
		Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Paser	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	5	111.950.980	5	79.043.490	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Diseminasi Informasi	Kab. Paser	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100	2.861.339.971	100	4.197.931.145	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Paser	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	20	210.097.414	20	296.877.406	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Penyusunan Konten	Kab. Paser	Jumlah Konten Informasi Publik	100	542.518.614	100	783.719.498	Dana Alokasi Umum (DAU)
TOTAL BIDANG						**4.339.084.135**		**5.831.555.667**	
BIDANG APLIKAS INFORMATIKA									
3	**Meningkatnya Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi**	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**		**Persentase aplikasi yang terintegrasi**	**60**	**2.121.525.742**	**60**	**3.201.362.836**	
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Layanan nama domain dan subdomain di Pemerintah Daerah Kab.Paser**	**65**	**159.111.800**	**65**	**129.555.900**	

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI		ANGGARAN PERUBAHAN		SUMBER DANA
1	2	3	10	4	5		Outcome/Output	RP	11
					K	Rp			
		Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	10	159.111.800	10	129.555.900	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**Sistem E-Government yang terbangun**	**65**	**1.962.413.942**	**65**	**3.071.806.936**	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Kab. Paser	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang ditempatkan di Pusat Data Nasional	1 Aplikasi	79.480.000	1 Aplikasi	321.765.703	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Kab. Paser	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	218.341.000	1 Laporan	110.070.500	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Kab. Paser	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	963.825.100	1 Dokumen	1.133.711.370	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	181.759.000	1 Dokumen	105.879.500	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Paser	Jumlah Aplikasi Khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	2 Aplikasi	282.680.000	2 Aplikasi	225.162.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Sosialisasi Program Kabupaten/ Kota Cerdas	42 Unit	181.768.842	42 Unit	237.379.315	Dana Alokasi Umum (DAU)

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI		ANGGARAN PERUBAHAN		SUMBER DANA
1	2	3	10	4	5		Outcome/Output	RP	11
					K	Rp			
		Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Kab. Paser	Jumlah Layanan Pemda yang Memanfaatkan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah Terintegrasi, Yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	2 Layanan	54.560.000	2 Layanan	937.838.548	Dana Alokasi Umum (DAU)
TOTAL BIDANG						**2.121.525.742**		**3.201.362.836**	
BIDANG TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI									
3	**Meningkatnya Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi**	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**		**Persentase aplikasi yang terintegrasi**	**60**	**8.923.433.380**	**60**	**9.289.414.357**	
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**Sistem E-Government yang terbangun**	**65**	**8.923.433.380**	**65**	**9.289.414.357**	
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Paser	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	177.405.080	1 Aplikasi	111.322.542	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	42 PD	4.360.194.900	42 PD	4.209.944.343	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK sesuai Kewenangan Dinas Kominfo	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	159.959.800	1 Dokumen	109.127.900	Dana Alokasi Umum (DAU)

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI		ANGGARAN PERUBAHAN		SUMBER DANA
1	2	3	10	4	5		Outcome/Output	RP	11
					K	Rp			
		Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	42 PD	4.225.873.600	42 PD	4.859.019.572	Dana Alokasi Umum (DAU)
TOTAL BIDANG						**8.923.433.380**		**9.289.414.357**	
BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN									
4	**Meningkatnya ketersediaan data informasi statistik daerah**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**		**Rasio perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral**	**100**	**497.232.085**	**100**	**509.852.221**	
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		**Terhimpunya data dalam mendukung penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**100**	**497.232.085**	**100**	**509.852.221**	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Paser	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	42 Orang	118.279.228	42 Orang	102.526.728	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Kab. Paser	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	162.373.000	100%	111.286.851	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kab. Paser	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%	90.192.629	100%	115.467.414	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Paser	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	10 Dokumen	21.593.614	10 Dokumen	11.277.614	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai standar	Kab. Paser	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	5 Dokumen	104.793.614	5 Dokumen	169.293.614	Dana Alokasi Umum (DAU)

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI		ANGGARAN PERUBAHAN		SUMBER DANA
1	2	3	10	4	5		Outcome/Output	RP	11
					K	Rp			
5	**Meningkatkan pengamanan informasi dilingkungan instansi pemerintah dan publik**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**		**Tingkat keamanan informasi**	**75**	**198.011.400**	**75**	**225.204.500**	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**65**	**192.398.500**	**65**	**222.398.050**	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	19.567.200	1 Laporan	9.783.600	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Pelaksanaaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Paser	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	10 Laporan	149.717.900	7 Laporan	167.037.750	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	26 PD	23.113.400	26 PD	45.576.700	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**65**	**5.612.900**	**65**	**2.806.450**	

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI		ANGGARAN PERUBAHAN		SUMBER DANA
1	2	3	10	4	5		Outcome/Output	RP	11
					K	Rp			
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	12	5.612.900	9	2.806.450	Dana Alokasi Umum (DAU)
TOTAL BIDANG						**695.243.485**		**735.056.721**	
TOTAL ANGGARAN PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN						**27.153.343.700**		**30.513.635.266**	

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persadian Kabupaten Paser pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 3 Matriks Renja

No	Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13
						Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			27.153.343.705,00							32.932.510.304,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			27.153.343.705,00							32.932.510.304,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			26.458.100.220,00							32.932.510.304,00	
1	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks kepuasan pelayanan Sekretariat	78 %	11.074.056.958,00						78 %	11.835.918.967,00	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran Diskominfostaper	100 %	336.379.855,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	100 %	420.544.165,00	
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	71.277.855,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	1 Dokumen	196.126.340,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	140.068.500,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	1 Dokumen	65.014.426,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13
	2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	39.612.500,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publikPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	1 Dokumen	40.215.261,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	27.483.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	1 Dokumen	26.828.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	25.636.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	1 Dokumen	25.796.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	12.950.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	1 Laporan	13.699.638,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	19.352.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	1 Laporan	52.864.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase ketersedian gaji dan Tunjangan ASN	100 %	10.087.589.186,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	100 %	10.285.375.199,00	
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	9.962.969.213,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publikPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	35 Orang/bulan	9.962.969.213,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	124.619.973,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	8 Laporan	322.405.986,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi dalam Menunjang Kinerja Aparatur	100 %	496.426.968,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	100 %	848.328.093,00	
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.968.226,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	1 Paket	329.916.899,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	184.429.391,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	1 Paket	184.429.391,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.253.255,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	1 Paket	14.253.255,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	293.776.096,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publikPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	15 Laporan	319.728.548,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Milik Daerah yang disediakan	100 %	21.029.949,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	100 %	67.300.000,00	
	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	21.029.949,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	5 Unit	31.040.510,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana dalam menunjang kegiatan	100 %	67.300.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	100 %	67.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	67.300.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	60 Laporan	87.490.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD	100 %	65.331.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	100 %	183.331.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	48.421.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publikPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	4 Unit	48.421.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	16.910.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	35 Unit	134.910.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	100 %	4.339.084.135,00						100 %	5.927.625.504,00	

No	Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang dapat mengakses Informasi	70 %	4.339.084.135,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat	70 %	5.927.625.504,00	
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	10 Laporan	171.195.029,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat	10 Laporan	347.831.409,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	10 Komunitas	142.466.047,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat	10 Komunitas	466.018.042,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	10 Permohonan	233.027.480,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat	10 Permohonan	253.807.740,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Persentase	66.488.600,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publikPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat	100 Persentase	33.244.300,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13
	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	5 Rekomendasi	111.950.980,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat	5 Rekomendasi	72.759.490,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persentase	2.861.339.971,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat	100 Persentase	3.040.995.145,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	20 Media	210.097.414,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat	20 Media	183.783.606,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	100 Konten	542.518.614,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat	100 Konten	1.529.185.772,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
3	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi yang terintegrasi	70 %	11.044.959.127,00						70 %	3.042.293.569,00	
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan nama domain dan sub domain di Pemerintah Daerah Kab.Paser	70 %	159.111.800,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	70 %	255.946.835,00	

No	Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13
	2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	10 Dokumen	159.111.800,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publikPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	10 Dokumen	255.946.835,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sistem E-Government yang terbangun	70 %	10.885.847.327,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	70 %	2.786.346.734,00	
	2	16	03	2.02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	1 Aplikasi	79.480.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	1 Aplikasi	298.985.703,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	181.759.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	1 Dokumen	141.858.440,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	42 Perangkat Daerah	4.360.194.900,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	42 Perangkat Daerah	4.331.373.155,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13
	2	16	03	2.02	0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	2 Layanan	54.560.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	2 Layanan	138.486.548,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	159.959.800,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publikPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	1 Dokumen	110.719.900,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2 Aplikasi	282.680.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	2 Aplikasi	373.434.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Laporan	963.825.100,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	1 Laporan	1.286.946.134,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	177.405.085,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	1 Aplikasi	200.730.542,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13
	2	16	03	2.02	0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	42 Perangkat Daerah	4.225.873.600,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	42 Perangkat Daerah	5.329.685.172,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1 Dokumen	218.341.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	1 Dokumen	203.453.528,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	181.768.842,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publikPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	1 Dokumen	343.182.381,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			497.232.085,00						0	643.209.721,00	
4	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rasio perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral	100 %	497.232.085,00						100 %	643.209.721,00	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terhimpunnya Data dalam mendukung penyelenggaraan Statistik Sektoral	100 %	497.232.085,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	100 %	643.209.721,00	

No	Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13
	2	20	02	2.01	0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100 %	162.373.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	100 %	251.586.851,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100 %	21.593.614,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	100 %	41.662.614,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %	90.192.629,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	100 %	115.467.414,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	42 Orang	118.279.228,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	42 Orang	129.699.228,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100 %	104.793.614,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publikPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	42 Orang	104.793.614,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			198.011.400,00						42 Orang	1.510.953.774,00	

No	Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13
5	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	tingkat keamanan informasi	75 %	198.011.400,00						42 Orang	1.510.953.774,00	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	65 %	192.398.500,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	42 Orang	1.508.147.324,00	
	2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	10 Laporan	149.717.900,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	42 Orang	166.365.150,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21	02	2.01	0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan	19.567.200,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	42 Orang	106.351.600,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21	02	2.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	26 Perangkat Daerah	23.113.400,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	42 Orang	1.235.430.574,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	65 %	5.612.900,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	42 Orang	2.806.450,00	
	2	21	02	2.02	0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	1 Kegiatan	5.612.900,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publikPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	42 Orang	2.806.450,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jumlah									**27.153.343.705,00**							**32.932.510.304,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

1.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Tana Paser, September 2025

Kepala,



Drs. H. Arief Rahman
Pembina Utama Muda
NIP. 19680206 198803 1 005



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOMP. PERKANTORAN GEDUNG E LANTAI 2 KAVLING A
JALAN KESUMA BANGSA KM.5, TANAH GROGOT, KAB.PASER KODE POS 76251
EMAIL: DLHKAB.PASER@GMAIL.COM

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Paser Tahun 2025.

Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja (Ranhir Perubahan Renja) Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja periode satu tahunan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun 2025, dimana dalam Rancangan Renja OPD tergambar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk masa satu tahun, yang merupakan bagian dari Rencana Strategis (REVIEW RENSTRA) DLH Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaannya Rancangan akhir Perubahan Renja OPD diharapkan mampu meningkatkan capaian kinerja dalam memberikan pelayanan secara optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Rancangan akhir Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup tergambarkan rencana program dan kegiatan serta capaian kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 berdasarkan Renstra. Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja OPD juga menganalisa setiap target dan sasaran untuk memperoleh kinerja sesungguhnya serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi sehingga pada pelaksanaannya nanti dapat terlaksana secara optimal.

Akhirnya, kami berharap agar Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi sesuai Review Renstra DLH Kab. Paser Tahun 2021 – 2026.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar isi ii

Bab I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 24

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah 28

2.4. Reviu terhadap rancangan awal perubahan RKPD 31

2.5. Penelahaan usulan program dan kegiatan Masyarakat 47

BAB III Rencana kerja dan pendaaan Perangkat Daerah 32

BAB V Penutup 80

4.1 **Kaidah-kaidah pelaksanaan.** 80

4.2 **Rencana tindak lanjut** 81

LAMPIRAN

-SK RENJA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rancangan Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rancangan Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja).

Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Nomor 100.3.3.2/KEP-741/Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas kepetusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

c. Pergeseran pagu kegiatan Dinas, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Rancangan Rancangan akhir Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Lingkungan Hidup, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Selanjutnya Rancangan akhir Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan akhir Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah :

a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara
b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja;
e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

f. Peraturan Presiden no 2 tahun 2025 tentang rencana Pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029;
g. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional
j. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas kepetusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
o. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangungan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025
p. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor …….tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 (diupdate menunggu)
q. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045.

r. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
s. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026
t. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026
u. Peraturan Bupati 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.
v. Peraturan bupati no….. tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan bupati paser Nomor18 tahun 2024 tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten paser tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renja perubahan tahun 2025;

Adapun tujuan Perubahan Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi,

perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan akhir Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup, proses penyusunan Rancangan akhir Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup, keterkaitan antaraRenja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Lingkungan Hidup, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan akhir Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2025 hingga Triwulan I baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

2.4 Reviuw Terhadap rancangan awal perubahan RKPD

2.5 Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDAAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV PENUTUP

4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Lampiran

Sk renja

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan Rancangan Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rancangan Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, adalah sebagaimana Tabel 2.1 dalam format berikut:

Tabel 2.1
Laporan Evaluasi RENJA Triwulan I s/d Bulan Maret Tahun 2025

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2025

Sasaran SKPD Tahunan :

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2022-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (%)		Ket
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		2				71.512.462.651		0		71.512.462.651		9.201.790.811		0		0		0	
		2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			67.679.620.434		0		67.679.620.434		8.719.175.811		0		0		0	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintah Terlaksana (Persen)	0	29.368.947.580	0	0	100	29.368.947.580	4	4.098.278.865	4	0	4	0	4	0	
				Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi terlaksana (Persen)	0		0		100		18		18		18		18		
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun (Persen)	0	460.742.902	0	0	100	460.742.902	27	50.044.000	27	0	27	0	27	0	
		2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	127.995.128	0	0	2	127.995.128	0	21.244.000	0	0	0	0	0	0	

		2.11.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	129.585.774	0	0	1	129.585.774	1	9.600.000	1	0	1	0	100	0	
		2.11.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	42.500.000	0	0	1	42.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.11.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	11.475.000	0	0	1	11.475.000	1	0	1	0	1	0	100	0	
		2.11.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	11.475.000	0	0	1	11.475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.11.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	126.237.000	0	0	4	126.237.000	0	19.200.000	0	0	0	0	0	0	
		2.11.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	11.475.000	0	0	1	11.475.000	1	0	1	0	1	0	100	0	
		2.11.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan terlaksana (Persen)	0	27.007.011.728	0	0	100	27.007.011.728	28	3.778.802.569	28	0	28	0	28	0	

		2.11.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.330	26.781.435.468	0	0	1.330	26.781.435.468	380	3.736.450.369	380	0	380	0	28,57	0	
		2.11.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	110.931.460	0	0	12	110.931.460	0	19.960.200	0	0	0	0	0	0	
		2.11.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	31.201.800	0	0	1	31.201.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.11.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	29.992.250	0	0	4	29.992.250	0	22.392.000	0	0	0	0	0	0	
		2.11.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	53.450.750	0	0	1	53.450.750	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.11.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang telah mengikuti Bimtek (Persen)	0	250.000.000	0	0	68	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.11.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7	250.000.000	0	0	7	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.11.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran terlayani (Persen)	0	490.066.805	0	0	100	490.066.805	0	95.111.500	0	0	0	0	0	0	

		2.11.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3.587.425	0	0	1	3.587.425	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.11.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	40	42.500.000	0	0	40	42.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.11.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	15	29.081.730	0	0	15	29.081.730	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.11.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	4.653.750	0	0	12	4.653.750	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.11.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	38	266.250.000	0	0	38	266.250.000	0	51.447.500	0	0	0	0	0	0	
		2.11.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	200	72.872.900	0	0	200	72.872.900	0	25.173.000	0	0	0	0	0	0	
		2.11.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	71.121.000	0	0	2	71.121.000	0	18.491.000	0	0	0	0	0	0	
		2.11.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor tersedia (Persen)	0	126.649.510	0	0	82	126.649.510	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.11.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	1.277.380	0	0	3	1.277.380	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.11.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	125.372.130	0	0	5	125.372.130	0	0	0	0	0	0	0	0	

		2.11.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang adnministrasi perkantoran terlayani (Persen)	0	944.097.835	0	0	100	944.097.835	11	168.972.396	11	0	11	0	11	0	
		2.11.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.700.000	0	0	12	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.11.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	375.906.415	0	0	12	375.906.415	3	52.577.196	3	0	3	0	25	0	
		2.11.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	566.491.420	0	0	12	566.491.420	1	116.395.200	1	0	1	0	8,33	0	
		2.11.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor terpelihara (Persen)	0	90.378.800	0	0	100	90.378.800	3	5.348.400	3	0	3	0	3	0	
		2.11.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	19	83.136.800	0	0	19	83.136.800	1	5.348.400	1	0	1	0	5,26	0	
		2.11.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	7.242.000	0	0	10	7.242.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Persentase Dokumen Perencanaan,Kajian Lingkungan Hidup serta evaluasi Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan (Persen)**	**0**	**588.696.400**	**0**	**0**	**0**	**588.696.400**	**0**	**39.566.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		2.11.02.2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan dan Evaluasinya (Persen)	0	309.780.100	0	0	0	309.780.100	0	39.566.200	0	0	0	0	0	0	

		2.11.02.2.01.0002		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	269.309.950	0	0	3	269.309.950	0	39.566.200	0	0	0	0	0	0	
		2.11.02.2.01.0003		Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	1	40.470.150	0	0	1	40.470.150	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.11.02.2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen kajian lingkungan hidup dan evaluasinya (Persen)	0	278.916.300	0	0	0	278.916.300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.11.02.2.02.0004		Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	1	20.908.300	0	0	1	20.908.300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.11.02.2.02.0005		Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	258.008.000	0	0	1	258.008.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Persentase cakupan Pencegahan dan penanggulangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan (Persen)**	**0**	**2.043.382.958**	**0**	**0**	**0**	**2.043.382.958**	**0**	**242.912.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					Persentase Cakupan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Persen)	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
		2.11.03.2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Teknis Lingkungan yang dikeluarkan (Dokumen)	0	855.603.266	0	0	0	855.603.266	0	114.240.000	0	0	0	0	0	0	

		2.11.03.2.01.0001		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	8	93.389.800	0	0	8	93.389.800	2	9.200.000	2	0	2	0	25	0	
		2.11.03.2.01.0002		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2	146.180.100	0	0	2	146.180.100	0	9.600.000	0	0	0	0	0	0	
		2.11.03.2.01.0015		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	12	616.033.366	0	0	12	616.033.366	0	95.440.000	0	0	0	0	0	0	
		2.11.03.2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Pemantauan Lingkungan terlaksana (Jenis)	0	1.025.496.692	0	0	0	1.025.496.692	0	101.502.480	0	0	0	0	0	0	
					Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki sumber pencemar yang di pantau (Perusahaan)	0		0		0		0		0		0		0		
		2.11.03.2.02.0001		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	1	967.145.437	0	0	1	967.145.437	0	92.534.680	0	0	0	0	0	0	
		2.11.03.2.02.0003		Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	30	58.351.255	0	0	30	58.351.255	0	8.967.800	0	0	0	0	0	0	

		2.11.03.2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan lahan kritis yang di rehabilitasi luar kawasan (Ha)	0	162.283.000	0	0	0	162.283.000	0	27.170.400	0	0	0	0	0	0	
		2.11.03.2.03.0009		Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	1	12.733.000	0	0	1	12.733.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.11.03.2.03.0012		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota (Kegiatan)	50	136.800.000	0	0	50	136.800.000	0	27.170.400	0	0	0	0	0	0	
		2.11.03.2.03.0013		Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	10	12.750.000	0	0	10	12.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**		**Rasio Luas RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan Taman Kehati yang dikelola (Persen)**	**0**	**4.984.678.359**	**0**	**0**	**0**	**4.984.678.359**	**16**	**818.532.000**	**16**	**0**	**16**	**0**	**16**	**0**	
		2.11.04.2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Konservasi/RTH dan Taman Kehati terkelola (Lokasi)	0	4.984.678.359	0	0	0	4.984.678.359	0	818.532.000	0	0	0	0	0	0	
		2.11.04.2.01.0004		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	63,82	4.767.924.627	0	0	63,82	4.767.924.627	15,96	798.532.000	15,96	0	15,96	0	25,01	0	
		2.11.04.2.01.0007		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	1	104.577.155	0	0	1	104.577.155	0	9.600.000	0	0	0	0	0	0	
		2.11.04.2.01.0009		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	1	112.176.577	0	0	1	112.176.577	0	10.400.000	0	0	0	0	0	0	

5	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana**	**2.11.05**		**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Jumlah Perusahaan/pelaku usaha yang memiliki ijin pengelolaan dan penyimpanan limbah B3 (Persen)**	**0**	**138.953.136**	**0**	**0**	**0**	**138.953.136**	**0**	**33.380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		2.11.05.2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah rekomendasi Penyimpanan limbah yang dikeluarkan (Dokumen)	0	60.920.690	0	0	0	60.920.690	0	9.304.800	0	0	0	0	0	0	
		2.11.05.2.01.0001		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	2	32.644.250	0	0	2	32.644.250	1	6.844.800	1	0	1	0	50	0	
		2.11.05.2.01.0002		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Laporan)	2	28.276.440	0	0	2	28.276.440	1	2.460.000	1	0	1	0	50	0	
		2.11.05.2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengelolaan Limbah B3 dan/atau pengumpulan Limbah B3 (Dokumen)	0	78.032.446	0	0	0	78.032.446	0	24.075.200	0	0	0	0	0	0	

		2.11.05.2.02.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	4	78.032.446	0	0	4	78.032.446	1	24.075.200	1	0	1	0	25	0	
6		**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**		**Persentase Perusahaan/pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan (Persen)**	**0**	**183.795.800**	**0**	**0**	**0**	**183.795.800**	**11**	**25.350.000**	**11**	**0**	**11**	**0**	**11**	**0**	
		2.11.06.2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi tindaklanjut evaluasi yang diberikan (Persen)	0	183.795.800	0	0	0	183.795.800	6	25.350.000	6	0	6	0	6	0	
		2.11.06.2.01.0007		Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2	30.977.800	0	0	2	30.977.800	0	0	0	0	0	0	0	0	

		2.11.06.2.01.0009		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	26	152.818.000	0	0	26	152.818.000	3	25.350.000	3	0	3	0	11,54	0	
7		**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**		**Persentase MHA yang terfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan (Persen)**	**0**	**34.164.000**	**0**	**0**	**0**	**34.164.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		2.11.07.2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pembinaan (MHA)	0	34.164.000	0	0	0	34.164.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.11.07.2.02.0001		Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	2	34.164.000	0	0	2	34.164.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
8		**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		**Persentase Kelompok masyarakat, Ormas, LSM dan lembaga yang mendapatkan pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup (Persen)**	**0**	**225.170.400**	**0**	**0**	**0**	**225.170.400**	**14,77**	**22.980.000**	**14,77**	**0**	**14,77**	**0**	**14,77**	**0**	

		2.11.08.2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat, ormas, LSM dan lembaga yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Kelompok)	0	225.170.400	0	0	0	225.170.400	7	22.980.000	7	0	7	0	7	0	
		2.11.08.2.01.0002		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	21	195.080.400	0	0	21	195.080.400	5	22.980.000	5	0	5	0	23,81	0	
		2.11.08.2.01.0003		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	1	30.090.000	0	0	1	30.090.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
9		**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		**Jumlah Penghargaan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup (Piagam Adipura)**	**0**	**35.898.250**	**0**	**0**	**0**	**35.898.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		2.11.09.2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis penilaian dan penghargaan lingkungan hidup terselenggara (Jenis)	0	35.898.250	0	0	0	35.898.250	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.11.09.2.01.0001		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	23	35.898.250	0	0	23	35.898.250	0	0	0	0	0	0	0	0	
10		**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani (Persen)**	**0**	**178.252.000**	**0**	**0**	**0**	**178.252.000**	**30**	**35.326.000**	**30**	**0**	**30**	**0**	**30**	**0**	
		2.11.10.2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah sanksi administrasi yang diterapkan (Kasus)	0	178.252.000	0	0	0	178.252.000	0	35.326.000	0	0	0	0	0	0	

		2.11.10.2.01.0004		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	22	107.830.000	0	0	22	107.830.000	1	21.350.000	1	0	1	0	4,55	0	
		2.11.10.2.01.0006		Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	8	70.422.000	0	0	8	70.422.000	1	13.976.000	1	0	1	0	12,5	0	
11		**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**		**Persentase Pengelolaan Sampah disumber (Persen)**	**0**	**29.897.681.551**	**0**	**0**	**0**	**29.897.681.551**	**0**	**3.402.849.866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					Persentase Sampah yang Tersangkut Ke TPA (Persen)	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
		2.11.11.2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah terangkut ke TPA (Ton)	0	29.883.795.101	0	0	0	29.883.795.101	0	3.402.849.866	0	0	0	0	0	0	
		2.11.11.2.01.0004		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	4	166.512.300	0	0	4	166.512.300	0	22.134.400	0	0	0	0	0	0	

		2.11.11.2.01.0005		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	1	15.141.000	0	0	1	15.141.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.11.11.2.01.0007		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	35	14.636.644.486	0	0	35	14.636.644.486	0	168.044.000	0	0	0	0	0	0	
		2.11.11.2.01.0012		Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	16.500	3.770.546.000	0	0	16.500	3.770.546.000	0	2.101.127.200	0	0	0	0	0	0	
		2.11.11.2.01.0013		Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali (Ton)	2.334	157.231.163	0	0	2.334	157.231.163	0	37.600.000	0	0	0	0	0	0	
		2.11.11.2.01.0018		Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (Laporan)	2	18.353.200	0	0	2	18.353.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.11.11.2.01.0019		Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	4.500	9.433.890.952	0	0	4.500	9.433.890.952	0	1.057.716.666	0	0	0	0	0	0	

		2.11.11.2.01.0020		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	17.000	1.685.476.000	0	0	17.000	1.685.476.000	0	16.227.600	0	0	0	0	0	0	
		2.11.11.2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Persentase rekomendasi tindaklanjut evaluasi yang diberikan (Persen)	0	13.886.450	0	0	0	13.886.450	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.11.11.2.03.0002		Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja (Unit)	2	13.886.450	0	0	2	13.886.450	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3					**3.832.842.217**		**0**		**3.832.842.217**		**482.615.000**		**0**		**0**		**0**	
		3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**				**3.832.842.217**		**0**		**3.832.842.217**		**482.615.000**		**0**		**0**		**0**	
12		**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**		**Persentase Luasan Tahura yang dikelola dan berfungsi dengan Baik (Persen)**	**0**	**3.832.842.217**	**0**	**0**	**0**	**3.832.842.217**	**0**	**482.615.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		3.28.04.2.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Persentase tutupan lahan kritis dalam kawasan terlaksana (Persen)	0	3.832.842.217	0	0	0	3.832.842.217	0	482.615.000	0	0	0	0	0	0	
					Persentase pengawasan dan keamanan dari gangguan dan kerusakan kawasan (Persen)	0		0		0		0		0		0		0		
					Persentase Pemanfaatan jasa lingkungan, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat desa penyangga terlaksana (Persen)	0		0		0		0		0		0		0		

		3.28.04.2.01.0006		Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti (Permohonan)	1	565.499.750	0	0	1	565.499.750	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3.28.04.2.01.0007		Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	376.043.900	0	0	1	376.043.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3.28.04.2.01.0008		Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif (Desa)	3	610.082.167	0	0	3	610.082.167	0	122.261.000	0	0	0	0	0	0	
		3.28.04.2.01.0014		Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan (Ha)	100	1.290.737.500	0	0	100	1.290.737.500	0	275.082.000	0	0	0	0	0	0	
		3.28.04.2.01.0015		Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota	Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem (Ha)	50	990.478.900	0	0	50	990.478.900	0	85.272.000	0	0	0	0	0	0	
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				:														
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				:														
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya				:														
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya				:														

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2025 Semester I dapat dijelaskan bahwa :

1. Total realisasi hingga triwulan I adalah 12,86 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.201.790.811 (Sembilan milyar dua ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 71.512.462.651 Tujuh puluh satu milyar lima ratus dua belas juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh satu rupiah)
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dibawah 20 % dengan predikat kinerja Sangat Rendah .
3. Untuk triwulan II ini dimana reasisasi baru mencapai 46,90% serta hampir semua program dan kegiatan belum optimal dalam pencapaian reasisasi disebabkan dari beberapa faktor penghambat seperti :
    - Keterlambatan dalam proses perencanaan dan penganggaran
    - Koordinasi dan Pelaksanaan dengan tim program kurang tepat waktu
    - Tingginya tingkat duplikasi data
    - Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup
    - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik

    Dan untuk factor pendorong seperti :
    - Peningkatan kualitas pelayanan public
    - Kerjasama Seluruh Tim Pelaksanaan Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Tingkat ketersediaan data yang valid
    - Peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah
    - Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup
    - Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam
    - Peningkatan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan hidup
    - Adanya kesadaran masyarakat akan bahaya sampah plastik bagi lingkungan hidup
    - Dukungan pemerintah untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai
    - Tersedianya teknologi yang ramah lingkungan untuk mengurangi sampah plastik

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

Dinas Lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

b. Penetapan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;

c. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang meliputi tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah Bahan berbahaya dan Beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup serta pengelolaan Taman Hutan Rakyat, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup adalah:

1. Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup

2. Pelayanan dibidang pemantauan Lingkungan

3. Pelayanan dibidang peningkatan kapasitas Lingkungan hidup

4. Pelayanan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan hidup

5. Pelayanan diseksi penegakan hukum Lingkungan

6. Pelayanan Fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

Upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Indek Kualitas Lahan (IKL)

2. Indek Kualitas Udara (IKU)

3. Indek Kualitas Air (IKA)

4. Cakupan sampah tertangani

5. Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap ijin lingkungan
6. Nilai Evaluasi SAKIP

a. Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Secara terperinci pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser jika mengacu pada Indikator kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada table 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser

NO	Angka/Nilai target/standard (IKU,SPM,IKK)		Target Renstra PD				Realisasi Capaian				Proyeksi		catatan analisi
			2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Indeks Tutupan Lahan/hutan	Indek Kualitas Lahan (IKL)	71,71	71,26	81,44	81,50	71,51	71,71	71,20	71,24	81,44	81,50	
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,02	89,07	84,64		90,59	89,53	90,46	93,38	84,64	84,84	
3	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	48,85	48,90	73,63		57,50	54,09	54,09	50,43	73,63	73,83	
4	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah	Persentase sampah yang tertangani	72,00	85,00	-		60,66	60,44	71,96	75,11			
5	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan	Persentase ketaatan pelaku usaha/ kegiatan terhadap ijin lingkungan	90,00	95,00	-		82,42	75,00	96,15	96,15			
6	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	Nilai evaluasi SAKIP	B/64	B/66	82	83	61,51	B/67,29	B/68,94	NA	82	83	

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian Sasaran Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1 " Meningkatnya indeks tutupan lahan/hutan " memiliki 1 indikator kinerja yaitu ""Indek Tutupan Lahan/Hutan"", belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar N/A dari target sebesar 71,81 dengan capaian kinerja sebesar N/A %.
2. Sasaran 2 " Meningkatnya indeks Kualitas Udara belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar N/A dari target sebesar 89,12 dengan capaian kinerja sebesar N/A % dan Meningkatnya indeks Kualitas Air belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar N/A dari target sebesar 48,95 dengan capaian kinerja sebesar N/A
3. Sasaran 3 " Meningkatnya Cakupan Pengelolaan sampah" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase sampah yang tertangani", belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar N/A dari target sebesar 100 dengan capaian kinerja sebesar N/A %
4. Sasaran 4 " Meningkatnya Ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap ijin lingkungan", belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar N/A dari target sebesar 100 dengan capaian kinerja sebesar N/A %.
5. Sasaran 5 " Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Nilai Evaluasi SAKIP", telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar N/A dari target sebesar 68 dengan capaian kinerja sebesar N/A %.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan bulan April Triwulan I Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% yang baru terealisasi hanya 20% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rancangan Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Periode Maret 2025 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya

1. Proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai jadwal.
2. Juknis pelaksanaan kegiatan dari pemerintah pusat yang terlambat
3. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan perangkat daerah.
4. Perubahan pejabat/personil sehubungan dengan adanya pergantian pejabat
5. Pelaksanaan kegiatan OPD belum sepenuhnya mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah disusun

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Rancangan akhir Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Rancangan akhir Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2025.

2.4 Review terhadap rancangan awal perubahan RKPD

Uraian	LOKASI	IDIKATOR	TARGET	PAGU SEBELUM PERGESERAN	PAGU SETELAH PENGURANGAN 50%	Uraian	LOKASI	IDIKATOR	TARGET	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	Catatan penting
				71.512.462.651	68.899.603.454					88.040.991.234	19.141.387.780	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				67.679.620.434	65.918.523.196	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				83.608.149.017	17.689.625.821	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				67.679.620.434	65.918.523.196	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				83.608.149.017	17.689.625.821	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				29.368.947.580	28.735.023.258	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				29.846.494.951	1.111.471.693	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun (Persen)	100	460.742.902	280.504.451	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun (Persen)	100	578.236.402	297.731.951	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	127.995.128	92.994.064	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	197.995.128	105.001.064	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	129.585.774	82.147.387	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	149.585.774	67.438.387	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	42.500.000	661.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	42.500.000	41.838.500	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	11.475.000	486.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	11.475.000	10.989.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	11.475.000	486.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	11.475.000	10.989.000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	126.237.000	98.743.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	153.730.500	54.987.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	11.475.000	4.986.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	11.475.000	6.489.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan terlaksana (Persen)	100	27.007.011.728	26.931.294.598	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase pelayanan administrasi keuangan terlaksana (Persen)	100	27.027.011.728	95.717.130	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.330	26.781.435.468	26.781.435.468	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.330	26.781.435.468	-	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	110.931.460	110.931.460	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	110.931.460	-	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	31.201.800	10.881.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	41.201.800	30.320.800	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	29.992.250	25.796.670	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	29.992.250	4.195.580	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	53.450.750	2.250.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	63.450.750	61.200.750	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang telah mengikuti Bimtek (Persen)	68	250.000.000	180.570.000	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Persentase pegawai yang telah mengikuti Bimtek (Persen)	68	312.521.000	131.951.000	

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7	250.000.000	180.570.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7	312.521.000	131.951.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi perkantoran terlayani (Persen)	100	490.066.805	243.777.247	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase administrasi perkantoran terlayani (Persen)	100	665.386.855	421.609.608	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3.587.425	3.559.137	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3.587.425	28.288	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	40	42.500.000	25.160.455	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	40	59.595.425	34.434.970	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	15	29.081.730	15.791.155	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	15	34.975.355	19.184.200	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	4.653.750	4.650.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	4.653.750	3.750	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	38	266.250.000	122.170.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	38	342.189.000	220.018.500	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	200	72.872.900	39.336.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	200	99.696.900	60.360.900	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	71.121.000	33.110.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	120.689.000	87.579.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor tersedia (Persen)	82	126.649.510	125.666.888	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Persentase sarana dan prasarana kantor tersedia (Persen)	82	166.005.331	40.338.443	
Pengadaan Mebel	Kab. Paser	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	1.277.380	456.011	Pengadaan Mebel	Kab. Paser	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	1.277.380	821.369	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	125.372.130	125.210.877	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	164.727.951	39.517.074	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penunjang adnministrasi perkantoran terlayani (Persen)	100	944.097.835	883.658.074	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase penunjang adnministrasi perkantoran terlayani (Persen)	100	976.721.835	93.063.761	

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.700.000	1.700.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	3.000.000	1.300.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	375.906.415	375.906.415	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	375.906.415	-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	566.491.420	506.051.659	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	597.815.420	91.763.761	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor terpelihara (Persen)	100	90.378.800	89.552.000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase sarana dan prasarana kantor terpelihara (Persen)	100	120.611.800	31.059.800	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	19	83.136.800	82.812.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	19	111.339.800	28.527.800	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	7.242.000	6.740.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	9.272.000	2.532.000	

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				588.696.400	489.032.888	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**				1.126.784.400	637.751.512	
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan dan Evaluasinya (Persen)	0	309.780.100	286.785.688	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan dan Evaluasinya (Persen)	0	460.018.000	173.232.312	
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	269.309.950	269.245.688	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	363.876.000	94.630.312	
Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	1	40.470.150	17.540.000	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	1	96.142.000	78.602.000	
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan dokumen kajian lingkungan hidup dan evaluasinya (Persen)	0	278.916.300	202.247.200	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**		Persentase ketersediaan dokumen kajian lingkungan hidup dan evaluasinya (Persen)	0	666.766.400	464.519.200	
Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Kab. Paser	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	1	20.908.300	-	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Kab. Paser	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	1	92.702.000	92.702.000	
Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Paser	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	258.008.000	202.247.200	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Paser	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	574.064.400	371.817.200	

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				2.043.382.958	1.673.062.503	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**				3.545.265.244	1.872.202.742	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Persetujuan Teknis Lingkungan yang dikeluarkan (Dokumen)	0	855.603.266	722.064.425	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		Jumlah Persetujuan Teknis Lingkungan yang dikeluarkan (Dokumen)	0	1.448.932.807	726.868.383	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	8	93.389.800	77.391.049	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	8	93.389.800	15.998.751	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2	146.180.100	91.848.658	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2	175.921.250	84.072.592	
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kab. Paser	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	12	616.033.366	552.824.718	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kab. Paser	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	12	1.179.621.757	626.797.040	

Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				1.025.496.692	815.588.606	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**				1.043.215.437	227.626.831	
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	1	967.145.437	774.463.606	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	1	967.145.437	192.681.831	
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Paser	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	30	58.351.255	41.125.000	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Paser	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	30	76.070.000	34.945.000	
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Luasan lahan kritis yang di rehabilitasi luar kawasan (Ha)	0	162.283.000	135.409.472	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		Jumlah Luasan lahan kritis yang di rehabilitasi luar kawasan (Ha)	0	1.053.117.000	917.707.528	
Pelaksanaan rehabilitasi	Kab. Paser	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	1	12.733.000	12.713.472	Pelaksanaan rehabilitasi	Kab. Paser	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	1	832.733.000	820.019.528	

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Kab. Paser	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota (Kegiatan)	50	136.800.000	117.633.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Kab. Paser	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota (Kegiatan)	50	192.634.000	75.001.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Kab. Paser	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	10	12.750.000	5.063.000	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Kab. Paser	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	10	27.750.000	22.687.000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				4.984.678.359	4.840.942.942	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**				5.191.438.167	350.495.225	
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Jumlah Kawasan Konservasi/RTH dan Taman Kehati terkelola (Lokasi)	0	4.984.678.359	4.840.942.942	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**		Jumlah Kawasan Konservasi/RTH dan Taman Kehati terkelola (Lokasi)	0	5.191.438.167	350.495.225	
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Paser	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	63,82	4.767.924.627	4.694.370.991	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Paser	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	63,82	4.866.746.215	172.375.224	
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	1	104.577.155	40.055.163	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	1	174.541.163	134.486.000	

Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab. Paser	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	1	112.176.577	106.516.788	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab. Paser	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	1	150.150.789	43.634.001	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH B3				138.953.136	86.276.568	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH B3**				145.916.008	59.639.440	
Penyimpanan sementara Limbah B3		Jumlah rekomendasi Penyimpanan limbah yang dikeluarkan (Dokumen)	0	60.920.690	22.508.925	**Penyimpanan sementara Limbah B3**		Jumlah rekomendasi Penyimpanan limbah yang dikeluarkan (Dokumen)	0	58.654.565	36.145.640	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Paser	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	2	32.644.250	9.110.925	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Paser	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	2	30.378.125	21.267.200	

Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Kab. Paser	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Laporan)	2	28.276.440	13.398.000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Kab. Paser	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Laporan)	2	28.276.440	14.878.440	
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pengelolaan Limbah B3 dan/atau pengumpulan Limbah B3 (Dokumen)	0	78.032.446	63.767.643	**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah dokumen pengelolaan Limbah B3 dan/atau pengumpulan Limbah B3 (Dokumen)	0	87.261.443	23.493.800	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3	4	78.032.446	63.767.643	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi	4	87.261.443	23.493.800	

Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)				Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)				
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				183.795.800	125.172.900	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**				223.061.400	97.888.500	

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase rekomendasi tindaklanjut evaluasi yang diberikan (Persen)	0	183.795.800	125.172.900	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase rekomendasi tindaklanjut evaluasi yang diberikan (Persen)	0	223.061.400	97.888.500	
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Paser	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2	30.977.800	16.191.900	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Paser	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2	45.308.000	29.116.100	
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Paser	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	26	152.818.000	108.981.000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Paser	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	26	177.753.400	68.772.400	
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN				34.164.000	16.894.000	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN**				45.748.000	28.854.000	

LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH						**LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**						
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH		Jumlah MHA yang mendapatkan pembinaan (MHA)	0	34.164.000	16.894.000	**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**		Jumlah MHA yang mendapatkan pembinaan (MHA)	0	45.748.000	28.854.000	
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	2	34.164.000	16.894.000	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	2	45.748.000	28.854.000	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				225.170.400	176.712.019	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**				400.408.137	223.696.119	
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga		Jumlah kelompok masyarakat, ormas, LSM dan lembaga yang mendapatkan pendidikan dan	0	225.170.400	176.712.019	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga**		Jumlah kelompok masyarakat, ormas, LSM dan lembaga yang mendapatkan	0	400.408.137	223.696.119	

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		pelatihan (Kelompok)				**Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		pendidikan dan pelatihan (Kelompok)				
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Paser	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	21	195.080.400	161.776.019	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Paser	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	21	261.666.137	99.890.119	
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Paser	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	1	30.090.000	14.936.000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Paser	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	1	138.742.000	123.806.000	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				35.898.250	17.062.000	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**				80.072.250	63.010.250	
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jenis penilaian dan penghargaan lingkungan hidup terselenggara (Jenis)	0	35.898.250	17.062.000	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Jenis penilaian dan penghargaan lingkungan hidup terselenggara (Jenis)	0	80.072.250	63.010.250	
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Paser	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	23	35.898.250	17.062.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Paser	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	23	80.072.250	63.010.250	

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				178.252.000	125.034.250	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**				411.787.400	286.753.150	
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah sanksi administrasi yang diterapkan (Kasus)	0	178.252.000	125.034.250	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**		Jumlah sanksi administrasi yang diterapkan (Kasus)	0	411.787.400	286.753.150	
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	22	107.830.000	89.149.250	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	22	234.034.000	144.884.750	
Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kab. Paser	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	8	70.422.000	35.885.000	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kab. Paser	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	8	177.753.400	141.868.400	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				29.897.681.551	29.633.309.869	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**				42.591.173.060	12.957.863.191	

Pengelolaan Sampah		Jumlah sampah terangkut ke TPA (Ton)	0	29.883.795.101	29.619.986.687	**Pengelolaan Sampah**		Jumlah sampah terangkut ke TPA (Ton)	0	42.577.849.878	12.957.863.191	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Paser	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	4	166.512.300	142.165.810	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Paser	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	4	299.418.810	157.253.000	

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	1	15.141.000	13.612.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	1	27.212.574	13.600.074	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	35	14.636.644.486	14.560.959.486	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	35	26.996.144.810	12.435.185.324	

Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kab. Paser	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	16.500	3.770.546.000	3.719.395.000	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kab. Paser	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	16.500	3.824.612.000	105.217.000	
Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Kab. Paser	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali (Ton)	2.334	157.231.163	145.013.163	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Kab. Paser	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali (Ton)	2.334	157.231.163	12.218.000	
Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kab. Paser	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (Laporan)	2	18.353.200	3.863.592	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kab. Paser	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (Laporan)	2	18.353.200	14.489.608	
Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kab. Paser	Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	4.500	9.433.890.952	9.406.201.136	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kab. Paser	Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	4.500	9.493.271.321	87.070.185	
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Paser	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	17.000	1.685.476.000	1.628.776.000	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Paser	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	17.000	1.761.606.000	132.830.000	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta		Persentase rekomendasi tindaklanjut evaluasi yang diberikan (Persen)	0	13.886.450	13.323.182	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**		Persentase rekomendasi tindaklanjut evaluasi yang diberikan (Persen)	0	13.323.182	-	

Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Kab. Paser	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja (Unit)	2	13.886.450	13.323.182	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Kab. Paser	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja (Unit)	2	13.323.182	-	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					-	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					-	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**					-	
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (DANA DBR DR)				3.832.842.217	2.981.080.258	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (DANA DBR DR)**				4.432.842.217	1.451.761.960	
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota				3.832.842.217	2.981.080.258	**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota**				4.432.842.217	1.451.761.960	
Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti (Permohonan)	1	565.499.750	3.976.443	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti (Permohonan)	1	1.165.499.750	1.161.523.307	
Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	376.043.900	369.560.498	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	376.043.900	6.483.402	

Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif (Desa)	3	610.082.167	525.460.256	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif (Desa)	3	610.082.167	84.621.912	
Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan (Ha)	100	1.290.737.500	1.159.465.719	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan (Ha)	100	1.290.737.500	131.271.781	
Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem (Ha)	50	990.478.900	922.617.342	Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem (Ha)	50	990.478.900	67.861.558	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat (penjelasan tentang persampahan)

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun sebelumnya, diketahui bahwa sejumlah program dan kegiatan yang diusulkan telah berhasil direalisasikan melalui anggaran tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun ini dilakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Musrenbang. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp 700.000.000 tersebut dialihkan untuk desa-desa pengusul yang belum terakomodir sebelumnya.tidak boleh

Kebijakan pengalihan anggaran ini dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan dana publik. Diharapkan, langkah ini dapat memberikan dampak positif yang lebih luas serta menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran.
perlu cek Kembali karena tidak boleh memindahkan uangnya.
kecuali tetap lokasinya kebutuhann

BAB III
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rancangan Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas lingkungan Hidup Tahun 2025 meliputi 12 Program yaitu :

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
5) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Mebel
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

1) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
2) Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

9. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

1. Pemantauan dan Evaluasi KLHS
2. Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang

3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

10. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
3) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota

11. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

1) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
2) Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

12. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

1. Pelaksanaan rehabilitasi
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota
3. Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi

4. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

13. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
3) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan

5. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH

BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

14. Penyimpanan sementara Limbah B3

1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3

15. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

16. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan

Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
2) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

7. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN

LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH

17. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

1) Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH

8. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

18. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
2) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

9. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

19. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

10. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

19. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

1) Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
2) Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

11. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

20. Pengelolaan Sampah

1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
4) Penanganan sampah melalui pengangkutan
5) Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
6) Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah
7) Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
8) Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

21. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta

1) Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

12. PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (DANA DBR DR)

22. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota

1) Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota
2) Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota
3) Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota
4) Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota
5) Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota

MATRIK PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	PAGU SEBELUM PERGESERAN	PAGU SETELAH PENGURANGAN 50%	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
2.11.3.28.0.00.00.0000 - Dinas Lingkungan Hidup						71.512.462.651	70.899.603.453	90.567.446.542	19.867.843.088
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	67.679.620.434	67.918.523.195	86.134.604.325	18.416.081.129
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	67.679.620.434	67.918.523.195	86.134.604.325	18.416.081.129
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	29.368.947.580	28.735.023.258	29.871.494.951	1.336.471.693
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	460.742.902	280.504.451	578.236.402	297.731.951
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	127.995.128	92.994.064	197.995.128	105.001.064
2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	129.585.774	82.147.387	149.585.774	67.438.387
2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	42.500.000	661.500	42.500.000	41.838.500
2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.475.000	486.000	11.475.000	10.989.000
2	11	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	11.475.000	486.000	11.475.000	10.989.000
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	126.237.000	98.743.500	153.730.500	54.987.000
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.475.000	4.986.000	11.475.000	6.489.000

2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	27.007.011.728	26.931.294.598	27.027.011.728	95.717.130
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.781.435.468	26.781.435.468	26.781.435.468	-
2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	110.931.460	110.931.460	110.931.460	-
2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	31.201.800	10.881.000	41.201.800	30.320.800
2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	29.992.250	25.796.670	29.992.250	4.195.580
2	11	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	53.450.750	2.250.000	63.450.750	61.200.750
2	**11**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	250.000.000	180.570.000	312.521.000	131.951.000
2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	250.000.000	180.570.000	312.521.000	131.951.000
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	490.066.805	243.777.247	665.386.855	421.609.608
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.587.425	3.559.137	3.587.425	28.288
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.500.000	25.160.455	59.595.425	34.434.970
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.081.730	15.791.155	34.975.355	19.184.200
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	4.653.750	4.650.000	4.653.750	3.750
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	266.250.000	122.170.500	342.189.000	220.018.500
2	11	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	72.872.900	39.336.000	99.696.900	60.360.900
2	11	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	71.121.000	33.110.000	120.689.000	87.579.000
2	**11**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	126.649.510	125.666.888	191.005.331	65.338.443

2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	1.277.380	456.011	26.277.380	25.821.369
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.372.130	125.210.877	164.727.951	39.517.074
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	944.097.835	883.658.074	976.721.835	93.063.761
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.700.000	1.700.000	3.000.000	1.300.000
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	375.906.415	375.906.415	375.906.415	-
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	566.491.420	506.051.659	597.815.420	91.763.761
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	90.378.800	89.552.000	120.611.800	231.059.800
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.136.800	82.812.000	111.339.800	28.527.800
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.242.000	6.740.000	9.272.000	2.532.000
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-	200.000.000	200.000.000
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	588.696.400	489.032.888	1.126.784.400	637.751.512
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	309.780.100	286.785.688	460.018.000	173.232.312
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	269.309.950	269.245.688	363.876.000	94.630.312
2	11	02	2.01	0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	40.470.150	17.540.000	96.142.000	78.602.000
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	278.916.300	202.247.200	666.766.400	464.519.200
2	11	02	2.02	0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	20.908.300	-	92.702.000	92.702.000

2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	258.008.000	202.247.200	574.064.400	371.817.200
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	2.043.382.958	2.473.062.502	3.555.021.244	1.081.958.742
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	855.603.266	722.064.425	1.458.688.807	736.624.383
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	93.389.800	77.391.049	103.145.800	25.754.751
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	146.180.100	91.848.658	175.921.250	84.072.592
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	616.033.366	552.824.718	1.179.621.757	626.797.040
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	1.025.496.692	815.588.606	1.043.215.437	227.626.831
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	967.145.437	774.463.606	967.145.437	192.681.831
2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	58.351.255	41.125.000	76.070.000	34.945.000
2	**11**	**03**	**2.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	162.283.000	935.409.472	1.053.117.000	117.707.528
2	11	03	2.03	0009	Pelaksanaan rehabilitasi	12.733.000	812.713.472	832.733.000	20.019.528
2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	136.800.000	117.633.000	192.634.000	75.001.000
2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	12.750.000	5.063.000	27.750.000	22.687.000

2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	4.984.678.359	5.040.942.942	5.191.438.167	150.495.225
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	4.984.678.359	5.040.942.942	5.191.438.167	150.495.225
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.767.924.627	4.894.370.991	4.866.746.215	- 27.624.776
2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	104.577.155	40.055.163	174.541.163	134.486.000
2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	112.176.577	106.516.788	150.150.789	43.634.001
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	138.953.136	86.276.568	145.916.008	59.639.440
2	**11**	**05**	**2.01**		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	60.920.690	22.508.925	58.654.565	36.145.640
2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	32.644.250	9.110.925	30.378.125	21.267.200
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	28.276.440	13.398.000	28.276.440	14.878.440
2	**11**	**05**	**2.02**		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	78.032.446	63.767.643	87.261.443	23.493.800
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	78.032.446	63.767.643	87.261.443	23.493.800
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN**	183.795.800	125.172.900	223.061.400	97.888.500

					PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan danIzin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	183.795.800	125.172.900	223.061.400	97.888.500
2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	30.977.800	16.191.900	45.308.000	29.116.100
2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	152.818.000	108.981.000	177.753.400	68.772.400
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	34.164.000	16.894.000	45.748.000	28.854.000
2	**11**	**07**	**2.02**		**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	34.164.000	16.894.000	45.748.000	28.854.000
2	11	07	2.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	34.164.000	16.894.000	45.748.000	28.854.000
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	225.170.400	176.712.019	400.408.137	223.696.119

2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	225.170.400	176.712.019	400.408.137	223.696.119
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	195.080.400	161.776.019	261.666.137	99.890.119
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	30.090.000	14.936.000	138.742.000	123.806.000
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	35.898.250	17.062.000	80.072.250	63.010.250
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	35.898.250	17.062.000	80.072.250	63.010.250
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	35.898.250	17.062.000	80.072.250	63.010.250
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	178.252.000	125.034.250	411.787.400	286.753.150
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	178.252.000	125.034.250	411.787.400	286.753.150
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	107.830.000	89.149.250	234.034.000	144.884.750
2	11	10	2.01	0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	70.422.000	35.885.000	177.753.400	141.868.400
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	29.897.681.551	30.633.309.869	45.082.872.368	14.449.562.499
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	29.883.795.101	30.619.986.687	45.069.549.186	14.449.562.499

2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	166.512.300	142.165.810	299.418.810	157.253.000
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	15.141.000	13.612.500	30.684.574	17.072.074
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	14.636.644.486	15.560.959.486	27.476.936.438	11.915.976.952
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	3.770.546.000	3.719.395.000	4.785.985.538	1.066.590.538
2	11	11	2.01	0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	157.231.163	145.013.163	157.231.163	12.218.000
2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	18.353.200	3.863.592	18.353.200	14.489.608
2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	9.433.890.952	9.406.201.136	9.493.271.321	87.070.185
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1.685.476.000	1.628.776.000	2.807.668.142	1.178.892.142
2	**11**	**11**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**	13.886.450	13.323.182	13.323.182	-
2	11	11	2.03	0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	13.886.450	13.323.182	13.323.182	-
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		-		-
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**		-		-
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (DANA DBR DR)**	3.832.842.217	2.981.080.258	4.432.842.217	1.451.761.960
3	**28**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota**	3.832.842.217	2.981.080.258	4.432.842.217	1.451.761.960
3	28	04	2.01	0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	565.499.750	3.976.443	1.165.499.750	1.161.523.307
3	28	04	2.01	0007	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	376.043.900	369.560.498	376.043.900	6.483.402

3	28	04	2.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	610.082.167	525.460.256	610.082.167	84.621.912
3	28	04	2.01	0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	1.290.737.500	1.159.465.719	1.290.737.500	131.271.781
3	28	04	2.01	0015	Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota	990.478.900	922.617.342	990.478.900	67.861.558

BAB IV
P E N U T U P

Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rancangan Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Rancangan akhir Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.2 Rencana tindak lanjut

Dokumen Rancangan akhir Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rancangan Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Tana Paser, 2025

Kepala Dinas

Achmad Safari, SP, M.Si
Rembina TK.I / IVb
NIP 19781031 200212 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Komp. Perkantoran Gedung E Lantai 2 Kavling A
Jalan Kesuma Bangsa Km.5, Tanah Grogot, Kab.Paser Kode Pos 76251
Email: dlhkab.paser@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER

NOMOR : B/800/02.2/Sekrt/DLH/I/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka kelancaran Tugas Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Penyusun Renja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser;

b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
   Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Paser No 71 tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor.59 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangja menegah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA keputusan ini bertugas mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA keputusan ini harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Paser;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 09 Januari 2024

Kepala,

Achmad Safari, SP, M.Si
Pembina TK.I / IVb
NIP.19781031 200212 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Paser (sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser
3. Kepala BKAD Kabupaten Paser di Tana Paser
4. Kepala Bappeda Kabupaten Paser di Tana Paser.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. PASER
NOMOR : **B/800/02.2/Sekrt/DLH/I/2024**
PADA TANGGAL : 09 Januari 2024

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
TIM PENYUSUNAN RENJA TAHUN 2025 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASER

Ketua	: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
Sekretaris	: Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
Anggota	: 1. Perencana Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kab. Paser
	2. Kasubbag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Paser
Sekretariat Kab. Paser	: 1. Edi Sudman, SE, staf Perencanaan Program Dinas Lingkungan Hidup
	2. Tina Nurliah Rosita, S.I.Kom, staf Perencanaan Program Dinas Lingkungan Hidup Kab. Paser

Kepala,

Aclunadi Safari, SP, M.Si
Pembina TK.I / IV b
NIP.19781031 200212 1 003

DINAS PEMUDA
OLAHRAGA &
PARIWISATA
KABUPATEN PASER

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mengembangkan potensi kepemudaan, olahraga dan pariwisata agar lebih berkualitas, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser selaku penanggungjawab tekhnis penyelenggaraan pembangunan daerah dalam bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berkewajiban menyusun Rancangan akhir Perubahan Renja Tahun 2025 yang pada hakikatnya merupakan rancangan agenda kerja tahunan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi SKPD sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan akhir Perubahan rencana kerja SKPD Tahun 2025 ini berpedoman pada Perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan mengacu pada perubahan renja tahun sebelumnya dan Renstra SKPD Tahun 2021 - 2026 serta usulan program dan kegiatan hasil Musyarawarah Rencana Pembangunan Kecamatan. Dokumen Perencanaan ini merupakan janji yang harus ditunaikan.

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser berkomitmen untuk membangun Kabupaten Paser melalui tugas pokok dan fungsinya yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati Paser berhasil menyusun Rancangan akhir Perubahan Renja 2025 yang fokus dalam pengembangan dan peningkatan potensi pemuda, olahraga dan pariwisata di Kabupaten Paser.

Tugas membangun daerah dalam bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan kedepan adalah tugas bersama, bukan merupakan tugas pemerintah semata. Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi dan sinergi dari masyarakat luas dan kerja keras tanpa pamrih.

Penyusunan Perubahan Renja 2025 ini tidak terlepas dari peran serta seluruh Pegawai

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian, hasil penyusunan dokumen ini tentu saja masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dari semua pihak dalam penyempurnaan dokumen ini sangat kami harapkan.

Akhirnya, semoga Perubahan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2025 ini dapat bermanfaat sebagai acuan agenda kerja tahunan pembangunan pemuda, olahraga dan pariwisata di Kabupaten Paser.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB I PENDAHULUAN 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Landasan Hukum 5
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata 5
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 6
2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD 6
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 6
3.1 Tujuan dan sasaran 6
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 6
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025 6
BAB IV PENUTUP 6

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagaia cuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi .keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Rancanga Perubahan Renja 2025.
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan perubahan Renja 2025 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perubahan Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah 2025 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

15. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
22. Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Paser;
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan

penyelenggaraan pemerintahan dalam Perubahan Rencana kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun. Tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah untuk menjaga kontinuitas kegiatan dan proses Pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Rancangan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan Rencana Perubahan Renja 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2025 hingga Triwulan I baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Pejelasan mengenai Faktor pendorong dan penghambat serta Solusi permasalahan dalam pelaksanaan hasil Renja PD tahun 2025

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 *Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD*
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2025 yang disertai perubahan target

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA SKPD

KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2025

ORGANISASI : **DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. PASER**

BULAN : **MARET 2025**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Belanja Murni (Rp)	Anggaran dikurang Efisiensi (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Bobot (%)	Realisasi Anggaran Belanja				Sisa Dana (Rp)	Keterangan
						Keuangan		Fisik			
						(Rp)	(%)	(%)	Tertimbang (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 19 01 2 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**264.536.057**				**42.676.622**					
2 19 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	142.544.009	-	142.544.009	0,08	42.676.622	29,94	32,00	0,02	99.867.387	
2 19 01 2 01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	59.241.048	-	59.241.048	0,03	-	-	-	-	59.241.048	
2 19 01 2 01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.751.000	-	62.751.000	0,03	-	-	-	-	62.751.000	
2 19 01 2 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.467.472.389**				**1.543.060.403**					
2 19 01 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.146.901.429	-	8.146.901.429	4,29	1.447.136.655	17,76	20,00	0,86	6.699.764.774	
2 19 01 2 02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	320.570.960	-	320.570.960	0,17	95.923.748	29,92	32,00	0,05	224.647.212	
2 19 01 2 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3.138.437.899**				**80.236.714**					
2 19 01 2 06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.364.117.802	523.750.000,00	1.840.367.802	0,97	-	-	-	-	1.840.367.802	
2 19 01 2 06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	324.416.097	-	324.416.097	0,17	-	-	-	-	324.416.097	
2 19 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	-	15.000.000	0,01	-	-	-	-	15.000.000	
2 19 01 2 06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	390.506.000	-	390.506.000	0,21	66.267.196	16,97	20,00	0,04	324.238.804	
2 19 01 2 06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	44.398.000	-	44.398.000	0,02	13.969.518	31,46	40,00	0,01	30.428.482	
2 19 01 2 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**254.362.000**				**22.515.000**					
2 19 01 2 09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	249.362.000	-	249.362.000	0,13	22.515.000	9,03	10,00	0,01	226.847.000	

Kode Rekening						Uraian	Anggaran Belanja Murni (Rp)	Anggaran Dikuranga Efisiensi (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Bobot (%)	Realisasi Anggran Belanja				Sisa Dana (Rp)	Keterangan
											Keuangan		Fisik			
											(Rp)	(%)	(%)	Tertimbang (%)		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	19	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	-	5.000.000	0,00	-	-	-	-	5.000.000	
2	**19**	**02**	**2**	**01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**885.812.900**				**98.893.200**					
2	19	02	2	01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	544.980.900	156.775.510,00	388.205.390	0,20	56.898.000	14,66	16,00	0,03	331.307.390	
2	19	02	2	01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	193.272.000	96.636.000,00	96.636.000	0,05	-	-	-	-	96.636.000	
2	19	02	2	01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	147.560.000	73.780.000,00	73.780.000	0,04	41.995.200	56,92	60,00			
2	**19**	**02**	**2**	**02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	**1.424.400.000**				**91.692.200**					
2	19	02	2	02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/kota	1.424.400.000	565.151.766,00	859.248.234	0,45	91.692.200	10,67	12,00	0,05	767.556.034	
2	**19**	**03**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	**13.987.500.000**				**438.848.426**					
2	19	03	2	02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	13.987.500.000	3.166.797.029,00	10.820.702.971	5,70	438.848.426	4,06	5,00	0,29	10.381.854.545	
2	**19**	**03**	**2**	**04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**31.929.280.000**				**181.131.613**					

Kode Rekening						Uraian	Anggaran Belanja Murni (Rp)	Anggaran Dikurangi Efisiensi (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Bobot (%)	Realisasi Anggran Belanja				Sisa Dana (Rp)	Keterangan
											Keuangan		Fisik			
											(Rp)	(%)	(%)	Tertimbang (%)		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	19	03	2	04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	31.929.280.000	896.261.000,00	31.033.019.000	16,35	181.131.613	0,58	2,00	0,33	30.851.887.387	
2	**19**	**03**	**2**	**05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**126.505.220.396**				**654.900.000**					
2	19	03	2	05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	5.518.287.200	1.106.203.164,00	4.412.084.036	2,32	20.710.000	0,47	1,00	0,02	4.391.374.036	
2	19	03	2	05	0009	Penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pengembangan dan Pengawasan	120.986.933.196	718.721.195,00	120.268.212.001	63,36	634.190.000	0,53	1,00	0,63	119.634.022.001	
2	**19**	**04**	**2**	**01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**1.050.000.000**				**0**					
2	19	04	2	01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1.050.000.000	-	1.050.000.000	0,55	-	-	-	-	1.050.000.000	
3	**26**	**02**	**2**	**01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota**	**5.973.721.775**				**217.586.422**					
3	26	02	2	01	0005	Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	5.652.006.775	52.000.020,00	5.600.006.755	2,95	217.586.422	3,89	5,00	0,15	5.382.420.333	
3	26	02	2	01	0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	321.715.000	60.887.789,00	260.827.211	0,14	-	-	-	-	260.827.211	
3	**26**	**02**	**2**	**02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota**	**101.287.672**				**0**					
3	26	02	2	02	0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	101.287.672	50.643.836,00	50.643.836	0,03	-	-	-	-	50.643.836	
3	**26**	**02**	**2**	**03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota**	**921.140.099**				**114.523.580**					
3	26	02	2	03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	735.000.000	367.500.000,00	367.500.000	0,19	114.523.580	31,16	32,00	0,06	252.976.420	

Kode Rekening						Uraian	Anggaran Belanja Murni (Rp)	Anggaran Dikurangi Efifsiensi (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Bobot (%)	Realisasi Anggaran Belanja				Sisa Dana (Rp)	Keterangan
											Keuangan		Fisik			
											(Rp)	(%)	(%)	Tertimbang (%)		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	26	02	2	03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	186.140.099	93.070.049,00	93.070.050	0,05	-	-	-	-	93.070.050	
3	**26**	**03**	**2**	**01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**1.702.396.566**				**50.926.400**					
3	26	03	2	01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	130.298.283	64.298.283,00	66.000.000	0,03	12.188.400	18,47	20,00	0,01	53.811.600	
3	26	03	2	01	0004	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	20.600.000	10.300.000,00	10.300.000	0,01	-	-	-	-	10.300.000	
3	26	03	2	01	0006	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	618.298.283	9.149.141,00	609.149.142	0,32	2.890.000	-	-	-	606.259.142	
3	26	03	2	01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	933.200.000	766.600.000,00	166.600.000	0,09	35.848.000	-	-	-	130.752.000	
3	**26**	**04**	**2**	**02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**1.619.978.200**				**64.913.000**					
3	26	04	2	02	0002	Pengembangan Pendidikan	204.007.200	39.328.600,00	164.678.600	0,09	-	-	-	-	164.678.600	
3	26	04	2	02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	625.000.000	134.812.719,00	490.187.281	0,26	64.913.000	-	-	-	425.274.281	
3	26	04	2	02	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	170.000.000	40.707.390,00	129.292.610	0,07	-	-	-	-	129.292.610	
3	26	04	2	02	0014	Fasilitasi Penguatan Kekayaan Intelektual	252.471.000	82.360.500,00	170.110.500	0,09	-	-	-	-	170.110.500	
3	26	04	2	02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	120.000.000	60.000.000,00	60.000.000	0,03	-	-	-	-	60.000.000	
3	26	04	2	02	0021	Perlindungan Hasil Kreativitas	210.000.000	116.180.000,00	93.820.000	0,05	-	-	-	-	93.820.000	
3	26	04	2	02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	38.500.000	1.241.915,00	37.258.085	0,02	-	-	-	-	37.258.085	
3	**26**	**05**	**2**	**01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**1.225.000.000**				**97.824.000**					

Kode Rekening						Uraian	Anggaran Belanja Murni (Rp)	Anggaran dikurang Efisiensi (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Bobot (%)	Realisasi Anggaran Belanja				Sisa Dana (Rp)	Keterangan
											Keuangan		Fisik			
											(Rp)	(%)	(%)	Tertimbang (%)		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	26	05	2	01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	400.000.000	140.248.008,00	259.751.992	0,14	-	-	-	-	259.751.992	
3	26	05	2	01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	450.000.000	161.010.242,00	288.989.758	0,15	50.624.000	17,52	18,00	0,03	238.365.758	
3	26	05	2	01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	200.000.000	12.640.001,00	187.359.999	0,10	47.200.000	25,19	26,00	0,03	140.159.999	
3	26	05	2	01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	25.000.000	13.308.544,00	11.691.456	0,01	-	-	-	-	11.691.456	
3	26	05	2	01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	130.000.000	39.375.987,00	90.624.013	0,05	-	-	-	-	90.624.013	
3	26	05	2	01	0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	20.000.000	9.918.697,00	10.081.303	0,01	-	-	-	-	10.081.303	
Jumlah							**199.450.545.953**	**9.629.657.385,00**	**189.820.888.568**	**100**	**3.699.727.580**	**1,95**		**2,63**	**186.121.160.988**	

Tana Paser, 2025
Kepala Dinas,

Kurniawan, S.Sos.
NIP. 19700122 199203 1 003

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi SKPD Tahun 2025 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 2,36%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.169.596.646 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Raus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam ratus Empat Puluh enam Rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 91.988.799.317 (Sembilan Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tuga Ratus Tujuh Belas Rupiah) atau sebesar 5,64%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada (Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata kabupaten Paser) sebesar 22,35% dengan predikat kinerja Sangat rendah.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) =1 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 0 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 0 indikator, capaian kinerja 0%-50% = 31 indikator

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan.

Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser 2025:

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai jadwal.
2. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan perangkat daerah.
3. Pelaksanaan kegiatan OPD belum sepenuhnya mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah disusun

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang

dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2025.

2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Paser, maka Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu: Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata**.**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kab. Paser mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di Bidang kepemudaan, keolahrgaan, dan pengembangan kepariwisataan serta bina usaha dan produk wisata sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah.
2. Penetapan kebijakan di Bidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
3. Pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan kepariwisataan serta bina usaha dan produk wisata sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan
5. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata adalah:

1. Pelayanan di Bidang kepemudaan
2. Pelayanan Di Bidang Keolahragaan
3. Pelayanan di Bidang kepariwisataan

Upaya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Tingkat hunian akomodasi
2. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
3. Persentase cabang olahraga yang melakukan pembinaan usia dini
4. Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang non materil dari BPK RI dan APIP
5. Nilai evaluasi Sakip dan APIP Disporapar

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Tahun 2021-2026,

sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026	2024	
Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan sektor keparwisataan daerah	Peningkatan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	0,33%	0,34%	0,35%	0,36%	0,37%	0,30	85
Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor jasa dan pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	43,67%	44,76%	45,31%	50,22%	50,76%	12,41	27,39
Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup pemuda	Persentase pemuda pengangguran terbuka	0.065%	0,064%	0,064%	0,063%	0,061%	0,063	90
Sasaran : Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	52,58%	52,84%	53,10%	53,35%	53,61%	39,15	73,72
Tujuan : Meningkatkan kegemaran berolahraga	Persentase organisasi desa/kelurahan yang melakukan kegiatan olahraga minimal 3 kali seminggu	10,42%	13,89%	17,36%	20,83%	24,315	48,84	108,53
Sasaran : Meningkatnya pembinaan olahraga	Persentase cabang olahraga yang melakukan pembinaan usia dini	30%	35%	40%	45%	50%	52,27	130,67
Tujuan : Meningkatkan kinerja OPD Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Indeks reformasi birokrasi	60	65	70	75	80	70	100
Sasaran : Meningkatnya akuntabiltas kinerja dan pengeloaan BMD dan keuangan yang akuntabel	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang non materiil dari BPK dan APIP	0	0	0	0	0	0	100
	Nilai evaluasi Sakip dan Apip Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	B	B	BB	BB	A	B (61,18)	86,17

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Meningkatkan pertumbuhan sektor kepariwisataan daerah memiliki 1 indikator kinerja yaitu Peningkatan PDRB sektor akomodasi dan makan minum belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 0,30 % dari target sebesar

0,35% dengan capaian kinerja sebesar 85 %;

2. Sasaran meningkatkan kontribusi sektor jasa dan pariwisata memiliki 1 indikator kinerja yaitu tingkat hunian akomodasi, belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 12,41. % dari target sebesar 45,31% dengan capaian kinerja sebesar 27,29 %
3. Tujuan meningkatkan kualitas hidup pemuda memiliki 1 indikator kinerja yaitu persentase pemuda pengangguran terbuka belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 0,063 % dari target sebesar 0,064% dengan capaian kinerja 90%
4. Sasaran meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan memiliki 1 indikator kinerja yaitu persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 39,15% dari target 53,10% dengan capaian kinerja 73,72%
5. Tujuan Meningkatkan kegemaran berolahraga memiliki 1 indikator kinerja yaitu persentase organisasi desa/ kelurahan yang melakukan kegiatan olahraga minimal 3 kali seminggu belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 48,84% dari target 17,36 % dengan capaian kinerja sebesar 108,53%
6. Sasaran meningkatnya pembinaan olahraga memiliki 1 indkator kinerja yaitu persentase cabang olahraga yang melakukan pembinaan usia dini belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 52,27 % dari target 40 % dengan capaian kinerja 130,67 %.

   Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada perhitungan indikator-indikator, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator tujuan/sasaran yang ada tersebut. Berikut tabel perhitungan indikator pada perubahan Renja Tahun 2025.

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025
Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan sektor keparwisataan daerah	Peningkatan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Tren perhitungan tahun sebelumnya dari BPS	0,35%	0,35%
Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor jasa dan pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{Jumlah\ Kamar\ terjual}{Jumlah\ kamar\ tersedia}$ x 100%	45,31%	45,31%
Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup pemuda	Persentase pemuda pengangguran terbuka	$\frac{Jumlah\ pemuda\ pengangguran}{Jumlah\ \ pemuda}$ x 100%	0.064%	0.064%
Sasaran : Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	$\frac{Jumlah\ pemuda\ yang\ Bekerja}{Jumlah\ \ pemuda}$ x 100%	53,10%	53,10%
Tujuan : Meningkatkan kegemaran berolahraga	Persentase organisasi desa/kelurahan yang melakukan kegiatan olahraga minimal 3 kali seminggu	$\frac{Jumlah\ desa\ dan\ kelurahan\ berolahraga\ 3x1\ minggu}{Jumlah\ Desa\ dan\ kelurahan}$ x 100%	17,36%	17,36%

Sasaran : Meningkatnya pembinaan olahraga	Persentase cabang olahraga yang melakukan pembinaan usia dini	$\frac{Cabor\ yang\ melakukan\ pembinaan\ usia\ dini}{Seluruh\ cabor}$ x 100%	40%	40%
Tujuan : Meningkatkan kinerja OPD Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Indeks reformasi birokrasi	Hasil evaluasi RB	70	70
Sasaran : Meningkatnya akuntabiltas kinerja dan pengeloaan BMD dan keuangan yang akuntabel	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang non materiil dari BPK dan APIP	laporan temuan dari BPK dan APIP	0	0
	Nilai evaluasi Sakip dan Apip Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Nilai evaluasi dari APIP	BB	BB

2.3 Faktor Pendorong dan penghambat serta solusi permasalahan dalam pelaksanaan hasil renja perangkat daerah

Faktor Pendorong :

1. Jumlah pemuda usia produktif 16-30 tahun yang ada di Kabupaten Paser
2. Jumlah Atlet
3. Potensi alam dan budaya local
4. Kerjasama dengan komunitas ekraf

Factor Penghambat :

1. Kurangnya kapasitas pemuda
2. Kurangnya pembinaan atlet
3. Kurangnya destinasi wisata yang berkondisi baik
4. Kurangnya produk ekraf dan SDM Pariwisata dan Ekraf

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan Dan Keolahrgaan serta kepariwisataan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025
Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan sektor keparwisataan daerah	Peningkatan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Tren perhitungan tahun sebelumnya dari BPS	0,35%	0,35%
Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor jasa dan pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{Jumlah\ Kamar\ terjual}{Jumlah\ kamar\ tersedia}$ x 100%	45,31%	45,31%
Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup pemuda	Persentase pemuda pengangguran terbuka	$\frac{Jumlah\ pemuda\ pengangguran}{Jumlah\ \ pemuda}$ x 100%	0.064%	0.064%
Sasaran : Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	$\frac{Jumlah\ pemuda\ yang\ Bekerja}{Jumlah\ \ pemuda}$ x 100%	53,10%	53,10%
Tujuan : Meningkatkan kegemaran berolahraga	Persentase organisasi desa/kelurahan yang melakukan kegiatan olahraga minimal 3 kali seminggu	$\frac{Jumlah\ desa\ dan\ kelurahan\ berolahraga\ 3x1\ minggu}{Jumlah\ Desa\ dan\ kelurahan}$ x 100%	17,36%	17,36%
Sasaran : Meningkatnya pembinaan olahraga	Persentase cabang olahraga yang melakukan pembinaan usia dini	$\frac{Cabor\ yang\ melakukan\ pembinaan\ usia\ dini}{Seluruh\ cabor}$ x 100%	40%	40%
Tujuan : Meningkatkan kinerja OPD Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Indeks reformasi birokrasi	Hasil evaluasi RB	70	70
Sasaran : Meningkatnya akuntabiltas kinerja dan pengeloaan BMD dan keuangan yang	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang	laporan temuan dari BPK dan APIP	0	0

akuntabel	non materiil dari BPK dan APIP			
	Nilai evaluasi Sakip dan Apip Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Nilai evaluasi dari APIP	BB	BB

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2025 tidak mengalami perubahan.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 yaitu "PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DISSELURUH KABUPATEN PASER" yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Penguatan Ekonomi Daerah.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Paser mendukung pencapaian sasaran ke 2, yaitu "Berkembangnya sektor kepariwisataan".

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Pemuda

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PERUBAHAN TAHUN 2025
KABUPATEN PASER
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kode					Uraian	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN/PAGU INDIKATIF
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				Rp 665,344,528.00				Rp 2.441686.510
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				Rp 484,344,528.00				Rp 901.263.692

2	19	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	Rp 108,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10	Rp 112,320,000.00
2	19	02	2.01	0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Rp 166,344,528.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Rp 172,998,309.12

2	19	02	2.01	0007	Pemberian Penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa da/berprestasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Rp 210,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2	Rp 218,400,000.00
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp 181,000,000.00				Rp 188,240,000.00
2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Rp 181,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Rp 188,240,000.00
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				Rp 2,232,286,575.00				Rp 2,321,578,038.00
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp 350,143,250.00				Rp 364,148,980.00

2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Rp 350,143,250.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Rp 364,148,980.00
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				Rp 1,116,143,325.00				Rp 1,160,789,058.00
2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Rp 700,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Rp 728,000,000.00
2	19	03	2.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Rp 416,143,325.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Rp 432,789,058.00
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				Rp 766,000,000.00				Rp 796,640,000.00
2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Rp 766,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Rp 796,640,000.00

2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				Rp 168,729,600.00				Rp 175,478,784.00
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				Rp 168,729,600.00				Rp 175,478,784.00
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Rp 168,729,600.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Rp 175,478,784.00
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp 7,066,646,852.62				Rp 7,349,312,726.72
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp 7,066,646,852.62				Rp 7,349,312,726.72
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34	Rp 6,639,605,913.37	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		34	Rp 6,905,190,149.90
2	19	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Rp 427,040,939.25	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Rp 444,122,576.82
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								

3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				Rp 5,799,014,246.00				Rp 6,030,974,815.84
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				Rp 2,540,228,550.00				Rp 2,641,837,692.00
3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Rp 1,530,933,550.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Rp 1,592,170,892.00
3	26	02	2.01	0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Rp 1,009,295,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Rp 1,049,666,800.00
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				Rp 2,124,000,000.00				Rp 2,208,960,000.00
3	26	02	2.02	0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Rp 2,124,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Rp 2,208,960,000.00

3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				Rp 1,134,785,696.00				Rp 1,180,177,123.84
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Rp 1,032,498,796.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Rp 1,073,798,747.84
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Rp 102,286,900.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Rp 106,378,376.00
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				Rp 235,000,000.00				Rp 244,400,000.00
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				Rp 235,000,000.00				Rp 244,400,000.00

3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Rp 42,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Rp 43,680,000.00
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Rp 43,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Rp 44,720,000.00
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp 115,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Rp 119,600,000.00

3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Rp 35,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Rp 36,400,000.00
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				Rp 453,000,000.00				Rp 471,120,000.00
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				Rp 453,000,000.00				Rp 471,120,000.00
3	26	04	2.02	0002	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Rp 36,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Rp 37,440,000.00
3	26	04	2.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Rp 45,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Rp 46,800,000.00

3	26	04	2.02	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Rp 200,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Rp 208,000,000.00
3	26	04	2.02	0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp 20,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Rp 20,800,000.00
3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Rp 82,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Rp 85,280,000.00
3	26	04	2.02	0021	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Rp 20,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Rp 20,800,000.00

3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Rp 50,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Rp 52,000,000.00
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				Rp 250,598,261.00				Rp 260,622,191.44
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				Rp 250,598,261.00				Rp 260,622,191.44

3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Rp 20,598,261.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Rp 21,422,191.44
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	Rp 20,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10	Rp 20,800,000.00
3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	Rp 30,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10	Rp 31,200,000.00

3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	Rp 90,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10	Rp 93,600,000.00
3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	Rp 30,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10	Rp 31,200,000.00
3	26	05	2.01	0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Rp 60,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Rp 62,400,000.00
X					NON URUSAN								
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp 426,414,847.37				Rp 443,471,441.26

X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp 126,591,519.65				Rp 131,655,180.44
X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	Rp 63,638,955.83	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2	Rp 66,184,514.06
X	XX	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Rp 39,635,257.96	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Rp 41,220,668.28
X	XX	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4	Rp 23,317,305.86	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		4	Rp 24,249,998.09
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp 242,082,820.84				Rp 251,766,133.67

X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	Rp 28,220,768.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12	Rp 29,349,598.73
X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	Rp 52,615,626.09	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12	Rp 54,720,251.13
X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	Rp 6,049,167.63	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12	Rp 6,291,134.34
X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	Rp 143,804,636.52	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12	Rp 149,556,821.98
X	XX	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	Rp 11,392,622.59	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12	Rp 11,848,327.49
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12	Rp 57,740,506.88			12	Rp 60,050,127.16

X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	Rp 56,143,200.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12	Rp 58,388,928.00
X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	Rp 1,597,306.88	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12	Rp 1,661,199.16

3.3 Rencana program dan kegiatan perubahan renja perangkat daerah

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025	

Organisasi : 2.19.3.26.0.00.00.0000 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun -1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata																			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp. 73.728.573.810	Rp. 114.178.447.831			Rp. 187.907.021.641	Rp. 85.855.345.676	Rp. 138.705.234.697			Rp. 224.560.580.373	Rp. 10.981.799.299,10
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				Rp. 73.728.573.810	Rp. 114.178.447.831			Rp. 187.907.021.641	Rp. 85.855.345.676	Rp. 138.705.234.697			Rp. 224.560.580.373	Rp. 10.981.799.299,10
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 9.572.939.391	Rp. 2.551.868.954			Rp. 12.124.808.345	Rp. 9.983.555.693	Rp. 2.401.843.982			Rp. 12.385.399.675	Rp. 7.792.784.167,98

2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 264.536.057				Rp. 264.536.057	Rp. 365.510.057				Rp. 365.510.057	Rp. 131.655.180,43
2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 142.544.009				Rp. 142.544.009	Rp. 218.518.009				Rp. 218.518.009	Rp. 66.184.514,06
2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 59.241.048				Rp. 59.241.048	Rp. 84.241.048				Rp. 84.241.048	Rp. 41.220.668,28
2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 62.751.000				Rp. 62.751.000	Rp. 62.751.000				Rp. 62.751.000	Rp. 24.249.998,09
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 8.467.472.389				Rp. 8.467.472.389	Rp. 8.563.632.389				Rp. 8.563.632.389	Rp. 7.349.312.726,72
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 8.146.901.429				Rp. 8.146.901.429	Rp. 8.176.901.429				Rp. 8.176.901.429	Rp. 6.905.190.149,90
2	19	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 320.570.960				Rp. 320.570.960	Rp. 386.730.960				Rp. 386.730.960	Rp. 444.122.576,82
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 586.568.945	Rp. 2.551.868.954			Rp. 3.138.437.899	Rp. 800.051.247	Rp. 2.401.843.982			Rp. 3.201.895.229	Rp. 251.766.133,67
2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.667.309	Rp. 2.360.450.493			Rp. 2.364.117.802	Rp. 1.656.134	Rp. 2.100.918.998			Rp. 2.102.575.132	Rp. 29.349.598,73
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 132.997.636	Rp. 191.418.461			Rp. 324.416.097	Rp. 48.491.113	Rp. 300.924.984			Rp. 349.416.097	Rp. 54.720.251,13

2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	Rp. 6.291.134,34
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 390.506.000				Rp. 390.506.000	Rp. 590.506.000				Rp. 590.506.000	Rp. 149.556.821,98
2	19	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 44.398.000				Rp. 44.398.000	Rp. 134.398.000				Rp. 134.398.000	Rp. 11.848.327,49
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 254.362.000				Rp. 254.362.000	Rp. 254.362.000				Rp. 254.362.000	Rp. 60.050.127,16
2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 249.362.000				Rp. 249.362.000	Rp. 249.362.000				Rp. 249.362.000	Rp. 58.388.928,00
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 1.661.199,16
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				Rp. 2.310.212.900				Rp. 2.310.212.900	Rp. 2.441.686.510				Rp. 2.441.686.510	Rp. 691.958.309,12
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				Rp. 885.812.900				Rp. 885.812.900	Rp. 901.263.692				Rp. 901.263.692	Rp. 503.718.309,12

2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 544.980.900				Rp. 544.980.900	Rp. 588.205.390				Rp. 588.205.390	Rp. 172.998.309,12
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 193.272.000				Rp. 193.272.000	Rp. 154.658.302				Rp. 154.658.302	Rp. 112.320.000,00
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 147.560.000				Rp. 147.560.000	Rp. 158.400.000				Rp. 158.400.000	Rp. 218.400.000,00
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 1.424.400.000				Rp. 1.424.400.000	Rp. 1.540.422.818				Rp. 1.540.422.818	Rp. 188.240.000,00
2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.424.400.000				Rp. 1.424.400.000	Rp. 1.540.422.818				Rp. 1.540.422.818	Rp. 188.240.000,00
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				Rp. 60.795.421.519	Rp. 111.626.578.877			Rp. 172.422.000.396	Rp. 72.380.103.473	Rp. 136.303.390.715			Rp. 208.683.494.188	Rp. 2.321.578.038,00
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 13.987.500.000				Rp. 13.987.500.000	Rp. 13.064.397.471				Rp. 13.064.397.471	Rp. 364.148.980,00
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.987.500.000				Rp. 13.987.500.000	Rp. 13.064.397.471				Rp. 13.064.397.471	Rp. 364.148.980,00
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				Rp. 31.929.280.000				Rp. 31.929.280.000	Rp. 45.313.321.500	Rp. 219.697.500			Rp. 45.533.019.000	Rp. 432.789.058,00
2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 31.929.280.000				Rp. 31.929.280.000	Rp. 45.313.321.500	Rp. 219.697.500			Rp. 45.533.019.000	Rp. 432.789.058,00

2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				Rp. 14.878.641.519	Rp. 111.626.578.877			Rp. 126.505.220.396	Rp. 14.002.384.502	Rp. 136.083.693.215			Rp. 150.086.077.717	Rp. 1.524.640.000,00
2	19	03	2.05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.518.287.200				Rp. 5.518.287.200	Rp. 4.412.084.036				Rp. 4.412.084.036	Rp. 728.000.000,00
2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.360.354.319	Rp. 111.626.578.877			Rp. 120.986.933.196	Rp. 9.590.300.466	Rp. 136.083.693.215			Rp. 145.673.993.681	Rp. 796.640.000,00
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				Rp. 1.050.000.000				Rp. 1.050.000.000	Rp. 1.050.000.000				Rp. 1.050.000.000	Rp. 175.478.784,00
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				Rp. 1.050.000.000				Rp. 1.050.000.000	Rp. 1.050.000.000				Rp. 1.050.000.000	Rp. 175.478.784,00
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.050.000.000				Rp. 1.050.000.000	Rp. 1.050.000.000				Rp. 1.050.000.000	Rp. 175.478.784,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				Rp. 7.715.104.057	Rp. 3.828.420.255			Rp. 11.543.524.312	Rp. 14.396.163.097	Rp. 3.905.995.984			Rp. 18.302.159.081	Rp. 7.007.117.007,28
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				Rp. 7.715.104.057	Rp. 3.828.420.255			Rp. 11.543.524.312	Rp. 14.396.163.097	Rp. 3.905.995.984			Rp. 18.302.159.081	Rp. 7.007.117.007,28
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				Rp. 3.173.103.854	Rp. 3.823.045.692			Rp. 6.996.149.546	Rp. 3.187.042.381	Rp. 3.861.620.471			Rp. 7.048.662.852	Rp. 6.030.974.815,84
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				Rp. 2.150.676.083	Rp. 3.823.045.692			Rp. 5.973.721.775	Rp. 2.675.828.495	Rp. 3.861.620.471			Rp. 6.537.448.966	Rp. 2.641.837.692,00
3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.828.961.083	Rp. 3.823.045.692			Rp. 5.652.006.775	Rp. 2.415.001.284	Rp. 3.861.620.471			Rp. 6.276.621.755	Rp. 1.592.170.892,00
3	26	02	2.01	0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 321.715.000				Rp. 321.715.000	Rp. 260.827.211				Rp. 260.827.211	Rp. 1.049.666.800,00
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				Rp. 101.287.672				Rp. 101.287.672	Rp. 50.643.836				Rp. 50.643.836	Rp. 2.208.960.000,00

3	26	02	2.02	0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 101.287.672				Rp. 101.287.672	Rp. 50.643.836				Rp. 50.643.836	Rp. 2.208.960.000,00
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				Rp. 921.140.099				Rp. 921.140.099	Rp. 460.570.050				Rp. 460.570.050	Rp. 1.180.177.123,84
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 735.000.000				Rp. 735.000.000	Rp. 367.500.000				Rp. 367.500.000	Rp. 1.073.798.747,84
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 186.140.099				Rp. 186.140.099	Rp. 93.070.050				Rp. 93.070.050	Rp. 106.378.376,00
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				Rp. 1.702.396.566				Rp. 1.702.396.566	Rp. 6.602.049.142				Rp. 6.602.049.142	Rp. 244.400.000,00
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				Rp. 1.702.396.566				Rp. 1.702.396.566	Rp. 6.602.049.142				Rp. 6.602.049.142	Rp. 244.400.000,00
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 130.298.283				Rp. 130.298.283	Rp. 66.000.000				Rp. 66.000.000	Rp. 43.680.000,00
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.600.000				Rp. 20.600.000	Rp. 10.300.000				Rp. 10.300.000	Rp. 44.720.000,00
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 618.298.283				Rp. 618.298.283	Rp. 5.609.149.142				Rp. 5.609.149.142	Rp. 119.600.000,00
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 933.200.000				Rp. 933.200.000	Rp. 916.600.000				Rp. 916.600.000	Rp. 36.400.000,00

3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				Rp. 1.614.603.637	Rp. 5.374.563			Rp. 1.619.978.200	Rp. 3.527.057.053	Rp. 44.375.513			Rp. 3.571.432.566	Rp. 471.120.000,00
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				Rp. 1.614.603.637	Rp. 5.374.563			Rp. 1.619.978.200	Rp. 3.527.057.053	Rp. 44.375.513			Rp. 3.571.432.566	Rp. 471.120.000,00
3	26	04	2.02	0002	Pengembangan Pendidikan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 204.007.200				Rp. 204.007.200	Rp. 215.056.700				Rp. 215.056.700	Rp. 37.440.000,00
3	26	04	2.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 619.625.437	Rp. 5.374.563			Rp. 625.000.000	Rp. 2.564.444.330	Rp. 25.742.951			Rp. 2.590.187.281	Rp. 46.800.000,00
3	26	04	2.02	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 170.000.000				Rp. 170.000.000	Rp. 336.367.438	Rp. 18.632.562			Rp. 355.000.000	Rp. 208.000.000,00
3	26	04	2.02	0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 252.471.000				Rp. 252.471.000	Rp. 170.110.500				Rp. 170.110.500	Rp. 20.800.000,00
3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 120.000.000				Rp. 120.000.000	Rp. 60.000.000				Rp. 60.000.000	Rp. 85.280.000,00
3	26	04	2.02	0021	Perlindungan Hasil Kreativitas	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 210.000.000				Rp. 210.000.000	Rp. 143.820.000				Rp. 143.820.000	Rp. 20.800.000,00
3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 38.500.000				Rp. 38.500.000	Rp. 37.258.085				Rp. 37.258.085	Rp. 52.000.000,00
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				Rp. 1.225.000.000				Rp. 1.225.000.000	Rp. 1.080.014.521				Rp. 1.080.014.521	Rp. 260.622.191,44

3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				Rp. 1.225.000.000				Rp. 1.225.000.000	Rp. 1.080.014.521				Rp. 1.080.014.521	Rp. 260.622.191,44
3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 400.000.000				Rp. 400.000.000	Rp. 335.267.992				Rp. 335.267.992	Rp. 21.422.191,44
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 450.000.000				Rp. 450.000.000	Rp. 288.989.758				Rp. 288.989.758	Rp. 20.800.000,00
3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 93.359.999				Rp. 93.359.999	Rp. 31.200.000,00
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	Rp. 261.691.456				Rp. 261.691.456	Rp. 93.600.000,00
3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 130.000.000				Rp. 130.000.000	Rp. 90.624.013				Rp. 90.624.013	Rp. 31.200.000,00
3	26	05	2.01	0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 10.081.303				Rp. 10.081.303	Rp. 62.400.000,00
Jumlah									Rp. 81.443.677.867	Rp. 118.006.868.086			Rp. 199.450.545.953	Rp. 100.251.508.773	Rp. 142.611.230.681			Rp. 242.862.739.454	Rp. 17.988.916.306,38

BAB IV
PENUTUP

Rancangan akhir perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Rancangan akhir perubahan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.2 Rencana tindak lanjut

Dokumen Rancangan akhir perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Tanah Grogot, 2025
Kepala Dinas
Pemuda Olahraga Dan Pariwisata

Kurniawan.S.Sos
Nip. 19700122 199203 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Jl.Kusuma Bangsa KM.05 Komplek Perkantoran Gedung B Lantai 1 Kavling 1
T A N A P A S E R

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PEMERINTAH KABUPATEN PASER KABUPATEN PASER
NOMOR : 050 /26 /DISPORAPAR/2025

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN PASER
TAHUN 2025

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya konsistensi perencanaan pembangunan tahun 2025 dan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2025 satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja yang selanjutnya disebut Renja SKPD;
b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan tim penyusunan rancangan awal rencana kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser;
c. Tim sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata kabupaten Paser

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49);
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Pada Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rancangan Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata kabupaten Paser tahun 2026
2. Mensinergikan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan RKPD maupun RPJMD kabupaten Paser
3. Melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata kabupaten Paser
4. Bertanggung jawab terhadap segala administrasi kegiatan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini berpedoman pada petunjuk dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tana Paser

Pada tanggal : 2025

Kepala Dinas,



Nurniawan.S.Sos

NIP. 19700122 199203 1 003

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Pemuda Olahraga Dan Pariwisata
Kab.Paser
Nomor :050/ /DISPORAPAR/2025
Tanggal Januari 2025

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PASER
TAHUN 2025

No	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2.	Ketua	Sekretaris Dinas
3.	Sekretaris	Perencana Muda
4.	Anggota	Iin Nur ainiyah.S.Ak Ahmad Rifa'i S.Kom

Kepala Dinas,

Kurniawan.S.Sos
NIP. 19700122 199203 1 003

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pemuda
Olahraga dan Pariwisata Kab.Paser
Nomor : 050 / /
DISPORAPAR / 2025
Tanggal Januari 2025

AGENDA KERJA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

1. PERSIAPAN
   a. Membentuk tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah

2. PELAKSANAAN
   a. Tim penyusun rencana kerja melakukan telaahan terhadap program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang terdapat dalam renstra
   b. Tim penyusun rancangan awal rencana kerja melaksankan analisis terhadap gambaran pelayanan perangkat daerah
   c. Tim Peyusun melakukan evaluasi terhadap rancangan awal rencana kerja tahun lalu berdasarkan renstra perangkat daerah
   d. Tim Penyusun melakukan analisis terhadap isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah
   e. Melakukan penelaahan terhadap ranwal RKPD dan melakukan perumusan tujuan dan sasaran renja perangkat daerah
   f. Melakukan penelaahan usulan masyarakat dan melakukan perumusan kegiatan prioritas
   g. Menyesuaikan pendanan program kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan pagu indikatif untuk masing2 perangkat daerah memperhitungkan prakiraan maju untuk tahun berikutnya
   h. Menyusun dokumen renja perangkat daerah yang kemudian di sahkan oleh kepala perangkat daerah

Kepala Dinas,

[redacted]
NIP. 19700122 199203 1 003

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemerintah Kabupaten Paser

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) TAHUN ANGGARAN 2025



Jl. Kusuma Bangsa KM.5 Kompleks Perkantoran Gedung C Lantai 2 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur
http://dpmd.paserkab.go.id
dpmdpaserkab@gmail.com

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan sistematika Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dokumen ini telah mengacu pada RPJMD pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

Dinamika perubahan lingkungan strategis yang bergerak dengan cepat, dan sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan senada dengan Visi Misi Bupati dan wakil Bupati Paser terpilih 2021-2026, Maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Paser dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) tahun 2025 secara terpadu dan terukur, Dengan Demikian seluruh program kegiatan dilingkungan Dinas pemberdayaan Masyarkat dan Desa kabupaten Paser tahun 2025, mengacu pada dokumen tersebut.

Akhirnya dengan memohon rahmat dari Tuhan yang Maha Esa, atas segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Paser, Kami berharap agar Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini pada akhirnya dapat direalisasikan dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pembangunan di Kabupaten Paser dalam pemberdayaan masyarakat dan desa.

Paser, 22 Agustus 2025
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

Drs. CHANDRA IRWANADHI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660731 198609 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Bab I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 4

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 6

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan DPMD 13

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025 18

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMD 23

3.1. Tujuan Dan Sasaran DPMD 23

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 24

3.3. Rencana Program Dan Kegiatan Perubahan Renja Pd Tahun 2025 34

Bab IV PENUTUP 44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser Tahun 2025 Triwulan II 7

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 15

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran DPMD 23

Tabel 3.2. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 26

Tabel 3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja DPMD Tahun 2025 35

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang diatur dalam surat Keputusan Bupati Paser Nomor 100.3.3.2/KEP-741/2025 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2025 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
22. Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser;
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2025 Tentang .Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke II (Dua);

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser dalam satu tahun;

2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser, proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2025

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2025 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang

diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2025 yang disertai perubahan target .

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.I

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser

Periode Pelaksanaan: Triwulan II

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Peraangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa			**75.176.315.090**		**45.789.664.731**		**20.058.841.924**		**2.339.439.527**		**2.918.985.510**		**-**		**-**		**5.258.425.037**					
1	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**80**	**40.022.007.554**	**83,41**	**20.344.207.281**	**84**	**10.790.473.103**	**84,89**	**1.528.296.187**		**2.304.329.324**		**-**		**-**	**21,22**	**3.832.625.511**	**52,32**	**24.176.832.792**	**65,40**	**60,41**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Presentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu**	**100**	**420.337.990**	**100**	**468.076.535**	**100 %**	**102.222.231**	**43,75**	**28.090.800**	**6,25**	**27.145.600**		**-**		**-**	**50,00**	**55.236.400**	**75,00**	**523.312.935**	**75,00**	**124,50**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	326.290.122	18	355.924.793	12 Dokumen	76.931.942	6	19.473.600	2	27.145.600					**8**	46.619.200	26	402.543.993	86,67	123,37	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48	6.400.000	24	7.199.700	12 laporan	5.778.000	3	-	3	-					**6**	-	30	7.199.700	62,50	112,50	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	87.647.868	18	104.952.042	8 Laporan	19.512.289	5	8.617.200	1	-					**6**	8.617.200	24	113.569.242	80,00	129,57	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Presentasi Kualitas Penataushaan dan Pertanggungjawaban keuangan**	**100**	**36.717.648.537**	**100**	**17.255.234.676**	**100 %**	**9.741.950.882**		**1.411.617.662**	**49,8**	**2.219.319.997**		**-**		**-**	**49,80**	**3.630.937.659**	**74,90**	**20.886.172.335**	**74,90**	**56,88**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140	34.639.836.263	84	16.081.003.140	28 Orang/bulan	9.385.285.561	28	1.332.828.502	28	2.170.350.025					**28**	3.503.178.527	112	19.584.181.667	80,00	56,54	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2070	1.944.721.094	1420	1.110.008.014	600 dokumen	342.157.421	115	78.789.160	111	42.221.472					**226**	121.010.632	1646	1.231.018.646	79,52	63,30	
		Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75	133.091.180	45	64.223.522	13 Laporan	14.507.900	3		3	6.748.500					**6**	6.748.500	51	70.972.022	68,00	53,33	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Presentasi Barang Milik Daerah yang terdata**	**80**	**155.008.489**	**44**	**156.972.884**	**50%**	**16.897.045**		**-**	**50**	**12.488.400**		**-**		**-**	**50**	**12.488.400**	**47**	**169.461.284**	**58,75**	**109,32**	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Peraangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	50	155.008.489	29	156.972.884	10 Laporan	16.897.045		-	5	12.488.400					**5**	12.488.400	34	169.461.284	68,00	109,32	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**100**	**234.650.000**	**100**	**320.229.000**	**100 %**	**121.813.439**		**10.917.400**	**34,6**	**-**		**-**		**-**	**34,6**	**10.917.400**	**67,3**	**331.146.400**	**67,30**	**141,12**	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	48	30.199.878			48 Dokumen	15.099.939		3.372.400	45	-					**45**	3.372.400	45	3.372.400	93,75	11,17	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1	30.000.000			1 dokumen	15.000.000		-	0	-					**0**	-	0	-	0,00	0,00	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	56	234.650.000	48	320.229.000	10 Orang	91.713.500		7.545.000	1	-					**1**	7.545.000	49	327.774.000	87,50	139,69	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**2.097.165.099**	**100**	**1.887.328.111**	**100 %**	**703.560.976**		**74.611.025**	**26,31**	**43.294.827**		**-**		**-**	**26,31**	**117.905.852**	**63,155**	**2.005.233.963**	**63,16**	**95,62**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	120	10.983.380	72	5.556.900	24 Paket	2.394.536		-	24	-					**24**	-	96	5.556.900	80,00	50,59	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17	131.885.423	16	431.828.500	3 Paket	126.357.614		-	0	-					**0**	-	16	431.828.500	94,12	327,43	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200	714.155.428	120	417.151.250	40 Paket	308.323.678		13.800.000	2	7.610.000					**2**	21.410.000	122	438.561.250	61,00	61,41	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	123.628.275	36	62.570.900	12 Paket	13.476.375		-	1	1.075.000					**1**	1.075.000	37	63.645.900	308,33	51,48	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3620	12.088.098	665	2.520.000	724 Dokumen	3.500.000		-	151	-					**151**	-	816	2.520.000	22,54	20,85	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180	1.115.407.875	144	967.700.561	36 Laporan	196.883.773		60.811.025	18	34.609.827					**18**	95.420.852	162	1.063.121.413	90,00	95,31	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penataan arsip dinamis pada skpd					10 Dokumen	52.625.000		-	0	-							0	-			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Jumlah Aset yang tersedia dalam keadaan baik**	**100**	**397.197.440**	**100**	**256.366.075**	**100 %**	**104.028.530**		**3.059.300**	**25**	**2.080.500**		**-**		**-**	**25**	**5.139.800**	**62,5**	**261.505.875**	**62,50**	**65,84**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	397.197.440	12	217.257.585	4 unit	91.716.780		3.059.300	2	2.080.500					**2**	5.139.800	14	222.397.385	70,00	55,99	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	56.472.175	31	39.108.490	10 unit	12.311.750		-	0	-					**0**	-	31	39.108.490	62,00	69,25	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Peraangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	**Meningkatkan Administrasi Desa dalam Mewujudkan Good and Clean Government**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Desa yang memiliki Perbup Batas Desa**	**12**	**363.989.831**	**0,72**	**211.947.000**	**4 %**	**73.096.113**		**1.338.000**		**1.900.000**		**-**		**-**	**0,72**	**3.238.000**	**0,72**	**215.185.000**	**6,00**	**59,12**	
		Penyelenggaraan Penataan Desa	**Presentase Desa yang batas desanya ditetapkan**	**20**	**363.989.831**	**12,23**	**211.947.000**	**15 %**	**73.096.113**		**1.338.000**	**7,91**	**1.900.000**		**-**		**-**	**12,23**	**3.238.000**	**12,23**	**215.185.000**	**61,15**	**59,12**	
		Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	4	181.994.916	0	2.282.000	1 Desa	3.450.000	0	-	0	-					**0**	-	0	2.282.000	0,00	1,25	
		Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	4	181.994.916	0	2.192.000	1 Desa	3.450.000	0	-	0	-					**0**	-	0	2.192.000	0,00	1,20	
		Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	4	128.043.441	3	75.211.000	1 Laporan	14.128.750	0	1.338.000	0	1.900.000					**0**	3.238.000	3	78.449.000	75,00	61,27	
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	10	181.994.916	5	132.262.000	1 Unit	52.067.363	0	-	0	-					**0**	-	5	132.262.000	50,00	72,67	
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	**Persentase kerjasama desa yang telah ditindaklanjuti**	**90**	**295.104.898**	**89,21**	**390.568.900**	**95 %**	**105.263.115**		**11.262.100**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**11.262.100**	**44,61**	**401.831.000**	**49,56**	**136,17**	
		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	**Persentase Kawasan Desa yang terbentuk**	**6**	**295.104.898**	**7,91**	**390.568.900**	**7,91 %**	**105.263.115**		**11.262.100**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**11.262.100**	**3,96**	**401.831.000**	**65,92**	**136,17**	
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5	295.104.898	4	390.568.900	1 dokumen	105.263.115	0	11.262.100	0	-					**0**	11.262.100	4	401.831.000	80,00	136,17	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Presentasi LHP Desa yang selesai ditindaklanjuti**	**100**	**20.501.611.321**	**100**	**14.203.966.565**	**100 %**	**5.617.669.948**		**714.849.240**		**448.852.520**		**-**		**-**	**0,00**	**1.163.701.760**	**50,00**	**15.367.668.325**	**50,00**	**74,96**	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Persentase Desa memiliki adminitrasi dan laporan desa yang berkualitas**	**100**	**20.501.611.321**	**77,56**	**14.203.966.565**	**85 %**	**5.617.669.948**		**714.849.240**	**34,09**	**448.852.520**		**-**		**-**	**34,09**	**1.163.701.760**	**55,83**	**15.367.668.325**	**55,83**	**74,96**	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	50	7.772.664.829	69	4.533.337.172	21 Desa	3.115.242.770	6	448.865.140	0	282.263.120					**6**	731.128.260	75	5.264.465.432	150,00	67,73	
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	15	161.145.683	3	5.000.000	8 Dokumen	28.957.829	0	4.500.000	0	-					**0**	4.500.000	3	9.500.000	20,00	5,90	
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	695	754.505.480	417	1.631.590.500	139 dokumen	143.625.000	36	16.630.000	73	28.272.000					**109**	44.902.000	526	1.676.492.500	75,68	222,20	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Peraangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	60	1.957.268.104	36	1.462.163.025	139 Dokumen	383.340.692	55	80.783.400	78	15.718.000					**133**	96.501.400	169	1.558.664.425	281,67	79,63	
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	387	686.500.000	72	450.708.850	40 Orang	491.048.700	0	-	0	25.111.500					**0**	25.111.500	72	475.820.350	18,60	69,31	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	50	140.365.000	20	61.512.500	1 Laporan	95.781.955	0	-	0	-					**0**	-	20	61.512.500	40,00	43,82	
		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	15	483.131.973	9	283.459.400	3 Dokumen	146.650.175	0	20.203.600	1	4.800.000					**1**	25.003.600	10	308.463.000	66,67	63,85	
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja	50	1.319.799.584	21	998.330.900	10 dokumen	222.477.634	0	45.782.500	0	20.436.000					**0**	66.218.500	21	1.064.549.400	42,00	80,66	
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian	5	4.111.192.072	74	2.385.547.278	1 Laporan	203.617.902	0	14.800.000	0	8.035.000					**0**	22.835.000	74	2.408.382.278	1480,00	58,58	
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5	156.190.560	17	49.964.000	1 laporan	10.325.000	0	-	0	6.180.000					**0**	6.180.000	17	56.144.000	340,00	35,95	
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	625	478.211.400	384	287.920.100	139 Dokumen	81.513.514	56	7.200.000	75	2.400.000					**131**	9.600.000	515	297.520.100	82,40	62,22	
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	5	511.577.146	206	641.480.980	139 Dokumen	229.575.410	27	43.669.600	68	7.160.000					**95**	50.829.600	301	692.310.580	6020,00	135,33	
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	360	69.615.000	79	11.280.000	40 Orang	143.550.000	0	-	0	-					**0**	-	79	11.280.000	21,94	16,20	
		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	20	1.000.000.000	13	759.873.060	5 desa	144.769.975	1	13.800.000	0	23.790.000					**1**	37.590.000	14	797.463.060	70,00	79,75	
		Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	5	271.738.001	3	68.660.200	139 laporan	14.580.000		-	0	-					**0**	-	3	68.660.200	60,00	25,27	
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	30	627.706.491	25	573.138.600	9 dokumen	162.613.392	9	18.615.000	0	24.686.900					**9**	43.301.900	34	616.440.500	113,33	98,21	
3	**Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**100**		**75**		**75 %**												**75**		**75,00**		
			Lembaga Adat Desa yang aktif	**90**	**13.993.601.486**	**60**	**10.638.974.985**	**60**	**3.472.339.645**		**83.694.000**		**163.903.666**	**-**		**-**			**247.597.666**	**60**	**10.886.572.651**	**66,67**	**77,80**	
			Masyarakat Hukum Adat yang aktif	**2**		**2**		**2**												**2**		**100,00**		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Peraangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Desa yang lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga Adatnya yang terfasilitasi**	**95**	**13.993.601.486**	**70**	**10.638.974.985**	**75 %**	**3.472.339.645**		**83.694.000**		**163.903.666**		**-**		**-**		**247.597.666**	**70**	**10.886.572.651**	**73,68**	**77,80**	
		Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	6	632.104.587	6	726.819.118	1 dokumen	118.413.256	0	22.010.000	1	6.175.000					**1**	28.185.000	7	755.004.118	116,67	119,44	
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	25	865.079.843	13	895.718.200	5 dokumen	278.933.916	1	24.986.000	2	8.160.000					**3**	33.146.000	16	928.864.200	64,00	107,37	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	70	182.027.891	60	115.416.400	15 lembaga	94.000.000	0	-	0	-					**0**	-	60	115.416.400	85,71	63,41	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	30	130.480.000	10	38.890.000	6 Dokumen	37.858.000	2	-	4	-					**6**	-	16	38.890.000	53,33	29,81	
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50	868.816.781	40	1.416.921.780	10 Laporan	431.152.196	3	36.698.000	4	60.468.666					**7**	97.166.666	47	1.514.088.446	94,00	174,27	
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	40	107.741.000	22	228.749.854	18 Laporan	70.440.128	0	-	0	-					**0**	-	22	228.749.854	55,00	212,31	
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat	20	11.207.351.383	12	7.216.459.633	4 Dokumen	2.441.542.149	0	-	1	89.100.000					**1**	89.100.000	13	7.305.559.633	65,00	65,19	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Peraangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			dan Kesejahteraan Keluarga																					
Jumlah									20.058.841.924									**33,14**	5.258.425.037					
Rata-rata capaian kinerja (%)									Program									8,65						
									Kegiatan									40,73						
									Sub Kegiatan									35,89						
Predikat Kinerja									Program									Sangat Rendah						
									Kegiatan									Sangat Rendah						
									Sub Kegiatan									Sangat Rendah						

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2025 Triwulan II dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 33,14 %, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.258.425.037 (Lima milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 21.872.503.468 (Dua puluh milyar lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) atau sebesar 26,21%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser sebesar 35,89 % dengan predikat kinerja Sangat Rendah (penentuan peringkat disesuaikan skala pada Tabel T-E.1 PMDN Halaman 494).
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 0 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 10 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 4 indikator capaian kinerja 0%-50% = 33 indikator

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja,
b. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran,
c. pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
d. pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas:
e. penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi:
f. perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
g. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan,
j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
k. pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku,
l. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas,
m. pembinaan jabatan fungsional pada Dinas sesuai dengan kewenangan yang diberikan,
n. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Dinas:

o. pengendalian pelaksanaan tugas UPTD:
p. penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
q. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi:
r. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah, dan
s. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan dalam dokumen perencanaan tersebut telah ditetapkan 2 tujuan dan 3 sasaran strategis yaitu :

Tujuan Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kemandirian desa
b. Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yg responsif dan tangkas

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

a. Meningkatkan Administrasi Desa dalam Mewujudkan Good and Clean Government
b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah

Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

a. Presentase Desa yang memiliki Administrasi Desa yang Baik
b. Presentase Desa yang terfasilitasi dalam Kerjasama antar Desa
c. Presentase Desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan
d. Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 -2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II
Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator		IKK	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
				2022	2023	2024	2025	2026		
	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan lndeks Desa Membangun	**%**	**outcome**	0	0	0	0	0	0	100%
	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa (desa tertinggal dan berkembang)	**Desa**	**output**	8	10	11	13	14	13	100
	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya (desa tertinggal dan berkembang)	**Desa**	**output**						-7	
	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan (desa tertinggal dan berkembang)	**Lembaga**	**output**						19	
	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan	**Desa**	**output**						5	

Tujuan/Sasaran	Indikator		IKK	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
				2022	2023	2024	2025	2026		
	dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan (desa tertinggal dan berkembang)									
	Iumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan lndeks Desa Membangun per tahun	**%**	**outcome**						20,37	
	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	**Desa**	**output**						38	
	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	**Desa**	**output**						10	
	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	**Lembaga**	**output**						12	
	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakata n dan lembaga	**Desa**	**output**						18	

Tujuan/Sasaran	Indikator		IKK	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
				2022	2023	2024	2025	2026		
	adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdavaan									
Tujuan: Meningkatkan kemandirian desa	Persentase pengentasan desa tertinggal			80	85	100	100	100	100	100
	Persentase peningkatan status desa mandiri			10	12	22	26	30	20,37	78,34
Sasaran:										
Meningkatkan Administrasi Desa dalam Mewujudkan Good and Clean Presentase Desa Government	Presentase Desa yang memiliki Administrasi Desa yang baik			28	35	40	50	55	49,64	99,28
	Persentase Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar Desa			6	7	89,21	95	97	89,21	93,90
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Presentase Desa yang lembaga ke masyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan keg iatan ekonomi pro duktif dan pember dayaan			25	30	37	40	50	39,56	98,90
Tujuan: Meningkatkan tata kelola perangkat Daerah yang responsif dan tangkas	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi			61	65	71	75	81		
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspek torat			B	BB	BB	BB	A	BB	100

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

a. Meningkatkan kemandirian desa memiliki 2 indikator kinerja yaitu "Persentase pengentasan desa tertinggal", telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100 %; indikator kinerja berikutnya "Persentase peningkatan status desa mandiri", belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 20,37% dari target sebesar 26% dengan capaian kinerja sebesar 78,34%. .

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

a. Meningkatkan Administrasi Desa dalam Mewujudkan Good and Clean Government memiliki 2 indikator kinerja yaitu "Presentase Desa yang memiliki Administrasi Desa yang Baik", belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 49,64% dari target sebesar 50% dengan capaian kinerja sebesar 99,28%; indikator kinerja berikutnya "Presentase Desa yang terfasilitasi dalam Kerjasama antar Desa", juga telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 89,21% dari target sebesar 95% dengan capaian kinerja sebesar 93,90%;
b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat memiliki 1 indikator yaitu "Presentase Desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan" belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 39,56% dari target sebesar 40% dengan capaian kinerja sebesar 98,90%;
c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah memiliki 2 indikator kinerja yaitu "Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan Keuangan yang material dari BPK dan APIP Eksternal", telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 0 dari target sebesar 0 dengan capaian kinerja sebesar 100 %; indikator kinerja berikutnya "Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat", belum mencapai target, dimana realisasinya 75,75 (BB) dari target 75 (BB) dengan capaian kinerja sebesar 100%;

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser Periode Juni 2025 :

1. Komitmen dan Motivasi dari Pimpinan.
2. Kerjasama Tim yang solid bersama seluruh stake holder yang terlibat.
3. Program Satu Malam Bersama Desa (Salam Berdesa) yang melibatkan DPMD, Kecamatan dan Desa terkait (Aparatur Desa, Tokoh masyarakaat, tokoh adat, LKD), Pendamping Desa.
4. Regulasi dan edaran dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah terkait Kerjasama Antar Desa dan mengharuskan untuk segera melakukan percepatan pelaksanaan di daerah, diantaranya :

a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

5. Komitmen bahwa laporan harus selesai 3 bulan setelah akhir tahun anggaran dan laporan BPD harus selesai 4 bulan setelah akhir tahun anggaran
6. Rutin dilakukan pembinaan, bimbingan updating data melalui layanan konsultasi langsung, youtube, WA dan sosmed lainnya.
7. Membentuk Pokja Prodeskel di setiap desa
8. Inovasi DPMD Kab.Paser

Dalam rangka memperkuat peran desa sebagai pusat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Paser menghadirkan berbagai inovasi strategis yang tertuang dalam SK Bupati Paser No. 100.3.3.2/kep.767/2024. Inovasi-inovasi tersebut menjadi instrumen penting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa, memperkuat kapasitas lembaga desa, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Melalui enam program unggulan, yaitu:

1. SALAM BERDESA (Satu Malam Bersama Desa)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Paser terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam mendukung pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan. Salah satu terobosan yang dihadirkan adalah Program "Semalam Bersama Warga Desa" atau yang akrab disebut "Salam Berdesa" merevolusi pendekatan tradisional dalam pembinaan desa, beralih dari sekadar kunjungan formal menjadi interaksi yang lebih mendalam, personal, dan partisipatif.

Berbeda dengan kunjungan kerja biasa yang cenderung singkat dan formal, "Salam Berdesa" mengharuskan jajaran DPMD, mulai dari kepala dinas hingga staf, untuk menginap semalam di desa. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan kesempatan untuk merasakan langsung denyut kehidupan desa, memahami tantangan sehari-hari yang dihadapi warga, dan melihat potensi yang mungkin terlewatkan dari laporan di atas meja. Interaksi yang personal dan informal ini membangun kepercayaan dan kedekatan antara aparat DPMD dan warga desa.

Dengan tinggal dan berinteraksi langsung, tim DPMD dapat mengidentifikasi masalah dan potensi desa secara lebih akurat. Diskusi santai di balai desa, atau bahkan saat makan malam bersama keluarga di desa, seringkali memunculkan informasi yang lebih jujur dan mendalam daripada pertemuan resmi. Ini memungkinkan DPMD merumuskan program pembinaan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil desa. Warga juga merasa lebih nyaman untuk menyampaikan aspirasi, ide, inovasi dan keluhan mereka. Program ini menciptakan ruang dialog yang egaliter, di mana suara setiap warga, dari berbagai latar belakang, dihargai dan didengar. Ini adalah kunci keberhasilan pembangunan desa yang partisipatif.

Salam Berdesa bukan sekadar inovasi, melainkan gerakan bersama untuk membangun desa dari hati, dengan semangat gotong royong dan kebersamaan.

Foto Kegiatan SALAM BERDESA





2. **SI DARA MASAK SATE LOBAK (Arsip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terkelola dengan Baik)**

Inovasi ini hadir untuk menjawab tantangan dalam pengelolaan arsip dan data di lingkungan DPMD. Selama ini, arsip menjadi instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Melalui SI DARA MASAK SATE LOBAK, DPMD memastikan bahwa seluruh dokumen, baik yang terkait dengan program desa, aset, maupun laporan kegiatan, dikelola dengan tertib dan berbasis sistem. Pengelolaan yang baik memudahkan pelacakan data, mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti, serta menjaga keteraturan administrasi. Lebih jauh, inovasi ini juga menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan, sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang modern.

3. **GERMAS BANGDES (Gerakan Masyarakat Bangun Desa)**

GERMAS BANGDES adalah bentuk nyata semangat gotong royong masyarakat Paser. Program ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Inovasi ini tidak hanya menggerakkan fisik pembangunan, tetapi juga memperkuat modal sosial masyarakat. Dengan melibatkan semua pihak, mulai dari tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, hingga lembaga desa, GERMAS BANGDES mendorong terciptanya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama atas hasil pembangunan. Selain mempercepat terwujudnya desa mandiri, inovasi ini juga menjaga kelestarian budaya gotong royong sebagai kearifan lokal yang harus terus diwariskan.

4. **GERBANG BUNGAS (Gerakan Bangun BUMDes Tingkatkan Pendapatan Desa)**

Inovasi ini lahir dari kesadaran bahwa **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)** merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi desa. GERBANG BUNGAS mendorong BUMDes agar lebih kreatif, produktif, dan adaptif terhadap peluang usaha. Program ini dilakukan melalui pembinaan, pelatihan manajemen, pendampingan usaha, hingga promosi produk lokal. Harapannya, BUMDes mampu mengelola potensi desa, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan asli desa, dan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Lebih dari sekadar unit usaha, BUMDes diarahkan untuk menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus katalisator pembangunan berbasis kemandirian lokal.

5. **RBMD (Rumah Bersama Bangun Desa)**

RBMD adalah wadah kolaborasi, koordinasi, dan konsultasi pembangunan desa. Konsep rumah bersama ini memungkinkan semua pemangku kepentingan—pemerintah desa, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, akademisi, hingga mitra pembangunan—untuk berkumpul,

berdiskusi, serta mencari solusi atas tantangan pembangunan desa. RBMD menjadi pusat integrasi ide dan inovasi, sehingga program pembangunan desa lebih terarah, sinergis, dan berkelanjutan. Selain itu, RBMD juga berfungsi sebagai ruang belajar bersama, tempat bertukar pengalaman, serta sarana memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan adanya RBMD, pembangunan desa tidak lagi bersifat parsial, melainkan terkoordinasi dengan baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat

6. **LKD AMAS (Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif Menuju Desa Maju, Adil, dan Sejahtera)**

   Inovasi ini menekankan penguatan lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, Karang Taruna, RT/RW, LPM, dan kelompok masyarakat lainnya. LKD AMAS bertujuan menjadikan lembaga desa lebih aktif, dinamis, dan berdaya guna dalam mendukung pembangunan. Melalui program ini, lembaga kemasyarakatan diberikan pembinaan, fasilitasi, serta pendampingan agar mampu menjalankan perannya secara optimal. LKD AMAS juga menjadi sarana untuk memastikan pembangunan desa berlangsung inklusif, adil, dan sejahtera, karena seluruh elemen masyarakat terlibat aktif. Dengan lembaga yang kuat, desa memiliki pilar sosial yang kokoh untuk menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang pembangunan di masa depan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Berdasarkan Permendagri No.45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa harus berbentuk polygon, sementara data batas yang telah dilakukan pelacakan dan berita acara kesepakatan masih dalam bentuk segmen.
2. Masih sering terjadi sengketa dalam penentuan batas administrasi desa.
3. Ketersediaan Anggaran untuk peningkatan kapasitas BPD belum memadai, karena berdasarkan surat edaran kemendagri No.140/11455/SJ Tanggal 18 Oktober 2019 agar pelaksanaan peningkatan kompetensi aparatur desa dilaksanakan melalui 3 (tiga) balai Pemdes (Malang, Yogyakarta dan Lampung).
4. Beberapa sub kegiatan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV sehingga realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II Masih 0 %.
5. Adanya kebijakan terkait Efisiensi Anggaran Tahun 2025 sehingga Kegiatan Pembinaan kurang maksimal.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2025.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025
Tujuan: Meningkatkan kemandirian desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	$\sum PDt = \frac{\sum D}{\sum D} x\ 100\%$ Keterangan : ∑Dadm : Jumlah desa tertinggal yang meningkat statusnya ∑D : Target Desa yang meningkat statusnya dari desa tertinggal	100%	100%
	Persentase peningkatan status desa mandiri	$\sum PDM = \frac{\sum DM}{\sum D} x\ 100\%$ Keterangan : ∑Dadm : Jumlah desa Mandiri ∑D : Jumlah Desa se Kabupaten Paser	26%	26%
Sasaran:				
Meningkatkan Administrasi Desa dalam Mewujudkan Good and Clean Government	Presentase Desa yang memiliki Administrasi Desa yang Baik	$\sum Pdadm = \frac{\sum Dadm}{\sum D} x\ 100\%$ Keterangan : ∑Dadm : Jumlah desa dengan administrasi yang baik ∑D : Target desa dengan administrasi yang baik tahun 2022-2026	50%	50%
	Presentase Desa yang terfasilitasi dalam Kerjasama antar Desa	$\sum PDkad = \frac{\sum Dkad}{\sum D} x\ 100\%$ Keterangan : ∑Dkad : Jumlah desa yang terfasilitasidalam Kerjasama antar desa ∑D : Jumlah Desa se Kabupaten Paser	95%	95%
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Presentase Desa yang lembaga kemasyarakatan		40%	40%

	danlembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	$\frac{\sum \text{PDl}kd}{\sum \text{D}} = \frac{\sum \text{Dlkd}}{\sum \text{D}} \; x \; 100\%$ Keterangan : ∑Dkad : Jumlah desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan ∑D : Jumlah Desa se Kabupaten Paser		
Tujuan: Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yg responsif dan tangkas	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	75	75
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspek torat	Kategori evaluasi SAKIP dari Inspektorat	75 BB	75 BB

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser Tahun 2025 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 yaitu ““PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DI SELURUH KABUPATEN PASER”” yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif

6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser mendukung pencapaian sasaran sasaran ke-3 yaitu "Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah" dan sasaran ke-10 yaitu "Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat" Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Pemberdayaan Masyarakaat dan Desa telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 3.2
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa				**20.058.841.924**	Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa				**26.470.433.073**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**84**	**10.790.473.103**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**84**	**11.917.887.178**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Presentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu**	**100 %**	**102.222.231**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Presentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu**	**100 %**	**262.848.463**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	76.931.942	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	162.369.961	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	5.778.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	11.600.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	19.512.289	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	88.878.502	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Presentasi Kualitas Penataushaan dan Pertanggungjawaban keuangan**	**100 %**	**9.741.950.882**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Presentasi Kualitas Penataushaan dan Pertanggungjawaban keuangan**	**100 %**	**9.842.098.716**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	9.385.285.561	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	9.385.285.561	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	600 dokumen	342.157.421	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	600 dokumen	421.513.355	
	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13 Laporan	14.507.900	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13 Laporan	35.299.800	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Presentasi Barang Milik Daerah yang terdata**	**50%**	**16.897.045**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Presentasi Barang Milik Daerah yang terdata**	**50%**	**33.794.090**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	16.897.045	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	33.794.090	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**100 %**	**121.813.439**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**100 %**	**531.799.878**	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	48 Dokumen	15.099.939	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	48 Dokumen	30.199.878	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 dokumen	30.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	91.713.500	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	471.600.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**703.560.976**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**1.138.439.501**	
	Penyediaan Komponen Instalasi		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	24 Paket	2.394.536	Penyediaan Komponen Instalasi		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	24 Paket	2.394.536	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bangunan Kantor yang Disediakan			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bangunan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	126.357.614	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	126.357.614	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	308.323.678	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	425.696.201	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	13.476.375	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	26.952.750	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	724 Dokumen	3.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	724 Dokumen	3.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	196.883.773	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	458.538.400	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penataan arsip dinamis pada skpd	10 Dokumen	52.625.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penataan arsip dinamis pada skpd	10 Dokumen	95.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Jumlah Aset yang tersedia dalam keadaan baik**	**100 %**	**104.028.530**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Jumlah Aset yang tersedia dalam keadaan baik**	**100 %**	**108.906.530**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	91.716.780	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	96.594.780	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	12.311.750	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	12.311.750	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**PROGRAM PENATAAN DESA**		**Persentase Desa yang memiliki Perbup Batas Desa**	**4 %**	**73.096.113**	**PROGRAM PENATAAN DESA**		**Persentase Desa yang memiliki Perbup Batas Desa**	**4 %**	**531.936.488**	
	Penyelenggaraan Penataan Desa		**Presentase Desa yang batas desanya ditetapkan**	**15 %**	**73.096.113**	**Penyelenggaraan Penataan Desa**		**Presentase Desa yang batas desanya ditetapkan**	**15 %**	**531.936.488**	
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	3.450.000	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	188.331.172	
	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	1 Desa	3.450.000	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	1 Desa	153.661.172	
	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat		Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	14.128.750	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat		Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	28.257.500	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	52.067.363	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	161.686.644	
3	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**		**Persentase kerjasama desa yang telah ditindaklanjuti**	**95 %**	**105.263.115**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**		**Persentase kerjasama desa yang telah ditindaklanjuti**	**95 %**	**222.689.900**	
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa		**Persentase Kawasan Desa yang terbentuk**	**7,91 %**	**105.263.115**	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**		**Persentase Kawasan Desa yang terbentuk**	**7,91 %**	**222.689.900**	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	105.263.115	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	222.689.900	
4	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		**Presentasi LHP Desa yang selesai ditindaklanjuti**	**100 %**	**5.617.669.948**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		**Presentasi LHP Desa yang selesai ditindaklanjuti**	**100 %**	**9.567.227.094**	
	Pembinaan dan Pengawasan		**Persentase Desa memiliki adminitrasi**	**85 %**	**5.617.669.948**	**Pembinaan dan Pengawasan**		**Persentase Desa memiliki adminitrasi**	**85 %**	**9.567.227.094**	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		**dan laporan desa yang berkualitas**			**Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**		**dan laporan desa yang berkualitas**			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	21 Desa	3.115.242.770	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	21 Desa	2.968.731.640	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	8 Dokumen	28.957.829	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	8 Dokumen	129.444.658	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	139 dokumen	143.625.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	139 dokumen	796.567.600	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	139 Dokumen	383.340.692	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	139 Dokumen	773.065.098	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	40 Orang	491.048.700	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	40 Orang	757.828.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 Laporan	95.781.955	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 Laporan	196.630.455	
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	3 Dokumen	146.650.175	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	3 Dokumen	348.692.450	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja	10 dokumen	222.477.634	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja	10 dokumen	532.011.634	
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian	1 Laporan	203.617.902	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian	1 Laporan	597.798.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 laporan	10.325.000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 laporan	20.650.000	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		Jumlah Dokumen Profil Desa	139 Dokumen	81.513.514	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		Jumlah Dokumen Profil Desa	139 Dokumen	120.087.172	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	139 Dokumen	229.575.410	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	139 Dokumen	599.830.135	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	40 Orang	143.550.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	40 Orang	451.677.000	
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	5 desa	144.769.975	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	5 desa	567.931.274	
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	139 laporan	14.580.000	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	139 laporan	29.160.000	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	9 dokumen	162.613.392	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	9 dokumen	677.121.978	
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**75 %**	**3.472.339.645**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**75 %**	**4.230.692.413**	
			Lembaga Adat Desa yang aktif	**60**				**Lembaga Adat Desa yang aktif**	**60**		
			Masyarakat Hukum Adat yang aktif	**2**				**Masyarakat Hukum Adat yang aktif**	**2**		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta		**Persentase Desa yang lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga Adatnya yang terfasilitasi**	**75 %**	**3.472.339.645**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta**		**Persentase Desa yang lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga Adatnya yang terfasilitasi**	**75 %**	**4.230.692.413**	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					**Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**					
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	118.413.256	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	2 dokumen	242.068.000	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 dokumen	278.933.916	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 dokumen	408.908.364	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 lembaga	94.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 lembaga	148.170.000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan	6 Dokumen	37.858.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan	6 Dokumen	75.716.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10 Laporan	431.152.196	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10 Laporan	820.538.400	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18 Laporan	70.440.128	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4 Laporan	93.749.500	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4 Dokumen	2.441.542.149	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4 Dokumen	2.441.542.149	

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa				**20.058.841.924**	**Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa**				**21.593.140.095**	**1.534.298.171**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**84**	**10.790.473.103**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**84**	**10.988.468.204**	**197.995.100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Presentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu**	**100 %**	**102.222.231**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Presentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu**	**100 %**	**143.787.965**	**41.565.734**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	76.931.942	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	112.675.722	35.743.780
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	5.778.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	11.599.954	5.821.954
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	19.512.289	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	19.512.289	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Presentasi Kualitas Penataushaan dan Pertanggungjawaban keuangan**	**100 %**	**9.741.950.882**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Presentasi Kualitas Penataushaan dan Pertanggungjawaban keuangan**	**100 %**	**9.749.893.304**	**7.942.422**

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	9.385.285.561	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	9.385.285.561	-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	600 dokumen	342.157.421	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	600 dokumen	347.597.355	5.439.934
	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13 Laporan	14.507.900	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13 Laporan	17.010.388	2.502.488
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Presentasi Barang Milik Daerah yang terdata**	**50%**	**16.897.045**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Presentasi Barang Milik Daerah yang terdata**	**50%**	**24.895.135**	**7.998.090**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	16.897.045	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	24.895.135	7.998.090
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**100 %**	**121.813.439**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**100 %**	**121.813.439**	**-**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	48 Dokumen	15.099.939	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	48 Dokumen	15.099.939	-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 dokumen	15.000.000	-

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	91.713.500	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	91.713.500	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**703.560.976**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**844.049.830**	**140.488.854**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	2.394.536	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	2.394.536	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	126.357.614	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	126.357.614	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	308.323.678	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	366.239.425	57.915.747
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	13.476.375	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	18.476.375	5.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	724 Dokumen	3.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	724 Dokumen	3.500.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	196.883.773	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	262.175.030	65.291.257
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penataan arsip dinamis pada skpd	10 Dokumen	52.625.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penataan arsip dinamis pada skpd	10 Dokumen	64.906.850	12.281.850

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Jumlah Aset yang tersedia dalam keadaan baik**	**100 %**	**104.028.530**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Jumlah Aset yang tersedia dalam keadaan baik**	**100 %**	**104.028.530**	**-**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	91.716.780	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	91.716.780	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	12.311.750	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	12.311.750	-
2	**PROGRAM PENATAAN DESA**		**Persentase Desa yang memiliki Perbup Batas Desa**	**4 %**	**73.096.113**	**PROGRAM PENATAAN DESA**		**Persentase Desa yang memiliki Perbup Batas Desa**	**4 %**	**175.836.482**	**102.740.369**
	Penyelenggaraan Penataan Desa		**Presentase Desa yang batas desanya ditetapkan**	**15 %**	**73.096.113**	**Penyelenggaraan Penataan Desa**		**Presentase Desa yang batas desanya ditetapkan**	**15 %**	**175.836.482**	**102.740.369**
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	3.450.000	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	22.539.172	19.089.172
	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	1 Desa	3.450.000	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	1 Desa	23.489.172	20.039.172
	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat		Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	14.128.750	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat		Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	30.177.018	16.048.268

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	52.067.363	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	99.631.120	47.563.757
3	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**		**Persentase kerjasama desa yang telah ditindaklanjuti**	**95 %**	**105.263.115**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**		**Persentase kerjasama desa yang telah ditindaklanjuti**	**95 %**	**141.417.683**	**36.154.568**
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa		**Persentase Kawasan Desa yang terbentuk**	**7,91 %**	**105.263.115**	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**		**Persentase Kawasan Desa yang terbentuk**	**7,91 %**	**141.417.683**	**36.154.568**
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	105.263.115	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	141.417.683	36.154.568
4	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		**Presentasi LHP Desa yang selesai ditindaklanjuti**	**100 %**	**5.617.669.948**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		**Presentasi LHP Desa yang selesai ditindaklanjuti**	**100 %**	**6.543.670.528**	**926.000.580**
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		**Persentase Desa memiliki adminitrasi dan laporan desa yang berkualitas**	**85 %**	**5.617.669.948**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**		**Persentase Desa memiliki adminitrasi dan laporan desa yang berkualitas**	**85 %**	**6.543.670.528**	**926.000.580**
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	21 Desa	3.115.242.770	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	21 Desa	2.659.243.640	455.999.130
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	8 Dokumen	28.957.829	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	8 Dokumen	55.881.588	26.923.759
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	139 dokumen	143.625.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	139 dokumen	618.625.100	475.000.100
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	139 Dokumen	383.340.692	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	139 Dokumen	569.953.692	186.613.000
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang	40 Orang	491.048.700	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang	40 Orang	638.098.700	147.050.000

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas					Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 Laporan	95.781.955	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 Laporan	111.334.455	15.552.500
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	3 Dokumen	146.650.175	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	3 Dokumen	180.684.009	34.033.834
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja	10 dokumen	222.477.634	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja	10 dokumen	289.929.124	67.451.490
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian	1 Laporan	203.617.902	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian	1 Laporan	327.808.000	124.190.098
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 laporan	10.325.000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 laporan	20.650.000	10.325.000
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		Jumlah Dokumen Profil Desa	139 Dokumen	81.513.514	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		Jumlah Dokumen Profil Desa	139 Dokumen	81.513.514	-
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	139 Dokumen	229.575.410	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	139 Dokumen	262.709.994	33.134.584
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	40 Orang	143.550.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	40 Orang	278.550.000	135.000.000
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	5 desa	144.769.975	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	5 desa	200.195.039	55.425.064

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	139 laporan	14.580.000	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	139 laporan	29.170.000	14.590.000
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	9 dokumen	162.613.392	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	9 dokumen	219.323.673	56.710.281
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**75 %**	**3.472.339.645**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**75 %**	**3.743.747.199**	**271.407.554**
			Lembaga Adat Desa yang aktif	**60**				**Lembaga Adat Desa yang aktif**	**60**		
			Masyarakat Hukum Adat yang aktif	**2**				**Masyarakat Hukum Adat yang aktif**	**2**		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Desa yang lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga Adatnya yang terfasilitasi**	**75 %**	**3.472.339.645**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Desa yang lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga Adatnya yang terfasilitasi**	**75 %**	**3.743.747.199**	**271.407.554**
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	118.413.256	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	2 dokumen	160.501.256	42.088.000
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan,	5 dokumen	278.933.916	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan,	5 dokumen	332.977.162	54.043.246

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 lembaga	94.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 lembaga	130.380.940	36.380.940
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6 Dokumen	37.858.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6 Dokumen	67.718.000	29.860.000
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10 Laporan	431.152.196	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10 Laporan	516.878.400	85.726.204

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ Berkurang
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18 Laporan	70.440.128	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18 Laporan	93.749.292	23.309.164
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4 Dokumen	2.441.542.149	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4 Dokumen	2.441.542.149	-

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Tanah Grogot, 22 Agustus 2025
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Drs. CHANDRA IRWANADHI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660731 198609 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS SOSIAL KABUPATEN PASER

TAHUN 2025

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata, maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial (Renja) ini dapat tersusun.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2021-2026 dan dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang selaras dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2025.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Paser tahun 2025 ini, semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat.

Tana Paser, 22 Agustus 2025

Kepala Dinas,

Ir. Hasanuddin, MM

Nip. 19670306 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
BAB. I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 3
1.2. Landasan Hukum 5
1.3. Maksud dan Tujuan 8
1.4. Sistematika Penulisan 9
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2022
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial 17
2.3. Faktor Pendorong dan Penghambat dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025 23
BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Tujuan dan Sasaran 25
3.2. Review Terhadapa Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 26
3.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025 41
BAB. IV PENUTUP
4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan 55
4.2. Rencana tindak lanjut 56

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Sosial, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi

Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal:
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Paser;
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025.
27. Keputusan Bupati Paser Nomor 100.3.3.2/KEP-741/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Sosial Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi

makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Sosial, proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Sosial, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Sosial, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2025

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2025 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan,

sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2025 yang disertai perubahan target

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja Dinas Sosial Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Paser
Periode Pelaksanaan : Triwulan I & II Tahun 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah mengacu pada sasaran RKPD :
1. Persentase PMKS target 15%
2. Nilai SAKIP dari APIP target BB (70,20%)

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s.d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d RENJA PD Tahun Lalu (2022 s.d 2024)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 yang dievaluasi)			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Capaian (Kinerja) dan Anggaran RENSTRA PD Tahun 2021 s.d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Tahun 2021 s.d 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV							
1	2	3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = (8+9+10+11)		13 = (6+12)		14 = (13/5)*100		15
				K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
1.	**Meningkatnya kualitas dan kepuasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinsos**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan sekretariat**	**80**	**%**	**36.661.133.637**	**74**	**18.889.441.371**	**76**	**Persen**	**9.122.846.077**	**18,67**	**1.317.302.609**	**71,4**	**2.438.711.582**		-		-	**53,52**	**3.756.014.191**	**74**	**22.645.455.562**	**77,00**	**61,77**	**Sekretariat**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**771.451.001**	**100**	**556.037.253**	**100**	**Persen**	**120.788.798**	**22,22**	**8.886.900**	**44,4**	**20.742.400**	**0,0**	-	**0,0**	-	**66,67**	**29.629.300**	**100**	**585.666.553**	**100,00**	**75,92**	**Sekretariat**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen	375.691.101	9	262.381.690	3	Dokumen	79.362.447	1	-	1	17.787.400	0	-	-	-	2	17.787.400	11	280.169.090	73,33	74,57	Sekretariat
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	29.250.000	3	19.014.100	1	Dokumen	750.000	0	-	1	-	0	-	-	-	1	-	4	19.014.100	80,00	65,01	Sekretariat
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	26.250.000	3	8.150.400	1	Dokumen	750.000	0	-	1	-	0	-	-	-	1	-	4	8.150.400	80,00	31,05	Sekretariat
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	29.020.900	3	8.051.500	1	Dokumen	750.000	0	-	1	-	0	-	-	-	1	-	4	8.051.500	80,00	27,74	Sekretariat
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	25.250.000	3	6.615.600	1	Dokumen	750.000	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	3	6.615.600	60,00	26,20	Sekretariat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	128.384.500	3	93.491.971	1	Laporan	10.000.000	1	-	0	2.955.000	0	-	-	-	1	2.955.000	4	96.446.971	80,00	75,12	Sekretariat
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	157.604.500	3	158.331.992	1	Laporan	28.426.351	0	8.886.900	0	-	0	-	-	-	-	8.886.900	3	167.218.892	60,00	106,10	Sekretariat
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**%**	**31.214.432.933**	**100**	**15.689.520.954**	**100**	**Persen**	**8.211.016.829**	**71,11**	**1.183.547.700**	**172,59**	**2.225.935.753**		-		-	**60,93**	**3.409.483.453**	**100**	**19.099.004.407**	**100,00**	**61,19**	**Sekretariat**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yg diterima oleh ASN: ((24 orang PNS x 4 bulan penggajian untuk data Januari - Maret (ditambah THR), (56 Orang PNS & P3K x 1 bulan penggajian untuk data April) dan (58 Orang PNS, P3K & CPNS x 9 bulan penggajian untuk data di bulan Mei - Desember (ditambah gaji 13))) (Total 674 kali Penggajian Selama Setahun)	160	Orang	30.732.182.933	102	15.473.884.425	33	Orang / bulan	8.150.219.424	96	1.169.942.294	230	2.197.469.614		-		-	326	3.367.411.908	428	18.841.296.333	267,50	61,31	Sekretariat
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dokumen	244.750.000	3	86.881.989	1	Dokumen	24.250.736	0	7.020.000	1	7.020.000	-	-	-	-	1	14.040.000	4	100.921.989	80,00	41,23	Sekretariat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	237.500.000	3	115.456.140	1	Laporan	25.581.771	0	-	1	14.860.733	-	-	-	-	1	14.860.733	4	130.316.873	80,00	54,87	Sekretariat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Laporan	36.302.575	3	34.288.398	1	Laporan	10.964.898	0	6.585.406	1	6.585.406	-	-	-	-	1	13.170.812	4	47.459.210	80,00	130,73	Sekretariat
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlayani**	**100**	**%**	**1.692.320.393**	**100**	**1.207.493.760**	**100**	**Persen**	**296.316.153**	**0,00**	**17.699.700**	**40,0**	**57.140.907**	**0,0**	-	**0,0**	-	**40,00**	**74.840.607**	**100**	**1.282.334.367**	**100,00**	**75,77**	**Sekretariat**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	Paket	10.420.000	3	3.855.000	1	Paket	1.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	3	3.855.000	15,00	37,00	Sekretariat
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	127.000.000	24	231.704.850	16	Paket	126.617.033	0	-	5	-	0	-	0	-	5	-	29	231.704.850	241,67	182,44	Sekretariat
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket	179.806.450	5	128.035.900	1	Paket	35.643.120	0	-	1	14.820.000	0	-	0	-	1	14.820.000	6	142.855.900	75,00	79,45	Sekretariat
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	Paket	103.656.000	3	41.160.300	1	Paket	3.100.000	0	-	1	3.083.000	0	-	0	-	1	3.083.000	4	44.243.300	25,00	42,68	Sekretariat
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Laporan	1.271.437.943	100	802.737.710	1	Laporan	129.956.000	0	17.699.700	1	39.237.907	0	-	0	-	1	56.937.607	100	859.675.317	2.000,00	67,61	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi**	**100**	**%**	**2.679.125.160**	**100**	**1.271.299.462**	**100**	**Persen**	**434.407.297**	**0,00**	**107.168.309**	**66,67**	**116.071.522**	**0,0**	-	**0,0**	-	**66,67**	**223.239.831**	**100**	**1.494.539.293**	**100,00**	**55,78**	**Sekretariat**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Laporan	12.500.000	3	4.970.000	1	Laporan	1.000.000	0	-	1	1.000.000	0	-	0	-	1	1.000.000	4	5.970.000	80,00	47,76	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10	Laporan	163.168.040	3	42.169.101	1	Laporan	46.399.647	0	4.380.913	0	6.134.126	0	-	0	-	-	10.515.039	3	52.684.140	30,00	32,29	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10	Laporan	2.503.457.120	3	1.224.160.361	1	Laporan	387.007.650	0	102.787.396	1	108.937.396	0	-	0	-	1	211.724.792	4	1.435.885.153	40,00	57,36	Sekretariat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100**	**%**	**303.804.150**	**100**	**165.089.942**	**100**	**Persen**	**60.317.000**	**0,00**	-	**33,33**	**18.821.000**	**0,0**	-	**0,0**	-	**33,33**	**18.821.000**	**100**	**183.910.942**	**100,00**	**60,54**	**Sekretariat**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	Unit	247.681.950	20	142.588.942	6	Unit	54.477.000	0	-	2	18.231.000	0	-	0	-	2	18.231.000	22	160.819.942	73,33	64,93	Sekretariat
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang di pelihara	40	Unit	56.122.200	23	22.501.000	6	Unit	5.840.000	0	-	2	590.000	0	-	0	-	2	590.000	25	23.091.000	62,50	41,14	Sekretariat
2.	**Meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan sosial**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial**	**100**	**%**	**1.296.636.654**	**100**	**1.228.252.119**	**100**	**%**	**308.180.207**	**0,00**	**47.356.800**	**8,33**	**20.725.960**	**0,0**	-	**0,0**	-	**8,33**	**68.082.760**	**100**	**1.296.334.879**	**100,00**	**99,98**	**Bid. Pemsos**
		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	**Persentase komunitas adat terpencil yang mendapatkan pemberdayaan dan bimbingan**	**100**	**%**	**583.183.259**	**100**	**291.163.600**	**100**	**%**	**117.244.756**	**0,00**	**9.200.000**	**0**	**15.417.960**	**0**	-	**0**	-	-	**24.617.960**	**100**	**315.781.560**	**100,00**	**54,15**	**Bid. Pemsos**
		Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	43	Keluarga	445.182.207	26	215.553.600	20	Keluarga	109.746.472	0	9.200.000	0	15.417.960	0	-	0	-	-	24.617.960	26	240.171.560	60,47	53,95	Bid. Pemsos
		Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	48	Keluarga	138.001.052	60	75.610.000	43	Keluarga	7.498.284	0	-	0	-	0	-	0	-			60	75.610.000	125,00	54,79	Bid. Pemsos
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase penerbitan izin undian gratis dan pengumpulan sumbangan**	**100**	**Org**	**199.002.052**	**100**	**229.126.604**	**100**	**%**	**51.807.448**	**0,00**	**20.387.600**	**25**	-	**0**	-	**0**	-	**25,00**	20.387.600	**100**	**249.514.204**	**100,00**	**125,38**	**Bid. Pemsos**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10	Dokumen	199.002.052	6	229.126.604	6	Dokumen	51.807.448	0	20.387.600	1	-	0	-	0	-	1	20.387.600	7	249.514.204	70,00	125,38	Bid. Pemsos
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan bimbingan atau pelatihan**	**100**	**%**	**514.451.343**	**100**	**707.961.915**	**100**	**%**	**139.128.003**	**0,00**	**17.769.200**	**0**	**5.308.000**	**0,00**	-	**0**	-	-	23.077.200	**100**	**731.039.115**	**100,00**	**142,10**	**Bid. Pemsos**
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Org	182.046.424	42	147.858.304	15	Orang	8.685.753	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	42	147.858.304	42,00	81,22	Bid. Pemsos
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Org	199.658.991	30	270.580.300	10	Orang	83.117.400	0	8.569.200	0	3.364.000	0	-	0	-	-	1	30	270.580.301	60,00	135,52	Bid. Pemsos

		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupatèh/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Lembaga	132.745.928	100	289.523.311	20	Lembaga	47.324.850	0	9.200.000	0	1.944.000	0	-	0	-	-	2	100	289.523.313	166,67	218,10	Bid. Pemsos
3.	**Meningkatnya cakupan layanan rehabilitasi sosialterhadap PMKS**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial**	**100**	**%**	**2.412.729.108,00**	**100**	**2.279.124.199**	**100**	**%**	**1.241.916.146**	**6,51**	**47.567.519**	**8,10**	**22.915.527**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**14,61**	**70.483.046**	**100**	**2.349.607.245**	**100**	**97,38**	**Bid. Rehsos**
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100**	**%**	**1.327.501.336,00**	**100**	**1.681.563.473**	**100**	**%**	**1.121.445.280**	**8,58**	**23.820.319**	**5,08**	**14.310.727**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**13,67**	38.131.046	**100**	**1.719.694.519**	**100,00**	**129,54**	**Bid. Rehsos**
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	8	Org	351.097.198	496	261.235.367	90	Orang	119.050.400	5	-	3	-	0	-	0	-	8	-	504	261.235.367	6.300,00	74,41	Bid. Rehsos
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	27	Org	66.500.000	90	38.250.000	120	Orang	75.097.500	0	-	0	-		-	0	-	-	-	90	38.250.000	333,33	57,52	Bid. Rehsos
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	141	Org	723.749.138	178	688.689.367	79	Orang	196.677.880	0	9.200.000	1	-	0	-	0	-	1	9.200.000	179	697.889.367	126,95	96,43	Bid. Rehsos
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewehangan Kabupaten/Kota	25	Org	47.500.000	10	9.758.000	46	Orang	70.188.500	5	14.620.319	6	13.790.727	0	-	0	-	11	28.411.046	21	38.169.046	84,00	80,36	Bid. Rehsos
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	42	Org	57.800.000	85	211.679.070	10	Orang	8.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	85	211.679.070	202,38	366,23	Bid. Rehsos
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Org	80.855.000	130	78.133.226	10	Orang	5.325.000	0	-	0	520.000	0	-	0	-	-	520.000	130	78.653.226	260,00	97,28	Bid. Rehsos
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Org	25.000.000	18	8.836.000	8	Orang	2.500.000	3	-	2	-	0	-	0	-	5	-	23	8.836.000	191,67	35,34	Bid. Rehsos
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Org	40.000.000	10	49.681.251	5	Orang	10.203.000	2	-	3	-	0	-	0	-	5	-	15	49.681.251	75,00	124,20	Bid. Rehsos
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	8	Org	20.000.000	900	170.707.093	500	Orang	71.197.000	48	-	12	-	0	-	0	-	60	-	960	170.707.093	12.000,00	853,54	Bid. Rehsos
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewehangan Kabupaten/Kota	12	Org	40.000.000	5	23.382.700	46	Orang	530.556.000	8	-	10	-	0	-	0	-	18	-	23	23.382.700	191,67	58,46	Bid. Rehsos
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewehangan Kabupaten/Kota	20	Org	62.500.000	15	80.954.297	15	Orang	15.200.000	7	-	7	-	0	-	0	-	14	-	29	80.954.297	145,00	129,53	Bid. Rehsos
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewehangan Kabupaten/Kota	13	Org	42.500.000	15	115.054.510	15	Orang	17.050.000	3	-	4	-	0	-	0	-	7	-	22	115.054.510	169,23	270,72	Bid. Rehsos
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100**	**%**	**1.085.227.772**	**100**	**597.560.726**	**100**	**%**	**120.470.866**	**4,44**	**23.747.200**	**11**	**8.604.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,56**	**32.352.000**	**100**	**629.912.726**	**100,00**	**58,04**	**Bid. Rehsos**
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota						20	Orang	23.435.760	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Bid. Rehsos
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	28	Org	222.944.652	16	62.581.928	3	Orang	11.060.106	1	2.500.000	0	-	0	-	0	-	1	2.500.000	17	65.081.928	60,71	29,19	Bid. Rehsos
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewehangan Kabupaten/Kota	50	Org	142.221.320	71	76.881.539	10	Orang	7.750.000	0	-	1	4.402.400	0	-	0	-	1	4.402.400	72	81.283.939	144,00	57,15	Bid. Rehsos
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	45	Org	116.100.000	42	66.092.000	6	Orang	9.500.000	1	1.900.000	2	4.202.400	0	-	0	-	3	6.102.400	45	72.194.400	100,00	62,18	Bid. Rehsos
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	85	Org	543.961.800	66	363.809.459	5	Orang	63.475.000	0	19.347.200	2	-	0	-	0	-	2	19.347.200	68	383.156.659	80,00	70,44	Bid. Rehsos
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5	Dokumen	60.000.000	3	28.195.800	1	Dokumen	5.250.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	3	28.195.800	60,00	46,99	Bid. Rehsos
4.	**Meningkatnya cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**100**	**%**	**3.518.663.126**	**100**	**3.667.629.506**	**100**	**%**	**667.388.410**	**12,50**	**41.098.000**	**75,30**	**25.921.400**	**0,00**	**-**	**0**	**-**	**87,80**	**67.019.400**	**100**	**3.734.648.906**	**100,00**	**106,14**	**Bid. Linjamsos**
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	**Persentase anak-anak terlantar yang dipelihara**	**100**	**%**	**693.882.048**	**100**	**351.770.866**	**100**	**%**	**110.088.300**	**25**	**9.200.000**	**51,00**	**13.674.000**	**0,00**	**-**	**0**	**-**	**76,00**	**22.874.000**	**100**	**374.644.866**	**100,00**	**53,99**	**Bid. Linjamsos**
		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Org	248.317.563	13	96.141.746	80	Orang	26.244.300	25	-	43	1.230.000	0	-	0	-	68	1.230.000	81	97.371.746	324,00	39,21	Bid. Linjamsos
		Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Org	233.250.153	13	158.749.220	10	Orang	65.764.000	0	9.200.000	4	12.444.000	0	-	0	-	4	21.644.000	17	180.393.220	68,00	77,34	Bid. Linjamsos
		Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Org	212.314.332	13	96.879.900	10	Orang	18.080.000	0	-	4	-	0	-	0	-	4	-	17	96.879.900	68,00	45,63	Bid. Linjamsos
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase data fakir miskin yang dikelola**	**100**	**%**	**2.824.781.078**	**100**	**3.315.858.640**	**100**	**%**	**557.300.110**	**0,00**	**31.898.000**	**99,59**	**12.247.400**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**99,59**	44.145.400	**100**	**3.360.004.040**	**100,00**	**118,95**	**Bid. Linjamsos**
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	39000	Org	424.392.248	6851	381.166.674	5000	Org	265.908.737	0	19.040.000	5000	3.306.000	0	-	0	-	5.000	22.346.000	11851	403.512.674	30,39	95,08	Bid. Linjamsos
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	8000	Keluarga	1.519.824.850	2601	998.818.546	1000	Keluarga	66.092.900	0	12.858.000	1000	6.175.400	0	-	0	-	1.000	19.033.400	3601	1.017.851.946	45,01	66,97	Bid. Linjamsos
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Keluarga	709.870.000	451	1.905.817.918	100	Keluarga	172.995.913	0	-	100	1.716.000	0	-	0	-	100	1.716.000	551	1.907.533.918	2.755,00	268,72	Bid. Linjamsos
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Org	170.693.980	5	30.055.502	25	Org	52.302.560	0	-	0	1.050.000	0	-	0	-	-	1.050.000	5	31.105.502	25,00	18,22	Bid. Linjamsos
5.	**Meningkatnya cakupan layanan penanganan bencana**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Cakupan Layanan Penanganan Bencana**	**100**	**%**	**2.255.907.501,00**	**100**	**1.571.513.938**	**100**	**%**	**638.809.071**	**9,71**	**56.117.300**	**84,26**	**7.548.300**	**0,00**	**-**	**0**	**-**	**93,98**	**63.665.600**	**100**	**1.635.179.538**	**100,00**	**72,48**	**Bid. Pen Ben**
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan**	**100**	**%**	**1.685.050.298**	**100**	**1.305.241.538**	**100**	**%**	**530.710.032**	**19,42**	**46.517.300**	**77,23**	**781.700**	**0,00**	**-**	**0**	**-**	**96,65**	**47.299.000**	**100**	**1.352.540.538**	**100,00**	**80,27**	**Bid. Pen Ben**
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	2200	Org	755.594.298	1065	558.031.900	550	Org	296.451.395	53	33.870.800	496	781.700	0	-	0	-	549	34.652.500	1614	592.684.400	73,36	78,44	Bid. Pen Ben
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	250	Org	728.678.000	245	411.576.142	150	Org	62.055.550	53	-	97	-	0	-	0	-	150	-	395	411.576.142	158,00	56,48	Bid. Pen Ben
		Penyediaan Tempat Penampung Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Unit	-	1	93.994.000	25	Unit	58.221.825	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1	93.994.000	50,00	-	Bid. Pen Ben
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Org	200.778.000	140	160.303.596	80	Org	27.131.762	21	-	59	-	0	-	0	-	80	-	220	160.303.596	440,00	79,84	Bid. Pen Ben
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Org	-	50	81.335.900	60	Org	86.849.500	41	12.646.500	16	-	0	-	0	-	57	12.646.500	107	93.982.400	1.070,00	-	Bid. Pen Ben
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kesiapsiagaan bencana**	**100**	**%**	**570.857.203**	**100**	**266.272.400**	**100**	**%**	**108.099.039**	**0,00**	**9.600.000**	**91,30**	**6.766.600**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**91,30**	**16.366.600**	**100**	**282.639.000**	**100,00**	**49,51**	**Bid. Pen Ben**
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	8	Kampung	190.364.740	3	121.574.100	3	Kampung	59.521.077	0	-	1	6.766.600	0	-	0	-	1	6.766.600	4	128.340.700	50,00	67,42	Bid. Pen Ben

		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	130	Org	380.492.463	100	144.698.300	20	Org	48.577.962	0	9.600.000	20	-	0	-	0	-	20	9.600.000	120	154.298.300	92,31	40,55	Bid. Pen Ben
6.	**Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**TMP Dalam Kondisi Baik**	**100**	**%**	**777.620.392**	**100**	**923.145.783**	**100**	**%**	**131.015.983**	**0,00**	**26.572.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**	**26.572.000**	**100**	**949.717.783**	**100,00**	**122,13**	**Bid. Pemsos**
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara**	**100**	**%**	**777.620.392**	**1**	**923.145.783**	**100**	**%**	**131.015.983**	**0,00**	**26.572.000**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**26.572.000**	**1**	**949.717.783**	**1,00**	**122,13**	**Bid. Pemsos**
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	60	Makam	777.620.392	24	923.145.783	12	Makam	131.015.983	0	26.572.000	0	-	0	-	0	-	-	26.572.000	1	949.717.783	1,67	122,13	Bid. Pemsos
													UPTD Pelkesos Dalam Sayang													
1.	**Meningkatnya kualitas dan kepuasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinsos**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan sekretariat**	**80**	**%**	**2.914.307.110**	**74**	**335.647.009**	**76**	**Persen**	**135.663.436**	**62,32**	**4.271.020**	**0**	**251.210**	**0**	**-**	**0**	**-**	**62,32**	**4.522.230**	**80**	**340.169.239**	**100,00**	**11,67**	**UPTD Pelkesos**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlayani**	**100**	**%**	**2.666.625.160**	**100**	**241.946.033**	**100**	**Persen**	**76.281.036**	**3333**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**3333**	**-**	**100**	**241.946.033**	**100,00**	**9,07**	**UPTD Pelkesos**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	Paket	163.168.040	3	45.461.933	1	Paket	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	3	45.461.933	15,00	27,86	UPTD Pelkesos
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket	2.503.457.120	3	196.484.100	1	Paket	66.281.036	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	3	196.484.100	37,50	7,85	UPTD Pelkesos
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi**	**100**	**%**	**163.168.040**	**100**	**84.505.545**	**100**	**%**	**16.382.400**	**100**	**4.271.020**	**0**	**251.210**	**0**	**-**	**0**	**-**	**100**	**4.522.230**	**200**	**89.027.775**	**200,00**	**54,56**	**UPTD Pelkesos**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10	Laporan	163.168.040	3	84.505.545	1	Laporan	16.382.400	1	4.271.020	0	251.210	0	-	0	-	1	4.522.230	4	89.027.775	40,00	54,56	UPTD Pelkesos
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100**	**%**	**247.681.950**	**100**	**57.969.947**	**100**	**100**	**43.000.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**100**	**57.969.947**	**100,00**	**23,40**	**UPTD Pelkesos**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	Unit	247.681.950	3	57.969.947	1	Unit	43.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	3	57.969.947	10,00	23,40	UPTD Pelkesos
2.	**Meningkatnya cakupan layanan rehabilitasi sosial terhadap PMKS**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Cakupan layanan rehabilitasi sosial**	**100**	**%**	**2.713.616.925**	**100**	**2.151.823.358**	**100**	**persen**	**919.417.388**	**47,83**	**189.810.000**	**43,48**	**2.528.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**91,30**	**192.338.000**	**100**	**2.344.161.358**	**100,00**	**86,39**	**UPTD Pelkesos**
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100**	**%**	**2.713.616.925**	**100**	**2.151.823.358**	**100**	**Persen**	**919.417.388**	**47,83**	**189.810.000**	**43,47826**	**2.528.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**91,30**	**192.338.000**	**100**	**2.344.161.358**	**100,00**	**86,39**	**UPTD Pelkesos**
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	40	Org	2.169.655.125	26	1.931.276.460	13	Org	884.417.388	3	189.810.000	10	-	0	-	0	-	13	189.810.000	39	2.121.086.450	97,50	97,76	UPTD Pelkesos
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	85	Org	543.961.800	35	220.546.908	10	Org	35.000.000	8	-	0	2.528.000	0	-	0	-	8	2.528.000	43	223.074.908	50,59	41,01	UPTD Pelkesos
											13.165.236.718										**4.248.697.227**		**35.295.274.510**			
																					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN			**97,13**	**82,24**	
																					PREDIKAT KINERJA PROGRAM			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
1. Dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegatan yang baik antara pimpinan dan bidang-bidang
3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Terbuka kesempatan untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat melalui berbagai bimbingan seperti penyuluhan/bimtek/sosialisasi/pelatihan

Faktor penghambat pencapaian kinerja :
1. Pihak Desa terkadang lama dalam pendataan warganya & Masih banyak desa yang belum memiliki tenaga PSM
2. Penanganan dan pelayanan terhadap PMKS terkadangkan kegagalan laporan dari masyarakat, sarpra PK, Rumah Sakit, dll
3. Pengadaan barang berupa mobil & Personal Computer mengalami kendala, karena unit mobil & Personal Computer yang dibutuhkan belum tersedia di dalam e-katalog, alternatif unit yang tersedia memiliki harga di atas pagu anggaran yang telah ditetapkan, sehingga belum dapat dilakukan proses pengadaan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :

Berdasarkan tabel hasil evaluasi Renja Dinas Sosial Kabupaten Paser diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 52,68 %, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.248.697.227,- (empat milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 13.165.236.718 (tiga belas milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) atau sebesar 32,27 %.
2. Rata-rata capaian kinerja program pada Dinas Sosial sebesar 51,48 % dengan predikat kinerja kurang
3. Capaian kinerja program yang melampaui target (>100%) = 0 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 3 Indikator capaian kinerja >50%-70% = 2 indikator capaian kinerja 0%-50% = 3 Indikator

Berdasarkan hasil evaluasi renja triwulan II diatas terdapat beberapa faktor penghambat tercapainya kinerja :

1. Pihak Desa terkadang lama dalam pendataan warganya & Masih banyak desa yang belum memiliki tenaga PSM
2. Penanganan dan pelayanan terhadap PMKS berdasarkan kejadian laporan dari masyarakat, Satpol PP, Rumah Sakit, dll.
3. Pengadaan barang berupa mobil, Alat Bantu & Personal Computer mengalami kendala, karena unit mobil & Personal Computer yang dibutuhkan belum tersedia di dalam e-katalog, alternatif unit yang tersedia memiliki harga di atas pagu anggaran yang telah ditetapkan, sehingga belum dapat dilakukan proses pengadaan.

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Paser, maka Dinas Sosial Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Sosial.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, maka Dinas Sosial Kabupaten Paser mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
2. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
3. Pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja sesuai dengan ketentuan;
4. Pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas sesuai dengan rencana kerja yang telah yang telah ditetapkkan guna pencapaian kinerja;
5. Penetapan standar operasioanal prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
6. Perumusan kebijakan di Bidang Sosial yang meliputi pemberdayaan social, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi social, perlindungan dan jaminan social, penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuagan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. Pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas sesuai ketentuan;
10. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan;
11. Pembinaan Jabatan Fungsional pada Dinas sesuai dengan kewenagan yang diberikan;
12. Pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
13. Pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;
14. Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintah di Bidang Sosial;
15. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui social penilaian yang tersedia sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
16. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Dinas Sosial adalah:

1. Rekomendasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
2. Rekomendasi undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang
3. Pemberian bantuan logistik bagi korban bencana alam dan social
4. Bantuan Transport Pemulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
5. Bantuan Sosial Terencana bagi Disabilitas
6. Bantuan Sosial Terencana bagi Anak melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
7. Bantuan Atensi bagi Lanjut Usia melalui LKS LU
8. Lanyanan Rujukan Anak Terlantar, Anak Berhadapan dengan

Hukum dan Anak yang Butuh Perlindungan Khusus

9. Bantuan Transport Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
10. Bantuan Pemakaman Orang Terlantar (OT)

Upaya Dinas Sosial dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Sosial
2. Persentase PMKS
3. Indeks reformasi birokrasi
4. Nilai SAKIP dari APIP

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Sosial terdapat dalam Tabel di bawah ini:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial sampai dengan Triwulan II Tahun 2025
Kabupaten Paser

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10*		*14*
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		V	25	17	16	15		12,71	14	
2	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	V		100	100	100	100	99,4	20,95	100	
3	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	V		100	100	100	100	100	20	100	
4	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhinya Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	V		100	100	100	100	98,7	19,95	100	
5	Persentase Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	V		100	100	100	100	88,7	54,10	100	
6	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah	V		100	100	100	100	100	99,82	100	
7	Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP		V	68	70, 10	70,10	70, 20	69,76		80,01	

Berdasarkan Tabel di atas, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan kualitas layanan sosial” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Sosial” mencapai target, dimana realisasinya sebesar 83,07% dari target sebesar 89% dengan capaian kinerja sebesar 93,34%;
b. Sasaran “Meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan social” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase PMKS”, dimana realisasinya sebesar 12,71% dari target sebesar 15 % dengan capaian kinerja sebesar 84,73 %.

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 51,48% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Paser Periode Juni 2025 :

1. Komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan target kinerja yang telah direncanakan dapat tercapai.
2. Dukungan anggaran dan sarana serta sarana prasarana yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan bidang sosial.
3. Peran serta masyarakat, dunia usaha dan stakeholder terkait.
4. Dukungan Regulasi Pusat dan Daerah.
5. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja, penetapan anggaran kas sehingga target kinerja dapat di capai sesuai harapan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Letak geografis, Kabupaten Paser dibeberapa daerah desa pedalaman yang jauh dari pusat-pusat Kecamatan dan Kabupaten sulit dijangkau sehingga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani oleh Dinas Sosial yang datang dan yang mengajukan permohonan serta yang diantar oleh pihak lain ke dinas
2. Pihak Desa terkadang lama dalam pendataan warganya & Masih banyak desa yang belum memiliki tenaga PSM
3. Penanganan dan pelayanan terhadap PMKS berdasarkan kejadian laporan dari masyarakat, Satpol PP, Rumah Sakit, dll.
4. Pengadaan barang berupa mobil, Alat Bantu & Personal Computer mengalami kendala, karena unit mobil & Personal Computer yang dibutuhkan belum tersedia di dalam e-katalog, alternatif unit yang tersedia memiliki harga di atas pagu anggaran yang telah ditetapkan, sehingga belum dapat dilakukan proses pengadaan.
5. Konvergensi penanganan kemiskinan lintas sektoral belum optimal
6. Belum optimalnya pemahaman regulasi tentang penanganan PPKS

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2025.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang sosial perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Paser

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas layanan sosial	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Sosial		89 %	89 %
Sasaran: 1. Meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS	$\frac{\text{Jumlah PMKS}}{\text{Jumlah Penduduk Kab Paser}}$ X 100%	15 %	15 %
Tujuan 2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang reponsif dan tangkas	Indeks reformasi birokrasi		75 %	75 %
Sasaran 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP dari APIP	Hasil Evaluasi SAKIP	BB (70,20)	BB (70,20)

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Paser Tahun 2025 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025, hal ini dikarenakan melihat realisasi hasil pencapaian kinerja tahun 2024 dan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 yaitu ““PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DI SELURUH KABUPATEN PASER”” yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Sosial mendukung pencapaian sasaran ke 10, yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Sosial telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen R Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 3.2.
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial
Kabupaten Paser Tahun 2025

No	Kode Rekening	Murni Tahun 2025				Rancangan Perubahan Tahun 2025				Bertambah/ Berkurang
		Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**14.276.232.505**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**15.159.264.154**	**883.031.649**
	1.06.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**13.177.888.257**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**1.404.1264.047**	**863.375.790**
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan sekretariat**	**76%**	**9.477.959.457**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan sekretariat**	**76%**	**9.799.328.063**	**321.368.606**
	1.06.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**100%**	**250.104.379**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**100%**	**195.092.798**	**(55.011.581)**
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	167.251.678	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	131.342.447	(35.909.231)
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	750.000	(750.000)

	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	750.000	(750.000)
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	750.000	(750.000)
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	750.000	(750.000)
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	19.756.000	(244.000)
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	56.852.701	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	40.994.351	(15.858.350)
	1.06.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**8.248.719.424**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**8.645.651.210**	396.931.786

	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	8.150.219.424	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	8.576.644.840	426.425.416
	1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan	25.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan	28.930.736	3.930.736
	1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	61.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	28.930.736	(32.069.264)
	1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	12.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	11.144.898	(1.355.102)
	1.06.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlayani**	**100%**	**444.992.850**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlayani**	**100%**	**449.124.912**	4.132.062
	1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	1.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	1.000.000	-
	1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	127.210.750	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	126.617.033	(593.717)
	1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket	50.582.100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket	45.307.879	(5.274.221)
	1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.200.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.200.000	-

	1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	260.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	270.000.000	10.000.000
	1.06.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi**	**100%**	**473.562.804**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi**	**100%**	**449.142.143**	(24.420.661)
	1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000	-
	1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	46.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	46.399.647	(353)
	1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	426.162.804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	401.742.496	(24.420.308)
	1.06.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100%**	**60.580.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100%**	**60.317.000**	(263.000)
	1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	54.580.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	54.477.000	(103.000)
	1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang di pelihara	6 Unit	6.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang di pelihara	6 Unit	5.840.000	(160.000)
2.	**1 06 02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial**	**100%**	**384.562.270**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial**	**100%**	**400.431.569**	15.869.299

	1 06 02 2.01	**Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	**Persentase komunitas adat terpencil yang mendapatkan pemberdayaan dan bimbingan**	**100%**	**144.201.370**	**Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	**Persentase komunitas adat terpencil yang mendapatkan pemberdayaan dan bimbingan**		**160.241.370**	16.040.000
	1 06 02 2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas	20 Keluarga	131.004.800	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan	20 Keluarga	131.004.800	-
	1 06 02 2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Keluarga	13.196.570	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Keluarga	29.236.570	16.040.000
	1 06 02 2.02	**Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penerbitan izin undian gratis dan pengumpulan sumbangan**	**100%**	**59.771.200**	**Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penerbitan izin undian gratis dan pengumpulan sumbangan**	**100%**	**59.771.200**	-
	1 06 02 2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	6 dokumen	59.771.200	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	6 dokumen	59.771.200	-
	1 06 02 2.03	**Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan bimbingan atau pelatihan**	**100%**	**180.589.700**	**Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan bimbingan atau pelatihan**	**100%**	**180.418.999**	(170.701)
	1 06 02 2.03 0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	28.303.200	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	28.303.200	-

	1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	89.836.800	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	89.677.400	(159.400)
	1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Lembaga	62.449.700	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Lembaga	62.438.399	(11.301)
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial**	**100%**	**1.484.739.880**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial**	**100%**	**1.655.755.564**	171.015.684
	1.06.04.2.01	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**		**1.321.389.880**	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan**		**1.520.284.698**	198.894.818
	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	90 orang	134.262.000	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	99 orang	137.998.210	3.736.210

	1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	120 orang	84.322.000	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	120 orang	88.362.545	4.040.545
	1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	79 orang	216.276.880	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	90 orang	411.661.426	195.384.546
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	46 Orang	134.377.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	87.264.500	(47.112.500)
	1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	11.500.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	11.293.800	(206.200)
	1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	9.750.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	23.570.500	13.820.500

	1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	umlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	5.000.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	umlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	16.162.000	11.162.000
	1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	16.397.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	6 orang	37.066.500	20.669.500
	1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 orang	82.105.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 orang	81.729.217	(375.783)
	1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	6 Orang	568.500.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	6 Orang	568.500.000	-
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	30.400.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	13 orang	26.362.000	(4.038.000)
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	28.500.000	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	30.314.000	1.814.000

	1.06.04.2.02	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100%**	**163.350.000**	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100%**	**135.470.866**	(27.879.134)
	1.06.04.2.02.06.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	30.000.000	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	20 Orang	23.435.760	(6.564.240)
	1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	12.000.000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	11.060.106	(939.894)
	1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	13.500.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7.750.000	(5.750.000)
	1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	14.500.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	9.500.000	(5.000.000)

	1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	82.850.000	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	63.475.000	(19.375.000)
	1.06.04.2.02.14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.500.000	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.250.000	9.750.000
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**100%**	**881.864.700**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**100%**	**868.077.071**	(13.787.629)
	1.06.05.2.01	**Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Persentase anak-anak terlantar yang dipelihara**	**100%**	**172.976.600**	**Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Persentase anak-anak terlantar yang dipelihara**	**100%**	**131.006.300**	(41.970.300)
	1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	52.488.600	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	47.162.300	(5.326.300)
	1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	84.328.000	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	65.764.000	(18.564.000)
	1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	36.160.000	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	18.080.000	(18.080.000)
	1.06.05.2.02	**Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase data fakir miskin yang dikelola**	**100%**	**708.888.100**	**Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase data fakir miskin yang dikelola**	**100%**	**737.070.771**	28.182.671

	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	5000 orang	291.007.475	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	5000 orang	293.076.738	2.069.263
	1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1000 Keluarga	132.185.800	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1000 Keluarga	145.752.807	13.567.007
	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Keluarga	218.043.825	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 keluarga	221.877.926	3.834.101
	1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	67.651.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	76.363.300	8.712.300
5.	**1.06.06.**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Cakupan Layanan Penanganan Bencana**	**100%**	**790.851.250**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Cakupan Layanan Penanganan Bencana**	**100%**	**935,160,251**	144.309.001
	1.06.06.2.01	**Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan**	**100%**	**642.251.250**	**Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan**	**100%**	**642.251.250**	-
	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	550 orang	339.516.250	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	550 orang	339.516.250	-

	1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	86.370.500	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	86.370.500	-
	1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampung Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	25 unit	102.060.000	Penyediaan Tempat Penampung Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	25 unit	102.060.000	-
	1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	27.455.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	27.455.000	-
	1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	86.849.500	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	86.849.500	-
	1.06.06.2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kesiapsiagaan bencana**	**100%**	**148.600.000**	**Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kesiapsiagaan bencana**	**100%**	**292.909.001**	144.309.001

	1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	100.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	90.828.039	(9171961)
	1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	36 orang	48.600.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	36 orang	202.080.962	153.480.962
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**TMP Dalam Kondisi Baik**	**100%**	**157.910.700**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**TMP Dalam Kondisi Baik**	**100%**	**382.511.529**	224.600.829
	1.06.07.2.01	**Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara**	**100%**	**157.910.700**	**Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara**	**100%**	**382.511.529**	224.600.829
	1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada	12 Makam	157.910.700	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya	12 Makam	382.511.529	224.600.829
	UPTD PELKESOS BULAU SAYANG				**1.098.344.248**				**1.118.000.107**	**19.655.859**
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan sekretariat**	**76%**	**138.984.360**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan sekretariat**	**76%**	**158.640.219**	**19.655.859**
	1.06.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlayani**	**100%**	**79.600.000**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlayani**	**100%**	**107.842.816**	**28.242.816**

	1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	-
	1.06.01.2.06.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	69.600.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	97.842.816	28.242.816
	1.06.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi**	**100%**	**16.384.360**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi**	**100%**	**16.384.360**	-
	1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	16.384.360	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	16.384.360	-
	1.06.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100%**	**43.000.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100%**	**34.413.043**	(8.586.957)
	1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	43.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	34.413.043	(8.586.957)

2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial**	**100%**	**959.359.888**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial**	**100%**	**959.359.888**	-
	1.06.04.2.02	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100%**	**959.359.888**	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100%**	**959.359.888**	-
	1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang	889.359.888	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang	889.359.888	-
	1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	70.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	70.000.000	-

Berdasarkan tabel 3.2. diatas, berikut alasan penambahan anggaran perubahan tahun 2025 :

- Dinas Sosial salah satu perangkat daerah yang masuk urusan wajib pelayanan dasar, dimana tugas Dinas Sosial sebagai pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya penyandang disabilitas ada yang mengajukan permohonan bantuan alat bantu kaki palsu;
- Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya orang terlantar yang membutuhkan bantuan BPJS;
- Karena sangat mendesak diperlukan segera sebagai tindak lanjut usulan Pahlawan Nasional dan pemberkasan di tahun ini;
- untuk memenuhi kekurangan anggaran pendukung kegiatan kampung siaga bencana agar dapat terlaksana sesuai target;

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.3.
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial
Kabupaten Paser Tahun 2025

No	Kode Rekening	Murni Tahun 2025				Rancangan Perubahan Tahun 2025				Bertambah/ Berkurang
		Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**14.276.232.505**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**14.006.230.254**	(270.002.251)
	1.06.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**13.177.888.257**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			12.888.149.430	(289.738.827)
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan sekretariat**	**76%**	**9.477.959.457**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan sekretariat**	**76%**	9.241.600.077	(236.359.380)
	1.06.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**100%**	**250.104.379**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**100%**	131.762.798	**(55.011.581)**
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	167.251.678	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	90.336.447	(76.915.231)
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	750.000	(750.000)

	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	750.000	(750.000)
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	750.000	(750.000)
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	750.000	(750.000)
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10.000.000	(10.000.000)
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	56.852.701	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	28.426.351	(28.426.350)
	1.06.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**8.248.719.424**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	8.215.696.829	(33.022.595)

	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	8.150.219.424	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	8.150.219.424	-
	1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan	25.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	28.930.736	(3.930.736)
	1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	61.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.581.771	(35.418.229)
	1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	12.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	10.964.898	(1.535.102)
	1.06.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlayani**	**100%**	**444.992.850**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlayani**	**100%**	399.416.153	(45.576.697)
	1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	1.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	1.000.000	-
	1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	127.210.750	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	126.617.033	(593.717)
	1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket	50.582.100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket	35.643.120	(14.938.980)
	1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.200.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.200.000	-

	1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	260.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	229.956.000	(30.044.000)
	1.06.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi**	**100%**	**473.562.804**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi**	**100%**	434.407.297	(39.155.507)
	1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000	-
	1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	46.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	46.399.647	(353)
	1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	426.162.804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	387.007.650	(39.155.154)
	1.06.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100%**	**60.580.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100%**	**60.317.000**	(263.000)
	1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	54.580.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	54.477.000	(103.000)
	1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang di pelihara	6 Unit	6.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang di pelihara	6 Unit	5.840.000	(160.000)
2.	**1 06 02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial**	**100%**	**384.562.270**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial**	**100%**	**343.962.684**	(40.599.586)

	1 06 02 2.01	**Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	**Persentase komunitas adat terpencil yang mendapatkan pemberdayaan dan bimbingan**	**100%**	**144.201.370**	**Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	**Persentase komunitas adat terpencil yang mendapatkan pemberdayaan dan bimbingan**		127.261.034	(16.940.336)
	1 06 02 2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas	20 Keluarga	131.004.800	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan	20 Keluarga	114.964.464	(16.040.336)
	1 06 02 2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Keluarga	13.196.570	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Keluarga	12.296.570	(900.000)
	1 06 02 2.02	**Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penerbitan izin undian gratis dan pengumpulan sumbangan**	**100%**	**59.771.200**	**Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penerbitan izin undian gratis dan pengumpulan sumbangan**	**100%**	**53.943.200**	(5.828.000)
	1 06 02 2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	6 dokumen	59.771.200	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	6 dokumen	53.943.200	(5.828.000)
	1 06 02 2.03	**Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan bimbingan atau pelatihan**	**100%**	**180.589.700**	**Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan bimbingan atau pelatihan**	**100%**	**162.758.450**	(17.831.250)
	1 06 02 2.03 0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	28.303.200	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	10.269.200	(18.034.000)

	1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	89.836.800	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	94.279.400	4.442.600
	1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Lembaga	62.449.700	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Lembaga	58.209.850	(4.239.850)
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial**	**100%**	**1.484.739.880**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial**	**100%**	**1.545.758.442**	64.500.000
	1.06.04.2.01	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**		**1.321.389.880**	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan**	100%	**1.410.287.576**	88.897.696
	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	90 orang	134.262.000	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	90 orang	133.163.600	(1.098.400)

	1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	120 orang	84.322.000	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	120 orang	82.135.500	(2.186.500)
	1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	79 orang	216.276.880	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	90 orang	409.929.426	193.652.546
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	46 Orang	134.377.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	46 Orang	85.188.500	(49.188.500)
	1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	11.500.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	11.293.800	(206.200)
	1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	9.750.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	9.361.500	(388.500)

	1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	umlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	5.000.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	umlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	5.010.000	10.000
	1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	16.397.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	21.047.500	4.650.500
	1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 orang	82.105.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 orang	75.449.750	(6.655.250)
	1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	46 Orang	568.500.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	46 Orang	532.198.000	(36.302.000)
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	30.400.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	15.200.000	(15.200.000)
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	28.500.000	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	30.310.000	1.810.000

	1.06.04.2.02	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100%**	**163.350.000**	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100%**	**135.470.866**	(27.879.134)
	1.06.04.2.02.06.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	30.000.000	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	20 Orang	23.435.760	(6.564.240)
	1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	12.000.000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	11.060.106	(939.894)
	1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	13.500.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7.750.000	(5.750.000)
	1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	14.500.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	9.500.000	(5.000.000)

	1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	82.850.000	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	63.475.000	(19.375.000)
	1.06.04.2.02.14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.500.000	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.250.000	9.750.000
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**100%**	**881.864.700**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**100%**	**721.181.627**	(160.683.073)
	1.06.05.2.01	**Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Persentase anak-anak terlantar yang dipelihara**	**100%**	**172.976.600**	**Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Persentase anak-anak terlantar yang dipelihara**	**100%**	**120.088.300**	(52.888.300)
	1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	52.488.600	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	36.244.300	(16.244.300)
	1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	84.328.000	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	65.764.000	(18.564.000)
	1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	36.160.000	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	18.080.000	(18.080.000)
	1.06.05.2.02	**Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase data fakir miskin yang dikelola**	**100%**	**708.888.100**	**Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase data fakir miskin yang dikelola**	**100%**	**601.093.327**	(107.794.773)

	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	5000 orang	291.007.475	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	5000 orang	265.908.737	(25.098.738)
	1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1000 Keluarga	132.185.800	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1000 Keluarga	88.342.900	(43.842.900)
	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Keluarga	218.043.825	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 keluarga	194.539.130	(23.504.695)
	1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	67.651.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	52.302.560	(15.348.440)
5.	**1.06.06.**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Cakupan Layanan Penanganan Bencana**	**100%**	**790.851.250**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Cakupan Layanan Penanganan Bencana**	**100%**	**733.165.071**	(57.686.179)
	1.06.06.2.01	**Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan**	**100%**	**642.251.250**	**Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan**	**100%**	**563.164.032**	(79.087.218)
	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	550 orang	339.516.250	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	550 orang	323.905.395	(15.610.855)

	1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	86.370.500	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	62.055.550	(24.314.950)
	1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampung Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	6 unit	102.060.000	Penyediaan Tempat Penampung Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	25 unit	63.221.825	(38.838.175)
	1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	27.455.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	27.131.762	(323.238)
	1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	86.849.500	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	86.849.500	-
	1.06.06.2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kesiapsiagaan bencana**	**100%**	**148.600.000**	**Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kesiapsiagaan bencana**	**100%**	**170.001.039**	21.401.039

	1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	100.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	90.673.077	(9.326.923)
	1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	36 orang	48.600.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	79.327.962	30.727.962
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**TMP Dalam Kondisi Baik**	**100%**	**157.910.700**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**TMP Dalam Kondisi Baik**	**100%**	**302.481.529**	144.570.829
	1.06.07.2.01	**Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara**	**100%**	**157.910.700**	**Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara**	**100%**	**302.481.529**	144.570.829
	1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada	12 Makam	157.910.700	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya	12 Makam	302.481.529	144.570.829
	UPTD PELKESOS BULAU SAYANG				**1.098.344.248**				**1.118.080.824**	(28.261.464)
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan sekretariat**	**76%**	**138.984.360**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan sekretariat**	**76%**	**135.665.396**	-3.718.964
	1.06.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlayani**	**100%**	**80.000.000**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlayani**	**100%**	**76.281.036**	**-3.718.964**

	1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	-
	1.06.01.2.06.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	66.281.036	-3.718.964
	1.06.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi**	**100%**	**16.384.360**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perkantoran yang terpenuhi**	**100%**	**16.382.400**	-1.960
	1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	16.384.360	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	16.382.400	-1.960
	1.06.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100%**	**43.000.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100%**	**43.000.000**	-
	1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	43.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	43.000.000	-

2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial**	**100%**	**959.359.888**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial**	**100%**	**982.417.388,-**	23.057.500
	1.06.04.2.02	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100%**	**959.359.888**	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100%**	**982.417.388,-**	23.057.500
	1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang	889.359.888	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang	932.417.388	43.057.500
	1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	70.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	50.000.000	(20.000.000)

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Sosial mempunyai tanggung jawab untuk :
    a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

5.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Tana Paser, 22 Agustus 2025

Kepala Dinas

Ir. Hasanuddin, MM

Nip. 19670306 199603 1 002

RENJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2025



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PASER

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Renca Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan selama periode awal tahun 2025, sejalan dengan visi Kabupaten Paser "Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera" yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Paser berkomitmen untuk mewujudkan misi keempat RPJMD, yaitu "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing", dengan fokus pada pengembangan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas dan berkelanjutan. Laporan ini memuat capaian kinerja, tantangan serta langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan, termasuk penurunan angka kematian ibu dan anak, pencegahan stunting serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

Penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak, diantaranya Bupati dan Wakil Bupati Paser, jajaran pengelola program di Dinas Kesehatan Kabupaten Paser dan kontribusi yang luar biasa besar dari tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Paser.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser tahun 2025 ini telah menyesuaikan dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 tahun 2019 beserta perubahannya dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan dan sub kegiatan yang disertai penetapan indikator kinerja. Renja Perubahan ini juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan anggaran perubahan tahun 2025 guna pencapaian kinerja tahunan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tana Paser, April 2025

Kepala Dinas Kesehatan

Amri Yulihardi, S.STP., M.Si.
NIP.198407262002121001

DAFTAR ISI

Halaman Judul		i
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
Bab I	Pendahuluan	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	6
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	9
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025	9
	2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan..	38
	2.3 Faktor Pendukung dan Penghambat dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025	50
BAB III	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	52
	3.1 Tujuan dan Sasaran	52
	3.2 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025	53
	3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	152
BAB IV	Penutup	215

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 129 tentang tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan menyiapkan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Kesehatan, dan dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian renstra perangkat daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang diatur dalam Surat Edaran Bupati Paser Nomor 000.7.2.4/II/P2EP-Bapplitbang Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
c. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan sub kegiatan, penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru/sub kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan penambahan/pengurangan pagu kegiatan dan sub kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
d. Adanya alokasi anggaran bantuan keuangan provinsi yang masuk dalam struktur anggaran Dinas Kesehatan.
e. Penyesuian kegiatan dan sub kegiatan khususnya yang bersumber dari alokasi anggaran DAK Fisik dan DAK Non Fisik Tahun 2024.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2021–2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Kesehatan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser;

27. Peraturan Bupati Paser Nomor 000.7.2.4/II/P2EP-Bapplitbang Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Kesehatan Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaanprogram dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan renja perangkat daerah agar subtansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Kesehatan, proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan, keterkaitan antara Renja Dinas Kesehatan dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Kesehatan serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Kesehatan, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025

Menggambarkan kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2025 hingga triwulan I baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

3.1 Tujuan dan Sasaran

Memuat tujuan dan sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2025 yang disertai perubahan target.

3.2. Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah rancangan RKPD telah dibagikan.

BAB IV Penutup

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung tercapai/penyebab tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, adalah sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Evaluasi hasil Renja Dinas Kesehatan sampai dengan triwulan I tahun 2025

No.	Sasaran	Kode Perangkat Daerah / Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi S.d Triwulan ke 4		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	
						Triwulan ke 1					
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)		(8)		(12)		(13)	
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
		Dinas Kesehatan									
1:02:02	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN (UKP) DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)	Cakupan Pelayanan UKM dan UKP	92%	138.938.937.336			0,0%	8.818.742.970	0,00%	4,97%
								-	-		
	2:01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**	**Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang disediakan**	**89%**	**63.198.455.936**	**10%**		**10%**	**140.472.737**	**11,2%**	**0,22%**
		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	5.000.000.000		-	-	-	0,0	0,00
		Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1	19.000.000.000		18.776.900	-	18.776.900	0,0	0,10
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1	201.525.000		-	-	-	0,0	0,00
		Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4	9.283.767.037		-	-	-	0,0	0,00
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2	5.019.343.000		942.000	-	942.000	0,0	0,02
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan	12	2.094.399.999		18.812.000	-	18.812.000	0,0	0,90

			Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya								
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	9	2.343.300.000		45.221.098	-	45.221.098	0,0	1,93
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50	8.556.599.999		-	-	-	0,0	0,00
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	100	662.260.999		18.791.246	-	18.791.246	0,0	2,84
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2	10.962.259.900		37.929.493	-	37.929.493	0,0	0,35
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	18207	75.000.000		-	-	-	0,0	0,00
	2:02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan**	**100%**	**75.490.481.400**	**25%**		**25%**	**8.670.403.633**	**25,0%**	11,49
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.606	842.085.000	921	16.454.400	921,00	16.454.400	16,4	1,95
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.406	272.044.500	1059	11.738.800	1.059,00	11.738.800	19,6	4,32
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.406	372.505.500	961	-	961,00	-	17,8	0,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan	25.212	226.668.000	2214	5.290.000	2.214,00	5.290.000	8,8	2,33

			Kesehatan Sesuai Standar								
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34.685	1.567.078.000	18092	12.656.400	18.092,00	12.656.400	52,2	0,81
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	203.202	2.149.154.000	15124	19.987.600	15.124,00	19.987.600	7,4	0,93
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.893	707.007.900	5239	9.795.200	5.239,00	9.795.200	27,7	1,39
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	87.197	622.550.000	7358	-	7.358,00	-	8,4	0,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.102	386.000.000	1097	-	1.097,00	-	15,4	0,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	495	522.000.000	226	16.706.400	226,00	16.706.400	45,7	3,20
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.145	888.925.000	1818	-	1.818,00	-	158,8	0,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12.557	1.255.058.400	1813	3.000.000	1.813,00	3.000.000	14,4	0,24
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1	50.000.000		-	-	-	0,0	0,00

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	2.235.900.000		42.440.400	-	42.440.400	0,0	1,90
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	98.300.000		9.061.600	-	9.061.600	0,0	9,22
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1.230.999.000		24.751.933	-	24.751.933	0,0	2,01
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	333.000.000		-	-	-	0,0	0,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	88.000.000		5.756.000	-	5.756.000	0,0	6,54
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	50.000.000		-	-	-	0,0	0,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	13.137	50.000.000	888	2.250.000	888,00	2.250.000	6,8	4,50
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4206	50.000.000	285	7.778.400	285,00	7.778.400	6,8	15,56
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4	372.346.000		20.595.000	-	20.595.000	0,0	5,53
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	56.897.024.000		8.191.563.500	-	8.191.563.500	0,0	14,40
		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1	50.000.000		-	-	-	0,0	0,00

		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	2.232.339.100		262.624.000	-	262.624.000	0,0	11,76
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	19	40.000.000		-	-	-	0,0	0,00
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	50.000.000		-	-	-	0,0	0,00
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	50.000.000		-	-	-	0,0	0,00
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	75.000.000		-	-	-	0,0	0,00
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	700	250.000.000	166	7.954.000	166,00	7.954.000	23,7	3,18
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40	50.000.000	11	-	11,00	-	27,5	0,00
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	350	508.432.000	7	-	7,00	-	2,0	0,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1	918.065.000		-	-	-	0,0	0,00
	2:03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegras**	**Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi**	**100%**	**150.000.000**			**0%**	**-**	**0,0%**	0,00
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2	150.000.000			-	-	0,0	0,00

	2:04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan**	**100%**	**100.000.000**			**0%**	**7.866.600**	**0,0%**	7,87
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	2	100.000.000		7.866.600	-	7.866.600	0,0	7,87
1:02:03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang Kompeten	100%	21.606.787.853			0,0%	6.824.857.917	0,00%	31,59%
	2:02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM**	100	20.311.380.853			0%	6.824.857.917	0,0%	33,60%
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	661	20.211.380.853		6.822.430.000	-	6.822.430.000	0,0	33,76
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	100.000.000		2.427.917	-	2.427.917	0,0	2,43
	2:03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK.**	**80**	**1.295.407.000**			**0%**	**-**	**0,0%**	**0,00%**
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	63	1.295.407.000			-	-	0,0	0,00
1:02:04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Obat, Alkes dan Makanan dan Minuman	100%	50.000.000			0%	-	0,00%	0,00%

	2:01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Presentase pemberian rekomendasi penerbitan izin apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT).**	**100%**	**50.000.000**			**0%**	**-**	**0,0%**	**0,00%**
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	50.000.000			-	-	0,0	0,00
1:02:05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	100%	364.932.000			0,00%	-	0,00%	0,00%
	2:01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (Germas)**	**Presentase kecamatan/desa/PKM yang mendapatkan Advokasi, Pemberdayaan , Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor**	**60%**	62.000.000			0%	-	0,0%	**0,00%**
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	62.000.000,00			-	-	0,0	0,00
	2:02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Keluarga yang mempraktikkan PHBS**	**35%**	150.000.000			0%	-	0,0%	**0,00%**
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	100.000.000,00			-	-	0,0	0,00
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup	9103	50.000.000,00			-	-	0,0	0,00

			Sersih dan Sehat								
	2:03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase UKBM aktif**	**58%**	152.932.000			0%	-	0,0%	**0,00%**
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	152.932.000			-	-	0,0	0,00
1:02:01	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Kesekretariatan	70,00	251.013.905.846			-	41.900.034.173	0,00%	16,69%
	2:01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	**100%**	**120.000.000**	**25%**		**25%**	**11.258.000**	**25,0%**	**9,38%**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	75.000.000		10.358.000	-	10.358.000	0,0	13,81
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	10.000.000		-	-	-	0,0	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	25.000.000		-	-	-	0,0	0,00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	10.000.000	1	900.000	1,00	900.000	100,0	9,00
	2:02	**Adminitrasi Keuangan**	**Presentase dokumen dan laporan adminitrasi keuangan yang tersusun**	**100%**	**238.009.102.817**	**25%**		**25%**	**41.712.471.611**	**25,0%**	**17,53%**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15260	237.751.594.817	4.936	41.630.639.868	6.165	41.630.639.868	40,4	17,51

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	15.000.000		10.200.000	-	10.200.000	0,0	68,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	131.190.000		26.410.460	-	26.410.460	0,0	20,13
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4	111.318.000	1	45.221.283	1,00	45.221.283	25,0	40,62
	2:03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***Persentase Ketersediaan Laporan BMD***	**100 %**	**25.000.000**	**100**		**10000%**	**14.312.000**	**10000,0%**	**57,25%**
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	25.000.000	1	14.312.000	1,00	14.312.000	100,0	57,25
	2:05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase adminitrasi kepegawaian PD yang tersusun**	**100%**	**20.000.000**			**0%**	**-**	**0,0%**	**0,00%**
								-	-		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	20.000.000			-	-	0,0	0,00
	2:06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD**	**100%**	**515.490.000**	**25%**		**25%**	**63.112.562**	**25,0%**	**12,24%**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	10.000.000			-	-	0,0	0,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	131.990.000			-	-	0,0	0,00
		Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik	3	95.000.000	1		1,00	-	100,0	0,00

		Kantor	Kantor yang Disediakan								
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	35.000.000			-	-	0,0	0,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	3.500.000			-	-	0,0	0,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	240.000.000	7	63.112.562	7,00	63.112.562	700,0	0,52
	2:08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan**	**100%**	**12.222.638.000**	**30%**		**30%**	**98.880.000**	**30,0%**	**0,81%**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2.500.000			-	-	0,0	0,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	15.105.000	1		1,00	-	100,0	0,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	12.205.033.000		98.880.000	-	98.880.000	0,0	0,81
	2:09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100%**	**101.675.029**			**0%**	**-**	**0,0%**	**0,00%**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	50.000.000			-	-	0,0	0,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	51.675.029			-	-	0,0	0,00
		SUBTOTAL			**411.974.563.035**	**0,00%**	**-**		**57.543.635.060**		**13,97**

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2025 triwulan I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan I (satu) adalah 33,22 %, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 57.543.635.060,- (lima puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam puluh rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 411.974.563.035,- (empat ratus sebelas milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh lima) atau sebesar 35,66%. Dengan predikat sangat rendah.
2. Capaian kinerja sub kegiatan dengan predikat kinerja sangat tinggi (91-100%) = 18 indikator, capaian kinerja predikat tinggi (76 - 90%) = 0 indikator, capaian kinerja predikat sedang (66-75 %) = 2 indikator capaian kinerja predikat rendah (51- 66%) = 4 indikator serta capaian kinerja sangat rendah < 50 % = 61 indikator.

   Dari Gambaran di atas rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Kesehatan baru mencapai 33,22% dengan predikat kinerja sangat rendah.

2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

Tugas

Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan sesuai dengan rencana strategis pemerintah pengoordinasian penyusunan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
2. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
3. Pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas;
5. Penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
6. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan yang meliputi bidang pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;

7. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
12. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas;
13. Pembinaan Jabatan Fungsional pada Dinas sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
14. Pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana pada Dinas;
15. Pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;
16. Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah di bidang kesehatan;
17. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
18. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah; dan

19. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Dinas Kesehatan adalah:

1. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan balita;
5. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
9. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;
10. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga;
11. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan;
12. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya;
13. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa;
14. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika psikotropika dan zat adiktif;
15. Pelaksanaan deteksi dini penyalahgunaan narkotika psikotropika;
16. Pelaksanaan peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;
17. Pelaksanaan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;

18. Pelaksanaan penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
19. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
20. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
21. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus;
22. Pelaksanaan perigelolaan pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis;
23. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV;
24. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa;
25. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana;
26. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan;
27. Pelaksanaan pengelolaan surveilans kesehatan;
28. Pelaksanaan pengelolaan upaya kesehatan khusus;
29. Pelaksanaan pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan;
30. Pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular;
31. Pelaksanaan pengambilan dan pengiriman specimen penyakit potensial kejadian luar biasa ke laboratorium rujukan/nasional;
32. Pelaksanaan penyelenggaraan kabupaten/kota sehat;
33. Pelaksanaan investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal);
34. Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah;
35. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-

IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga;

36. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum;
37. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembiriaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan;
38. Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan;
39. Penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga;
40. Pelaksanaan pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya;
41. Pelaksanaan pembangunan puskesmas;
42. Pelaksanaan pembangunan fasilitas kesehatan lainnya;
43. Pelaksanaan pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan;
44. Pelaksanaan pengembangan rumah sakit;
45. Pelaksanaan pengembangan puskesmas;
46. Pelaksanaan pengembangan fasilitas kesehatan lainnya;
47. Pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit;
48. Pelaksanaan rehabilitast dan pemeliharaan puskesmas;
49. Pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya;
50. Pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehata;
51. Pelaksanaan pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan;
52. Pelaksanaan pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan;
53. Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat;
54. Pelaksanaan penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan;

55. Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota;
56. Pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu;
57. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kesehatan;
58. Pelaksanaan pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet;
59. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan perizinan rumah sakit kelas c, d dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
60. Pe1aksanaan peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten;
61. Pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan;
62. Pelaksanaan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan;
63. Pelaksanaan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan;
64. Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi ;
65. Pelaksanaan pengadaan obat, vaksin;
66. Pelaksanaan pengadaan bahan habis pakai;
67. Pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan;
68. Pelaksanaan pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan;
69. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan;
70. Pelaksanaan perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan;
71. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar;
72. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan;
73. Pelaksanaan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten;

74. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional;
75. Pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional;
76. Pelaksanaan fasilitasi pemenuhan komitmen izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional;
77. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dark PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;
78. Pelaksanaa pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;
79. Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pada Dinas;
80. Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pada Dinas;
81. Pelaksanaan administrasi keuangan pada Dinas;
82. Pelaksanaan administrasi barang milik Daerah pada Dinas;
83. Pelaksanaan administrasi pendapatan Daerah kewenangan pada Dinas;
84. Pelaksanaan administrasi kepegawaian pada Dinas;
85. Pelaksanaan administrasi umum pada Dinas;
86. Pengadaan barang mílik Daerah penunjaiig urusan pemerintah daerah pada Dinas;
87. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah pada dinas;
88. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas;
89. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaporan penerapan standar pelayanan minimal di bidang kesehatan;

90. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan;
91. Fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana pada Dinas;
92. Fasilitasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak	Angka kematian ibu	0
		Angka kematian bayi	0
		Angka kematian balita	0
		Prevalensi stunting	0
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) (Permenpan No. 14 Tahun 2017	0
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0
3.	Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat PM dan PTM	Angka kesakitan	0
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan BMD dan keuangan yang akuntabel	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	0

Sumber: Dinkes Kab Paser 2025

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD berdasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan terdapat dalam tabel di bawah ini.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran			Capaian Kinerja		
			2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025 (triwulan I)	2023	2024	2025 (triwulan I)
1.	Tujuan 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Umur harapan hidup (UHH)	72,80	72,90	73,10	73,20	73,30	72,89	74,1	0	100%	0	0
	Sasaran 1. Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak	Angka kematian ibu (-)	10 kasus	9 kasus	8 kasus	6 kasus	4 kasus	11 kasus	7 kasus	0	82%	87,5%	0
		Angka kematian bayi (-)	7,3 per 1.000 kelahiran hidup	6,3 per 1.000 kelahiran hidup	5,3 per 1.000 kelahiran hidup	4,3 per 1.000 kelahiran hidup	3,3 per 1.000 kelahiran hidup	10,2 per 1.000 kelahiran hidup	13,8 per 1.000 kelahiran hidup	0	62%	0	0
		Angka kematian balita (-)	8,4 per 1.000 kelahiran hidup	7,4 per 1.000 kelahiran hidup	6,4 per 1.000 kelahiran hidup	5,4 per 1.000 kelahiran hidup	4,4 per 1.000 kelahiran hidup	12,6 per 1.000 kelahiran hidup	14,21 per 1.000 kelahiran hidup	0	59%	0	0
		Prevalensi stunting (-)	14,40%	13,40%	12,40%	11,40%	10,40%	13,98%	13,3%	0	96%	0	0
	Sasaran 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Indeks kepuasaan Masyarakat (IKM) (Permenpan No. 14 Tahun 2017	76,61	81,61	86,61	91,61	96,61	84,7%	86,82%	0	104%	0	0
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,26	0,27	0	86%	0	0
	Sasaran 3. Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat PM dan PTM	Angka kesakitan (-)	18,5%	18%	17,5%	17%	16,5%	23%	0	0	78%	0	0
2.	Tujuan 2. Meningkatkan kinerja OPD												
	Sasaran 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	C (67)	C (69)	BB (73)	BB	A	B (69,11)	B (69,11)	0	100%	0	0

Tabel 2.3 Pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan sampai dengan triwulan I tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.3 di atas, pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Tujuan 1 “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 72,99 dari target sebesar 72,90 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

   1) Sasaran 1 “Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak“ memiliki 4 indikator kinerja yang bertanda negatif (-) artinya semakin rendah capaian maka semakin baik. Kinerjanya meliputi:

      a. Angka kematian ibu telah mencapai target dimana realisasinya sebesar 4 kasus dari target sebesar 8 kasus dengan capaian kinerja sebesar 200%.

      b. Angka kematian bayi belum memcapai target dimana realisasi sebesar 20,05 per 1.000 kelahiran hidup dari target 5,3 per 1.000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja sebesar 26%.

      c. Angka kematian balita belum mencapai target dimana realisasi sebesar 20,5 per 1.000 kelahiran hidup dari target 6,4 per 1.000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja sebesar 31%

      d. Prevalensi stunting, belum mencapai target, dimana realisasi sebesar 13,3% dari target 12,4% dengan capaian kinerja sebesar 93%.

   2) Sasaran 2 “Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan” memiliki 2 indikator kinerja yaitu:

      a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum mencapai target dimana realisasi 84,71 dari target 86,61 dengan capaian kinerja sebesar 97%.

      b. Indeks Keluarga Sehat (IKS), belum mencapai target dimana saat ini realisasi masih 0,27 dari target 4 dengan capaian kinerja sebesar 68%.

   3) Sasaran 3 “Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit menular dan tidak menular“ memiliki 1 Indikator yaitu “angka kesakitan (-)” belum mencapai target, dimana realisasi sebesar 23% dari target 17,5% atau capaian kinerja baru 79%.

2. Tujuan 2 “Meningkatkan Kinerja OPD“ memiliki 1 sasaran yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja” dengan indikator “Nilai SAKIP“ belum mencapai target, realisasi B (69,11) dari target BB (73), dengan capaian kinerja sebesar 95%.

Tabel 2.4 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sampai dengan triwulan I tahun 2025

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KAB/KOTA)	PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4.155	921	22,17	828947	819098	98,81	37,50
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.155	1059	25,49	13897	13897	100,00	40,39
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3.964	961	24,24	25588	21270	83,12	36,02
4	Pelayanan Kesehatan Balita	23.785	2214	9,31	268561	144452	53,79	18,20
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	53.740	18092	33,67	349135	147151	42,15	35,36
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	204.549	15124	7,39	257444	31778	12,34	8,38
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	22.114	5239	23,69	71183	71183	100,00	38,95
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	84.882	7358	8,67	2076774	75814	3,65	7,66
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.269	1097	33,56	1120349	60145	5,37	27,92
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	382	226	59,16	888	883	99,44	67,22
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	8.078	1818	22,51	12465	5025	40,31	26,07
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	9.764	1813	18,57	10506	15803	150,42	44,94

Sumber: Dinkes Kab. Paser 2025

Pada tabel 2.4 di atas dapat dilihat gambaran pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sampai dengan triwulan ke-I.

Tabel 2.5 Capaian IKK outcome urusan kesehatan sampai dengan triwulan I tahun 2025

No. IKK	IKK Outcome	Rumus	Penyebut	Pembilang	Capaian (%)
1.b.1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan dibagi jumlah penduduk di kabupaten/kota	305	309	0,098%
1.b.2	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS rujukan yang terakreditasi dibagi jumlah RS di	2	2	100%

		kabupaten/kota			
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah ibu hamil di kabupaten/kota	4319	5477	79%
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan dibagi jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	4113	5285	78%
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	3877	5282	73%
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah balita di kabupaten/kota	20951	25210	83%
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi jmlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota	45844	54351	84.35%
1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota	132166	204313	64,69%
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota	16899	21468	78,7%
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	54817	83094	66%
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah penderita DM di kabupaten/kota	3215	3202	100,40%
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	367	373	98%
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan	598	598	100%

	pelayanan TBC sesuai standar	sesuai standar dibagi 44,94jumlah penderita TBC di kabupaten/kota			
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar dibagi jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota	9060	8256	110%

2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat dan Solusi Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan triwulan I tahun 2025 di atas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari rencana target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser sampai dengan triwulan I tahun 2025 antara lain:

1. Penetapan dan pengesahan anggaran di tahun sebelumnya sehingga pelaksanaan kegiatan dapat segera mulai diawal tahun anggaran.
2. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang sudah memadai.
3. Dukungan dan dorongan dari pimpinan untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatiakan aturan dan ketentuan yang berlaku serta kelegkapan administrasi.
4. Masyarakat sebagai penerima layanan, khususnya pelayanan Kesehatan masih memilih pelayanan milik pemerintah.

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Masih adanya kekurangan/belum teranggarkan belanja kegiatan-kegiatan prioritas baik terkait pelayanan maupun pemenuhan sarana dan prasarana pada Dinas Kesehatan maupun di UPTD.
2. Pelaksana/penanggung jawab kegiatan/sub kegiatan yang kurang respon terhadap arahan atau pun petunjuk pimpinan.

3. Masih terjadinya kekeliruan dalam penginputan belanja di RKA khususnya kode rekening belanja, sehingga belum dapat digunakan sehingga menunggu perbaikan pada tahapan perubahan anggaran.
4. Kegiatan pelatihan/Bimtek atau sejenisnya yang akan diikuti (mengikuti kelas regular) di Lembaga diklat/bimtek baru akan membuka kelas pada triwulan 3 dan 4 mendatang sehingga realisasi kegitan baru ada pada di semester ke 2.
5. Kegiatan pengadaan konstruksi, belanja modal sebagian besar baru mulai proses pemilihan penyedia pada triwulan ke 2, sehingga progres fisik dan keuangan baru akan terlihat pada triwulan 3 dan 4 mendatang.
6. Adanya migrasi dari e-katalog versi 5 ke e-katalog versi 6 dimana selain penyedia yang belum siap beralih ke e-katalog versi 6, sebagian bendahara di UPTD juga belum bisa digunakan akunnya.
7. Di e-katalog versi 6 juga ada beberapa kategori diantaranya obat-obatan, bahan medis habis pakai, konstruksi, yang statusnya belum aktif, sehingga penyedia belum bisa menayangkan produk/jasanya di e-katalog.

Implikasi yang timbul akibat kondisi di atas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2025.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang kesehatan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Renja 2025 dan perubahan Renja 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula	Target	
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025
1.	Tujuan 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	Menggunakan rilis hasil pengukuran BPS		
	Sasaran 1. Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak	Angka kematian ibu (-)	Jumlah kematian ibu dalam waktu 1 tahun		
		Angka kematian bayi (-)	Jumlah kematian bayi <1 tahun / jumlah kelahiran hidup) * 1.000		
		Angka kematian balita (-)	Jumlah kematian anak < 5 tahun / jumlah kelahiran hidup) * 1.000		
		Prevalensi stunting	Hasil perhitungan survey		
	Sasaran 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) (Permenpan No. 14 Tahun 2017	Hasil pengukuran pendapat masyarakat secara kuantitatif dan kualitatif. dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat		
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Hasil pengukuran 12 indikator Keluarga Sehat		

	Sasaran 3. Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat PM dan PTM	Angka kesakitan (-)	Jumlah total kasus penyakit dibagi dengan total populasi		
2.	Tujuan 2. Meningkatnya kinerja OPD				
	Sasaran 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	Hasil Penilaian AKIP tahun sebelumnya oleh APIP		

Memperhatikan tabel 3.1 di atas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2025 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 yaitu "PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DI SELURUH KABUPATEN PASER"" yang dijabarkan ke dalam 4 (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Pemerataan konektivitas untuk mendukung pengurangan kesenjangan antar wilayah.
2. Pemenuhan pelayanan dasar yang berkualitas dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
3. Penguatan perekonomian melalui pengembangan dunia usaha, pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya air.
5. Pengembangan kualitas birokrasi dan kondusivitas daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
5. Meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan bencana
8. Meningkatnya kualitas pendidikan
9. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan mendukung pencapaian sasaran ke-9, yaitu “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Kesehatan telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 3.2 Reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Kesehatan

Kode					Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana
					Dinas Kesehatan			366.040.761.683,00	Dinas Kesehatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	239.576.410.846,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan		
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100	120.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Presentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun		
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	75.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase dokumen dan laporan adminitrasi	100	237.941.594.817,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Presentase dokumen dan laporan adminitrasi		

						keuangan yang tersusun						keuangan yang tersusun		
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15260 Orang/ bulan	237.751.594.817,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	131.190.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	43.810.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100	25.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Paser	Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum		
1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase adminitrasi kepegawaian PD yang tersusun	-100	20.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Paser	Presentase adminitrasi kepegawaian PD yang tersusun		
1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	20.000.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100	433.500.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Paser	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD		
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan	1 Paket		Penyediaan Peralatan	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan		

					Perlengkapan Kantor	dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		50.000.000,00	dan Perlengkapan Kantor		dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	95.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.500.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	240.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100	934.641.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	932.141.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100	101.675.029,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser	Presentase barang milik daerah yang terpelihara		
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	51.675.029,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		

1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	90.361.630.837,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kab. Paser	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	17.830.248.537,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia		
1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0 Unit	-	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Kab. Paser	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	0 Unit	0,00	Pembangunan Puskesmas	Kab. Paser	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun		
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0 Unit	201.525.000,00	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun		
1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	0 Unit	0,00	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun		
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	2.683.530.537,00	Pengembangan Puskesmas	Kab. Paser	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	0 Unit	221.525.000,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas		
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	2.094.400.000,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		
1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang	0 Unit	1.943.300.000,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga	Kab. Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang		

						Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan			Kesehatan		Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan		
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	755.000.000,00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Paser	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 Unit	500.000.000,00	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Paser	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	9.355.968.000,00	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kab. Paser	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	18207 Keluarga	75.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Kab. Paser	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	72.281.382.300,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5606 Orang	842.085.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Paser	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5406 Orang	135.592.500,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Paser	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5406 Orang	146.530.500,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Paser	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Balita yang	25212		Pengelolaan Pelayanan	Kab. Paser	Jumlah Balita yang		

					Kesehatan Balita	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	226.668.000,00	Kesehatan Balita		Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	'34685 Orang	1.567.078.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Paser	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	203.202 Orang	2.149.154.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Paser	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.893 Orang	687.671.900,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Paser	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	87.197 Orang	622.550.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Paser	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7102 Orang	386.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Paser	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	495 Orang	522.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1145 Orang	888.925.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12557 Orang	1.255.058.400,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Paser	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	1 Dokumen	50.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa		

						(KLB) Sesuai Standar					(KLB) Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	900.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	73.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	450.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	50.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	88.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	50.000.000,00	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	13137 Orang	50.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kab. Paser	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4206 Orang	50.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kab. Paser	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	200.000.000,00	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	56.897.024.000,00	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui	1 Unit	50.000.000,00	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Paser	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui		

						Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas					Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	2.000.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	19 Unit	40.000.000,00	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	50.000.000,00	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	50.000.000,00	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	75.000.000,00	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Paser	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	700 Orang	350.000.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kab. Paser	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40 Orang	50.000.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kab. Paser	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	350 Orang	334.000.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kab. Paser	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		
1	02	02	2.02	0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan	1 Dokumen	995.045.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan	Kab. Paser	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan		

					Kabupaten/Kota	SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota		SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota		
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	100	150.000.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Kab. Paser	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi		
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	150.000.000,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan	100	100.000.000,00	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Persentase rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan		
1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	2 Unit	100.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya		
1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	0,00	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%	26.574.220.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kab. Paser	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100	26.024.220.000,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM		
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	510 Orang	25.924.220.000,00	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	100.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia		

											Kesehatan		
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK.	90	550.000.000,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Presentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK.		
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	25 Orang	550.000.000,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Obat, Alkes dan Makanan dan Minuman	100	50.000.000,00	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kab. Paser	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Obat, Alkes dan Makanan dan Minuman		
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Presentase pemberian rekomendasi penerbitan izin apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT).	-	50.000.000,00	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Paser	Presentase pemberian rekomendasi penerbitan izin apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT).		
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	50.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	9.478.500.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kab. Paser	Persentase UKBM Aktif		
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kecamatan/desa/PKM yang mendapatkan Advokasi, Pemberdayaan ,Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	-	62.000.000,00	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Presentase kecamatan/desa/PKM yang mendapatkan Advokasi, Pemberdayaan ,Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor		
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen		Peningkatan Upaya	Kab. Paser	Jumlah Dokumen		

					Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		62.000.000,00	Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang mempraktikkan PHBS	-	150.000.000,00	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Persentase Keluarga yang mempraktikkan PHBS		
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	100.000.000,00	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		
1	02	05	2.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	9103 Keluarga	50.000.000,00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Paser	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat		
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase UKBM aktif	-	9.266.500.000,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Presentase UKBM aktif		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	9.266.500.000,00	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
					RSUD Panglima Sebaya			172.233.013.427,00	RSUD Panglima Sebaya				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG	Nilai evaluasi SAKIP dan	BB		PROGRAM PENUNJANG	Kab. Paser	Nilai evaluasi SAKIP dan		

					URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	APIP Dinas Kesehatan		422.416.916,00	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		APIP Dinas Kesehatan		
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100 %	422.416.916,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	350.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	72.416.916,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	159.451.616.511,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kab. Paser	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	0,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia		
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	82 Unit	0,00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Paser	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	159.451.616.511,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan		
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	159.451.616.511,00	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%	12.358.980.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kab. Paser	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten		

1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %	12.358.980.000,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM		
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	374 Orang	12.358.980.000,00	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		
					UPTD Perbekalan Obat dan Alkes			704.911.700,00	UPTD Perbekalan Obat dan Alkes				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	276.582.190,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Paser	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100	116.279.390,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD		
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.039.590,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	43.719.800,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		

1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30.020.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-	106.120.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	86.400.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	17.720.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100	54.182.800,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah yang terpelihara		
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	54.182.800,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	428.329.510,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	342.889.510,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia		
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	75.000.000,00	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun		

										Kel/Desa			
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	267.889.510,00	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	85.440.000,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan		
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	85.440.000,00	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%	0,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang kompeten		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	-	0,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM		
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	7 Orang	0,00	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		
					UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah			1.959.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	1.149.127.636,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Kabupaten Paser	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan		

					DAERAH KABUPATEN/KOTA				PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100	60.435.436,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD		
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.532.622,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.112.058,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.550.756,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	24.240.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-	227.484.200,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.100.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	210.524.200,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15.860.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100	11.208.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah yang terpelihara		
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	1 Unit	11.208.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan		

					Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100	850.000.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	850.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	809.872.364,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	782.595.983,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia		
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	15.787.966,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	23 Unit	112.264.455,00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 PAKET	654.543.562,00	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tanah Grogot	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	27.276.381,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan		
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen		Operasional Pelayanan	Kab. Paser,	Jumlah Dokumen		

					Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		27.276.381,00	Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tanah Grogot, Tanah Grogot	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%	0,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang kompeten		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	-	0,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM		
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	0 Orang	0,00	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		
					Rumah Sakit Umum Daerah Kerang			2.148.135.272,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kerang				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	1.641.864.728,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Paser	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100	218.364.728,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD		
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser, Batu Engau, Kerang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser, Batu Engau, Kerang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan	1 Paket		Penyediaan Bahan	Kab. Paser,	Jumlah Paket Bahan		

					Kantor	Logistik Kantor yang Disediakan		117.000.000,00	Logistik Kantor	Batu Engau, Kerang	Logistik Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.364.728,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Batu Engau, Kerang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	70.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Batu Engau, Kerang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100 %	197.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	197.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Batu Engau, Kerang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100	122.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah yang terpelihara		
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	82.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser, Batu Engau, Kerang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	40.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Batu Engau, Kerang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100	1.104.500.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.104.500.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	506.270.544,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP		

1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	279.000.000,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia		
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	69.000.000,00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Paser, Batu Engau, Kerang	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30 Unit	20.000.000,00	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Paser, Batu Engau, Kerang	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	190.000.000,00	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kab. Paser, Batu Engau, Kerang	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	227.270.544,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan		
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	227.270.544,00	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
					UPTD Puskesmas Tanah Grogot			2.837.000.000,00	UPTD Puskesmas Tanah grogot				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	2.631.036.640,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Kabupaten Paser	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan		

					DAERAH KABUPATEN/KOTA				PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100	254.458.240,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD		
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.876.640,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	136.581.600,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	70.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-	152.160.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.160.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	150.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100	68.418.400,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah yang terpelihara		
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	2 Unit	25.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Kab. Paser, Semua Kecamatan,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		

					Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kel/Desa	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	43.418.400,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100	2.156.000.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.156.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	205.963.360,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	205.963.360,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1165 Orang	5.500.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Paser, kecamatan tanah Grogot	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1126 Orang	1.056.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Paser, kecamatan tanah Grogot	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1068 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Paser, kecamatan tanah Grogot	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3977 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Paser, kecamatan tanah Grogot	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang	6447 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Kab. Paser, kecamatan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang		

					Pendidikan Dasar	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			Pendidikan Dasar	tanah Grogot	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26759 Orang	11.287.105,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Paser, kecamatan tanah Grogot	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2827 Orang	16.100.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Paser, kecamatan tanah Grogot	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11184 Orang	12.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Paser, kecamatan tanah Grogot	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	509 Orang	7.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Paser, kecamatan tanah Grogot	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	47 Orang	7.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Paser, kecamatan tanah Grogot	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	782 Orang	15.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Paser, kecamatan tanah Grogot	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1962 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Paser, kecamatan tanah Grogot	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	12.165.055,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Paser, kecamatan tanah Grogot	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	5.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Paser, kecamatan tanah Grogot	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	1 Dokumen	2.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Paser, kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan		

						Promosi Kesehatan				tanah Grogot	Promosi Kesehatan		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	61.855.200,00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Paser, kecamatan tanah Grogot	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	10.000.000,00	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Paser, kecamatan tanah Grogot	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%	0,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang kompeten		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	-	0,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM		
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Orang	0,00	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		
					UPTD Puskesmas Senaken			2.357.722.987,00	UPTD Puskesmas Senaken				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	2.033.005.887,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Paser	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100	169.583.887,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD		
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	15.687.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		

					Bangunan Kantor	Disediakan			Bangunan Kantor	Kel/Desa	Disediakan		
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.896.887,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	90.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah yang dadakan	-	50.100.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pengadaan barang milik daerah yang dadakan		
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	70 Unit	50.100.000,00	Pengadaan Mebel	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-	76.720.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.400.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	72.320.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100	62.602.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah yang terpelihara		
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	2 Unit	12.252.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Kab. Paser, Semua Kecamatan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang		

					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kel/Desa	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	32.050.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	18.300.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100	1.674.000.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.674.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	319.377.100,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	8.640.000,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia		
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	8.640.000,00	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	310.737.100,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	485 Orang	2.884.600,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Paser, Semua	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan		

						Kesehatan Sesuai Standar				Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	463 Orang	13.775.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	88 Orang	4.752.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3508 Orang	52.272.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2902 Orang	21.396.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6002 Orang	33.942.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2294 Orang	41.910.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2155 Orang	6.926.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	229 Orang	3.404.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	30 Orang	4.974.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		

						Sesuai Standar				Kel/Desa	Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	412 Orang	300.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25 Orang	1.864.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	56.628.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	3.614.500,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	55.960.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	6.135.000,00	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	5.340.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase UKBM Aktif		
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kecamatan/desa/PKM yang mendapatkan Advokasi, Pemberdayaan ,Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	-	5.340.000,00	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase kecamatan/desa/PKM yang mendapatkan Advokasi, Pemberdayaan ,Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor		
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan	12 Dokumen	5.340.000,00	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan	Kab. Paser, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan		

					Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat			dan Pemberdayaan Masyarakat	Semua Kel/Desa	Pemberdayaan Masyarakat		
					UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser			1.391.158.480,00	UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	1.023.085.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Paser	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100	247.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD		
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	53.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	130.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-	42.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100	86.085.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah yang terpelihara		
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	41.085.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	35.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100	648.000.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	648.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	368.073.480,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	5.040.000,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia		
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang	12 Paket	5.040.000,00	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kab. Paser, Muara Samu, Muser	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang		

						disediakan					disediakan		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	363.033.480,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	30.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	12.129.480,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	5.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 Orang	54.204.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	450 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	700 Orang	5.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan	500 Orang	5.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Paser, Muara Samu, Semua	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan		

						Kesehatan Sesuai Standar				Kel/Desa	Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	10 Orang	12.820.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	28.880.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	130.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	300 Orang	40.000.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%	0,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang kompeten		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	-	0,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM		
1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	0,00	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
					UPTD Puskesmas Mendik			1.421.314.189,00	UPTD Puskesmas Mendik				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB				

					DENGAN PELAYANAN DASAR				YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	1.023.195.300,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Paser	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan			
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100	85.402.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD			
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	47.840.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Long Kali, Mendik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.362.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	35.200.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot Kab. Paser, Long Kali, Mendik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah yang dadakan	-	78.989.300,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pengadaan barang milik daerah yang dadakan			
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	9.901.000,00	Pengadaan Mebel	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	69.088.300,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-	57.044.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan			
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan	1 Laporan		Penyediaan Jasa Surat	Kab. Paser,	Jumlah Laporan			

					Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.100.000,00	Menyurat	Long Kali, Mendik	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	55.944.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Long Kali, Mendik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100	35.760.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah yang terpelihara		
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	20.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	15.760.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Long Kali, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100	766.000.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	766.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Paser, Long Kali, Mendik	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	398.118.889,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	34.847.000,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia		
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	30.000.000,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kab. Paser, Long Kali, Mendik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas		

1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	4.847.000,00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	363.271.889,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	179 Orang	12.500.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Paser, Long Kali, Mendik	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60 Orang	12.500.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Paser, Long Kali, Mendik	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	9.924.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Paser, Long Kali, Mendik	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	63.360.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Paser, Long Kali, Mendik	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Paser, Long Kali, Mendik	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7856 Orang	7.500.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	16.368.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Paser, Long Kali, Mendik	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang	7.500.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Paser, Long Kali, Mendik	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		

1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	140 Orang	11.235.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Paser, Long Kali, Mendik	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5 Orang	15.312.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Paser, Long Kali, Mendik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15 Orang	6.500.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Paser, Long Kali, Mendik	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	5.504.889,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Paser, Long Kali, Mendik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	152.568.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Paser, Long Kali, Mendik	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	5.000.000,00	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Paser, Long Kali, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	25 Orang	7.500.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kab. Paser, Long Kali, Mendik	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%	0,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang kompeten		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	-	0,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM		

					UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				
1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	0,00	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Paser, Long Kali, Mendik	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK.	-	0,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK.		
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	12 Orang	0,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Long Kali, Mendik	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		
					UPTD Puskesmas Suliliran Baru			1.888.314.889,00	UPTD Puskesmas Suliliran Baru				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	1.590.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Paser	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100	130.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD		
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Paser Belengkong, Suliliran Baru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	65.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Kab. Paser, Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat		

					SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Konsultasi SKPD	Belengkong, Suliliran Baru	Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-	102.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	102.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Paser Belengkong, Suliliran Baru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100	50.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah yang terpelihara		
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser, Paser Belengkong, Suliliran Baru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100	1.308.000.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.308.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Paser, Paser Belengkong, Suliliran Baru	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	298.314.889,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	0,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia		
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	14 Unit	0,00	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Paser, Paser Belengkong, Suliliran Baru	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		

1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	298.314.889,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	264 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Paser, Paser Belengkong, Sulilira Baru	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Paser, Paser Belengkong, Sulilira Baru	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	239 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Paser, Paser Belengkong, Sulilira Baru	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	927 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Paser, Paser Belengkong, Sulilira Baru	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	201 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Paser, Paser Belengkong, Sulilira Baru	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2217 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Paser, Paser Belengkong, Sulilira Baru	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	831 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Paser, Paser Belengkong, Sulilira Baru	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Paser, Paser Belengkong, Sulilira Baru	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Paser, Paser Belengkong, Sulilira Baru	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		

1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Paser, Paser Belengkong, Suliliran Baru	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	80 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Paser, Paser Belengkong, Suliliran Baru	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	412 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Paser, Paser Belengkong, Suliliran Baru	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Paser, Paser Belengkong, Suliliran Baru	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Paser, Paser Belengkong, Suliliran Baru	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Paser, Paser Belengkong, Suliliran Baru	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	-	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Paser, Paser Belengkong, Suliliran Baru	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Paser, Paser Belengkong, Suliliran Baru	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	163.314.889,00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Paser, Paser Belengkong, Suliliran Baru	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kab. Paser, Paser Belengkong, Suliliran Baru	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	24 Orang	5.000.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kab. Paser, Paser Belengkong,	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		

										Sulilíran Baru			
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%	0,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang kompeten		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	-	0,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM		
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	16 Orang	0,00	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Paser, Paser Belengkong, Sulilíran Baru	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		
					UPTD Puskesmas Suatang Baru			1.318.896.576,00	UPTD Puskesmas Suatang Baru				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	1.008.343.476,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Paser	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100	246.799.776,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD		
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.496.300,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	145.519.126,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	5 Paket	38.187.550,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang		

						Disediakan				Belengkong, Keresik Bura	Disediakan		
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.612.800,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	39.984.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-	33.480.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40 Laporan	456.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.024.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100	41.432.700,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah yang terpelihara		
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	30.682.700,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	10.750.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100	686.631.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Unit Kerja	686.631.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN	Presentase pemenuhan	100 %		PROGRAM		Presentase pemenuhan		

					UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	layanan UKM dan UKP		310.553.100,00	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		layanan UKM dan UKP		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	3.840.000,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia		
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	3.840.000,00	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	306.713.100,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	121 Orang	5.820.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	115 Orang	5.790.800,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	136 Orang	5.280.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	540 Orang	41.712.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	633 Orang	17.046.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan	4789 Orang	9.900.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Paser, Paser Belengkong,	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan		

						Kesehatan Sesuai Standar				Keresik Bura	Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	612 Orang	34.848.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2393 Orang	16.405.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	91 Orang	20.061.800,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	17 Orang	2.200.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	129 Orang	4.400.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	175 Orang	510.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	142.739.500,00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
					UPTD Puskesmas Kerang			1.784.664.380,00	UPTD Puskesmas Kerang				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG	Nilai evaluasi SAKIP dan	BB		PROGRAM PENUNJANG	Kabupaten	Nilai evaluasi SAKIP dan		

					URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	APIP Dinas Kesehatan		1.316.718.380,00	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Paser	APIP Dinas Kesehatan		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100	94.587.252,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD		
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.991.252,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Batu Engau, Kerang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Batu Engau, Kerang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	31.596.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Batu Engau, Kerang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-	103.968.464,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.113.500,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Batu Engau, Kerang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	58.503.864,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	44.351.100,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser, Batu Engau, Kerang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100	1.118.162.664,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.118.162.664,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	467.946.000,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP		

									MASYARAKAT				
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	106.984.000,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia		
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	70.000.000,00	Pengembangan Puskesmas	Kab. Paser, Batu Engau, Kerang	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	36.984.000,00	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	360.962.000,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang	15.828.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang	15.834.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang	6.852.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	19.800.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	898 Orang	19.938.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang	500 Orang	19.962.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Kab. Paser, Batu Engau,	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang		

					Produktif	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			Produktif	Semua Kel/Desa	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	949 Orang	15.840.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5058 Orang	19.932.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	230 Orang	14.124.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	28 Orang	15.924.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	294 Orang	14.784.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	16.608.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	46.890.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	96.636.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20 Orang	6.434.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan	Jumlah orang dengan	3 Orang		Pengelolaan pelayanan	Kab. Paser,	Jumlah orang dengan		

					kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		5.808.000,00	kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Batu Engau, Semua Kel/Desa	HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang	9.768.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%	0,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang kompeten		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	-	0,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM		
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	9 Orang	0,00	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Paser, Batu Engau, Kerang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		
					UPTD Puskesmas Long Kali			3.134.756.030,00	UPTD Puskesmas Long Kali				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	2.772.916.030,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Paser	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100	201.605.430,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD		
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	15.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		

					Bangunan Kantor	Disediakan			Bangunan Kantor		Disediakan		
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	110.405.430,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	76.200.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah yang dadakan	-	76.196.600,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pengadaan barang milik daerah yang dadakan		
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	39.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	37.196.600,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-	68.752.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	66.252.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100	105.812.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah yang terpelihara		
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	35.812.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Paser, Long Kali, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	20.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	50.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Kab. Paser, Long Kali, Long	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		

					Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi			Bangunan Lainnya	Kali	yang Dipelihara/Direhabilitasi		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100	2.320.550.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.320.550.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	361.840.000,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	361.840.000,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan		
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	18.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	20.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	18.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	20.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan	0 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan		

						Sesuai Standar			HIV		Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	20.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	20.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	5.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kab. Paser, Long Kali, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	190.840.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	20.000.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		
					UPTD Puskesmas Pasir Belengkong			1.240.425.559,00	UPTD Puskesmas Pasir Belengkong				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	329.458.892,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Paser	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100	214.775.492,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD		
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	2.893.200,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		

					Bangunan Kantor	Disediakan			Bangunan Kantor	Kel/Desa	Disediakan		
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	52.832.937,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	52.107.355,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.696.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	99.246.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-	62.277.400,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	570.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	61.707.400,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100	52.406.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah yang terpelihara		
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	3 Unit	18.546.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kab. Paser, Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau		

					Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belengkong, Semua Kel/Desa	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	33.860.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	183.766.667,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP		
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100%	2.660.000,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia		
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	12 PAKET	2.660.000,00	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	181.106.667,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan		
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1100 Orang	32.546.667,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2038 Orang	15.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	1216 Orang	20.300.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai		

						Standar				Kel/Desa	Standar		
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	748 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1216 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	244 Orang	14.980.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	239 Orang	5.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 dokumen	7.920.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	38 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	45.360.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	39 Orang	-	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		

1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%	0,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang kompeten		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	-	0,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM		
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	11 Orang	0,00	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	7.500.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase UKBM Aktif		
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang mempraktikkan PHBS	-	7.500.000,00	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Keluarga yang mempraktikkan PHBS		
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	7.500.000,00	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		
X					NON URUSAN			0,00	NON URUSAN				
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	719.700.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Paser	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan		
X	XX	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100	719.700.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD		
X	XX	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	1 Unit Kerja	719.700.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Paser, Paser Belengkong,	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang		

						Pelayanan				Semua Kel/Desa	Pelayanan		
					UPTD Puskesmas Kayungo			1.225.913.659,00	UPTD Puskesmas Kayungo				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	952.673.133,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Paser	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100	375.807.900,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD		
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	122.015.900,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	26.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	227.792.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah yang dadakan	-	65.200.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pengadaan barang milik daerah yang dadakan		
1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	52.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	13.200.000,00	Pengadaan Mebel	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang	-	59.500.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang		

						disediakan					disediakan		
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	57.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100	21.749.200,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah yang terpelihara		
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	21.749.200,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100	430.416.033,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	430.416.033,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	273.240.526,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	273.240.526,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	125 Orang	10.766.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Paser, Long Ikis, Long Gelang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	119 Orang	2.376.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Paser, Long Ikis, Semua	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		

						Sesuai Standar				Kel/Desa	Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	114 Orang	5.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	904 Orang	75.629.326,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	775 Orang	18.078.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4454 Orang	6.484.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	591 Orang	18.494.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	409 Orang	12.176.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	113 Orang	12.176.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5 Orang	10.368.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	9.183.200,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	15.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Paser, Long Ikis, Semua	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		

										Kel/Desa			
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	34.800.000,00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	5.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	20.710.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18 Orang	7.000.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	128 Orang	10.000.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
					UPTD Puskesmas Sebakung Taka			1.282.744.716,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	996.758.300,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Paser	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100	167.529.300,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD		
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	8.800.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		

					Bangunan Kantor	Disediakan			Bangunan Kantor		Disediakan		
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.100.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.094.300,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.700.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216 Laporan	99.835.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah yang dadakan	-	126.729.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pengadaan barang milik daerah yang dadakan		
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	126.729.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-	39.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100	25.500.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah yang terpelihara		
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	25.500.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100	638.000.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang	1 Unit		Pelayanan dan	Kab. Paser,	Jumlah BLUD yang		

					Pelayanan BLUD	Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kerja	638.000.000,00	Penunjang Pelayanan BLUD	Long Kali, Sebakung Taka	Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	285.986.416,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	62.724.416,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia		
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	36.000.000,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas		
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	8.276.416,00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	18.448.000,00	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	223.262.000,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	53 Orang	36.167.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	32 Orang	7.920.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		

1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33 Orang	5.280.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76 Orang	44.352.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	2.772.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	5.544.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	56 Orang	7.920.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34 Orang	7.920.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35 Orang	5.280.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	6 Orang	5.280.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	3.195.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7 Orang	8.976.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		

1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	35 Dokumen	14.256.000,00	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	177 Dokumen	68.400.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%	0,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang kompeten		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	-	0,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM		
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4 Orang	0,00	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Paser, Long Kali, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		
					UPTD Puskesmas Muara Komam			3.016.228.346,00	UPTD Puskesmas Muara Komam				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	2.285.833.046,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Paser	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100	63.303.946,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD		
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		

1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.913.946,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	32.390.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-	85.310.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.310.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	84.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100	46.219.100,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah yang terpelihara		
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	36.219.100,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan	Presentase jumlah UPT	100		Peningkatan Pelayanan		Presentase jumlah UPT		

					BLUD	yang melakukan pelayanan BLUD		2.091.000.000,00	BLUD		yang melakukan pelayanan BLUD		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.091.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	710.405.300,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	15.000.000,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia		
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	3862 Keluarga	15.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	695.405.300,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	249 Orang	16.290.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	237 Orang	15.048.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35 Orang	9.996.500,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	245 Orang	43.560.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang	750 Orang	42.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Kab. Paser, Muara Komam,	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang		

					Pendidikan Dasar	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			Pendidikan Dasar	Semua Kel/Desa	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9250 Orang	43.596.300,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6201 Orang	18.500.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3968 Orang	3.960.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	181 Orang	3.960.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	25 Orang	11.436.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	220 Orang	19.876.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	300 Orang	21.196.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	29.984.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	34.020.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen		Pengelolaan Pelayanan	Kab. Paser,	Jumlah Dokumen Hasil		

					Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		25.000.000,00	Kesehatan Lingkungan	Muara Komam, Semua Kel/Desa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	65.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	5.080.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1000 Orang	12.504.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	33.568.000,00	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	222.650.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50 Orang	9.740.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang	8.440.500,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%	0,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang kompeten		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	-	0,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM		

1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	10 Orang	0,00	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	19.990.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase UKBM Aktif		
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase UKBM aktif	-	19.990.000,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase UKBM aktif		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	19.990.000,00	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
					UPTD Puskesmas Krayan			1.161.553.123,00	UPTD Puskesmas Krayan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	885.874.123,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Paser	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100	214.899.903,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD		
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.248.623,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket	46.946.780,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Long Ikis,	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang		

						Disediakan				Krayan Sentosa	Disediakan		
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	31.798.500,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	113.906.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-	76.536.420,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	75.036.420,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100	46.537.800,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah yang terpelihara		
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	27.767.800,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	18.770.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100	547.900.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	1 Unit Kerja	547.900.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang		

						Pelayanan					Pelayanan		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	275.679.000,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	30.700.000,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia		
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	7 Unit	30.700.000,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	244.979.000,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135 Orang	6.600.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	129 Orang	20.700.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127 Orang	15.120.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	685 Orang	27.648.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	936 Orang	4.620.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang	1116 Orang	1.452.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Kab. Paser, Long Ikis,	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang		

					Produktif	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			Produktif	Krayan Sentosa	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	505 Orang	28.512.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	506 Orang	4.752.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	148 Orang	4.752.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8 Orang	2.538.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	148 Orang	5.760.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	3.168.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	13.152.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	5.340.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	88.042.000,00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan	1 Dokumen	4.843.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan		

					Lainnya	Mandiri dan Tradisional Lainnya			Tradisional Lainnya		Mandiri dan Tradisional Lainnya		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	7.296.000,00	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9 Orang	-	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9 Orang	684.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	100	0,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi		
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%	-	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang kompeten		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	-	-	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM		
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	3 Orang	0,00	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK.	-	-	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK.		

1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0 Orang	-	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		
					UPTD Puskesmas Lolo			1.053.350.058,00	UPTD Puskesmas Lolo				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	708.075.940,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Paser	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100	80.253.550,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD		
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.353.700,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.320.050,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	38.579.800,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah yang dadakan	-	21.240.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pengadaan barang milik daerah yang dadakan		
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	21.240.000,00	Pengadaan Mebel	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang	-	61.042.930,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang		

						disediakan					disediakan		
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	680.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.362.930,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100	26.447.460,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah yang terpelihara		
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3.987.460,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	22.460.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100	519.092.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	519.092.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	345.274.118,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	9.449.300,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia		
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas	2 Paket	9.449.300,00	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas		

						Kesehatan yang disediakan			Kesehatan		Kesehatan yang disediakan		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	335.824.818,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	168 Orang	5.734.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	168 Orang	2.074.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	168 Orang	6.475.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	876 Orang	61.390.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2004 Orang	6.978.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6204 Orang	7.049.750,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	793 Orang	15.211.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2593 Orang	4.876.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan	100 Orang	1.774.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan		

						Kesehatan Sesuai Standar					Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	12 Orang	5.998.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	166 Orang	4.774.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	233 Orang	2.830.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	210.661.068,00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	33 Orang	0,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	0,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%	0,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang kompeten		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	-	0,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM		
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	5 Orang	0,00	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		

					UPTD Puskesmas Long Ikis			4.043.848.900,00	UPTD Puskesmas Long Ikis				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	3.605.456.900,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Paser	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100	18.225.300,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD		
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.725.300,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1.140.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	15.360.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah yang dadakan	-	0,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pengadaan barang milik daerah yang dadakan		
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00		-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang	-	161.153.600,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang		

						disediakan					disediakan		
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	161.153.600,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100	40.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah yang terpelihara		
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	40.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100	3.386.078.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.386.078.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	438.392.000,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	-	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia		
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	0,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas		
1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1 Unit	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan		

1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	438.392.000,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	454 Orang	25.704.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	435 Orang	7.920.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	435 Orang	7.920.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2398 Orang	162.096.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2438 Orang	7.920.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19433 Orang	3.960.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2276 Orang	23.760.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8117 Orang	3.960.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		

1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	367 Orang	3.960.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	23 Orang	40.892.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	531 Orang	3.960.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	144 Orang	3.960.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	130.500.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	102 Orang	3.960.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9 Orang	3.960.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	52 Orang	3.960.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%	0,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang kompeten		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	-	0,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM		

1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	15 Orang	0,00	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		
					UPTD Puskesmas Kuaro			2.051.567.612,00	UPTD Puskesmas Kuaro				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	1.643.080.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Paser	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100	143.040.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD		
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	45.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	84.040.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-	80.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	80.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Kab. Paser, Kuaro, Semua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		

					Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Daya Air dan Listrik	Kel/Desa	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100	60.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah yang terpelihara		
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	60.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100	1.360.040.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.360.040.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	408.487.612,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	51.837.612,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia		
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	30.597.612,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas		
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	12 Paket	21.240.000,00	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM	100 %	356.650.000,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM		

					UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dan UKP Rujukan yang disediakan			dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		dan UKP Rujukan yang disediakan		
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	4.884.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	430 Orang	52.326.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2020 Orang	19.404.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	29 Orang	11.808.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	450 Orang	6.780.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	600 Orang	9.552.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	52.912.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	16.890.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	3.990.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	172.200.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Semua Kota/Kab, Semua	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		

										Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa				
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18 Orang	5.904.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
					UPTD Puskesmas Padang Pengrapat			1.418.122.246,00	UPTD Puskesmas Padang Pengrapat				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	1.062.111.428,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Paser	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100	151.878.700,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD		
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.989.600,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	25.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.914.100,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan	12 Laporan		Penyelenggaraan Rapat	Kab. Paser,	Jumlah Laporan		

					Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		64.975.000,00	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah yang dadakan	-	19.733.400,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pengadaan barang milik daerah yang dadakan		
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	19.733.400,00	Pengadaan Mebel	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-	61.195.510,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.192.100,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.003.410,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100	48.165.168,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah yang terpelihara		
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	25.186.368,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	22.978.800,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100	781.138.650,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD		

1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	781.138.650,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	356.010.818,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %	23.102.045,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia		
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	5 Unit	-	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center		
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	23.102.045,00	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	332.908.773,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145 Orang	17.540.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang	13.464.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40 Orang	4.884.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Balita yang	1000 Orang		Pengelolaan Pelayanan	Kab. Paser,	Jumlah Balita yang		

					Kesehatan Balita	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		28.882.000,00	Kesehatan Balita	Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	920 Orang	4.874.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600 Orang	4.872.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	750 Orang	6.600.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 Orang	4.888.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 Orang	4.886.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	20 Orang	5.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	35 Orang	4.760.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	36.792.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	4.900.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil	12		Pengelolaan Pelayanan	Kab. Paser,	Jumlah Dokumen Hasil		

					Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	14.440.000,00	Promosi Kesehatan	Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4 Dokumen	4.941.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	5.136.000,00	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	151.067.773,00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	4.982.000,00	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80 Orang	5.000.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	30 Orang	5.000.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%	0,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang kompeten		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	-	0,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM		
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	15 Orang	0,00	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		

					UPTD Puskesmas Tanjung Aru			1.317.717.202,00	UPTD Puskesmas Tanjung Aru				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	929.921.822,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Paser	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100	169.223.222,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD		
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	13.579.722,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	58.366.500,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.765.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	66.512.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

										Kel/Desa			
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-	18.820.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.320.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	17.500.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100	36.122.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah yang terpelihara		
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	26.706.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	9.416.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100	705.756.600,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	705.756.600,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	387.795.380,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas	Presentase fasilitas	100 %		Penyediaan Fasilitas		Presentase fasilitas		

					Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia		62.195.278,00	Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia		
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	22.545.278,00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	39.650.000,00	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	325.600.102,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	136 Orang	12.590.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	148 Orang	1.880.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	148 Orang	1.880.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	865 Orang	40.952.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	256 Orang	1.880.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		

1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7568 Orang	1.880.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	132 Orang	21.896.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	850 Orang	4.172.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	565 Orang	940.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	245 Orang	7.880.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	22 Orang	1.880.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	7.367.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	12.866.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	12.866.000,00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	1 Dokumen	10.900.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,	Kab. Paser, Tanjung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan		

					Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Harapan, Semua Kel/Desa	Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	181.891.102,00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	940.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8 Orang	940.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%	0,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang kompeten		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100	0,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM		
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	24 Orang	0,00	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		
					UPTD Puskesmas Batukajang			1.826.038.000,00	UPTD Puskesmas Batukajang				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			0,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				

1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB	1.492.375.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Paser	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100	147.551.800,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD		
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.594.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	57.057.800,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	86.900.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah yang dadakan	100	26.500.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pengadaan barang milik daerah yang dadakan		
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	26.500.000,00	Pengadaan Mebel	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100	31.003.200,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	660.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.343.200,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100	65.320.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah yang terpelihara		
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	2 Unit	36.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kab. Paser, Batu Sopang,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau		

					Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Batu Kajang	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	7.320.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	22.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100	1.222.000.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.222.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	333.663.000,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %	333.663.000,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	510 Orang	13.200.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	509 Orang	3.960.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	442 Orang	3.960.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3977 Orang	39.420.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		

1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4260 Orang	7.920.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17361 Orang	18.360.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	810 Orang	44.352.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6100 Orang	9.665.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	590 Orang	8.510.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	20 Orang	7.680.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	453 Orang	3.600.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	813 Orang	5.208.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	6.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	100 Dokumen	161.828.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Paser, Batu Sopang,	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan		

						Puskesmas				Semua Kel/Desa	Puskesmas		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%	0,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang kompeten		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100	0,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM		
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	9 Orang	0,00	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3 Rencana program dan kegiatan perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif		
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
					Dinas Kesehatan				366.040.761.683,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB		239.576.410.846,00		Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100		120.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		75.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		10.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		25.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		10.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase dokumen dan laporan adminitrasi keuangan yang tersusun	100		237.941.594.817,00		Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15260 Orang/ bulan		237.751.594.817,00		Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		15.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		131.190.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	4 Laporan		43.810.000,00		Dinas Kesehatan

						Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100		25.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		25.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase adminitrasi kepegawaian PD yang tersusun	-100		20.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		20.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100		433.500.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		10.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		50.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		95.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		35.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		3.500.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		240.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100		934.641.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		2.500.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		932.141.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100		101.675.029,00		Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		50.000.000,00		Dinas Kesehatan

1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit		51.675.029,00		Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %		90.361.630.837,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %		17.830.248.537,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0 Unit		-		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	0 Unit		0,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0 Unit		201.525.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	0 Unit		0,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit		2.683.530.537,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	0 Unit		221.525.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit		2.094.400.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	0 Unit		1.943.300.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit		755.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 Unit		500.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai,	2 Paket				Dinas Kesehatan

					Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			9.355.968.000,00		
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	18207 Keluarga		75.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %		72.281.382.300,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5606 Orang		842.085.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5406 Orang		135.592.500,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5406 Orang		146.530.500,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25212 Orang		226.668.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	'34685 Orang		1.567.078.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	203.202 Orang		2.149.154.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.893 Orang		687.671.900,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	87.197 Orang		622.550.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7102 Orang		386.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	495 Orang		522.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1145 Orang		888.925.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan	12557 Orang		1.255.058.400,00		Dinas Kesehatan

						Sesuai Standar					
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen		50.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		900.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen		73.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		450.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		50.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen		88.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		50.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	13137 Orang		50.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4206 Orang		50.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen		200.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		56.897.024.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1 Unit		50.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		2.000.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	19 Unit		40.000.000,00		Dinas Kesehatan

1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		50.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		50.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit		75.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	700 Orang		350.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40 Orang		50.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	350 Orang		334.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		995.045.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	100		150.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen		150.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan	100		100.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	2 Unit		100.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen		0,00		Dinas Kesehatan
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%		26.574.220.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100		26.024.220.000,00		Dinas Kesehatan

					UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	510 Orang		25.924.220.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		100.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK.	90		550.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	25 Orang		550.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Obat, Alkes dan Makanan dan Minuman	100		50.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Presentase pemberian rekomendasi penerbitan izin apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT).	-		50.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen		50.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90		9.478.500.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kecamatan/desa/PKM yang mendapatkan Advokasi, Pemberdayaan ,Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	-		62.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		62.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang mempraktikkan PHBS	-		150.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi	1 Dokumen		100.000.000,00		Dinas Kesehatan

					Bersih dan Sehat	Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					
1	02	05	2.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	9103 Keluarga		50.000.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase UKBM aktif	-		9.266.500.000,00		Dinas Kesehatan
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		9.266.500.000,00		Dinas Kesehatan
					RSUD Panglima Sebaya				172.233.013.427,00		RSUD Panglima Sebaya
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00		RSUD Panglima Sebaya
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				0,00		RSUD Panglima Sebaya
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB		422.416.916,00		RSUD Panglima Sebaya
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100 %		422.416.916,00		RSUD Panglima Sebaya
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		350.000.000,00		RSUD Panglima Sebaya
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		72.416.916,00		RSUD Panglima Sebaya
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %		159.451.616.511,00		RSUD Panglima Sebaya
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %		0,00		RSUD Panglima Sebaya
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	82 Unit		0,00		RSUD Panglima Sebaya
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %		159.451.616.511,00		RSUD Panglima Sebaya

					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	yang disediakan					
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen		159.451.616.511,00		RSUD Panglima Sebaya
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%		12.358.980.000,00		RSUD Panglima Sebaya
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100 %		12.358.980.000,00		RSUD Panglima Sebaya
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	374 Orang		12.358.980.000,00		RSUD Panglima Sebaya
					UPTD Perbekalan Obat dan Alkes				704.911.700,00		UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				-		UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				0,00		UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB		276.582.190,00		UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100		116.279.390,00		UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket				UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		2.500.000,00		UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		40.039.590,00		UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		43.719.800,00		UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		30.020.000,00		UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-		106.120.000,00		UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		2.000.000,00		UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		86.400.000,00		UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan				UPTD Perbekalan Obat

					Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			17.720.000,00		dan Alkes
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100		54.182.800,00		UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		54.182.800,00		UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %		428.329.510,00		UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %		342.889.510,00		UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit		75.000.000,00		UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket		267.889.510,00		UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %		85.440.000,00		UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen		85.440.000,00		UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%		0,00		UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	-		0,00		UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	7 Orang		0,00		UPTD Perbekalan Obat dan Alkes
					UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah				1.959.000.000,00		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				0,00		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB		1.149.127.636,00		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

					KABUPATEN/KOTA						
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100		60.435.436,00		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1.532.622,00		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		32.112.058,00		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		2.550.756,00		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		24.240.000,00		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-		227.484.200,00		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1.100.000,00		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		210.524.200,00		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		15.860.000,00		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100		11.208.000,00		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		11.208.000,00		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100		850.000.000,00		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		850.000.000,00		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %		809.872.364,00		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %		782.595.983,00		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas	1 Unit		15.787.966,00		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

						Kesehatan Lainnya					
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	23 Unit		112.264.455,00		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 PAKET		654.543.562,00		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %		27.276.381,00		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen		27.276.381,00		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%		0,00		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	-		0,00		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	0 Orang		0,00		UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
					RSUD Kerang				2.148.135.272,00		RSUD Kerang
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00		RSUD Kerang
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				0,00		RSUD Kerang
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB		1.641.864.728,00		RSUD Kerang
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100		218.364.728,00		RSUD Kerang
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		7.000.000,00		RSUD Kerang
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		17.000.000,00		RSUD Kerang
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		117.000.000,00		RSUD Kerang

1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		7.364.728,00		RSUD Kerang
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		70.000.000,00		RSUD Kerang
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100 %		197.000.000,00		RSUD Kerang
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		197.000.000,00		RSUD Kerang
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100		122.000.000,00		RSUD Kerang
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		82.000.000,00		RSUD Kerang
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit		40.000.000,00		RSUD Kerang
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100		1.104.500.000,00		RSUD Kerang
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1.104.500.000,00		RSUD Kerang
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %		506.270.544,00		RSUD Kerang
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %		279.000.000,00		RSUD Kerang
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit		69.000.000,00		RSUD Kerang
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30 Unit		20.000.000,00		RSUD Kerang
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket		190.000.000,00		RSUD Kerang
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %		227.270.544,00		RSUD Kerang

1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen		227.270.544,00		RSUD Kerang
					UPTD Puskesmas Tanah Grogot				2.837.000.000,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				0,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB		2.631.036.640,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100		254.458.240,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		17.876.640,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		136.581.600,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		30.000.000,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		70.000.000,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-		152.160.000,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		2.160.000,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		150.000.000,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100		68.418.400,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		25.000.000,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		43.418.400,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100		2.156.000.000,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		2.156.000.000,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Presentase pemenuhan layanan	100 %				UPTD Puskesmas Tanah

					KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKM dan UKP			205.963.360,00		Grogot
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %		205.963.360,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1165 Orang		5.500.000,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1126 Orang		1.056.000,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1068 Orang		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3977 Orang		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6447 Orang		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26759 Orang		11.287.105,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2827 Orang		16.100.000,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11184 Orang		12.000.000,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	509 Orang		7.000.000,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	47 Orang		7.000.000,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	782 Orang		15.000.000,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1962 Orang		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen		12.165.055,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		5.000.000,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot

						Lingkungan					
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		2.000.000,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		61.855.200,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%		0,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	-		0,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Orang		0,00		UPTD Puskesmas Tanah Grogot
					UPTD Puskesmas Senaken				2.357.722.987,00		UPTD Puskesmas Senaken
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				0,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB		2.033.005.887,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100		169.583.887,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		15.687.000,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		43.896.887,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		20.000.000,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		90.000.000,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah yang dadakan	-		50.100.000,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	70 Unit		50.100.000,00		UPTD Puskesmas Senaken

1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-		76.720.000,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		4.400.000,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		72.320.000,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100		62.602.000,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		12.252.000,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		32.050.000,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit		18.300.000,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100		1.674.000.000,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1.674.000.000,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %		319.377.100,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %		8.640.000,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket		8.640.000,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %		310.737.100,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	485 Orang		2.884.600,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	463 Orang		13.775.000,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan	88 Orang		4.752.000,00		UPTD Puskesmas Senaken

						Kesehatan Sesuai Standar					
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3508 Orang		52.272.000,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2902 Orang		21.396.000,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6002 Orang		33.942.000,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2294 Orang		41.910.000,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2155 Orang		6.926.000,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	229 Orang		3.404.000,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang		4.974.000,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	412 Orang		300.000,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25 Orang		1.864.000,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		56.628.000,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen		3.614.500,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		55.960.000,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen		6.135.000,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90		5.340.000,00		UPTD Puskesmas Senaken
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Presentase kecamatan/desa/PKM yang mendapatkan Advokasi, Pemberdayaan ,Kemitraan,	-		5.340.000,00		UPTD Puskesmas Senaken

					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor					
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen		5.340.000,00		UPTD Puskesmas Senaken
					UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser				1.391.158.480,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				0,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB		1.023.085.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100		247.000.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		5.000.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		49.000.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		53.000.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		130.000.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-		42.000.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		2.000.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		40.000.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100		86.085.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		41.085.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser

1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		35.000.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100		648.000.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		648.000.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %		368.073.480,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %		5.040.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	12 Paket		5.040.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %		363.033.480,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang		30.000.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang		12.129.480,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang		5.000.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 Orang		54.204.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	450 Orang		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 Orang		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	700 Orang		5.000.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser

1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang		5.000.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	10 Orang		12.820.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang		28.880.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		130.000.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	300 Orang		40.000.000,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%		0,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	-		0,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen		0,00		UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser
					UPTD Puskesmas Mendik				1.421.314.189,00		UPTD Puskesmas Mendik
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				0,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB		1.023.195.300,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100		85.402.000,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		47.840.000,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		2.362.000,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		35.200.000,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Presentase pengadaan barang	-				UPTD Puskesmas

					Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	milik daerah yang dadakan			78.989.300,00		Mendik
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		9.901.000,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		69.088.300,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-		57.044.000,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1.100.000,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		55.944.000,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100		35.760.000,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		20.000.000,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		15.760.000,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100		766.000.000,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		766.000.000,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %		398.118.889,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %		34.847.000,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit		30.000.000,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit		4.847.000,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %		363.271.889,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	179 Orang		12.500.000,00		UPTD Puskesmas Mendik

						Kesehatan Sesuai Standar					
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60 Orang		12.500.000,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang		9.924.000,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang		63.360.000,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7856 Orang		7.500.000,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang		16.368.000,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang		7.500.000,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	140 Orang		11.235.000,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5 Orang		15.312.000,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15 Orang		6.500.000,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5 Orang		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen		5.504.889,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		152.568.000,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		5.000.000,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan	Jumlah orang yang mendapatkan	25 Orang				UPTD Puskesmas

					Malaria	pelayanan kesehatan malaria			7.500.000,00		Mendik
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%		0,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	-		0,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen		0,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK.	-		0,00		UPTD Puskesmas Mendik
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	12 Orang		0,00		UPTD Puskesmas Mendik
					UPTD Puskesmas Suliliran Baru				1.888.314.889,00		UPTD Puskesmas Suliliran Baru
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00		UPTD Puskesmas Suliliran Baru
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				0,00		UPTD Puskesmas Suliliran Baru
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB		1.590.000.000,00		UPTD Puskesmas Suliliran Baru
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100		130.000.000,00		UPTD Puskesmas Suliliran Baru
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		65.000.000,00		UPTD Puskesmas Suliliran Baru
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		65.000.000,00		UPTD Puskesmas Suliliran Baru
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-		102.000.000,00		UPTD Puskesmas Suliliran Baru
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		102.000.000,00		UPTD Puskesmas Suliliran Baru
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100		50.000.000,00		UPTD Puskesmas Suliliran Baru
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas	4 Unit				UPTD Puskesmas

					Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			50.000.000,00		Sulliliran Baru
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100		1.308.000.000,00		UPTD Puskesmas Sulliliran Baru
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1.308.000.000,00		UPTD Puskesmas Sulliliran Baru
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %		298.314.889,00		UPTD Puskesmas Sulliliran Baru
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %		0,00		UPTD Puskesmas Sulliliran Baru
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	14 Unit		0,00		UPTD Puskesmas Sulliliran Baru
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %		298.314.889,00		UPTD Puskesmas Sulliliran Baru
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	264 Orang		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Sulliliran Baru
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Sulliliran Baru
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	239 Orang		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Sulliliran Baru
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	927 Orang		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Sulliliran Baru
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	201 Orang		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Sulliliran Baru
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2217 Orang		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Sulliliran Baru
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	831 Orang		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Sulliliran Baru
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Sulliliran Baru
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus	100 Orang				UPTD Puskesmas

					Penderita Diabetes Melitus	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			10.000.000,00		Sulilíran Baru
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5 Orang		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Sulilíran Baru
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	80 Orang		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Sulilíran Baru
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	412 Orang		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Sulilíran Baru
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		-		UPTD Puskesmas Sulilíran Baru
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen		-		UPTD Puskesmas Sulilíran Baru
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		-		UPTD Puskesmas Sulilíran Baru
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen		-		UPTD Puskesmas Sulilíran Baru
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		-		UPTD Puskesmas Sulilíran Baru
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		163.314.889,00		UPTD Puskesmas Sulilíran Baru
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80 Orang		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Sulilíran Baru
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	24 Orang		5.000.000,00		UPTD Puskesmas Sulilíran Baru
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%		0,00		UPTD Puskesmas Sulilíran Baru
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	-		0,00		UPTD Puskesmas Sulilíran Baru
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	16 Orang		0,00		UPTD Puskesmas Sulilíran Baru
					UPTD Puskesmas Suatang Baru				1.318.896.576,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru

1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				0,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB		1.008.343.476,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100		246.799.776,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		5.496.300,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		145.519.126,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		38.187.550,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		17.612.800,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		39.984.000,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-		33.480.000,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40 Laporan		456.000,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		33.024.000,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100		41.432.700,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		30.682.700,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		10.750.000,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100		686.631.000,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Unit Kerja		686.631.000,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %		310.553.100,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru

					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %		3.840.000,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket		3.840.000,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %		306.713.100,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	121 Orang		5.820.000,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	115 Orang		5.790.800,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	136 Orang		5.280.000,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	540 Orang		41.712.000,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	633 Orang		17.046.000,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4789 Orang		9.900.000,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	612 Orang		34.848.000,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2393 Orang		16.405.000,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	91 Orang		20.061.800,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	17 Orang		2.200.000,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	129 Orang		4.400.000,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru

1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	175 Orang		510.000,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen		142.739.500,00		UPTD Puskesmas Suatang Baru
					UPTD Puskesmas Kerang				1.784.664.380,00		UPTD Puskesmas Kerang
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				0,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB		1.316.718.380,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100		94.587.252,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		52.991.252,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		31.596.000,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-		103.968.464,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1.113.500,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		58.503.864,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		44.351.100,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100		1.118.162.664,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1.118.162.664,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %		467.946.000,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %		106.984.000,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang	1 Unit				UPTD Puskesmas

						Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			70.000.000,00		Kerang
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket		36.984.000,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %		360.962.000,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang		15.828.000,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang		15.834.000,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang		6.852.000,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang		19.800.000,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	898 Orang		19.938.000,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang		19.962.000,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	949 Orang		15.840.000,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5058 Orang		19.932.000,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	230 Orang		14.124.000,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	28 Orang		15.924.000,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	294 Orang		14.784.000,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang		16.608.000,00		UPTD Puskesmas Kerang

1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		46.890.000,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		96.636.000,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20 Orang		6.434.000,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3 Orang		5.808.000,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang		9.768.000,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%		0,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	-		0,00		UPTD Puskesmas Kerang
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	9 Orang		0,00		UPTD Puskesmas Kerang
					UPTD Puskesmas Long Kali				3.134.756.030,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				0,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB		2.772.916.030,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100		201.605.430,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		15.000.000,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		110.405.430,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		76.200.000,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Presentase pengadaan barang milik daerah yang dadakan	-		76.196.600,00		UPTD Puskesmas Long Kali

					Daerah						
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		39.000.000,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		37.196.600,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-		68.752.000,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		2.500.000,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		66.252.000,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100		105.812.000,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		35.812.000,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		20.000.000,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		50.000.000,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100		2.320.550.000,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		2.320.550.000,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %		361.840.000,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %		361.840.000,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang		18.000.000,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang		20.000.000,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang		18.000.000,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0 Orang		20.000.000,00		UPTD Puskesmas Long Kali

						Sesuai Standar					
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen		20.000.000,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		20.000.000,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen		5.000.000,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		190.840.000,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Long Kali
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang		20.000.000,00		UPTD Puskesmas Long Kali
					UPTD Puskesmas Pasir Belengkong				1.240.425.559,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				0,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB		329.458.892,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100		214.775.492,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		2.893.200,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		52.832.937,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		52.107.355,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		7.696.000,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong

1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		99.246.000,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-		62.277.400,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		570.000,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		61.707.400,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		-		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100		52.406.000,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		18.546.000,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		33.860.000,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %		183.766.667,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100%		2.660.000,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	12 PAKET		2.660.000,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %		181.106.667,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1100 Orang		32.546.667,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2038 Orang		15.000.000,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1216 Orang		20.300.000,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut	748 Orang				UPTD Puskesmas Pasir

					pada Usia Lanjut	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			10.000.000,00		Belengkong
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1216 Orang		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145 Orang		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	244 Orang		14.980.000,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	239 Orang		5.000.000,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 dokumen		7.920.000,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	38 Orang		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		45.360.000,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	39 Orang		-		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%		0,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	-		0,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	11 Orang		0,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90		7.500.000,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang mempraktikkan PHBS	-		7.500.000,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup	1 Dokumen		7.500.000,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong

						Bersih dan Sehat					
X					NON URUSAN				0,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				0,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB		719.700.000,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
X	XX	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100		719.700.000,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
X	XX	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		719.700.000,00		UPTD Puskesmas Pasir Belengkong
					UPTD Puskesmas Kayungo				1.225.913.659,00		UPTD Puskesmas Kayungo
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00		UPTD Puskesmas Kayungo
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				0,00		UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB		952.673.133,00		UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100		375.807.900,00		UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		122.015.900,00		UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		26.000.000,00		UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		227.792.000,00		UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah yang dadakan	-		65.200.000,00		UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		52.000.000,00		UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit		13.200.000,00		UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-		59.500.000,00		UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		2.500.000,00		UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	1 Laporan		57.000.000,00		UPTD Puskesmas Kayungo

						Listrik yang Disediakan					
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100		21.749.200,00		UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		21.749.200,00		UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100		430.416.033,00		UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		430.416.033,00		UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %		273.240.526,00		UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %		273.240.526,00		UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	125 Orang		10.766.000,00		UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	119 Orang		2.376.000,00		UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	114 Orang		5.000.000,00		UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	904 Orang		75.629.326,00		UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	775 Orang		18.078.000,00		UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4454 Orang		6.484.000,00		UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	591 Orang		18.494.000,00		UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	409 Orang		12.176.000,00		UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	113 Orang		12.176.000,00		UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan	5 Orang				UPTD Puskesmas

					Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			10.368.000,00	Kayungo
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen		9.183.200,00	UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		15.000.000,00	UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		34.800.000,00	UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen		5.000.000,00	UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		20.710.000,00	UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18 Orang		7.000.000,00	UPTD Puskesmas Kayungo
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	128 Orang		10.000.000,00	UPTD Puskesmas Kayungo
					UPTD Puskesmas Sebakung Taka				1.282.744.716,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				0,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB		996.758.300,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100		167.529.300,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		8.800.000,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		16.100.000,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		25.094.300,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		17.700.000,00	UPTD Puskesmas Sebakung Taka

1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216 Laporan		99.835.000,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah yang dadakan	-		126.729.000,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit		126.729.000,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-		39.000.000,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		39.000.000,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100		25.500.000,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		25.500.000,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100		638.000.000,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		638.000.000,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %		285.986.416,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %		62.724.416,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit		36.000.000,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit		8.276.416,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket		18.448.000,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %		223.262.000,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka

					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	yang disediakan					
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	53 Orang		36.167.000,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	32 Orang		7.920.000,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33 Orang		5.280.000,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76 Orang		44.352.000,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang		2.772.000,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang		5.544.000,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	56 Orang		7.920.000,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34 Orang		7.920.000,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35 Orang		5.280.000,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	6 Orang		5.280.000,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang		3.195.000,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7 Orang		8.976.000,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	35 Dokumen		14.256.000,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	177 Dokumen		68.400.000,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%		0,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan	Presentase kebutuhan SDMK yang	-		0,00		UPTD Puskesmas

					Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	direncanakan untuk UKP dan UKM					Sebakung Taka
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4 Orang		0,00		UPTD Puskesmas Sebakung Taka
					UPTD Puskesmas Muara Komam				3.016.228.346,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				0,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB		2.285.833.046,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100		63.303.946,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		5.000.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		25.913.946,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		32.390.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-		85.310.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1.310.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		84.000.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100		46.219.100,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		36.219.100,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		-		UPTD Puskesmas Muara Komam

1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		10.000.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100		2.091.000.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		2.091.000.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %		710.405.300,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %		15.000.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	3862 Keluarga		15.000.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %		695.405.300,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	249 Orang		16.290.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	237 Orang		15.048.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35 Orang		9.996.500,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	245 Orang		43.560.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	750 Orang		42.000.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9250 Orang		43.596.300,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6201 Orang		18.500.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3968 Orang		3.960.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam

1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	181 Orang		3.960.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	25 Orang		11.436.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	220 Orang		19.876.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	300 Orang		21.196.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen		29.984.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen		34.020.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		25.000.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		65.000.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen		5.080.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1000 Orang		12.504.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen		33.568.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		222.650.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50 Orang		9.740.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang		8.440.500,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%		0,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan	-		0,00		UPTD Puskesmas Muara Komam

					Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	UKM					
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	10 Orang		0,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90		19.990.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase UKBM aktif	-		19.990.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		19.990.000,00		UPTD Puskesmas Muara Komam
					UPTD Puskesmas Krayan				1.161.553.123,00		UPTD Puskesmas Krayan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				0,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB		885.874.123,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100		214.899.903,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		22.248.623,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		46.946.780,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		31.798.500,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		113.906.000,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-		76.536.420,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1.500.000,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		75.036.420,00		UPTD Puskesmas Krayan

1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100		46.537.800,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		27.767.800,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		-		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		18.770.000,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100		547.900.000,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		547.900.000,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %		275.679.000,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %		30.700.000,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	7 Unit		30.700.000,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %		244.979.000,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135 Orang		6.600.000,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	129 Orang		20.700.000,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127 Orang		15.120.000,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	685 Orang		27.648.000,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	936 Orang		4.620.000,00		UPTD Puskesmas Krayan

1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1116 Orang		1.452.000,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	505 Orang		28.512.000,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	506 Orang		4.752.000,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	148 Orang		4.752.000,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8 Orang		2.538.000,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	148 Orang		5.760.000,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang		3.168.000,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		13.152.000,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		5.340.000,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		88.042.000,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen		4.843.000,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen		7.296.000,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9 Orang		-		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9 Orang		684.000,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	100		0,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen		0,00		UPTD Puskesmas

					Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					Krayan
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%		-		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	-		-		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	3 Orang		0,00		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK.	-		-		UPTD Puskesmas Krayan
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0 Orang		-		UPTD Puskesmas Krayan
					UPTD Puskesmas Lolo				1.053.350.058,00		UPTD Puskesmas Lolo
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				0,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB		708.075.940,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100		80.253.550,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		3.353.700,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		38.320.050,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		38.579.800,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah yang dadakan	-		21.240.000,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit		21.240.000,00		UPTD Puskesmas Lolo

1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-		61.042.930,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		680.000,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		60.362.930,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100		26.447.460,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		3.987.460,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		22.460.000,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100		519.092.000,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		519.092.000,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %		345.274.118,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %		9.449.300,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket		9.449.300,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %		335.824.818,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	168 Orang		5.734.000,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	168 Orang		2.074.000,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	168 Orang		6.475.000,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	876 Orang		61.390.000,00		UPTD Puskesmas Lolo

						Standar					
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2004 Orang		6.978.000,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6204 Orang		7.049.750,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	793 Orang		15.211.000,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2593 Orang		4.876.000,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang		1.774.000,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	12 Orang		5.998.000,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	166 Orang		4.774.000,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	233 Orang		2.830.000,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		210.661.068,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	33 Orang		0,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang		0,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%		0,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	-		0,00		UPTD Puskesmas Lolo
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	5 Orang		0,00		UPTD Puskesmas Lolo
					UPTD Puskesmas Long Ikis						UPTD Puskesmas Long

									4.043.848.900,00		Ikis
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				0,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB		3.605.456.900,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100		18.225.300,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1.725.300,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket				UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1.140.000,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		15.360.000,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah yang dadakan	-		0,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		0,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-		161.153.600,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		161.153.600,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100		40.000.000,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		40.000.000,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100		3.386.078.000,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		3.386.078.000,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Presentase pemenuhan layanan	100 %				UPTD Puskesmas Long

					KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKM dan UKP			438.392.000,00		Ikis
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %		-		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit		0,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1 Unit		-		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit		0,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %		438.392.000,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	454 Orang		25.704.000,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	435 Orang		7.920.000,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	435 Orang		7.920.000,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2398 Orang		162.096.000,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2438 Orang		7.920.000,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19433 Orang		3.960.000,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2276 Orang		23.760.000,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8117 Orang		3.960.000,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan	367 Orang		3.960.000,00		UPTD Puskesmas Long Ikis

						Kesehatan Sesuai Standar					
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	23 Orang		40.892.000,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	531 Orang		3.960.000,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	144 Orang		3.960.000,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen		130.500.000,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	102 Orang		3.960.000,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9 Orang		3.960.000,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	52 Orang		3.960.000,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%		0,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	-		0,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	15 Orang		0,00		UPTD Puskesmas Long Ikis
					UPTD Puskesmas Kuaro				2.051.567.612,00		UPTD Puskesmas Kuaro
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00		UPTD Puskesmas Kuaro
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				0,00		UPTD Puskesmas Kuaro
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB		1.643.080.000,00		UPTD Puskesmas Kuaro
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100		143.040.000,00		UPTD Puskesmas Kuaro
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		6.000.000,00		UPTD Puskesmas Kuaro

					Kantor						
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		45.000.000,00		UPTD Puskesmas Kuaro
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		8.000.000,00		UPTD Puskesmas Kuaro
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		84.040.000,00		UPTD Puskesmas Kuaro
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-		80.000.000,00		UPTD Puskesmas Kuaro
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		80.000.000,00		UPTD Puskesmas Kuaro
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100		60.000.000,00		UPTD Puskesmas Kuaro
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		60.000.000,00		UPTD Puskesmas Kuaro
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100		1.360.040.000,00		UPTD Puskesmas Kuaro
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1.360.040.000,00		UPTD Puskesmas Kuaro
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %		408.487.612,00		UPTD Puskesmas Kuaro
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %		51.837.612,00		UPTD Puskesmas Kuaro
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit		30.597.612,00		UPTD Puskesmas Kuaro
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	12 Paket		21.240.000,00		UPTD Puskesmas Kuaro
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %		356.650.000,00		UPTD Puskesmas Kuaro
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang		4.884.000,00		UPTD Puskesmas Kuaro
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Balita yang Mendapatkan	430 Orang				UPTD Puskesmas Kuaro

					Balita	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			52.326.000,00		
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2020 Orang		19.404.000,00		UPTD Puskesmas Kuaro
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	29 Orang		11.808.000,00		UPTD Puskesmas Kuaro
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	450 Orang		6.780.000,00		UPTD Puskesmas Kuaro
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	600 Orang		9.552.000,00		UPTD Puskesmas Kuaro
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		52.912.000,00		UPTD Puskesmas Kuaro
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen		16.890.000,00		UPTD Puskesmas Kuaro
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang		3.990.000,00		UPTD Puskesmas Kuaro
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		172.200.000,00		UPTD Puskesmas Kuaro
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18 Orang		5.904.000,00		UPTD Puskesmas Kuaro
					UPTD Puskesmas Padang Pengrapat				1.418.122.246,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				0,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB		1.062.111.428,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100		151.878.700,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		9.989.600,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	3 Paket		25.000.000,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat

						Disediakan					
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		33.914.100,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		18.000.000,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		64.975.000,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah yang dadakan	-		19.733.400,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit		19.733.400,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-		61.195.510,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1.192.100,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		60.003.410,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100		48.165.168,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		25.186.368,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		22.978.800,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		0,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100		781.138.650,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		781.138.650,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %		356.010.818,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %		23.102.045,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan	5 Unit		-		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat

						Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center					
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket		23.102.045,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %		332.908.773,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145 Orang		17.540.000,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang		13.464.000,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40 Orang		4.884.000,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang		28.882.000,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	920 Orang		4.874.000,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600 Orang		4.872.000,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	750 Orang		6.600.000,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 Orang		4.888.000,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 Orang		4.886.000,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	20 Orang		5.000.000,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	35 Orang		4.760.000,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	12 Dokumen		36.792.000,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat

						Gizi Masyarakat					
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen		4.900.000,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen		14.440.000,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4 Dokumen		4.941.000,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		5.136.000,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		151.067.773,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen		4.982.000,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80 Orang		5.000.000,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	30 Orang		5.000.000,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%		0,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	-		0,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	15 Orang		0,00		UPTD Puskesmas Padang Pengrapat
					UPTD Puskesmas Tanjung Aru				1.317.717.202,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				0,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB		929.921.822,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100		169.223.222,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru

1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		5.000.000,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		18.000.000,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		13.579.722,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		58.366.500,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		7.765.000,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		66.512.000,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	-		18.820.000,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1.320.000,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		17.500.000,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100		36.122.000,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		26.706.000,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		9.416.000,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100		705.756.600,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		705.756.600,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %		387.795.380,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	100 %		62.195.278,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang	10 Unit		22.545.278,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru

						Disediakan					
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket		39.650.000,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %		325.600.102,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	136 Orang		12.590.000,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	148 Orang		1.880.000,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	148 Orang		1.880.000,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	865 Orang		40.952.000,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	256 Orang		1.880.000,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7568 Orang		1.880.000,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	132 Orang		21.896.000,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	850 Orang		4.172.000,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	565 Orang		940.000,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	245 Orang		7.880.000,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	22 Orang		1.880.000,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang		7.367.000,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen				UPTD Puskesmas

					Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			12.866.000,00		Tanjung Aru
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		12.866.000,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen		10.900.000,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		181.891.102,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang		940.000,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8 Orang		940.000,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%		0,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100		0,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	24 Orang		0,00		UPTD Puskesmas Tanjung Aru
					UPTD Puskesmas Batu Kajang				1.826.038.000,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				0,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP Dinas Kesehatan	BB		1.492.375.000,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100		147.551.800,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		3.594.000,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		57.057.800,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	120 Laporan				UPTD Puskesmas

					dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			86.900.000,00		Batukajang
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah yang dadakan	100		26.500.000,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit		26.500.000,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100		31.003.200,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		660.000,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		30.343.200,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100		65.320.000,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		36.000.000,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		7.320.000,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		22.000.000,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase jumlah UPT yang melakukan pelayanan BLUD	100		1.222.000.000,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1.222.000.000,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %		333.663.000,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100 %		333.663.000,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	510 Orang		13.200.000,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	509 Orang		3.960.000,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	442 Orang		3.960.000,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Balita yang Mendapatkan	3977 Orang				UPTD Puskesmas

					Balita	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			39.420.000,00		Batukajang
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4260 Orang		7.920.000,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17361 Orang		18.360.000,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	810 Orang		44.352.000,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6100 Orang		9.665.000,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	590 Orang		8.510.000,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	20 Orang		7.680.000,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	453 Orang		3.600.000,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	813 Orang		5.208.000,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen		6.000.000,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen		161.828.000,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%		0,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDMK yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100		0,00		UPTD Puskesmas Batukajang
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	9 Orang		0,00		UPTD Puskesmas Batukajang

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Paser tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja perangkat daerah dalam prioritas pembangunan, visi dan misi daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser tahun 2025 merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai nilai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan rencana kerja pembangunan daerah perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. Melaksanakan perubahan Renja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanan Renja Perubahan tahun 2025.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dokumen Perubahan Renja tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025.

Tana Paser, 28 April 2025

Kepala Dinas Kesehatan

Amri Yulihardi, S.S.T.P., M.Si.
19840726200212100 1

DPPKBPPPA PEMERINTAH KABUPATEN PASER

P-RENJA TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA(P-Renja)

Perangkat Daerah Tahun 2025

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PASER





Jalan K.H.Akhmad Dahlan No.54 Telp/ Fax. (0543) 23636



TANA PASER

2025

DPPKBPPPA

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Alah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta hidayah-Nya kami dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Pengendalian Pendududuk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2025 ini memuat target tujuan, sasaran, program serta strategi impelementasi yang ditetapkan untuk dapat direalisasikan. Perubahan Renja tahun 2025 ini diharapkan dapat dijadikan Pedoman Pelaksanaan tugas bagi seluruh aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operaisonalnya memiliki nilai kinerja yang mengarah pada tercapainya sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Demikian Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser Tahun 2025 ini dibuat, semoga dapat memberikan arah bagi kelancaran tugas dan peningkatan kinerja aparat.

Tana Paser 22 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN DPPKB dan PPPA PASER

Amir Faisol,SKM,M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19671128 199103 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2025 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II 2025 9
2.2 Analisis Capaian kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser 35
2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025 48
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 50
3.1 Tujuan dan Sasaran 50
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 54
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025 70
BAB IV PENUTUP 85
4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja 85
4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan 86
4.3 Rencana Tindak Lanjut 86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.I Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025 (Tabel E.55) 13

Tabel 2.2 Pencapaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 (Tabel TC.30) 30

Tabel 3.I Perubahan Pencapaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 53

Tabel 3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (TC. 31)..... 56

Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025 (TC. 33)……. …… 71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomo/2025r 100.3.3.2/KEP-741 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten paser sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perem;piuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum.

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2025 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden RI Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ;
11. Peraturan Presiden Tentang RPJMD Nomor 12 Tahun 2025
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Bupati Nomor 18 Yahun 2024 Tentang rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser;
22. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistimatika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Pengendal;ian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser, proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja;

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan 1 dan Triwulan II tahun 2025

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2025 hingga Triwulan I dan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser.

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025.

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2025 yang disertai perubahan target

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (Dua) TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, adalah :

1. Pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, indikator persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG ditargetkan sebesar **30%**, namun realisasi capaian mencapai **100%**. Hasil ini menunjukkan kinerja yang melampaui target dan mencerminkan meningkatnya komitmen serta kapasitas perangkat daerah dalam penerapan PPRG secara menyeluruh.
2. Pada kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota, indikator kinerja yang direncanakan adalah jumlah organisasi masyarakat yang difasilitasi dengan target **10 organisasi**. Namun, realisasi capaian hanya sebesar **2 organisasi**, sehingga tidak memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan partisipasi organisasi masyarakat, keterjangkauan program, serta keterbatasan dukungan sumber daya. Ke depan, diperlukan strategi yang lebih optimal melalui peningkatan koordinasi, sosialisasi, dan pendampingan agar capaian sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Pada Program Peningkatan Kualitas Keluarga, indikator kinerja yang

direncanakan adalah persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan dengan target **50 lembaga**. Namun, realisasi capaian hanya sebesar **10 lembaga**, sehingga belum memenuhi target yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan jangkauan program. Ke depan, diperlukan strategi peningkatan koordinasi, pembinaan berkelanjutan, serta optimalisasi dukungan agar capaian dapat lebih sesuai dengan target yang direncanakan.

4. Pada kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak di wilayah kerja Kabupaten/Kota, ditetapkan target **10 lembaga** yang difasilitasi. Namun, realisasi capaian hanya sebesar **3 lembaga**, sehingga belum memenuhi target yang direncanakan. Hal ini antara lain disebabkan keterbatasan dukungan sumber daya serta rendahnya partisipasi lembaga yang terjangkau. Ke depan, diperlukan peningkatan koordinasi, pendampingan, serta strategi sosialisasi yang lebih efektif untuk mengoptimalkan capaian sesuai target kinerja.
5. Pada Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), indikator kinerja yang direncanakan adalah *nilai evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA)* dengan target sebesar **650 poin**. Realisasi capaian mencapai **601 poin**, sehingga belum memenuhi target yang ditetapkan. Namun demikian, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan signifikan dengan naiknya peringkat Kabupaten Layak Anak dari **Pratama** menjadi **Madya**. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pemenuhan hak anak, meskipun ke depan masih diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kualitas layanan agar target kinerja dapat tercapai secara optimal.
6. Pada kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kabupaten/Kota, indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah lembaga penyedia layanan yang difasilitasi dengan target **10 lembaga**. Namun, realisasi capaian masih **0 lembaga**, sehingga tidak memenuhi target yang direncanakan. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan

sumber daya, minimnya partisipasi lembaga, serta kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan. Ke depan, diperlukan upaya optimalisasi strategi, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pendampingan intensif agar target kinerja dapat tercapai.

7. Program Pengendalian Penduduk, indikator kinerja yang digunakan adalah *Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR)* dengan target sebesar **13 per 1.000 penduduk**. Realisasi capaian menunjukkan angka **0,73 per 1.000 penduduk**, yang berarti jauh lebih rendah dari target yang ditetapkan. Secara metodologis, capaian ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian data atau belum optimalnya pencatatan, karena angka kelahiran kasar secara umum tidak mungkin serendah itu. Jika capaian ini benar adanya, maka rendahnya angka kelahiran dapat berdampak negatif terhadap dinamika kependudukan, khususnya dari sisi regenerasi penduduk. Namun, apabila terjadi karena kendala teknis data, maka perlu dilakukan verifikasi dan validasi lebih lanjut untuk memastikan keakuratan hasil pengukuran.
8. Pada kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah organisasi kemasyarakatan yang berperan dengan target **12 organisasi**. Realisasi capaian hanya sebesar **5 organisasi**, sehingga belum memenuhi target kinerja yang direncanakan. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih terbatasnya keterlibatan organisasi kemasyarakatan serta kendala koordinasi di lapangan. Ke depan, diperlukan strategi penguatan peran, peningkatan pendampingan, serta kerjasama lintas sektor agar partisipasi organisasi kemasyarakatan dapat lebih optimal sesuai target yang ditetapkan.
9. Pada kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah organisasi kemasyarakatan yang berperan dengan target **38 organisasi**. Namun, realisasi capaian masih **0 organisasi**, sehingga tidak memenuhi target yang direncanakan. Kondisi

ini dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi organisasi kemasyarakatan, keterbatasan dukungan, serta belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi program. Ke depan, diperlukan upaya intensif melalui penguatan sosialisasi, pendampingan, serta kolaborasi lintas sektor agar peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga dapat lebih optimal sesuai target kinerj.

Hasil evaluasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2025sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel E.55

Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Format E.55

No	Sasaran	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat daerah pada Tahun akhir Renstra 2021-2026		Realisasi Capaianan Kinerja Renstra Perangkat daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			K	RP	K
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah																				69,93	0			
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	%	***80%***	***48.458.409.564***	74	**25.220.090.976,00**	80	**12.633.337.120,00**	74	**2.662.414.872,00**	74	**2.705.694.395,00**		**0,00**		**0,00**	74	**5.368.109.267,00**	74	30.588.200.243	92,50	42,49	
																					0	0			

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**B**			**69,63**	**800.775.838,00**	**70**	**226.611.516,00**	**69,63**	**59.754.000,00**	**69,63**	**67.460.718,00**		**0,00**		**0,00**	**69,63**	127.214.718	69,63	927.990.556	99,47	56,14	
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Dokumen	6	***486.383.906***	12	678.242.074,00	10	156.225.516,00	4	46.254.000,00	3	25.717.200,00					7	71.971.200	19	750.213.274	70,00	46,07	
2		Evaluasi Kinjerja perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Laporan	4	***80.809.142***	9	122.533.764,00	9	70.386.000,00	3	13.500.000,00	2	41.743.518,00					5	55.243.518	14	177.777.282	55,56	78,49	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun**	**%**	**100**	***43.239.811.066***	**100**	**22.758.965.045,00**	**100**	**11.754.654.062,00**	**100**	**2.435.564.971,00**		**2.431.203.765,00**		**0,00**		**0,00**	**100**	**4.866.768.736**	**200**	**27.625.733.781**	**100,00**	**41,40**	
3		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjnagan ASN	orang	60	***35.460.723.197***	14	22.132.493.576,00	60	11.614.240.152,00	47	2.392.218.371,00	55	2.419.018.125,00					55	4.811.236.496	69	26.943.730.072	91,67	41,43	
4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Dokumen	4	***563.670.518***	19	626.471.469,00	4	140.413.910,00	1	43.346.600,00	1	12.185.640,00					2	55.532.240	21	682.003.709	50,00	39,55	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen dan pelaporan Barang Milik Daerah perangkat daerah yang tersusun**	**%**	**100**	***77.504.700***	**100**	**80.300.402,00**	**100**	**40.000.000,00**	**100**	**33.021.200,00**	**70**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**100**	**33.021.200**	**200**	**113.321.602**	**100**	**82,55**	

5		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	***77.504.700***		80.300.402,00	1	40.000.000,00	1	33.021.200,00	1	0,00				2	33.021.200	2	113.321.602	100,00	82,55	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Pada Owerangkat Daerah yang Terlaksana	%	100	***703.032.496***			100	15.158.987,00	70	0,00	70					70	**0**	**70**	**0**	70,00	**0,00**	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	***703.032.496***			1	15.158.987,00	1		1	12.130.800,00				2	12.130.800	2	12.130.800	100,00	80,02	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	***2.115.446.526***	**100**	**1.116.099.639,00**	**100**	**344.850.745,00**	**100**	**127.509.178,00**	**75**	**71.574.031,00**		**0,00**		**0,00**	**100**	**199.083.209**	**200**	**1.315.182.848**	**100,00**	**57,73**	
6		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	10	***11.982.080***	22	6.869.220,00	10	22.976.677,00	10		4	0,00					14	0	36	6.869.220	100,00	0,00	
7		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	70	***575.095.720***	70	283.101.707,00	70	165.863.068,00	65	65.398.000,00	5	22.900.000,00					70	88.298.000	140	371.399.707	100,00	53,24	
8		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Ceatakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	10	***89.000.000***	50	34.798.956,00	10	7.480.000,00	10	7.090.000,00	10	0,00					20	7.090.000	70	41.888.956	100,00	94,79	
9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	485	***744.188.018***	54	791.329.756,00	485	148.531.000,00	200	55.021.178,00	200	48.674.031,00					400	103.695.209	454	895.024.965	82,47	69,81	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah yang tersedia**	**%**	**100**	***26.500.000***	**100**	**159.032.500,00**	**100**	**131.261.760,00**	**100**	**0,00**	**70**	**99.084.150,00**		**0,00**		**0,00**	100	99.084.150	200	258.116.650	100,00	75,49	
10		Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	8	***26.500.000***	8	159.032.500,00	8	131.261.760,00	8		5	99.084.150,00					5	99.084.150	13	258.116.650	62,50	75,49	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	**Persentase jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah yang tersedia**	**%**	**100**	***466.460.050***	**100**	**146.311.773,00**	**100**	**59.349.250,00**	**100**	**6.565.523,00**	**75**	**33.109.703,00**		**0,00**		**0,00**	100	39.675.226	200	185.986.999	100,00	66,85	
11		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	150	***33.000.000***	250	48.159.632,00	150	14.350.050,00	50		150	12.366.000,00					200	12.366.000	450	60.525.632	100,00	0,00	
12		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	***345.575.240***	12	98.152.141,00	12	44.999.200,00	6	6.565.523,00	6	20.743.703,00					12	27.309.226	24	125.461.367	100,00	60,69	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah	**Persentase Sarana Prasarana Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang terpelihara**	%	**100**	***409.160.859***	100	**158.605.779,00**	100	**61.450.800,00**	100	**0,00**	0	**3.262.028,00**		**0,00**		**0,00**	100	3.262.028	200	161.867.807	100,00	5,31	
13		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan	Unit	7	***222.516.552***	13	122.680.679,00	7	48.550.800,00	7		0	3.262.028,00					7	3.262.028	20	125.942.707	100,00	0,00	

			Perizinananya																				
14		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	8	***90.701.169***	16	14.692.105,00	10	4.990.000,00	8		0	0,00				8	0	24	14.692.105	80,00	0,00	
15		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	***21.320.000***	1	14.584.995,00	1	5.000.000,00	1		0	0,00				1	0	2	14.584.995	100,00	0,00	
16		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	***10.652.000***	13	6.648.000,00	1	2.910.000,00	1		0	0,00				1	0	14	6.648.000	100,00	0,00	
	Meningkatnya Keseteraan gender		Persentase Perempuan Dalam legislatif	%	23		23	2.067.006.690,00	20	392.546.776,00	20	67.660.700,00	20%	0,00		0,00		20	67.660.700	43	2.134.667.390	100,00	17,24	
			Persentase perempuan dalam Jabatan Tenaga Profesional	%	43,59		43,59		43,59		0		43,59					43,59	0	87	0	100,00		
			persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan Dalam pemerintahan	%	28		28		28		0		28					28	0	56	0	100,00		
		Program Pengarusutamanaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi perempuan	%	49,5	***2.552.568.416***	10,00	**2.067.006.690,00**	15,00	**207.924.000,00**	0	**40.810.900,00**	15	**50.749.200,00**		**0,00**		15	91.560.100	25	2.158.566.790	100,00	44,04	
			Persentase Perangkat daerah yang Melaksanakan PPRG	%	100	-	41,00		30,00		13		100					100	0	100	0	100,00		

		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	**Persentase pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota**	%	**100**	***404.674.806***	100	**372.824.936,00**	100	**48.572.350,00**	30	**11.519.800,00**	100	**23.922.400,00**		-		-	100	35.442.200	200	408.267.136	100,00	72,97	
17		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan	Perangkat Daerah	20	***242.910.428***	60	372.824.936,00	41	48.572.350,00	0	11.519.800,00	41	23.922.400,00					41	35.442.200	101	408.267.136	100,00	72,97	
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	**Jumlah Organisasi Masyarakat yang di Fasilitasi**	Ormas	**60**	***989.839.610***	12	**1.281.265.439,00**	10	**91.776.650,00**	2	**29.291.100,00**	2	**26.826.800,00**		**0,00**		**0,00**	4	56.117.900	16	1.337.383.339	40,00	61,15	
		Sosial Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan	OPD	**5**	***396.721.138***			4	**27.200.000,00**	4		4	**5.600.000,00**					8	5.600.000	8	5.600.000	100,00	20,59	

			Pembangunan Responsif Gender																				
19		Advokasi Kebijakan dan pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapat Advokasi dan Pendampingan kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Ormas	1	***410.857.139***	20	1.281.265.439,00	4	64.576.650,00	4	29.291.100,00	4	26.826.800,00					8	56.117.900	28	1.337.383.339	100,00	0,00	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan**	Lembaga	**35**	***1.158.054.000***	25	**412.916.315,00**	20	**67.575.000,00**	0	**0,00**	10	**0,00**		**0,00**		**0,00**	0	0	25	412.916.315	0,00	0,00	
21		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah sumber Daya lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Mendapat Peningkatan	Lembaga	20	***358.437.990***	190	412.916.315,00	100	67.575.000,00	0		50	0,00					50	0	240	412.916.315	50,00	0,00	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi keluarga yang Mendapatka**	%		***566.113.267***	44	**0,00**	50	**179.041.776,00**	10	**26.849.800,00**	10	**13.400.000,00**		**0,00**		**0,00**	20	36.770.000	64	36.770.000	40,00	20,54	

			n Pembinaan dan Penguatan																				
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ kota	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas keluarga KG dan Hak Anak yang difasilitasi**	Lembaga	**10**	***163.238.516***	10	**0,00**	10	**179.041.776,00**	3	**26.849.800,00**	3	**13.400.000,00**		**0,00**		**0,00**	6	36.770.000	16	36.770.000	60,00	20,54	
23		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan (Dengan Satuan:Lembaga)	Lembaga	5	***163.238.516***	5		5	179.041.776,00	2	26.849.800,00	1	9.920.200,00					3	36.770.000	8	36.770.000	60,00	20,54	
		Program pengelola Sistem Data Gender dan ANAK	**Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Sistem data Gender atau Data Anak**	%	**0,9524**	***549.775.063***	17	**93.914.322,00**	50	**5.581.000,00**	0	**0,00**	50	**4.878.000,00**		**0,00**		**0,00**	50	4.878.000	67	98.792.322	100,00	87,40	
		Pengumpulan Pengelolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaa	**Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak**	Dokumen	**1**	***549.775.063***	1	93.914.322,00	1	5.581.000,00	0	0,00	1	4.878.000,00		**0,00**		**0,00**	1	4.878.000	2	98.792.322	100,00	87,40	

		n Data di tingkat Daerah Kabupaten /Kota																						
24		Penyediaan Data Gender dan Anak kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang tersedia	Dokumen	5	***449.775.063***	7	93.914.322,00	5	5.581.000,00	0		5	4.878.000,00					5	4.878.000	12	98.792.322	100,00	87,40	
	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan pemenuhan Hak Serta Kualitas Hidup Anak		Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani	%	100		100	650.178.750,00	100	415.128.233,00		62.374.800,00	100	11.306.000,00		0,00		0,00	100	66.850.800	200	717.029.550	100	16,10	
			Persentase kekerasan terhadap Anak yang tertangani	%	100		100		100				100						100		200	0	100,00		
		Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan	%	100	***5.000.000***			100	60.714.362,00	100	6.830.000,00	100						100	6.830.000	100	6.830.000	100,00	11,25	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Yang di Fasilitasi	Lembaga	60	***5.000.000***			40	60.714.362,00	0	6.830.000,00	0						0	6.830.000	0	6.830.000	0,00	11,25	

		Penguatan jejaring antar lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	5	***5.000.000***			1	60.714.362,00	1	6.830.000,00	0	4.040.000,00					1	10.870.000	1	10.870.000	100,00	17,90	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	**Nilai Evaluasi kabupaten Layak Anak (KLA)**	point	**800**	***681.191.950***	653	**650.178.750,00**	650	**210.663.871,00**	819	**38.903.000,00**	819	**11.306.000,00**		**0,00**		**0,00**	819	50.209.000	819	700.387.750	126,00	23,83	
		Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	**Jumlah lembaga/Institusi yang dibina**	**lembaga**	**10**	***222.883.319***	**9**	**434.003.450,00**	**10**	**132.376.150,00**	**1**	**26.228.000,00**	**9**	**11.306.000,00**		**0,00**		**0,00**	10	37.534.000	19	471.537.450	100,00	28,35	
25		Advokasi kebijakan dan Pendampingan pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah Media dan dunia Usaha	Organisasi	10	***18.420.000***	111	434.003.450,00	10	132.376.150,00	1	26.228.000,00	9	11.306.000,00					10	37.534.000	121	471.537.450	100,00	28,35	

		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Yang difasilitasi**	Lembaga	**10**	***458.308.631***	10	**216.175.300,00**	10	**78.287.721,00**	2	**12.675.000,00**	5	**0,00**		**0,00**		**0,00**	2	12.675.000	12	228.850.300	20,00	16,19	
26		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	5	***167.718.494***	1	95.299.830,00	1	52.864.221,00	0		0	0,00					0	0	1	95.299.830	0,00	0,00	
27		Penguatan jejaring antar lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Dokumen	5	***204.300.137***	5	120.875.470,00	5	25.423.500,00	2	12.675.000,00	3						5	12.675.000	10	133.550.470	100,00	49,86	
		Program Perlindungan Khusus Anak	**Cakupan Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan khusus**	%	**100**	***1.952.218.374***	100	**0,00**	100	**143.750.000,00**	0	**16.641.800,00**	100	**0,00**		**0,00**		**0,00**	100	16.641.800	100	16.641.800	100,00	11,58	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi anak	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan**	Lembaga	**10**	***14.000.000***			10	**143.750.000,00**	0	**16.641.800,00**	0						0	16.641.800	0	16.641.800	0,00	11,58	

		yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Perlindungan Kusus Yang difasilitasi**																				
		Pengembangan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	***14.000.000***			1	143.750.000,00	0	16.641.800,00	0	18.137.200,00					0	34.779.000	0	34.779.000	0,00	24,19	
	Menurunnya Angka kelahiran		Angka kelahiran Total (TFR)	Angka	1,5		2,19	**1.196.115.132,00**	2,19	**522.109.799,00**		**109.428.827,00**	2,19	**65.715.868,00**		**0,00**		**0,00**	2,19	175.144.695	4,38	1.371.259.827	100	33,55	
		Program Pengendalian penduduk	**Angka kelahiran kasar**	%	**100**	***1.440.540.636***	18,63	**1.196.115.132,00**	13,0	**522.109.799,00**	0,37	**109.428.827,00**	0,73	**65.715.868,00**		**0,00**		**0,00**	0,73	175.144.695	19,36	1.371.259.827	194,3846154	33,55	
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengedalian Kuantitas Penduduk	**Jumlah Dokumen Yang di selaraskan**	Dokumen	**5**	***1.086.747.636***	1	**393.356.559,00**	1	**127.309.754,00**		**55.730.600,00**	1	**8.544.400,00**		**0,00**		**0,00**	1	64.275.000	2	457.631.559	100,00	50,49	
29		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design pembangunan kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	Dokumen	5	***314.916.688***		68.483.800,00	1	28.437.000,00		10.812.800,00	1	4.272.000					1	15.084.800	1	83.568.600	1,0	53,05	

31		Advokasi, sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan kependudukan Jalur Formal di satuan pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan, Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalujr Non Formal dan Informal	Satuan Pendidikan	50	***94.040.658***	170	282.809.650,00	50	72.119.500,00		30.896.800,00	50	4.272.400,00					50	35.169.200	220	317.978.850	100,00	48,77	
32		Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Pemanfaatan kajian dampak kependudukan Beserta Model Solusi strategi Sebagai Peringatan Dini Dampak kependudukan Kepada pemangku Kepentingan	Organisasi	50	***47.025.329***		42.063.109,00	50	26.753.254,00	25	14.021.000,00	25	0					50	14.021.000	50	56.084.109	100,00	52,41	
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Penduduk**	Dokumen	**1**	***353.793.000***	5	**802.758.573,00**	1	**394.800.045,00**		**53.698.227,00**	1	**57.171.468,00**		**0,00**		**0,00**	1	110.869.695	6	913.628.268	100,00	28,08	
34		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga	Laporan	5	***28.900.000***	4	114.254.584,00	1	91.504.000,00		8.999.000,00	0	38.185.000,00					0	47.184.000	4	161.438.584	0,00	51,56	
35		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data dan Informasi	Dokumen	1	***13.500.000***	1	285.121.317,00	1	93.987.000,00		38.845.600,00	0	12.000.000,00					0	50.845.600	1	335.966.917	0,00	54,10	

			keluarga tersedianya																					
36		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan Pencatatan dan pengumpulan Data keluarga	Laporan	5	***19.100.000***	5	374.135.072,00	1	137.018.000,00			0	0,00					0	0	5	374.135.072	0,00	0,00	
37		Pengolahan dan Pelaporan Data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan pelayanan KB	Dokumen	1	***48.410.000***	1	29.247.600,00	1	43.968.000,00		5.853.627,00	0	6.986.468,00					0	12.840.095	1	42.087.695	0	29,20	
		Pembentukan dan operasional Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memeperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Dengan Satuan:Unit)	Unit	21	***31.410.000***			5	15.000.000,00			1	5.240.000,00					1	5.240.000	1	5.240.000	20	34,93	
		Penyusunan Profil prgoram pembangunan keluarga, kependudukan dan Kelouarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	1	***48.435.000***			1	13.323.045,00			0						0	0	0	0	0	0,00	

	Menurunnya kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi / Unmet Need		Unmet Need peserta KB	%	3		3	9.493.402.204,00	11	4.055.152.739,00		146.005.480,00	11	**424.445.510,00**		**0,00**		**0,00**	11	**318.705.870,00**	14	9.812.108.074	0,00	7,86	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	**Rasio Akseptor KB**	%	**0,775**	***19.826.730.220***	67,68	**7.780.752.734,00**	76,00	**2.549.690.160,00**	7,41	**82.162.040,00**	71,73	**340.530.470,00**		**0,00**		**0,00**	71,73	**170.947.390,00**	139	7.951.700.124	94,38	6,70	
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Jumlah Peserta Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai kearifan Budaya Lokal**	Peserta	**100**	***3.963.988.153***	40,00	**2.423.365.535,00**	100,00	**553.497.000,00**	0	**17.666.000,00**	20	**5.840.000,00**		**0,00**		**0,00**	20	23.506.000	60	2.446.871.535	20,00	4,25	
38		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana)	Balai	2	***2.258.416.000***	2	1.484.623.002,00	2	141.000.000,00	0	880.000,00	0	440.000,00					0	1.320.000	2	1.485.943.002	0,00	0,94	
39		Pelaksanaan mekanisme Operasional Program KKBPK melalui rapat Koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi desa (Rakordes), dan mini	Jumlah laporan Mekanisme Operasional Program Bangga kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga Berencana) melalui Rapat	Laporan	3	***411.962.718***	3	533.584.583,00	3	212.497.000,00	0	16.786.000,00	1	0,00					1	16.786.000	4	550.370.583	33,33	7,90	

		lokakarya (Minilok)	koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																						
41		promosi dan KIE proghram Bangga Kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah Dokumen promosi dan KIE program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elketronik serta Media Luar Ruangan	Dokumen	1	***120.000.000***	1	319.008.750,00	1	100.000.000,00			0	1.950.000,00				0	1.950.000	1	320.958.750	0,00	1,95	
42		Advokasi program Bangga kencana oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholkder dan Moitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) Kepada Stakeholder dan Mitra kerja	Organisasi	21	***60.000.000***	27	86.149.200,00	21	100.000.000,00	0		0	3.450.000,00				0	3.450.000	27	89.599.200	0,00	3,45	
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB/PKB/PLKB	**Jumlah tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PLKB/PKB)**	**orang**	**5**	***3.817.779.327***	**5**	**1.940.674.679,00**	**6**	**879.984.000,00**	0	**0,00**	0			0		**0**	0	0	5	1.940.674.679	0,00	0,00	

43		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat (IMP)	orang	288	***2.802.600.000***	288	1.940.674.679,00	288	879.984.000,00	0		0	0,00					0	0	288	1.940.674.679	0,00	0,00	
		Pemberdayaan dan peningkatan peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat bDaerah Kabupaten/ Kota Dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Jumlah organisasi Kemasyarakatan yang berperan Dalam Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Organisasi**	**12**	***3.703.924.152***	**9**	**818.791.469,00**	**12**	**460.203.660,00**	0	**15.821.080,00**	5		**0**		**0**	5	15.821.080	14	834.612.549	41,67	3,44	
44		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	1	***2.480.260.000***	13	193.923.179,00	1	68.600.000,00	0	15.821.080,00	0	15.180.000,00					0	31.001.080	13	224.924.259	0,00	45,19	
45		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Proghram Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	21	***12.000.000***	50	624.868.290,00	21	391.603.660,00	0		50	25.490.000,00					50	25.490.000	100	650.358.290	238,10	6,51	
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaa	**Cakupan pelayanan KB di daerah Kabupaten dengan Kegiatan pendistribusian kebutuhan**	%	**100**	***8.341.038.588***	100	**2.597.921.051,00**	100	**656.005.500,00**	15	**48.674.960,00**	50	**334.690.470,00**		**0,00**		**0,00**	65	131.620.310	165	2.729.541.361	65,00	20,06	

		n Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	**Alat dan Obat Kontrasepsi**																				
46		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjnag Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan jejaring	Jumlah Laporan pengendalian pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB ke Fasilitasi kesehatan termasuk Jaringan dan jejaringnya	Laporan	28	***4.223.770.810***	113	273.960.315,00	28	44.935.000,00	5	18.168.960,00	9	17.776.750,00					14	35.945.710	127	309.906.025	50,00	79,99	
47		Pembinaan Pelayanan Keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan hasil Pembinaan pelayanan Keluarga berencana dan kesehatan Reproduksi di Fasilitasi kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	28	***385.186.908***	149	145.606.628,00	34	59.225.500,00	4	28.256.000,00	20	19.846.100,00					24	48.102.100	173	193.708.728	70,59	81,22	
48		Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	orang	1000	***20.000.000***	2000	2.178.354.108,00	1730	551.845.000,00	200	2.250.000,00	0	45.322.500,00					200	47.572.500	2.200	2.225.926.608	11,56	8,62	
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	**Persentase Kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Aktif**	%	**100**	***681.191.951***	100	**1.712.649.470,00**	100	**1.505.462.579,00**	100	**63.843.440,00**	**100**	**83.915.040,00**		**0,00**		**0,00**	100	147.758.480	100	1.860.407.950	100,00	9,81	

		Pelaksanaan Pembangunan keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Cakupan pembangunan Keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	%	**100**	***471.337.951***	100	**507.749.470,00**	100	**176.699.139,00**	1	**2.300.000,00**	75	**83.915.040,00**		**0,00**		**0,00**	76	86.215.040	176	593.964.510	76,00	48,79	
49		Orientasi dan pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan pelatihan teknis Pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R dan UPPKA)	Laporan	5	***191.630.000***	100	507.749.470,00	5	176.699.139,00	1	2.300.000,00	4	83.915.040,00					5	86.215.040	105	593.964.510	100,00	48,79	
		Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	**Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang berperan Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga**	Ormas	**38**	***209.854.000***		**1.204.900.000,00**	38	**1.328.763.440,00**	**0**	**61.543.440,00**	**0**			**0**		**0**	0	61.543.440	0	1.266.443.440	0,00	4,63	
51		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja, calon pengangtin/calon PUS, Ibu hamil, Pasca Salin/Kelahiran Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Bali	laporan	1			573.500.000,00	1	576.000.000,00	0		0	0,00					0	0	0	573.500.000	0,00	0,00	

			ta) (Dengan Satuan:laporan)																				
52		Pendampingan keluarga berisiko stunting (termasuk remaja, calon pengantin, calon PUS, Ibu hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (Dengan Satuan:laporan)	laporan	1			631.400.000,00	1	752.763.440,00	0	61.543.440,00	0	0,00					0	61.543.440	0	692.943.440	0,00	8,18	
		UPTD PPA																			0	0			
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	%	**80**	***48.458.409.564***	72	**112.965.500,00**	70	**140.227.169,00**	70	**4.600.000,00**		**-**		**-**		**-**	**70**	**4.600.000**	70	117.565.500	**70**	**3,28**	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	%	**100**	***2.115.446.526***	68	**86.054.380,00**	100	**116.252.669,00**		**4.600.000,00**	20	**-**		**-**		**-**	20	**4.600.000**	88	90.654.380	**20,00**	**3,96**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	10	***11.982.080***			5	2.973.135,00			0						0	0	0	0	0,00	0,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan	Paket	**15**	***29.627.267***			8	63.292.269,00			8	**59.401.890,00**					8	59.401.890	8	59.401.890	100,00	93,85	

			Satuan:Paket)																				
53		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	70	***575.095.720***	58	27.356.380,00	37	28.407.131,00			0,00						0	0	58	27.356.380	0,00	0,00	
54		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Ceatakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	10	***89.000.000***	10	3.270.000,00	3	3.196.134,00			0,00						0	0	10	3.270.000	0,00	0,00	
55		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	485	***744.188.018***	28	55.428.000,00	8	18.384.000,00	1	4.600.000,00	-						1	4.600.000	29	60.028.000	12,50	25,02	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	**Persentase jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah yang tersedia**	%	**100**	***466.460.050***	-	**1.190.000,00**	100	**1.100.000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0**	**0**	0	1.190.000	**0,00**	**0,00**	
56		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lembar	150	***33.000.000***	150	1.190.000,00	1	1.100.000,00			0,00						0	0	150	1.190.000	0,00	0,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah	**Persentase Sarana Prasarana Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang terpelihara**	%	**100**	***409.160.859***	-	**25.721.120,00**	100	**22.874.500,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		0	0	0	0	25.721.120	0,00	0,00	
57		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan	Unit	7	***222.516.552***	1	25.721.120,00	3	18.145.900,00			0,00						0	0	1	25.721.120	0,00	0,00	

		atau Lapangan	Perizinananya																				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	8				3	4.728.600,00			0,00					0	0	0	0	0,00	0,00	
		Program Perlindungan Khusus Anak	**Cakupan Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus**	%	**100**	***1.952.218.374***	100	**288.559.973,00**	100	**112.040.000,00**		**7.158.000,00**	100	**23.640.000,00**		-		-	100	30.798.000	100	319.357.973	100,00	27,49	
		Penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang nenerlukan koordinasi Tingkat daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Anak yang memrlukan Perlindungan Khusus yang dilayani**	**orang**	**40**	***1.420.766.734***	**6**	**288.559.973,00**	**35**	**112.040.000,00**		**7.158.000,00**	**3**	**23.640.000,00**		-		-	3	**30.798.000**	9	319.357.973	**8,57**	**0,00**	
58		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	orang	200	***166.208.682***	10	288.559.973,00	35	112.040.000,00	12	7.158.000,00	3	23.640.000,00					15	30.798.000	25	319.357.973	42,86	27,49	

2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser, maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoodinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevalusai dan melaporkan pelaksanaa kebijakan dalam penyelnggaraan Urusan Pemerintah di Bidang penhendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
    a. Pengoordinasian penyusunan rencana strstegis Dinas berdasarkan rencana Pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
    b. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggraan;
    c. Pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    d. Pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetpakan guna pencapaian kinerja Dinas;
    e. Penetapan standar opersaional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan

fungsi;

f. Perumusan kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, Pengarusutaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan, pengelolaan Sistem data Gender dan Anak, Perlindungan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak;
g. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera, Pengarusutaman Gender, dan Pemberdayaan Perempuan, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Perlindungan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera, Pengarusutaman Gender, dan Pemberdayaan Perempuan, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Perlindungan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas guna mengetahui permasalahan yang di hadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;

k. Pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
l. Penyelengaraan fungsi kesekretariatan Dinas;
m. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
n. Pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana pada Dinas;
o. Pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;
p. Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pengarusutaman Gander, dan perlindungan Perempuan dan Anak;
q. Pelaksanaan penialian tugas bawahan melalui system penialian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
r. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah; dan
s. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser adalah:

10. Pelayanan pemenuhan alat kotrasepsi dalam upaya pengendaian penduduk.
11. Perlayanan fasilitasi kelompok bina keluarga dalam pembinaan keluarga Sejahtera
12. Pelayanan perlindungan anak
13. Pelayanan perlindungan dan pemberdayaan Perempuan
14. Pelayanan kesekretariatan
15. Pelayanan Kasus pada UPTD PPA

Upaya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser adalah:

1. Persentase Perempuan Dalam Legislatif;
2. Persentase Perempuan Dalam Jabatan Tenaga Profesional;
3. Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan;
4. Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani;
5. Persentase Kekerasan Terhadap anak yang tertangani;
6. Angka Kelahiran Total TFR);
7. Unmet Need Peserta KB;
8. Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini:

T-C.30

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser

Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Program (Outcames)/Kegiatan (Output)		SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Realisasi S/d TW II Tahun 2025	Capaian Kinerja s/d Tw II Tahun 2025 (%)	Catatan Analisis
					Tahun 2022 (Tahun n-3)	Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	Tahun 2023 (Tahun n-1)	Tahun 2024 (Tahun n-1)			
1	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*		*14*
	IDG				**68**	**71**	**74**	**77**	**80**	**68,35**			**0,00**	
	Persentase Perempuan Dalam Legislatif	**%**			**20**	**20**	**20**	**23**	**23**	**23,33**	**20**	**20**	**100**	
	Persentase Perempuan Dalam Jabatan Tenaga Profesional	**%**			**43,59**	**43,59**	**43,59**	**44,59**	**44,59**	**51,44**	**51,44**	**43,59**	**100**	
	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam pemerintah	**%**			**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**23,75**	**23,75**	**28**	**100**	
	Persentase Partisipasi perempuan	**%**			**37,5**	**40**	**43,5**	**46,5**	**49,5**	**5,50%**	**43,50%**	**15**	**100**	
	Persentase Perangkat daerah yang Melaksanakan PPRG	%			59,52	71,43	83,33	100	100	22 PD	83,33	100	100	

	Persentase pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	%			100	100	100	100	100	2 Program	100	100	100	
	Jumlah Organisasi Masyarakat yang di Fasilitasi	Organisasi			60	60	60	60	60	10 Lembaga	60	4	40	
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan	Lembaga			27	29	32	33	35	0	25	0	0	
	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi keluarga yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan	%						90	90	10 Organisasi Wanita	40	20	40	
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas keluarga KG dan Hak Anak yang difasilitasi	Lembaga			20	20	20	20	20	2 Lembaga	10	6	60	
	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Sistem data Gender atau Data Anak	%'			47,62	71,43	83,33	95,24	95,24	95,25	83,33	50	100	
	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak	Dokumen			1	1	1	1	1	1	1	1	100	
				Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD						5,50%	13,51%			
	IPG				**75**	**78**	**84**	**87**	**89**	**68,35**		**0**	**0**	

	Persentase kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani	**%**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
	Persentase kekerasan Terhadap Anak yang Tertangani	**%**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan	**Angka**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00683**	**100**	**100**	**100**	
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Yang di Fasilitasi	Lembaga			60	60	60	60	60	2 Kebijakan	60	0	0	
	Nilai Evaluasi kabupaten Layak Anak (KLA)	Angka			600	650	700	750	800	523	819	819	126	
	Jumlah lembaga/Institusi yang dibina	Lembaga			10	10	10	10	10	9	10	10	100	
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Yang difasilitasi	Lembaga			10	10	10	10	10	10	10	2	20	
	Cakupan Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan khusus	Angka			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Kusus Yang difasilitasi	Lembaga			10	10	10	10	10	60	0	0	0	

	Jumlah Anak yang memrlukan Perlindungan Khusus yang dilayani	Orang			40	40	40	40	40	100	0	0	0	
				Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)						0,68%	7,36%			
				Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten						100%	100%			
	Laju Pertumbuhan Penduduk				**1,95**	**1,9**	**1,85**	**1,83**	**1,8**	**2,19**	**2,19**	**0**	**0**	
	Jumlah Angka Kjelahiran Total (TFR)	**%**			**2,1**	**2,1**	**2**	**1,5**	**1,5**	**2,19**	**2,19**	**2,19**	**100**	
	Angka kelahiran kasar	**Angka**			**12**	**10**	**10**	**10**	**10**	**2,19**	**0,73**	**0,73**	**100**	
	Jumlah Dokumen Yang di selaraskan	Dokumen			5	5	5	5	5	3 Dokumen	5	1	100	
	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Penduduk	Dokumen			1	1	1	1	1	60,95	1	1	100	
				TFR (Angka Kelahiran Total)						2,19%	2,21%			
	Laju Pertumbuhan Penduduk				**1,95**	**1,9**	**1,85**	**1,83**	**1,8**	**2,19**		**0**	**0**	

	Unmet Need Peserta KB	**%**			**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**11,83**	**14**	**11**	**0**	
				Persentase Pemakaian Kontresepasi modern (modern contraceptive Prevalence Rate/mcpr)						**55,22%**	**54,53%**			
				Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi Unmet Need						**11,15%**	**8,03%**			
	Rasio Akseptor KB	**Angka**			**75**	**75**	**76**	**76,5**	**77**	**55,22**	**73,57**	**7,41**	**9,75**	
	Jumlah Peserta Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai kearifan Budaya Lokal	Orang			100	100	100	100	100	54,1	100	20	20	
	Jumlah tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PLKB/PKB)	Orang			5	5	5	5	5	72,52	6	0	0	
	Jumlah organisasi Kemasyarakatan yang berperan Dalam Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi			12	12	12	12	12	21 Kelompok	12	5	41,67	

	Cakupan pelayanan KB di daerah Kabupaten dengan Kegiatan pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	Angka			100	100	100	100	100	25,8	100	65	65	
	Persentase Kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Aktif	**%**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**11,55**	**100**	**100**	**100**	
	Cakupan pembangunan Keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Angka			100	100	100	100	100	100	100	76	76	
	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang berperan Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	Organisasi			38	38	38	38	38	0	38	0	1	
	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	**Nilai**			**60 (CC)**	**65 (CC)**	**70**	**75 (B)**	**80 (A)**	**69,93**		**80**	**80**	
	Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP	**Nilai**			**60 (CC)**	**65 (CC)**	**70**	**75 (B)**	**80 (A)**	**69,93**		**69,63**	**69,63**	
	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	**%**			**70**	**70**	**72**	**74**	**76**	**80**	**74**	**74**	**185**	

	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**Nilai**										**69,63**	**99,47**	
	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	**%**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
	Persentase Dokumen dan pelaporan Barang Milik Daerah perangkat daerah yang tersusun	**%**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
	Persentase Administrasi Kepegawaian Pada Owerangkat Daerah yang Terlaksana	**%**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**70**	**70**	
	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**%**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah yang tersedia	**%**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	

	Persentase jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah yang tersedia	**%**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
	Persentase Sarana Prasarana Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang terpelihara	**%**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	

Bedasarkan Tebal 22 diatas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan ” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “ IDG ”, dari target sebesar 77 dengan capaian kinerja masih belum ada.
b. Tujuan “Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan Pemenuhan Hak Anak” ” memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu IPG “dari target sebesar 87 dengan capaian kinerja masih belum ada.

   Tujuan “ Pengendalian Pertumbuhan Penduduk” memilik 1 indikator kinerja yaitu “ Laju Pertumbuhan Penduduk”, dari target sebesar 1,83 dengan capaian kinerja masih belum ada.

   Tujuan Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang responsive dan tangkas” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “ Penilaian Mandiri Repormasi Birokrasi”,) dari target sebesar 75(B) dengan capaian kinerja masih belum ada.
c. Sasaran “ Meningkatnya Kesetaraan Gender” memiliki 3 indikator kinerja yaitu :
   1. Persentase Perempuan Dalam Legislatif”, telah mencapaian target, dimana realisasinya sebesar 20 dari target sebesar 23 .dengan capaian kinerja sebesar 86,96 %;
   2. Persentase Perempuan dalam jabatan tenaga profesional, telah telah melampaui capaian target , dimana realisasinya sebesar 51,44 dari target sebesar 44,59 dengan capaian kinerja sebesar 115,4%;
   3. Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam pemerintah, telah telah mencapai target , dimana realisasinya sebesar 23,75 dari target sebesar 28 dengan capaian kinerja sebesar 84,82%;

Sasaran “meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak serta Kualitas hidup Anak ” memiliki 2 indikator kinerja yaitu :

1. Persentase kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani”, telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 100 dari target sebesar 100 dengan capaian kinerja sebesar 100 %;
2. Persentase kekerasan Terhadap anak yang Tertangani”, telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 100 dari target sebesar 100 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Sasaran “Menurunnya Angka Kelahiran ” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Jumlah Angka Kelahiran total (TFR) ”, telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 2,19 dari target sebesar 1,5 dengan capaian kinerja sebesar 90,5%;

Sasaran “Menurunnya Menurunnya Kebutuhan Ber -KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need ” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Unmet Need Peserta KB ”, telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 14 dari target sebesar 11 dengan capaian kinerja sebesar 72,73%;

Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP ”, telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 69,63 dari target sebesar 72 dengan capaian kinerja sebesar 96,71%.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser Periode Juli 2025 :

1. Komitmen yang tinggi dari Pemerintah dalam Program Kependudukan Serta Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Dukungan yang tinggi dari lintas sertoral terkait dan mitra terkait;
3. Tersedianya regulasi dalam program kependudukan.

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Terbatasnya sumber daya manusia di bidang pembangunan kependudukan serta pembnerdayaan perempuan dan perlindungajn anak;
2. Terbatasnya anggaran dalam program kependudukan dan pemberdayaan perempuan dan perlindumngan anak;
3. Geografi yang sebagian sulit serta wilayah daerah yang sangat luas; Keterbatasan sarana dan prasarana dalam program kependudukan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungananak serta pemeberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2025.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Perubahan Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Target	
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025
Tujuan : Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan	IDG			74	74
Sasaran 1.1 Meningkatnya Kesetaraan Gender	Persentaser Perempuan dalam legislatif	$\frac{\sum Perempuan\ yang\ Produktif\ di\ legislatif}{\sum Anggota\ Dewan\ Yang\ Duduk} x\ 100$	keterwakilan perempuan dilembaga Legislatif dapat berperan dan partisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan. Sehingga ketika kebijakankebijakan yang dibuat dapat mendukung perspektif gender. Dalam hal ini perempuan terlibat dalam proses pembuatan keputusan, sehingga dapat masuk ke dalam sektor-sektor strategis, dalam jangka panjang	25	25
	Persensate perempuan dalam jabatan tenaga profesional	$\frac{\sum Perempuan\ yang\ menduduki\ jabatan\ Tenaga\ Profesional}{\sum jabartan\ Tenaga\ Profesional\ yang\ ada} x\ 100$	Umumnya Perempuan yang memiliki jabatan tenaga Profesional dalam kehidupannya mempraktikkan keahlian khusus dan menjalankannya, memiliki keahlian tertentu dan juga semangat untuk melakukan kegiatan kerja. Bertindak objektif dalam setiap pengambilan keputusan	45	45
	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam pemerintah	$\frac{\sum Kelompok\ Uasaha\ Perempuan}{\sum Kelompok\ Usaha} x\ 100$	Sumbangan pendapatan perempuan merupakan salah satu dari indikator yang dipakai untuk menghitung Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Yang mana perempuan Indonesia berkontribusi terhadap pendapatan keluarga	30	30
Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	IPG			84	84

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Target	
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025
Sasaran 2.1 Meningkatnya perlindungan perempuan dan pemenuhan Hak serta kualitas hidup Anak	Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani	$\frac{\Sigma \text{ Perempuan Korban Kekerasan}}{\Sigma \text{ Perempuan korban kekerasan yang di tangani}} x\ 100$	Kekerasan Terhadap Perempuan yang selanjutnya disingkat KTP adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik	100	100
	Persentase kekerasan terhadap anak yang tertangani	$\frac{\Sigma \text{ Anak Korban Kekerasan}}{\Sigma \text{ Anak korban kekerasan yang di tangani}} x\ 100$	Kekerasan Terhadap Anak yang selanjutnya disingkat KTA adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.	100	100
Tujuan : Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk			1,85	1,85

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Target	
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025
Sasaran 3.1 Menurunnya angka kelahiran	Jumlah angka kelahiran total (TFR)	$TFR = 5\sum_{i=1}^{7} ASFR\ i$ $ASFRi = \frac{bi}{F\ pi}\ X\ K$ Angka Kelahiran Remaja Umur 15 – 19 Tahun (ASPR) TFR= Angka Kelahiran Total ASFRi = Angka Kelahiran Menurut Kelompok umur b i= Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok um pada tahun tertentu p i= Jumlah Penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengah tahun yang sama i= Kelompok umur (i = 1 untuk kelompok umur 15 – 19 1 = 2 untuk kelompok umur 20 -24 i= 7 untuk kelompok umur 45 -49 K= Bilangan Konstanta biasanya 1000	Rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seoramg ibu selama masa refroduksi, yaitu sejak awal usia subur sampai akhir nasa reproduksinya	2,20	2,20
Sasaran 3.2 Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/ UnmetNeed	Unmet Need Peserta KB	$\frac{\sum Akseptor\ Tidak\ Ingin\ Anak\ Lagi}{\sum PUS\ ber\ KB}\ X\ 100$	PUS yg tidak menggunakan alat kontrasepsi atau tdk Ber KB dg berbagai alasan 1. Kurang pengetahuan tentang pentingnya ber-KB 2. Akses untuk ber KB yang sulit 3. Tidak ada petugas 4. dan alasan lainnya	11	11
Tujuan : Meningkatnya tata Kelola Perangakat Daerah yang responsive dan Tangkas	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi			72(BB)	70(BB)

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Target	
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025
Sasaran 4.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP	Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Definisi Oprasional : Nilai SAKIP merupakan hasil Evaluasi atas komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	72(BB)	70(BB)

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser Tahun 2025 tidak mengalami perubahan

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 yaitu ““PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DI SELURUH KABUPATEN PASER”” yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser mendukung pencapaian sasaran ke 3 (tiga) , yaitu “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat”.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

T-C.31

Tabel 3.2
T- C 31
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Rancangan Perubahan RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian TW II		Pagu Indikatif Murni (Rp)	Pagu Indikatif Efisiensi (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian TW II		Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-6	-7	-8	-9	-10		-11	-12
						20.176.712.843	**18.179.545.836**						**19.647.662.725**	
						14.550.934.547	**13.441.016.129**						**14.040.434.520**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	72	%	**13.089.445.889**	**12.633.337.120**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**		**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	74	%	**13.020.394.597**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**70**	**B**	**368.468.031**	**226.611.516**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**69,63**	**B**	**281.005.203**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan perangkat Daerah	10	Dokumen	236.496.031	156.225.516	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan perangkat Daerah	4	Dokumen	190.000.034	
	Evaluasi Kinjerja perangkat Daerah		Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	9	Laporan	131.972.000	70.386.000	Evaluasi Kinjerja perangkat Daerah		Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	3	Laporan	91.005.169	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**11.793.676.132**	**11.754.654.062**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**11.803.838.569**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjnagan ASN	60	orang	11.614.240.152	11.614.240.152	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjnagan ASN	55	orang	11.614.240.152	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	4	Dokumen	179.435.980	140.413.910	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran	2	Dokumen	189.598.417	

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Persentase Dokumen dan pelaporan Barang Milik Daerah perangkat daerah yang tersusun**	100	%	**80.000.000**	**40.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen dan pelaporan Barang Milik Daerah perangkat daerah yang tersusun**	100	%	**40.000.000**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD	**1**	Dokumen	80.000.000	40.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD	**1**	Dokumen	40.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Kepegawaian Pada Owerangkat Daerah yang Terlaksana**	**100**	**%**	**30.317.974**	**15.158.987**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Kepegawaian Pada Owerangkat Daerah yang Terlaksana**	**100**	**%**	**125.000.000**	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	30.317.974	15.158.987	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	125.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100	%	**545.319.599**	**344.850.745**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100	%	**439.878.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10	Jenis	23.000.000	22.976.677	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Jenis	93.830.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	70	Paket	210.297.599	165.863.068	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	65	Paket	118.863.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Ceatakan dan Penggandaan yang disediakan	10	Paket	14.960.000	7.480.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Ceatakan dan Penggandaan yang disediakan	10	Paket	7.480.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	485	Laporan	297.062.000	148.531.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	485	Laporan	219.705.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah yang tersedia**	**100**	**%**	**137.863.253**	**131.261.760**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah yang tersedia**	**100**	**%**	**195.669.575**	
	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya		Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8	Unit	137.863.253	131.261.760	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya		Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5	Unit	195.669.575	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah		**Persentase jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah yang tersedia**	**100**	**%**	**72.250.100**	**59.349.250**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah**		**Persentase jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah yang tersedia**	**100**	**%**	**73.552.450**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150,00	Lembar	27.250.100	14.350.050	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150	Lembar	14.350.050	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	45.000.000	44.999.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	59.202.400	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah		**Persentase Sarana Prasarana Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang terpelihara**	100	%	**61.550.800**	**61.450.800**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah**		**Persentase Sarana Prasarana Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang terpelihara**	100	%	**61.450.800**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinanannya	7	Unit	48.550.800	48.550.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinanannya	7	Unit	48.550.800	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara	10	Unit	5.000.000	4.990.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara	8	Unit	4.990.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	5.000.000	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	5.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1,00	Unit	3.000.000	2.910.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	2.910.000	
	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan		**Persentase Perempuan Dalam legislatif**	**20**	**%**	**630.461.751**	**207.924.000**	**Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan**		**Persentase Perempuan Dalam legislatif**	**20**	**%**	**261.601.246**	
			Persentase perempuan dalam Jabatan Tenaga Profesional	**43,59**	**%**					**Persentase perempuan dalam Jabatan Tenaga Profesional**	**43,59**	**%**		
			persentase Sumbangan Perempuan Dalam pemerintahan	**28**	**%**					**persentase Sumbangan Perempuan Dalam pemerintahan**	**28**	**%**		

	Program Pengarusutamanaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Persentase Partisipasi perempuan	15,00	%	**630.461.751**	**207.924.000**	**Program Pengarusutamanaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**		Persentase Partisipasi perempuan	15,00	%	**261.601.246**	
			Persentase Perangkat daerah yang Melaksanakan PPRG	30,00	%					Persentase Perangkat daerah yang Melaksanakan PPRG	100,00	%		
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota		**Persentase pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	100	%	**97.144.700**	**48.572.350**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota**		**Persentase pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	100	%	**102.249.596**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) kewenangan Kabupaten	41	Perangkat Daerah	97.144.700	48.572.350	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) kewenangan Kabupaten	41	Perangkat Daerah	102.249.596	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota		**Jumlah Organisasi Masyarakat yang di Fasilitasi**	10	Ormas	**433.317.051**	**91.776.650**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota**		**Jumlah Organisasi Masyarakat yang di Fasilitasi**	4	Ormas	**91.776.650**	
	Sosial Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender	5	Perangkat Daerah	304.163.751	27.200.000	Sosial Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender	8	Perangkat Daerah	27.200.000	
	Advokasi Kebijakan dan pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi		Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapat Advokasi dan Pendampingan kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Lembaga	129.153.300	64.576.650	Advokasi Kebijakan dan pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi		Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapat Advokasi dan Pendampingan kebijakan Peningkatan	8	Lembaga	64.576.650	

									Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan**	20	Lembaga	**100.000.000**	**67.575.000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan**	10	Lembaga	**67.575.000**	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber Daya lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Mendapat Peningkatan	100	orang	100.000.000	67.575.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber Daya lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Mendapat Peningkatan	50	orang	67.575.000	
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi keluarga yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan**	50	%	**108.319.800**	**179.045.776**	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**		**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi keluarga yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan**	50	%	**183.065.098**	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/kota		**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas keluarga KG dan Hak Anak yang difasilitasi**	10	Lembaga	**108.319.800**	**179.045.776**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/kota**		**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas keluarga KG dan Hak Anak yang difasilitasi**	6	Lembaga	**183.065.098**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan (Dengan Satuan:Lembaga)	5	Lembaga	108.319.800	179.045.776	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan (Dengan Satuan:Lembaga)	3	Lembaga	183.065.098	
	Program pengelola Sistem Data Gender dan ANAK		**Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Sistem data Gender atau Data Anak**	50	%	**11.162.000**	**5.581.000**	**Program pengelola Sistem Data Gender dan ANAK**		**Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Sistem data Gender atau Data Anak**	50	%	**52.169.250**	

	Pengumpulan Pengelolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di tingkat Daerah Kabupaten /Kota		**Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak**	1	Dokumen	**11.162.000**	**5.581.000**	**Pengumpulan Pengelolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di tingkat Daerah Kabupaten /Kota**		**Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak**	1	Dokumen	**52.169.250**	
	Penyediaan Data Gender dan Anak kewenangan Kabupaten /Kota		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	5	Dokumen	11.162.000	5.581.000	Penyediaan Data Gender dan Anak kewenangan Kabupaten /Kota		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	1	Dokumen	52.169.250	
	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan pemenuhan Hak Serta Kualitas Hidup Anak		**Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani**	**100**	**%**	**598.518.900**	**354.413.871**	**Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan pemenuhan Hak Serta Kualitas Hidup Anak**		**Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani**	**100**	**%**	**462.489.967**	
			Persentase kekerasan terhadap Anak yang tertangani	**100**	**%**					**Persentase kekerasan terhadap Anak yang tertangani**	**100**	**%**		
	Program Perlindungan Perempuan		**Cakupan Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan**	**100**	%	**113.026.207**	**60.714.362**	**Program Perlindungan Perempuan**		**Cakupan Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan**	**100**	%	**60.714.362**	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah kabupaten/Kota		**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Yang di Fasilitasi**	**40**	**Lembaga**	**113.026.207**	**60.714.362**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah kabupaten/Kota**		**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Yang di Fasilitasi**	**40**	**Lembaga**	**60.714.362**	
	Penguatan jejaring antar lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**1**	Dokumen	113.026.207	60.714.362	Penguatan jejaring antar lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**1**	Dokumen	60.714.362	
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		**Nilai Evaluasi kabupaten Layak Anak (KLA)**	650	point	**353.318.900**	**210.663.871**	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**		**Nilai Evaluasi kabupaten Layak Anak (KLA)**	819	point	**262.489.967**	
	Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota		**Jumlah lembaga/Institusi yang dibina**	**10**	**lembaga**	**210.952.300**	**132.376.150**	**Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota**		**Jumlah lembaga/Institusi yang dibina**	**10**	**lembaga**	**139.376.150**	

	Advokasi kebijakan dan Pendampingan pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah Media dan dunia Usaha	10	Organisasi	210.952.300	132.376.150	Advokasi kebijakan dan Pendampingan pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah Media dan dunia Usaha	10	Organisasi	139.376.150	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Yang difasilitasi**	10	Lembaga	**142.366.600**	**78.287.721**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Yang difasilitasi**	7	Lembaga	**123.113.817**	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	91.519.600	52.864.221	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	52.864.221	
	Penguatan jejaring antar lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	5	Dokumen	50.847.000	25.423.500	Penguatan jejaring antar lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	5	Dokumen	70.249.596	
	Program Perlindungan Khusus Anak		**Cakupan Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan khusus**	100	%	**245.200.000**	**143.750.000**	**Program Perlindungan Khusus Anak**		**Cakupan Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan khusus**	100	%	**200.000.000**	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Kusus Yang difasilitasi**	10	Lembaga	**245.200.000**	**143.750.000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Kusus Yang difasilitasi**	10	Lembaga	**200.000.000**	
	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota		Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	245.200.000	143.750.000	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota		Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1	Dokumen	200.000.000	

									Kewenangan Kabupaten/Kota					
						5.254.277.296	**4.486.262.538**						**5.214.347.286**	
	Menurunnya Angka kelahiran		**Angka kelahiran Total (TFR)**	**2,19**	**Angka**	**811.748.596**	**522.109.799**	**Menurunnya Angka kelahiran**		**Angka kelahiran Total (TFR)**	**2,19**	**Angka**	**920.838.057**	
	Program Pengendalian penduduk		**Angka kelahiran kasar**	13	%	**811.748.596**	**522.109.799**	**Program Pengendalian penduduk**		**Angka kelahiran kasar**	13	%	**920.838.057**	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengedalian Kuantitas Penduduk		**Jumlah Dokumen Yang di selaraskan**	1	Dokumen	**254.619.507**	**127.309.754**	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengedalian Kuantitas Penduduk**		**Jumlah Dokumen Yang di selaraskan**	1	Dokumen	**436.877.126**	
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design pembangunan kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	Dokumen	56.874.000	28.437.000	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design pembangunan kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	Dokumen	278.437.000	
	Advokasi, sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan kependudukan Jalur Formal di satuan pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal		Jumlah satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan, Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalujr Non Formal dan Informal	50	Satuan Pendidikan	144.239.000	72.119.500	Advokasi, sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan kependudukan Jalur Formal di satuan pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal		Jumlah satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan, Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalujr Non Formal dan Informal	50	Satuan Pendidikan	131.686.872	
	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak kependudukan kepada Pemangku Kepentingan		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Pemanfaatan kajian dampak kependudukan Beserta Model Solusi strategi Sebagai Peringatan Dini Dampak kependudukan Kepada pemangku Kepentingan	50	Organisasi	53.506.507	26.753.254	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak kependudukan kepada Pemangku Kepentingan		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Pemanfaatan kajian dampak kependudukan Beserta Model Solusi strategi Sebagai Peringatan Dini Dampak kependudukan Kepada pemangku Kepentingan	50	Organisasi	26.753.254	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Penduduk**	1	Dokumen	**557.129.089**	**394.800.045**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Penduduk**	1	Dokumen	**483.960.931**	

	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga	1	Laporan	122.905.000	91.504.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga	1	Laporan	91.504.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		Jumlah data dan Informasi keluarga tersedianya	1	Dokumen	187.974.000	93.987.000	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		Jumlah data dan Informasi keluarga tersedianya	1	Dokumen	114.515.000	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		Jumlah laporan Pencatatan dan pengumpulan Data keluarga	1	Laporan	145.636.000	137.018.000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		Jumlah laporan Pencatatan dan pengumpulan Data keluarga	1	Laporan	157.952.000	
	Pengolahan dan Pelaporan Data pengendalian lapangan dan pelayanan KB		Jumlah Dokumen Pengolahan dan pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan pelayanan KB	1	Dokumen	43.968.000	43.968.000	Pengolahan dan Pelaporan Data pengendalian lapangan dan pelayanan KB		Jumlah Dokumen Pengolahan dan pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan pelayanan KB	1	Dokumen	43.968.000	
	Pembentukan dan operasional Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memeperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain		Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Dengan Satuan:Unit)	5	Unit	30.000.000	15.000.000	Pembentukan dan operasional Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memeperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain		Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Dengan Satuan:Unit)	5	Unit	62.698.886	
	Penyusunan Profil prgoram pembangunan keluarga, kependudukan dan Kelouarga Berencana (Bangga Kencana)		Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dengan Satuan:Dokumen)	1	Dokumen	26.646.089	13.323.045	Penyusunan Profil prgoram pembangunan keluarga, kependudukan dan Kelouarga Berencana (Bangga Kencana)		Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dengan Satuan:Dokumen)	1	Dokumen	13.323.045	
	Menurunnya kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi / Unmet Need		Unmet Need peserta KB	11	Angka	4.442.528.700	3.964.152.739	Menurunnya kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi / Unmet Need		Unmet Need peserta KB	11	Angka	4.293.509.229	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		**Rasio Akseptor KB**	76,00	%	**2.798.584.000**	**2.458.690.160**	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**		**Rasio Akseptor KB**	76,00	%	**2.663.211.970**	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		**Jumlah Peserta Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai kearifan Budaya Lokal**	100,00	Peserta	**586.000.000**	**462.497.000**	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**		**Jumlah Peserta Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai kearifan Budaya Lokal**	71,73	Peserta	**553.497.000**	

	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana)	2	Balai	141.000.000	141.000.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana)	-	Balai	141.000.000	
	Pelaksanaan mekanisme Operasional Program KKBPK melalui rapat Koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi desa (Rakordes), dan mini lokakarya (Minilok)		Jumlah laporan Mekanisme Operasional Program Bangga kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga Berencana) melalui Rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	3	Laporan	245.000.000	121.497.000	Pelaksanaan mekanisme Operasional Program KKBPK melalui rapat Koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi desa (Rakordes), dan mini lokakarya (Minilok)		Jumlah laporan Mekanisme Operasional Program Bangga kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga Berencana) melalui Rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1	Laporan	212.497.000	
	promosi dan KIE proghram Bangga Kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang		Jumlah Dokumen promosi dan KIE program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elketronik serta Media Luar Ruangan	1	Dokumen	100.000.000	100.000.000	promosi dan KIE proghram Bangga Kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang		Jumlah Dokumen promosi dan KIE program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elketronik serta Media Luar Ruangan	-	Dokumen	100.000.000	
	Advokasi program Bangga kencana oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholkder dan Moitra Kerja		Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) Kepada Stakeholder dan Mitra kerja	21	Organisasi	100.000.000	100.000.000	Advokasi program Bangga kencana oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholkder dan Moitra Kerja		Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) Kepada Stakeholder dan Mitra kerja	-	Organisasi	100.000.000	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB/PKB/PLKB		**Jumlah tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PLKB/PKB)**	**6**	**orang**	**879.984.000**	**879.984.000**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB/PKB/PLKB**		**Jumlah tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PLKB/PKB)**	**6**	**orang**	**899.984.000**	

	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat pedesaan (IMP)		Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat (IMP)	288	orang	879.984.000	879.984.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat pedesaan (IMP)		Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat (IMP)	-	orang	899.984.000	
	Pemberdayaan dan peningkatan peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat bDaerah Kabupaten/Kota Dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		**Jumlah organisasi Kemasyarakatan yang berperan Dalam Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**12**	**Organisasi**	**592.534.000**	**460.203.660**	**Pemberdayaan dan peningkatan peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat bDaerah Kabupaten/Kota Dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**		**Jumlah organisasi Kemasyarakatan yang berperan Dalam Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**12**	**Organisasi**	**495.808.470**	
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1	Dokumen	103.600.000	68.600.000	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1	Dokumen	89.204.810	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung KB		Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Proghram Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	21	Kampung	488.934.000	391.603.660	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung KB		Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Proghram Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	50	Kampung	406.603.660	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		**Cakupan pelayanan KB di daerah Kabupaten dengan Kegiatan pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi**	100	%	**740.066.000**	**656.005.500**	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**		**Cakupan pelayanan KB di daerah Kabupaten dengan Kegiatan pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi**	100	%	**713.922.500**	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjnag Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan jejaring		Jumlah Laporan pengendalian pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB ke Fasilitasi kesehatan termasuk Jaringan dan jejaringnya	28	Laporan	89.870.000	44.935.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjnag Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan jejaring		Jumlah Laporan pengendalian pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB ke Fasilitasi kesehatan termasuk Jaringan dan jejaringnya	14	Laporan	57.012.000	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah laporan hasil Pembinaan pelayanan Keluarga berencana dan kesehatan Reproduksi di Fasilitasi kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	34	Laporan	551.845.000	551.845.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah laporan hasil Pembinaan pelayanan Keluarga berencana dan kesehatan Reproduksi di Fasilitasi kesehatan Termasuk	24	Laporan	567.685.000	

										Jaringan dan Jejaringnya				
	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang		Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	1730	orang	98.351.000	59.225.500	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang		Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	200	orang	89.225.500	
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		**Persentase Kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Aktif**	**100**	**%**	**1.643.944.700**	**1.505.462.579**	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**		**Persentase Kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Aktif**	**100**	**%**	**1.630.297.259**	
	Pelaksanaan Pembangunan keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		**Cakupan pembangunan Keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	100	%	**276.744.700**	**176.699.139**	**Pelaksanaan Pembangunan keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Cakupan pembangunan Keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	76	%	**211.299.139**	
	Orientasi dan pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKS)		Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan pelatihan teknis Pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R dan UPPKA)	5	Peserta	276.744.700	176.699.139	Orientasi dan pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKS)		Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan pelatihan teknis Pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R dan UPPKA)	5	Peserta	211.299.139	
	Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga		**Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang berperan Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga**	36	Kelompok	**1.367.200.000**	**1.328.763.440**	**Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga**		**Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang berperan Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga**	36	Kelompok	**1.418.998.120**	
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja, calon pengangtin/calon PUS, Ibu hamil, Pasca Salin/Kelahiran Baduta/Balita)		Cakupan Pemantauan data dan informasi keluarga ebresiko stunting ((termasuk remaja, calon pengangtin/calon PUS, Ibu hamil, Pasca Salin/Kelahiran Baduta/Balita)	1	Laporan	576.000.000	576.000.000	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja, calon pengangtin/calon PUS, Ibu hamil, Pasca Salin/Kelahiran Baduta/Balita)		Cakupan Pemantauan data dan informasi keluarga ebresiko stunting ((termasuk remaja, calon pengangtin/calon PUS, Ibu hamil, Pasca Salin/Kelahiran Baduta/Balita)	0	Laporan	622.320.000	

	Pendampingan keluarga berisiko stunting (termasuk remaja, calon pengantin, calon PUS, Ibu hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)		Jumlah keluarga beresiko stunting (termasuk remaja, calon pengantin, calon PUS, Ibu hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita) yang mendapatkan pendampingkan	1	Laporan	791.200.000	752.763.440	Pendampingan keluarga berisiko stunting (termasuk remaja, calon pengantin, calon PUS, Ibu hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)		Jumlah keluarga beresiko stunting (termasuk remaja, calon pengantin, calon PUS, Ibu hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita) yang mendapatkan pendampingkan	0	Laporan	796.678.120	
	UPTD PPA					**371.501.000**	**252.267.169**	**UPTD PPA**					**392.880.919**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	100	%	**168.296.000**	**140.227.169**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**		**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	70	%	**140.227.169**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	5	%	**144.321.500**	**116.252.669**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	20	%	**116.252.669**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8	Jenis	2.973.135	2.973.135	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	-	Jenis	2.973.135	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	15	Paket	63.292.269	63.292.269	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	8	Paket	63.292.269	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	37	Paket	34.895.828	28.407.131	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	-	Paket	28.407.131	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Ceatakan dan Penggandaan yang disediakan	3	Paket	6.392.268	3.196.134	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Ceatakan dan Penggandaan yang disediakan	-	Paket	3.196.134	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	Laporan	36.768.000	18.384.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	18.384.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah		**Persentase jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah yang tersedia**	100	%	**1.100.000**	**1.100.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah**		**Persentase jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah yang tersedia**	100	%	**1.100.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Lembar	1.100.000	1.100.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Lembar	1.100.000	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah		**Persentase Sarana Prasarana Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang terpelihara**	100	%	**22.874.500**	**22.874.500**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah**		**Persentase Sarana Prasarana Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang terpelihara**	100	%	**22.874.500**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinanannya	3	Unit	18.145.900	18.145.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinanannya	3	Unit	18.145.900	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara	3	Unit	4.728.600	4.728.600	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara	3	Unit	4.728.600	
	Program Perlindungan Khusus Anak		**Cakupan Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus**	3	%	**203.205.000**	**112.040.000**	**Program Perlindungan Khusus Anak**		**Cakupan Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus**	3	%	**252.653.750**	
	Penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang nenerlukan koordinasi Tingkat daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Anak yang memrlukan Perlindungan Khusus yang dilayani**	**100**	**orang**	**203.205.000**	**112.040.000**	**Penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang nenerlukan koordinasi Tingkat daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Anak yang memrlukan Perlindungan Khusus yang dilayani**	**3**	**orang**	**252.653.750**	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	35	orang	203.205.000	112.040.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	35	orang	252.653.750	

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Perubahan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAMDAN/ KEGIATAN/ DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ DAN SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025							
			Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
			Sebelum		Sesudah		Sebelum (Murni)	Sebelum (Efisiensi)	Sesudah	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*9*	*10*	*11*
							20.176.712.843,00	**6.667.919.924,00**	**19.647.662.725,00**	
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						**14.550.934.547,00**	**1.838.390.217,00**	**14.040.434.520,00**	**APBD**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	72	%	72	%	**13.089.445.889,00**	**1.030.711.208,00**	**13.020.394.597,00**	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**70**	**B**	**70**	**B**	**368.468.031,00**	**226.611.516,00**	**281.005.203,00**	APBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat Daerah	10	Dokumen	10	Dokumen	236.496.031,00	156.225.516,00	190.000.034,00	APBD
	Evaluasi Kinjerja perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	9	Laporan	9	Laporan	131.972.000,00	70.386.000,00	91.005.169,00	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**100**	**%**	**11.793.676.132,00**	**152.028.150,00**	**11.803.838.569,00**	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjnagan ASN	14	Bulan	14	Bulan	11.614.240.152,00	11.614.240,00	11.614.240.152,00	APBD

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	4	Dokumen	4	Dokumen	179.435.980,00	140.413.910,00	189.598.417,00	APBD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen dan pelaporan Barang Milik Daerah perangkat daerah yang tersusun**	100	%	100	%	**80.000.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	APBD
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD	**1**	Dokumen	**1**	Dokumen	80.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Pada Owerangkat Daerah yang Terlaksana**	**100**	**%**	**100**	**%**	**30.317.974,00**	**15.158.987,00**	**125.000.000,00**	APBD
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	Dokumen	5	Dokumen	30.317.974,00	15.158.987,00	125.000.000,00	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100	%	100	%	**545.319.599,00**	**344.850.745,00**	**439.878.000,00**	APBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10	Jenis	10	Jenis	23.000.000,00	22.976.677,00	93.830.000,00	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	70	Paket	70	Paket	210.297.599,00	165.863.068,00	118.863.000,00	APBD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Ceatakan dan Penggandaan yang disediakan	10	Paket	10	Paket	14.960.000,00	7.480.000,00	7.480.000,00	APBD

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	485	Laporan	485	Laporan	297.062.000,00	148.531.000,00	219.705.000,00	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah yang tersedia**	**100**	**%**	**100**	**%**	**137.863.253,00**	**131.261.760,00**	**195.669.575,00**	APBD
	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8	Unit	8	Unit	137.863.253,00	131.261.760,00	195.669.575,00	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	**Persentase jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah yang tersedia**	**100**	**%**	**100**	**%**	**72.250.100,00**	**59.349.250,00**	**73.552.450,00**	APBD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150,00	Lembar	150,00	Lembar	27.250.100,00	14.350.050,00	14.350.050,00	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	12	Laporan	45.000.000,00	44.999.200,00	59.202.400,00	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah	**Persentase Sarana Prasarana Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang terpelihara**	100	%	100	%	**61.550.800,00**	**61.450.800,00**	**61.450.800,00**	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinanannya	7	Unit	7	Unit	48.550.800,00	48.550.800,00	48.550.800,00	APBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara	10	Unit	10	Unit	5.000.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	APBD

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1,00	Unit	1,00	Unit	3.000.000,00	2.910.000,00	2.910.000,00	APBD
	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan	**Persentase Perempuan Dalam legislatif**	**20**	**%**	**20**	**%**	**630.461.751,00**	**392.550.776,00**	**496.835.594,00**	APBD
		Persentase perempuan dalam Jabatan Tenaga Profesional	**43,59**	**%**	**43,59**	**%**				APBD
		persentase Sumbangan Perempuan Dalam pemerintahan	**28**	**%**	**28**	**%**				APBD
	Program Pengarusutamanaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi perempuan	15,00	%	15,00	%	**630.461.751,00**	**207.924.000,00**	**261.601.246,00**	APBD
		Persentase Perangkat daerah yang Melaksanakan PPRG	83,33	%	83,33	%				APBD
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	**Persentase pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	100	%	100	%	**97.144.700,00**	**48.572.350,00**	**102.249.596,00**	APBD
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) kewenangan Kabupaten	41	Perangkat Daerah	41	Perangkat Daerah	97.144.700,00	48.572.350,00	102.249.596,00	APBD
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	**Jumlah Organisasi Masyarakat yang di Fasilitasi**	10	Ormas	10	Ormas	**433.317.051,00**	**91.776.650,00**	**91.776.650,00**	APBD

	Sosial Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender	5	Perangkat Daerah	5	Perangkat Daerah	304.163.751,00	27.200.000,00	27.200.000,00	APBD
	Advokasi Kebijakan dan pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapat Advokasi dan Pendampingan kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Lembaga	10	Lembaga	129.153.300,00	64.576.650,00	64.576.650,00	APBD
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan**	20	Lembaga	20	Lembaga	**100.000.000**	**67.575.000**	**67.575.000**	APBD
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Mendapat Peningkatan	100	orang	100	orang	100.000.000,00	67.575.000,00	67.575.000,00	APBD
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi keluarga yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan**	50	%	50	%	**108.319.800,00**	**179.045.776,00**	**183.065.098,00**	APBD
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/kota	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas keluarga KG dan Hak Anak yang difasilitasi**	10	Lembaga	10	Lembaga	**108.319.800,00**	**179.045.776,00**	**183.065.098,00**	APBD
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan (Dengan Satuan:Lembaga)	5	Lembaga	5	Lembaga	108.319.800,00	179.045.776,00	183.065.098,00	APBD
	Program pengelola Sistem Data Gender dan ANAK	**Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Sistem data Gender atau Data Anak**	50	%	50	%	**11.162.000,00**	**5.581.000,00**	**52.169.250,00**	APBD

	Pengumpulan Pengelolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di tingkat Daerah Kabupaten /Kota	**Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak**	1	Dokumen	1	Dokumen	**11.162.000,00**	**5.581.000,00**	**52.169.250,00**	APBD
	Penyediaan Data Gender dan Anak kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	5	Dokumen	5	Dokumen	11.162.000,00	5.581.000,00	52.169.250,00	APBD
	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan pemenuhan Hak Serta Kualitas Hidup Anak	**Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani**	**100**	**%**	**100**	**%**	**598.518.900,00**	**354.413.871,00**	**462.489.967,00**	APBD
		Persentase kekerasan terhadap Anak yang tertangani	**100**	**%**	**100**	**%**				APBD
	Program Perlindungan Perempuan	**Cakupan Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan**	**100**	%	**100**	%	**113.026.207,00**	**60.714.362,00**	**60.714.362,00**	APBD
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Yang di Fasilitasi**	**40**	**Lembaga**	**40**	**Lembaga**	**113.026.207,00**	**60.714.362,00**	**60.714.362,00**	APBD
	Penguatan jejaring antar lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**1**	Dokumen	**1**	Dokumen	113.026.207,00	60.714.362,00	60.714.362,00	APBD
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	**Nilai Evaluasi kabupaten Layak Anak (KLA)**	650	point	650	point	**353.318.900,00**	**210.663.871,00**	**262.489.967,00**	APBD
	Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	**Jumlah lembaga/Institusi yang dibina**	**10**	**lembaga**	**10**	**lembaga**	**210.952.300,00**	**132.376.150,00**	**139.376.150,00**	APBD

	Advokasi kebijakan dan Pendampingan pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah Media dan dunia Usaha	10	Organisasi	10	Organisasi	210.952.300,00	132.376.150,00	139.376.150,00	APBD
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Yang difasilitasi**	10	Lembaga	10	Lembaga	**142.366.600,00**	**78.287.721,00**	**123.113.817,00**	APBD
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	91.519.600,00	52.864.221,00	52.864.221,00	APBD
	Penguatan jejaring antar lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	5	Dokumen	5	Dokumen	50.847.000,00	25.423.500,00	70.249.596,00	APBD
	Program Perlindungan Khusus Anak	**Cakupan Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan khusus**	100	%	100	%	**245.200.000,00**	**143.750.000,00**	**200.000.000,00**	APBD
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Kusus Yang difasilitasi**	10		10		**245.200.000,00**	**143.750.000,00**	**200.000.000,00**	APBD
	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1		1		245.200.000,00	143.750.000,00	200.000.000,00	APBD
							5.254.277.296,00	**4.577.262.538,00**	**5.214.347.286,00**	APBD/ DAK

	Menurunnya Angka kelahiran	**Angka kelahiran Total (TFR)**					**811.748.596,00**	**522.109.799,00**	**920.838.057,00**	APBD/DAK
	Program Pengendalian penduduk	**Angka kelahiran kasar**	13	%	13	%	**811.748.596,00**	**522.109.799,00**	**920.838.057,00**	APBD
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengedalian Kuantitas Penduduk	**Jumlah Dokumen Yang di selaraskan**	1	Dokumen	1	Dokumen	**254.619.507,00**	**127.309.754,00**	**436.877.126,00**	APBD/DAK
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design pembangunan kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	56.874.000,00	28.437.000,00	278.437.000,00	APBD
	Advokasi, sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan kependudukan Jalur Formal di satuan pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan, Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalujr Non Formal dan Informal	50	Satuan Pendidikan	50	Satuan Pendidikan	144.239.000,00	72.119.500,00	131.686.872,00	APBD
	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Pemanfaatan kajian dampak kependudukan Beserta Model Solusi strategi Sebagai Peringatan Dini Dampak kependudukan Kepada pemangku Kepentingan	50	Organisasi	50	Organisasi	53.506.507,00	26.753.254,00	26.753.254,00	APBD
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Penduduk**	1	Dokumen	1	Dokumen	**557.129.089,00**	**394.800.045,00**	**483.960.931,00**	APBD/DAK
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga	1	Laporan	1	Laporan	122.905.000,00	91.504.000,00	91.504.000,00	APBD

	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data dan Informasi keluarga tersedianya	1	Dokumen	1	Dokumen	187.974.000,00	93.987.000,00	114.515.000,00	APBD
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan Pencatatan dan pengumpulan Data keluarga	1	Laporan	1	Laporan	145.636.000,00	137.018.000,00	157.952.000,00	APBD
	Pengolahan dan Pelaporan Data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan pelayanan KB	1	Dokumen	1	Dokumen	43.968.000,00	43.968.000,00	43.968.000,00	APBD
	Pembentukan dan operasional Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memeperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Dengan Satuan:Unit)	5	Unit	5	Unit	30.000.000,00	15.000.000,00	62.698.886,00	APBD
	Penyusunan Profil prgoram pembangunan keluarga, kependudukan dan Kelouarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dengan Satuan:Dokumen)	1	Dokumen	1	Dokumen	26.646.089,00	13.323.045,00	13.323.045,00	APBD
	Menurunnya kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi / Unmet Need	Unmet Need peserta KB	11	Angka	11	Angka	4.442.528.700,00	4.055.152.739,00	4.293.509.229,00	APBD/DAK
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	**Rasio Akseptor KB**	76,00	%	76,00	%	**2.798.584.000,00**	**2.549.690.160,00**	**2.663.211.970,00**	APBD/DAK
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Jumlah Peserta Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai kearifan Budaya Lokal**	100,00	Peserta	100,00	Peserta	**586.000.000,00**	**553.497.000,00**	**553.497.000,00**	APBD/DAK

	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana)	2	Balai	2	Balai	141.000.000,00	141.000.000,00	141.000.000,00	APBD
	Pelaksanaan mekanisme Operasional Program KKBPK melalui rapat Koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi desa (Rakordes), dan mini lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan Mekanisme Operasional Program Bangga kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga Berencana) melalui Rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	3	Laporan	3	Laporan	245.000.000,00	212.497.000,00	212.497.000,00	APBD
	promosi dan KIE proghram Bangga Kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah Dokumen promosi dan KIE program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elketronik serta Media Luar Ruangan	1	Dokumen	1	Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	APBD/DAK
	Advokasi program Bangga kencana oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholkder dan Moitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) Kepada Stakeholder dan Mitra kerja	21	Organisasi	21	Organisasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	APBD/DAK
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB/PKB/PLKB	**Jumlah tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PLKB/PKB)**	**6**	**orang**	**6**	**orang**	**879.984.000,00**	**879.984.000,00**	**899.984.000,00**	APBD
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat (IMP)	288	orang	288	orang	879.984.000,00	879.984.000,00	899.984.000,00	APBD
	Pemberdayaan dan peningkatan peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat bDaerah Kabupaten/Kota Dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Jumlah organisasi Kemasyarakatan yang berperan Dalam Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**12**	**Organisasi**	**12**	**Organisasi**	**592.534.000,00**	**460.203.660,00**	**495.808.470,00**	APBD

	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1	Dokumen	1	Dokumen	103.600.000,00	68.600.000,00	89.204.810,00	APBD
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Proghram Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	21	Kampung	21	Kampung	488.934.000,00	391.603.660,00	406.603.660,00	APBD
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan pelayanan KB di daerah Kabupaten dengan Kegiatan pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi**	100	%	100	%	**740.066.000,00**	**656.005.500,00**	**713.922.500,00**	APBD/DAK
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjnag Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan jejaring	Jumlah Laporan pengendalian pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB ke Fasilitasi kesehatan termasuk Jaringan dan jejaringnya	28	Laporan	28	Laporan	89.870.000,00	44.935.000,00	57.012.000,00	APBD
	Pembinaan Pelayanan Keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan hasil Pembinaan pelayanan Keluarga berencana dan kesehatan Reproduksi di Fasilitasi kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	34	Laporan	34	Laporan	551.845.000,00	551.845.000,00	567.685.000,00	APBD
	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	1730	orang	1730	orang	98.351.000,00	59.225.500,00	89.225.500,00	APBD
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	**Persentase Kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Aktif**	**100**	**%**	**100**	**%**	**1.643.944.700,00**	**1.505.462.579,00**	**1.630.297.259,00**	APBD/DAK
	Pelaksanaan Pembangunan keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Cakupan pembangunan Keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	100	%	100	%	**276.744.700,00**	**176.699.139,00**	**211.299.139,00**	APBD/DAK
	Orientasi dan pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan pelatihan teknis Pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R dan UPPKA)	5	Peserta	5	Peserta	276.744.700,00	176.699.139,00	211.299.139,00	APBD/DAK

	Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	**Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang berperan Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga**	36	Kelompok	36	Kelompok	**1.367.200.000,00**	**1.328.763.440,00**	**1.418.998.120,00**	APBD/DAK
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja, calon pengangtin/calon PUS, Ibu hamil, Pasca Salin/Kelahiran Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan data dan informasi keluarga ebresiko stunting ((termasuk remaja, calon pengangtin/calon PUS, Ibu hamil, Pasca Salin/Kelahiran Baduta/Balita)	1	Laporan	1	Laporan	576.000.000,00	576.000.000,00	622.320.000,00	APBD/DAK
	Pendampingan keluarga berisiko stunting (termasuk remaja, calon pengantin, calon PUS, Ibu hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)	Jumlah keluarga beresiko stunting (termasuk remaja, calon pengantin, calon PUS, Ibu hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita) yang mendapatkan pendampingkan	1	Laporan	1	Laporan	791.200.000,00	752.763.440,00	796.678.120,00	APBD/DAK
	UPTD PPA						**371.501.000,00**	**252.267.169,00**	**392.880.919,00**	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	100	%	100	%	**168.296.000,00**	**140.227.169,00**	**140.227.169,00**	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	5	%	5	%	**144.321.500,00**	**116.252.669,00**	**116.252.669,00**	APBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8	Jenis	8	Jenis	2.973.135,00	2.973.135,00	2.973.135,00	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	15	Paket	15	Paket	63.292.269,00	63.292.269,00	63.292.269,00	APBD

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	37	Paket	37	Paket	34.895.828,00	28.407.131,00	28.407.131,00	APBD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Ceatakan dan Penggandaan yang disediakan	3	Paket	3	Paket	6.392.268,00	3.196.134,00	3.196.134,00	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	Laporan	8	Laporan	36.768.000,00	18.384.000,00	18.384.000,00	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	**Persentase jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah yang tersedia**	100	%	100	%	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	APBD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Lembar	1	Lembar	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah	**Persentase Sarana Prasarana Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang terpelihara**	100	%	100	%	**22.874.500,00**	**22.874.500,00**	**22.874.500,00**	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinanannya	3	Unit	3	Unit	18.145.900,00	18.145.900,00	18.145.900,00	APBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara					4.728.600,00	4.728.600,00	4.728.600,00	APBD
	Program Perlindungan Khusus Anak	**Cakupan Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus**	3	%	3	%	**203.205.000,00**	**112.040.000,00**	**252.653.750,00**	APBD

	Penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang nenerlukan koordinasi Tingkat daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Anak yang memrlukan Perlindungan Khusus yang dilayani**	**100**	**orang**	**100**	**orang**	**203.205.000,00**	**112.040.000,00**	**252.653.750,00**	APBD
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	35	orang	35	orang	203.205.000,00	112.040.000,00	252.653.750,00	APBD

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser tahun 2025 adalah merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dalam rangka menjaga kesinambungan rencana strategis tahun 2021-2026 untuk pencapaian pembangunan daerah. Rencana Kerja ini akan menjadi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan untuk kegiatan 1 (satu) tahun, sehingga apa yang diprogramkan dapat terwujud dan mencapai tujuan serta sasaran. Rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Paser dengan memperhatikan potensi, peluang, hambatan, ancaman dan kekuatan yang ada atau yang mungkin muncul disaat berjalannya kegiatan tersebut.

4.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.3. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Tanah Grogot, 22 Agustus 2025

KEPALA DINAS



Amir Faisol,SKM,M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19671128 199103 1 006

PERUBAHAN
RENJA
2025

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASER

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunanRencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2025 telah selesai dilaksanakan.

RENJA Perubahan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan sebagai wujud pertanggungjawaban visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian tujuan melalui Kebijakan, program, dan kegiatan.

RENJA Perubahan ini menguraikan penyusunan program kegiatan dan anggaran/pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kedepannya dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

RENJA Perubahan ini juga merupakan salah satu perwujudan dari niat Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten paser untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang baik (*good government governance*). RENJA Perubahan Tahun 2025 ini kami sajikan secara objektif tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan kebudayaan.

RENJA Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2025 ini tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap untuk mendapatkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Rancangan Renja ini dimasa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan RENJA Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2025.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 9
2.2 Analisis kinerja pelayanan PD 44
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 54
2.4 Tujuan dan Sasaran 58
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 59
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 84

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 88
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional 88
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 89
3.3 Program dan Kegiatan 91

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 115
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan 115
4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi 115
4.3 Prioritas Perangkat Daerah 116

BAB V PENUTUP 137

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 (TC.29) REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2023 KABUPATEN PASER 10
Tabel 2.2 (TC.30) PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. PASER 46
Tabel 2.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Paser 55
Tabel 2.4 Identifikasi Isu-isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser .. 57
Tabel 2.5 Kebijakan Strategis 57
Tabel 2.6 (TC.31)REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 KABUPATEN PASER 60
Tabel 2.7 (TC.32) USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 KAB PASER 85
Tabel 3.1 Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 89
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Misi 4 90
Tabel 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU 2026 .. 92
Tabel 4.1 Prioritas Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser 116

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana

program dan kegiatan prioritas daerah.

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2025 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 adalah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, yang disahkan untuk menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2007 dan menjadi landasan hukum serta arah kebijakan pembangunan Indonesia selama 20 tahun ke depan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2); Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 03 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
26. Perbup no 14 tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Paser.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser dalam satu tahun;

2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, keterkaitan antaraRenja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Disdikbud, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2025

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2025 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2025 yang disertai perubahan target Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2025.

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata

anggaran

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Pada bagian ini juga berisikan tanda tangan Kepala OPD.

Ditetapkan di Tanah Grogot
Pada Tanggal
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Paser

M. YUNUS SYAM, S.Pd, M.Si
NIP. 197012031994121002

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

TABEL 2.1 (TC.29)

Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						727.725.300.419,00		107.350.146.225,00		123.726.491.836,00		-		-	0	231.076.638.061,00	0	1.826.818.465.006,46	0,84	139%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				725.744.875.742,00		107.170.610.253,00		123.449.139.634,00		-		-	0	230.619.749.887,00	0	1.811.041.280.369,46		82%	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				725.744.875.742,00		107.170.610.253,00		123.449.139.634,00		-		-	0	230.619.749.887,00	0	1.811.041.280.369,46		82%	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SD	0,50	%	180.422.473.203,00		16.788.604.596,00		4.240.038.790,00		-		-	0,00	21.028.643.386,00	0	603.318.261.533,46	6%	71%	
			Angka Putus Sekolah SMP	0,50	%										0		0		9%		
			APK PAUD	40	%										0		90		46%		

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
			APM SD	99	%										0		195		37%		
			APM SMP		%										0		170		35%		
			APK SD	104	%										0		193		39%		
			APK SMP	98	%										0,00		165		34%		
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD	100,00	%	105.486.116.752,00		10.972.006.175,00		1.592.285.645,00		-		-	0	12.564.291.820,00	196	396.038.710.905,00	39%	69%	
			Angka Melanjutkan dari SD/Sederajat	94,00	%										0		173		37%		
			Persentase Ketersediaan Operasional SD	100,00	%										0		200		40%		
			Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	56,47	%										0		166		60%		
			Persentase ketersediaan sarana prasarana dalam kondisi baik	94,42	%										0		104		22%		
			Persentase SD/Sederajat Terakreditasi	100,00	%										0		172		34%		

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3	Ruang	1.647.300.000,00									0	-	16	4.009.343.990,00	320%	393%	
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2	Ruang	538.562.000,00									0	-	18	5.314.091.295,00	120%	159%	
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2	Ruang	729.340.000,00									0	-	33	5.790.058.534,00	330%	324%	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	22	Unit	7.414.400.000,00									0	-	142	51.538.905.033,00	316%	318%	
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	6	Unit	2.970.100.000,00									0	-	108	6.311.162.104,00	432%	109%	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang		Unit										0	-	17	14.524.519.128,00	170%	456%	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
			Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat																		
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		Paket										0	-	31	3.351.423.890,00	620%	44%	
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1	Paket	1.328.500.000,00									0	-	31	29.765.536.348,00	620%	130%	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Peserta Didik										0	-	5	1.361.787.426,00	100%	356%	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100	Peserta Didik	374.907.494,00		20.964.800,00		96.520.400,00					0	117.485.200,00	6	1.681.941.529,00	1%	66%	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	802	Orang	31.502.259.635,00	802	8.728.600.000,00	341	948.500.000,00					286	9.677.100.000,00	1141	55.895.467.340,00	21%	31%	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga	500	Orang	1.907.962.940,00	30	463.536.400,00		188.959.300,00					30	652.495.700,00	1111	22.517.894.721,00	22220%	2943%	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi																		
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	208	Satuan Pendidikan	265.883.277,00		47.112.000,00		1.920.000,00					0	49.032.000,00	2	3.089.129.600,00	0%	712%	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	210	Satuan Pendidikan	45.768.870.000,00		1.655.360.000,00		122.000.000,00					0	1.777.360.000,00	213	11.809.812.806,00	19%	4%	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	210	Orang	6.434.448,00				118.496.000,00											

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2	Ruang	1.046.340.000,00									0	-	15	4.825.787.114,00	63%	111%	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	Dokumen	0,00									0	-	5502	913.686.300,00	529%	72%	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	9	Ruang	6.720.680.000,00				11.146.000,00					0	11.146.000,00	256	103.142.423.212,00	512%	658%	
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	210	Satuan Pendidikan	207.938.000,00		56.432.975,00		104.743.945,00					0	161.176.920,00	1	27.668.599.945,00	0%	1004%	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12	Ruang	1.583.840.000,00									0	-	234	42.408.644.590,00	390%	270%	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima	31696	Peserta Didik	4.326.000,00				3.256.000,00											

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
			Biaya Personil Peserta Didik																		
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2	Paket	248.472.958,00		11.688.000,00		21.660.400,00											
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				1.220.000.000,00															
																-	0	-			
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Kelulusan SMP	100,00	%	50.701.889.905,00		5.294.691.369,00		1.114.202.400,00		-		-	0	6.408.893.769,00	196	167.088.360.833,46	39%	77%	
			Persentase Ketersediaan Operasional SMP	100,00	%										0		173		35%		
			Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	73,00	%										0		185		52%		
			Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	89,60	%										0		161		36%		
			Persentase Satuan Pendidikan	100,00	%										0		152		30%		

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
			SMP yang dibina																		
			Persentase SMP/Sederajat Terkareditasi	99,00	%										0		166		33%		
		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2	Ruang	211.740.000,00									0	-	33	14.203.982.374,00	660%	1216%	
		Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1	Ruang	211.740.000,00															
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1	Unit	211.740.000,00									0	-	56	11.709.310.915,00	560%	580%	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6	Unit	1.079.200.000,00		15.920.400,00							0	15.920.400,00	82	20.550.882.398,66	410%	578%	
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	66	Paket	4.200.000.000,00									0	-	15	10.060.444.532,00	300%	253%	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang	240	Peserta Didik	424.288.000,00		22.530.000,00							0	22.530.000,00	2	3.685.931.390,00	8%	126%	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
			Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik																		
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	365	Orang	14.342.160.000,00	362	3.895.960.000,00		947.461.700,00					91	4.843.421.700,00	404	20.587.905.346,00	16%	24%	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100	Orang	1.423.886.954,00	35	433.930.944,00		22.349.700,00					35	456.280.644,00	522	1.430.257.430,00	136%	180%	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan	66	Satuan Pendidikan	591.000.000,00		73.030.025,00							0	73.030.025,00	13	2.227.137.705,00	3%	494%	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
			Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi																		
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	66	Satuan Pendidikan	19.413.567.351,00		853.320.000,00		125.485.000,00					0	978.805.000,00	1023	38.879.334.630,00	266%	40%	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	Dokumen	0,00									0	-	155	723.946.875,00	44%	91%	
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	3657	Satuan Pendidikan	598.207.600,00				18.906.000,00					0	18.906.000,00	154	2.125.947.484,00	3080%	62%	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12	Ruang	7.777.760.000,00									0	-	158	40.903.279.753,80	263%	269%	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3	Paket	216.600.000,00															

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
																		-			
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	68,98	%	22.866.662.111,00		501.702.100,00		1.496.551.500,00		-		-	0	1.998.253.600,00	163	37.847.686.104,00	48%	71%	
			Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	68,98	%										0,00		118	-	35%		
			Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang dibina	100	%										0		200	-	40%		
			Presentase Ketersediaan Operasional PAUD	100	%										0		199	-	40%		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	5	Unit	7.358.250.000,00		84.712.000,00		145.935.500,00					0	230.647.500,00	69	13.912.651.079,00	345%	94%	
		Pengadaan Mebel PAUD				299.092.700,00															
		Pengadaan Perlengkapan PAUD				86.629.000,00															

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	49	Org	1.549.840.000,00	36	244.400.000,00		40.800.000,00					9	285.200.000,00	378	2.081.671.700,00	143%	22%	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	51	Orang	2.327.907.250,00				1.076.990.600,00					0	1.076.990.600,00	377	6.444.989.960,00	148%	1284%	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	204	Satuan Pendidikan	1.089.840.836,00		23.708.900,00		152.902.400,00					0	176.611.300,00	254	2.130.401.750,00	25%	61%	
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	204	Satuan Pendidikan	5.191.535.000,00		101.440.000,00		62.070.800,00					0	163.510.800,00	397	5.109.483.200,00	39%	22%	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam	204	Orang	80.672.000,00															

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
			Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	Dokumen	0,00									0	-	264	2.193.263.000,00	5280 %	874%	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12	Ruang	2.239.952.705,00		15.560.000,00							0	15.560.000,00	28	5.925.492.015,00	62%	387%	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9	Unit	653.794.300,00				10.456.200,00											
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	5.406	Satuan Pendidikan	131.525.300,00		28.681.200,00		7.396.000,00											
		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	3	Ruang	207.929.000,00		3.200.000,00													

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Ruang	1.649.694.020,00															
																-		-			
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang aktif	40	%	1.367.804.435,00		20.204.952,00		36.999.245,00		-		-	0	57.204.197,00	105	2.343.503.691,00	75%	49%	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	51	Orang	114.204.570,00									0	-	32	185.619.720,00	640%	23%	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	9	Satuan Pendidikan	917.572.831,00		7.543.752,00		11.149.245,00					0	18.692.997,00	18	1.227.192.237,00	40%	57%	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0	Orang	67.234.000,00															
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	Dokumen	39.085.500,00				1.500.000,00					0	1.500.000,00	3	96.720.840,00	60%	12%	
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100	Peserta Didik	229.707.534,00		12.661.200,00		24.350.000,00					0	37.011.200,00	112	833.970.894,00	22%	86%	
																		-			
																		-			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan Pendidikan (Jenjang	100	%	1.251.658.176,00		14.427.725,00		266.130.500,00		-		-	0	280.558.225,00	300	1.743.110.113,00	100%	47%	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
			PAUD, Dikdas dan Kesetaraan) yang memiliki kurikulum mata pelajaran Muatan Lokal																		
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Mapel Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1	Mapel	857.158.480,00		14.427.725,00		266.130.500,00		-		-	0	280.558.225,00	3	1.469.965.663,00	60%	70%	
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1	Dokumen	196.656.810,00			1	121.443.000,00					1	121.443.000,00	3	413.530.213,00	60%	52%	
		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	400	Buku	135.534.050,00															
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	5	Orang	214.772.810,00									0	-	57	580.342.900,00	228%	116%	
		Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan	400	Buku	113.678.000,00															

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Pendidikan Dasar	Dasar yang telah dinilai/ditelaah																		
		Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1	Dokumen	196.516.810,00		14.427.725,00	1	144.687.500,00					1	159.115.225,00	2	476.092.550,00	40%	60%	
															0	-	0	-			
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	100	%	394.499.696,00		-		-		-		-	0	-	100	273.144.450,00	1000%	17%	
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1	Dok	199.937.848,00									0	-	1	148.066.750,00	20%	19%	
		Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaia	1	Dok	194.561.848,00									0	-	1	125.077.700,00	20%	16%	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	n Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun																		
																	0	-			
															0	-	0	-			
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Pendidik Sesuai Standar	91	%	2.722.112.152,00		100.877.000,00		40.647.000,00		-		-	0	141.524.000,00	91	2.840.420.826,00	19%	5%	
			Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Tenaga Kependidikan Sesuai Standar	60	%										0		60		20%		
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,	Jumlah satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP	94	%	2.722.112.152,00		100.877.000,00		40.647.000,00		-		-	0	141.524.000,00	151	2.840.420.826,00	32%	129%	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4	Dok	2.252.688.452,00	1,00	48.000.000,00							1	48.000.000,00	91	1.968.946.108,00	19%	494%	
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4	Dok	469.423.700,00	1,00	52.877.000,00		40.647.000,00					1	93.524.000,00	24	871.474.718,00	480%	48%	
																		-			

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
																		-			
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Swasta / Masyarakat yang mendapatkan Rekomendasi Perijinan Pendidikan Sesuai Ketentuan	100	%	43.632.000,00		1.880.000,00		1.040.000,00		-		-	0	2.920.000,00	283	1.796.569.100,00	57%	246%	
		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Presentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		%	0,00		-		-		-		-	0	-	300	82.740.000,00	60%	35%	
		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0	Dok	0,00									0	-	4	28.833.000,00	27%	27%	
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian	0	Dok	0,00									0	-	11	53.907.000,00	220%	41%	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Diselenggarakan oleh Masyarakat	dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
															0	-	0	-			
		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Presentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	3,00	Sekolah	43.632.000,00		1.880.000,00		1.040.000,00		-		-	0	2.920.000,00	267	1.713.829.100,00	53%	349%	
		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	Dok	29.064.000,00		1.880.000,00							0	1.880.000,00	17	40.265.100,00	14%	38%	
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian	1	Dok	0,00									0	-	204	47.062.000,00	20%	30%	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Diselenggarakan oleh Masyarakat	dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
		Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	Dok	14.568.000,00				1.040.000,00					0	1.040.000,00	115	1.626.502.000,00	20%	720%	
															0	-	0	-			
															0	-	0	-			
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan bahasa dan sastra dalam muatan lokal	100	%	182.525.630,00		-		-		-		-	0	-	100	293.117.268,00	20%	16%	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dibina	10	Kecamatan	182.525.630,00		-		-		-		-	0	-	10	293.117.268,00	20%	16%	
		Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	10	Orang	17.141.814,00									0	-	5	42.703.400,00	100%	7%	
		Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	20	Buku	59.449.662,00									0	-	479	81.167.568,00	9580%	10%	
		Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Peserta Didik	105.934.154,00									0	-	150	169.246.300,00	3000%	43%	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
																	0	-			
																-	0	-			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76	%	541.122.474.581,00		90.264.820.932,00		118.901.283.344,00		-		-	0	209.166.104.276,00	1664	1.201.049.801.529,00	447%	88%	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan Dokumen Perencanaan tepat Waktu	100	%	1.051.530.689,00	25	111.830.000,00	25	39.913.886,00		-		-	50	151.743.886,00	350	2.301.725.491,00	70%	72%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dok	760.222.769,00		83.230.000,00	1	18.186.287,00					1	101.416.287,00	17	1.703.647.651,00	57%	72%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dok	14.011.150,00	1	28.600.000,00							1	28.600.000,00	14	199.929.200,00	140%	108%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1	Lap	277.296.770,00			1	21.727.599,00					1	21.727.599,00	12	398.148.640,00	240%	61%	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
			Perangkat Daerah																		
															0	-	0	-			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan	100 %	%	537.304.329.470,00	25	89.875.385.827,00	25	118.542.441.351,00		-		-	50	208.417.827.178,00	350	1.189.093.231.753,00	70%	88%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.316	Org	536.784.363.520,00	2316	89.846.785.827,00	3175	118.394.002.291,00					1373	208.240.788.118,00	3608	1.186.826.675.923,00	39%	88%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7	Lap	519.965.950,00		28.600.000,00		148.439.060,00					0	177.039.060,00	25	2.266.555.830,00	500%	102%	
															0	-	0	-			

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	100	%	265.598.314,00	0	34.700.000,00	0	20.460.000,00		-		-	0	55.160.000,00	300	817.454.731,00	60%	681%	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20	Dok	265.598.314,00		34.700.000,00		20.460.000,00					0	55.160.000,00	65	817.454.731,00	54%	681%	
															0	-	0	-			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	541.409.286,00	25	90.521.000,00	25	46.233.920,00		-		-	50	136.754.920,00	86	1.100.377.355,00	143%	73%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	5	Dok	400.440.000,00		47.600.000,00		9.600.000,00					0	57.200.000,00	15	876.589.935,00	60%	92%	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70	Org	140.969.286,00		42.921.000,00		36.633.920,00					0	79.554.920,00	70	223.787.420,00	140%	40%	
															0	-	0	-			

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	100	%	1.147.422.252,00	25	112.598.975,00	25	221.622.869,00		-		-	50	334.221.844,00	86	6.259.466.857,00	143%	195%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	104.318.296,00		-		-					0	-	18	4.723.128.950,00	180%	1176%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	221.867.800,00		74.234.259,00	1	72.912.397,00					1	147.146.656,00	27	765.656.736,00	45%	61%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	34.474.000,00		-		-					0	-	27	95.920.260,00	180%	76%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	Lap	786.762.156,00		38.364.716,00		148.710.472,00					0	187.075.188,00	27	674.760.911,00	180%	47%	
															0	-	0	-			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	699.684.570,00		39.785.130,00		30.611.318,00		-		-	0	70.396.448,00	300	1.369.239.042,00	60%	37%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan	5	Lap	42.099.600,00									0	-	36	69.697.544,00	144%	29%	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan																		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Lap	657.584.970,00		39.785.130,00	0	30.611.318,00					0	70.396.448,00	29	1.299.541.498,00	116%	38%	
															0	-	0	-			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional	100	%	112.500.000,00		-		-		-		-	0	-	300	108.306.300,00	60%	15%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	112.500.000,00									0	-	22	108.306.300,00	88%	15%	
															0	-	0	-			

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.980.424.677,00		179.535.972,00		277.352.202,00		-		-	0	456.888.174,00	0	15.777.184.637,00		91%	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.980.424.677,00		179.535.972,00		277.352.202,00		-		-	0	456.888.174,00	0	15.777.184.637,00		91%	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Event Kebudayaan Sesuai Dengan Standar Kebudayaan	70	%	132.901.221,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0	-	0	1.979.034.512,00	0%	201%	
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Obyek Kebudayaan Masyarakat yang dikelola	1	Kegiatan	35.552.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0	-	0	24.933.000,00	0%	3%	
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10	Objek	35.552.000,00									0	-	2	24.933.000,00	40%	3%	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional masyarakat yang di lestarikan	23	Objek	97.349.221,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0	-	37	1.954.101.512,00	33%	1052%	
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	24	Objek	97.349.221,00									0	-	37	1.954.101.512,00	33%	1052%	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Seni/Sanggar Kesenian yang aktif	36	%	681.149.905,00		74.195.172,00		141.057.900,00					0	215.253.072,00	130	3.719.552.794,00	41%	61%	
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok seni yang dibina	84	Seni	681.149.905,00		74.195.172,00		141.057.900,00					0	215.253.072,00	32	3.719.552.794,00	8%	61%	
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian	10	Orang	292.281.905,00		9.400.000,00		101.234.353,00					0	110.634.353,00	2010	1.243.514.629,00	4020%	51%	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Manusia Kesenian Tradisional	Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)																		
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	84	Lembaga	388.868.000,00				131.610.000,00					0	131.610.000,00	37	2.503.029.446,00	9%	68%	
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Penyelenggaraan Event dan Penulisan Buku yang Berkaitan dengan Sejarah Daerah	5	Event	297.164.041,00		18.892.000,00		74.723.779,00					0	93.615.779,00	0	6.377.017.476,00	0%	673%	
		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sejarah Lokal yang dibina	1	Objek	297.164.041,00		18.892.000,00		74.723.779,00					0	93.615.779,00	0	6.377.017.476,00	0%	673%	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	60		45.020.000,00		18.892.000,00							0	18.892.000,00	1050	5.361.703.125,00	350%	660%	
		Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat			252.144.041,00				74.723.779,00					0	74.723.779,00	9	1.015.314.351,00	30%	750%	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	90	%	66.224.000,00		20.848.800,00		-					0	20.848.800,00	0	102.290.100,00	0%	76%	
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	14	Objek	66.224.000,00		20.848.800,00		-					0	20.848.800,00	0	102.290.100,00	0%	76%	
		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	24	Objek	66.224.000,00		20.848.800,00							0	20.848.800,00	2	102.290.100,00	2%	76%	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Presentase Peningkatan Pengunjung Museum Sadurengas Pertahun		%	802.985.510,00		65.600.000,00		61.570.523,00					0	127.170.523,00	33	3.599.289.755,00	19%	39%	
		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah museum yang di kelola		Unit	802.985.510,00		65.600.000,00		61.570.523,00					0	127.170.523,00	2	3.599.289.755,00	40%	39%	
		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	1	Unit	130.000.000,00				12.938.900,00					0	12.938.900,00	71	543.471.600,00	71%	24%	
		Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	6	Orang	100.000.000,00		4.400.000,00		6.600.000,00					0	11.000.000,00	6	266.635.768,00	27%	9%	
		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1	Unit	262.985.510,00				27.931.623,00					0	27.931.623,00	4	1.355.607.790,00	40%	106%	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah
							I		II		III		IV								
1	2	3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1	Unit	310.000.000,00		28.400.000,00		14.100.000,00					0	42.500.000,00	2	1.400.774.597,00	40%	55%	

Berdasarkan Tabel 2.2 Realisasi RKPD Tahun 2025 Semester II dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 32%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 231.076.638.061,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Satu Rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp.727.725.300.419,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah).
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 6,38% dengan predikat kinerja Sangat Rendah.
3. Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu penyebab utama dari ketidaktercapaian ini adalah ketidaktepatan dalam proses penetapan target. Kesalahan ini menunjukkan pentingnya dilakukan evaluasi awal yang mendalam dan berbasis data dalam prose perencanaan.
4. Beberapa indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan, keberhasilan ini mencerminkan efektifitas perencanan, komitmen pelaksana, serta koordinasi yang baik antarunit kerja dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

1. Pelayanan administrasi umum
2. Pelayanan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan
3. Pelayanan administrasi kesiswaan
4. Pelayanan izin pendirian dan penyelenggaraan satuan Pendidikan
5. Pelayanan rekomendasi pendirian dan penyelenggaraan satuan Pendidikan
6. Pelayanan permohonan informasi pendidikan

Upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Angka Harapan Lama Sekolah
2. Rata-rata Lama Sekolah
3. Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang telah ditetapkan
4. Nila Evaluasi SAKIP dan APIP

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat dalam Tabel 2.2. di bawah ini

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
			2022	2023	2024	2025	2026		
Meningkatkan kualitas Pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah	13.25	13.30	13.35	13.40	13.50	13,38	100,22%
		Rata-rata Lama Sekolah	8.60	8.70	8.80	8.90	9.00	8,92	100,22%
Meningkatkan Kehidupan Berbudaya	Meningkatnya kehidupan berbudaya	Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang telah ditetapkan	35%	40%	43%	45%	50%	40%	93%
		Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Keatas yang Menggunakan Bahasa Daerah	45%	50%	55%	60%	75%	70 %	127%
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang resposif dan tangkas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	70	70	70	80	80	60,61	86,8

	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai IKM	80	85	90	92	93	88 %	95,65 %

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pendidikan” memiliki 2 indikator kinerja yaitu “Angka Harapan Lama Sekolah” telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 7,86 dari target sebesar 13,25 dengan capaian kinerja sebesar 59,32 %; sedangkan indikator “Rata-rata Lama Sekolah”, telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 8,61 dari target sebesar 8,61 dengan capaian kinerja sebesar 100,11 %.
b. Tujuan “Meningkatnya Kehidupan Berbudaya” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang telah ditetapkan”, telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 19,45 dari target sebesar 35 % dengan capaian kinerja sebesar 55,57 %.
c. Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang resposif dan tangkas” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP”, telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar B dari target sebesar B dengan capaian kinerja sebesar B.

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Periode Juni 2025:

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai jadwal.
2. Juknis pelaksanaan kegiatan dari pemerintah pusat yang terlambat
3. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan perangkat daerah.
4. Perubahan pejabat/personil sehubungan dengan adanya pergantian pejabat
5. Pelaksanaan kegiatan OPD belum sepenuhnya mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah disusun

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2025.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025
Meningkatkan kualitas Pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS = \frac{\text{Jumlah penduduk usia}_i \text{ yang bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia}_i \text{ pada tahun } t}$ Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat / kelas yang sedang / pernah dijalani dan jenjang Pendidikan tertinggi yang di tamatkan.	13.40	13.40
		Rata-rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{\text{lama sekolah penduduk}}{\text{jumlah penduduk}}$ Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	8.90	8.90
Meningkatkan Kehidupan Berbudaya	Meningkatnya kehidupan berbudaya	Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang telah ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah Warisan Budaya Benda dan Tak Benda yang Telah ditetapkan}}{\text{Jumlah warisan budaya yang ada}} x\ 100$ Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	45%	45%

	Meningkatnya kehidupan berbudaya	Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang telah ditetapkan	*Jumlah penduduk usia* 5 *tahun keatas berbahasa daerah* x 100 / *Jumlah Penduduk* 5 *Tahun keatas* Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	60%	60%
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang resposif dan tangkas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP (tahun sebelumnya) dari APIP	80	80
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik DInas Pendidikan	Nilai IKM	*total nilai dari persepsi per unsur* / *Total Nilai yang terisi* x *Nilai Penimbang* Nilai kualitas pelayanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	92	92

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2025 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 yaitu ““PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN UNTUK KABUPATEN PASER YANG SEJAHTERA” yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata, peningkatan kualitas hidup anak, perempuan dan pemuda.
2. Penurunan kemiskinan melalui penguatan pelaksanaan pelindungan dan jaminan sosial, peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal.
3. Pemantapan tata kelola pemerintahan melalui penguatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan kepuasan pelayanan publik.

4. Pemantapan kualitas infrastuktur yang berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan konektivitas untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan ketangguhan terhadap bencana.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung pencapaian sasaran ke-8 Yaitu meningkatkan Kualitas Pendidikan

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 3.2

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									**727.415.105.609,00**					**730.869.492.983,00**
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**725.434.680.932,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**721.959.614.333,00**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Paser**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**100%**	**541.122.474.581,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Paser**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**100%**	**419.509.634.936,00**
1	**01**	**01**	**2.01**		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan Dokumen Perencanaan tepat Waktu	100%	1.051.530.689,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan Dokumen Perencanaan tepat Waktu	100%	1.042.647.700,00
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	760.222.769,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	743.609.500,00
1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	14.011.150,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	119.290.000,00
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	277.296.770,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	179.748.200,00
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	**Prosentase Kualitas Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan yang Akuntable**	**100%**	**537.304.329.470,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	**Prosentase Kualitas Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan yang Akuntable**	**100%**	**413.596.769.236,00**
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.165 Orang/Bulan	536.784.363.520,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.462 Orang/Bulan	412.813.773.736,00

Kode					Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan ulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	7 Laporan	519.965.950,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan ulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	782.995.500,00
1	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**265.598.314,00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**421.472.000,00**
1	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 Dokumen	265.598.314,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	24 Dokumen	421.472.000,00
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**541.409.286,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**617.854.000,00**
1	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	400.440.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	406.854.000,00
1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	140.969.286,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	211.000.000,00
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase Layanan Administrasi Perkantoran**	**12 Bulan**	**1.147.422.252,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase Layanan Administrasi Perkantoran**	**12 Bulan**	**2.802.309.680,00**
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	104.318.296,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.855.957.800,00
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	221.867.800,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	295.000.000,00

Kode					Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	34.474.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	99.300.000,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	786.762.156,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	552.051.880,00
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**699.684.570,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**878.582.320,00**
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	42.099.600,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	51.005.000,00
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	657.584.970,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	827.577.320,00
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase Jasa Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional**	**100%**	**112.500.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase Jasa Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional**	**100%**	**150.000.000,00**
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	112.500.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	150.000.000,00
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Kab. Paser**	**Angka Putus Sekolah SMP**	**1%**	**180.422.473.203,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Kab. Paser**	**Angka Putus Sekolah SMP**	**1%**	**295.493.062.947,00**
							APK PAUD	**39%**				**APK PAUD**	**39%**	
							APM SD	**98,50%**				**APM SD**	**98,50%**	
							APM SMP	**96%**				**APM SMP**	**96%**	
							APK SD	**106,00%**				**APK SD**	**106,00%**	

Kode					Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
							APK SMP	**96%**				**APK SMP**	**96%**	
							Angka Putus Sekolah SD	**0,70%**				**Angka Putus Sekolah SD**	**0,70%**	
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Kab. Paser**	**Angka Kelulusan SD**	**100%**	**105.486.116.752,00**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Kab. Paser**	**Angka Kelulusan SD**	**100%**	**202.446.079.926,00**
							Angka Melanjutkan dari SD/Sederajat	**93,50%**				**Angka Melanjutkan dari SD/Sederajat**	**93,50%**	
							Persentase Ketersediaan Operasional SD	**100%**				**Persentase Ketersediaan Operasional SD**	**100%**	
							Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	**55.63 %**				**Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD**	**55.63 %**	
							Persentase ketersediaan sarana prasarana dalam kondisi baik	**93.03 %**				**Persentase ketersediaan sarana prasarana dalam kondisi baik**	**93.03 %**	
							Persentase SD/Sederajat Terakreditasi	**100%**				**Persentase SD/Sederajat Terakreditasi**	**100%**	
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Paser	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	5 Ruang	1.647.300.000,00	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Paser	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	5 Ruang	1.958.021.400,00
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun	2 Ruang	538.562.000,00	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun	2 Ruang	1.901.573.600,00
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	2 Ruang	729.340.000,00	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	2 Ruang	2.753.433.600,00
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	32 Unit	7.414.400.000,00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	32 Unit	11.137.805.299,00
1	01	02	2.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Dibangun	7 Unit	2.970.100.000,00	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Dibangun	7 Unit	3.075.383.600,00

Kode					Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Direhabilitasi	2 Paket	1.328.500.000,00	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Direhabilitasi	2 Paket	2.633.931.400,00
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	100 Peserta Didik	374.907.494,00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	100 Peserta Didik	100.000.000,00
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Perlengkapan Sekolah	802 Orang	31.502.259.635,00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Perlengkapan Sekolah	802 Orang	20.746.593.900,00
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	350 Orang	1.907.962.940,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	350 Orang	25.000.000,00
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	226 Satuan Pendidikan	265.883.277,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	226 Satuan Pendidikan	653.406.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	226 Satuan Pendidikan	45.768.870.000,00	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	226 Satuan Pendidikan	44.429.398.179,00
1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	420 Orang	6.434.448,00	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	420 Orang	718.812.850,00
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	2 Ruang	1.046.340.000,00	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	2 Ruang	497.560.000,00

Kode					Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	2 Paket	1.220.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	2 Paket	36.114.700.000,00
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Paser	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	13 Ruang	6.720.680.000,00	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Paser	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	13 Ruang	4.883.423.800,00
1	01	02	2.01	0050	Penyelengaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	226 Satuan Pendidikan	207.938.000,00	Penyelengaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	226 Satuan Pendidikan	595.400.000,00
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kab. Paser	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Ruang	1.583.840.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kab. Paser	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Ruang	3.368.440.900,00
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	31696 Peserta Didik	4.326.000,00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	31696 Peserta Didik	66.723.195.398,00
1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Paket	248.472.958,00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Paket	130.000.000,00
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Kab. Paser**	**Angka Kelulusan SMP**	**100%**	**50.701.889.905,00**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Kab. Paser**	**Angka Kelulusan SMP**	**100%**	**50.210.482.121,00**
							Persentase Ketersediaan Operasional SMP	**100%**				**Persentase Ketersediaan Operasional SMP**	**100%**	
							Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	**71%**				**Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP**	**71%**	
							Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	**88.75 %**				**Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik**	**88.75 %**	

Kode					Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
							Persentase Satuan Pendidikan SMP yang dibina	**100%**				**Persentase Satuan Pendidikan SMP yang dibina**	**100%**	
							Persentase SMP/Sederajat Terkareditasi	**98.90 %**				**Persentase SMP/Sederajat Terkareditasi**	**98.90 %**	
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Kab. Paser	Jumlah Laboratorium yang Dibangun	1 Ruang	211.740.000,00	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Paser	Jumlah Laboratorium yang Dibangun	5 Ruang	2.215.232.600,00
1	01	02	2.02	0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Kab. Paser	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang	211.740.000,00	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	13 Ruang	4.168.674.400,00
1	01	02	2.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Dibangun	1 Unit	211.740.000,00	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Dibangun	9 Ruang	3.589.692.850,00
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dibangun	6 Unit	1.079.200.000,00	Pembangunan Laboratorium	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dibangun	15 Ruang	7.905.077.100,00
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah yang Tersedia	66 Paket	4.200.000.000,00	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah yang Tersedia	42 Unit	7.875.738.750,00
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Paser	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	240 Peserta Didik	424.288.000,00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	42 Unit	6.450.337.250,00
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	395 Orang	14.342.160.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	8 Ruang	3.885.555.400,00

Kode					Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	1.423.886.954,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 Ruang	247.811.550,00
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	80 Satuan Pendidikan	591.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	4 Ruang	1.431.525.600,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	80 Satuan Pendidikan	19.413.567.351,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	4 Unit	1.511.113.600,00
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	3657 Satuan Pendidikan	598.207.600,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	3 Unit	743.615.900,00
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang	7.777.760.000,00	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	9 Paket	815.194.721,00
1	01	02	2.02	67	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	216.600.000,00	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	8 Paket	9.370.912.400,00
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Kab. Paser**	**Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD**	**67.63 %**	**22.866.662.111,00**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Kab. Paser**	**Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD**	**67.63 %**	**39.067.581.050,00**
							Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	**67.63 %**				**Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik**	**67.63 %**	
							Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang dibina	**100%**				**Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang dibina**	**100%**	
							Presentase Ketersediaan Operasional PAUD	**100%**				**Presentase Ketersediaan Operasional PAUD**	**100%**	

Kode					Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	5 Unit	7.358.250.000,00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	32 Unit	8.391.145.350,00
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Kab. Paser	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	7 Paket	299.092.700,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Paser	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	21 Unit	3.316.497.600,00
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kab. Paser	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket	86.629.000,00	Pengadaan Mebel PAUD	Kab. Paser	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	9 Paket	904.485.100,00
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	49 Orang	1.549.840.000,00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kab. Paser	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD	20 Paket	287.490.000,00
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	51 Orang	2.327.907.250,00	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kab. Paser	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	5.406 Peserta Didik	120.000.000,00
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Paser	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	219 Satuan Pendidikan	1.089.840.836,00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	53 Orang	1.919.600.000,00
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Paser	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	219 Satuan Pendidikan	5.191.535.000,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	51 Orang	100.000.000,00
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Paser	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	219 Satuan Pendidikan	80.672.000,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Paser	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	204 Satuan Pendidikan	1.700.000.000,00

Kode					Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12 Ruang	2.239.952.705,00	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Paser	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	204 Satuan Pendidikan	8.806.600.000,00
1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Unit	653.794.300,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	3.253.194.000,00
1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kab. Paser	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	5.406 Peserta Didik	131.525.300,00	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Paser	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	858.093.300,00
1	01	02	2.03	0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Paser	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	3 Ruang	207.929.000,00	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	28 Ruang	5.280.466.200,00
1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	1.649.694.020,00	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	4.130.009.500,00
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Kab. Paser**	**Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang aktif**	**35%**	**1.367.804.435,00**	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**Kab. Paser**	**Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang aktif**	**35%**	**3.768.919.850,00**
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	51 Orang	114.204.570,00	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	15 Unit	1.380.090.050,00

Kode					Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	9 Satuan Pendidikan	917.572.831,00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	10 Paket	610.019.800,00
1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Normal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	9 Orang	67.234.000,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	51 Orang	60.000.000,00
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	39.085.500,00	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	1.698.810.000,00
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah lembaga Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	100 Peserta Didik	229.707.534,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Paser	Jumlah lembaga Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	20.000.000,00
1	01	03			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Kab. Paser**	**Persentase satuan Pendidikan (Jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan) yang memiliki kurikulum mata pelajaran Muatan Lokal**	**100%**	**941.463.366,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Kab. Paser**	**Persentase satuan Pendidikan (Jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan) yang memiliki kurikulum mata pelajaran Muatan Lokal**	**100%**	**1.112.366.800,00**

Kode					Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	**Kab Paser**	**Jumlah Mapel Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**1 Mapel**	**546.963.670,00**	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	**Kab Paser**	**Jumlah Mapel Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**1 Mapel**	**812.366.800,00**
1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab Paser	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	196.656.810,00	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab Paser	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	150.000.000,00
1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab Paser	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	50 Orang	135.534.050,00	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab Paser	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	50 Orang	562.366.800,00
1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab Paser	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	1 Dokumen	214.772.810,00	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab Paser	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	1 Dokumen	100.000.000,00
1	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	Kab Paser	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	2 Dokumen	113.678.000,00	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	Kab Paser	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	2 Dokumen	100.000.000,00
1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab Paser	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	3 Dokumen	196.516.810,00	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab Paser	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	3 Dokumen	100.000.000,00
1	**01**	**03**	**2.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Kab. Paser**	**Prosentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**100%**	**394.499.696,00**	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Kab. Paser**	**Prosentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**100%**	**300.000.000,00**
1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Paser	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	199.937.848,00	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Paser	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	150.000.000,00
1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Paser	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan	1 Kegiatan	194.561.848,00	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan	Kab. Paser	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan	1 Kegiatan	150.000.000,00

Kode					Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
							Nonformal yang Tersusun			Pendidikan Nonformal		Nonformal yang Tersusun		
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Kab. Paser**	**Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Pendidik Sesuai Standar**	**91%**	**2.722.112.152,00**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Kab. Paser**	**Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Pendidik Sesuai Standar**	**91%**	**5.369.331.650,00**
							Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Tenaga Kependidikan Sesuai Standar	**60%**				**Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Tenaga Kependidikan Sesuai Standar**	**60%**	
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Kab. Paser**	**Jumlah satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP**	**94%**	**2.722.112.152,00**	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Kab. Paser**	**Jumlah satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP**	**94%**	**5.369.331.650,00**
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	2.252.688.452,00	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	3.308.187.150,00
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	469.423.700,00	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	2.061.144.500,00

Kode					Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Kab. Paser**	**Persentase Satuan Pendidikan Swasta / Masyarakat yang mendapatkan Rekomendasi Perijinan Pendidikan Sesuai Ketentuan**	**100%**	**43.632.000,00**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Kab. Paser**	**Persentase Satuan Pendidikan Swasta / Masyarakat yang mendapatkan Rekomendasi Perijinan Pendidikan Sesuai Ketentuan**	**100%**	**159.218.000,00**
1	**01**	**05**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Kab. Paser**	**Presentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**100%**	**-**	**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Kab. Paser**	**Presentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**100%**	**55.000.000,00**
1	01	05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang Terlayani	1 Dokumen	-	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang Terlayani	1 Dokumen	20.000.000,00
1	01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	-	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	35.000.000,00
1	**01**	**05**	**2.02**		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Kab. Paser**	**Presentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**100%**	**43.632.000,00**	**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Kab. Paser**	**Presentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**100%**	**104.218.000,00**
1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat	1 Dokumen	29.064.000,00	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat	1 Dokumen	21.218.000,00

Kode					Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyaraka	1 Dokumen		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyaraka	1 Dokumen	38.000.000,00
1	01	05	2.02	0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Pembinaan Bunda PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	14.568.000,00	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Pembinaan Bunda PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	45.000.000,00
1	**01**	**06**			**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**Kab. Paser**	**persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan bahasa dan sastra dalam muatan lokal**	**100%**	**182.525.630,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**Kab. Paser**	**persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan bahasa dan sastra dalam muatan lokal**	**100%**	**316.000.000,00**
1	**01**	**06**	**2.01**		**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Paser**	**Jumlah Lembaga yang Dibina**	**10 Kecamatan**	**182.525.630,00**	**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Paser**	**Jumlah Lembaga yang Dibina**	**10 Kecamatan**	**316.000.000,00**
1	01	06	2.01	0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	10 Orang	17.141.814,00	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	10 Orang	110.000.000,00
1	01	06	2.01	0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	200 Buku	59.449.662,00	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	200 Buku	85.000.000,00

Kode					Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	01	06	2.01	0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Peserta Didik	105.934.154,00	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Peserta Didik	121.000.000,00
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**1.980.424.677,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**8.909.878.650,00**
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Kab. Paser**	**Persentase penyelenggaraan Event Kebudayaan Sesuai Dengan Standar Kebudayaan**	**70%**	**132.901.221,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Kab. Paser**	**Persentase penyelenggaraan Event Kebudayaan Sesuai Dengan Standar Kebudayaan**	**70%**	**1.165.781.600,00**
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Paser**	**Prosentase Obyek Kebudayaan Masyarakat yang dikelola**	**1 Kegiatan**	**35.552.000,00**	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Paser**	**Prosentase Obyek Kebudayaan Masyarakat yang dikelola**	**1 Kegiatan**	**50.000.000,00**
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kab. Paser	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 Objek	35.552.000,00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kab. Paser	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 Objek	50.000.000,00
2	**22**	**02**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Paser**	**Jumlah kesenian tradisional masyarakat yang di lestarikan**	**23 Objek**	**97.349.221,00**	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Paser**	**Jumlah kesenian tradisional masyarakat yang di lestarikan**	**23 Objek**	**1.115.781.600,00**

Kode					Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kab. Paser	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	23 Obyek	97.349.221,00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kab. Paser	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	23 Obyek	1.115.781.600,00
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Kab. Paser**	**Persentase Kelompok Seni/Sanggar Kesenian yang aktif**	**30%**	**681.149.905,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Kab. Paser**	**Persentase Kelompok Seni/Sanggar Kesenian yang aktif**	**30%**	**1.782.818.400,00**
2	**22**	**03**	**2.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Paser**	**Jumlah kelompok seni yang dibina**	**84 Seni**	**681.149.905,00**	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Paser**	**Jumlah kelompok seni yang dibina**	**84 Seni**	**1.782.818.400,00**
2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kab. Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	10 Orang	292.281.905,00	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kab. Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	10 Orang	717.818.400,00
2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kab. Paser	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	388.868.000,00	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kab. Paser	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	1.065.000.000,00
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Kab. Paser**	**Jumlah Penyelenggaraan Event dan Penulisan Buku yang Berkaitan dengan Sejarah Daerah**	**5 Event**	**297.164.041,00**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Kab. Paser**	**Jumlah Penyelenggaraan Event dan Penulisan Buku yang Berkaitan dengan Sejarah Daerah**	**5 Event**	**4.426.413.650,00**
2	**22**	**04**	**2.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Paser**	**Jumlah Sejarah Lokal yang dibina**	**1 Objek**	**297.164.041,00**	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Paser**	**Jumlah Sejarah Lokal yang dibina**	**1 Objek**	**4.426.413.650,00**

Kode					Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Dierdayakan	10 Orang	45.020.000,00	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Dierdayakan	10 Orang	3.241.413.650,00
2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen	252.144.041,00	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen	1.185.000.000,00
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Kab. Paser**	**Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**	**80%**	**66.224.000,00**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Kab. Paser**	**Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**	**80%**	**27.040.000,00**
2	**22**	**05**	**2.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Kab. Paser**	**Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya**	**14 Objek**	**66.224.000,00**	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Kab. Paser**	**Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya**	**14 Objek**	**27.040.000,00**
2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kab. Paser	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	22 Obyek	66.224.000,00	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kab. Paser	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	22 Obyek	27.040.000,00
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Kab. Paser**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Museum Sadurengas Pertahun**	**14%**	**802.985.510,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Kab. Paser**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Museum Sadurengas Pertahun**	**14%**	**1.507.825.000,00**
2	**22**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**Kab. Paser**	**Jumlah museum yang di kelola**	**1 Unit**	**802.985.510,00**	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**Kab. Paser**	**Jumlah museum yang di kelola**	**1 Unit**	**1.507.825.000,00**
2	22	06	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	Kab. Paser	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	125 Unit	130.000.000,00	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	Kab. Paser	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	125 Unit	70.000.000,00
2	22	06	2.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Kab. Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan	5 Orang	100.000.000,00	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya	Kab. Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan	5 Orang	75.000.000,00

Kode					Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
							Mutu dan Kapasitasnya			Manusia Permuseuman		Mutu dan Kapasitasnya		
2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Kab. Paser	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	262.985.510,00	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Kab. Paser	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	200.025.000,00
2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kab. Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	310.000.000,00	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kab. Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	1.162.800.000,00

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	MURNI					PERUBAHAN	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									**727.725.300.419,00**				**771.599.684.152,00**
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**725.744.875.742,00**				**765.237.259.475,00**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**Kab. Paser**	**76%**	**541.122.474.581,00**	**APBD**		**76%**	**520.802.521.318,00**
1	**01**	**01**	**2.01**		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan Dokumen Perencanaan tepat Waktu	Kab. Paser	100%	1.051.530.689,00			100%	952.478.689,00
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	6 Dokumen	760.222.769,00			6 Dokumen	661.170.769,00
1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	2 Dokumen	14.011.150,00			2 Dokumen	14.011.150,00
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	1 Laporan	277.296.770,00			2 Laporan	277.296.770,00
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Kualitas Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan yang Akuntable**	**Kab. Paser**	**100%**	**537.304.329.470,00**			**100%**	**517.323.243.034,00**
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	3.165 Orang/Bulan	536.784.363.520,00			3.165 Orang/Bulan	516.735.311.084,00

1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan ulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Paser	7 Laporan	519.965.950,00			7 Laporan	587.931.950,00
1	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi Perkantoran**	**Kab. Paser**	**100%**	**265.598.314,00**			**100%**	**217.598.314,00**
1	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Paser	20 Dokumen	265.598.314,00			20 Dokumen	217.598.314,00
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	**12 Bulan**	**541.409.286,00**			**100%**	**446.409.286,00**
1	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Paser	5 Dokumen	400.440.000,00			5 Dokumen	305.440.000,00
1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Paser	100 Orang	140.969.286,00			100 Orang	140.969.286,00
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi Perkantoran**	**Kab. Paser**	**12 Bulan**	**1.147.422.252,00**			**100%**	**1.303.607.425,00**
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	2 Paket	104.318.296,00			2 Paket	230.503.469,00
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	2 Paket	221.867.800,00			2 Paket	251.867.800,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Paser	3 Paket	34.474.000,00			3 Paket	34.474.000,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	3 Laporan	786.762.156,00			3 Laporan	786.762.156,00

1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Paser**	**100%**	**699.684.570,00**			**100%**	**446.684.570,00**
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Paser	5 Laporan	42.099.600,00			12 Laporan	42.099.600,00
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	5 Laporan	657.584.970,00			5 Laporan	404.584.970,00
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional**	**Kab. Paser**	**100%**	**112.500.000,00**			**100%**	**112.500.000,00**
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Paser	5 Unit	112.500.000,00			5 Unit	112.500.000,00
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Putus Sekolah SD**	**Kab. Paser**	**0,5%**	**180.422.473.203,00**	APBD		**0,70%**	**240.019.910.417,00**
						Angka Putus Sekolah SMP		**0,5%**				**1,00%**	
						APK PAUD		**65%**				**39%**	
						APM SD		**99,00%**				**98,50%**	
						APM SMP		**96%**				**96%**	
						APK SD		**104,00%**				**106,00%**	
						APK SMP		**96%**				**96%**	
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Angka Kelulusan SD**	**Kab. Paser**	**100%**	**105.486.116.752,00**			**100%**	**145.258.433.692,00**
						Angka Melanjutkan dari SD/Sederajat		**94%**				**93,50%**	
						Persentase Ketersediaan Operasional SD		**100%**				**100%**	
						Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD		**56,47%**				**55.63 %**	

						Persentase ketersediaan sarana prasarana dalam kondisi baik		**94,42%**				**93.03 %**	
						Persentase SD/Sederajat Terakreditasi		**100,00%**				**100%**	
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Paser	5 Ruang	1.647.300.000,00			7 Ruang	2.905.660.000,00
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun	Kab. Paser	2 Ruang	538.562.000,00			2 Ruang	615.284.700,00
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	Kab. Paser	2 Ruang	729.340.000,00			2 Ruang	1.416.810.000,00
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	Kab. Paser	32 Unit	7.414.400.000,00			64 Unit	24.819.795.896,00
1	01	02	2.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Dibangun	Kab. Paser	7 Unit	2.970.100.000,00			8 Unit	3.430.770.000,00
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Kab. Paser					Paket	5.305.838.000,00
1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah	Kab. Paser	2 Paket	1.328.500.000,00			4 Paket	7.283.392.700,00
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Paser	100 Peserta Didik	374.907.494,00			100 Peserta Didik	374.907.494,00
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Paser	802 Orang	31.502.259.635,00			802 Orang	20.722.259.635,00
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Paser	350 Orang	1.907.962.940,00			400 Orang	2.207.962.940,00
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kab. Paser	226 Satuan Pendidikan	265.883.277,00			226 Satuan Pendidikan	189.577.227,00

1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Kab. Paser	226 Satuan Pendidikan	45.768.870.000,00			226 Satuan Pendidikan	47.898.390.000,00
1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Paser	420 Orang	6.434.448,00			420 Orang	109.556.000,00
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Kab. Paser	2 Ruang	1.046.340.000,00			2 Ruang	1.108.770.000,00
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kab. Paser	2 Paket	1.220.000.000,00			3 Paket	4.640.020.000,00
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Paser	13 Ruang	6.720.680.000,00			24 Ruang	12.005.153.100,00
1	01	02	2.01	0050	Penyelengaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kab. Paser	226 Satuan Pendidikan	207.938.000,00			226 Satuan Pendidikan	235.446.000,00
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Paser	3 Ruang	1.583.840.000,00			15 Ruang	9.988.840.000,00
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Paser	31696 Peserta Didik	4.326.000,00			31696 Peserta Didik	4.326.000,00
1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Kab. Paser	1 Paket	248.472.958,00			1 Paket	248.472.958,00
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Angka Kelulusan SMP**	**Kab. Paser**	**100%**	**50.701.889.905,00**			**100%**	**61.390.985.249,00**
						Persentase Ketersediaan Operasional SMP		**100%**				**100%**	
						Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP		**73%**				**71%**	
						Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik		**89,64%**				**88.75 %**	
						Persentase Satuan Pendidikan SMP yang dibina		**100%**				**100%**	

						Persentase SMP/Sederajat Terkareditasi		**99%**				**98.90 %**	
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kab. Paser					1 Ruang	201.820.000,00
1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Paser					2 Ruang	604.582.000,00
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Kab. Paser	1 Ruang	211.740.000,00			6 Ruang	1.720.588.000,00
1	01	02	2.02	0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Kab. Paser	1 Ruang	211.740.000,00			1 Ruang	229.900.000,00
1	01	02	2.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Dibangun	Kab. Paser	1 Unit	211.740.000,00			2 Unit	998.167.000,00
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dibangun	Kab. Paser	6 Unit	1.079.200.000,00			21 Unit	7.961.624.435,00
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Paser					3 Ruang	315.820.000,00
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Paser					2 Ruang	221.712.000,00
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah yang Tersedia	Kab. Paser	66 Paket	4.200.000.000,00			66 Paket	4.326.140.000,00
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kab. Paser					66 Paket	630.968.000,00
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Paser	240 Peserta Didik	424.288.000,00			240 Peserta Didik	1.299.625.429,00
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Paser	395 Orang	14.342.160.000,00			395 Orang	10.583.760.000,00

1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Paser	100 Orang	1.423.886.954,00			130 Orang	1.623.886.954,00
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kab. Paser	80 Satuan Pendidikan	591.000.000,00			80 Satuan Pendidikan	1.990.852.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Kab. Paser	80 Satuan Pendidikan	19.413.567.351,00			80 Satuan Pendidikan	21.423.922.351,00
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Paser	3657 Satuan Pendidikan	598.207.600,00			3657 Peserta Didik	707.947.600,00
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Paser	6 Ruang	7.777.760.000,00			6 Ruang	6.001.114.370,00
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kab. Paser					365 Paket	252.317.110,00
1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Paser	3 Paket				2 Ruang	17.500.000,00
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Kab. Paser	3 Paket	216.600.000,00			3 Paket	278.738.000,00
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD**	**Kab. Paser**	**68,98%**	**22.866.662.111,00**			**67.63 %**	**31.630.587.041,00**
						Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik		**68,98%**				**67.63 %**	
						Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang dibina		**100%**				**100%**	
						Presentase Ketersediaan Operasional PAUD		**100%**				**100%**	
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	Kab. Paser	5 Unit	7.358.250.000,00			72 Unit	9.372.663.250,00
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Kab. Paser	7 Paket	299.092.700,00			7 Paket	299.092.700,00

1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Kab. Paser	1 Paket	86.629.000,00			1 Paket	86.629.000,00
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kab. Paser	49 Orang	1.549.840.000,00			49 Orang	795.840.000,00
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Paser	51 Orang	2.327.907.250,00			470 Orang	3.327.907.250,00
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Paser	219 Satuan Pendidikan	1.089.840.836,00			219 Satuan Pendidikan	1.544.840.836,00
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Kab. Paser	219 Satuan Pendidikan	5.191.535.000,00			219 Satuan Pendidikan	11.141.535.000,00
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Paser	219 Satuan Pendidikan	80.672.000,00			219 Orang	80.672.000,00
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Paser	12 Ruang	2.239.952.705,00			24 Ruang	3.855.362.705,00
1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Paser	9 Unit	653.794.300,00			6 Unit	1.126.044.300,00
1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Paser	5.406 Peserta Didik	131.525.300,00			5.406 Peserta Didik	60.525.300,00
1	01	02	2.03	0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Kab. Paser	3 Ruang	207.929.000,00			1 Ruang	274.679.000,00
1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Paser	2 Ruang	1.649.694.020,00			21 Ruang	2.934.944.020,00
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang aktif**	**Kab. Paser**	**40%**	**1.367.804.435,00**			**35%**	**1.739.904.435,00**

1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Paser	51 Orang	114.204.570,00			400 Orang	114.204.570,00
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Paser					9 Satuan Pendidikan	222.100.000,00
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Kab. Paser	9 Satuan Pendidikan	917.572.831,00			9 Satuan Pendidikan	917.572.831,00
1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Normal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	9 Orang	67.234.000,00			9 Orang	67.234.000,00
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Paser	1 Dokumen	39.085.500,00			1 Dokumen	39.085.500,00
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah lembaga Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	100 Peserta Didik	229.707.534,00			130 Peserta Didik	379.707.534,00
1	01	03			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase satuan Pendidikan (Jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan) yang memiliki kurikulum mata pelajaran Muatan Lokal**	**Kab. Paser**	**100%**	**1.251.658.176,00**			**100%**	**1.427.658.176,00**
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	**Jumlah Mapel Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Kab Paser**	**1 Mapel**	**857.158.480,00**			**1 Mapel**	**1.033.158.480,00**
1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kab Paser	1 Dokumen	196.656.810,00			1 Dokumen	196.656.810,00

1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Kab Paser	500 Buku	135.534.050,00			2000 Buku	311.534.050,00
1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Kab Paser	5 Orang	214.772.810,00			50 Orang	214.772.810,00
1	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	Kab Paser	3 Buku	113.678.000,00			2 Buku	113.678.000,00
1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kab Paser	1 Dokumen	196.516.810,00			1 Dokumen	196.516.810,00
1	**01**	**03**	**2.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Kab. Paser**	**100%**	**394.499.696,00**			**100%**	**394.499.696,00**
1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Kab. Paser	1 Dokumen	199.937.848,00			1 Dokumen	199.937.848,00
1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Kab. Paser	1 Dokumen	194.561.848,00			1 Dokumen	194.561.848,00
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Pendidik Sesuai Standar**	**Kab. Paser**	**92%**	**2.722.112.152,00**			**91%**	**2.602.112.152,00**
						Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Tenaga Kependidikan Sesuai Standar		**65%**				**60%**	

1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Jumlah satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP**	**Kab. Paser**	**96%**	**2.722.112.152,00**			**94%**	**2.602.112.152,00**
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	1 Dokumen	2.252.688.452,00			1 Dokumen	2.132.688.452,00
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	1 Laporan	469.423.700,00			1 Laporan	469.423.700,00
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase Satuan Pendidikan Swasta / Masyarakat yang mendapatkan Rekomendasi Perijinan Pendidikan Sesuai Ketentuan**	**Kab. Paser**	**100%**	**43.632.000,00**			**100%**	**43.632.000,00**
1	**01**	**05**	**2.02**		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Presentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Kab. Paser**	**100%**	**43.632.000,00**			**100%**	**43.632.000,00**
1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal	Kab. Paser	1 Dokumen	29.064.000,00			1 Dokumen	29.064.000,00
1	01	05	2.02	0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Pembinaan Bunda PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	1 Dokumen	14.568.000,00			1 Dokumen	14.568.000,00

1	**01**	**06**			**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan bahasa dan sastra dalam muatan lokal**	**Kab. Paser**	**100%**	**182.525.630,00**			**100%**	**341.425.412,00**
1	**01**	**06**	**2.01**		**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga yang Dibina**	**Kab. Paser**	**10 Kecamatan**	**182.525.630,00**			**10 Kecamatan**	**341.425.412,00**
1	01	06	2.01	0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	Kab. Paser	10 Orang	17.141.814,00			10 Orang	17.141.814,00
1	01	06	2.01	0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	Kab. Paser	20 Buku	59.449.662,00			20 Buku	59.449.662,00
1	01	06	2.01	0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	5 Peserta Didik	105.934.154,00			5 Peserta Didik	264.833.936,00
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**1.980.424.677,00**				**6.362.424.677,00**
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase penyelenggaraan Event Kebudayaan Sesuai Dengan Standar Kebudayaan**	**Kab. Paser**	**70%**	**132.901.221,00**			**70%**	**458.813.221,00**

2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Obyek Kebudayaan Masyarakat yang dikelola**	**Kab. Paser**	**1 Kegiatan**	**35.552.000,00**			**1 Kegiatan**	**361.464.000,00**
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Kab. Paser	10 Objek	35.552.000,00			10 Objek	361.464.000,00
2	**22**	**02**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kesenian tradisional masyarakat yang di lestarikan**	**Kab. Paser**	**23 Objek**	**97.349.221,00**			**23 Objek**	**97.349.221,00**
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Kab. Paser	23 Obyek	97.349.221,00			24 Obyek	97.349.221,00
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase Kelompok Seni/Sanggar Kesenian yang aktif**	**Kab. Paser**	**30%**	**681.149.905,00**			**30%**	**1.489.149.905,00**
2	**22**	**03**	**2.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kelompok seni yang dibina**	**Kab. Paser**	**84 Seni**	**681.149.905,00**			**84 Seni**	**1.489.149.905,00**
2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Kab. Paser	10 Orang	292.281.905,00			10 Orang	245.281.905,00
2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Paser	10 Lembaga	388.868.000,00			10 Lembaga	1.243.868.000,00

2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Jumlah Penyelenggaraan Event dan Penulisan Buku yang Berkaitan dengan Sejarah Daerah**	**Kab. Paser**	**5 Event**	**297.164.041,00**			**5 Event**	**3.246.164.041,00**
2	**22**	**04**	**2.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sejarah Lokal yang dibina**	**Kab. Paser**	**1 Objek**	**297.164.041,00**			**1 Objek**	**3.246.164.041,00**
2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Dierdayakan	Kab. Paser	10 Orang	45.020.000,00			60 Orang	2.994.020.000,00
2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Kab. Paser	4 Dokumen	252.144.041,00			2 Dokumen	252.144.041,00
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**	**Kab. Paser**	**90%**	**66.224.000,00**			**80%**	**66.224.000,00**
2	**22**	**05**	**2.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya**	**Kab. Paser**	**14 Objek**	**66.224.000,00**			**14 Objek**	**66.224.000,00**
2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Kab. Paser	22 Obyek	66.224.000,00			22 Obyek	66.224.000,00
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Presentase Peningkatan Pengunjung Museum Sadurengas Pertahun**	**Kab. Paser**	**16%**	**802.985.510,00**			**14%**	**1.102.073.510,00**
2	**22**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**Jumlah museum yang di kelola**	**Kab. Paser**	**1 Unit**	**802.985.510,00**			**1 Unit**	**1.102.073.510,00**
2	22	06	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Kab. Paser	125 Unit	130.000.000,00			125 Unit	430.000.000,00
2	22	06	2.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Kab. Paser	5 Orang	100.000.000,00			6 Orang	100.000.000,00

2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Kab. Paser	1 Unit	262.985.510,00			1 Unit	357.073.510,00
2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Kab. Paser	1 Unit	310.000.000,00			1 Unit	215.000.000,00

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2025.

Ditetapkan di Tanah Grogot
Pada Tanggal 22 Agustus 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Paser

M. YUNUS SYAM, S.Pd, M.Si
NIP. 197012031994121002

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS PERHUBUNGAN



RENCANA KERJA
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan perencanaan perangkat daerah selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Renstra. Adapun penyusunan rencana kerja perangkat daerah merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.

Rencana Kerja Tahun 2026 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Renja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan juga berperan sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perhubungan. Renja juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Paser dan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin

Tana Paser, 29 Agustus 2025
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

H. INAYATULLAH, ST. MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750511 199903 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
SK PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN iii
1. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud Dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7
II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan 11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah 25
2.4 Review Terhadap RKPD 28
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 39
III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 43
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 43
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 44
3.3 Program dan Kegiatan 45
IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 47
V PENUTUP 56

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. D.I. Panjaitan Kecamatan Tanah Grogot
Kabupaten Paser Kalimantan Timur Kode Pos 76211
Email : perhubunganpaser@gmail.com Web. https://dishub.paserkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER
NOMOR : 188.4/ 010 /DISHUB-2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Tahun 2026 perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja tersebut;
b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana; Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten paser nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten paser nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026;
9. Peraturan Bupati Paser Nomor 8 Tahun 2023 tentang kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Paser dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini adalah menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Paser;

KETIGA : Tim penyusun dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencansan lainnya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Di tetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Dinas,

H. Inayatullah, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP 19750511 199903 1 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Paser di Tana Paser;
2. Ketua DPRD Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. BPKAD Kabupaten Paser di Tana Paser
5. Kepala Bappeda Kabupaten Paser di Tana Paser;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
NOMOR : 188.4 / /DISHUB-2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
TIM PENYUSUNAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER TAHUN 2025

Ketua	:	Kepala Dinas
Wakil Ketua	:	Sekretaris
Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Anggota	:	1. Kepala Bidang Prasarana LLAJ
		2. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan
		3. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		4. Kepala UPTD. Pelabuhan Tana Paser
		5. Kepala UPTD. Terminal Kota
		6. Kepala UPTD. Terminal Kuaro
		7. Kepala UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor
Sekretariat :		1. Ratmini, SE
		2. Budi Santoso, SP
		3. Hariyati

Kepala Dinas,

H. Inayatullah, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19750511 199903 1 005

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Perhubungan sebagai salah satu bagian dari sistem organisasi pemerintah daerah Kabupaten Paser dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal dan mengacu pada sistem Good Governance untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan.

Rencana Kerja (Rankhir Renja) Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Paser tahun 2025- 2029.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang mempunyai hak untuk meminta penjelasan atau jawaban atas kinerja. Untuk mewujudkan hal tersebut maka harus ada sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legimit, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangun dapat berdaya guna, berhasil, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Oleh karena itu, kegiatan pada Dinas Perhubungan harus memenuhi asas akuntabilitas yang menuntut setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser disusun dengan menggunakan acuan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah rujukan utama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta beberapa Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang relevan antara lain dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sebagai konsekuensi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menekankan perlunya keterkaitan erat antara penyusunan Renja dan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten.

Atas dasar peraturan tersebut diatas tersurat kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Paser untuk menyusun Renja Tahun 2026. Sebagai arah program atau kegiatan secara terpadu yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun, selain itu, merupakan pedoman terarah dan antisipasi terhadap perubahan lingkungan, untuk memberikan strategi yang tepat dalam menghadapinya, serta mengacu pada Renstra dan RPJM Daerah, RPJP Nasional, RPJM Nasional dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, dengan tujuan penetapan tolak ukur pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Dinas Perhubungan Kabupaten Paser merupakan suatu kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang namun sudah merupakan suatu kebutuhan. Dengan adanya Renja, penetapan suatu kegiatan pembangunan diharapkan akan sinergi terarah dan terencana.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Perencanaan internal Perangkat Daerah seperti diuraikan di atas, juga untuk merealisasikan tugas pembangunan kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, dan secara sinergi bertujuan untuk mensukseskan Pembangunan Daerah.

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser melalui tahapan proses tersebut secara umum dan memperhatikan dan mengacu pada beberapa dokumen perencanaan lainnya.

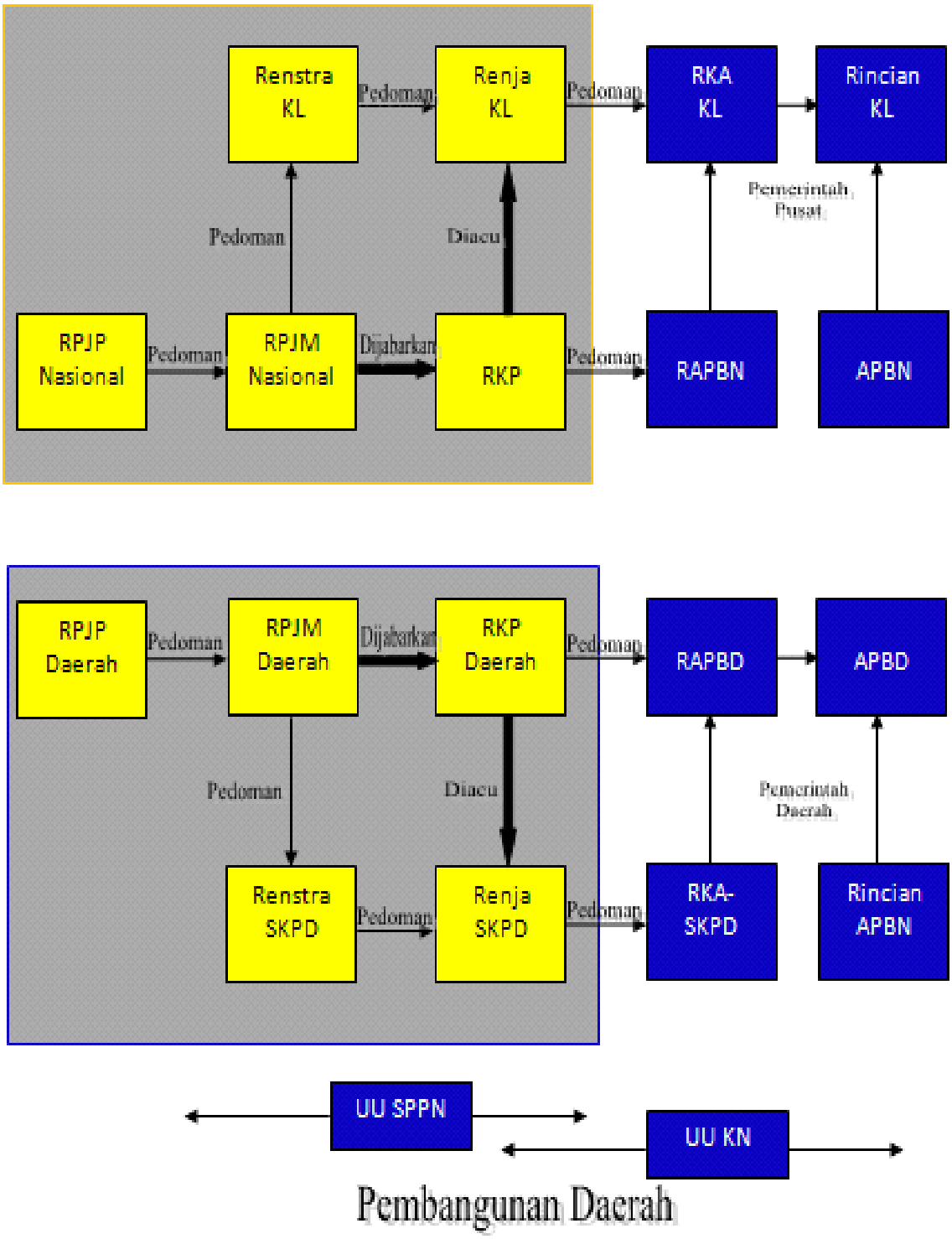

Gambar 1.1. Posisi Renstra dalam Sistem Perencanaan

1.2 Landasan Hukum

Dalam Menyusun Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Tahun 2026 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan yang terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026.
- Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Peraturan Bupati Paser Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan organisasi unit pelaksanaan daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Paser;
- Peraturan Bupati Paser Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser;
- Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perhubungan dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi. Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN maupun APBD Kabupaten. Berdasarkan pertimbangan ini, maka Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

- Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Perhubungan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan sumber pembiayaan APBN.
- Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap tahun pada Dinas Perhubungan.
- Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan.
- Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perhubungan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perhubungan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 (satu) tahunan.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

- Memberikan gambaran kemampuan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan untuk melakukan introspeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/pimpinan.

- Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perhubungan serta indikator atau ukuran keberhasilan/kegagalan pada tahun 2026.
- Memberikan arah/acuan dalam penyusunan Program/kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten paser, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang

  Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

- Landasan Hukum

  Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan Pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

- Maksud dan Tujuan

  Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

- Sistematika Penulisan

  Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Perhubungan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun-tahun sebelumnya

- Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan,
  berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
- Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerahberisikan uraian mengenai :
  1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
  2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
  3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Suistanable Development Goalds);
  4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
  5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

- Review terhadap Rancangan Akhir

  RKPD berisikan uraian mengenai:

  1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
  2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
  3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut
  4. Lampiran table T-C.31

- Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

  Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkanhasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangandan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

  Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

- Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

  perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu pentingpenyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

- Program dan Kegiatan

  berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan

kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja merupakan kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas perhubungan kabupaten Paser, dalam rangka pencapaian visi dan misi. Pendanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan merupakan cara penyusunan pendanaan perumusan prioritas serta penghitungan alokasi untuk masing-masing program dan kegiatan untuk mencapai target yang akan dicapai.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser adalah merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan- tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2026.

Dana kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Paser, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 yang tersedia untuk membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semula berjumlah Rp. 31.591.001.588,00 yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal, dan mengalami perubahan menjadi Rp. 48.514.645.257 Dengan realisasi Rp. 45.483.745.158 (93,75 %).

Tabel II. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2024
Kabupaten Paser

Dinas Perhubungan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2101- 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)								Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		Predikat Renja Tahun Berjalan				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10		11 = (5+7+10)		12 = (10/4)	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	**15**	**1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Indeks kepuasan pelayanan sekretariat**	**80 %**	**76.896.181.567**	**72 %**	**13.377.817.545**	**74 %**	**16.161.480.989**	**74 %**	**14.806.852.826**	**100**	**91,62**	**ST**	**ST**	**76%**	**20.060.272.765**				
					Presentase perangkat daerah dengannilai IRB baik	**90 %**		**80 %**		**85 %**		**85 %**		**100**		**ST**		**90 %**					
2	**15**	**1**	**1.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD**	**20 Dok**	**201.235.532**	**4 Dok**	**21.848.200**	**4 Dok**	**87.912.700**	**4 Dok**	**83.878.415**	**100,00**	**95,41**	**ST**	**ST**	**4 Dok**	**40.638.200**				
2	**15**	**1**	**1.01.1**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dok	9,906,800																
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	51,575,204	1 dok	9.456.800	1 dok	74.906.800	1 dok	71.111.689	100	94,93	ST	ST	1 dok	17.453.400				
2	**15**	**1**	**1.01.2**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA SKPD	1 dok	39,716,495																
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dok	6,875,900	1 dok	4.055.000	1 dok	4.055.000	1 dok	4.009.000	100	98,87	ST	ST	1 dok	2.027.500				
2	**15**	**1**	**1.01.6**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok	6.875.900																
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dok	47.104.198	1 dok	6.261.600	1 dok	6.875.900	1 dok	6.732.726	100	97,92	ST	ST	1 dok	3.437.800				
2	**15**	**1**	**1.01.7**	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dok	2,075,000																
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dok	39,926,935	1 dok	2.074.800	1 dok	2.075.000	1 dok	2.025.000	100	97,59	ST	ST	1 dok	17.719.500				
2	**15**	**1**	**1.02**	**Administrasi KeuanganPerangkat Daerah**	**Persentasi administrasi keuangan yang terlaksana**	**100%**	55.396.215.633	**100%**	**8.879.509.620**	**100**	**9.869.308.148**	**100**	**9.515.221.179**	**100,00**	**96,41**	**ST**	**ST**	**100%**	**14.527.996.014**				
2	**15**	**1**	**1.02.1**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	8.446.447.962																

					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Org/Bln	43.119.961.490	56/Org/Bln	7.993.529.533	56/Org/Bln	8.985.900.948	56/Org/Bln	8.672.750.267	100	96,52	ST	ST	56/Org/Bln	13.747.370.831				
2	**15**	**1**	**1.02.2**	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedinya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Lap	731.682.000																
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dok	3.098.124.181	1 dok	885.980.087	1 dok	883.407.200	1 dok	842.470.912	100	95,37	ST	ST	1 dok	780.625.183				
2	**15**	**1**	**1.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**265.696.481**	**100%**	**39.267.738**	**100**	**40.000.000**	**100**	**38.002.434**	**100,00**	**95,01**	**ST**	**ST**	**100%**	**25.750.000**				
2	15	1	1.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 org	265.696.481	2 org	39.267.738	2 org	40.000.000	2 org	38.002.434	**100,00**	95,01	ST	ST	2 org	25.750.000				
2	**15**	**1**	**1.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah**	**100%**	2.026.032.925	**100%**	**684.594.030**	**100**	**795.627.682**	**100**	**738.058.316**	**100,00**	**92,76**	**ST**	**ST**	**100%**	**1.016.181.379**				
2	**15**	**1**	**1.06.1**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen 13embali dan penerangan bangunan	4 item	5.375.000																
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	16 Paket	44.126.908	1 Paket	2.295.000	4 Paket	2.375.000	4 Paket	2.332.500	100	98,21	ST	ST	4 Paket	2.364.498				
2	**15**	**1**	**1.06.2**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	7 item	62.170.148																
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yan Disediakan	28 Paket	369.791.821	7 Paket	236.005.300	7 Paket	358.462.300	13 Paket	349.655.880	186	97,54	ST	ST	7 Paket	741.276.621				
2	**15**	**1**	**1.06.4**	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah item jenis barang	40 item	45.000.000.00																
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	258.678.190	1 Paket	41.950.544	40 Paket	47.975.040	40 Paket	47.496.715	100,00	99,00	ST	ST	1 Paket	54.132.589				
2	**15**	**1**	**1.06.5**	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	590 lembar	18.062.300																
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	89.105.768	1 Paket	12.601.400	1 Paket	17.062.100	1 Paket	6.566.000	**100,00**	38,48	ST	SR	1 Paket	8.531.050				
2	**15**	**1**	**1.06.9**	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Lap.		67 Lap.	391.741.786	50 Lap.	369.753.242	45 Lap.	332.007.221	90,00	89,79	T	T	70 Lap.	209.876.621				
2	**15**	**1**	**1.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan skpd**	**100%**	16.916.508.029	**100%**	**3,627,353,182**	**100**	**4.273.969.209**	**100**	**3.397.186.672**	**100,00**	**79,49**	**ST**	**T**	**100%**	**3.572.916.272**				
2	**15**	**1**	**1.08.1**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai	100 lembar	1.000.000																
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	20.245.370	1 Laporan	900.000	1 Laporan	1.000.000	-	-	-	0,00	SR	SR	1 Laporan	1.000.000100				
2	**15**	**1**	**1.08.2**	Penyediaan Jasa Komunikasi. SumberDaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	3.057.807.305,00																
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Laporan	13.731.668.159	1 Laporan	3.614.577.354	12 Laporan	4.255.217.709	12 Laporan	3.383.454.030	100,00	79,51	ST	T	1 Laporan	3.554.165.852				
2	**15**	**1**	**1.08.3**	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	15 Unit	8.050.000																
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Laporan	39.570.555	1 Laporan	2.627.550	15 Laporan	3.050.000	11 Laporan	2.244.898	73,33	73,60	S	S	1 Laporan	3.050.000				

2	15	1	1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasaPelayanan Umum Kantor	12 Bulan	8.484.912													
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 Laporan	49.681.728	1 Laporan	9.248.278	12 Laporan	14.701.500	12 Laporan	11.487.744	100,00	78,14	ST	T	1 Laporan	14.700.420	
2	15	1	1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang skpd**	**20 unit**	2.090.492.967,	**16 Unit**	**125.244.775**	**20 Unit**	**1.094.663.250**	**20 Unit**	**1.034.505.810**	**100,00**	**94,50**	**ST**	**ST**	**20 unit**	**876.790.900**	
2	15	1	1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	10 unit	189.877.230													
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarakan Pajak dan Perizinannya	10 unit	828.774.569	7 Unit	122.836.511	10 Unit	187.523.250	10 Unit	142.331.259	100,00	76	ST	T	10 unit	404.713.950	
2	15	1	1.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	10 unit	6.640.000													
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yan dipelihara	10 unit	30.792.764,00	9 Unit	2.408.264	10 Unit	5.640.000	5 Unit	2.377.551	50,00	42,16	SR	SR	10 unit	5.640.000	
2	15	1	1.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/reh abilitasi gedung kantor	1 Unit	226.988.800													
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit	807.419.604			1 Unit	901.500.000	1 Unit	889.797.000	100,00	98,70	ST	ST	1 Unit	466.436.950	
2	15	2		**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Presentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan LLAJ yang sesuai standar**	**100%**	**53.219.035.806,60**	**90 %**	**17,050,957,976**	**90 %**	**27.417.493.180**	**90 %**	**26.197.450.748**	**100,00**	**95,55**	**ST**	**ST**	**90 %**	**13.129.538.560**	
2	15	2	2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota**	**Persentase terlaksananya penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk LLAJ**	**100 %**	**1.092.355.464,**	**100 %**	**11.130.000**	**80 %**	**237.128.800**	-	-	-	**0,00**	**SR**	**SR**	**90 %**	**396.109.400**	
2	15	2	2.01.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dok	257.128.799	1 Dok	11.130.000	1 Dok	237.128.800	-	-	-	0,00	SR	SR			
2	15	2	2.01.2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk LLAJ	12 Kali	356.008.800													
					Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3 dok	479.217.865											1 Dok	396.109.400	
2	15	2	2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah perlengkapan jalan yang terpasang**	**100 %**	**30.334.562.280,60**	100 %	**14.383.334.143**	**85 %**	**25.359.426.835**	**85 %**	**24.440.515.711**	**100**	**96,38**	**ST**	**ST**	**100 %**	**10.107.941.338**	
2	15	2	2.02.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	1. Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	100 unit	4.542.204.327													
					2. Peningkatan Jumlah APILL yg terpasang	2 Unit														
					3. Peningkatan Jumlah rambu lalu lintas di jalan raya	100 unit														
					Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1226 Unit	13.923.943.916,60	1.325 Unit	13.794.424.450	347 Unit	24.557.363.835	347 Unit	23.650.639.373	100,00	96,31	ST	ST	118 unit	9.440.976.338	
2	15	2	2.02.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	1. Peningkatan jumlah Marka Jalan	1949 m2	1.444.844.454													
					2. Pengecatan Marka Jalan/Zebra Cross/Speed trap	750 m2														
					Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	320 Unit	4.955.127.446,	168 Unit	261.689.693	270 Unit	464.743.000	270 Unit	453.094.338	100,00	97,49	ST	ST	100 Unit	410.125.000	
2	15	2	2.02.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1. tiang dan lampu jalan yg terpelihara	915 unit	1.524.017.126													

					2. Apill dalam kondisi baik	4 Unit															
					3. Rambu Lalu Lintas yang terpelihara	100 unit															
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3.862 Unit	3.944.425.011	961 Unit	327.220.000	951 Unit	337.320.000	951 Unit	336.782.000	100,00	99,84	ST	ST	980 unit	256.840.000		
2	**15**	**2**	**2.03**	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	Persentase jumlah sarana dan prasarana terminal yang dikembangkan	**100%**	**5.402.963.197**	**100%**	**550.323.500**	**80 %**	**581.248.700**	**80 %**	**580.151.600**	**100,00**	**99,81**	**SR**	**ST**	**90%**	**556.005.200**		
2	**15**	**2**	**2.03.3**	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1 Keg	850.000.000	1 Keg	550.323.500												
2	15	2	2.03.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Terminal Kota	Peningkatan penumpang angkutan yang terlayani	12.810 Orang	324.731.600														
2	15	2	2.03.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Terminal Kuaro	Peningkatan penumpang angkutan yang terlayani	65.000 Orang	350.000.000														
2	15	2	2.03.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang direhabilitasi dan dipelihara	3 Unit	3.099.491.757			1 Keg	581.248.700	1 Unit	580.151.600	100,00	99,81	SR	SR	1 Unit	556.005.200		
2	**15**	**2**	**2.04**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Terlaksananya penerbitan izin penyelenggaraan parkir**	**5 dok**	594.424.588	**1 Dok**	**29.962.400**	**1 Dok**	**59.999.000**	**1 Dok**	**59.989.738**	**100,00**	**99,98**	**ST**	**ST**	**1 dok**	**30.000.000**		
2	**15**	**2**	**2.04.1**	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	594.424.588	1 Dokuimen	29.962.400	1 Dok	59.999.000	1 Dok	59.989.738	100,00	99,98	ST	ST	1 dokumen	30.000.000		
2	**15**	**2**	**2.05**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Peningkatan Jumlah kendaraan yg telah diuji kelaikannya**	**13.500 Unit**	**6.722.297.006**	**11.302 Unit**	**715.223.700**	**13.500 Unit**	**1.026.649.500**	**3.667 Unit**	**983.598.597**	**27,16**	**95,81**	**SR**	**ST**	**14.849 Unit**	**733.147.224**		
2	**15**	**2**	**2.05.3**	RegistrasiKendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan jumlah Kendaraan yang telah di Uji Kelaikannya	11.150 Unit	1.521.032.670														
					Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	12.000 unit	3.932.066.476	11.294 Unit	571.192.200	11.539 Unit	662.649.500	11.525 Unit	646.505.597	99,87	97,56	ST	ST	11.700 unit	583.147.224		
2	**15**	**2**	**2.05.7**	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat uji kelaikan kendaraan bermotor yang terpelihara	9 Unit	265.000.000														
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	1.004.197.860	9 Unit	135.031.500	9 Unit	364.000.000	9 Unit	337.093.000	100	92,61	ST	ST	9 Unit	150.000.000		
2	**15**	**2**	**2.06**	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota**	**Tersedinya Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten**	**15 Dok**	2.673.535.881	**3 Dok**	**104.096.405**	**3 Dok**	**290.984.838**	**3 Dok**	**288.539.927**	100,00	**99,16**	**ST**	**ST**	**3 Dokumen**	**128.430.000**		
2	**15**	**2**	**2.06.1**	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas UntukJaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1 Dok	342.523.600														
					Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	4 Laporan	811.765.415	1 Dok	36.716.405	1 Dok	111.996.968	1 Dok	111.947.213	100,00	99,96	ST	ST	1 Dokumen	35.505.000		
2	**15**	**2**	**2.06.4**	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Kabupaten	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Kegiatan penilain WTN kabupaten Paser yang tersusun	1 Dokumen	302.087.600														
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	4 Dok	526.010.353	1 Dok	31.035.000	1 Dok	81.999.620	1 Dok	81.174.828	100,00	98,99	ST	ST	1 Dokumen	41.000.000		
2	**1**	**2**	**2.06**	Forum Lalu Lintas Dan Angkutan	Tersedinya dokumen pelaksanaan	1 Dok															

	5		.5	Jalan Kabupten / Kota	koordinasi Forum LLAJ		302.866.000,00														
					Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Dok	388.282.913,00	1 Dok	36.345.000	1 Dok	96.988.250	1 Dok	95.417.886	100,00	98,38	ST	ST	1 Dokumen	51.925.000		
2	**15**	**2**	**2.08**	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Peningkatan jumlah pengemu dikendaraan bermotor yang kompeten dan memenuhi persyaratan**	**75 Orang**	**784.741.373**	**10 Orang**	**81.898.092**	**15 Orang**	**81.685.992**	**6 Orang**	**74.574.633**	**40,00**	**91,29**	**SR**	**ST**	**15 Orang**	**52.200.000**		
2	**15**	**2**	**2.08.4**	Pelaksanaan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah pengemudi kendaraan bermotor yang kompeten dan memenuhi persyaratan	15 Orang	325.000.000														
					Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggara an Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	4 Laporan	459.741.373,00	2 Laporan	81.898.092	1 Laporan	81.685.992	2 Laporan	74.574.633	200,00	91,29	ST	ST	1 Laporan	52.200.000		
2	15	2	2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	85%	2.113.203.815	**85 %**	368.819.591	**90 %**	**493.762.126**	**90 %**	**443.319.069**	**100,00**	**97,93**	**ST**	**ST**	**90 %**	**478.865.398**		
2	15	2	2.09.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Unit	440.000.000	15 Unit	45.255.500	15 Unit	44.985.000	15 Unit	44.054.870	100,00	97,93	ST	ST	15 Unit	22.500.000		
2	15	2	2.09.2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (UPTD Terminal Kota)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48 Laporan	1.190.772.937	12 Laporan	254.834.500	12 Laporan	287.869.188	12 Laporan	255.286.107	100,00	88,68	ST	T	12 Laporan	321.055.819		
2	15	2	2.09.2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (UPTD Terminal Kuaro)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48 Laporan	482.430.879	12 Laporan	68.729.591	12 Laporan	160.907.938	12 Laporan	143.978.092	100,00	89,48	ST	T	12 Laporan	135.309.579		
2	**15**	**2**	**2.16**	**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya dokumen hasil kegiatan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan umum**	**5 Dokumen**	3.500.952.202	**1 Dokumen**	**803.505.145**	**1 Dokumen**	**822.357.750**			**100 %**	**97,71**	**ST**	**ST**	**1 Dokumen**	**646.840.000**		
2	15	2	2.16.3	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya dokumen hasil kegiatan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan umum	1 Dokumen	583.275.000			1 Dokumen	**762.034.015**	1 Dokumen	**709.624.269**	**100,00**	**93,12**	**SR**	**R**	1 Dokumen	646.840.000		
					Jumlah Lapor an Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	2.917.677.202	1 Dokumen	803.505.145												
2	**15**	**3**		**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Peresentase penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang-perongan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas 16embali1616 dalam kabupaten**	**100%**	**20.079.387.580**	**90 %**	**3.431.577.256**	**90 %**	**2.961.164.000**	**90 %**	**2.601.972.453**	**100,00**	**87,87**	**ST**	**T**	**100 %**	**2.483.260.654**		
2	**15**	**3**	**2.06**	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau jaringan jalur Kereta Api Kabupaten/ Kota**	**Tersedianya data penetapan Lintas Penyeberangan dan PersetujuanPengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/AtauJaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota**	**5 Dokumen**	**3.781.431.117**	**1 Dokumen**	**155.888.751**	**1 Dokumen**	**400.529.000**	**1 Dokumen**	**393.447.602**	**100,00**	**98,23**	**ST**	**ST**	**1 Dokumen**	**679.116.13**		

2	**1 5**	**3**	**2.06 .2**	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	3	2,711,268,268	1 Lap.	155.888.751	1 Lap.	400.529.000	1 Lap.	393.447.602	100 ,00	98, 23	S T	S T	1 Dokumen	679.116.13		
2	**1 5**	**3**	**2.13**	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**Terpeliharanya prasarana Pelabuhan Sungai & danau**	**10 Unit**	14.772. 733.013	**3 Unit**	**2.809.712 .265**	**2 Unit**	**2.560.635 .000**	**2 Unit**	**2.208.524. 851**	**100 ,00**	**86, 25**	**S T**	**T**	**2 Unit**	**3,719,388 ,533**		
2	**1 5**	**3**	**2.13 .6**	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	20 Unit	11.150. 896.905	4 Unit	2.809.712 .265	8 Unit	2.560.635 .000	8 Unit	2.208.524. 851	100	86, 25	S T	T	5 Unit	**1.804.144 .522**		
2	**1 5**	**3**	**2.12 .3**	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Terpeliharanya Prasarana Pelabuhan Sungai & Danau	2 unit	533.497 .030														
					Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang beroperasi dan Terpelihara	4 Unit	3.088.3 39.078	1 Unit	348.269.5 00	1 Unit	499.080.46 2	1	494.606.335	10 0	99, 10	S T	S T	2 Unit	376.849.9 49		
2	**1 5**	**4**		**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**Presentasi pelaksanaan rencana induk perkretaapian**	100%	631.788 .900	**40 %**	**113.494.7 48**					**10 0 %**				80 %	**195,736,1 50**		
2	**1 5**	**4**	**2.01 .**	**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	**Tersedianya Data pelaksanaan rencana induk perkeretapian**	4 Dokume n	631.788 .900	**1 Dokumen**	113.49 4.748					**10 0 %**				1 Dok	**37.500.00 0**		
2	1 5	4	2.01 .1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Tersedianya data dan informasi mengenai penyusunan rencana induk perkeretaapian	2 Dokume n	245.466 .600.00	1 Dokumen	113.494.7 48					10 0 %							
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	2 Dokume n	386.322 .300											1 Dok	37.500.00 0		
Total							**150.826 .393.85 3,60**		**34.976.68 2.906**										**35.710.57 1.979**		

Faktor pendorong keberhasilan dan kegagalan yang berpengaruh pada peningkatan atau penurunan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser antara lain adalah :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Keuangan = 38,48)

   Faktor Penghambat

   Pengurangan pemakaian bahan cetak, sehingga sebagian tdk dilakukan pencairan

   Tindak Lanjut

   Dilakukan Penyesuaian Target dan Kebutuhan pada tahun berikutnya

2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Fisik 186%)

   Faktor Pendorong

   Ketersediaan anggaran untuk melaksanakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   Tindak Lanjut

   Dilakukan Evaluasi dengan menyesuaikan anggaran dan target pada tahun berikutnya

3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Keuangan = 73,60 Fisik= 73,33)

   Faktor Penghambat

   dikarenakan kerusakan Peralatan dan mesin lainnya masih tergolong ringan sehingga tidak memerlukan biaya tinggi dan adanya pengadaan baru

   Tindak Lanjut

   Dialkukan Evaluasi dengan Perencanaan yang lebih teliti serta menganggarkan dana menyesuaikan kebutuhan

4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Keuangan = 0 % Fisik = 0 %)

   Faktor Penghambat

   Penggunaan Matrai di OPD tidak digunakan

   Tindak Lanjut

   Tidak Perlu dianggarkan kembali pada tahun berikutnya

5. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Keuangan = 42 Fisik= 50)

Faktor Penghambat

Peralatan dan mesin lainnya masih tergolong ringan sehingga tidak memerlukan biaya tinggi dan adanya pengadaan baru

Tindak Lanjut

dianggarkan kembali pada tahun berikutnya menyesuaikan kebutuhan

6. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Keuangan = 0 Fisik= 0)

Faktor Penghambat

Berdasarkan Hasil rapat dengan dishub propinsi jika kebutuhan mereka saat ini yang mereka perlukan adalah rencana induk jaringan transportasi, sedangkan kegiatan yg ada itu rencana jaringan induk LLAJ, “transportasi" mencakup semua moda transportasi (darat, laut, udara), sedangkan "LLAJ" secara spesifik merujuk pada lalu lintas dan angkutan jalan saja, Dengan menggunakan istilah "transportasi", fokusnya menjadi lebih luas, mencakup perencanaan dan pengembangan seluruh sistem transportasi yang mendukung IKN, tidak hanya jalan raya, Perubahan istilah ini menyiratkan adanya upaya untuk menciptakan sistem transportasi yang terpadu, di mana berbagai moda transportasi dapat saling melengkapi dan mengakomodasi teknologi transportasi masa depan, seperti kendaraan otonom, transportasi massal berbasis listrik, dan sebagainya.

Tindak Lanjut

dianggarkan kembali pada tahun berikutnya menyesuaikan kebutuhan

7. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Fisik 200 %

Faktor Pendorong

adanya penambahan kegiatan pelaporan pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ tingkat Kabupaten Paser dan Propinsi Kalimantan Timur

Tindak Lanjut

dianggarkan kembali pada tahun berikutnya menyesuaikan kebutuhan

8. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Fisik = 27, 16 %)

Faktor Pengambat

Jumlah Kendaraan yang Uji KIR tidak mencapai target karena tidak ada penindakkan gakkum di masyarakat Kendaraan Angkutan Barang banyak yang beroperasi dilokasi Pertambangan dan Perkebunan

Tindak Lanjut

Perlu dilakukan Penindakan Hukum terhadap Kendaraan yang tidak memiliki KIR

3.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

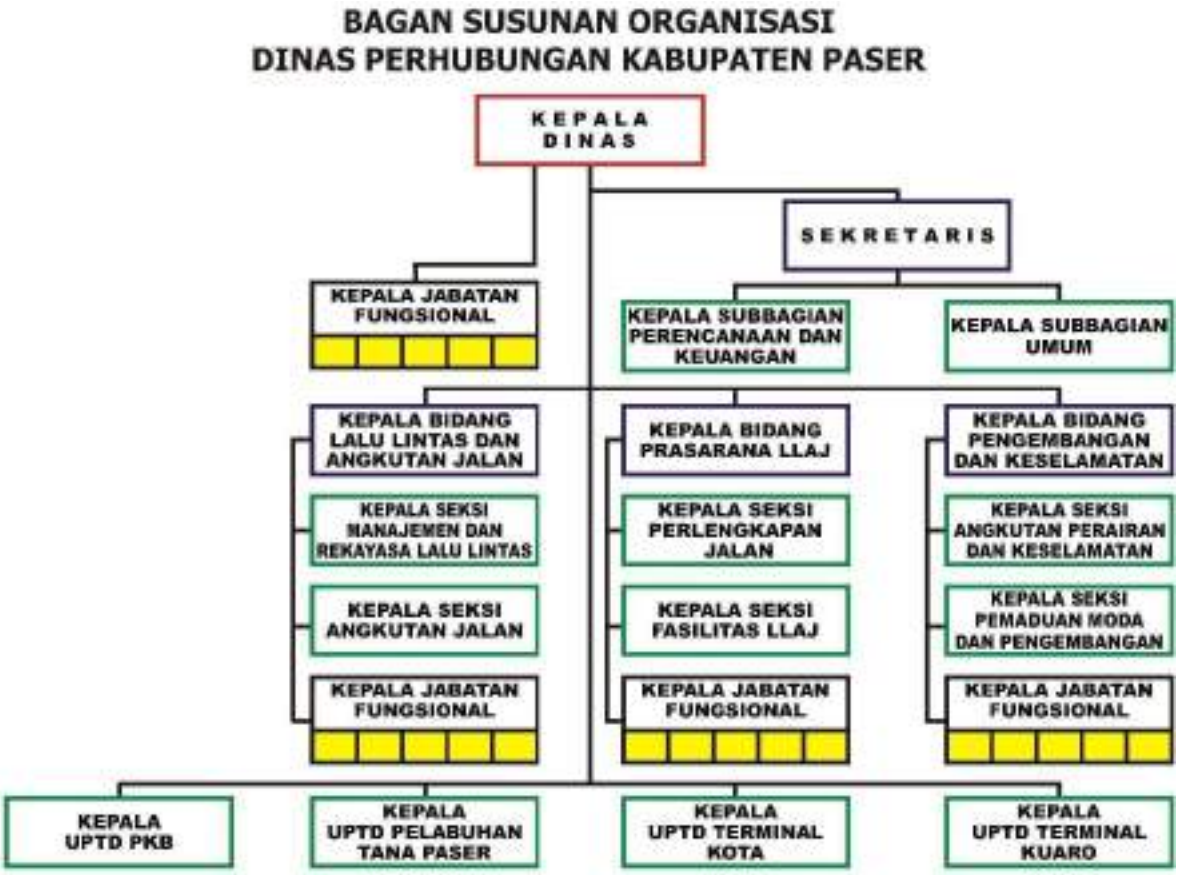

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Paser

Dinas Perhubungan Kabupaten Paser ditunjang dengan rincian struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016. sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris. membawahi :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2) Sub Bagian Umum.

c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. membawahi :

1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
2) Seksi Angkutan Jalan; dan
3) Jabatan Fungsional.

d. Bidang Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. membawahi :

1) Seksi Perlengkapan Jalan;
2) Seksi Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
3) Jabatan Fungsional.

e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan. membawahi :

1) Seksi Angkutan Perairan dan Keselamatan;
2) Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan; dan
3) Jabatan Fungsional.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Tana Paser;

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Kota;

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Kuaro;

Tabel II. 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Paser

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-					
					2022		2023		2024		2025		2026		2022		2.023		2024	
(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks kepuasan pelayanan sekretariat** **Presentase perangkat daerah dengannilai IRB baik**	**68** **70**	**80** **90**	**75.762.458.776**	**70** **75**	**13.030.498.357**	**72** **80**	**14.104.345.673**	**74** **85**	**15.274.117.594**	**76** **90**	**16.548.833.576**	**80** **90**	**7.938.386.366**	**70** **75**	**12.288.867.113**	**72** **80**	**13.377.817.545**	**74** **85**	**14.806.852.826**
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	4	20	201.235.531	4	22.912.700	4	29.209.690	4	46.055.324	4	48.503.723	4	54.554.094	4	19.144.000	4	21.848.200	4	83.878.415
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi administrasi keuangan yang terlaksana	100	100	55.396.215.633	100	9.178.129.962	100	10.026.371.970	100	10.970.484.502	100	12.002.632.952	100	13.218.596.247	100	8.046.982.848	100	8.879.509.620	100	9.515.221.179
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	100	265.696.481	0		100	45.696.481	100	60.000.000	100	70.000.000	100	90.000.000	0	-	100	39.267.738	100	38.002.434
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengadministrasian umum perangkat daerah	100	100	892.310.135	100	330.607.448	100	351.561.362	100	376.192.831	100	477.312.114	100	490.359.170	100	414.470.392	100	684.594.030	100	738.058.316
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan skpd	100	100	16.916.508.029	100	3.075.342.217	100	3.454.408.705	100	3.331.263.140	100	3.486.829.724	100	3.568.664.243	100	3.283.058.394	100	3.627.353.182	100	3.397.186.672
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang skpd	23	31	2.090.492.967	30	423.506.030	31	197.097.465	31	490.121.797	31	463.555.063	31	516.212.612	31	525.211.479	12	125.244.775	20	1.034.505.810

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Presentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan LLAJ yang sesuai standa**	**49,38**	**100**	**47.509.168.370**	**85**	**11.847.644.237**	**90**	**9.409.811.768**	**90**	**9.939.370.719**	**95**	**10.057.827.071**	**100**	**10.057.827.071**	**83,16**	**7.466.634.409**	**90**	**17.050.957.976**	**90**	**27.580.313.544**
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya penetapan rencana induk jaringan LLAJ	N/A	100	835.226.665	100	356.008.800	100	257.128.799	100	208.365.488	100	127.502.037	100	143.350.340	100	36.008.800	100	11.130.000	0	-
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perlengkapan jalan yang terpasang	53,5	100	24.881.823.643	100	7.511.065.907	100	5.750.908.956	100	5.733.872.936	100	5.588.685.128	100	5.215.732.853	80,2	4.892.979.135	100	14.383.334.143	85	24.440.515.711
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase jumlah sarana dan prasarana terminal yang dikembangkan	100	100	5.402.963.197	100	152.473.160	100	778.739.840	100	966.613.824	100	1.063.275.206	100	1.069.602.727	128,3	1.092.648.380	100	550.323.500	80	580.151.600
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terlaksananya penerbitan izin penyelenggaraan parkir	36	1	594.424.588	1	186.311.500	1	94.005.156	1	96.830.191	1	98.513.210	1	118.764.531	1	36.065.000	1	29.962.400	1	59.989.738
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan Jumlah kendaraan yg telah diuji kelaikannya	4937	68116	6.722.297.006	11159	1.786.032.670	12274	1.081.727.640	13500	1.342.756.764	14849	1.157.990.444	16333	1.353.789.488	3805	578.138.544	11302	715.223.700	3667	983.598.597
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedinya Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	2	15	2.673.535.881	3	947.477.200	3	267.587.223	3	238.345.946	3	580.516.919	3	639.608.593	3	125.861.170	3	104.096.405	3	288.539.927
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Peningkatan jumlah pengemudi kendaraan bermotor yang kompeten dan memenuhi persyaratan	1	175	784.741.373	35	325.000.000	35	120.453.000	35	137.398.300	35	96.138.130	35	105.751.943	3	47.682.380	10	81.898.092	6	74.574.633
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		15	2.113.203.815	0		15	417.658.654	15	509.424.520	15	568.866.972	15	617.253.669	0	-	15	371.484.591	15	443.319.069

Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen hasil kegiatan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan umum	1	5	3.500.952.202	1	583.275.000	1	641.602.500	1	705.762.750	1	776.339.025	1	793.972.927	1	657.251.000	1	803.505.145	1	709.624.269

Sumber : Laporan Evaluasi Renstra 2024

2.3. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagaimana dalam peraturan Bupati Paser Nomor 5 tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis Gambaran umum Dinas Perhubungan, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangk Menengah Dinas Perhubungan yaitu: "**Belum Optimalnya Konektivitas Antar Wilayah"** yangdijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya kualias layanan dan akuntabilitas kinerja organisasi.	Belum optimalnya kelembagaan dan kinerja organisasi	Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur
			Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) aparatur yang memiliki kompetensi
			Kurangnya sinkronisasi dalam penyusunanan dokumen perencanaan
2.	Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana transportasi	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	Terbatasnya fasilitas perlengkapan jalan
			Kurangnya sarana dan prasarana pendukung terminal
			Kurangnya moda transportasi
			Belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan umum
			Kurangnya sarana

			dan prasarana pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor
			Rendahnya Tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap aturan berlalu lintas
			Fasilitas keselamatan transportasi belum memadai
			Belum maksimalnya pengawasan dan pembinaan pada angkutan moda transportasi
		Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayaran	Belum optimalnya kualitas pelayanan kepelabuhan
			Kurangnya sarana dan prasarana transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat di tampilkan pohon masalah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Paser sebagai berikut:



Dinas Perhubungan Kabupaten Paser berdasarkan isu strategis daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Daerah atau RPJMD

2025-2029 yakni "Belum Optimalnya Konektivitas Antar Wilayah" maka diketahui bahwa masalah pokok dalam pencapaian hal tersebut adalah "Belum Optimalnya kualitas sarana dan prasarana transportasi". Hal ini dibuktikan dengan belum adanya trayek khusus yang menghubungkan Kecamatan Muara Komam ke Tanah Grogot. Demikian juga trayek yang menghubungkan Kecamatan Long Kali dengan Ibukota Kabupaten Paser di Tanah Grogot, meskipun terdapat angkutan kota dalam provinsi yang menghubungkan wilayah tersebut, namun konektivitas tersebut harus dipertimbangkan.

Masalah pokok berupa belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Paser ini dapat dibagi dua masalah baik itu yang berupa di darat berupa lalu lintas dan angkutan jalan dan masalah yang berada di sungai, danau dan penyeberangan berupa belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayaran.

2.3.2 Kebijakan-Kebijakan OPD

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan akan dicapai. Sedangkan kebijaka merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan.

Tabel 2.5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah.	Meningkatnya Layanan Transportasi Yang Berkualitas dan Berkeselamatan	Meningkatnya kualitas layanan transportasi sungai, danau dan penyeberangan	Terlaksananya penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten kota
			Meningkatnya Prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau
			Meningkatnya Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal
		Meningkatnya Kondisi Lalu Lintas yang aman tertib dan lancar	Terselenggaranya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
			Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
			Tersusunnya Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

			Terlaksananya Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /kota
			Tersedianya Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terselenggaranya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
			Terlaksananya Penerbitan izin Penyelenggaran dan Pembangunan Fasilitas Parkir
			Meningkatnya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

2.4. Review Terhadap Akhir RKPD

Renja Perangkat Daerah yang merupakan penuangan dari Renstra Perangkat Daerah atau sebagai turunan dari RKPD yang merupakan penuangan dari RPJMD Kabupaten. adalah sebuah runtutan proses atau alur mekanisme perencanaan yang harus disusun sebagai sebuah Dokumen Perencanaan. Berdasarkan uraian tersebut. berarti rancangan akhir RKPD sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam RPJMD Kabupaten. Untuk melihat perbandingan antara Rancangan Akhir RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan dapat dilihat pada tabel II. 6 :

Tabel II. 6

Review Terhadap Rancangan Akhir Perangkat Daerah
Tahun 2026

No	Rancangan Alkhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	KebutuhanDana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DINAS PERHUBUNGAN											
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Kab. Paser**	**Indeks kepuasan pelayanan masyarakat (Persen)**	**60**	**19.043.810.923**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Kab. Paser**	**Indeks kepuasan pelayanan masyarakat (Persen)**	**60**	**21.327.270.000**	
1.1	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase ketersediaan data kinerja**	**100**	**51.237.400**	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase ketersediaan data kinerja**	**100**	**135.683.000**	
			Persentase konsistensi Renja dengan Renstra tahun berkenaan	**100**				**Persentase konsistensi Renja dengan Renstra tahun berkenaan**	**100**		
			Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	**33**				**Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah**	**33**		
			Persentase keselarasan muatan Renstra dengan RPJMD	**100**				**Persentase keselarasan muatan Renstra dengan RPJMD**	**100**		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	34.906.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	56.591.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	4.055.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	15.210.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1	6.875.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	28.392.000	

			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)			
	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	1	5.400.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	1	35.490.000	
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase Temuan Ditindaklanjuti (%)**	**33,33**	**14.001.522.511**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase Temuan Ditindaklanjuti (%)**	**50**	**14.877.399.000**	
			Persentase LHP nihil (%)	**20**				**Persentase LHP nihil (%)**			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	116	13.747.370.831	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	116	13.939.833.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	243.450.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	892.483.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	6.201.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	29.076.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4.500.680	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	16.007.000	
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase rata-rata capaian IKldengannilai"e (%)**	**80**	**120.761.550**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase rata-rata capaian IKldengannilai"e (%)**	**80**	**153.114.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Paser	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	124	25.600.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Paser	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	124	49.686.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	500.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	12.168.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Paser	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	5	62.661.550	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Paser	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	5	40.560.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	2	12.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	2	25.350.000	

			Peraturan Perundang-Undangan					Peraturan Perundang-Undangan			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	20.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	25.350.000	
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perkantoran (%)**	**20**	**498.031.685**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perkantoran (%)**	**20**	**711.983.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.365.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.398.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	161.275.743	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	152.100.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	20.280.000	
	Penyediaan BahanLogistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	56.975.400	Penyediaan BahanLogistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	57.772.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	17.062.100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	17.300.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	2.300.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	5.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Paser	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	5.400.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Paser	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	5.070.000	
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	219.753.242	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	425.629.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	25.600.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	13.182.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	2.300.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	13.182.000	

1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Kab. Paser**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan (%)**	**33,33**	**65.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Kab. Paser**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan (%)**	**50**	**1.014.000.000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	50.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	507.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	5.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	101.400.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	5.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	202.800.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	5.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	202.800.000	
1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**33,33**	**3.962.415.605**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**50**	**4.000.464.000**	
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan SKPD	**5 Laporan**					**5 Laporan**		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1	500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1	507.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	3.947.386.861	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	3.979.931.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	3.050.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	5.120.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	11.478.744	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	14.906.000	

1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase Barang Inventaris Dalam Kondisi Baik**	**30,71**	**344.842.172**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Paser	**Persentase Barang Inventaris Dalam Kondisi Baik**	**47,14**	**434.627.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11	142.331.259	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	224.081.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	2.567.800	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	7.746.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Paser	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor (Unit)	1	199.943.113	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Paser	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor	1 unit	202.800.000	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kab. Paser**	**Rasio Konektivitas Darat (%)**	**0,83**	**11.710.762.226**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Kab. Paser	**Rasio Konektivitas Darat (%)**	**0,83**	**11.710.762.226**	
			Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (%)	**81,59**				**Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (%)**	**81,59**		
			VC Ratio Perhubungan	**0,166**				**VC Ratio Perhubungan**	**0,166**		
2.1	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota**	**Kab. Paser**	**Persentase terlaksananya penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk LLAJ (%)**	**30,76**	**83.560.000**	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota**	Kab. Paser	**Persentase terlaksananya penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk LLAJ**	**30,76**	**442.128.000**	
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota (Dokumen)	1	38.560.0000	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	220.000.000	
	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1	45.000.000	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	222.128.000	
2.2	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Kab. Paser**	**Persentase terpenuhinya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (%)**	**81,61**	**2.465.000.000**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Kab. Paser	**Persentase jumlah perlengkapan jalan yang Terpasang**	**81,61**	**4.528.802.000**	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (unit)	5495 Unit	2.290.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kab. Paser	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5495 Unit	3.815.062.000	

	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Paser	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	120 Unit	75.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Paser	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	120 Unit	407.100.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Paser	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	990 Unit	100.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Paser	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	990 Unit	306.640.000	
2.3	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Kab. Paser**	**Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap sarana dan prasarana terminal tipe C**	**3,22**	**120.000.000**	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Kab. Paser**	**Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap sarana dan prasarana terminal tipe C**	**3,22**	**550.500.000**	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Paser	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun (Dokumen)	1	45.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Paser	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun (Dokumen)	1	233.660.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kab. Paser	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2	75.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kab. Paser	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2	316.840.000	
2.4	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Kab. Paser**	**Persentase penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir (%)**	**33,33**	**60.000.000**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Kab. Paser**	**Persentase penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir (%)**	**50**	**60.000.000**	
	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	4	60.000.000	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	4	60.000.000	
2.5	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota**	**Kab. Paser**	**Persentase Pelaksanaan manajemen dan rekayasan lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota (%)**	**33,33**	**225.000.000**	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota**	**Kab. Paser**	**Persentase Pelaksanaan manajemen dan rekayasan lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota (%)**	**50**	**225.000.000**	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2	70.000.000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2	70.000.000	

	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	85.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	85.000.000	
	Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupten/ Kota	Kab. Paser	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	70.000.000	Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupten/ Kota	Kab. Paser	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	70.000.000	
2.6	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Kab. Paser	**Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan (%)**	**20**	**40.000.000**	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ diJalan**	Kab. Paser	**Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan (%)**	**40**	**72.200.000**	
	Pelaksanaan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Pemenuhan Per4syaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Laporan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	1	40.000.000	Pelaksanaan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Pemenuhan Per4syaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Laporan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	1	72.200.000	
2.7	**Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Paser	**Persentase peningkatan pelayaan angkutan umum**	**84**	**100.000.000**	**Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Paser	**Persentase peningkatan pelayaan angkutan umum**	**85**	**854.000.000**	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	55.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	100.000.000	
	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atauBarang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	1	45.000.000	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atauBarang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	1	754.000.000	
2.8	**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk AngkutanOrang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan**	Kab. Paser	**Persentase terlaksananya pelayanan perizinan angkutan perkotaan**	**33,33**	**133.400.000**	**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk AngkutanOrang yang Melayani Trayek serta**	Kab. Paser	**Persentase terlaksananya pelayanan perizinan angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi (%)**	**50**	**630.290.000**	

	Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		**dan pedesaan kelas ekonomi (%)**			**Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**					
	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu)Daerah Provinsi	Kab. Paser	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	133.400.000	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu)Daerah Provinsi	Kab. Paser	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	630.290.000	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Kab. Paser	**Rasio Konektivitas SDP (Sungai Danau dan Penyeberangan)**	**0,95**	**2.860.064.080**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Kab. Paser	**Rasio Konektivitas SDP (Sungai Danau dan Penyeberangan)**	**0,95**	**2.860.064.080**	
			Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Pelayaran	**80,39**				**Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Pelayaran**	**80,39**		
3.1	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau jaringan jalurKereta Api Kabupaten/ Kota**	Kab. Paser	**Persentase Persetujuan izin pengoperasian kapal untuk angkutan penyeberangan (%)**	**17**	**75.000.000**	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau jaringan jalurKereta Api Kabupaten/ Kota**	Kab. Paser	**Persentase Persetujuan izin pengoperasian kapal untuk angkutan penyeberangan (%)**	**17**	**581.486.000**	
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai. Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai. Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai. Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai. Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	75.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai. Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai. Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai. Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai. Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	581.486.000	
3.2	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan**	**Kab. Paser**	**Persentase Tersedianya sarana dan Prasarana**	**14**	**60.000.000**	**Pembangunan, Penerbitan Izin**	**Kab. Paser**	**Persentase Tersedianya sarana dan Prasarana**	**14**	**413.696.000**	

	Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		**Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (%)**			**Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**		**Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (%)**			
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Paser	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	1	60.000.000	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Paser	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	1	413.696.000	
3.3	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**Kab. Paser**	**Persentase Tersedianya sarana dan Prasarana Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (%)**	**83,67**	**60.000.000**	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**Kab. Paser**	**Persentase Tersedianya sarana dan Prasarana Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (%)**	**83,67**	**1.164.882.000**	
	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Kab. Paser	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan (Unit)	2	60.000.000	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Kab. Paser	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan (Unit)	2	1.164.882.000	
Total					**22.465.770.923**					**30.556.431.000**	
UPTD											
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kab. Paser**	**Rasio Konektivitas Darat (%)**	**0,83**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kab. Paser**	**Rasio Konektivitas Darat (%)**	**0,83**		
			Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (%)	**81,59**				**Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (%)**	**81,59**		
			VC Ratio Perhubungan	**0,166**				**VC Ratio Perhubungan**	**0,166**		
1.1	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Kab. Paser**	**Persentase terlaksananya pelayanan uji berkala (%)**	**30**	**553.547.224**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Kab. Paser**	**Persentase terlaksananya pelayanan uji berkala (%)**	**30**	**843.649.000**	
	RegistrasiKendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Paser	Peningkatan Jumlah kendaraan yg telah diuji kelaikannya (Unit)	11.856	403.547.224	RegistrasiKendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Paser	Peningkatan Jumlah kendaraan yg telah diuji kelaikannya (Unit)	11.856	693.649.000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian	Kab. Paser	Jumlah Alat uji kelaikan kendaraan bermotor yang terpelihara (Unit)	9	150.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian	Kab. Paser	Jumlah Alat uji kelaikan kendaraan bermotor yang terpelihara (Unit)	9	150.000.000	
1.2	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Kab. Paser**	**Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap sarana dan prasarana terminal tipe C (%)**	**3,22**	**489.324.557**	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Kab. Paser**	**Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap sarana dan prasarana terminal tipe C (%)**	**3,22**	**513.193.000**	
	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C (Terminal Kota)	Kab. Paser	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	1 Dok	275.505.819	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C (Terminal Kota)	Kab. Paser	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	1 Dok	287.375.000	
	Pengawasan	Kab.	Jumlah Terminal	1 Dok	213.818.738	Pengawasan Operasional	Kab.	Jumlah Terminal	1 Dok	225.818.000	

	Operasional Terminal Penumpang Tipe C (Terminal Kuaro)	Paser	Penumpang Tipe C yang diawasi			Terminal Penumpang Tipe C (Terminal Kuaro)	Paser	Penumpang Tipe C yang diawasi			
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	**Kab. Paser**	**Rasio Konektivitas SDP (Sungai Danau dan Penyeberangan)**	**0,95**	**362.853.861**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Kab. Paser	**Rasio Konektivitas SDP (Sungai Danau dan Penyeberangan)**	**0,95**	**350.000.000**	
			Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Pelayaran	**80,39**				**Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Pelayaran**	**80,39**		
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		**Persentase Tersedianya sarana dan Prasarana Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (%)**	**83,67**	**362.853.861**	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**		**Persentase Tersedianya sarana dan Prasarana Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (%)**	**83,67**	**350.000.000**	
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau		Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1	362.853.861	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau		Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1	350.000.000	
Total					**1.405.725.642**						

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Sebagaimana fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Paser yang utama yaitu memberikan Pelayanan kepada masyarakat di bidang Perhubungan dengan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana Lalu Lintas, maka dalam menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tentunya mengacu kepada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kebutuhan tersebut dapat berupa penyediaan fasilitas lalu lintas darat dan sungai, kemudahan dan penyediaan fasilitas angkutan penyeberangan, angkutan umum, kelancaran dan kemudahan berlalu lintas serta perparkiran. Usulan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan telah melalui proses dan mekanisme yang sesuai yaitu melalui proses Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota (Forum SKPD) serta penyesuaian dengan kondisi terkini kebutuhan saat perencanaan. Adapun Kegiatan yang merupakan usulan dari Kecamatan sebagai hasil proses dari Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Forum SKPD yaitu sebagaimana berikut :

Tabel II. 7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2025 Kabupaten Paser

Dinas Perhubungan

No	Program/ Kegiatan / SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) /Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota, Penyediaan				

1.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (khusus lokasi/daerah yang telah tersedia jaringan listrik PLN)	Desa Jone	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	5 Unit	Musrenbang
2.	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (khusus lokasi/daerah yang telah tersedia jaringan listrik PLN)	Desa Pondong Baru, RT.1 - 7, Kab. Paser	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	6 Unit	
3.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (khusus lokasi/daerah yang telah tersedia jaringan listrik PLN)	Desa Padang Jaya, Kab. Paser	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	6 Unit	
4.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (khusus lokasi/daerah yang telah tersedia jaringan listrik PLN)	Jalan Poros Damit Olong Pinang, Kab. Paser	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	6 Unit	
5.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (khusus lokasi/daerah yang telah tersedia jaringan listrik PLN)	Desa Keresik Bura, Kab. Paser	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	6 Unit	
6.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (khusus lokasi/daerah yang telah tersedia jaringan listrik PLN)	Desa Busui	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	6 Unit	
7.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (khusus lokasi/daerah yang telah tersedia jaringan listrik PLN)	Desa Songka RT.01 s/d RT.09	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	6 Unit	
8.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (khusus lokasi/daerah yang telah tersedia jaringan listrik PLN)	Desa Segendang RT 1 s/d RT 4, Kab. Paser	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	6 Unit	
9.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (khusus lokasi/daerah yang telah tersedia jaringan listrik PLN)	Desa Langgai, Kab. Paser	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	6 Unit	

10	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (khusus lokasi/daerah yang telah tersedia jaringan listrik PLN)	Desa Bai Jaya RT 1 s/d RT 5, Kab. Paser	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	6 Unit	
11.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (khusus lokasi/daerah yang telah tersedia jaringan listrik PLN)	Rantau Atas RT 001 s.d RT 005, Kab. Paser	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	6 Unit	
12	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (khusus lokasi/daerah yang telah tersedia jaringan listrik PLN)	Rt.01 dan Rt.02 (Ds Luan)	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	6 Unit	
13.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (khusus lokasi/daerah yang telah tersedia jaringan listrik PLN)	Tanjung Aru, Kab. Paser	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	6 Unit	
14.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (khusus lokasi/daerah yang telah tersedia jaringan listrik PLN)	Desa Random	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	6 Unit	
15	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (khusus lokasi/daerah yang telah tersedia jaringan listrik PLN)	RT.001 - RT.003 Desa Muara Payang, Kab. Paser	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	6 Unit	
16.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (khusus lokasi/daerah yang telah tersedia jaringan listrik PLN)	Desa Teluk Waru RT. 01	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	6 Unit	
17.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (khusus lokasi/daerah yang telah tersedia jaringan listrik PLN)	Desa Muara Telake	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	6 Unit	
18.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (khusus lokasi/daerah yang telah tersedia jaringan listrik PLN)	RT. 001 s/d RT. 005 Desa Muara Toyu, Kab. Paser	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	6 Unit	

19.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (khusus lokasi/daerah yang telah tersedia jaringan listrik PLN)	Desa perkuwen RT. 001 RT. 002	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	6 Unit	
20.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (khusus lokasi/daerah yang telah tersedia jaringan listrik PLN)	Desa Pinang Jatus (RT 01, RT 02)	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	6 Unit	
21	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (khusus lokasi/daerah yang telah tersedia jaringan listrik PLN)	Rt.01,02,03,04 dan 05 Desa Maruat	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	6 Unit	
22.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (khusus lokasi/daerah yang telah tersedia jaringan listrik PLN	Desa Putang RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 04, RT. 05.	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	6 Unit	
23.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (khusus lokasi/daerah yang telah tersedia jaringan listrik PLN	Desa Makmur Jaya	Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	6 Unit	
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN / Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				
1.	Pembangunan Dermaga Sungai	Desa Saing Prupuk RT.002 RT.003, Kab. Paser	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	1 Paket	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASER

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Kementerian Perhubungan ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Perhubungan atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi. misi. dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan. serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis. keberlanjutan kebijakan pembangunan. dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Perhubungan.

Dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045 dan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 pada sektor transportasi, maka dirumuskan Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 sebagai berikut :

“Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 merupakan bentuk dukungan Kementerian Perhubungan terhadap pencapaian visi pembangunan nasional sesuai lingkup tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan dalam Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yang mencakup penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.

Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan dukungan bidang transportasi terhadap Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 serta Visi Indonesia Emas 2045. Dalam hal ini ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Misi Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 yang berkesesuaian secara langsung satu per satu dengan 8 (delapan) Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 (Asta Cita), yakni :

1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan.

2. Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yg berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman.
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan.
5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor-sektor ekonomi utama.
6. Membangun transportasi kewilayahan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau.
7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional.
8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepadapernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tujuan Dinas Perhubungan untuk periode 2025-2029 adalah **meningkatkan konektivitas antar wilayah**. Sebagaimana Renstra Dinas Perhubungan periode 2025-2029 harus selaras dengan RPJMD Kabupaten Paser tahun 2025-2029 maka tujuan Dinas Perhubungan periode tersebut juga harus selaras dengan tujuan RPJMD periode yang sama.

Tujuan RPJMD Kabupaten Paser periode 2025-2029 sebagaimana pada tujuan RPJMD yaitu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang adil, berkualitas dan berkelanjutan. Tujuan dari RPJMD masih bersifat umum yang dapat meliputi beberapa perangkat daerah, namun secara spesifik untuk Dinas Perhubungan adalah infrastruktur perhubungan yang lebih fokus kepada meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah **meningkatnya layanan transportasi yang berkualitas dan berkeselamatan dan meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan**.

Tujuan dan sasaran serta target Tahun 2026 Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan bidang perhubungan kepada masyarakat Kabupaten Paser sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2026

NO	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	TARGET 2026
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perhubungan	Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah		Rasio Konektivitas Wilayah	0,86
				Meningkatnya Layanan Transportasi yang Berkualitas dan Berkeselamatan	Tingkat Layanan Transportasi	0,78
					Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan	2,70
2.	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Perhubungan	84,04
					Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	75,30

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan. diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. menjawab tantangan pembangunan. serta memaksimalkan peluang yang ada.

Adapun Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Tahun 2026. terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.1

Program Pembangunan Bidang Perhubungan Kabupaten Paser Tahun 2026

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
•	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah\Kabupaten/Kota	19.043.810.923,00
•	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).	4.269.831.781,00
•	Program Pengelolaan Pelayaran.	557.853.861,00
T O T A L		**23.871.496.565,00**

Dana kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Paser. sesuai dengan Rencana Kebutuhan Anggaran Tahun Anggaran 2026 yang tersedia untuk membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjumlah Rp. **23.871.496.565,00** yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal yang terdiri dari belanja pegawai. belanja barang dan jasa. dan belanja modal.

Program Pembangunan Dinas Perhubungan sebanyak 3 (Tiga) program dengan jumlah 19 (Sembilan Belas) kegiatan diuraikan menjadi 57 (Lima Puluh Tujuh) Sub Kegiatan.

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan pada dokumen Renja Perangkat Daerah (RKPD) beserta target indikator sasaran pada tahun 2025 beserta prognosis tahun berikutnya yang disertai capaian target kinerja beserta kerangka pendanaannya dapat dilihat pada tabel IV.1. berikut ini:

Tabel IV.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Paser

Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Dinas Perhubungan	-							
02.15.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAH DAERAH**	**Nilai KInerja Manajemen Internal**	**Kab. Paser**	**76**	**19.043.810.923,00**	**APBD**		**80**	**21.342.487.110**
02.15.01.2.01	**Perencanaan. Penganggaran. Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	**33**	**51.237.400**	**APBD**		**100**	**150.893.000**
		Persentase konsistensi Renja dengan Renstra tahun berkenaan	**Kab. Paser**	**100**		**APBD**		**100**	
		Persentase keselarasan muatan Renstra dengan RPJMD	**Kab. Paser**	**100**		**APBD**		**100**	
		Persentase ketersediaan data kinerja	**Kab. Paser**	**100**		**APBD**		**100**	
02.15.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Kab. Paser	1	34.906.800	APBD		1	56.591.000
02.15.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	umlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	2	4.055.000	APBD		2	15.210.000
02.15.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	Kab. Paser	1	6.875.600	APBD		1	28.392.000
		Laporan Midterm SAKIP Perangkat Daerah	Kab. Paser	1		APBD		1	
		LAKjIP Perangkat Daerah	Kab. Paser	1		APBD		1	
		Laporan PM SPIP Terintegrasi Perangkat Daerah	Kab. Paser	1		APBD		1	
		Laporan MR Perangkat Daerah	Kab. Paser	1		APBD		1	
		Laporan Implementasi RB General Perangkat Daerah	Kab. Paser	1		APBD		1	

02.15.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	Kab. Paser	1	5.400.000	APBD		1	35.490.000
		Persentase Laporan evaluasi kinerja tepat waktu	Kab. Paser	100		APBD		100	
		Jumlah laporan evaluasi RENJA Perangkat Daerah	Kab. Paser	1		APBD		1	
		Jumlah laporan evaluasi RENSTRA Perangkat Daerah	Kab. Paser	1		APBD		1	
02.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentasi temuan ditindaklanjuti**	**Kab. Paser**	**33,3**	**14.001.522.511**	**APBD**		**100**	**14.877.399.890**
		Persentase LHP Nihil	Kab. Paser	**20**		APBD		**100**	
02.15.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Kab. Paser	116	13.747.370.831	APBD		116	13,939,833,000
		Persentase Kesesuaian data kepegawaian dengan Daftar Gaji ASN	Kab. Paser	100		APBD		100	
02.15.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Kab. Paser	1	243.450.000	APBD		1	892,483,000
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Paser	12	6,201,000	APBD		**12**	29,076,000
		Persentase dokumen SPJ yang dikembalikan	Kab. Paser	20		APBD		18	
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Paser	12	4,500,680	APBD		12	16,007,000
		Persentase pemenuhan Laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu	Kab. Paser	100				100	
		Persentase capaian realisasi kinerja keuangan perangkat daerah secara periodik	Kab. Paser	4				4	
		Jumlah Laporan Pajak Bulanan	Kab. Paser	12				12	
02.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)**	**Kab. Paser**	**80**	**120.761.550**	**APBD**		**81**	**153.114.000**
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Kab. Paser	116	25.600.000	APBD		116	49,686,000
2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Paser	4	500.000	APBD		4	12,168,000

2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Kab. Paser	5	62.661.550	APBD		5	40,560,000
2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Paser	2	12.000.000	APBD		2	25,350,000
2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Paser	3	20.000.000	APBD		3	25,350,000
		Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian		5				6	
02.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pengadministrasian UmumPerangkat Daerah (%)**	Kab. Paser	**20**	**498.031.685**	**APBD**		**40**	**711.985.190**
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan KomponenInstalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab. Paser	1	2.365.200	APBD		1	2,398,000
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab. Paser	5	161.275.743	APBD		5	152,100,000
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Paser	5	5.000.000	APBD		5	20,280,000
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan BahanLogistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab. Paser	1	56.975.400	APBD		1	57,772,000
2.15.01.12.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kab. Paser	1	17.062.100	APBD		1	17,300,000
2.15.01.12.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Paser	1	2.300.000	APBD		1	5,070,000
2.15.01.12.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Paser	4	5.400.000	APBD		4	5,070,000
2.15.01.12.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kab. Paser	50	219.753.242	APBD		50	425,629,000
2.15.01.12.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Paser	1	25.600.000	APBD		1	13,182,000
2.15.01.12.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Paser	1	2.300.000	APBD		1	13,182,000
		Jumlah Update berita dan informasi per bulan pada website Dinas Perhubungan		4				4	
		Jumlah akses laman website		10				10	

02.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Persentase Barang Inventaris Peralatan dan Mesin Dalam Kondisi Baik (%)**	**Kab. Paser**	**33,33**	**65.000.000**	APBD		**75**	**1.014.000.000**
02.15.01.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Kab. Paser	1	50.000.000	APBD		1	507,000,000
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Paser	5	5.000.000	APBD		5	101,400,000
02.15.01.2.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Paser	1	5.000.000	APBD		1	202,800,000
02.15.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Kab. Paser	1	5.000.000	APBD		1	202,800,000
02.15.01.2.07.011	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Paser**	**33,3**	**3.962.415.605**	**APBD**		**100**	**4.000.466.260**
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan SKPD		**5 Laporan**					
02.15.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	Kab. Paser	1	500.000	APBD		1	507,000
02.15.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber DayaAir dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Kab. Paser	1	3.947.386.861	APBD		1	3,979,931,000
02.15.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab. Paser	1	3.050.000	APBD		1	5,120,000
02.15.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab. Paser	1	11.478.744	APBD		1	14,906,000
02.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Inventaris Dalam Kondisi Baik**	**Kab. Paser**	**30,71**	**344.842.172**	**APBD**		**47,14**	**434.628.790**
02.15.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kab. Paser	11	142.331.259	APBD		12	224,081,000
		Persentase Kendaraan dinas operasional layak pakai		90				90	
02.15.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Kab. Paser	10	2.567.800	APBD		10	7,746,000
		Persentase Peralatan kantor kondisi baik		90				90	

02.15.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor (Unit)	Kab. Paser	1	199.943.113	APBD		1	202,800,000
02.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAANLALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Rasio Konektivitas Darat (%)**	Kab. Paser	**0,83**	**4.269.831.781**	**APBD**		**0,83**	**8.833.613.000**
		Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (%)		**81,59**				**86,67 %**	
		VC Ratio Perhubungan		**0,166**				**0,165**	
02.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota**	**Persentase terlaksananya penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk LLAJ (%)**	**Kab. Paser**	**30,76**	**83.560.000**	**APBD**		**46,15**	**448.237,120**
02.15.02.2.01.002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota (Dokumen)	Kab. Paser	1	38.560.000	APBD		1	223.000.000
02.15.02.2.01.004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kot0	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	1	45.000.000	APBD		1	225.237.000
02.15.02.2.02.002	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase terpenuhinya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (%)**	Kab. Paser	**81,61**	**2.465.000.000**	**APBD**		**86,69**	**4.592.203.000,**
02.15.02.2.02.002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (unit)	Kab. Paser	365	2.290.000.000	APBD		342	3.868.472.000
02.15.02.2.02.003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan PrasaranaJalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	Kab. Paser	100	75.000.000	APBD		100	412.799.000
02.15.02.2.02.004	Rehabilitasi danPemeliharaan Perlengkapan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	Kab. Paser	980	100.000.000	APBD		980	310.932.000
02.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap sarana dan prasarana terminal tipe C**	**Kab. Paser**	**3,22**	**609.324.557**	**APBD**		**3,33**	**1.078.583.000**
02.15.02.2.03.006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Terminal Kuaro dan Terminal Kota)	Kab. Paser	2	489.324.557	APBD		2	520.377.000
02.15.02.2.03.009	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun (Dokumen	Kab. Paser	1	45.000.000	APBD		1	236.931.000
02.15.02.2.03.011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	Kab. Paser	2	75.000.000	APBD		2	321.275.000
02.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas**	**Persentase penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir (%)**	**Kab. Paser**	**33,33**	**60.000.000**	**APBD**		**66,67**	**60.840.000**

	Parkir								
02.15.02.2.04.001	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	Kab. Paser	1	60.000.000	APBD		1	60.840.000
02.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase terlaksananya pelayanan uji berkala (%)**	**Kab. Paser**	**30**	**553.547.224**	**APBD**		**40**	**855.460.000**
02.15.02.2.05.003	RegistrasiKendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan Jumlah kendaraan yg telah diuji kelaikannya (Unit)	Kab. Paser	200	403.547.224	APBD		200	703.360.000
02.15.02.2.05.007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian	Jumlah Alat uji kelaikan kendaraan bermotor yang terpelihara (Unit)	Kab. Paser	9	150.000.000	APBD		9	152,100,000
02.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota**	**Persentase Pelaksanaan manajemen dan rekayasan lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota (%)**	Kab. Paser	**33,33**	**225.000.000**	**APBD**		**66,67**	**229.136.000**
02.15.02.2.06.004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	Kab. Paser	1	70.000.000	APBD		1	70.980.000
02.15.02.2.06.015	Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupten/ Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	Kab. Paser	1	85.000.000	APBD		1	86.190.000
02.15.02.2.06.017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	Kab. Paser	2	70.000.000	APBD		1	71.966.000
02.15.02.2.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ diJalan**	**Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan (%)**	**Kab. Paser**	**20**	**40.000.000**	**APBD**		**40**	**73.210.000**
02.15.02.2.08.004	Pelaksanaan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Pemenuhan Per4syaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	Kab. Paser	2	40.000.000	APBD		2	73.210.000
02.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang AntarKota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan pelayaan angkutan umum**	**Kab. Paser**	**84**	**100.000.000**	**APBD**		**85**	**856.830.000**

02.15.02.2.09.002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	Kab. Paser	1	55.000.000	APBD		1	101.400.000
02.15.02.2.09.003	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atauBarang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	Kab. Paser	1	45.000.000	APBD		1	755.430.000
02.15.02.2.16	**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk AngkutanOrang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase terlaksananya pelayanan perizinan angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi (%)**	**Kab. Paser**	**33,33**	**133.400.000**	**APBD**		**50**	**639.114.060**
02.15.02.2.16.003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	Kab. Paser	2	133.400.000	APBD		2	639.114.060
02.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Rasio Konektivitas SDP (Sungai Danau dan Penyeberangan)**	**Kab. Paser**	**0,95**	**557.853.861**	**APBD**		0,95	**2.565.179.000**
		Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Pelayaran		**80,39**				84,31	
02.15.03.2.06	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada JaringanJalan Kabupaten/Kota dan/atau jaringan jalurKereta Api Kabupaten/Kota**	**Persentase Persetujuan izin pengoperasian kapal untuk angkutan penyeberangan (%)**	**Kab. Paser**	**17**	**75.000.000**	**APBD**		**34**	**589.602.000**

02.15.03.2.06.004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai. Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai. Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai. Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai. Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	Kab. Paser	1	75.000.000	APBD		1	589.602.000
02.15.03.2.12	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Persentase tersedianya sarana dan prasarana agar pelabuhuan pengumpan lokal dapat beroperasi (%)**	**Kab. Paser**	**14**	**60.000.000**	**APBD**		**28**	**419.487.000**
02.15.03.2.12.003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	Kab. Paser	1	60.000.000	APBD		1	419.487.000
02.15.03.2.13	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**Persentase Tersedianya sarana dan Prasarana Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (%)**	**Kab. Paser**	**83,67**	**422.853.861**	**APBD**		**87,76**	**1.556.190.000**
02.15.03.2.13.003	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	Kab. Paser	2	60.000.000	APBD		2	1.181.1900,000
02.15.03.2.13.006	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan (Unit)	Kab. Paser	1	362.853.861	APBD		1	374.900.000
Total					**23.871.496.565**				**32.726.062.000**

BAB V

PENUTUP

Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam semesta karena berkat karuniaNya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Rankhir Renja) Tahun 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Paser

Renja Dinas Perhubungan ini disusun dengan memuat analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi, karena merupakan suatu hal yang penting sebagai pondasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan datang berdasarkan asas transparasi, efisiensi, efektif dan akuntabel. Analisis lingkungan internal dan eksternal merupakan suatu kegiatan inventarisasi situasi dan identifikasi kekuatan. kelemahan. peluang dan ancaman.

Renja ini memuat Tujuan, Sasaran dan Program termasuk pembiayaan yang realistis dan nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada publik melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah masing-masing Perangkat Daerah. Oleh sebab itu Sumber Daya Manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan dan harus dikelola secara profesional dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat. Proses peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Selain itu dukungan dana untuk melaksanakan program dan kegiatan juga sangat turut menentukan keberhasilan tujuan serta sasaran program kegiatan yang akan dicapai. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Dokumen Renja 2026 ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan kedepan sangat kami harapkan.

Demikian Rencana Kerja ini kami buat semoga ALLAH SWT senantiasa memberi limpahan rahmat-Nya kepada kita semua dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas kerjasamanya dan mohon maaf apabila dalam penyajiannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

LAMPIRAN

Tabel Matriks Kontribusi Daerah Terhadap Asta Cita Dalam RPJMN 2025-2029

No.	**ASTA CITA**	**URUSAN**	**REKOMENDASI KEGIATAN**
1.	Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sub Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal Sub Kegiatan Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C Sub Kegiatan Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau Sub Kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau

PERUBAHAN RENJA 2025

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin-Nya telah disusun Perubahan Renja Tahun 2025 Disnakertrans Kabupaten Paser. Perubahan Renja Tahun 2025 Disnakertrans Kabupaten Paser adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Disnakertrans Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2025.

Perubahan Renja Disnakertrans Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun sebagai implementasi tahunan dari Reviu Rencana Strategis (Renstra) Disnakertrans Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 dan dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang selaras dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) Tahun 2025 Kabupaten Paser.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Disnakertrans, merupakan tahun keempat dari dokumen Reviu Renstra Disnakertrans 2021-2026. Perubahan Renja Tahun 2025 Disnakertrans mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) Kabupaten Paser. Oleh karenanya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Disnakertrans dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Disnakertrans, evaluasi pelaksanaan Renja Disnakertrans sampai dengan triwulan I Tahun 2025.

Perubahan Renja Tahun 2025 Disnakertrans berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Disnakertrans disamping sebagai dokumen rencana kerja juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang yang jelas dari program kegiatan Disnakertrans sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Disnakertrans Kabupaten Paser. Kami berharap agar Perubahan Renja ini dapat bermanfaat baik bagi seluruh aparatur Disnakertrans maupun seluruh pihak terkait. Kami juga menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Disnakertrans Kabupaten Paser ini masih terdapat kekurangan dan perlu penyempurnaan untuk perbaikan selanjutnya.

Untuk itu, kami mohon masukan dan saran untuk penyempurnaan Renja agar menjadi lebih baik di masa mendatang.

Tana Paser, 22 Agustus 2025
Kepala Disnakertrans



Rizky Noviar, S.STP NIP. 197905071998101001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi iii

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB. II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 28

2.4 Reviu Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025 29

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 44

BAB. III RENCANA KERJA PENDANAAN DISNAKERTRANS

3.1. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 45

BAB. IV PENUTUP

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan 50

4.2. Rencana Tindak Lanjut 50

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan dengan merujuk pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan dilakukan akibat adanya ketidaksesuaian rencana kerja dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah serta perubahan kebijakan nasional maupun provinsi, sehingga mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung. Menindaklanjuti hal tersebut, penyusunan Perubahan Renja Disnakertrans Tahun 2025 dilakukan dengan tetap merujuk kepada Reviu Renstra Disnakertrans 2016-2021 serta memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) Kabupaten Paser Tahun 2025.

Adapun dokumen Perubahan Renja Disnakertrans Tahun 2025 memuat perubahan dan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja. Hal ini dilakukan akibat adanya perkembangan kondisi dan progres kegiatan dilapangan. Perubahan juga dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia sehingga menghasilkan kinerja yang mendukung pencapaian target Renstra Disnakertrans dan RPJMD Kabupaten Paser.

1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Paser Nomor 70 tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusuan Kerangka Acuan Kerja;
17. Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser;
18. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Renja (Rencana Kerja) bertujuan untuk menyesuaikan perencanaan pembangunan tahunan dengan perubahan kondisi atau kebijakan yang terjadi, sehingga dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai target pembangunan. Maksudnya adalah untuk memberikan panduan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diubah, serta menjadi dasar bagi perubahan anggaran.

Penyusunan Perubahan Renja merupakan proses revisi atau penyesuaian rencana kerja yang telah ada sebelumnya. Dilakukan jika ada perubahan yang signifikan pada kondisi atau kebijakan yang mempengaruhi target pembangunan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa rencana kerja tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan.

Maksud Penyusunan Penyesuaian dengan Perubahan Kondisi/Kebijakan Perubahan kondisi, seperti perubahan ekonomi, sosial, atau lingkungan. Perubahan kebijakan, seperti perubahan peraturan atau prioritas pembangunan.

Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan menyesuaikan program dan kegiatan agar lebih tepat sasaran dan efektif dalam mencapai tujuan. Menghindari pemborosan atau ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akibat perubahan kondisi atau kebijakan.

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Reviu Renstra tahun 2021-2026 .

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Menjamin Keterkaitan dan Konsistensi Perubahan Renja harus sejalan dengan rencana strategis (Renstra) dan rencana pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD).
2. Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan:
3. Perubahan Renja menjadi panduan bagi instansi atau perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah diubah.
4. Dasar Penyusunan Anggaran Perubahan Renja dapat menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) atau Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA).
5. Optimasi Peran dan Fungsi Mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan Efisiensi Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah
7. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dalam satu tahun;
8. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
9. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan
10. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
11. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISNAKERTRANS SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Disnakertrans Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Disnakertrans

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA PENDANAAN DISNAKERTRANS

3.1. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

4.2. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DISNAKERTRANS SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Disnakertrans Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi atau diukur dalam pelaksanaannya. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategi.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian visi dan misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sampai dengan Triwulan I sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2025 s/d Triwulan I

Kode	Perangkat Daerah / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025		Sisa Anggaran
						Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV						
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		
			K		RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	35	C		0		0		0							0	0
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP Disnakertrans	79	B		0				0				-		-		0
2.07.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76	Persen	12.331.959.320,00	16	2.384.051.769,00	-	-	-	-			16,00	2.384.051.769,00	21,05	19,33	9.947.907.551,00
2.07.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Sasaran strategis Disnakertrans	92	persen	274.510.000,00	25	16.676.500,00	-	-	-	-			27,17	16.676.500,00	29,54	6,08	257.833.500,00
2.07.001.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	Laporan	47.591.000,00	1	-	-	-	-	-			1,00	-	25,00	-	47.591.000,00
2.07.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	9	Dokumen	206.449.000,00	3	16.676.500,00	-	-	-	-			3,00	16.676.500,00	33,33	8,08	189.772.500,00
2.07.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	20.470.000,00	1	-	-	-	-	-			1,00	-	100,00	-	20.470.000,00
2.07.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengeluaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100	Persen	9.398.698.270,00	25	2.006.356.394,00	-	-		-			25,00	2.006.356.394,00	25,00	21,35	7.392.341.876,00
2.07.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (34 Orang)	34	Bulan	8.945.768.270,00	4	1.934.297.594,00	-	-	-	-			4,00	1.934.297.594,00	11,76	21,62	7.011.470.676,00
2.07.001.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	452.930.000,00	3	72.058.800,00	-	-	-	-			3,00	72.058.800,00	25,00	15,91	380.871.200,00

2.07.001.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**100**	**persen**	**976.292.570,00**	**25**	**61.792.396,00**	**-**	**-**		**-**			**25,00**	**61.792.396,00**	**25,00**	**6,3**	**914.500.174,00**
2.07.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11	Paket	501.750.700,00	0	0,00	-	-	-	-			-	-	-	-	501.750.700,00
2.07.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	Paket	192.174.050,00	0	24.613.396,00	-	-	-	-			-	24.613.396,00	-	12,8	167.560.654,00
2.07.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	71.959.820,00	0	1.230.000,00	-	-	-	-			-	1.230.000,00	-	1,7	70.729.820,00
2.07.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34	Laporan	210.408.000,00	7	35.949.000,00	-	-	-	-			7,00	35.949.000,00	20,59	17,0	174.459.000,00
2.07.001.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**persen**	**1.258.006.960,00**	**25**	**277.591.901,00**	**-**	**-**		**-**			**25,00**	**277.591.901,00**	**25,00**	**22,0**	**980.415.059,00**
2.07.001.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	30.848.000,00	1	0,00	-	-	-	-			1,00	-	8,3	-	30.848.000,00
2.07.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	51.706.920,00	3	2.691.901,00	-						3,00	2.691.901,00	25,00	5,2	49.015.019,00
2.07.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14	Laporan	1.175.452.040,00	4	274.900.000,00	-						4,00	274.900.000,00	28,57	23,3	900.552.040,00
2.07.001.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah**	**100**	**pesen**	**424.451.520,00**	**25**	**21.634.578,00**	**-**	**-**		**-**			**25,00**	**21.634.578,00**	**25,00**	**5,1**	**402.816.942,00**
2.07.001.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dipelihara dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	unit	102.393.320,00	0	21.634.578,00	-			-			-	21.634.578,00	-	21,1	80.758.742,00
2.07.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	Unit	74.820.000,00	0		-			-			-	-	-	-	74.820.000,00
2.07.001.2.09.009	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	247.238.200,00	0	-	-						-	-	-	-	247.238.200,00
	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Memiliki Kompetensi dan Telah Ditempatkan	**Pertumbuhan jumlah tenaga Kerja yang siap kerja**	**47**	**Persen**		**0**										-		
	Terserapnya Tenaga Kerja Terlatih yang Bekerja	**Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan**	**55**	**Persen**		**0**		**-**								-		

2.07.002	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Capaian Program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya**	**100**	**persen**	**212.660.300,00**	**25**	**-**	**-**	**-**		**-**			**25,00**	**-**	**25,00**	**-**	**212.660.300,00**
2.07.002.2.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Persentase dokumen ketenagakerjaan yang tersusun**	**75**	**persen**	**212.660.300,00**	**10**			**-**		**-**			**13,33**	**-**	**17,78**	**-**	**212.660.300,00**
2.07.002.2.01.002	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro	20	Orang	212.660.300,00	0	-		-	-				-	-	-	-	212.660.300,00
2.07.003	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Presentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	**85**	**persen**	**10.098.172.610,00**	**17**	**262.020.200,00**	**-**	**-**		**-**			**17,00**	**262.020.200,00**	**20,00**	**2,59**	**9.836.152.410,00**
2.07.003.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Presentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan unitkompetensi**	**100**	**persen**	**9.398.569.664,00**	**25**	**232.366.600,00**	**0**	**-**		**-**			**25,00**	**232.366.600,00**	**25,00**	**2,47**	**9.166.203.064,00**
2.07.003.2.01.001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	80	orang	803.026.664,00	16	23.662.800,00	-						16,00	23.662.800,00	20,00	2,95	779.363.864,00
2.07.003.2.01.003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1	Unit	2.495.543.000,00	0	0,00	-		-				-	-	-	-	2.495.543.000,00
2.07.003.2.01.004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi pada tahun n	329	orang	6.100.000.000,00	46	208.703.800,00	-						46,00	208.703.800,00	13,98	3,42	5.891.296.200,00
2.07.003.2.02	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Presentase pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta**	**85**	**persen**	**350.000.000,00**	**12,5**	**4.183.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**			**14,71**	**4.183.000,00**	**17,30**	**1,20**	**345.817.000,00**
2.07.003.2.02.001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatuhan swasta yang dibina	8	lembaga	350.000.000,00	1	4.183.000,00	-						1,00	4.183.000,00	12,50	1,20	345.817.000,00
2.07.003.2.03	**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**Presentase pendaftarandan rekomendasi LPK**	**85**	**persen**	**49.602.946,00**	**12,5**	**-**	**-**	**-**		**-**			**14,71**	**-**	**17,30**	**-**	**49.602.946,00**
2.07.003.2.03.001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	1	Perizinan	49.602.946,00	0	-	-						-	-	-	-	49.602.946,00

2.07.003.2.04	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Presentase Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil**	**70**	**persen**	**80.000.000,00**	**20**	**2.168.000,00**	**-**	**-**		**-**			**28,57**	**2.168.000,00**	**40,82**	**2,71**	**77.832.000,00**
2.07.003.2.04.001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlahperusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatanproduktifitas	5	perusahaan	80.000.000,0	1	2.168.000,0	-						1,0	2.168.000,00	20,00	2,71	77.832.000,0
2.07.003.2.05	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Pengukuran Produktivitas Daerah Kab/Kota**	**100**	**persen**	**220.000.000,00**	**25**	**23.302.600,00**	**-**	**-**		**-**				**23.302.600,00**	**-**	**10,59**	**196.697.400,00**
2.07.003.2.05.001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	5	Dokumen	220.000.000,0	1	23.302.600,00	-						1,0	23.302.600,00	20,00	10,59	196.697.400,0
2.07.004	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Presentase besaran Pencari Kerjayang terdaftar yang ditempatkan**	**30**	**persen**	**1.652.887.834,00**	**10**	**91.320.245,00**	**-**	**-**		**-**			**10,00**	**91.320.245,00**	**33,33**	**5,52**	
2.07.004.2.01	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan antarkerjadi daerah kabupaten/kota**	**27**	**Persen**	**1.119.339.100,00**	**10**	**48.896.400,00**	**-**	**-**		**-**			**37,04**	**48.896.400,00**	**137,17**	**4,37**	**68.168.860,00**
2.07.004.2.01.002	Pelayanan antar Kerja	Jumlahtenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	500	orang	79.714.160,0	4	11.545.300,0	-						4,0	11.545.300,00	0,80	14,48	68.168.860,0
2.07.004.2.01.003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagiPencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang mengikutipenyuluhan dan bimbinganjabatan	120	Orang	74.435.320,0	0	0,0	-	-					-	-	-	-	74.435.320,0
2.07.004.2.01.004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	1	Orang	343.000.000,0	0	15.413.400,0	-	-					-	15.413.400,00	-	4,49	327.586.600,0
2.07.004.2.01.005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	60	Orang	622.189.620,0	0	21.937.700,0	-						-	21.937.700,00	-	3,53	600.251.920,0
2.07.004.2.02	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase LPTKSyangmemiliki ijinsesuai dengan regulasi yang berlaku**	**34**	**Persen**	**24.901.880,00**	**2,94**	**7.965.600,00**	**-**	**-**	**-**	**-**			**8,65**	**7.965.600,00**	**25,43**	**31,99**	**16.936.280,00**
2.07.004.2.02.002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	10	LPTKS	24.901.880,0	1	7.965.600,00	-	-	-				1,0	7.965.600,00	10,00	31,99	16.936.280,0
2.07.004.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase informasi lowongan kerja**	**100**	**persen**	**508.646.854,00**	**25**	**34.458.245,00**	**-**	**-**		**-**			**25,00**	**34.458.245,00**	**25,00**	**6,77**	**88.236.755,00**
2.07.004.2.03.001	Pemeliharaan dan Operasional AplikasiInformasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasiyang Dihasilkan Apliakasi Informasi Pasar Kerja Online	3	Dokumen	99.857.600,0	0	11.620.845,0	-			-			-	11.620.845,00	-	11,64	88.236.755,0
2.07.004.2.03.002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerjayang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	1500	Orang	408.789.254,0	348	22.837.400,0	-	-					348,0	22.837.400,00	23,20	5,59	385.951.854,0
	Terwujudnya Hubungan yang Kondusif Untuk Mengembangkan Usaha dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja	**Tingkat Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja**	**45**	**Persen**		**16**		**-**								**-**		
	MeningkatnyaHubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	**Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan**	**80**	**Persen**		**12,00**		**-**								**-**		

2.07.005	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Presentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja**	**75**	**persen**	**12.042.057.290,00**	**16**	**80.219.700,00**	-	-		-			**16,00**	**80.219.700,00**	**21,33**	**0,67**	**11.400.482.789,00**
2.07.005.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan**	**15**	**persen**	**648.411.201,00**	**2**	**11.116.900,00**	-	-		-			**13,33**	**11.116.900,00**	**88,89**	**1,71**	**75.939.500,00**
2.07.005.2.01.001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yangterkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online	16	perusahaa n	75.939.500,00	10	0,00	-						10,00	-	62,50	-	75.939.500,00
2.07.005.2.01.002	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yangmenyusun perjanjian kerja sama	7	perusahaa n	55.910.000,00	2	0,00	-		-	-			2,00	-	28,57	-	55.910.000,00
2.07.005.2.01.003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	10	Laporan	516.561.701,00	3	11.116.900,00	-						3,00	11.116.900,00	30,00	2,15	505.444.801,00
2.07.005.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perselisihan HI dan mogok kerja yang terselesaikan**	**90**	**Persen**	**11.393.646.089,00**	**50**	**69.102.800,00**	-	-		-			**55,56**	**69.102.800,00**	**61,73**	**0,61**	**11.324.543.289,00**
2.07.005.2.02.001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	3	Perkara	115.444.106,00	1	0,00	-	-		-			1,00	-	33,33	-	115.444.106,00
2.07.005.2.02.002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan Yang Terselesaikan	12	Perkara	48.390.473,00	2	0,00	-	-		-			2,00	-	16,67	-	48.390.473,00
2.07.005.2.02.003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	28	Asosiasi dengan serikat pekerja	181.556.150,00	0	7.504.800,00	-	-		-			-	7.504.800,00	-	4,13	174.051.350,00
2.07.005.2.02.004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1	Lembaga	263.712.500,00	1	0,00	-	-					1,00	-	100,00	-	263.712.500,00
2.07.005.2.02.005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (32268 Orang)	47026	orang/bula n	10.784.542.860,00	2351	61.598.000,00	0	-					2.351,00	61.598.000,00	5,00	0,57	10.722.944.860,00
	Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Baru Sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Melalui Penyelenggaraan Transmigrasi	**Persentase peningkatan kualitas hidup warga Transmigran baru**	**100**	**Persen**		**25**		-								-		
	Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi	**Persentase peningkatan pengembangan kawasan transmigrasi baru**	**50**	**Persen**		**0**		-								-		

3.32.002	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Cakupan Kawasan Transmigrasi yang sesuai perencanaan**	**100**	**persen**	**182.836.220,00**	**25**	**15.699.000,00**	**-**	**-**		**-**			**25,00**	**15.699.000,00**	**25,00**	**8,59**	**167.137.220,00**
3.32.002.2.01	**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	**Persentase ketersediaan lahan kawasan transmigrasi**	**35**	**Persen**	**182.836.220,00**	**3,5**	**15.699.000,00**	**-**	**-**		**-**			**10,00**	**15.699.000,00**	**28,57**	**8,59**	**167.137.220,00**
3.32.002.2.01.001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang nisa dibangun dan dikerja samakan dengan daerah lain	1	Dokumen	96.698.500,00	0	0,00	-	-	-				-	-	-	-	96.698.500,00
3.32.002.2.01.002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan transmigrasi	1	Kawsan Transmigrasi	86.137.720,00	0	15.699.000,00	-	-	-	-			-	15.699.000,00	-	18,23	70.438.720,00
3.32.003	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Presentase Peningkatan Jumlah KK transmigran sejahtera yang ditempatkan**	**90**	**persen**	**257.007.540,00**	**14**	**10.592.800,00**	**-**	**-**		**-**			**14,00**	**10.592.800,00**	**15,56**	**4,12**	**102.314.740,00**
3.32.003.2.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pertumbuhan penduduk pada kawasan transmigrasi baru**	**80**	**Persen**	**257.007.540,00**	**12**	**10.592.800,00**	**-**	**-**		**-**			**15,00**	**10.592.800,00**	**18,75**	**4,12**	**102.314.740,00**
3.32.003.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang)	2	Laporan	112.907.540,00	0	10.592.800,00		-	-				-	10.592.800,00	-	9,38	102.314.740,00
3.32.003.2.01.002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni,Layak Usaha,dan Layak Berkembang)	1	Dokumen	144.100.000,00	0	0,00		-	-				-	-	-	-	144.100.000,00
3.32.004	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Jumlah Kawasan perkotaan baru yang berkembang dgn memiliki sarana dan prasarana yang memadai**	**100**	**Kawasan**	**420.999.700,00**	**25**	**21.290.100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**			**25,00**	**21.290.100,00**	**25,00**	**5,06**	**399.709.600,00**
3.32.004.2.01	**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian**	**Persentase layanan dasar yang dapat di akses warga trans baru**	**90**	**Persen**	**420.999.700,00**	**12**	**21.290.100,00**	**-**	**-**		**-**			**13,33**	**21.290.100,00**	**14,81**	**5,06**	**399.709.600,00**
3.32.004.2.01.001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah kepala keluarga transmigrasi yang dibina	30	KK	220.999.850,00	0	0,00	-	-	-	-			-	-	-	-	220.999.850,00
3.32.004.2.01.002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial,Ekonomi,Kelembagaan	1	Satuan Pemukiman	199.999.850,00	0	21.290.100,00	-	-	-				-	21.290.100,00	-	10,65	178.709.750,00
	Total				**37.198.580.814,00**		**2.865.193.814,00**		**-**		**-**		**-**	**18,50**	**2.865.193.814,00**	**23,28**	**7,70**	**32.066.364.610,00**

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi Renja Tahun 2025 semester I dapat dijelaskan bahwa :

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan I adalah 23,28 %, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.865.193.814,00 (Dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta serratus Sembilan puluh tiga ribu delaan ratus empat belas rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 37.198.580.814,00 (Tiga puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat belas rupiah) atau sebesar 7,70 %
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar 23,8 % dengan predikat kinerja rendah (penentuan peringkat disesuaikan skala pada Tabel T-E.1 PMDN Halaman 494).
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 0 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 0 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 5 indikator capaian kinerja
   0%-50% = 39 indikator

Secara Umum berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 diatas, realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan.

Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Periode April 2025 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Adanya pelaksanaan rapat setiap triwulan
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. UPTD BLK dan Bidang Produktivitas (Anggaran uji kompetensi untuk pelatihan dan Pemaganggan yang dilaksanakan dengan dana APBD murni baru dilaksanakan 1 Kelas kejuruan dan 1 kali pengiriman peserta pelatihan selanjutnya akan dilanjutkan di trw II dan III.
2. Bidang Penempatan untuk Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengawasan LPTKS belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu beberapa SK yg belum terbit dari bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
3. Kurangnya Koordinasi di awal triwulan
4. Pelaksanaan kegiatan bidang belum sepenuhnya mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah disusun.

2.1.1. Faktor Pendorong dan Penghambat dan Rekomendasi Serta Tindak Lanjut Evaluasi Triwulan I

Tabel 2.2

Realisasi Program dan Kegiatan dan Hasil Keluaran Triwulan I

Kode	Perangkat Daerah / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi tahun 2025		Target Rencana Aksi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan Triwulan-I	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)Satuan	(6)	(7)	(8)
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	35	C	0	0	Sesuai
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP Disnakertrans	79	B	0	0	Sesuai
2.07.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76	Persen	15.00	16	Melebihi Traget
2.07.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Sasaran strategis Disnakertrans	92	persen	20.00	25	Melebihi Target
2.07.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengeluaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100	Persen	25.00	25	Tercapai
2.07.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	persen	25.00	25	Tercapai
2.07.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen	25.00	25	Tercapai
2.07.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah	100	pesen	25.00	25	Tercapai
	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Memiliki Kompetensi dan Telah Ditempatkan	Pertumbuhan jumlah tenaga Kerja yang siap kerja	47	Persen	0	0	Sesuai
	Terserapnya Tenaga Kerja Terlatih yang Bekerja	Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan	55	Persen	0	0	Sesuai
2.07.002	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Capaian Program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya	100	persen	0	25	Melebihi Target
2.07.002.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase dokumen ketenagakerjaan yang tersusun	75	persen	0	10	Melebihi Target
2.07.003	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Presentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	85	persen	20.00	17	Tidak Tercapai
2.07.003.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Presentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	100	persen	20.00	25	Melebihi target
2.07.003.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Presentase pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	85	persen	30.00	12.5	Tidak Tercapai
2.07.003.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Presentase pendaftarandan rekomendasi LPK	85	persen	20.00	12.5	Tidak Tercapai
2.07.003.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Presentase Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil	70	persen	30.00	20	Tidak Tercapai
2.07.003.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengukuran Produktivitas Daerah Kab/Kota	100	persen	20.00	25	Melebihi Target
2.07.004	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	30	persen	15.00	10	Tidak Tercapai
2.07.004.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	27	Persen	10.00	10	Sesuai
2.07.004.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LPTKS yang memiliki ijin sesuai dengan regulasi yang berlaku	34	Persen	10.00	2.94	Tidak Tercapai
2.07.004.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase informasi lowongan kerja	100	persen	20.00	25	Melebihi Target
	Terwujudnya Hubungan yang Kondusif Untuk Mengembangkan Usaha dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja	Tingkat Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	45	Persen	20.00	16	Tidak Tercapai
	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	80	Persen	20.00	12	Tidak Tercapai
2.07.005	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Presentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	75	persen	10.00	16	Melebihi Target
2.07.005.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	15	persen	5.00	2	Tidak Tercapai
2.07.005.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan HI dan mogok kerja yang terselesaikan	90	Persen	40.00	50	Melebihi Target
	Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Baru Sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Melalui Penyelenggaraan Transmigrasi	Persentase peningkatan kualitas hidup warga Transmigran baru	100	Persen	0	25	Melebihi Target
	Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi	Persentase peningkatan pengembangan kawasan transmigrasi baru	50	Persen	0	0	Sesuai
3.32.002	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Kawasan Transmigrasi yang sesuai perencanaan	100	persen	0	25	Melebihi Target
3.32.002.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase ketersediaan lahan kawasan transmigrasi	35	Persen	0	3.5	Melebihi target
3.32.003	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Presentase Peningkatan Jumlah KK transmigran sejahtera yang ditempatkan	90	persen	20.00	14	Tidak Tercapai
3.32.003.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan penduduk pada kawasan transmigrasi baru	80	Persen	20.00	12	Tidak Tercapai
3.32.004	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan perkotaan baru yang berkembang dgn memiliki sarana dan prasarana yang memadai	100	Kawasan	0	25	Melebihi Target
3.32.004.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase layanan dasar yang dapat di akses warga trans baru	90	Persen	20.00	12	Tidak Tercapai

a. Realiasasi Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target yaitu :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, target Rencana Aksi 20% baru tercapai 17%,

   Faktor penghambat tidak tercapai : karena triwulan 1 baru mulai dilaksanakan pendataan peserta pelatihan dan belum dilaksanakan uji kompetensi.

   - Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, target Rencana aksi 30 Tercapai 12,5%

     Faktor Penghambat tidak tercapai : Kegiatan pembinaan dilaksanakan pada triwulan II

   - Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, target rencana aksi 20% tercapai 12,5%

     Faktor penghambat tidak tercapai : Kegiatan dipindahkan ke triwuan II karena adanya perubahan regulasi dari kementrian

   - Kegiatan Presentase Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil, target rencana aksi 30%, tercapai 20%

     Faktor pengahambat tidak tercapai : Kegiatan dipindahkan ke triwuan II karena adanya perubahan regulasi dari kementrian

2. Program Penempatan Tenaga Kerja, target rencana aksi 15% realisasi 10%

   Faktor penghambat tidak tercapai : Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia pada triwulan I tidak sesuai dengan yang diperkirakan

   - Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, target rencana aksi 10% , tercapai 2,94%

     Faktor penghambat tidak tercapai : LPTKS yang ada saat ini berupa labour suplay milik perusahan yang telah memiliki izin resmi dari kemantrian sehingga belum ada penerbitan ijin dari daerah dan Disnakertrans tidak berwenang untuk menerbitkan ijin hanya berupa koordinasi dan pembinaan.

3. Program Pembangunan Kawasan transmigrasi, target rencana aksi 20%, tercapai 14%

   Faktor penghambat tidak tercapai : Pembangunan transmigrasi menunggu dana Tugas pembantuan dari kementrian (APBD Kabupaten adalah dana pendamping).

   - Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, target rencana aksi 20% tercapai 12%.

     Faktor penghambat tidak tercapai : Kegiatan ini merupakan pendampingan kegiatan dana tugas pembantuan dari kementrian

4. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

   - Kegiatan pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian, target

rencana aksi 20% realisasi 12%.

Faktor penghambat tidak tercapai : Kegiatan ini merupakan pendampingan kegiatan dana tugas pembantuan dari kementrian

b. Program yang melebihi target :

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Target rencana aksi 15% realisasi 16%.

   Faktor pendukung melebihi target : Program berjalan sesuai rencana aksi dan anggaran kas yang telah disusun.

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target rencana aksi 20% tercapai 25%

  Faktor pendukung melebihi target : Dokumen perencanaan pada triwulan 1 melebihi target yang disusun.

2. Program Perencanan Tenaga Kerja, target rencana aksi 0% realisasi 25%

   Faktor pendukung melebihi target : Program dilaksanakan sesuai rencana aksi yang telah di susun.

- Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), target rencana aksi 0% realisasi 10%

  Faktor pendukung melebihi target : Penyusunan dan persiapan SK kegiatan yang dijadwalkan triwulan II lebih cepat dilaksanakan.

3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

- Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, target rencana aksi 20% realisasi 25%.

  Faktor pendukung melebihi target : Pelatihan pada tahap seleksi peserta dan pendataan.

- Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, target rencana aksi 20% realisasi 25%.

  Faktor pendukung keberhasilan : Kegiatan mengacu pada rencana aksi yang telah disusun

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

> Kegiatan Pengelolaan informasi pasar kerja, target rencana aksi 20% realisasi 25% Faktor pendukung melebihi target : Kegiatan dilaksanakan sesuai rencana aksi yang telah disusun.

5. Program Hubungan Industrial, target rencana aksi 10% realosasi 16%

   Faktor pendukung melebihi target : kasus PHK yang terdaftar pada triwulan I dapat diselesaikan.

- Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kabupaten/Kota. Tareget rencana aksi 40% realisasi 50%

  Faktor pendukung melebihi target : Kasus yang terdaftar pada triwulan I dapat diselesaikan.

6. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, target rencana aksi 0% realisasi 25%. Faktor Pendukung melebihi target : perencanaan dilaksanakan dengan mempersiapkan pendataan, kelengkapan administrasi yang sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun.

- Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi, target rencana aksi 0% realisasi 3,5%

  Faktor pendukung melebihi target : Kegiatan pencadangan tanah dilaksanakan dengan mempersiapkan pendataan, kelengkapan administrasi yang sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun.

7. Program Pengembangan Kawasan Tarnsmigrasi, target rencana aksi 0% realisasi 25%. Faktor pendukung melebihi target : Pengembangan Kawasan transmigrasi dilaksanakan sesuai rencana aksi yang telah disusun.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2025.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Paser, dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan RPJMD Kabupaten Paser;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi;
c. penyelengaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Ketenagakerjaan dan transmigrasi yang meliputi penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi;
e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaran tugas dan fungsi dinas tenaga kerja dan transmigrasi;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
g. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dibantu oleh Sekretariat dan 4 (empat) bidang yang diatur Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tugas dan fungsi Sekretariat dan 4 (empat) bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

a. Tugas Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum meliputi perencanaan program, kepegawaian, kelembagaan, penatausahaan keuangan, perlengkapan, kehumasan dan rumah tangga dinas, dan memberikan pelayanan administratif kepada satuan kerja di lingkungan dinas.

b. Fungsi Sekretariat

1. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan dinas:
2. pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
3. pelaksanaan pembantuan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas;
4. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
5. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
6. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian dan kediklatan;

7. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

1.1. Kepala Sub Bagian Umum

a. Tugas sub bagian umum

Sub bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, mengelola barang milik daerah dan administrasi kepegawaian.

b. Fungsi sub bagian umum

1. pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah pada Dinas;
2. pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemanfaatan, penatausahaan (pembukuan, inventarisasi dan pelaporan) pengamanan dan pemeliharaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas;

   pelaksanaan penyusunan analisis jabatan (ANJAB), pengusulan formasi jabatan fungsional angka kredit dan jabatan fungsional umum, penerapan kualifikasi jabatan, evaluasi pelaksanaan tugas jabatan struktural, dan peningkatan kompetensi PNSD di lingkungan Dinas;
3. pelaksanaan penyusunan penempatan dan pemindahan, kepangkatan, penggajian, usulan pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, dan pembinaan disiplin, serta peningkatan kesejahteraan PNS di lingkungan Dinas;
4. pelaksanaan penyusunan uraian tugas jabatan fungsional umum/fasilitatif;
5. pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja di lingkungan Dinas;
6. pelaksanaan penyusunanpenerapan ketentuan tata naskah Dinas, tata kearsipan, pakaian Dinas, jam kerja dan perjalanan Dinas pegawai di lingkungan Dinas;dan
7. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum.

1.2. Kepala Sub Bagian Keuangan

a. Tugas sub bagian keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan menatausahakan keuangan Dinas.

b. Fungsi sub bagian keuangan

1. pelaksanaan penyusunan anggaran belanja Dinas yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung, termasuk perubahannya;
2. pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA);
3. pelaksanaan penyiapan dokumen surat perintah membayar (SPM);

4. pelaksanaan penelitian kelengkapan surat perintah pembayaran langsung (SPP-LS), surat perintah pembayaran uang persediaan (SPP- UP), surat perintah pembayaran ganti uang (SPP-GU) dan surat perintah pembayaran tambah uang (SPP –TU);
5. pelaksanaanverifikasi surat pemintaan pembayaran (SPP);
6. pelaksanaan pengujian tagihan dan melaksanakan pembayaran atas persetujuan kepala Dinas selaku pengguna anggaran;
7. pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan;
8. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
9. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penatausahaan keuangan pada unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas;
10. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan.

2. Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

a. Tugas Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja Bidang Penempatan dan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pengembangan bursa Kerja dan peningkatan kesempatan kerja, sertapenempatan tenaga kerja.

b. Fungsi Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

1. Pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pengembangan bursa Kerja dan peningkatan kesempatan kerja, serta penempatan tenaga kerja sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
2. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan bursa Kerja dan peningkatan kesempatan kerja, serta penempatan tenaga kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
3. pelaksanaan fasilitas penempatan dan peningkatan kesempatan kerja; pelaksanaan pembinaan SDM, pengembangan dan penempatan tenaga kerja;
4. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri;
5. pelaksanaan pengkoordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja Kabupaten;
6. pelaksanaan pengendalian Tenaga Kerja Asing (TKA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja;
8. pelaksanaan pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair Kabupaten;

9. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja dengan seksi Pengembangan Bursa Kerja dan peningkatan kesempatan kerja, serta Penempatan Tenaga Kerja;
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan penempatan dan peningkatan kesempatan kerja; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja.
12. pelaksanaan pembinaan bursa kerja di lembaga satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pelatihan (bursa kerja khusus/BKK);
13. pelaksanaan penyelenggaraan bursa kerja (Job MarketFair);
14. pelaksanaan data lowongan kerja dengan System Daring (On-Line System) atau penyelenggaraan bursa kerja secara elektronik (Bursa Kerja On-Line/BKOL);
15. pelaksanaan penyusunan proyeksi permintaan dan penawaran tenaga kerja;
16. pelaksanaan pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja;
17. pelaksanaan pengelolaan informasi ketenagakerjaan, meliputi pengumpulan, pengelolaan dan penyajian informasi ketenagakerjaan;
18. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja; dan
19. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Bursa Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja.
20. prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
21. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penempatan tenaga kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
22. pelaksanaan pemantauan wajib lapor lowongan kerja;
23. pelaksanaan pelayanan pencari kerja (AK1);
24. pelaksanaan pelayanan pengantaran/perantaraan kerja, pelayanan penempatan AKL, AKAD dan AKN;
25. pelaksanaan pelayanan surat izin pengarahan;
26. pelaksanaan penerbitan surat pesetujuan penerbitan;
27. pelaksanaan pelayanan perizinan memperkerjakan tenaga asing (IMTA);
28. pelaksanaan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
29. pelaksanaan pelayanan perizinan dan pelayanan LPTKS;

3. Bidang Hubungan Industrial

a. Tugas Bidang Hubungan Industrial

Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat kerja

b. Fungsi Bidang Hubungan Industrial dan kesejahteraan tenaga kerja

1. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat kerja sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
2. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
3. pelaksanaanperencanaanteknis operasional program kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
4. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan terkait dengan hubungan industrial sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra OPD;
5. pelaksanaan program hubungan industrial guna pelaksanaan rencana strategis OPD;
6. pelaksanaan penyusunan dan mengolah data hubungan industrial dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan hubungan industrial dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan hubungan industrial;
7. pelaksanaan pelayanan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. pelaksanaan pembinaan hubungan industrial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengesahan pearturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah;
9. pelaksanaan pengawasan pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan hubungan industrial;
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Hubungan Industrial;dan
11. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Hubungan Industrial.

4. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja

a. Tugas Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerjamempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pengembangan produktivitas kerja, serta pelatihan dan pemagangan.

b. Fungsi Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja

1. Pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pengembangan produktivitas kerja serta pelatihan dan pemagangan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
2. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan produktivitas kerja, serta pelatihan dan pemagangan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
3. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan terkait dengan pelatihan, serta pemagangan dan produktivitas kerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) OPD;
4. Pelaksanaan program pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja guna pelaksanaan rencana strategis OPD;
5. Pelaksanaan penyusunan dan mengolah data pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;
6. pelaksanaan pelayanan pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia;
8. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pemagangan kerja guna menguasai keterampilan atau keahlian tertentu serta pelatihan berdasarkan unit kopetensi;
9. pelaksanaan perizinan dan pendaftaran dan pelatihan kerja;
10. pelaksanaan konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil dan pengukuran produktivitas tingkat daerah;
11. pelaksanaan penyelenggaraan standarisasi dan sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; pelaksanaan pengembangan produktivitas guna peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;
12. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja;
13. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan BidangPelatihan dan Produktivitas Kerja; dan
14. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja.

5. Bidang Transmigrasi

a. Tugas Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi, pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi serta pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi.

b. Fungsi Bidang Transmigrasi

1. pelaksanaanperumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi, pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi serta pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah;
2. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi, pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi serta pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
3. pelaksanaan pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi dan masyarakat sekitar permukiman transmigrasi;
4. pelaksanaan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi dan eks transmigrasi;
5. pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan Daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang ketransmigrasian Kabupaten;
6. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan Seksi penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi, pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi serta pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan transmigrasi; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Transmigrasi.

6. UPTD Balai Latihan Kerja

Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagai berikut :

a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha;dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Tugas dan Fungsinya UPTD BLK adalah sebagai berikut :

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan UPTD BLK sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan UPTD BLK sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan UPTD BLK sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
d. pelaksanaan promosi program pelatihan kerja;
e. pelaksanaan penyusunan kegiatan pelatihan tenaga kerja;
f. pelaksanaan penyusunan instruktur dan calon peserta pelatihan;
g. pelaksanaan pengadaan suku cadang dan peralatan pelatihan;
h. pelaksanaan ketatausahaan UPTD BLK;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPTD BLK; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi UPTD BLK.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut sejumlah jenis pelayan yang diberika Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota

5. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
7. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Presentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan ditempatkan
2. Presentase kasus perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan
3. Jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan perkotaan baru
4. Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK dan APIP eksternal
5. Nilai SAKIP dari Inspektorat

Analisa Kinerja Pelayanan Disnakertrans Kabupaten Paser didasarkan pada kajian

capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Disnakertrans

Kabupaten Paser Sampai Dengan Triwulan I

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensidan Ditempatkan			30%	30%	55%	55%	26,15%	53.63%	55%	58%	
			Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	80%	80%	100%	100%	85,71%	73,68%	100%	100%	
			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetens	1,5%	2,5%	3,5%	3,8%	0,814%	3,26%	3,5%	3,8%	
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	17.062.065.433,53	39.376.416.471,50	39.376.416.471,50	39.376.416.471,50	17.062.065.433,53	39.376.416.471,50	39.376.416.471,50	39.376.416.471,50	
			Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	20%	22%	25%	27%	20,16%	24,27%	25%	27%	
2	Presentase Kasus Perselisihan HubunganIndustrial yang Terselesaikan			40%	49%	80%	90%	61,54%	76.47%	80%	90%	
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	9%	10%	11	12	10%	9,53%	11%	12%	
3	Nilai Evaluasi SAKIP Disnakertrans			77,92	79	79	79.00	79,17	79,49	79	80%	
4	Persentase peningkatan pengembangan kawasan transmigrasi baru			1 Kawasan	0	50%	100%	1 Kawasan	0	50%	100%	

Berdasarkan Tabel 2.3 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang resposif dan tangkas” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Penilaian mandiri pelaksanaan birokrasi reformasi ”, belum mencapai target dikarenakan capaian tersebut diukur pada saat akhir tahun.

b. Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “.Nilai Evaluasi SAKIP Disnakertrans”, belum mencapai target karena penilaian dari AKIP Kabupaten akan dilaksanakan pada triwulan ke II.

c. Tujuan : Meningkatnya Tenaga Kerja yang memiliki Kompetensi dan telah ditempatkan, memiliki 1 indikator kinerja yaitu : Pertumbuhan jumlah tenaga Kerja yang siap kerja, belum mencapai target, dimana realisasi sebesar 0% dari target sebesar 47 % dengan capaian kinerja 0 %

d. Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja terlatih yang bekerja, memiliki 1 indikator yaitu: Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan, belum mencapai target, dimana realidsasi sebesar 0% dari target sebesar 55 % dengan capaian kinerja 0 %

e. Tujuan : Mewujudkan Hubungan yang Kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan Pekerja , memiliki 1 indikator yaitu : Tingkat Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja, belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 0 % dari target sebesar 45 % dengan capaian kinerja 0%

f. Sasaran : Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis, memiliki 1 indikator yaitu : Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan, belum mencapapai target, dimana realisasinya sebesar 0% dari target 80 % dengan capaian kinerja 0 %

g. Tujuan : Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) melalui penyelenggaraan Transmigrasi, memiliki 1 indikator yaitu : Persentase peningkatan kualitas hidup warga Transmigran baru, belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 0 % dari target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 0 %

h. Sasaran : Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi, memiliki 1 indikator yaitu : Persentase peningkatan pengembangan kawasan transmigrasi baru, dimana realisasinya 0% dari target 50%, belum mencapai target dikarenakan capaian tersebut diukur pada saat akhir tahun.

2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) meliputi penanganan perselisihan tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan, penyusunan program ketenagakerjaan, pelatihan tenaga kerja, dan penempatan tenaga kerja. Isu-isu ini juga terkait dengan menjaga hubungan industrial yang harmonis dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Isu-isu penting tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penanganan Perselisihan Tenaga Kerja:

   Disnakertrans berperan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pemberi kerja, seperti perselisihan terkait hak-hak pekerja, syarat kerja, atau sengketa lainnya.

2. Penyusunan Program Ketenagakerjaan:

   Disnakertrans menyusun program ketenagakerjaan yang komprehensif, mencakup penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pelatihan, dan pengembangan keterampilan.

3. Pelatihan Tenaga Kerja:

Disnakertrans berperan dalam menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga kerja, baik pelatihan keterampilan, pelatihan peningkatan kompetensi, maupun pelatihan khusus sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja.

4. Penempatan Tenaga Kerja:

Disnakertrans memfasilitasi penempatan tenaga kerja, baik penempatan tenaga kerja antar daerah maupun penempatan tenaga kerja ke luar negeri, melalui berbagai mekanisme seperti bursa kerja, kerja sama dengan PJTKI, dan informasi lowongan pekerjaan.

5. Hubungan Industrial yang Harmonis:

Disnakertrans berupaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah, melalui penyelesaian perselisihan, pengawasan ketenagakerjaan, dialog sosial dan jaminan kesejahteraan pekerja.

Untuk jaminan Kesejahteraan pekerja Disnakertrans mendorong agar perusahaan yang memiliki tenaga kerja lebih dari 10 orang wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya pada jaminan kesejahteraan seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), jaminan Hari Tua (JKT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JHP). Selain hal tersebut di atas Disnakertrans sesuai INPRES No 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan sosial Ketenagakerjaan juga diberikan Amanah pembayaran iuran BPJS tenaga kerja rentan sebanyak 49063 orang pada triwulan I.

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:

Disnakertrans berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah melalui program pelatihan, peningkatan kompetensi, dan penempatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

7. Penanganan Pengangguran:

Disnakertrans berupaya mengurangi angka pengangguran dengan memberikan informasi lowongan pekerjaan, memfasilitasi penempatan tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja baru

2.4. Reviu Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 yaitu "***Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Untuk Kabupaten Paser Yang Sejahtera*"** yang dijabarkan ke dalam 4 (Empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang merata, peningkatan kualitas hidup anak, perempuan serta pemuda;

2. Penurunan kemiskinan melalui penguatan pelaksanaan perlindungan dan jaminansosial, peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal;;
3. Pemanfatan tata Kelola pemerintahan melalui penguatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan kepuasan pelayanan publikj;
4. Pemantapan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan konektivitas untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan ketangguhan terhadap bencana;

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian.
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur.
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana.
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendukung pencapaian sasaran ke 3 yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, dan sasaran ke 6 yaitu Meningkatkan kualitas dan layanan infrastruktur serta pencapaian sasaran ke 10 , yaitu Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Perubahan RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Reviu terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA				**34.225.715.968**	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA**				**40.738.120.211**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		**INDEKS KEPUASAN PELAYANAN SEKERTARIAT**	76 %	**11.891.625.523**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOT**		**INDEKS KEPUASAN PELAYANAN SEKERTARIAT**	76 %	**13.953.335.966**	
Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Semua Kecamatan**	**Presentase Capaian Sasaran Strategis Disnakertrans**	**92 %**	**195.380.000**	**Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Semua Kecamatan**	**Presentase Capaian Sasaran Strategis Disnakertrans**	**92 %**	**290.379.500**	**Priorita s Penduk ung l**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kecamatan	Tersusunnya dokumen Rentra, Renja, Statistik dan Satu Data	9 Dokumen	141.562.944	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kecamatan	Tersusunnya dokumen Rentra, Renja, Statistik dan Satu Data	9 Dokumen	216.562.944,00	Prioritas Penduku ng l
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Semua Kecamatan	Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1 Dokumen	13.521.556	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Semua Kecamatan	Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1 Dokumen	13.521.556,00	Prioritas Penduku ng l
Realisasi Kinerja SKPD		Realisasi Kinerja SKPD		Realisasi Kinerja SKPD		Realisasi Kinerja SKPD			Realisasi Kinerja SKPD	

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kecamatan	Tersedianya dokumen laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	40.295.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kecamatan	Tersedianya dokumen laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	60.295.000,00	Prioritas Pendukung I
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Semua Kecamatan**	**Persentase pengeluaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**100 Persen**	**9.257.073.270**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Semua Kecamatan**	**Persentase pengeluaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**100 persen**	**9.377.073.270,00**	**Prioritas Pendukung I**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kecamatan	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	8.945.768.270	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kecamatan	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	8.945.768.270,00	Prioritas Pendukung I
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kecamatan	Terpenuhinya Pembayaran Penatausahaan Keuangan	12 Dokumen	311.305.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kecamatan	Terpenuhinya Pembayaran Penatausahaan Keuangan	12 Dokumen	431.305.000,00	Prioritas Pendukung I
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Semua Kecamatan**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi perkantoran**	**100 %**	**779.669.783,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Semua Kecamatan**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi perkantoran**	**100 %**	**1.213.190.363,00**	**Prioritas Pendukung I**
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	500.452.464,00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	773.973.044,00	Prioritas Pendukung I
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kecamatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	133.101.989,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kecamatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	193.101.989,00	Prioritas Pendukung I
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	40.911.330,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	40.911.330,00	Prioritas Pendukung I
Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 Laporan	105.204.000,00	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	205.204.000,00	Prioritas Pendukung I

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Semua Kecamatan**	**Presentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**1.257.111.209,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kecamatan**	**Presentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**1.457.111.209,00**	**Prioritas Pendukung I**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	30.774.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	30.774.000,00	Prioritas Pendukung I
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	51.706.920,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	51.706.920,00	Prioritas Pendukung I
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Laporan	1.174.630.289,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Laporan	1.374.630.289,00	Prioritas Pendukung I
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Semua Kecamatan**	**Presentase terpenuhinya barang milik daerah**	**100 %**	**402.391.261,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Semua Kecamatan**	**Presentase terpenuhinya barang milik daerah**	**100 %**	**402.391.261,00**	**Prioritas Pendukung I**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Semua Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan	8 Unit	83.290.660,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Semua Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan	8 Unit	83.290.660,00	Prioritas Pendukung I
Pemeliharaan,P ajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dipelihara dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Pemeliharaan,P ajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dipelihara dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kecamatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	Unit	74.695.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kecamatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	Unit	74.695.000,00	Prioritas Pendukung I
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kecamatan	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	244.405.601,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kecamatan	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	244.405.601,00	Prioritas Pendukung I
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**Semua Kecamatan**	**CAPAIAN PROGRAM TENAGA KERJA YANG DAPAT DILAKSANAKAN SETIAP TAHUNNYA**	**100**	**%**	**157.430.150,00**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Semua Kecamatan**	**CAPAIAN PROGRAM TENAGA KERJA YANG DAPAT DILAKSANAKAN SETIAP TAHUNNYA**	**100**	**%**	**157.430.150,00**	**Prioritas Pendukung I**
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Semua Kecamatan	**Persentase dokumen ketenagakerjaan yang tersusun**	**75**	**%**	157.430.150,00	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Semua Kecamatan	**Persentase dokumen ketenagakerjaan yang tersusun**	**75**	**%**	157.430.150,00	Prioritas Pendukung I
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Semua Kecamatan	Jumlah SDM Perusahaan yang Mampu Menyusun RTK Mikro	20	Orang	157.430.150,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Semua Kecamatan	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	20	Orang	157.430.150,00	Prioritas Pendukung I
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Semua Kecamatan**	**Presentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan**	**85**	**%**	**9.321.599.770,00**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Semua Kecamatan**	**Presentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan**	**85**	**%**	**12.760.343.570**	**Prioritas Pendukung I**
		berbasis kompetensi						**berbasis kompetensi**				
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	**Semua Kecamatan**	**Presentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**100**	**%**	**8.921.251.222,00**	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Semua Kecamatan**	**Presentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**100**	**%**	**12.359.995.022,00**	**Prioritas Pendukung I**

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Semua Kecamatan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	80 Orang	654.294.347,00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Semua Kecamatan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	80 Orang	2.990.834.347,00	Prioritas Pendukung I
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Tanah Grogot	Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	1 Unit	2.474.706.875,00	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Tanah Grogot	Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	1 Unit	2.576.910.675,00	
Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi Kabupaten/Kota	Tanah Grogot	Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja								
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Tanah Grogot	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	326 Orang	5.792.250.000,00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Unit Kompetensi	Tanah Grogot	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi pada tahun n	329 Orang	6.792.250.000,00	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		**Presentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swastaa**	**85 %**	**213.000.000,00**	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**		**Presentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swastaa**	**85 %**	**213.000.000,00**	**Prioritas Pendukung I**
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Semua Kecamatan	Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	8 Lembaga	213.000.000,00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Semua Kecamatan	Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	8 Lembaga	213.000.000,00	Prioritas Pendukung I

Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	**Semua Kecamatan**	**Presentase Pendaftaran dan Rekomendasi LPK**	**80**	**%**	**24.801.473,00**	**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**Semua Kecamatan**	**Presentase Pendaftaran dan Rekomendasi LPK**	**85**	**%**	**24.801.473,00**	**Prioritas Pendukung I**
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Semua Kecamatan	Jumlah SDM yang menangani perizinan LPTKS	1	Perijinan	24.801.473,00	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Semua Kecamatan	Jumlah SDM yang menangani perizinan LPTKS	1	Perijinan	24.801.473,00	Prioritas Pendukung I
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**Semua Kecamatan**	**Presentase Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**70**	**%**	**40.303.970,00**	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Semua Kecamatan**	**Presentase Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**70**	**%**	**40.303.970,00**	**Prioritas Pendukung I**
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Semua Kecamatan	Jumlah perusahaan kecil yang melaksanakan konsultasi produktivitas	5	Perusahaan	40.303.970,00	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Semua Kecamatan	Jumlah perusahaan kecil yang melaksanakan konsultasi produktivitas	5	Perusahaan	40.303.970,00	Prioritas Pendukung I
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah	**Semua Kecamatan**	**Presentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah kab/Kota**	**100**	**%**	**122.243.105,00**	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah**	**Semua Kecamatan**	**Presentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah kab/Kota**	**80**	**%**	**122.243.105,00**	**Prioritas Pendukung I**

Kabupaten/Kota						**Kabupaten/Kot a**						
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Semua Kecamatan	Jumlah Pengukuran Produktivitas Tingkat daerah Kab/Kota	5	Dokumen	122.243.105,00	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Semua Kecamatan	Jumlah pengukuran produktivitas tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5	Dokumen	122.243.105,00	Prioritas Pendukung I

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Semua Kecamatan**	**Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan**	**30 %**	**1.133.210.322,00**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Semua Kecamatan**	**Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan**	**30 %**	**1.583.210.322**	**Prioritas Pendukung I**
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Semua Kecamatan**	**Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota**	**27 %**	**812.835.955,00**	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Semua Kecamatan**	**Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota**	**27 %**	**1.262.835.955**	**Prioritas Pendukung I**
Pelayanan antar Kerja	**Semua Kecamatan**	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	500 Orang	39.857.080,00	Pelayanan antar Kerja		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	500 Orang	39.857.080	Prioritas Pendukung II
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	**Semua Kecamatan**	Jumlah pencari kerja yang mengikuti Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	120 Orang	38.567.660,00	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Muara Samu	Jumlah pencari kerja yang mengikuti Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	120 Orang	38.567.660	Prioritas Pendukung II
Perluasan Kesempatan Kerja	**Semua Kecamatan**	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan keterampilan	60 Orang	484.644.810,00	Perluasan Kesempatan Kerja	Batu Kajang	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan keterampilan	60 Orang	484.644.810	Prioritas Pendukung II
Penyelenggara an Unit layanan Disabilitas	**Semua Kecamatan**	Jumlah Tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan	1 Orang	249.766.405,00	Penyelenggara an Unit layanan Disabilitas	**Semua Kecamatan**	Jumlah Tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan	30 Orang	699.766.405	
ketenagakerjaan		fasilitaslayanan ULD		ketenagakerjaa n		fasilitaslayanan ULD	ketenagakerjaan		fasilitaslayanan ULD	

Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a	**Semua Kecamatan**	**Persentase LPTKS yang memiliki ijin sesuai dengan regulasi yang berlaku**	**34 %**	**12.450.940,00**	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a**	**Semua Kecamatan**	**Persentase LPTKS yang memiliki ijin sesuai dengan regulasi yang berlaku**	**34 %**	**12.450.940**	**Prioritas Pendukung II**
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	**Semua Kecamatan**	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	10 LPTKS	12.450.940,00	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Desa Riwang, Tanjung Harapan	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	10 LPTKS	12.450.940	Prioritas Pendukung II
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Semua Kecamatan**	**Presentase Informasi Lowongan Kerja**	**100 %**	**307.923.427,00**	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Batu Engau**	**Presentase Informasi Lowongan Kerja**	**100 %**	**307.923.427**	**Prioritas Pendukung II**
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	**Semua Kecamatan**	Terlaksanaya pemeliharaan dan operasional aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	3 Dokumen	49.928.800,00	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Semua Kecamatan	Terlaksanaya pemeliharaan dan operasional aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	3 Dokumen	49.928.800	Prioritas Pendukung II
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	**Semua Kecamatan**	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	1500 Orang	257.994.627,00	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Batu Engau	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	1500 Orang	257.994.627	Prioritas Pendukung II
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Muara Kuaro**	**PERSENTASE TINGKAT PENYELESAIAN PERSELISIHAN TENAGA KERJA**	**75 %**	**11.263.423.809**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Muara Kuaro**	**PERSENTASE TINGKAT PENYELESAIAN PERSELISIHAN TENAGA KERJA**	**75 %**	**11.317.873.809**	**Prioritas Pendukung II**

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a	**Semua Kecam atan**	**Persentase kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan**	**15 %**	**371.884.024,00**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a**	**Semua Kecamatan**	**Persentase kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan**	**15 %**	**376.834.024**	**Prioritas Penduk ung II**
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Semua Kecam atan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online	16 Perusahaan	38.019.809,00	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Semua Kecamatan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online	16 Perusahaan	42.969.809	Prioritas Penduku ng II
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Semua Kecam atan	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja sama	7 Perusahaan	27.955.201,00	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan		Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja sama	7 Perusahaan	27.955.201	Rutin
Penyelenggraa n pendataan dan informasi sarana	Tana Paser	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala	10 Laporan	305.909.014,00	Penyelenggraa n pendataan dan informasi sara hubungan	Tana Paser	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala	10 laporan	305.909.014	Rutin
hubungan indsustrial dan jaminan sosial ketenagakerjaa n serta pengupahan		upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan			indsustrial dan jaminan sosial ketenagakerjaa n serta pengupahan		upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan			

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kot a)	Tana Paser	**Persentase perselisihan HI dan mogok kerja yang terselesaikan**	**90 %**	**10.891.539.785,00**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kot a)**	Tana Paser	**Persentase perselisihan HI dan mogok kerja yang terselesaikan**	**90 %**	**10.941.039.785**	**Rutin**
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah Perselisihan yang Dicega yang terselesaikan	3 Perkara	66.422.053,00	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah Perselisihan yang Dicega yang terselesaikan	3 Perkara	66.422.053	Rutin
Penyelesaian Perselisihan Hubungan	Tana Paser	Jumlah Perkara Perselisihan Yang Terselesaikan	12 Perkara	24.197.473,00	Penyelesaian Perselisihan Hubungan	Tana Paser	Jumlah Perkara Perselisihan Yang Terselesaikan	12 Perkara	24.197.473	Rutin
Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					

Penyelenggara an Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Tana Paser	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	28	Asosiasi dengan serikat pekerja	99.478.138,00	Penyelenggara an Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Tana Paser	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	28 Asosiasi dengan serikat pekerja	99.478.138	Rutin
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1	Lembaga	140.556.423,00	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	140.556.423	Rutin
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Tana Paser	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	407 26	Orang	10.560.885.698,00	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Tana Paser	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	407 26 Orang	10.610.385.698	Rutin
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG TRANSMIGRA SI					**URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG TRANSMIGRA SI**				**1.274. 586.03 4 URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG TRANSMIGRA SI**		
PROGRAM PERENCANAA N KAWASAN TRANSMIGRA SI	**Tana Paser**	**CAKUPAN KAWASAN TRANSMIGRASI YANG SESUAI PERENCANAAN**	**100**	**%**	**91.418.110,00**	**PROGRAM PERENCANAA N KAWASAN TRANSMIGRA SI**	**Tana Paser**	**CAKUPAN KAWASAN TRANSMIGRASI YANG SESUAI PERENCANAAN**	**100 %**	**348.918.110**	**Rutin**

Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	**Tana Paser**	**Persentase ketersediaan lahan kawasan transmigrasi**	**35**	**%**	**91.418.110,00**	**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	**Tana Paser**	**Persentase ketersediaan lahan kawasan transmigrasi**	**35**	**%**	**348.918.110**	**Rutin**
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Tana Paser	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang nisa dibangun dan dikerja samakan dengan daerah lain	1	Dokumen	48.349.250,00	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Tana Paser	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang nisa dibangun dan dikerja samakan dengan daerah lain	1	Dokumen	98.349.250	Rutin
Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Tana Paser	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan transmigrasi	1	Kawasan Transmigrasi	43.068.860,00	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Tana Paser	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan transmigrasi	1	Kawasan Transmigrasi	250.568.860	Rutin
PROGRAM PEMBANGUN AN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Tana Paser**	**PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH KK TRANSMIGRAN**	**90**	**%**	**128.503.770**	**PROGRAM PEMBANGUN AN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Tana Paser**	**PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH KK TRANSMIGRAN**	**80**	**%**	228.503.770	**Rutin**

Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tana Paser	**Persentase pertumbuhan penduduk pada kawasan transmigrasi baru**	80	%	128.503.770	**Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Tana Paser	**Persentase pertumbuhan penduduk pada kawasan transmigrasi baru**	80	%	**228.503.770**	Rutin
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang)	2	Laporan	56.453.770,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang)	2	Laporan	156.453.770	Rutin

Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Tana Paser	Jumlah lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi	1 Dokumen	72.050.000,00	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Tana Paser	Jumlah lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi	1 Dokumen	72.050.000	Rutin
PROGRAM PENGEMBAN GAN KAWASAN TRANSMIGRA SI	**Tana Paser**	**Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi**	**100 %**	**238.504.514,00**	**PROGRAM PENGEMBAN GAN KAWASAN TRANSMIGRA SI**	**Tana Paser**	**Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi**	**100 %**	**388.504.514**	**Rutin**
Pengembanga n Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	**Tana Paser**	**Persentase layanan dasar yang dapat di akses warga trans baru**	**90 %**	**238.504.514,00**	**Pengembanga n Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian**	**Tana Paser**	**Persentase layanan dasar yang dapat di akses warga trans baru**	**90 %**	**388.504.514**	**Rutin**
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Tana Paser	Jumlah kepala keluarga transmigrasi yang dibina	30 KK	138.504.589,00	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Tana Paser	Jumlah kepala keluarga transmigrasi yang dibina	30 KK	188.504.589	Rutin
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Tana Paser	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial,Ekonomi,K elembagaan	1 Satuan pemukiman	99.999.925,00	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Tana Paser	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial,Ekonomi,K elembagaan	1 Satuan pemukiman	199.999.925	Rutin

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada perubahan RKPD 2025 tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Paser.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISNAKERTRANS

3.1. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser pada Perubahan Renja Tahun Anggaran 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

TABEL 3.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2025

Pagu Sebelum Perubahan						Pagu Setelah Efisiensi						Pagu Rancangan Perubahan						
Program/Kegiatan/SubKeg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian		Pagu Indkatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian		Pagu Indkatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian		Pagu Indkatif	Bertambah/Berkurang
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENAGAKERJAAN					**37,198,580,814.00**						**34,225,715,968.00**						**43,085,099,033.00**	8,859,383,565.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**76**	**Persen**	***12,331,959,320.00***	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota***	**Tana Paser**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**76**	**Persen**	***11,891,625,523.00***	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota***	**Tana Paser**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**76**	**Persen**	***14,635,980,744.00***	2,744,355,721.00
Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Presentase Capaian Sasaran strategis Disnakertrans**	**92**	**persen**	***274,510,000.00***	***Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**Tana Paser**	**Presentase Capaian Sasaran strategis Disnakertrans**	**92**	**persen**	***195,380,000.00***	***Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**Tana Paser**	**Presentase Capaian Sasaran strategis Disnakertrans**	**92**	**persen**	***288,100,500.00***	92,721,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	9	Dokumen	206,449,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tana Paser	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	9	Dokumen	152,812,944.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tana Paser	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	10	Dokumen	245,533,944.00	92,721,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	20,470,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	2,271,556.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	2,271,556.00	0.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	Laporan	47,591,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tana Paser	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	Laporan	40,295,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tana Paser	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	Laporan	40,295,000.00	0.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase pengeluaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**100**	**Persen**	***9,398,698,270.00***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**Tana Paser**	**Persentase pengeluaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**100**	**Persen**	***9,257,073,270.00***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**Tana Paser**	**Persentase pengeluaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**100**	**Persen**	11,064,845,506.00	1,807,772,236.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (34 Orang)	34	Bulan	8,945,768,270.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tana Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (34 Orang)	34	Bulan	8,945,768,270.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tana Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (34 Orang)	34	Bulan	10,611,915,506.00	1,666,147,236.00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	452,930,000.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	311,305,000.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	452,930,000.00	141,625,000.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**100**	**persen**	***976,292,570.00***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**Tana Paser**	**Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**100**	**persen**	***779,669,783.00***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**Tana Paser**	**Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**100**	**persen**	1,415,550,552.00	635,880,769.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11	Paket	501,750,700.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tana Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11	Paket	500,452,464.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tana Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	Paket	976,333,233.00	475,880,769.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	Paket	192,174,050.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tana Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	Paket	133,101,989.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tana Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	Paket	193,101,989.00	60,000,000.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	71,959,820.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tana Paser	Tersedianya Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	40,911,330.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tana Paser	Tersedianya Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	40,911,330.00	0.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34	Laporan	210,408,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34	Laporan	105,204,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	205,204,000.00	100,000,000.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Presentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**persen**	***1,258,006,960.00***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Tana Paser**	**Presentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**persen**	***1,257,111,209.00***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Tana Paser**	**Presentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**persen**	1,465,092,925.00	207,981,716.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	30,848,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	30,774,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	30,774,000.00	0.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	51,706,920.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	51,706,920.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	51,706,920.00	0.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14	Laporan	1,175,452,040.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14	Laporan	1,174,630,289.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14	Laporan	1,382,612,005.00	207,981,716.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		**Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah**	**100**	**pesen**	***424,451,520.00***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan***	**Tana Paser**	**Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah**	**100**	**pesen**	***402,391,261.00***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan***	**Tana Paser**	**Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah**	**100**	**pesen**	402,391,261.00	0.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dipelihara dibayarkan Pajak dan Perizinannnya	8	unit	102,393,320.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tana Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dipelihara dibayarkan Pajak dan Perizinannnya	8	unit	83,290,660.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tana Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dipelihara dibayarkan Pajak dan Perizinannnya	8	unit	83,290,660.00	0.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	Unit	74,820,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tana Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	Unit	74,695,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tana Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	Unit	74,695,000.00	0.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	247,238,200.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tana Paser	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	244,405,601.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tana Paser	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	244,405,601.00	0.00
Program Perencanaan Tenaga Kerja		**Capaian Program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya**	**100**	**persen**	**212,660,300.00**	**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	**Tana Paser**	**Capaian Program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya**	**100**	**persen**	**157,430,150.00**	**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	**Tana Paser**	**Capaian Program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya**	**100**	**persen**	**157,430,150.00**	0.00
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		**Persentase dokumen ketenagakerjaan yang tersusun**	**75**	**persen**	212,660,300.00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	**Tana Paser**	**Persentase dokumen ketenagakerjaan yang tersusun**	**75**	**persen**	157,430,150.00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	**Tana Paser**	**Persentase dokumen ketenagakerjaan yang tersusun**	**75**	**persen**	157,430,150.00	0.00
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro	20	Orang	212,660,300.00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Tana Paser	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro	20	Orang	157,430,150.00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Tana Paser	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro	20	Orang	157,430,150.00	0.00

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		**Presentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	**85**	**persen**	**10,098,172,610.00**	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Tana Paser**	**Presentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	**85**	**persen**	**9,321,599,770.00**	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Tana Paser**	**Presentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	**85**	**persen**	**14,484,607,614.00**	5,163,007,844.00
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		**Presentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan unit kompetensi**	**100**	**persen**	***9,398,569,664.00***	***Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi***	**Tana Paser**	**Presentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan unit kompetensi**	**100**	**persen**	***8,921,251,222.00***	***Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi***	**Tana Paser**	**Presentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan unit kompetensi**	**100**	**persen**	14,084,259,066.00	5,163,007,844.00
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	80	orang	803,026,664.00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Tana Paser	Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	80	orang	654,294,347.00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Tana Paser	Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	96	orang	886,948,391.00	232,654,044.00
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1	Unit	2,495,543,000.00	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1	Unit	2,474,706,875.00	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	6	Unit	4,055,060,675.00	1,580,353,800.00
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Unit Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi pada tahun n	329	orang	6,100,000,000.00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Unit Kompetensi	Tana Paser	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi pada tahun n	329	orang	5,792,250,000.00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Unit Kompetensi	Tana Paser	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi pada tahun n	525	orang	9,142,250,000.00	3,350,000,000.00
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		**Presentase pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta**	**85**	**persen**	***350,000,000.00***	***Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta***	**Tana Paser**	**Presentase pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta**	**85**	**persen**	***213,000,000.00***	***Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta***	**Tana Paser**	**Presentase pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta**	**85**	**persen**	213,000,000.00	0.00
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta	8	lembaga	350,000,000.00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Tana Paser	Jumlah Pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta	8	lembaga	213,000,000.00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Tana Paser	Jumlah Pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta	8	lembaga	213,000,000.00	0.00
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		**Presentase pendaftarandan rekomendasi LPK**	**85**	**persen**	***49,602,946.00***	***Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja***	**Tana Paser**	**Presentase pendaftarandan rekomendasi LPK**	**85**	**persen**	***24,801,473.00***	***Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja***	**Tana Paser**	**Presentase pendaftarandan rekomendasi LPK**	**85**	**persen**	24,801,473.00	0.00
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi		Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	1	Perizinan	49,602,946.00	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Tana Paser	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	1	Perizinan	24,801,473.00	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Tana Paser	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	1	Perizinan	24,801,473.00	0.00
Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil		**Presentase Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil**	**70**	**persen**	***80,000,000.00***	***Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil***	**Tana Paser**	**Presentase Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil**	**70**	**persen**	***40,303,970.00***	***Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil***	**Tana Paser**	**Presentase Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil**	**70**	**persen**	40,303,970.00	0.00
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan kecil yang melaksanakan konsultasi produktifitas	5	perusahaan	80,000,000.00	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Tana Paser	Jumlah perusahaan kecil yang melaksanakan konsultasi produktifitas	5	perusahaan	40,303,970.00	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Tana Paser	Jumlah perusahaan kecil yang melaksanakan konsultasi produktifitas	5	perusahaan	40,303,970.00	0.00
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Presentase Pengukuran Produktivitas Daerah Kab/Kota**	**100**	**persen**	***220,000,000.00***	***Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	**Tana Paser**	**Presentase Pengukuran Produktivitas Daerah Kab/Kota**	**100**	**persen**	***122,243,105.00***	***Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	**Tana Paser**	**Presentase Pengukuran Produktivitas Daerah Kab/Kota**	**100**	**persen**	122,243,105.00	0.00
Penggukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	5	Dokumen	220,000,000.00	Penggukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	5	Dokumen	122,243,105.00	Penggukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	5	Dokumen	122,243,105.00	0.00
Program Penemptan Tenaga Kerja		**Presentase besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan**	**30**	**persen**	**1,652,887,834.00**	**Program Penemptan Tenaga Kerja**	**Tana Paser**	**Presentase besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan**	**30**	**persen**	**1,133,210,322.00**	**Program Penemptan Tenaga Kerja**	**Tana Paser**	**Presentase besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan**	**30**	**persen**	**1,583,210,322.00**	450,000,000.00
Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota**	**27**	**Persen**	**1,119,339,100.00**	**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Tana Paser**	**Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota**	**27**	**Persen**	**812,835,955.00**	**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Tana Paser**	**Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota**	**27**	**Persen**	1,262,835,955.00	450,000,000.00
Pelayanan antar Kerja		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	500	orang	79,714,160.00	Pelayanan antar Kerja	Tana Paser	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	500	orang	39,857,080.00	Pelayanan antar Kerja	Tana Paser	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	500	orang	39,857,080.00	0.00
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari kerja yang mengikuti penyuluhan dan bimbingan jabatan	120	Orang	74,435,320.00	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Tana Paser	Jumlah Pencari kerja yang mengikuti penyuluhan dan bimbingan jabatan	120	Orang	38,567,660.00	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Tana Paser	Jumlah Pencari kerja yang mengikuti penyuluhan dan bimbingan jabatan	120	Orang	38,567,660.00	0.00
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	1	Orang	343,000,000.00	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Tana Paser	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	1	Orang	249,766,405.00	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Tana Paser	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	30	Orang	699,766,405.00	450,000,000.00
Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	60	Orang	622,189,620.00	Perluasan Kesempatan Kerja	Tana Paser	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	60	Orang	484,644,810.00	Perluasan Kesempatan Kerja	Tana Paser	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	60	Orang	484,644,810.00	0.00
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase LPTKS yang memiliki ijin sesuai dengan regulasi yang berlaku**	**34**	**Persen**	**24,901,880.00**	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tana Paser**	**Persentase LPTKS yang memiliki ijin sesuai dengan regulasi yang berlaku**	**34**	**Persen**	**12,450,940.00**	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tana Paser**	**Persentase LPTKS yang memiliki ijin sesuai dengan regulasi yang berlaku**	**34**	**Persen**	12,450,940.00	0.00
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS		Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	10	LPTKS	24,901,880.00	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Tana Paser	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	10	LPTKS	12,450,940.00	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Tana Paser	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	10	LPTKS	12,450,940.00	0.00
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		**Persentase informasi lowongan kerja**	**100**	**persen**	**508,646,854.00**	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Tana Paser**	**Persentase informasi lowongan kerja**	**100**	**persen**	**307,923,427.00**	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Tana Paser**	**Persentase informasi lowongan kerja**	**100**	**persen**	307,923,427.00	0.00
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	3	Dokumen	99,857,600.00	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Tana Paser	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	3	Dokumen	49,928,800.00	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Tana Paser	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	3	Dokumen	49,928,800.00	0.00
Pelayanan dan Penyediaan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	1500	Orang	408,789,254.00	Pelayanan dan Penyediaan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Tana Paser	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	1500	Orang	257,994,627.00	Pelayanan dan Penyediaan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Tana Paser	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	1500	Orang	257,994,627.00	0.00
Program Hubungan Industrial		**Presentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja**	**75**	**persen**	**12,042,057,290.00**	**Program Hubungan Industrial**	**Tana Paser**	**Presentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja**	**75**	**persen**	**11,263,423,809.00**	**Program Hubungan Industrial**	**Tana Paser**	**Presentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja**	**75**	**persen**	**11,263,423,809.00**	0.00
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan**	**15**	**persen**	**648,411,201.00**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tana Paser**	**Persentase kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan**	**15**	**persen**	**371,884,024.00**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tana Paser**	**Persentase kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan**	**15**	**persen**	371,884,024.00	0.00
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online	16	perusahaan	75,939,500.00	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Tana Paser	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online	16	perusahaan	38,019,809.00	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Tana Paser	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online	16	perusahaan	38,019,809.00	0.00
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan		Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja sama	7	perusahaan	55,910,000.00	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Tana Paser	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja sama	7	perusahaan	27,955,201.00	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Tana Paser	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja sama	7	perusahaan	27,955,201.00	0.00
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	10	Laporan	516,561,701.00	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Tana Paser	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	10	Laporan	305,909,014.00	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Tana Paser	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	10	Laporan	305,909,014.00	0.00
Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase perselisihan HI dan mogok kerja yang terselesaikan**	**90**	**Persen**	**11,393,646,089.00**	**Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Tana Paser**	**Persentase perselisihan HI dan mogok kerja yang terselesaikan**	**90**	**Persen**	**10,891,539,785.00**	**Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Tana Paser**	**Persentase perselisihan HI dan mogok kerja yang terselesaikan**	**90**	**Persen**	**10,891,539,785.00**	0.00
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	3	Perkara	115,444,106.00	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	3	Perkara	66,422,053.00	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	3	Perkara	66,422,053.00	0.00
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan Yang Terselesaikan	12	Perkara	48,390,473.00	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah Perkara Perselisihan Yang Terselesaikan	12	Perkara	24,197,473.00	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah Perkara Perselisihan Yang Terselesaikan	12	Perkara	24,197,473.00	0.00
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	28	Asosiasi dengan serikat pekerja	181,556,150.00	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Tana Paser	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	28	Asosiasi dengan serikat pekerja	99,478,138.00	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Tana Paser	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	28	Asosiasi dengan serikat pekerja	99,478,138.00	0.00
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1	Lembaga	263,712,500.00	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1	Lembaga	140,556,423.00	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1	Lembaga	140,556,423.00	0.00
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (32268 Orang)	47026	orang/bulan	10,784,542,860.00	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Tana Paser	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (32268 Orang)	47026	orang/bulan	10,560,885,698.00	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Tana Paser	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (32268 Orang)	47026	orang/bulan	10,560,885,698.00	0.00

Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi		**Cakupan Kawasan Transmigrasi yang sesuai perencanaan**	**100**	**persen**	**182,836,220.00**	**Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi**	**Kladen**	**Cakupan Kawasan Transmigrasi yang sesuai perencanaan**	**100**	**persen**	**91,418,110.00**	**Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi**	**Kladen**	**Cakupan Kawasan Transmigrasi yang sesuai perencanaan**	**100**	**persen**	**343,438,110.00**	252,020,000.00
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		**Persentase ketersediaan lahan kawasan transmigrasi**	**35**	**Persen**	**182,836,220.00**	**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	**Kladen**	**Persentase ketersediaan lahan kawasan transmigrasi**	**35**	**Persen**	**91,418,110.00**	**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	**Kladen**	**Persentase ketersediaan lahan kawasan transmigrasi**	**35**	**Persen**	**343,438,110.00**	252,020,000.00
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang nisa dibangun dan dikerja samakan dengan daerah lain	1	Dokumen	96,698,500.00	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Kladen	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang nisa dibangun dan dikerja samakan dengan daerah lain	1	Dokumen	48,349,250.00	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Kladen	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang nisa dibangun dan dikerja samakan dengan daerah lain	1	Dokumen	98,349,250.00	50,000,000.00
Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan		Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan transmigrasi	1	Kawsan Transmigrasi	86,137,720.00	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Kladen	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan transmigrasi	1	Kawsan Transmigrasi	43,068,860.00	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Desa suliliran	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan transmigrasi	1	Kawsan Transmigrasi (300 persil)	245,088,860.00	202,020,000.00
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		**Presentase Peningkatan Jumlah KK transmigran sejahtera yang ditempatkan**	**90**	**persen**	**257,007,540.00**	**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Kladen**	**Presentase Peningkatan Jumlah KK transmigran sejahtera yang ditempatkan**	**90**	**persen**	**128,503,770.00**	**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Kladen**	**Presentase Peningkatan Jumlah KK transmigran sejahtera yang ditempatkan**	**90**	**persen**	**228,503,770.00**	100,000,000.00
Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase pertumbuhan penduduk pada kawasan transmigrasi baru**	**80**	**Persen**	**257,007,540.00**	**Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kladen**	**Persentase pertumbuhan penduduk pada kawasan transmigrasi baru**	**80**	**Persen**	**128,503,770.00**	**Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kladen**	**Persentase pertumbuhan penduduk pada kawasan transmigrasi baru**	**80**	**Persen**	**228,503,770.00**	100,000,000.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang)	2	Laporan	112,907,540.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kladen	Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang)	2	Laporan	56,453,770.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kladen	Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang)	2	Laporan	156,453,770.00	100,000,000.00
Penyiapan Lingkungan Fisik,Sosial,Ekonomi, bagi Penduduk Setempat dan Transmigran		Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni,Layak Usaha,dan Layak Berkembang)	1	Dokumen	144,100,000.00	Penyiapan Lingkungan Fisik,Sosial,Ekonomi, bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Kladen	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni,Layak Usaha,dan Layak Berkembang)	1	Dokumen	72,050,000.00	Penyiapan Lingkungan Fisik,Sosial,Ekonomi, bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Kladen	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni,Layak Usaha,dan Layak Berkembang)	1	Dokumen	72,050,000.00	0.00
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi		**Jumlah Kawasan perkotaan baru yang berkembang dgn memiliki sarana dan prasarana yang memadai**	**100**	**Kawasan**	**420,999,700.00**	**Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**	**Kladen**	**Jumlah Kawasan perkotaan baru yang berkembang dgn memiliki sarana dan prasarana yang memadai**	**100**	**Kawasan**	**238,504,514.00**	**Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**	**Kladen**	**Jumlah Kawasan perkotaan baru yang berkembang dgn memiliki sarana dan prasarana yang memadai**	**100**	**Kawasan**	**388,504,514.00**	150,000,000.00
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian		**Persentase layanan dasar yang dapat di akses warga trans baru**	**90**	**Persen**	**420,999,700.00**	**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian**	**Kladen**	**Persentase layanan dasar yang dapat di akses warga trans baru**	**90**	**Persen**	**238,504,514.00**	**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian**	**Kladen**	**Persentase layanan dasar yang dapat di akses warga trans baru**	**90**	**Persen**	**388,504,514.00**	150,000,000.00
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian satuan Permukiman		Jumlah kepala keluarga transmigrasi yang dibina	30	KK	220,999,850.00	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian satuan Permukiman	Kladen	Jumlah kepala keluarga transmigrasi yang dibina	30	KK	138,504,589.00	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian satuan Permukiman	Kladen	Jumlah kepala keluarga transmigrasi yang dibina	30	KK	188,504,589.00	50,000,000.00
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian		Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial,Ekonomi,Kelembagaan	1	Satuan Pemukiman	199,999,850.00	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian	Kladen	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial,Ekonomi,Kelembagaan	1	Satuan Pemukiman	99,999,925.00	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian	Kladen	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial,Ekonomi,Kelembagaan	1	Satuan Pemukiman	199,999,925.00	100,000,000.00

Dari table 3.1 diatas dapat dilihat bahwa program yang menjadi prioritas Bupati adalah :

1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
   Kegiatan : Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi
   Subkeg : - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
   - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
   - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Unit Kompetensi

2. Program Penempatan Tenaga Kerja
   Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
   Subkeg : - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

3. Program Hubunga Industrial
   Kegiatan : Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
   Subkeg : - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Program diatas dilakukakan perubahan target dan anggaran dalam perubahan rancangan akhir rencana Kerja tahun 2025.

BAB IV
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Disnakertrans Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai nilai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Reviu Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabuputen Paser mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik- baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Disnakertrans.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa KM.5 Gedung E Lantai 2 Kav. B Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kode Pos 76211
Website : https://disnakertrans.paserkab.go.id
E-mail:disnakertrans31@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PASER

NOMOR : 100.3.3/KEP.58/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PASER

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2024 perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja tersebut;
b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026- ;
13. Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Penyusuna Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini adalah menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser;

KETIGA : Tim penyusun dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan

dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 10 April 2025

Kepala Dinas

Rizky Noviar,S. STP

NIP. 197905071998101001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Paser di Tana Paser (sebagai laporan)
2. Kepala BPKAD Kabupaten Paser di Tana Paser
3. Inspektur Inpektorat Kabupaten Paser di Tana Paser
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMGRASI KABUPATEN PASER
NOMOR : 100.3.3/KEP.58/2025
TANGGAL : 10 April 2025

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASI
KABUPATEN PASER

Ketua	:	Kepala Dinas
Wakil Ketua	:	Sekretaris
Sekretaris	:	Perencana Ahli Muda
Anggota	:	1. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
		2. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja
		3. Kepala Bidang Hubungan Industrial
		4. Kepala Bidang Transmigrasi
		5. Kepala UPTD Balai Latihan Kerja
Sekretariat	:	1. Mega Suryathni
		2. Muhammad Ismail, S.Kom

Ditetapkan : Tana Paser
Pada tanggal : 10 April 2025

Kepala Dinas
NIP. 197905071998101001

Rizky Noviar,S. STP

PERUBAHAN RENCANA KERJA

2025

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KABUPATEN PASER

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun 2025 ini merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana

Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser sebagai unit kerja yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawabnya diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan tugas yang demikian penting, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser harus memiliki dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki maka disusunlah Rancangan Akhir Akhir Perubahan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**
Daftar Isi ..... **ii**
Daftar Tabel ..... **iii**

Bab I Pendahuluan **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2025 ..... **6**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian RENSTRA PD 6
2.2 Faktor Pendorong Dan Penghambat dalam Pelaksanaan Hasil Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun 2025 16
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17
2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Perangkat Daerah 24
2.5 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser. 24
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 26
2.7 Review terhadap Rancangan Akhir Akhir RKPD 28

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan **41**
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 46

Bab IV Rancangan Akhir Akhir Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Paser **48**

Bab V Penutup **60**

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Evaluasi Renja Tahun 2025 Triwulan I Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7
Tabel II.2	Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025	18
Tabel II.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser	22
Tabel II.4	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser	25
Tabel II.5	Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser	27
Tabel II.6	Review terhadap Rancangan Akhir Akhir RKPD Tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser	30
Tabel III.1	Matriks Kontribusi Daerah Terhadap Astra Cita	44
Tabel III.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	45
Tabel III.3	Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	46
Tabel IV.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser	49

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Akhir Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Akhir RKPD.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser sebagai unit kerja yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perumahan, bidang kawasan permukiman dan bidang pertanahan menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawabnya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berkaitan erat dalam mensukseskan misi kedua yakni meningkatkan tata kelola permerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan, serta misi kelima yaitu Pembangunan Kewilayahan Untuk Meningkatkan Pemerataan dan Keadilan Pembangunan. Dengan tugas yang demikian penting, maka

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser harus didukung aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser, maka disusunlah Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026;
10. Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Paser.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025 Kabupaten Paser.

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja tahun 2025 bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sesuai dengan Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja 2025, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SKPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

2 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian RENSTRA PD
2.2 Faktor Pendorong Dan Penghambat dalam Pelaksanaan Hasil Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun 2025
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.5. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
2.7. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

BAB IV RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD triwulan I ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian RENSTRA PD

Evaluasi Renja Triwulan I dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025 dan capaian Renstra Tahun 2025, rata-rata pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025 belum menunjukkan kemajuan yang signifikan karena kegiatan fisik baru akan dilaksanakan pada akhir Juni dan awal Bulan Juli, menyesuaikan dengan tahapan perencanaan dan tahap lelang pekerjaan.

Bertambahnya jumlah pekerjaan juga terjadi pada pergeseran APBD karena masuknya bantuan keuangan provinsi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Adapun Hasil evaluasi kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan triwulan 1 Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana tabel II.1 berikut.

Tabel II.1

EVALUASI RENJA 2025 TRIWULAN II

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Nomor	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Dan Pagu 2024 Renja		Target Kinerja Dan Pagu 2025 Renja		Realisasi 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Triwulan I		Triwulan II						
1	2	3	4		5		6		11		7		8		9
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan			377.017.149.981,00		331.929.057.576,00	0	2.897.526.208,00	0	9.179.670.977,00		12.077.197.185,00		3,64	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	66,88 Persen	3.066.005.460,00	86,36 Persen	2.423.364.131,00	0	43.200.000,00	0	57.325.556,00	0	100.525.556,00	0,00	4,15	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah	1 dokumen	340.028.260,00	1 dokumen	317.125.000,00	0	14.400.000,00	0	17.584.686,00	0	31.984.686,00	0,00	10,09	
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang berpotensi terkena relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			1 Dokumen	112.500.000,00									
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			1 Dokumen	122.500.000,00	0	-	0	15.314.686,00	0	15.314.686,00	0	12,50	

	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1	Dokumen	340.028.260,00	1	Dokumen	82.125.000,00	0	14.400.000,00	0	2.270.000,00	0	16.670.000,00	0	20,30	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Tertangani	43	Unit	2.665.977.200,00	31	Unit Rumah	2.025.321.631,00	0	28.800.000,00	0	25.087.270,00	0	53.887.270,00	0,00	2,66	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	18	Unit	834.462.400,00	16	Unit Rumah	668.953.878,00	0	-	0	25.087.270,00	0	25.087.270,00	0	3,75	
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	25	unit	1.831.514.800,00	15	Unit Rumah	1.331.009.439,00	0	28.800.000,00	0	-	0	28.800.000,00	0	2,16	
	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota				1	Unit Rumah	25.358.314,00	0	-							
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Terkait Penyediaan, Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1	dokumen	60.000.000,00	1	dokumen	80.917.500,00	0	-	0	14.653.600,00	0	14.653.600,00	0,00	18,11	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1	Laporan	60.000.000,00	1	Laporan	80.917.500,00	0	-	0	14.653.600,00	0	14.653.600,00	0	18,11	

2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang tertangani	50	Persen	9.928.512.000,00	70	Persen	7.990.416.590,00	0	119.379.600,00	0	82.829.000,00	0,00	202.208.600,00	0,00	2,53	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokuman Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh yang disusun	1	dokumen	522.512.000,00	1	dokumen	353.195.000,00	0	-	0	675.000,00	0	675.000,00	0,00	0,19	
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh							0	-	0		0	-	0,00	0	
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1	dokumen	522.512.000,00	1	dokumen	353.195.000,00	0	-	0	675.000,00	0	675.000,00	0	0,19	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani	112,26	Hektar	9.406.000.000,00	157,16	Ha	7.637.221.590,00	0	119.379.600,00	0	82.154.000,00	0	201.533.600,00	0	2,64	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	72	Unit	2.310.000.000,00	59	Unit Rumah	2.046.375.795,00	0	12.484.800,00	0	32.154.000,00	0	44.638.800,00	0	2,18	
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	112,26	Ha	7.096.000.000,00	157,16	Ha	5.590.845.795,00	0	106.894.800,00	0	50.000.000,00	0	156.894.800,00	0	2,81	
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni	92,17	Persen	7.707.344.900,00	93,13	Persen	7.584.994.577,00	0	104.000.000,00	0	11.766.000,00	0	115.766.000,00	0,00	1,53	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tidak layak huni yang tertangani di Luar Kawasan Kumuh Perkotaan	49,93	Persen	7.707.344.900,00	8,26	Persen	7.584.994.577,00	0	104.000.000,00	0	11.766.000,00	0	115.766.000,00	0,00	1,53	

	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	244	Unit	7.707.344.900,00	205	Unit Rumah	7.584.994.577,00	0	104.000.000,00	0	11.766.000,00	0	115.766.000,00	0	1,53	
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	58,58	Persen	263.069.875.012,00	65,58	Persen	252.975.030.151,00	0	247.448.907,00	0	6.429.500.300,00	0	6.676.949.207,00	0,00	2,64	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan PSU di Lingkungan Perumahan	101000	meter	263.069.875.012,00	75705	meter	252.975.030.151,00	0	247.448.907,00	0	6.429.500.300,00	0	6.676.949.207,00	0,00	2,64	
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU yang disusun	1	dokumen	100.000.000,00				0	-			0	-	0	0,00	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	412	Lokasi	262.969.875.012,00	178	Lokasi	252.975.030.151,00	0	247.448.907,00		6.429.500.300,00	0	6.676.949.207,00	0	2,64	
5	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan	71,43	Persen	495.265.000,00	85,71	Persen	250.225.228,00	0	54.299.400,00	0	24.343.000,00	0	78.642.400,00	0,00	31,43	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Mediasi Sengketa Pertanahan yang tertangani	3	kasus	495.265.000,00	3	kasus	250.225.228,00	0	54.299.400,00	0	24.343.000,00	0	78.642.400,00	0,00	31,43	
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	101.393.000,00	1	Dokumen	40.000.000,00	0	13.443.600,00	0	-	0	13.443.600,00	0	33,61	

	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	berita acara	393.872.000,00	3	berita acara	210.225.228,00	0	40.855.800,00	0	24.343.000,00	0	65.198.800,00	0	31,01	
6	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	77,78	Persen	83.781.760.300,00	83,33	Persen	47.973.994.174,00	0	150.085.960,00	0	546.232.200,00		696.318.160,00	0,00	1,45	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Penyelesaian Ganti Rugi Dan Santunan Tanah	18	Lokasi	83.781.760.300,00	3	Lokasi	47.973.994.174,00	0	150.085.960,00	0	546.232.200,00	0	696.318.160,00	0,00	1,45	
	Penetapan Daftar Masyarakat penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1	dokumen	71.482.000,00	1	dokumen	59.700.000,00	0	1.797.460,00	0	19.790.000,00	0	21.587.460,00	0	36,16	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18	dokumen	83.710.278.300,00	8	dokumen	47.914.294.174,00	0	148.288.500,00	1	526.442.200,00	1	674.730.700,00	12,50	1,41	
7	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase proses penetapan tanah ulayat (2 lokasi)	80	Persen	163.364.000,00	100	Persen	47.100.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	
	Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat (2 lokasi)	1	Dokumen	163.364.000,00	1	Dokumen	47.100.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	163.364.000,00	1	Dokumen	47.100.000,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00	
	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota				0	-	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	
8	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penatagunaan tanah yang dilaksanakan	50	Persen	265.147.000,00	75	Persen	269.185.250,00	0	116.352.600,00	0	6.990.000,00	0	123.342.600,00	0,00	45,82	
	Penggunaan Tanah Hamparanya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan zona nilai tanah	2	Lokasi	265.147.000,00	1	Lokasi	269.185.250,00	0	116.352.600,00	0	6.990.000,00	0	123.342.600,00	0,00	45,82	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Laporan	83.993.000,00	1	Laporan	224.111.250,00	0	88.201.800,00	0	6.990.000,00	0	95.191.800,00	0	42,48	
	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	2	dokumen	181.154.000,00	2	dokumen	45.074.000,00	0	28.150.800,00	0	-	0	28.150.800,00	0	62,45	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	74	Persen	8.539.876.309,00	76	Persen	12.414.747.475,00	19	2.062.759.741,00	19	2.020.684.921,00	38	4.083.444.662,00	50,00	32,89	
		Persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik	85	Persen		90	Persen		22,5		22,5		45		50,00		

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun	100	Persen	196.080.885,00	100	Persen	93.621.195,00	25	20.752.600,00	25	20.223.487,00	50,00	40.976.087,00	50,00	20,90	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen	81.942.605,00	3	dokumen	43.693.433,00	1	4.300.000,00	1	15.282.366,00	2	19.582.366,00	66,67	44,82	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	dokumen	10.000.000,00	2	dokumen	5.000.000,00	1	-	0	1.350.000,00	1	1.350.000,00	50	27,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	dokumen	10.000.000,00	2	dokumen	5.000.000,00	1	-	0	1.489.493,00	1	1.489.493,00	50	29,79	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	7.172.440,00	1	Laporan	3.944.842,00	1	-	0	-	1	-	100	0,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	86.965.840,00	5	Laporan	35.982.920,00	2	16.452.600,00	0	2.101.628,00	2	18.554.228,00	40	51,56	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang terlaksana	100	Persen	7.309.099.171,00	100	Persen	11.457.055.560,00	25	1.900.068.111,00	25	1.932.746.863,00	50,00	3.832.814.974,00	50	33,45	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40	Orang/Bulan	6.574.099.171,00	40	Orang/Bulan	10.765.011.412,00	10	1.734.587.464,00	10	1.854.204.863,00	20	3.588.792.327,00	50,00	33,34	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	735.000.000,00	12	Dokumen	692.044.148,00	3	165.480.647,00	3	78.542.000,00	6	244.022.647,00	50	35,26	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	Persen	832.331.253,00	100	Persen	678.353.845,00	25	132.822.054,00	25	61.124.441,00	50	193.946.495,00	50	28,59	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	jenis	4.020.500,00	11	Paket	4.221.525,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	jenis	231.994.453,00	15	Paket	366.148.197,00	2	26.590.617,00	2	2.506.116,00	4	29.096.733,00	26,67	7,95	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35	jenis	155.000.000,00	38	Paket	138.189.986,00	7	28.521.856,00	8	12.900.795,00	15	41.422.651,00	39,47	29,98	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	buku	18.256.700,00	60	Paket	9.584.767,00	10	1.981.701,00	20	3.249.572,00	30	5.231.273,00	50,00	54,58	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	531	eksemplar	4.593.600,00	550	Dokumen	10.000.000,00	100	-	150	4.125.000,00	250	4.125.000,00	47,08	41,25	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	kali	418.466.000,00	45	Laporan	150.209.370,00	15	75.727.880,00	25	38.342.958,00	40	114.070.838,00	88,89	75,94	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang administrasi perkantoran yang terlayani	100	Persen	46.450.000,00	100	Persen	76.522.500,00	25	3.036.976,00	25	1.448.130,00	50	4.485.106,00	50,00	5,86	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.450.000,00	12	Laporan	1.522.500,00	3	1.520.000,00	3	-	6	1.520.000,00	50	99,84	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	45.000.000,00	12	Laporan	75.000.000,00	3	1.516.976,00	3	1.448.130,00	6	2.965.106,00	50	3,95	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	100	Persen	155.915.000,00	100	Persen	109.194.375,00	16,67	6.080.000,00	16,67	5.142.000,00	33,33	11.222.000,00	33,33	10,28	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	6	unit	144.200.000,00	6	unit	97.344.000,00	1	6.080.000,00	1	5.142.000,00	2	11.222.000,00	33,33	11,53	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	28	unit	11.715.000,00	31	unit	11.850.375,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00	

2.2. Faktor Pendorong Dan Penghambat dalam Pelaksanaan Hasil Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun 2025

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis Triwulan I Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 30% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Kabupaten Paser Periode Maret 2025 :

1. Kerjasama yang baik dalam melaksanakan pekerjaan, secara internal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta antar organisasi perangkat daerah
2. Dukungan dan partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan dan fisik kegiatan
3. Tenaga teknis yang cukup memadai dibantu konsultan perencana dan pengawas dalam pengendalian teknis dan perencanaan
4. Pagu dana tersedsia yang cukup memadai untuk mencapai indicator dan sasaran yang ingin dicapai
5. Adanya sumber anggaran lain seperti bantuan provinsi, CSR, BSPS Provinsi dan lain-lain, sehingga membantu meningkatkan tujuan dan indikator yang dicapai

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

a. Pembangunan sarana transportasi jalan yang meningkat seiring dengan bertambahnya beban, jumlah kendaraan serta populasi, sehingga jalan lingkungan, drainase yang harus diperbaiki juga bertambah.
b. Kasus penyelesaian sengketa tanah, mediasi, memerlukan waktu yang lama, pendekatan personal serta rapat koordinasi yang ulet.
c. Waktu yang dibutuhkan untuk tahapan pembuatan KAK, lelang,

perencanaan teknis, sehingga rata-rata pekerjaan fisik baru dapat dilaksanakan diakhir triwulan II atau awal triwulan III.

Adapun tindakan yang akan diambil untuk meminimalisir hambatan yang terjadi di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser ini diantara:

a. Mengusahakan anggaran yang cukup untuk pembangunan jalan lingkungan dan drainase, baik melalui dana APBD, APBDP, Bantuan Keuangan, sehingga kebutuhan akan infrastruktur perumahan dan pemukiman cukup memadai.
b. Rapat koordinasi dan kerjasama yang intens antar dinas teknis untuk menyelesaikan masalah/konflik pertanahan.
c. KAK pekerjaan dibuat segera diawal tahun perencanaan sehingga proses lelang dan pengerjaan fisik secara bertahap dapat dilanjutkan segera setelah proses perencanaan selesai.

2.3. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan tabel II.1, maka dapat diuraikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Keberhasilan kinerja SKPD dari persentase pencapaian rasio pelayanan yang dapat dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan.

Sesuai Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Paser dan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2025 – 2029 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Tahun 2025 – 2029. Gambaran

pelayanan SKPD secara jelas dapat dilihat dari tugas dan fungsi pokok yang dibebankan pada satu SKPD. Pelayanan umum di bidang Perumahan meliputi pembangunan rumah layak huni, rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pembangunan rumah korban bencana, gorong-gorong, drainase, untuk bidang kawasan permukiman meliputi penyiapan prasarana sarana dasar permukiman sedangkan untuk bidang pertanahan meliputi pengadaan tanah untuk sarana prasarana pemerintah dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan. Lebih detailnya mengenai gambaran pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dapat dilihat dari tabel II.2. program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2025 dan tabel II.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tabel II.2.
Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

				SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang berpotensi terkena relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
			Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun
			Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi
		Peningkatan Kualitas	Perbaikan Rumah Tidak Layak	Jumlah Rumah Tidak Layak

		Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Huni	Huni yang Diperbaiki
			Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian
6	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
7	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Daftar Masyarakat penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah

			Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota
8	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi pengakuan dasn pengukuhan Masyarakat hukum adat dalam 1 (satu) daerah Kabupaten Kota	Jumlah Perkada tentang pengukuhan Masyarakat hukum adat dalam 1(satu) Daerah Kabupaten Kota
9	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Penggunaan Tanah Hamparanya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1(satu) Kabupaten Kota
			Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya

Tabel II.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
1	Rasio Rumah Layak Huni Per KK		Rasio Rumah Layak Huni Per KK	0,78	0,79	0,80	0,81	0,82	0,92	0,94	0,81	0,82	
		Jumlah Rumah Korban Bencana yang ditangani		28	28	32	28	23	25	43	28	23	
2	Cakupan Kawasan Permukiman yang Memiliki Infrastruktur dalam Kondisi Baik		Persentase permukiman yang memiliki infrastruktur dalam kondisi baik	58,92 %	61,87 %	64,96 %	68,21 %	71,62 %	65,14 %	66,07 %	68,21 %	71,62 %	

3	Presentase Penyelesaian Kasus Pertanahan		Presentase Penyelesaian Kasus Pertanahan	41,46 %	56,10 %	68,29 %	85,37 %	100%	60%	65,85 %	85,37 %	100%	
4	Predikat Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP		Predikat Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	B	BB	A	A	A	BB	BB	A	A	

Renstra 2025-2029 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser memiliki 3 (tiga) tujuan utama dan 4 (empat) sasaran dan indikator sasaran, yakni:

1. Tujuan 1; Meningkatnya Kualitas dan Kepuasan atas Pelayanan dan Pelaksanaan Tugas dan Fuagsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dengan indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

   Sasaran1; Meningkatkan efektivitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah, dengan indikator Meningkatkan efektivitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan Nilai Evaluasi SAKIP
2. Tujuan 2; Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, dengan indikator Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan

   Sasaran 2; Meningkatnya kualitas perumahan rakyat, dengan inidkator Rasio Rumah Layak Huni Per KK

   Sasaran 3; Meningkatnya kualitas kawasan permukiman, dengan indikator Persentase permukiman yang memiliki infrastruktur dalam kondisi baik
3. Tujuan 3; Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan, dengan indikator indeks tertib administrasi pertanahan terjangkau dan berkelanjutan

   Sasaran 4; Meningkatnya adminsitrasi penyelengaraan pertanahan, dengan indikator Persentase lahan milik pemerintah daerah yang bersertifikat dan Persentase Penyelesaian Kasus Pertanahan.

2.4. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Berdasarkan hasil telaah kebijakan, dokumen terkait (RPJP Kabupaten, RPJM Kabupaten, dan RTRW Kabupaten Paser), dan hasil dari rangkaian FGD (Focus Group Discussion) baik internal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser maupun dengan SKPD terkait, maka terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan.

Identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut:

1. Rendahnya Kualitas Kawasan Permukiman
2. Rendahnya Kualitas Jalan Lingkungan Dan Drainase
3. Masih Adanya Kawasan Kumuh Perkotaan
4. Belum meratanya kualitas perumahan yang layak
5. Tingginya jumlah rumah tidak layak huni
6. Tingginya jumlah baclog perumahan
7. Banyaknya rumah korban bencana yang belum tertangani

2.5. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.

Adapun identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan digambarakan sesuai program pada tabel II.4. sebagai berikut:

Tabel II.4.
Identifikasi permasalahan Pelayanan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser

No	Program	Permasalahan	Faktor

		Pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Program Pengembangan Perumahan, dan Program Kawasan Permukiman	Usulan rehabilitasi rumah tidak layak huni warga kurang mampu yang terus bertambah setiap tahunnya	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan Rehabilitasi RTLH ini belum maksimal	Masih banyak pos pos anggaran lain diluar APBD untuk membantu rumah tidak layak huni masyarakat kurang mampu
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kondisi jalan lingkungan belum seluruhnya dalam kondisi baik.	Penggunaan sarana transportasi jalan yang meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan.	Partisipasi masyarakat desa dalam pemeliharaan jalan
		Belum optimalnya sosialisasi pemeliharaan jaringan drainase.	Trend kegiatan pembangunan di Kabupaten *Paser* yang cenderung meningkatkan *runoff*.	Partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase.
		Opini masyarakat bahwa drainase tanggung jawab pemerintah.	Kesadaran masyarakat terhadap fungsi drainase masih kurang.	Kemampuan tanah di Wilayah Paser untuk menyerap air cukup tinggi.
		Pemanfaatan saluran drainase untuk pembuangan limbah rumah tangga.	Penutupan drainase dengan tidak mengindahkan kaidah teknis sehingga mengakibatkan terganggunya saluran drainase.	Banyak sungai yang melintas di Wilayah Paser.

3	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Masih banyak penyelesaian pertahanan yang belum terselesaikan	Penyelesaian kasus sengketa pertanahan memerlukan waktu yang sangat lama	Adanya integrasi program dan kegiatan antar OPD terkait dan kerjasama dengan tim penilai (apraisal).

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kabupaten Paser merupakan hasil dari Musrenbang tingkat desa yang merupakan forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah di tingkat dusun. Hasil dari musrenbang desa akan diusulkan di tingkat Kecamatan, dan Forum RKPD sehingga disepakati Program dan Kegiatan prioritas yang akan dimasukkan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi yang sesuai dengan usulan dari masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel II.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

I	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**		**Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni**		
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Rumah Tidak layak huni yang tertangani di Luar Kawasan Kumuh Perkotaan**		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		
	a Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Tersebar di Kab. Paser		64 Unit	Musrenbang
II	**Program Kawasan Permukiman**		**Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang tertangani**		
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		**Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani**		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		
	a Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Tersebar di Kab. Paser		4 unit	Musrenbang
III	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**		**Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU**		

	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		**Penyediaan PSU di Lingkungan Perumahan**		
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		
a	Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Tersebar di Kab. Paser (Desa Sempulang, Desa Kerta Bumi, Desa Laburan Baru, Desa Olung, Desa Munggu, Desa Maruat)		7 Lokasi	Musrenbang

2.7. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD ini dimaksudkan untuk membandingkan Rancangan Akhir RKPD dengan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. RKPD merupakan penjabaran dari RENSTRA 2025-2029 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser dan telah sesuai kebutuhan, namun dalam masa pelaksanaan pada Tahun 2025 terdapat pagu indikatif sehingga target kinerja yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 menyesuaikan dengan ketersediaan dana. Berikut review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser dalam Tabel II.5.

Tabel II.6. Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser

No	Rancangan Akhir Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Program Pengembangan Perumahan**		**Persentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani**	**Persen**	**86,36**	**2.479.664.131,00**	**Program Pengembangan Perumahan**		**Persentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani**	**86,36**	**2.479.664.131,00**	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Kabupaten/Kota		**Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah**	**Dokumen**	**1**	**350.425.000,00**	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Kabupaten/Kota**		**Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah**	**1**	**350.425.000,00**	
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang berpotensi terkena relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1	127.500.000	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang berpotensi terkena relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	**1**	127.500.000	

	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		1	145.000.000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**1**	145.000.000	
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi		1	77.925.000	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	**1**	77.925.000	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		**Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Tertangani**	**Unit**	**31**	**2.033.321.631,00**	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Tertangani**	**31**	**2.033.321.631,00**	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit	**16**	683.953.878,00	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	**16**	683.953.878,00	
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	**15**	1.309.009.439,00	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	**15**	1.309.009.439,00	
	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit	**1**	40.358.314,00	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	**1**	40.358.314,00	

	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		**Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Terkait Penyediaan, Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Dokumen**	**1**	**95.917.500,00**	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**		**Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Terkait Penyediaan, Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**1**	**95.917.500,00**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	1	95.917.500,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1	95.917.500,00	
2	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**		**Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni**	**Persen**	**93,13**	**7.324.994.577,00**	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**		**Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni**	**93,13**	**12.791.995.092,00**	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Rumah Tidak layak huni yang tertangani di Luar Kawasan Kumuh Perkotaan**	**Persen**	**8,26**	**7.324.994.577,00**	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Rumah Tidak layak huni yang tertangani di Luar Kawasan Kumuh Perkotaan**	**8,26**	**12.791.995.092,00**	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	Unit	207	7.324.994.577,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	207	12.791.995.092,00	

			(Sepuluh) Ha yang Diperbaiki									
3	**Program Kawasan Permukiman**		**Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang tertangani**	**Persen**	**70**	**7.975.576.590,00**	**Program Kawasan Permukiman**		**Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang tertangani**	**70**	**9.285.868.058,80**	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		**Jumlah dokuman Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh yang disusun**	**Dokumen**	**1**	**433.195.000,00**	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**		**Jumlah dokuman Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh yang disusun**	**1**	**433.195.000,00**	
	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	Dokumen	1	433.195.000,00	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1	433.195.000,00	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		**Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani**	**Hektar**	**157,16**	**7.542.381.590,00**	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**		**Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani**	**157,16**	**8.852.673.058,80**	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit	59	2.046.375.795,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	59	3.356.667.264	
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh		Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Hektar	157,16	5.496.005.795,00	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh		Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	157,16	5.496.005.795	

4	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**		**Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU**	**Persen**	**65,58**	**252.551.230.151,00**	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**		**Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU**	**65,58**	**252.551.230.151,00**	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		**Penyediaan PSU di Lingkungan Perumahan**	**meter**	**75.705**	**252.551.230.151,00**	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**		**Penyediaan PSU di Lingkungan Perumahan**	**75.705**	**252.551.230.151,00**	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	178	252.551.230.151,00	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	178	252.551.230.151,00	
5	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**		Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan	Persen	**85,71**	**377.217.912,00**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**		Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan	85,71	**377.217.912,00**	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Mediasi Sengketa Pertanahan yang tertangani	Kasus	3	377.217.912	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah Mediasi Sengketa Pertanahan yang tertangani	3	377.217.912	
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	81.472.000	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	81.472.000	

	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	3	295.745.912	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	295.745.912	
6	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	**83,33**	**48.455.327.634,00**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	83,33	**48.455.327.634,00**	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lokasi Penyelesaian Ganti Rugi Dan Santunan Tanah	Lokasi	16	48.455.327.634	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah Lokasi Penyelesaian Ganti Rugi Dan Santunan Tanah	16	48.455.327.634	
	Penetapan Daftar Masyarakat penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen	1	80.994.500	Penetapan Daftar Masyarakat penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1	80.994.500	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	16	48.374.333.134	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16	48.374.333.134	

7	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**		Persentase proses penetapan tanah ulayat (2 lokasi)	Persen	100	**47.100.000,00**	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**		Persentase proses penetapan tanah ulayat (2 lokasi)	100	**47.100.000,00**	
	Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat (2 lokasi)	Dokumen	1	47.100.000,00	**Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat (2 lokasi)	1	47.100.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	47.100.000,00	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku		Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	47.100.000,00	
					-							
8	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**		Persentase penatagunaan tanah yang dilaksanakan	Persen	70	**483.497.500,00**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**		Persentase penatagunaan tanah yang dilaksanakan	70	**483.497.500,00**	
	Penggunaan Tanah Hamparanya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan zona nilai tanah	Lokasi	1	483.497.500,00	**Penggunaan Tanah Hamparanya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan zona nilai tanah	1	483.497.500,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1	323.423.500,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	323.423.500,00	

	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Dokumen	1	160.074.000,00	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1	160.074.000,00	
9	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Persen	76	**12.401.853.457,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76	**12.401.853.457,00**	
			Persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik	Persen	90				Persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik	90		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun**	**Persen**	100	**137.095.195**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun**	100	**137.095.195,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	87.167.433	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	87.167.433,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	5.000.000,00	

	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	5.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.944.842	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	3.944.842,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	35.982.920	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	35.982.920,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase pelayanan administrasi keuangan yang terlaksana**	**Persen**	100	**11.324.135.560,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase pelayanan administrasi keuangan yang terlaksana**	100	**11.324.135.560,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ Bulan	40	10.765.011.412	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40	10.765.011.412,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	559.124.148	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	559.124.148,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**Persen**	100	**776.549.827,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	100	**776.549.827,00**	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	11	4.221.525	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	4.221.525,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	436.344.179	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	436.344.179,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	38	91.189.986	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38	91.189.986,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	9.584.767	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	9.584.767,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	550	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	550	10.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	45	225.209.370	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	225.209.370,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase penunjang administrasi perkantoran yang terlayani**	**Persen**	100	**11.522.500**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase penunjang administrasi perkantoran yang terlayani**	100	**11.522.500**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.522.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1.522.500	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	10.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	10.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase sarana dan prasarana kantor yang terpelihara**	**Persen**	100	**152.550.375**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase sarana dan prasarana kantor yang terpelihara**	100	**152.550.375**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	140.700.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	140.700.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	31	11.850.375	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31	11.850.375	
						332.096.461.952,00					**338.873.753.935,80**	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk tahun 2025 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan RENSTRA Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 – 2029, Visi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonsia Emas 2045”. Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya menusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,

serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai

Berdasarkan Delapan Asta Cita tersebut dan amanat RPJMN Tahun 2025-2029, Kementerian PKP turut mendukung Asta Cita Nomor 6, yaitu Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan yang kemudian diselaraskan menjadi misi Kementerian PKP periode 2025-2029, misi ini selaras dengan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.

Terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR, dan sasaran ketiga yakni Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau sesuai dengan sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser, dengan Indikator Kinerja:

- Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
- Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni

Sejalan dengan Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur yang mendukung visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur, untuk mencapai visi Gubernur yakni “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur adalah Terwujudnya Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dalam Mendukung Pengembangan Wilayah, Meningkatkan Perekonomian, serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan melalui Peningkatan Kualitas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Meningkatnya akuntabilitas, integritas, profesionalisme pemerintahanan perangkat daerah

b. Konstribusi Perangkat Daerah Terhadap Asta Cita

Pada Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser tahun 2025 telah mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati Paser.

Asta cita “Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi” sesuai dengan program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, sub kegiatan

Penyelesaian Masalah ganti krugian dan Santunan Tanah untuk Pembanguan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Astacita “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Ekonomi” sesuai dengan program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha dan subkegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian. Berikut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Matriks Konstribusi Perangkat Daerah Terhadap Asta Cita Dalam RPJMN 2025-2029

NO	ASTA CITA	URUSAN	REKOMENDASI SUB KEGIATAN
1.	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pertanahan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2.	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Ekonomi	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak layak Huni
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

c. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telahaan Visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupeten Paser terhadap Program Kegiatan yang ada di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat dan dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel III.2.
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

NO	VISI/MISI/PROGRAM KDH/WKDH	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	VISI : Paser Tuntas 2029 (Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil, Dan Sejahtera)					
	Misi : Pembangunan Kewilayahan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan					
1	Rehabilitasi Rumah Warga Kurang Mampu	Rumah Warga Kurang Mampu yang direhab	900 Unit	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

				Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak ayak Huni
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah darah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama lima tahun.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki 3 (tiga) tujuan dan 4 (empat) sasaran sebagaimana tabel III.1 berikut ini.

Tabel III.3

Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL TAHUN 2020	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
1	**Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi**		Indeks Reformasi Birokrasi Unit	NA	75
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Predikat Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	B	A
2	**Meningkatkan Insfrastruktur permukiman yang berkualitas dan perumahan yang layak huni**		Rasio permukiman layak huni	0,3	0,61
		Meningkatnya masyarakat yang memiliki hunian yang layak	Rasio rumah layak huni	0,76	0,81
		Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase permukiman yang memiliki infrastruktur dalam kondisi baik	53,98	68,21
3	**Meningkatkan tata kelola Pertanahan**	Meningkatnya Pelayanan dalam penyelenggaraan tata kelola Pertanahan	Persentase Luasan Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	22	41
			Persentase Penyelesaian Kasus Pertanahan	14,63	85,37

BAB IV

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PASER

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) beserta target indikator sasaran pada tahun 2025 beserta prognosis tahun berikutnya yang disertai capaian target kinerja beserta kerangka pendanaannya dapat dilihat pada tabel IV.1. berikut ini:

Tabel IV.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser

KODE	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal, perencanaan 2024	Sebelum Perubahan Tahun 2025			Setelah Pergeseran Tahun 2025		Setelah Perubahan Tahun 2025		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Unit kerja PD Penanggung jawab
				Lokasi	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.04.02	**Program Pengembangan Perumahan**	**Persentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani**	**66,88**		**86,36**	**2.651.671.300**	**86,36**	**2.423.364.131**	**86,36**	**2.570.864.131**		**88**	**1.998.743.184**	**DPKP2**
1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Kabupaten/Kota**	**Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah**	**1**		**1**	**384.050.000**	**1**	**317.125.000**	**1**	**369.625.000**		**1**	**459.981.421**	**DPKP2**
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang berpotensi terkena relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0		1	125.000.000	1	112.500.000	1	127.500.000		1	137.500.000	

1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1		1	145.000.000	1	122.500.000	1	145.000.000		1	159.500.000	
1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	4		1	114.050.000	1	82.125.000	1	97.125.000		1	162.981.421,02	
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Tertangani**	**97**		**31**	**2.163.621.300**	**31**	**2.025.321.631**	**31**	**2.105.321.631**		**30**	**1.430.082.401**	**DPKP2**
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	47		16	726.142.300	16	668.953.878	16	683.953.878		18	589.943.665	
1.04.02.2.03.0001	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	50		15	1.387.479.000	15	1.331.009.439	15	1.381.009.439		12	840.138.735	
1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	NA		1	50.000.000	1	25.358.314	1	40.358.314		0	-	

1.04.02.2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Terkait Penyediaan, Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**3**		**1**	**104.000.000**	**1**	**80.917.500**	**1**	**95.917.500**		**1**	**108.679.362**	**DPKP2**
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	3		1	104.000.000	1	80.917.500	1	95.917.500		1	108.679.362	
1.04.04	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**	**Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni**	**93,63**		**93,13**	**7.818.000.000**	**93,13**	**7.584.994.577**	**93,13**	**7.584.994.577**		**91,2**	**13.104.004.846**	**DPKP2**
1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah Tidak layak huni yang tertangani di Luar Kawasan Kumuh Perkotaan**	**43,40**		**8,26**	**7.818.000.000**	**8,26**	**7.584.994.577**	**8,26**	**7.584.994.577**		**8,26**	**13.104.004.846**	**DPKP2**
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah	3316		205	7.818.000.000	205	7.584.994.577	207	7.584.994.577		210	13.104.004.846	

		10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki												
1.04.03	**Program Kawasan Permukiman**	**Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang tertangani**	**50,89**		**70**	**8.151.600.000**	**70**	**7.990.416.590**	**70**	**8.070.416.590**		**75**	**9.522.947.940**	**DPKP2**
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokuman Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh yang disusun	4		1	400.000.000	1	353.195.000	1	433.195.000		1	266.532.320	**DPKP2**
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terevie w /Terlegalisasi	3		1	400.000.000	1	353.195.000,00	1	433.195.000,00		1	266.532.320	
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani**	**114,26**		**157,16**	**7.751.600.000**	**157,16**	**7.637.221.590**	**157,16**	**7.637.221.590**		**153,19**	**9.256.415.620**	**DPKP2**

1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	527		59	2.120.000.000	59	2.046.375.795	59	2.046.375.795		65	3.408.554.627	
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	114,26		157,16	5.631.600.000	157,16	5.590.845.795	157,16	5.590.845.795		153,19	5.847.860.993	
1.04.05	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	**Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU**	**58,33**		**65,58**	**226.936.933.000**	**65,58**	**252.975.030.151**	**65,58**	**252.975.030.151**		**68**	**165.816.587.148**	**DPKP2**
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan PSU di Lingkungan Perumahan	691.777		75.705	226.936.933.000	75.705	252.975.030.151	75.705	252.975.030.151		110.000	165.816.587.148	**DPKP2**
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	808		178	226.936.933.000	178	252.975.030.151	178	252.975.030.151		196	165.816.587.148	
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan**	**71,43**		**85,71**	**349.600.000**	**85,71**	**250.225.228**	**85,71**	**352.217.912**		**88,00**	**429.496.422**	**DPKP2**
2.10.04.2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Mediasi Sengketa Pertanahan yang tertangani	16		3	349.600.000	3	250.225.228	3	352.217.912		3	429.496.422	**DPKP2**

2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3		1	80.000.000	1	40.000.000	1	81.472.000		1	122.888.422	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16		3	269.600.000	3	210.225.228	3	270.745.912		3	306.608.000	
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum**	**77,78**		**83,33**	**48.218.262.000**	**83,33**	**47.973.994.174**	**83,33**	**48.750.327.634**		**85,00**	**7.449.129.416**	**DPKP2**
2.10.05.2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Lokasi Penyelesaian Ganti Rugi Dan Santunan Tanah	26		3	48.218.262.000	3	47.973.994.174	3	48.750.327.634		3	7.449.129.416	**DPKP2**
2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1		1	84.700.000	1	59.700.000	1	80.994.500		7	96.680.000	

2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26		3	48.133.562.000	3	47.914.294.174	3	48.669.333.134		3	7.352.449.416	
2.10.07	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	**Persentase proses penetapan tanah ulayat (2 lokasi)**	**60**		**100**	**82.850.000**	**100**	**47.100.000**	**100**	**47.100.000**		**0**	**-**	**DPKP2**
2.10.07.2.01	**Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat (2 lokasi)	2		1	82.850.000	1	47.100.000	1	47.100.000		0	-	**DPKP2**
2.10.07.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2		1	82.850.000	1	47.100.000	1	47.100.000		0	-	
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase penatagunaan tanah yang dilaksanakan**	**50**		**70**	**426.070.000**	**70**	**269.185.250**	**70**	**403.497.500**		**70**	**172.208.641**	**DPKP2**

2.10.10.2.01	**Penggunaan Tanah Hamparanya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan zona nilai tanah	6		1	426.070.000	1	269.185.250	1	403.497.500		1	172.208.641	**DPKP2**
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1		1	335.922.000	1	224.111.250	1	323.423.500		-	-	
2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	4		2	90.148.000	2	45.074.000	2	80.074.000		2	172.208.641	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**74**		**76**	**12.641.618.146**	**76**	**12.414.747.475**	**76**	**12.650.053.457**		**80**	**9.176.856.149**	**DPKP2**
		Persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik	**85**		**90**		**90**		**90**			**90**		
1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun**	100		100	182.492.390	100	93.621.195	100	104.595.195		100	164.492.390	**DPKP2**

1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9		3	82.636.866	3	43.693.433	3	54.667.433		3	62.636.866	
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4		2	10.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		2	11.000.000	
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4		2	10.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		2	11.000.000	
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3		1	7.889.684	1	3.944.842	1	3.944.842		1	7.889.684	
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15		5	71.965.840	5	35.982.920	5	35.982.920		5	71.965.840	
1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan yang terlaksana**	100		100	11.544.332.706	100	11.457.055.560	100	11.525.335.560		70	8.107.527.398	**DPKP2**
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	118		40	10.765.011.412	40	10.765.011.412	40	10.765.011.412		86	7.313.527.398	

1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36		12	779.321.294	12	692.044.148	12	760.324.148		12	794.000.000	
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	60		100	696.559.800	100	678.353.845	100	791.049.827		100	641.013.112	**DPKP2**
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	33		11	4.221.525	11	4.221.525	11	4.221.525		11	4.221.525	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45		15	200.000.000	15	366.148.197	16	403.844.179		15	180.000.000	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	103		38	162.750.000	38	138.189.986	38	138.189.986		35	160.000.000	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	180		60	19.169.535	60	9.584.767	60	9.584.767		60	19.169.535	
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1593		550	10.000.000	550	10.000.000	550	10.000.000		531	4.915.750	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120		45	300.418.740	45	150.209.370	45	225.209.370		40	272.706.302	

1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penunjang administrasi perkantoran yang terlayani**	60		100	76.522.500	100	76.522.500	100	76.522.500		100	151.522.500	**DPKP2**
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	302		12	1.522.500	12	1.522.500	12	1.522.500		12	1.522.500	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36		12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000		12	150.000.000	
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana kantor yang terpelihara**	60		100	141.710.750	100	109.194.375	100	152.550.375		100	112.300.750	**DPKP2**
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18		6	129.410.000	6	97.344.000	6	140.700.000		6	100.000.000	
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75		31	12.300.750	31	11.850.375	31	11.850.375		28	12.300.750	
						307.276.604.446		**331.929.057.576**		**333.404.501.952**			**207.669.973.746,00**	

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Perubahan Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, penyusunan Perubahan Reja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas maupun di lingkup daerah.

1.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tanggung jawab untuk:

a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

1.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Untuk menjaga konsistensi dan efektifitas pelaksanaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 akan dilaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja maupun evaluasi hasil pelaksanaan Rancangan Akhir Perubahan Renja dan hasilnya disampaikan kepada Bupati Paser melalui Bappedalitbang.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai tujuan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan visi Kepala Daerah "PASER TUNTAS; Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil dan Sejahtera."

Tana Paser, 22 Agustus 2025
Plt. Kepala Dinas,

Aji Mohd Tommy, SE, M.Si
NIP. 19781006 200604 1 018

PERUBAHAN
RENJA

2025



DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN PASER

dis.tph.paser20@gmail.com

https://dtph.paserkab.go.id

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatNya sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2025 pada hakikatnya merupakan rancangan agenda kerja tahunan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi OPD sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Paser nomor 17 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser. Penyusunan Perubahan OPD tahun 2025 ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Paser yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan mengacu pada renja tahun sebelumnya dan Renstra OPD tahun 2021 – 2026.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) 2025 ini tidak terlepas dari peran serta seluruh Pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser. Namun demikian, hasil penyusunan buku ini tentu saja masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dari semua pihak demi penyempurnaan dokumen ini sangat kami harapkan.

Akhirnya, semoga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser tahun 2025 ini dapat bermanfaat sebagai acuan agenda kerja tahunan pembangunan Pertanian di Kabupaten Paser.

DAFTAR ISI

BAB/Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

I. **PENDAHULUAN** ..... I – 1

1.1 LATAR BELAKANG ..... I – 1

1.2 LANDASAN HUKUM ..... I – 3

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ……..... I – 5

1.3.1 Maksud ..... I – 5

1.3.2 Tujuan ……..... I – 5

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN …….. I – 5

II. **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TRIWULAN I** II – 7

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025…..... II – 7

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD ……..….... II – 23

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH ..... II -25

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 .... II – 26

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ..... II – 36

III. **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA** ..... III – 37

IV. PENUTUP ..... IV – 48

4.1 KAIDAH – KAIDAH PELAKSANAAN ..... IV – 48

4.2 RENCANA TINDAK LANJUT ..... IV – 49

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rancangan Renja Perubahan merupakan hasil pembahasan atas usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang dan juga kekurangan kekurangan yang didapatkan selama tahun berjalan dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan Perubahan, dan penetapan. PD menyusun Rancangan Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis dalam menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan

Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja PD), Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA) Perangkat Daerah dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Kabupaten/Kota serta sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rancangan Renja Perubahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun berjalan yang menitikberatkan kepada pemenuhan kebutuhan anggaran yang masih belum terakomodir serta masalah-masalah yang terjadi selama tahun anggaran berjalan.

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan RKPD. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renja PD dapat

dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rancangan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap penetapan Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Rancangan Renja PD untuk menjadi pedoman dilingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser, maka disusunlah Perubahan Renja PD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan nasional bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2022;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025-2046;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
18. Keputusan Bupati Paser Nomor 100.3.3.2/KEP-741/2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja Tahun 2025 bagi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser, sesuai dengan Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD Perubahan Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rancangan Renja Perubahan 2025, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan OPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
5. Terlaksananya Program dan Kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perubahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Perubahan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DARAH TRIWULAN I

Bab ini memuat pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan perubahan RKPD tahun 2025, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memuat Rencaja Kerja yang akan dilaksanaka dan direvisi, serta pendanaan nya

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncakan di dalam Renja OPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi renja sampai dengan triwulan I dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, hasil evaluasi dipergunakan untuk menyesuaian / perubahan rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja perangkat daerah pada perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser sampai dengan triwulan I tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut :

Tabel. T-II.I.

Evalusi Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2025
Triwulan I

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2025

Sasaran SKPD Tahunan :
-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2022-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (%)		Ket
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
		3				**120.938.681.180**		**0**		**120.938.681.180**		**3.190.125.073**		**3.190.125.073**		**3.190.125.073**		**2,64**	
		3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**120.938.681.180**		**0**		**120.938.681.180**		**3.190.125.073**		**3.190.125.073**		**3.190.125.073**		**2,64**	
1		**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat (%)**	**14,4**	**24.823.237.410**	**0**	**0**	**72**	**24.823.237.410**	**72**	**2.855.515.113**	**72**	**2.855.515.113**	**36**	**2.855.515.113**	**250**	**11,5**	
		3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah dengan baik (%)	100	161.060.000	0	0	100	161.060.000	25	32.819.509	25	32.819.509	25	32.819.509	25	20,38	
		3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	138.560.000	0	0	5	138.560.000	1	32.819.509	1	32.819.509	1	32.819.509	20	23,69	

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		1		0		0		0		0		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		0		4		0		0		0		0		
		3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	2.500.000	0	0	5	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		1		0		0		0		0		
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		0		4		0		0		0		0		
		3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	20.000.000	0	0	5	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		1		0		0		0		0		
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		0		4		1		1		1		25		
		3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentasi PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu (%)	100	23.982.673.176	0	0	100	23.982.673.176	25	2.750.669.382	25	2.750.669.382	25	2.750.669.382	25	11,47
		3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23	23.860.691.176	0	0	115	23.860.691.176	115	2.731.261.182	115	2.731.261.182	57,5	2.731.261.182	250	11,45

3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	115	121.982.000	0	0	115	121.982.000	0	19.408.200	0	19.408.200	0	19.408.200	0	15,91
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	600		0		600		50		50		50		8,33	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)	100	270.340.220	0	0	100	270.340.220	25	17.922.211	25	17.922.211	25	17.922.211	25	6,63
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	13	2.494.550	0	0	13	2.494.550	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		10		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		3		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		0		12		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	360		0		360		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	52		0		52		0		0		0		0	
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	13	70.000.000	0	0	13	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		10		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		3		0		0		0		0	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		0		12		0		0		0		0	

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	360		0		360		0		0		0		0		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	52		0		52		0		0		0		0		
		3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	13	35.757.670	0	0	13	35.757.670	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		10		0		0		0		0	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		3		1		1		1		33,33	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		0		12		0		0		0		0	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	360		0		360		0		0		0		0	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	52		0		52		0		0		0		0	
		3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	13	10.000.000	0	0	13	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		10		0		0		0		0	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		3		0		0		0		0	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		0		12		3		3		3		25	

				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	360		0		360		90		90		90		25	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	52		0		52		0		0		0		0	
		3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	13	2.088.000	0	0	13	2.088.000	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		10		0		0		0		0	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		3		0		0		0		0	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		0		12		0		0		0		0	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	360		0		360		90		90		90		25	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	52		0		52		0		0		0		0	
		3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	13	150.000.000	0	0	13	150.000.000	0	17.922.211	0	17.922.211	0	17.922.211	0	11,95
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		10		0		0		0		0	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		3		0		0		0		0	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		0		12		0		0		0		0	

		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	360		0		360		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	52		0		52		10		10		10		19,23		
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran (%)	100	264.064.014	0	0	100	264.064.014	25	48.166.553	25	48.166.553	25	48.166.553	25	18,24	
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.750.000	0	0	12	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		0		12		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		12		0		0		0		0		
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	50.000.000	0	0	12	50.000.000	0	5.241.753	0	5.241.753	0	5.241.753	0	10,48	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		0		12		3		3		3		25		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		12		0		0		0		0		
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	212.314.014	0	0	12	212.314.014	0	42.924.800	0	42.924.800	0	42.924.800	0	20,22	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		0		12		0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		12		3		3		3		25		

		3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatue (%)	100	145.100.000	0	0	100	145.100.000	25	5.937.458	25	5.937.458	25	5.937.458	25	4,09
		3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	125.000.000	0	0	5	125.000.000	1	5.937.458	1	5.937.458	1	5.937.458	20	4,75
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8		0		8		0		0		0		0	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		2		0		0		0		0	
		3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	19.600.000	0	0	5	19.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8		0		8		0		0		0		0	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		2		0		0		0		0	
		3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	500.000	0	0	5	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8		0		8		0		0		0		0	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		2		0		0		0		0	
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																
2		**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Presentasi Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura Yang di Manfaatkan (%)**	**100**	**8.125.612.950**	**0**	**0**	**100**	**8.125.612.950**	**25**	**125.893.313**	**25**	**125.893.313**	**25**	**125.893.313**	**25**	**1,55**
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentasi pengawasan penggunaan sarana	0	8.125.612.950	0	0	0	8.125.612.950	25	125.893.313	25	125.893.313	25	125.893.313	25	1,55

				pertanian (%)													
		3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	31	8.120.112.950	0	0	31	8.120.112.950	4	94.776.400	4	94.776.400	4	94.776.400	12,9	1,17
				Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	4		0		4		0		0		0		0	
		3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	31	5.500.000	0	0	31	5.500.000	0	31.116.913	0	31.116.913	0	31.116.913	0	565,76
				Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	4		0		4		1		1		1		25	
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																
3		**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Presentase Prasarana Pertanian yang di Manfaatkan (%)**	**100**	**81.188.081.209**	**0**	**0**	**100**	**81.188.081.209**	**25**	**66.690.000**	**25**	**66.690.000**	**25**	**66.690.000**	**25**	**,08**
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentasi pengembangan prasarana pertanian (%)	100	659.657.600	0	0	100	659.657.600	25	7.200.000	25	7.200.000	25	7.200.000	25	1,09
		3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1	31.250.000	0	0	1	31.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
				Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	1		0		1		0		0		0		0	
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	5		0		5		0		0		0		0	

3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1	444.706.000	0	0	1	444.706.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0	1,62
		Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	1		0		1		0		0		0		0	
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	5		0		5		0		0		0		0	
3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1	183.701.600	0	0	1	183.701.600	0	0	0	0	0	0	0	0
		Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	1		0		1		0		0		0		0	
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	5		0		5		0		0		0		0	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pendukung Pertanian (%)	100	80.528.423.609	0	0	100	80.528.423.609	25	59.490.000	25	59.490.000	25	59.490.000	25	,07
3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	2.366.673	0	0	0	2.366.673	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	0		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan	0		0		0		0		0		0		0	

		Dipelihara (Unit)															
		Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0		0		0		0		0		0		0		
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	79.741.052.936	0	0	0	79.741.052.936	0	38.490.000	0	38.490.000	0	38.490.000	0	,05	
		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0		0		0		0		0		0		0		
3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	347.724.000	0	0	0	347.724.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0		0		0		0		0		0		0		
		Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0		0		0		0		0		0		0		
3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	379.280.000	0	0	0	379.280.000	0	6.900.000	0	6.900.000	0	6.900.000	0	1,82	
		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	0		0		0		0		0		0		0		

				Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0		0		0		0		0		0		0		
				Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0		0		0		0		0		0		0		
				Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0		0		0		0		0		0		0		
				Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0		0		0		0		0		0		0		
		3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	0		0		0		0		0		0		0		
				Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0		0		0		0		0		0		0		
				Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0		0		0		0		0		0		0		
				Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0		0		0		0		0		0		0		
				Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0		0		0		0		0		0		0		
		3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	54.000.000	0	0	0	54.000.000	0	14.100.000	0	14.100.000	0	14.100.000	0	26,11	
				Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	0		0		0		0		0		0		0		
				Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0		0		0		0		0		0		0		
				Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0		0		0		0		0		0		0		
				Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0		0		0		0		0		0		0		

				Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0		0		0		0		0		0		0	
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																	
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																	
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																	
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																	
4		**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Presentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)**	**10**	**2.080.329.402**	**0**	**0**	**10**	**2.080.329.402**	**2,5**	**0**	**2,5**	**0**	**2,5**	**0**	**25**	**0**
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (%)	100	2.080.329.402	0	0	100	2.080.329.402	25	0	25	0	25	0	25	0
		3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	10	995.206.750	0	0	10	995.206.750	1	0	1	0	1	0	10	0
				Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	5		0		5		1		1		1		20	
				Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	5		0		5		0		0		0		0	
		3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	10	4.000.000	0	0	10	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	5		0		5		1		1		1		20	
				Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	5		0		5		0		0		0		0	

		3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	10	1.081.122.652	0	0	10	1.081.122.652	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	5		0		5		0		0		0		0	
				Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	5		0		5		0		0		0		0	
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																	
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																	
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																	
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																	
5		**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Presentase Pertumbuhan Produksi Kelompok yang di Suluh (%)**	**62**	**4.721.420.209**	**0**	**0**	**62**	**4.721.420.209**	**10**	**142.026.647**	**10**	**142.026.647**	**10**	**142.026.647**	**16,13**	**3,01**
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	terlaksananya penyuluhan pertanian (%)	100	4.721.420.209	0	0	100	4.721.420.209	25	142.026.647	25	142.026.647	25	142.026.647	25	3,01
		3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	7	791.792.511	0	0	7	791.792.511	1	91.363.000	1	91.363.000	1	91.363.000	14,29	11,54
				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	7		0		7		0		0		0		0	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	7		0		7		0		0		0		0	
		3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	7	3.587.583.650	0	0	7	3.587.583.650	0	49.000.000	0	49.000.000	0	49.000.000	0	1,37
				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	7		0		7		1		1		1		14,29	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	7		0		7		0		0		0		0	

				(Unit)														
		3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	7	342.044.048	0	0	7	342.044.048	0	1.663.647	0	1.663.647	0	1.663.647	0	,49
				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	7		0		7		0		0		0		0	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	7		0		7		0		0		0		0	
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																
	JUMLAH					**120.938.681.180**		**0**		**120.938.681.180**		**3.190.125.073**		**3.190.125.073**		**3.190.125.073**		
	Rata-rata capaian kinerja (%)												**16,13**	**2,64**			**16,13**	**2,64**
	Predikat kinerja												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian rencana strategis sampai dengan triwulan I tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih dibawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan rencana kerja dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser periode April 2025 antara lain :

1. Meningkatkan dukungan infrastruktur pertanian dengan mendorong pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT) untuk kelancaran distribusi pada Kawasan pertanian
2. Proses pengadaan Barang dan jasa melalui e katalog sehingga di bantu oleh ULP

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya adalah:

1. Terlambatnya pembuatan SK Penerima Hasil Pekerjaan Baik Barang maupun Jasa dan SK Penerima hasil pekerjaan fisik konstruksi.
2. Pada paket kegiatan Jalan Usaha Tani masih terkendala dengan ketidak sesuaian lahan untuk pembangunan jalan usaha tani di desa tersebut.
3. Adanya Peraturan Perundang – undangan No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 15 Tentang Pembagian kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sehingga paket Bantuang yang diserahkan kemasyarakat untuk saat ini tidak diproses
4. Terbatasnya Kendaraan Dinas Operasional untuk melakukan CPCL, Pendataan, Pengawasan dan Monitoring Sampai ke Tingkat Petani yang mencakup 10 Kecamatan

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah :

1. Perlu adanya percepatan Pembuatan SK Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa serta Kostruksi
2. Perlu adanya koordinasi dengan Bappedalitbang terkait tugas dan fungdi serta Nomenklatur subkegiatan yang di ampu oleh Dinas Kabupaten Kota

3. Perlu adanya koordinasi antara instansi terkait sehubungan dengan Spek Paket Pengadaan yang sesuai dengan Anggaran
4. Mempercepat Proses perencanaan guna menyelesaikan produk perencanaan untuk diteruskan pada proses lelang
5. Perlu adanya anggaran tambahan terkait Penanggulangan bencana pertanian maupun Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yaitu berupa penyediaan Pestisida, bibit dan Pupuk
6. Perlu adanya penambahan personil untuk melakukan pedataan, pengawasan dan monitoring di Lapangan
7. Perlunya pemahaman mengenai proses panjang pengadaan melalui e-katalog

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Keberhasilan kinerja OPD dapat dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. T-II.2.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2025
Kabupaten Paser

NO	Indikator *)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra OPD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)		(13)
1.	Penigkatan Produksi Padi										
	- Produksi Padi (Ton)	-	-	52.849,00	53.189,20	53.820,00	28.608,94	52.886,67	53.820,00		
2.	Peningkatan Produksi Palawija Produksi (Ton)	-	-	11.593,41	11.872,5	12.442,70	4.259,57	7.551,98	12.442,70		
3.	Peningkatan Produksi Hortikultura										
	- Produksi (Ton)	-	-	13.194,31	13.414,42	15.896,85	60.465,06	84.398,22	15.896,85		

*** Data Sementara (Prognosa)**

Untuk data produksi masih belum bias ditampilkan karena masih ada beberapa sampel yang harus di ambil oleh BPS, untuk diketahui untuk pengambilan sampel sabagai dasar perhitungan produksi Tanaman Pangan dilakukan sepenuhnya Oleh Badan Pusat Statistik sehingga masih perlu ditindaklanjuti, untuk dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura bisa menampilkan perbandingan data luas Panen sampai dengan Bulan Maret (Triwulan I), untuk padi pada TW I tahun 2024 luas panen mencapai 276,53 Ha sedangkan pada tahun 2025 TW I luas panen mencapai 820,80 Ha, hal ini deikarenakan adannya pergeseran musim tanam dan adanya kegiatan pengembangan padi sawah pada akhir tahun 2024, diharapkan denga adanya peningkatan Luas Panen Padi dapat meningkatkan Produksi Padi tersebut.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN OPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai berikut:

1. Bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Paser setiap tahunnya. Dinamika pertambahan penduduk ini meningkatkan permintaan terhadap produk-produk pertanian baik dalam hal jumlah, kualitas maupun keragamannya;
2. Pemanfaatan teknologi pertanian yang belum optimal dan belum sepenuhnya beroritasi pada pasar ;
3. Luas Baku lahan pertanian yang semakin berkurang adanya alih fungsi lahan ke arah pembangunan sektor lainnya ;
4. Tata ruang lahan-lahan pertanian, diperkuat dengan aturan yang mengikat sehingga pembangunan pertanian dapat berlangsung secara berkelanjutan;

5. Peningkatan mutu dan keamanan pangan yang menjadi daya saing produk pertanian;
6. Belum dimanfaatkannya motivasi kerja aparatur dan koordinasi antar bidang untuk menekan pemanfaatan sumber daya yang tidak ramah lingkungan;
7. Belum terpenuhinya jumlah tenaga penyuluh di setiap desa, dengan rasio satu desa satu penyuluh;
8. Belum optimalnya pengetahuan terhadap perkembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap tenaga penyuluh; dan
9. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung penyuluhan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 yaitu “PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN BERBASIS PERTANIAN UNTUK MENGGERAKKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT” yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Penguatan Ekonomi Daerah.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser mendukung pencapaian sasaran ke-1 yaitu "Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian" dan sasaran ke- 3 yaitu "Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah"

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Rancangaan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Paser	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72	25.019.619.190	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Paser	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72	25.019.619.190	Kegiatan Lanjutan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Terlaksananya Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah dengan baik	100%	230.800.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Terlaksananya Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah dengan baik	100%	230.800.000	Kegiatan Lanjutan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5 Dokumen	185.800.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5 Dokumen	185.800.000	Kegiatan Lanjutan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	1 Laporan	5.000.000	Kegiatan Lanjutan

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	40.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	40.000.000	Kegiatan Lanjutan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Presentasi PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu (%)	100%	23.994.291.176	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Presentasi PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu (%)	100%	23.994.291.176	Kegiatan Lanjutan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Org/Bln	23.860.691.176	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	153 Org/Bln	24.460.691.176	Kegiatan Lanjutan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	600 Dokumen	133.600.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	600 Dokumen	153.600.000	Kegiatan Lanjutan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	100%	362.588.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	100%	362.588.000	Kegiatan Lanjutan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	13 Paket	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	13 Paket	2.500.000	Kegiatan Lanjutan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10 Paket	70.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10 Paket	100.000.000	Kegiatan Lanjutan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3 Paket	68.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3 Paket	68.000.000	Kegiatan Lanjutan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12 Paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12 Paket	20.000.000	Kegiatan Lanjutan

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan (Dokumen)	360 Dokumen	2.088.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan (Dokumen)	360 Dokumen	2.088.000	Kegiatan Lanjutan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	250.000.000	Kegiatan Lanjutan
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kabupaten Paser	Persentase terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kabupaten Paser	Persentase terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah			Kegiatan Baru
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kabupaten Paser	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di sediakan			Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kabupaten Paser	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di sediakan			Kegiatan Baru
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah	Kabupaten Paser	Persentase pemenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran	100%	286.340.014	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah	Kabupaten Paser	Persentase pemenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran	100%	286.340.014	Kegiatan Lanjutan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12 Laporan	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12 Laporan	2.500.000	Kegiatan Lanjutan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	50.000.000	Kegiatan Lanjutan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	233.840.014	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	233.840.014	Kegiatan Lanjutan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Paser	persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	100%	145.600.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Paser	persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	100%	145.600.000	Kegiatan Lanjutan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5 Unit	125.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5 Unit	125.000.000	Kegiatan Lanjutan

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	19.600.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	19.600.000	Kegiatan Lanjutan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2 Unit	1.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2 Unit	1.000.000	Kegiatan Lanjutan
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kabupaten Paser	Persentase Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura yang di Manfaatkan	100%	9.407.773.345	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kabupaten Paser	Persentase Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura yang di Manfaatkan	100%	9.407.773.345	Kegiatan Lanjutan
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kabupaten Paser	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	100%	9.407.773.345	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kabupaten Paser	Persentase pengawasan penggunaan sarana	100%	9.407.773.345	Kegiatan Lanjutan
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kabupaten Paser	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	9.396.773.345	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kabupaten Paser	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	9.396.773.345	Kegiatan Lanjutan
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kabupaten Paser	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	12 Laporan	11.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kabupaten Paser	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	12 Laporan	25.000.000	Kegiatan Lanjutan
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kabupaten Paser	Persentase Prasarana Pertanian Yang di Manfaatkan	100%	78.728.545.346	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kabupaten Paser	Persentase Prasarana Pertanian Yang di Manfaatkan	100%	78.728.545.346	Kegiatan Lanjutan
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kabupaten Paser	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	805.372.000	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kabupaten Paser	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	805.372.000	Kegiatan Lanjutan

	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Kabupaten Paser	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (Dokumen)	1 Dokumen	512.872.000	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Kabupaten Paser	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 Dokumen	512.872.000	Kegiatan Lanjutan
	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Kabupaten Paser	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	1 Dokumen	210.000.000	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Kabupaten Paser	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	1 Dokumen	210.000.000	Kegiatan Lanjutan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kabupaten Paser	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	5 Laporan	82.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kabupaten Paser	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	5 Laporan	82.500.000	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kabupaten Paser	Tersedianya Prasarana Pendukung Pertanian	88 Unit	77.923.173.346	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kabupaten Paser	Tersedianya Prasarana Pendukung Pertanian	88 Unit	77.923.173.346	Kegiatan Lanjutan
	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kabupaten Paser	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang di bangun, di rehabilitasi dan di pelihara	0 Unit	75.800.000	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kabupaten Paser	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang di bangun, di rehabilitasi dan di pelihara	1 Unit	75.800.000	Kegiatan Lanjutan
	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kabupaten Paser	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	0 Unit	4.733.346	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kabupaten Paser	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	1 Unit	4.733.346	Kegiatan Lanjutan
	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kabupaten Paser	Jalan Usaha Tani yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	49 Unit	77.087.440.000	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kabupaten Paser	Jalan Usaha Tani yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	49 Unit	77.087.440.000	Kegiatan Lanjutan

	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kabupaten Paser	Jumlah DAM Parit yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	1 Unit	355.000.000	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kabupaten Paser	Jumlah DAM Parit yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	1 Unit	355.000.000	Kegiatan Lanjutan
	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Kabupaten Paser	Jumlah Long Storage yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	0 Unit	-	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Kabupaten Paser	Jumlah Long Storage yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	0 Unit	-	Kegiatan Lanjutan
	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Kabupaten Paser	Jumlah Pintu Air yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	2 Unit	392.200.000	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Kabupaten Paser	Jumlah Pintu Air yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	2 Unit	392.200.000	Kegiatan Lanjutan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah sarana pendukung lainnya yang di bangun	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah sarana pendukung lainnya yang di bangun	-	-	Kegiatan Lanjutan
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	0 Unit	8.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1 Unit	8.000.000	
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kabupaten Paser	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	100%	2.163.816.000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kabupaten Paser	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	100%	2.163.816.000	Kegiatan Lanjutan
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100%	2.163.816.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100%	2.163.816.000	Kegiatan Lanjutan
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kabupaten Paser	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Di kendalikan	10 Ha	1.034.816.000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kabupaten Paser	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Di kendalikan	10 Ha	1.034.816.000	Kegiatan Lanjutan

	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kabupaten Paser	Terlaksananya Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5 Laporan	8.000.000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kabupaten Paser	Terlaksananya Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5 Laporan	8.000.000	
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kabupaten Paser	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura , Perkebunan	5 Laporan	1.121.000.000	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kabupaten Paser	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura , Perkebunan	5 Laporan	1.121.000.000	Kegiatan Lanjutan
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kabupaten Paser	Pertumbuhan Produksi kelompok yang disuluh	62%	5.702.618.800	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kabupaten Paser	Pertumbuhan Produksi kelompok yang disuluh	62%	5.702.618.800	Kegiatan Lanjutan
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kabupaten Paser	terlaksananya penyuluhan pertanian	100%	5.702.618.800	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kabupaten Paser	terlaksananya penyuluhan pertanian	100%	5.702.618.800	Kegiatan Lanjutan
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kabupaten Paser	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Yang di Tingkatkan Kapasitasnya	7 Unit	972.965.980	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kabupaten Paser	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Yang di Tingkatkan Kapasitasnya	7 Unit	972.965.980	Kegiatan Lanjutan
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kabupaten Paser	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang di tingkatkan kapasitasnya	7 Unit	4.380.434.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kabupaten Paser	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang di tingkatkan kapasitasnya	7 Unit	4.380.434.000	Kegiatan Lanjutan
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kabupaten Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	7 Unit	349.218.820	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kabupaten Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	7 Unit	349.218.820	Kegiatan Lanjutan

	UPT BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA					UPT BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA					
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kabupaten Paser	Persentase Sarana tanaman pangan dan hortikultura yang dimanfaatkan	100	424.158.290	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kabupaten Paser	Persentase Sarana tanaman pangan dan hortikultura yang dimanfaatkan	100	424.158.290	Kegiatan Lanjutan
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kabupaten Paser	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	100	424.158.290	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kabupaten Paser	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	100	424.158.290	Kegiatan Lanjutan
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kabupaten Paser	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kabupaten Paser	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100%	266.130.790	Kegiatan Lanjutan

2.5 **PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Pada Perubahan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 tidak ada usulan program kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dari kelompok masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten paser, maupun Reses oleh DPRD Kabupaten Paser.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Perubahan Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran (nama OPD) Kabupaten Paser tidak mengalami perubahan tetapi ada beberapa sub kegiatan yang mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam table berikut.

Tabel
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja
Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Tahun 2025

No	Sebelum Perubahan				Pergeseran				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9	10
	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA			**121.446.530.971,00**				**121.297.043.165,00**				**124.131.432.230,00**	**2.834.389.065,00**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**72**	**25.019.619.190,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**72**	**24.823.237.410,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**72**	**25.201.978.740,00**	**378.741.330,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah dengan baik	100%	230.800.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah dengan baik	100%	161.060.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah dengan baik	100%	272.375.000,00	111.315.000,00

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5 Dokumen	185.800.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5 Dokumen	138.560.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5 Dokumen	217.375.000,00	78.815.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	1 Laporan	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	1 Laporan	2.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	1 Laporan	5.000.000,00	2.500.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	40.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	20.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	50.000.000,00	30.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentasi PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu (%)	100%	23.994.291.176,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentasi PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu (%)	100%	23.982.673.176,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentasi PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu (%)	100%	24.054.331.176,00	71.658.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Org/Bln	23.860.691.176,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 Org/Bln	23.860.691.176,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 Org/Bln	23.860.691.176,00	0
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	600 Dokumen	133.600.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	600 Dokumen	121.982.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	600 Dokumen	193.640.000,00	71.658.000

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	100%	362.588.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	100%	270.340.220,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	100%	412.582.550,00	142.242.330,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5 Paket	2.500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5 Paket	2.494.550,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5 Paket	2.494.550,00	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10 Paket	70.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10 Paket	70.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10 Paket	70.000.000,00	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3 Paket	68.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3 Paket	35.757.670,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3 Paket	68.000.000,00	32.242.330,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3 Paket	20.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3 Paket	20.000.000,00	10.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan (Dokumen)	348 Dokumen	2.088.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan (Dokumen)	348 Dokumen	2.088.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan (Dokumen)	348 Dokumen	2.088.000,00	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	200.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	150.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	250.000.000,00	100.000.000,00

	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran	100%	286.340.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran	100%	264.064.014,00	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran	100%	318.090.014,00	54.026.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12 Laporan	2.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12 Laporan	1.750.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12 Laporan	4.250.000,00	2.500.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	50.000.000,00	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	233.840.014,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	212.314.014,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	263.840.014,00	51.526.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	100%	145.600.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	100%	145.100.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	100%	144.600.000,00	(500.000,00)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6 Unit	1.250.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6 Unit	125.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6 Unit	125.000.000,00	-

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	19.600.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	19.600.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	19.600.000,00	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2 Unit	1.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2 Unit	500.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2 Unit	-	(500.000,00)
2	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura yang di Manfaatkan**	**100%**	**9.407.773.345,00**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura yang di Manfaatkan**	**100%**	**8.125.612.950,00**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura yang di Manfaatkan**	**100%**	**1.701.034.260,00**	**(6.424.578.690,00)**
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	100%	9.407.773.345,00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	100%	8.125.612.950,00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	100%	1.701.034.260,00	0
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Pengawasan)	45 Laporan	9.396.773.345,00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	45 Laporan	8.120.112.950,00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	45 Laporan	1.695.534.260,00	(6.424.578.690,00)
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	40 Laporan	11.000.000,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	40 Laporan	5.500.000,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	40 Laporan	5.500.000,00	-

3	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Prasarana Pertanian Yang di Manfaatkan**	**100%**	**78.728.545.346,00**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Prasarana Pertanian Yang di Manfaatkan**	**100%**	**81.188.081.209,00**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Prasarana Pertanian Yang di Manfaatkan**	**100%**	**85.619.691.209,00**	**4.431.610.000,00**
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	805.372.000,00	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	659.657.600,00	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	1.065.657.600,00	406.000.000,00
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (Dokumen)	1 dokumen	512.872.000,00	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (Dokumen)	1 dokumen	444.706.000,00	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (Dokumen)	1 dokumen	629.706.000,00	185.000.000,00
	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	1 Dokumen	210.000.000,00	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	1 Dokumen	183.701.600,00	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	1 Dokumen	316.701.600,00	133.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	82.500.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	31.250.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	119.250.000,00	88.000.000,00

	Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pendukung Pertanian	78 Unit	77.923.173.346,00	Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pendukung Pertanian	78 Unit	80.528.423.609,00	Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pendukung Pertanian	78 Unit	84.554.033.609,00	4.025.610.000,00
	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang di bangun, di rehabilitasi dan di pelihara	2 Unit	75.800.000,00	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang di bangun, di rehabilitasi dan di pelihara	2 Unit	54.000.000,00	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang di bangun, di rehabilitasi dan di pelihara	2 Unit	107.000.000,00	53.000.000,00
	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	2 Unit	4.733.346,00	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	2 Unit	2.366.673,00	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	2 Unit	28.366.673,00	26.000.000,00
	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	69 Unit	77.087.440.000,00	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	69 Unit	79.741.052.936,00	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	69 Unit	80.788.662.936,00	1.047.610.000,00
	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	0 Unit	355.000.000,00	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	0 Unit	347.724.000,00	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	0 Unit	431.724.000,00	84.000.000,00
	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	1 unit	392.200.000,00	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	1 unit	379.280.000,00	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang dibangun , di rehabilitasi dan di pelihara	1 unit	3.168.280.000,00	2.789.000.000,00
	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	0	8.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	0	4.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1 Unit	30.000.000,00	26.000.000,00

4	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)**	**100%**	**2.163.816.000,00**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)**	**100%**	**2.080.329.402,00**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)**	**100%**	**2.080.329.402,00**	**-**
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100%	2.163.816.000,00	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100%	2.080.329.402,00	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100%	2.080.329.402,00	0
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Di kendalikan	10 Ha	1.034.816.000,00	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	10 Ha	995.206.750,00	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	10 Ha	995.206.750,00	0
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Penanganan Dampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5 Ha	8.000.000,00	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Penanganan Dampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5 Ha	4.000.000,00	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Penanganan Dampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5 Ha	4.000.000,00	
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura , Perkebunan	10 Laporan	1.121.000.000,00	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura , Perkebunan	10 Laporan	1.081.122.652,00	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura , Perkebunan	10 Laporan	1.081.122.652,00	0

5	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Pertumbuhan Produksi kelompok yang disuluh**	**62%**	**5.702.618.800,00**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Pertumbuhan Produksi kelompok yang disuluh**	**62%**	**4.728.594.981,00**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Pertumbuhan Produksi kelompok yang disuluh**	**62%**	**9.111.248.166,00**	**4.382.653.185,00**
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	terlaksananya penyuluhan pertanian	100%	5.702.618.800,00	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	terlaksananya penyuluhan pertanian	100%	4.728.594.981,00	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	terlaksananya penyuluhan pertanian	100%	9.111.248.166,00	4.382.653.185,00
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Yang di Tingkatkan Kapasitasnya	7 Unit	972.965.980,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Yang di Tingkatkan Kapasitasnya	7 Unit	791.792.511,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Yang di Tingkatkan Kapasitasnya	7 Unit	1.074.750.511,00	282.958.000,00
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang di tingkatkan kapasitasnya	10 Unit	4.380.434.000,00	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang di tingkatkan kapasitasnya	11 Unit	3.587.583.650,00	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang di tingkatkan kapasitasnya	11 Unit	3.787.583.650,00	200.000.000,00
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	6 Unit	349.218.820,00	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	6 Unit	349.218.820,00	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	6 Unit	4.248.914.005,00	3.899.695.185,00
	UPT BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA												
6	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Sarana tanaman pangan dan hortikultura yang dimanfaatkan**	**100%**	**424.158.290,00**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Sarana tanaman pangan dan hortikultura yang dimanfaatkan**	**100%**	**358.361.985,00**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Sarana tanaman pangan dan hortikultura yang dimanfaatkan**	**100%**	**417.150.453,00**	**58.788.468,00**

	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	100 %	424.158.290,00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	100%	358.361.985,00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	100%	417.150.453,00	58.788.468,00
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100 %	424.158.290,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100%	358.361.985,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100%	417.150.453,00	58.788.468,00

BAB IV
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

A. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD P, Perubahan Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.

B. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Tana Paser, 23 September 2025

KEPALA
DINAS TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA

Dr. Erwan Wahyudi, SP,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19781230 200801 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Jln. RA. Kartini ☎ (0543) 21300 - 21049
Email : dis.tph.paser20@gmail.com
TANAH PASER

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN PASER
NOMOR 806 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) 2025
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASER
TAHUN 2023

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN PASER

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu di bentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaan lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai denga jadwal yang ditetapkan;
2. Bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf (a) tersebut diatas, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Ranwal Renja, Rancangan Renja, Renja, Ranhir Renja, Rancangan Renja Perubahan, Renja Perubahan dan Ranhir Renja Perubahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2025 dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertugas melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser Tahun 2025, dan di dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada petunjuk dan ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari tedapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 20 Desember 2023
Kepala Dinas

Dr. Erwan Wahyudi, SP M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19781230 200801 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 806 TAHUN 2023
TANGGAL : 20 DESEMBER 2023

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASER
TAHUN 2023

Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan hortikultura Kabupaten Paser
Ketua	:	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser
Sekretaris	:	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Anggota	:	1. Kepala Bidang Sarana, Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian 2. Kepala Bidang Prasarana 3. Kepala Bidang Penyuluhan

Kepala Dinas

Dr. Erwan Wahyudi, SP M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19781230 200801 1 006

Rencana Jadwal Pelaksanaan

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Penyusunan SK TIM												
2	Penyusunan Rancangan Renja												
3	Rancangan Perubahan Renja												
4	Penyusunan Ranhir Renja												
5	Penyusunan Ranhir Perubahan Renja												
6	Penyusunan Ranwal Renja												

RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAHUN 2025

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nyalah maka penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini merupakan salah satu kewajiban untuk merencanakan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), efektif, efisien, bersih dan responsif serta akuntabel.

Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 ini disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser dan pencapaian target kinerja yang diharapkan. Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) ini juga merupakan upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati Paser terpilih tahun 2021- 2026.

Merealisasikan perencanaan yang telah disusun tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak terkait. Upaya pembenahan sistem, pengembangan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sesuai tuntutan tugas dan harapan masyarakat merupakan suatu tugas besar yang harus segera direalisasikan. Untuk itu, dukungan semua pihak dalam perbaikan sistem dan kinerja DPMPTSP Kabupaten Paser akan sangat diperlukan demi meningkatnya realisasi investasi di daerah, meningkatnya kualitas pelayanan yang lebih baik dan terwujudnya akuntabilitas kinerja.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) ini merupakan dokumen yang dinamis sehingga memungkinkan untuk dilakukan perubahan dan perbaikan yang dianggap strategis serta sejalan dengan perkembangan pembangunan daerah.

Tana Paser, 22 Agustus 2025

Kepala DPMPTSP Kab. Paser,

Ir. Toto Irianto, ST., M.Ling
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP 19731116 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ……. 14

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..…. 16

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKP……...…. 16

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……...…. …….. 22

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RENJA PD Tahun 2025 23

BAB IV PENUTUP 27

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 7

2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser..... 15

3. Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser..... 18

4. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;

d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun 2021–2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun 2025ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun 2025 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3406 Tahun 2024tentangHasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
20. PeraturanBupatiPaser Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten PaserTahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

BAB II.HASIL EVALUASI RENJA

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan yang disertai tanda tangan Kepala Perangkat Daera

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta Implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan capaian renstra sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampirantabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan I
Tahun 2025

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2025			Target Program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/dtahun 2025		Catatan
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.18.001	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP**	**75,8%**		**75,80**	**19**	**25**	**75,8%**	**75,8%**	**75,8%**	
2.18.001.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Sasaran Strategis DPMPTSP**	**Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**		**100**	**25**	**25**	**100%**	**100%**	**100%**	
2.18.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3		11	1	**9**	3	3	3	
2.18.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1		1	0	**0**	1	1	1	
2.18.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1		4	1	**25**	1	1	1	
2.18.001.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**		**100**	**25**	**25**	**100%**	**100%**	**100%**	
2.18.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	30 Orang/Bulan		30	30	**100**	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	

2.18.001.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan		1	0	**0**	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
2.18.001.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian**	**Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**		**100**	0	**0**	**100%**	**100%**	**100%**	
2.18.001.2.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Peserta yang mendapatkan informasi peraturan pembinaan peningkatan wawasan perundang - undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	40 Orang		40	0	**0**	40 Orang	40 Orang	40 Orang	
2.18.001.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**Tersedianya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**		**100**	**25**	**25**	**100%**	**100%**	**100%**	
2.18.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket		1	0	**0**	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
2.18.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket		1	0	**0**	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
2.18.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket		1	0	**0**	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
2.18.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket		1	0	**0**	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
2.18.001.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen		2	0	**0**	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
2.18.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		1	0	**0**	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
2.18.001.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran**	**Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**		**100**	**25**	**25**	**100%**	**100%**	**100%**	
2.18.001.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1	0	**0**	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

2.18.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan		1	0	**0**	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
2.18.001.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan BMD**	**Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**		**100**	**25**	**25**	**100%**	**100%**	**100%**	
2.18.001.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0		0	-	-	0	0	0	
2.18.001.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit		3	0	**0**	3 Unit	3 Unit	3 Unit	
2.18.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17 Unit		17	4	**24**	17 Unit	17 Unit	17 Unit	
2.18.002	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA (dalam juta rupiah)**	**Meningkatnya kemudahan berusaha**	**3.000.000**		**3.000.000**	**943.059**	**31,44**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	
2.18.002.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha**	**Tersedianya dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha**	**2 Dokumen**		**2**	**0**	**0**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	
2.18.002.2.02.001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal DaerahKabupaten/Kota (Dokumen)	Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1	0	**0**	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dokumen)	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1	0	**0**	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.18.003	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Investor Non Tambang dan Non Sawit**	**Terciptanya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mempromosikan investasi**	**71 Investor**		**71**	**0**	**0**	**71 Investor**	**71 Investor**	**71 Investor**	
2.18.003.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal**	**3 Event**		**3**	**0**	**0**	**3 Event**	**3 Event**	**3 Event**	

2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab./Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1	0	**0**	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	2 Dokumen		1	0	**0**	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
2.18.004	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Meningkatnya daya tarik bagi investor dan mendorong investasi yang berkelanjutan**	**81,07**		**81,07**	**80,91**	**99,80**	**81,07**	**81,07**	**81,07**	
2.18.004.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Unsur SPM yang terpenuhi**	**Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sesuai NSPK**	**81,07 %**		**81,07**	**80,91**	**99,80**	**81,07 %**	**81,07 %**	**81,07 %**	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	928 Pelaku Usaha		928	240	25,86	928 Pelaku Usaha	928 Pelaku Usaha	928 Pelaku Usaha	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	20 Orang		20	27	135	20 Orang	20 Orang	20 Orang	
2.18.005	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan**	**Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**71 Investor**		**71**	**0**	**0**	**71 Investor**	**71 Investor**	**71 Investor**	
2.18.005.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pengendalian terhadap perusahaan**	**Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap perusahaan (Perusahaan)**	**71 Perusahaan**		**71**	**0**	**0**	**71 Perusahaan**	**71 Perusahaan**	**71 Perusahaan**	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	31 Kegiatan Usaha		31	0	0	31 Kegiatan Usaha	31 Kegiatan Usaha	31 Kegiatan Usaha	

2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pembinaan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	20 Pelaku Usaha		20	0	0	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengawasan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	20 Pelaku Usaha		20	0	0	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	
2.18.006	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal**	**Meningkatnya Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal**	**90%**		**90**	**22,5**	**25**	**90%**	**90%**	**90%**	
2.18.006.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah ketersedian data dan informasi perizinan dan nonperizinan**	**Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan**	**90%**		**90**	**22,5**	**25**	**90%**	**90%**	**90%**	
2.18.006.2.01.001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	Terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dokumen		1	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis sebagian besar sudah diatas 25% dari target yang ditetapkan. Hanya saja untuk sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi masih masih belum bisa dihitung karena data realisasinya masih belum masuk, (Masih menunggu rekap release dari kementrian BKPM);.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran antara lain:

1. Program promosi penanaman modal dengan tingkat capaian Kinerja dan Anggaran 16,81%, hal ini disebabkan Pegawai yang bertanggung jawab melaksanakan program promosi kekurangan sumber daya yang memadai dan keterbatasan anggaran untuk kegiatan promosi.
2. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan tingkat capaian Kinerja dan Anggaran 16,90%, hal ini di sebabkan kurangnya kesadaran pelaku usaha, masyarakat dan pelaku usaha kadang kurang patuh dalam mengurus izin usaha yang di perlukan, serta banyak pelaku usaha yang kurang memahami prosedur dan persyaratan perizinan. Kebijakan anggaran yang membatasi pengawasan pelaksanaan kegiatan juga menghambat keberhasilan program.

b. Realisasi Program/kegiatan yang memenuhi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota, penyebab terpenuhinya target adalah infrastruktur yang memadai, terutama untuk program berbasis teknologi serta kepemimpinan yang baik pada tingkat perencanaan dan pelaksanaan program berkontribusi pada keberhasilan program.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, penyebab terpenuhinya target adalah penyederhanaan dalam prosedur perizinan, seperti penerapan system online dan layanan terpadu satu pintu, sangat membantu investor dalam mengurus dokumen dan proses perizinan
3. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, penyebab terpenuhinya target adalah perencanaan yang efektif dan terstruktur sehingga

mencapai target program pengelolaan data dan system informasipenanaman modal serta penggunaan teknologi yang tepat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data system informasi penanaman modal.

c. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan.

Program Pelayanan Penanaman Modal dengan tingkat capaian Kinerja dan Anggaran 100,42%, penyebab melebihinya target adalah penyediaan informasi yang lengkap dan mudah di akses mengenai persyaratan, prosedur, biaya, dan jangka waktu pelayanan membantu pelaku usaha memahami proses dengan baik.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser sampai dengan Periode Maret 2025 :

1. Komitmen pimpinan dan kerja sama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain ituditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Belum Optimalnya kinerja realisasi investasi terkait pelaporan kegiatan penanaman modal dari perusahaan sehingga Perangkat Daerah belum mendapatkan data yang lebih lengkap dan valid.
2. Belum optimalnya implementasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dikarenakan keterbatasan sarana transportasi yang diperlukan untuk kegiatan ke lapangan
3. Belum optimalnya pengawasan karena kurangnya SDM.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut maka diusulkan beberapa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur secara reguler melalui bimbingan teknis/pelatihan/studi tiru pengayaan informasi dan peningkatan kapasitas.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana transportasi yang memadai utnuk mendukung tugas tugas lapangan
3. Meningkatkan kinerja pelaporan kegiatan penanaman modal melalui pembinaan dan sosialisasi tatacara pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal kepada perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Paser.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, DPMPTSP menyelenggarakan fungsi:

1. penetapan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
2. perencanaan program di bidang penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
3. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang meliputi penanaman modal, perizinan, serta data dan pengaduan;
4. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan pengkoordinasian di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang meliputi penanaman modal, perizinan, serta data dan pengaduan.

Upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintudalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Meningkatnya Realisasi Investasi
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuTahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintuterdapat dalam Tabel 2.2 di bawahini.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Paser

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Pertumbuhan Investasi		✓	35	40	45	50	0,3148	-13,55			
2	Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA (Milyar)			2000	2500	3000	3500	3,661	3.122	943		
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			81,04	81,06	81,07	81,12	83.91	83,06	81,41		
4	Nilai Akuntabiltas Kinerja			75,2	75,5	75,8	80	69,59	71,2			

Berdasarkan Tabel T-C.30 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Mewujudkan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah memiliki 1 indikator kinerja yaitu Persentase Pertumbuhan Investasi, dimana target yang ditetapkan adalah 45 % dengan realisasinya -13.55% capaian kinerja sebesar -13.55%;
b. Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasimemiliki 1 indikator kinerja yaitu Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA (Milyar) dimana target yang ditetapkan adalah 3 Triliun sampai dengan triwulan II ini data realisasinyamasih belum masuk,

(Masih menunggu rekap release dari kementrian BKPM);

c. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dengan indikator kinerja yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimana target yang ditetapkan adalah 81,07 sampai dengan triwulan II ini realisasinya 80.91 capaian kinerja sebesar 99.80%;
d. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan indikator kinerja Nilai Akuntabiltas Kinerja dimana target yang ditetapkan adalah 75,8 dengan realisasinya 71.20 capaian kinerja sebesar 93.93%;

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini penting dikarenakan dampaknya yang signifikan dan bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan penyelenggaraan pemerintahan kedepannya.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan terkait dengan Tugas Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Paser, terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sasaran Renstra BKPM Republik Indonesia, sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Kalimantan Timur, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta Analisis KLHS yang telah dilakukan, maka dapat teridentifikasi isu isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser yaitu:

1. Rendahnya Minat Investasi Pada Industri Hilir/Pengolahan/Manufaktur Yang Bisa Menyerap Bahan Baku dari Produk Lokal
2. Rendahnya Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Khususnya Kualitas Pelayanan Perizinan (Terkait Kepastian Waktu dan Proses)
3. Belum Optimalnya Tata Kelola Manajemen Administrasi Pemerintah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2026 yaitu “Pemerataan Pembangunan untuk Menciptakan Kesejahteraan yang

Merata di seluruh Kabupaten Paser**”**yang dijabarkan ke dalam rangka Penguatan Perekonomian melalui Prioritas Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
2. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan kedalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu mendukung pencapaian sasaran ke-1, yaitu “**Meningkatnya multiplier effect sektor pertanian. yang meliputi urusan pertanian, pangan,perindustrian, penanaman modal dan ketenagakerjaan**”.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran Tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser

No.	Rancangan Akhir Perubahan RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif Setelah Efisiensi (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab paser**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**Pimpinan atau Kepala SKPD serta seluruh pegawai staf Kabupaten Paser**	**75,8 %**	**10.310.140.965**	**10.048.226.634**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab paser**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP**	**75,8 %**	**11.542.427.344**	
A.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab paser	Persentase Capaian Sasaran Strategis DPMPTSP	Pimpinan atau Kepala SKPD serta seluruh pegawai staf Kabupaten Paser	100%	177.477.260	108.450.298	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab paser	Persentase Capaian Sasaran Strategis DPMPTSP	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	208.449.212	
A.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pimpinan atau Kepala SKPD serta seluruh pegawai staf Kabupaten Paser	3 Dokumen	72.662.351	36.331.175	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	73.634.303	
A.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pimpinan atau Kepala SKPD serta seluruh pegawai staf Kabupaten Paser	1 Laporan	61.842.071	37.896.035	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	61.842.071	
A.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pimpinan atau Kepala SKPD serta seluruh pegawai staf Kabupaten Paser	1 Laporan	42.972.838	34.223.088	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	72.972.838	
A.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab paser	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pimpinan atau Kepala SKPD serta seluruh pegawai staf Kabupaten Paser	100%	9.582.430.244	9.567.669.588	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab paser	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	9.582.430.244	
A.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Pimpinan atau Kepala SKPD serta seluruh pegawai staf Kabupaten Paser	30 Orang/Bulan	9.107.772.836	9.107.772.836	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	46 Orang/Bulan	9.107.772.836	
A.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester SKPD	Pimpinan atau Kepala SKPD serta seluruh pegawai staf Kabupaten Paser	1 Laporan	474.657.408	459.896.752	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	474.657.408	
A.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab paser	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian	Pimpinan atau Kepala SKPD serta seluruh pegawai staf Kabupaten Paser	100%	17.499.500	8.749.750	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab paser	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian	Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	458.334.227	
A.3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab paser	Jumlah Peserta yang mendapatkan informasi peraturan pembinaan peningkatan wawasan perundang - undangan	Pimpinan atau Kepala SKPD serta seluruh pegawai staf Kabupaten Paser	40 Orang	17.499.500	8.749.750	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab paser	Jumlah Peserta yang mendapatkan informasi peraturan pembinaan peningkatan wawasan perundang - undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	40 Orang	96.084.227	Tambahan Untuk Kegiatan Zona Integritas/ZI (Berdasarkan arahan Inspektorat Kab. Paser)

A.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	Pimpinan atau Kepala SKPD serta seluruh pegawai staf Kabupaten Paser	.-	-	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undanga	Kab paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	362.250.000	Rekomendasi CHR Inspektorat Kab. Paser (Pelatihan Training Of Trainer (TOT) OSS oleh Kementrian Investasi dan Hilirisasi/BKPM atau DPMPTSP Prov.
A.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab paser	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Pimpinan atau Kepala SKPD serta seluruh pegawai staf Kabupaten Paser	100%	449.233.842	279.856.879	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab paser	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.209.713.542	
A.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pimpinan atau Kepala SKPD serta seluruh pegawai staf Kabupaten Paser	1 Paket	6.723.000	6.721.892	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	6.721.892	
A.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pimpinan atau Kepala SKPD serta seluruh pegawai staf Kabupaten Paser	1 Paket	89.484.187	88.683.550	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	849.964.995	Tambahan Sarana Pendukung MPP dan Tim Penanggulangan Kebakaran
A.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pimpinan atau Kepala SKPD serta seluruh pegawai staf	1 Paket	41.103.000	27.139.610	Penyediaan Bahan Logistik Kan	Kab paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	41.103.000	
A.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pimpinan atau Kepala SKPD serta seluruh pegawai staf Kabupaten Paser	1 Paket	30.141.600	15.070.800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	30.141.600	
A.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Pimpinan atau Kepala SKPD serta seluruh pegawai staf Kabupaten Paser	2 Dokumen	3.688.800	3.194.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	3.688.800	
A.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pimpinan atau Kepala SKPD serta seluruh pegawai staf Kabupaten Paser	2 Laporan	278.093.255	139.046.627	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	278.093.255	
A.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab paser	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	Pimpinan atau Kepala SKPD serta seluruh pegawai staf Kabupaten Paser	100%	19.364.375	19.364.375	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab paser	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	19.364.375	
A.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pimpinan atau Kepala SKPD serta seluruh pegawai staf Kabupaten Paser	1 Laporan	2.000.000	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	
A.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pimpinan atau Kepala SKPD serta seluruh pegawai staf Kabupaten Paser	1 Laporan	17.364.375	17.364.375	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	17.364.375	
A.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab paser	Persentase Pemeliharaan BMD	Pimpinan atau Kepala SKPD serta seluruh pegawai staf Kabupaten Paser	100%	64.135.744	64.135.744	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab paser	Persentase Pemeliharaan BMD	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	64.135.744	
A.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pimpinan atau Kepala SKPD serta seluruh pegawai staf Kabupaten Paser	3 Unit	56.665.744	56.665.744	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	56.665.744	
A.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pimpinan atau Kepala SKPD serta seluruh pegawai staf Kabupaten Paser	17 Unit	7.470.000	7.470.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17 Unit	7.470.000	

B	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Kab paser**	**Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA (dalam juta rupiah)**	**Pelaku Usaha**	**3.000.000**	**1.335.551.731**	**955.292.192**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Kab paser**	**Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA (dalam juta rupiah)**	**Meningkatnya kemudahan berusaha**	**3.000.000**	**1.206.236.009**	
B.1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha	Pelaku Usaha	2 Dokumen	1.335.551.731	955.292.192	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha	Tersedianya dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha	2 Dokumen	1.206.236.009	
B.1.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal DaerahKabupaten/Kota (Dokumen)	Pelaku Usaha	1 Dokumen	426.712.500	295.697.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal DaerahKabupaten/Kota (Dokumen)	Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	427.953.000	
B.1.2	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dokumen)	Pelaku Usaha	1 Dokumen	908.839.231	659.595.192	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dokumen)	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	778.283.009	
C	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Kab paser**	**Jumlah Investor Non Tambang dan Non Sawit**	**Pelaku Usaha**	**71 Investor**	**732.000.000**	**539.435.883**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Kab paser**	**Jumlah Investor Non Tambang dan Non Sawit**	**Terciptanya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mempromosikan investasi**	**71 Investor**	**723.613.139**	
C.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Pelaku Usaha	3 Dokumen	732.000.000	539.435.883	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	3 Dokumen	723.613.139	
C.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab./Kota	Pelaku Usaha	1 Dokumen	217.000.000	173.587.975	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab./Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	509.345.164	
C.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	2 Dokumen	515.000.000	365.847.908	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	2 Dokumen	214.267.975	
D	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Kab paser**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Pelaku Usaha**	**81,07**	**1.887.108.633**	**1.412.502.035**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Kab paser**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Meningkatnya daya tarik bagi investor dan mendorong investasi yang berkelanjutan**	**81,07**	**2.387.108.633**	
D.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab paser	Jumlah Unsur SPM yang terpenuhi	Pelaku Usaha	81,07 %	1.887.108.633	1.412.502.035	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab paser	Jumlah Unsur SPM yang terpenuhi	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sesuai NSPK	81,07 %	2.387.108.633	
D.1.1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab paser	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	928 Pelaku Usaha	1.617.708.633	1.227.103.275	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab paser	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	928 Pelaku Usaha	2.117.708.633	Tambahan untuk pelaksanaan PERBUB Nomor : 48 Tahun 2024

D.1.2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab paser	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Pelaku Usaha	20 Orang	269.400.000	185.398.760	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab paser	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	20 Orang	269.400.000	
E	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Kab paser**	**Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan**	**Pelaku Usaha**	**71 Investor**	**619.150.632**	**384.619.968**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Kab paser**	**Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan**	**Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**71 Investor**	**711.657.733**	
E.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah pengendalian terhadap perusahaan	Pelaku Usaha	71 Perusahaan	619.150.632	384.619.968	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah pengendalian terhadap perusahaan	Terlaksananya kegiatan pengendalian terhadap perusahaan (Perusahaan)	71 Perusahaan	711.657.733	
E.1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab paser	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	31 Kegiatan Usaha	223.600.000	131.567.101	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab paser	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	31 Kegiatan Usaha	316.107.101	
E.1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab paser	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pembinaan	Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	220.000.000	158.662.551	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab paser	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pembinaan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	20 Pelaku Usaha	220.000.000	
E.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	Kab paser	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengawasan	Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	175.550.632	94.390.316	Pengawasan Penanaman Modal	Kab paser	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengawasan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	20 Pelaku Usaha	175.550.632	
F	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Kab paser**	**Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal**	**Pelaku Usaha**	**90%**	**205.259.154**	**137.037.154**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Kab paser**	**Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal**	**Meningkatnya Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal**	**90%**	**205.259.154**	
F.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah ketersedian data dan informasi perizinan dan nonperizinan	Pelaku Usaha	90%	205.259.154	137.037.154	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab paser	Jumlah ketersedian data dan informasi perizinan dan nonperizinan	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	90%	205.259.154	
F.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab paser	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	Pelaku Usaha	1 Dokumen	205.259.154	137.037.154	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab paser	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	Terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dokumen	205.259.154	
Jumlah						**15.089.211.115**	**13.477.113.866**						**16.776.302.012**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser tidak mendapat masukan program / kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan perizinan berusaha, maupun dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi ataupun pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Paser.

BABIII
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perubahan PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2025, maka pada dokumen Rencana Kera Perubahan ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

TC 3.3

Tabel 3.1

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Paser

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Lokasi	Pagu Indikatif Tahun 2025		Pagu Indikatif Tahun Tahun 2025 Setelah Efisiensi		Pagu Indikatif Tahun Tahun 2025 Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	5	6	5	6	6	5	6
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**15.089.211.115**		**13.477.113.866**		**16.776.302.012**	**3.299.188.146**		**10.327.130.000**
2,18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**15.089.211.115**		**13.477.113.866**		**16.776.302.012**	**3.299.188.146**		**10.327.130.000**
2.18.001	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**Kabupaten Paser**	**75,8%**	**10.310.140.965**	**75,8%**	**10.048.226.634**	**75,8%**	**11.542.427.344**	**1.494.200.710**	**80%**	**8.604.910.200**
2.18.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Sasaran Strategis DPMPTSP	Kabupaten Paser	100%	177.477.260	100%	108.450.298	100%	208.449.212	99.998.914	100%	264.751.122
2.18.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	3 Dokumen	72.662.351	3 Dokumen	36.331.175	11 Dokumen	73.634.303	37.303.128	3 Dokumen	124.595.468
2.18.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Paser	1 Laporan	61.842.071	1 Laporan	37.896.035	1 Laporan	61.842.071	23.946.036	1 Laporan	84.434.175
2.18.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	1 Laporan	42.972.838	1 Laporan	34.223.088	4 Laporan	72.972.838	38.749.750	1 Laporan	55.721.479
2.18.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Paser	100%	9.582.430.244	100%	9.567.669.588	100%	9.582.430.244	14.760.656	100%	7.761.245.357
2.18.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Kabupaten Paser	30 Orang/Bulan	9.107.772.836	30 Orang/Bulan	9.107.772.836	46 Orang/Bulan	9.107.772.836	-	30 Orang/Bulan	7.193.049.032
2.18.001.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester SKPD	Kabupaten Paser	1 Laporan	474.657.408	1 Laporan	459.896.752	1 Laporan	474.657.408	14.760.656	1 Laporan	568.196.325
2.18.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian	Kabupaten Paser	100%	17.499.500	100%	8.749.750	100%	458.334.227	449.584.477	100%	103.380.265
2.18.001.2.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang mendapatkan informasi peraturan pembinaan peningkatan wawasan perundang - undangan	Kabupaten Paser	40 Orang	17.499.500	40 Orang	8.749.750	40 Orang	96.084.227	87.334.477	40 Orang	103.380.265
2.18.001.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan SatuanOrang)	Kabupaten Paser	-	-	-	-	45 Orang	362.250.000	362.250.000	40 Orang	103.380.265
2.18.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kabupaten Paser	100%	449.233.842	100%	279.856.879	100%	1.209.713.542	929.856.663	100%	380.261.584
2.18.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Paser	1 Paket	6.723.000	1 Paket	6.721.892	1 Paket	6.721.892	-	1 Paket	8.182.423

2.18.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Paser	1 Paket	89.484.187	1 Paket	88.683.550	1 Paket	849.964.995	761.281.445	1 Paket	106.398.035
2.18.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Paser	1 Paket	41.103.000	1 Paket	27.139.610	1 Paket	41.103.000	13.963.390	1 Paket	49.961.075
2.18.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Paser	1 Paket	30.141.600	1 Paket	15.070.800	1 Paket	30.141.600	15.070.800	1 Paket	36.637.546
2.18.001.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Paser	2 Dokumen	3.688.800	2 Dokumen	3.194.400	2 Dokumen	3.688.800	494.400	2 Dokumen	4.490.104
2.18.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Paser	2 Laporan	278.093.255	2 Laporan	139.046.627	2 Laporan	278.093.255	139.046.628	2 Laporan	174.592.401
2.18.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	Kabupaten Paser	100%	19.364.375	100%	19.364.375	100%	19.364.375	-	100%	20.232.594
2.18.001.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Paser	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	-	1 Laporan	2.000.000
2.18.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Paser	1 Laporan	17.364.375	1 Laporan	17.364.375	1 Laporan	17.364.375	-	1 Laporan	18.232.594
2.18.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD	Kabupaten Paser	100%	64.135.744	100%	64.135.744	100%	64.135.744	-	100%	75.039.278
2.18.001.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Paser	3 Unit	56.665.744	3 Unit	56.665.744	3 Unit	56.665.744	-	1 Unit	55.852.512
2.18.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Paser	17 Unit	7.470.000	17 Unit	7.470.000	17 Unit	7.470.000	-	17 Unit	19.186.766
2.18.002	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA (dalam juta rupiah)**	**Kabupaten Paser**	**3.000.000**	**1.335.551.731**	**3.000.000**	**955.292.192**	**3.000.000**	**1.206.236.009**	**250.943.817**	**3.500.000**	**250.919.800**
2.18.002.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha	Kabupaten Paser	2 Dokumen	1.335.551.731	2 Dokumen	955.292.192	2 Dokumen	1.206.236.009	250.943.817	2 Dokumen	250.919.800
2.18.002.2.02.001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal DaerahKabupaten/Kota (Dokumen)	Kabupaten Paser	1 Dokumen	426.712.500	1 Dokumen	295.697.000	1 Dokumen	427.953.000	132.256.000	1 Dokumen	125.459.900
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dokumen)	Kabupaten Paser	1 Dokumen	908.839.231	1 Dokumen	659.595.192	1 Dokumen	778.283.009	118.687.817	1 Dokumen	125.459.900
2.18.003	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Investor Non Tambang dan Non Sawit**		**71 Investor**	**732.000.000**	**71 Investor**	**539.435.883**	**71 Investor**	**723.613.139**	**184.177.256**	**78 Investor**	**249.300.000**
2.18.003.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Kabupaten Paser	3 Dokumen	732.000.000	3 Dokumen	539.435.883	3 Dokumen	723.613.139	184.177.256	3 Dokumen	249.300.000
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab./Kota	Kabupaten Paser	1 Dokumen	217.000.000	1 Dokumen	173.587.975	1 Dokumen	509.345.164	335.757.189	1 Dokumen	103.800.000
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	2 Dokumen	515.000.000	2 Dokumen	365.847.908	2 Dokumen	214.267.975	(151.579.933)	2 Dokumen	145.500.000
2.18.004	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Kabupaten Paser**	**81,07**	**1.887.108.633**	**81,07**	**1.412.502.035**	**81,07**	**2.387.108.633**	**974.606.598**	**81,12**	**610.400.000**

2.18.004.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Unsur SPM yang terpenuhi	Kabupaten Paser	81,07 %	1.887.108.633	81,07 %	1.412.502.035	81,07 %	2.387.108.633	974.606.598	81,12 %	610.400.000
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Paser	928 Pelaku Usaha	1.617.708.633	928 Pelaku Usaha	1.227.103.275	928 Pelaku Usaha	2.117.708.633	890.605.358	930 Pelaku Usaha	508.200.000
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Paser	20 Orang	269.400.000	20 Orang	185.398.760	20 Orang	269.400.000	84.001.240	20 Orang	102.200.000
2.18.005	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan**	**Kabupaten Paser**	**71 Investor**	**619.150.632**	**71 Investor**	**384.619.968**	**71 Investor**	**711.657.733**	**327.037.765**	**78 Investor**	**440.200.000**
2.18.005.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian terhadap perusahaan	Kabupaten Paser	71 Perusahaan	619.150.632	71 Perusahaan	384.619.968	71 Perusahaan	711.657.733	327.037.765	78 Perusahaan	440.200.000
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Paser	31 Kegiatan Usaha	223.600.000	31 Kegiatan Usaha	131.567.101	31 Kegiatan Usaha	316.107.101	184.540.000	38 Kegiatan Usaha	102.200.000
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pembinaan	Kabupaten Paser	20 Pelaku Usaha	220.000.000	20 Pelaku Usaha	158.662.551	20 Pelaku Usaha	220.000.000	61.337.449	20 Pelaku Usaha	169.000.000
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengawasan	Kabupaten Paser	20 Pelaku Usaha	175.550.632	20 Pelaku Usaha	94.390.316	20 Pelaku Usaha	175.550.632	81.160.316	20 Pelaku Usaha	169.000.000
2.18.006	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal**	**Kabupaten Paser**	**90%**	**205.259.154**	**90%**	**137.037.154**	**90%**	**205.259.154**	**68.222.000**	**100%**	**171.400.000**
2.18.006.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersedian data dan informasi perizinan dan nonperizinan	Kabupaten Paser	90%	205.259.154	90%	137.037.154	90%	205.259.154	68.222.000	100%	171.400.000
2.18.006.2.01.001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	Kabupaten Paser	1 Dokumen	205.259.154	1 Dokumen	137.037.154	1 Dokumen	205.259.154	68.222.000	1 Dokumen	171.400.000
Jumlah					**15.089.211.115**		**13.477.113.866**		**16.776.302.012**	**3.299.188.146**		**10.327.130.000**

IV
P E N U T U P

Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun 2025, merupakan rencana kerja tahunan yang disusun untuk tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah, target dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser .

Selain itu Rencana Kerja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Paser ini juga merupakan dokumen perencanaan tahunan yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan arah dan rencana ke depan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta kemampuan sumber daya dan pembiayaan yang berasal dari APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025.

4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Perubahan sebagai salah satu sarana tata kelola organisasi yang dapat dipergunakan, untuk :

a. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan;
b. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan;
c. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan;
d. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan kegiatan yang telah disusun;
e. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.
f. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan tersusunnya Renja Perubahan ini, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran visi misi instansi diharapkan akan lebih terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta

terwujudnya komunikasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser maupun dengan instansi/lembaga terkait yang membidangi fungsi lain.

Tana Paser, 22 Agustus 2025
Kepala DPMPTSP Kab. Paser,

Toto Irianto, ST., M.Ling
Pembina Tingkat I / IV.b

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.K.Bangsa KM.5 Komp.Perkantoran Gdg.F Lt.1 Kav.2, T.Grogot, Kab.Paser, 76251
Website : http://dpmptsp.paserkab.go.id, Email : dpmptsp@paserkab.go.id

KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER
NOMOR : 10 Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER

KEPALA DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Renja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025, perlu dibentuk Tim Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser;

b. Bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Paser.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/05/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Umum Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelimpahan kewenangan penerbitan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

10. Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Renja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana tersebut pada diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membuat dan menyusun Laporan Renja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser;
2. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan pada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini;

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 05 Januari 2024

Kepala DPMPTSP Kab. paser,

Ir. Toto ifrianto, ST, M.Ling
Pembina TK. I/IVb
NIP. 19731116 199203 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP
KAB. PASER
NOMOR : 10 Tahun 2024
TANGGAL : 05 Januari 2024

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER

Ketua	:	Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kab. Paser
Sekretaris	:	Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kab. Paser
Anggota PNS	:	1. Akhmad Faridi Wijaya SE., M.Si, Perencana Ahli Muda / Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan
		2. Vera Juliati Simamora, SE Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		3. Zainal Arifin, A.Md, Pelaksana
Anggota Non PNS	:	1. Noorhasanah S.I.P, Pelaksana

Kepala DPMPTSP Kab. paser,

Ir. Toto Irianto, ST, M.Ling
Pembina TK. I/IVb
NIP. 19731116 199203 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2025

Komplek Perkantoran Terpadu Jl. Kesuma Bangsa Km. 5 Gedung D. Lt. 1 Kv. 1
Tana Paser

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Paser Tahun 2025 dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dokumen ini merupakan implementasi dari Renstra dan bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Paser di Bidang Kelautan dan Perikanan secara tahunan untuk tahun 2025 agar kebijakan yang dimaksud tepat sasaran sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Perubahan Renja Perangkat Daerah ini adalah dokumen perencanaan yang merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Kami mengharapkan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi, dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Paser, sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Akhirnya kami mengharapkan kritik, saran, masukan serta dukungan semua pihak, demi suksesnya pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan dalam Perubahan Renja Dinas Perikanan ini dan atas bantuan semua pihak yang terkait dengan penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan ini diucapkan terima kasih.

Tana Paser, 22 Agustus 2025
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Paser

Rudiansyah, S.Pi.,M.Si.
Pembina Tk.1/IV B
NIP. 19710311 199803 1 007

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi..... ii

Daftar Tabel iii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud Dan Tujuan..... 6

1.4 Sistematikan Penulisan 7

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 23

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan dan Fungsi Perangkat Daerah 27

2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025..... 28

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 38

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 44

BAB IV. PENUTUP 59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Periode Pelaksanaan hingga Triwulan I Tahun 2025.	10
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Paser.....	24
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025....	25
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Paser.....	27
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Paser	35
Tabel 3.1	Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah..... 4

LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perikanan Tahun 2025 dan Renja Tahun 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Berpedoman pada Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Paser mengacu pada Sembilan (9) arah baru tujuan pengelolaan perikanan yaitu: (1). Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya kecil, (2) Meningkatkan penerimaan dan devisa Negara, (3) Mendorong perluasan kesempatan kerja,(4) Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, (5) Mengoptimalkan pengelolaan pembudidayaan ikan, (6) Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing, (7) Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, (8) Mencapai, pemanfaatan sumberdaya

ikan,lahan pembudidaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan secara optimal, dan (9) Menjamin kelestarian sumberdaya ikan, lahan pembudidaya ikan dan tata ruang.

Pada Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 diarahkan sebagai upaya untuk memenuhi capaian sasaran Renstra dan RPJMD yang sampai pada triwulan I berdasarkan evaluasi belum mencapai target sasaran sehingga untuk penyempurnaan dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dalam triwulan I dimana titik berat pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk Pemerataan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh kabupaten Paser melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap maupun budidaya serta pembinaan teknis kepada pelaku usaha baik pembudidaya, nelayan dan pengolah hasil perikanan.

Penyusunan renja dan perubahan renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan I menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

a) Percepatan pelaksanaan program Prioritas Kepala Daerah

b) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Renstra Dinas Perikanan

Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perikanan, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Perikanan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Dinas Perikanan Kabupaten Paser Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Tahun 2025 dilakukan melalui proses teknokratis dan partisipatif dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan, proses *top-down* dan proses *bottom-up* secara berjenjang berdasarkan hasil Forum Rencana Kerja Perangkat Daerah dan selanjutnya disinergiskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

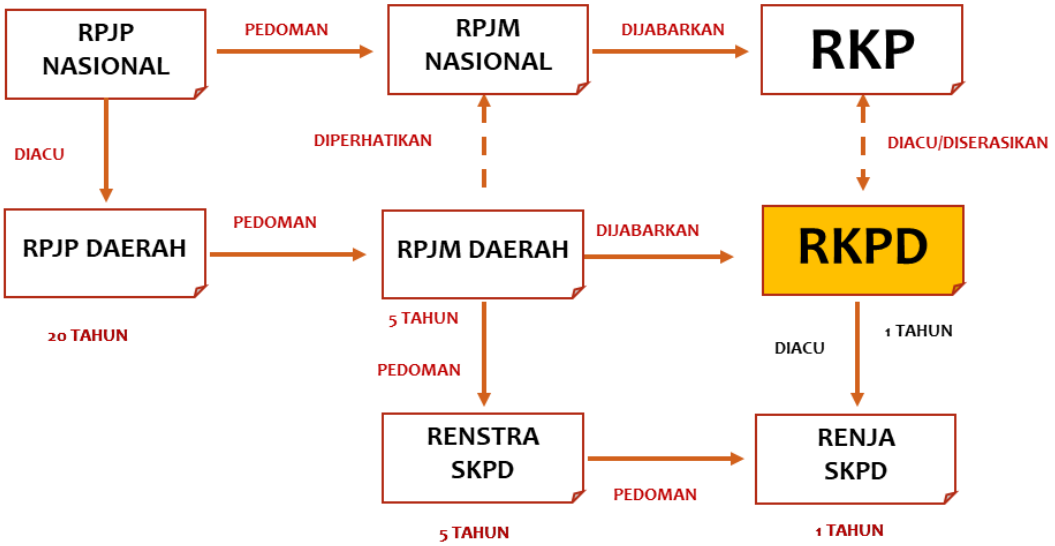

Gambar 1.1.Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Paser sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2006- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2006 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 ; dan
14. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser.

15. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 Nomor 14)

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser untuk periode satu tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah. Disamping itu pula sebagai acuan bagi bidang–bidang pada Dinas Perikanan dalam pencapaian program/kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Paser.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Renja adalah mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten, implementatif dan menjadi tolak ukur penilaian kinerja serta sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan, penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perikanan, proses penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perikanan, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Perikanan ,serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perikanan, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2025 hingga Triwulan I baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Menyajikan sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan Isu-isu penting terkait pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Menyajikan catatan analisa kebutuhan yang memerlukan penambahan pagu anggaran/penyesuaian target.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Pada Bab ini disajikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, yang bertujuan untuk menilai sejauh mana capaian program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap realisasi kinerja, baik dari sisi keluaran (output) maupun serapan anggaran, serta mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi dasar perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program pada triwulan berikutnya agar target kinerja tahunan dapat tercapai secara optimal.

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Perikanan tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser tahun 2021-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Perubahan rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja hingga

triwulan I tahun 2025 dan pencapaian kinerja Renstra perangkat daerah yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra perangkat daerah serta identifikasi faktor-faktor yang mendukung pencapaian target maupun hambatan/kendala yang menyebabkan pencapaian target per triwulan belum tercapai.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser pada Tahun 2025 tetap mengacu pada pencapaian indikator program Dinas perikanan yang tertuang dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 maupun dalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025, Dinas Perikanan Kabupaten Paser mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp. 23.269.496.051,- untuk melaksanakan 5 program, yang dijabarkan dalam 15 kegiatan dan 34 sub kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan hingga triwulan I Tahun 2025, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan
Periode Pelaksanaan hingga Triwulan I Tahun 2025

Kode	Perangkat Daerah/Tujuan/Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025		Sisa Anggaran	Predikat	
						Triwulan-I		Triwulan-II								
-1	-2	-3	-4			-5		-6		-7		-8		-9	-10	
			K		RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP	K	ST
	Tujuan : Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap Ekonomi Lokal/Non Tambang	Kontribusi Lapangan Usaha Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Paser	1.94	%												
3.25.0.00.0.00.25.0000	Dinas Perikanan		0		23,269,486,051	-	1,727,165,434	-	0		1,727,165,434		7.42	21,542,320,617		Sangat Rendah
	Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP	80.72													
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76	%	9,209,532,361	15	1,473,273,790			15	1,473,273,790	19.737	16	7,736,258,571	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun	100	%	252,400,000	25	8,362,610			25	8,362,610	25	3.3	244,037,390	ST	Sangat Rendah
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	130,000,000	1	0			1	0	20	0	130,000,000	Sangat Rendah	Sangat Rendah

3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	4,000,000	0	0			0	**0**	0	0	4,000,000	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	3,000,000	0	0			0	**0**	0	0	3,000,000	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	4,000,000	0	0			0	**0**	0	0	4,000,000	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	111,400,000	2	8,362,610			2	8,362,610	40	7.5	103,037,390	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan Dinas Perikanan**	**100**	**%**	**7,951,884,305**	**25**	**1,347,268,615**			**25**	**1,347,268,615**	**25**	**16.94**	**6,604,615,690**	**ST**	**Sangat Rendah**
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	Orang/Bulan	7,845,362,805	26	1,334,946,215			26	1,334,946,215	56.52174	17.0	6,510,416,590	Rendah	Sangat Rendah
3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300	Dokumen	51,521,500	59	0			59	0	19.66667	0	51,521,500	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	55,000,000	1	12,322,400			1	12,322,400	50	22.4	42,677,600	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum Dinas Perikanan**	**100**	**%**	**638,977,956**	**25**	**37,159,985**			**25**	**37,159,985**	**25**	**5.82**	**601,817,971**	**ST**	**Sangat Rendah**

3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	251,372,690	0	0			0	0	0	0.0	251,372,690	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	79,605,266	1	9,281,493			1	9,281,493	33.33333	11.7	70,323,773	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	18,000,000		986,902			0	986,902	0	5.5	17,013,098	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	290,000,000	3	26,891,590			3	26,891,590	25	9.3	263,108,410	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**2**	**Jenis**	**269,093,500**		**67,421,360**			**0**	**67,421,360**	**0**	**25.05**	**201,672,140**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1,000,000	0	350,000			0	350,000	0	35.0	650,000	Sangat Rendah	T
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	268,093,500	3	67,071,360			3	67,071,360	25	25.0	201,022,140	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintahan daerah yang dipelihara**	**4**	**Jenis**	**97,176,600**	**1**	**13,061,220**			**1**	**13,061,220**	**25**	**13.44**	**84,115,380**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	70,936,600	1	12,011,220			1	12,011,220	33.33333	16.9	58,925,380	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	Unit	26,240,000	1	1,050,000			1	1,050,000	9.1	4.0	25,190,000	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Produksi Kelautan dan Perikanan	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**	**10,936.17**	**Ton**		**####**				**#####**	**0**	**20.809**		**0**	**Sangat Rendah**	

3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap**	**0.6**	**%**	**8,323,561,392**	**0.2**	**42,710,000**			**0.2**	**42,710,000**	**33.333**	**0.5**	**8,280,851,392**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
3.25.03.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah wilayah pengelolaan penangkapan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya**	**5**	**Kecamatan**	**7,963,561,392**	**0**	**27,400,000**			**0**	**27,400,000**	**0**	**0.34**	**7,936,161,392**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	5	Dokumen	53,248,865	0	2,620,000			0	2,620,000	0	4.9	50,628,865	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1609	Unit	7,910,312,527	0	24,780,000			0	24,780,000	0	0.3	7,885,532,527	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kelompok nelayan kecil yang diberdayakan**	**15**	**Kelompok**	**325,000,000**	**2**	**11,350,000**			**2**	**11,350,000**	**13.333**	**3.49**	**313,650,000**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50	Orang	295,000,000	20	5,320,000			20	5,320,000	40	1.8	289,680,000	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	5	Kelompok	30,000,000	0	6,030,000			0	6,030,000	0	20.1	23,970,000	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.25.03.2.06	**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Realisasi tanda daftar kapal perikanan di wilayah PUD**	**100**	**Dokumen**	**35,000,000**	**1**	**3,960,000**			**1**	**3,960,000**	**1**	**11.31**	**31,040,000**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**

3.25.03.2.06.0002	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	25	Rekomendasi	35,000,000	3	3,960,000			3	3,960,000	12	11.3	31,040,000	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Produksi Kelautan dan Perikanan	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**14,874**	**Ton**		**2,601**				**2,601**	**0**	**17.485**			**Sangat Rendah**	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**	**1**	**%**	**4,565,910,702**	**0.15**	**98,252,000**			**0.15**	**98,252,000**	**15**	**2.15**	**4,467,658,702**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Jumlah kelompok pembudi daya ikan yang diberdayakan**	**7**	**Kelompok**	**765,752,088**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0.00**	**765,752,088**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	4	Kelompok	27,000,000	0	0			0	**0**	0	0.0	27,000,000	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3	Kelompok	738,752,088	0	0			0	**0**	0	0.0	738,752,088	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.25.04.2.03	**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah rekomendasi perizinan bagi pembudidaya ikan**	**10**	**Dokumen**	**27,000,000**					**0**	**0**	0	**0.00**	27,000,000	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
3.25.04.2.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3	Rekomendasi	27,000,000	0	0			0	**0**	0	0.0	27,000,000	Sangat Rendah	Sangat Rendah

3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah wilayah pengelolaan pembudidayaan ikan**	**10**	**Kecamatan**	**3,773,158,614**		**98,252,000**			**0**	**98,252,000**	**0**	**2.60**	**3,674,906,614**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Dokumen	356,000,000	1	8,108,000			1	8,108,000	20	2.3	347,892,000	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.25.04.2.04.0003	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	2	Dokumen	29,000,000	0	2,090,000			0	2,090,000	0	7.2	26,910,000	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	424	Unit	3,361,158,614	0	86,136,000			0	86,136,000	0	2.6	3,275,022,614	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	20	Unit	27,000,000	5	1,918,000			5	1,918,000	25	7.1	25,082,000	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Cakupan wilayah PUD yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya perikanan**	**45**	**%**	**35,000,000**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**35,000,000**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
3.25.05.2.01	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan**	**60**	**%**	**35,000,000**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0.00**	**35,000,000**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	20	Pelaku Usaha	10,000,000	0	0			0	**0**	0	0.0	10,000,000	Sangat Rendah	Sangat Rendah

3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	10	Pelaku Usaha	25,000,000	0	0			0	**0**	0	0.0	25,000,000	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Sasaran : Meningkatnya Daya Saing Produk Olahan Hasil Perikanan	**Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan**	**3,015.49**	**Ton**		**1448**				**1448**	**0**	**48.019**			**Sangat Rendah**	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan**	**0.9**	**%**	**1,135,481,596**	**0.23**	**112,929,644**			**0.23**	**112,929,644**	**25.556**	**9.95**	**1,022,551,952**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
3.25.06.2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah rekomendasi izin usaha pengolahan hasil perikanan**	**2**	**Dokumen**	**113,600,000**	**1**	**15,283,200**			**1**	**15,283,200**	**50**	**50.00**	**98,316,800**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	5	Dokumen	113,600,000	2	15,283,200			2	15,283,200	40	13.5	98,316,800	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.25.06.2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah pelaku usaha yang menerapkan standar mutu dan keamanan hasil olahan**	**7**	**Kelompok**	**83,600,000**	**1**	**5,304,000**			**1**	**5,304,000**	**14.286**	**6.34**	**78,296,000**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
3.25.06.2.02.0001	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasara Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	5	Unit Usaha	83,600,000	1	5,304,000			1	5,304,000	20	6.3	78,296,000	Sangat Rendah	Sangat Rendah

3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah bahan baku industri pengolahan ikan yang tersedia**	**3264.32**	**Ton**	**938,281,596**	**755**	**92,342,444**			**755**	**92,342,444**	**23.129**	**9.84**	**845,939,152**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.64	Ton	656,600,000	0.75	89,592,444			0.75	89,592,444	2.3	13.6	567,007,556	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	50	Pelaku Usaha	281,681,596	5	2,750,000			5	2,750,000	10	1.0	278,931,596	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata Capaian Kinerja												**13.45**				**Sangat Rendah**

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Paser

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Total rata-rata capaian kinerja pada triwulan I Adalah masih dibawah 25 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.727.165.434,- (Satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp 23.269.486.051,- (dua puluh tiga milyar dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima puluh satu rupiah) dengan capaian keuangan sebesar 7,42%.
2. Rata-rata capaian kinerja kegiatan pada Dinas Perikanan sebesar 13,45 % dengan predikat kinerja sangat rendah
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 0 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 0 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 0 indikator capaian kinerja 0%-50% = 34 indikator.

Realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (≤ 25%) adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota**

Masih rendahnya realisasi capaian kinerja kegiatan pada program ini, disebabkan oleh :

- Penyusunan dokumen perencanaan baru pada tahap rancangan awal
- Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang telah direalisasikan gaji dan tunjangan PNS, sedangkan gaji dan tunjangan PPPK realisasi di triwulan (2) dua.
- Pengadaan peralatan kantor masih tahap perencanaan (penyesuaian E-Katalog versi 6)
- Kegiatan pemeliharaan dan perawatan BMD belum direalisasikan

2. **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Masih rendahnya capaian kinerja kegiatan pada program ini disebabkan :

- Masih dilaksanakannya CPCL calon penerima bantuan sarana perikanan tangkap
- Kurangnya tenaga adminsitrasi maupun teknis
- Adanya perubahan system pengadaan barang dan jasa (E-Katalog versi-6)
- Illegal Fishing, Overfishing, kendala lingkungan dan kondisi alam dan penggunaan alat tangkap yang dilarang

3. **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Faktor /kendala masih rendahnya capaian kinerja pada beberapa kegiatan tersebut, adalah :

- Potensi budidaya khususnya payau masih dalam kawasan cagar alam.
- rendahnya kesadaran pelaku usaha terkait perizinan usaha budidaya
- Adanya perubahan system pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya dikuasai pihak ketiga, sehingga perlu waktu sosialisasi terlebih dahulu
- Adanya perubahan harga barang di pasaran
- Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan hasil produksinya.

4. **Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

- Belum dilaksanakannya kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya, yang biasanya dilakukan secara bersama dengan tim dari provinsi.

5. **Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

- Ketidaksiapan administrasi maupun teknis calon kelompok penerima bantuan usulan oleh kelompok penerima bantuan

sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan menjadi tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan

- Masih banyaknya pelaku usaha pengolah yang belum menguasai teknis pengolahan yang sesuai standar.
- Masih banyaknya pelaku usaha yang belum terdaftar atau tercatat

- Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser periode triwulan I 2025 :
  1. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah maupun Provinsi;
  2. Adanya instruksi Pemerintah untuk percepatan anggaran
  3. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
  4. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai.
- Secara umum faktor penghambat yang dialami diantaranya:
  1. Terbatasnya SDM pada Dinas Perikanan baik tenaga administrasi maupun teknis
  2. Proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai jadwal;
  3. Adanya perubahan harga barang dipasaran;
  4. Adanya perubahan sistem e-purchasing ke e-catalog versi 6 sehingga belum dapat dilakukan proses pengadaan barang/jasa; dan
  5. Adanya perubahan spesifikasi terhadap barang yang diusulkan oleh masyarakat dan kesiapan calon kelompok penerima baik dari segi administrasi maupun teknis.
- Tidaklanjut yang diperlukan untuk triwulan berikutnya :
  1. Perlu adanya penambahan SDM administrasi dan teknis pada Dinas Perikanan
  2. Perlu adanya konsistensi terhadap usulan yang diusulkan oleh masyarakat melalui pelaksanaan verifikasi usulan yang lebih awal

3. Perlu tambahan anggaran untuk semua kegiatan yang menunjang kesejahteraan masyarakat perikanan
4. Melakukan identifikasi program/kegiatan yang prioritas dan berpotensi menyerap anggaran.
5. Percepat proses pelaksanaan program/kegiatan, termasuk pengadaan barang dan jasa.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan program/kegiatan berjalan sesuai rencana dan menambah intensitas monitoring sebelumnya per triwulan
7. Melaksanakan sosialisasi kerjasama pengelolaan budidaya dikawasan cagar alam
8. Evaluasi, pengembangan teknologi dan inovasi, pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan nelayan, Penguatan penegakan hukum, Partisipasi Masyarakat

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan perubahan renja tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2025.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah dinilai berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja yang masuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain adalah :

1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

   Indikator kinerja pada jumlah produksi perikanan budidaya merupakan penghitungan besarnya peningkatan produksi perikanan budidaya pada tahun 2025. Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah produksi perikanan budidaya baik budidaya air tawar, air payau maupun laut. Target kinerja indikator ini pada tahun 2025 adalah 14.874 ton untuk dapat mencapai target tersebut strategi yang dilakukan pada sektor perikanan budidaya dengan cara; a) Meningkatkan produktivitas budidaya dengan penerapan teknologi, penggunaan benih unggul, pengendalian hama penyakit ikan, dan b) Peningkatan kapasitas usaha budidaya yang dilakukan dengan pemenuhan infrastruktur kawasan serta sarana dan prasarana perikanan budidaya.

2. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

   Indikator kinerja pada jumlah produksi perikanan tangkap merupakan penghitungan jumlah volume produksi perikanan tangkap dari produksi laut dan perairan umum daratan (PUD) selama satu tahun. Target kinerja indikator ini pada tahun 2025 adalah 10.936,17 ton. Strategi yang digunakan untuk mencapai target kinerja indikator jumlah produksi perikanan tangkap dengan cara; a) Meningkatkan kapasitas usaha dengan dukungan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan b) Pemberdayaan Masyarakat Nelayan.

3. Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan

   Indikator kinerja pada jumlah produk olahan hasil perikanan merupakan penghitungan besarnya jumlah produk olahan hasil perikanan pada tahun 2025, indikator ini digunakan untuk melihat peningkatan produksi perikanan dari sektor pengolahan hasil

perikanan. Target kinerja indikator ini pada tahun 2025 adalah 3.015,49 ton.

Strategi yang digunakan untuk melihat peningkatan kinerja disektor pengolahan hasil perikanan yaitu dengan a) meningkatkan kualitas produksi hasil olahan dilaksanakan dengan melatih para pelaku usaha pengolahan hasil perikanan produk pengolahan baru/diversifikasi serta pelatihan dan fasilitasi poklahsar untuk mengurus sertifikat PIRT, b) peningkatan kapasitas usaha pengolahan hasil perikanan dilakukan dengan memberikan bantuan sarana pengolahan, serta sarana pengolahan untuk peningkatan kapasitas produk ini disebabkan oleh perbaikan/update data base pelaku usaha pengolah.

Berikut gambaran pelayanan urusan perikanan tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Paser

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Indikator Lainnya	Target Rentra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB				1.88	1.9	1.92	1.94	1.92	2.21			
2	Jumlah produksi perikanan tangkap		IKK		10,677.84	10,763.27	10,849.37	10,936.17	10,876.45	10,984.53	10,990	11,036.17	
3	Jumlah produksi perikanan budidaya		IKK		14,150.80	14,292.33	14,435.25	14,579.61	14,293.62	14,844.52	14,850	14,879.61	
4	Jumlah produksi olahan hasil perikanan			IKU	2,440.30	2,462.30	2,484.40	2,506.80	2,843.26	3,003.48	3,015	3,019	
5	Nilai evaluasi SAKIP dari APIP			TPB 16 SDG's	66.38	71.59	75.41	80.72	70.38	69.65	75.41	80.72	

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas PerikananTahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan

pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Perikanan terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026		
Tujuan : Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap Ekonomi Lokal/Non Tambang	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1.88	1.88	1.9	1.9	1.9	0	
Sasaran:								
Meningkatnya kapasitas produksi kelautan dan perikanan	1. Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	10,677.84	10,763.27	10,849.37	10,936.17	11,023.66	2,276	20.81
	2. Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	14,150.82	14,292.33	14,435.25	14,579.60	14,725.40	2,601	17.48
Meningkatnya daya saing produk olahan hasil perikanan	1. Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)	2,440.30	2,447.62	2,454.96	2.462,33\	2,469.72	1,448.00	48.02
Meningkatknya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	1. Nilai evaluasi SAKIP dari APIP	66.38	71.59	75.41	80.72	86.26	0	0

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Paser

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan terhadap ekonomi lokal/non tambang memiliki 1 indikator kinerja yaitu kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%), saat ini tidak dapat diketahui realisasi capaian kinerjanya dikarenakan nilai PDRB merupakan data tahunan yang akan diketahui pada tahun berikutnya yang dikeluarkan oleh BPS ;
b. Sasaran 1 (satu) meningkatnya kapasitas produksi kelautan dan perikanan memiliki 2 indikator kinerja, pertama jumlah produksi perikanan tangkap belum mencapai target dimana realisasinya sebesar 2,276 ton dari target sebesar 10.936,17 ton dengan capaian kinerja sebesar 20,81%, dan kedua jumlah produksi perikanan budidaya belum mencapai target dimana realisasinya sebesar 2.601 ton dari target sebesar 14.874 ton dengan capaian kinerja sebesar 17,48%;
c. Sasaran 2 (dua) meningkatnya daya saing produk olahan hasil perikanan memiliki 1 indikator kinerja yaitu jumlah produksi olahan hasil perikanan belum mencapai target dimana realisasinya sebesar 1.448 ton dari target sebesar 3.015,49 ton dengan capaian kinerja sebesar 48,02 %; dan
d. Sasaran 3 (tiga) meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel dengan indicator nilai evaluasi SAKIP dari APIP dengan capaian nilai tahun 2024 sebesar 69,95 yang merupakan hasil kinerja tahun 2023, sedangkan Nilai SAKIP pada awal tahun 2025 belum ada. Target perubahan 2024 sebesar 70,58 jikandibandingkan dengan capaian 69,95, maka capaian kinerja sebesar 98,68%..

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sektor perikanan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Paser. Dengan potensi sumber daya perikanan yang melimpah, baik dari perikanan tangkap maupun budidaya, diperlukan identifikasi isu-isu strategis yang dapat memengaruhi kinerja sektor ini.

1. **Penurunan Sumber Daya Ikan di Perairan Kabupaten Paser**
   - Overfishing akibat penggunaan alat tangkap yang kurang ramah lingkungan.
   - Penangkapan ikan yang tidak terkendali dalam radius 4–5 mil laut oleh nelayan kecil.
2. **Kurangnya Diversifikasi Komoditas Perikanan Budidaya**
   - Fokus utama masih pada beberapa jenis ikan unggulan tanpa pengembangan diversifikasi.
   - Potensi komoditas bernilai tinggi seperti kepiting, kerapu, dan udang belum tergarap optimal.
   - Kendala dalam pengadaan benih berkualitas dan teknologi budidaya yang efisien.
3. **Kendala dalam Rantai Distribusi dan Daya Saing Produk Perikanan**
   - Infrastruktur rantai dingin (cold storage) masih terbatas.
   - Kurangnya inovasi pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah.
4. **Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya yang Belum Optimal**
   - Pendapatan yang rendah akibat fluktuasi harga ikan.
   - Kurangnya akses terhadap permodalan dan kredit usaha perikanan.
   - Lemahnya kelembagaan kelompok nelayan dan pembudidaya ikan

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025

Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2025 yaitu "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Kabupaten yang Sejahtera".

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 ini dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang merata, peningkatan kualitas hidup anak, Perempuan serta pemuda
2. Penurunan kemiskinan melalui penguatan pelaksanaan perlindungan dan jaminan social, peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal
3. Pemantapan tata Kelola pemerintahan melalui penguatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan kepuasan pelayanan publik
4. Peningkatan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan konektivitas untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan ketangguhan terhadap bencana.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan kedalam sepuluh sasaran daerah yaitu:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana

8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan mendukung pencapaian sasaran ke-1, yaitu "meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian".

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Perikanan telah melakukan *review* dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Paser

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				**22,320,461,595**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**28,871,108,327**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**76 %**	**8,876,356,314**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**76 %**	**9,154,023,314**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun**	**100%**	**113,572,437**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun**	**100%**	**213,572,437**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	52,888,200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	102,888,200	Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja 2026, Perubahan Renja 2025)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1,954,900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1,954,900	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Dokumen	1,499,800	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Dokumen	1,499,800	

			Dokumen DPA-SKPD					Dokumen DPA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2,029,100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2,029,100	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	55,200,437	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	105,200,437	Monev Kegiatan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan Dinas Perikanan**	**100%**	**7,950,670,391**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan Dinas Perikanan**	**100%**	**7,965,670,391**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/ bulan	7,845,362,805	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/ bulan	7,845,362,805	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen	51,521,500	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 Dokumen	51,521,500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	53,786,086	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	68,786,086	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum Dinas Perikanan**	**100%**	**445,843,386**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum Dinas Perikanan**	**100%**	**606,970,386**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser, Tanah Grogot,	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	5 Paket	249,619,986	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser, Tanah Grogot,	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	13 Paket	252,119,986	Belanja Hardisk, Video

		Tepian Batang	Kantor yang Disediakan				Tepian Batang	Kantor yang Disediakan			Conference
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	55,885,896	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	55,885,896	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8,964,504	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8,964,504	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	131,373,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	290,000,000	Kegiatan Rapat Koordinasi di Luar Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**2 Jenis**	**269,093,500**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**2 Jenis**	**269,093,500**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	268,093,500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	268,093,500	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jenis sarana penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara**	**4 Jenis**	**97,176,600**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jenis sarana penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara**	**4 Jenis**	**98,716,600**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	70,936,600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	72,476,600	Belanja Solar Exavator
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	26,240,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	26,240,000	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		**Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap**	**0.6 %**	**8,352,136,480**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		**Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap**	**0.62 %**	**10,231,809,272**	

	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		**Jumlah wilayah pengelolaan penangkapan ikan di wilayah PUD**	**5 Kecamatan**	**8,143,883,114**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah wilayah pengelolaan penangkapan ikan di wilayah PUD**	**5 Kecamatan**	**10,023,555,906**	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab. Paser, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dokumen	41,486,000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab. Paser, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dokumen	41,486,000	
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Paser, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1609 Unit	8,102,397,114	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Paser, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1830 Unit	9,982,069,906	Pengadaan Sapras PT,Kajian Feasibility Studi Pembangunan TPI
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah kelompok nelayan kecil yang diberdayakan**	**10 Kelompok**	**188,046,113**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah kelompok nelayan kecil yang diberdayakan**	**10 Kelompok**	**188,046,113**	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Paser, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	170,329,840	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Paser, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	170,329,840.00	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kab. Paser, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	5 Kelompok	17,716,273	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kab. Paser, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	5 Kelompok	17,716,273	
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	**Realisasi tanda daftar kapal perikanan di wilayah PUD**	**100 Dokumen**	**20,207,253**	**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Paser, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	**Realisasi tanda daftar kapal perikanan di wilayah PUD**	**25 Dokumen**	**20,207,253**	

	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	**25 Rekomendasi**	20,207,253	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	**5 Rekomendasi**	20,207,253	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya**	**1.00%**	**4,145,544,072**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya**	**1.03%**	**5,690,273,987**	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		**Jumlah kelompok pembudi daya ikan yang diberdayakan**	**7 Kelompok**	**693,804,171**	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**		**Jumlah kelompok pembudi daya ikan yang diberdayakan**	**7 Kelompok**	**784,267,726**	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	4 Kelompok	13,474,000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	4 Kelompok	13,474,000	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3 Kelompok	680,330,171	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	770,793,726	Belanja Bahan Pembuat Pakan Ikan, Uji Lab. dan Perdin Narasumber Pelatihan
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		**Realisasi izin pencatatan tanda daftar pembudidaya ikan kecil**	**10 Dokumen**	**13,499,744**	**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Realisasi izin pencatatan tanda daftar pembudidaya ikan kecil**	**10 Dokumen**	**13,499,744**	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3 Rekomendasi	13,499,744	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3 Rekomendasi	13,499,744	

	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		**Jumlah wilayah pengelolaan pembudidayaan ikan**	**10 Kecamatan**	**3,438,240,157**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**		**Jumlah wilayah pengelolaan pembudidayaan ikan**	**10 Kecamatan**	**4,892,506,517**	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	325,654,734	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	331,654,734	Honor Enumerator
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	2 Dokumen	16,008,000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	2 Dokumen	16,008,000	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	424 Unit	3,083,080,293	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	450 Unit	4,531,346,653	Pengadaan Sarana Produksi Budidaya Desa Pondong Baru benur : 1.380.000 ekor, Nener : 483.000 ekor, pupuk 464 zak, Pengadaan Calin Ikan Lele, Operasional UPTD.BBU Tanjung Aru
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Paser, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Unit	13,497,130	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Paser, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Unit	13,497,130	
4	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**Cakupan wilayah PUD yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya perikanan**	**45 %**	**19,602,043**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**Cakupan wilayah PUD yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya perikanan**	**45 %**	**247,383,443**	

	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		**Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan perundang-undangan**	**60%**	**19,602,043**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan perundang-undangan**	**60%**	**247,383,443**	
	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	20 Pelaku Usaha	5,049,758	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	20 Pelaku Usaha	232,831,158	Pengadaan Speed Boat Operasional
	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	10 Pelaku Usaha	14,552,285	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	10 Pelaku Usaha	14,552,285	
5	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		**Persentase peningkatan produksi olahan hasil Perikanan**	**0.9 %**	**926,822,686**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		**Persentase peningkatan produksi olahan hasil Perikanan**	**2%**	**3,547,618,311**	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		**Jumlah rekomendasi izin usaha pengolahan hasil perikanan**	**2 Dokumen**	**88,600,000**	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**		**Jumlah rekomendasi izin usaha pengolahan hasil perikanan**	**5 Dokumen**	**88,600,000**	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	5 Dokumen	88,600,000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	5 Dokumen	88,600,000	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		**Jumlah pelaku usaha yang menerapkan standar mutu dan keamanan hasil olahan**	**7 Kelompok**	**59,244,375**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**		**Jumlah pelaku usaha yang menerapkan standar mutu dan keamanan hasil olahan**	**7 Kelompok**	**0**	
	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan	5 Unit Usaha	59,244,375	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan	7 Unit Usaha		

			Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko					Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko			
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		**Jumlah bahan baku industri pengolahan ikan yang tersedia**	**3.264,32 ton**	**778,978,311**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah bahan baku industri pengolahan ikan yang tersedia**	**4.150 ton**	**3,459,018,311**	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	22,8 Ton	535,491,550	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	45 Ton	3,115,531,550	Pelatihan Pengolah, Mobil Box, Perencanaan Rehab Gedung PPI, Lomba Masak Serba Ikan, GEMARIKAN
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	50 Pelaku Usaha	243,486,761	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	60 Pelaku Usaha	343,486,761	Bantuan Sarana Poklahsar

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Paser

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Musrenbang Desa/Kelurahan. Musrenbang Kecamatan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan saran dan pendapat DPRD berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Tidak semua aspirasi tersebut dapat diakomodir dalam Renja Dinas Perikanan Tahun 2025. Sehingga sebagian diusulkan dalam Perubahan Renja Tahun 2025. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat (Teknokratik) yang direncanakan pada Perubahan Renja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Paser

Perangkat Daerah: Dinas Perikanan Kabupaten Paser

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**		**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**		
	- Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah wilayah pengelolaan penangkapan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia		
	1. Permohonan Mesin Penggerak Kapal	Desa Pondong Baru Kec. Kuaro		11 Unit	Program Prioritas Bupati (Pertanian Meningkat)
	2. Mesin Penggerak Kapal	Desa Muara Pasir Kec. Tanah Grogot		36 Unit	
	3. Alat tangkap ikan (*Gill net*)	Desa Harapan Baru Kec. Kuaro		300 Unit	

			4. Mesin Ketinting	Desa Pengguren Kec. Batu Engau		20 Unit	
			5. Perahu dan Mesin ketinting	Desa Pepara Kec. Tanah Grogot		12 Unit	
			6. Mesin Ketinting	Desa Olong Pinang Kec. Pasir Belengkong		10 Unit	
2	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**				**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**		
	-	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			Jumlah wilayah pengelolaan pembudidayaan ikan		
		-	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			1. Sarana Produksi Budidaya (Benur, Nener, Pupuk Tambak SP26)	Desa Pondong Baru Kec. Kuaro	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Benur 1.380.000 ekor	Program Satu Juta Bibit Ikan
						Nener 483.000 Ekor	
						Pupuk 464 Zak	Program Prioritas Bupati (Pertanian Meningkat)
			2. Sarana Produksi Unit Pembenihan Rakyat	Suatang Kec. Pasir	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	- Calin Lele 20 Paket - Calin Nila 4 Paket	Program Satu Juta Bibit

				Belengkong			Ikan
				Desa Olong Pinang Kec. Pasir Belengkong			
				Kelurahan Long Ikis Kec. Long Ikis			
				Desa Atang Pait Kec. Long Ikis			
				Kelurahan Long Ikis Kec. Long Ikis			
			3. Permononan Pupuk Tambak	Desa Pondong Baru Kec. Kuaro	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	382 Zak	Program Prioritas Bupati (Pertanian Meningkat)
			4. Permohonan Badan Perahu Ketinting	Desa Harapan Baru Kec. Kuaro		10 Unit	
			5. Permohonan Paket Budidaya Ikan Kolam Tanah	Desa Tajer Mulya Kec. Long Ikis	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1 Paket	
				Desa Jemparing Kec. Long Ikis		1 Paket	
				Desa Damit Kec. Pasir Belengkong		1 Paket	

3	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**				**Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan**		
	-	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			Jumlah bahan baku industri pengolahan ikan yang tersedia		
			Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		
			Permohonan Cheest Freezer	Desa Jone Kec, Tanah Grogot	Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	10 Unit	Program Prioritas Bupati (Pertanian Meningkat)

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Perikanan Kabupaten Paser disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Renja Awal adalah 5 program, 15 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 23.269.486.051,00 karena adanya efisiensi anggaran menjadi Rp. 21.870.757.636,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 1.398.728.415,50 atau sebesar 6,01%. Pada tahap pergeseran anggaran menjadi Rp. 22.320.461.595 karena adanya tambahan anggaran yang berasal dari Pokok Pikiran (aspirasi) DPRD Kab. Paser untuk belanja yang diserahkan ke masyarakat. Pada tahap PPAS Perubahan mendapatkan tambahan pagu sebesar Rp. 994.378.250,- sehinggan pagu nya menjadi Rp. 23.314.839.845,- Usulan penambahan anggaran pada Perubahan Renja Dinas Perikanan ditampilkan pada tabel 3.1 berikut :

:

Tabel 3.1. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

Pagu Awal Sebelum Perubahan					Pagu Setelah Efisiensi/Pergeseran				Perubahan Renja					Bertambah/Berkurang	Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				**23,269,486,051**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**22,320,461,595**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**23,314,839,845**	**994,378,250**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**76 %**	**9,209,532,361**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**76 %**	**8,876,356,314**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**76 %**	**9,005,444,314**	**129,088,000**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun**	**100%**	**252,400,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun**	**100%**	**113,572,437**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun**	**100%**	**155,932,437**	**42,360,000**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	130,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	52,888,200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	80,158,200	27,270,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra 2025-2029, Renja 2026, Perubahan Renja

															2025)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1,954,900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1,954,900	0	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1,499,800	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1,499,800	0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2,029,100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2,029,100	0	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	111,400,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	55,200,437	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	70,290,437	15,090,000	Monev Kegiatan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan Dinas Perikanan**	**100%**	**7,951,884,305**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan Dinas Perikanan**	**100%**	**7,950,670,391**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan Dinas Perikanan**	**100%**	**7,955,670,391**	**5,000,000**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/ bulan	7,845,362,805	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/ bulan	7,845,362,805	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/ bulan	7,845,362,805	0	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen	51,521,500	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen	51,521,500	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	450 Dokumen	51,521,500	0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	55,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	53,786,086	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	58,786,086	5,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum Dinas Perikanan**	**100%**	**638,977,956**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum Dinas Perikanan**	**100%**	**445,843,386**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum Dinas Perikanan**	**100%**	**526,031,386**	**80,188,000**	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	251,372,690	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	249,619,986	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	249,619,986		

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	79,605,266	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	55,885,896	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	55,885,896	0	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	18,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8,964,504	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8,964,504	0	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	290,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	131,373,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	211,561,000	80,188,000	Kegiatan Rapat Koordinasi di Luar Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**2 Jenis**	**269,093,500**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**2 Jenis**	**269,093,500**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**2 Jenis**	**269,093,500**	**0**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,000,000	0	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	268,093,500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	268,093,500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	268,093,500	0	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jenis sarana penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara**	**4 Jenis**	**97,176,600**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis sarana penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara**	**4 Jenis**	**97,176,600**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jenis sarana penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara**	**4 Jenis**	**98,716,600**	**1,540,000**	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	70,936,600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	70,936,600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	72,476,600	1,540,000	Belanja Solar Exavator
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	26,240,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	26,240,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	26,240,000		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		**Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap**	**0.6 %**	**8,323,561,392**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap**	**0.6 %**	**8,352,136,480**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		**Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap**	**0.62 %**	**8,352,136,480**	**0**	
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		**Jumlah wilayah pengelolaan penangkapan ikan di wilayah PUD**	**5 Kecamatan**	**7,963,561,392**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah wilayah pengelolaan penangkapan ikan di wilayah PUD**	**5 Kecamatan**	**8,143,883,114**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah wilayah pengelolaan penangkapan ikan di wilayah PUD**	**5 Kecamatan**	**8,143,883,114**	**0**	
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	5 Dokumen	53,248,865	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	5 Dokumen	41,486,000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	5 Dokumen	41,486,000	0	

Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1609 Unit	7,910,312,527	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1609 Unit	8,102,397,114	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1609 Unit	8,102,397,114	0	
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah kelompok nelayan kecil yang diberdayakan**	**10 Kelompok**	**325,000,000**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kelompok nelayan kecil yang diberdayakan**	**10 Kelompok**	**188,046,113**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah kelompok nelayan kecil yang diberdayakan**	**10 Kelompok**	**188,046,113**	**0**	
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	295,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	40 Orang	170,329,840.00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	170,329,840.00	0	
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	5 Kelompok	30,000,000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	5 Kelompok	17,716,273	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	5 Kelompok	17,716,273	0	
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Realisasi tanda daftar kapal perikanan di wilayah PUD**	**100 Dokumen**	**35,000,000**	**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K**	**Realisasi tanda daftar kapal perikanan di wilayah PUD**	**25 Dokumen**	**20,207,253**	**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K**	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Realisasi tanda daftar kapal perikanan di wilayah PUD**	**25 Dokumen**	**20,207,253**	**0**	

ota					**ota**				**ota**						
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	**25 Rekomendasi**	35,000,000	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	**5 Rekomendasi**	20,207,253	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	**5 Rekomendasi**	20,207,253	0	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		**Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya**	**###**	**4,565,910,702**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya**	**###**	**4,145,544,072**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya**	**1.00%**	**4,845,834,322**	**700,290,250**	
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		**Jumlah kelompok pembudi daya ikan yang diberdayakan**	**7 Kelompok**	**765,752,088**	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Jumlah kelompok pembudi daya ikan yang diberdayakan**	**7 Kelompok**	**693,804,171**	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**		**Jumlah kelompok pembudi daya ikan yang diberdayakan**	**7 Kelompok**	**737,014,971**	**43,210,800**	
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	4 Kelompok	27,000,000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	4 Kelompok	13,474,000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	4 Kelompok	13,474,000	0	

Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3 Kelompok	738,752,088	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3 Kelompok	680,330,171	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	723,540,971	43,210,800	Belanja Bahan Pembuat Pakan Ikan, Uji Lab. dan Perdin Narasumber Pelatihan
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		**Realisasi izin pencatatan tanda daftar pembudidaya ikan kecil**	**10 Dokumen**	**27,000,000**	**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Realisasi izin pencatatan tanda daftar pembudidaya ikan kecil**	**10 Dokumen**	**13,499,744**	**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Realisasi izin pencatatan tanda daftar pembudidaya ikan kecil**	**10 Dokumen**	**13,499,744**	**0**	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan	3 Rekomendasi	27,000,000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan	3 Rekomendasi	13,499,744	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan	3 Rekomendasi	13,499,744	0	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		**Jumlah wilayah pengelolaan pembudidayaan ikan**	**10 Kecamatan**	**3,773,158,614**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah wilayah pengelolaan pembudidayaan ikan**	**10 Kecamatan**	**3,438,240,157**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**		**Jumlah wilayah pengelolaan pembudidayaan ikan**	**10 Kecamatan**	**4,095,319,607**	**657,079,450**	

Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	356,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	325,654,734	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	331,654,734	6,000,000	Honor Enumerator
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	2 Dokumen	29,000,000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	2 Dokumen	16,008,000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	2 Dokumen	16,008,000	0	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	424 Unit	3,361,158,614	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	424 Unit	3,083,080,293	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	450 Unit	3,734,159,743	651,079,450	Pengadaan Sarana Produksi Budidaya Desa Pondong Baru benur dan nener, pupuk tambak, Pengadaan Calin Ikan Lele dan Nila bagi UPR

Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Unit	27,000,000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	10 Unit	13,497,130	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Orang	13,497,130	0	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		**Cakupan wilayah PUD yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya perikanan**	**45 %**	**35,000,000**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Cakupan wilayah PUD yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya perikanan**	**45 %**	**19,602,043**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**Cakupan wilayah PUD yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya perikanan**	**45 %**	**34,602,043**	**15,000,000**	
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		**Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan perundang-undangan**	**60%**	**35,000,000**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan perundang-undangan**	**60%**	**19,602,043**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan perundang-undangan**	**60%**	**34,602,043**	**15,000,000**	
Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	20 Pelaku Usaha	10,000,000	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	10 Pelaku Usaha	5,049,758	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Semua Kecamatan	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	20 Pelaku Usaha	20,049,758	15,000,000	Pengawasan Izin Usaha
Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan sesuai	10 Pelaku Usaha	25,000,000	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan sesuai	10 Pelaku Usaha	14,552,285	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan	Semua Kecamatan	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan sesuai	10 Pelaku Usaha	14,552,285	0	

ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kelurahan	kewenangan kabupaten/kota			ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	kewenangan kabupaten/kota			ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota		kewenangan kabupaten/kota				
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		**Persentase peningkatan produksi olahan hasil Perikanan**	**0.9 %**	**1,135,481,596**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase peningkatan produksi olahan hasil Perikanan**	**0.9 %**	**926,822,686**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		**Persentase peningkatan produksi olahan hasil Perikanan**	**0.9 %**	**1,076,822,686**	**150,000,000**	
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		**Jumlah rekomendasi izin usaha pengolahan hasil perikanan**	**2 Dokumen**	**113,600,000**	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah rekomendasi izin usaha pengolahan hasil perikanan**	**2 Dokumen**	**88,600,000**	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**		**Jumlah rekomendasi izin usaha pengolahan hasil perikanan**	**2 Dokumen**	**88,600,000**	**0**	
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	5 Dokumen	113,600,000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	5 Dokumen	88,600,000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	5 Dokumen	88,600,000	0	
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		**Jumlah pelaku usaha yang menerapkan standar mutu dan keamanan hasil olahan**	**7 Kelompok**	**83,600,000**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah pelaku usaha yang menerapkan standar mutu dan keamanan hasil olahan**	**7 Kelompok**	**59,244,375**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**		**Jumlah pelaku usaha yang menerapkan standar mutu dan keamanan hasil olahan**	**7 Kelompok**	**59,244,375**	**0**	

Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	5 Unit Usaha	83,600,000	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	5 Unit Usaha	59,244,375	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Semua Kecamatan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	5 Unit Usaha	59,244,375		
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		**Jumlah bahan baku industri pengolahan ikan yang tersedia**	**3.264,32 ton**	**938,281,596**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah bahan baku industri pengolahan ikan yang tersedia**	**3.264,32 ton**	**778,978,311**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah bahan baku industri pengolahan ikan yang tersedia**	**4.150 ton**	**928,978,311**	**150,000,000**	
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	32,64 Ton	656,600,000	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	32,64 Ton	535,491,550	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	45 Ton	685,491,550	150,000,000	Perbaikan Pabrik Es Senaken (Belanja Dinamo)

Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	50 Pelaku Usaha	281,681,596	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	50 Pelaku Usaha	243,486,761	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	60 Pelaku Usaha	243,486,761		

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2025 merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah, dan menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan I tahun 2025, masih diperlukan upaya-upaya peningkatan lebih untuk pencapaian target pada tahun 2025 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Paser serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sehingga menghasilkan sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pembangunan Perikanan. Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang akan lebih baik.

Tana Paser, 22 Agustus 2025
Kepala Dinas,

Rusdiansyah, S.Pi, M.Si
Pembina Tk.1/IV B
NIP. 19710311 199803 1 007

LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dan Renja Tahun 2026

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PERIKANAN
Jl. Kesuma Bangsa Km. 5 Komplek Perkantoran Gentung Temiang Gedung D Lt. 1, Kavling 1
TANA PASER Kode Pos : 76211
Website : https://perikanan.paserkab.go.id/ , Email : perikananpaser@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASER

Nomor : 500.5 / /SK-DISKAN/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025 DAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026 PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASER

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASER,

Menimbang :
1. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dan Rencana Kerja Tahun 2026, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan ;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Paser selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 dan Rencana Kerja Tahun 2026;

Mengingat :
1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah di ubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Racangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor .050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Paser Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser;
11. Peraturan Bupati Paser Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser;
b. Mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser
c. Melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser
d. Merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser
e. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser yaitu Anggaran Perubahan Tahun 2025 dan Anggaran Tahun 2026.
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser tepat waktu
g. Melaporkan hasilnya pada Kepala Dinas Perikanan selaku Pengguna Anggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Paser selaku Pengguna Anggaran;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perikanan Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari tedapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser

Pada Tanggal : 24 Maret 2025

Kepala Dinas,

Sudiansyah, S.Pi, M.Si
Pembina
NIP. 19710311 199803 1 0007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PASER
NOMOR 500.5 / /SK-DISKAN/2025
TANGGAL 24 MARET 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASER
(RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DAN RENJA TAHUN 2026)

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN
1.	Rudiansyah, S.Pi, M.Si	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Abdul Aziz, S.St.Pi	Sekretaris	Ketua
3	Fatmawati, S.Pi	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretaris
4	Dadang Suherman, S.Pi	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Anggota
5	Agustina Mulyana, S.Pi	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Anggota
6	Hery Maya Santi, SP	Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Anggota
7	Yulida Dianti, S.Pi	Pelaksana	Sekretariat
8	Arya Fadhil Asshidqi, ST	Pelaksana	Sekretariat

Kepala Dinas,

Rudiansyah, S.Pi, M.Si
Pembina
NIP. 19710311 199803 1 0007

DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOPERASI
DAN UKM

PERUBAHAN
RENJA
2025

KABUPATEN PASER

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, atas berkat dan rahmat Nya sehingga kami dapat menyelesaikan PERUBAHAN RENJA Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & UKM Tahun 2025.

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & Ukm Kabupaten Paser berkomitmen untuk membangun Kabupaten Paser melalui tugas pokok dan fungsinya yang diamanatkan oleh peraturan Bupati Paser berhasil menyusun Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) SKPD tahun 2025 yang fokus pada pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P- RENJA)SKPD Tahun 2025 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi & UKM disusun setelah tambahan Perubahan Anggaran tahun 2025 yang telah disepakati menjadi sebuah kegiatan, dan menjadi acuan pembangunan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi & UKM Kabupaten Paser . Dokumen Perencanaan ini merupakan janji yang harus ditunaikan.

Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan sektor Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & UKM. Tugas membangun Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & UKM ke depan yaitu tugas bersama, bukan merupakan tugas pemerintah semata-mata oleh karena itu dibutuhkan partisipasi dan sinergi dari masyarakat luas dan kerja keras tanpa pamrih .

Demikian penyusunan PERUBAHAN RENJA Tahun 2025 yang kami buat sebagai acuan atas kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan, dan Koperasi & UKM Kabupaten Paser.

Tana Paser , 22 Agustus 2025

Kepala



YUSUF. SP. MP
Pembina Tk.I
Nip. 19720421 199803 1 011

D A F T A R I S I

Kata Pengantar ..... **ii**

D A F T A R I S I ..... **iii**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II **7**

HASIL EVALUASI RENJA **7**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindagkop dan UKM 22

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 27

2.4 Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025 29

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 37

BAB III **38**

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **38**

3.1. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025 38

BAB IV **50**

PENUTUP **50**

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan. 50

4.2. Rencana tindak lanjut 51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Nomor 000.7.2.4/11/P2EP-Bapplitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Tahun 2022 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2025 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Paser;

17. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024; dan
19. Surat Edaran Bupati Paser Nomor Perubahan RKPD Nomor 20 000.7.2.4/11/P2EP-Bapplitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2022-2026 pada triwulan ke 1 (satu);

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

BAB II: HASIL EVALUASI RENJA

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah serta Review Terhadap RKPD, dan pemangku kepentingan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas

BAB IV: PENUTUP

Memuat kesimpulan yang disertai tanda tangan Kepala Perangkat Daerah.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET ANGGARAN DAN KINERJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025	
					TRIW I		TRIW II		TRIW III		TRIW IV					
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Anggaran
	DISPERINDAGKOP DAN UKM			**47.767.212.221,00**										**5.125.891.066,00**	**10,57**	**10,73**
	SASARAN : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	**Nilai evaluasi SAKIP Disperindagkop**	68 %												-	
1 2 17 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat**	76 %	**21.353.360.702,00**	**20**	**2.707.652.613**							**20**	**2.707.652.613,00**	**26,32**	**12,68**
2 17 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**PersentasePenyusunanPerencanaanPerangkat Daerah**	96 %	**367.626.209,00**	**25**	**67.622.800**							**25**	**67.622.800,00**	**26,04**	**18,39**
2 17 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	30.234.000,00									-	-	-	**0,00**
2 17 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	17.127.800,00	1	13.176.400							**1,00**	13.176.400,00	**50,00**	**76,93**
2 17 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	20.244.000,00	1	6.765.000							**1,00**	6.765.000,00	**10,00**	**33,42**

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET ANGGARAN DAN KINERJA			Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025	
										TRIW I		TRIW II		TRIW III		TRIW IV					
							Kinerja		Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Anggaran
2	17	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10	Dokumen	25.000.000,00	1	7.572.000							**1,00**	7.572.000,00	**10,00**	**30,29**
2	17	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10	Dokumen	24.000.000,00		14.894.000							**-**	14.894.000,00	**-**	**62,06**
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	24.244.000,00	1								**1,00**	-	**100,00**	**0,00**
2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	226.776.409,00	2	25.215.400							**2,00**	25.215.400,00	**50,00**	**11,12**
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***PersentaseketersediaanAdministrasiKeuangan***	90	%	**19.839.712.988,00**	**20**	**2.609.736.410**							**20**	**2.609.736.410**	**22,22**	**13,15**
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62	Orang/bulan	18.814.681.309,00	52	2.377.107.394							**52,00**	2.377.107.394,00	**83,87**	**12,63**
2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	947.897.183,00	3	223.996.616							**3,00**	223.996.616,00	**25,00**	**23,63**
2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Laporan	77.134.496,00	3	8.632.400							**3,00**	8.632.400,00	**25,00**	**11,19**
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Pelayanan administrasi SKPD***	90	%	**1.082.784.508,00**	**20**	**30.293.403**							**20**	**30.293.403**	**22,22**	**2,80**

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET ANGGARAN DAN KINERJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025	
									TRIW I		TRIW II		TRIW III		TRIW IV					
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Anggaran
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3.997.350,00									-	-	-	**0,00**
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	592.269.198,00									-	-	-	**0,00**
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	53.389.960,00									-	-	-	**0,00**
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	31.884.000,00									-	-	-	**0,00**
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	600 Dokumen	4.060.000,00	60	660.000							**60,00**	660.000,00	**10,00**	**16,26**
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	397.184.000,00	15	29.633.403							**15,00**	29.633.403,00	**22,73**	**7,46**
2	17	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentasepenyediaanjasapenunjangurusanpemerintahdaerah*	100 %	4.500.000,00									-	-	-	**0,00**
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.500.000,00									-	-	-	**0,00**
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.000.000,00									-	-	-	**0,00**
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan bmd**	1 %	**58.736.997,00**		-							-	-	-	**0,00**

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET ANGGARAN DAN KINERJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025	
									TRIW I		TRIW II		TRIW III		TRIW IV					
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Anggaran
	2	17	01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	53.392.000,00								-	-	-	0,00
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.344.997,00								-	-	-	0,00
						SASARAN : Meningkatkan kwalitas usaha dan kelembagaan koperasi	**Persentase koperasi aktif**	61 %									**11**		**19,67**	
2	**2**	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Sehat**	67 %	**134.996.686,00**		**6.828.000**						-	**6.828.000**	-	**5,06**
	2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT**	58 Koperasi	**134.996.686,00**		**6.828.000**						-	**6.828.000**	-	**5,06**
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	10 Unit Usaha	134.996.686,00		6.828.000							6.828.000,00	-	**5,06**
3	**2**	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentasepeningkatankoperasi yang Maju**	12 %	**664.996.686,00**		**20.640.200**						-	**20.640.200**	-	**3,10**

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET ANGGARAN DAN KINERJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025	
									TRIW I		TRIW II		TRIW III		TRIW IV					
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Anggaran
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlahpelatihan yang dilaksanakan**	2 kali	**664.996.686,00**		**20.640.200**							**-**	**20.640.200**	**-**	**3,10**
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 orang	664.996.686,00		20.640.200								20.640.200,00	-	**3,10**
4	**2**	**17**	**06**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Rata rata omzet koperasi**	265 juta	**1.622.196.686,00**	**260**	**99.143.690**							**260**	**99.143.690**	**98,11**	**6,11**
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan pemberdayaan koperasi**	10 kec	**1.622.196.686,00**	**5**	**99.143.690**							**5**	**99.143.690**	**50,00**	**6,11**
2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit Usaha	1.622.196.686,00	4	99.143.690								99.143.690,00	-	**6,11**
					SASARAN : Meningkatkan kwalitas skala usaha UKM	**Persentase peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil**	0,05 %												-	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Persentasepeningkatanjumlah UMKM yang diberdayakan**	5 %	**623.128.554,00**		**89.138.750**							**-**	**89.138.750**	**-**	**14,31**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET ANGGARAN DAN KINERJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025	
					TRIW I		TRIW II		TRIW III		TRIW IV					
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Anggaran
2 1 7 0 7 2.0 1	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Jumlah UMKM yang diberdayakan**	52 UKM	**623.128.554,00**		**89.138.750**							-	**89.138.750**	-	**14,31**
2 1 7 0 7 2.0 1 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	3 orang	129.064.277,00										-	-	**0,00**
2 1 7 0 7 2.0 1 0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	30 Unit Usaha	494.064.277,00	655	89.138.750								89.138.750,00	-	**18,04**
6 2 1 7 0 8	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentasejumlahumkm naik kelas**	0,06 %	**3.411.282.837,00**		**269.341.665**							-	**269.341.665**	-	**7,90**
2 1 7 0 8 2.0 1	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Jumalah Usaha Mikro yang dikembangkanmenjadiusahakecil**	20 UMKM	**3.411.282.837,00**		**269.341.665**							-	**269.341.665**	-	**7,90**
2 1 7 0 8 2.0 1 0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	60 Unit Usaha	3.411.282.837,00		269.341.665								269.341.665	-	**7,90**
	SASARAN : Meningkatnya pdrb sektor perdagangan	**Nilai pdrb sektor perdagangan**	2415,7												-	
7 3 3 0 0 2	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Jumlah Rekomendasi perizinan yang dikeluarkan**	50 Rekom	**198.884.690,00**	**3**	**30.064.750**							**3**	**30.064.750**	**6,00**	**15,12**

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET ANGGARAN DAN KINERJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025	
									TRIW I		TRIW II		TRIW III		TRIW IV					
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Anggaran
3	**3 0**	**0 2**	**2.0 1**		**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	***Persentase rekomendasi perizinan yang dikrekomendasikan melalui aplikasi oss berbasisresiko tinggi***	2 %	**198.884.690,00**	**0,5**	**30.064.750**							**1**	**30.064.750**	**25,00**	**15,12**
3	3 0	0 2	2.0 1	000 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6 Dokumen	198.884.690,00	1	30.064.750								30.064.750,00	-	**15,12**
8	**3**	**3 0**	**0 3**		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Sarana DistribusiPerdagangan yang direhap/ Dibangun**	4 %	**13.292.527.180,00**		**1.733.256.673**							**-**	**1.733.256.673**	**-**	**13,04**
	3	**3 0**	**0 3**	**2.0 1**	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	***Terlaksananyapembangunan dan pengelolaansaranadistribusiperdagangan***	10 Pasar	**3.540.829.380,00**		**63.193.830**							**-**	**63.193.830**	**-**	**1,78**
	3	3 0	0 3	2.0 1	000 1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	10 Pasar	3.021.944.690,00		40.239.700								40.239.700,00	-	**1,33**
	3	3 0	0 3	2.0 1	000 2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	518.884.690,00		22.954.130								22.954.130,00	-	**4,42**
	3	3 0	0 3	2.0 2		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Terlaksananya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan*	5 Pasar	9.751.697.800,00	1	**1.670.062.843**							**1**	**1.670.062.843**	**20,00**	**17,13**

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET ANGGARAN DAN KINERJA			Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025	
										TRIW I		TRIW II		TRIW III		TRIW IV					
							Kinerja		Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Anggaran
	3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	Dokumen	9.751.697.800,00	3	1.670.062.843							1.670.062.843,00	-	17,13
9	**3**	**30**	**04**		**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Stabilitas harga Bahan Pokok dan Penting**	60	%	**975.988.680,00**	**10**	**49.974.220**							**10**	**49.974.220**	**16,67**	**5,12**
	3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	***Terlaksananya pendataan dan informasi harga dan stock bapok dan bapokting***	30	pelakuusaha	**797.412.697,00**	**5**	**45.462.120**							**5**	**45.462.120**	**16,67**	**5,70**
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	Laporan	458.884.690,00	3	24.312.720							24.312.720,00	-	5,30
	3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	240	Laporan	189.643.317,00	60	10.169.400							10.169.400,00	-	5,36
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Laporan	148.884.690,00	1	10.980.000							10.980.000,00	-	7,37

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET ANGGARAN DAN KINERJA			Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025	
										TRIW I		TRIW II		TRIW III		TRIW IV					
							Kinerja		Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Anggaran
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida sesuai kebutuhan masyarakat*	34	kios	178.575.983,00	2	4.512.100							4.512.100		
																		2		**5,88**	**2,53**
	3	30	04	2.03	0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	32	Dokumen	178.575.983,00	2	4.512.100							4.512.100,00		
																				-	**2,53**
10	**3**	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase peningkatan produk local bahan ekspor**	20	%	**278.884.690,00**	**5**	**21.106.800**							**21.106.800**		
																		5		**25,00**	**7,57**
	3	**30**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	***Terlaksananyapromosi dan missidagangprodukekspor***	1	Kegiatan	**278.884.690,00**		**21.106.800**							**21.106.800**		
																		-		-	**7,57**
	3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10	Produk	278.884.690,00	3	21.106.800							21.106.800,00		
																				-	**7,57**
11	**3**	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase jumlahuttp yang ditera tera ulang**	100	%	**1.287.358.794,00**	**10**	**51.796.905**							**51.796.905**		
																		10		**1.000,00**	**4,02**
	3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**TerlaksananyaTera , Tera Ulangalat UTTP**	8	kec	**1.287.358.794,00**	**2**	**51.796.905**							**51.796.905**		
																		2		**25,00**	**4,02**
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	370	Unit	952.621.134,00	187	33.891.705							33.891.705,00		
																				-	**3,56**
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	400	Orang	334.737.660,00	20	17.905.200							17.905.200,00		
																				-	**5,35**

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET ANGGARAN DAN KINERJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025	
									TRIW I		TRIW II		TRIW III		TRIW IV					
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Anggaran
1 2	**3**	**3 0**	**0 7**		**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase peningkatan produk umkm yang dipasarkan / dipromosikan**	17 %	**584.737.660,00**		-							-	-	-	**0,00**
	3	**3 0**	**0 7**	**2.0 1**	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	***Terlaksananya promosi produk dalam negeri***	2 Kegiatan	**584.737.660,00**		-							-	-	-	**0,00**
	3	3 0	0 7	2.0 1	0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2 UMKM	584.737.660,00										-	-	**0,00**
					SASARAN : Meningkatkan kwalitas Pertumbuhan sektor Industri berbasis pertania	**Persentase Pertumbuhan industri baru**	6% %										**2**		**33,3 -**	
1 3	**3**	**3 1**	**0 2**		**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase per tumbuhan produk industry berbasis pertanian**	2,4 %	**2.927.005.096,00**	**1**	**24.722.000**							**1**	**24.722.000**	**41,67**	**0,84**
	3	**3 1**	**0 2**	**2.0 1**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan industri**	2 dokumen	**2.927.005.096,00**	**1**	**24.722.000**							**1**	**24.722.000**	**50,00**	**0,84**
	3	3 1	0 2	2.0 1	0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	411.104.653,00		11.030.000								11.030.000,00	-	**2,68**

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET ANGGARAN DAN KINERJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025	
									TRIW I		TRIW II		TRIW III		TRIW IV					
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Anggaran
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10 Dokumen	1.234.104.653,00									-	-	**0,00**
	3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	5 Dokumen	1.281.795.790,00	1	13.692.000							13.692.000,00	-	**1,07**
14	**3**	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase pemutahiran data IKM**	60 %	**411.863.280,00**	**15**	**22.224.800**							**15**	**22.224.800**	**25,00**	**5,40**
	3	**31**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah industri yang difasilitasi perizinannya**	5 Industri	**411.863.280,00**	**1**	**22.224.800**							**1**	**22.224.800**	**20,00**	**5,40**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET ANGGARAN DAN KINERJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025	
					TRIW I		TRIW II		TRIW III		TRIW IV					
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Anggaran
3 3 1 0 3 2.0 1 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	5 Dokumen	411.863.280,00	1	22.224.800							**1,00**	22.224.800,00	**20,00**	**5,40**

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi Renja Tahun 2025 Triwulan I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan I adalah 10,73%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.125.891.066,00 (Lima miliar seratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh seribu enam puluh enam rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 47.767.212.221,00 (Empat puluh tujuh Miliar tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) atau sebesar 10,73%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser sebesar 10,25% dengan predikat kinerja Sangat Rendah penentuan peringkat disesuaikan skala pada:

Tabel T-E.1 PMDN

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJ
(1)	91% ≤	Sangat tinggi
(2)	76%	Tinggi
(3)	66%	Sedang
(4)	51%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 0 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 1 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 3 indikator capaian kinerja 0%-50% = 38 indikator
   a) Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan terdapat pada Kegaiatn Administrasi Perangkat Daerah deangan Sub.kegaiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,bPenyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,bPenyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
   b) Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan terdapat pada SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

c) Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan belum ada.

d) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya Target Kinerja:
   - Belum terlaksananya Belanja Barang dan Belanja Modal Karena adanya Peralihan Ekatalog dari V5 ke V6. Peralihan dari eKatalog V5 ke V6 yang diwajibkan mulai 1 Januari 2025 menyebabkan sejumlah hambatan dalam realisasi belanja barang dan belanja modal, seperti keterlambatan penayangan produk, data produk yang belum lengkap, serta penyesuaian sistem pembayaran dan integrasi dengan aplikasi keuangan pemerintah. Masa transisi ini juga membuat sebagian produk/etalase belum sepenuhnya tersedia di V6, sehingga proses pengadaan terhambat
   - Banyak Penyedia Barang Belum Menggunaakan Ekatalog V6
   - Adanya Efisiensi Anggaran sehinggan Anggaran Kegiatan dan Kelapangan terbatas

e) Implikasi terhadap target capaian program Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop & UKM) Kabupaten Paser sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor strategis, kebijakan, serta dinamika internal dan eksternal organisasi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindagkop dan UKM

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Paser, maka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan. kebijakan da1am penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusun-an rencana kerja;
b. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
c. pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas sesuai d-engan rencana kerja yang telah - ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas;
e. penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
f. perumusan kebijakan di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
g. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Perindustrian, Perdagangan-dan Koperasi, Usaha Kecil -dan Menengah;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
l. pnyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas
m. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
n. pengoordinasian penyusunan rencana Fungsional dan pelaksana pada Dinas;
o. pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;
p. penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
q. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku - dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
r. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah; dan
s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser adalah:

1. Pembinaan dan pengembangan industri

2. Pembinaan dan pengembangan perdagangan
3. Pembinaan kepada koperasi dan UMKM

Upaya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.2

NO.	INDIKATOR	SPM	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2025	2026	
1	Persentase peningkatan penerimaan PAD Retribusi Pasar			%	5	5				5,45	5,65						
	Nilai pdrb sektor perdagangan			%			2.405,50	2.415,7	2.431,1								
2	Persentase koperasi aktif			%	59	62	61,5	61,5	62	62,31	55,86	56,45					
3	Persentase peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil			%	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,04	0,05	0,1					
4	Persentase pertumbuhan industri berbasis pertanian			%	2,4	2,4				5,87	2,4						
	Persentase Pertumbuhan industri baru			%			5,50%	6%	6%			5,40%					
5	Nilai evaluasi SAKIP Disperindagkop			Angka	62	64	66	68	70	62,58	67,93	72,69					

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Perindustrian

Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser terdapat dalam Tabel di bawah ini

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Paser
sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	Target Kinerja					Realisasi Triwulan I 2025	Capaian
			2022	2023	2024	2025	2026		
			n-2	n-1	n	n+1	n+2	n	n
	Tujuan : Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing Sasaran :	Laju pertumbuhan sektor perdagangan			6,4%	6,5%	6,6%		
1	Meningkatkan penerimaan PAD dari sektor Retribusi Pasar	Persentase peningkatan penerimaan PAD Retribusi Pasar	5%	5%					
	Meningkatnya pdrb sektor perdagangan	Nilai pdrb sektor perdagangan			2.405,50	2.415,7	2.431,1		
2	Meningkatkan kwalitas usaha dan kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif	59%	62%	61,50%	61,50%	62%	12%	19,67
3	Meningkatkan kwalitas skala usaha UKM	Persentase peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%		
4	Meningkatkan kwalitas Pertumbuhan sektor Industri berbasis pertanian	Persentase pertumbuhan industri berbasis pertanian	2,40%	2,40%					
		Persentase Pertumbuhan industri baru			5,5%	6%	6%	2%	3,3

Berdasarkan Tabel 2.3 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM kabupaten Paser sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “ Laju pertumbuhan sektor perdagangan”, belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 0 dari target sebesar 6,4% dengan capaian kinerja sebesar 0 % dikarenakan perhitungan dilakukan diawal tahun depan oleh BPS kabupaten Paser ;

b. 1. Sasaran “Meningkatnya pdrb sektor perdagangan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai pdrb sektor perdagangan”, belum

mencapai target, dimana realisasinya sebesar 0 dari target sebesar 2.415,7 dengan capaian kinerja sebesar 0 %

2. Sasaran “Meningkatkan kwalitas usaha dan kelembagaan koperasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase koperasi aktif”, belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 12% dari target sebesar 61,50% dengan capaian kinerja sebesar 19,51%

3. Sasaran “Meningkatkan kwalitas skala usaha UKM” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil”, belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 0% dari target sebesar 0,05% dengan capaian kinerja sebesar 0%

4. Sasaran “Meningkatkan kwalitas Pertumbuhan sektor Industri berbasis pertanian” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Pertumbuhan industri baru”, belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 2% dari target sebesar 6% dengan capaian kinerja sebesar 33,3%

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Sebagaimana dalam peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 16 tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu: “Belum optimalnya ketahanan ekonomi yang berkelanjutan” yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rumusan Permasalahan
“sektor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah”

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Kinerja sektor IKM belum optimal	Rendahnya kontribusi sektor IKM; Rendahnya efektivitas pengembangan industri pengolahan dalam sektor IKM	1. Rendahnya pertumbuhan industri baru sektor pengolahan 2. Keterbatasan dukungan teknis dalam pengelolaan sistem informasi 3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam perencanaan industri 4. Minimnya pembinaan

			dan pengembangan IKM 5. Belum banyak IKM yang menerapkan standar kualitas dan sertifikasi produk 6. IKM sulit menembus pasar ritel modern, e-commerce, dan ekspor 7. Terbatasnya akses permodalan bagi IKM
2	Koperasi belum berdaya saing dalam mendukung kesejahteraan ekonomi daerah	Belum optimalnya kontribusi koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan perekonomian daerah	1. Rendahnya partisipasi dan kesadaran anggota koperasi 2. Belum optimalnya manajemen dan tata kelola koperasi (terbatasnya SDM) 3. Terbatasnya akses permodalan 4. Masih adanya koperasi yang tidak aktif 5. Lemahnya sistem pengawasan koperasi 6. Kompleksitas regulasi yang tidak efektif dalam memfasilitasi pembentukan koperasi
3	Lemahnya ekosistem kewirausahaan daerah	Belum optimalnya ekosistem pendukung kewirausahaan daerah	1. Minimnya inovasi dalam pengembangan produk dan strategi pemasaran 2. Belum optimalnya pemanfaatan literasi digital dalam pemasaran 3. Terbatasnya akses permodalan 4. Minimnya jenis pelatihan dan SDM pelaku UMKM
4	Daya saing produk daerah rendah dalam menghadapi pasar	Belum optimalnya produk daerah yang berpotensi ekspor untuk menembus	1. Sistem perizinan berbasis digital belum sepenuhnya optimal 2. Terbatasnya ekspor

	global	pasar global	komoditi dan produk non-migas non-batubara 3. Belum ada platform atau fasilitasi yang optimal untuk mempertemukan pelaku usaha dengan eksportir 4. Belum optimalnya SDM pelaku usaha 5. Minimnya standar produk lokal dari segi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas 6. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan tera dan ukur ulang 7. Kurangnya promosi dan branding produk lokal
5	Distribusi kebutuhan pokok belum merata dan efisien	Belum optimalnya rantai distribusi kebutuhan pokok	1. Belum adanya toko penyeimbang dari berbagai kabupaten/kota 2. Sistem logistik dan rantai pasok masih kurang efisien 3. Ketersediaan fasilitas distribusi perdagangan belum optimal 4. Belum adanya pasar berstandar SNI

2.4 Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 yaitu “OPTIMALISASI DIVERSIFIKASI EKONOMI DIDUKUNG PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN SUMBER DAYA MANUSIA BERDAYA SAING”. yang dijabarkan ke dalam 8 (Delapan) Prioritas

Pembangunan Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat terutama pada upaya promotive dan preventif;
3. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yangmendukung hilirisasi industri dan ketahanan pangan;
4. Penguatan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar;
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik;
8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser mendukung pencapaian sasaran ke 1 yaitu “Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian” dan sasaran ke 2 yaitu “Berkembangnya sektor kepariwisataan”.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Perubahan RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 2.5
Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser

Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	Catatn penting
SASARAN : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan		**Nilai evaluasi SAKIP Disperindagkop**	68		**SASARAN : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan**		**Nilai evaluasi SAKIP Disperindagkop**	68		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab. Paser**	**Persentase kepenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	76 %	**21.353.360.702,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Paser**	**Persentase kepenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	76 %	**22.400.062.595,00**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Paser**	**PersentasePenyusunanPerencanaanPerangkat Daerah**	96 %	**367.626.209,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	**PersentasePenyusunanPerencanaanPerangkat Daerah**	96 %	**527.011.052,00**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	30.234.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	91.636.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	17.127.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	14.976.400,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	20.244.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	6.765.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	25.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	24.390.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen	24.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen	22.136.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	24.244.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	66.869.652,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	226.776.409,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	300.238.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Paser**	***PersentaseketersediaanAdministrasiKeuangan***	90 %	**19.839.712.988,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	***PersentaseketersediaanAdministrasiKeuangan***	90 %	**20.480.645.144,00**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	18.814.681.309,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	19.374.181.309,00	

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	947.897.183,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	1.018.589.835,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Laporan	77.134.496,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Laporan	87.874.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Paser**	***Persentase Pelayanan administrasi SKPD***	90	%	**1.082.784.508,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	***Persentase Pelayanan administrasi SKPD***	90	%	**1.331.237.445,00**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	3.997.350,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	3.977.073,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	592.269.198,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	806.685.729,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	53.389.960,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	69.395.696,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket	31.884.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket	43.686.947,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	600	Dokumen	4.060.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	600	Dokumen	4.055.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66	Laporan	397.184.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66	Laporan	403.437.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Paser**	***Persentasepenyediaanjasapenunjang urusanpemerintahdaerah***	**100**	**%**	**4.500.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Paser**	***Persentasepenyediaanjasapenunjangur usanpemerintahdaerah***	**100**	**%**	**2.500.000,00**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2.500.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Paser**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan bmd**	1	%	**58.736.997,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan bmd**	1	%	**58.668.954,00**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Unit	53.392.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Unit	53.340.856,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	5.344.997,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	5.328.098,00	
SASARAN : Meningkatkan kwalitas usaha dan kelembagaan koperasi		**Persentase koperasi aktif**	61	%		**SASARAN : Meningkatkan kwalitas usaha dan kelembagaan koperasi**		**Persentase koperasi aktif**	61	%		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Kab. Paser**	**Persentase Koperasi Sehat**	67	%	**134.996.686,00**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Kab. Paser**	**Persentase Koperasi Sehat**	67	%	**339.242.000,00**	
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Kab. Paser**	**Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT**	58	Koperasi	**134.996.686,00**	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab. Paser**	**Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT**	58	Koperasi	**339.242.000,00**	
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah	Kab. Paser	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	10	Unit Usaha	134.996.686,00	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah	Kab. Paser	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	10	Unit Usaha	339.242.000,00	

Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Kab. Paser**	**Persentasepeningkatankoperasi yang Maju**	12 %	**664.996.686,00**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Kab. Paser**	**Persentasepeningkatankoperasi yang Maju**	12 %	**1.269.392.487,00**	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Paser**	**Jumlahpelatihan yang dilaksanakan**	2 kali	**664.996.686,00**	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Paser**	**Jumlahpelatihan yang dilaksanakan**	2 kali	**1.269.392.487,00**	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Paser	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 orang	664.996.686,00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Paser	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 orang	1.269.392.487,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Kab. Paser**	**Rata rata omzet koperasi**	265 juta	**1.622.196.686,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Kab. Paser**	**Rata rata omzet koperasi**	265 juta	**2.238.680.659,00**	
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Paser**	**Pelaksanaan pemberdayaan koperasi**	10 kec	**1.622.196.686,00**	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Paser**	**Pelaksanaan pemberdayaan koperasi**	10 kec	**2.238.680.659,00**	
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit Usaha	1.622.196.686,00	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit Usaha	2.238.680.659,00	
SASARAN : Meningkatkan kwalitas skala usaha UKM		**Persentase peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil**	0,05 %		**SASARAN : Meningkatkan kwalitas skala usaha UKM**		**Persentase peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil**	0,05 %		
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Kab. Paser**	**Persentasepeningkatanjumlah UMKM yang diberdayakan**	5 %	**623.128.554,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Kab. Paser**	**Persentasepeningkatanjumlah UMKM yang diberdayakan**	5 %	**902.554.000,00**	
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Kab. Paser**	**Jumlah UMKM yang diberdayakan**	52 UKM	**623.128.554,00**	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Kab. Paser**	**Jumlah UMKM yang diberdayakan**	52 UKM	**902.554.000,00**	
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Paser	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	3 orang	129.064.277,00	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Paser	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	3 orang	61.352.000,00	
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kab. Paser	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	30 Unit Usaha	494.064.277,00	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kab. Paser	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	30 Unit Usaha	841.202.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Kab. Paser**	**Persentasejumlahumkm naik kelas**	0,06 %	**3.411.282.837,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Kab. Paser**	**Persentasejumlahumkm naik kelas**	0,06 %	**3.055.289.290,00**	
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Kab. Paser**	**Jumalah Usaha Mikro yang dikembangkanmenjadiusahakecil**	20 UMKM	**3.411.282.837,00**	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Kab. Paser**	**Jumalah Usaha Mikro yang dikembangkanmenjadiusahakecil**	20 UMKM	**3.055.289.290,00**	
Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Paser	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	60 Unit Usaha	3.411.282.837,00	Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Paser	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	60 Unit Usaha	3.055.289.290,00	
SASARAN : Meningkatnya pdrb sektor perdagangan		**Nilai pdrb sektor perdagangan**	2415,7		**SASARAN : Meningkatnya pdrb sektor perdagangan**		**Nilai pdrb sektor perdagangan**	2415,7		

PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**Kab. Paser**	**Jumlah Rekomendasi perizinan yang dikeluarkan**	50	Rekom	**198.884.690,00**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Kab. Paser**	**Jumlah Rekomendasi perizinan yang dikeluarkan**	50	Rekom	**198.024.000,00**	
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	**Kab. Paser**	***Persentase rekomendasi perizinan yang dikrekomendasikan melalui aplikasi oss berbasisresiko tinggi***	2	%	**198.884.690,00**	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**Kab. Paser**	***Persentase rekomendasi perizinan yang dikrekomendasikan melalui aplikasi oss berbasisresiko tinggi***	2	%	**198.024.000,00**	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Paser	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6	Dokumen	198.884.690,00	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Paser	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6	Dokumen	198.024.000,00	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**Kab. Paser**	**Persentase Sarana DistribusiPerdagangan yang direhap/ Dibangun**	4	%	**13.292.527.180,00**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Kab. Paser**	**Persentase Sarana DistribusiPerdagangan yang direhap/ Dibangun**	4	%	**18.133.495.283,00**	
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Kab. Paser**	***Terlaksananyapembangunan dan pengelolaansaranadistribusiperdagangan***	10	Pasar	**3.540.829.380,00**	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Kab. Paser**	***Terlaksananyapembangunan dan pengelolaansaranadistribusiperdagangan***	10	Pasar	**5.633.779.002,00**	
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Paser	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	10	Pasar	3.021.944.690,00	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Paser	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	10	Pasar	5.230.351.002,00	
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Paser	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5	Unit	518.884.690,00	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Paser	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5	Unit	403.428.000,00	
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**Kab. Paser**	***Terlaksananya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan***	**5**	**Pasar**	**9.751.697.800,00**	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Kab. Paser**	***Terlaksananya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan***	**5**	**Pasar**	**12.499.716.281,00**	
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	Dokumen	9.751.697.800,00	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	Dokumen	12.499.716.281,00	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Kab. Paser**	**Persentase Stabilitas harga Bahan Pokok dan Penting**	60	%	**975.988.680,00**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Kab. Paser**	**Persentase Stabilitas harga Bahan Pokok dan Penting**	60	%	**561.034.606,00**	
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Kab. Paser**	***Terlaksananya pendataan dan informasi harga dan stock bapok dan bapokting***	30	pelakuusaha	**797.412.697,00**	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Kab. Paser**	***Terlaksananya pendataan dan informasi harga dan stock bapok dan bapokting***	30	pelakuusaha	**488.876.606,00**	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	Laporan	458.884.690,00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	Laporan	321.618.000,00	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	240	Laporan	189.643.317,00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	240	Laporan	94.126.000,00	
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Laporan	148.884.690,00	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Laporan	73.132.606,00	
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	*Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida sesuai kebutuhan masyarakat*	34	kios	178.575.983,00	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	*Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida sesuai kebutuhan masyarakat*	34	kios	72.158.000,00	
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	32	Dokumen	178.575.983,00	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	32	Dokumen	72.158.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**Kab. Paser**	**Persentase peningkatan produk local**	20	%		**PROGRAM PENGEMBANGAN**	**Kab. Paser**	**Persentase peningkatan produk local**	20	%		

		bahan ekspor		**278.884.690,00**	**EKSPOR**		**bahan ekspor**		**264.398.000,00**	
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Paser**	***Terlaksananyapromosi dan missidagangprodukekspor***	1 kali	**278.884.690,00**	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Paser**	***Terlaksananyapromosi dan missidagangprodukekspor***	1 kali	**264.398.000,00**	
Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Paser	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 Produk	278.884.690,00	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Paser	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 Produk	264.398.000,00	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Kab. Paser**	**Persentase jumlahuttp yang ditera tera ulang**	100 %	**1.287.358.794,00**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Kab. Paser**	**Persentase jumlahuttp yang ditera tera ulang**	100 %	**1.781.324.749,00**	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Kab. Paser**	**TerlaksananyaTera , Tera Ulangalat UTTP**	8 kec	**1.287.358.794,00**	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Kab. Paser**	**TerlaksananyaTera , Tera Ulangalat UTTP**	8 kec	**1.781.324.749,00**	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Paser	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	370 Unit	952.621.134,00	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Paser	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	370 Unit	1.454.894.749,00	
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Paser	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	400 Orang	334.737.660,00	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Paser	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	400 Orang	326.430.000,00	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**Kab. Paser**	**Persentase peningkatan produk umkm yang dipasarkan / dipromosikan**	17 %	**584.737.660,00**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Kab. Paser**	**Persentase peningkatan produk umkm yang dipasarkan / dipromosikan**	17 %	**631.080.560,00**	
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Kab. Paser**	***Terlaksananya promosi produk dalam negeri***	2 Kegiatan	**584.737.660,00**	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Kab. Paser**	***Terlaksananya promosi produk dalam negeri***	2 Kegiatan	**631.080.560,00**	
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2 UMKM	584.737.660,00	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2 UMKM	631.080.560,00	
SASARAN : Meningkatkan kwalitas Pertumbuhan sektor Industri berbasis pertania		**Persentase Pertumbuhan industri baru**	6 %		**SASARAN : Meningkatkan kwalitas Pertumbuhan sektor Industri berbasis pertania**		**Persentase Pertumbuhan industri baru**	6 %		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Kab. Paser**	**Persentase per tumbuhan produk industry berbasis pertanian**	2,4 %	**2.927.005.096,00**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Kab. Paser**	**Persentase per tumbuhan produk industry berbasis pertanian**	2,4 %	**2.955.294.455,63**	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Kab. Paser**	**Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan industri**	2 dokumen	**2.927.005.096,00**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Kab. Paser**	**Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan industri**	2 dokumen	**2.955.294.455,63**	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	411.104.653,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	644.155.584,63	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10 Dokumen	1.234.104.653,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10 Dokumen	1.234.104.653,00	

Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	5 Dokumen	1.281.795.790,00	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	5 Dokumen	1.077.034.218,00	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	**Kab. Paser**	**Persentase pemutahiran data IKM**	60 %	**411.863.280,00**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Kab. Paser**	**Persentase pemutahiran data IKM**	60 %	**417.351.000,00**	
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kab. Paser**	**Jumlah industri yang difasilitasi perizinannya**	5 Industri	**411.863.280,00**	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Paser**	**Jumlah industri yang difasilitasi perizinannya**	5 Industri	**417.351.000,00**	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	5 Dokumen	411.863.280,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	5 Dokumen	417.351.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. saran dan pendapat DPRD berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Pada RKPD Perubahan Tahun 2025 tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Paser.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kab.Paser Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							**35.193.869.338,00**	**47.767.212.221,00**	**46.759.371.088,00**	**11.565.501.750,00**							**26.948.100.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**16.959.545.982,00**	**26.974.491.611,00**	**29.131.221.852,00**	**12.171.675.870,00**							**14.923.400.000,00**	
	2,17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**16.959.545.982,00**	**26.974.491.611,00**	**29.131.221.852,00**	**12.171.675.870,00**							**14.923.400.000,00**	
1	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi sehat**				**-**	**67 %**	**34.996.686,00**	**34.996.686,00**	**251.061.000,00**	**15.003.314,00**							**50.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Koperasi Aktif*				-	53 %	34.996.686,00	34.996.686,00	251.061.000,00	216.064.314,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal	Koperasi		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	34.996.686,00	34.996.686,00	251.061.000,00	216.064.314,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase pningkatan koperasi yang maju**				**-**	**12 %**	**264.996.686,00**	**264.996.686,00**	**1.391.543.487,00**	**-44.996.686,00**							**220.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pelatihan yang dilaksanakan*				-	2 Kali	264.996.686,00	264.996.686,00	1.391.543.487,00	1.126.546.801,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal	Koperasi		220.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				60 Orang	60 Orang	264.996.686,00	264.996.686,00	1.391.543.487,00	1.126.546.801,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			220.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Rata-Rata Omzet per Koperasi**				**-**	**265 Juta Rp**	**404.996.686,00**	**1.622.196.686,00**	**2.149.205.459,00**	**-352.996.686,00**							**52.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Pelaksanaan pemberdayaan koperasi*				-	10 Kec	404.996.686,00	1.622.196.686,00	2.149.205.459,00	1.744.208.773,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal	Koperasi		52.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	404.996.686,00	1.622.196.686,00	2.149.205.459,00	1.744.208.773,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			52.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Peningkatan jumlah UMKM yang diberdayakan**				**-**	**5 %**	**623.128.554,00**	**623.128.554,00**	**409.428.000,00**	**-328.128.554,00**							**295.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah UMKM yang Diberdayakan*				-	52 UKM	623.128.554,00	623.128.554,00	409.428.000,00	-213.700.554,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal	UMKM		295.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																		
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				3 Orang	3 Orang	129.064.277,00	129.064.277,00	61.352.000,00	-67.712.277,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				30 Unit Usaha	2000 Unit Usaha	494.064.277,00	494.064.277,00	348.076.000,00	-145.988.277,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			260.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase peningkatan jumlah umkm yang naik kelas**				**-**	**0.05 %**	**2.730.064.277,00**	**3.411.282.837,00**	**3.644.123.652,00**	**-880.064.277,00**							**1.850.000.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah Usaha Mikro yang Dikembangkan menjadi Usaha Kecil*				-	20 UKM	2.730.064.277,00	3.411.282.837,00	3.644.123.652,00	914.059.375,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal	UMKM		1.850.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				600 Unit Usaha	600 Unit Usaha	2.730.064.277,00	3.411.282.837,00	3.644.123.652,00	914.059.375,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			1.850.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat**				**-**	**76 %**	**12.901.363.093,00**	**21.017.890.162,00**	**21.285.860.254,00**	**-444.963.093,00**							**12.456.400.000,00**	
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah*				-	90 %	240.876.800,00	240.876.800,00	456.431.734,00	215.554.934,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal	Pegawai Disperindagkop dan UKM		127.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	11 Dokumen	30.234.000,00	30.234.000,00	155.420.000,00	125.186.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			32.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	17.127.800,00	17.127.800,00	14.976.400,00	-2.151.400,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			14.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	20.244.000,00	20.244.000,00	6.765.000,00	-13.479.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			7.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	24.390.000,00	-610.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			9.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	24.000.000,00	24.000.000,00	22.136.000,00	-1.864.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			4.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	24.244.000,00	24.244.000,00	22.597.652,00	-1.646.348,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			19.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	100.027.000,00	100.027.000,00	210.146.682,00	110.119.682,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			42.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan Administrasi Keuangan*				-	90 %	12.201.361.336,00	19.849.546.988,00	19.811.095.144,00	7.609.733.808,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal	Pegawai Disperindagkop dan UKM		11.804.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	11.298.095.657,00	18.814.681.309,00	18.814.681.309,00	7.516.585.652,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			11.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	826.131.183,00	957.731.183,00	942.961.835,00	116.830.652,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			785.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan				12 Laporan	12	77.134.496,00	77.134.496,00	53.452.000,00	-23.682.496,00	Kab.	DANA ALOKASI	Membangun dari desa dan	Penurunan Kemiskinan Melalui			19.000.000,00	DINAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Laporan					Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal				PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Administrasi SKPD*				-	90 %	395.887.960,00	864.229.377,00	957.164.422,00	561.276.462,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal	Pegawai Disperindagkop dan UKM		383.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	3.977.073,00	-22.927,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			2.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	72.200.000,00	540.541.417,00	592.183.832,00	519.983.832,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	53.389.960,00	53.389.960,00	46.149.784,00	-7.240.176,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	31.884.000,00	31.884.000,00	16.683.733,00	-15.200.267,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			35.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang				600 Dokumen	600 Dokumen	4.060.000,00	4.060.000,00	4.055.000,00	-5.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis			5.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Disediakan										Semua Kel/Desa			Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal				MENENGAH
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				66 Laporan	66 Laporan	230.354.000,00	230.354.000,00	294.115.000,00	63.761.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			220.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Kebutuhan Urusan Pemerintah Daerah*				-	12 Bulan	4.500.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	-2.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal	Pegawai Disperindagkop dan UKM		22.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			3.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			19.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Pemelihraan BMD*				-	65 %	58.736.997,00	58.736.997,00	58.668.954,00	-68.043,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal	Pegawai Disperindagkop dan UKM		119.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	53.392.000,00	53.392.000,00	53.340.856,00	-51.144,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			115.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.01.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	.09.0006																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.344.997,00	5.344.997,00	5.328.098,00	-16.899,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			4.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**18.234.323.356,00**	**20.792.720.610,00**	**17.628.149.236,00**	**-606.174.120,00**							**12.024.700.000,00**	
	3,3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**14.029.904.744,00**	**16.404.543.371,00**	**14.795.485.690,00**	**765.580.946,00**							**10.649.700.000,00**	
1	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan**				**-**	**50 Rekom**	**198.884.690,00**	**198.884.690,00**	**80.616.000,00**	**-156.884.690,00**							**42.000.000,00**	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan melalui aplikasi OSS berbasis resiko tinggi*				-	2 %	198.884.690,00	198.884.690,00	80.616.000,00	-118.268.690,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal	Pelaku Usaha		42.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				6 Dokumen	6 Dokumen	198.884.690,00	198.884.690,00	80.616.000,00	-118.268.690,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			42.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase sarana distribusi perdagangan yang direhap / dibangun**				**-**	**4 %**	**10.808.647.180,00**	**13.052.527.180,00**	**12.677.634.195,00**	**-1.118.947.180,00**							**9.689.700.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*				-	10 Pasar Permanen	2.222.769.380,00	3.300.829.380,00	3.138.038.000,00	915.268.620,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal	Pasar		1.789.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				13 Unit	13 Unit	2.043.884.690,00	3.021.944.690,00	2.734.610.000,00	690.725.310,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis			1.700.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Potensi Lokal				
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				5 Unit	5 Unit	178.884.690,00	278.884.690,00	403.428.000,00	224.543.310,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			89.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan*				-	10 Kec	8.585.877.800,00	9.751.697.800,00	9.539.596.195,00	953.718.395,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal	Pelaku Usaha		7.900.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.585.877.800,00	9.751.697.800,00	9.539.596.195,00	953.718.395,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			7.900.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase harga barang kebutuhan pokok dan penting yang stabil**				**-**	**60 %**	**1.021.391.730,00**	**1.002.150.357,00**	**401.420.006,00**	**-839.391.730,00**							**182.000.000,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pendataan dan Informasi Harga dan Stock Bapok dan Bapokting*				-	30 Pelaku Usaha	816.654.070,00	797.412.697,00	329.262.006,00	-487.392.064,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal	Pelaku Usaha		155.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	458.884.690,00	458.884.690,00	162.003.400,00	-296.881.290,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			45.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi				240 Laporan	240 Laporan	208.884.690,00	189.643.317,00	94.126.000,00	-114.758.690,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis			35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			dalam Sistem Informasi Perdagangan													Potensi Lokal				
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	148.884.690,00	148.884.690,00	73.132.606,00	-75.752.084,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kios yang Diawasi*				-	32 Kios	204.737.660,00	204.737.660,00	72.158.000,00	-132.579.660,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal	Pelaku Usaha		27.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan																		
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				32 Dokumen	32 Dokumen	204.737.660,00	204.737.660,00	72.158.000,00	-132.579.660,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			27.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase peningkatan produk lokal yang diekspor**				**-**	**20 %**	**278.884.690,00**	**278.884.690,00**	**178.490.000,00**	**-224.884.690,00**							**54.000.000,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya promosi dan missi dagang produk ekspor*				-	1 Kegiatan	278.884.690,00	278.884.690,00	178.490.000,00	-100.394.690,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal	Pelaku Usaha		54.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				10 Produk	10 Produk	278.884.690,00	278.884.690,00	178.490.000,00	-100.394.690,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			54.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase jumlah uttp yang ditera / tera ulang**				**-**	**100 %**	**1.287.358.794,00**	**1.287.358.794,00**	**909.302.749,00**	**-697.358.794,00**							**590.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Terlaksananya Tera , Tera Ulang Alat UTTP*				-	8 Kec	1.287.358.794,00	1.287.358.794,00	909.302.749,00	-378.056.045,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya	Pelaku Usaha		590.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal				
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				370 Unit	370 Unit	952.621.134,00	952.621.134,00	804.894.749,00	-147.726.385,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			390.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				400 Orang	400 Orang	334.737.660,00	334.737.660,00	104.408.000,00	-230.329.660,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase peningkatan produk umkm yang dipasarkan / dipromosikan**				**-**	**17 %**	**434.737.660,00**	**584.737.660,00**	**548.022.740,00**	**-342.737.660,00**							**92.000.000,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Meningkatnya Pelaksanaan promosi dan Penggunaaan Produk Lokal*				-	2 Kegiatan	434.737.660,00	584.737.660,00	548.022.740,00	113.285.080,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal	Pelaku Usaha		92.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				2 UMKM	2 UMKM	434.737.660,00	584.737.660,00	548.022.740,00	113.285.080,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			92.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3,31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**4.204.418.612,00**	**4.388.177.239,00**	**2.832.663.546,00**	**-1.371.755.066,00**							**1.375.000.000,00**	
1	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase pertumbuhan industri berbasis pertanian**				**-**	**2.4 %**	**3.773.313.959,00**	**3.976.313.959,00**	**2.665.312.546,00**	**-2.848.313.959,00**							**925.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*				-	2 Dokumen	3.773.313.959,00	3.976.313.959,00	2.665.312.546,00	-1.108.001.413,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal	IKM		925.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,				~~1 Dokumen~~	~~1~~ Dokumen	~~411.104.653,00~~	~~411.104.653,00~~	~~393.251.675,00~~	~~-17.852.978,00~~	Kab. Paser,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan			420.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN,

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri										Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal				PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1.031.104.653,00	1.234.104.653,00	1.234.104.653,00	203.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			460.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				5 Dokumen	5 Dokumen	2.331.104.653,00	2.331.104.653,00	1.037.956.218,00	-1.293.148.435,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			45.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase pemutahiran data IKM**				**-**	**50 %**	**431.104.653,00**	**411.863.280,00**	**167.351.000,00**	**18.895.347,00**							**450.000.000,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah industri yang difasilitasi perizinannya*				-	5 Industri	431.104.653,00	411.863.280,00	167.351.000,00	-263.753.653,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal	Industri		450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				5 Dokumen	5 Dokumen	431.104.653,00	411.863.280,00	167.351.000,00	-263.753.653,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal			450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	JUMLAH								**35.193.869.338,00**	**47.767.212.221,00**	**46.759.371.088,00**	**11.565.501.750,00**							**26.948.100.000,00**	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Tana Paser , 22 Agustus 2025

Kepala

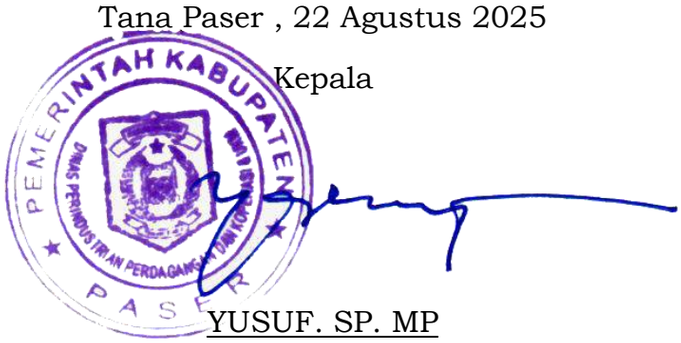

YUSUF. SP. MP

Pembina Tk.I

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
NAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI & UKM
pleks Perkantoran KM 4,5 Gedung I Lt 2 Kav 2 Fax. (0543) 21167
TANA PASER

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN PASER

NOMOR : 188.4/ 20 /Sek.1/ V /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN PASER TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM KABUPATEN PASER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah di ubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Racangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

3. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 3 Tahun 2022tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Kabupaten Paser sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Kabupaten Paser;

b. Mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Kabupaten Paser;

c. Melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Kabupaten Paser;

d. Merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser;

e. Melaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser tepat waktu;

g. Melaporkan hasilnya pada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser selaku Pengguna Anggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 18 April 2025

Kepala Dinas

YUSUF. SP. MP
NIP. 19720421 199803 1 011

Tembusan Keputusan ini disampaikankepada Yth.

1. Bupati Paser di Tana Paser (sebagai laporan).
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERINDAGKOP DAN UKM
KABUPATEN PASER

NOMOR : 188.4/20 /Sek.1/ V /2025

TANGGAL: 18 April 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN PASER TAHUN 2025

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN
1.	Yusuf SP. MP	Kepala Disperindagkop &UKM	Penanggung Jawab
2.	Syamsul Rizal, SP.M.Si	Sekretaris	Ketua
3.	Lina Wati, SE	Perencana Pertama	Sekretaris
4.	Suherman, S.Sos	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
5.	Eric Apriantour, SE	Kepala Bidang UKM	Anggota
6.	H. Zailani SE. MM	Kepala Bidang Pengawasan	Anggota
7.	Muhriani, SP	Pembina Industri Ahli Muda	Anggota
8.	Haryono	Pelaksana	Anggota
9.	Abdul Hafidz	Pelaksana	Anggota
10.	Rasyadi Andzar	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 18 April 2025
Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

YUSUF. SP. MP
NIP. 19720421 199803 1 011

RencanaKerjaPerubahan Tahun 2025

DinasPekerjaanUmumDanTataRuang Kabupaten Paser

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

DAFTARISI

KataPengantar i

BABI PENDAHULUAN 1

LatarBelakang 1

LandasanHukum 3

Maksuddantujuan 4

SitematikaPenulisan 5

BABII EVALUASIPELAKSANAANRENJAPERUBAHANTAHUNLALU 6

EvaluasiPelaksanaanRenjaDinasPekerjaanUmumdanTataRuangTahunLalu

danCapaianRenstraKabupatenPaser 6

AnalisaKinerjaPelayananPerangkatDaerah 15

Isu-IsuStrategisPenyelenggaraanTugasdanFungsiDinas 19

ReviewTerhadapRencanaPerubahanRKPD 22

PenelaahanUsulanProgramdanKegiatanMasyarakat 27

BABIIITUJUANDANSASARAN 29

TelaahanTerhadapKebijakanNasionaldanProvinsi 29

TujuandanSasaranRenjaPD 30

ProgramdanKegiatan 31

BABIV RENCANAKERJADANPENDANAANPERANGKATDAERAH 32

BABV PENUTUP 40

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

LATARBELAKANG

RenjaPerubahan Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (empat) tahun. Undang-UndangNo 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun RenjaPerubahan PD sebagai pedoman kerja selama periode 4 (empat)tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

RenjaPerubahan PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja PD disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis.Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen RenjaPerubahan PD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan PD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatanyang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perubahan PD sangat ditentukan oleh kemampuan PD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi PD.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.





Dalamprosesnya, penyusunanRenjaPerubahan PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renja Perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunanRenjaPerubahan PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renja Perubahan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD,evaluasi pelaksanaan RenjaPerubahan PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaianRenstra PD. Tahap penetapan Renja Perubahan PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

Sesuai dengan perubahan yang sudah, sedang dan akan terjadi akhir-akhir ini dimana setiap organisasi dituntut untuk lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka diharapkan organisasi harus dapat menyusun dan membuat suatu Rencana Strategik (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan Pertanggung jawaban Kinerja (Performance Accountability Report) organisasi yangdapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas.

Pembangunan di bidang sarana dan prasarana mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting sebab menyangkut tugas pokok dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan seperti tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional. Perumusan kebijaksanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana meliputi perencanaan teknis operasional pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan perbaikan prasarana jalan,jembatan, saluran irigasi, drainase dan pelengkap jalan serta bangunan gedung dan penataan ruang. Dalam pembangunan di bidang sarana dan prasarana (jalan, jembatan, saluran irigasi, drainase dan pelengkap jalan serta bangunan gedung dan penataan ruang), strategi yang harus

dipakai adalah strategi pembinaan yang menampung secara sinergi dan seimbang atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Adapun pendekatan yang dipergunakan diantaranya :

a. Pendekatanpelayananyaitutugaspembinaanyang menyangkutpelayananterhadap masyarakat pengguna sarana dan prasarana (jalan, jembatan dan saluranirigasi)
b. Pendekatan pengembangan wilayah yaitu mengharapkan suatu pengembangan wilayah dan pembangunan / peningkatan daerah baru dengan membuat / membangun sarana dan prasarana baru yang sebelumnya tidak ada atau belum berkembang.

Sejalan dengan apa yang telah diuraikan di atas, pembangunan di bidang sarana dan prasaranadi Kabupaten Paser harus selalu didukung dengan dana sehingga dapat berkembang sesuai yang diharapkan. Semua itu diarahkan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakatsebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

LANDASANHUKUM

Adapun yang dipakai sebagai dasar hukum dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor17Tahun2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 –2025;
4. Undang-undangNo23Tahun2014tentangPemerintahDaerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Undang-UndangNomor26Tahun2007tentangPenataanRuang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor6 Tahun2008 tentangPedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Paser Tahun2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 –2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan SusunanPerangkat;
17. Peraturan Bupati Paser Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang KabupatenPaser.

MAKSUDDANTUJUAN

Maksud

Pada dasarnya Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser ini dimaksudkan sebagai arah dan pedoman pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Paser pada Tahun 2025serta untuk mendapatkan gambaran yang jelastentang permasalahan pembangunan di bidang jalan, jembatan, irigasi, bangunan gedung dan penataan ruang, dalam upaya untuk meningkatkan kualitasnya.

Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja 2025 adalah:

1. Sebagai pedoman bagi unit kerja terkait yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, khususnya bagi unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser, sebagai upaya untuk memenuhi pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumber daya air, pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah dan penataan ruang;
2. Memudahkan monitoring dan evaluasi, baik awal sampai akhir pelaksanaan program, sehingga memudahkan perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang.

SISTEMATIKAPENULISAN

Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN
Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksuddan Tujuan
Sistematika Penulisan

BABII EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHANDINASPEKERJAANUMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN TAHUN LALU
Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD Tabel T-C.29
Analisis KinerjaPelayanan PD TabelT-C.30
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Review Terhadap Rencana Renja Perubahan RKPD TabelT-C.31
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat TabelT-C.32

BABIII TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) DPUTR
Program dan Kegiatan

BABIV RENCANAKERJADANPENDANAANPERANGKATDAERAH

BABV PENUTUP

BABII
EVALUASIPELAKSANAANRENJAPERUBAHANTAHUNLALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Tahun Lalu dan Capaian RenstraKabupaten Paser

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab Paser juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Racangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

a) Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b) Tujuan yang dikehendaki;
c) Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d) Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksananya.

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab Paser juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
b) Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab Paserdapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut :

FORMULIREVALUASIHASILRENJAPERANGKATDAERAHDINASPEKERJAANUMUMDANTATARUANGPEMERINTAHKABUPATENPASER

PeriodePelaksanaan:TriwulanIVTahun2024

SasaranSKPDTahunan:-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahanDaerahdanProgram/Kegiatan	IndikatorKinerjaProgram (outcome)/Kegiatan(output)	TargetRENSTRApadaTahun 2021-2026(AkhirPeriodeRENSTRA)		Realisasi Capaian KinerjaRENSTRAsampaidenganRENJA Tahun Lalu (Tahun 2023)		TargetKinerjadanAnggaranRENJATahunberjalan(Tahun2024)yangdievaluasi		RealisasiKinerjaPadaTriwulan								RealisasiCapaianKinerjadanAnggaranRENJAyangdievaluasi		RealisasiKinerjadanAnggaranRENSTRAs/d tahun 2024(Akhir TahunPelaksanaaanRENJATahun2024)		TingkatCapaianKinerjadanRealisasiAnggaranRENSTRAs/dtahun2023(%)		Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		1				1.272.382.719.814,00		1.151.204.292.023,00		1.009.459.461.630,00															
		1,03	URUSANPEMERINTAHANBIDANGPEKERJAAN UMUMDANPENATAANRUANG			1.272.382.719.814,00		1.151.204.292.023,00		1.009.459.461.630,00															
1		1:03:01	PROGRAMPENUNJANGURUSANPEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA	IndeksKepuasanLayanan(Sekretariat)	100	17.787.233.836,00	100	**15.971.105.046,00**	100	**25.838.346.188,00**															
		1.03.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi KinerjaPerangkatDaerah	Persentaserealisasianggarandaritotalanggaran yang dialokasikan untuk setiap programataukegiatan.	100	69.596.000,00	100%	64.903.964,00	100	110.000.000,00															
		1.03.01.2.01.03	KoordinasidanPenyusunanDokumenPerubahanRKA-SKPD	JumlahDokumenPerubahanRKA-SKPDdan LaporanHasil	10	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	0	0	0	-	0	-	5	8.931.200,00	5	8.931.200,00	10	18.931.200,00	100%	189%	
		1.03.01.2.01.04	KoordinasidanPenyusunanDPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD(Dokumen)	10	9.966.000,00	5	8.016.000,00	5	10.000.000,00	0	0	0	-	0	-	5	9.933.600,00	5	9.933.600,00	10	17.949.600,00	100%	180%	
		1.03.01.2.01.05	KoordinasidanPenyusunanPerubahanDPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPDdanLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen Perubahan DPA-SKPD(Dokumen)	10	9.966.000,00	5	9.696.000,00	5	10.000.000,00	0	0	0	-	0	-	5	8.526.800,00	5	8.526.800,00	10	18.222.800,00	100%	183%	
		1.03.01.2.01.01	PenyusunanDokumenPerencanaanPerangkatDaerah	JumlahDokumenPerencanaanPerangkat Daerah(Dokumen)	0	9.994.000,00	5	9.474.000,00	5	10.000.000,00	0	0	0	-	0	7.170.811,00	5	2.816.400,00	5	9.987.211,00	10	12.290.400,00	0%	123%	
		1.03.01.2.01.02	KoordinasidanPenyusunanDokumenRKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(Dokumen)	0	10.000.000,00	5	9.780.000,00	5	10.000.000,00	0	0	1	8.624.246,00	0	-	4	244.000,00	5	8.868.246,00	10	10.024.000,00	0%	100%	
		1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian KinerjadanIkhtisarRealisasiKinerjaSKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerjadan IkhtisarRealisasiKinerjaSKPDdanLaporanHasilKoordinasi Penyusunan Laporan CapaianKinerjdanIkhtisarRealisasiKinerjaSKPD (Laporan)	10	10.000.000,00	5	9.877.482,00	5	20.000.000,00	0	0	0	-	0	13.680.800,00	5	6.032.800,00	5	19.713.600,00	10	15.910.282,00	100%	159%	
		1.03.01.2.01.07	EvaluasiKinerjaPerangkatDaerah	JumlahLaporanEvaluasiKinerjaPerangkat Daerah(Laporan)	10	9.670.000,00	5	8.060.482,00	5	40.000.000,00	0	0	1	8.615.800,00	0	-	4	28.673.400,00	5	37.289.200,00	10	36.733.882,00	100%	380%	
		1.03.01.2.02	AdministrasiKeuanganPerangkatDaerah	Persentase gaji pegawaiyang dibayarkantepatwaktu sesuaidengan jadwalyang telah ditetapkan.	100	10.495.843.403,00	100%	9.310.315.834,00	100	11.591.006.978,00															
		1.03.01.2.02.01	PenyediaanGajidanTunjanganASN	JumlahOrangyangMenerimaGajidan TunjanganASN(Orang/bulan)	70	9.835.741.003,00	14	8.653.899.606,00	14	10.913.037.330,00	4	1.596.659.738,00	4	3.347.762.828,00	3	2.031.783.389,80	3	2.521.535.372,20	14	9.497.741.328,00	28	11.175.434.978,20	40%	114%	
		1.03.01.2.02.02	PenyediaanAdministrasiPelaksanaanTugasASN	JumlahDokumenHasilPenyediaanAdministrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	17	608.059.600,00	14	605.919.600,00	14	656.000.000,00	4	120.293.404,00	4	175.288.500,00	3	138.991.900,00	3	219.773.856,00	14	654.347.660,00	28	825.693.456,00	165%	136%	
		1.03.01.2.02.04	KoordinasidanPelaksanaanAkuntansiSKPD	JumlahDokumenKoordinasidanPelaksanaan Akuntansi SKPD(Dokumen)	119	52.042.800,00	12	50.496.628,00	12	21.969.648,00	3	4.316.544,00	3	4.343.760,00	3	4.347.000,00	3	3.750.948,00	12	16.758.252,00	24	54.247.576,00	20%	104%	
		1.03.01.2.03	AdministrasiBarangMilikDaerahpadaPerangkatDaerah	Persentase rekonsiliasi barang yang dilakukandengan keteraturan dan kelengkapan sesuaidenganjadwalyangditetapkan	100	51.158.800,00	100%	50.478.800,00	100	10.000.000,00															
		1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang MilikDaerahpadaSKPD	JumlahLaporanRekonsiliasidanPenyusunan Laporan Barang Milik Daerah padaSKPD(Laporan)	0	51.158.800,00	2	50.478.800,00	2	10.000.000,00	0	0	1	-	0	6.707.200,00	1	3.016.400,00	2	9.723.600,00	4	53.495.200,00	0%	105%	
		1.03.01.2.05	AdministrasiKepegawaianPerangkatDaerah	Persentase kelengkapan data pada profilpegawaiyang mencakupinformasi pribadi,riwayatpendidikan,riwayatpekerjaan	100	60.000.000,00	100%	59.263.955,00	100	20.000.000,00															
		1.03.01.2.05.03	PendataandanPengolahanAdministrasiKepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan PengolahanAdministrasiKepegawaian(Dokumen)	0	60.000.000,00	1	59.263.955,00	1	20.000.000,00	0	6.244.800,00	0	8.135.600,00	0	-	1	3.600.400,00	1	17.980.800,00	2	62.864.355,00	0%	105%	

		1.03.01.2.06	AdministrasiUmumPerangkatDaerah	PersntasePeralatandanperlengkapankantor,RAKOR sesuai jadwal yang ditetapkan	100	379.998.800,00	100%	351.922.600,00	100	465.000.000,00																	
		1.03.01.2.06.04	PenyediaanBahanLogistikKantor	JumlahPaketBahanLogistikKantoryang Disediakan(Paket)	1169,17	64.998.800,00	1168	37.135.400,00	1170	50.000.000,00	292	0	292	30.371.400,00	292	19.628.500,00	294	-	1170	49.999.900,00	2338	37.135.400,00	200%	57%	
		1.03.01.2.06.05	PenyediaanBarangCetakandanPenggandaan	JumlahPaketBarangCetakandan PenggandanyangDisediakan(Paket)	112,88	15.000.000,00	56440	15.000.000,00	56442	15.000.000,00	14124	0	14124	5.000.000,00	14124	7.852.000,00	14070	2.148.000,00	56442	15.000.000,00	112882	17.148.000,00	100002%	114%	
		1.03.01.2.06.09	PenyelenggaraanRapatKoordinasidanKonsultasiSKPD	JumlahLaporanPenyelenggaraanRapatKoordinasidanKonsultasiSKPD(Laporan)	398	300.000.000,00	198	299.787.200,00	200	400.000.000,00	49	47.393.205,00	49	46.091.150,00	49	64.983.804,00	53	232.592.790,00	200	391.060.949,00	398	532.379.990,00	100%	177%	
		1.03.01.2.07	PengadaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusanPemerintahDaerah	Persentasekebutuhanbarangyangberhasilterpenuhimelaluiprosespengadaan	0	83.251.000,00	0	81.962.900,00	100	448.162.300,00															
		1.03.01.2.07.06	PengadaanPeralatandanMesinLainnya	JumlahUnitPeralatandanMesinLainnya yangDisediakan(Unit)	10	83.251.000,00	10	81.962.900,00	10	448.162.300,00	0	0	0	-		-	10	334.271.900,00	10	334.271.900,00	20	416.234.800,00	200%	500%	
		1.03.01.2.08	PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahanDaerah	Persentasetargetlayanan yangberhasildicapaioleh penyediajasapenunjangpemerintahan daerah(OPD)	809	4.449.999.573,00	100%	4.009.746.893,00	409	6.325.210.950,00															
		1.03.01.2.08.02	PenyediaanJasaKomunikasi,SumberDayaAirdanListrik	JumlahLaporanPenyediaanJasa Komunikasi,SumberDayaAirdanListrikyang Disediakan(Laporan)	24	4.449.999.573,00	12	4.009.746.893,00	12	6.325.210.950,00	3	1.169.345.287,00	3	973.750.434,00	3	1.085.601.120,00	3	1.295.140.649,00	12	4.523.837.490,00	24	5.304.887.542,00	100%	119%	
		1.03.01.2.09	PemeliharaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusanPemerintahanDaerah	Persentaserekonsiliasibarangyangdilakukandenganketeraturandankelengkapansesuaidengan jadwal yang ditetapkan	100	2.197.386.260,00	100%	2.042.510.100,00	100	6.868.965.960,00															
		1.03.01.2.09.02	Penyediaan JasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan,PajakdanPerizinanKendaraanDinasOperasionalatauLapangan	JumlahKendaraanDinasOperasionalatauLapangan yangDipeliharadandibayarkanPajak dan Perizinannya (Unit)	17	119.971.600,00	9	119.113.400,00	6	154.000.000,00	2	4.239.200,00	2	31.789.700,00	1	20.710.000,00	1	84.891.400,00	6	141.630.300,00	15	204.004.800,00	88%	170%	
		1.03.01.2.09.06	PemeliharaanPeralatandanMesinLainnya	JumlahPeralatandanMesinLainnyayang Dipelihara(Unit)	10	9.490.000,00	10	9.300.000,00	0	0	0	0	0	-		-			0	-	10	9.300.000,00	100%	98%	
		1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan PrasaranaPendukungGedungKantoratauBangunanLainnya	JumlahGedungKantordanPendukungYangterpelihara(%)	0	2.067.924.660,00	100	1.914.096.700,00	100	6.714.965.960,00	25	149.800.000,0	25	239.099.800,0	25	1.545.035.400	25	3.876.384.932	100	5.810.320.132,00	200	5.790.481.632,00	0%	280%	
		FaktorPendomongKeberhasilanKinerja			:																						
		FaktorPenghambatPencapaianKinerja			:																						
		TindakLanjutyangDiperlukanDalamTriwulanBerikutnya			:																						
		TindakLanjutyangdiperlukandalamRenjaSKPDBerikutnya			:																						
2		37259	PROGRAMPENGELOLAANSUMBERDAYAAIR (SDA)	persentasekawasansumberdayaairyang dikeloladenganbaik(%)	43	151.959.000.401,00	94,89	**144.487.000.421,00**	30	**148.449.001.728,00**															
		1.03.02.2.01	PengelolaanSDAdanBangunanPengamanPantaipadaWilayahSungai(WS)dalam1(Satu)DaerahKabupaten/Kota	Persentasi Pengelolaan pemantauan kondisifisikdankekuatanstruktur tanggulsertabangunanpengamanpantaiuntukmenastikankelayakan dan kinerja yang optimal.	100	39.685.405.832,00	92,89%	34.695.912.142,00	100	43.914.001.440,00															
		1.03.02.2.01.26	RehabilitasiPintuAir/Bendung/PengendaliBanjir	PanjangSaluranIrigasiyangDitingkakan (M)	26	10.099.986.686,00	31349,4	7.060.748.400,00	3500	3.925.000.000,00	0	0	0	-	9172,40	78.692.900,00	12499,22	2.886.256.300,00	21671,62	2.964.949.200,00	53021,02	9.947.004.700,00	203927%	98%	
		1.03.02.2.01.0075	PembinaandanPemberdayaankelembagaanpengelolaanSDAKewenanganKabupaten/Kota	JumlahLembaga PengelolaanSDAKewenanganKabupaten /Kotayangdibina /fasilitasi/diberdayakan	0	0	0	0	1	500.000.000,00	0	0	0	-	1	19.499.200,00	0	281.768.808,00	1	301.268.008,00	1	281.768.808,00	0%	0%	
		1.03.02.2.01.46	Normalisasi/RestorasiSungai	PanjangSungaiyangDinormalisasi/Direstorasi(KM)	40	16.370.419.521,00	39229,41	15.817.096.015,00	10	31.434.000.000,00	0	5.942.200,00	0	49.403.729,00	1,21	1.323.772.200,00	9,71	28.083.429.250,00	10,918	29.462.547.379,00	39240,328	43.900.525.265,00	98101%	268%	
		1.03.02.2.01.21	RehabilitasiEmbungdanPenampunganAirLainnya	JumlahEmbungyangdipelihara(Unit)	7	275.000.000,00	4	263.240.000,00	5	425.000.000,00	0	0	0	-	2	1.544.000,00	0	410.925.368,00	2	412.469.368,00	6	674.165.368,00	86%	245%	

		1.03.02.2.01.0116	PenyusunanPoladanRencanaPengelolaan SDA WSKewenanganKabupaten/Kota	Jumlah Poladan RencanaPengelolaan SDAWS Kewenangan Kabupaten/Kotayang disusun	0	0	0	0	1	2.050.000.000,00	0	93.300.000,00	0	122.000.000,00	0	359.753.360,00	1	1.293.307.839,00	1	1.868.361.199,00	1	1.293.307.839,00	0%	0%	
		1.03.02.2.01.06	PembangunanEmbungdanPenampungAirLainnya	JumlahEmbungdanPenampungAirLainnya yangDibangun(Unit)	7	7.200.000.000,00	12	6.937.602.500,00	2	3.380.001.440,00	0	0	0	-	6	288.708.800,00	7	3.028.767.800,00	13	3.317.476.600,00	25	9.966.370.300,00	357%	138%	
		1.03.02.2.01.11	PembangunanPintuAir/BendungPengendaliBanjir	JumlahPintuAir/BendungPengendaliBanjir yangDibangun(Unitm)	3	5.389.999.625,00	5	4.403.722.200,00	1/1000	2.200.000.000,00	0	0	3757	29.485.964,00	0	871.303.961,00	5447,61	1.210.951.200,00	9204,61	2.111.741.125,00	9209,61	5.614.673.400,00	306987%	104%	
		1.03.02.2.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan KapasitasKelembagaanPengelolaanSDAKewenanganKabupaten/Kota	DokumenpendukungPeningkatanKapasitasKelembagaanPengelolanSDAKewenanganKabupaten/Kota(Dokumen)	1	350.000.000,00	1	213.503.027,00	-	0	0	0	0	-		-			0	-	1	213.503.027,00	100%	61%	
		1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi PrimerdanSekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas lahan yang tercakupolehsistemirigasiprimerdansekunder.	100	112.273.594.569,00	95,24%	109.791.088.279,00		104.535.000.288,00															
		1.03.02.2.02.01	Penyusunan RencanaTeknis dan Dokumen LingkunganHidupuntuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah RencanaTeknis dan DokumenLingkungan Hidupuntuk Konstruksi Irigasidan Rawayang Tersusun (Dokumen)	6	350.000.000,00	2	313.756.205,00	-	0	0	0	0	-		-			0	-	2	313.756.205,00	33%	90%	
		1.03.02.2.02.08	PeningkatanJaringanIrigasiPemukaan	PanjangJaringanIrigasiPemukaanyang Ditingkatkan(KM)	7053	61.772.843.472,00	233035,9	60.212.632.933,00	15	55.410.000.288,00	0	0		2.697.300,00	8,48	9.858.362.665,00	15,70	43.472.523.835,00	24,18	53.333.583.800,00	233060,08	103.685.156.768,00	3304%	168%	
		1.03.02.2.02.0011	PeningkatanJaringanIrigasiTambak	PanjangJaringanIrigasiTambakyang ditingkatkan	0	0	0	0	5	6.125.000.000,00	0	0		1.460.300,00	1,42	178.245.000,00	0,92	5.363.328.000,00	2,34	5.543.033.300,00	2,34	5.363.328.000,00	0%	0%	
		1.03.02.2.02.14	RehabilitasiJaringanIrigasiPemukaan	PanjangJaringanIrigasiPemukaanyang Direhabilisi(KM)	5100	37.520.820.181,00	16414,46	37.522.063.157,00	10	34.800.000.000,00	0	0		15.318.100,00	9,79	1.908.878.980,00	18,26	31.797.063.973,00	28,05	33.721.261.053,00	164172,65	69.319.127.130,00	3219%	185%	
		1.03.02.2.02.17	RehabilitasiJaringanIrigasiTambak	PanjangJaringanIrigasiTambakyang Direhabilisi(KM)	10	9.029.930.916,00	33137,98	8.787.245.984,00	-	0	0	0		-	0	-			0	-	33137,98	8.787.245.984,00	331380%	97%	
		1.03.02.2.02.21	OperasidanPemeliharaanJaringanIrigasiPemukaan	Panjang Jaringan Irigasi Pemukaan yangDioperasikandanDipelihara(KM)	15	3.600.000.000,00	21,84	2.955.390.000,00	10	8.200.000.000,00	0	0		2.586.100,00	3,94	150.276.400,00	8,03	7.816.212.805,00	11,97	7.969.075.305,00	33,81	10.771.602.805,00	225%	299%	
		FaktorPendorongKeberhasilanKinerja		:																					
		FaktorPenghambatPencapaianKinerja		:																					
		TindakLanjutyangDiperlukanDalamTriwulanBerikutnya		:																					
		TindakLanjutyangdiperlukandalamRenjaSKPDBerikutnya		:																					
3		37624	PROGRAMPENGELOLAANDANPENGEMBANGANSISTEMPENYEDIAANAIR MINUM	persentasecapaianaksesairminumlayak(%)	93	62.173.396.130,00	98,79	**58.256.098.842,00**		**101.510.046.288,00**															
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase yang terlayani oleh sistempenyediaan airminum,baik dari segi cakupanwilayahmaupunjumlahrumahtanggayangterlayani.	100	62.173.396.130,00	98,79%	58.256.098.842,00		101.510.046.288,00															
		1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM)BukanJaringanPerpipaan	Jumlah SistemPenyediaan Air Minum(SPAM)Bukan Jaringan Perpipaan Yangdibangun	0	0	0	0	5	7.523.946.000,00	0	0	0	2.328.400,00	2	156.883.900,00	8	7.193.669.136,00	10	7.352.881.436,00	10	7.193.669.136,00	0%	0%	
		1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana,Kebijakan,Strategi dan TeknisSistem Penyediaan AirMinum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana,Kebijakn,Strategidan Teknis Sistem Penyediaan AirMinum(SPAM)yangdisusun	0	0	0	0	5	1.735.100.000,00	0	0	0	17.127.900,00	0	-	0	-	0	17.127.900,00	0	-	0%	0%	
		1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM)JaringanPerpipaan	KapasitasSistemPenyediaanAir Minum(SPAM)Jaringan perpipaan yang dibangun	0	0	0	0	700	24.790.000.288,00	0	35.133.150,00	0	57.742.186,00	0	272.079.673,00	773	21.361.700.147,00	773	21.726.655.156,00	773	21.361.700.147,00	0%	0%	
		1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM)JaringanPerpipaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayanimelalui Kegiatan PadatKarya/SPAMBerbasisMasyarakat(SR)	0	0	0	0	700	67.461.000.000,00	0	72.536.650,00	0	183.381.799,00	130	10.798.415.187,00	570	54.200.644.847,00	700	65.254.978.483,00	700	54.200.644.847,00	0%	0%	
		1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAMJaringan Perpipaan di KawasanPerdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayanioleh Perluasan sistem penyediaan AirMinum(SPAM)jaringanperpipaan	8050	593.706.130,00	859	591.294.700,00	-	0	0	-	0	-		-			0	-	859	591.294.700,00	11%	100%	
		1.03.03.2.01.17	Pembangunan Baru SPAMBukan Jaringan Perpipaan diKawasanPerdesaan	Jumlah Rumah Tanggayang Terlayanimelalui Pembangunan Baru SPAMBukanJaringan Perpipaan (Rumah Tangga)	235	18.211.290.000,00	1437	16.578.641.300,00	-	0	0	-	0	-		-			0	-	1437	16.578.641.300,00	61.1%	91%	
		1.03.03.2.01.19	PerluasanSPAMJaringanPerpipaandiKawasan Perdesaan	PanjangJaringan(M)	50043,08	42.368.400.000,00	124357	40.961.552.842,00	-	0	0	0	0	-		-			0	-	124357	40.961.552.842,00	40%	97%	

		1.03.03.2.01.20	PerbaikanSPAMJaringanPerpipaandiKawasan Perkotaan	JumlahunitSPAMJaringanPerpipaanyang dioptimalisasi(Unit)	1	1.000.000.000,00	1	124.610.000,00	-	0	0	0	0	-		-			0	-	1	124.610.000,00	100%	12%	
		FaktorPendonongKeberhasilanKinerja			:																										
		FaktorPenghambatPencapaianKinerja			:																										
		TindakLanjutyangDiperlukanDalamTriwulanBerikutnya			:																										
		TindakLanjutyangdiperlukandalamRenjaSKPDBerikutnya			:																										
4		37989	PROGRAMPENGEMBANGAN SISTEMDANPENGELOLAANPERSAMPAHANREGIONAL	persentasebangunandaninfrastrukturpersampahanyangdikeloladenganbaik(%)	65	25.000.000,00	100	10.443.459,00		3.000.000.000,00																		
		1.03.04.2.01	PengembanganSistemdanPengelolaanPersampahandiDaerahKabupaten/Kota	PersentaseBangunandanInfrastrukturPersampahanyangdikeloladenganbaik(%)	100	25.000.000,00	100%	10.443.459,00		3.000.000.000,00																		
		1.03.04.2.01.0010	PembangunanTPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	KapasitasTPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPSyang dibangun	0	0	0	0	6	3.000.000.000,00	0	0		-	0	-	6	2.452.651.450,00	6	2.452.651.450,00	6	2.452.651.450,00	0%	0%	
		1.03.04.2.01.04	RehabilitasiTPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	JumlahTPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPSyang Direhabilitasi(Unit)	1	25.000.000,00	1	10.443.459,00	-	0	0	0		-		-				-	1	10.443.459,00	100%	42%	
		FaktorPendonongKeberhasilanKinerja			:																										
		FaktorPenghambatPencapaianKinerja			:																										
		TindakLanjutyangDiperlukanDalamTriwulanBerikutnya			:																										
		TindakLanjutyangdiperlukandalamRenjaSKPDBerikutnya			:																										
5		38355	PROGRAMPENGELOLAANDANPENGEMBANGAN SISTEMAIRLIMBAH	persentasecapaianaksesairdimbahdomestikyanglayak(%)	86	3.057.282.000,00	100	**3.005.564.138,00**		**2.932.000.000,00**																		
		1.03.05.2.01	PengelolaandanPengembanganSistemAirLimbahDomestikdalamDaerahKabupaten/Kota	Persentase yang terlayani oleh sistempengelolaan airlimbah,termasuk jaringansaluranairlimbahdaninstalasipengolahan.	100	3.057.282.000,00	100%	3.005.564.138,00		2.932.000.000,00																		
		1.03.06.2.01.0038	OperasidanPemeliharaanSistemPengelolaanAirLimbahDomestik(SPALD)	JumlahSistemPengelolaanAirLimbah Domestik(SPALD)yangdioperasikandandipelihara	0	0	0	0	1	232.000.000,00	0	39.000.000,00	0	101.949.101,00	0	39.000.000,00	1	52.000.000,00	1	231.949.101,00	1	52.000.000,00	0%	0%	
		1.03.05.2.01.0039	PenyediaanSubSistemPengolahanAirLimbahDomestik(SPALD)setempat	JumlahRumahTanggayangmemilikiToiletdantangkiSeptiksesuaidenganStandar	0	0	0	0	100	2.700.000.000,00	0	0	0	-	1	571.728.000,00	99	1.932.391.700,00	100	2.504.119.700,00	100	1.932.391.700,00	0%	0%	
		1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/PerluasanSistemPengelolaanAirLimbahDomestikTerpusatSkalaPermukiman	JumlahpenambahanrumahtanggayangterlayanimelaluioptimalisasiSPALD-TSkalaPermukiman(RumahTangga)	0	57.282.000,00	5	22.242.817,00	-	0	0	0	0	-		-			0	-	5	22.242.817,00	0%	39%	
		1.03.05.2.01.06	PembangunanPenyediaanSubSistemPengolahan Setempat	JumlahRumahTanggayangmemilikiTangki Septik(RumahTangga)	2	3.000.000.000,00	14	2.983.321.321,00	-	0	0	0	0	-		-			0	-	14	2.983.321.321,00	700%	99%	
		FaktorPendonongKeberhasilanKinerja			:																										
		FaktorPenghambatPencapaianKinerja			:																										
		TindakLanjutyangDiperlukanDalamTriwulanBerikutnya			:																										
		TindakLanjutyangdiperlukandalamRenjaSKPDBerikutnya			:																										
6		38720	PROGRAMPENGELOLAANDANPENGEMBANGANSISTEMDRAINASE	persentasesistempengembanganPemukimanyangberfungsidenganbaik	80	13.237.608.864,00	99,27	**7.838.298.900,00**		**44.659.278.896,00**																		
		1.03.06.2.01	PengelolaandanPengembanganSistemDrainaseyang TerhubungLangsungdenganSungaidalamDaerahKabupaten/Kota	Persentasesaluandrainaseyangdiperbaiki, ditingkatkan,ataudibangunkembali,setarapeningkatan	100	13.237.608.864,00	99,27%	7.838.298.900,00		44.659.278.896,00																		
		1.03.06.2.01.12	PembangunanSistemDrainaseLingkungan	PanjangSaluranDrainaseLingkunganyang Dibangun(M)	0	4.947.100.000,00	3708,47	5.721.124.500,00	2200	14.537.500.000,00	0	0	0	4.163.400,00	500	659.634.900,00	1700	13.507.462.750,00	2200	14.171.261.050,00	5908,47	19.228.587.250,00	0%	389%	
		1.03.06.2.01.0021	PeningkatanSistemDrainaseLingkungan	JumlahSistemDrainaseLingkunganyangdiTingkatkan	0	0	0	0	20	6.542.282.000,00	0	0	0	-	0	-	0	5.181.088.550,00	0	5.181.088.550,00	0	5.181.088.550,00	0%	0%	
		1.03.06.2.01.0028	RehabilitasiSistemDrainasePerkotaan	JumlahSistemDrainasePerkotaanyang diRehabilitasi	0	0	0	0	10	1.380.000.288,00	0	0	0	-	0	83.028.000,00	10	1.279.940.431,00	10	1.362.968.431,00	10	1.279.940.431,00	0%	0%	
		1.03.06.2.01.0029	PembangunanSistemDrainasePerkotaan	JumlahSistemDrainasePerkotaanyang Dibangun	0	0	0	0	15	22.199.496.608,00	0	0	0	-	0	180.264.000,00	10	12.828.119.260,00	10	13.008.383.260,00	10	12.828.119.260,00	0%	0%	

		1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (M)	0	4.700.000.000,00	2175,3	4.501.363.000,00	-	0	0	0	0	-	0	-			0	-	2175,3	4.501.363.000,00	0%	96%	
		1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi (M)	0	1.144.508.864,00	909,5	1.137.970.300,00	-	0	0	0	0	-	0	-			0	-	909,5	1.137.970.300,00	0%	99%	
		1.03.06.2.01.13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (M)	0	2.446.000.000,00	1171	2.198.965.600,00	-	0	0	0	0	-	0	-			0	-	1171	2.198.965.600,00	0%	90%	
		1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	**persentase sistem Pengelolaan Permukiman yang berfungsi dengan baik**				-		150.000.000,00																
		1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman dikawasan strategis daerah Kabupaten/Kota	Dukungan terhadap kelancaran Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman dikawasan strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-		150.000.000,00																
		1.03.07.2.01.0006	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Stategis Kabupaten/Kota yang terlayani jasa penyedotan lumpur Tinja	0	0	0	0	100	150.000.000,00	0		0	59.182.800,00	0	52.359.300,00	100	14.844.000,00	100	126.386.100,00	100	14.844.000,00	0%	0%	
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			:																					
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja			:																					
		Tindak Lanjut yang Dipethkan Dalam Triwulan Berikutnya			:																					
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya			:																					
7		**3.09.0**	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Persentase bangunan gedung yang telah fungsi dengan baik (%)**	**88**	**181.870.448.080,00**	**97,38**	**163.344.984.393,00**		**324.195.159.182,00**																
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	persentase bangunan yang memperoleh IMB sebelum memulai konstruksi	100	181.870.448.080,00	97,38%	163.344.984.393,00		324.195.159.182,00																
		1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan dan Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	30	323.995.159.182,00	0	109.624.000,00	33	1.710.779.424,00	83	31.904.434.357,00	156	234.830.670.134,00	272	268.555.507.915,00	272	234.830.670.134,00	0%	0%	
		1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Rencana Teknis pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA) Tim Penilai Teknis (TPT) Pemilik dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Rencana Teknis pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA) Tim Penilai Teknis (TPT) Pemilik dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG	0	0	0	0	15	200.000.000,00	67	0	40	-	56	53.212.000,00	23	50.979.787,00	186	104.191.787,00	186	50.979.787,00	0%	0%	
		1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG (Dokumen)	0	168.856.000,00	209	162.693.100,00	-	0	0	-								-	209	162.693.100,00	0%	96%	
		1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	0	181.701.592.080,00	199	163.182.291.293,00	-	0	0	-		-		-			-						

		FaktorPendorongKeberhasilanKinerja			:																					
		FaktorPenghambatPencapaianKinerja			:																					
		TindakLanjutyangDiperlukandalamTriwulanBerikutnya			:																					
		TindakLanjutyangdiperlukandalamRenjaSKPDBerikutnya			:																					
8		40181	PROGRAMPENYELENGGARAANJALAN	PersentasejalanKabupatendalamkondisi mantap(%)	66	838.293.214.530,00	90,68	**749.108.624.706,00**		**690.551.006.110,00**																
				persentasej embatandalamkondisibaik(%)	90																					
		1.03.10.2.01	PenyelenggaraanJalanKabupaten/Kota	Persentasekondisifisikjalan	100	838.293.214.530,00	90,68%	749.108.624.706,00		690.551.006.110,00																
		1.03.10.2.01.01	PenyusunanRencana,Kebijakan,danStrategiPengembanganJaringanJalansertaPerencanaanTeknisPenyelenggaraanJalandanJembatan	Jumlah Dokumen Hasilpelaksanaan Advisdan LayananTeknis,KajianKebijakan,Bantuan Teknis, BimbinganTeknis,PengelolaanPengendalian(Dokumen)	750	1.570.139.600,00	350	1.265.821.200,00	360	520.000.000,00	100	77.280.000,00	100	128.024.400,00	100	80.890.000,00	60	232.596.200,00	360	518.790.600,00	710	1.498.417.400,00	95%	95%	
		1.03.10.2.01.08	RekonstruksiJalan	PanjangJalanyang Dilaksanakan Rekonstruksi Jalan(KM)	110	771.439.055.930,00	119,25	700.654.712.981,00	100	573.352.432.195,00	0	84.160.000,00	1,457	9.983.371.953,00	30,653	106.366.302.622,00	77,138	427.983.650.029,50	109,248	544.417.484.604,50	228,498	1.128.638.363.010,50	208%	146%	
		1.03.10.2.01.19	PemeliharaanRutinJembatan	JumlahJembatan Yangdipeliharasecara Rutin	160	2.715.000.000,00	185	2.000.284.639,00	2	5.200.000.000,00	0	0	3	5.808.300,00	3	11.680.000,00	5	2.071.123.064,00	11	2.088.611.364,00	196	4.071.407.703,00	123%	150%	
		1.03.10.2.01.18	RehabilitasiJembatan	JumlahJembatan YangdiRehabilitasi	505	11.442.511.000,00	400	8.347.562.835,00	3	5.596.133.300,00	0	0	0	6.687.400,00	0	640.709.140,00	4	3.688.028.150,00	4	4.335.424.690,00	404	12.035.590.985,00	80%	105%	
		1.03.10.2.01.12	PembangunanJembatan	JumlahJembatanyangdibangun	180	30.236.262.569,00	190,7	22.964.429.223,00	3	98.033.339.815,00	0	0	0	2.335.156.300,00	5	22.884.088.262,00	37	47.528.998.033,00	42	72.748.242.595,00	232,7	70.493.427.256,00	129%	233%	
		1.03.10.2.01.09	RehabilitasiJalan	PanjangJalanyang Direhabilitasi(KM)	2	14.472.008.000,00	6	10.867.812.580,00	1	562.109.400,00	0	38.860.000,00	0	115.400.000,00	0	168.142.900,00	0	154.736.300,00	0	477.139.200,00	6	11.022.548.880,00	300%	76%	
		1.03.10.2.01.11	PemeliharaanRutinJalan	PanjangJalanyang DilakukanPemeliharaan SecaraRutin(KM)	50	6.418.237.431,00	14	3.008.001.248,00	15	7.286.991.400,00	0	0	0	1.329.508.726,00	5,563	744.407.416,00	14	1.530.038.084,00	19,563	3.603.954.226,00	33,563	4.538.039.332,00	67%	71%	
		FaktorPendorongKeberhasilanKinerja			:																					
		FaktorPenghambatPencapaianKinerja			:																					
		TindakLanjutyangDiperlukanDalamTriwulanBerikutnya			:																					
		TindakLanjutyangdiperlukandalamRenjaSKPDBerikutnya			:																					
9		40546	PROGRAMPENGEMBANGANJASAKONSTRUKSI	PersentaseTenagaTerampildiKabupatenPaseryangbersertifikatstandarnasional(%)	376	2.141.440.000,00	92,91	**1.673.635.265,00**		**2.357.586.550,00**																
		1.03.11.2.01	PenyelenggaraanPelatihanTenagaTerampilKonstruksi	Persentasi jumlah total pelatihan yangdiselenggarakandalamperiodewaktutertentu	100	1.944.840.000,00	78,73%	1.480.022.504,00		1.223.477.300,00																
		1.03.11.2.01.0010	FasilitasiSertifikasiTenagaKerjaKontruksiKualifikasiJabatan Operator dan Teknis atau Analis	Jumlah TenagaKerjaKontruksiKualifikasiJabatan Operatordan Teknisiatau Analisyangdifasilitasisertifikasi	0	0	0	0	200	445.130.000,00	76	0	10	130.661.600,00	0	114.889.425,00	4	120.609.700,00	90	366.160.725,00	90	120.609.700,00	0%	0%	
		1.03.11.2.01.0016	PelatihanTenagaKerjaKonstruksiKualifikasiJabatanOperator dan Teknis atau Analis	Jumlah TenagaKerjaKontruksiKualifikasiJabatanOperatordanTeknisiatauAnalis yangdilatih	0	0	0	0	200	778.347.300,00	0	14.400.000,00	10	296.301.094,00	0	136.399.369,00	80	284.591.620,00	90	731.692.083,00	90	284.591.620,00	0%	0%	
		1.03.11.2.01.04	PelaksanaanPelatihanTenagaTerampilKonstruksi	Jumlah TenagaKerjaKonstruksiKualifikasiJabatanOperatordanTeknisiatauAnalisyang Mengikuti Pelatihan (Orang)	130	956.180.000,00	58	832.118.072,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	58	832.118.072,00	45%	87%	
		1.03.11.2.01.06	FasilitasiSertifikasiTenagaTerampilKonstruksi	Jumlah TenagaKerjaKonstruksiKualifikasiJabatanOperatordanTeknisiatauAnalisyangTersertifikasi(Orang)	275	988.660.000,00	58	647.904.432,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	58	647.904.432,00	21%	66%	
		1.03.11.2.02	PenyelenggaraanSistemInformasiJasaKonstruksiCakupanDaerahKabupaten/Kota	PersentaseketersediaandanketepatandatayangdisediakanolehsisteminformasiJakons	500	82.200.000,00	100%	80.894.900,00		81.000.000,00																
		1.03.11.2.02.0015	OperasionalisasiLayananInformasiJasaKonstruksi	JumlahLayananInformasiJasaKontruksi yangdioperasikan	0	0	0	0	1	81.000.000,00	0	6.900.000,00	0	13.280.000,00	0	6.900.000,00	1	29.972.400,00	1	57.052.400,00	1	29.972.400,00	0%	0%	
		1.03.11.2.02.01	PengelolaanOperasionalLayananInformasiJasaKonstruksi	Jumlah LaporanPenyelenggaraan Dukungan ManajemenSistemInformasiJasaKonstruksi(Laporan)	4	82.200.000,00	1	80.894.900,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1	80.894.900,00	25%	98%	

		1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha konstruksi terhadap aturan dan peraturan yang berlaku, seperti perizinan, standar konstruksi, dan tata tertib kerja.	500	114.400.000,00	100%	112.717.861,00		1.053.109.250,00															
		1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, Tertib Pemanfaatan Produk	0	0	0	0	35	1.053.109.250,00	0	13.800.000,00	10	152.682.371,00	0	209.887.867,00	25	588.586.639,00	35	964.956.877,00	35	588.586.639,00	0%	0%	
		1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (Laporan)	40	114.400.000,00	40	112.717.861,00	-	0	0	0	0	-		-			0	-	40	112.717.861,00	100%	99%	
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			:																					
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja			:																					
		Tindak Lanjutyang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya			:																					
		Tindak Lanjutyang Diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya			:																					
10		40911	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelenggaraan Tata Ruang(%)	329,11	1.838.095.973,00	100	**1.787.412.353,00**		**3.313.800.000,00**															
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	persentase tingkat implementasi RTRW dan RRTR dalam proses perencanaan dan pembangunan diwilayah Kabupaten/Kota.	500	513.556.000,00	100%	513.186.689,00		1.729.880.000,00															
		1.03.12.2.01..0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	0	0	0	0	1	1.631.600.000,00	0	30.611.400,00	0	33.673.500,00	0	385.504.728,00	1	1.067.441.195,00	1	1.517.230.823,00	1	1.067.441.195,00	0%	0%	
		1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pemangku Kepentinganyang Mengikuti kegiatan sosialisasi	0	0	0	0	60	98.280.000,00	0	48.993.029,00	0	34.773.918,00	0	12.160.100,00	60	-	60	95.927.047,00	60	-	0%	0%	
		1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	295.016.000,00	1	295.016.000,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1	295.016.000,00	50%	100%	
		1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	218.540.000,00	2	218.170.689,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2	218.170.689,00	50%	100%	
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase menyusun RDTR dan RTRW, dari tahap perencanaan hingga penerbitan dokumen final.	500	773.000.000,00	100%	772.790.788,00		1.583.920.000,00															
		1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	53.000.000,00	1	52.790.944,00	1	1.083.920.000,00	0	56.441.692,00	0	154.150.788,00	0	86.572.123,00	1	761.316.004,00	1	1.058.480.607,00	2	814.106.948,00	100%	1536%	
		1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	720.000.000,00	1	719.999.844,00	1	500.000.000,00	0	15.556.172,00	0	6.746.640,00	0	258.362.041,00	1	171.981.241,00	1	452.646.094,00	2	891.981.085,00	100%	124%	
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota	500	176.540.000,00	100%	175.937.872,00		-															
		1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (Dokumen)	2	141.540.000,00	1	141.360.992,00	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	1	141.360.992,00	50%	100%	
		1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang (Dokumen)	2	35.000.000,00	100	34.576.880,00	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	100	34.576.880,00	5000%	99%	
		1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penataan ruang dan implementusikebijakan pengendalian pemanfaatanruang	500	374.999.973,00	100%	325.497.004,00		-															
		1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang(Rapat)	40	374.999.973,00	15	325.497.004,00	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	15	325.497.004,00	38%	87%	
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			:																					
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja			:																					
		Tindak Lanjutyang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya			:																					
		Tindak Lanjutyang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya			:																					
JUMLAH						1.272.382.719.814,00		-		1.346.956.224.942,00		3.840.830.471,00		21.964.706.711,00		196.863.464.700,80		975.386.630.876,70		1.198.055.632.759,50						
Rata-rata capaian kinerja(%)																			94,09%	88,95%						
Predikat kinerja																			Tinggi	Sedang						

Disusun,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Asnawi, ST, M.Si

NIP.197204222006041012

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun 2024 adalah sebesar 88,94%. Dari 11 programdinas,22Kegiatan,58Sub Kegiatandengan2SubKegiatancapaiankinerjakeuangannya sangat memuaskan, 16 Sub Kegiatan capaian kinerja Keuangan Sangat baik, 6 Sub Kegiatan Capaian Kinerja Keuangan baik dan 3program capaian kinerja keuangan Cukup dapat terlihat dari table berikut

Tabel rekapitulasi tingkat pencapaian kinerja berdasarkan realisasi keuangan Tahun 2024

Urutan	Rentang capaian Daya Serap Anggaran	Kategori Capaian	Jumlah Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	%
I	Capaian≥100	Sangat memuaskan	2	100,00
II	85%≤capaian100%	Sangat baik	39	95,35
III	70%≤capaian<85%	Baik	13	70,79
IV	55%≤capaian<70%	Cukup	2	55,66
V	Capaian<55%	Kurang	3	38,00

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dari Pengukuran Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser diperoleh nilai rata-rata 94,09 %. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat keberhasilan Dinas Pekerjaan Umumdan Tata Ruang Kabupaten Paser sebagai lembaga teknis daerah dinilai **“Sangat Baik“.**

Analisis terhadap keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan capaian kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan serta kemungkinan permasalahan yang akan terjadi pada tahun berikutnya:

1. BidangTataRuang.
   a. Penyusunan Naskah Akademik. Revisi dokumen RTRW dan RDTR masih dalam proses perbaikan sehingga belum dapat dilanjutkan pada tahap Naskah Akademik, mengingat RTRW Kalimantan Timur pun masih dalam proses.
      Upaya tindak lanjut terhadap kendala yang dihadapi:
      a. Tetap mengupayakan terwujudnya dokumen RTRW dan RDTR Kabupaten Paser dan hal-hal lain terkait teknis penataan ruang Kabupaten dengan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait

b. BidangJasaKonstruksi.
   a. Pelatihan yang awalnya dianggarkan untuk online seperti tahun sebelumnya, berubah kebijakan menjadi ofline oleh Kementrian PUPR sehingga memerlukan Anggaran yang lebih Besar
c. Untuk Bidang Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Cipta Karya
   Permasalahan yang dihadapi dan upaya tindak lanjut terkait infrastruktur adalah:
   Perencanaan pekerjaan fisik yang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan (T-)) merupakan bagian dari upaya percepatan pelaksanaan program pembangunan. Meskipun idealnya tahapan perencanaan dilakukan satu tahun sebelumnya (T-1), kondidi tertentu seperti perubahan kebijakan, kebutuhan mendesak, atau dinamika dilapangan dapat menyebabkan proses perencanaan dilakukan bersamaan dengan tahun pelaksanaan.
   Meskipun dilakukan dalam tahun yang sama, pelaksanaan pekerjaan fisik hasil perencanaan T-0 tetap diarahkan untuk mencapai output dan outcome yang telah ditetapkan, dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penurunan kualitas akibat keterbatasan waktu.
   Pendekataninimenuntutkoordinasi yang solid antar pihak terkait serta fleksibilitas dalam proses pengambilan keputusan ditingkat teknis dan administratif.

Hasil evaluasi terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa secara umum target kinerja tercapai, dimana realisasi pencapaian target kinerjafisik sebesar 94,09 % dan realisasi pencapaian target kinerja keuangan adalah 88,94% yaitu dari anggaran sebesar Rp.1.346.976.224.942 realisasinya adalah sebesar Rp. 1.198.031.034.614,30, dengan uraian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi, Belanja operasi berupa Belanja Pegawai yang meliputi Biaya Gaji dan Tunjangan dengan pagu anggaran Rp. 383.442.478.136,- dengan realisasi sebesar Rp. 351.155.227.445,- (91,58 %) dan Belanja Barang dan Jasa dengan pagu anggaran Rp. 370.050.102.606,- dengan realisasi sebesar Rp. 339.414.568.263,- (91,72 %).

2. Belanja Modal Belanja modal peralatan dan mesin dengan pagu anggaran Rp. 963.513.746.806,- dan realisasi mencapai Rp. 846.875.807.167,50,-(87,89 %).

Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program,antaralain:

1. Tersedianya pendanaan yang memadai yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan;
2. Meningkatnya pemahaman dari para Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya;
3. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan dan triwulan.

2.2.ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Paser untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser

sudah memenuhi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK. Sehubungan dengan Tingkat kinerja pelayanan DPUTR, perlu dilakukan pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia secara terencana dan sistematis dan dikembangkan untuk dapat lebih proaktif dan secara kolektif bisa menentukan masa depan.

Analisis capaian kinerja dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan(stakeholders). Pencapaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tidak terlepas dari capaian program dan kegiatan sebagaimana dijabarkan pada indikator kinerja tabel 2.1 dan 2.2 diatas.

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah:

1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel
2. MeningkMeningkatnyaPembangunandanpeningkatansaranadanprasaranasumber daya air dan Jaringan air bersih
3. Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan dan pedesaan
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur pengelolaan sampah
5. Meningkatnya kualitas sanitasi (airlimbah) permukiman perkotaan
6. Meningkatnya kapasitas dan efektifitas sistem drainase
7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung Negara
8. Peningkatan konektifitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan dan jembatan
9. Meningkatnya sistem informasi dan kapasitas serta kompetensi SDM bidang jasa konstruksi
10. Meningkatnya ketersediaan informasi, Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Yang dijabarkan melalui indikator Kinerja UtamaTahun2024 sebagaimana tabel 2.3berikut:

INDIKATORKINERJAUTAMA

No.	Indikator Kinerja Utama	TargetTahun2024	CapaianTahun 2024
1.	Predikatnilai SAKIP dari APIP	65	63
2.	Persentase kawasan sumber daya air yang Dikelola dengan baik	40%	90,92%
3.	Persentase penduduk yang mendapatkan Akses air minum yang aman	87%	87,17%
4.	Persentase jumlah infrastruktur pengolahan sampah yang dibangundan ditingkatkan	90%	100%
5.	Persentase penduduk yang terlayani Sistem air limbah	90%	93,61%
6.	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	80%	100%
7.	Persentase bangunan gedung pemerintah dan bangunan publik lainnya yang dikelola dengan baik	73%	92,85%

8.	Persentase jalan dan jembatan dalam Kondisi mantap	37%	41,72%
9.	Persentase tenaga operator dan teknis/analiskonstruksi yang bersertifikat standar nasional	40%	13,40%
10.	Persentase jumlah dokumen Rencana Tata Ruang, Pemanfaatan dan Pengendalian PemanfaatanTata Ruang	90%	80,46%

Yang dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran dan capaian tahun 2024 sebagaimana tabel 2.4 berikut :

*Capaian: realisasi

Tabel 2.4

Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator KinerjaSasaran	TargetTahun 2024	CapaianTahun 2024
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Predikat nilai SAKIP dari APIP	65	63
2.	Meningkatnya Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air Dan Jaringan air bersih	Persentase kawasan sumber daya air yang dikelola dengan baik	40%	90,92%
3.	Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan dan pedesaan	Persentase penduduk yang mendapatkan aksesair minum Yang aman	87%	87,17%
4.	Meningkatkan kapasitas infrastruktur pengelolaan sampah	Persenta sejumlah infrastruktur pengolahan sampah yang dibangun dan ditingkatkan	90%	100%
5.	Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah) permukiman perkotaan	Persentase penduduk yang terlayani sistem Air limbah	90%	93,61%
6.	Meningkatnya kapasitas	Persentase	80%	100%

	dan efektifitas sistem drainase	Saluran drainase dalam kondisi baik		
7.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung negara	Persentase bangunan gedung pemerintah dan bangunanpublik lainnya yang dikeloladengan baik	73%	92,85%
8.	Peningkatan konektifitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentasejalan dan jembatan dalam kondisi mantap	37%	41,72%
9.	Meningkatnya sistem informasi dan kapasitas serta kompetensi SDM bidang jasa konstruksi	Persentase tenaga operator danteknis/analis konstruksi yang bersertifikat standar nasional	40%	13,40%
10.	Meningkatnya ketersediaan informasi, Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase jumlah dokumen Rencana Tata Ruang, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan TataRuang	90%	80,46%

Dari hasil capaiankinerja masing-masing indikator,analisa yang dapatdisampaikan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2024			Realisasi 2023
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Predikat nilai SAKIP dari APIP	65	63	96,92%	
2	Persentase kawasan sumber daya air yang dikelola dengan baik	40%	90,92%	227,30%	29,68%
3	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	87%	87,17%	100,20%	85,15%
4	Persentase jumlah infrastruktur pengolahan sampah yang dibangun dan ditingkatkan	90%	100%	111,11%	
5	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah	90%	93,61%	104,01%	90,95%
6	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	80%			

7	Persentase bangunan gedung pemerintah dan bangunan publik lainnya yang dikelola dengan baik	73%	92,85%	127,19%	100%
8	Persentase jalan dan jembatan Dalam kondisi mantap	37%	41,72%	112,76%	36,6%
9	Persentase tenaga operator dan teknis/analis konstruksi yang bersertifikat standar nasional	40%	13,40%	33,50%	38%
10	Persentase jumlah dokumen Rencana Tata Ruang, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan TataRuang	90%	80,46%	89,40%	93,30%

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Analisa SWOT

Permasalahan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum danTata Ruang Kabupaten Paser diperlukan identifikasi berdasarkan kekuatan dan kelemahan untuk mengetahui dinamika permasalahan internal serta peluang dan tantangan untuk mengetahui dinamika permasalahan yang berasal dari luar.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi memerlukan persepsi yang sama dalam kebijakan. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program – program. Strategi disusun berdasarkan isu strategis dan sektoral Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser. Kemudian dilakukan analisis SWOT yang terdiri dari Strength (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan) merupakan faktor internal PD, sedangkan Opportunity (O) dan Threat (T) merupakan faktor eksternal atau faktor yang mempengaruhi SKPD dari luar. Berikut adalah analisis SWOT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser.

a. Kekuatan
   1. Ketersediaan Sumber pendanaan lainnya dari pemerintah pusat
   2. Adanya peran serta masyrakat dalam pelaksanaan pembangunan

b. Kelemahan
   1. Lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas bangunan infrastruktur
   2. Kurangnya pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang
   3. Belum opftimalnya koordinasi antar opd

c. Peluang (Opportunity)
   1. Koordinasi yang baik dengan badan/dinas terkait dalam hal pemenuhan data maupun informasi lainnya;
   2. Adanya keterbukaan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan melalui proses musrenbang maupun proposal yang masuk kedinas;
   3. Adanya instansi diklat teknis maupun Perguruan Tinggi untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
   4. Akses ke Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sangat terbuka.

d. Ancaman (Threat)

1. Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antar sektor dalam produk rencana tata ruang tersebut diantaranya pada bidang infrastruktur seperti jalan, air bersih, jaringan irigasi, serta prasarana lainnya seperti jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik yang kerap kali belum termuat dalam Rencana Struktur Ruang sebagai muatan dari produk Rencana Tata Ruang
2. Belum padunya rencana beberapa sektor untuk pengembangan permukiman dan perumahan, transmigrasi, pariwisata, perdagangan dan industri, perikanan dan pertanian serta kebijakan pembangunan kawasan perdesaan yang semestinya sudah harus terpadu dalam Rencana Pola Ruang pada sebuah produk Rencana Tata Ruang
3. kebijakan dalam ketentuan Peraturan Zonasi dan kebijakan Indikasi Program dan Kegiatan yang merupakan instrumen pemanfaatan Rencana Tata Ruang pengendaliannya
4. Belum optimalnya koordinasi antarPD
5. Tersedianya Sumber pendanaan lain dari Pemerintah Pusat.
6. Adanya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan pada gambaran pelayanan PD; visi, misi, dan program Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Terpilih; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan PD; dan identifikasi masalah berdasarkan urgenitasnya, selanjutnya dapat diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Kurangnya dan rendahnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar sebagai satu prioritas yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat seperti perumahan dan permukiman, air bersih dansanitasi
2. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air, konservasi, pendaya guna dan pengendalian daya rusak air, seperti pengelolaan sungai, danau, waduk, sumber daya air dan sistem irigasi pertanian.
3. Kurangnya jumlah jaringan jalan maupun jembatan dan rendahnya kualitas jalan maupun jembatan diberbagai kecamatan.
4. Masih kurangnya ketersediaan informasi Rencana Rinci Tata Ruang dan Belum optimalnya kesesuaian/ketaatan terhadap aturan tata ruang untuk mendukung tujuan pembangunanberkelanjutan.
5. Masih kurangnya bangunan gedung/sarana dan prasarana publik yang memadai
6. Masih kurangnya SDM/ tenaga terampil dibidang jasa konstruksi yang bersertifikat
7. Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisa SWOT dan penentuan isu strategis bidang pekerjaan umum dan tata ruang, berbagai program kegiatan perlu dilakukan untuk menangggulangi isu tersebut. Dalam upaya penanggulangan isu tersebut

sesuai dengan tugas dan fungsinya, DPUTR masih terkendala pada beberapa faktor. Adapun permasalahan/hambatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas yaitu :

1. Banyaknya usulan dan tuntutan masyarakat akan pembangunan Infrastruktur di daerahnya serta adanya keterbatasan dana yang tersedia di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan penentuan skala prioritas pembangunan (Jalan, Jembatan, Saluran Irigasi,Drainase dan pelengkap jalan, Gedung Perkantoran dan PenataanRuang) dimana penentuan tersebut di dasarkan atas Visi dan Misi yang telah di tetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan TataRuang;
2. Sarana dan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan belum terpenuhi secara maksimal. Infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang telah dibangun sampai saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal, hal ini diantaranya dapat dilihat dari masih banyaknya ruas jalan dan jembatan yang belum terbangun yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga jarak dan waktu tempuh perjalanan menjadi lebih tinggi. Prasarana dasar lain saluran drainase yang merupakan salah satu fasilitas yang sangat berpengaruh terhadap penataandan kebersihan lingkungan. Keterbatasanberbagai infrastruktur dasar tersebut telah menghambat mobilitas manusia dan barang, akselerasi pertumbuhan ekonomi, memperlambat proses transformasi perekonomian, menghambat kemajuan dan kemandirian wilayah, serta berpotensi menekan tingkat kesejahteraan masyarakat;
3. Laju kerusakan jalan lebih tinggi dibandingkan dengan penanganan jalan. Kerusakan jalan yang terjadi baik akibat umur pakai yang sudah lama, penggunaan di luar kapasitasnya maupun karena cuaca dan bencana alam seperti curah hujan yang tinggi dan banjir lajunya cukup tinggi sementara penanganan yang dilakukan baik dalam bentuk peningkatan, pemeliharaan berkala maupun pemeliharaan rutin masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan alokasi anggaran yang tersedia terbatas. Sebagai perbandingan bahwa panjang jalan saat ini yang ditangani oleh Dinas PU sepanjang 1.005,192 Km dan masih terdapat jalan yang masih non status. Hingga tahun 2023 kondisi jalan mantap mencapai 414,94 km atau 41,27%. Dan ini tentunya akan memerlukandukungan anggaranyangcukup besar untuk memperoleh kualitas produk jalan yangmantap.
4. Rendahnya unit peralatan lapangan/alat berat yang dimiliki oleh Dinas PU dan kondisi peralatan uji material di laboratorium UPTD DPUTR pun tentunya memerlukan biaya operasional yang tidak kecil untuk memperoleh hasil ujiyang akuarat dan valid. Kebutuhan pembangunan yang tinggi juga berbanding lurus terhadap kebutuhan peralatan yang memadai. Umur peralatan lapangan/alat berat dan yang lainnya yang dimiliki oleh Dinas PUrata-rata sudah tua, di samping membutuhkan biaya perawatan yang tinggi juga output yang dihasilkan rendah atau hanya berkisar 60 % s/d 70%.

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, dan Renstra PD, maka Dinas PekerjaanUmumdanTataRuangmengajukan1 programrutin,4programprioritas dan 5 program pendukung IKU PD dengan total sebanyak 23 kegiatan. Dari usulan program kegiatan yang masuk ke dalam RKPD tentunya diharapkan bisa dilaksanakan semuanya.

ReviewTerhadapRencanaRenjaPerubahanRKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepatsasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis PD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja PD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Tema Renja Perubahan RKPD Kabupaten Paser tahun 2025 adalah**MENUJU KABUPATENPASERMAJU,ADILDANSEJAHTERA**dengan arah kebijakan Kabupaten Paser Tahun 2026 yakni "Peningkatan Pembangunan Infrastruktur untuk menggerakkan perekonomian Yang BerwawasanLingkungandanBerkelanjutan", dan program prioritas pembangunan yang selaras dengan tugas dan kewenangan DPUTR adalah Program PeningkatanInfrastrukturyang berkualitas.DinasPekerjaanUmum danTataRuang Kabupaten Paser akan melaksanakan 10program untuk mencapaisasaran-sasaranyang telahditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyekenggaraan Jalan
3. Program PengelolaanSumber DayaAir
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sitstem Drainase
7. Program Penataan Bangunan Gedung
8. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
9. Program Penyelenggaraan Penataan
10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Adapun sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser adalah :

1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan kinerja Organisasi yang akuntabel
2. Meningkatnya Pembangunan dan Peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air dan Jaringan Air Bersih
3. Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan dan Pedesaan
4. Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur pengolahan sampah
5. Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan dan Pedesaan
6. Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah drainase) permukiman perkotaan
7. Meningkatnya sarana dan prasarana sumber daya air dan Jaringan irigasi Kabupaten

8. Meningkatnya kualitas jalan kabupaten
9. Meningkatnya konektivitas wilayah Kabupaten
10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung negara
11. Meningkatnya ketersediaan informasi, Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
12. MeningkatnyaJumlahSDM/Tenaga Terampil bidang Jasa Konstruksi yang bersertifikat
13. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan kinerja Organisasi yang akuntabel

Tabel2.5TabelT-C.31

Review terhadap Renja Perubahan RKPD Tahun 2025
Kabupaten Paser

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Paser	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	100%	19.672.981.986,00	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Paser	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	100%	26.076.497.581	
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Kab.Paser	Persentase jalan dan jembatan dalam kondis baik	78%	341.378.741.250,00	2	Program Penyelenggaraan Jalan	Kab.Paser	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	80%	551.643.421.137	
3	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Kab.Paser	Persentase Kawasan Sumber Daya air yang dikelola dengan baik.	40%	52.582.577.512,00	3	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Kab.Paser	Persentase Kawasan Sumber Daya air yang dikelola dengan baik.	50%	114.523.256.289	
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kab.Paser	Persentase penduduk yang mendapatkan akses airminum yang aman	87%	49.730.000.000,00	4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kab.Paser	Persentase capaian akses air minum layak	93%	81.730.016.636	
5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kab.Paser	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah	87%	3.400.000.000	5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kab.Paser	Persentase capaian akses air limbah domestik yang layak	90%	8.707.451.896	

6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Kab.Paser	Persentase peningkatan kapasitas sistem drainase	87%	14.385.250.000,00	6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Kab.Paser	Persentase sistem jaringan drainase yang berfungsi baik	75%	36.297.775.465	
7	Penataan Bangunan Gedung	Kab.Paser	Persentase bangunan gedung pemerintah yang berfungsi dengan baik	87%	39.329.930.030,00	7	Penataan Bangunan Gedung	Kab.Paser	Persentase Bangunan gedung pemerintah untuk pelayanan publik yang dikelola dengan baik	90%	217.499.861.064	
8	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Kab.Paser	Persentase jumlah infrastruktur pengolahan sampah yang dibangun dan ditingkatkan	82%	1.000.000.000,00	8	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Kab.Paser	Persentase Bangunan dan Infrastruktur Persampahan yang dikelola dengan baik	85%	29.930.969.056	
9	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab.Paser	Persentase Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang	72.47%	2.050.000.000,00	9	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab.Paser	Persentase jumlah dokumen rencana tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	60%	2.202.243.200	
10	Pengembangan Jasa Konstruksi	Kab.Paser	Persentase Tenaga Terampil di Kabupaten Paser yang bersertifikat standar nasional	82%	742.060.000,00	10	Pengembangan Jasa Konstruksi	Kab.Paser	Persentase tenaga operator dan teknis/analis konstruksi yang bersertifikat standar nasional	100%	2.402.087.289	

PenelaahanUsulanProgramdanKegiatanMasyarakat

Terdapat perbedaan penetapan program/kegiatan di dalam Renja Perubahan tahun sebelumnya dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerahsebagai bentuk pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuanganyang digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dengan terbitnya Permendagri tersebut sebagian kewenangan dari Perangkat Daerah lain dialihkan menjadi kewenangan DPUTR. Adanya perubahan pelimpahan program kegiatan mengharuskan DPUTR untuk lebih intens melakukan koordinasi dengan PD terkait mengingat tanggung jawab yang diemban menjadi lebih besar. Tentunya selain dukungan anggaran perlu didukung oleh SDM yang mumpuni.Penelaahan Usulan Program dan KegiatanMasyarakat Rencana Kerja Perubahan Dinas PekerjaanUmum dan Tata Ruang Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun 2022-2026, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani / memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusunsuatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Program dan Kegiatan yang ada di Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser merupakan usulan-usulan dari masyarakat, baik melalui Musrenbang Kabupaten, Maupun penyampaian proposal dan penjabaran dari visi misi Bupati/Wakil Bupati dan visi misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Paser. Usulan tersebut membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser dalam menyusun tercapainya target pada program dan kegiatan serta mempercepat tercapainya target yang telah ditetapkan.

Adapun Usulan Program Kegiatan Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata RuangKabupaten Paser fokus pada program prioritas yang mendukung penjabaran dari visi misi Bupati/Wakil Bupati. Walaupun belum dapat sepenuhnya memenuhi hasil Musrenbang Kecamatan pada Tahun 2024 untuk Tahun 2025 karena alokasi ketersediaan anggaran daerah yang terbatas. Walaupun sebenarnya telah dilakukan verifikasi oleh masing-masing bidangsesuai dengan kebutuhan dan asumsi pengalokasian anggaran yang diajukan pada Perencanaan Penganggaranmelalui Sistem Informasi PemerintahanDaerah(SIPD). Meskipundemikianusulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG Kabupaten Paser pada tahun 2024 untuk TA 2025 tetap menjadi prioritas daerah dan akan dijadikan bahan pertimbangan untuk diajukan kembali pada tahun berikutnya bila tidak terakomodir pada tahun 2025. Adapun usulan Program Kegiatan hasil musrenbang tersebut sebagai berikut:

Proses penyusunan Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Kabupaten Paser Tahun 2025 didasarkan kepada Renstra Dinas Pekerjaan Umumdan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2025 dengan tetap memperhatikanprogram prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program / kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Arah kebijakan umum Nasional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang mengacu pada pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang saat ini telah sampai pada tahap ketiga, diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu dengan memantapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terusmeningkat.

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah. Arah kebijakan tersebut meliputi 6 aspek, yaitu;

a. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;

b. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan.Pengembangan Kawasan Perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisik potensi ekonomi dan budaya lokal;

c. Arah kebijakan peningkatan keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan adalah peningkatanketerkaitandesa-kotayang bertujuanuntukmengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dengan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi;

d. Arah kebijakan pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Pengembangan daerah tertinggal difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik,serta pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia(SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis;

e. Arah kebijakan penanggulangan bencana adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana;

f. Arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional adalah pengembangan struktur tata ruang dan pengembangan pola ruang;

g. Arah kebijakan dan strategi tata kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; peningkatan kapasitas keuangan daerah; dan pelaksanaan Otonomi Khusus/Daerah Istimewa.

Penentuan Arah kebijakan yang dirumuskan pada RKPD untuk Tahun 2025 yakni Peningkatan Pembangunan Infrastruktur untuk menggerakkan perekonomian Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan. Rumusan arah kebijakan adalah guna merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

TujuandanSasaran RenjaPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

Gambar3.1

Bagan Alir Tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran PD Kabupaten/Kota

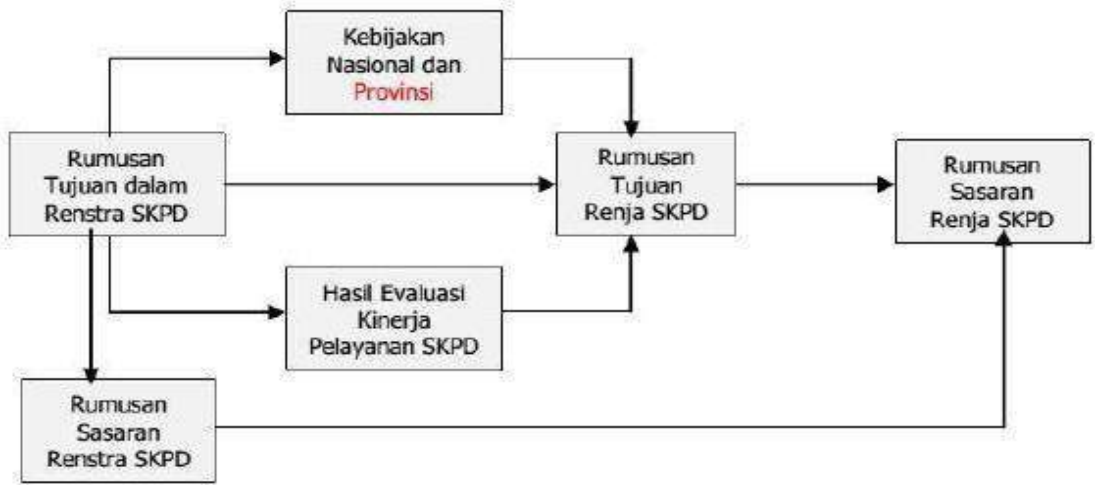

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum danTata Ruang maka tujuan yang ditetapkan mulai tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan Kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar masyarakat
2. Mengoptimalkan penyelenggaraan sumber daya air diwilayah Kabupaten
3. Meningkatkan jumlah jaringan jalan dan kualitas jalan dan jembatan yang menunjang konektivitas dan aksesibilitas antara wilayah
4. Meningkatkan bangunan gedung/sarana dan prasarana publik yang memadai
5. Menyediakan informasi Rencana Tata Ruang dan Meningkatkan ketaatan serta pengawasan terhadap aturan tata ruang.
6. Meningkatkan jumlah SDM/tenaga terampil dibidang jasa konstruksi yang bersertifikat
7. Mengoptimalkan pelayanan dan akuntabiitas kinerja Perangkat Daerah

Sinergi dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser. Guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan penetapan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan dan Pedesaan
2. Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah drainase) permukiman perkotaan
3. Meningkatnya sarana dan prasarana sumber daya air dan Jaringan irigasi Kabupaten
4. Meningkatnya kualitas jalan kabupaten
5. Meningkatnya konektivitas wilayah Kabupaten
6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung negara
7. Meningkatnya ketersediaan informasi, Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
8. Meningkatnya Jumlah SDM / TenagaTerampil bidang Jasa Konstruksi yang bersertifikat
9. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan kinerja Organisasi yang akuntabel

Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian visi dan misi Kabupaten Paser yaitu "**MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA"**
2. Tugas dan fungsi dinas yang tertuang dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 10 Tahun 2020.
3. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah melalui kawasan wisata.

BABIV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkanisu – isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Berdasarkan isu – isu strategis tahun 2025 seperti tersebut pada bab terdahulu, maka prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser diarahkan pada:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Jalan
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
7. Program Penataan Bangunan Gedung
8. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Adapun program dan kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

a. Administrasi barang milik daerah pada perangka tdaerah

- Masukan (Input) : Tersedianya dana
- Keluaran (Output) : Dukungan terhadap kelancaran Adiministrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD
- OutputSpesifik : Jumlah Jenis layanan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah

Layanan melalui sub keiatan :

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

b. Administrasi kepegawaian perangkat daerah

- Masukan(Input) : Tersedianya dana
- Keluaran(Output) : Dukungan terhadap kelancaran Adiministrasi Kepegawaian Pada SKPD
- OutputSpesifik : Jumlah Jenis layanan Administrasi kepegawaian perangkat daerah Layanan melalui Dengan sub kegiatan:

Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian

c. Administrasi keuangan perangkat daerah

- Masukan(Input) : Tersedianya dana
- Keluaran(Output) : Dukungan terhadap kelancaran Adiministrasi keuangan perangkat daerah
- Output Spesifik : Jumlah Jenis layanan Administrasi keuangan perangkat daerah

Layanan melalui sub kegiatan:

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
2. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi
3. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

d. Administrasi umum perangkat daerah

- Masukan(Input) : Tersedianya dana
- Keluaran(Output) : Dukungan terhadap kelancaran Adiministrasi Umum perangkat daerah
- OutputSpesifik : Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum PD

Layanan melalui kegiatan :

1. Penyediaan bahan logistik kantor
2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

e. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- Masukan(Input) : Tersedianya dana
- Keluaran(Output) : Dukungan terhadap kelancaran Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah
- OutputSpesifik : Jumlah Jenis layanan Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah

Layanan melalui sub kegiatan:

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
2. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

- Masukan(Input) : Tersedianya dana
- Keluaran(Output) : Dukungan terhadap kelancaran Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintahan daerah
- OutputSpesifik : Jumlah Jenis layananPenyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Layananmelaluisubkegiatan:

Penyediaanjasakomunikasi,sumberdayaairlistrik

g. Perencanaan,penganggaran,danevaluasikinerjaperangkatdaerah

- Masukan(Input) : Tersedianyadana
- Keluaran(Output) : Dukunganterhadap kelancaran PerencanaanPenganggarandanevaluasiKinerjaSKPD
- OutputSpesifik : Jumlah Jenis layananPerencanaan,penganggaran, dan evaluasikinerjaperangkatdaerah

Layanan melalui sub kegiatan:

1. Koordinasi dan penyusunan perubahanDPA-SKPD
2. Evaluasi kinerja perangkat daerah
3. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
5. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
6. Koordinasidan penyusunan DPA-SKPD
7. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahanRKA-SKPD

2. Program Penyelenggaraan Jalan

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

- Masukan(Input) : Tersedianya Dana
- Keluaran(Output) : Dukungan terhadap kelancaran penyelenggaraan jalan kabupaten/kota
- Output Spesifik : Jumlah jenis layanan penyelenggaraan kabupaten/kota

Layanan melaui sub kegiatan :

1. Rekonstruksi Jalan
2. Penyusunan rencana, kebijakan dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan
3. Pemeliharaan rutin jalan
4. Rehabilitasi jalan
5. Pembangunan jembatan

6. Rehabilitasi jalan
7. Pemeliharaan rutin jembatan

3. Program pengelolaan sumber daya air(SDA)

a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu)daerahkabupaten/kota

- Masukan(Input) : Tersedianya dana
- Keluaran(Output) : Dukungan terhadap kelancaran Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah WS
- OutputSpesifik : Jumlah Jenis layanan Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

Layanan melalui sub kegiatan:

1. Pembangunan embung dan penampung air lainnya
2. Rehabilitasi embung dan penampung air lainnya
3. Rehabilitasi kanal banjir
4. Penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan kabupaten / kota
5. Pembangunan pintu air/bendung pengendali banjir
6. Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase utama perkotaan dan pengamatanpantai
7. Penyusunanrencana teknis dandokumen lingkunganhidup untuk konstruksi bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya
8. Pembangunan Tanggul Sungai
9. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
10. Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
11. Normalisasi/Restorasi Sungai
12. Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampng Air Lainnya

b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

- Masukan(Input) : Tersedianya dana
- Keluaran(Output): Dukungan terhadap kelancaran pengelolaan SDA dan bangunan Pengaman pantai pada WS
- OutputSpesifik : Jumlah jenis lapangan

Layanan melalui sub kegiatan:

1. Rehabilitasi jaringan irigasi rawa

2. Penyusunan rencana teknisdan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi danrawa
3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak

4. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum

Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) didaerah kabupaten/kota

- Masukan(Input) : Tersedianya dana
- Keluaran(Output) : Dukungan terhadap kelancaran Pengelolaan dan Pengembangan SPAM
- OutputSpesifik : Jumlah Jenis layanan Pengelolaan dan pengembangan Sistem penyediaan air minum (SPAM) didaerah kabupaten/kota

Layanan melalui sub kegiatan:

1. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan dikawasan perdesaan
2. Perluasan SPAM jaringan perpipaan dikawasan perkotaan
3. Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan dikawasan perdesaan
4. Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan dikawasan perdesaan
5. Perluasan SPAM jaringan perpipaan dikawasan perdesaan
6. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM
7. Pembangunan SPAM jaringan perpipaan dikawasan perkotaan
8. Pembangunan SPAM jaringan perpipaan dikawasan perdesaan

5. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah

Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota

- Masukan(Input) : Tersedianya dana
- Keluaran(Output) : Dukungan terhadap kelancaran Pengelolaand an Pengembangan Sistem Air Limbah Dalam Daerah
- OutputSpesifik : Jumlah Jenis layanan Pengelolaan dan pengembangan sistemair limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota

6. Program Penataan Bangunan Gedung

Penyelenggaraan bangunan gedung diwilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung

- Masukan(Input) : Tersedianya dana
- Keluaran(Output) : Dukungan terhadap kelancaran penyelenggaraan bangunan Gedung

- OutputSpesifik : Jumlah layanan penyelenggaraan bangunan gedung wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikai laik fungsi bangunan gedung

Layananmelaluisubkegiatan:

1. Penyelenggaraan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB), sertifikat laik fungsi (SLF), peran tenaga ahli bangunan gedung (TABG), pendataan bangunan gedung, serta implementasiSIMBG
2. Perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung daerahkabupaten/kota

7. Programpengelolaandanpengembangansistemdrainase

Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota

- Masukan(Input) : Tersedianyadana
- Keluaran (Output) : Dukungan terhadap kelancaran pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
- Output Spesifik : Jumlahjenislayananpengelolaandanpengembangansystem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota

Layananmelaluisubkegiatan:

1. Peningkatansalurandrainaselingkungan
2. Peningkatansalurandrainaseperkotaan
3. Rehabilitasisalurandrainaseperkotaan
4. Pembangunansystemdrainaselingkungan

8. Programpengembangansistemdanpengelolaanpersampahanregional

Pengembangansistemdanpengelolaanpersampahandidaerahkabupaten/kota

- Masukan(Input) : Tersedianyadana
- Keluaran(Output) : Dukungan terhadap kelancaran PengembanganSistem dan PengelolaanPersampahanRegional
- OutputSpesifik : JumlahJenislayananPengembangansistemdanpengelolaan persampahandidaerahkabupaten/kota

LayananDengansubkegiatan:

PembangunanTPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

9. Programpenyelenggaraanpenataanruang

a. Koordinasidansinkronisasipemanfaatanruangdaerahkabupaten/kota
   - Masukan(Input) : Tersedianyadana

- Keluaran(Output) : Dukungan terhadap kelancaran Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatanruangdaerahkabupaten/kota
- OutputSpesifik : Jumlah Jenis layanan Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota

Layanan melalui sub kegiatan :

1. Sistem informasi pemanfaatan ruang
2. Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah

b. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota

- Masukan(Input) : Tersedianya dana
- Keluaran(Output): Dukungan terhadap kelancaran koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota
- OutputSpesifik : Jumlah jenis layanan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian Pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota

c. Koordinasidansinkronisasiperencanaanruangdaerahkabupaten/kota

- Masukan(Input) : Tersedianyadana
- Keluaran(Output): Dukunganterhadapkelancarankoordinasidansinkronisasi perencanaantataruangdaerahkabupaten/kota
- OutputSpesifik : Jumlah jenis layanan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian Pemanfaatan ruang daerah kabupaten / kota

Layanan dengan sub kegiatan :

1. Koordinasidan koordinasi penyusunan RTRW kabupaten/kota
2. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR kabupaten/kota

d. Penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR)kabupaten/kota

- Masukan(Input) : Tersedianya dana
- Keluaran(Output) : Dukungan terhadap kelancaran Penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR)
- Output Spesifik : Jumlah jenis layanan penetapan rencana tata ruang wilayah(RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) kabupaten/kota

Layanan melalui sub kegiatan:

1. Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi danPenetapan RTRW kabupaten/kota
2. Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RRTRkabupaten/kota

10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

a. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi

- Masukan(Input) : Tersedianya dana
- Keluaran(Output) : Dukungan terhadap kelancaran Pengawasan Tertib Usaha, Penyelenggaraan, Pemanfaatan Jasa Konstruksi Presentase kepuasan Aparatur

Output Spesifik : Jumlah Jenis layanan Pengawasan tertib usaha, Tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi

Layanan melalui sub kegiatan:

1. Pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi

b. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi

- Masukan(Input) : Tersedianya dana
- Keluaran(Output) : Dukungan terhadap kelancaran Penyelenggaraan PelatihanTenagaTerampil Konstruksi
- OutputSpesifik : Jumlah Jenis layanan Penyelenggaraan pelatihan tenaga Terampil

konstruksi Layanan melalui sub kegiatan :

1. Pelaksanaan pelatihan tenaga terampil
2. Fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi

c. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota

- Masukan(Input) : Tersedianya dana
- Keluaran(Output) : Dukungan terhadap kelancaran Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi
- OutputSpesifik : Jumlah Jenis layanan Penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota

Layanan melalui sub kegiatan:

1. Pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi

BABV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja Perubahan merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan kebinamargaan yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum danTataRuangsebagaisalahsatuPDdi lingkup Pemerintah KabupatenPaser. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi RENJA DinasPekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser. Semoga RENJA tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Paser tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser.

1. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Uraian rencana program/kegiatan yang terdapat pada rencana kerja tahun 2025 ini dan juga yang telah tertuang melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser,sehingga tujuan dansasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Paser.

Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada rencana kerja 2025 maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat dimasukkan kembali kedalam rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun 2021-2025.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan TataRuang Kabupaten Paser Tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh

optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten /kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

2. Kaidah–kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 86 Tahun 2017, maka ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun 2025 sebagai berikut :

1) Di dalam Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun 2025 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan denganPermendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah, kemudian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
2) Renja PerubahanDinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan

kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Kalimantan Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Paser dan RenstraDinas).

3. RencanaTindakLanjut

a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal,bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
b. Aparaturperencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang.
c. Menerapkan sistem rewardandpunishment terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya atas perolehan kinerja.
d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasidenganPD,agarproses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
f. Meningkatkan upaya pendanaan alokasi kegiatan melalui anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi.
g. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

TanaPaser, 22 Agustus 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Kabupaten Paser



Asnawi,ST,M.Si
NIP197204222006041012

LAMPIRAN-LAMPIRAN

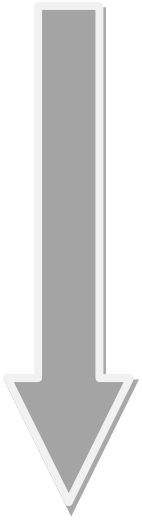

RENCANA KERJA PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KAB. PASER
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang							**685.710.055.671,00**	**1.087.315.304.048,00**	**1.171.068.365.616,00**							**535.416.332.077,00**	
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**685.710.055.671,00**	**1.087.315.304.048,00**	**1.171.068.365.616,00**							**535.416.332.077,00**	
	1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**685.710.055.671,00**	**1.087.315.304.048,00**	**1.171.068.365.616,00**							**535.416.332.077,00**	
1	**1**	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan pelayanan sekretariat**				-	**100 %**	**19.088.093.330,00**	**26.326.437.031,00**	**26.131.110.589,00**						**100 %**	**21.097.093.330,00**	
	1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi anggaran dari total anggaran yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan.**	-			-	**100 %**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**117.375.673,00**	**Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal**	**Terpenuhinya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 %**	**117.000.000,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	76.706.673,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal		5 Dokumen	21.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	7.683.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal		5 Dokumen	11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal		5 Dokumen	11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal		5 Dokumen	21.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

	1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.059.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal		5 Dokumen	21.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	7.683.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal		5 Laporan	21.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	10.244.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal		5 Laporan	11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase gaji pegawai yang dibayarkan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan**	-			-	**100 %**	**11.768.093.330,00**	**18.126.437.031,00**	**17.805.877.031,00**	**Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal**	**Meningkatkan tata kelola administrasi keuangan daerah**	**100 %**	**11.580.093.330,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	11.055.093.330,00	17.413.437.704,00	17.413.437.704,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal		14 Orang/bulan	11.055.093.330,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	700.000.000,00	700.000.000,00	354.440.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal		12 Dokumen	511.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				107 Dokumen	107 Dokumen	13.000.000,00	12.999.327,00	37.999.327,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal		107 Dokumen	14.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

	1	**03**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-			-	-	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**35.294.000,00**	**Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal**	**Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah pada SKPD**	-	**11.000.000,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
	1	03	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	35.294.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal		2 Laporan	11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase kelengkapan data pada profil pegawai yang mencakup informasi pribadi, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan**	-			-	**100 %**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**60.050.257,00**	**Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal**	**Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian SKPD**	**100 %**	**50.000.000,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
	1	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	60.050.257,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal		1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persntase Peralatan dan perlengkapan kantor, RAKOR sesuai jadwal yang ditetapkan**	-			-	**100 %**	**295.000.000,00**	**295.000.000,00**	**382.513.628,00**	**Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal**	**Meningkatnya pengelolaan administrasi umum SKPD**	**100 %**	**303.000.000,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal		4 Paket	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1170 Paket	1170 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal		1170 Paket	51.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				56,442 Paket	56,442 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.128,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal		56,442 Paket	21.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	320.013.500,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal		200 Laporan	201.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase kebutuhan barang yang berhasil terpenuhi melalui proses pengadaan**	-			-	**100 %**	**0,00**	**880.000.000,00**	**880.000.000,00**	**Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal**	**Meningkatnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**10.000.000,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	7 Unit	0,00	880.000.000,00	880.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal		7 Unit	10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase target layanan yang berhasil dicapai oleh penyedia jasa penunjang pemerintahan daerah (OPD)**	-			-	**100 %**	**6.600.000.000,00**	**6.600.000.000,00**	**6.600.000.000,00**	**Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal**	**Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah**	**100 %**	**7.005.000.000,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Bulan	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal		12 Bulan	7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
	1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase total aset yang menjalani pemeliharaan terhadap total aset yang dimiliki oleh OPD**	-			-	**100 %**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**2.021.000.000,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal		15 Unit	221.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2	**1**	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Kawasan Sumber Daya air yang dikelola dengan baik**				**-**	**50 %**	**1.635.400.000,00**	**108.706.266.600,00**	**128.912.706.289,00**								**59.677.599.500,00**	
	1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentasi Pengelolaan pemantauan kondisi fisik dan kekuatan struktur tanggul serta bangunan pengaman pantai untuk memastikan kelayakan dan kinerja yang**	-			**-**	**90 %**	**985.400.000,00**	**22.163.100.000,00**	**26.621.026.256,00**	**Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik**	**Terpenuhinya, Pengelolaan SDA dan bangunan pelengkapnya**	**90 %**	**30.876.089.500,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
	1	03	02	2.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																				
	1	03	02	2.01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																				
							Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				3 Lembaga	2 Lembaga	435.400.000,00	1.888.100.000,00	1.372.550.994,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana		2 Lembaga	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																				
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				5000 KM	40 KM	0,00	8.000.000.000,00	9.869.805.205,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		40 KM	4.675.824.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	02	2.01	0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya																				
							Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi				5 Unit	3 Unit	200.000.000,00	850.000.000,00	984.234.755,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		3 Unit	4.091.346.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	02	2.01	0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota																				
							Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				4 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	625.000.000,00	553.865.776,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		2 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																				
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				5 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		1 Dokumen	367.711.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

	1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																			
							Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				4 Unit	9 Unit	0,00	3.000.000.000,00	3.490.338.818,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		9 Unit	2.922.390.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	02	2.01	0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																			
							Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				3 Unit	5 Unit	0,00	7.500.000.000,00	10.050.230.708,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		5 Unit	5.844.780.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase luas lahan yang tercakup oleh sistem irigasi primer dan sekunder.**	-			-	**90 %**	**650.000.000,00**	**86.543.166.600,00**	**102.291.680.033,00**	**Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik**	**Meningkatnya pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi primer sekunder**	**90 %**	**28.801.510.000,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																			
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				7000 KM	230 KM	100.000.000,00	54.061.166.600,00	55.145.171.248,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		230 KM	3.506.868.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																			
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				7000 KM	200 KM	50.000.000,00	24.782.000.000,00	34.083.950.549,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		200 KM	4.675.824.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	02	2.02	0017	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak																			
							Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi				7000 KM	7000 M	0,00	2.400.000.000,00	2.399.369.690,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		7000 M	5.844.780.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																			
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				7000 KM	100 KM	500.000.000,00	5.300.000.000,00	10.663.188.546,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		100 KM	2.922.390.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

3	**1**	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase capaian akses air minum layak**				**-**	**93 %**	**1.432.400.000,00**	**87.772.400.000,00**	**92.728.814.816,00**							**45.703.312.632,00**	
	1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase yang terlayani oleh sistem penyediaan air minum, baik dari segi cakupan wilayah maupun**	**-**			**-**	**90 %**	**1.432.400.000,00**	**87.772.400.000,00**	**92.728.814.816,00**	**Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana**	**Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan SPAM**	**90 %**	**45.703.312.632,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
	1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan																			
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				2000 Unit	1.240 Unit	250.000.000,00	3.750.000.000,00	5.835.286.155,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana		1.240 Unit	35.133.312.632,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																			
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																			
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				8780 Liter/Detik	50 Liter/Detik	700.000.000,00	57.500.000.000,00	52.021.405.680,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		50 Liter/Detik	8.550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																			
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				700 SR	2.280 SR	482.400.000,00	26.522.400.000,00	34.872.122.981,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		2.280 SR	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4	**1**	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase bangunan dan infrastruktur persampahan yang berfungsi**				**-**	**85 %**	**0,00**	**25.000.000.000,00**	**30.471.566.806,00**							**1.000.000.000,00**	
	1	**03**	**04**	**2.01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan infrastruktur pengelolaan persampahan, termasuk tempat pembuangan akhir,**	**-**			**-**	**85 %**	**0,00**	**25.000.000.000,00**	**30.471.566.806,00**	**Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik**	**Terlaksananya sistem pengelolaan sampah regional**	**85 %**	**1.000.000.000,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

	1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																			
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				1 Ton/hari	108 Ton/hari	0,00	25.000.000.000,00	30.471.566.806,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		108 Ton/hari	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5	1	03	05			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase capaian pengelolaan sistem air limbah**				-	**90 %**	**706.693.333,00**	**8.226.693.333,00**	**8.577.451.896,00**								**856.693.333,00**	
	1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase yang terlayani oleh sistem pengelolaan air limbah, termasuk jaringan saluran air limbah dan instalasi pengolahan**	-			-	**90 %**	**706.693.333,00**	**8.226.693.333,00**	**8.577.451.896,00**	**Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik**	**Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik**	**90 %**	**856.693.333,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
	1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja																			
							Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				12 Rumah Tangga	94 Rumah Tangga	0,00	170.000.000,00	970.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		94 Rumah Tangga	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																			
							Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				10 Unit	10 Unit	182.000.000,00	532.000.000,00	402.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana		10 Unit	182.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																			
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				50 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga	224.693.333,00	7.224.693.333,00	7.205.451.896,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana		50 Rumah Tangga	24.693.333,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																			
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				5 Dokumen	0 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana		0 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

6	**1**	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase peningkatan kapasitas sistem drainase**				-	**75 %**	**270.000.000,00**	**35.141.502.000,00**	**39.620.893.490,00**							**11.937.000.000,00**	
	1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase saluran drainase yang diperbaiki, ditingkatkan, atau dibangun kembali, serta peningkatan**	-			-	**90 %**	**270.000.000,00**	**35.141.502.000,00**	**39.620.893.490,00**	**Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana**	**Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase**	**90 %**	**11.937.000.000,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
	1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
							Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				1000 M	4.400 M	235.000.000,00	24.117.824.000,00	26.469.881.429,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana		4.400 M	35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	06	2.01	0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan																		
							Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				500 Sistem Drainase Lingkungan	3 Sistem Drainase Lingkungan	0,00	610.000.000,00	1.207.168.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		3 Sistem Drainase Lingkungan	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																		
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				2000 Sistem Drainase Perkotaan	2000 Sistem Drainase Perkotaan	35.000.000,00	2.035.000.000,00	2.216.909.821,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		2000 Sistem Drainase Perkotaan	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				1500 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	8.378.678.000,00	9.726.934.240,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		4 Sistem Drainase Perkotaan	7.402.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7	**1**	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase bangunan gedung pemerintah yang berfungsi dengan baik**				-	**90 %**	**230.829.880.000,00**	**239.787.454.899,00**	**258.305.612.744,00**							**37.051.920.000,00**	
	1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase bangunan yang memperoleh IMB sebelum memulai konstruksi**	-			-	**90 %**	**230.829.880.000,00**	**239.787.454.899,00**	**258.305.612.744,00**	**Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	-	-	**90 %**	**37.051.920.000,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				62 Dokumen	150 Dokumen	230.779.880.000,00	239.487.454.899,00	258.122.032.929,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		150 Dokumen	36.980.555.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																			
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				15 Dokumen	350 Dokumen	50.000.000,00	300.000.000,00	183.579.815,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		350 Dokumen	71.365.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
8	**1**	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase jalan dalam kondisi baik**				-	**80 %**	**428.296.109.008,00**	**550.623.646.185,00**	**581.528.478.497,00**								**355.012.728.956,00**	
	1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase kondisi fisik jalan**	-			-	**85 %**	**428.296.109.008,00**	**550.623.646.185,00**	**581.528.478.497,00**	**Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal**	**Meningkatnya kualitas jalan kabupaten**	**85 %**	**355.012.728.956,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan																			
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi				30 KM	85 KM	426.874.367.823,00	427.110.242.375,00	471.262.374.725,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana		85 KM	240.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																			
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				200 Jembatan	7 Jembatan	50.000.000,00	1.550.000.000,00	2.303.923.170,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal		7 Jembatan	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan																			
							Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				200 Jembatan	5 Jembatan	0,00	200.000.000,00	1.100.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal		5 Jembatan	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan																		
							Jumlah Jembatan yang Dibangun				5 Jembatan	11 Jembatan	1.000.000.000,00	119.391.662.625,00	100.673.676.225,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana		11 Jembatan	19.290.009.783,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan																		
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi				1 KM	1 KM	319.360.000,00	319.360.000,00	1.048.675.235,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal		1 KM	47.072.350.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				100 KM	6 KM	52.381.185,00	2.052.381.185,00	5.139.829.142,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal		6 KM	45.000.369.173,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
9	**1**	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase tenaga operator dan teknis/analisdi Kabupaten Paser yang bersertifikat**				**-**	**90 %**	**763.800.000,00**	**3.043.224.000,00**	**2.696.087.289,00**								**738.480.000,00**	
	1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Persentasi jumlah total pelatihan yang diselenggarakan dalam periode waktu tertentu**	**-**			**-**	**95 %**	**467.200.000,00**	**1.586.804.800,00**	**1.441.826.309,00**	**Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana**	**Meningkatkan jumlah tenaga konstruksi yang mengikuti program pelatihan**	**95 %**	**518.480.000,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				200 Orang	223 Orang	150.000.000,00	584.290.250,00	505.876.572,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana		223 Orang	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				100 Orang	223 Orang	317.200.000,00	1.002.514.550,00	935.949.737,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana		223 Orang	268.480.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

	1	**03**	**11**	**2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan dan ketepatan data yang disediakan oleh sistem**	-			-	**100 %**	**132.200.000,00**	**630.268.100,00**	**396.006.660,00**	**Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana**	**Meningkatkan jumlah tenaga konstruksi yang mengikuti program pelatihan**	**100 %**	**100.000.000,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
	1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																	
							Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	132.200.000,00	630.268.100,00	396.006.660,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana		1 Layanan Informasi	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	**03**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha konstruksi terhadap aturan dan peraturan yang berlaku, seperti perizinan, standar konstruksi, dan tata tertib**	-			-	**100 %**	**164.400.000,00**	**826.151.100,00**	**858.254.320,00**	**Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana**	**Peningkatan pengawasan tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi**	**100 %**	**120.000.000,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
	1	03	11	2.04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																	
							Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				35 Lembaga	35 Lembaga	164.400.000,00	826.151.100,00	858.254.320,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana		35 Lembaga	120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
10	**1**	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase dokumen tata ruang**				-	**60 %**	**2.687.680.000,00**	**2.687.680.000,00**	**2.095.643.200,00**							**2.341.504.326,00**	
	1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**persentase tingkat implementasi RTRW dan RRTR dalam proses perencanaan dan pembangunan di wilayah Kabupaten/Kota**	-			-	**85 %**	**1.050.000.000,00**	**1.050.000.000,00**	**830.600.500,00**	**Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik**	**Terlaksananya penetapan RTRW dan RRTR**	**85 %**	**1.441.504.326,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
	1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota																	
							Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	450.000.000,00	450.000.000,00	393.375.300,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		5 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota																		
							Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	450.000.000,00	450.000.000,00	362.225.200,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		5 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang																		
							Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				5 Laporan	5 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		5 Laporan	441.504.326,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase menyusun RDTR dan RTRW, dari tahap perencanaan hingga penerbitan dokumen final.**	-			-	**85 %**	**1.437.680.000,00**	**1.437.680.000,00**	**1.160.421.700,00**	**Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik**	**Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Tata Ruang Daerah Kab.**	**85 %**	**650.000.000,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
	1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota																		
							Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				5 Dokumen	1 Dokumen	671.600.000,00	671.600.000,00	549.200.400,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	12	2.02	0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota																		
							Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota				5 Dokumen	1 Dokumen	666.080.000,00	666.080.000,00	524.717.800,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	12	2.02	0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang																		
							Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	86.503.500,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana		1 Kegiatan	350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

	1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penataan ruang dan implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan**	**-**			**-**	**85 %**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**104.621.000,00**	**Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik**	**Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang**	**85 %**	**250.000.000,00**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				5 Dokumen	5 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	104.621.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		5 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
												J U M L A H	**685.710.055.671,00**	**1.087.315.304.048,00**	**1.171.068.365.616,00**							**535.416.332.077,00**	

RENCANA KERJA PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA P OPD)
UPTD PERKANTORAN GENTUNG TEMIANG KAB. PASER
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						UPTD Perkantoran Gentung Temiang							12.175.000.000,00	15.125.000.000,00	14.889.399.439,00							1.800.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.175.000.000,00	15.125.000.000,00	14.889.399.439,00							1.800.000.000,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							12.175.000.000,00	15.125.000.000,00	14.889.399.439,00							1.800.000.000,00	
1	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat				-	100 %	12.175.000.000,00	15.125.000.000,00	14.889.399.439,00							1.800.000.000,00	
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase total aset yang menjalani pemeliharaan terhadap total aset yang dimiliki oleh OPD	-			-	100 %	12.175.000.000,00	15.125.000.000,00	14.889.399.439,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		1.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	8 Unit	12.175.000.000,00	15.125.000.000,00	14.889.399.439,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana		8 Unit	1.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
												J U M L A H	**12.175.000.000,00**	**15.125.000.000,00**	**14.889.399.439,00**						**1.800.000.000,00**	

RENCANA KERJA PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN BAHAN DAN MATERIAL KAB. PASER
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						UPTD Laboratorium Pengujian Bahan dan Material							840.640.000,00	1.225.791.374,00	1.034.715.439,00							650.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							840.640.000,00	1.225.791.374,00	1.034.715.439,00							650.000.000,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							840.640.000,00	1.225.791.374,00	1.034.715.439,00							650.000.000,00	
1	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap				90 66 %	80 %	840.640.000,00	1.225.791.374,00	1.034.715.439,00							650.000.000,00	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya uji lab bidang konstruksi	-			-	80 %	840.640.000,00	1.225.791.374,00	1.034.715.439,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana	Meningkatnya kualitas jalan kabupaten		650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																	
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun			350 Dokumen	350 Dokumen	840.640.000,00	1.225.791.374,00	1.034.715.439,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana		350 Dokumen	650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
												J U M L A H	**840.640.000,00**	**1.225.791.374,00**	**1.034.715.439,00**						**650.000.000,00**	

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Kompleks Perkantoran Jl. Kusuma Bangsa KM 05 Gedung A Lantai I Kavling 1-2
TANA PASER KODE POS 76211
Telepon(0543)-Faksimili(0543)-Emailpaserpu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN PASER

NOMOR:050/281/DPUTR/2025

TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PASER

Menimbang :

a. Bahwa Pemerintah Kabupaten Paser berupaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pengguna jalan dengan melakukan inovasi terhadap pola pekerjaan umum dan keciptakaryaan dengan menyusun program kegiatan pada rencana kerja yang tepat dan benar yangpada akhirnya dapat meningkatkan capaian kinerja Perangkat Daerah;

b. Bahwa penyusunan rencana kerja program kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser.

Mengingat :

1. Undang-undangNomor27Tahun1959tentangPenetapan Undang-UndangDaruratNomor3Tahun1953tentangPembentukanDaerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undangNomor17Tahun2003tentangKeuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undangNomor25Tahun2004TentangSistemPerencanaan PembangunanNasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undangNomor26Tahun2007TentangPenataan Ruang;
8. Undang-undangNomor23Tahun2014TentangPemerintahan Daerah;
9. PeraturanPemerintahNomor26Tahun2007tentangKeuanganDaerah;
10. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi KalimantanTimur;
11. Pemerintah Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PaserTahun Anggaran.

KEDUA : Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Terdiri dari:

a. BAB I : Pendahuluan
b. BAB II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
e. BABV : Penutup

KETIGA : Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser dalam melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bidang pekerjaan umum dan keciptakaryaan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Tana Paser
Pada Tanggal : 22 Agustus 2025

KepalaDinas,

Asnawi,S.T.,M.Si
NIP.197204222006041012

PEMERINTAHKABUPATENPASER
DINASPEKERJAANUMUMDANTATARUANG
KompleksPerkantoranJl.KusumaBangsaKM05GedungALantaiIKavling1-2
TANAPASERKODEPOS 76211
Telepon(0543)-Faksimili(0543)-Emailpaserpu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PASER

NOMOR:050/282/DPUTR/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS,

Menimbang:

a. Bahwa menjamin terwujudnya konsistensi perencanaan pembangunan Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah;
b. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025;
c. Tim sebagaimana dimaksud di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang KabupatenPaser.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun2011tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
PERTAMA	:	Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
KEDUA	:	Tim Penyusun Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA keputusan ini terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan Renja PD
KELIMA	:Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	

Ditetapkan di :Tana Paser
Pada Tanggal :22 Agustus 2025

Kepala Dinas,

Asnawi,S.T.,M.Si
NIP.197204222006041012

Tembusan disampaikan KepadaYth:
1. Inspektorat Kabupaten Paser di TanaPaser
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I
Keputusan Kepala DPUTR Kab. Paser

Nomor : 50/282/DPUTR/2025
Tanggal : 22 Agustus 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PASER TAHUN 2025

Jabatan Dalam Tim		Nama/Jabatan
Pengarah	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum danTata Ruang Kabupaten Paser
Penanggung jawab	:	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser
Ketua	:	Fungsional Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Perencana Program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser
Anggota	:	1. Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kab.Paser 2. Kepala Bidang Tata Ruang DPUTR Kab.Paser 3. Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUTR Kab.Paser 4. Kepala Bidang Cipta Karya DPUTR Kab.Paser 5. Kepala Bidang Jasa Konstruksi DPUTR Kab.Paser 6. Kasubbag Umum DPUTR Kab.Paser 7. Kasubbag KeuanganDPUTR Kab.Paser 8. Rahman, SE 9. IraHasriana, A.Md 10. EkaHartiana, SE 11. Herlinna, A.Md

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG,

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Asnawi,S.T.,M.Si
NIP.197204222006041012

Nomor : 50/April/DPUTR/2025
Tanggal : 22 Agustus 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun 2025

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PASER TAHUN 2025

1. Pengarah, yaitu:
   a. Memberikan arahan, masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun 2025, baik dalam hal persiapan, mekanisme penyelenggaraan, pelaksanaan penyusunan, hasil akhir dokumen maupun legalisasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025;
   b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim kelompok kerja Renja Tahun 2025;
   c. Menyampaikan laporan kegiatan perkembangan penyusunan Renja melalui Sekretaris Dinas PUTR Kabupaten Paser.

2. Penanggung jawab,yaitu:
   a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan Tim Penyusun Renja Dinas PUTR Kabupaten Paser Tahun 2025;
   b. Membantu Penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Renja Tahun 2025 Dinas PUTR;
   c. MengoreksidanmenyampaikanlaporanhasilpekerjaanTimpenyusunkepada Kepala Dinas PUTR Kabupaten Paser.

3. Ketua, yaitu:
   a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Renja Tahun 2025 Dinas PUTR Kabupaten Paser;
   b. Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim penyusun Renja Tahun 2025 Dinas PUTR;
   c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun kepada Penanggung jawab penyusunan Renja Dinas PUTR Kabupaten Paser

4. Anggota,yaitu:
   a. Mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah (PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser;
   b. Melakukan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser;
   c. Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser;
   d. Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
   e. Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan;
   f. Merumuskan program prioritas;
   g. Menyesuaikan dokumen rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Paser sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan.

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG



ASNAWI,ST,M.Si
NIP.197204222006041012

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASER

PERUBAHAN RENJA 2025

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PASER

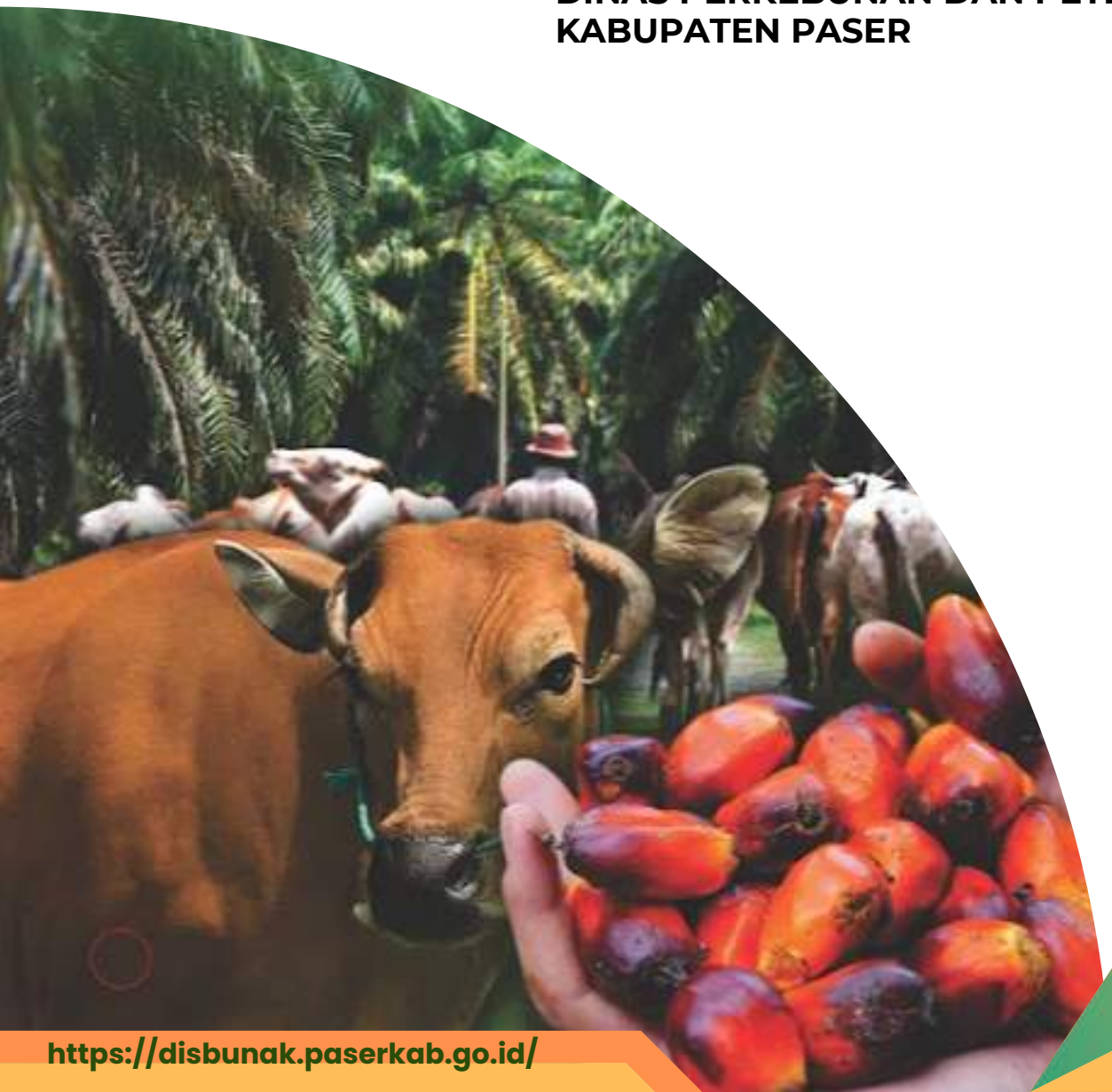

https://disbunak.paserkab.go.id/

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025 dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan ini akan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan serta memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang akan dilaksanakan di daerah.

Diharapkan Perubahan Rencana Kerja ini akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan serta menjadi arahan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang oleh Pimpinan serta seluruh staf Dinas Perkebunan dan Peternakan, yang akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja ini. Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini sehingga dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga Rencana Kerja ini bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya sektor Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Paser

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 5

1.3 Sistematika Penulisan 5

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA sampai dengan Triwulan II 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2025 9

2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan 15

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi disbunak 22

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 24

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan 27

3.1 Tujuan dan Sasaran 27

3.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 42

BAB IV Penutup 43

4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan 43

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Tabel Evaluasi Renja.....10

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan 17

Tabel 3. 1 Target Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan.....27

Tabel 3. 2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensiantar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perkebunan dan Peternakan, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser Tahun 2025.

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja Perubahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025 didasarkan pada ketentuan perundang- undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025
20. Peraturan Bupati Paser Nomor 22 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser.
21. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026

22. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024, tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025
23. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024, tentang RPJPD Tahun Anggaran 2025 – 2045
24. Peraturan Bupati Nomor 100.3.3.2/Kep.741/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya R a n c a n g a n Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasersebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada tahun 2025;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangandan pergeseran mata anggaran.

1.3 Sistematika Penulisan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagaiberikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Perubahan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan, proses penyusunan Rancangan Perubahan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2025 hinggaTriwulan I baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan

Mengemukakan Faktor Pendukung dan Penghambat yang dapat mempengaruhi tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Menyajikan data dan informasi tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan RJDMP 2021 – 2026 dalam bentuk tabel yang disertai narasi kerja tersebut

3.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menyajikan usulan program dan kegiatan masyarakat yang direncanakan dalam Perubahan Renja Tahun 2024 merupakan hasil penjaringan aspirasi melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang serta pokok-pokok pikiran DPRD yang disinergikan dengan sasaran program dalam RPJMD sebagai dasar perumusan kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2. 1 Tabel Evaluasi Renja

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2022-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (%)		Ket
											I		II									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		3				**68.778.743.477**		**0**		**68.778.743.477**		**2.617.335.659**		**0**		**2.617.335.659**		**2.617.335.659**		**3,81**	
		3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**68.778.743.477**		**0**		**68.778.743.477**		**2.617.335.659**		**0**		**2.617.335.659**		**2.617.335.659**		**3,81**	
1		**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan pelayanan masyarakat (Persen)**	**72**	**16.458.259.375**	**0**	**0**	**72**	**16.458.259.375**	**18,37**	**1.727.087.904**	**23**	**0**	**41,37**	**1.727.087.904**	**41,37**	**1.727.087.904**	**57,46**	**10,49**	
		3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja ()	200	150.799.070	100	0	100	150.799.070	14,54	27.924.398	25	0	39,54	27.924.398	139,54	27.924.398	69,77	18,52	
		3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	92.783.000	5	0	5	92.783.000	1	27.924.398	1	0	2	27.924.398	7	27.924.398	70	30,1	
		3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	30.682.120	0	0	1	30.682.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8	27.333.950	2	0	4	27.333.950	0	0	0	0	0	0	2	0	25	0	
		3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah ()	24	14.883.614.222	12	0	12	14.883.614.222	3	1.594.413.184	3	0	6	1.594.413.184	18	1.594.413.184	75	10,71	
		3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	14.723.889.222	240	0	5	14.723.889.222	60	1.582.333.184	60	0	60	1.582.333.184	60	1.582.333.184	100	10,75	

3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.100	159.725.000	920	0	1.500	159.725.000	200	12.080.000	275	0	475	12.080.000	1.395	12.080.000	66,43	7,56
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian ()	24	127.213.000	12	0	12	127.213.000	3	21.543.200	3	0	6	21.543.200	18	21.543.200	75	16,93
3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7	127.213.000	1,5	0	2	127.213.000	0	21.543.200	1	0	1	21.543.200	2,5	21.543.200	35,71	16,93
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum di dinas ()	200	1.095.565.755	100	0	100	1.095.565.755	4,28	52.947.400	,84	0	5,12	52.947.400	105,12	52.947.400	52,56	4,83
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	17	928.650.525	13	0	13	928.650.525	0	0	0	0	0	0	13	0	76,47	0
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	54.524.097	4	0	5	54.524.097	1	23.283.048	1	0	2	23.283.048	6	23.283.048	120	42,7
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	4.891.133	2	0	2	4.891.133	1	2.528.800	0	0	1	2.528.800	3	2.528.800	42,86	51,7
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	45	107.500.000	25	0	25	107.500.000	3	27.135.552	2	0	5	27.135.552	30	27.135.552	66,67	25,24
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan Pemerintah Daerah ()	200	56.077.328	100	0	100	56.077.328	19,72	8.759.722	4,1	0	23,82	8.759.722	123,82	8.759.722	61,91	15,62
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2.000.000	1	0	1	2.000.000	0	0	0	0	0	0	1	0	50	0
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7	54.077.328	2	0	2	54.077.328	1	8.759.722	0	0	1	8.759.722	3	8.759.722	42,86	16,2
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah ()	100	144.990.000	0	0	100	144.990.000	14,09	21.500.000	5	0	19,09	21.500.000	19,09	21.500.000	19,09	14,83
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11	135.000.000	6	0	6	135.000.000	1	20.000.000	1	0	2	20.000.000	8	20.000.000	72,73	14,81
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	9.990.000	15	0	15	9.990.000	1	1.500.000	0	0	1	1.500.000	16	1.500.000	53,33	15,02
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:	Dorongan untuk terus melakukan perbaikan layanan, baik internal maupun eksternal																
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	:	Belum optimalnya regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program, seperti SOP yang belum ter-update atau aturan yang tumpang tindih																

	Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : Menjadwalkan monev internal untuk memantau pelaksanaan program secara lebih intensif																		
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya : Merancang jadwal monitoring dan evaluasi berkala dalam Renja berikutnya, termasuk tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya.																		
2	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Presentasi sarana pertanian (Perkebunan dan Peternakan) yang dimanfaatkan (Persen)**	**100**	**3.916.961.284**	**0**	**0**	**100**	**3.916.961.284**	**5,82**	**249.476.378**	**10**	**0**	**15,82**	**249.476.378**	**15,82**	**249.476.378**	**15,82**	**6,37**
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang terlaksana ()	112	162.749.478	100	0	12	162.749.478	12,49	131.941.678	25	0	37,49	131.941.678	137,49	131.941.678	122,76	81,07
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	32	105.378.367	20	0	20	105.378.367	3	6.120.000	0	0	3	6.120.000	23	6.120.000	71,88	5,81
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	24	57.371.111	12	0	12	57.371.111	3	125.821.678	3	0	6	125.821.678	18	125.821.678	75	219,31
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan mutu benih / bibit ternak ()	200	20.895.500	100	0	100	20.895.500	0	0	25	0	25	0	125	0	62,5	0
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	12	20.895.500	12	0	12	20.895.500	3	0	3	0	6	0	18	0	150	0
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan penyediaan dan peredaran benih / bibit ternak (Persen)	200	353.986.683	100	0	100	353.986.683	12,4	71.372.000	25	0	37,4	71.372.000	137,4	71.372.000	68,7	20,16
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	24	353.986.683	12	0	12	353.986.683	3	71.372.000	3	0	6	71.372.000	18	71.372.000	75	20,16
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Kegiatan penyediaan Bibit Ternak yang dilaksanakan ()	200	3.379.329.623	100	0	100	3.379.329.623	1,4	46.162.700	25	0	26,4	46.162.700	126,4	46.162.700	63,2	1,37
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	26.295	3.379.329.623	0	0	26.295	3.379.329.623	0	46.162.700	0	0	0	46.162.700	0	46.162.700	0	1,37
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Tingginya tingkat partisipasi dan kemauan petani, peternak, dan kelompok tani dalam mengikuti program penyediaan sarana pertanian																		
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Belum optimalnya tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi																		
	Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : Mempercepat pelaksanaan pengadaan sarana pertanian yang belum terealisasi (bibit, benih, pupuk, alsintan, dan lainnya)																		
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya : Mendorong penguatan kelembagaan kelompok tani sebagai mitra dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan sarana																		

3		**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Presentase Prasarana Perkebunan dan Peternakan yang dimanfaatkan (Persen)**	**200**	**45.236.420.894**	**100**	**0**	**100**	**45.236.420.894**	**5**	**316.717.910**	**25**	**0**	**30**	**316.717.910**	**130**	**316.717.910**	**65**	**,7**
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian yang dilaksanakan (Persen)	200	3.658.463.645	100	0	100	3.658.463.645	4,4	188.797.058	12	0	16,4	188.797.058	116,4	188.797.058	58,2	5,16
		3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	16	1.844.529.925	4	0	4	1.844.529.925	1	35.425.408	1	0	2	35.425.408	6	35.425.408	37,5	1,92
		3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Hektar)	2.500	291.095.138	0	0	2.500	291.095.138	0	0	175	0	175	0	175	0	7	0
		3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	4	1.522.838.582	4	0	4	1.522.838.582	1	153.371.650	1	0	2	153.371.650	6	153.371.650	150	10,07
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian yang dilaksanakan ()	100	40.285.211.242	0	0	100	40.285.211.242	,48	71.676.800	,41	0	,89	71.676.800	,89	71.676.800	,89	,18
		3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	68	40.285.211.242	123	0	28	40.285.211.242	0	71.676.800	0	0	0	71.676.800	123	71.676.800	180,88	,18
		3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Persentase Lahan Penggembalaan Umum yang tersedia (Persen)	200	1.292.746.007	100	0	100	1.292.746.007	2,84	56.244.052	1,6	0	4,44	56.244.052	104,44	56.244.052	52,22	4,35
		3.27.03.2.04.0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan (Ha)	25	1.292.746.007	25	0	25	1.292.746.007	0	56.244.052	0	0	0	56.244.052	25	56.244.052	100	4,35
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		:	Dukungan penuh dari aparatur dinas untuk menyukseskan program secara optimal															
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		:	Lokasi lahan pertanian di daerah terpencil, terjal, atau minim akses jalan, sehingga menyulitkan pembangunan dan distribusi material prasarana															
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya		:	Memastikan penyerapan anggaran berjalan sesuai rencana untuk menghindari keterlambatan realisasi															
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya		:	Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat untuk mendukung keberlanjutan fungsi prasarana pasca pembangunan															
4		**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Populasi hewan ternak yang sehat (Persen)**	**125**	**2.067.012.014**	**16,25**	**0**	**65**	**2.067.012.014**	**6,68**	**97.386.300**	**20**	**0**	**26,68**	**97.386.300**	**42,93**	**97.386.300**	**34,34**	**4,71**
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan penjaminan kesehatan hewan dalam daerah kab/kota (Persen)	200	1.515.320.841	100	0	100	1.515.320.841	3,45	59.359.900	25	0	28,45	59.359.900	128,45	59.359.900	64,23	3,92

	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	4	1.515.320.841	0	0	4	1.515.320.841	1	59.359.900	1	0	2	59.359.900	2	59.359.900	50	3,92
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan produk hewan (Persen)	200	59.236.000	100	0	100	59.236.000	16,07	11.950.000	25	0	41,07	11.950.000	141,07	11.950.000	70,54	20,17
	3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	12	59.236.000	0	0	12	59.236.000	3	11.950.000	3	0	6	11.950.000	6	11.950.000	50	20,17
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase terlaksananya pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner (Persen)	200	492.455.173	100	0	100	492.455.173	4,14	26.076.400	25	0	29,14	26.076.400	129,14	26.076.400	64,57	5,3
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (dokumen)	12	436.332.800	12	0	12	436.332.800	3	26.076.400	3	0	6	26.076.400	18	26.076.400	150	5,98
	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	12	56.122.373	0	0	12	56.122.373	3	0	3	0	6	0	6	0	50	0
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:	Adanya aplikasi atau platform digital untuk mempermudah pelaporan dan pengawasan kesehatan hewan.																
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	:	Jumlah dokter hewan, paramedis veteriner, dan petugas kesehatan hewan yang masih minim																
	Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya	:	Melaksanakan kegiatan monitoring penyakit hewan menular secara lebih intensif, khususnya penyakit strategis seperti PMK, Rabies, dan Zoonosis																
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya	:	Menyelesaikan proses pengadaan vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan hewan untuk segera didistribusikan ke lapangan																
5	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang terlaksana (Persen)**	**200**	**653.760.484**	**100**	**0**	**100**	**653.760.484**	**19,48**	**166.634.702**	**9,8**	**0**	**29,28**	**166.634.702**	**129,28**	**166.634.702**	**64,64**	**25,49**
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pengendalian gangguan tanaman perkebunan (Persen)	200	653.760.484	100	0	100	653.760.484	19,48	166.634.702	9,8	0	29,28	166.634.702	129,28	166.634.702	64,64	25,49
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	30	653.760.484	4	0	5	653.760.484	0	166.634.702	1	0	1	166.634.702	5	166.634.702	16,67	25,49
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:	Adanya kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pelaksanaan program pengendalian bencana pertanian																

		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	:	Data potensi bencana pertanian dan populasi petani/peternak rentan yang belum lengkap atau tidak terintegrasi.																
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya	:	Melakukan pemutakhiran data wilayah sentra pertanian dan peternakan yang rentan terhadap bencana seperti banjir, kekeringan, serangan hama, dan penyakit hewan																
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya	:	Menyusun dan menetapkan rencana kontinjensi serta SOP penanggulangan bencana pertanian dan peternakan sebagai pedoman operasional di lapangan																
6		**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase Rekomendasi Perizinan yang diterbitkan (Persen)**	**200**	**446.329.426**	**87**	**0**	**100**	**446.329.426**	**11,43**	**60.032.465**	**9**	**0**	**20,43**	**60.032.465**	**107,43**	**60.032.465**	**53,72**	**13,45**
		3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi teknis penerbitan izin usaha pertanian yang dibuat (STDB) ()	1.500	446.329.426	0	0	1.500	446.329.426	0	60.032.465	135	0	135	60.032.465	135	60.032.465	9	13,45
		3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	1.500	446.329.426	0	0	1.500	446.329.426	0	60.032.465	135	0	135	60.032.465	135	60.032.465	9	13,45
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:	Adanya dukungan dan komitmen kuat dari pimpinan OPD dalam mempercepat dan mempermudah layanan perizinan usaha pertanian																
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	:	Adanya regulasi yang terlalu kompleks, tumpang tindih, atau belum sepenuhnya sinkron antara peraturan pusat, provinsi, dan daerah																
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya	:	Menyediakan layanan pendampingan dan konsultasi teknis bagi pelaku usaha, khususnya untuk wilayah terpencil atau yang mengalami kendala perizinan																
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya	:	Penguatan Database Perizinan dan Monitoring Usaha																
		JUMLAH				**68.778.743.477**		**0**		**68.778.743.477**		**2.617.335.659**		**0**		**2.617.335.659**		**2.617.335.659**		
		Rata-rata capaian kinerja (%)													**20,43**	**3,81**			**53,72**	**3,81**
		Predikat kinerja													**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			**Rendah**	**Sangat Rendah**

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025 triwulan I dapat dijelaskan bahwa:

1) Total realisasi kinerja hingga triwulan I adalah 12,92 %, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.568.873.104,- (Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 81.132.579.296,- (Delapan Puluh Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 10.50%.
2) Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan sebesar 125% dengan predikat kinerja Sangat Rendah (penentuan peringkat berdasarkan Skala Nilai Perangkat Kinerja Permendagri No 86).
3) Capaian kinerja sub kegiatan >70%-100% = 1 Indikator, capaian kinerja >50%-70% = 1 indikator , capaian kinerja 0%-50% = 34 indikator.(dijabarkan indikator)

2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser, maka Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan dan peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Perkebunandan Peternakan serta penguatan daya saing produk Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
b. Penetapan kebijakan di bidang Perkebunan dan Peternakan
c. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan dan peternakan yang meliputi Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan norma, standar, prosedurdan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Upaya Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Persentase Luas lahan Pengembangan Kebun Sawit, Karet, Aren dan Lada (Ha)
2. Penerbitan STDB yang dilaksanakan
3. Persentase kenaikan ketersediaan daging yang higienis
4. Jumlah Temuan Penyimpangan Pengelolaan BMD dan Keuangan yang material dari BPKRI dan APIP Eksternal
5. Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP
6. Indeks kepuasan layanan sekretariat (%)

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan

Tujuan / Sasaran	Indikator	Target & Realisasi Renja											Capaian Kinerja
		2022	Realisasi	2023	Realisasi	2024	Realisasi	2025	Realisasi	2026	Realisasi		
Peningkatan kontribusi sektor Perkebunan dan Peternakan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi sektor perkebunan dan peternakan terhadap PDRB	8%		10%		10%		12%		15%			
Meningkatnya pertumbuhansektor Perkebunan	Persentase Pengembangan komoditas perkebunan	0,20%	0,20%	0,25%	0,84%	0,50%	0,90%	1%		1,50%		0	0
	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perkebunan yang tersedia	30,00%	75%	75,00%	100%	75,00%	100%	45%		50,00%		0	0
	Jumlah Penerbitan STDB yang dilaksanakan	1500	1500	2500	1250	1500	1.500	1500		1500		0	0
Meningkatnya pertumbutumbuhan Sektor Peternakan	Persentase Kenaikan Jumlah Populasi Ternak	0,11%	0,11%	6%	8%	6%	7,10%	0,12%		0,11%		0	0
Meningkatnya ketersediaan produk hewan dan produk asal hewan yang berdaya saing	Persentase kenaikan ketersediaan produkhewan yang higienis	5,04%	27%	5,50%	2,40%	5,90%	8,41%	6,12%		6,50%			
	Persentasi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	95,71%	98,77%	95,74%	101,92%	95,83%	94,77%	95,90%		96,05%		0	0
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsifdan tangkas	Tingkat kepuasan pelayanan kesekretariatan	70%		75%		80%		85%		90%			
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan Kinerja Organisasiyang akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	60	60	62	63,73	70	74,4	70		70		0	0

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

a. Persentase pengembangan komoditas perkebunan yang digunakan Bidang Perkebunan dan UPTD Tanaman Perkebunan adalah untuk mengukur sejauh mana perkembangan produksi komoditas tanaman perkebunan dari tahun ke tahun. indikator ini memberikan gambaran kuantitatif tentang keberhasilan berbagai program, kebijakan, dan intervensi dalam sektor perkebunan, khususnya dalam meningkatkan produksi daerah. Untuk mengukur pertumbuhan atau pengembangan produksi komoditas tanaman perkebunan dari tahun ke tahun yaitu dengan menghitung jumlah produksi pada tahun berjalan dikurangi jumlah produksi pada tahun sebelumnya, kemudian hasilnya dibagi dengan jumlah produksi pada tahun sebelumnya, lalu dikalikan dengan 100 persen atau digunakan rumus berikut :

$$\frac{(Pt - Pt - 1)}{(Pt - 1)} \times 100\%$$

Ket :

Pt= Produksi komoditas pada tahun berjalan

Pt – 1 = Produksi komoditas pada tahun sebelumnya

Nilai yang dihasilkan menunjukkan apakah terjadi peningkatan (positif) atau penurunan (negatif) dalam produksi.

b. Persentase peningkatan sarana dan prasarana perkebunan yang termanfaatkan merupakan data yang disusun oleh bidang prasarana sarana pengolahan dan pemasaran perkebunan dan peternakan. Indikator ini digunakan untuk mengukur peningkatan pemanfaatan bantuan sarana dan prasarana perkebunan dari tahun ke tahun oleh petani atau kelompok tani. Tujuan dari penghitungan indikator ini adalah untuk melihat efektivitas penyediaan dan pemanfaatan bantuan sarana dan prasarana oleh petani dan peternak yang dilakukan melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan), atau koperasi perkebunan berupa benih, pupuk, pestisida, alat pascapanen dan pengolahan hasil, kandang ternak, serta jalan produksi perkebunan.

Untuk mengukur persentase peningkatan sarana dan prasarana perkebunan yang termanfaatkan yaitu jumlah sarana prasarana dikurangi

jumlah termanfaatkan dibagi jumlah sarana prasarana dikalikan 100 persen Atau dengan rumus :

$$\frac{(S_{total} - S_{terpakai})}{S_{total}} \times 100\%$$

S_{total} = Total jumlah sarana dan prasarana yang disediakan

$S_{terpakai}$ = Jumlah sarana dan prasarana yang telah dimanfaatkan

c. Jumlah penerbitan STDB yang dilaksanankan dihitung berdasarkan jumlah STDB yang diterbitkan pertahun (dokumen). STDB merupakan pendataandan pendaftaran pekebun dengan luasan kurang dari 25 ha oleh bidang Perkebunan untuk 137 komoditas perkebunan, termasuk sawit. Proses penerbitan didahului dengan pendataan, verifikasi dan validasi lapangan atas lahan milik pekebun yang mengajukan permohonan.

d. Persentase kenaikan jumlah populasi ternak digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan jumlah populasi ternak dari tahun ke tahun. perhitungan dilakukan dengan cara mengurangi jumlah populasi tahun ini dengan jumlah populasi tahun lalu, kemudian dibagi jumlah populasi tahun lalu dan dikalikan 100%. hasilnya menunjukkan seberapa besar peningkatan (atau penurunan) populasi ternak dalam bentuk persentase atau dengan rumus :

$$\frac{(\boldsymbol{Populasi\ Tahun\ Ini\ -\ Populasi\ tahun\ lalu})}{(\boldsymbol{Populasi\ Tahun\ Lalu})}\ \boldsymbol{x\ 100}\ \%$$

Perhitungan ini memberikan gambaran yang jelas tentang laju pertumbuhan populasi ternak, yang sangat penting di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan UPTD Pembibitan Ternak dalam evaluasi program peternakan, perencanaan kebutuhan pakan, dan pengembangan kebijakan sektor peternakan. Jika nilai persentase positif, berarti terjadi peningkatan populasi ternak. Sebaliknya, jika nilai persentase negatif, berarti populasi ternak mengalami penurunan. Indikator ini juga dapat dijadikan sebagai alat pemantauan terhadap efektivitas program

pengembangan peternakan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

e. Persentase kenaikan ketersediaan produk hewan yang higienis digunakan untuk mengukur pertumbuhan ketersediaan produk hewan yang diproses secara higienis dari tahun ke tahun. Tujuan dari indikator ini adalah untuk memastikan bahwa setiap unit usaha produk hewan menerapkan praktik-praktik higiene dan sanitasi yang memadai. Hal ini dilakukan melalui kegiatan pembinaan, sertifikasi, dan pengawasan secara berkelanjutan. Penerapan praktik higiene dan sanitasi yang baik diharapkan dapat menghasilkan produk hewan yang memenuhi prinsip ASUH, yaituAman, Sehat, Utuh, dan Halal. Perhitungan dilakukan dengan cara mengurangkan jumlah produksi tahun ini dengan jumlah produksi tahun lalu, kemudian dibagi jumlah produksi tahun lalu dan dikalikan 100 persen atau dengan rumus

$$\frac{(Pt - Pt - 1)}{(Pt - 1)} \times 100\ \%$$

Ket :

Pt = Jumlah produksi produk hewan higienis tahun ini

Pt – 1 = Jumlah produksi produk hewan higienis tahun lalu

Penanggung jawab dari pelaksanaan indikator ini adalah Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Rumah Potong Hewan (RPH) Jone, yang memiliki peran penting dalam memastikan penerapan higiene sanitasi dan pengawasan mutu produk hewan.

f. Persentase pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner digunakan untuk mengukur cakupan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Keswan dan Kesmavet) terhadap populasi ternak yang dilayani. Pelayanan ini meliputi kegiatan pencegahan, pengobatan, dan pemantauan penyakit pada hewan, serta upaya menjaga keamanan produk hewan bagi masyarakat.

Data pelayanan diambil dari Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), yang merupakan unit kerja di daerah yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan. Selain itu, pemantauan dan pencatatan dilakukan melalui SIKHNAS (Sistem Informasi Kesehatan Hewan Indonesia), sebuah sistem berbasis teknologi yang memungkinkan pengumpulan data dari lapangan secara cepat dan akurat, kemudian menyajikannya dalam bentuk yang siap digunakan oleh para pemangku kepentingan.

Perhitungan dilakukan dengan cara membagi jumlah total pelayanan yang diberikan dengan jumlah populasi ternak yang menjadi sasaran,

kemudian dikalikan 100 persen atau dengan rumus :

$$\frac{(P_{keswan} + P_{Kesmavet})}{P_{ternak}} \times 100\%$$

P_{Keswan} = Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan

$P_{Kesmavet}$ = Jumlah pelayanan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet)

P_{ternak} = Jumlah populasi ternak yang dilayani

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi disbunak

Faktor- Faktor Penghambat yang mungkin akan ditemui, diantaranya :

1) Kurang optimalnya produksi dan produktivitas sektor pekebun dan peternakan, karena banyaknya pekebun dan peternak yang masih menjalankan perkebunan dan peternakannya secara tradisional.

2) Rendahnya minat masyarakat terhdapat komoditas non sawit, karena komoditas sawit terbukti memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan relatid lebih stabil jika dibandinkan dengan komoditas perkebunan lainnya dan diproyeksikan kedepannya komoditas ini masih memiliki potensi yang cukup baik.

3) Belum optimalnya pelayanan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner. Hal ini karena masih rendahnya kepedulian masyarakat tentang mutu dan keamanan pangan karena terbatasnya pengetahuan dan rendahnya kemampuan daya beli untuk produk pangan yang bermutu dan tingkat keamanan yang tinggi.

Faktor-faktor pendorong keberhasilan diantaranya :

1) Jumlah kawasan perkebunan seluas ± 201.168,42 ha tersebar di kecamatan Long Ikis, Long Kali, Tanjung Harapan, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Batu Sopang dan Muara Komam. Total area perkebunan yang dikelola masyarakat sebanyak 91.926,25 ha, sekitar 80 persen diantaranya merupakan perkebunan kelapa sawit. Karena perawatan yang relatif mudah dan nilai ekonomi yang tinggi, kelapa sawit marak dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat.

2) Perkembangan perkebunan kelapa sawit masih menghasilkan tren positif dalam hal nominal PDRB. Industri pengolahan minyak kelapa

sawit (CP0) masi mendominasi di Industri pengolahan di Kabupaten Paser.

3) Beternak menjadi salah satu mata pencaharian yang cukup banyak diminati oleh masyarakat Kab. Paser. Hal ini karena hasil dari peternakan hingga saat ini masih menguntungkan karena diperlukand dalam kehidupan sehari-hari.

4) Sektor pertanian masih menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Pertanian masih menjadi sektor terbesar yang mampu menyerap tenaga kerja di Kabupaten Paser walaupun sumbangannya terhadap PDRB masih rendah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah, telah dilakukan sejumlah perubahan anggaran pada berbagai sub kegiatan yang berdampak pada peningkatan maupun pengalokasian ulang dana. Berikut ini adalah rincian perubahan tersebut:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya mengalami peningkatan anggaran dari Rp1.844.529.925 menjadi Rp2.187.512.080. Tambahan sebesar Rp342.982.155 digunakan untuk mengganti pagu DBH yang terkena efisiensi serta untuk biaya perjalanan dinas dan koordinasi.
2. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian mengalami penambahan anggaran sebesar Rp172.835.862, dari Rp291.095.138 menjadi Rp463.931.000, untuk mengganti pagu DBH yang terkena efisiensi.
3. Pengeluaran Gaji dan Tunjangan ASN naik sebesar Rp200.000.000, dari Rp14.723.889.222 menjadi Rp14.923.889.222, dialokasikan untuk tambahan upah pungut UPTD Perkebunan menjadi sebesar Rp34 juta.
4. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian mendapat tambahan Rp302.787.000, dari Rp127.213.000 menjadi Rp430.000.000, digunakan untuk biaya koordinasi aset, BMD, dan keikutsertaan dalam pelatihan/diklat bagi seluruh UPTD dan sekretariat.
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD meningkat sebesar Rp107.500.000, dari Rp107.500.000 menjadi Rp215.000.000, untuk mendukung perjalanan dinas kepala dinas dan sekretaris dalam kegiatan koordinasi.
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor bertambah sebesar Rp255.363.167, dari Rp928.650.525 menjadi Rp1.184.013.692, yang digunakan untuk pengadaan laptop keuangan, perangkat CCTV, dan peralatan perencanaan lainnya.
7. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B meningkat dari Rp1.722.838.582 menjadi Rp1.953.200.582, atau bertambah Rp230.362.000, dialokasikan untuk tambahan biaya perjalanan dinas karena DBH tidak dapat digunakan untuk koordinasi.

8. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian naik sebesar Rp120.000.000, dari Rp446.292.136 menjadi Rp566.226.392. Tambahan ini digunakan untuk perjalanan dinas, konsultasi eksternal, dan pemetaan perkebunan.
9. Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Lahan serta Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp150.000.000, dari Rp653.760.484 menjadi Rp803.760.484, digunakan untuk kegiatan sosialisasi, monitoring, dan konsultasi pencegahan.
10. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan meningkat dari Rp436.332.800 menjadi Rp636.466.455 atau bertambah Rp200.133.655, untuk mendukung seminar edukasi protein hewani bagi anak sekolah serta lomba anak sekolah.
11. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis Dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota mendapat tambahan Rp241.593.967, dari Rp1.515.320.840,61 menjadi Rp1.756.914.808,60, digunakan untuk pendampingan vaksinasi dan pelatihan kesehatan hewan.
12. Pengawasan Produksi Benih Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp146.460.240, dari Rp353.986.683 menjadi Rp500.446.923, untuk mendukung kegiatan pengawasan produksi ternak.
13. Pengadaan Benih Ternak dari Daerah Kabupaten/Kota Lain mengalami peningkatan Rp574.259.230, dari Rp3.379.329.623 menjadi Rp3.953.588.853. Tambahan ini digunakan untuk pengadaan pakan ayam buras kampung dan kipas angin kandang.
14. Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian meningkat dari Rp57.371.111 menjadi Rp115.344.591 atau bertambah Rp57.973.480, digunakan untuk belanja perjalanan dinas dan pengadaan komputer.
15. Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembangan Umum mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp3.151.189.480, dari Rp1.292.746.007 menjadi Rp4.443.935.497, digunakan untuk pembangunan kandang closed house, peningkatan jalan menuju kandang ayam, dan kegiatan JUT lainnya.

16. Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Usaha Tani meningkat sebesar Rp1.028.594.300, dari Rp43.013.631.242 menjadi Rp44.042.225.542,

    digunakan untuk jasa konsultan perencanaan sebanyak dua paket dan tiga paket perencanaan fisik JUT di Desa Krayan Jaya.
17. Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPTD Puskeswan Long Ikis) mengalami tambahan anggaran Rp250.000.000, dari Rp517.855.981 menjadi Rp767.855.981, untuk mendukung pembangunan gedung kantor UPTD Puskeswan.
18. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Peternakan (UPTD Pembibitan Ternak Petangis) mengalami peningkatan sebesar Rp4.138.386.634, dari Rp1.187.938.851 menjadi Rp5.326.325.485. Tambahan ini digunakan untuk pembelian pakan ayam petelur dan biaya operasional.
19. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPTD Puskeswan Pasir Belengkong) meningkat sebesar Rp486.318.000, dari Rp866.953.063 menjadi Rp1.353.271.063, digunakan untuk pembangunan kamar mandi dan toilet laboratorium.
20. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp267.250.000, dari Rp733.695.687 menjadi Rp1.000.945.687. Tambahan ini digunakan untuk pembangunan pagar lahan pertanian

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang ekonomi perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021- 2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan didalam dokumen Renja.

Tabel 3. 1 Target Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan

Tujuan / Sasaran	Indikator	Formulasi	Target	
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025
Peningkatan kontribusi sektor Perkebunan dan Peternakan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi sektor perkebunan dan peternakan terhadap PDRB	Jumlah kontribusi perkebunan dan peternakan / kontribusi Pertanian, Kehutanan dan perikanan x 100%		
Meningkatnya pertumbuhan sektor Perkebunan	Persentase Pengembangan komoditas Perkebunan	(Jumlah Tahun Ini - Jumlah Tahun Lalu) / Jumlah Tahun Lalu x100%	1%	1%
	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perkebunan yang tersedia	(Jumlah Tahun Ini - Jumlah Tahun Lalu) / Jumlah Tahun Lalu x100%	75%	75%
	Jumlah Penerbitan STDB yang dilaksanakan	Jumlah STDB yang diterbitkan	1500	1500
Meningkatnya pertumbuhan sektor Peternakan	Persentase Kenaikan Jumlah Populasi Ternak	(Jumlah Tahun Ini - Jumlah Tahun Lalu) / Jumlah Tahun Lalu x100%	6%	6%
Meningkatnya ketersediaan produk hewan dan produk asal hewan yang berdaya saing	Persentase kenaikan ketersediaan produk hewan yang higienis	(Jumlah Tahun Ini - Jumlah Tahun Lalu) / Jumlah Tahun Lalu x100%	6.12%	6.12%
	Persentasi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pelayanan UPTD / Jumlah UPTD x100%	95,90%	95,90%
Mewujudkan tata kelola	Tingkat kepuasan	Jumlah Bobot		

pemerintahan yang responsifdan tangkas	pelayanan kesekretariatan	Jumlah Unsur Pelayanan	x100%		
	Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	Hasil reviu Tim Penilai SAKIP (Eksternal)		70	70

Memperhatikan tabel diatas, perubahan anggaran diarahkan pada belanja yang tidak berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

KEGIATAN	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN BELANJA PERGESERAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERGESERAN (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten					
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 151.966.000	(59.183.000)	Rp 92.783.000	151.966.000	59.183.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 41.564.000	(10.971.880)	Rp 30.592.120	41.564.000	10.971.880
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 41.917.900	(14.583.950)	Rp 27.333.950	41.917.900	14.583.950
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 14.923.889.222		14.723.889.222	14.923.889.222	200.000.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 200.000.000	(40.275.000)	Rp 159.725.000	218.360.000	58.635.000
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					-
Pendataan dan Pengelolaan Adminitrasi Kepegawaian	Rp 187.226.000	(60.013.000)	Rp 127.213.000	430.000.000	302.787.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 928.650.525		Rp 928.650.525	1.184.013.692	255.363.167
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 83.158.700	(28.634.603)	Rp 54.524.097	83.158.700	28.634.603
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 8.100.000	(3.208.867)	Rp 4.891.133	8.100.000	3.208.867
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 215.000.000	(107.500.000)	Rp 107.500.000	215.000.000	107.500.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 2.000.000		Rp 2.000.000		(2.000.000)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 54.077.328		Rp 54.077.328		(54.077.328)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 145.000.000	Rp 145.000.000	Rp 145.000.000	Rp 190.433.255	45.433.255
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 10.000.000	(10.000)	Rp 9.990.000		(9.990.000)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					-
					-
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				2.373.382.917	2.373.382.917
Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				2.389.373.550	2.389.373.550
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Rp 120.200.000	(14.821.633)	Rp 105.378.367	121.142.367	15.764.000
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rp 81.142.238	(23.771.127)	Rp 57.371.111	115.344.591	57.973.480
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota					-
Pengawasan Mutu Benih/Bibit T ernak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Rp 28.000.000	(7.104.500)	Rp 20.895.500		(20.895.500)
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah					-
Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Rp 772.000.000	(418.013.317)	Rp 353.986.683	500.446.923	146.460.240
Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain					-
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Rp 3.279.082.306	100.247.317	Rp 3.379.329.623	4.524.095.153	1.144.765.530
					-

KEGIATAN	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN BELANJA PERGESERAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERGESERAN (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				2.268.662.768	2.268.662.768
Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian				2.479.423.560	2.479.423.560
					-
Koordinasi dan Singkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Rp 2.074.933.208	(230.403.283)	Rp 1.844.529.925	2.103.369.925	258.840.000
Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Rp 463.931.000	(172.835.862)	Rp 291.095.138	463.931.000	172.835.862
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	Rp 2.042.712.678	(319.874.096)	Rp 1.722.838.582	1.953.200.582	230.362.000
					-
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian					-
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rp 43.462.342.238	(448.710.996)	Rp 43.013.631.242	44.042.225.542	1.028.594.300
KegiatanPengembangan Lahan Penggembalaan Umum					-
Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Rp 2.343.842.238	(76.525.131)	Rp 2.267.317.107	3.466.259.507	1.198.942.400
					-
					-
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					-
					-
Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota					-
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Dan Zoonosis Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.782.978.841	(267.658.000)	Rp 1.515.320.841	1.756.914.808	241.593.967
Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota					-
Analisis Risiko Penyakit Hewan, Zoonosis, Produk Hewan Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya	Rp 74.362.000	(15.126.000)	Rp 59.236.000		
Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner					-
					-
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Rp 579.491.808	(143.159.008)	Rp 436.332.800	636.466.455	200.133.655
Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi Pada Unit Usaha Produk Hewan	Rp 108.227.373	(52.105.000)	Rp 56.122.373		(56.122.373)
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					-
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					-
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rp 892.256.678	(238.496.194)	Rp 653.760.484	803.760.484	150.000.000
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					-
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					-
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin usaha Pertanian	Rp 577.381.678	(131.052.252)	Rp 446.329.426	566.329.426	120.000.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					-
Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian (UPT Pembibitan Tanaman Perkebunan)					-
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	Rp 788.817.993	(55.122.306)	Rp 733.695.687	1.000.945.687	267.250.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					-
					-
Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (UPT Pembibitan dan Perawatan Ternak Petangis)					-
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rp 1.229.650.676	(41.711.825)	Rp 1.187.938.851	5.326.325.485	4.138.386.634
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					-
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota (UPT PKH Kuaro)					-
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Rp 657.132.658	(65.104.286)	Rp 592.028.372	642.028.372	50.000.000
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota (UPT PKH Long Ikis)					-
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Rp 545.063.050	(27.212.225)	Rp 517.850.825	767.850.825	250.000.000
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota UPT PKH Batu Engau)					-

Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Rp	300.618.878	(44.795.062)	Rp 255.823.816	305.823.816	50.000.000
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota (UPT PKH Muara Komam)						-
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Rp	286.408.872	(59.881.439)	Rp 226.527.433	276.527.433	50.000.000
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota (UPT PKH Tanah Grogot)						-
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Rp	222.956.034	(41.379.314)	Rp 181.576.720		-
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota (UPT PKH Pasir Belengkong)						-
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Rp	934.724.201	(67.771.138)	Rp 866.953.063	1.353.271.063	486.318.000
						-
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						-
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian (UPT RPH Jone)						-
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Rp	491.772.975	(47.746.276)	Rp 444.026.699	494.026.699	50.000.000
JUMLAH	Rp	81.132.579.296		Rp 77.698.066.043	98.219.531.707	20.762.278.384

Tabel 3. 2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pemerintahan Pilihan	Kab. Paser				Urusan Pemerintahan Pilihan	Kab. Paser				
	Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Kab. Paser				Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Kab. Paser				
1.	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)**	**Kab. Paser**	**Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang terlaksana**	**5 Ha**	**620,760,484**	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)**	**Kab. Paser**	**Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang terlaksana**	**5 Ha**	**682,256,678**	
	Kegiatan Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Persentase terlaksananya kegiatan pengendalian gangguan tanaman perkebunan	5 Ha	620,760,484	Kegiatan Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Persentase terlaksananya kegiatan pengendalian gangguan tanaman perkebunan	5 Ha	803,760,484	
	Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Paser	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5 Ha	620,760,484	Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Paser	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5 Ha	803,760,484	
2.	**Program Perizinan Usaha Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)**	**Kab. Paser**	**Persentase Rekomendasi Perizinan yang diterbitkan**	**100%**	**389,329,426**	**Program Perizinan Usaha Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)**	**Kab. Paser**	**Persentase Rekomendasi Perizinan yang diterbitkan**	**100%**	**566,329,426**	

	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah rekomendasi teknis penerbitan izin usaha pertanian yang dibuat (STDB)	**100%**	389,329,426	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah rekomendasi teknis penerbitan izin usaha pertanian yang dibuat (STDB)	**100%**	566,329,426	
	Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kab. Paser	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1500 Dokumen	389,329,426	Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kab. Paser	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1500 Dokumen	566,329,426	
3.	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)**	**Kab. Paser**	**Presentasi sarana pertanian (Perkebunan dan Peternakan) yang dimanfaatkan**	**100%**	**10,529,235,612**	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)**	**Kab. Paser**	**Presentasi sarana pertanian (Perkebunan dan Peternakan) yang dimanfaatkan**	**100%**	**10,037,743,719**	
	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Paser	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang terlaksana	**100%**	4,889,670,076	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Paser	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang terlaksana	**100%**	5,562,812,443	
	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Paser	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	20 Laporan	121,142,367	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Paser	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	20 Laporan	121,142,367	
	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Paser	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	71,344,591	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Paser	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	115,344,591	
	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (UPTD Petangis)	Kab. Paser	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	4,818,325,485	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (UPTD Petangis)	Kab. Paser	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	5,326,325,485	
	Kegiatan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Peningkatan mutu benih / bibit ternak	100%	20,895,500	Kegiatan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Peningkatan mutu benih / bibit ternak	100%	20,895,500	

	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Paser	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	20,895,500	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Paser	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	20,895,500	
	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Persentase pengawasan penyediaan dan peredaran benih / bibit ternak	100%	336,846,923	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Persentase pengawasan penyediaan dan peredaran benih / bibit ternak	100%	500,446,923	
	Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kab. Paser	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	12 Laporan	336,846,923	Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kab. Paser	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	12 Laporan	500,446,923	
	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Paser	Persentase Kegiatan penyediaan Bibit Ternak yang dilaksanakan	100%	5,281,823,113	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Paser	Persentase Kegiatan penyediaan Bibit Ternak yang dilaksanakan	100%	3,953,588,853	
	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Paser	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	500 Ekor	5,281,823,113	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Paser	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	500 Ekor	3,953,588,853	
4.	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)**	**Kab. Paser**	**Presentase Prasarana Perkebunan dan Peternakan yang dimanfaatkan**	**100%**	**54,474,116,997**	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)**	**Kab. Paser**	**Presentase Prasarana Perkebunan dan Peternakan yang dimanfaatkan**	**100%**	**54,121,846,087**	
	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Paser	Persentase Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian yang dilaksanakan	**100%**	5,489,796,349	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Paser	Persentase Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian yang dilaksanakan	**100%**	5,141,658,349	

	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Kab. Paser	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	4 Dokumen	2,392,338,582	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Kab. Paser	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	4 Dokumen	1,953,200,582	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B (UPT Pembibitan Tanaman Perkebunan)	Kab. Paser	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	12 Dokumen	909,945,687	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B (UPT Pembibitan Tanaman Perkebunan)	Kab. Paser	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	12 Dokumen	1,000,945,687	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kab. Paser	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 Laporan	2,187,512,080	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kab. Paser	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 Laporan	2,187,512,080	
	Sub KegiatanPengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Kab. Paser	Luas Kawasan pertanian yang termanfaatkan	2500 Ha	463,931,000	Sub KegiatanPengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Kab. Paser	Luas Kawasan pertanian yang termanfaatkan	2500 Ha	463,931,000	
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Paser	Persentase Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	100%	46,335,632,241	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Paser	Persentase Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	100%	44,536,252,241	
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Paser	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20 unit	45,980,805,542	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Paser	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20 unit	44,042,225,542	

	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Kab. Paser	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	354,826,699	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Kab. Paser	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	494,026,699	
	Kegiatan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Kab. Paser	Persentase Lahan Penggembalaan Umum yang tersedia	100%	2,648,688,407	Kegiatan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Kab. Paser	Persentase Lahan Penggembalaan Umum yang tersedia	100%	4,443,935,497	
	Sub Kegiatan Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Kab. Paser	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	25 Ha	2,648,688,407	Sub Kegiatan Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Kab. Paser	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	25 Ha	4,443,935,497	
5.	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Kab. Paser**	**Persentase Populasi hewan ternak yang sehat**	**75%**	**4,825,964,867.00**	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Kab. Paser**	**Persentase Populasi hewan ternak yang sehat**	**75%**	**#VALUE!**	
	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Persentase terlaksananya kegiatan penjaminan kesehatan hewan dalam daerah kab/kota	100%	1,593,914,810.00	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Persentase terlaksananya kegiatan penjaminan kesehatan hewan dalam daerah kab/kota	100%	1,756,914,808	
	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Dan Zoonosis Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Dan Zoonosis Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	1,593,914,810	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Dan Zoonosis Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Dan Zoonosis Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	1,756,914,808	
	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Persentase pengawasan produk hewan	100%	59,236,000	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Persentase pengawasan produk hewan	100%	59,236,000	
	Sub Kegiatan Analisis Risiko Penyakit Hewan, Zoonosis, Produk Hewan Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Analisis Risiko Penyakit Hewan, Zoonosis, Produk Hewan Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya	12 Laporan	59,236,000	Sub Kegiatan Analisis Risiko Penyakit Hewan, Zoonosis, Produk Hewan Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Analisis Risiko Penyakit Hewan, Zoonosis, Produk Hewan Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya	12 Laporan	59,236,000	

	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Paser	Persentase terlaksananya pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	100%	498,588,828	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Paser	Persentase terlaksananya pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	100%	692,588,828	
	Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi Pada Unit Usaha Produk Hewan	Kab. Paser	Jumlah Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi Pada Unit Usaha Produk Hewan	12 Unit Usaha	56,122,373	Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi Pada Unit Usaha Produk Hewan	Kab. Paser	Jumlah Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi Pada Unit Usaha Produk Hewan	12 Unit Usaha	56,122,373	
	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Paser	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	442,466,455	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Paser	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	636,466,455	
	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Persentase Penyediaan Pelayanan kesehatan hewan di Kab. Paser	100%	2,674,225,229	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Persentase Penyediaan Pelayanan kesehatan hewan di Kab. Paser	100%	3,577,078,229	
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPT PKH Batu Engau)	Kab. Paser	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	265,048,816	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPT PKH Batu Engau)	Kab. Paser	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	305,823,816	
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPT PKH Long Ikis)	Kab. Paser	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	517,850,825	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPT PKH Long Ikis)	Kab. Paser	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	767,850,825	
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPT PKH Muara Komam)	Kab. Paser	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	266,527,433	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPT PKH Muara Komam)	Kab. Paser	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	276,527,433	
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPT PKH Pasir Belengkong)	Kab. Paser	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	878,743,063	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPT PKH Pasir Belengkong)	Kab. Paser	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	1,353,271,063	

	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPT PKH Tana Paser)	Kab. Paser	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	198,576,720	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPT PKH Tana Paser)	Kab. Paser	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	231,576,720	
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPT PKH Kuaro)	Kab. Paser	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	547,478,372	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPT PKH Kuaro)	Kab. Paser	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	642,028,372	
6.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Perkebunan dan Peternakan)**	**Kab. Paser**	**Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat**	**76%**	**16,662,227,827**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Perkebunan dan Peternakan)**	**Kab. Paser**	**Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat**	**76%**	**17,228,683,097**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	202,830,400	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	235,447,900	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	119,348,500	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	151,966,000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	41,564,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	41,564,000	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	41,917,900	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	41,917,900	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	14,962,249,222	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	15,142,249,222	

	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang	14,743,889,222	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang	14,923,889,222	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	218,360,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	218,360,000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Paser	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian	12 Bulan	153,213,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Paser	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian	12 Bulan	127,213,000	
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	2 Dokumen	153,213,000	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	2 Dokumen	127,213,000	
	Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum di dinas	100%	1,120,434,622	Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum di dinas	100%	1,490,272,392	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	885,310,525	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1,184,013,692	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	69,524,097	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	83,158,700	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Paket	157,500,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Paket	215,000,000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Laporan	8,100,000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Laporan	8,100,000	

	Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	33,077,328	Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	33,077,328	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	31,077,328	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	31,077,328	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100%	190,423,255	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100%	200,423,255	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	180,433,255	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	190,433,255	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	9,990,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	9,990,000	

3.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. saran dan pendapat DPRD berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat yang direncanakan pada Perubahan Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedomanpada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Tana Paser, September 2025

Kepala Dinas
Perkebunan dan Peternakan

Djoko Bawono, SP. M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19730113 199803 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KETAHANAN PANGAN

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)

DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASER

TAHUN 2025

DINAS KETAHANAN PANGAN
Kompleks Perkantoran Jl. Kesuma Bangsa
Km 5 Gedung D lantai 2 TANA PASER

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah- Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Tahun 2025 sesuai waktu yang telah ditentukan. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Tahun 2025 mempunyai arti strategis karena merupakan tahun awal dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalan Renstra 2022-2026 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada Tahun 2025 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan yang berkesinambungan.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi Instansi Pemerintah maupun Mitra Kerja. Diharapkan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2025 dapat berjalan dengan tertib sehingga makin mendekatkan pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	**PENDAHULUAN**	
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Landasan Hukum	I-2
	1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
	1.4. Sistematika Penulisan	I-4
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I**	
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025	II-5
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	II-12
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-18
	2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025	II-27
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-32
BAB III	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	III-34
BAB IV	**PENUTUP**	IV-38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Formulir Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Paser Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2025	II-6
Tabel T-C. 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur / Kabupaten Paser	II-12
Tabel T-C. 31	Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Timur / Kabupaten Paser	II-28
Tabel 2.5	Usulan Program Kegiatan (teknokratik) Tahun 2025 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser	II-32
Tabel 3.1	Matriks Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Tahun 2025	III-34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman ke BAPANAS, RENJA PROVINSI, RKPD, Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022-2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun berjalan;
2. Identifikasi terhadap isu strategis;
3. Penyelasaran terhadap perubahan arah kebijakan pembangunan;
4. Penyesuaian dengan kebutuhan;

5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang telah disesuaikan dan menjadi pedoman serta rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2025 yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, serta antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengacu pada kemampuan keuangan daerah, sehingga program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdayaguna dan berhasil guna serta tepat

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undan-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2008 no.21 tambahan lembaran negera Republik Indonesia no. 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2006- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2006 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Paser Nomor 100.3.3.2/KEP-741/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus dijalankan/direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser.

1.4 Sistematika

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser, sebagaimana dimaksud terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan I

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV Penutup

LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser sudah sesuai target meskipun ada beberapa kegiatan serapan anggaran dibawah target yang seharusnya dicapai. Adanya kebijakan pembatasan kegiatan baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser maupun pada institusi pelaksana/mitra kerja menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan optimal dan anggaran tidak dapat terserap sesuai yang direncanakan.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser sampai dengan triwulan II Tahun 2025 adalah sebagaimana terlampir tabel 2.1 simpas sebagai berikut :

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KETAHANAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2025

Sasaran SKPD Tahunan :
-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2022-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (%)		Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		2				**17.024.199.613**		**0**		**17.024.199.613**		**937.832.895**		**0**						**937.832.895**		**937.832.895**		**5,51**	
		2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**17.024.199.613**		**0**		**17.024.199.613**		**937.832.895**		**0**						**937.832.895**		**937.832.895**		**5,51**	
1	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya urusan pemerintah (persen)**	**100**	**8.530.413.582**	**100**	**0**	**100**	**8.530.413.582**	**25**	**806.989.895**	**25**	**0**					**25**	**806.989.895**	**25**	**806.989.895**	**25**	**9,46**	
		2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja (persen)	100	264.422.842	100	0	100	264.422.842	25	29.134.900	25	0					25	29.134.900	25	29.134.900	25	11,02	
		2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	204.422.842	2	0	2	204.422.842	,25	24.336.900	,25	0					,25	24.336.900	,25	24.336.900	100	11,91	
		2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	17.500.000	1	0	1	17.500.000	,25	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
		2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	42.500.000	4	0	4	42.500.000	,25	4.798.000	,25	0					,25	4.798.000	,25	4.798.000	100	11,29	
		2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah (persen)	0	7.397.238.228	100	0	25	7.397.238.228	25	742.434.397	25	0					25	742.434.397	25	742.434.397	25	10,04	
		2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12,8	7.238.507.228	10,67	0	32	7.238.507.228	32	717.054.397	32	0					32	717.054.397	21,33	717.054.397	166,67	9,91	
		2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	158.731.000	3	0	4	158.731.000	,25	25.380.000	,25	0					,25	25.380.000	,25	25.380.000	100	15,99	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2022-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (%)		Ket
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah (persen)	0	766.650.197	100	0	100	766.650.197	25	34.079.642	25	0					25	34.079.642	25	34.079.642	25	4,45	
		2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	627.764.356	4	0	4	627.764.356	,25	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
		2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	32.432.631	4	0	4	32.432.631	1	15.686.728	,25	0					,25	15.686.728	,25	15.686.728	100	48,37	
		2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	12.465.710	4	0	4	12.465.710	1	2.513.514	,25	0					,25	2.513.514	,25	2.513.514	100	20,16	
		2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	2.487.500	1	0	1	2.487.500	,25	0	,25	0					,25	0	,25	0	100	0	
		2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	86.500.000	1	0	1	86.500.000	,25	15.879.400	0	0					0	15.879.400	0	15.879.400	0	18,36	
		2.09.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	5.000.000	1	0	1	5.000.000	,25	0	,25	0					,25	0	,25	0	100	0	
		2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran (persen)	0	40.988.034	100	0	100	40.988.034	0	1.340.956	25	0					25	1.340.956	25	1.340.956	25	3,27	
		2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	500.000	1	0	1	500.000	1	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
		2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	33.000.000	1	0	1	33.000.000	,25	1.340.956	,25	0					,25	1.340.956	,25	1.340.956	100	4,06	
		2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	7.488.034	1	0	1	7.488.034	,25	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
		2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD (persen)	0	61.114.281	100	0	100	61.114.281	0	0	25	0					25	0	25	0	25	0	
		2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	61.114.281	2	0	2	61.114.281	0	0	,25	0					,25	0	,25	0	100	0	
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya regulasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah 2. Tersedianya anggaran APBD																						
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	: Masih kurangnya jumlah personil yang ada pada sekretariat																						
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya	: Efisiensi pembagian tugas personil																						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2022-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (%)		Ket
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya : Efisiensi pembagian tugas personil																							
2		**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan (persen)**	**0**	**1.422.467.787**	**55**	**0**	**60**	**1.422.467.787**	**10**	**6.768.000**	**10**	**0**					**10**	**6.768.000**	**10**	**6.768.000**	**10**	**,48**	
		2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah insfrastruktur lantai jemur (Unit)	0	1.422.467.787	5	0	6	1.422.467.787	,25	6.768.000	,8	0					,8	6.768.000	,8	6.768.000	,8	,48	
		2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	0	1.422.467.787	5	0	6	1.422.467.787	,25	6.768.000	,8	0					,8	6.768.000	,8	6.768.000	100	,48	
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1. UU No 18 Thn 2012 ttg Pangan 2. Permentan No 56 Thn 2018 ttg Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah 3. Dukungan APBD																							
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1. Proses perencanaan teknis tidak sesuai jadwal karena adanya kendala teknis (kelengkapan dokumen, lokasi, status lahan) 2. Nama desa/lokasi rencana pembangunan lantai jemur di desa janju dan mendik belum terinput di SIPD RI																							
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : 1. Melaksanakan koordinasi dan survey lokasi lebih awal untuk memastikan kesiapan lahan dan kondisi lapangan sesuai kebutuhan teknis 2. Pengimputan nama desa janju dan mendik akan dilakukan saat SIPD RI dibuka untuk penginputan APBD-P																							
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya : 1. Melaksanakan koordinasi dan survey lokasi lebih awal untuk memastikan kesiapan lahan dan kondisi lapangan sesuai kebutuhan teknis 2. Pengimputan nama desa janju dan mendik akan dilakukan saat SIPD RI dibuka untuk penginputan APBD-P																							
3		**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Tingkat ketersediaan (Skor)**	**0**	**4.481.550.264**	**98,71**	**0**	**98,25**	**4.481.550.264**	**15**	**106.175.000**	**25**	**0**					**25**	**106.175.000**	**25**	**106.175.000**	**25**	**2,37**	
				Tingkat konsumsi (Skor)	**0**		**87,06**		**89,6**		**22**		**22**						**22**		**22**		**22**		
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan (persen)	0	1.900.957.915	100	0	100	1.900.957.915	0	40.480.000	0	0					0	40.480.000	0	40.480.000	0	2,13	
		2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	0	975.886.536	1	0	1	975.886.536	,15	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
		2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan (Unit)	0	735.896.379	1	0	1	735.896.379	,15	26.080.000	,25	0					,25	26.080.000	,25	26.080.000	100	3,54	
		2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan (Dokumen)	0	110.475.000	1	0	1	110.475.000	,25	7.200.000	0	0					0	7.200.000	0	7.200.000	0	6,52	
		2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	78.700.000	2	0	1	78.700.000	,25	7.200.000	,25	0					,25	7.200.000	,25	7.200.000	100	9,15	
		2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data potensi dan kebutuhan pangan lokal (Dokumen)	0	17.500.001	1	0	1	17.500.001	,25	0	,25	0					,25	0	,25	0	,25	0	
		2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	0	17.500.001	1	0	1	17.500.001	,25	0	,25	0					,25	0	,25	0	100	0	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2022-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (%)		Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase capaian target konsumsi pangan berdasarkan AKG (persen)	0	2.563.092.348	97,5	0	98	2.563.092.348	24,5	65.695.000	24,5	0					24,5	65.695.000	24,5	65.695.000	24,5	2,56	
		2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	0	140.290.127	1	0	1	140.290.127	,25	7.200.000	,25	0					,25	7.200.000	,25	7.200.000	100	5,13	
		2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	0	2.359.559.964	1	0	1	2.359.559.964	,25	51.295.000	,25	0					,25	51.295.000	,25	51.295.000	100	2,17	
		2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	0	63.242.257	1	0	1	63.242.257	,25	7.200.000	,25	0					,25	7.200.000	,25	7.200.000	100	11,38	
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1. UU No 18 Tahun 2012 ttg Pangan 2. Dukungan APBD																							
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1. Data sekunder penyusunan neraca ketersediaan pangan strategis wilayah yang meliputi data produksi san stok pangan 11 bahan pokok dari Dinas terkait kurang akurat dan belum dapat diterima tepat waktu 2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan bantuan dan edukasi secara berkelanjutan																						
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : 1. Melaksanakan koordinasi rutin antara tim neraca ketersediaan/perangkat daerah terkait untuk menyamakan data dan indikator 2. Meningkatkan monev dan edukasi secara merata dalam kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan lokal																						
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya : 1. Melaksanakan koordinasi rutin antara tim neraca ketersediaan/perangkat daerah terkait untuk menyamakan data dan indikator 2. Meningkatkan monev dan edukasi secara merata dalam kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan lokal																						
4		**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase penanganan desa rawan pangan (Desa)** **Persentase penyaluran cadangan pangan (persen)**	**0** **0**	**2.202.217.818**	**63,63** **10**	**0**	**17,36** **10**	**2.202.217.818**	**4,34** **2,5**	**10.700.000**	**4,34** **2,5**	**0**					**4,34** **2,5**	**10.700.000**	**4,34** **2,5**	**10.700.000**	**4,34** **2,5**	**,49**	
		2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dokumen update data peta FSVA (Dokumen)	0	48.000.001	1	0	1	48.000.001	,25	0	,25	0					,25	0	,25	0	,25	0	
		2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	0	48.000.001	1	0	1	48.000.001	,25	0	,25	0					,25	0	,25	0	100	0	
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Teratasinya kerawanan pangan daerah (Desa)	0	2.154.217.817	8	0	2	2.154.217.817	0	10.700.000	0	0					0	10.700.000	0	10.700.000	0	,5	
		2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	616.581.500	1	0	1	616.581.500	,25	10.700.000	,25	0					,25	10.700.000	,25	10.700.000	100	1,74	
		2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	160.106.551	1	0	1	160.106.551	,25	0	,25	0					,25	0	,25	0	100	0	
		2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	1	1.377.529.766	0	0	1	1.377.529.766	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2022-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (%)		Ket
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1. Tersedianya regulasi pelaksanaan kegiatan 2. Tersedianya anggaran																							
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1. Penyusunan peta FSVA belum dimulai baru tahap pembuatan Sk dan rapat tim 2. Untuk proses penyerapan pangan masih tahap lelang																							
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : 1. Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait dan konsultasi dengan provinsi 2. Melakukan lelang terbuka penyaluran beras CPPD dan bantuan pangan sampai ke tempat tujuan																							
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya : 1. Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait dan konsultasi dengan provinsi 2. Melakukan lelang terbuka penyaluran beras CPPD dan bantuan pangan sampai ke tempat tujuan																							
5		**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji (persen)**	**0**	**387.550.162**	**94,07**	**0**	**21,5**	**387.550.162**	**21,5**	**7.200.000**	**18**	**0**					**18**	**7.200.000**	**18**	**7.200.000**	**18**	**1,86**	
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar (persen)	0	387.550.162	84	0	86	387.550.162	21,5	7.200.000	18	0					18	7.200.000	18	7.200.000	18	1,86	
		2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	167.250.000	1	0	1	167.250.000	,25	0	,25	0					,25	0	,25	0	100	0	
		2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	0	144.325.162	1	0	1	144.325.162	,25	0	,25	0					,25	0	,25	0	100	0	
		2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	0	75.975.000	1	0	1	75.975.000	,25	7.200.000	,25	0					,25	7.200.000	,25	7.200.000	100	9,48	
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1. Tersedianya anggaran 2. Permentan No 53 Tahun 2018 ttg Keamanan dan Mutu PSAT																							
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Kegiatan telah dilaksanakan pada triwulan II namun pada proses pencairan terkendala angkas																							
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : Proses pencairan akan dilaksanakan pada triwulan III																							
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya : Proses pencairan akan dilaksanakan pada triwulan III																							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2022-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (%)		Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	JUMLAH					17.024.199.613		0		17.024.199.613		937.832.895		0						937.832.895		937.832.895			
	Rata-rata capaian kinerja (%)																		2.173,43	5,51			18	5,51	
	Predikat kinerja																		Sangat tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

Disusun

Tanah Grogot, 17 Juli 2025

NIP.

Dievaluasi

Tanah Grogot, 17 Juli 2025

Kepala Bappedalitbang

-

NIP.

Hasil evaluasi sampai dengan triwulan II (dua) pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Tahun 2025, berdasarkan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (≤ 25%) adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan

   Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/kota

   Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan Lainnya masih belum mencapai/memenuhi target yang direncanakan karena :

   - Proses perencanaan teknis tidak sesuai jadwal karena adanya kendala teknis (kelengkapan dokumen, lokasi, status lahan)
   - Nama desa/lokasi rencana pembangunan lantai jemur di desa janju dan mendik belum terinput di SIPD RI

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

   Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

   Sub Kegiatan Pemantauan Stok Pangan masih belum mencapai/memenuhi target yang direncanakan data sekunder penyusunan neraca ketersediaan pangan strategis wilayah yang meliputi data produksi san stok pangan 11 bahan pokok dari Dinas terkait kurang akurat dan belum dapat diterima tepat waktu.

   Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal masih belum mencapai target dikarenakan ketidaksanggupan salah satu desa calon penerima manfaat untuk menerima/ melaksanakan bantuan benih, bibit sapras tanaman pangan, menyebabkan jadwal pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana yang yelah ditetapkan dan kurangnya komitmen Kelompok Tani (poktan) penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan budidaya.

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi

   Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi belum mencapai / memenuhi target yang direncanakan karena adanya efisiensi anggaran serta pengadaan bantuan sembako untuk desa rawan pangan dan lokus stunting angkas tersedia di triwulan III.

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

   Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota belum mencapai / memenuhi target yang direncanakan karena kegiatan telah dilaksanakan pada triwulan II namun pada proses pencairan tersedia di angkas triwulan III.

2. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan. Secara umum, yang menjadi faktor penyebab terpenuhinya target kinerja hasil/keluaran adalah:
   a. Pelaksanaan evaluasi capaian kinerja Program kegiatan sub kegiatan yang telah dilaksanakan secara rutin setiap akhir triwulan pada tahun berjalan.
   b. Kerjasama yang baik antara bidang selaku pelaksana teknis kegiatan.
   c. Koordinasi dan sinergitas antar instansi, dalam hal Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dalam rangka Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berjalan cukup baik.
   d. Antusias penerima manfaat dan perangkat desa dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.
   e. Kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan pangan
   f. Keterlibatan pemerintah dan Lembaga terkait, dapat memberikan dukungan kelembagaan, mengkoordinasikan upaya bersama dan memberikan sumberdaya dan kebijakan yang diperlukan.

3. Langkah - langkah yang dapat diambil untuk memenuhi pencapaian target kinerja program/kegiatan sebagai berikut:
   a. Pemerataan akses pangan bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan, harus menjadi prioritas.
   b. Dinas Ketahanan Pangan perlu memperkuat kelembagaan dan kebijakan terkait ketahanan pangan.
   c. Dinas Ketahanan Pangan perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk bertukar informasi, teknologi, dan pengalaman dalam upaya mencapai target ketahanan pangan global.
   d. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser sesuai dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Kalimantan Timur / Kabupaten Paser

No	Indikator KInerja	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian Pangan		50%	55%	60%	65%	60%	60%	70%	73%	
2	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan		97,9	98,00	98,17	98,31	98,65	98,91	98,93	98,95	
3	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		86	87	88	89	89	87,06	88	89	

4	Persentase Penanganan Pangan pada desa rentan rawan Pangan	IKK	18,05%	17,36%	16,66%	15,97%	13,89%	350%	16,66%	15,97%	
5.	Persentase keamanan pangan segar yang diuji		82%	84%	86%	88%	95,08	94,01%	86%	88%	
6.	Nilai SAKIP dan APIP		BB (>70 - 80)	BB (>70 - 80)	BB (>70 - 80)	BB (>70 - 80)		BB (70,36)	BB (70,38)	BB (70,40)	
7.	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah dengan baik		100	100	100	100		100%	100%	100%	

Secara umum capaian realisasi program/kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Tahun 2024 pada kisaran baik, dimana faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah:

a. Program/kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran;
b. Kerjasama yang baik antara bidang selaku pelaksana teknis kegiatan.
c. Koordinasi dan sinergitas antar instansi lintas sektoral, sehingga masing-masing organisasi Perangkat Daerah bisa meningkatkan kerjasama dalam upaya meningkatkan capaian kinerja.

1. Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan adalah upaya untuk membangun dan memelihara sarana dan prasarana yang mendukung produksi, distribusi, penyimpanan, dan akses terhadap makanan yang memungkinkan suatu daerah atau negara mencapai kemandirian pangan. Indikator kinerja persentase penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian pangan terealisasi sebesar 60 % dari target 55% dengan persentase capaian kinerja sasaran pada Tahun 2024 sebesar 109,09 % dikategorikan **Sangat Baik**, dimana capaian ini meningkat 9,09 poin dibandingkah dengan capaian pada tahun 2023. Melihat pencapaian kinerja ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2024 ini disebabkan Komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan mutu hasil pertanian (beras) untuk kesejahteraan masyarakat, koordinasi

dan sinergitas antar instansi lintas sektoral yang berjalan cukup baik. Indikator ini diampu oleh Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan melalui pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya.

Formulasi : $\frac{\text{Jumlah infrastruktur yang tersedia}}{\text{Jumlah kebutuhan insfrastruktur}}$ x 100%

Sumber Data dari Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan

2. Tingkat ketersediaan Pangan (PPH) Ketersediaan

Indikator kinerja Tingkat ketersediaan pangan (PPH) Ketersediaan terealisasi sebesar **98, 91** dari target **98,00** dengan persentase capaian kinerja 100,72% dikategorikan **Sangat Baik**. Capaian Skor PPH ketersediaan Tahun 2024 ini sedikit mengalami penurunan 0,05 poin dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2023 namun masih berada diatas dari target capaian yang telah ditetapkan yaitu sebesar 97,90.

Pengukuran skor PPH ketersediaan merupakan instrumen yang menunjukkan ketersediaan pangan yang ideal di suatu wilayah termasuk Kabupaten Paser. Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan merupakan pola tentang ketersediaan pangan di suatu wilayah berbasis pola ketersediaan ideal yang mengacu pada pola pangan harapan. Pangan yang tersedia secara beragam dalam jumlah seimbang akan mampu menyediakan kebutuhan zat gizi. Keanekaragaman pangan tersebut mencakup kelompok padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah dan biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah-buahan serta lain-lain. Terjadinya penurunan skor PPH Ketersediaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain : Ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi pangan, Faktor ekonomi dan sosial Adapun yang menjadi faktor pendorong/ penunjang pencapaian target kinerja antara lain angka kebutuhan pangan telah tercukupi dari pasokan pokok selain dari produksi, Program penganekaragaman pangan untuk mencapai komposisi ketersediaan yang ideal, cukup secara kuantitas bergizi aman dan seimbang berjalan cukup baik dimana Indikator ini diampu oleh Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Pemantauan Stok Pangan, Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota.

Formula : Perhitungan berdasarkan Data Susenas.

Sumber Data dari Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan

2. **Tingkat konsumsi pangan (PPH) Konsumsi**

PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Capaian indikator sasaran Tingkat konsumsi pangan (PPH) Konsumsi terealisasi 87,06 dari target Tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 87 dengan persentase capaian 100,07%, dikategorikan **Sangat Baik.** Walaupun nilai capaian Tahun 2024 ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2023 yaitu sebesar 103,49% (3,42 poin), namun realisasi capaian mengalami kenaikan 0,6 poin dari target yang ditetapkan. Pencapaian dari Indikator sasaran tersebut berdasarkan pola konsumsi pangan merupakan gambaran pola penduduk suatu wilayah dalam mengkonsumsi jenis-jenis pangan pada kelompok sumber pangan tertentu. Secara detail pola konsumsi pangan dijabarkan menjadi pola konsumsi (1) kelompok pangan padi-padian (2) kelompok pangan umbi-umbian (3) kelompok pangan hewani (4) kelompok pangan minyak dan lemak (5) kelompok pangan buah/biji berminyak (6) kelompok pangan kacang-kacangan (7) kelompok pangan gula (8) kelompok pangan buah dan sayur (9) kelompok pangan lainnya. Adapun faktor pendukung/pendorong tercapainya target antara lain:

- Program penganekaragaman pangan melalui penyediaan sumber daya lokal non Beras berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam panganekaragaman pangan melalui pengembangan tanaman pekarangan.
- Pelaksanaan Sosialisasi diversifikasi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berjalan cukup baik.
- Mulai adanya peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan yang B2SA.

Pada indikator ini diampu oleh Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Berbasis Sumber Daya Lokal.

Formula : Perhitungan berdasarkan Data Susenas.

Sumber Data dari Bidang Penganekaragaman konsumsi pangan.

3. Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan

Capaian indikator sasaran Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan pada Tahun 2024 yaitu sebesar 2016% dikategorikan **Sangat Baik**. Dari update terhadap 6 (enam) indikator kerawanan pangan oleh tim pelaksana penyusunan Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan Kabupaten Paser diperoleh hasil 25 (17,36%) desa rentan rawan pangan pada Tahun 2023. Target sasaran strategis Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan Tahun 2024 yaitu sebesar sebanyak 8 Desa terdiri dari:

Prioritas 1 (1 desa) yaitu :

1) Desa Rantau Layung Kecamatan Batu Sopang

Prioritas 2 (2 desa) sebagai berikut :

1) Desa Rantau Buta Kecamatan Batu Sopang
2) Desa Keladen Kecamatan Tanjung Harapan
3) Desa Kayungo Sari Kecamatan Long Ikis
4) Desa Makmur Jaya Kecamatan Long Kali

Prioritas 3 (3 Desa) sebagai berikut :

1) Desa Mendik Kecamatan Long Kali
2) Desa Muara Pias Kecamatan Long Kali
3) Desa Muara Toyu Kecamatan Long Kali

Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 2 secara umum disebabkan oleh :

- Kurangnya lahan pertanian, banyaknya alih fungsi lahan
- Masih kurangnya penyedia pangan disebabkan jarak dari kabupaten jauh
- Tingkat pendapatan masyarakat masih rendah, Karena masih bergantung dengan usaha tani.

Sedangkan desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 3 secara umum disebabkan oleh :

- Terbatasnya akses terhadap air bersih
- Daya beli masyarakat terbatas Karena kemiskinan

- Masih terbatasnya tenaga kesehatan karena penempatan yang belum merata.

Ada pun faktor pendorong yang mendukung pencapaian kinerja sasaran persentase penanganan desa rawan pangan antara lain :

- Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam penanganan daerah rentan rawan pangan
- Indikator penanganan kerawanan pangan antar sektor telah terintegrasi dengan cukup baik.
- Koordinasi data indikator FSVA antar tim penyusun dengan pihak desa rentan rawan pangan telah terlaksana dengan baik.
- Sinergi dan kerja sama antara pemangku kepentingan terkait Upaya mengentaskan daerah rentan rawan pangan, terutama kegiatan intervensi terhadap 6 (enam) indikator kerawanan pangan sehingga kebijakan program pembangunan ketahanan pangan lebih terarah dan berkesinambungan.
- Dasar dalam penetapan desa rawan pangan terdapat perubahan kategori pada indikator jumlah penduduk miskin, dimana pada tahun sebelumnya menggunakan data penduduk miskin desil 1, namun pada tahun 2024 menggunakan data penduduk miskin ekstrem.

Indikator ini diampu Bidang Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi melalui sub kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

formulasi : $\frac{\text{Jumlah desa yg dibantu pangan}}{\text{Jumlah desa rentan rawan pangan}} \times 100\%$

Sumber Data dari Bidang Kerawanan pangan

4. Persentase Tingkat keamanan Pangan Segar yang diuji

Keamanan pangan segar yang diuji merujuk pada praktik pengujian dan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan bahwa Pangan segar Asal Tumbuhan (PSAT) terutama produk-produk pertanian dan produk pangan segar lainnya, bebas dari kontaminan atau bahaya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Capaian indikator sasaran persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji Tahun 2024 mengalami penurunan capaian kinerja sasaran dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yang lalu, dimana capaian kinerja sasaran tingkat keamanan pangan segar yang diuji sebesar 115,95 %, maka pada Tahun 2024 capaian

kinerjanya menurun menjadi 111,99% dikategorikan **Baik.** Dari hasil pengujian yang dilakukan, terlihat bahwa kontrol atau pengawasan yang lebih intensif terhadap produk-produk PSAT yang beredar, baik di pasar tradisional maupun pasar modern dapat mengurangi persentase pangan segar yang terindikasi positif tercemar oleh residu pestisida. Pada tabel tersebut terlihat bahwa indikator persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji Tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024-2026 dengan target sebesar 84%. Ada pun faktor pendorong yang mendukung kegiatan pengawasan kemananan pangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2018 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor: 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan sebagai dasar hukum pengawasan dan pengujian keamanan PSAT
2. Upaya Sosialisasi dan penyuluhan tentang kelembagaan dan informasi keamanan pangan kepada masyarakat berjalan cukup baik.
3. Upaya menumbuhkembangkan jejaring kerja keamanan pangan, dengan cara meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan pihak-pihak terkait keamanan pangan berjalan cukup baik.
4. Koordinasi dengan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikutura Provinsi Kaltim berjalan baik.

Indikator ini diampu Bidang Pengawasan Keamanan Pangan melalui sub kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.

Formula : $\frac{\text{Jumlah sampel pangan yang aman}}{\text{Jumlah sampel yang diuji}}$ x 100%

Sumber Data dari Bidang Keamanan Pangan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser mempunyai kedudukan yaitu ***"merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan pilihan di bidang Ketahanan Pangan.***

Pada RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser periode Tahun 2022-2026 ditetapkan 2 Sasaran Strategis yaitu :

I. Terjaganya ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman,merata dan terjangkau yang berbasis sumberdaya lokal secara berkelanjutan serta Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat, dengan indikator :

1. Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
2. Tingkat ketersediaan pangan (PPH) Ketersediaan
3. Tingkat konsumsi pangan (PPH) Konsumsi
4. Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan
5. Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji

II. Meningkatnya pengelolaan dan kinerja organisasi yang akuntabel, dengan indikator :

1. Nilai SAKIP dan APIP
2. Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah dengan baik

2. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser dalam pembangunan di bidang Ketahanan pangan telah dilaksanakan sampai saat ini. Hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, adalah sebagai berikut:

I. Perumusan kebijakan teknis bidang Ketahanan Pangan

- Adanya kebijakan nasional yang kurang mendapat dukungan dana pendampingan sebagai perwujudan ketahanan pangan
- Regulasi untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan di daerah masih kurang

II. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dibidang ketahanan pangan:

- Ketersediaan pangan belum memenuhi kondisi ideal dan masih terdapat wilayah dengan kategori rentan pangan
- Pengelolaan Cadangan pangan belum optimal untuk mengantisipasi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan pangan, fluktuasi harga serta keadaan darurat dan kerawanan pangan
- Belum optimalnya distribusi pangan
- Mutu keamanan pangan belum terjamin

- Pola konsumsi pangan masyarakat belum ideal sesuai Angka kecukupan gizi (AKG)

III. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan:

- Belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang ketahanan pangan dan belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi sebagai informasi umpan balik (feed back) bagi perbaikan pelaksanaan dan perumusan perencanaan.

IV. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas :

- Masih belum optimalnya penyesuaian program kegiatan terdahulu dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang membawa perubahan signifikan dalam sistem Perencanaan terutama untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
- Belum optimalnya fungsi kearsipan dan tata kelola organisasi, administrasi kesekretariatan.

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan menyesuaikan dengan Visi Kabupaten Paser 2022 -2026, "MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA" Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dalam periode 5 (lima) tahun ke depan (2022-2026), maka Misi pembangunan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.
2. Meningkatkan tata kelola permerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan
3. Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Pembangunan ketahanan pangan merupakan perwujudan misi yang ke-1 yaitu "Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing" Arah dari Misi 1 ini meliputi Pembangunan Pertanian dalam arti luas, ketersediaan pangan bagi masyarakat, pembangunan industri pengolahan, peningkatan investasi, ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pengembangan pariwisata dan kebudayaan, serta peningkatan usaha perdagangan, koperasi dan UMKM. Tujuan dan Sasaran Agar

misi yang diagendakan dapat diimplementasikan secara operasional dan fokus diperlukan arahan umum dalam bentuk tujuan dan sasaran. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser yaitu "Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat yang berbasis Pangan Lokal". Pelaksanaan tujuan Dinas Ketahanan Pangan diharapkan mampu mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Paser. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser selaku perangkat daerah yang memiliki tugas pokok "melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan", dalam pelaksanaan tugas tersebut, maka perlu sinergitas dan koordinasi dengan semua perangkat daerah terkait penanganan bersama hal-hal dalam bidang ketahanan pangan. Termasuk mendukung Program Bupati yaitu Penanganan Desa Rawan Pangan dari 25 Desa yang harus ditangani menjadi 8 Desa, diharapkan 5 tahun kedepan menjadi nol dengan persentasi penanganan 100% sehingga sebagai amanat SDGs (Sustainable Development Goals)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang merupakan sebuah dokumen yang akan menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Pencapaian Visi dan misi Kabupaten Paser akan mempengaruhi pencapaian program SDGs/TPB. Program/Kegiatan yang dilaksanakan di setiap perangkat daerah mendukung tercapaianya visi dan misi Kabupaten Paser yang berkesinambungan dengan program SDGs/TPB. Program/Kegiatan dari Dinas Ketahanan Pangan yang mendukung SDGs/TPB yaitu Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan.

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemberian pelayanan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kab. Paser yaitu :

- Menurunnya minat generasi muda di bidang budidaya pertanian

Rendahnya minat generasi muda untuk menekuni profesi dibidang pertanian karena profesi ini dinilai sebagai profesi yang tidak menjanjikan bagi generasi melenial, mereka lebih suka menekuni dibidang Informasi Teknologi yang lebih menjanjikan, sehingga sangat jarang ada dari generasi melenial yang benar-benar berkeinginan menjadi seorang petani. Akibatnya jumlah petani yang turun ke dunia pertanian semakin berkurang.

- Ketersediaan pangan utama (beras) Kabupaten Paser belum terpenuhi 100% dan masih ketergantungan pasokan beras dari luar.
- Meningkatnya alih fungi lahan pertanian ke non pertanian.
- Peningkatan hasil produksi pertanian relatif rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat.
- Berkembang jenis makanan olahan / siap saji yang beredar di pasaran.
- Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
- Sulit mendapatkan akses data pangan secara cepat dan akurat
- Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pertanian belum bisa berperan optimal
- Masih adanya iklim ego sektoral dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektoral
- Masih beredarnya jenis makanan olahan yang menggunakan bahan tambahan yang membahayakan kesehatan masyarakat.
- Masih rendahnya cadangan pangan masyarakat dan cadangan pemerintah.
- Adanya kebijakan pasar global.

b. Peluang

Sedangkan peluang yang dimiliki dalam upaya peningkatan pemberian pelayanan Ketahanan Pangan yaitu :

- Masih tersedianya lahan potensial untuk budidaya tanaman pangan utama guna meningkatkan produksi pangan (beras)
- Tersedianya lahan pekarangan masyarakat yang belum termanfaatkan secara optimal, sebagai sarana peningkatan cadangan pangan di tingkat keluarga.

  Pekarangan bukan hanya untuk menciptakan keindahan dan kesejukan saja, tetapi lebih daripada itu adalah guna meningkatkan perekonomian keluarga masing-masing. Jenis-jenis tanaman yang bisa ditanam di pekarangan rumah masing-masing rumah tangga adalah jenis sayur-sayuran, buah-buahan, obat-

obatan, tanaman rempah-rempah, tanaman hias dan lain sebagainya yang semuanya itu dapat menunjang kebutuhan pangan keluarga dan sebagai sumber pendapatan di tingkat keluarga,

- Jaminan legalitas kepemilikan lahan, sarana produksi dan perlindungan terhadap alih fungsi lahan tanaman pangan oleh pemerintah daerah Kabupaten Paser.
- Terbukanya peluang usaha pangan lokal yang berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu ikon di Kabupaten Paser.
- Terbukanya koordinasi lintas sektoral, dengan Dinas/Instansi terkait meliputi Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi perdagangan dan adanya MOU kerjasama pemerintah Kabupaten Paser dengan Badan POM Propinsi Kalimantan Timur.
- Adanya kebijakan Nasional untuk Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).
- Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pangan yang beragam dan bermutu berbasis bahan lokal.
- Terbukanya jalur arus lalu lintas distribusi pangan antara Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai ke tingkat Desa.
- Tersedianya cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah.
- Adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Paser dalam hal penerapan prinsip partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, perumusan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah dalam pembangunan di bidang Ketahanan pangan, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser sebagai berikut:

I. Perumusan kebijakan teknis bidang Ketahanan Pangan:

- Untuk mengatasi masalah kebijakan nasional yang kurang mendukung, diperlukan beberapa langkah strategis :
  1. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada untuk mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu diperbaiki.

2. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan, termasuk masyarakat, akademisi, dan organisasi non-pemerintah.
3. Memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan.
5. Memastikan alokasi anggaran yang adil dan efektif.
6. Mengintegrasikan teknologi dalam perumusan dan implementasi kebijakan.
7. Meningkatkan kesadaran publik tentang kebijakan yang ada.
8. Melakukan evaluasi dan monitoring berkelanjutan terhadap dampak kebijakan.

- Regulasi untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan di daerah masih kurang. Sehingga, fokus utama adalah pada penguatan regulasi yang ada untuk mengidentifikasi kelemahannya, lakukan revisi atau penyempurnaan regulasi yang ada agar lebih relevan, efektif, dan mudah diimplementasikan. Selain itu, penting untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses ini.

II. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dibidang Ketahanan Pangan:

Untuk mengatasi ketersediaan pangan yang belum memenuhi kondisi ideal, diperlukan beberapa langkah strategis seperti penguatan cadangan pangan nasional, peningkatan produksi dan diversifikasi pangan, serta perbaikan infrastruktur dan sistem distribusi. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya peningkatan akses pangan, keamanan pangan, dan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal.

III. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Ketahanan Pangan :

Untuk mengatasi belum terintegrasinya data dan pelaporan serta belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi, diperlukan beberapa langkah strategis.

1. Perlu dilakukan integrasi sistem informasi yang ada untuk menciptakan basis data yang terpusat dan mudah diakses.
2. Perlu ada peningkatan kualitas data dan pelaporan melalui standarisasi format, validasi data, dan pelatihan bagi pengguna.

3. Perlu ada mekanisme yang jelas untuk memanfaatkan hasil evaluasi dalam proses pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja.
4. Perlu ada budaya organisasi yang mendukung pemanfaatan data dan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

IV. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas :

Untuk mengatasi permasalahan belum optimalnya fungsi kearsipan dan tata kelola serta belum lengkapnya standar operasional prosedur (SOP), diperlukan langkah-langkah komprehensif. Ini termasuk penyusunan dan penerapan SOP yang jelas, pelatihan SDM kearsipan, pembenahan sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan hasil telaahan dan analisis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser sebagai berikut:

1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (Strength-opportunity) antara lain dengan ;
   a. Mengintegrasikan program ketahanan pangan, terutama dalam hal konsumsi dan penganekaragaman pangan
   b. Meningkatkan fasilitas dalam pembinaan kepada petani dan produsen pangan olahan untuk menyediakan pangan yang bermutu (on farm and off farm);
   c. Mendorong dan meningkatkan peran dalam membantu peningkatan program ketahanan pangan;
   d. Meningkatkan peran kelembagaan pangan dalam membangun ketahanan pangan;
   e. Mendorong tumbuhnya industri olahan pangan berbasis potensi lokal;
   f. Mengembangkan metode partisipatif.
2. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman (strength-threats); antara lain ;
   a. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan bertumpu pada sumber daya lokal dan kelembagaan yang ada;

b. Meningkatkan fasilitasi dalam sosialisasi pola konsumsi pangan yang memenuhi asas B2SA yang halal, terutama yang berbasis potensi lokal;
c. Meningkatkan daya saing produk olahan pangan;
d. Menjaga stabilitasasi harga dan Rekronstruksi kelembagaan pangan ;

3. Strategi yang menggunakan kelemahan untuk memanfaatkan peluang (weakness-opportunity) antara lain dengan ;
   a. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan ketahanan pangan;
   b. Meningkatkan SDM kelembagaan pangan dan aparatur guna mewujudkan ketahanan pangan melalui penyelenggaraan edukasi;
   c. Meningkatkan kerjasama dengan institusi terkait dan pihak swasta dalam integrasi dan sinkronisasi kegiatan dalam bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
   d. Membangun kesiapan aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi dan menanggulangi masalah akses kerawanan dan keamanan pangan;
   e. Mendorong terwujudnya kemandirian pangan masyarakat;
   f. Meningkatkan fungsi kelembagaan pangan menjadi lembaga sosial ekonomi yang mandiri dan tangguh;
   g. Memfasilitasi permodalan kelembagaan pangan;
   h. Membangun jejaring informasi dan teknologi agribisnis.
4. Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman (weakness-threats) antara lain dengan:
   a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pertanian penghasil pangan olahan dan pangan alternatif;
   b. Mengupayakan pemupukan modal kelembagaan pangan melalui pola usaha yang efektif dan efisien;
   c. Memanfaatkan media informasi untuk mendukung ketahanan pangan dan pemasyarakatan mencintai produk makanan dalam negeri;
   d. Melakukan kampanye dan promosi tentang pola konsumsi dan diversifikasi pangan secara terus-menerus melalui berbagai media;
   e. Mengembangkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman;
   f. Membangun cadangan pangan masyarakat;
   g. Meningkatkan peran kelembagaan pangan dalam keseluruhan sistem ketahanan pangan melalui kegiatan produktif.

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Proses penelaahan dan review terhadap rancangan perubahan RKPD dilakukan dengan tujuan agar program/kegiatan/sub kegiatan yang disusun oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser selaras dengan rencana program/kegiatan dan prioritas pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2025. Pelaksanaan program dan kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran akan dilakukan penyesuaian dan penataan kembali melalui mekanisme Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025. Uraian program, kegiatan, sub kegiatan dan usulan penambahan anggaran ditampilkan pada tabel T-C. 31 berikut :

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025
Provinsi Kalimantan Timur / Kabupaten Paser

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				**14,072,625,127**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**18,723,929,650**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terlaksananya urusan pemerintah**		**100%**	**9,422,625,127**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya urusan pemerintah**		**100%**	**8,508,402,918**	
	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah dengan baik		**100%**			**Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah dengan baik**		**100%**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**		**100%**	***327,650,000***	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**		**100%**	**453,167,700**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	1 Dok	175,650,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	2 Dok	348,167,700	Terdapat kebutuhan untuk penyusunan renstra 2025-2029
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser	1 laporan	17,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser	1 laporan	20,000,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Kab. Paser	1 laporan	135,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Kab. Paser	1 laporan	85,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tingkat kepuasan pelayanan Administrasi keuangan Perangkat Daerah**		**100%**	**8,672,625,127**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat kepuasan pelayanan Administrasi keuangan Perangkat Daerah**		**100%**	**7,420,787,228**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	32 Org/Bulan	8,239,175,752	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	32 Org/Bulan	7,238,507,228	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Paser	3 Laporan	433,449,375	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Paser	3 Laporan	182,280,000	

Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**380,800,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tingkat Kepuasa Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**511,289,482**	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	4 Paket	75,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	4 Paket	256,789,482	Untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas kerja
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	4 Paket	58,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	4 Paket	54,000,000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	4 Paket	18,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	4 Paket	20,000,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Paser	1 Dok	2,800,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Paser	1 Dok	2,500,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	1 Laporan	167,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	1 Laporan	173,000,000	Untuk mendukung efektivitas koordinasi lintas sektor
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Paser	1 Dok	60,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Paser	1 Dok	5,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran**		**100%**	**16,550,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran**		**100%**	**41,000,000**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Kab. Paser	1 Laporan	750,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Kab. Paser	1 Laporan	500,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Paser	1 Laporan	3,800,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Paser	1 Laporan	33,000,000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	1 Laporan	12,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	1 Laporan	7,500,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan BMD**		**100%**	**25,000,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan BMD**		**100%**	**82,158,508**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Paser	2 unit	25,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Paser	2 unit	82,158,508	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	**Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan**		**60%**	**1,100,000,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan**		**60%**	**1,498,338,200**	

Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia**		**60%**	**1,100,000,000**	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia**		**60%**	**1,498,338,200**	Memperluas jangkauan wilayah penerima manfaat dan meningkatkan kualitas sarana prasarana
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia	Kab. Paser	6 Unit	1,100,000,000	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia	Kab. Paser	6 Unit	1,498,338,200	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				**2,400,000,000**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**				**5,600,153,250**	
	- Tingkat Ketersediaan		**98.5**	**1,151,000,000**		**- Tingkat Ketersediaan**		**98.5**	**2,222,317,000**	
	- Tingkat Konsumsi		**88**	**1,249,000,000**		**- Tingkat Konsumsi**		**88**	**3,377,836,250**	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan		100%	1,151,000,000	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan		100%	**2,222,317,000**	
Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	1 Laporan	22,000,000	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	1 Laporan	94,600,000	Adanya penambahan frekuensi dan jenis komoditas yang di pantau serta publikasi data harga pangan yang ter up date
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Kab. Paser	1 Laporan	850,000,000	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Kab. Paser	1 Laporan	1,158,002,000	Untuk mendukung kelompok tani dalam pengembangan pangan lokal
Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	Kab. Paser	1 Dok	99,000,000	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	Kab. Paser	1 Dok	158,600,000	
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Kab. Paser	1 Unit	180,000,000	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Kab. Paser	1 Unit	811,115,000	Untuk melengkapi sarana kebutuhan pada Outlet pangan
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Persentase potensi dan kebutuhan pangan lokal yang terakomodir dalam dokumen potensi pangan**		**100%**	**49,000,000**	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Persentase potensi dan kebutuhan pangan lokal yang terakomodir dalam dokumen potensi**		**100%**	**35,000,000**	
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Paser	1 Dok	49,000,000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Paser	1 Dok	35,000,000	
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Persentase capaian target konsumsi pangan berdasarkan AKG**		**99%**	**1,200,000,000**	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Persentase capaian target konsumsi pangan berdasarkan AKG**		**99%**	**3,342,836,250**	
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Paser	1 Dok	30,000,000	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Paser	1 Dok	245,652,250	Mendukung pencapaian target PPh Konsumsi

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Paser	1 Laporan	1,100,000,000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Paser	1 Laporan	2,988,584,000	Adanya usulan masyarakat melalui Musrenbang pengadaan dapur B2SA di Desa KPJ dan Suatang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Kab. Paser	1 Laporan	70,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Kab. Paser	1 Laporan	108,600,000	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**Persentase penanganan desa rawan pangan**		**16.66%**	**210,000,000**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase penanganan desa rawan pangan**		**16.66%**	**1,877,835,282**	
	Persentase penyaluran cadangan pangan		**10%**	**490,000,000**		**Persentase penyaluran cadangan pangan**		**10%**	**665,600,000**	
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	**Persentase desa rawan pangan yg terakomodir dalam peta FSVA**		**100%**	**75,000,000**	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Persentase desa rawan pangan yg terakomodir dalam peta FSVA**		**100%**	**75,000,000**	
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan	Kab. Paser	1 Dok	75,000,000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan	Kab. Paser	1 Dok	75,000,000	
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase penyediaan cadangan pangan**		**70%**	**625,000,000**	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase penyediaan cadangan pangan**		**70%**	**2,468,435,282**	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	1 Lap	135,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	1 Lap	245,000,000	
Pelaksanaaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah	Kab. Paser	1 Dok	490,000,000	Pelaksanaaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah	Kab. Paser	1 Dok	665,600,000	
					Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Kab. Paser	1 Dok	1,557,835,282	Bantuan pangan ke daerah rawan pangan dan lokus stunting
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji**		84%	**450,000,000**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji**		84%	**573,600,000**	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar**		**84%**	**450,000,000**	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar**		**84%**	**573,600,000**	
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Kab. Paser	1 Dok	155,000,000	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Kab. Paser	1 Dok	108,600,000	
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Paser	1 Dok	75,000,000	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Paser	1 Dok	270,000,000	

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	1 Dok	220,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	1 Dok	195,000,000	
				14,072,625,127					**18,723,929,650**	

Tana Paser, 25 September 2025

Kepala Dinas



Ir. TAHARUDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 196[illegible]31010

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan Tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada Tahun2025 yaitu melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. saran dan pendapat DPRD berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Pada Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 terdapat usulan teknokratik yang masuk ke Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser dan dijabarkan pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program Kegiatan (teknokratik) Tahun 2025
pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Besaran/ Volume	Catatan Penting
		Kec.	Desa			
1	2	3		4	5	6
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			- Tingkat Ketersediaan - Tingkat Konsumsi		
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			Persentase penyediaan dan penyaluran pangan		
	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Batu Sopang	Batu Kajang	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Paket	Bantuan Pangan (sembako) kepada Kios Pangan Desa / Kecamatan, BUMDES dan Koperasi
		Muara Komam	Batu Butok		1 Paket	
		Batu Engau	Saing Prupuk		1 Paket	
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			- Tingkat Ketersediaan - Tingkat Konsumsi		
	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			Persentase capaian target konsumsi pangan berdasarkan AKG		

	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tanah Grogot	Tanah Grogot	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal	1 Paket	Bantuan pemanfaatan pekarangan sekolah di SDN 014 Tanah Grogot
		Tanah Grogot	Tapis		1 Paket	Bantuan Alat Laboratorium Tehnologi Pasca Panen UMKT Tana Paser

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser tahun 2025 perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Renja Awal adalah 5 program, 12 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 18,723,929,650,00** dikarenakan efisiensi anggaran menjadi **Rp. 17,024,199,612,00** atau mengalami penurunan sebesar Rp. 1,699,730,037 (9,07%). Adanya penambahan anggaran pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan ditampilkan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Matriks Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Tahun 2025

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	APBD Murni Tahun 2025			Efisiensi Tahun 2025			APBD Perubahan Tahun 2025			Bertambah/ Berkurang		Ket
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.09.0.00.0.00.00.0000	**Dinas Ketahanan Pangan**													
2.09.0.00.0.00.00.0000	**Dinas Ketahanan Pangan**				**18,723,929,650**			**17,024,199,612**			**18,473,845,350**	**1,449,645,738**	**7.74**	
2.09.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya urusan pemerintah Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah dengan baik	Kab. Paser	100% 100%	8,508,402,918	Kab. Paser	100% 100%	8,530,413,582	Kab. Paser	100% 100%	9,059,703,355	529,289,773	6.22	
2.09.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penggganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Paser	100%	453,167,700	Kab. Paser	100%	264,422,842	Kab. Paser	100%	476,765,866	212,343,024	46.86	
2.09.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Paser	2	348,167,700	Kab. Paser	2	204,422,842	Kab. Paser	2	217,796,842	13,374,000	3.84	Terdapat kebutuhan untuk penyusunan renstra 2025-2029
2.09.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Paser	1	20,000,000	Kab. Paser	1	17,500,000	Kab. Paser	1	20,000,000	2,500,000	12.50	
2.09.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat	Kab. Paser	4	85,000,000	Kab. Paser	4	42,500,000	Kab. Paser	4	238,969,024	196,469,024	231.14	Pendukung Operasional kegiatan MBG
2.09.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Paser	100%	7,420,787,228	Kab. Paser	100%	7,397,238,228	Kab. Paser	100%	7,408,238,228	11,000,000	- 16.43	
2.09.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kab. Paser	14 Bulan	7,238,507,228	Kab. Paser	14 Bulan	7,238,507,228	Kab. Paser	14 Bulan	7,280,507,228	42,000,000	0.58	
2.09.001.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Paser	3 Laporan	182,280,000	Kab. Paser	3 Laporan	158,731,000	Kab. Paser	3 Laporan	127,731,000	(31,000,000)	- 17.01	
2.09.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Paser	100%	511,289,482	Kab. Paser	100%	766,650,197	Kab. Paser	100%	1,078,572,773	311,922,576	242.79	
2.09.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	4 paket	256,789,482	Kab. Paser	4 paket	627,764,356	Kab. Paser	4 paket	818,064,629	190,300,273	74.11	Pembelian printer 4 buah untuk mendukung pelayanan operasional kantor
2.09.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	4 Paket	54,000,000	Kab. Paser	4 Paket	32,432,631	Kab. Paser	4 Paket	85,730,434	53,297,803	98.70	Pembelian ATK dan makan minum rapat Sekretariat dan MBG
2.09.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	4 Paket	20,000,000	Kab. Paser	4 Paket	12,465,710	Kab. Paser	4 Paket	17,465,710	5,000,000	25.00	Penyediaaan bahan cetak
2.09.001.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Paser	1 Dokumen	2,500,000	Kab. Paser	1 Dokumen	2,487,500	Kab. Paser	1 Dokumen	2,700,000	212,500	8.50	
2.09.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	1 Laporan	173,000,000	Kab. Paser	1 Laporan	86,500,000	Kab. Paser	1 Laporan	149,612,000	63,112,000	36.48	Untuk mendukung efektivitas koordinasi lintas sektor
2.09.001.2.06.00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Paser	1 Dokumen	5,000,000	Kab. Paser	1 Dokumen	5,000,000	Kab. Paser	1 Dokumen	5,000,000	-	-	

2.09.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran	Kab. Paser	100%	41,000,000	Kab. Paser	100%	40,988,034	Kab. Paser	100%	40,988,034	-	-	
2.09.001.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Kab. Paser	1 Laporan	500,000	Kab. Paser	1 Laporan	500,000	Kab. Paser	1 Laporan	500,000	-	-	
2.09.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan'	Kab. Paser	1 Laporan	33,000,000	Kab. Paser	1 Laporan	33,000,000	Kab. Paser	1 Laporan	33,000,000	-	-	
2.09.001.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	1 Laporan	7,500,000	Kab. Paser	1 Laporan	7,488,034	Kab. Paser	1 Laporan	7,488,034	-	-	
2.09.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD	Kab. Paser	100%	82,158,508	Kab. Paser	100%	61,114,281	Kab. Paser	100%	55,138,454	(5,975,827)	- 7.27	
2.09.001.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Paser	2 Unit	82,158,508	Kab. Paser	2 Unit	61,114,281	Kab. Paser	2 Unit	55,138,454	(5,975,827)	- 7.27	
2.09.002	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	Kab. Paser	60%	1,498,338,200	Kab. Paser	60%	1,422,467,787	Kab. Paser	60%	1,393,226,414	- 29,241,373	(2)	
2.09.002.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	Kab. Paser	60%	1,498,338,200	Kab. Paser	6 Unit	1,422,467,787	Kab. Paser	6 Unit	1,393,226,414	(29,241,373)	- 1.95	
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Kab. Paser	6 Unit	1,498,338,200	Kab. Paser	6 Unit	1,422,467,787	Kab. Paser	6 Unit	1,393,226,414	(29,241,373)	- 1.95	
2.09.003	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat ketersediaan pangan	Kab. Paser	98,17	5,600,153,250	Kab. Paser	98,17	4,481,550,263	Kab. Paser	98,17	5,093,929,264	612,379,001	11	
		Tingkat konsumsi pangan		91,7			91,7			91,7				
2.09.003.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyediaan dan penyaluran	Kab. Paser	100 persen	2,222,317,000	Kab. Paser	100 persen	1,900,957,915	Kab. Paser	100 persen	2,438,311,915	537,354,000	47.63	
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Kab. Paser	1 Dokumen	1,158,002,000	Kab. Paser	1 Dokumen	975,886,536	Kab. Paser	1 Dokumen	975,886,536	-	-	
2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Kab. Paser	1 Unit	811,115,000	Kab. Paser	1 Laporan	735,896,379	Kab. Paser	1 Laporan	1,297,296,379	561,400,000	69.21	Bantuan pangan (sembako) kepada kios pangan Desa/Kecamatan, Bumdes dan Koperasi sebanyak 3 paket, Perencanaan pembangunan Outlet Pangan di 2 Kecamatan (Batu Engau dan Longkali)
2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	Kab. Paser	1 Laporan	158,600,000	Kab. Paser	1 Laporan	110,475,000	Kab. Paser	1 Laporan	101,475,000	(9,000,000)	- 5.67	
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	1 Laporan	94,600,000	Kab. Paser	1 Unit	78,700,000	Kab. Paser	1 Unit	63,654,000	(15,046,000)	- 15.90	
2.09.003.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data potensi dan kebutuhan pangan lokal	Kab. Paser	1 Dokumen	35,000,000	Kab. Paser	1 Dokumen	17,500,001	Kab. Paser	1 Dokumen	17,500,001	-	-	
2.09.003.2.02.002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Paser	1 dokumen	35,000,000	Kab. Paser	1 dokumen	17,500,001	Kab. Paser	1 dokumen	17,500,001	-	-	

2.09.003.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase capaian target konsumsi pangan berdasarkan AKG	Kab. Paser	98	3,342,836,250	Kab. Paser	98	2,563,092,347	Kab. Paser	98	2,638,117,348	26,625,000	- 8.84	
2.09.003.2.04.001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Paser	1 dokumen	245,652,250	Kab. Paser	1 dokumen	140,290,127	Kab. Paser	1 dokumen	166,915,127	26,625,000	10.84	Mendukung pencapaian target PPh Konsumsi
2.09.003.2.04.002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Paser	1 Laporan	2,988,584,000	Kab. Paser	1 Laporan	2,359,559,963	Kab. Paser	1 Laporan	2,431,959,964	72,400,001	2.42	Mendukung operasional TOT B2SA, Festival Cipta Menu, Promosi Penganekaragaman
2.09.003.2.04.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Kab. Paser	1 Laporan	108,600,000	Kab. Paser	1 Laporan	63,242,257	Kab. Paser	1 Laporan	39,242,257	(24,000,000)	- 22.10	
2.09.004	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan desa rawan pangan Persentase penyaluran cadangan pangan	Kab. Paser	17.36% 10%	2,543,435,282	Kab. Paser	17.36% 10%	2,202,217,818	Kab. Paser	17.36% 10%	2,438,736,317	236,518,499	64.16	
2.09.004.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase desa rawan pangan yang terakomodir dalam peta FSVA	Kab. Paser	1 Dokumen	75,000,000	Kab. Paser	1 Dokumen	48,000,001	Kab. Paser	1 Dokumen	75,000,000	26,999,999	36.00	
2.09.004.2.01.001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Kab. Paser	1 dokumen	75,000,000	Kab. Paser	1 dokumen	48,000,001	Kab. Paser	1 dokumen	75,000,000	26,999,999	36.00	Pendukung kegiatan penyusunan peta FSVA
2.09.004.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan dan penyaluran cadangan pangan	Kab. Paser	8 desa	2,468,435,282	Kab. Paser	8 Kev.	2,154,217,817	Kab. Paser	8 Kev.	2,363,736,317	209,518,500	31.17	
2.09.04.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan gizi Kabupaten/Kota	Kab. Paser	1 Laporan	245,000,000	Kab. Paser	1 dokumen	160,106,551	Kab. Paser	1 dokumen	206,606,551	46,500,000	18.98	Pelaksanaan kegiatan Gerakan selamatkan Pangan (GSP) di Sekolah
2.09.04.2.02.0003	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1(Satu) Daerah	Kab. Paser	1 dokumen	665,600,000	Kab. Paser	1 Laporan	616,581,500	Kab. Paser	1 Laporan	636,600,000	20,018,500	3.01	Pengadaan cadangan pangan
2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan & Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Kab. Paser	1 Laporan	1,557,835,282	Kab. Paser	1 dokumen	1,377,529,766	Kab. Paser	1 dokumen	1,520,529,766	143,000,000	9.18	Bantuan beraas fortivit untuk Desa Rawan Pangan dan Lokus Stunting
2.09.005	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Kab. Paser	86%	573,600,000	Kab. Paser	86%	387,550,162	Kab. Paser	86%	488,250,000	100,699,838	49.26	
2.09.005.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar sesuai mutu pangan	Kab. Paser	86%	573,600,000	Kab. Paser	86%	387,550,162	Kab. Paser	86%	488,250,000	100,699,838	49.26	
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Paser	1 dokumen	270,000,000	Kab. Paser	1 dokumen	167,250,000	Kab. Paser	1 dokumen	208,650,000	41,400,000	15.33	Pendampingan dan monitoring ke pelaku usaha
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	1 dokumen	195,000,000	Kab. Paser	1 dokumen	144,325,162	Kab. Paser	1 dokumen	195,000,000	50,674,838	25.99	Pembelian rapid test 2 paket
2.09.05.2.01.0009	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Paser	1 dokumen	108,600,000	Kab. Paser	1 dokumen	75,975,000	Kab. Paser	1 dokumen	84,600,000	8,625,000	7.94	Operasional petugas pengawas pangan

Tana Paser, 25 Septembert 2025

Kepala Dinas



PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2025, masih diperlukan upaya-upaya peningkatan lebih untuk pencapaian target pada tahun 2025 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Tahun 2022-2026 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Paser serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2025.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan antar OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Paser. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Paser.

Pemantauan dan evaluasi perlu dilakukan agar pelaksanaan program di masing-masing bidang dapat berjalan, sehingga apabila terjadi perubahan terkait ketersediaan anggaran dan lainnya bisa segera disesuaikan sesuai dengan prioritas pembangunan dan kesiapan bidang-bidang dalam melaksanakan program dan kegiatan, sehingga Renja Perubahan Tahun 2025 dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan aturan yang berlaku.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sehingga menghasilkan sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pembangunan Ketahanan Pangan. Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan

sangat kami harapkan agar dalam penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang akan lebih baik.

Tana Paser, 25 September 2025

Kepala Dinas,



Ir. TAHARUDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 196509051994031010

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KETAHANAN PANGAN
Komplek Perkantoran Jl. Kesuma Bangsa KM.5 Gedung D Lt 2 Kav.1
Telp. (0543) 5220951 Fax (0543) 5220951 Kode Pos. 76211
TANA PASER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PASER
NOMOR : 800/ 21 /DKP/2023

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASER
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PASER

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang diartikan sebagai Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun ;

b. bahwa untuk maksud butir a konsideran ini dan demi lebih efektif dan terarahnya pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah (PD) Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026.

6. Peraturan Bupati Paser Nomor 19 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susuanan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (PD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) adalah :
1. Membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
2. Mengevaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun lalu dan Capaian Renstra;
3. Menyiapkan Dokumen Pendukung;
4. Melakukan Koreksi dan Perbaikan terhadap draft RENJA PD dan finalisasi RENJA PD Tahun 2025;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi pada instansi terkait.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (PD) harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : Desember 2023

Kepala Dinas,

Ir. TAHARUDIN
Pembina Tk.I/IV b
NIP. 19650905 199403 1 010

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser
Nomor : 800/ /DKP/2023
Tanggal : Desember 2023
Tentang : Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (PD) Dinas Ketahanan Kabupaten Paser Tahun 2025

Daftar Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Tahun 2025

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Sekretaris	Ketua Pelaksana
3.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Staf Subbag Perencanaan	Anggota
5.	Kepala Bidang Penanganan Kerwananan Pangan dan Gizi	Anggota
6.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabiltas Pangan	Anggota
7.	Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota
8.	Kepala Bidang Keamanan Pangan	Anggota

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : Desember 2023

Kepala Dinas,

Ir. TAHARUDIN
Pembina Tk.I/IV b
NIP. 19650905 199403 1 010



RENCANA KERJA PERUBAHAN

TA. 2025

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER

Bapenda
KABUPATEN PASER

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Basuki Rahmat No. 01 Tanah Grogot, Kab. Paser, Kode Pos 76211
Telp.(0543) 23816,FAX (0543) 23816, Website https://bapenda.paserkab.go.id
(Email) bapendakab.paser@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR : 105/BAPENDA-UM/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN DOKUMEN RENCANA KERJA 2025 DAN
RENCANA KERJA PERUBAHAN 2025
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASER

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASER,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Dokumen Renja dan Dokumen Renja Perubahan SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser, perlu dibentuk Tim Penyusunan Dokumen Renja dan Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser;
b. bahwa penetapan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/05/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Umum Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 2;

9. Peraturan Bupati Paser Nomor 27 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Renja dan Dokumen Renja Perubahan SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana tersebut pada diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membuat dan menyusun Dokumen Renja dan Dokumen Renja Perubahan SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser untuk setiap Triwulan
2. Mempertanggung jawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan pada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser;
3. Mengawasi kegiatan pembangunan sehingga anggaran Perangkat Daerah dapat direalisasikan secara optimal.
4. Memfasilitasi penyelesaian hambatan-hambatan realisasi anggaran.
5. Merumuskan solusi terhadap hambatan-hambatan realisasi anggaran.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tana Paser
pada tanggal : 8 Januari 2024

Kepala
Badan Pendapatan Daerah

Ali Nour Muhamad

Tembusan:
1. Kepala Bappeda Kabupaten Paser;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BAPENDA KABUPATEN PASER
NOMOR :105/BAPENDA-UM/I/2024
TANGGAL : 8 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN LAPORAN RENCANA KERJA 2025 DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASER

No.	NAMA ANGGOTA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ali Nour Muhamad, SP., MM	PENANGGUNG JAWAB
2.	Ibrahim, S.Sos, MM	KETUA
3.	Hj. Elva Ara Vera, SE	WAKIL KETUA
4.	Erlisa, SE	SEKRETARIS
5.	Abdul Karim, SE	SEKRETARIS
6.	Elfrida Veronica, SE	ANGGOTA
7.	Tri Gunawan, ST, MM	ANGGOTA
8.	Nani Mariani, SE	ANGGOTA
9.	Widiya Ratna Sari,S.Sos	ANGGOTA
10.	Diah Restu Setiawaty, ST	SEKRETARIAT
11.	Maudina Yustika, SE	SEKRETARIAT
12.	Selvira Fairunnisa, SE	SEKRETARIAT
13.	Edi Sofyansyah, SE	SEKRETARIAT

Kepala
Badan Pendapatan Daerah

Ali Nour Muhamad

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 2

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Triwulan II 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 45

2.3. Faktor Pendorong dan Penghambat 48

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……. 49

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA KAB.PASER

3.1. Tujuan dan Sasaran 50

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD 51

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan 66

BAB IV PENUTUP

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan 82

4.2. Rencana Tindak Lanjut 83

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 100.3.3.2 /KEP-741/2025
TANGGAL 22 AGUSTUS 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus

digunakan untuk tahun berjalan;

c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;

d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Pendapatan Daerah hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;

4. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 27 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta

terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah, keterkaitan antara Renja Badan Pendapatan Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Badan Pendapatan Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pendapatan Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan III tahun 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan III baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 yang disertai perubahan target

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja s.d Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Secara detail pelaksanaan untuk program-program Bapenda Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Realisasi penyerapan dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.800.000,- atau 7,73% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 23.286.954,- .

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 57.512.400,- atau 34,61% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 166.169.000,-. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu Tersusunnya dokumen RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025.

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Realisasi penyerapan dana masih belum ada pada kegiatan ini atau masih 0% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.275.000,- .

d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi penyerapan dana pada kegiatan ini sebesar Rp. 44.101.382,- atau masih 45,83% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 96.218.048,- .

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 5.805.566.310,- atau 32,52% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 17.851.566.736,-. Tersedianya gaji dan tunjangan ASN adalah hasil dari capaian sub kegiatan ini.

b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 79.224.712,- atau 35,37% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 224.004.136,-. Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini yaitu Tersedianya Laporan keuangan SKPD serta dokumen pelaksanaan akutansi SKPD.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Realisasi penyerapan dana masih belum ada pada kegiatan ini atau masih 0% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 279.884.000,- .

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 47.772.000,- atau 24,13% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 186.816.734,-. Hasil yang akan dicapai tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dan meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 126.385.868,- atau 48,90% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 258.444.188,-. Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini yaitu Tersedianya ATK, sarana kebersihan dan makanan dan minuman rapat.

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 58.413.972,- atau 79,77% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 73.228.832,-. Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini tersedianya barang cetak seperti Amplop, Map, SPPT dan STTS, Fotocopy dan Penjilidan.

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.1.125.000,- atau 90,26% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 1.246.345,-. Hasil yang telah dicapai dari sub kegiatan ini tersedianya koran dan bahan bacaan perundang-undangan.

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 54.236.424,- atau 25,16% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 215.566.000,- hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini yaitu terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di dalam maupun luar daerah.

f. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 91.784.800,- atau 44,83% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 204.741.000,- hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini yaitu Terlaksananya Penatausahaan Arsip dinamis yang baik dan benar pada SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 340.000,- atau 97,15% Dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 349.980,-. Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini yaitu tersedianya Materai untuk kegiatan kantor.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 59.056.331,- atau 35,92% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 164.400.000,- Untuk keperluan belanja jasa kantor meliputi belanja telepon , belanja air dan belanja listrik.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 18.379.510,- atau 24,14% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 76.144.300,-. Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini tersedianya mobil dinas yang dipelihara dan surat perizinan kendaraan dinas.

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 15.350.000,- atau 73,05% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 21.013.245,-. Hasil dicapai yaitu perlengkapan gedung kantor yang terpelihara serta tercapainya pemeliharaan/rehab gedung kantor.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 16.772.400,- atau 24,56% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 68.300.000,-. Hasil yang akan dicapai tersedianya Dokumen Perencanaan dan pengembangan pendapatan.

b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 41.977.642,- atau 33,63% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 124.812.000,-. Hasil yang dicapai masih setengah dari target dikarenakan kegiatan dilaksanakan pada bulan desember.

c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 72.034.306,- atau 30,88% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 233.254.508,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi pajak daerah meliputi kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Paser.

d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana masih belum ada pada kegiatan ini atau masih 0% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 160.000.000,- .

e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 50.155.700,- atau 31,41% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 159.676.912,- Pada sub kegiatan ini didapatkan hasil berupa jumlah objek pajak yang didata dalam bentuk satuan dokumen.

f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 57.286.200,- atau 15,67% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 365.668.947,-. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah tersedianya dokumen penerimaan pajak daerah.

g. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 173.693.200,- atau 40,96% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 424.106.852,-. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu tersedianya dokumen jumlah PBB dan BPHTB yang telah diverifikasi.

g. Penetapan Wajib Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 32.136.000,- atau 35,55% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 90.400.000,-. Hasil yang dicapai yaitu Tersedianya dokumen wajib pajak yang telah ditetapkan.

h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 29.512.000,- atau 25,24% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 116.948.000,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen tentang jumlah pelayanan dan konsultasi pajak yang diterima.

i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 35.512.400,- atau 23,13% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 153.512.660,- tersedianya dokumen berisi jumlah data hasil pemeriksaan pajak daerah adalah capaian yang terdapat pada sub kegiatan ini.

j. Penagihan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 101.685.700,- atau 37,12% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 273.932.000,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan adalah tunggakan pajak daerah yang telah diselesaikan.

k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 11.119.500,- atau 20,51% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 54.204.000,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu kebaratan pajak daerah telah diselesaikan.

l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 39.233.400,- atau 14,83% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 264.549.000,- Tersedianya Dokumen Laporan Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah.

Hasil evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1.

Evaluasi Renja s.d. Triwulan II Tahun 2025

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II								
3	4	5			6		7		8				12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	80		**Rp 67.066.190.942**	76	**Rp 38.309.039.318**	76	**Rp 20.378.004.106**	**89,96**	**Rp 2.378.179.300**	**79,71**	**Rp 4.082.869.409**	84,84	**Rp 6.461.048.709**	160,84	**Rp 44.770.088.027**	**201%**	**66,76%**	Badan Pendapatan

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
Daerah Kabupaten/Kota																		Daerah

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi**	**30**	**Dokumen**	**Rp 1.859.455.836**	**24**	**Rp 1.325.400.930**	**6**	**Rp 415.991.954**	**1**	**Rp 42.029.800**	**1**	**Rp 61.383.982**	**2**	**Rp 103.413.782**	**26,00**	**Rp 1.428.814.712**	**87%**	**76,84%**	**Badan Pendapatan Daerah**

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	Rp 111.926.051	8	Rp 112.914.700	2	Rp 31.212.954	0	Rp -	0	Rp 1.800.000	0	**Rp 1.800.000**	8,00	Rp 114.714.700	80 %	**102,49%**	Badan Pendapatan Daerah

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokume	5	Dokumen	Rp 761.456.457	4	Rp 736.063.059	1	Rp 189.278.000	1	Rp 42.029.800	0	Rp 15.482.600	1	**Rp 57.512.400**	5,00	Rp 793.575.459	100%	**104,22%**	Badan Pendapatan Daerah

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
	n RKA-SKPD																	

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5	Dokumen	Rp 344.991.195	4	Rp 221.618.338	1	Rp 5.275.000	0	Rp -	0	Rp -	0	**Rp -**	4,00	Rp 221.618.338	80 %	**64,24 %**	Badan Pendapatan Daerah

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
	Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Dokumen	Rp 641.082.133	8	Rp 254.804.833	2	Rp 190.226.000	0	Rp -	1	Rp 44.101.382	1	**Rp 44.101.382**	9,00	Rp 298.906.215	90 %	**46,63 %**	Badan Pendapatan Daerah
Administrasi Keuangan Perangk	**Persentase Peningkatan Administrasi**	**500 %**	**Persen**	**Rp 60.564.289.841**	**400%**	**Rp 31.358.969.535**	**100 %**	**Rp 18.111.675.628**	**91 %**	**Rp 1.997.003.269**	**77,60 %**	**Rp 3.887.787.753**	**84,08 %**	**Rp 5.884.791.022**	**4,84**	**Rp 37.243.760.557**	**97 %**	**61,49 %**	**Badan Pendapatan**

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
at Daerah	**Keuangan**																	**Daerah**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3080	Orang	Rp 58.976.565.395	2370	Rp 30.240.248.732	616	Rp 17.851.566.736	125	Rp 1.952.082.070	255	Rp 3.853.484.240	380	**Rp 5.805.566.310**	2750,00	Rp 36.045.815.042	89%	**61,12%**	Badan Pendapatan Daerah

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	Dokumen	Rp 1.587.724.446	4	Rp 1.118.720.803	1	Rp 260.108.892	1	Rp 44.921.199	0	Rp 34.303.513	1	**Rp 79.224.712**	5,00	Rp 1.197.945.515	100%	**75,45 %**	Badan Pendapatan Daerah
Administrasi Kepegawaian	**Persentase Peningkatan**	**500 %**	**Persen**	**Rp 290.693.801**	**100%**	**Rp 824.459.066**	**100 %**	**Rp 400.000.000**	**91,14 %**		**82,20 %**	**Rp -**	**86,67 %**	**Rp -**	**1,87**	**Rp 824.459.066**	**37 %**	**283,62%**	**Badan Pendap**

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
Perangkat Daerah	**Administrasi Kepegawaian**																	**atan Daerah**
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perunda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	60	Orang	Rp 290.693.801	78	Rp 824.459.066	32	Rp 400.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	**Rp -**	78,00	Rp 824.459.066	130%	**283,62%**	Badan Pendapatan Daerah

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
ng - undangan	Peraturan Perundang-Undangan																	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Administr**	**500 %**	**Persen**	**Rp 3.287.662.023**	**400%**	**Rp 4.199.387.295**	**100 %**	**Rp 1.188.428.999**	**87,37 %**	**Rp 292.257.477**	**79.50 %**	**Rp 87.460.587**	**87,37 %**	**Rp 379.718.064**	**4,87**	**Rp 4.579.105.359**	**97 %**	**139,28%**	**Badan Pendapatan**

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
	asi Umum																	**Daerah**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	75	Paket	Rp 777.708.934	46	Rp 980.344.961	15	Rp 197.989.873	3	Rp 47.772.000	0	Rp -	3	**Rp 47.772.000**	49,00	Rp 1.028.116.961	65 %	**132,20%**	Badan Pendapatan Daerah

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
	disediakan																	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	50	Paket	Rp 568.414.446	92	Rp 733.274.750	10	Rp 271.433.827	8	Rp 91.153.752	2	Rp 35.232.116	10	**Rp 126.385.868**	102,00	Rp 859.660.618	204%	**151,24%**	Badan Pendapatan Daerah

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
	Disediakan																	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	100	Paket	Rp 535.270.297	33	Rp 579.419.600	20	Rp 73.228.832	4	Rp 48.104.701	4	Rp 10.309.271	8	**Rp 58.413.972**	41,00	Rp 637.833.572	41%	**119,16%**	Badan Pendapatan Daerah

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
	Disediakan																	

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1825	Exampler	Rp 6.314.866	1745	Rp 6.825.000	365	Rp 1.246.345	180	Rp 675.000	167	Rp 450.000	347	**Rp 1.125.000**	2092,00	Rp 7.950.000	115%	**125,89%**	Badan Pendapatan Daerah

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Laporan	Rp 763.278.172	123	Rp 660.917.055	35	Rp 398.130.122	2	Rp 39.174.224	24	Rp 15.062.200	26	**Rp 54.236.424**	149,00	Rp 715.153.479	75%	**93,69%**	Badan Pendapatan Daerah
Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penataus	9000	Dokumen	Rp 636.675.308	9729	Rp 1.238.605.929	1850	Rp 246.400.000	283	Rp 65.377.800	490	Rp 26.407.000	773	**Rp 91.784.800**	10502,00	Rp 1.330.390.729	117%	**208,96%**	Badan Pendap

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
pada SKPD	ahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	atan Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pengadministrasian Umum Berjalan dengan Baik**	**500 %**	**Persen**	**Rp 882.186.118**	**400%**	**Rp 362.379.330**	**100 %**	**Rp 164.749.980**	**90 %**	**Rp 32.563.754**	**79 %**	**Rp 26.832.577**	**84,68 %**	**Rp 59.396.331**	**4,85**	**Rp 421.775.661**	**97 %**	**47,81 %**	**Badan Pendapatan Daerah**

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150	Lembar	Rp 3.444.683	154	Rp 1.363.600	60	Rp 349.980	34	Rp 340.000	0	Rp -	34	**Rp 340.000**	188,00	Rp 1.703.600	125 %	**49,46 %**	Badan Pendapatan Daerah

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	Rp 514.934.789	37	Rp 361.015.730	12	Rp 164.400.000	3	Rp 32.223.754	3	Rp 26.832.577	6	**Rp 59.056.331**	43,00	Rp 420.072.061	72 %	**81,58 %**	Badan Pendapatan Daerah

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Berjalan dengan baik**	**50 %**	**Persen**	**Rp 181.903.323**	**40 0%**	**Rp 238.443.162**	**100 %**	**Rp 97.157.545**	**89 %**	**Rp 14.325.000**	**76,28 %**	**Rp 19.404.510**	**82,58 %**	**Rp 33.729.510**	**4,83**	**Rp 272.172.672**	**97 %**	**149,62%**	**Badan Pendapatan Daerah**

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharaa dan dibayark	25	Unit	Rp 136.935.013	28	Rp 103.903.162	5	Rp 76.144.300	1	Rp 1.650.000	1	Rp 16.729.510	2	**Rp 18.379.510**	30,00	Rp 122.282.672	120 %	**89,30 %**	Badan Pendapatan Daerah

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
Operasional atau Lapangan	an Pajaknya																	

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguna	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang di Pelihara atau Rehabilit	5	Paket	Rp 44.968.310	3	Rp 134.540.000	1	Rp 21.013.245	1	Rp 12.675.000	0	Rp 2.675.000	1	**Rp 15.350.000**	4,00	Rp 149.890.000	80 %	**33 3,32%**	Badan Pendapatan Daerah

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
n Lainnya	asi yang Dipeliharaa/Direhabilitasi																	

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Rasio PAD terhadap APBD**	**8,50 %**	**Persen**	**Rp 14.250.264.780**	**14 %**	**Rp 10.446.989.212**	**7,25 %**	Rp 3.282.152.992	**9,52 %**	**Rp 434.718.148**	**7,33 %**	**Rp 226.400.300**	**9,52 %**	**Rp 661.118.448**	0,24	**Rp 11.108.107.660**	**27 %**	**77,95 %**	Badan Pendapatan Daerah

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Persentase Peningkatan PAD**	**15 %**	**Persen**	**Rp 14.250.264.780**	**116,12%**	**Rp 10.446.989.212**	**71,49 %**	**Rp 3.282.152.992**	**7,80 %**	**Rp 434.718.148**	**-44,96 %**	**Rp 226.400.300**	**7,80 %**	**Rp 661.118.448**	**1,24**	**Rp 11.108.107.660**	**826 %**	**77,95 %**	**Badan Pendapatan Daerah**
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan	5	Dokumen	Rp 961.851.925	4	Rp 661.422.751	1	Rp 93.600.000	0,25	Rp 14.522.400	0,25	Rp 2.250.000	0,50	**Rp 16.772.400**	4,50	Rp 678.195.151	90 %	**70,51 %**	Badan Pendapatan

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
	Pajak Daerah																	Daerah
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusu	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijaka	5	Laporan	Rp 877.929.140	4	Rp 697.422.580	1	Rp 172.236.000	0,25	Rp 35.955.242	0,25	Rp 6.022.400	0,50	**Rp 41.977.642**	4,50	Rp 739.400.222	90%	**84,22%**	Badan Pendapatan Daerah

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
nan Kebijakan Pajak Daerah	n Pajak Daerah																	

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5	Dokumen	Rp 898.049.235	4	Rp 1.017.250.482	1	Rp 305.000.000	0,25	Rp 43.779.206	0,25	Rp 28.255.100	0,50	**Rp 72.034.306**	4,50	Rp 1.089.284.788	90%	**121,29%**	Badan Pendapatan Daerah

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II								
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5	Sarana dan Prasarana	Rp 588.295.080			1	Rp 160.000.000	0	Rp -	0		0,00	**Rp -**	0,00	Rp -	0 %	**0,00%**	Badan Pendapatan Daerah

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan	5	Laporan	Rp 807.769.125	4	Rp 579.678.636	1	Rp 222.753.825	0,25	Rp 30.950.000	0,25	Rp 19.205.700	0,50	**Rp 50.155.700**	4,50	Rp 629.834.336	90 %	**77,97 %**	Badan Pendapatan Daerah

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
	Wajib Pajak Daerah																	

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	5	Laporan	Rp 943.953.335	4	Rp 708.520.826	1	Rp 401.165.667	0,25	Rp 26.104.800	0,25	Rp 31.181.400	0,50	**Rp 57.286.200**	4,50	Rp 765.807.026	90%	**81,13 %**	Badan Pendapatan Daerah

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	98000	Objek Pajak PBB	Rp 1.480.353.340	10449	Rp 1.657.729.670	97000	Rp 550.000.000	2.167	Rp 95.974.800	2732	Rp 77.718.400	4899	Rp 173.693.200	109848,00	Rp 765.807.026	112%	**51,73 %**	Badan Pendapatan Daerah
		70000	Objek Pajak BPHTB		9218		6000		1123		943		2066		11284,00		161%		Badan Pendapatan Daerah
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	5	Dokumen	Rp 1.174.561.320	4	Rp 770.340.315	1	Rp 147.200.000	0,25	Rp 21.968.000	0,25	Rp 10.168.000	0,50	Rp 32.136.000	4,50	Rp 802.476.315	90%	**68,32 %**	Badan Pendapatan Daerah

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	275	Layanan	Rp 1.699.000.000	220	Rp 1.118.140.512	55	Rp 166.436.000	23	Rp 23.456.000	10	Rp 6.056.000	33	Rp 29.512.000	253,00	Rp 1.147.652.512	92 %	**67,55 %**	Badan Pendapatan Daerah

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	5	Dokumen	Rp 983.158.635	4	Rp 637.412.596	1	Rp 275.525.500	0,25	Rp 21.500.000	0,25	Rp 14.012.400	0,50	Rp 35.512.400	4,50	Rp 672.924.996	90%	**68,45%**	Badan Pendapatan Daerah

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	5	Dokumen	Rp 1.554.529.075	4	Rp 1.308.413.000	1	Rp 375.000.000	0,25	Rp 79.209.800	0,25	Rp 22.475.900	0,50	Rp 101.685.700	4,50	Rp 1.410.098.700	90 %	**90,71 %**	Badan Pendapatan Daerah
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian	5	Dokumen	Rp 1.185.340.235	4	Rp 616.701.280	1	Rp 90.036.000	0,25	Rp 6.364.500	0,25	Rp 4.755.000	0,50	Rp 11.119.500	4,50	Rp 627.820.780	90 %	**52,97 %**	Badan Pendapatan

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
	Keberatan Pajak Daerah																	Daerah
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawa	5	Dokumen	Rp 1.095.474.335	4	Rp 673.956.564	1	Rp 323.200.000	0,25	Rp 34.933.400	0,25	Rp 4.300.000	0,50	Rp 39.233.400	4,50	Rp 713.189.964	90 %	**65,10 %**	Badan Pendapatan Daerah

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II							
	san Pajak Daerah																	

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2025 Triwulan II dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga Triwulan II adalah 31,88%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.122.167.157,00 (*Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*) dari total pagu Renja sebesar Rp. 23.337.718.083,- (*Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah*).

2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah sebesar 34,48% dengan predikat kinerja Sangat Rendah.

3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 0 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 4 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 0 indikator capaian kinerja 0%-50% = 26 indikator

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok

a. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang pendapatan daerah;
b. Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan dibidang pendapatan daerah;
c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;
d. Melaksanakan kegiatan lain dibidang pendapatan daerah yang ditugaskan oleh Bupati.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser mempunyai fungsi:

a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional dibidang Pendapatan, Perimbangan dan Peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah.
b. Penetapan kebijakan dibidang Pendapatan Daerah;
c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan yang meliputi Pendapatan, Perimbangan dan Peningkatan Pendapatan daerah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Upaya Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

a. Persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah
b. Persentase tingkat pertumbuhan retribusi daerah
c. Persentase pertumbuhan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
d. Persentase pertumbuhan lain-lain PAD yang sah
e. Indeks Kepuasan Masyarakat
f. Evaluasi SAKIP dari APIP
g. Temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK RI dan APIP Eksternal

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap pencapaian target kinerja Badan Pendapatan Daerah terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah
sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026		
Meningkatkan Pendapatan Daerah dari Sektor PAD	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	80%	85%	90%	95%	100%		
Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah	Persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah	12%	13%	63%	15%	16%		
	Persentase tingkat pertumbuhan retribusi daerah	4%	5%	92%	7%	8%		
	Persentase pertumbuhan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	4%	5%	100%	7%	8%		
	Persentase pertumbuhan lain-lain PAD yang sah	8%	9%	48,67%	11%	12%		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81	79	83	84		
Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Responsif dan Tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	80%	81%	82%	83%	84%		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Evaluasi SAKIP dari APIP	B	B	BB	BB	BB		

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Periode Maret 2025 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula hambatan yang dialami diantaranya:

1. Minimnya Sarana penunjang kegiatan Sebagian Wajib Pajak enggan melakukam pembayaran secara Online atau tidak memilki Aplikasi
2. Jaringan Internet yang sering mengalami gangguan, yang mengakibatkan tidak bisa diaksesnya Aplikasi
3. Keterlambatan di dalam pengumpulan Realisasi Kinerja

Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan yang akan datang diantaranya:

2.3.1. Memotivasi SDM yang ada untuk terus meningkatkan kinerja dalam Upaya pencapaian kinerja yang lebih baik dan mencapai realisasi target dengan anggaran yang sudah tersedia serta memaksimalkan anggaran sebaik mungkin dalam proses kegiatan yang dilakukan.

2.3.2. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dengan memperbarui cara kerja, misalnya pelaksanaan instruksi dan pengawasan serta evaluasi intern melalui daring (WA, email) dan permintaan data maupun penerbitan laporan dalam bentuk softcopy.

2.3.3. Memprioritaskan alokasi anggaran untuk kegiatan/sub kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan lainnya sehingga adanya kelengkapan dan keterkaitan antar kegiatan dalam instruksi pelaksanaan maupun evaluasinya.

2.3.4. Tetap dilaksanakan pengawasan yang efektif secara berjenjang guna memperlancar proses kegiatan

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2025.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. saran dan pendapat DPRD berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Tidak semua aspirasi tersebut dapat diakomodir dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025, sehingga sebagian diusulkan dalam Perubahan Renja Tahun 2025. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat yang direncanakan pada Perubahan Renja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Pada Perubahan Rancangan RKPD 2025 tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Badan Pendapatan Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Paser.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendapatan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025
Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Sektor PAD	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah		90%	90%
Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah	Persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah	∑ Penerimaan Pjk Daerah (tahun n) - ∑ Penerimaan Pajak Daerah(tahun n-1) / ∑ Penerimaan Pjk Daerah (tahun n-1) x 100%	15%	1,5%
	Persentase tingkat pertumbuhan retribusi daerah	∑ Penerimaan Retribusi (tahun n) - ∑ Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah (tahun -n1) / ∑ Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah (tahun -n1) x 100%	7%	6%

	Persentase pertumbuhan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (By. Simda Keuangan)	7%	3%
	Persentase pertumbuhan lain-lain PAD yang sah	∑ Pembayaran WP Aset Daerah : ∑ WP Aset Daerah x 100%	11%	2%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penilaian berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017	81	82
Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Responsif dan Tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Penilaian berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017	82	83
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Evaluasi SAKIP dari APIP	Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja	72	72,3

Memperhatikan tabel 3.1. diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 mengalami perubahan. Alasan perubahan pada target tujuan dan sasaran didasari oleh realisasi capaian sampai dengan Triwulan II. Sedangkan untuk anggaran belanja Tahun 2025 juga mengalami perubahan hal ini dikarenakan perubahan anggaran diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 yaitu “PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT” yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Penguatan Ekonomi Daerah.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah mendukung pencapaian sasaran ke-1 yaitu “Meningkatnya penerimaan pajak daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Badan Pendapatan Daerah telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.2.
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
5.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Paser	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76	19.848.482.805,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Paser	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76	20.419.832.726,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	6 Dokumen	290.949.002,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	6 Dokumen	222.778.048,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 23.286.954	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 56.391.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 166.169.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 70.169.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 5.275.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp -	
	Evaluasi Kinerja	Kab.	Jumlah Laporan Evaluasi	2 Laporan	Rp 96.218.048	Evaluasi Kinerja	Kab.	Jumlah Laporan Evaluasi	2 Laporan	Rp 96.218.048	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
	Perangkat Daerah	**Paser**	Kinerja Perangkat Daerah			Perangkat Daerah	**Paser**	Kinerja Perangkat Daerah			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Paser**	**Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan**	**100%**	**18.075.700.472,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan**	**100%**	**17.578.764.352,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Kab. Paser**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1372 Orang	Rp 17.851.566.736	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Kab. Paser**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	890	Rp 17.401.566.736	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**Kab. Paser**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Rp 224.133.736,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**Kab. Paser**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Rp 177.197.616,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Paser**	**Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian**	**100%**	**279.884.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian**	**100%**	**24.451.900,00**	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	**Kab. Paser**	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32 Orang	279.884.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	**Kab. Paser**	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	24.451.900,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Paser**	**Persentase Peningkatan Administrasi Umum**	**100%**	**940.041.806,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase Peningkatan Administrasi Umum**	**100%**	**2.321.430.901,00**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Kab. Paser**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	15 Paket	Rp 186.816.735	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Kab. Paser**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	16 Paket	Rp 769.596.018	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
			Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Rp 258.444.188	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket	Rp 249.550.392	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	Rp 73.227.538	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	Rp 80.502.538	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	365 Dokumen	Rp 1.246.345	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	365 Dokumen	Rp 1.246.345	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
			yang Disediakan					yang Disediakan			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	Rp 215.566.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Rp 215.566.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1850 Dokumen	Rp 204.741.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1884 Dokumen	Rp 1.004.969.608	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Paser**	**Persentase Pengadministrasian Umum Berjalan dengan Baik**	**100%**	**164.749.980,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Paser**	**Persentase Pengadministrasian Umum Berjalan dengan Baik**	**100%**	**165.249.980,00**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kab. Paser**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	Rp 349.980	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kab. Paser**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp 349.980	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Kab. Paser**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 164.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Kab. Paser**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 164.900.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Berjalan dengan baik	100%	97.157.545,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Berjalan dengan baik	100%	107.157.545,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya	5 Unit	Rp 76.144.300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya	6 Unit	Rp 76.144.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang di Pelihara atau Rehabilitasi yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 21.013.245	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang di Pelihara atau Rehabilitasi yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 31.013.245	
5.02.004	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Paser	Rasio PAD terhadap APBD	8,3%	2.513.364.880,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Paser	Rasio PAD terhadap APBD	8,3%	2.889.431.182,00	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kab. Paser	Persentase Peningkatan PAD	15%	2.513.364.880,00	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kab. Paser	Persentase Peningkatan PAD	15%	2.889.431.182,00	
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab.	Jumlah Dokumen Rencana	1 Dokumen	Rp 68.300.000	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab.	Jumlah Dokumen Rencana	1 Dokumen	Rp 65.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
		Paser	Pengelolaan Pajak Daerah				Paser	Pengelolaan Pajak Daerah			
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab. Paser	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Daerah	1 Laporan	Rp 124.812.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab. Paser	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Daerah	1 Laporan	Rp 271.576.375	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Rp 233.254.509	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Rp 257.400.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kab. Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Sarana &	Rp 160.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kab. Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Sarana &	Rp 160.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
	Pengelolaan Pajak Daerah		Pengelolaan Pajak Daerah	Prasarana		Pengelolaan Pajak Daerah		Pengelolaan Pajak Daerah	Prasarana		
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Pasaer	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	Rp 159.676.913	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Pasaer	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	Rp 145.215.368	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Pasaer	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	Rp 365.668.947	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Pasaer	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	Rp 370.742.280	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Paser	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	97000 Obyek Pajak PBB dan 6000 Obyek Pajak BPHTB	Rp 448.106.852	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Paser	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	87400 Obyek Pajak	Rp 431.392.000	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	Rp 90.400.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	Rp 123.200.000	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Paser	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	60 Layanan	Rp 116.948.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Paser	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	60 Layanan	Rp 93.692.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Paser	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	Rp 153.512.660	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Paser	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	Rp 181.475.500	
	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	Rp 273.932.000	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	Rp 416.197.659	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	Rp 54.204.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	Rp 93.764.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Rp 264.549.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Rp 279.526.000	
TOTAL					Rp 22.361.847.685,00	TOTAL				Rp 23.309.263.908,00	

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3.

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20
						Badan Pendapatan Daerah				16.000.351.046,00	23.660.157.098,00	23.503.496.912,00				17.891.800.000,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				16.000.351.046,00	23.660.157.098,00	23.503.496.912,00				17.891.800.000,00	
	5	02				KEUANGAN				16.000.351.046,00	23.660.157.098,00	23.503.496.912,00				17.891.800.000,00	
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	-	76 %	13.173.198.054,00	20.378.004.106,00	19.990.865.730,00				14.646.800.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	-	6 dokumen	415.991.954,00	415.991.954,00	415.991.954,00				669.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	31.212.954,00	31.212.954,00	56.391.000,00	Kab. Pasaer, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)		40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	189.278.000,00	189.278.000,00	166.169.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)		390.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.275.000,00	5.275.000,00	5.275.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)		89.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	190.226.000,00	190.226.000,00	96.218.048,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)		150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Administrasi Keuangan	-	100 %	11.457.802.576,00	18.111.675.628,00	18.111.675.628,00				12.900.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima	44 Orang/ bulan	890 Orang/ bulan	11.197.693.684,00	17.851.566.736,00	17.851.566.736,00	Kab. Paser,	Dana Alo		12.600.000.000,00	BADAN PENDAPATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
							Gaji dan Tunjangan ASN						Tanah Grogot, Tanah Grogot	kasi Umum (DAU)			DAERAH
	5	02	01	2.02	00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	260.108.892,00	260.108.892,00	253.137.616,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)		300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawa	Presentase Penurunan Tingktan	-	100 %	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00				0,00	BADAN PENDAPATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
						ian Perangkat Daerah	Pelanggaran Disiplin PNS										DAERAH
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	0,00	400.000.000,00	279.884.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Administrasi Umum	-	100 %	1.047.495.999,00	1.188.428.999,00	1.188.428.999,00				832.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	16 Paket	117.116.900,00	197.989.873,00	186.816.734,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)		120.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13 Paket	256.373.800,00	271.433.827,00	333.219.188,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)		80.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	73.228.832,00	73.228.832,00	78.227.538,00	Kab. Pasir, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)		130.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	365 Dokumen	365 Dokumen	1.246.345,00	1.246.345,00	1.246.345,00	Kab. Pasir, Tanah Grogot, Tana	Dana Alokasi Umum (DAU)		2.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
							yang Disediakan						h Grogot				
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	348.130.122,00	398.130.122,00	215.566.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)		250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	1850 Dokumen	1884 Dokumen	251.400.000,00	246.400.000,00	204.741.000,00	Kab. Paser, Tana	Dana Alokasi		250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
							Dinamis pada SKPD						h Grogot, Tanah Grogot	Um um (DAU)			DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pengadministrasian umum Berjalan Baik	-	100 %	164.749.980,00	164.749.980,00	164.749.980,00				125.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	349.980,00	349.980,00	349.980,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tana	Dana Alokasi Umum (DAU)		800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
													Grogot				
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	164.400.000,00	164.400.000,00	164.900.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)		125.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Berjalan Baik	-	100 %	87.157.545,00	97.157.545,00	97.157.545,00				120.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
						han Daerah											
	5	02	01	2.09	00002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	6 Unit	66.144.300,00	76.144.300,00	76.144.300,00	Kab. Pasaer, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)		30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	00010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	21.013.245,00	21.013.245,00	21.013.245,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)		90.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap APBD	-	8.3 %	2.827.152.992,00	3.282.152.992,00	3.512.631.182,00				3.245.000.000,00	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase Peningkatan PAD	-	15 %	2.827.152.992,00	3.282.152.992,00	3.282.152.992,00				3.245.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	93.600.000,00	93.600.000,00	88.250.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)		220.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan	1 Dokumen	1 Dokumen	142.236.000,00	172.236.000,00	317.576.375,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tana	Dana Alokasi Umum (DAU)		185.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
							Kebijakan Pajak Daerah						h Grogot				
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	275.000.000,00	305.000.000,00	305.000.000,00	Kab. Pasar, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)		200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah											
							Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	Kab. Pasar,	Dana Alo		100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
							Pengelolaan Pajak Daerah						Tanah Grogot, Semua Kel/ Desa	kasi Umum (DAU)			DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	222.753.825,00	222.753.825,00	191.215.368,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)		180.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	301.165.667,00	401.165.667,00	418.742.280,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)		220.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)											
							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	87400 Obyek Pajak	87400 Obyek Pajak	550.000.000,00	550.000.000,00	583.992.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)		480.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	127.200.000,00	147.200.000,00	147.200.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)		250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah											
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	6 Layanan	60 Layanan	166.436.000,00	166.436.000,00	141.692.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tana	Dana Alokasi Umum (DAU)		340.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
													Kab. Pasuruan, Tanah Grogot				
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah											
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	275.525.500,00	275.525.500,00	228.475.500,00	Kab. Pasuruan, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)		220.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	345.000.000,00	375.000.000,00	510.197.659,00	Kab. Pasuruan, Tanah	Dana Alokasi Um		350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
							Penagihan Pajak Daerah						Grogot, Tanah Grogot	um (DAU)			
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	90.036.000,00	90.036.000,00	93.764.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)		250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	138.200.000,00	323.200.000,00	326.526.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Alokasi Umum (DAU)		250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	JUMLAH									**16.000.351.046,00**	**23.660.157.098,00**	**23.503.496.912,00**				**17.891.800.000,00**	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Tana Paser, 31 Juli 2025
Kepala
Badan Pendapatan Daerah

Ali Nour Muhamad, SP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19730903 200604 1 012

RENJA PERUBAHAN 2025 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN PASER TAHUN 2025

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, izin, dan perlindungan-Nya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan RENJA Perangkat Daerah ini merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Peraturan Bupati Paser Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser.

Sejalan dengan amanat peraturan tersebut, dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran berkewajiban menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) tahun berikutnya sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Untuk memenuhi ketentuan diatas, maka Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Perubahan RENJA-PD) yang terdiri dari dari 2 (Dua) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 28 (dua puluh Delapan) Sub Kegiatan, dengan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Paser semula sebesar 17.913.607.310 dengan adanya Efisiensi sebesar 1.232.073.365 menjadi Rp. 16.681.533.945. Pada Bulan Agustus ada penambahan anggaran Rp. 1.294.829.144, Dan juga ada penarikan sisa anggaran Gaji PPPK sebesar Rp. 337.600.000 sehingga pagu indikatif berubah menjadi Rp. 17.640.163.089.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser tahun 2025 ini dijadikan acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan bagi seluruh jajaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser tahun 2026..

Tana Paser, 11 September 2025
Kepala,

Muhammad Lukman Darma, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19771023 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI *2*

BAB I PENDAHULUAN 3

1.1. Latar Belakang 3

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 21

2.3 Faktor pendorong , penghambat dan solusi permasalahan dalam pelaksanaan hasil Renja pada tahun 2025 30

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 31

3.1. Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah 31

3.2. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 32

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja pada Tahun 2025 43

BAB IV PENUTUP 62

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan 63

4.2. Rencana Tindak Lanjut 64

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser Tahun 2025 – 2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2025 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

24. Peraturan Bupati Paser Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser;

25. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;

26. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 2 (Dua) tahun 2025;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2025 Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2025 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2025 yang disertai perubahan target

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan sebagai instrumen pengendalian dan penilaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan maupun kendala yang menghambat capaian tersebut. Melalui evaluasi ini dapat diketahui kondisi riil pelaksanaan program, mulai dari kesesuaian antara rencana dengan realisasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, hingga optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, hasil evaluasi memberikan gambaran objektif mengenai implikasi yang timbul, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun penganggaran, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyusun langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran.

Lebih lanjut, hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyesuaian atau perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025. Proses penyesuaian tersebut dilakukan dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah serta diselaraskan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Dengan adanya evaluasi ini, perencanaan pembangunan dapat lebih responsif terhadap dinamika dan kebutuhan aktual masyarakat, serta memastikan bahwa alokasi anggaran dan pelaksanaan program benar-benar mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Hasil evaluasi Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**6.98 %**	**3,71%**	**4,5%**	**4,5%**	100%	**5,29%**	**13,49%**	**193%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**9 Dokumen**	**0**	**9 Dokumen**	**9 dokumen**	**100%**	**9 dokumen**	**18**	**200%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6	6 dokumen	2 dokumen	33%	7 dokumen	15	250%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 laporan	3 laporan	3 dokumen	1 dokumen	33%	3 laporan	7	233%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/14)
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	70 stel		51 stel	51 stel	100%	215 stel	266	380%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Temuan Yang Ditindak Lanjuti**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	48 orang	14 bulan	48 orang	48 orang	100%	64 orang	64	100%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	12 dokumen	80%	15 dokumen	42	280%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	60 paket	38 paket	29 paket	28 paket	97%	86 paket	152	193%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	36	300%
	Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8 laporan	40 kali	7 laporan	38 kali	95%	20 laporan	20	250%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/14)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD**	**33%**	**19%**	**21,85%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Pengadaan Meubel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	16 unit	14 unit	15 unit			15 Unit	29 unit	181,25%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	15 unit	300%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Banguunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0		0			0		100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0		0			0		100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	**2**		0			0		100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpenuhi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	100 lembar	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/14)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 bulan	1 laporan	12 laporan	1200%	12 laporan	12 laporan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	19 unit	11 unit	19 unit	19 unit	100%	19 unit	49	258%
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	32 Unit		2 unit	3 unit	150%	24 unit	27	84,375%
	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit		1 unit	1 unit	100%	1 unit	**2**	200%
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**Cakupan layanan kebakaran kabupaten**	**70%**	**30%**	**40 %**	**40%**	**100%**	**100%**	**170%**	**243%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/14)
	Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pencegahan ,Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Yang ditangani**	**70%**	**30%**	**40%**	**100%**	**100%**	**100%**	**230%**	**328%**
	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 laporan		1 laproan			1 laporan	2	200%
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam kabupaten	12 laporan	91%	12 laporan	1 laporan	7,85%	12 laporan	12 laporan	100%
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	12 dokumen	98%	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/14)
	Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian bahan berbahaya dan Beracun (B3) dan penanganan kebakaran yang disebabkan B3 dalam Daerah	1 dokumen		1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	100%
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala (Setiap Tahun), sah dan Legal	12 dokumen	4 unit	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan Legal sesuai standar Teknis Terkait	0	97%	260 unit	394 unit	152%	25 unit		100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/14)
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis dalam Pencegahan dan Penanggulangan	10 Orang	13 orang	17 orang	2 orang	12%	31 orang	30	100%
	Pengelolaan Sistem Komunikasi Dan Informasi Kebakaran Dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa atau Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang bisa di secara Perbaharui atau Dimutakhirkan secara Berkala (Setiap Tahun) Berkelanjutan dan Real Time yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan	1 Desa/Kelurahan			1 desa/kelurah an		1 desa/kelurah an	1	100%
	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, Dan Kemitraan Dalam	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen	1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/14)
	Pencegahan, Penanngulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran								
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga								
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	**Jumlah dokumen terkait kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**100%**	**1 dokumen**	**1**	**100%**
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan /Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	48 dokumen	17 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	100%	48 dokumen	85	177%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/14)
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana proteksi kebakaran	48 dokumen	14 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	100%	48 dokumen	110	230%
	Investigasi Kejadian Kebakaran	**Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran yang di Tangani**	**100%**		**100%**			**100%**	**100%**	**100%**
	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian Dan Pengujian Penyebab Kejadian	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	1 dokumen		1 dokumen			1 dokumen	1	100%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**Persentase relawan/kelompok yang dibina**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegi atan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat Yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	250 orang	350 orang	125 Orang	977 orang	782%	500 orang	1.827	730,8%
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	10 Desa/Kelurahan	4 desa/kelurah an	10 Desa/Kelura han	9 desa/ Kelurahan	90%	10 desa/kelurah an	23	230%
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat /Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1 dokumen	3 dokumen	3 Dokumen	3 dokumen	100%	1 dokumen	7	700%
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	**Persentase Kejadian membahayakan yang mendapatkan operasi pencarian dan pertolongan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Pada peristiwa yang menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam	jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	1 laporan		1 laporan			1 laporan	1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan Dan Evakuasi	Jumlah dokumen yang memuat kajian kebutuhan jenis sarana prasarana untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelama tan dan evakuasi yang sesuai standar	1 dokumen		1 dokumen			1 dokumen	1	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan Dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia untuk pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/Penyelama tan dan Evakuasi sesuai dengan	1585 unit		260 unit			286 unit	546	34,44%
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamat an Dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelama tan dan Evakuasi	1 laporan	2 laporan	1 laporan	3 laporan	300%	2 laporan	7	700%

Berdasarkan Tabel Realisasi RKPD Tahun 2025 Triwulan II dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 49,20%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 5.855.029.895,00 (Lima Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta dua puluh Sembilan Ribu Delapan ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp 16.681.533.945,00 (Enam Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 35,098%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser sebesar 24,60% dengan predikat kinerja Rendah
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 3 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 4 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 9 indikator capaian kinerja 0%-50% = 12 indikator.
4. Adanya sub kegiatan yang sebagian kinerjanya dibawah 50%, hal ini karena masih pada koordinasi dan pelaksaanya dilakukan di triwulan III dsn IV.
5. Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan penunjang pemerintahan sub urusan perencanaan perangkat daerah serta program pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran di tahun 2024 secara umum telah berjalan sangat baik, dengan capaian kinerja yang sesuai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.
6. Pada aspek perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, seluruh dokumen perencanaan serta evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditargetkan (9 dokumen dan 3 laporan) telah terealisasi 100%, mendukung tersedianya data perencanaan yang akurat dan tepat waktu.
7. Pada dukungan administrasi dan logistik, seluruh paket pengadaan dan logistik yang direncanakan dapat dipenuhi secara penuh (100%) sehingga mendukung kelancaran operasional. Capaian koordinasi dan fasilitasi kegiatan juga optimal, dengan partisipasi ASN sesuai target (48 orang berubah menjadi 64orang ,dengan realisasi 100%).
8. Program pengadaan barang milik daerah menunjukkan hasil yang melampaui target, dengan total realisasi 29 unit. Sarana prasarana penunjang lainnya juga terpenuhi dengan capaian 181,25%.
9. Dalam program pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran, capaian indikator kinerja melebihi target. Seluruh laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran di setiap kecamatan terselesaikan 12 laporan (100%), serta persentase penanggulangan kebakaran di wilayah kabupaten/kota mencapai 140% dari target, mencerminkan keberhasilan upaya pengurangan risiko kebakaran.
10. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM terus dilakukan melalui pelatihan aparatur pemadam kebakaran. Jumlah peserta yang direncanakan sebanyak 15 orang bahkan terealisasi 17 orang (113%), dan pengembangan sistem keselamatan kebakaran (SKKK) telah terselenggara di desa/kelurahan sesuai target (100%).
11. Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2024 berada pada tingkat ≥100% pada hampir seluruh indikator, bahkan beberapa melampaui target secara signifikan. Hal ini menunjukkan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif.

2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser, maka Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur, serta mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Dinas.
2. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
   a. Pemberian petunjuk penyusunan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rancangan rencana kerja;
   b. Pemberian petunjuk penyusunan rancangan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
   c. Perumusan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   d. Pemberian petunjuk penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas sesuai dengan rancangan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas;
   e. Pengoorganisasian penyusunan dan mensosialisasikan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Dinas;
   f. Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
   g. Pelaksanaan administrasi keuangan Dinas;
   h. Pelaksanaan administrasi barang milik Daerah pada Dinas;
   i. Pelaksanaan administrasi pendapatan Daerah kewenangan Dinas;
   j. Pelaksanaan administrasi kepegawaian Dinas;
   k. Pelaksanaan administrasi umum Dinas;
   l. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Dinas;
   m. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah;
   n. Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah;
   o. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaporan penerapan standar pelayanan minimal di bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
   p. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan;
   q. Pelaksanaan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
   r. Fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana pada Dinas;
   s. Fasilitasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;

t. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah serta pengelolaan informasi dan dokumentasi;
u. Pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas;
v. Pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
w. Pemberian petunjuk penyiapan bahan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
x. Pemberian petunjuk penyiapan bahian pembinaan jabatan fungsional pada Dinas;
y. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana pada Dinas;
z. Pemberian petunjuk penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;

Bidang Pemadaman, Penyelamatan Dan Sarana Prasarana

1. Bidang Pemadaman, Penyelamatan Dan Sarana Prasarana mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana.
2. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:
   a. Perencanaan dan Keuangan Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rancangan rencana kerja Dinas;
   b. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rancangan rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
   c. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana berdasarkan rancangan rencana kerja yang telah ditetapkan;
   d. Pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
   e. Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;
   f. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana ;

g. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana ;
h. Pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Daerah;
i. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran;
j. Pelaksanaan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah;
k. Pelaksanaan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
l. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
m. Pelaksanaan pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan;
n. Pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar Lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penyelamatan dan Non kebakaran;
o. Pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
p. Pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia;
q. Pelaksanaan standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
r. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
s. Pelaksanaan pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia penyelamatan dan evakuasi;
t. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana ;
u. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
v. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana ; dan
w. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pencegahan

1) Bidang Pencegahan mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan.
2) Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi :
   a. Perencanaan dan Keuangan Bidang Pencegahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rancangan rencana kerja Dinas;
   b. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rancangan rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
   c. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pencegahan berdasarkan rancangan rencana kerja yang telah ditetapkan;
   d. Pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Pencegahan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
   e. Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebujakan di Bidang Pencegahan;
   f. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan;
   g. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Pencegahan;
   h. Pelaksanaan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten;
   i. Pelaksanaan pembinaan aparatur pemadam kebakaran;
   j. Pelaksanaan pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran;
   k. Pelaksanaan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran;
   l. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat;
   m. Pelaksanaan pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran;
   n. Pelaksanaan dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran;
   o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan pada Dinas;
   p. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
   q. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Pencegahan; dan
   r. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser adalah:

1. Pemadaman Kebakaran;
2. Evakuasi Korban Kebakaran;
3. Evakuasi ular, evakuasi lebah/tawon, evakuasi hewan lainnya yang mampu ditangani;
4. Penyelamatan manusia dari ketinggian, evakuasi korban tenggelam, pertolongan pertama lainnya;
5. Pembentukan dan pembinaan relawan;
6. Sosialisasi/simulasi/penyuluhan kepada masyarakat;
7. Pembinaan aparatur pemadam kebakaran;
8. Inspeksi alat proteksi kebakaran.

Upaya Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1) Persentase Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK yang tertangani)
2) Tersusunnya RISPK
3) Response Time Rate (Waktu Tanggap Darurat)
4) Jumlah Kelompok Relawan

5) Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser terdapat dalam Tabel 2.1 di bawah ini :

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser
sampai dengan Triwulan II
Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026		
Tujuan: Meningkatnya Pelayanan dan Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta meminimalisir korban dan Dampaknya	Indikator penilaian mandiri reformasi birokrasi	B	B	B	B	BB	B	
	Cakupan layanan kebakaran kabupaten	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%

Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan kinerja organisasi yang ankuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP DAN APIP	B	B	BB	A	A	B	B
Sasaran : Terwujudnya sistem Pemadaman Kebakaran yang cepat tepat dan efesien	Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani	1	1	1	1	2	1	100
	Tersusunnya RISPK	0	0	1	0	0	0	0
	Respon Time (Waktu Tanggap)	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	13,77 menit	108,9
	Jumlah Kelompok Relawan	5	10	10	10	10	18	180 %

Berdasarkan Tabel 2.3 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel” memiliki 2 indikator kinerja yaitu “Nilai Evaluasi SAKIP DAN APIP” belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar B dari target sebesar A
b. Sasaran “Terwujudnya sistem Pemadaman Kebakaran yang cepat tepat dan efesien” memiliki 4 indikator kinerja yaitu :

    1) “Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani” telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 1 dari target sebesar 1 dengan capaian kinerja sebesar 100 %;
    2) “Tersusunnya RISPK” belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 0 dari target 0 dengan capaian kinerja sebesar 0 %;
    3) “Respon Time (Waktu Tanggap)” telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 13,77 menit dari target sebesar 15 menit dengan capaian kinerja sebesar 76,81 %. Formulasi perhitungan perhitungan respon time yaitu jumlah menit keseluruhan kejadian yang tertangani dibagi dengan jumlah kejadian yang tertangani.
    4) “Jumlah Kelompok Relawan yang terbina dan terbentuk” telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 18 kelompok, terdiri dari 4 pembentukan kelompok relawan di Desa Harapan Baru, Desa Tanjung Aru, Desa Slengot, Desa Lusan, Dan ada pembinaan kelompok Relawan dalam 3 angkatan yang diikuti dari perwakilan 14 Desa dari 5 kecamatan di Kabupaten Paser, dari target sebesar 10 kelompok Desa /kelurahan yang terbina dan terbentuk dalam 1 tahun . sehingga capaian kinerja sebesar 180%.

CAPAIAN SPM SUB URUSAN KEBAKARAN

LANGKAH KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KOTA	PERHITUNGAN		TARGET NASIONAL
Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1. Layanan Response time Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 menit	15 menit	$\frac{Kasus\ Kebakaran\ di\ WMK\ yang\ ditangani\ dalam\ tingkat\ waktu\ tanggap\ (response\ time)\ oleh\ Dinas\ Pemadam\ Kabupaten\ Paser}{Jumlah\ Kejadian\ kebakaxran\ di\ Kabupaten\ Paser}$	$\frac{950}{69} = 13{,}77\ Menit$	15 Menit
	2. Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	69	$\frac{Jumlah\ layanan\ pemadaman\ yang\ ditangani}{Jumlah\ kasus\ kebakaran\ di\ Kabupaten\ Paser\ tahun\ 2024}$ *x 100%*	$\frac{53}{69} x\ 100 = 76{,}81\%$	100%
	3. Layanan Pelaksanaan Evakuasi	111	Jumlah dan jenis pelayanan pemyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Paser 2024	1. Operasi Tangkap tawon 38 kali 2. Operasi tangkap ular 114 kali 3. Operasi tangkap biawak 8 kali 4. Operasi tangkap monyet 7 kali 5. Operasi tangkap kucing 15 kali 6. Operasi Tangkap Burung 1 Kali 7. Operasi Tangkap Buaya 1 Kali 8. Operasi Tangkap Anjing 2 Kali 9. Kecelakaan 51 kali 10. Pohon tumbang 17 kali 11. Operasi Bangunan runtuh 3 kali 12. Operasi pelepasan cincin 16 kali 13. Operasi tangkap tikus 1 kali 14. Operasi tangkap laba-laba 2 kali 15. Barang Masuk selokan 10 kali	

				16. Kendaraan Mogok 8 kali 17. Terkunci 23 kali 18. Tabung Gas 6 Kali 19. Pemasangan Bola Lampu 1 Kali 20. Pengisian Voucher Listrik 1Kali 21. Saluran Tersumbat 6 Kali 22. Konsleting 2 Kali 23. Sosialisasi dan penyiraman 2 Kali 24. Evakuasi manusia 1 Kali	
	4. Layanan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Kebakaran	11	$\frac{Jumlah\ Layanan\ yang\ ditangani\ Relawan}{Jumlah\ Layanan\ Pemadam\ di\ Kabupaten\ Paser}$ *x 100%*	$\frac{22}{38}\ x\ 100 = 57{,}89\%$	
			Jumlah Sosialisasi / Simulasi Penyuluhan dalam rangka pemberdayaan dan edukasi masyarakat	1.100 orang mengikuti sosialisasi pencegahan kebakaran 105 orang mengikuti pelatihan keluarga tanggap kebakaran	
			Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/kelurahan yang telah terbentuk dan terbina relawan pemadam Kebakaran berjumlah 18 kelompok	
	5. Layanan Pendataan, Inspeksi, dan Investigasi Pasca Kebakaran		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Retribusi APAR dan Pengecekan	Dokumen pendataan bangunan/ Gedung/ lingkungan yang harus Memiliki alat proteksi berjumlah 26	
			Inventarisasi Sarana Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung	gedung yang telah dilakukan inventarisasi kelaiakan standar sarana proteksi sejumlah 2	

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja (nama OPD) Kabupaten Paser Periode Desember 2025 :

1) Terlaksananya tindak penanganan yang telah sesuai dengan waktu respon time yang ditentukan dengan baik;
2) SDM yang berusaha secara maksimal melaksanakan kinerja dengan baik dan tanggap darurat.
3) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser hampir seluruh petugas lapangannya telah mengikuti diklat dasar pemadam kebakaran.

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1) Kurangnya jumlah SDM dalam pelaksanaan kegiatan sehingga begitu banyak job desk yang diampu oleh masing-masing pegawai, sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam penyelesaian tugas.
2) Tahun anggaran 2023 dan 2024 Dinas Pemadam Kebakaran medapatkan alokasi pendanaan dari DBH DR sehingga sangat membantu dalam pencapaian indikator kinerja yang berhubungan kegiatan pemadaman, sedangkan pada tahun 2025, seluruh anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser dibebankan pada APBD Kabupaten Paser.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2025.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser sebagai penunjang urusan pemerintahan di Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser

Tujuan/Sasaran	Indikator	Formulasi	Target	
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025
Tujuan: Meningkatnya Pelayanan dan Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta meminimalisir korban dan Dampaknya	Indikator penilaian mandiri reformasi birokrasi			
Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan kinerja organisasi yang ankuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP DAN APIP	Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP pada Tahun Sebelumnya	A	A
Tujuan : Meningkatnya Pelayanan dan Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta meminimalisir korban dan Dampaknya	Cakupan layanan kebakaran kabupaten			

Tujuan/Sasaran	Indikator	Formulasi	Target	
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025
Sasaran : Terwujudnya sistem Pemadaman Kebakaran yang cepat tepat dan efesien	Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani	Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang menerima penanganan sesuai laporan	1	1
	Tersusunnya RISPK	Jumlah RISPK yang tersusun	-	-
	Respon Time (Waktu Tanggap)	Jumlah Kebakaran yang ditangani x tingkat waktu tanggap (respon time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser / Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten Paser	15 menit	15 menit
	Jumlah Kelompok Relawan	Jumlah Kelompok Relawan yang telah dibentuk	10	10

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser Tahun 2025 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 diarahkan pada pencapaian kebijakan tahun keempat RPJMD Kabupaten Paser 2021-2026 dengan arah kebijakan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas dan Pendidikan dan Kesehatan untuk Kabupaten Paser yang Sejahtera dengan empat prioritas pembangunan yaitu:

a. Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayan Pendidikan dan Kesehatan Yang Merata, Peningkatan Kualitas Hidup Anak, Perempuan Serta Pemuda,

b. Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal,

c. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik, serta

d. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser mendukung pencapaian sasaran ke-5, yaitu “Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif”.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025
Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kabupaten Paser**	**Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat**	26,56%	**Rp12.466.535.301**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kabupaten Paser**	**Indeks Kepuasan layanan Sekretariat**	6,08 %	**1.580.200.624**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kabupaten Paser**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**11 Dokumen**	**Rp. 344.528.410**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kabupaten Paser**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	**6 Dokumen**	**191.637.639**	
1.1	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	Rp200.528.255,00	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	76.107.969	
1.2	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	Rp. 144.000.155,00	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	115.529.670	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Paser**	**Persentase Temuan Yang Ditindak Lanjuti**	**100%**	**Rp.10.779.773.282,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Paser**	**Persentase Temuan Yang Ditindak Lanjuti**	**100%**	**187.645.005.00**	
2.1	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang/ bulan	10.546.310.195,00	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Kabupaten Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang/bulan	50.000.000,00	
2.2	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15 dokumen	233.423.087,00	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	137.645.005,00	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kabupaten Paser**	**Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi**	**100%**	**423.000.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kabupaten Paser**	**Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi**	**100%**	**900.000.000,00**	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 stel	423.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 stel	900.000.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Paser**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**Rp334.967.334,**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Paser**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**300.917.980,00**	
4.1	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	Rp72.790.264,00	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	50.851.300,00	
4.2	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	18.000.215,00	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	17.415.535,00	
4.3	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 laporan	244.176.855,00	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 laporan	232.651.145,00	
4.4	*Pengadaan Mebel*	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	*Pengadaan Mebel*	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 unit	0	
4.5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Paser	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0	
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Paser**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD**	**100%**	**116.790.500,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Paser**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD**	**100%**	**0**	
5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Paser	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Paser	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	0	
5.2	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Kabupaten Paser	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	58.790.500,00	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Kabupaten Paser	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	0	
5.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	58.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 unit	0	
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Paser**	**Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpenuhi**	**100%**	**151.015.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Paser**	**Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpenuhi**	**100%**	**0**	
6.1	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Kabupaten Paser	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1.015.000,00	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Kabupaten Paser	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	0	
6.2	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	150.000.000,00	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	0	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Paser**			**316.500,775,00**					**0**	
7.1	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	280.000.775,00	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	Kabupaten Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	0	
7.2	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	5.500.000,00	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0	
7.3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	31.000.000,00	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 unit	0	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**Kabupaten Paser**	**Cakupan layanan kebakaran kabupaten**	**50%**	**Rp5.173.627.788,**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Kabupaten Paser**	**Cakupan layanan kebakaran kabupaten**	**100%**	**2.151.576.915**	
8	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Paser**	**Persentase Pencegahan ,Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Yang ditangani**	**50%**	**4.062.789.339,00**	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Paser**	**Persentase Pencegahan ,Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Yang ditangani**	**50%**	**1.644.385.716**	
8.1	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	0	0	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 laporan	0	
8.2	*Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	212.594.000,	*Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	307.722.774	
8.3	*Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran*	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 dokumen	Rp1.608.791.850	*Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran*	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 dokumen	716.078.400	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
8.4	Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	0	
8.5	*Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri*	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	12 Dokumen	Rp144.041.582,00	*Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri*	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	25 Unit	190.579.906	
8.6	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri*	Kabupaten Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	25 Unit	1.483.044.060,00	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri*	Kabupaten Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4 Dokumen	2.601.005.276	
8.7	*Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran*	Kabupaten Paser	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan	15 orang	573.125.100,00	*Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran*	Kabupaten Paser	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan	22 orang	331.580.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Penanggulangan Kebakaran					Penanggulangan Kebakaran			
8.8	Pengelolaan Sistem Komunikasi Dan Informasi Kebakaran Dan Penyelamatan (SKIK)	Kabupaten Paser	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	0	0	Pengelolaan Sistem Komunikasi Dan Informasi Kebakaran Dan Penyelamatan (SKIK)	Kabupaten Paser	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	1 Desa/Kelurahan	0	
8.9	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, Dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanngulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	25.000.000,00	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, Dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanngulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 dokumen	37.187.480,00	
8.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Kabupaten Paser	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	13 Keluarga	16.192.747,00	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Kabupaten Paser	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	13 Keluarga	0	
9	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Kabupaten Paser**	**Jumlah bangunan yang diperiksa**	**96 Inspeksi**	**91.270.050**	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Kabupaten Paser**	**Jumlah bangunan yang diperiksa**	**96 Inspeksi**	**168.822.150**	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
9.1	*Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran*	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	48 Dokumen	Rp30.306.000,00	*Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran*	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	48 Dokumen	15.156.000	
9.2	*Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran*	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelayakan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	48 Dokumen	Rp60.964.050,00	*Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran*	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelayakan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	48 Dokumen	153.666.150	
10	**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**Kabupaten Paser**	**Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran yang di Tangani**	**100%**	**0**	**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**Kabupaten Paser**	**Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran yang di Tangani**	**100%**	**0**	
10.1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian Dan Pengujian Penyebab Kejadian	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	0	0	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian Dan Pengujian Penyebab Kejadian	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	1 dokumen	0	
11	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Kabupaten Paser**	**Persentase relawan/kelompok yang dibina**	**100%**	**Rp721.223.399,**	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Kabupaten Paser**	**Persentase relawan/kelompok yang dibina**	**100%**	**306.656.479**	
11.1	*Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat*	Kabupaten Paser	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	200 Orang	Rp44.585.000,00	*Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat*	Kabupaten Paser	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	200 Orang	24.990.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
11.2	*Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran*	Kabupaten Paser	Jumlahnya desa/kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	10 Desa/Kelurahan	Rp639.322.699,00	*Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran*	Kabupaten Paser	Jumlahnya desa/kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	10 Desa/Kelurahan	247.052.479	
11.3	*Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana*	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1 Dokumen	37.315.700,00	*Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana*	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1 Dokumen	34.614.000	
12	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Kabupaten Paser**	**Jumlah Pertolongan dan Pencarian terhadap kondisi yang membahayakan**	**2 Orang**	**Rp298.345.000,00**	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Kabupaten Paser**	**Jumlah Pertolongan dan Pencarian terhadap kondisi yang membahayakan**	**2 Orang**	31.712.570,**00**	
12.1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Pada peristiwa yang menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	0	0	Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Pada peristiwa yang menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam	Kabupaten Paser	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 laporan	0	
12.2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan Dan Evakuasi	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan	0	0	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan Dan Evakuasi	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan	1 dokumen	0	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
			Evakuasi yang Sesuai Standar					Evakuasi yang Sesuai Standar			
12.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan Dan Evakuasi	Kabupaten Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia untuk pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/Penyelamatan dan Evakuasi sesuai dengan standar teknis	0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan Dan Evakuasi	Kabupaten Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia untuk pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/Penyelamatan dan Evakuasi sesuai dengan standar teknis	286 unit	0	
12.4	*Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi*	Kabupaten Paser	Jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal	1 laporan	Rp298.345.000,00	*Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi*	Kabupaten Paser	Jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal	2 laporan	31.712.570	
					17.640.163.089					**6.271.545.659**	

Dana yang besar pada sub kegiatan tertentu, seperti sub kegiatan penyelamatan dan evakuasi, didalamnya memuat gaji PTT dan uang lembur aktivitas lapangan petugas pemadam kebakaran. sehingga sub kegiatan tersebut terkesan memiliki dana yang besar, Tetapi pada tahun ini terjadi penarikan anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 337.600.000 , karena ada PTT yang sudah diangkat menjadi PPPK. sementara untuk pelaksanaan kegiatan operasional lainnya masih terbatas dananya. penambahan pagu dana pada sub kegiatan Pembinaan aparatur Pemadam Kebakaran sebesar Rp 313.989.000 karena ada penambahan untuk Biaya Diklat dari 15 orang menjadi 31 orang yang ada di renja perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser, dikarenakan pagu dana yang ada, tidak sesuai atau kurang dengan kebutuhan pemenuhan target yang telah ditetapkan. Sehingga dibutuhkan adanya penyesuaian antara pagu dana dengan target yang ada.

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

Diisi Matriks Renja yang bersumber dari SIPD

DINAS PEMADAM KEBAKARAN KAB. PASER
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Pemadam Kebakaran							17.074.015.482,00	16.681.533.945,00	17.640.163.089					
	1					NON URUSAN							17.074.015.482,00	16.681.533.945,00	17.640.163.089					
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG							17.074.015.482,00	16.681.533.945,00	17.640.163.089					
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan layanan Sekretariat						11.144.505.422,00	12.028.461.301,00	Rp12.466.535.301					
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	-			6 Dokumen	7 Dokumen	100.000.000,00	79.554.255,00	Rp200.528.255,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser

																		Perubahan Iklim	Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	98.000.000,00	49.000.155,00	144.000.155,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Yang Ditindak Lanjuti	-			100 persen	100 persen	**10.095.394.927,00**	**10.671.272.389,00**	**10.779.733.282,00**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerint	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser

																			ahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	9.885.394.927,00	10.546.310.195,00	10.546.310.195,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	05	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	210.000.000,00	124.962.194,00	233.423.087,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerint	

																		ahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	-			90 Paket	215 paket	**153.000.000,00**	**153.000.000,00**	**423.000.000**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				90 Paket	215 Paket	153.000.000,00	153.000.000,00	423.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsi	

																		ve dan Tangkas	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-			100 persen	100 persen	**418.304.995,00**	**217.867.334,00**	**Rp334.967.334,**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser
	1	05	01	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	86 Paket	100.000.000,00	58.690.264,00	72.790. 264	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	05	01	2.	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

				06	05		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	15.000.215,00	18.000.215,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	20 Laporan	288.304.955,00	144.176.855,00	244.176.855	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	-			100 persen	100 persen	**116.790.500,00**	**116.790.500,00**	**116.790.500,00**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahan	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser

																		an Bencana Dan Perubahan Iklim	Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	58.790.500,00	58.790.500,00	58.790.500,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	3 Unit	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Menduku	

																	Dan Perubahan Iklim	ng Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpenuhi	-			100 persen	100 persen	**151.015.000,00**	**151.015.000,00**	**151.015.000,00**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsi	

																		ve dan Tangkas	
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	-			100 persen	100 persen	**110.000.000,00**	**589.961.668,00**	316.500.775,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser

	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	24Unit	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19Unit	19 Unit	480.000.000,00	480.000.000,00	280.000.775,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas		
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan Gedung kantor																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	79.000.000,00	78.961.668,00	5.500.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas		

																		Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
9	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan layanan kebakaran kabupaten						**5.351.510.060,00**	4.653.072.644,00	**Rp5.173.627.788**					
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan ,Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Yang ditangani	-			50 persen	100 persen	**4.148.973.160,00**	3.762.392.995,00	**Rp4.062.789.339**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Masyarakat
	1					Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran														

		05	04	2.01	0003		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				12 Dokumen	12 Dokumen	1.778.836.000,00	1.746.391.850,00	1.608.791.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota													
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	338.468.000,00	169.234.000,00	212.594.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas

	1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				12 Dokumen	12 Dokumen	87.080.000,00	63.394.238,00	144.041.582	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														
							Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				15 Orang	31Orang	356.640.600,00	259.136.100,00	573.125.100,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsi	

																			ve dan Tangkas	
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				25 Unit	25 Unit	1.512.267.560,00	1.483.044.060,00	1.483.044.060,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsi	

																			ve dan Tangkas	
	1	0 5	0 4	2 . 0 1	0 0 1 9	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga														
							Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				13 Keluarga	13 Keluarga	25.681. 000,00	26.661. 250,00	16. 192. 747,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	0 5	0 4	2 . 0 2		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan yang diperiksa	-			96 Inspeksi	96 Inspeksi	**69.04 7.500, 00**	**41.81 1.250, 00**	**91.270.050**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	0 5	0 4	2 .	0 0	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														

				02	01														
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				48 Dokumen	48 Dokumen	30.300.000,00	15.150.000,00	30. 306. 000	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran													
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				48 Dokumen	48 Dokumen	38.747.500,00	26.661.250,00	60. 964. 050	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	

	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Peningkatan Masyarakat Paham Terhadap Pencegahan dan penyelamatan Kebakaran	-					**727.890.400,00**	**572.233.399,00**	**Rp721.223.399,**			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Masyarakat, MPA
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat													
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				200 Orang	200 Orang	37.000.000,00	19.595.000,00	44. 585. 000	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran													

							Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				10 Desa/Kelurahan	10 Desa/Kelurahan	638.918.250,00	515.322.699,00	639. 322. 699	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
	1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana														
							Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				1 Dokumen	1 Dokumen	51.972.150,00	37.315.700,00	37.315.700,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	

	1	05	04	2.05		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Jumlah Pertolongan dan Pencarian terhadap kondisi yang membahayakan**	-					**405.599.000,00**	**276.635.000,00**	Rp298.345.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	Masyarakat
	1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				1 Laporan	1 Laporan	405.599.000,00	276.635.000,00	298. 345. 000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsive dan Tangkas	
											JUMLAH		**17.074.015.482,00**	**16.681.533.945,00**	**Rp17.640.163.089**					

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.2 Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Selanjutnya, sebagai rencana tindak lanjut, Dinas Pemadam Kebakaran akan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan dokumen perencanaan lainnya agar tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sekaligus menyusun RKA Perubahan secara lebih rinci berdasarkan evaluasi kinerja, kebutuhan aktual, serta ketersediaan plafon anggaran. Proses tersebut akan didukung melalui koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan konsistensi target kinerja dan pencapaian prioritas pembangunan. Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan dimonitoring dan dievaluasi secara berkala guna menjamin efektivitas, efisiensi, serta ketepatan sasaran, dan hasilnya akan dilaporkan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang mengarahkan pelaksanaan pembangunan daerah secara terukur dan berkesinambungan.

Tana Paser, 11 September 2025
Kepala,

Muhammad Lukman Darma, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19771023 199703 1 003

Renja Perubahan 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Kusuma Bangsa Komplek Perkantoran Km. 5 Gedung F Lantai 2
Desa Tepian Batang Tanah Grogot, Kabupaten Paser
Kode Pos 76211, *Email :* *kesbangpol_paser@yahoo.com*

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

Lampiran :
Tanggal

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

c. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2025 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 20052025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah ;
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022.
26. Peraturan Bupati Paser Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Tanggal 31 Juli 2023.
27. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 Tentang APBD Tahun 2025 Tanggal 30 Desember 2024.
28. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2025 Tanggal 30 Desember 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Proses penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan III tahun 2025

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2025 hingga Triwulan III baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2025 yang disertai perubahan target.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan III Tahun 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan III dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Laporan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sampai Dengan Triwulan Ke III Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel		Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP				50,805,251,630.00	BB	14,319,829,093.00															
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Sekertariat	80	30,239,441,080.00	100%	7,824,770,790.00	100%	7,368,278,762.00	25.41	1,872,455,827.00	14.63	1,077,950,844.00	25.71	1,894,667,427.00			65.76	4,845,074,098.00	66.76	12,669,844,888.00	0.83	0.42	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50	216,375,104.00	100%	162,434,680.00	100%	168,476,422.00	40.40	68,057,908.00	5.80	9,774,800.00	7.15	12,041,600			53.35	89,874,308.00	54.35	252,308,988.00	1.09	1.17	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	25	72,799,919.00	5	55,096,000.00	3	80,564,922.00	1	34,988,208.00	0	1,800,000.00	1	12,041,600			2	48,829,808.00	7	103,925,808.00	0.28	1.43	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen RKA SKPD	-	-	1	48,248,680.00	2	39,602,400.00	1	20,906,200.00	0	7,254,800.00		-			1	28,161,000.00	2	76,409,680.00			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD		-	-	0	-	2	18,224,500.00	0	-	1			-			1.00	-	1.00	-			
		Evalusi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	143,575,185.00	5	59,090,000.00	4	30,084,600.00	2	12,163,500.00	0	720,000.00		-			2	12,883,500.00	7	71,973,500.00	0.28	0.50	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	100%	27,811,063,903.00	97%	6,349,535,004.00	97%	6,700,042,269.00	25.02	1,676,549,777.00	15.22	1,019,753,359	24.83	1,663,587,355			65.07	4,359,890,491.00	66.04	10,709,425,495.00	66.0	0.39	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175	25,948,582,358.00	25	5,925,184,416.00	30	6,267,555,604.00	7	1,563,720,845.00	35	1,005,798,459	35	1,624,382,915			77	4,193,902,219.00	102	10,119,086,635.00	0.58	0.39	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penata Utahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	1270	1,862,481,545.00	250	424,350,588.00	270	432,486,665.00	56	112,828,932.00	10	13,954,900	30	39,204,440			96	165,988,272.00	346	590,338,860.00	0.27	0.32	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminis trasi Umum Daerah	100%	1,647,683,741.00	96%	1,210,806,920.00	96%	405,294,420.00	29.74	120,531,402.00	8.63	34,975,960	44.66	180,991,406			83.03	336,498,768.00	83.99	1,547,305,688.00	84.0	0.94	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5	1,800,653.00	1	700,800.00	1	2,304,651.00	0	-	0	-		-			-	-	1	700,800.00	0.20	0.39	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	10	101,156,250.00	2	473,517,450.00	2	166,340,088.00	1	38,950,000.00	0	-	1	119,424,900			2	158,374,900.00	4	631,892,350.00	0.40	6.25	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang tersedia	10	210,788,854.00	2	46,259,200.00	2	50,100,000.00	1	33,257,907.00	0	11,205,500		-			1	44,463,407.00	3	90,722,607.00	0.30	0.43	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Bahan Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10	182,333,122.00	2	26,559,800.00	2	34,493,735.00	1	16,115,523.00	0	-		1,232,855			1	17,348,378.00	3	43,908,178.00	0.30	0.24	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan perundang - undangan yang disediakan	60	26,604,861.00	12	5,200,000.00	1	5,000,000.00	0	-	0	-		2,700,000			-	2,700,000.00	12	7,900,000.00	0.20	0.30	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	30	100,000,000.00		-	4	3,479,000.00	0	-	0	-		-			-	-	-	-	0.00	-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	600	1,000,000,000.00	120	658,569,670.00	4	143,576,946.00	1	32,207,972.00	1	23,770,460	1	57,633,651			3	113,612,083.00	123	772,181,753.00	0.21	0.77	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Pemerintah Daerah	12	97,664,588.00	100%	32,012,150.00	100%	5,000,000.00	13.40	670,000.00		-	-				13.40	670,000.00	14.40	32,682,150.00	1.2	0.33	
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	12	97,664,588.00	2	32,012,150.00	1	5,000,000.00	0	670,000.00	0	-		-			-	670,000.00	2	32,682,150.00	0.17	0.33	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	362,051,812.00	100%	24,663,036.00	100%	26,999,185.00	24.62	6,646,740.00	10.86	2,931,725	10.45	2,820,300			45.92	12,398,765.00	46.92	37,061,801.00	46.9	0.10	
		Penyediaan Jasa Surat - Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	60	32,734,509.00	12	7,429,800.00	4	12,000,000.00	1	3,785,000.00	-	-		-			1	3,785,000.00	13	11,214,800.00	0.22	0.34	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunukasi, jaringan sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	60	329,317,303.00	2	17,233,236.00	12	14,999,185.00	3	2,861,740.00	3	2,931,725	3	2,820,300			9	8,613,765.00	11	25,847,001.00	0.18	0.08	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	104,601,931.00	100%	45,319,000.00	100%	62,466,466.00	-	-	16.83	10,515,000	56.39	35,226,766			73.23	45,741,766.00	74.23	91,060,766.00	74.2	0.87	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15	33,090,872.00	3	37,760,000.00	3	35,966,466.00	0	-	0	-	2	34,026,766			2	34,026,766.00	5	71,786,766.00	0.33	2.17	

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	50	36,511,059.00	10	7,559,000.00	10	26,500,000.00	0	-	2	10,515,000	2	1,200,000			4	11,715,000.00	14	19,274,000.00	0.28	0.53	
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase Penurunan Konflik Berbau Sara	100%	764,791,141.32	100%	4,940,224,215.00	100%	2,130,407,465.00	9.37	199,641,000.00	14.93	318,176,298	51.05	1,087,580,473			75.36	1,605,397,771.00	76.36	6,545,621,986.00	76.36	8.56	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Teknis dibidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	30	764,791,141.32	100%	4,940,224,215.00	100%	2,130,407,465.00	9.37	199,641,000.00	14.93	318,176,298	51.05	1,087,580,473			75.36	1,605,397,771.00	76.36	6,545,621,986.00	2.5	8.56	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10	255,700,803.82	2	60,000,000.00	3	200,772,770.00	0	-	1	20,733,200	1	33,960,350			2.00	54,693,550.00	4	114,693,550.00	0.40	0.45	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	440	407,272,270.00	90	4,880,224,215.00	25	150,123,652.00	0	-	5	8,121,200	15	118,231,245			20.00	126,352,445.00	110	5,006,576,660.00	0.25	12.29	
		Pembentukan Paskibraka						100	1,779,511,043.00	12	199,641,000.00	25	289,321,898	50	935,388,878			87.00	1,424,351,776.00	87	1,424,351,776.00	0.00	-	
	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Paser yang responsif dan bertanggung jawab dalam proses dan partisipasi politik yang demokratis		Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu																					
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	80%	4,277,106,495.25		33,991,031,553.00	100%	2,482,173,607.00	1.76	43,767,000.00	81.46	2,021,993,322	3.45	85,594,743			86.67	2,151,355,065.00	86.67	36,142,386,618.00	108.34	8.45	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Terlaksananiyan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah . Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi	25	4,277,106,495.25		33,991,031,553.00	100%	2,482,173,607.00	1.76	43,767,000.00	81.46	2,021,993,322	3.45	85,594,743			86.67	2,151,355,065.00	86.67	36,142,386,618.00	3.5	8.45	
		Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Dokumen Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun.	10	12,500,000.00	2	25,124,000.00	0	-														
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun.	5	12,500,000.00	1	21,472,500.00	0	-														
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	6650	253,550,339.00	2650	1,025,396,300.00	150	56,375,000.00		-	0	5,385,263	100	42,412,100			100.00	47,797,363.00	2,750	1,073,193,663.00	0.41	4.23	
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1635	3,883,356,744.00	400	32,355,244,353.00	100	2,337,976,390.00	10	26,047,400.00	70	2,013,677,940	10	31,945,843			90.00	2,071,671,183.00	490	34,426,915,536.00	0.30	8.87	

		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum,Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	15	115,199,414.00	3	563,794,400.00	3	87,822,217.00	1	17,719,600.00	0	2,930,119	1	11,236,800			2.00	31,886,519.00	5	595,680,919.00	0.33	5.17	
	Mewujudkan pembinaan dan pemberdayaan ormas		Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan																					
		Program Pemberdaayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Organisasi Masyarakat (Ormas) yang aktif	75%	643,825,476.00	100%	908,741,292.00	100%	215,360,531.00	4.80	10,346,000.00	1.67	3,606,019	58.03	124,973,414			64.51	138,925,433.00	65.51	1,047,666,725.00	87.34	1.63	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dirumuskan	25	643,825,476.00	100%	908,741,292.00	100%	215,360,531.00	4.80	10,346,000.00	1.67	3,606,019	58.03	124,973,414			64.51	138,925,433.00	65.51	1,047,666,725.00	2.6	1.63	
		Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun.	8	7,500,000.00	2	18,890,392.00	0	-	-	-													
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun.	8	7,500,000.00	2	17,724,000.00	0	-	-	-													
		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	890	196,287,300.00	200	242,473,300.00	200	100,677,053.00	20	10,346,000.00	0	884,960	100	64,792,500			120.00	76,023,460.00	320	318,496,760.00	0.36	1.62	
		Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	920	190,149,200.00	300	238,295,600.00	300	64,591,739.00	0	-	0	1,437,635	150	38,352,114			150.00	39,789,749.00	450	278,085,349.00	0.49	1.46	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10	232,388,974.00	2	391,358,000.00	2	50,091,739.00	0	-	0	1,283,424	1	21,828,800			1.00	23,112,224.00	3	414,470,224.00	0.30	1.78	
	Mewujudkan ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama		Fasilitasi kebijakan dibidang ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya																					
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Presentase kebijakan bidang ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditindaklanjuti	100%	4,429,085,918.00	100%	295,000,000.00	100%	550,000,000.00	-	-	1.77	9,750,100	43.10	237,036,800			44.87	246,786,900.00	45.87	541,786,900.00	45.87	0.12	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan budaya yang dirumuskan	25	4,429,085,918.00	100%	295,000,000.00	100%	550,000,000.00	-	-	1.77	9,750,100	43.10	237,036,800			44.87	246,786,900.00	45.87	541,786,900.00	1.8	0.12	
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	25	1,018,180,675.00	5	80,000,000.00	3	250,000,000.00	0	-	0	-	2	160,224,000			2.00	160,224,000.00	7	240,224,000.00	0.28	0.24	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	560	2,570,905,848.00	120	200,000,000.00	120	250,000,000.00	0	-	0	-	80	76,812,800			80.00	76,812,800.00	200	276,812,800.00	0.36	0.11	

		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20	76,363,550.63	4	15,000,000.00	4	50,000,000.00	0	-	0	9,750,100		-			-	9,750,100.00	4	24,750,100.00	0.20	0.32	
	Meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang tertib dan aman		Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Paser																				
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Presentase kasus konflik sosial yang tertangani / terselesaikan	100%	8,304,752,763.68	100%	2,845,483,780.00	100%	1,573,608,728.00	6.25	98,279,023.00	1.30	20,419,860	50.80	799,390,494			58.34	918,089,377.00	59.34	3,763,573,157.00	59.34	0.45	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social yang dirumuskan	30	8,304,752,763.68	100%	2,845,483,780.00	100%	1,573,608,728.00	6.25	98,279,023.00	1.30	20,419,860	50.80	799,390,494			58.34	918,089,377.00	59.34	3,763,573,157.00	1.98	0.45	
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10	15,920,453.26	2	39,196,460.00	2	25,237,884.00	0	450,000.00	0	-	1	19,927,698			1.00	20,377,698.00	3	59,574,158.00	0.30	3.74	
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	2	26,235,093.75	2	154,596,460.00	2	53,798,904.00	0	-	0	-	1	43,681,667			1.00	43,681,667.00	3	198,278,127.00	1.50	7.56	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	23	1,048,840,625.00	23	195,065,860.00	20	82,450,000.00	2	27,050,760.00	1	16,516,860	5	12,511,198			8.00	56,078,818.00	31	251,144,678.00	1.35	0.24	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12	636,362,921.88	12	615,125,000.00	20	283,285,000.00	2	1,350,000.00	2	1,350,000	10	204,227,968			14.00	206,927,968.00	26	822,052,968.00	2.17	1.29	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4	122,204,590.06	4	441,510,000.00	6	125,000,000.00	0	-	1	2,553,000	4	93,963,611			5.00	96,516,611.00	9	538,026,611.00	2.25	4.40	
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	60	5,345,448,543.75	12	1,399,990,000.00	2	1,003,836,940.00	1	69,428,263.00	0	-	1	425,078,352			2.00	494,506,615.00	14	1,894,496,615.00	0.23	0.35	
								Rata-rata capaian kinerja (%)								69.17	9,905,628,644				19.63	
								Predikat Kinerja								Sedang						

Berdasarkan Tabel 2.2 Realisasi RKPD Tahun 2025 Triwulan III dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan III adalah 67,17 %, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 9.905.628.644 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp 14.319.829.093 (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah)
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Kabupaten Paser sebesar 69,17 % dengan predikat kinerja sedang .
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 0 Indikator, capaian kinerja >70%-100% = 0 Indikator, capaian kinerja >50%-70% = Indikator capaian kinerja 0%-50% = 10 Indikator

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

A. Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser mempunyai tugas membantu Bupati Paser dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

1. Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi :
    a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
    b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan

organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;

c. Pelaksanaan koordinasi dibidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penganganan konflik sosial;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penganganan konflik sosial;
e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah
f. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;dan
g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sebagai berikut :

I. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
II. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
III. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi terdiri dari:
    1. Subbidang Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan.
    2. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama.
IV. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :
    1. Subbidang Politik Dalam Negeri.

2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.

V. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik terdiri dari :

1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen.
2. Subbidang Penanganan konflik.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dapat dilihat pada bagan Gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER

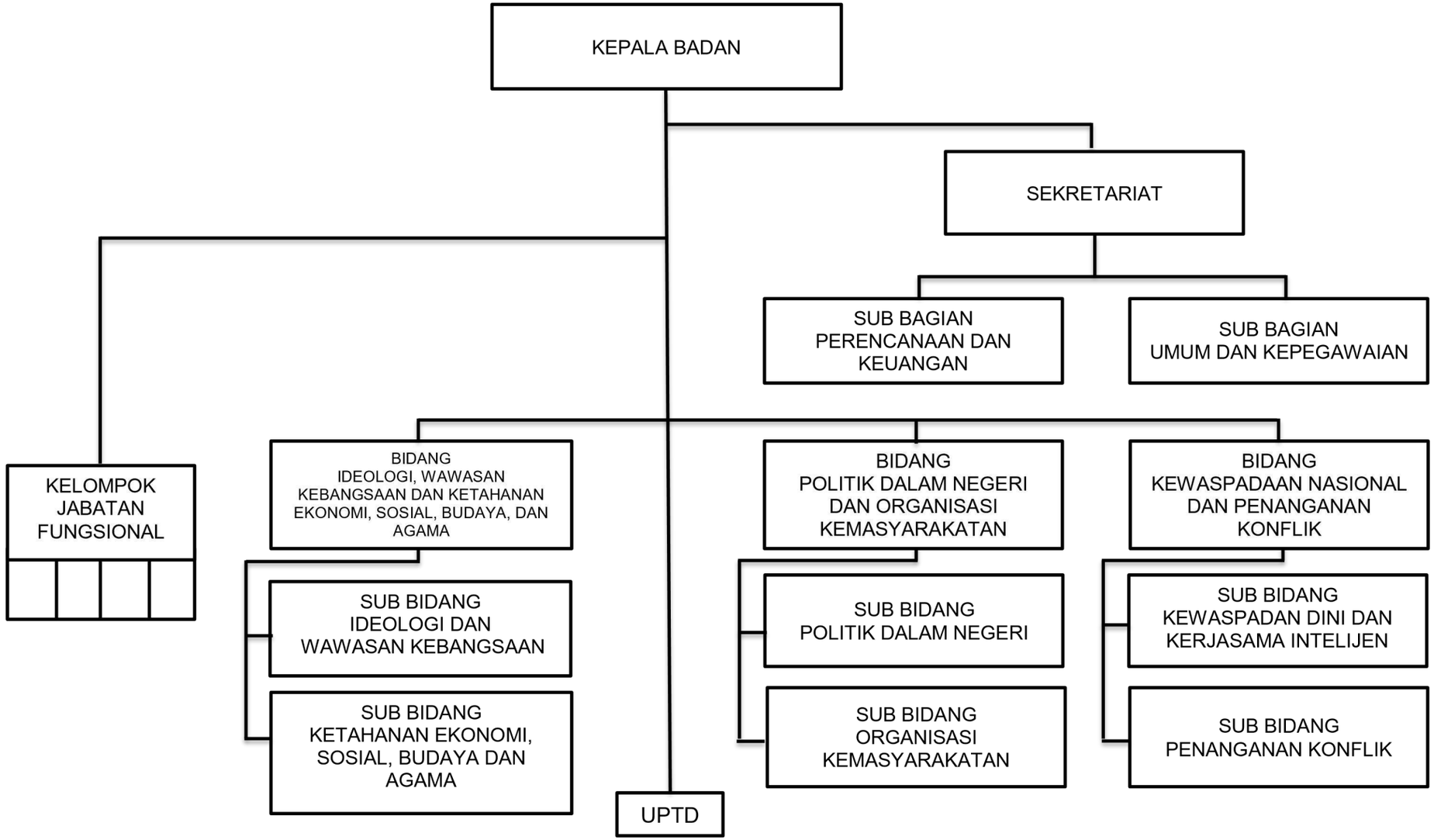

sumber : Peraturan Bupati Paser Nomor 32 Tahun 2020

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser terdapat dalam Tabel di bawah ini

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan III
Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -					Realisasi	Capaian Kinerja
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas		Indikator Penilaian mandiri reformasi birokrasi	70 B	73 B	75 B	80 B	85 B	4.845.074.098	65,76 %
			Nilai Sakip dari Inspektorat	B	B	BB	A	A	A 80B	
2	meningkatkan pemahaman idiologi pancasila dan wawasan kebangsaan	peningkatan kesadaran masyarakat tentang ideologi pancasila	100%	100%	100%	100%	100%	199.641.000	1.605.397.771	7536%
3	Mewujudkan Masyarakat yang memahami dan menjaga kesatuan bangsa dan politik	Mewujudkan Masyarakat kabupaten paser yang responsif dan bertanggung jawab dalam proses dan partisipasi pokitik yang demokratis	Fasilitasi penyelenggaraan pemilu	76%	78%	80%	85%	90%	2.151.355.065	86,67 %
4		mewujudkan pembinaan dan pemberdayaan ormas	Presentase masyarakat yang difasilitasi	80%	80%	90%	100%	100%	138.925.433	64,51%

5		mewujudkan ketahanan ekonomi,sosial budaya dan agama	fasilitasi kebijakan dibidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	80%	80%	90%	100%	100%	246.786.900	44,87%
6		Meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang tertib dan aman	terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Paser	100%	100%	100%	100%	100%	918.089.377	58,34 %

Berdasarkan Tabel di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan " Mewujudkan Masyarakat yang memahami dan menjaga kesatuan bangsa dan Politik." memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Terwujudnya lingkungan daerah yang kondusif", belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar Rp. 4.845.074.098 dari target sebesar Rp. 7.368.278.762 dengan capaian kinerja sebesar 65,76 %;

b. 1). Sasaran meningkatkan pemahaman ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan memiliki 1 indikator kinerja yaitu peningkatan kesadaran masyarakat tentang ideologi Pancasila belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar Rp 1.605.397.771 dari target sebesar Rp. 2.130.407.465 dengan capaian kinerja sebesar 75,36% .

2). Sasaran "Mewujudkan masyarakat Kabupaten paser yang responsif dan bertanggung jawab dalam proses dan partisipasi politik yang demokratis memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Fasilitasi penyelenggaraan pemilu", hampir mencapai target, dimana realisasinya sebesar Rp 2.151,355.065 dari target sebesar Rp. 2.482.173.607 dengan capaian kinerja sebesar 87,67%.

3). Sasaran mewujudkan pembinaan dan pemberdayaan ormas memiliki 1 indikator kinerja yaitu Presentase masyarakat yang difasilitasi belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar Rp 138.925.433 dari target sebesar Rp 215.360.531 dengan capaian kinerja sebesar 64,51 %.

4). Sasaran mewujudkan ketahanan ekonomi , sosial budaya dan agama memiliki 3 indikator kinerja yaitu fasilitasi kebijakan dibidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar Rp 246.785.900 dari target sebesar Rp. 295.000.000 dengan capaian kinerja sebesar 44,87 % .

5). Sasaran Meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang tertib dan aman memiliki 1 indikator kinerja yaitu terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Paser belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar Rp. 918.089.377 dari target sebesar Rp. 2.845.483.780 dengan capaian kinerja sebesar 58,34 %.

2.2. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih belum sesuai dengan Anggaran yaitu sebesar 69,17 % dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Periode Januari – September 2025 :

1. Adanya Kerja Sama yang solid menyebabkan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan yang dijadwalkan.

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Belum adanya kepastian tahapan pemilu sehingga untuk Anggaran Pendampingan Pemilu belum dapat dilaksanakan tepat waktu.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, beberapa target tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser mengalami perubahan penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Indikator	Formulasi	Target	
					Renja 2025	Perubahan Renja 2025
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel	Indikator Penilaian mandiri reformasi birokrasi	Cukup Jelas	65,76 %	85%
			Nilai Sakip dari Inspektorat	Cukup Jelas	A	A
2.		Meningkatkan pemahaman ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang ideologi pancasila	Jumlah terlaksananya peningkatan kesadaran masyarakat ttg Ideologi Pancasila / Jumlah Sosialiasi tahun (n) X 100%	75,36%	100 %
3.	Mewujudkan Masyarakat yang memahami dan menjaga kesatuan bangsa dan politik	Mewujudkan Masyarakat kabupaten paser yang responsif dan bertanggung jawab dalam proses dan partisipasi pokitik yang demokratis	Penyelenggaraan pemilu	Jumlah yang mengikuti partisipasi politik / Jumlah partisipasi politik X 100%	86,67%	80 %

4.		Mewujudkan pembinaan dan pemberdayaan ormas	Presentase masyarakat yang difasilitasi	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang masih aktif / Jumlah Organsisasi Kemasyarakatan Yang terdaftar X 100%	64,51%	75 %
5.		Mewujudkan ketahanan ekonomi,sosial budaya dan agama	Fasilitasi kebijakan dibidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	Jumlah terlaksananya peningkatan wawasan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama tahun (n) / Jumlah sosialisasi tahun (n) X 100%	44,87%	100 %

6.		Meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang tertib dan aman	Stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Paser	Jumlah konflik sosial yang terselesaikan / Jumlah Konflik Sosial yang ada X 100%	58,34%	100%

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2025 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023 yaitu "PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT" yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Penguatan Ekonomi Daerah.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser mendukung pencapaian sasaran ke-4 yakni meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan review dan analisa kebutuhan

terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 3

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Murni	Target Capaian	Pagu Perubahan
1	2	4	5	6	7	8
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			**16.689.387.613**		**16.678.514.625**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	100%	**7.505.905.555**	100%	**7.272.291.514**
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	100%	**194.905.513**	100%	**194.450.422**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	85.229.513	2 Dokumen	106.538.922
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	52.676.000	2 Dokumen	39.602.400
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD		2 Dokumen	22.000.000	2 Dokumen	18.224.500
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	35.000.000	4 Dokumen	30.084.600
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	97%	**6.733.472.192**	97%	**6.464.302.113**

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 orang/ Bulan	6.267.555.604	30 orang/ Bulan	6.267.555.604
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	270 Dokumen	465.916.588	150 Dokumen	196.746.509
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Daerah	96%	**497.417.850**	96%	**519.073.328**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	2.320.000	1 paket	2.304.651
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	137.132.850	2 Paket	180.118.996
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	45.000.000	2 Paket	50.100.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket bahan cetakan penggandaan yang disediakan	2 Paket	32.500.000	2 Paket	34.493.735
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitas kunjungan tamu	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	3.479.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	270.465.000	6 Laporan	243.576.946
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	100%	**5.000.000**	100%	**5.000.000**
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	**15.500.000**	100%	**26.999.185**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	10.500.000	4 Laporan	12.000.000

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	14.999.185
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Negara yang terpelihara	100%	**59.610.000**	100%	**62.466.466**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan nya	3 Unit	36.000.000	3 Unit	35.966.466
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara	10 Unit	23.610.000	10 Unit	26.500.000

2	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase penurunan konflik berbau SARA	100%	**2.284.753.229**	100%	**3.434.660.433**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Teknis dibidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	**2.284.753.229**	100%	**3.434.660.433**
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kebijakan teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dirumuskan	3 Dokumen	322.829.907	2 Dokumen	185.022.770
b	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dirumuskan	25 Orang	221.606.000	50 Orang	517.573.562

	Pembentukan Paskibraka		100 Orang	1.740.317.322	100 Orang	2.732.064.011
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	100%	**2.655.851.490**	100%	**2.341.078.759**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan yang dirumuskan	100%	**2.655.851.490**	100%	**2.341.078.759**

	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	150 Orang	91.000.000	150 Orang	56.375.000

	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	2.414.851.490	100 Orang	2.196.881.542
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3 Laporan	150.000.000	3 Laporan	87.822.217
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	persentase organisasi masyarakat (ormas) yang aktif	100%	**359.961.800**	100%	**356.455.379**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dirumuskan	100%	**356.961.800**	100%	**356.455.379**

	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang	156.961.800	200 Orang	241.771.901
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	100.000.000	300 Orang	64.591.739
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	50.091.739
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang ditindaklanjuti	100%	**1.489.817.770**	100%	**1.185.419.812**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan agama yang ditindaklanjuti	100%	**1.489.817.770**	100%	**1.185.419.812**
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	3 Dokumen	663.878.070	6 Dokumen	498.051.020

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	120 Orang	725.939.700		651.147.700

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	100.000.000	1 Dokumen	36.221.092
6	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan	100%	**2.369.097.769**	100%	**2.088.608.728**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya kebijakan teknis dan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	**2.369.097.769**	100%	**2.088.608.728**
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Dokumen	46.097.769	2 Dokumen	25.237.884

	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah yang disusun	2 Dokumen	76.097.769	3 Dokumen	78.798.904

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	20 Orang	150.000.000	20 Orang	102.450.000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 Orang	420.000.000	40 Orang	403.285.000
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6 Laporan	250.000.000		225.000.000

	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota FORKOPIMDA	2 Dokumen	1.453.902.231	4 Dokumen	1.253.836.940
	T O T A L			**16.689.387.613**		**14.319.829.093**

3.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Perubahan Rancangan RKPD 2025 tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Paser.

Tabel. 3 Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Nama OPD										
	Urusan ……..										
	Tidak Ada Usulan										

3.4. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Murni	Target Capaian	Pagu Perubahan	Bertambah / Berkurang
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				**16.689.387.613**		**16.678.514.625**	**(10.872.988)**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tanah Grogot	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	100%	**7.505.905.555**	100%	**7.272.291.514**	**(233.614.041)**
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanah Grogot	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	11 Dokumen	**194.905.513**	100%	**194.450.422**	**(455.091)**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanah Grogot	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	85.229.513	2 Dokumen	106.538.922	21.309.409
	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil Koordinas dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	52.676.000	2 Dokumen	39.602.400	(13.073.600)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD			2 Dokumen	22.000.000	2 Dokumen	18.224.500	(3.775.500)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanah Grogot	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen	35.000.000	4 Dokumen	30.084.600	(4.915.400)

b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tanah Grogot	Presentasi temuan yang ditindak lanjutin	97%	**6.733.472.192**	97%	**6.464.302.113**	**(269.170.079)**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanah Grogot	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 orang/ Bulan	6.267.555.604	30 orang/ Bulan	6.267.555.604	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tanah Grogot	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	270 Dokumen	465.916.588	150 Dokumen	196.746.509	(269.170.179)
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tanah Grogot	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	96%	**497.417.850**	96%	**519.073.328**	**21.655.478**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tanah Grogot	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	2.320.000	1 paket	2.304.651	(15.349)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanah Grogot	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	137.132.850	2 Paket	180.118.996	42.986.146
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanah Grogot	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	45.000.000	2 Paket	50.100.000	5.100.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tanah Grogot	Jumlah paket bahan cetakan penggandaan yang disediakan	2 Paket	32.500.000	2 Paket	34.493.735	1.993.735
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tanah Grogot	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tanah Grogot	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	3.479.000	(1.521.000)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanah Grogot	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	270.465.000	6 Laporan	243.576.946	(26.888.054)
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tanah Grogot	Tersedianya barang milik daerah	100%	**5.000.000**	100%	**5.000.000**	
	Pengadaan Mebel	Tanah Grogot	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tanah Grogot	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	**15.500.000**	100%	**26.999.185**	**11.399.185**

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanah Grogot	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	10.500.000	4 Laporan	12.000.000	1.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanah Grogot	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	14.999.185	9.999.185
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tanah Grogot	Terpeliharanya Barang Milik Negara yang terpelihara	100%	**59.610.000**	100%	**62.466.466**	**2.856.466**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanah Grogot	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan nya	3 Unit	36.000.000	3 Unit	35.966.466	(33.534)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanah Grogot	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	10 Unit	23.610.000	10 Unit	26.500.000	2.890.000
2	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Tanah Grogot	Persentase penurunan konflik berbau SARA	100%	**2.284.753.229**	100%	**3.434.660.433**	**1.149.907.204**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tanah Grogot	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan pemantapan bidang ideology Pancasila dan Karekter Bangsa yang dirumuskan	100%	**2.284.753.229**	100%	**3.434.660.433**	**1.149.907.204**
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tanah Grogot	Jumlah kebijakan teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dirumuskan	3 Dokumen	322.829.907	2 Dokumen	185.022.770	(137.807.137)

b	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Paser	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dirumuskan	25 Orang	221.606.000	50 Orang	517.573.562	295.967.562
	Pembentukan Paskibraka	Kab. Paser		100 Orang	1.740.317.322	100 Orang	2.732.064.011	991.746.689
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tanah Grogot	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	100%	**2.655.851.490**	100%	**2.341.078.759**	**(314.772.731)**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Tanah Grogot	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan yang dirumuskan	100%	**2.655.851.490**	100%	**2.341.078.759**	**(314.772.731)**
	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Program kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah					

	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah					
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah orang yang Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	150 Orang	91.000.000	150 Orang	56.375.000	(34.625.000)
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tanah Grogot	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	2.414.851.490	100 Orang	2.196.881.542	(217.969.948)

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3 Laporan	150.000.000	3 Laporan	87.822.217	(62.177.783)
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Tanah Grogot	persentase organisasi masyarakat (ormas) yang aktif	100%	**356.961.800**	100%	**356.455.379**	**(506.421)**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tanah Grogot	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dirumuskan	100%	**356.961.800**	100%	**356.455.379**	**(506.421)**
	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					

	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah orang yang mengikuti Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang	156.961.800	200 Orang	241.771.901	84.810.101
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	100.000.000	300 Orang	64.591.739	(35.408.261)
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	50.091.739	(49.908.261)
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Tanah Grogot	Persentase kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang ditindaklanjuti	100%	**1.489.817.770**	100%	**1.185.419.812**	**(304.397.958)**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tanah Grogot	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan agama yang ditindaklanjuti	100%	**1.489.817.770**	100%	**1.185.419.812**	**(304.397.958)**

	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	3 Dokumen	663.878.070	6 Dokumen	498.051.020	(165.827.050)
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Paser	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	120 Orang	725.939.700		651.147.700	(74.792.000)
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	100.000.000	1 Dokumen	36.221.092	(63.778.908)
6	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Tanah Grogot	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan	100%	**2.396.097.769**	100%	**2.088.608.728**	**(307.489.041)**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tanah Grogot	Terlaksananya kebijakan teknis dan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	**2.396.097.769**	100%	**2.088.608.728**	**(307.489.041)**
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Dokumen	46.097.769	2 Dokumen	25.237.884	(20.859.885)

	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	Tanah Grogot	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah yang disusun	2 Dokumen	76.097.769	3 Dokumen	78.798.904	2.701.135
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	20 Orang	150.000.000	20 Orang	102.450.000	(47.550.000)
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 Orang	420.000.000	40 Orang	403.285.000	(16.715.000)
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6 Laporan	250.000.000		225.000.000	(25.000.000)

	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota FORKOPIMDA	2 Dokumen	1.453.902.231	4 Dokumen	1.253.836.940	(200.065.291)
TOTAL					**16.689.387.613**		**16.678.514.625**	**(10.872.988)**

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2022 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Tana Paser, September 2025

Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Paser

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Nonding, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 197106071997031007



RENJA PERUBAHAN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

JL. Kusuma Bangsa Komplek Perkantoran KM. 5 Gd. D Lt. I Kav. II Tana Paser

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2025 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi

dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025 - 2045;
22. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
25. Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 100.3.3.2/KEP-741/2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasandalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2025

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2025 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025 Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2025 yang disertai perubahan target (jika ada)

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Pada bagian ini juga berisikan tanda tangan Kepala OPD.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Semester I Tahun 2025

Kode	Urusan/bid Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra S/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
02.12	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**									
02.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**80**	**100**	**74**	**99,38**	**134,30**	**76**	**91,79**	**114,74**
2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**97,5**	**97,50**	**100**	**99,17**	**99,17**
2.12.01.2.01.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	10	10	10	**100,00**	10	**10,00**	**100,00**
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10	10	10	9	**90,00**	10	**9,67**	**96,67**

2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2	0	2	2	**100,00**	2	**1,33**	**66,67**
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja	5	5	5	5	**100,00**	2	**4,00**	**80,00**
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase temuan ditindaklanjuti**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**100,00**	**100,00**
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	40	12	33	33	**100,00**	33	**26,00**	**65,00**
2.12.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	12	12	12	12	**100,00**	12	**12,00**	**100,00**
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**100,00**	**100,00**
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan mesin	4	10	10	10	**100,00**	4	**8,00**	**200,00**
2.12.01.2.06.03	Penyeediaan peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10	0	10	10	**100,00**	10	**6,67**	**66,67**
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan Perlangkapan Kebersihan	5	10	5	5	**100,00**	5	**6,67**	**133,33**
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	30	25	25	25	**100,00**	30	**26,67**	**88,89**
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumla Perjalanan Dinas dan Rapat Kordinasi	60	60	60	60	**100,00**	60	**60,00**	**100,00**
2.12.01.2.06.03	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	4	0	0	0	0	4	**1,33**	**33,33**

2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang inventaris dalam kondisi baik**	**52**	**12,73**	**47**	**100**	**212,77**	**50**	**54,24**	**104,31**
2.12.01.2.09.02	Penyediaan jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Mobil Operasional Yang Dipelihara	4	2	4	4	**100,00**	4	**3,33**	**83,33**
2.12.01.2.09.06	Penyediaan jasa pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah peralatan Komputer Yang Dipelihara	4	0	4	4	**100,00**	4	**2,67**	**66,67**
02.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)**	**98**	**99,18**	**97**	**99,46**	**102,54**	**98**	**98,88**	**100,90**
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase jumlah dokumen kependudukan pelayanan pendaftaran penduduk**	**98**	**75,62**	**96**	**75,62**	**78,77**	**98**	**83,08**	**84,78**
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	2	2	2	2	**100,00**	2	**2,00**	**100,00**
2.12.02.2.01.04	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	8.000	0	8.000	8.000	**100,00**	8.000	**5.333,33**	**66,67**
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan	12	0	12	0	-	12	**4,00**	**33,33**

2.12.02.2.02	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase jumlah dokumen penataan pendaftaran penduduk**	**98**	**0**	**97**	**86,72**	**89,40**	**98**	**61,57**	**62,83**
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP- El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	10.000	0	10.000	10.000	**100,00**	10.000	**6.666,67**	**66,67**
2.12.02.2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase jumlah laporan/data/dokumen penyelenggaraan pendafataran penduduk**	**98**	**0**	**97**	**100**	**103,09**	**98**	**66,00**	**67,35**
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	10	0	10	10	**100,00**	10	**6,67**	**66,67**
02.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)**	**98**	**98,92**	**97**	**109,53**	**112,92**	**98**	**102,15**	**104,23**
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Persentase Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil**	**98**	**99,54**	**97**	**100**	**103,09**	**98**	**99,18**	**101,20**
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas	6.000	6.000	6.000	6.000	**100,00**	6.000	**6.000,00**	**100,00**
2.12.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Persentase jumlah laporan/data/dokumen penyelenggaraan pendafataran penduduk**	**98**	**0**	**96**	**0**	**-**	**98**	**32,67**	**33,33**
2.12.03.2.01.01	Sosialisasi Terkait Pencacatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	10	0	0	0	**#DIV/0!**	50	**16,67**	**166,67**

02.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase data kependudukan yang valid**	**98**	**100**	**97**	**100**	**103,09**	**98**	**99,33**	**101,36**
2.12.04.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan**	**98**	**100**	**97**	**100**	**103,09**	**98**	**99,33**	**101,36**
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12	100	12	12	**100,00**	12	**41,33**	**344,44**
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**98**	**90,62**	**97**	**83,33**	**85,91**	**98**	**90,65**	**92,50**
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	**0**	1	1	**100,00**	2	**1,00**	**50,00**
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	0	2	1	**50,00**	2	**1,00**	**50,00**
2.12.04.2.03.06	Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	1	100	1	1	**100,00**	1	**34,00**	**3.400,00**
2.12.04.2.04	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data**	**98**	**0**	**97**	**100**	**103,09**	**2**	**34,00**	**34,69**

2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	4	0	4	4	**100,00**	4	**2,67**	**66,67**
02.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Terlaksananya Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah**	**100%**	**0**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**66,67**	**6.666,67**
2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	Persentase Laporan Profil Kependudukan	100	0	100	100	**100,00**	100	**66,67**	**66,67**
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan	4	0	4	4	**100,00**	4	**2,67**	**66,67**

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2025 Triwulan II dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga Triwulan II adalah 49,60%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.154.601.204,00 (Lima milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus seribu dua ratus empat rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 13.959.302.869,00 (Tiga belas milyar Sembilan ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus dua ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah) atau sebesar 36,92%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 32,5% dengan predikat kinerja Rendah.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 1 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 1 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 1 indikator capaian kinerja 0%-50% = 23 indikator

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksudn pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
   a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
   b. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
   c. pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   d. pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas;
   e. penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
   f. perumusan kebijakan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   g. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan;
   h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana
   j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   k. pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
   l. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas;
   m. pembinaan Jabatan Fungsional pada Dinas sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
   o. pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;
   p. penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   q. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan

yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

r. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah, dan;

s. pelaksanaan fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Pelayanan Pencatatan Sipil
3. Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan

Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan
2. Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KTP, KK)
3. Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)
4. Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2.1

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi s.d Triwulan II	Capaian Indikator Tahun Berjalan (%)	Program Pendukung IKU	Anggaran Program Pendukung IKU	Realisasi Anggaran Program	% Realisasi Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TUJUAN 1: Meningkatkan Penataan dan pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan	83	87,51	105,43		Rp 13.959.302.869,00	Rp 5.154.601.204,00	36,93	
	SASARAN 1: Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	2 Jam	1 Jam	2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 139.210.988,00	Rp 60.753.700,00	43,64	
		Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	1 Jam	30 Menit	1	Program Pencatatan Sipil	Rp 107.937.575,00	Rp 46.682.150,00	43,25	
	SASARAN 2: Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	25%	0%	0%	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 2.131.782.031,00	Rp 791.576.400,00	37,13	

Berdasarkan Tabel 2.2.1 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Sasaran 1 “Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil” memiliki 2 indikator kinerja yaitu “Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KTP, KK)” dan “Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)” mencapai target, dimana realisasinya sebesar 2 Jam dari target sebesar 2 Jam dengan capaian kinerja sebesar 100%;

b. Sasaran 2 “Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan” belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 0 OPD/Lembaga dari target sebesar 25% dengan capaian kinerja sebesar 0%, dikarenakan masih menunggu feedback dari Dirjen Kemendagri terkait pelaporan Kerja Sama yang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser kirimkan (masih dalam proses);

Tabel 2.2.2

Pencapaian IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

No.	IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Capaian
2.K.1.1	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah Penduduk Berumur 17 Tahun Ke atas yang Memiliki KTP	Jumlah Penduduk Berumur 17 Tahun Ke atas yang Memiliki KTP x 100% Jumlah Penduduk 17 Tahun Ke atas	99,74%
2.K.1.2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah Anak Usia 0 - 17 Tahun Memiliki KIA yang Belum Menikah	Jumlah Anak Usia 0 - 17 Tahun Memiliki KIA yang Belum Menikah x 100% Jumlah Anak Usia 0 - 17 Tahun yang Belum Menikah	68,19%
2.K.1.3	Kepemilikan Akta Lahir	Jumlah Anak Usia 0 - 17 Tahun yang Sudah Memiliki Akta Kelahiran	Jumlah Anak Usia 0 - 17 Tahun yang Sudah Memiliki Akta Kelahiran x 100% Jumlah Penduduk Usia 0 - 17 Tahun	98,44%
2.K.1.4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama x 100% Jumlah OPD	0,00%

Berdasarkan Tabel 2.2.2 Di atas, pencapaian target IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. IKK Outcome 1 “Perekaman KTP Elektronik” dengan Output Jumlah Penduduk Berumur 17 Tahun ke atas yang memiliki KTP, dimana capaiannya sebesar 99,74%;
b. IKK Outcome 2 “Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA” dengan Output Jumlah Anak Usia 0 – 17 Tahun Memiliki KIA yang Belum Menikah, dimana capaiannya sebesar 68,19%;
c. IKK Outcome 3 “Kepemilikan Akta Lahir” dengan Output Jumlah Anak Usia 0 - 17 Tahun yang Sudah Memiliki Akta Kelahiran, dimana capaiannya sebesar 98,44%;
d. IKK Outcome 4 “Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama” dengan Output J Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama, dimana capaiannya sebesar 0%.

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Periode Juni 2025:

1. Pelayanan Langsung (Jemput Bola) ke desa-desa;
2. Penggunaan sosial media dalam penyebaran informasi terkait pelayanan Adminduk;
3. Pelayanan hari minggu di CFD (Car Free Day);
4. Bimbingan Teknis bagi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Kurangnya SDM;
2. Kurangnya Pejabat Fungsional;
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Operator Pelayanan;
4. Koordinasi dengan pusat yang memerlukan waktu;
5. Efisiensi Anggaran.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2025.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Pelayanan Publik perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2022-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025
Tujuan: Meningkatkan Penataan dan pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan	Nilai Persepsi Unsur Layanan / Jumlah Unsur Layanan x Bobot Unsur	83	83
Sasaran 1: Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	Waktu maksimal penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP) dari pemohon datang hingga dokumen diterbitkan	2 Jam	2 Jam
	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	Waktu maksimal penyelesaian dokumen catatan sipil (akta kelairan, akta kematian,akta pengangkatan anak, akta perceraian/perkawinan) dari pemohon datang hingga dokumen diterbitkan	1 Jam	1 Jam
Sasaran 2: Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	Lembaga Pengguna Data Kependudukan / Jumlah Lembaga yang ada di Kab. Paser x 100	25	25

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2025 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 yaitu ""PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DI SELURUH KABUPATEN PASER"" yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung pencapaian sasaran ke 4, yaitu "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik".

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel. 3.2
Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	RANCANGAN AWAL 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**Kab. Paser**	**76**	**12.341.591.192,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**Kab. Paser**	**76**	**14.254.619.870,80**	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD**	**Kab. Paser**	**100**	**251.374.000,00**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD**	**Kab. Paser**	**100**	**350.870.100,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	10	70.974.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	10	81.620.100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	5	37.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	5	75.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	10	47.900.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	10	85.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja	Kab. Paser	2	95.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja	Kab. Paser	2	109.250.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase temuan ditindaklanjuti**	**Kab. Paser**	**100**	**9.678.528.467,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase temuan ditindaklanjuti**	**Kab. Paser**	**100**	**11.130.307.737,05**	
		Persentase LHP nihil		**100**			**Persentase LHP nihil**		**100**		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Paser	68	9.188.240.063,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Paser	68	10.566.476.072,45	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser	12	490.288.404,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser	12	563.831.664,60	

No.	RANCANGAN AWAL 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	9	10
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**Kab. Paser**	**100**	**2.271.072.725,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**Kab. Paser**	**100**	**2.611.733.633,75**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	12	690.077.041,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	12	793.588.597,15	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kab. Paser	1	5.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kab. Paser	1	5.750.000,00	
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Paser	28	835.668.080,00	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Paser	28	961.018.292,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	Kab. Paser	9	113.276.300,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	Kab. Paser	9	130.267.745,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumla Perjalanan Dinas dan Rapat Kordinasi	Kab. Paser	40	272.051.304,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumla Perjalanan Dinas dan Rapat Kordinasi	Kab. Paser	40	312.858.999,60	
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kab. Paser	4	355.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kab. Paser	4	408.250.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang inventaris dalam kondisi baik**	**Kab. Paser**	**50**	**140.616.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang inventaris dalam kondisi baik**	**Kab. Paser**	**50**	**161.708.400,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Operasional Yang Dipelihara	Kab. Paser	3	68.356.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Operasional Yang Dipelihara	Kab. Paser	3	78.609.400,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan Komputer Yang Dipelihara	Kab. Paser	100	72.260.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan Komputer Yang Dipelihara	Kab. Paser	100	83.099.000,00	

No.	RANCANGAN AWAL 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	9	10
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)**	**Kab. Paser**	**98**	**319.891.975,00**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)**	**Kab. Paser**	**98**	**367.875.771,25**	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Persentase jumlah dokumen kependudukan pelayanan pendaftaran penduduk**	**Kab. Paser**	**98**	**304.891.975,00**	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase jumlah dokumen kependudukan pelayanan pendaftaran penduduk**	**Kab. Paser**	**98**	**350.625.771,25**	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Kab. Paser	2	15.000.000,00	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Kab. Paser	2	17.250.000,00	
	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	8000	274.891.975,00	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	8000	316.125.771,25	
	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Paser	12	15.000.000,00	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Paser	12	17.250.000,00	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Persentase jumlah laporan/data/dokumen penyelenggaraan pendafataran penduduk**	**Kab. Paser**	**98**	**15.000.000,00**	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase jumlah laporan/data/dokumen penyelenggaraan pendafataran penduduk**	**Kab. Paser**	**98**	**17.250.000,00**	
	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	2	15.000.000,00	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	2	17.250.000,00	

No.	RANCANGAN AWAL 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	9	10
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)**	**Kab. Paser**	**98**	**238.620.075,00**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)**	**Kab. Paser**	**98**	**274.413.086,25**	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	**Persentase Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Kab. Paser**	**98**	**218.620.075,00**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Persentase Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Kab. Paser**	**98**	**251.413.086,25**	
	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Paser	6000	218.620.075,00	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Paser	6000	251.413.086,25	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Persentase Jumlah laporan penyelenggaraan pencatatan sipil**	**Kab. Paser**	**98**	**20.000.000,00**	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Persentase Jumlah laporan penyelenggaraan pencatatan sipil**	**Kab. Paser**	**98**	**23.000.000,00**	
	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	Kab. Paser	4	20.000.000,00	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	Kab. Paser	4	23.000.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Persentase data kependudukan yang valid**	**Kab. Paser**	**98**	**1.468.977.866,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase data kependudukan yang valid**	**Kab. Paser**	**98**	**1.689.324.545,90**	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Persentase Jumlah Dokumen pengumpulan, pemanfaatan dan penyajian database kepenedudukan**	**Kab. Paser**	**98**	**732.020.000,00**	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Persentase Jumlah Dokumen pengumpulan, pemanfaatan dan penyajian database kepenedudukan**	**Kab. Paser**	**98**	**841.823.000,00**	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kab. Paser	12	732.020.000,00	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kab. Paser	12	841.823.000,00	

No.	RANCANGAN AWAL 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	9	10
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Persentase jumlah dokumen/laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Kab. Paser**	**98**	**386.957.866,00**	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase jumlah dokumen/laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Kab. Paser**	**98**	**445.001.545,90**	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	2	177.065.615,00	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	2	203.625.457,25	
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	2	76.474.206,00	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	2	87.945.336,90	
	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Kab. Paser	1	133.418.045,00	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Kab. Paser	1	153.430.751,75	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Persentase dokumen/laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Kab. Paser**	**98**	**350.000.000,00**	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase dokumen/laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Kab. Paser**	**98**	**402.500.000,00**	
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data	Kab. Paser	4	350.000.000,00	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data	Kab. Paser	4	402.500.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**Persentase pemanfaatan data kependudukan**	**Kab. Paser**	**100**	**164.916.400,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase pemanfaatan data kependudukan**	**Kab. Paser**	**100**	**189.653.860,00**	
	Penyusunan Profil Kependudukan	**Persentase Laporan Profil Kependudukan**	**Kab. Paser**	**100**	**164.916.400,00**	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Persentase Laporan Profil Kependudukan**	**Kab. Paser**	**100**	**189.653.860,00**	

	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Persentase pemanfaatan data kependudukan	Kab. Paser	4	164.916.400,00	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Persentase pemanfaatan data kependudukan	Kab. Paser	4	189.653.860,00	
JUMLAH					**14.533.997.508,00**	**JUMLAH**				**16.775.887.134,20**	

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | **REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.00.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp. 15.337.439.486	Rp. 695.234.365			Rp. 16.032.673.851	Rp. 13.893.474.624	Rp. 640.522.884			Rp. 14.533.997.508	Rp. 15.055.928.706,00
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				Rp. 15.337.439.486	Rp. 695.234.365			Rp. 16.032.673.851	Rp. 13.893.474.624	Rp. 640.522.884			Rp. 14.533.997.508	Rp. 15.055.928.706,00
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 11.541.525.860	Rp. 695.234.365			Rp. 12.236.760.225	Rp. 11.701.068.308	Rp. 640.522.884			Rp. 12.341.591.192	Rp. 10.093.996.659,00
2	12	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 290.000.000				Rp. 290.000.000	Rp. 251.374.000				Rp. 251.374.000	Rp. 428.000.000,00
2	12	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 70.000.000				Rp. 70.000.000	Rp. 70.974.000				Rp. 70.974.000	Rp. 96.000.000,00

2	12	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 75.000.000				Rp. 75.000.000	Rp. 37.500.000				Rp. 37.500.000	Rp. 140.000.000,00
2	12	01	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 85.000.000				Rp. 85.000.000	Rp. 47.900.000				Rp. 47.900.000	Rp. 96.000.000,00
2	12	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 60.000.000				Rp. 60.000.000	Rp. 95.000.000				Rp. 95.000.000	Rp. 96.000.000,00
2	12	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 10.007.455.663				Rp. 10.007.455.663	Rp. 9.678.528.467				Rp. 9.678.528.467	Rp. 8.507.996.659,00
2	12	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 9.588.240.063				Rp. 9.588.240.063	Rp. 9.188.240.063				Rp. 9.188.240.063	Rp. 8.443.317.259,00
2	12	01	2,02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 419.215.600				Rp. 419.215.600	Rp. 490.288.404				Rp. 490.288.404	Rp. 64.679.400,00
2	12	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 1.103.454.197	Rp. 695.234.365			Rp. 1.798.688.562	Rp. 1.630.549.841	Rp. 640.522.884			Rp. 2.271.072.725	Rp. 1.002.000.000,00
2	12	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 121.560.346	Rp. 692.440.516			Rp. 814.000.862	Rp. 52.348.006	Rp. 637.729.035			Rp. 690.077.041	Rp. 120.000.000,00
2	12	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 2.206.151	Rp. 2.793.849			Rp. 5.000.000	Rp. 2.206.151	Rp. 2.793.849			Rp. 5.000.000	Rp. 120.000.000,00
2	12	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 183.911.400				Rp. 183.911.400	Rp. 835.668.080				Rp. 835.668.080	Rp. 120.000.000,00
2	12	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 113.276.300				Rp. 113.276.300	Rp. 113.276.300				Rp. 113.276.300	Rp. 72.000.000,00
2	12	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 207.500.000				Rp. 207.500.000	Rp. 272.051.304				Rp. 272.051.304	Rp. 300.000.000,00
2	12	01	2,06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 475.000.000				Rp. 475.000.000	Rp. 355.000.000				Rp. 355.000.000	Rp. 270.000.000,00

2	12	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 140.616.000				Rp. 140.616.000	Rp. 140.616.000				Rp. 140.616.000	Rp. 156.000.000,00
2	12	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		Rp. 68.356.000				Rp. 68.356.000	Rp. 68.356.000				Rp. 68.356.000	Rp. 72.000.000,00
2	12	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang		Rp. 72.260.000				Rp. 72.260.000	Rp. 72.260.000				Rp. 72.260.000	Rp. 84.000.000,00
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				Rp. 271.815.975				Rp. 271.815.975	Rp. 319.891.975				Rp. 319.891.975	Rp. 1.434.300.000,00
2	12	02	2,01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk				Rp. 256.815.975				Rp. 256.815.975	Rp. 304.891.975				Rp. 304.891.975	Rp. 1.053.900.000,00
2	12	02	2,01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 252.000.000,00
2	12	02	2,01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 226.815.975				Rp. 226.815.975	Rp. 274.891.975				Rp. 274.891.975	Rp. 602.400.000,00
2	12	02	2,01	0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 199.500.000,00
2	12	02	2,02		Penataan Pendaftaran Penduduk				Rp. 0				Rp. 0	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 240.000.000,00
2	12	02	2,02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0				Rp. 0	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 240.000.000,00
2	12	02	2,03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 140.400.000,00

2	12	02	2,03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 140.400.000,00
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				Rp. 188.710.000	Rp. 0			Rp. 188.710.000	Rp. 238.620.075	Rp. 0			Rp. 238.620.075	Rp. 803.217.240,00
2	12	03	2,01		Pelayanan Pencatatan Sipil				Rp. 168.710.000	Rp. 0			Rp. 168.710.000	Rp. 218.620.075	Rp. 0			Rp. 218.620.075	Rp. 663.777.240,00
2	12	03	2,01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 168.710.000	Rp. 0			Rp. 168.710.000	Rp. 218.620.075	Rp. 0			Rp. 218.620.075	Rp. 663.777.240,00
2	12	03	2,02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 139.440.000,00
2	12	03	2,02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 139.440.000,00
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				Rp. 3.170.471.251				Rp. 3.170.471.251	Rp. 1.468.977.866				Rp. 1.468.977.866	Rp. 2.621.495.127,00
2	12	04	2,01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				Rp. 1.616.120.000				Rp. 1.616.120.000	Rp. 732.020.000				Rp. 732.020.000	Rp. 2.089.730.727,00
2	12	04	2,01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.616.120.000				Rp. 1.616.120.000	Rp. 732.020.000				Rp. 732.020.000	Rp. 2.089.730.727,00
2	12	04	2,03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				Rp. 1.204.351.251				Rp. 1.204.351.251	Rp. 386.957.866				Rp. 386.957.866	Rp. 383.924.400,00
2	12	04	2,03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 126.400.000				Rp. 126.400.000	Rp. 177.065.615				Rp. 177.065.615	Rp. 50.892.000,00
2	12	04	2,03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 64.533.206				Rp. 64.533.206	Rp. 76.474.206				Rp. 76.474.206	Rp. 104.881.200,00

2	12	04	2,03	0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.013.418.045				Rp. 1.013.418.045	Rp. 133.418.045				Rp. 133.418.045	Rp. 228.151.200,00
2	12	04	2,04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				Rp. 350.000.000				Rp. 350.000.000	Rp. 350.000.000				Rp. 350.000.000	Rp. 147.840.000,00
2	12	04	2,04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 350.000.000				Rp. 350.000.000	Rp. 350.000.000				Rp. 350.000.000	Rp. 147.840.000,00
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				Rp. 164.916.400				Rp. 164.916.400	Rp. 164.916.400				Rp. 164.916.400	Rp. 102.919.680,00
2	12	05	2,01		Penyusunan Profil Kependudukan				Rp. 164.916.400				Rp. 164.916.400	Rp. 164.916.400				Rp. 164.916.400	Rp. 102.919.680,00
2	12	05	2,01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 164.916.400				Rp. 164.916.400	Rp. 164.916.400				Rp. 164.916.400	Rp. 102.919.680,00
Jumlah									**Rp. 15.337.439.486**	**Rp. 695.234.365**			**Rp. 16.032.673.851**	**Rp. 13.893.474.624**	**Rp. 640.522.884**			**Rp. 14.533.997.508**	**Rp. 15.055.928.706,00**

BAB IV
PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai. Ketersediaan anggaran menjadi kunci untuk mewujudkan renja yang sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah. Renja Perubahan disusun berdasarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2025 - 2029. Renja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program kerja menuju aparatur pemerintah yang profesional, bersih dan akuntabel. Disamping itu Renja merupakan tolak ukur capaian kinerja, baik yang dilakukan secara individu tim maupun Institusi dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Dokumen Renja selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi program prioritas satu tahun kedepan, sehingga agar memperhatikan hal – hal sebagai berikut

5.1. Catatan Penting

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Dimana Renja sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2025 terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan. Jika dalam proses perkembangannya serta ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan Rencana Kerja disebabkan adanya kebijakan baru, maka diperlukan penyesuaian seperti pengurangan Sub Kegiatan yang memiliki prioritas paling sedikit dalam mendukung IKU maupun IKK tahunan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2025-2029.

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

5.3. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Tanah Grogot, 4 Agustus 2025
Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Paser

PEMERINTAH KABUPATEN DISDUKCAPIL PASER

Mohd. Isnaini Yanuardi, S. Hut. MM
NIP. 197001051998031010

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 Kecamatan Tanah Grogot

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANAH GROGOT
Jl. Pangeran Menteri No. 1 Telp (0543) 21091
TANAH GROGOT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen **“ PERUBAHAN Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2025”** ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025 untuk melaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika pelaksanaan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2025.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan Kecamatan Tanah Grogot yang lebih baik di Kabupaten Paser. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser pada khususnya, sehingga pembangunan di Kabupaten Paser dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser.

Tanah Grogot, 22 Agustus 2025

Camat Tanah Grogot,

Abdul Rasyid, S.STP, MA
Pembina Tk. I
NIP. 19790716 200003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI.....iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 2

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 34

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangat Daerah 40

2.4 Review Terhadap Perubahan Renja RKPD 42

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 54

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional 55

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tanah Grogot 56

3.3 Program dan Kegiatan 58

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan 133

BAB V PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari amanat Peturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di Kabupaten Paser. Berdasarkan diktum kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan kepada daerah untuk menetapkan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. Adapun Misi Kecamatan Tanah Grogot adalah sebagai berikut :

1. Misi ke 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien melalui Pemerintahan yang Profesional, Partisipatif dan Transparan.
2. Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Rancangan Renja Perubahan Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2025 merupakan output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tanah Grogot.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja(RENJA) Tahun 2025 Kantor Kecamatan Tanah Grogot adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan sebagai Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Dearah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
16. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahPemerintah Kabupaten Paser;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Paser Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kecamatan;
20. Peraturan Bupati Paser Nomor 100.3.3.2/KEP-741/2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Tanah Grogot dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada RKPD Kabupaten Paser tahun 2025 dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2021-2026. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Tanah Grogot dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Kecamatan Tanah Grogot dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Paser tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanah Grogot dalam mencapai visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Paser.
2. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2025.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2025.
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tanah Grogot
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1. Program dan Kegiatan
BAB V. PENUTUP
LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Tanah Grogot telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2024 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2025), bahwa dalam mencapai kinerja progran dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2021 – 2026 telah dilaksanakan dengan baik.

Dari total anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan tanah Grogot Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 16.814.671.391,00 telah terserap sesuai dengan realisasi keuangan sebesar Rp 15.763.502.493,00 atau sebesar 93,75**%** dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.051.168.898,00 dengan rincian alokasi dana sebagai berikut :

1. **Belanja Tidak Langsung**

   Pagu dana sebesar Rp 5.705.820.445,00 dengan capain realisasi keuangan sebesar Rp 4.901.937.647,00 atau sebesar 85,91% dengan sisa anggaran sebesar Rp 803.882.798,00

2. **Belanja Langsung**

   Pagu dana sebesar Rp11.108.850.946,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 10.861.564.846,00 atau sebesar 96,15% dan sisa anggaran adalah sebesar 122.625.419,00 dengan rincian alokasi dana sebagian berikut;

   1) Belanja Barang dan Jasa

      Dengan pagu sebesar Rp8.038.294.069,00 dengan Realisasi keuangan sebesar Rp 7.887.506.647,00 atau 98,12% dan sisa anggaran sebesar Rp 150.787.422,00

   2) Belanja Modal

      Dengan pagu sebesar Rp3.070.294.069,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.974.058.199,00 atau sebesar 96,86% dan sisa anggaran sebesar Rp 96.498.678,00

Adapun hasil analisa yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja dan keuangan dapat dikategorikan sebagai berikut :

Secara keseluruhan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 telah memenuhi target kinerja dan keuangan yang direncanakan.

Adapun realisasi capaian program yang tidak memenuhi capaian target kinerja dan keuangan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA SUB KEGIATAN	CAPAIAN KEUANGAN	CAPAIAN KINERJA
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0

1) Faktor Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Target

Secara umum tidak ada hambatan atau kendala yang berarti dalam pencapaian target kinerja dan keuangan. Keberhasilan capaian kinerja dan keuangan yang dicapai disebabkan karena pelaksanaan program maupun kegiatan dilakukan tepat waktu. Sedangkan kegagalan capaian keuangan disebabkan oleh :

Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan tidak terealisasi karena dasar pembayaran pajak atas kendaraan roda dua dan mobil damkar hibah dari Pemadam Kebakaran berdasarkan info yang didapat minimal 2 tahun pemakaian baru bisa pajaknya dibayarkan sehingga anggaran yang sudah direncanakan tidak terealisasi.

2) Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi atau dampak langsung yang timbul dari pencapaian target realisasi capaian kinerja terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya lingkungan Daerah yang Kondusif.

b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

3) Kebijakan untuk menindaklanjuti kegagalan pencapaian target

Kebijakan ataupun Tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk mengantisipasi kegagalan pencapaian kinerja Program/ Kegiatan adalah :

a. Dengan melakukan perencanaan dan penganggaran yang lebih matang
b. Melakukan efisiensi serta efektifitas anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan
c. Evaluasi dan estimasi serapan anggaran secara berkala sebagai bahan pertimbangan pada saat penyusunan anggaran perubahan di Tahun berjalan, sehingga tidak terjadi kelebihan anggaran di satu program atau kegiatan yang pada akhirnya tidak mampu terserap secara maksimal
d. Perlu adanya peningkatan keterampilan serta kompetensi

Adapun hasil rekapitulasi evaluasi rencana kerja Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

TC. 29
Evaluasi Terhadap Hasil Renja
TW IV

NO	SASARAN	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Faktor Penyebab tidak Tercapainya Realisasi Kinerja	Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab	Sub Unit Penanggung Jawab
								I		II		III		IV						
						Kecamatan		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah						
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11				15
				K	RP	K	RP	RP	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			

1	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan dan Kelurahan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80	**6.469.823.896**	74	**7.404.381.241**	**496.896.163**	**7.901.277.404**	19,00	**1.200.948.196**	20	**2.122.328.216**	**15,00**	**1.592.426.605**	**20**	**2.105.149.386**	**74**	**7.020.852.403**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	**100**	**34.295.872**	**100**	**102.731.800**		**102.731.800**	**30,00**	**8.112.100**	**20**	**7.604.800**	**30,00**	**22.926.800**	**20**	**63.988.576**	**100**	**102.632.276**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	4	19.481.072	4	84.731.800		**84.731.800**	1,00	**6.212.100**	1	**7.604.800**	1,00	**18.876.800**	1	**51.948.576**	**4**	**84.642.276**			**Kantor Kec. Tanah**

		Perangkat Daerah	Daerah																	**Grogot**
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	**4**	14.814.800	4	18.000.000		**18.000.000**	2,00	**1.900.000**	**1**	-	**1,00**	**4.050.000**		**12.040.000**	**4**	**17.990.000**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen Keuangan yang tepat waktu	**100**	**5.867.762**	**100**	**5.965.207.773**	**95.126.208**	**6.060.333.981**	25,00	**963.340.285**	**25**	**1.894.087.680**	**25,00**	**1.031.757.428**	**25**	**1.310.896.334**	**100**	**5.209.581.727**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	5.504.898.963	37	5.650.996.245		**5.650.996.245**	37,00	**892.820.485**	37	**1.777.810.800**	37,00	**980.917.668**	37	**1.195.564.494**	**37**	**4.847.113.447**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksana	12	343.009.605	12	295.121.728	95.126.208	**390.247.936**	3,00	**72.880.100**	3	**116.276.880**	3,00	**50.839.760**	3	**103.381.840**	**12**	**343.378.580**			**Kantor Kec. Tanah**

			an																	**Grogot**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	19.853.600	1	19.089.800		**19.089.800**	1,00	**7.139.700**	0	-		-		**11.950.000**	**1**	**19.089.700**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan pelayanan Administrasi Umum PD yang berjalan dengan baik	**100**	**212.178.216**	**100**	**570.904.276**	**107.161.891**	**678.066.167**	25	**148.127.220**	25	**108.830.551**	25	**193.589.342**	**25**	**219.752.926**	**100**	**690.642.439**			

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**3**	**5.643.238**	**3**	3.550.200	10.196.800	**13.747.000**	**1,00**	**4.935.090**	1	**6.906.110**	1,00	**907.900**		**995.600**	**3**	**13.744.700**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	**1**	**-**	**1**			**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**0**	**-**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	59.511.639	12	47.200.800	39.331.296	**86.532.096**	3,00	**29.020.185**	3	**14.223.571**	3,00	**37.045.400**	3	**1.038.400**	**12**	**81.327.556**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**

		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	21.442.366	3	35.143.000	12.636.795	**47.779.795**	1,00	**14.098.260**	1	**8.705.885**	1,00	**33.567.768**		**11.599.100**	**3**	**67.971.013**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**12**	80.277.600	12	485.010.276	44.997.000	**530.007.276**	3,00	**100.073.685**	3	**78.994.985**	3,00	**142.410.674**	3	**206.119.826**	**12**	**527.599.170**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang pada PD dalam kondisi baik	**100**	**7.826.943**	**100**	**345.662.110**	**151.574.800**	**497.236.910**	**25,00**	-	**25**	-	**25,00**	**207.216.204**	**25**	**280.780.000**	**100**	**487.996.204**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan	**2**	**7.826.943**	**2**	**345.662.110**	**151.574.800**	**497.236.910**	**1,00**	-		-		**207.216.204**	1	**280.780.000**	**2**	**487.996.204**			**Kantor Kec. Tana**

			Mesin Lainnya yang Disediakan																	**h Grogot**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor	**100**	**160.522.613**	**100**	**144.833.440**	**89.453.264**	**234.286.704**	25,00	**43.749.891**	**25**	**56.912.985**	**25,00**	**60.246.546**	**25**	**67.744.050**	**100**	**224.854.880**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**4**	**2.500.000**	4	2.500.000		**2.500.000**	**1,00**	**615.700**	1	**628.800**	1,00	**615.700**	1	**31.179.399**	**4**	**33.039.599**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	**4**	**145.265.962**	4	77.933.440	89.453.264	**167.386.704**	1,00	**33.934.191**	1	**24.885.593**	1,00	**50.430.846**	1	**18.164.651**	**4**	**127.415.281**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**

			Disediakan																	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**1**	**12.756.651**	4	64.400.000		**64.400.000**	1,00	**9.200.000**	1	**27.600.000**	1,00	**9.200.000**	1	**18.400.000**	**4**	**64.400.000**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan inventarisasi pada PD dalam kondisi baik	**100**	**140.674.394**	**100**	**275.041.842**	**53.580.000**	**328.621.842**	25,00	**30.930.800**	**25**	**54.892.200**	**25,00**	**76.690.285**	**25**	**161.987.500**	**100**	**324.500.785**			

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**4**	-	**4**	-		**-**		-		-		-	-	-	**0**	-			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**4**	**8.965.320**	**4**	33.790.400	18.580.000	**52.370.400**	**1,00**	**13.655.500**	1	**6.770.000**	1,00	**14.316.200**	1	**15.177.500**	**4**	**49.919.200**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**2**	**130.440.274**	**2**	118.632.670		**118.632.670**	**1,00**	**17.275.300**	1	**45.682.200**		**17.457.300**		**37.599.500**	**2**	**118.014.300**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	**1.268.800**	2	122.618.772		**122.618.772**	-	-	1	**2.440.000**	1,00	**44.916.785**		**109.210.500**	**2**	**156.567.285**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	2	**16.673.800**	2		**35.000.000**	**35.000.000**		-		-	2,00	-		-	**2**	-			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINT	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa	100	**206.256.368**	100	**457.900.002**	**60.000.000**	**517.900.002**	25,00	**24.813.200**	**25**	**161.477.000**	**25,00**	**93.622.700**	**25**	**235.601.902**	**100**	**515.514.802**			

		AH DESA	tepat waktu																	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi	**100**	**206.256.368**	**100**	**457.900.002**	**60.000.000**	**517.900.002**	25,00	**24.813.200**	**25**	**161.477.000**	**25,00**	**93.622.700**	**25**	**235.601.902**	**100**	**515.514.802**			
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4	9.578.379	4	16.419.860		**16.419.860**	1,00	-	1	**3.060.000**	1,00	**4.635.000**	1	**8.693.700**	**4**	**16.388.700**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**

		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	9.578.379	1	37.102.066	60.000.000	**97.102.066**	1,00	-		**5.400.000**		**22.728.000**		**67.730.000**	**1**	**95.858.000**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	**4**	20.333.074	4	318.575.070		**318.575.070**	**1,00**	**18.800.000**	1	**103.265.000**	1,00	**55.799.700**	1	**139.821.202**	**4**	**317.685.902**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaa	4	148.384.465	4	85.803.006		**85.803.006**	1,00	**6.013.200**	1	**49.752.000**	1,00	**10.460.000**	1	**19.357.000**	**4**	**85.582.200**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**

		Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	tan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																	
2	**Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Publik**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80	**408.557.416**	74	**997.360.447**	**1.182.218.790**	**2.179.579.237**	16,00	**93.175.400**	**18**	**352.534.000**	**20,00**	**537.028.508**	**20**	**1.189.927.130**	**74**	**2.172.665.038**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksana	**100**	**288.640.493**	**100**	**332.298.220**	**1.182.218.790**	**1.514.517.010**	25,00	**58.967.400**	**25**	**294.862.000**	**25,00**	**282.091.908**	**25**	**872.074.130**	**100**	**1.507.995.438**			

		Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	kan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan																	
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	**4**	104.695.268	4		1.182.218.790	**1.182.218.790**	1,00	**14.400.000**	1	**202.720.000**	1,00	**196.856.608**	1	**761.749.582**	**4**	**332.269.248**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyaraka	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	4	183.945.225	4	332.298.220		**332.298.220**	**1,00**	**44.567.400**	1	**92.142.000**	1,00	**85.235.300**	1	**110.324.548**	**4**	**332.269.248**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**

		t di Wilayah Kecamatan	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**100**	**119.916.923**	**100**	**665.062.227**		**665.062.227**	**25,00**	**34.208.000**	**25**	**57.672.000**	**25,00**	**254.936.600**	**25**	**317.853.000**	**100**	**664.669.600**			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	**4**	**119.916.923**	**4**	**665.062.227**		**665.062.227**	**1,00**	**34.208.000**	**1**	**57.672.000**	1,00	**254.936.600**	1	**317.853.000**	**4**	**664.669.600**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**

3	**Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase pelanggaran perda dan perkada yang terselesaikan di wilayah kecamatan	70	**280.466.626**	60	**446.158.000**		**446.158.000**	**15,00**	**37.000.000**	**15**	**151.230.000**	**15,00**	**99.422.000**	**15**	**158.208.000**	**60**	**445.860.000**			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**100**	**33.221.316**	**100**	**83.862.000**		**83.862.000**	**25,00**	**-**	**25**	**20.996.000**	**25,00**	**17.780.000**	**25**	**44.824.000**	**100**	**83.600.000**			

		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	16.702.400	4	83.862.000		**83.862.000**	**1,00**	-	1	**20.996.000**	1,00	**17.780.000**	1	**44.824.000**	**4**	**83.600.000**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	16.518.916	1	-		**-**	**-**	**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**-**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**

		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan perda dan penegakan peraturan kepala daerah	**100**	**247.245.310**	**100**	**362.296.000**		**362.296.000**	**20,00**	**37.000.000**	**25**	**130.234.000**	**40,00**	**81.642.000**	**15**	**113.384.000**	**100**	**362.260.000**			
		Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepoliasian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	4	247.245.310	4	362.296.000		**362.296.000**	**1,00**	**37.000.000**	**1**	**130.234.000**	1,00	**81.642.000**	1	**113.384.000**	**4**	**362.260.000**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**

			Kepoliasian Negara Republik Indonesia																	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100	**51.288.433**	100	**215.518.100**		**215.518.100**	**25,00**	-	**25**	**17.928.000**	**25,00**	**63.405.110**	**25**	**133.389.200**	**100**	**214.722.310**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	**3**	**51.288.433**	**3**	**215.518.100**		**215.518.100**		-	**1**	**17.928.000**	**1,00**	**63.405.110**	**1**	**133.389.200**	**3**	**214.722.310**			

		Kepala Daerah																		
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar	**400**	**27.197.576**	**400**	**60.305.200**		**60.305.200**	-	-		-	400,00	**41.852.000**		**18.125.000**	**400**	**59.977.000**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**

		Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat	**119**	**24.090.857**	**119**	**128.332.900**		**128.332.900**		**-**		**5.850.000**		**16.553.110**	127	**105.474.200**	**127**	**127.877.310**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**

		Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	**1**	**-**	**1**	**26.880.000**		**26.880.000**		**-**	1	**12.078.000**		**5.000.000**		**9.790.000**	**1**	**26.868.000**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**

4	**Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Tingkat Pertumbuhan usaha/ kelompok usaha baru	40	**1.573.325.781**	30	**744.827.700**	**4.809.410.948**	**5.554.238.648**	50	**230.550.000**	**10**	**427.473.812**	**10,00**	**472.804.854**	**5**	**4.263.059.274**	**30**	**5.393.887.940**			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	**100**	**261.402.954**	**100**	**245.686.500**	**120.090.000**	**365.776.500**	25,00	**41.550.000**	**25**	**106.723.812**	**25,00**	**112.241.000**	**25**	**598.927.900**	**100**	**859.442.712**			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	**15**	**34.543.530**	16	91.942.000	120.090.000	**212.032.000**	16,00	**20.570.000**	16	**43.126.100**	16,00	**17.580.000**	16	**126.689.500**	**16**	**207.965.600**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**

		nan di Desa	Perencanaan Pembangunan di Desa																	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**4**	**226.856.424**	4	652.885.700		**652.885.700**	**1,00**	**20.980.000**	1	**63.597.712**	1,00	**94.661.000**	1	**472.238.400**	**4**	**651.477.112**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	**100**	**1.311.949.827**	**100**		**4.689.320.948**	**4.689.320.948**	25,00	**189.000.000**	**25**	**320.750.000**	**30,00**	**360.563.854**	**20**	**3.664.131.374**	**100**				

		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	**15**	**113.533.930**	15			**-**	**5,00**	-	5	-	5,00	-		-	**15**	-			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan Prasarna Kelurahan yang Terbangun	**2**	**180.803.336**	2		337.778.317	**337.778.317**	1,00	-		-		-	1	**325.151.900**	**2**	**325.151.900**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**

		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	**20**	**993.504.805**	20		4.224.393.831	**4.224.393.831**	20,00	**175.200.000**	20	**286.250.000**	20,00	**329.723.854**	20	**3.291.210.674**	**20**	**4.082.384.528**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	**1**	**24.107.756**	1		127.148.800	**127.148.800**	1,00	**13.800.000**	1	**34.500.000**	1,00	**10.560.000**	1	**47.768.800**	**1**	**106.628.800**			**Kantor Kec. Tanah Grogot**
					8.989.718.520		**10.266.145.490**	**6.548.525.901**	**16.814.671.391**		**1.586.486.796**		**3.232.971.028**		**2.858.709.777**		**8.085.334.892**		**15.763.502.493**			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tanah Grogot dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Paser 2021-2026 dan Renstra Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2021-2026

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat mempresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan peroleh nilai capaian yang akan dilaporkan. Sebagaimana yan tercantum dalam revisi Indikator Kinerja Utama Pada Kecamatan Tanah Grogot, pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

Berikut ini kami sajikan Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Capaian Kinerja pada Kantor Kecamatan Tanah Grogot dengan tabel TC 30

TABEL TC - 30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (Thn n-2)	Tahun 2023 (Thn n-1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2025 (Thn n+1)	Tahun 2022 (Thn n-2)	Tahun 2023 (Thn n-1	Tahun 2024 (Thn n-1	Tahun 2025 (Thn n)	Tahun 2026 (Thn n+1)	
	Indikator Sasaran Strategis													
1	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat			Nilai/ Predikat	B (61)	B (65)	BB (70)	BB (75)	B (64,50)	B (65,78)		BB (75)	A (81)	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan			%	80	80	82	83	84,86	87,42	88,38	84	84	
3	Angka Kriminalitas			Kejadian	52	51	50	49	17,41	14,19	14,19	48	48	
4	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tujuan dan Sasaran Strategis
KECAMATAN TANAH GROGOT

VISI	**: Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil, dan Sejahtera (PASER MAS)**
MISI 2	**: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional,partisipatif, dan transparan**
TUJUAN 1	**: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan Keuangan yang material dari BPK dan APIP eksternal	Jumlah temuan dan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK dan APIP eksternal	Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK dan APIP eksternal	Kasubbag Program dan Keuangan & Kasubbag Kepegawaian dan Umum
	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai hasil evaluasi SAKIP atas Implementasi Sistem Akuntabilitas	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP atas Implementasi Sistem Akuntabilitas dari Inspektorat	Kasubbag Program dan Keuangan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil penghitungan survey indeks kepuasan masyarakat setiap tahun	Dokumen IKM	Kasi Pemerintahan dan kependudukan & Kasi Kesejahteraan Masyarakat

Meningkatnya lingkungan daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	jumlah kriminalitas setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun ybs dikalikan 100.000	Data kriminalitas dari Kepolisian setempat	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

VISI	**: Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil, dan Sejahtera (PASER MAS)**
MISI 2	**: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing**
TUJUAN 2	**: Meningkatnya kemandirian masyarakat desa**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya peran Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan dibagi jumlah desa/kelurahan	Data lembaga kemasyarakatan per desa	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Adapun realisasi anggaran tahun 2024 Kecamatan Tanah Grogot per program kegiatan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**7.901.277.404,00**	**7.020.852.403,00**	**88,86**
Perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah	102.731.800,00	102.632.276,00	99,90
Adminstrasi Keuangan Perangkat daerah	6.060.333.981,00	5.206.769.627,00	85,92
Administrasi Umum Perangkat daerah	678.066.167,00	670.300.039,00	98,85
Pengadaan barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	497.236.910,00	487.996.204,00	98,14
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah	234.286.704,00	228.653.472,00	97,60
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	328.621.842,00	324.500.785,00	98,75
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.179.579.237,00	2.172.665.038,00	99,68
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.514.517.010,00	1.507.995.438,00	99,57
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	665.062.227,00	664.669.600,00	99,94
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**5.554.238.648,00**	**5.393.887.940,00**	**97,11**
Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	864.917.700,00	859.442.712,00	99,37
Kegiatan pemberdayaan kelurahan	4.689.320.948,00	4.534.445.228,00	96,70

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**446.158.000,00**	**445.860.000,00**	**99,93**
Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum	83.862.000,00	83.600.000,00	99,69
Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	362.296.000,00	362.260.000,00	99,99
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**215.518.100,00**	**214.722.310,00**	**99,63**
Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	**215.518.100,00**	**214.722.310,00**	**99,63**
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**517.900.002,00**	**515.514.802,00**	**99,54**
Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	517.900.002,00	515.514.802,00	99,54
Jumlah	**16.814.671.391,00**	**15.763.502.493,00**	**93,75**

Tabel III.10. Realisasi Anggaran per Sasaran Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2024

No.	Sasaran	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realiasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**7.901.277.404**	**7.020.852.403,00**	**88,86%**
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	**450.856.400**	**449.656.585**	**99,73%**
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**1.266.847.000**	**1.254.555.900**	**99,03%**
3	Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**436.160.000**	**435.970.000**	**99,96%**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**155.830.000**	**155.394.460**	**99,72%**

4	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**4.897.555.079**	**4.849.961.430**	**99,03%**

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun perencanaan, Pemerintah Kecamatan Tanah Grogot dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi tuntutan kemajuan tekhnologi dan informasi, dengan tingginya intensitas pelayanan di Kecamatan Tanah Grogot dibanding dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Paser, menuntut perencanaan strategis Kecamatan diarahkan kepada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Berkaitan dengan isu dan masalah yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan dapat menuju kepada penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance*.

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang baik
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi semangat sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuannya
4. Kurangnya kesadaran aparatur akan tugas pokok dan fungsinya sehingga perkembangan yang diharapkan masih rendah

Dengan mengetahui isu strategis dan hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja Kecamatan, maka diperlukan sebuah komitmen seluruh aparatur untuk dapat mewujudkan akuntabilitas, mengintensifkan kegiatan-kegiatan dengan pencapaian kinerja yang masih rendah serta meningkatkan peran tekhnologi guna meningkatkan kualitas pelayanan secara maksimal.

Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Dalam RKPD Tahun 2025 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah

sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintahan Kabupaten.

Tabel T-C. 31
REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATT
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
	KECAMATAN										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat		**8.952.232.755,50**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76	10.249.993.487	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100	**36.365.900,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100	77.231.800	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	27.365.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	59,231,800	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	4 Laporan	9.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	4 Dokumen	18.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Persentase dokumen Keuangan yang tepat waktu		**8.506.489.829,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Persentase dokumen Keuangan yang tepat waktu	100	8.555.874.729	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ Bulan	8.304.512.301	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ Bulan	8.304.512.301	

	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	182.592.628	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan	12 Dokumen	212.592.628	
	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kc Tanah Grogot	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	19.384.900	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kc Tanah Grogot	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	38.769.800	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80	0%	0	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	0	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Persentase kegiatan pelayanan Administrasi Umum PD yang berjalan dengan baik	100 %	**125.953.586,50**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Persentase kegiatan pelayanan Administrasi Umum PD yang berjalan dengan baik	100 %	**462.665.286,50**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.550.200	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Paket Komponen Instalasi	3 Paket	5.426.190	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	28.159.887	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	69.688.665	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	17.571.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	35.143.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	76.672.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	375.104.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang pada PD dalam kondisi baik	100%	2.100.000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Persentase Barang pada PD dalam kondisi baik	100%	**792.874.832,00**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kc Tanah Grogot	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.100.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kc Tanah Grogot	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	792.874.832	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor	100%	**144.833.440,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Presentase penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor	100%	**163.490.440,00**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kc Tanah Grogot	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kc Tanah Grogot	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	77.933.440	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	139.678.810	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	64.400.000	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**		Jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	1 Laporan	64.400.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan inventarisasi pada PD dalam kondisi baik	100 %	**136.490.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Persentase Pemeliharaan inventarisasi pada PD dalam kondisi baik	100 %	**197.856.400,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	9.550.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	9.550.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	18.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	78.266.400	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.400.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	125.423.340	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	7.440.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	100.400.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.100.000	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**				5.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA		Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu		**235.503.585,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**		Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100	**399.078.011,00**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kc. Tanah Grogot	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana dengan baik		**235.503.585,00**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kc. Tanah Grogot	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana dengan baik	100	**399.078.011,00**	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kc Tanah Grogot	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen	11.796.500	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kc Tanah Grogot	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen	11.796.500	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	**23.681.659**	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	23.972.659	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kc Tanah Grogot	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	**172.730.000**	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kc Tanah Grogot	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	308.718.000	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kc Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan	4 Dokumen	27.295.426	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan	Kc Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta	4Dokumen	54.590.852	

			Penegasan Batas Desa			Penegasan Batas Desa		Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		0	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	76 %	**463.329.009,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	76	**916.404.354,00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kl. Tanah Grogot	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	**216.345.720,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Kl. Tanah Grogot	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	**305.541.500,00**	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	0	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	0	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kc Tanah Grogot	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	216.345.720	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kc Tanah Grogot	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	305.541.500	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	**246.983.289,00**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	**610.862.854,00**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	Kc Tanah Grogot	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang	4 Laporan	**246.983.289**	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain	Kc Tanah Grogot	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain	4 Laporan	610.862.854	

	Dilimpahkan		Dilimpahkan			yang Dilimpahkan		yang Dilimpahkan			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penurunan Kasus gangguan keamanan dan ketertiban	65 %	**326.965.000,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase pelanggaran perda dan perkada yang terselesaikan di wilayah kecamatan	65 %	**357.373.000,00**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kc Tanah Grogot	Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	23.860.000	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Kc Tanah Grogot	Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	**61.338.000,00**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kc Tanah Grogot	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	12.660.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kc Tanah Grogot	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	25.330.000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kc Tanah Grogot	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	5.600.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kc Tanah Grogot	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	36.008.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase penerapan perda dan penegakan peraturan kepala daerah	100 %	296.035.000	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		Persentase penerapan perda dan penegakan peraturan kepala daerah	100 %	**296.035.000,00**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepoliasian Negara Republik Indonesia	Kc Tanah Grogot	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	296.035.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepoliasian Negara Republik Indonesia	Kc Tanah Grogot	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepoliasian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	296.035.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN		Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan	100 %	**92.851.536,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN**		Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaik	100 %	**142.308.849,00**	

	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		di wilayah kecamatan			**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		an di wilayah kecamatan			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kc Tanah Grogot	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	**92.851.536,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kc Tanah Grogot	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	**142.308.849,00**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kc Tanah Grogot	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 Oran	63.183.086	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kc Tanah Grogot	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 Orang	95.394.399	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kc Tanah Grogot	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	119 Orang	19.372.450	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kc Tanah Grogot	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	180 Orang	23.332.900	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kc Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	10.296.000	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kc Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	119 Dokumen	27.955.200	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Tingkat Pertumbuhan usaha/ kelompok usaha baru	35 %	**225.296.405,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	35 %	1.550.101.262	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kc Tanah Grogot	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100 %	**225.296.405,00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kc Tanah Grogot	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100 %	**634.697.700,00**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kc Tanah Grogot	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 Lembaga Kemasyarakatan	36.003.350	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kc Tanah Grogot	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 Lembaga Kemasyarakatan	57.723.350	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kc Tanah Grogot	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	**189.293.055**	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kc Tanah Grogot	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	576.974.350	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100 %	0	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100 %	**0**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Lembaga Kemasyarakatan	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Lembaga Kemasyarakatan	0	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan	Jumlah sarana dan Prasarna Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	0	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas/ Ormas	0	

	Evaluasi Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	0	Evaluasi Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Laporan HasilEvaluasi Kelurahan	1 Laporan	0	

Tabel T-C. 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RENJA TAHUN 2025
KELURAHAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATT
	PROGRAM/KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**PROGRAM/KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET KINERJA**	**KEBUTUHAN DANA (Rp)**	
	KELURAHAN										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat		6.328.832.167	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76	6.328.832.167	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Persentase dokumen Keuangan yang tepat waktu		2.481.606.650	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Persentase dokumen Keuangan yang tepat waktu	100	2.481.606.650	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	329.816.928	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan	12 Dokumen	329.816.928	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Persentase kegiatan pelayanan Administrasi Umum PD yang berjalan dengan baik	100 %	356.892.084	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Persentase kegiatan pelayanan Administrasi Umum PD yang berjalan dengan baik	100 %	356.892.084	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.426.190	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Paket Komponen Instalasi	3 Paket	5.426.190	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	69.688.665	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	69.688.665	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	20.617.660	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	20.617.660	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	108.285.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	108.285.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang pada PD dalam kondisi baik	100%	31.942.498	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Persentase Barang pada PD dalam kondisi baik	100%	**31.942.498**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kc Tanah Grogot	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	31.942.498	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kc Tanah Grogot	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	31.942.498	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor	100%	152.178.810	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Presentase penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor	100%	**152.178.810**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	139.678.810	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	139.678.810	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan inventarisasi pada PD dalam kondisi baik	100 %	135.263.840	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Persentase Pemeliharaan inventarisasi pada PD dalam kondisi baik	100 %	135.263.840	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	8.620.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	8.620.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 Unit	1.220.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	1.220.000	

			Dipelihara/Direhabilitasi					yang Dipelihara/Direhabilitasi			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA		Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu		203.208.246	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**		Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100	**203.208.246**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kc. Tanah Grogot	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana dengan baik		203.208.246	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kc. Tanah Grogot	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana dengan baik	100	**203.208.246**	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa19.551.033	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	19.551.033	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kc Tanah Grogot & Kl. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	19.551.033	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	76 %	402.519.621	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	76	**402.519.621**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kl. Tanah Grogot	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	287.214.888	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Kl. Tanah Grogot	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	**287.214.888**	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	103.695.568	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	103.695.568	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Tingkat Pertumbuhan usaha/ kelompok usaha baru	35 %	1.550.101.262	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	35 %	1.550.101.262	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100 %	1.301.146.067	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100 %	**1.301.146.067**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Lembaga Kemasyarakatan	109.167.240	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Lembaga Kemasyarakatan	109.167.240	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	174.366.266	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan	Jumlah sarana dan Prasarna Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	174.366.266	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas	993.504.805	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas/ Ormas	993.504.805	
	Evaluasi Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	24.107.756	Evaluasi Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Laporan HasilEvaluasi Kelurahan	1 Laporan	24.107.756	

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga mengahasilkan usulan program yang dibawa ke forum Musrenbangdes.
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Tabel TC- 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
		NIHIL		

Tidak ada Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan pada Tahun 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN dan KEGIATAN PROGRAM

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dokumen Perencanaan disusun dimulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, oleh karena itu pada hakekatnya Rencana Kerja Kecamatan Tanah Grogot merupakan gambaran mengenai perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu yang dalam penyusunannya harus memperhatikan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Kebijakan Provinsi.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2021-2026, agenda pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Nawa Cita yang merupakan agenda prioritas Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara
2. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara kesatuan
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Adapun yang menjadi sasaran Pembangunan Nasional adalah:

1. Pemulihan ekonomi yang semakin cepat dan memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan.
2. Kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya
3. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik
4. Membangun sistem politik yang demokratis dan mempertahankan persatuan dan kesatuan.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendorong pembangunan di daerah-daerah.

Jika dalam RPJMN membawa 9 Nawa Cita dalam prioritas Nasionalnya, maka berikut 12 prioritas RPJMN Provinsi Kalimantan Timur :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
2. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar
3. Peningkatan produksi pangan
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendiidkan
5. Peningkatan kualitas layanan kesehatan
6. Percepatan pengentasan kemiskinan
7. Pengembangan ekonomi kerakyatan
8. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja
9. Percepatan transformasi ekonomi
10. Pengembangan agribisnis
11. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
12. Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan

Sedangkan berdasarkan RPJMD Kabupaten Paser 2021-2026 telah disusun sejumlah sasaran dan program prioritas pembangunan Paser yakni bidang infrastruktur jalan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan pertanian.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tanah Grogot

RENJA Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2025 ditujukan untuk memberikan arah, kebijakan umum dan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Tanah Grogot. Selain itu Renja juga sebagai landasan dan pedoman kebijakan operasional

berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai dengan peran, tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terarahnya proses pengembangan ekonomi daerah dan kemampuan masyarakat, serta pencapaian tujuan pelayanan publik.

Adapun yang menjadi tujuan Kecamatan Tanah Grogot sesuai dengan Renstra adalah :

1. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang responsive dan tangkas
2. Meningkatkan kemandirian Masyarakat Desa

Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif
4. Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan

Sasaran dari Rencana Kerja tahun 2025 ini adalah sebagaimana tertuang dalam RENSTRA dan diturunkan dalam sasaran Renja yakni Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang responsive dan tangkas dan Meningkatkan kemandirian Masyarakat Desa. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Tanah Grogot.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	1). Nilai SAKIP dari Inspektorat	B (66,16)
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Publik	1). Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	89
		Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	1). Angka Kriminalitas	14,19
2	Meningkatnya kemandirian masyarakat desa	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan	1). Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	100

3.3. Program dan Kegiatan

TABEL TC - 33

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. PASER
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KANTOR CAMAT TANAH GROGOT				**4.292.349.466,00**	**11.047.410.107,00**	**10.901.193.098,00**	**6.608.843.632,00**							**11.767.764.841,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**4.292.349.466,00**	**11.047.410.107,00**	**10.901.193.098,00**	**6.608.843.632,00**							**11.767.764.841,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**4.292.349.466,00**	**11.047.410.107,00**	**10.901.193.098,00**	**6.608.843.632,00**							**11.767.764.841,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**-**	**83 Indeks**	**2.938.172.610,00**	**9.190.883.969,00**	**9.112.323.403,00**	**7.068.986.811,00**							**10.007.159.421,00**	

	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu*	100 Persen	100 Persen	62.081.600,00	72.731.800,00	64.844.355,00	2.762.755,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka	Kantor Kecamatan Tanah Grogot		68.289.760,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana				
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	44.081.600,00	54.731.800,00	49.128.852,00	5.047.252,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggunan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			48.489.760,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	15.715.503,00	-2.284.497,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggunan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			19.800.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana				

	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase dokumen Keuangan yang tepat waktu*	-	100 Persen	2.481.606.650,00	8.548.834.729,00	8.498.689.021,00	6.017.082.371,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka	Kantor Kecamatan Tanah Grogot		9.336.410.632,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	2.286.592.922,00	8.304.512.301,00	8.292.632.301,00	6.006.039.379,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			9.121.895.531,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD															

			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	175.923.928,00	212.592.628,00	186.991.920,00	11.067.992,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			193.516.321,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	19.089.800,00	31.729.800,00	19.064.800,00	-25.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggunan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			20.998.780,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				

	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	156.992.920,00	285.894.000,00	237.739.587,00	80.746.667,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka	Kantor Kecamatan Tanah Grogot		261.513.545,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana				
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3.550.200,00	3.550.200,00	3.550.200,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			3.905.220,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana				
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			0,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana				
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	26.492.600,00	47.200.800,00	33.159.887,00	6.667.287,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			36.475.875,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana				
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	11.580.000,00	35.143.000,00	22.571.500,00	10.991.500,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			24.828.650,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	115.370.120,00	200.000.000,00	178.458.000,00	63.087.880,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggunan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			196.303.800,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana				

	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang pada PD dalam kondisi baik*	100 Persen	100 Persen	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka	Kantor Kecamatan Tanah Grogot		2.310.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			2.310.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana				

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor*	100 Persen	100 Persen	122.551.440,00	144.833.440,00	163.490.440,00	40.939.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka	Kantor Kecamatan Tanah Grogot		179.839.484,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana				
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			2.750.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	55.651.440,00	77.933.440,00	96.590.440,00	40.939.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			106.249.484,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4 Laporan	64.400.000,00	64.400.000,00	64.400.000,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			70.840.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana				

	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan inventarisasi pada PD dalam kondisi baik*	100 Persen	100 Persen	112.840.000,00	136.490.000,00	145.460.000,00	32.620.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka	Kantor Kecamatan Tanah Grogot		158.796.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	2.000.000,00	9.550.000,00	9.550.000,00	7.550.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			10.505.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	3.000.000,00	18.000.000,00	25.870.000,00	22.870.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			28.457.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100.400.000,00	100.400.000,00	100.400.000,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			110.440.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															

			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	7.440.000,00	7.440.000,00	8.540.000,00	1.100.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggunan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			8.184.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															

			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			1.210.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	**76 Persen**	**76 Persen**	**467.487.220,00**	**593.402.220,00**	**508.633.298,00**	**46.748.722,00**							**514.235.942,00**	

	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 Persen	100 Persen	240.636.220,00	240.636.220,00	230.890.500,00	-9.745.720,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		264.699.842,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan															

			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			0,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan															

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	240.636.220,00	240.636.220,00	230.890.500,00	-9.745.720,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			264.699.842,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana				

	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 Persen	100 Persen	226.851.000,00	352.766.000,00	277.742.798,00	50.891.798,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		249.536.100,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan															

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	226.851.000,00	352.766.000,00	277.742.798,00	50.891.798,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			249.536.100,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Pertumbuhan usaha/ kelompok usaha baru**	**35 Persen**	**35 Persen**	**186.544.500,00**	**403.874.900,00**	**264.753.105,00**	**45.468.435,00**							**232.012.935,00**	

	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana*	100 Persen	100 Persen	186.544.500,00	403.874.900,00	264.753.105,00	78.208.605,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		232.012.935,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana				
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa															

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 Lembaga Kemasyarakatan	16 Lembaga Kemasyarakatan	19.827.000,00	100.530.700,00	44.203.350,00	24.376.350,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			48.623.685,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	166.717.500,00	303.344.200,00	220.549.755,00	53.832.255,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggunan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			183.389.250,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				

	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana*	100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka	Masyarakat Desa dan Kelurahan		0,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana				
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			0,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana				
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															

			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			0,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana				
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															

			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			0,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana				
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan															

			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			0,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan Kasus Gangguan Keamanan dan Ketertiban**	**65 Persen**	**65 %**	**343.930.000,00**	**381.930.000,00**	**349.175.000,00**	**67.701.000,00**							**411.631.000,00**	

	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	100 Persen	100 Persen	23.860.000,00	61.860.000,00	54.140.000,00	30.280.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		59.554.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana				
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															

			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	12.660.000,00	50.660.000,00	42.940.000,00	30.280.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			47.234.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana				
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat															

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			12.320.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana				

	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase penerapan perda dan penegakan peraturan kepala daerah*	100 Persen	100 Persen	320.070.000,00	320.070.000,00	295.035.000,00	-25.035.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		352.077.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana				
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia															

			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan	320.070.000,00	320.070.000,00	295.035.000,00	-25.035.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggunan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			352.077.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				
5,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**82.542.000,00**	**154.731.300,00**	**201.512.849,00**	**8.254.200,00**							**90.796.200,00**	

	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan*	3 Kegiatan	3 Kegiatan	82.542.000,00	154.731.300,00	201.512.849,00	118.970.849,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		90.796.200,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 Orang	400 Orang	47.210.000,00	95.394.400,00	98.144.399,00	50.934.399,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			51.931.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana				
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	119 Orang	119 Orang	21.740.000,00	38.744.900,00	87.654.450,00	65.914.450,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			23.914.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana				
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal															

			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	1 Dokumen	13.592.000,00	20.592.000,00	15.714.000,00	2.122.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			14.951.200,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				
6,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu**	**-**	**100 Persen**	**273.673.136,00**	**322.587.718,00**	**464.795.443,00**	**238.256.207,00**							**511.929.343,00**	

	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana dengan baik*	-	15 Desa	273.673.136,00	322.587.718,00	464.795.443,00	191.122.307,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		511.929.343,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana				
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa															

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	9.200.000,00	18.223.000,00	25.707.500,00	16.507.500,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			10.120.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana				
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa															

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	18.029.066,00	35.733.766,00	23.972.659,00	5.943.593,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			26.369.924,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana				
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa															

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	202.832.370,00	213.860.000,00	185.730.000,00	-17.102.370,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			223.115.607,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana				
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa															

			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			0,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana				
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa															

			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayaguna an Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	43.611.700,00	54.770.952,00	229.385.284,00	185.773.584,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			252.323.812,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana				
	J U M L A H					**5.759.992.539,00**	**14.638.660.406,00**	**14.693.035.990,00**	**1.754.212.427.619,00**							**15.361.684.116,82**	

TABEL TC - 33

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. PASER
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KELURAHAN TANAH GROGOT				**1.467.643.073,00**	**3.591.250.299,00**	**3.791.842.892,00**	**2.324.199.819,00**							**3.593.919.275,82**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**1.467.643.073,00**	**3.591.250.299,00**	**3.791.842.892,00**	**2.324.199.819,00**							**3.593.919.275,82**	
	7.01	**KECAMATAN**				**1.467.643.073,00**	**3.591.250.299,00**	**3.791.842.892,00**	**2.324.199.819,00**							**3.593.919.275,82**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**76 %**	**76 %**	**637.522.828,00**	**775.613.509,00**	**805.545.602,00**	**48.499.585,00**							**686.022.413,00**	

	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	12 bulan	12 bulan	108.497.808,00	124.251.408,00	77.251.408,00	-31.246.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka	Kelurahan Tanah Grogot		77.251.408,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD															
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	108.497.808,00	124.251.408,00	77.251.408,00	-31.246.400,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar			77.251.408,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Wilayah dan Ketanguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanguhan Terhadap Bencana				

	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase kegiatan pelayanan Administrasi Umum PD yang berjalan dengan baik*	100 Persen	100 Persen	356.892.084,00	356.892.084,00	411.787.377,00	54.895.293,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka	Kelurahan Tanah Grogot		392.582.775,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

												Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	20.390.340,00	20.390.340,00	20.390.340,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar			22.429.374,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Wilayah dan Ketanguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanguhan Terhadap Bencana				
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Paket	12 Paket	54.329.949,00	54.329.949,00	60.445.242,00	6.115.293,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			59.764.426,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	12.636.795,00	12.636.795,00	12.636.795,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar			13.900.475,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Wilayah dan Ketanguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanguhan Terhadap Bencana				
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	269.535.000,00	269.535.000,00	318.315.000,00	48.780.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			296.488.500,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

												Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang pada PD dalam kondisi baik*	100 Persen	100 Persen	31.832.600,00	130.169.681,00	130.169.681,00	98.337.081,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan	Kelurahan Tanah Grogot		35.015.860,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Ketanggu han Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggu han Terhadap Bencana				
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	31.832.600,00	130.169.681,00	130.169.681,00	98.337.081,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			35.015.860,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

												Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	*Presentase penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor*	100 Persen	100 Persen	79.720.336,00	103.720.336,00	103.720.336,00	24.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan	Kelurahan Tanah Grogot		114.092.370,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Ketanggu hanan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggu hanan Terhadap Bencana				
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4 Laporan	79.720.336,00	103.720.336,00	103.720.336,00	24.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			114.092.370,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

												Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan inventarisasi pada PD dalam kondisi baik*	100 Persen	100 Persen	60.580.000,00	60.580.000,00	82.616.800,00	22.036.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola	Kelurahan Tanah Grogot		67.080.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik				
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2 Unit	25.580.000,00	25.580.000,00	40.398.400,00	14.818.400,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola			28.580.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik				
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	42.218.400,00	7.218.400,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan			38.500.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

												Ketanggu hanan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggu hanan Terhadap Bencana				
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**	**-**	**167.094.917,00**	**962.849.012,00**	**969.849.012,00**	**818.617.998,82**							**985.712.915,82**	

	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	167.094.917,00	962.849.012,00	969.849.012,00	802.754.095,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Tanah Grogot		985.712.915,82	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan															

			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	200 Laporan	4 Laporan	167.094.917,00	962.849.012,00	969.849.012,00	802.754.095,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			985.712.915,82	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**	**-**	**603.025.328,00**	**1.792.787.778,00**	**1.939.748.278,00**	**1.253.158.619,00**							**1.856.183.947,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana*	-	100 % 100 Persen	603.025.328,00	1.792.787.778,00	1.939.748.278,00	1.336.722.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastr	Masyarakat Kelurahan Tanah Grogot		1.856.183.947,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													uktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana				
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	97.690.000,00	97.690.000,00	116.290.000,00	18.600.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			107.459.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	15.088.550,00	127.471.688,00	138.471.688,00	123.383.138,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar			140.218.857,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Wilayah dan Ketanguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanguhan Terhadap Bencana				
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															

			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	62 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas	334.318.778,00	1.399.058.090,00	1.584.738.590,00	1.250.419.812,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka			1.508.258.090,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

												Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	1 Laporan	155.928.000,00	168.568.000,00	100.248.000,00	-55.680.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar			100.248.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													Wilayah dan Ketanguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanguhan Terhadap Bencana				
4,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**	**-**	**-**	**-**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**76.700.000,00**	**6.000.000,00**							**66.000.000,00**	

		PEMERINTAHAN DESA														
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	60.000.000,00	60.000.000,00	76.700.000,00	16.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingku	Masyarakat di Wilayah Kelurahan Tanah Grogot		66.000.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													ngan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketanggguhan Terhadap Bencana				
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa															
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	76.700.000,00	16.700.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenj			66.000.000,00	KANTOR CAMAT TANAH GROGOT

													angan Antar Wilaya h dan Ketang guhan Terhad ap Bencan a Pemant apan Kualita s Infrastr uktur Yang Berwa wasan Lingku ngan dalam Rangka Mening katkan Konekti vitas Untuk Mengur angi Kesenj angan Antar Wilaya h dan Ketang guhan Terhad ap Bencan a				
	J U M L A H					**5.759.99 2.539,00**	**14.638.66 0.406,00**	**14.693.03 5.990,00**	**1.754.212.42 7.619,00**						**15.361.68 4.116,82**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Memperhatikan Renstra Kecamatan Tanah Grogot 2021-2026 maka Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah (Matrik Renja Terlampir) yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, meliputi :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD
   3) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
   1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
   3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
   1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA

8. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
4) Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
5) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

11. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

12. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepoliasian Negara Republik Indonesia

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
3) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

14. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

15. Kegiatan Pemberdayaan Desa

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4) Evaluasi Kelurahan

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2025, selama periode ini Kecamatan Tanah Grogot menetapkan 6 (enam) program yang membawahi 15 (lima belas) kegiatan dan diuraikan ke dalam 40 (empat puluh) sub kegiatan.

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana kegiatan dan tindakan yang mendasar pada orientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun.

Rencana Kerja ini mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanah Grogot.

Demikian pula dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tanah Grogot ini juga masih terdapat kekurang-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Rancangan Akhir Renja Perubah Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian VISI Pemerintah Kabupaten Paser.

Tanah Grogot, 22 Agustus 2025
Camat Tanah Grogot



ABDUL RASYID, S.STP, MA
Pembina TK. I
NIP. 19790716 200003 1 001

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

RENJA PERUBAHAN

TAHUN 2025

KECAMATAN PASIR BELENGKONG



KANTOR KECAMATAN PASER BELENGKONG

KABUPATEN PASER

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Paser Belengkong dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rencana Kerja Perubahan 2025 Kecamatan Paser Belengkong Tahun merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamantkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut diatas Renja Perubahan ini disusun dengan masih mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Paser Belengkong Tahun 2022 – 2026.

Demikian Rencana Kerja Perubahan 2025 Kecamatan Paser Belengkong ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Paser Belengkong Tahun 2025.

Paser Belengkong, 25 Agustus 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang **1**

1.2. Landasan Hukum **2**

1.3. Maksud dan Tujuan **4**

1.4. Sistematika Penulisan **5**

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 ..... **6**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun2025 ..... **6**

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Paser Belengkong **14**

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 ..... **16**

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **18**

3.1. Tujuan dan Sasaran **18**

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 ..... **19**

3.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat **25**

3.4. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025 ..... **25**

BAB IV PENUTUP **40**

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan. **40**

4.2. Rencana tindak lanjut **40**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan

kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Kantor Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kantor Kecamatan Paser Belengkong, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Paser Belengkong sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Renja Kantor Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2025 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Paser Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tentang Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 adalah peraturan yang mengesahkan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Kantor Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Kantor Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan

aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Paser Belengkong

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja Kantor Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2025

Sasaran SKPD Tahunan :

- Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat 68 (71)
- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 90
- Angka Kriminalitas 49
- Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan yang aktif 80%

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2022-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu				Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi (Tahun 2025) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (%)		Ket	Misi SKPD Pros ngan tujuan sb
							Tahun 2025		Tahun (2021,2024)				I		II		III		IV											
					R	Rp	R	Rp	R	Rp	R	Rp	R	Rp	R	Rp	R	Rp	R	Rp	R	Rp	R	Rp	R	Rp	R	Rp		
		T	UNSUR KEWAJIBAN							-																-				
		T.01	RINCIAN TAN					5.000.087.444		10.201.001.782		9.040.708.000		1.240.022.924								1.240.022.924				20.254.113.500				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	T.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	80	4.406.927.247	71	4.222.272.744	152	5.340.834.372	79	7.199.248.000		1.013.022.924							-	1.240.022.924				18.278.720.500	80	216,8		Kantor Camat Pasir Belengkong
		T.01.01.2.01	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun dan melaksanakan	100	15.015.215	100	12.400.000	171	30.852.000	100	17.315.000	25	-							25	-			22	-	100	32.346.600	80	337,3		
		T.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya dokumen perencanaan	5	7.455.575	4	5.100.000	-	-	-	-	-	-							-	-			4	5.100.000	80	68,4		
		T.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Kinerja (LKIP)	4	8.567.700	4	6.300.000	-	-	-	-	-	-							-	-			4	6.300.000	100	100,0		
		T.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	29.004.000			4	21.287.900	2	11.315.000	-	-							-	-			4	29.307.600	80	99,5		
		T.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	5	16.800.000			4	10.500.000	2	4.800.000	1	-							1	-			1	16.800.000	80	31,4		
		T.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun dan	100	4.344.000.000	100	3.757.001.348	200	5.300.827.372	100	5.488.940.000	25	929.370.000							25	929.370.000			22	14	88	11.000.000.000	80	298,1		
		T.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan Gaji dan	12	4.147.504.000	14	3.554.751.348	-	-	-	-	-	-							-	-			12	3.554.751.348	100	85,8		
		T.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Dokumen tersusun	100	150.004.000	100	117.000.000	-	-	-	-	-	-							-	-			100	117.200.000	100	96,5		
		T.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan	10	39.750.000	10	36.000.000	-	-	-	-	-	-							-	-			10	36.000.000	100	100,0		
		T.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	144	13.259.004.000			82	7.774.130.400	25	5.171.018.000	25	951.004.420							25	951.004.420	100	74	77	9.007.022.820	70	73,4		
		T.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	400	737.217.044			240	492.271.540	100	257.941.000	13	33.453.750							13	33.453.750	53	10	277	493.777.629	69	66,7		
		T.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	60	116.000.000			24	72.210.000	10	96.000.000	4	9.000.000							4	9.000.000	37	25	62	80.415.000	77	69,4		
		T.01.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Data Pegawai Yang	100	80.000.000	100	80.000.000	200	220.000.000	100	100.001.000	25	25.240.000							25	25.240.000	22	18	88	127.000.000	80	544,1		
		T.01.01.2.03.0003	Pendidikan dan Pengelolaan Administrasi	Jumlah pegawai yang dipertimbangkan	12	80.000.000	12	80.000.000	-	-	-	-	-	-							-	-			12	80.000.000	100	116,8		
		T.01.01.2.03.03	Pendidikan dan Pengelolaan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendidikan dan	48	240.000.000			24	220.000.000	12	100.001.000	3	25.240.000							6	25.240.000	22	18	37	257.000.000	80	107,1		
		T.01.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan pelayanan	100	109.001.000	100	122.001.000	200	401.004.000	100	284.001.000	25	26.004.710							25	26.004.710	22	18	88	559.000.000	80	361,4		
		T.01.01.2.05.0001	Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah komponen yang dipelihara	50	2.000.000	2	1.325.000	-	-	-	-	-	-							-	-			2	1.325.000	7	66,3		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dipelihara			11	7.373.000	-	-																				

7.01.01.2.05.0004	Penyediaan Barang Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	12	20.770.000	11	18.813.000	-	-	-	-	-	-										11	18.813.000	73	174,0
7.01.01.2.05.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan	12	3.787.000	4	3.787.000	-	-	-	-	-	-										7	3.787.000	79	185,9
7.01.01.2.05.0006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang	140	40.000.000	80	62.296.962	-	-	-	-	-	-										80	62.296.962	40	155,7
7.01.01.2.05.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedakan	4	3.500.000			2	3.500.000	1	3.276.100	-	-										3	3.592.100	79	89,6
7.01.01.2.05.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	10	111.510.000			5	70.852.000	4	78.702.100	-	-										9	78.080.100	77	110,2
7.01.01.2.05.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	9	23.077.200			6	10.786.000	3	8.246.000	-	-										9	18.786.000	79	46,6
7.01.01.2.05.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (SKPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	600	331.331.551			170	210.813.510	75	225.122.000	6	35.454.710							6	35.454.710	72	72	179	327.010.222	99	148,9
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang pada PD dalam kondisi baik (Persen)	100	22.000.000	100	137.212.000	200	217.204.540	100	-	-	-										80	454.470.540	99	2374,9
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang	14	22.000.000	3	40.345.900	-	-	-	-	-	-										9	40.200.000	21	183,4
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau	10	97.680.700	1	96.917.000	-	-	-	-	-	-										9	99.017.000	9	98,8
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	50	61.320.400			15	217.204.540	-	-	-	-										10	277.204.540	28	531,9
7.01.01.2.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase penyediaan jasa	100	101.956.770	100	106.150.940	200	340.525.551	100	217.104.074	20	27.800.000							20	27.800.000	22	13	80	302.086.178	89	276,2
7.01.01.2.05.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah material yang disebarkan	100	3.040.000	100	3.040.000	-	-	-	-	-	-							-	-		100	3.040.000	100	100,0
7.01.01.2.05.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jaringan Listrik dan Air yang Disediakan	12	100.956.770	12	54.910.940	-	-	-	-	-	-										12	54.910.940	100	68,9
7.01.01.2.05.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum yang	12	82.800.000	11	99.800.000	-	-	-	-	-	-										12	99.096.000	100	116,7
7.01.01.2.05.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan	1	25.550.000			3	2.031.500	1	960.000	-	-										3	2.091.000	20	7,8
7.01.01.2.05.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan	60	420.823.112			4	194.836.731	2	130.104.074	-	-										4	194.836.731	4	25,0
7.01.01.2.05.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan	3	331.200.000			3	153.200.000	1	98.800.000	-	27.800.000							-	27.800.000	-	28	3	226.600.000	74	68,7
7.01.01.2.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor	100	77.856.154	100	92.803.950	200	142.648.350	100	98.900.000	-	-										80	103.240.000	99	131,8
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	5	21.700.000	5	49.152.000	-	-	-	-	-	-										5	49.152.000	100	226,5
7.01.01.2.06.0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang	24	3.500.000	3	1.301.550	5	3.850.000	3	3.180.000	-	-										7	3.477.550	29	239,8
7.01.01.2.06.0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi	1	170.870.000			1	94.848.750	1	11.964.100	-	-										1	94.848.750	100	55,5
7.01.01.2.06.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	3.500.000	3	3.500.000	20	15.395.000	20	12.300.000	-	-										20	10.223.000	825	746,7
7.01.01.2.05.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dilengkapi Pajak dan Perizinannya (Unit)	17	71.940.400			10	30.800.000	5	29.701.700	-	-										10	34.662.000	34	42,9

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:	Koordinasi yang intens antar sub bagian dan seksi di dalam OPD dalam pelaksanaan kegiatan
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	:	Alokasi biaya tersedia yang pengadaan melalui e-Katalog mempengaruhi ketersediaan berjalan pengadaan barang dan jasa
Tindak Lanjut yang Dilakukan Dalam Triwulan Berikutnya	:	Melengkapi persyaratan yang ditentukan dalam pengadaan melalui e-katalog
Tindak Lanjut yang dijanjikan dalam Renja SKPD Berikutnya	:	

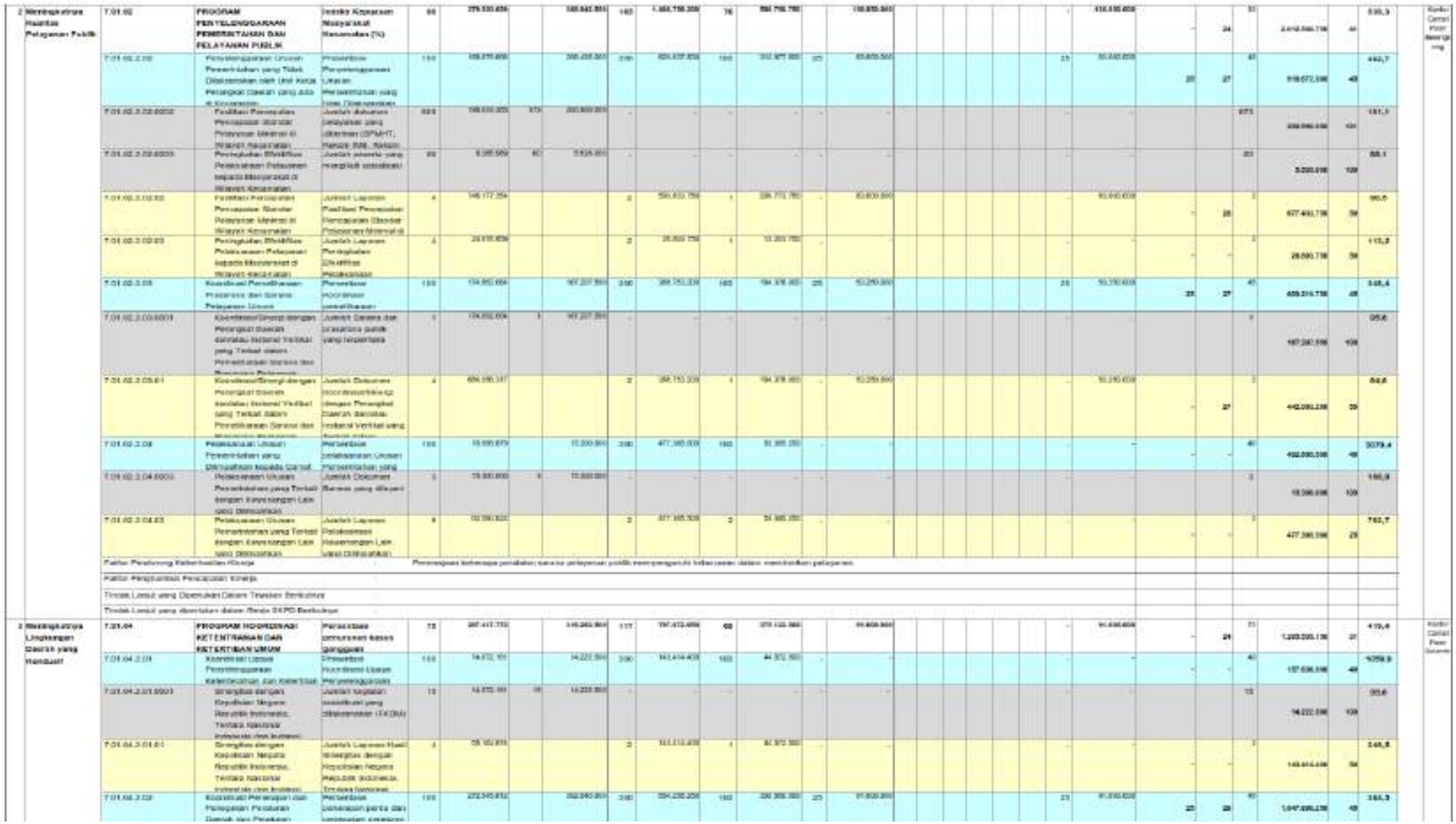

| | | |

| | | |

| | | |

7.01.03.3.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Layanan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	342,231,490			0	182,031,370	4	304,223,280	-	-								-	-		0	-	-	438,914,170	59	123,4
Faktor Penghambat Ketercapaian Kinerja			: Pembayaran DPRD Belum Maksimal																												
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			:																												
Tindak Lanjut yang Dilaksanakan Dalam Triwulan Berikutnya			:																												
Tindak Lanjut yang dperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya			:																												

Berdasarkan Tabel 2.2 Realisasi RKPD Tahun 2025 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 40%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. **1.248.822.924,00** dari total pagu Renja sebesar Rp. **9.040.704.090,00** atau sebesar 13,81%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Kantor Camat Paser Belengkong sebesar 13% dengan predikat kinerja SR (Sangat Rendah)

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Paser Belengkong

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kantor Camat Paser Belengkong melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

Tugas :

1. Camat mempunyai tugas yang meliputi :
   a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
   b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
   c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
   d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
   e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
   f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
   g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan
   h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
   i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibantu oleh perangkat kecamatan

Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Upaya Kantor Camat Paser Belengkong dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Jumlah temuan penyimpanan pengelolaan BMD dan Keuangan yang material dari BPK dan APIP eksternal
2. Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat
3. Nilai indeks kepuasan masyarakat
4. Angka kriminalitas
5. Presentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kantor Camat Paser Belengkong Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Kantor Camat Paser Belengkong terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kantor Camat Paser Belengkong sampai dengan Triwulan I

Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					Realisasi	Capaian Kinerja
			2022	2023	2024	2025	2026		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	70	73	75	80	85		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	CC (60)	B (61)	B (63)	B (64)	BB (71)	64,76	102,79
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84	84	85	95	95	86,29	101,51
	Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	3	3	3	3	3		
Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa		Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan	6	6	13	20	26	6	46,15
	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan yang aktif	50	55	60	65	70		

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kantor Camat Paser Belengkong sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Tujuan “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi”, belum mencapai target, dimana realisasinya belum dapat dilaksanakan karena belum adanya jadwal penilaian dari pemerintah daerah
2. Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat” mencapai target, dimana realisasinya sebesar 64,76 dari target sebesar 63 dengan capaian kinerja sebesar 102,79 %.
3. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan”, melampaui target, dimana realisasinya sebesar 86,29 dari target sebesar 85 dengan capaian kinerja sebesar 101,51 %.
4. Sasaran “Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Menurunnya Angka Kriminalitas”, belum mencapai target, dimana realisasinya masih sebesar 0 dari target sebesar 3
5. Tujuan “Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan”, Belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 6% dari target 13%
6. Sasaran “Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan yang aktif”, belum mencapai target, karena data belum tersedia.

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Camat Paser Belengkong Periode Juni 2025 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai

4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai jadwal.
2. Perubahan pejabat/personil sehubungan dengan adanya pergantian pejabat
3. Ganguan akses jariangan internet dan Aplikasi SIPD

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2025.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Paser Belengkong sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran Kantor Camat Paser Belengkong tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		80	80
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai Hasi Evaluasi dari Inspektorat	B 64	B 64
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat/Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan PATEN kecamatan yang dilaksanakan 1 tahun sekali	95	95
	Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	Jumlah peristiwa kriminal/gangguan keamanan/ketertiban selama setahun dibagi jumlah penduduk tahun ybs dikalikan 100.000	3	3
Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa		Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan		20	20
	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	Jumlah desa yang memiliki Lembaga kemasyarakatan ----- x 100 % Jumlah Desa	65	65

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Kantor Camat Paser Belengkong Tahun 2025 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Kantor Camat Paser Belengkong mendukung pencapaian sasaran ke – 3, 4, 5 dan 10 yaitu “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, Meningkatnya kualitas pelayanan publik, Meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif dan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat”.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Kantor Camat Paser Belengkong telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

TABEL 3.2
Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Paser Belengkong

No	Rancangan Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kantor Kecamatan Paser Belengkong				Rp. 8.541.819.563					**Rp 9.482.419.398**	
	Urusan Kewilayahan										
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			77	Rp.6.964.892.176					**Rp.7.214.713.243**	
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			74	Rp. 14.144.000					Rp. 17.314.000	
0001	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Reviu renstra, ranwal renja,ranc renja, renja, profil kecamatan).	2	Rp. 11.994.000					Rp 13.014.000	
0007	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKJiP, Evaluasi Renja, SPIP, Laporan TEPRA)	5	Rp. 2.150.000					Rp 4.300.000	
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase LHP nihil	100	Rp.6.414.216.054					Rp. 6.468.940.054	
0001	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang	Rp.6.175.018.308					Rp.6.175.018.308	
0004	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD (SPP, SPM,E-Billing)	200 Dokumen	Rp. 204.957.746					Rp. 257.641.746	
0005	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	Rp. 34.240.000					Rp. 36.280.000	
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70 %	Rp. 130.687.400					Rp. 155.821.400	
0003	*Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai yang di perbarui datanya	12 0rang	Rp. 130.687.400					Rp. 155.821.400	
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp. 132.754.718					Rp. 289.537.209	
0001	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Rp. 2.218.100					Rp. 6.587.539	
0003	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket						Rp. 17.629.500	

0004	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	Rp. 18.254.618					Rp. 42.979.170	
0005	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Rp. 1.109.500					Rp. 2.219.000	
0009	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118 Laporan	Rp. 111.172.500					Rp. 220.122.000	
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	70 %	Rp. 0					Rp. 13.279.302	
0006	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Rp. 0					Rp. 13.279.302	
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perkantoran	100 %	Rp. 217.584.074					Rp.217.584.074	
0001	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	Rp. 880.000					Rp. 880.000	
0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	Rp. 120.104.074					Rp. 120.104.074	
0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 96.600.000					Rp. 96.600.000	
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	65 %	Rp. 55.505.930					Rp. 52.237.204	
0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Rp. 29.551.780					Rp. 37.847.204	
0006	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Rp. 2.190.000					Rp. 2.190.000	
0009	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Rp. 11.564.150					Rp. 0	
0010	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Rp. 12.200.000					Rp. 12.200.000	
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	**80**	**Rp. 515.913.750**					**Rp. 741.600.628**	
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak	100 %	Rp. 302.802.500					Rp. 312.977.500	

	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
0002	*Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	Rp. 296.188.750					Rp. 299.773.750	
0003	*Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	Rp. 6.613.750					Rp. 13.203.750	
2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			100%	Rp. 194.378.000					Rp. 194.378.000	
0001	*Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Laporan	Rp. 194.378.000					Rp. 194.378.000	
2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	Rp. 18.733.250					Rp. 234.245.128	
0003	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	Rp. 18.733.250					Rp. 234.245.128	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Paser Belengkong**	**Tingkat Pertumbuhan Usaha/kelompok usaha baru.**	**20%**	**Rp. 476.217.615**					**Rp. 785.298.055**	
02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100 %	Rp. 476.217.615					Rp. 785.298.055	
0001	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga	Rp. 11.064.025					Rp. 9.298.050	
0003	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	Rp. 465.153.590					Rp. 776.000.005	
04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Paser Belengkong**	**Persentase penurunan Kasus Gangguan keamanan dan ketertiban**	**50%**	**Rp. 359.632.500**					**Rp. 471.744.700**	
2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Rp. 34.067.500					Rp. 80.584.700,00	
0001	*Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,*	Kab. Paser, Paser Belengkong,	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian	12	Rp. 34.067.500					Rp. 80.584.700,00	

	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Semua Kel/Desa	Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	Rp. 325.565.000					Rp. 391.160.000	
0001	*Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9 Laporan	Rp. 325.565.000					Rp. 391.160.000	
05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan**	**100 %**	**Rp. 186.049.272**					**Rp. 190.324.272**	
2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Koorinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Rp. 186.049.272					Rp. 190.324.272	
0001	*Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 Orang	Rp. 176.299.272					Rp. 190.324.272	
0004	*Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300	Rp. 9.750.000					Rp. 0	
06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**Rp. 39.114.250**					**Rp. 78.738.500**	
2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Rp. 39.114.250					Rp. 78.738.500	

0001	*Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 Dokumen	Rp. 7.628.750					Rp. 15.238.750	
0002	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 Dokumen	Rp. 11.193.750					Rp. 16.378.750	
0003	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Dokumen	Rp. 13.571.750					Rp. 33.684.750	
0006	*Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Dokumen	Rp. 2.456.250					Rp. 4.912.500	
0015	*Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa*	Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	15 Dokumen	Rp. 4.263.750					Rp. 8.523.750	

3.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Perubahan Rancangan RKPD 2025 tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kantor Camat Paser Belengkong baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Paser.

Tabel 3.3

Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2025 pada Kantor Camat Paser Belengkong

	Program dan Kegiatan Masyarakat					nalisis Kebutuhan					h Pentin g
	m /Kegiatan		or Kinerja	Capaian	ndikatif	m		or Kinerja	Capaian	ıhan Dana	
	Camat Paser Belengkong										
	……										
	m …..										
	an ….										
	giatan										
	m …..										
	an ….										
	giatan										
	m …..										
	an ….										
	giatan										

NIHIL

3.4. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kantor Camat Paser Belengkong pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. PASER
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENSTRA OPD TAHUN 2021	PRAKIRAAN CAPAIAN TAHUNT RENSTRA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN BLUD PERUBAHAN TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Selisih/Bertambah/Lebih (11-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							PERUBAHAN	SEBELUM	KUPO 2025	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2025				KEWENANGAN	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KAWASAN CAGAR ALAM BELEMBAGAN							8.165.167.473,00	8.540.754.000,00	8.907.454.000,00	2.024.287.473,00							8.940.922.710,00	
	1	URUSAN WAJIB_Lainnya							8.165.167.473,00	8.540.754.000,00	8.907.454.000,00	2.024.287.473,00							8.940.922.710,00	
	1.01	Kawasan Hutan							8.165.167.473,00	8.540.754.000,00	8.907.454.000,00	2.024.287.473,00							8.940.922.710,00	
1.	1.01.0	PROGRAM PENATAUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi				75 Persen	75 Persen	8.023.024.483,00	7.765.338.000,00	7.379.162.039,00	90.726.051,00							8.209.280.710,00	
	1.01.0 2.01	Perencanaan, Pengelolaan, dan Evaluasi Hirarki Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan pengelolaan sesuai aturan				100 Persen	100 Persen	17.474.000,00	17.214.000,00	28.383.000,00	10.909.000,00			Memenuhi informasi publik, hukum dan akuntasi, serta mewujudkan pencegahan dan penanganan korupsi, kolusi, nepotisi, dan penyalahgunaan	Pemenuhan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Menciptakan Kepuasan Publik, Pemenuhan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Menciptakan Kepuasan Publik	100% Kepuasan Pada Kategori Baik		2.127.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	1.01.0 2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	19.041.000,00	18.914.000,00	20.964.000,00	10.909.000,00	Kec. Pasir, Pasir Belengkong, Pasir Belengkong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memenuhi informasi publik, hukum dan akuntasi, serta mewujudkan pencegahan dan penanganan korupsi, kolusi, nepotisi, dan penyalahgunaan	Pemenuhan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Menciptakan Kepuasan Publik, Pemenuhan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Menciptakan Kepuasan Publik			2.127.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	1.01.0 2.01.007	Evaluasi Hirarki Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Hirarki Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kec. Pasir, Pasir Belengkong, Pasir Belengkong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memenuhi informasi publik, hukum dan akuntasi, serta mewujudkan pencegahan dan penanganan korupsi, kolusi, nepotisi, dan penyalahgunaan	Pemenuhan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Menciptakan Kepuasan Publik, Pemenuhan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Menciptakan Kepuasan Publik			1.595.000,00	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG
	1.01.0 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan Dokumen Pengelolaan Keuangan				100 Persen	100 Persen	4.729.271.283,00	6.440.940.054,00	6.423.060.054,00	1.773.888.754,00			Memenuhi informasi publik, hukum dan akuntasi, serta mewujudkan pencegahan dan penanganan korupsi, kolusi, nepotisi, dan penyalahgunaan	Pemenuhan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Menciptakan Kepuasan Publik, Pemenuhan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Menciptakan Kepuasan Publik	100% Kepuasan Pada Kategori Baik		4.463.844.275,57	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG

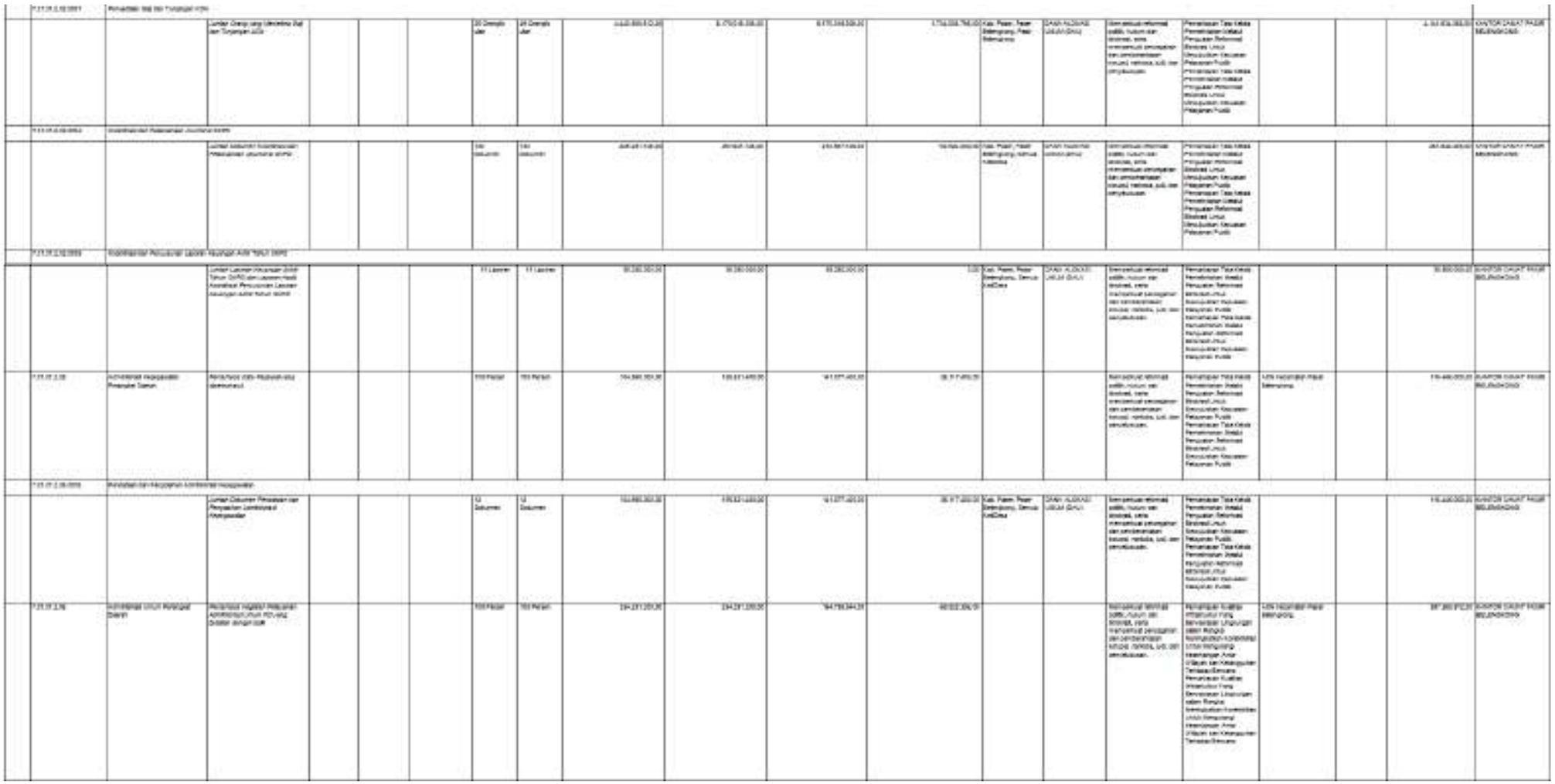

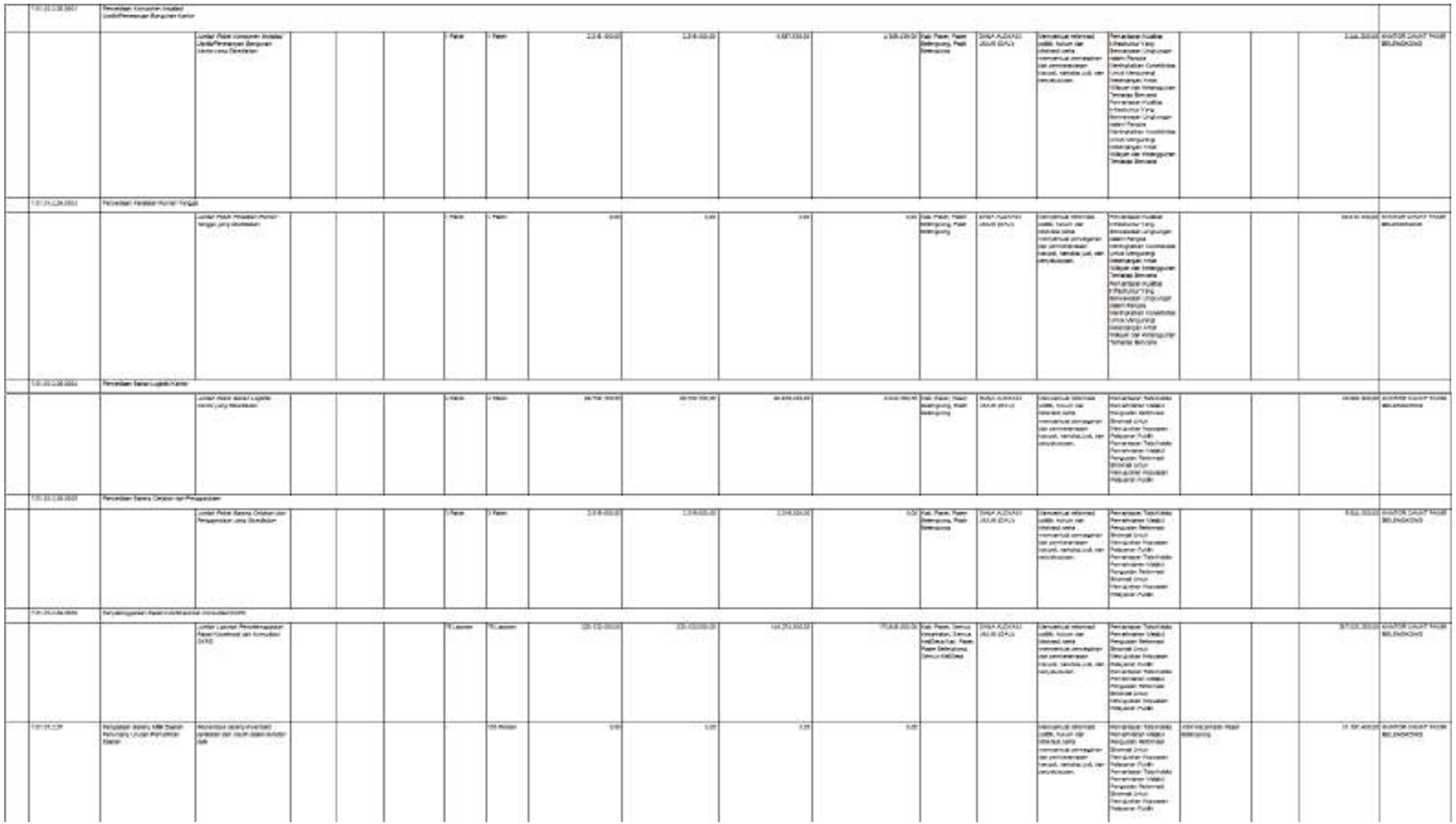

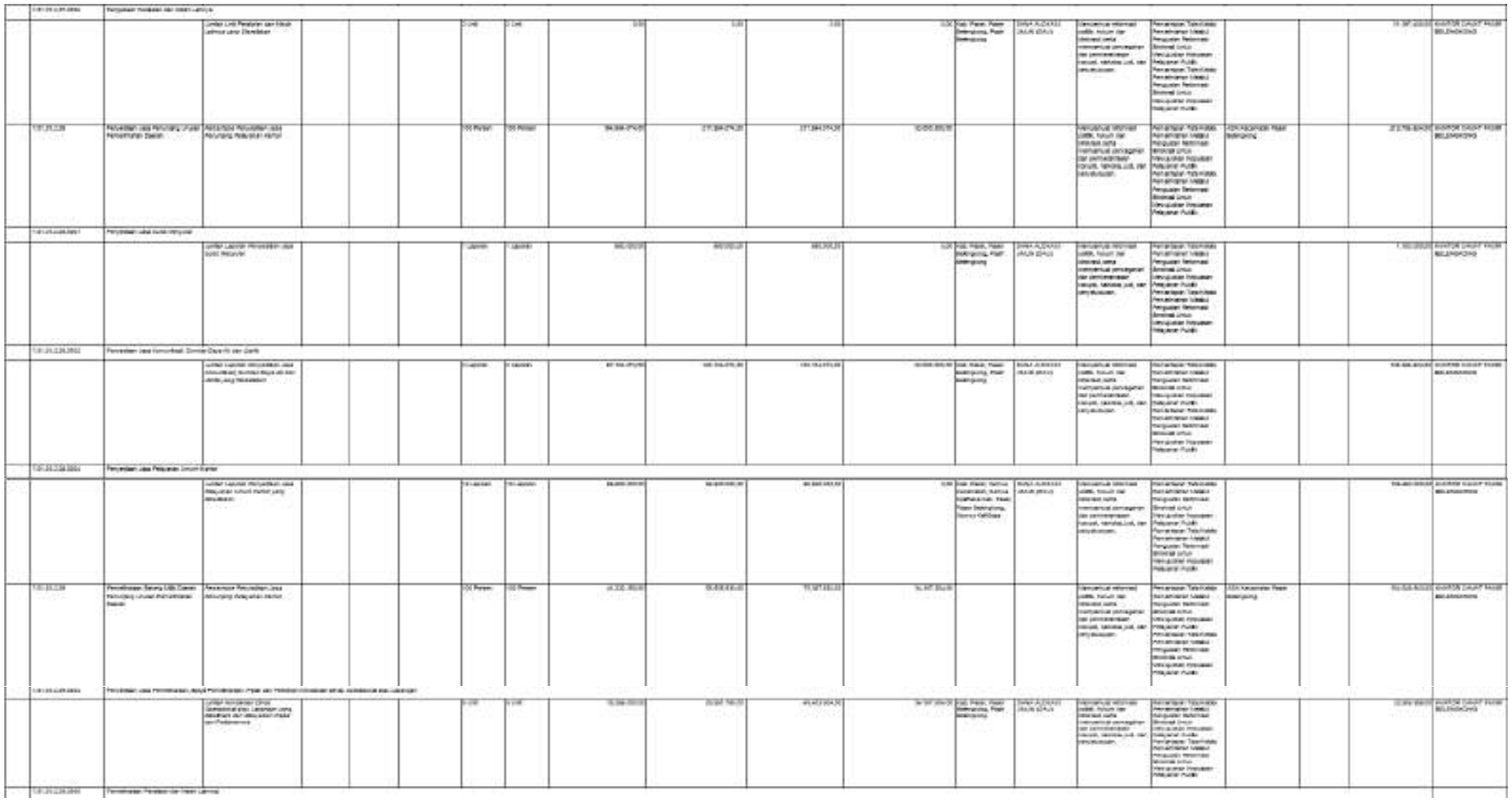





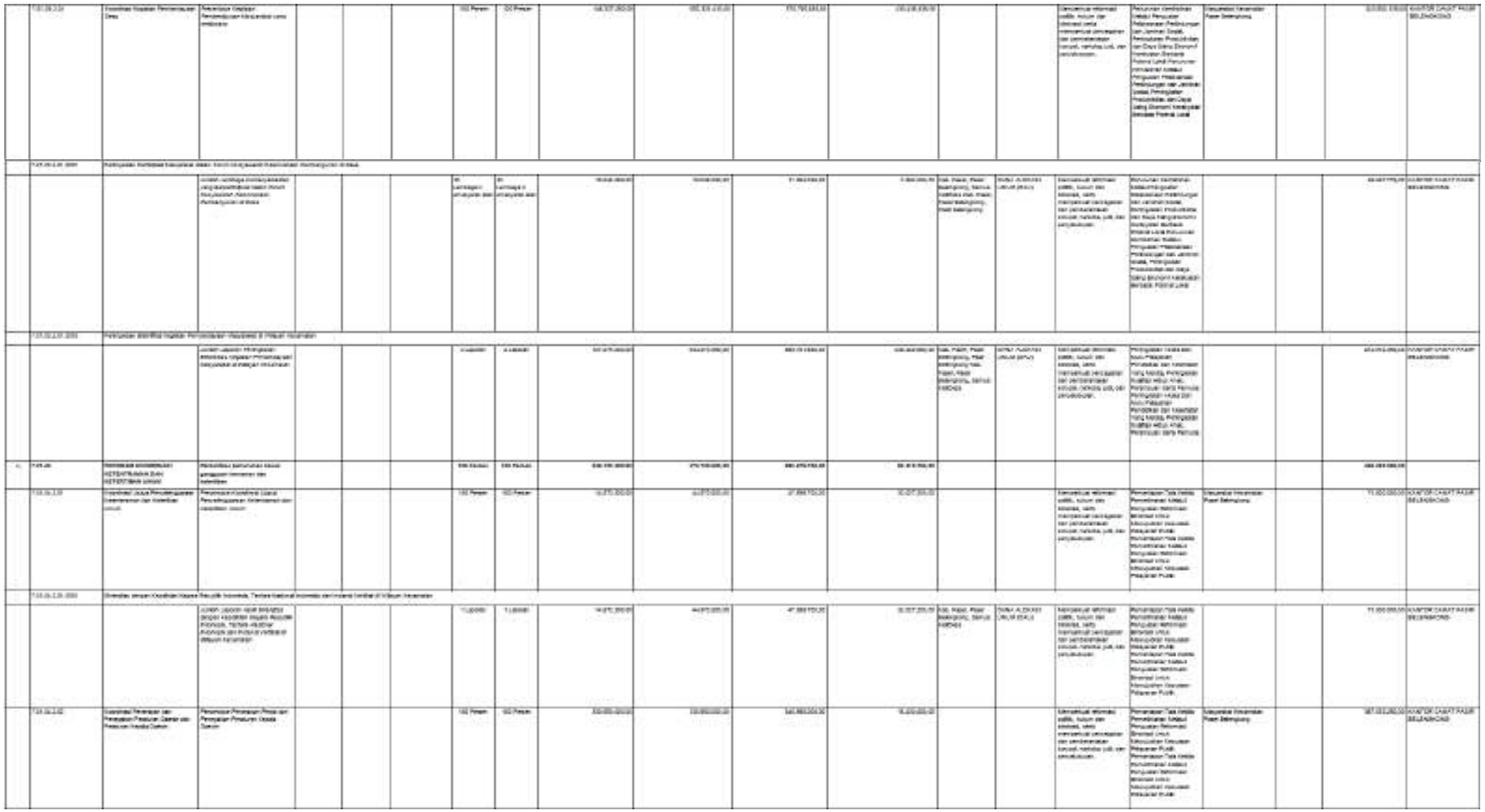

	[illegible]	[illegible]																				
			Lumbar Lainnya [illegible] dengan Peralatan Gedung yang Tujuan dan Fungsinya di Bidang Pengujian, Penilaian, Penyimpanan, Pengamanan, Pemeliharaan, Perawatan, Pemusnahan, Pengadaan, Penyewaan

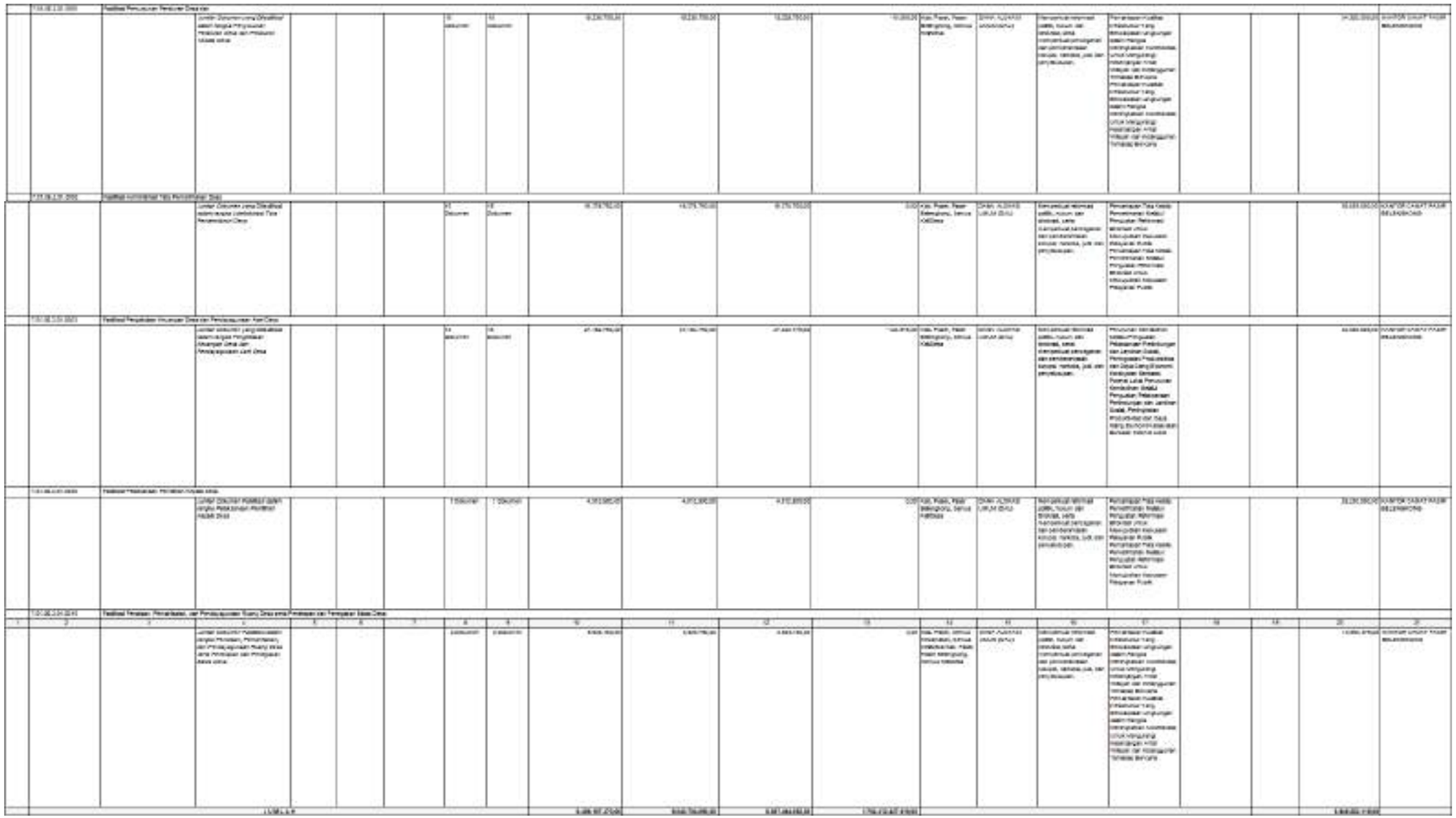

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Paser Belengkong Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kantor Camat Paser Belengkong mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

1.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Paser Belengkong, 28 Juli 2025
Plt. CAMAT,

ABDILLAH, S.STP
NIP 198207052001121004

RENCANA KERJA (PERUBAHAN) TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

KECAMATAN BATU ENGAU



PREPARED BY:
sUB. BAGIAN PROGRAM DAN KEUANAGAN

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Batu Engau dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rencana Kerja Perubahan 2025 Kecamatan Batu Engau Tahun merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamantkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut diatas Renja Perubahan ini disusun dengan masih mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Batu Engau Tahun 2022 – 2026.

Demikian Rencana Kerja Perubahan 2025 Kecamatan Batu Engau ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Batu Engau Tahun 2025.

Batu Engau, September 2025

Camat Batu Engau

PEMERINTAH KABUPATEN PASER KECAMATAN BATU ENGAU

Muhammad Tauhid, S.Sos, MM

Pembina TK .I

NIP. 19680202 198803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI i1

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 9

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Batu Engau 17

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 20

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 22

3.1. Tujuan dan Sasaran 22

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 23

3.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 27

3.4. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024 28

BAB IV PENUTUP 36

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan. 36

4.2. Rencana tindak lanjut 37

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser mengacu padakerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 dan Renstra Kantor Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kantor Kecamatan Batu Engau, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Batu Engau sampai

dengan Triwulan II Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Renja Kantor Kecamatan Batu Engau , Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2025 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tentang Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Kantor Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun. Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Kantor Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2025
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Batu Engau
2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Tujuan dan sasaran
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja Kantor Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel 2.1 dalam format berikut:

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
KANTOR CAMAT BATU ENGAU
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
Periode Pelaksanaan : Triwulan III Tahun 2025

Sasaran SKPD Tahunan :
-

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2022-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (%)		Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7 + 13		15=14/8 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		F				6.031.000.000		0		6.031.000.000		943.651.710		0		0						943.651.710		7,53	
		7.01	KECAMATAN			6.031.000.000		0		6.031.000.000		943.651.710		0		0						943.651.710		7,53	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat (Persentase)	80	7.394.303.960	0	0	80	7.394.303.960	0	944.651.710	0	0	0	0			0	944.651.710	0	944.651.710	0	7,51	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan PD, Persentase Capaian Sasaran Strategis PD, Kualitas Pelaksanaan SPIP PD, Nilai Evaluasi SAKIP Oleh Inspektorat Kabupaten, Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK PD (Persen) (Persentase)	100	111.992.964	0	0	100	111.992.964	0	12.535.918	0	0	0	0			0	12.535.918	0	12.535.918	0	11,20	
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	5.000.000	4	0	6	5.000.000	2	386.774	1	0	0	0			3	386.774	7	386.774	70	5,92	
		7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	106.992.964	4	0	5	106.992.964	1	12.037.736	1	0	0	0			2	12.037.736	6	12.037.736	60	11,25	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terhutan dilaksanakan Persentase LHP sisi (Persentase)	100	6.744.991.955	0	0	100	6.744.991.955	0	484.343.313	0	0	0	0			0	484.343.313	0	484.343.313	0	6,68	
		7.01.01.2.02.0001	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	360	6.611.641.753	238	0	264	6.611.641.753	67	433.480.802	67	0	0	0			134	433.480.802	372	433.988.802	63,27	6,83	
		7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	100	94.286.000	100	0	100	94.286.000	50	7.150.000	24	0	0	0			74	7.150.000	204	7.150.000	86	12,93	
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (Laporan)	10	5.845.000	0	0	15	5.845.000	0	1.100.001	0	0	0	0			0	1.100.001	0	1.100.001	0	19,55	
		7.01.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase (dari2 rapusan Indeks kepuasan terhadap (Persentase)	100	100.100.700	0	0	100	100.100.700	0	21.040.000	0	0	0	0			0	21.040.000	0	21.040.000	0	13,8	

printed by ***e-Dalevbang PPT*** *| 30 September 2025 13:04*

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2022-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (%)		Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/8 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		7.01.01.2.80.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	24	189.130.700	11	0	12	189.130.700	2	31.640.000	0	0	0	0			2	31.640.000	13	31.640.000	54,17	16,8	
		7.01.01.2.90	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase roda2 operasional kantor kepasuan sekretariat (Persentase)	100	329.313.000	0	0	436	329.313.200	0	99.666.616	0	0	0	0			0	99.666.616	0	99.666.616	0	30,41	
		7.01.01.2.90.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	7.324.488	1	0	1	7.324.488	0	0	0	0	0	0			0	0	1	0	50	0	
		7.01.01.2.90.0002	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	3.411.207	1	0	1	3.411.207	0	0	1	0	0	0			1	0	2	0	100	0	
		7.01.01.2.90.0003	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	33.640.220	3	0	3	33.640.220	1	11.638.000	1	0	0	0			2	11.638.000	5	11.638.000	83,33	80,81	
		7.01.01.2.90.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	3.272.000	1	0	1	3.272.000	0	0	0	0	0	0			0	0	1	0	50	0	
		7.01.01.2.90.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	468	70.000.000	219	0	234	70.000.000	24	20.640.079	23	0	0	0			47	20.640.079	266	20.640.079	56,84	47,70	
		7.01.01.2.90.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4.787.600	0	0	1	4.787.600	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0		0				0		0		0		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		3		0		0		0				0		0		0		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0		0				0		0		0		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	234		0		234		0		0		0				0		0		0		
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5		0		5		0		0		0				0		0		0		
		7.01.01.2.91	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik (Persentase)	100	199.823.220	0	0	536	199.823.220	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
		7.01.01.2.97.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	199.823.220	0	0	7	199.823.220	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	85,71	0	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (%)		Ket
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15=7+13		16=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		7.01.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan (Persen) (Persentase)	100	84.668.000	0	0	100	84.668.000	0	7.497.977	0	0	0	0			0	7.497.977	0	7.497.977	0	8,84	
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100	500.000	50	0	50	500.000	0	0	0	0	0	0			0	0	50	0	50	0	
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	32.168.828	12	0	12	32.168.828	3	3.297.977	3	0	0	0			6	3.297.977	18	3.297.977	75	8,32	
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	24	32.000.000	12	0	12	32.000.000	3	4.200.000	0	0	0	0			3	4.200.000	15	4.200.000	62,5	13,84	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik (Persen) (Persentase)	100	69.714.736	0	0	100	69.714.736	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	22.480.848	2	0	2	22.480.848	0	0	0	0	0	0			0	0	2	0	25	0	
		7.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	11.221.088	10	0	10	11.221.088	0	0	10	0	0	0			10	0	20	0	66,33	0	
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																									
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																									
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya																									
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya																									
2		**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Kecamatan (Persen)**	**80**	**197.449.649**	**0**	**0**	**80**	**197.449.649**	**0**	**39.340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**39.340.000**	**0**	**39.340.000**	**0**	**19,92**	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Persen)	280	125.649.000	100	0	100	125.649.000	0	24.620.000	0	0	0	0			0	24.620.000	100	24.620.000	80	19,96	
		7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	14	118.680.000	7	0	7	118.680.000	1	24.620.000	1	0	0	0			2	24.620.000	9	24.620.000	64,29	20,83	
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	3.960.000	1	0	1	3.960.000	0	0	0	0	0	0			0	0	1	0	50	0	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2022-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (%)		Ket
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/8 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		T.01.02.2.02	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Persentase)	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
		T.01.02.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	1	3.000.000	0	0	1	3.000.000	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
		T.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat (Persentase)	0	98.520.000	0	0	0	98.520.000	0	4.720.000	0	0	0	0			0	4.720.000	0	4.720.000	0	0,00	
		T.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	2	98.520.000	2	0	2	98.520.000	1	4.720.000	0	0	0	0			1	4.720.000	2	4.720.000	50	0,00	
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																							
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																							
		Tindak Lanjut yang Dperlukan Dalam Triwulan Berikutnya																							
		Tindak Lanjut yang dperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya																							
A		T.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%) (Persentase)	75	31.295.200	0	0	75	31.295.200	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
		T.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (Persen) (Persentase)	100	31.295.200	0	0	100	31.295.200	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
		T.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	15	23.000.000	5	0	5	23.000.000	0	0	0	0	0	0			5	0	15	0	100	0	
		T.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	8.295.200	3	0	3	8.295.200	0	0	1	0	0	0			1	0	4	0	66,67	0	
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																							
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																							
		Tindak Lanjut yang Dperlukan Dalam Triwulan Berikutnya																							
		Tindak Lanjut yang dperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya																							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2022-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (%)		Ket
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
4		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Kasus Gangguan Keamanan dan Ketertiban (Persentase)	0	300.715.000	0	0	0	300.715.000	0	50.000.000	0	0	0	0			0	50.000.000	0	50.000.000	0	13,63	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Persentase)	0	60.135.000	0	0	0	60.135.000	0	2.450.000	0	0	0	0			0	2.450.000	0	2.450.000	0	3,78	
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	8	30.360.000	4	0	4	30.360.000	1	0	1	0	0	0			2	0	0	0	25	0	
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	8	44.275.000	1	0	7	44.275.000	0	2.450.000	0	0	0	0			0	2.450.000	1	2.450.000	12,5	5,53	
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (Persentase)	100	301.600.000	0	0	100	301.600.000	0	47.550.000	0	0	0	0			0	47.550.000	0	47.550.000	0	15,77	
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	4	301.600.000	0	0	4	301.600.000	1	47.550.000	0	0	0	0			1	47.550.000	1	47.550.000	25	15,77	
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																							
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																							
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya																							
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya																							
5		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan (Persentase)	0	264.980.000	0	0	100	264.980.000	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sosial Pengawas Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawas Kepala Daerah (Persentase)	0	264.980.000	0	0	0	264.980.000	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (%)		Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		7.01.35.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemantapan dan Pengembangan Kehidupan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kebangsaan dan Ketahanan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	58	148.481.773	0	0	58	148.481.773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.01.35.2.01.0003	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemantapan dan Pemeliharaan Kerukunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	58	148.481.773	0	0	58	148.481.773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja																								
		Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja																								
		Tindak Lanjut yang Dperlukan Dalam Triwulan Berikutnya																								
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya																								
9		7.01.36	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Menyampaikan LKP Desa Tepat Waktu (Persentase)	100	277.505.051	0	0	100	277.505.051	0	9.605.000	0	0	0	0			0	9.605.000	0	9.605.000	0	3,46	
		7.01.36.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Persentase)	0	277.505.051	0	0	0	277.505.051	0	9.605.000	0	0	0	0			0	9.605.000	0	9.605.000	0	3,46	
		7.01.36.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	26	9.257.850	12	0	12	9.257.850	0	0	0	0	0	0			0	0	12	0	50	0	
		7.01.36.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	26	9.605.500	12	0	12	9.605.500	0	0	0	0	0	0			3	0	10	0	61,54	0	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025 (%)		Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		7.01.00.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	20	145.000.000	13	0	13	145.000.000	3	9.000.000	3	0	0	0			5	9.000.000	16	9.000.000	80,23	6,02	
		7.01.00.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	20	99.967.111	13	0	13	99.967.111	3	0	10	0	0	0			10	0	23	0	88,46	0	
		7.01.00.2.01.0018	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	10	0.000.000	0	0	10	0.000.000	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
		7.01.00.2.01.0019	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	5	28.470.470	0	0	5	28.470.470	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																							
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																							
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya																							
		Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Rapat OPD Berikutnya																							
				JUMLAH		0.551.888.581		0		0.551.888.581		641.621.719		0		0				641.621.719		641.621.719			
				Rata-rata capaian kinerja (%)															0	7,33			0	7,33	
				Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

Dievaluasi

Tanah Grogot, 30 September 2025

Kepala Bappeda Litbang

NIP.

Dievaluasi

Tanah Grogot, 30 September 2025

Kepala Bappeda Litbang

NIP.

printed by ***e-Dalevbang PPT*** | 30 September 2025 13.04

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2025 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 32,36%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.767.545.399,00 dari total pagu Renja sebesar Rp 8.551.980.593,00.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Kantor Camat Batu Engau dengan predikat kinerja Cukup Rendah.

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Batu Engau

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kantor Camat Batu Engau melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

Tugas :

1. Camat mempunyai tugas yang meliputi :
   a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
   b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
   c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
   d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
   e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
   f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
   g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibantu oleh perangkat kecamatan

Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Upaya Kantor Camat Batu Engau dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Jumlah temuan penyimpanan pengelolaan BMD dan Keuangan yang material dari BPK dan APIP eksternal
2. Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat
3. Nilai indeks kepuasan masyarakat
4. Angka kriminalitas
5. Presentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kantor Camat Batu Engau Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Kantor Camat Batu Engau terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kantor Camat Batu Engau sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					Realisasi	Capaian Kinerja
			2022	2023	2024	2025	2026		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi							
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	CC	B	BB	A	A		

	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	78, 61	81	82	83	84		10,45
	Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	52	51	50	49	48		11,94
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Angka Kemiskinan	8	7,3	6,8	6,3	5,8		
	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan yang aktif	100	100	100	100	100		3,46

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Camat Batu Engau Periode JuLi 2025 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai jadwal.
2. Perubahan pejabat/personil sehubungan dengan adanya pergantian pejabat
3. Ganguan akses jariangan internet dan Aplikasi SIPD

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2025.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Batu Engau sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran Kantor Camat Batu Engau tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Target Tahunan Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		80	80
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai Hasi Evaluasi dari Inspektorat	B 64	B 64
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat/Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan PATEN kecamatan yang dilaksanakan 1 tahun sekali	95	95
	Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	Jumlah peristiwa kriminal/gangguan keamanan/ketertiban selama setahun dibagi jumlah penduduk tahun ybs dikalikan 100.000	3	3
Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa		Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan		20	20

	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	Jumlah desa yang memiliki Lembaga kemasyarakatan ----- x 100 % Jumlah Desa	65	65

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Kantor Camat Batu Engau Tahun 2025 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Kantor Camat Batu Engau mendukung pencapaian sasaran ke – 3, 4, 5 dan 10 yaitu “Meningkatnya akuntabilitas kinerja

pemerintah, Meningkatnya kualitas pelayanan publik, Meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif dan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat".

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Kantor Camat Batu Engau telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

TABEL 3.2

Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Batu Engau

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	Ket
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
	BELANJA OPERASIONAL	**7.003.972.583,00**	**8.884.447.842,00**	**1.880.475.259,00**	
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.950.486.428,00**	**7.520.526.004,00**	**240.648.319,00**	
I	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**96.000.000,00**	**137.315.000,00**	**41.315.000,00**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	20.974.000,00	10.974.000,00	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.000.000,00	116.341.000,00	30.341.000,00	
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.458.804.221,00**	**6.746.682.305,00**	**1.287.878.084,00**	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.361.262.017,00	6.674.640.753,00	1.313.378.736,00	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	89.852.104,00	64.396.052,00	-25.456.052,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.690.100,00	7.645.500,00	-44.600,00	
III	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**132.150.000,00**	**137.267.400,00**	**5.117.400,00**	
6	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	132.150.000,00	137.267.400,00	5.117.400,00	
IV	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**145.891.100,00**	**201.342.109,00**	**55.451.009,00**	

7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.653.700,00	11.531.061,00	7.877.361,00	
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.617.400,00	2.611.327,00	-6.073,00	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	35.501.346,00	-14.498.654,00	
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.545.000,00	6.710.875,00	2.165.875,00	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000,00	140.200.000,00	60.200.000,00	
12	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.075.000,00	4.787.500,00	-287.500,00	
V	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**84.858.928,00**	**99.977.100,00**	**15.118.172,00**	
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	0,00	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.158.928,00	67.277.100,00	15.118.172,00	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	
VI	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN**	**31.682.179,00**	**47.118.857,00**	**15.436.678,00**	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000,00	35.897.768,00	15.897.768,00	
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.482.179,00	11.221.089,00	-261.090,00	
VII	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH**	1.100.000,00	150.823.233,00	149.723.233,00	
18	Pengadaan Mebel	100.000,00	0,00	-100.000,00	
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000,00	150.823.233,00	149.823.233,00	
B	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**235.650.000,00**	**233.249.291,00**	**46.792.671,00**	
I	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN**	**148.550.000,00**	**149.839.672,00**	**1.289.672,00**	
20	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	138.550.000,00	132.844.000,00	-5.706.000,00	
21	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000,00	16.995.672,00	6.995.672,00	
II	**KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM**	**3.100.000,00**	**3.089.619,00**	**-10.381,00**	
22	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3.100.000,00	3.089.619,00	-10.381,00	
III	**PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT**	**84.000.000,00**	**80.320.000,00**	**-3.680.000,00**	
23	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	84.000.000,00	80.320.000,00	-3.680.000,00	
C	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**28.280.400,00**	**47.038.400,00**	**15.319.600,00**	
I	**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	**28.280.400,00**	**47.038.400,00**	**18.758.000,00**	

24	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.000.000,00	25.480.000,00	8.480.000,00	
25	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.280.400,00	21.558.400,00	10.278.000,00	
D	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**400.000.000,00**	**376.725.000,00**	**7.000.000,00**	
I	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**95.000.000,00**	**70.125.000,00**	**-24.875.000,00**	
26	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.000.000,00	25.850.000,00	-4.150.000,00	
27	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	65.000.000,00	44.275.000,00	-20.725.000,00	
II	**KOOREDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH**	**305.000.000,00**	**306.600.000,00**	1.600.000,00	
28	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	305.000.000,00	306.600.000,00	1.600.000,00	
E	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM**	**130.000.000,00**	**383.847.566,00**	**155.647.777,00**	
I	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**130.000.000,00**	**383.847.566,00**	**253.847.566,00**	
29	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Republik Indonesia	60.000.000,00	167.948.481,00	107.948.481,00	
30	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	70.000.000,00	215.899.085,00	145.899.085,00	
F	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**259.555.755,00**	**323.061.581,00**	**101.944.245,00**	
I	**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**259.555.755,00**	**323.061.581,00**	**63.505.826,00**	
31	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.615.220,00	9.872.296,00	4.257.076,00	
32	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.945.190,00	10.135.595,00	190.405,00	
33	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	136.000.000,00	151.553.000,00	15.553.000,00	
34	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	77.310.345,00	102.349.345,00	25.039.000,00	
35	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	15.000.000,00	14.598.000,00	-402.000,00	
36	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat (Musdes, RKPDesa, APBDesa)	15.685.000,00	34.553.345,00	18.868.345,00	
	JUMLAH	**7.003.972.583,00**	**8.884.447.842,00**	**1.754.212.427.619,00**	

3.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Perubahan Rancangan RKPD 2025 tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kantor Camat Batu Engau baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Paser.

Tabel 3.3
Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tahun 2025 pada Kantor Camat Batu Engau

No	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kantor Camat Batu Engau										
	Urusan ……..										
1	Program …..										
	Kegiatan ….										
	Sub Kegiatan										
2.	Program …..										
	Kegiatan ….										
	Sub Kegiatan										
2.	Program …..										
	Kegiatan ….										
	Sub Kegiatan										

NIHIL

3.4. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kantor Camat Batu Engau pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. PASER
TAHUN 2025



NO	KODE	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, PENGELOLAAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET OUTCOME PROGRAM / KEGIATAN TPW	BESARAN CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	PENGELOLA CAPAIAN TARGET PADA UPT TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENGANGGARAN															
							TARGET DPA		PAGU ANGGARAN (Rp.)			Komparatif/Berkurang (10-11)	LOKASI	SUMBER DANA	PENERIMA		KELOMPOK SASARAN	STANDARISASI BELANJA BERDASARKAN PERMENDAGRI		PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEGIATAN
							KEGIATAN	SATUAN	RAPBD 2023	APBD 2023	PAGU PERUBAHAN 2023				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU/HOMEBASE (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pemohon Izin Operasional Radio Siaran Komersial Publik Lokal				9 Stasiun	9 Stasiun	5.475.000.00	5.475.000.00	1.757.000.00	-357.000.00	Kab. Pasir, Kab. Bulan, Kab.Kota Balikpa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memberikan rekomendasi, hasil survei, dan verifikasi kelayakan pengajuan izin operasional, laporan berkala, audit, dan perpanjangan	Pemerintah Kab. Kota/Pemerintah Kabupaten Kota Kecamatan Kelurahan Lintas Masyarakat Pengguna Publik			5.475.000.00	KANTOR CABANG BALIKPAPAN
	7.01.01.0.01	Fasilitasi Siaran Radio Milik Swasta Pada Jenis Lokal Untuk Pemerintah Daerah							1.000.000.00	100.471.000.00	100.000.000.00	1.757.000.00			Memberikan rekomendasi, hasil survei, dan verifikasi kelayakan pengajuan izin operasional, laporan berkala, audit, dan perpanjangan	Pemerintah Kab. Kota/Pemerintah Kabupaten Kota Kecamatan Kelurahan Lintas Masyarakat Pengguna Publik	Radio Komersial Publik Swasta		98.471.111.00	KANTOR CABANG BALIKPAPAN
	7.01.01.2.01.0000	Pengawasan Materi																		
			Jumlah Materi Materi yang Diawasi				1 Unit	1 Unit	500.000.00	0.00	0.00	-1.00.000.00	Kab. Pasir, Kab. Bulan, Kab.Kota Balikpapan, Kab.Penajam Paser Utara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kartanegara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memberikan rekomendasi, hasil survei, dan verifikasi kelayakan pengajuan izin operasional, laporan berkala, audit, dan perpanjangan	Pemerintah Kab. Kota/Pemerintah Wilayah Pengguna Internet Kabupaten Lintas Masyarakat Pengguna Publik Pemerintah Kab. Kota/Pemerintah Wilayah Pengguna Internet Kabupaten Lintas Masyarakat Pengguna Publik			10.000.000.00	KANTOR CABANG BALIKPAPAN
	7.01.01.2.01.0000	Pengawasan Pemanfaatan Materi Lainnya																		
			Jumlah Unit Pengawasan dan Materi Lainnya yang Diawasi				5 Unit	5 Unit	1.000.000.00	100.521.000.00	100.521.000.00	100.521.000.00	Kab. Pasir, Kab. Bulan, Kab.Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memberikan rekomendasi, hasil survei, dan verifikasi kelayakan pengajuan izin operasional, laporan berkala, audit, dan perpanjangan	Pemerintah Kab. Kota/Pemerintah Wilayah Pengguna (Seluruh) Lintas Masyarakat Pengguna Publik Pemerintah Kab. Kota/Pemerintah Wilayah Pengguna (Seluruh) Lintas Masyarakat Pengguna Publik			99.979.111.00	KANTOR CABANG BALIKPAPAN
	7.01.01.2.08.0000	Pengawasan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Keperluan Lembaga Penyiaran Publik							84.999.999.00	84.999.999.00	84.999.999.00	19.119.120.00			Memberikan rekomendasi, hasil survei, dan verifikasi kelayakan pengajuan izin operasional, laporan berkala, audit, dan perpanjangan	Pemerintah Kab. Kota/Pemerintah Wilayah Pengguna Radio Lintas Masyarakat Pengguna Publik Pemerintah Kab. Kota/Pemerintah Wilayah Pengguna Radio Lintas Masyarakat Pengguna Publik	Publik Perusahaan Radio Siaran		84.999.111.00	KANTOR CABANG BALIKPAPAN
	7.01.01.2.08.0001	Pengawasan Izin Operasional Radio																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Izin Operasional Radio Siaran Publik Lokal				12 Laporan	12 Laporan	100.000.00	100.000.00	100.000.00	0.00	Kab. Pasir, Kab. Bulan, Kab.Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memberikan rekomendasi, hasil survei, dan verifikasi kelayakan pengajuan izin operasional, laporan berkala, audit, dan perpanjangan	Pemerintah Kab. Kota/Pemerintah Wilayah Pengguna Radio Lintas Masyarakat Pengguna Publik Pemerintah Kab. Kota/Pemerintah Wilayah Pengguna Radio Lintas Masyarakat Pengguna Publik			117.000.00	DATA UNIT KERJA BALIKPAPAN
	7.01.01.2.08.0002	Pengawasan Jasa Konvensional Jumlah Desa Ke dan Dari																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Jasa Konvensional Jumlah Desa Ke dan Dari yang Diawasi				12 Laporan	12 Laporan	23.100.000.00	23.100.000.00	97.277.100.00	19.119.120.00	Kab. Pasir, Kab. Bulan, Kab.Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memberikan rekomendasi, hasil survei, dan verifikasi kelayakan pengajuan izin operasional, laporan berkala, audit, dan perpanjangan	-			94.977.112.00	KANTOR CABANG BALIKPAPAN
	7.01.01.2.08.0003	Pengawasan Jasa Penyiaran Lingkungan Kantor																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Jasa Penyiaran Lingkungan Kantor yang Diawasi				12 Laporan	12 Laporan	84.999.999.00	84.999.999.00	84.999.999.00	0.00	Kab. Pasir, Kab. Bulan, Kab.Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memberikan rekomendasi, hasil survei, dan verifikasi kelayakan pengajuan izin operasional, laporan berkala, audit, dan perpanjangan	Pemerintah Kab. Kota/Pemerintah Wilayah Pengguna Radio Lintas Masyarakat Pengguna Publik Pemerintah Kab. Kota/Pemerintah Wilayah Pengguna Radio Lintas Masyarakat Pengguna Publik			84.999.999.00	KANTOR CABANG BALIKPAPAN
	7.01.01.2.xx	Pengawasan Penyiaran Radio Siaran Publik Lokal Untuk Pemerintah Daerah							91.999.110.00	93.997.110.00	97.119.111.00	19.119.120.00			Memberikan rekomendasi, hasil survei, dan verifikasi kelayakan pengajuan izin operasional, laporan berkala, audit, dan perpanjangan	Pemerintah Kab. Kota/Pemerintah Wilayah Pengguna Radio Lintas Masyarakat Pengguna Publik Pemerintah Kab. Kota/Pemerintah Wilayah Pengguna Radio Lintas Masyarakat Pengguna Publik	Publik Perusahaan Radio Siaran		110.997.997.00	KANTOR CABANG BALIKPAPAN

Kode	Uraian	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Awal Periode Program	Realisasi Capaian Sebelum Diisi Tahun 2023	Prakiraan Capaian Setelah Diisi Tahun Ini	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelembagaan Sasaran	Penanggung Jawab Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Gap/Kesenjangan (7-8-9)	Lokasi	Kelompok Sasaran	Program	Kegiatan	
							Akhir Th.	Akhir Th.	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	7.01.01.2.08.0000	Penyediaan Jasa Kesehatanan, Jasa Kesehatanan, Pada Unit Pelayan Kesehatan Milik Pemerintah atau Lainnya															
			Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Kelayakan Pakai dan Pelayanan				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	22.900.000,00	38.267.765,00	16.831.765,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan kesehatan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Kegiatan Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Untuk Pemenuhan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			31.119.713,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.01.2.09.0000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	11.992.700,00	11.992.179,00	11.221.696,00	(241.000,00)	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Kegiatan Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			11.200.140,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.01.2.09.0002	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000,00	0,00	0,00	(100.000,00)	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Kegiatan Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.01.2.09.0013	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Kegiatan Prasarana (Fasilitas) Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENPELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**				**95 Persen**	**97 Persen**	**100.000.000,00**	**88.000.000,00**	**200.000.000,00**	**18.750.971,00**					**88.000.971,00**
	7.01.02.2.01	Pengadaan/Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Kegiatan Pemerintahan yang Baik Dilaksanakan oleh Unit Kerja Pelayanan Publik yang Ada di Kecamatan				100 Persen	100 Persen	140.000.000,00	111.000.000,00	140.000.000,00	1.000.000,00			Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Baik Publik		100.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.02.0000	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Kantor di Wilayah Kecamatan															
			Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Kantor (Meja dan Kursi) di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.02.0002	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya															
			Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.03.0000	Pengadaan Alat Listrik															
			Jumlah Laporan Pengadaan Alat Listrik yang Terkait dalam Pemeliharaan Gedung dan Pemasangan Instalasi Listrik				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.05.0000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
			Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.06.0000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
			Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.08.0000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
			Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.09.0000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
			Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.10.0000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
			Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.11.0000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
			Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.12.0000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
			Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.13.0000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
			Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.14.0000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
			Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.15.0000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
			Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.16.0000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
			Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.17.0000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
			Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.18.0000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
			Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.19.0000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
			Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.20.0000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
			Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.21.0000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
			Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.22.0000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
			Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.23.0000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
			Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.24.0000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
			Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.25.0000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
			Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.26.0000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
			Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.27.0000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
			Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.28.0000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
			Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.29.0000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
			Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.30.0000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
			Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.31.0000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
			Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.32.0000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
			Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik			10.000.000,00	KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN
	7.01.02.2.33.0000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor															
			Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Paser, Balu Enggu, Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta mutu pelayanan dan pemberdayaan dan pemberdayaan keluarga, lansia, dll. dan pemerintah	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Menjalankan Kewajiban Pemerintah Publik Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Peng

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Jumlah Lainnya Pemeliharaan Halaman/Taman Kantor/yang dengan Fisik Jumlah Lainnya				7 Lainnya	7 Lainnya	60.000.000,00	60.000.000,00	44.375.000,00	66.725.000,00	Dinas Kebersihan, Taman dan Pemakaman Kota Palangka Raya	Dana Alokasi Umum (DAU)				60.000.000,00		
	1.01.1a.2.10	Pemeliharaan Halaman dan Lingkungan Kantor Rumah dan Pemukiman Bahan Hukum	-				-	-	480.000.000,00	417.000.000,00	348.000.000,00	1.000.000,00			Masyarakat Kota Palangka Raya, Instansi dan Lembaga Swasta di Kota Palangka Raya, Pengelola Taman, Pemerintah Kota Palangka Raya	Pemerintah Kota Palangka Raya, Instansi Pemerintah, Swasta Perorangan dan Kelompok Masyarakat, Pengelola Taman, Pemerintah Kota Palangka Raya	Kelurahan/Kecamatan Kota Palangka Raya			417.000.000,00	1.01.1a.2.10
	1.01.1a.2.10.0001	Kondisi kesehatan yang dapat dicapai oleh masyarakat yang hidup di lingkungan lingkungan tertentu dan/atau kelompok tanaman yang ditanam di kota, kabupaten/kota Kota Palangka Raya																		
			Jumlah Lainnya Pemeliharaan/Perawatan Taman Kantor/yang dengan Fisik Jumlah Lainnya				41 Lainnya	41 Lainnya	480.000.000,00	417.000.000,00	348.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Kota Palangka Raya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Masyarakat, Instansi dan Lembaga Swasta di Kota Palangka Raya, Pengelola Taman, Pemerintah Kota Palangka Raya	Pemerintah Kota Palangka Raya, Instansi Pemerintah, Swasta Perorangan dan Kelompok Masyarakat, Pengelola Taman, Pemerintah Kota Palangka Raya			417.000.000,00	1.01.1a.2.10.0001
2	**1.01.1b**	**PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH PERMUKIMAN KECIL**	-				-	-	**130.000.000,00**	**399.841.000,00**	**260.647.366,00**	**268.647.777,00**							**399.841.777,00**	
	1.01.1b.2.01	Pemeliharaan/perawatan Lindak Pengelolaan Limbah Domestik Perusahaan/Pabrik							130.000.000,00	399.841.000,00	260.647.366,00	268.647.777,00			Masyarakat, Instansi dan Lembaga Swasta di Kota Palangka Raya, Pengelola Taman, Pemerintah Kota Palangka Raya	Pemerintah Kota Palangka Raya, Instansi Pemerintah, Swasta Perorangan dan Kelompok Masyarakat, Pengelola Taman, Pemerintah Kota Palangka Raya	Kelurahan/Kecamatan Kota Palangka Raya			399.841.777,00	1.01.1b.2.01
	1.01.1b.2.01.0001	Pemenuhan Persentase Kabupaten/kota Kabupaten/kota Nasional dalam rangka Pemenuhan Pengelolaan Persampahan, Pemerintah Indonesia Tahun Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang dapat memberikan dan Pemerintah Kabupaten/kota Kota Palangka Raya																		
			Jumlah Orang yang Menjalin Perkiraan/Melakukan Perkumpulan dan Kelompok Orang yang Mendapatkan Pengelolaan Persampahan, Pengurusan, Lindang Lindang Dalam Upaya Kondisi Kumuh Aktifitas Pengelolaan Limbah Tinggal Ke Luar Permukiman/Jumlah Pemindahan Kotoran Upaya Kotoran Kotoran				99 Orang	99 Orang	90.000.000,00	199.195.000,00	197.000.000,00	197.835.551,00	Kab. Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	DAK/DAU/DBH	Masyarakat, Instansi dan Lembaga Swasta di Kota Palangka Raya, Pengelola Taman, Pemerintah Kota Palangka Raya	Pemerintah Kota Palangka Raya, Instansi Pemerintah, Swasta Perorangan dan Kelompok Masyarakat, Pengelola Taman, Pemerintah Kota Palangka Raya			99.911.777,00	1.01.1b.2.01.0004
	1.01.1b.2.01.0004	Persentase Kecamatan yang Jalan Lalu Lintas Dalam Lindak Pengelolaan Sistem Pengelolaan Kecamatan Lokal Pengelolaan dan Lindang																		
			Jumlah Orang yang Menjalin Perkiraan/Melakukan Perkumpulan dan Kelompok Orang yang Mendapatkan Pengelolaan Persampahan, Pengurusan, Lindang Lindang Dalam Upaya Kondisi Kumuh Aktifitas Pengelolaan Limbah Tinggal Ke Luar Permukiman/Jumlah Pemindahan Kotoran Upaya Kotoran Kotoran				99 Orang	99 Orang	70.000.000,00	107.217.000,00	21.999.000,00	110.999.000,00	Kab. Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	DAK/DAU/DBH	Masyarakat, Instansi dan Lembaga Swasta di Kota Palangka Raya, Pengelola Taman, Pemerintah Kota Palangka Raya	Pemerintah Kota Palangka Raya, Instansi Pemerintah, Swasta Perorangan dan Kelompok Masyarakat, Pengelola Taman, Pemerintah Kota Palangka Raya			220.000.000,00	1.01.1b.2.01.0004
3	**1.01.1c**	**PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN PENGELOLAAN PERMUKIMAN BAHA**	-				-	-	**250.000.000,00**	**300.141.000,00**	**320.001.001,00**	**191.444.444,00**							**301.000.000,00**	
	1.01.1c.2.01	Fasilitas Pemeliharaan dan Kondisi Pemerintah dan Pengelolaan Pemerintahan Desa	-				-	-	250.000.000,00	300.141.000,00	320.001.001,00	89.000.000,00			Masyarakat, Instansi dan Lembaga Swasta di Kota Palangka Raya, Pengelola Taman, Pemerintah Kota Palangka Raya	Pemerintah Kota Palangka Raya, Instansi Pemerintah, Swasta Perorangan dan Kelompok Masyarakat, Pengelola Taman, Pemerintah Kota Palangka Raya	Kelurahan/Kecamatan Kota Palangka Raya			301.000.000,00	1.01.1c.2.01
	1.01.1c.2.01.0001	Fasilitas Pengelolaan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR HASIL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN RENSTRA SKPD	TARGET AKHIR CAPAIAN RENJA SKPD TAHUN 2023	PENGAWAS CAPAIAN TARGET RENJA SKPD KABUPATEN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PROGRAM BIDU PRIORITAS TAHUN 2023		PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)				LOKASI	KANTOR YANG	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							KEWILAYAH	KEWILAYAH	KEWILAYAH	KEWILAYAH	KEWILAYAH	KEWILAYAH			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Dihasilkan dalam rangka Pelaksanaan Monitoring Aset Daerah Tersedia Sesuai Jenis				12 Dokumen	12 Dokumen	9.616.000.000	10.577.600.000	9.674.760.000	4.287.376.000	Kab. Pasar, Bab Kapas, Jalan Raffles	DINAS ILMIAH UMUM SAKTI	Memperkuat sistem/tata sistem, hukum dan struktur serta manajemen dan pemerintahan kerjasama, metrasi, unit, dan pemerintahan	Pemerintah Tata Kerja Pemerintahan Melalui Pengadaan Pelayanan Efektif Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Pemerintah Tata Kerja Pemerintahan Melalui Pengadaan Pelayanan Efektif Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik			15.000.000.00	1.0000000.0.0000.0.0000.0.0000.0.0000
	1.0.1.0.0.1.01.0000	Kabupaten Pemberdayaan Tata Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Disediakan dalam rangka Pelaksanaan Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	9.616.160.00	10.578.176.00	10.133.208.00	100.116.00	Kab. Pasar, Bab Kapas, Jalan Raffles	DINAS ILMIAH UMUM SAKTI	Memperkuat sistem/tata sistem, hukum dan struktur serta manajemen dan pemerintahan kerjasama, metrasi, unit, dan pemerintahan	Pemerintah Tata Kerja Pemerintahan Melalui Pengadaan Pelayanan Efektif Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Pemerintah Tata Kerja Pemerintahan Melalui Pengadaan Pelayanan Publik			15.000.000.00	1.0000000.0.0000.0.0000.0.0000.0.0000
	1.0.1.0.0.1.01.0000	Kabupaten Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah																		
			Jumlah Dokumen yang Disediakan dalam rangka Pelaksanaan Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	138.000.000.00	151.800.000.00	141.984.000.00	19.800.000.00	Kab. Pasar, Bab Kapas, Jalan Raffles	DINAS ILMIAH UMUM SAKTI	Memperkuat sistem/tata sistem, hukum dan struktur serta manajemen dan pemerintahan kerjasama, metrasi, unit, dan pemerintahan	Pemerintah Tata Kerja Pemerintahan Melalui Pengadaan Pelayanan Efektif Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Pemerintah Tata Kerja Pemerintahan Melalui Pengadaan Pelayanan Publik			150.000.000.00	1.0000000.0.0000.0.0000.0.0000.0.0000
	1.0.1.0.0.1.01.0000	Kabupaten Kabupaten Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lainnya Kepala Daerah																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lainnya sesuai Ketentuan				12 Dokumen	12 Dokumen	77.616.340.00	184.734.340.00	130.340.344.00	19.000.000.00	Kab. Pasar, Bab Kapas, Jalan Raffles	DINAS ILMIAH UMUM SAKTI	Memperkuat sistem/tata sistem, hukum dan struktur serta manajemen dan pemerintahan kerjasama, metrasi, unit, dan pemerintahan	Pemerintah Tata Kerja Pemerintahan Melalui Pengadaan Pelayanan Efektif Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Pemerintah Tata Kerja Pemerintahan Melalui Pengadaan Pelayanan Efektif Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik			130.000.000.00	1.0000000.0.0000.0.0000.0.0000.0.0000
	1.0.1.0.0.1.01.0000	Kabupaten Pemberian Penghargaan dan Penanggulangan Hukum Kepada Pemerintah dan Penegakan Hukum Daerah																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pemberian Penghargaan, dan Penanggulangan Hukum Dalam Pemerintah dan Penegakan Hukum Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000.00	11.000.000.00	10.000.000.00	600.000.00	Kab. Pasar, Bab Kapas, Jalan Raffles	DINAS ILMIAH UMUM SAKTI	Memperkuat sistem/tata sistem, hukum dan struktur serta manajemen dan pemerintahan kerjasama, metrasi, unit, dan pemerintahan	Pemerintah Tata Kerja Pemerintahan Melalui Pengadaan Pelayanan Efektif Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Pemerintah Tata Kerja Pemerintahan Melalui Pengadaan Pelayanan Publik			10.000.000.00	1.0000000.0.0000.0.0000.0.0000.0.0000
	1.0.1.0.0.1.01.0000	Kabupaten Kabupaten Pengawasan dan Pelaksanaan Pemerintahan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pengawasan dan Pelaksanaan Pemerintahan Masyarakat Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	19.800.000.00	199.100.100.00	21.000.111.00	19.000.100.00	Kab. Pasar, Bab Kapas, Jalan Raffles	DINAS ILMIAH UMUM SAKTI	Memperkuat sistem/tata sistem, hukum dan struktur serta manajemen dan pemerintahan kerjasama, metrasi, unit, dan pemerintahan	Pemerintah Tata Kerja Pemerintahan Melalui Pengadaan Pelayanan Efektif Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Pemerintah Tata Kerja Pemerintahan Melalui Pengadaan Pelayanan Publik			99.000.000.00	1.0000000.0.0000.0.0000.0.0000.0.0000
	JUMLAH								7.000.010.000.00	9.301.770.176.00	9.004.141.040.00	1.741.070.497.976.00							1.071.100.100.00	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Batu Engau Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kantor Camat Batu Engau mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan

kewenangannya;

b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

1.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Batu Engau, September 2025

Camat Batu Engau

PEMERINTAH KABUPATEN PASER KECAMATAN BATU ENGAU

Muhammad Tauhid, S.Sos, MM

Pembina TK .I

NIP. 19680202 198803 1 004

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KANTOR KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

TANJUNG ARU

2025

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

TAHUN 2025

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

RENCANA KERJA (RENJA)

PERUBAHAN

KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) PD Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2025.

Renja Perubahan Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2025 merupakan bahan materi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2025 yang disusun dengan mengacu pada tema, prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur serta isu-isu strategis Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Paser tahun 2021-2026.

Renja Perubahan Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2025 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2025. Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan PD Kecamatan Tanjung harapan Kabupaten Paser Tahun 2025 semoga dapat diimplementasikan sebaik- baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan PD Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak. Akhirnya atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar- besarnya.

Tanjung Aru, 22 Agustus 2025

Camat,

PEMERINTAH KABUPATEN PASER KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

H. Sudarsono, SP,.MP.
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 197004241998031010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 5

1.4 SISTEM PENYUSUNAN RENCANA KERJA 6

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025 ..... **8**

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025 8

2.2 ANALISIS CAPAIAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN TANJUNG HARAPAN 20

2.3 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT KEBERHASILAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 25

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **27**

3.1 TUJUAN DAN SASARAN 27

3.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 28

3.3 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 42

3.4 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2025 42

BAB IV PENUTUP **55**

4.1 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN 55

4.2 RENCANA TINDAK LANJUT 55

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR : 100.3.3.2/KEP- /2025
TANGGAL :

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Renstra Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kantor Kecamatan Tanjung Harapan, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tanjung Harapan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2025 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322)

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Paser Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun; Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi

makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Harapan proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Harapan keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Kecamatan Tanjung Harapan, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025 Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2025 hingga Triwulan I baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjung Harapan

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar

yang diserta narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025.

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2025 yang disertai perubahan target.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025.

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Sebagaimana Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi atau diukur dalam pelaksanaannya. Pengukuran Kinerja adalah Proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui pencapaian Realisasi Keuangan dan capaian Kinerja, kemajuan dan kendala yang di hadapi dalam rangka pencapaian Visi dan misi, supaya dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efesiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi.

Hasil evaluasi Renja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagaimana termuat pada tabel 2.1 dalam format berikut ini:

Tabel 2.1

Capaian kinerja Program dan Kegiatan Sampai dengan Triwulan I

Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2025

Laporan Renja Triwulan-I 2025 [7.01.0.00.0.00.08.0000] Kantor Camat Tanjung Harapan

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025		Predikat	
						Triwulan-I		Triwulan-II							
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	
			K		RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kantor Camat Tanjung Harapan	-	0	-	7.723.824.924,00	9,96	761.067.695,00	0	0	9,96	761.067.695,00	9,96	9,85	SR	SR
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kantor Camat Tanjung Harapan	-	0	-	7.723.824.924,00	9,96	761.067.695.00	0	0	9,96	761.067.695.00	9,96	9,85	SR	SR
7.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76	%	4.542.642.774,00	14,95	678.897.695,00	0	0	14,95	678.897.695,00	14,95	14,95	T	R
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100	%	36.432.000,00	25	-	0	0	25	0	25	0	SR	SR

7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	25.152.000,00	2	0	0	0	2	0	66,66	0	T	SR
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	11.280.000,00	1	0	0	0	1	0	20	0	T	SR
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase PD yang menyusun dan menetapkan Dokumen Keuangan yang tepat waktu**	**100**	**persen**	**3.997.786.677,00**	**25**	**654.663.104,00**	**0**	**0**	**25**	**654.663.104,00**	**25**	**16,38**	**SR**	**R**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182	Orang/ bulan	3.726.558.357,00	52	608.263.104,00	0	0	52	608.263.104,00	63	54,00	ST	R
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	232.832.320,00	4	46.400.000,00	0	0	4	46.400.000,00	33,33	19,93	R	SR
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	38.396.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR

7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80**	**100**	**persen**	**40.871.400,00**	**25**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**	**25**	**0**	**SR**	**SR**
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	40.871.400,00	**3**	**0**	0	0	3	0	25	0	SR	SR
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Pelayanan Administrasi PD yang berjalan dengan Baik**	**100**	**persen**	**260.252.399,00**	**25**	**24.234.591,00**	**0**	**0**	**25**	**24.234.591,00**	**25**	**9,31**	**SR**	**SR**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13	Paket	8.149.400,00	3	0	0	0	3	0	23.07	0	SR	SR
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38	Paket	26.386.499,00	3	0	5	0	3	-	62,5	0	SR	SR
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	10.804.500,00	1	0	0	0	1	-	20	0	SR	SR
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85	Laporan	214.912.000,00	10	24.234.591,00	0	0	10	24.234.591,00	11,76	11,28	SR	SR
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**persen**	**29.174.136,00**	**25**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**	**25**	**0**	**SR**	**SR**

7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.200.000,00	3	0	0	0	3	0-	25	**0**	SR	SR
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	27.974.136,00	3	0	0	0	3	0	25	0	SR	SR
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemeliharaan Inventarisasi pada PD dalam Kondisi Baik**	**100**	**persen**	**178.126.162,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**SR**	**SR**
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	61.463.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	Unit	116.805.362,00	0	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	**76**	**%**	**2.228.709.750,00**	**10**	**0**	**10**	**0**	**10**	**0**	**13,16**	**0**	**SR**	**SR**

7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100**	**Persen**	**27.743.700,00**	**25**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**	**25**	**0**	**SR**	**SR**
7.01.02.2.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksana Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7	Laporan	16.463.700,00	1	0	0	0	1	0-	14,28	0	SR	SR
7.01.02.2.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	150	Dokumen	11.280.000,00	70	0	0	0	70	0	46,67	0	SR	SR
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100**	**Persen**	**90.062.500,00**	**25**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**	**25**	**0**	**SR**	**SR**
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	26.805.000,00	3	0	0	0	3	0	25	0	SR	SR

7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	63.257.500,00	1	0	0	0	1	0	25	0	SR	SR
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada camat	100	Persen	2.110.903.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	Laporan	2.110.903.550,00,00	0	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan dengan baik	85	Persen	297.660.000,00	20	0	0	0	20	0	23,53	0	SR	SR
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100	persen	297.660.000,00	25	0	0	0	25	0	25	0	SR	SR
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	297.660.000,00	1	0	0	0	1	0	1	0	SR	SR

7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	65	%	367.260.000,00	10	0	0	0	10	0	15,38	0	SR	SR
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Persen	12.350.000,00	**25**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**	**25**	**0**	SR	SR
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	12.350.000,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**	**25**	**0**	SR	SR
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	kegiatan yang ditindaklanjuti (berjalan baik) / seluruh kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum dikoordinasikan x 100	100	persen	354.910.000,00	25	82.170.000,00	0	0	25	82.170.000,00	25	23,15	SR	SR
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Laporan	354.910.000,00	3	82.170.000,00	0	0	3	82.170.000,00	25	23,15	S	SR
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100	%	154.196.400,00	25	0	0	0	25	0	25	0	SR	SR

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	persen	154.196.400,00	25	0	0	0	25	0	25	0	SR	SR
7.01.005.2.01.001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INdonesia	25	Orang	59.576.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR

7.01.005.2.01.004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	35	Orang	94.620.000,00	10	0	0	0	10	0	28,57	0	SR	SR
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100	%	133.356.000,00	25	0	0	0	25	0	50	22,83	SR	SR
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi	7	Desa	133.356.000,00	1	0	0	0	1	0	28,57	22,83	SR	SR
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7	Dokumen	40.651.000,00	1	0	0	0	1	0	100	43,99	SR	SR
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7	Dokumen	22.850.000,00	1	0	0	0	1	0	14,28	0	SR	SR

7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	7	Laporan	26.330.000,00	0	0	0	0	0	0	14,28	0	SR	SR
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7	Dokumen	19.350.000,00	7	0	0	0	7	0	100	45,35	ST	SR
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan Batas Desa	2	Laporan	24.175.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2025 Semester I dapat dijelaskan

bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan I adalah 9,96 %, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 761.067.695,00 (Tujuh ratus enam puluh satu juta enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 7.723.824.924,00 (Tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah) atau sebesar 9,85%.

2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Kecamatan Tanjung Harapan sebesar 9,96% dengan predikat kinerja pada formulir E.15, dengan menggunakan kriteria yang tercantum dalam Tabel T-E.1 sebagai berikut :

Tabel T-E.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	70% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

   Gradasi ini menunjukkan pencapaain/realisasi kinerja capaian telah memnuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

   Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratn minimal.

3. Hasil Sangat Rendan dan Rendah

   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum

memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 1 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 4 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 9 indikator capaian
   kinerja 0%-50% = 19 indikator

2.2. **Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjung Harapan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, maka Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Tugas Pokok Kecamatan Tanjung Harapan
   Kecamatan Tanjung Harapan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.
2. Fungsi Kecamatan Tanjung Harapan
   Untuk melaksanakan Tugasnya, Kecamatan Tanjung Harapan mempunyai fungsi antara lain:
   a. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan otonomi daerah;
   b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa
   c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
   d. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan Peraturan Perundang-Undangan
   e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
   f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
   g. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan

h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atauyang belum dapat dilaksanakanPemerintah Desa atau Kelurahan
i. Penyusunan program,pembinaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Kecamatan Tanjung Harapan adalah:

1. Pelayanan kepada Masyarakat dalam pengurusan KTP, Kartu Keluarga (KK) dan pindah domisili
2. Pemberian Surat Rekomendasi pembuatan IMB
3. Pelayanan SKTM

Upaya Kecamatan Tanjung Harapan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanjung Harapan

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2025	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	74 (BB)	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat ***Definisi Operasional :*** Nilai SAKIP merupakan Hasil Evaluasi atas kompnen perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Camat, Sekcam, Kasubag Program dan Keuangan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	Hasil Penghitungan Survei Indeks KepuasanMasyarakat di Kecamatan setiap Tahun ***Definisi Operasonal :*** Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan Kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan	Dokumen Laporan Hasil Survet Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	Kasi Pemerintahan dan Kependudkan & Kasi Kesejahteraan Masyarakat
3	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	49	$\frac{\sum \text{Kriminalitas setahun}}{\sum \text{penduduk}} \times 100.000$ ***Definisi Operasional :*** Angka Kriminalitas merupakan indikator negatife dari rasa aman. Semakin tinggi angka kriminalitas,	Data Kriminalitas dariKepolisian setempat	Kasi Ketentraman dan Ketertiban

				menunjukan bahwa kehidupan pada masyarakat disuatu daerah semakin tidak aman.		
4	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	6,30	Jumlah Masyarakat Miskin _____ X 100 % Jumlah Penduduk dalam satu Daerah **Definisi Operasional :** Angka Kemiskinan merupakan persentase penduduk miskin terhadap jumlah pemduduk dalam suatu wilayah. Semakin tinggi angka kemiskinan maka semakin rendah kesejahteraan masyarakatnya..	Hasil Survei dan Data Statistik	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kasi Kesmas.

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Kecamatan Tanjung Harapan terdapat dalam Tabel TC-29 di bawah ini

Tabel TC-29
Pencapaian Kinerja ,Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tanjung Harapan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi			Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif dan Tangkas Sasaran: Meningkatkan Akuntabiltas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	(61,20) B	(65) B	(70,15) BB	(74) BB	(80,10) A	B	B (61,20)	B 65,53	B 65,52
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81	82	84	84	82	81,99	84,08	35
Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	52	51	50	49	48	47,5	84,1	56,5	20
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	8	7,30	6,80	6,30	5,80	2,19	3,35	3,17	1,029

Berdasarkan Tabel TC-29 di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tanjung Harapan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan

Tangkas

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerka Pemerintah dengan 1 indikator kinerja yaitu Nilai Evaluasi SAKIP. Untuk penilaian Evaluasi SAKIP tahun 2024 dari Inspektorat belum dinilai.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 35% dari target sebesar 84%.

Sasaran 3 : Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif dengan Indikator Angka Kriminalitas, dengan realisasi capaian Kinerja sebesar 20% dari target 49%. Dari hasil Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I, perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Tanjung Harapan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat.

b. **Tujuan** **:** Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata

Sasaran : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan indikator kinerja yaitu Menurunnya Angka Kemiskinan dari Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Harapan sebesar 10.464 Jiwa jumlah Masyarakat Miskin Sebesar 1.017 Jiwa atau sebesar 1,029%. Jika dilihat dari Target persentase Angka kemiskinan masih dibawah target hal ini menunjukkan capaian yang baik. Karena untuk mengukur Angka Kemiskinan semakin kecil capaian Target maka semakin baik capaian Kinerjanya, yang menunjukkan bahwa Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tanjung Harapan meningkat.

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Periode Maret 2025 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara

perangkat daerah dengan stakeholder terkait.

3. Adanya Kerangka Acuan Kegiatan
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Juknis pelaksanaan kegiatan dari pemerintah pusat yang terlambat
2. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan perangkat daerah.
3. Perubahan pejabat/personil sehubungan dengan adanya pergantian pejabat
4. Pelaksanaan kegiatan OPD belum sepenuhnya mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah disusun.
5. Sarana dan Prasarana Penunjang yang belum memadai
6. Adanya Efesiensi Anggaran pada Anggaran Murni 2025.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2025.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tanjung Harapan sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Kewilayahan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021- 2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel TC-30
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tanjung Harapan
Tahun 2025

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET	
					Renja 2025	Perubahan Renja 2025
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif dan Tangkas	Meningkatkan Akuntabiltas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat ***Definisi Operasional*** : Nilai SAKIP merupakan Hasil Evaluasi atas kompnen perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	BB (74)	B (65,52)
2		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Penghitungan Survei Indeks KepuasanMasyarakat di Kecamatan setiap Tahun ***Definisi Operasonal :*** Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan Kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan	84	85
3		Meningkatnya Lingkungan Daerah yang	Angka Kriminalitas	$\frac{\sum \text{Kriminalitas setahun}}{\sum \text{penduduk}} \times 100.000$	49	49

		Kondusif		***Definisi Operasional :*** Angka Kriminalitas merupakan indikator negatife dari rasa aman. Semakin tinggi angka kriminalitas, menunjukan bahwa kehidupan pada masyarakat disuatu daerah semakin tidak aman.		
4	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Jumlah Masyarakat Miskin / Jumlah Penduduk dalam satu Daerah X 100 % **Definisi Operasional :** Angka Kemiskinan merupakan persentase penduduk miskin terhadap jumlah pemduduk dalam suatu wilayah. Semakin tinggi angka kemiskinan maka semakin rendah kesejahteraan masyarakatnya..	6,30	6,30

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2025 mengalami perubahan pada Target Indikator Sasaran Nilai Evaluasi SAKIP.

Namun pada Tahun Anggaran 2025 telah terjadi perubahan atau pergeseran pada anggaran Murni 2025, hal ini di sebabkan adanya efesiensi anggaran Tahun 2025 pada belanja Perjalanan Dinas, Belanja makan minum rapat, belanja Alat Tulis Kantor, dan Belanja Cetak pada masing-masing sub Kegiatan.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 yaitu "PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**"** yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Penguatan Ekonomi Daerah.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Tanjung Harapan mendukung pencapaian sasaran ke satu yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Kecamatan Tanjung Harapan telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

Berdasarkan Review Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 terdapat efesiensi anggaran pada masing-masing Sub Kegiatan untuk belanja perjalanan dinas, belanja makan minum rapat, belanja makanan dan minuman jamuan tamu, belanja alat/bahan Alat Tulis Kantor, belanja Alat/Bahan Kertas dan Cover dan Belanja Alat/Bahan Cetak dengan Total Anggaran yang diefeseinsi sebesar Rp. 509.185.473,00 (Lima ratus Sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Kantor Camat Tanjung Harapan juga mengajukan Penambahan Anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk belanja Jasa pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik dengan Anggaran sebesar Rp. 50.000.000. Belanja jasa Pemasangan Instalasi Listrik ini sangat diperlukan melihat kondisi sarana dan prasarana penunjang Kantor yang tersedia di Kantor Kecamatan Tanjung

Harapan sangat ini belum tersedia.

Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Renja Tahun 2025
Kantor Camat Tanjung Harapan

No	KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
		Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN										
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**										
	7.01	**KECAMATAN**										
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**%**	**76** **3.322.595.773**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**%**	**76** **4.542.642.774**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen Perencanaan dan Penganggaran tepat waktu	%	100 35.832.000	Perencanaan, Penganggaran,		Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen Perencanaan dan Penganggaran tepat waktu	%	100 36.432.000	
				Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	%	74			Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	%	71	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Reviu renstra, ranwal renja, ranc. renja, renja, profil kecamatan)	Dokumen	5 25.152.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Reviu renstra, ranwal renja, ranc. renja, renja, profil kecamatan)	Dokumen	5 25.152.000	

	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	10.680.000	Koordinasi	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP, Evaluasi Renja, SPIP, Laporan TEPRA)	Dokumen	5	11.280.000	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase LHP nihil Persentase temuan Ditindaklanjuti**	%	**100**	**2.955.779.974**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase LHP NIHIL Persentase temuan ditindaklanjuti**	%	**100**	**3.997.786.677**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	182	2.730.111.654	Penyediaan Gaji	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan ASN	Orang/ bulan	182	3.726.558.357	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	210.272.320	Koordinasi	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	**12**	232.832.320	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	15.396.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	38.396.000	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80**	%	**100**	**16.920.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80**	%	**100**	**40.871.400**	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**Dokumen**	**12**	16.920.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**Dokumen**	**27**	**40.871.400**	

	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pelayanan Administrasi Umum PD yang berjalan dengan baik**	**%**	**100**	**238.906.963**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pelayanan Administrasi Umum PD yang berjalan dengan baik**	**%**	**3**	**260.252.399**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	13	8.149.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	8.149.400	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	0	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	38	26.386.499	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	38	26.386.499	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Paket barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	5	9.459.064	Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	10.804.500	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	85	194.912.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	85	214.912.000	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor**	**%**	**100**	**29.174.136**	**Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor**	**%**	**100**	**29.174.136**	

	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	**12**	**1.200.000**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan penyediaan Listrik, air Bersih dan Internet	Laporan	12	27.974.136	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan penyediaan Listrik, air Bersih dan Internet	Laporan	12	27.974.136	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**		**Persentase Inventarisasi Barang dalam kondisi Baik**	**%**	**100**	**45.982.700**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**		**Persentase Inventarisasi Barang dalam kondisi Baik**	**%**	**100**	**178.126.162**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	Unit	2	45.422.700	Penyediaan Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	Unit	2	61.320.800	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Peralatan kantor lainnya yang dipelihara	Unit	5	3.560.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Peralatan kantor lainnya yang dipelihara	Unit	5	116.805.362	
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Tanjung Harapan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan**	**%**	**76**	**170.912.200**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Tanjung Harapan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan**	**%**	**76**	**2.228.709.750**	

	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec. Tanjung Harapan**	**Presentase koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada dikecamatan**	**%**	**100**	**25.863.700**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kec. Tanjung Harapan	**Presentase koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada dikecamatan**	**%**	**100**	**27.743.700**	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	**Kec. Tanjung Harapan**	Jumlah Laporan koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Intansi Vertikal terkait	laporan	7	16.463.700	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Intansi Vertikal terkait	Laporan	7	16.463.700	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kec. Tanjung Harapan**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	150	9.400.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kec. Tanjung Harapan**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	150	11.280.000	
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada**	**%**	**100**	**77.852.500**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada**	**%**	**100**	**90.062.500**	

				di Kecamatan						**di Kecamatan**				
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	26.805.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	26.805.000	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	**5**	**51.047.500**	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakatdi Wilayah Kecamatan	Laporan	**5**	**63.257.500**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada camat	%	**100**	**67.196.000**	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada camat	%	**100**	**2.110.903.550**	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	**2**	**67.196.000**	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	2	2.110.903.550	MTQ Kabupaten

3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru**	**%**	**85**	**75.020.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru**	**%**	**85**	**297.660.000**	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana**	**%**	**100**	**75.020.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Kegiatan Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan**	**%**	**100**	**297.660.000**	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	**75.020.000**	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	**297.660.000**	
4	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Tanjung Harapan**	**Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban**	**%**	**65**	**363.500.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban**	**%**	**65**	**367.260.000**	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Kec. Tanjung Harapan	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**%**	**100**	**12.350.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**%**	**100**	**12.360.000**	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan forum Kerukunan beragama yang dilaksanakan	Laporan	**1**	12.350.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan forum Kerukunan beragama yang dilaksanakan	Laporan	**1**	12.360.000	

	7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		Presentase penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**%**	**100**	**351.150.000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		**Jumlah Frekuensi Monitoring Trantibnas yang dilakukan oleh aparat Kecamatan**	**%**	**100**	**354.910.000**	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepoliasian Negara Republik Indonesia	Kec. Tanjung Harapan	Laporan koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	**Laporan**	**12**	**351.150.000**	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepoliasian Negara Republik Indonesia	Kec. Tanjung Harapan	Laporan koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	354.910.000	
5	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/ terseles aikan di wilayah kecamatan**	**%**	**100**	**108.796.400**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/ terseles aikan di wilayah kecamatan**	**%**	**100**	**154.196.400**	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**%**	**100**	**108.796.400**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan Umum yang Terkoordinasi dengan baik**	**%**	**100**	**154.196.400**	

	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan p e ngamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	25	59.576.400	Pembinaan Wawasan Kebangsaan da n Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	25	59.576.400	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	35	49.220.000	Pembinaan Kerukunan Antar Intrasuku,	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Orang	35	94.620.000	

6	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Presentase Desa yang Menyampaikan LKP Desa Tepat Waktu**	**%**	**100**	**75.365.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Presentase Desa yang Menyampaikan LKP Desa Tepat Waktu**	**%**	**100**	**133.356.000**	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Tanjung Harapan**	umlah Desa yang terfasilitasi	**Desa**	**7**	75.365.000	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Tanjung Harap an**	Jumlah Koordinasi/rapat Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah	Perse n	100	133.356.000	
	7.01.06.2.01 .0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**Doku men**	**7**	19.750.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Doku men	**7**	40.651.000	
	7.01.06.2.0 1.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Doku men	7	10.350.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Dalam rangka pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Doku men	7	22.850.000	
	7.01.06.2.0 1.0004	Fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Lapor an	7	14.330.000	Fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Lapor an	7	26.330.000	

	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi/Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	7	19.350.000	Fasilitasi/Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	7	19.350.000	
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	2	11.585.000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa,	Kec. Tanju	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	2	24.175.000	
		JUMLAH					**4.116.189.373**						**7.723.824.924**	

3.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.

b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing PD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. PD Kecamatan Tanjung Harapan sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke PD terkait sebagaimana Tabel TC.32

Tabel TC-32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Besaran/ volume

Nihil

3.4. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Tanjung Harapan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel TC-33

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN KAB. PASER
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kantor Camat Tanjung Harapan							4.116.189.373,00	7.723.824.924,00	7.510.685.385,00							3.325.344.643,80	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							4.116.189.373,00	7.723.824.924,00	7.510.685.385,00							3.325.344.643,80	
	7	01				KECAMATAN							4.116.189.373,00	7.723.824.924,00	7.510.685.385,00							3.325.344.643,80	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat				76 Nilai	76 Nilai	3.322.595.773,00	4.542.642.774,00	4.523.099.354,00							2.602.402.097,80	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kualitas pelaksanaan SPIP Perangkat Daerah Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Persentase capaian sasaran strategis Persentase ketepatan waktu dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan Penganggaran PD Persentase rata-rata capaian area perubahan	-			100 % 3 Level 70 % 74 Nilai 92 %	100 % 3 Level 70 % 74 Nilai 92 %	35.832.000,00	36.432.000,00	36.432.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana	ASN Kecamatan Tanjung Harapan	76%	16.000.000,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	25.152.000,00	25.152.000,00	48.906.000,00	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana			7.500.000,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	10.680.000,00	11.280.000,00	14.772.300,00	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana			8.500.000,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN

	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase LHP nihil Persentase temuan ditindaklanjuti	-			100 %	100 %	2.955.779.974,00	3.997.786.677,00	3.997.786.677,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana	ASN Kantor Kecamatan Tanjung Harapan		2.389.303.043,80	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				182 Orang/bulan	294 Orang/bulan	2.730.111.654,00	3.726.558.357,00	3.726.558.357,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana			2.178.024.811,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	210.272.320,00	232.832.320,00	247.117.200,00	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana			202.099.326,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.396.000,00	38.396.000,00	38.198.000,00	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana			9.178.906,80	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN

	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80	-			100 %	100 %	16.920.000,00	40.871.400,00	40.871.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana	ASN Kantor Kecamatan Tanjung Harapan		16.632.000,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	16.920.000,00	40.871.400,00	37.364.188,00	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana			16.632.000,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum PD yang berjalan dengan Baik	-			100 %	100 %	238.906.963,00	260.252.399,00	260.252.399,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana	ASN Kecamatan Tanjung Harapan		115.395.754,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	8.149.400,00	8.149.400,00	8.149.400,00	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana			2.713.718,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN

	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				38 Paket	38 Paket	26.386.499,00	26.386.499,00	20.375.361,00	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana			20.419.000,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	9.459.064,00	10.804.500,00	5.402.250,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana			10.858.939,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85 Laporan	85 Laporan	194.912.000,00	214.912.000,00	148.956.000,00	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana			81.404.097,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	-			100 %	100 %	29.174.136,00	29.174.136,00	29.174.136,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana	ASN Kecamatan Tanjung Harapan		29.744.300,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana			1.100.000,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	27.974.136,00	27.974.136,00	47.974.136,00	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana			28.644.300,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Iventaris Barang dalam kondisi Baik	-			100 %	100 %	45.982.700,00	178.126.162,00	178.126.162,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana	ASN Kecamatan Tanjung Harapan		35.327.000,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN

	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	3 Unit	42.422.700,00	61.320.800,00	61.320.800,00	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana			31.827.000,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	3.560.000,00	116.805.362,00	116.805.362,00	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana			3.500.000,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan				76 Nilai	82 Nilai	170.912.200,00	2.228.709.750,00	2.195.578.764,00								127.056.256,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-			100 %	100 %	25.863.700,00	27.743.700,00	27.743.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana	Masyarakat Kecamatan Tanjung Harapan		41.697.500,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	7 Laporan	16.463.700,00	16.463.700,00	10.817.819,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana			17.447.500,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN

	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				150 Dokumen	150 Dokumen	9.400.000,00	11.280.000,00	16.410.000,00	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana			24.250.000,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-			100 %	100 %	77.852.500,00	90.062.500,00	90.062.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana	Masyarakat Kecamatan Tanjung Harapan		52.372.250,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	26.805.000,00	26.805.000,00	25.818.645,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana			23.720.000,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	51.047.500,00	63.257.500,00	31.628.750,00	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana			28.652.250,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggarasn Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada Camat	-			100 %	100 %	67.196.000,00	2.110.903.550,00	2.110.903.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana	Masyarakat Kecamatan Tanjung Harapan		32.986.506,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN

	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	2 Laporan	67.196.000,00	2.110.903.550,00	2.110.903.550,00	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana			32.986.506,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru Persentase program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang berjalan dengan baik				85 35 % %	35 85 % %	75.020.000,00	297.660.000,00	160.454.476,00								106.347.398,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	-			100 %	100 %	75.020.000,00	297.660.000,00	297.660.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana	Masyarakat Kecamatan Tanjung Harapan		106.347.398,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	4 Laporan	75.020.000,00	297.660.000,00	160.454.476,00	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana			106.347.398,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan Kasus gangguan keamanan dan ketertiban				65 %	65 %	363.500.000,00	367.260.000,00	344.630.000,00								317.979.617,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			100 %	100 %	12.350.000,00	12.350.000,00	12.350.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana	Masyarakat Kecamatan Tanjung Harapan		17.754.617,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN

	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	12.350.000,00	12.350.000,00	6.175.000,00	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana			17.754.617,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-			100 %	100 %	351.150.000,00	354.910.000,00	354.910.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana	Kecamatan Tanjung Harapan		300.225.000,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																				
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	351.150.000,00	354.910.000,00	338.455.000,00	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana			300.225.000,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/ terselesaikan di wilayah kecamatan				-	100 100 % Persen	108.796.400,00	154.196.400,00	164.515.791,00							52.577.919,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			100 %	100 %	108.796.400,00	154.196.400,00	154.196.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana	Masyarakat Kecamatan Tanjung Harapan		52.577.919,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN

	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				25 Orang	25 Orang	59.576.400,00	59.576.400,00	44.930.791,00	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana			30.000.000,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				35 Orang	35 Orang	49.220.000,00	94.620.000,00	119.585.000,00	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana			22.577.919,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu				100 %	100 %	75.365.000,00	133.356.000,00	122.407.000,00							118.981.356,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difailitasi	-			7 Desa	7 Desa	75.365.000,00	133.356.000,00	133.356.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana	Pemerintah Desa dan Aparatur Desa di Kecamatan Tanjung Harapan		118.981.356,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN

	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	19.750.000,00	40.651.000,00	20.325.500,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana			13.545.506,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	10.350.000,00	22.850.000,00	41.247.500,00	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana			22.412.500,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
	7	01	06	2.01	0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan																		
							Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				7 Laporan	7 Laporan	14.330.000,00	26.330.000,00	13.165.000,00	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana			22.170.750,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	19.350.000,00	19.350.000,00	9.675.000,00	Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana			38.980.350,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN

	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	11.585.000,00	24.175.000,00	37.994.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana			21.872.250,00	KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
													J U M L A H	**4.116.189.373,00**	**7.723.824.924,00**	**7.510.685.385,00**							**3.325.344.643,80**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1.Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kecamatan Tanjung Harapan mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.2.Rencana Tindak Lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Tanjung Aru, 22 Agustus 2025

`

CAMAT



H. SUDARSONO, SP,.MP.
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 197004241998031010

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Jalan M. Dachri Desa Tanjung Haru Kode Pos : 76261

Email : tanjungharapan7621i@gmail.com Website : http//kectanjungharapan.paserkab.go.id/.paser.go

SURAT KEPUTUSAN CAMAT TANJUNG HARAPAN

NOMOR : 181 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN KANTOR TANJUNG HARAPAN TAHUN 2025

Menimbang :

a. Bahwa Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah;

b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa dalam tahap persiapan penyusunan rencana kerja perangkat daerah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2025 dengan Keputusan Camat Tanjung Harapan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
17. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2006 -2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.
20. Peraturan Bupati Paser Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kecamatan.

Memperhatikan : -

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tersebut pada jalur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Renja Perubahan Tahun 2025 pada Kecamatan Tanjung Harapan.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Aru
Tanggal : 14 April 2025

Plh. CAMAT

PEMERINTAH KABUPATEN PASER KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

AGUS SURYANTO, S.Sos
Penata TK.I/III.d
NIP. 198908022011011005

Lampiran : Surat Keputusan Camat Tanjung Harapan
Nomor : 181 Tahun 2025
Tanggal : 14 April 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
KABUPATEN PASER TAHUN 2025

NO.	N A M A	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	3	4
1	H. SUDARSONO, SP, MP	Camat	Ketua
2	AGUS SURYANTO, S.Sos	Sekretaris	Sekretaris
3	KTISTININGATI, SE	Kasubbag Perencanaan Program & Keuangan	Anggota
4	RAHMAT HIDAYAT, S.I.P	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Anggota
5	EDDY FAZRYYANTO, S.Sos	Kasi Pemerintahan dan Kependudukan	Anggota
6	SURENDRO, S. ST, M.Si	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota
7	MOCH. AREIF YUDI ISMANTO, A.Md	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
8	FARID BUDI SUKOCO, SP	Kasi Kesejahteraan Masyarakat	Anggota
9	ZAINAL ABIDIN, M.Pd.I	Analis Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di : Tanjung Aru
Tanggal : 14 April 2025

Plh. CAMAT

PEMERINTAH KABUPATEN PASER KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

AGUS SURYANTO, S.Sos
Penata TK.I/III.d
NIP. 19890802 201101 1 005.

KECAMATAN KUARO
KABUPATEN PASER – KALIMANTAN TIMUR

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025



Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 01 RT. 006
Kelurahan Kuaro Kecamatan Kuaro 76281
Email : kuarokecamatan@gmail.com
website : https://keckuaro.paserkab.go.id

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kuaro Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen Renja Perubahan ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kuaro Tahun 2025 yang sebelumnya telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Penetapan. Penyusunan dokumen ini mengacu pada perubahan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Paser Tahun 2025, serta tetap berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Kuaro Tahun 2021–2026.

Renja Perubahan Kecamatan Kuaro Tahun 2025 memuat evaluasi kinerja triwulan II, identifikasi permasalahan, dan usulan penyesuaian program/kegiatan beserta target dan pagu anggarannya. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan bagi Kecamatan Kuaro dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, khususnya kepada Tim Perencana Kecamatan Kuaro, perangkat daerah teknis, serta masyarakat yang telah berpartisipasi dalam forum Musrenbang Perubahan.

Semoga dokumen ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan menjadi dasar yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Kuaro, demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Kuaro, 22 Agustus 2025
Camat Kuaro,

FINANDAR ASTAMAN, S.STP.
NIP. 198611272006011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 2
1.4 Sistematika Penulisan 3
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025 4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025 4
2.2 Analisis Capaian Kinerja 11
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 15
2.4 Review terhadap Rancangan RKPD 18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 26
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 27
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 27
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 29
4.1 Program dan Kegiatan 29
4.2 Matriks Pendanaan 31
BAB V PENUTUP 41
5.1. Kaidah Kaidah Pelaksanaan 41
5.2. Rencana Tindak Lanjut 41

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29. Rincian Realisasi Kinerja dan Keuangan Triwulan II Tahun 2025 6
Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser..... 15
Tabel T-C.31. Review Terhadap Renja Tahun 2025 Kantor Camat Kuaro ... 20
Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 26
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 27
Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Paser 32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika kebijakan serta kebutuhan masyarakat, diperlukan adanya penyesuaian terhadap dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yaitu Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kuaro Tahun 2025.

Penyesuaian ini dituangkan dalam bentuk Renja Perubahan, yang menjadi bagian integral dari proses perencanaan tahunan daerah dan disusun mengacu pada perubahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Paser Tahun 2025.

Perubahan terhadap dokumen Renja diperlukan untuk menyesuaikan target dan capaian kinerja perangkat daerah, menyelaraskan program dan kegiatan dengan perubahan pemerintah pusat maupun daerah, serta menyesuaikan alokasi anggaran berdasarkan kemampuan fiskal daerah. Selain itu, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun berjalan juga menjadi dasar penting dalam proses penyusunan dokumen perubahan ini.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kuaro Tahun 2025 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur secara teknis tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah, termasuk perubahan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah, serta sebagai dasar dalam penyempurnaan dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Paser Tahun 2025.

Dengan penyusunan Renja Perubahan ini, memungkinkan Kecamatan Kuaro menyesuaikan arah dan prioritas pembangunan secara tepat berdasarkan evaluasi pelaksanaan dan kemampuan anggaran yang tersedia.

1.2 Landasan Hukum

Landasan konstitusional Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kuaro adalah Pancasila, dan UUD 1945, selanjutnya landasan operasionalnya mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negera;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser;
9. Peraturan Bupari Paser Nomor 74 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kuaro Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Kecamatan Kuaro dalam menyelaraskan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan kebijakan serta prioritas yang telah mengalami penyesuaian sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Paser Tahun 2025, serta tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuaro Tahun 2021-2026.

Renja Perubahan Kecamatan Kuaro Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat perubahan terhadap program, kegiatan, target kinerja, dan alokasi anggaran, yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan, serta sebagai alat evaluasi terhadap capaian kinerja tahun berjalan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kuaro Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a) Sebagai pedoman Kecamatan Kuaro dalam menyesuaikan pelaksanaan program dan kegiatan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RKPD Perubahan Kabupaten Paser Tahun 2025.
b) Untuk menyesuaikan target, sasaran kinerja, lokasi, output, serta pagu indikatif program dan kegiatan Kecamatan Kuaro Tahun 2025 berdasarkan evaluasi pelaksanaan hingga semester pertama.
c) Memberikan dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA Perubahan) Kecamatan Kuaro Tahun 2025 yang disesuaikan dengan kondisi riil dan kemampuan fiskal daerah.
d) Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan hasil penyesuaian agar tetap selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan kebutuhan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kuaro Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja
- 1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 4.1. Program dan Kegiatan
- 4.2. Matriks Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kuaro merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menyesuaikan pelaksanaan program dan kegiatan dengan arah kebijakan, target kinerja, dan kondisi aktual berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja awal. Dokumen ini juga menjadi penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuaro Tahun 2021–2026, sehingga capaian kinerja tahun berjalan harus dianalisis dalam konteks ketercapaian sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Kecamatan Kuaro Tahun 2025 hingga Triwulan II dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas serta fungsi kecamatan, yang tercermin dalam indikator kinerja, realisasi output, dan penggunaan anggaran. Proses evaluasi ini mengacu pada prinsip akuntabilitas kinerja, yaitu kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui sistem pelaporan kinerja secara periodik.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan daerah, termasuk Renja Perubahan, harus melalui proses evaluasi. Evaluasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari pengukuran kinerja perangkat daerah yang sistematis dan berkesinambungan, guna menilai keberhasilan dan hambatan pelaksanaan kegiatan terhadap program, kebijakan, dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan.

Melalui evaluasi pelaksanaan Renja ini, diperoleh informasi mengenai:

- Realisasi fisik dan keuangan kegiatan hingga triwulan kedua,
- Tingkat ketercapaian indikator kinerja program dan kegiatan,
- Kendala atau hambatan teknis, administratif, maupun anggaran,
- Tingkat efisiensi pelaksanaan, yang dianalisis melalui perbandingan antara input dan output yang dihasilkan.

Hasil evaluasi ini menjadi dasar penyusunan Renja Perubahan, dengan maksud untuk melakukan perbaikan, penyempurnaan, atau penyesuaian terhadap program, kegiatan, lokasi, target, sasaran, dan pagu anggaran, agar tetap sejalan dengan arah kebijakan pembangunan

dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kecamatan Kuaro.

Tabel T-C.29.
Rincian Realisasi Kinerja dan Keuangan Triwulan II Tahun 2025

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada Dokumen RPPD:

1. Nilai Evaluasi SAKIP dan AKIP BMD dan Keuangan yang Material dari BPK RI — BB (76,61)
2. Jumlah temuan pemeriksaan BMD dan keuangan yang material dari BPK RI dan APIP Eksternal — 5 Temuan
3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat — 88 Nilai
4. Angka Kemiskinan
5. Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan

NO	Satuan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Pelayanan Sekretariat	74,80	2.980.317.466,00	31%	1.287.152.184,00		1.912.963.591,00					31%	3.200.125.385,00	74,27	8.986.963.991,00	8.212,46	70,04	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya dokumen perencanaan perangkat daerah	38,80	62.215.000,00		4.200.000,00		7.165.000,00					9%	11.415.000,00	38,80	62.215.000,00			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renstra, renstrat, renja, renja, renja, renja)	8,80	2.980.000,00	-		1,00						1,00	-	8,80	8.780.000,00	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA Murni	9,80	2.980.000,00	9,80	2.980.000,00	1,00						10,80	2.980.000,00	11,80	11.280.000,00	-	-	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9,80		9,80		1,00						10,80		11,80				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA, DK Perubahan	8,80	1.180.280,00	-		-						0,00	-	8,80	8.780.000,00	-	-	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8,80		-		-						0,00		8,80		-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKIP)yang tersusun	8,80	1.075.000,00	8,80	1.075.000,00	2,00						1,00	1.075.000,00	12,80	10.375.000,00	-	-	
			Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,80		8,80		2,00						1,00		12,80		-		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Kinerja (LKIP, Evaluasi RENJA, SPIP, Laporan TEPRA)	2,80	1.180.280,00	-	-	2,00	1.180.280,00					2,00	1.180.280,00	2,80	1.180.280,00	-	-	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,80		-		-						0,00		2,80		-	-	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi	100,00	1.340.680.186,00	18%	1.143.000.000,00		1.887.811.001,00					18%	3.031.109.370,00	100,00	7.718.000.000,00			
		Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	14,80	5.615.680.606,00	5,00	1.000.000.000,00	5,00	1.662.672.400,00					6,00	2.673.908.800,00	20,80	1.218.907.912,00	-	-	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14,80		-		-						0,00		14,80		-		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen keuangan (GPM, SPP)	120	420.000.040,00	60,00	122.700.000,00	70,00	35.139.511,00					131,00	157.848.047,00	10%	480.071.087,00	-	-	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	120		-		-						0,00		12,00		-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan	18,80	1.260.000,00	-	-	-						0,00	-	18,80	12.180.000,00	-	-	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18,80		-		-						0,00		18,80		-	-	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	70,00	60.230.720,00									0%		70,00		-	-	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	-	60.425.720,00	-		-						0,00	-	-	-	-	-	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Pelengkapnya	-		-		-						0,00		-		-	-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketata usahaan terlaksana dengan baik	100,00	53.001.171,00	15%	110.000.000,00		264.312.911,00					15%	323.133.074,00	100,15	1.240.219.174,00			
		Penyediaan Kelengkapan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kendaraan yang disediakan	12,80	43.071.058,00	-		-						0,00	-	-	-	-	-	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12,80										0,00						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18,80	146.888.888,00	-		6,00	77.383.888,00					6,00	77.383.888,00	8,80	77.383.888,00	-	-	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18,80		-		6,00						6,00		8,80		-		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	28,80	486.581.420,00	-	84.480.000,00	6,00	81.084.080,00					6,00	145.484.080,00	34,80	665.053.295,00	-	-	
			Ketersediaan Makanan dan Minuman Rapat Pegawai	1.906,80		-		360,00						360,00		1.906,80		-		
			Jumlah Penerima Rumah Tangga yang Disediakan	15,80		0		5,00						5,00		20,80		-		
			Jumlah ATK (Bulan)	12,80		-		6,00						6,00		18,80		-		
			Jumlah Penerima Kebersihan dan Bahan pembersih (Bulan)	12,80		0		6,00						6,00		18,80		-		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,80		0		-						0,00		1,80		-		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	15,80	6.080.000,00	-		-						0,00	-	15,80	6.276.000,00	-	-	





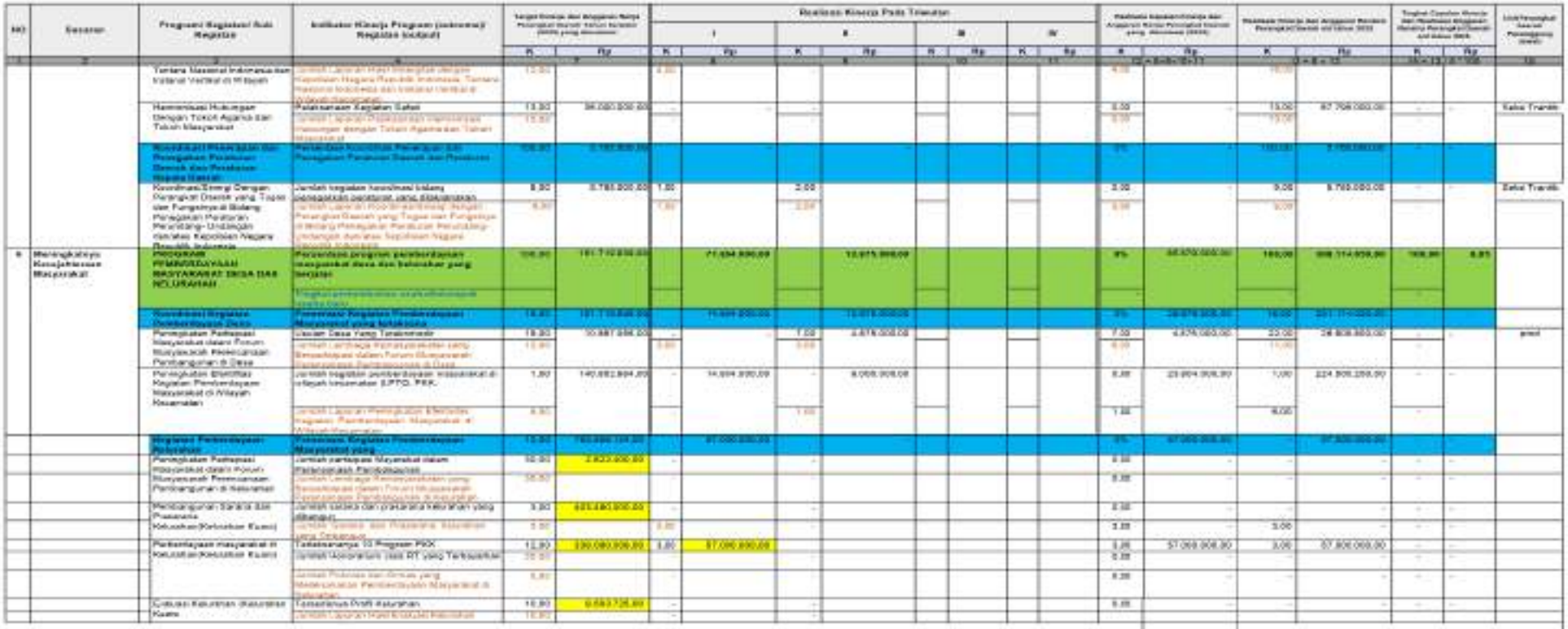

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang Dikoreksi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah sd Triwulan ini		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Akhir RPJPD		Unit Penanggung Jawab/ Penanggung Jawab
						I		II		III		IV						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 7+9+11+13	16 = 8+10+12+14	17 = 5+15	18 = 6+16	19
		Tertib Administrasi Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kabupaten	12,00		3,00								3,00		12,00		
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pelaksanaan Kegiatan Safari	12,00	96.000.000,00	-	-	-						0,00		12,00	87.708.000,00	-	-	Kabid Trantib
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12,00										0,00		12,00				
		Koordinasi Pelaksanaan dan Pengelolaan Perpolisian Masyarakat dan Penataan Ruang	Persentase Koordinasi Pelaksanaan dan Pengelolaan Perpolisian Masyarakat dan Penataan Ruang	100,00	3.780.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	100,00	3.780.000,00	-	-	
		Koordinasi Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan serta Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan koordinasi bidang penegakan peraturan yang ditandatangani	8,00	3.780.000,00	1,00		2,00						3,00		9,00	3.780.000,00	-	-	Kabid Trantib
			Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8,00		1,00		2,00						3,00		9,00				
6	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang berjalan	100,00	181.710.836,00		71.694.836,09		12.975.999,00					9%	84.670.835,09	100,00	266.314.939,00	100,00	6,91	
			Tingkat pemberdayaan masyarakat desa											-				-		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Penerimaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terfasilitasi	18,00	181.710.836,00		71.694.836,09		12.975.999,00					9%	84.670.835,09	18,00	266.314.939,00			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lkisan Desa Yang Terakreditasi	18,00	90.887.836,00	-	-	7,00	2.975.000,00					7,00	4.974.000,00	25,00	24.808.963,00	-	-	pmd
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12,00		5,00		5,00						10,00		12,00		-		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (UPTD, PKK,	1,00	140.882.804,00	-	14.994.930,09	-	8.000.908,00					0,00	23.994.908,90	1,00	224.809.259,00	-	-	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8,00				1,00						1,00		8,00		-		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersedianya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang	18,00	100.000.104,00		57.000.000,00							0%	57.000.000,00		57.000.000,00			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan	02,00	2.823.000,00	-	-	-	-					0,00	-	-	-	-	-	
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	04,00										0,00	-	-	-	-	-	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	3,00	825.680.000,00	-	-	-	-					0,00	-	-	-	-	-	
		Kelurahan(Kelurahan Kuala)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun	1,00		0,00	-	-	-					0,00	-	3,00	-	-	-	
		Pemberdayaan masyarakat di kelurahan(Kelurahan Kuala)	Terlaksananya 10 Program PKK	12,00	330.080.936,00	3,00	57.000.000,00							3,00	57.000.908,90	3,00	57.800.000,00	-	-	
			Jumlah Koordinator (ada RT yang Terkoordinir	10,00										0,00	-	-	-	-	-	
			Jumlah Posbindu dan Kimtas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5,00		-	-	-	-					0,00	-	-	-	-	-	
		Ketahanan Kelurahan (Kelurahan Kuala)	Terselenggara Trantib Kelurahan	10,00	9.583.726,00	-	-	-	-					0,00	-	-	-	-	-	
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Kelurahan	10,00		-	-	-	-											

	Rata-rata Capaian Kinerja (%)
	Predikat Kinerja
Faktor pendukung keberhasilan kinerja	Selalu Berkoordinasi Antar Wadag Dengan Adanya Camat dan Sekretaris Camat
Faktor penghambat pencapaian kinerja	- Adanya Efesiensi Anggaran Tahun 2025
Tindak lanjut yang dilakukan dalam triwulan berikutnya*)	Selalu Berkoordinasi Hasil Capaian Kinerja dan Melaporkan Realisasi
Tindak lanjut yang dilakukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya*)	Memberikan Sosialisasi Kpl, Bhn Hsl, Cara Mengakses SIPD dan SPI

*) Diisi oleh Kepala SKPD/UKE

Diketahui
Kuala, Juli 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

PLANDAR ASTAMAN, S.STP
NIP. 19801127 200003 1 001

Dievaluasi
Tana Paser, Juli 2025
KEPALA BAPPEDA

NIP .....

Adapun hasil analisa menurut tabel diatas secara umum pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kuaro Tahun 2025 hingga Triwulan II menunjukkan progres positif, baik dari aspek perencanaan, pelaporan, maupun capaian beberapa indikator pelayanan publik. Secara bertahap, kecamatan telah mampu menjalankan sebagian besar program prioritas yang direncanakan, dengan penekanan pada penguatan akuntabilitas, peningkatan pelayanan masyarakat, serta pemberdayaan desa dan kelurahan.

1) Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

Faktor utama yang mendorong pencapaian kinerja antara lain adalah komitmen dan kedisiplinan aparatur dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan. Seluruh jajaran pelaksana program di tingkat kecamatan telah menunjukkan etos kerja yang baik serta kepatuhan terhadap jadwal dan ketentuan pelaksanaan kegiatan. Kualitas koordinasi internal yang efektif antarbagian, terutama dalam kegiatan yang bersifat lintas seksi seperti rapat koordinasi, penyusunan laporan, serta fasilitasi dokumen, juga menjadi kekuatan utama dalam mendorong kelancaran pelaksanaan program.

Selain itu, pengelolaan keuangan yang tertib dan sesuai dengan ketentuan juga menjadi faktor keberhasilan tersendiri. Tidak adanya temuan dari BPK maupun APIP hingga pertengahan tahun menjadi bukti bahwa kecamatan telah menjalankan tata kelola keuangan dengan baik dan akuntabel. Capaian indeks kepuasan masyarakat yang telah melebihi target pun mencerminkan adanya kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan.

Namun demikian, pencapaian kinerja secara menyeluruh masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu faktor penghambat utama adalah kebijakan efisiensi anggaran pada Tahun 2025 yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan beberapa kegiatan non-prioritas di semester awal. Selain itu, sejumlah kegiatan lapangan seperti pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan sarana, dan kegiatan koordinasi di desa/kelurahan mengalami penjadwalan ulang karena menyesuaikan musim pelaksanaan, kesiapan masyarakat, atau keterlibatan pihak ketiga.

2) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Renja Kecamatan Kuaro hingga Triwulan II Tahun 2025 secara umum telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran Renstra 2021–2026. Capaian indikator utama seperti Indeks Kepuasan Masyarakat, penyusunan dokumen perencanaan, serta pelaksanaan kegiatan koordinatif menunjukkan

arah yang sejalan dengan tujuan strategis kecamatan. Meskipun terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi sepenuhnya, hal ini lebih disebabkan oleh penjadwalan teknis yang memang direncanakan pada semester kedua, sehingga masih dalam batas wajar. Dengan percepatan dan penguatan pelaksanaan di triwulan berikutnya, target-target Renstra diyakini tetap dapat dicapai secara optimal hingga akhir periode perencanaan.

3) Kebijakan untuk menindaklanjuti kegagalan pencapaian target

Sebagai upaya menindaklanjuti beberapa kegiatan yang belum mencapai target hingga Triwulan II, Kecamatan Kuaro menetapkan sejumlah kebijakan strategis yang difokuskan pada percepatan dan optimalisasi pelaksanaan program. Langkah-langkah tersebut meliputi penguatan koordinasi lintas seksi, percepatan pelaksanaan kegiatan fisik dan pemberdayaan masyarakat pada Triwulan III dan IV, serta penjadwalan ulang kegiatan yang sempat tertunda akibat efisiensi anggaran atau kendala teknis lainnya. Selain itu, dilakukan peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis pelaporan, serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan berkualitas. Apabila diperlukan, kecamatan juga akan mengusulkan realokasi anggaran untuk mendukung kegiatan prioritas yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap capaian Renstra.

Secara umum, pelaksanaan Renja Kecamatan Kuaro hingga pertengahan tahun 2025 menunjukkan arah yang positif, terukur, dan terjaga dari sisi akuntabilitas. Dengan langkah tindak lanjut yang telah disusun, Kecamatan Kuaro optimis dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

2.2 Analisis Capaian Kinerja

Kecamatan Kuaro sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi pemerintah kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam

suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Adapun indikator kinerja pelayanan Kecamatan Kuaro dari 6 (enam) Program adalah sebagai berikut :

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Reviu renstra, ranwal renja, ranc. renja, renja, profil kecamatan)
   - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP, Evaluasi Renja, SPIP, Laporan TEPRA)
   - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
   - Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (SPP,SPM,E-Billing)
   - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   - Jumlah pakaian dinas yang disediakan
   - Jumlah pegawai yang diperbarui datanya
   - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
   - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
   - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
   - Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
   - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
   - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
   - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
   - Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
   - Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   - Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
   - Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
   - Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah
   - Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
   - Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
   - Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
   - Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
   - Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
   - Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
6) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
   - Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
   - Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa

- Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing disajikan dalam tabel sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2025		CAPAIAN KINERJA %
		TARGET	REALISASI	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	1. Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP dari Inspektorat	62%	60.10%	-
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	80%	84,41%	105,51
3.Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	14	26,95%	33,33%
4.Meningkatnya Percepatan Pembangunan Kecamatan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	90%	100%	90%
RATA-RATA CAPAIAN IKU				103,6

Dalam mencapai kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kuaro Tahun 2025 berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Kuaro merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Kuaro berikut ini; (Tabel T-C.30)

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM/ Standar Nasional	TARGET IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH	REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-	CATATAN ANALISIS
				2025	2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP dari Inspektorat			74	62,63	
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan			85	89,22	
3	Angka Kriminalitas			12	5.7	
4	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan			100	100	

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, Kecamatan Kuaro menunjukkan kinerja yang positif. Indeks Kepuasan Masyarakat melebihi target, angka kriminalitas tercatat rendah, dan seluruh desa/kelurahan telah memiliki lembaga kemasyarakatan. Nilai evaluasi SAKIP dan APIP juga menunjukkan kemajuan meskipun masih perlu peningkatan. Capaian ini mencerminkan komitmen Kecamatan Kuaro dalam meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Kecamatan Kuaro sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan Publik atau Pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Kuaro kepada masyarakat, merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan /atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Kecamatan Kuaro. Kecamatan Kuaro berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan atau bahkan pelayanan yang diberikan diatas standar pelayanan yang ditetapkan.

Dengan demikian Pelayanan prima yang diberikan diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat. Atas Pelayanan yang diselenggarakan harapan selanjutnya Kecamatan Kuaro

menjadi salah satu instansi pemerintah yang dapat menciptakan “Good Governance” yaitu pemerintahan yang baik dan dinamis yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kuaro.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Kuaro didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dari berbagai disiplin ilmu. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja
- Belum adanya aplikasi yang mendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan
- Kurangnya pengendalian internal dan tertib administrasi di lingkungan internal Kecamatan Kuaro

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi Kecamatan Kuaro serta terhadap capaian visi dan misi kepala daerah. Berkaca pada permasalahan-permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Kuaro di masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi Kecamatan Kuaro dalam kurun waktu 5 tahun mendatang adalah:

1) Meningkatnya frekuensi pelayanan publik urusan kependudukan
2) Meningkatnya frekuensi pelayanan perijinan ditingkat Kecamatan meliputi urusan SITU, SIUP dan IMB
3) Meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana aparatur dari segi kualitas dan kuantitas
4) Tingkat disiplin dan kapasitas aparatur kecamatan yang perlu ditingkatkan
5) Konflik pertanahan yang masih sering terjadi dan batas antar desa yang masih harus diperjelas
6) Belum maksimalnya proses pengawasan dan penegakan terhadap Perda
7) Belum meratanya kesejahteraan masyarakat
8) Maraknya peredaran narkoba dan minuman keras serta meningkatnya jumlah pasangan menikah di bawah umur
9) Kualitas sumber daya aparatur desa yang perlu ditingkatkan
10) Belum maksimalnya pengelolaan asset kecamatan dan prasarana pelayanan publik
11) Belum maksimalnya persentase realisasi dan penyerapan anggaran serta capaian kinerja

Sedangkan peluang Kecamatan Kuaro dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah:

1) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif
2) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kecamatan Kuaro dengan Muspika, Dinas Instansi, UPT, Kepala Desa dan Perangkat Desa, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat, merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui rapat koordinasi
3) Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
4) Perubahan paradigma pada permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kecamatan sebagai SKPD
5) Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Kuaro dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
6) Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan
7) Visi dan misi kepala daerah yang menunjang percepatan pembangunan di kecamatan
8) Kemudahan dalam mengakses informasi melalui teknologi internet

Isu – isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

2) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Paser kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah,

potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Paser;

3) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.*
   Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Responsibility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4) *Pelayanan Prima*
   Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Paser yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;
5) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana guna optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat;
6) Peningkatan pengetahuan kepada masyarakat dalam memahami prosedur dan tatacara pengurusan;
7) Peningkatan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah;
8) Peningkatan infrastruktur perdesaan;
9) Peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Formulasi isu-isu penting berupa langkah-langkah strategis guna menjawab permasalahan-permasalahan yang ada tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan

Kuaro serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Paser. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat:

a) Rancangan kerangka ekonomi daerah
b) Program prioritas pembangunan daerah
c) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

RKPD Kabupaten Paser disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat / melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah (Proses Button-up dan Top-down).

Berdasarkan review terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dikaitkan dengan Rencana Kerja Kecamatan Kuaro berdasarkan analisis kebutuhan, dimana program dan kegiatan yang telah direncanakan dan diusulkan belum sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam Renstra SKPD Tahun 2021 – 2026. Di dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kuaro untuk tahun 2025 berdasarkan Rancangan RKPD tahun 2025.

Tabel T-C.31.

Review Terhadap Renja Tahun 2025 Kantor Camat Kuaro

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks kepuasan Layanan Skretariat**	**76 Nilai Indeks**	**8.331.797.985**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks kepuasan Layanan Skretariat**	**76 Nilai Indeks**	**8.331.797.985**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**25 dokumen**	**18.427.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**25 dokumen**	**18.427.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	15.324.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	15.324.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	5.160.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	5.160.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	2.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	2.900.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1.675.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1.675.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2.900.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2.900.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase LHP nihil Persentase temuan ditindaklanjuti**	**100 %**	**7.130.161.876**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase LHP nihil Persentase temuan ditindaklanjuti**	**100 %**	**7.130.161.876**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	6.915.650.836	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	6.915.650.836	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	200 Dokumen	190.711.040	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	200 Dokumen	190.711.040	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	4.060.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	4.060.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80**	**80 %**	**53.425.735**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80**	**80 %**	**53.425.735**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	34 Paket	53.425.735	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	34 Paket	53.425.735	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat**	**100 %**	**1.043.842.797**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat**	**100 %**	**1.043.842.797**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	0	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	176.402.771	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	176.402.771	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	578.428.603	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	578.428.603	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	230.160.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	230.160.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	**100 Persen**	**154.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	**100 Persen**	**154.000.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	4.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	**76 %**	**491.719.189**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	**76 %**	**491.719.189**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		**persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daaerah yang ada di Kecamatan**	**100 %**	**111.503.600**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daaerah yang ada di Kecamatan**	**100 %**	**111.503.600**	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	116.978.600	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	116.978.600	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		**Indeks Kepuasan Pelayanan masyarakat Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum**	**100 %**	**359.246.669**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		**Indeks Kepuasan Pelayanan masyarakat Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum**	**100 %**	**359.246.669**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	354.480.589	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	354.480.589	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Presentase Pelaksana Uraian Pemerintah yang dilimpahkan Oleh Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100 %**	**16.520.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Presentase Pelaksana Uraian Pemerintah yang dilimpahkan Oleh Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100 %**	**16.520.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 Dokumen	20.260.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 Dokumen	20.260.000	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru**	**30 %**	**170.719.939**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru**	**30 %**	**170.719.939**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana**	**100 %**	**260.373.800**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana**	**100 %**	**260.373.800**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	12.367.055	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	12.367.055	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	158.352.884	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	158.352.884	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban**	**55 %**	**734.001.123**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban**	**55 %**	**734.001.123**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 %**	**702.169.774**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 %**	**702.169.774**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	659.796.264	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	659.796.264	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	62.722.359	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	62.722.359	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		**Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100 %**	**5.765.000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		**Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100 %**	**5.765.000**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9 Laporan	11.482.500	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9 Laporan	11.482.500	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan**	**100 %**	**432.387.812**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan**	**100 %**	**432.387.812**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Jumlah Kegiatan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**2 Kegiatan**	**411.925.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Jumlah Kegiatan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**2 Kegiatan**	**411.925.000**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 Orang	150.009.160	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 Orang	150.009.160	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30 Orang	57.150.000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30 Orang	57.150.000	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	225.228.652	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	225.228.652	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu**	**100 %**	**188.199.174**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu**	**100 %**	**188.199.174**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Jumlah Desa yang terfasilitasi**	**9 Desa**	**183.082.350**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Jumlah Desa yang terfasilitasi**	**9 Desa**	**183.082.350**	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	38.290.889	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	38.290.889	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	27 Dokumen	133.428.285	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	27 Dokumen	133.428.285	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3 Dokumen	16.480.000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3 Dokumen	16.480.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Kuaro pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya melalui :

1. Peningkatan kualitas pelayanan public yang menjadi wewenang Kecamatan dan Peningkatan kualitas aparaturnya.
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa.
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Usulan Program dan kegiatan Masyarakat, melalui prosedur sebagai berikut:

1. Bahwa usulan program/kegiatan yang dibahas dalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur tokoh masyarakat sehinggan menghasilkan usulan perempuan dan organisasi kemasyarakatan sehinggan menghasilkan usulan program yang dibawah ke form musrenbangdes
2. Di form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa/Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut ke form Musrenbang tingkat kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu-isu penting terkait dari masing-masing SKPD yang ada pada unit pelaksana teknis ditingkat kecamatan. (Tabel T-C.32)

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Besaran/ volume

Nihil

Tidak ada Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan pada Tahun 2025.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kuaro merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Paser. Oleh karena itu, Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kuaro berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Kuaro dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Paser sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Kecamatan Kuaro bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, maupun di tingkat Provinsi dan Kabupaten Paser (RPJMD dan RKPD).

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Adapun Arah Prioritas Pembangunan yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Profesional dan Akuntabel untuk Mendukung Transformasi Pelayanan Publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas dan Meningkatnya kemandirian masyarakat desa, adapun sasaran yang akan dicapai adalah :

1. **Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah**
2. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan**
3. **Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif**
4. **Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan**

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	75
		1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	BB (75)
		2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	84
		3) Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	13,95

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	
2	Meningkatnya kemandirian masyarakat desa	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	74 100

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Kantor Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Tahun 2025 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Memperhatikan Renstra Kecamatan Kuaro 2021-2026 maka Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, meliputi:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
   1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

5. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**
   1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

6. **Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**
   1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

7. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

8. Koordinasi Kegiatan Pemberdyaan Desa

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

9. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

10. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepoliasian Negara Republik Indonesia

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
3) Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA

12. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
3) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
4) Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2025, selama periode ini Kecamatan Kuaro menetapkan 6 (enam) program yang membawahi 12 (dua belas) kegiatan dan diuraikan ke dalam 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan.

4.2 Matriks Pendanaan

Rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 beserta rencana pendanaan dan perkiraan maju tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Paser

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kuaro

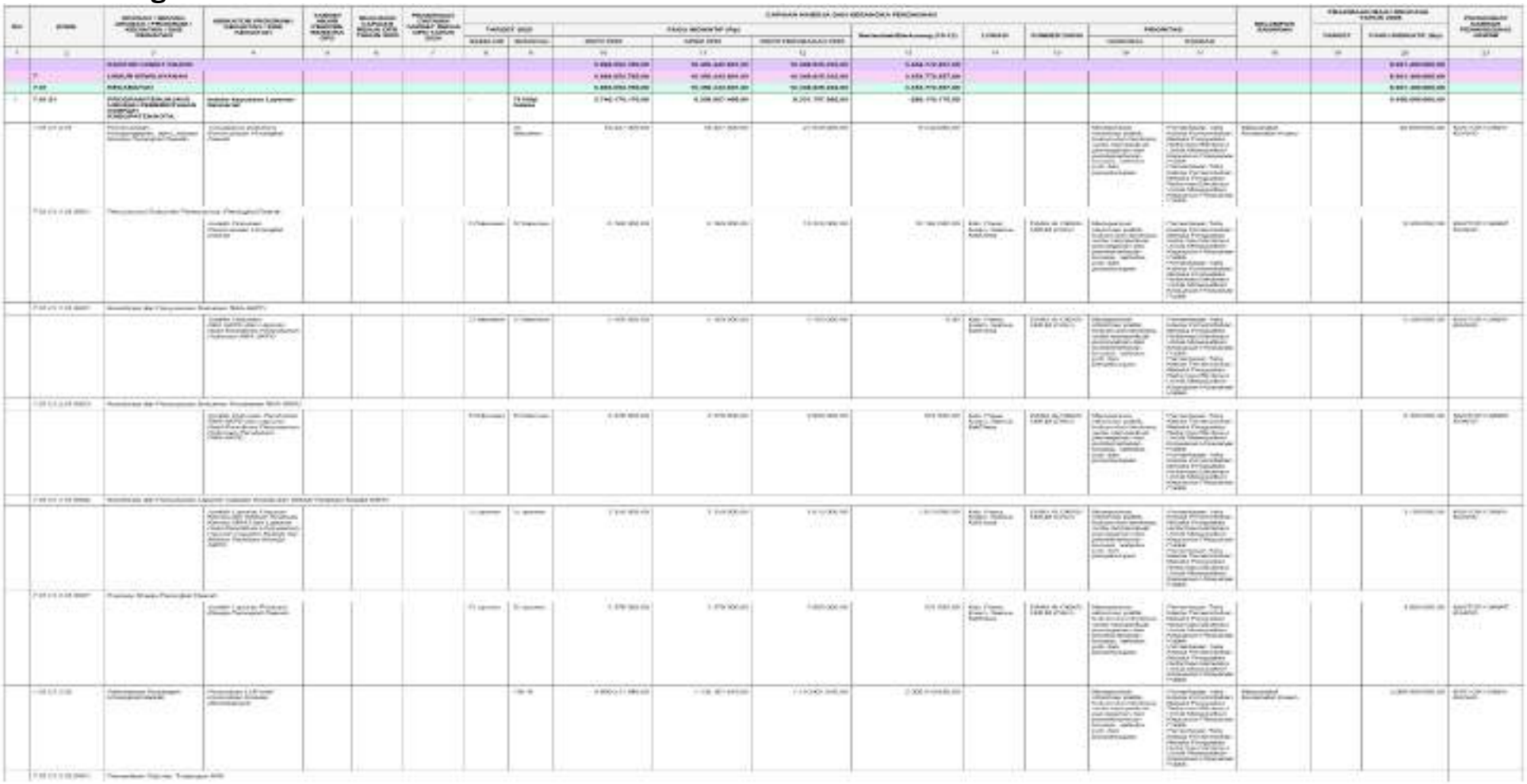

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	4.600.000.000,00	6.915.650.836,00	6.915.650.836,00	2.315.650.836,00	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeladupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			4.600.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				125 Dokumen	200 Dokumen	207.511.040,00	212.511.040,00	190.711.040,00	-16.800.000,00	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeladupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			280.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	15 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	4.080.000,00	2.080.000,00	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeladupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			9.600.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai "c*				-	80 %	51.000.000,00	53.425.735,00	53.425.735,00	-574.265,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeladupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kuaro		51.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				54 Paket	34 Paket	54.000.000,00	53.425.735,00	53.425.735,00	-574.265,00	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeladupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			54.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat*					100 %	748.238.135,00	1.043.842.797,00	985.991.374,00	245.753.239,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeladupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kuaro		175.300.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	10 Paket	21.000.000,00	29.671.859,00	0,00	21.000.000,00	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeladupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			2.300.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	157.000.000,00	134.572.707,00	148.407.771,00	-24.407.771,00	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeladupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			0,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				26 Paket	20 Paket	365.738.136,00	635.084.236,00	578.428.603,00	212.690.468,00	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			83.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			13.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110 Laporan	120 Laporan	199.500.000,00	242.504.000,00	230.160.000,00	30.660.000,00	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			77.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan*				-	100 Persen	124.000.000,00	154.000.000,00	154.000.000,00	30.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kuaro		138.300.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	100 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			7.300.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	24 Laporan	120.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			136.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**				-	**76 %**	**385.772.800,00**	**487.270.269,00**	**491.719.189,00**	**367.127.200,00**							**752.900.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan*				-	100 %	111.503.600,00	111.503.600,00	116.978.600,00	5.475.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kuaro		206.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	31 Laporan	111.503.600,00	111.503.600,00	116.978.600,00	5.475.000,00	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pengadaan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			206.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Indeks Kepuasan Pelayanan masyarakat Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum*				-	100 %	257.069.200,00	359.246.669,00	354.480.589,00	97.411.389,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kuaro		540.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinerg dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				8 Dokumen	12 Dokumen	257.069.200,00	359.246.669,00	354.480.589,00	97.411.389,00	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			540.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Presentase Pelaksana Urusan Pemerintah yang dilimpahkan Oleh Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*				-	100 %	17.200.000,00	16.520.000,00	20.260.000,00	3.060.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kuaro		6.900.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				15 Dokumen	15 Dokumen	17.200.000,00	16.520.000,00	20.260.000,00	3.060.000,00	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			6.900.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat pertumbuhan usahakelompok usaha baru**				**-**	**30 %**	**21.733.800,00**	**260.373.800,00**	**170.719.939,00**	**191.266.200,00**							**213.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana*				-	100 %	21.733.800,00	260.373.800,00	170.719.939,00	148.986.139,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kuaro		213.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartispasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				13 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	21.733.800,00	21.733.800,00	12.367.055,00	9.366.745,00	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			33.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	31 Laporan	0,00	238.640.000,00	158.352.884,00	158.352.884,00	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			180.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
4	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban**				**-**	**55 %**	**560.087.240,00**	**707.934.774,00**	**734.001.123,00**	**-238.087.240,00**							**312.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				-	100 %	544.322.240,00	702.169.774,00	722.518.623,00	178.196.383,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kuaro		306.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisan Negara Republik Indonesa, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	541.322.240,00	667.169.774,00	659.796.264,00	115.474.024,00	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			290.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	2 Laporan	0,00	35.000.000,00	62.722.359,00	62.722.359,00	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			16.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				-	100 %	5.785.000,00	5.785.000,00	11.482.500,00	5.717.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kuaro		6.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				6 Laporan	9 Laporan	5.785.000,00	5.785.000,00	11.482.500,00	5.717.500,00	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			6.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan**				-	**100 %**	**6.925.000,00**	**411.925.000,00**	**432.387.812,00**	**75.575.000,00**							**82.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan*				-	2 Kegiatan	6.925.000,00	411.925.000,00	432.387.812,00	425.462.812,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kuaro		82.500.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				0 Orang	25 Orang	0,00	150.000.000,00	150.009.160,00	150.009.160,00	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			68.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				8 Orang	30 Orang	6.925.000,00	6.925.000,00	57.150.000,00	50.225.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			6.600.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				0 Dokumen	3 Dokumen	0,00	255.000.000,00	225.278.652,00	225.278.652,00	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			7.900.000,00	KANTOR CAMAT KUARO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu**				**-**	**100 %**	**183.357.750,00**	**183.082.350,00**	**188.199.174,00**	**-80.357.750,00**							**103.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa yang terfasilitasi*				-	9 Desa	183.357.750,00	183.082.350,00	188.199.174,00	4.841.424,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kuaro		103.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	3 Dokumen	21.581.750,00	21.581.750,00	38.290.888,00	16.709.138,00	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			13.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				36 Dokumen	27 Dokumen	148.890.600,00	148.890.600,00	133.428.285,00	-15.462.315,00	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			45.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.06.2.01.0008	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			29.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				6 Dokumen	3 Dokumen	12.885.400,00	12.610.000,00	16.480.000,00	3.594.600,00	Kab. Paser, Kuaro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			16.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	JUMLAH								**7.592.465.995,00**	**11.883.679.951,00**	**11.856.480.150,00**	**1.754.212.427.619,00**							**8.498.500.000,00**	

Nama Perangkat Daerah : Kelurahan Kuaro

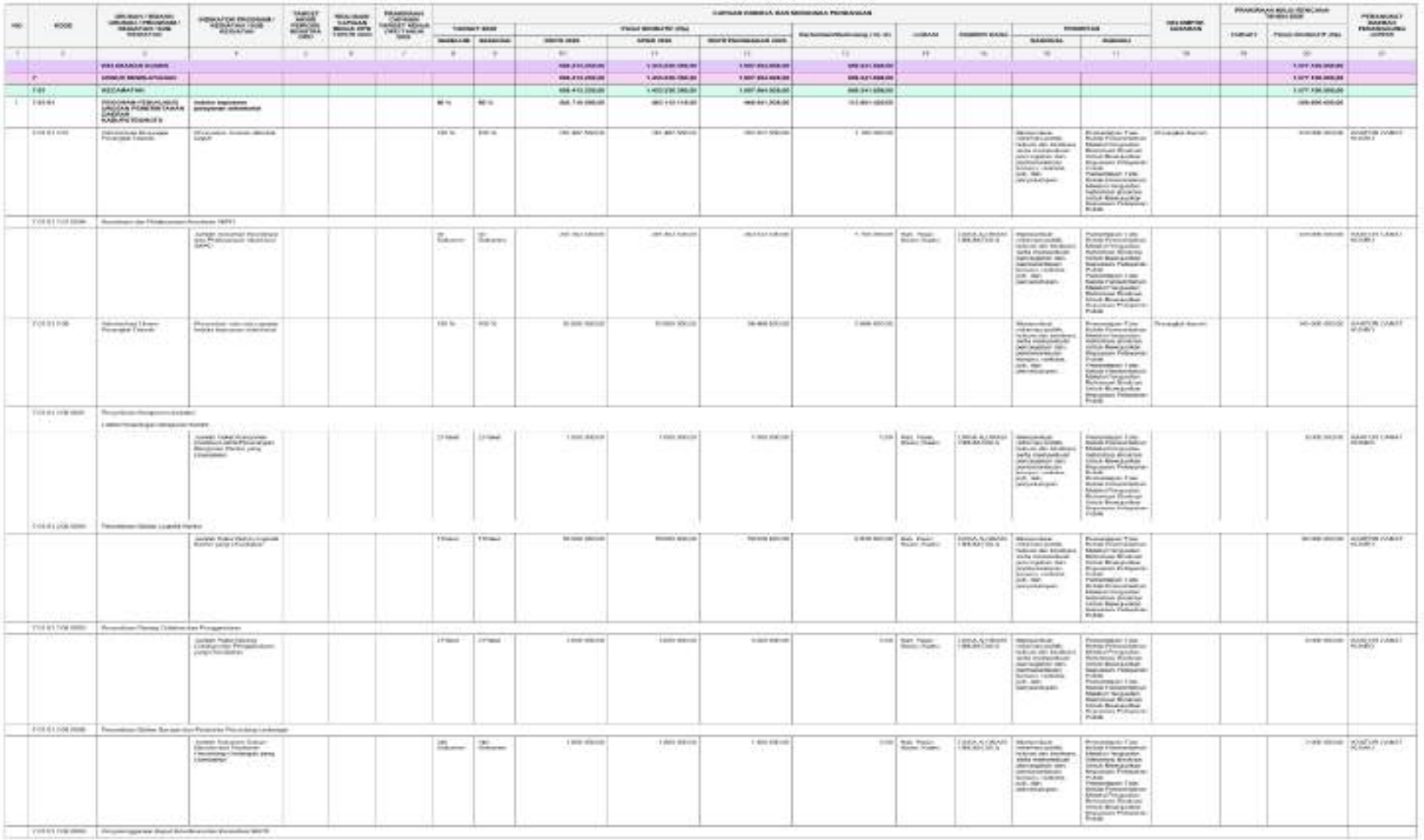

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	23.040.000,00	-6.960.000,00	Kab. Paser, Kuaro, Kuaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			30.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan*				100 %	100 %	41.100.080,00	49.496.618,00	49.496.618,00	8.396.538,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Perangkat daerah		46.100.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	1.100.000,00	1.417.029,00	1.417.029,00	317.029,00	Kab. Paser, Kuaro, Kuaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			1.100.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	40.000.080,00	48.079.589,00	48.079.589,00	8.079.509,00	Kab. Paser, Kuaro, Kuaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			45.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	58.356.000,00	58.356.000,00	58.356.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Perangkat daerah		61.500.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	Kab. Paser, Kuaro, Kuaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			500.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	5.720.000,00	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	Kab. Paser, Kuaro, Kuaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			6.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	52.186.000,00	52.186.000,00	52.186.000,00	0,00	Kab. Paser, Kuaro, Kuaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			50.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks kepuasan pelayanan masyarakat**				**90 %**	**90 %**	**5.411.650,00**	**82.708.287,00**	**231.361.688,00**	**94.588.350,00**							**100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Prasentase Pelaksana Urusan Pemerintah yang dilimpahkan Oleh Camat*				100 %	100 %	5.411.650,00	82.708.287,00	231.361.688,00	225.950.038,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Masyarakat		100.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	5.411.650,00	82.708.287,00	231.361.688,00	225.950.038,00	Kab. Peser, Kuaro, Kuaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			100.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang berjalan**				**100 %**	**100 %**	**238.283.000,00**	**887.412.945,00**	**809.351.302,00**	**670.217.000,00**							**908.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Prasentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berjalan*				100 %	100 %	238.283.000,00	887.412.945,00	809.351.302,00	571.068.302,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Masyarakat		908.500.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyara katan	4 Lembaga Kemasyara katan	2.822.400,00	2.822.400,00	2.822.400,00	0,00	Kab. Peser, Kuaro, Kuaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	400.000.000,00	403.480.000,00	203.480.000,00	Kab. Peser, Kuaro, Kuaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KHUSUSNAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			450.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Poklmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Poklmas / Ormas	4 Poklmas / Ormas	29.300.000,00	465.300.000,00	394.545.177,00	365.245.177,00	Kab. Peser, Kuaro, Kuaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			450.000.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				10 Laporan	10 Laporan	6.160.600,00	19.290.545,00	8.563.725,00	2.343.125,00	Kab. Peser, Kuaro, Kuaro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			5.500.000,00	KANTOR CAMAT KUARO
	J U M L A H								**7.592.465.995,00**	**11.883.679.951,00**	**11.856.480.150,00**	**1.754.212.427.619,00**							**8.498.500.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi Kecamatan Kuaro, tantangan dan peluang yang ada, serta hambatan dan kekuatan internal yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas, efektivitas, dan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat serta penguatan koordinasi lintas sektor. Penyusunan dokumen ini menjadi instrumen strategis dalam menjawab dinamika pembangunan di tingkat kecamatan secara adaptif dan tepat sasaran.

5.1. Kaidah Kaidah Pelaksanaan

Untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan dalam dokumen Renja Perubahan Kecamatan Kuaro Tahun 2025 berjalan secara optimal, maka diterapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta ketentuan teknis lainnya terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- Prinsip akuntabilitas dan transparansi, dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi.
- Efisiensi dan efektivitas anggaran, dengan mengutamakan kegiatan prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- Partisipasi masyarakat, sebagai elemen penting dalam proses pembangunan, khususnya dalam pengusulan kegiatan melalui mekanisme Musrenbang dan forum-forum konsultasi publik lainnya.
- Koordinasi lintas sektor dan integrasi program, baik secara internal antar seksi dan staf kecamatan, maupun eksternal dengan perangkat daerah dan instansi vertikal.
- Pemanfaatan teknologi informasi, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi birokrasi.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai kelanjutan dari penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025, Kecamatan Kuaro menetapkan rencana tindak lanjut yang bersifat strategis dan operasional sebagai berikut:

- Mensosialisasikan dokumen Renja Perubahan kepada seluruh unit kerja internal dan pemangku kepentingan terkait, guna memastikan pemahaman dan komitmen bersama dalam pelaksanaannya.

- Melakukan penajaman kegiatan prioritas, khususnya kegiatan yang mendukung capaian sasaran Renstra 2021–2026 dan RKPD Perubahan Kabupaten Paser Tahun 2025.
- Mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan, melalui penguatan monitoring dan evaluasi berkala, termasuk penyesuaian teknis apabila terjadi perubahan dalam kondisi lapangan.
- Melakukan konsolidasi data dan pelaporan kinerja, secara akurat dan tepat waktu sebagai bahan evaluasi capaian serta dasar penyusunan perencanaan tahun berikutnya.
- Mengajukan dukungan dan koordinasi lintas perangkat daerah, khususnya terhadap kegiatan yang memerlukan sinergi lintas sektor dan pelibatan masyarakat secara langsung.

Dengan pelaksanaan kaidah-kaidah dan rencana tindak lanjut ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kuaro Tahun 2025 dapat berjalan secara terarah, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kuaro, 22 Agustus 2025
Camat

Finandar Astaman, S.STP
Penata Tk.I
NIP. 19861127 200602 1 001

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



KECAMATAN LONG IKIS

KABUPATEN PASER

SALINAN

BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Long Ikis Tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalan Renstra 2021-2026, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Kantor Camat Long Ikis Tahun Anggaran 2025. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Long Ikis, 22 Agustus 2025

Plt. Camat Long Ikis,

Husni, S.Sos

Pembina

NIP. 19671008 199203 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 ..... **8**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 8
2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Long Ikis 13
2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat dan Solusi Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025 19
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **21**
3.1 Tujuan dan Sasaran 21
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 22
3.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 27
3.4 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025 27
BAB IV PENUTUP **37**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Long Ikis Semester I Tahun 2025 9
Tabel 2.2.1 Indikator Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan 16
Tabel 2.2.2 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Long Ikis sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 16
Tabel 3.1.1 Target Tahunan Tujuan dan Sasaran 21
Tabel 3.2.1 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Kecamatan Long Ikis..... 23
Tabel 3.3.1 Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2025 pada Kecamatan Long Ikis..... 27
Tabel 3.4.1 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025... 28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangkapendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Kebijakan efisiensi belanja tahun anggaran 2025 yang ditetapkan pemerintah menyebabkan beberapa mata anggaran belanja pada sub kegiatan harus dilakukan penyesuaian kembali guna menunjang kelancaran kegiatan.
c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

d. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;

e. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser mengacu padakerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Renstra Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Long Ikis, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Long Ikis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Renja Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Tahun 2025 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang ipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 30,);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kecamatan;

25. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Tahun 2025 ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Kecamatan Long Ikis, proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Long Ikis, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Kecamatan Long Ikis, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RenjaKecamatan Long Ikis, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2025 hingga Triwulan I baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Long Ikis

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2025 yang disertai perubahan target.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Adapun hasil evaluasi Renja Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1.1

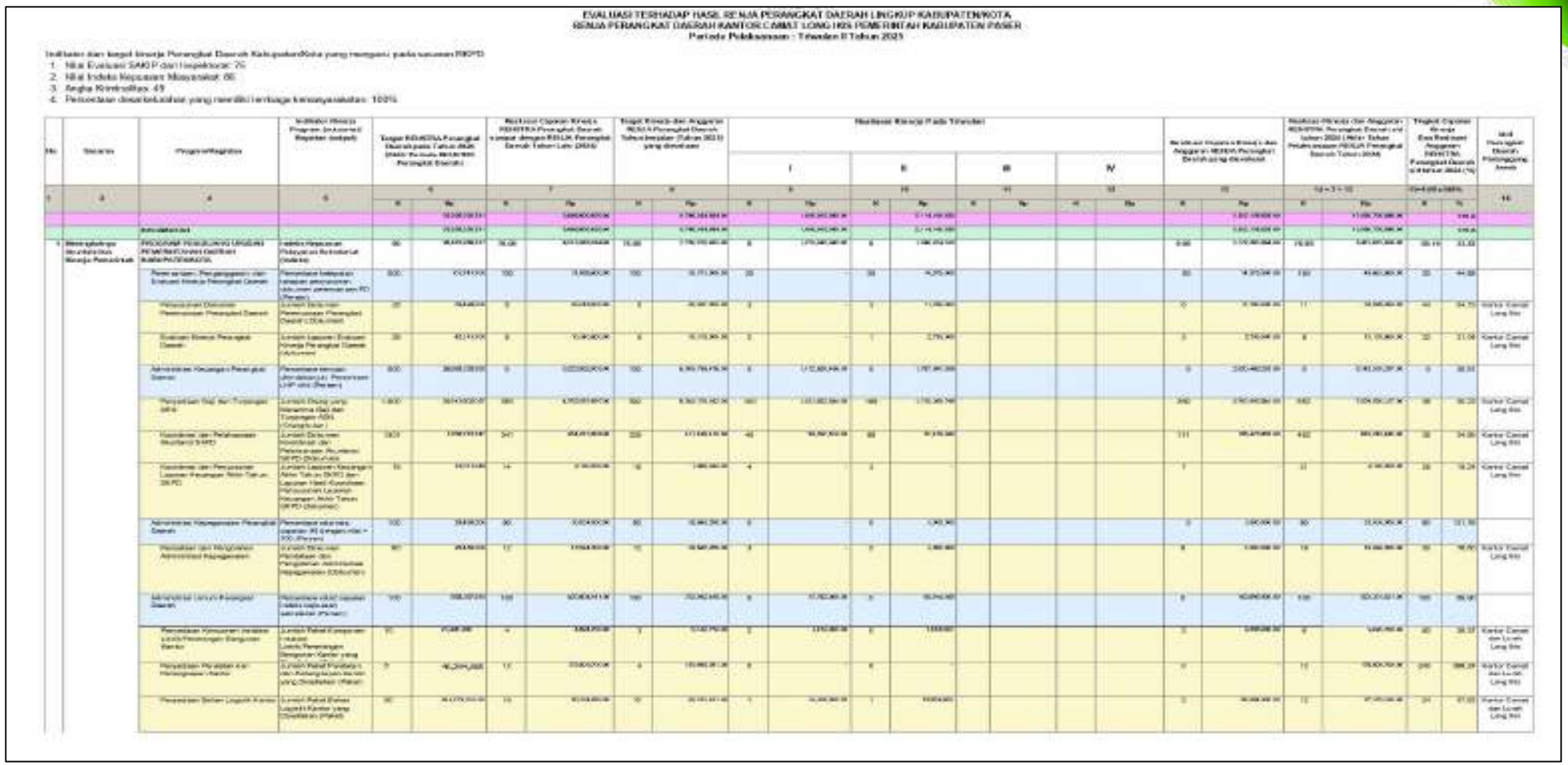

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH KANTOR CAMAT LONG IKIS PEMERINTAH KABUPATEN PASER
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat: 70
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat: 80
3. Angka Kemiskinan: 49
4. Persentase desa/kelurahan yang memiliki tenaga kesehatan: 100%

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Hasil (Outcome) Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Hasil (Outcome) RENSTRA Perangkat Daerah sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I								Realisasi Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=13-12		15=13/12*100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
	Jumlah/Rata-rata																								
1	Meningkatkan Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN UNGGAS PEMERINTAHAN KECAMATAN KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi (Indeks)	90	90,00%	76,00	80%	75,00	80%	0	-	0	-					0,00	-	76,00	80%	95,00	83,33	
		Penyelenggaraan Pengelolaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan dokumen pelaporan (dok.renja,renstra,dan PD Perubah)	100	100%	100	100%	100	25%	-	25%	25						50	50%	100	100%	50	44,00	
		Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20	20	0	20	0	20	-	5	5						10	50%	11	55,00	40	54,55	Kantor Camat Long Ikis
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	20	40	0	20	0	20	-	5	5						10	50%	8	40,00	20	21,04	Kantor Camat Long Ikis
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kenaikan gaji berkala pns, Pemberian LHP ptkp (Berkas)	100	100%	100	100%	100	25%	-	25%	25						50	50%	0	0,00%	0	38,33	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.800	1.800	180	1.800	180	1.800	180	1.800	180						360	1.800	182	1.824	90	90,22	Kantor Camat Long Ikis
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Monitoring dan Pelaporan (Dokumen)	324	324	241	324	60	324	60	324	60						120	324	122	324	80	34,26	Kantor Camat Long Ikis
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (SKPD)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (SKPD) (Dokumen)	16	16	14	16	4	16	4	16	4						8	16	12	16	8	18,24	Kantor Camat Long Ikis
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan dokumen PNS (Lengkap,Akte + KK) (Persen)	100	100%	80	100%	80	100%	0	-	0						0	0,00%	80	100,00%	80	121,95	
		Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Rencana Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	80	80	12	80	20	80	8	20	0						8	40,00%	16	80,00	80	98,80	Kantor Camat Long Ikis
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sikap kepatuhan terhadap kebijakan/ administrasi (Persen)	100	100%	100	100%	100	25%	0	-	0						0	0,00%	100	100,00%	100	99,38	
		Pemeliharaan Kelengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Paket Kelengkapan dan Peralatan yang Dipelihara (Paket)	10	10	3	10	3	10	3	10	0						3	30,00%	6	60,00	40	38,37	Kantor Camat dan Lurah Long Ikis
		Pemeliharaan Prasarana dan Peralatan Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor yang Dipelihara (Paket)	5	40,00%	12	5	4	5	0	-	0						0	-	12	70,00%	240	168,29	Kantor Camat dan Lurah Long Ikis
		Penyediaan Sarana Logistik Kantor	Jumlah Paket Sarana Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	40	40	10	40	10	40	1	10	1						2	10,00%	10	47,50%	24	47,50	Kantor Camat dan Lurah Long Ikis

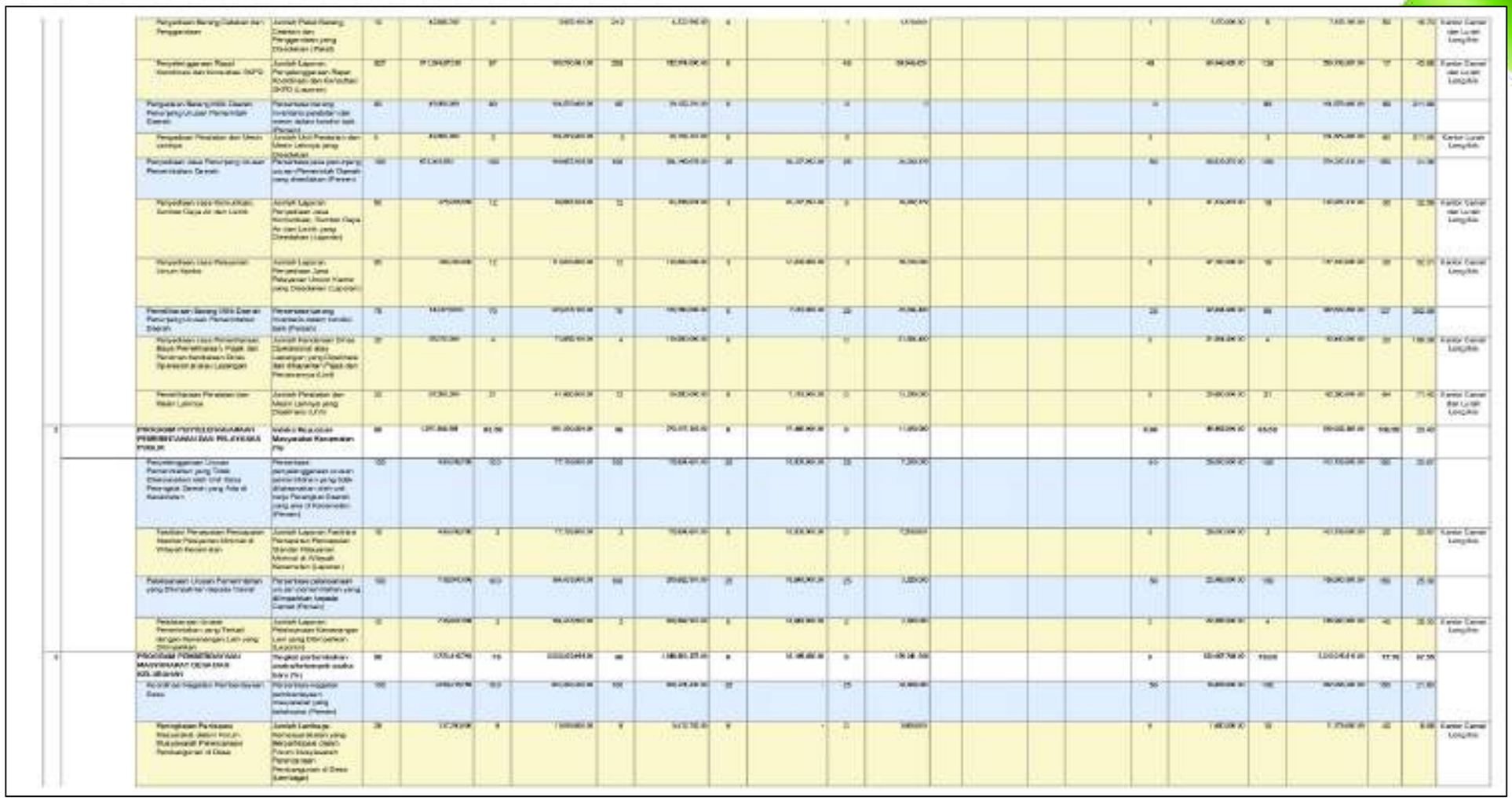

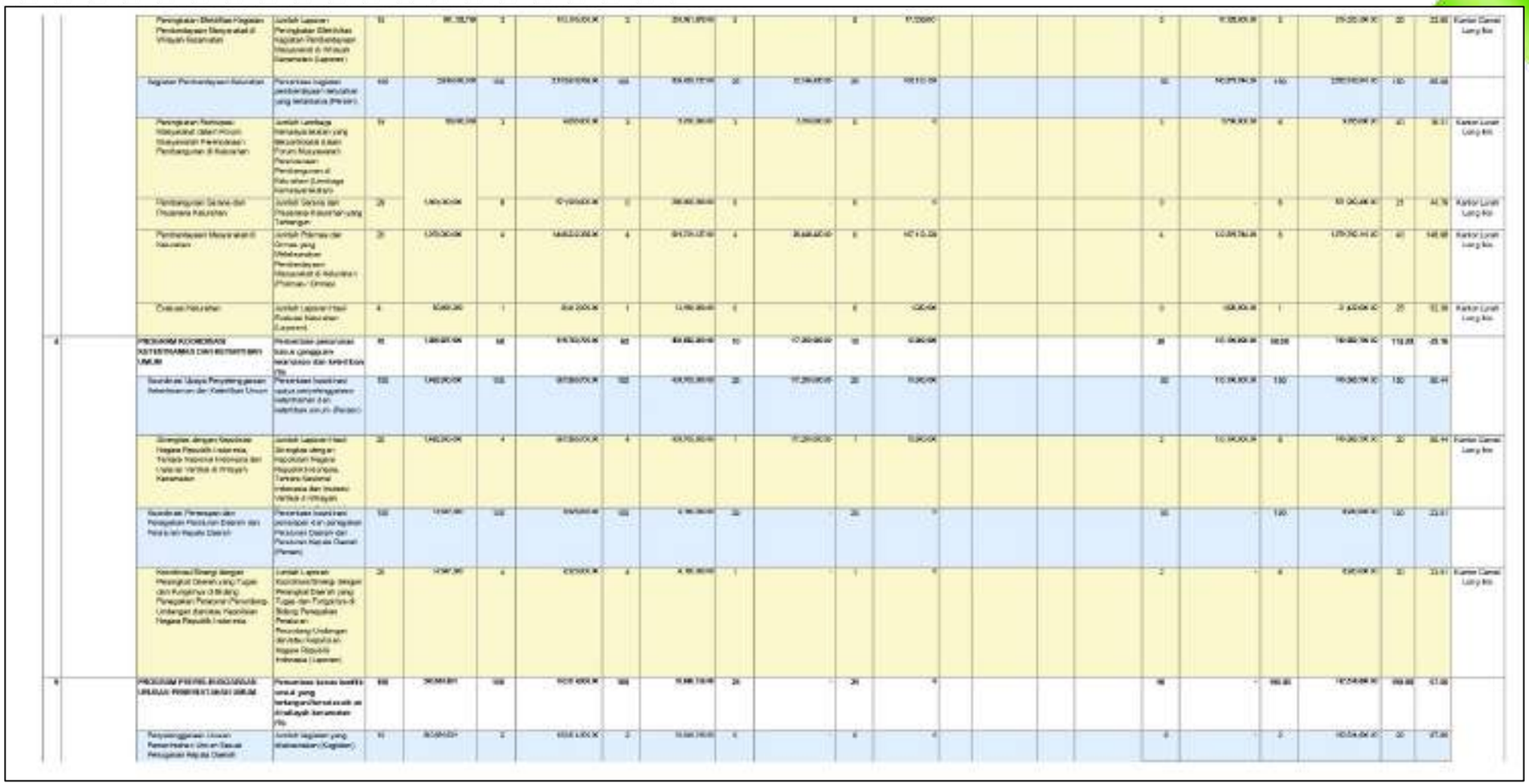

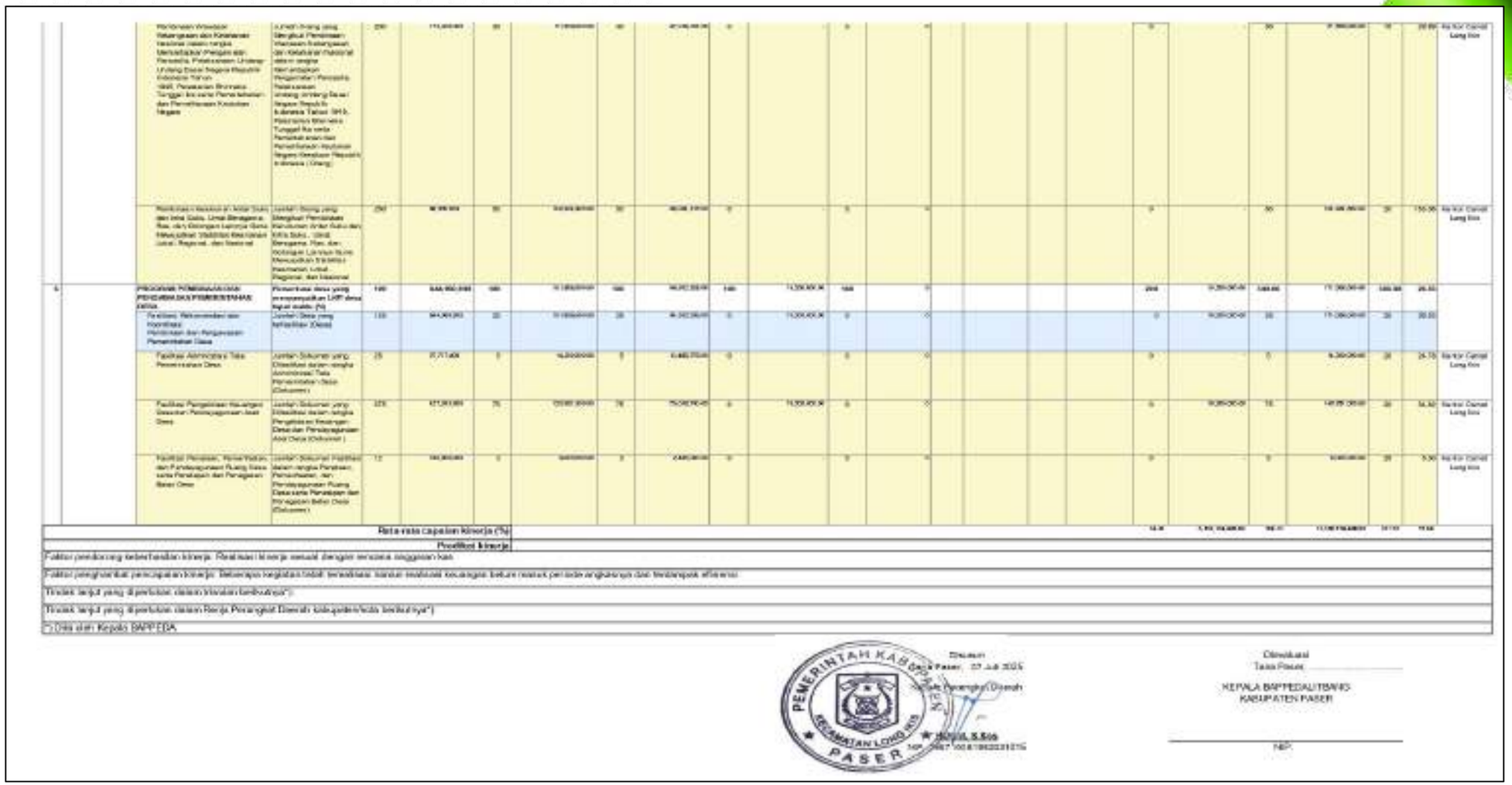

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kesatuan Nasional pasca rangka Melaksanakan Program-program Perundang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemahaman dan Pengamalan Kedudukan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kesatuan Nasional pasca rangka Melaksanakan Program-program Perundang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemahaman dan Pengamalan Kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	250		50		50		0		0						0		50		20	20.00	Kepala Camat Long Ikis
		Pembinaan Kesatuan Antar Suku dan Inter Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Nasional Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kesatuan Antar Suku dan Inter Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Nasional Lokal, Regional, dan Nasional	250		50		50		0		0						0		50		20	150.00	Kepala Camat Long Ikis
5		PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase desa yang menyampaikan LKPJ desa tepat waktu (%)	140		100		100		140		100						200		100.00		20.00		
		Fasilitasi Pemerintahan dan Kelembagaan Pemberdayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi (Desa)	110		20		20		0		0						0		20		20	20.00	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	25		5		5		0		0						0		5		20	20.00	Kepala Camat Long Ikis
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	275		75		75		0		0						0		10		20	20.00	Kepala Camat Long Ikis
		Fasilitasi Penataan, Pemetaan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penataan dan Penagelolaan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemetaan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penataan dan Pengelolaan Batas Desa (Dokumen)	12		0		0		0		0						0		0		20	0.00	Kepala Camat Long Ikis
			Rata-rata capaian kinerja (%)																				
			Predikat kinerja																				

Faktor pendukung keberhasilan kinerja: Realisasi kinerja sesuai dengan rencana anggaran kas

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Beberapa kegiatan tidak terealisasi karena terbatasi anggaran sehingga belum maksimal pencapaian kinerja dan terdapat efisiensi

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*)

*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA

Disetujui
Tana Paser, 07 Juli 2025
Kepala Perangkat Daerah

Dinilai oleh
Tana Paser,
KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN PASER

NIP.

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun 2025 Triwulan II dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi keuangan sebesar Rp. 2.114.100.659,00 *Dua milyar seratus empat belas juta seratus ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah)* dari total pagu APBD sebesar Rp. 9.746.954.884,00 *(Sembilan milyar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah)* atau sebesar 21,69%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Kecamatan Long Ikis sebesar 35,41% dengan predikat kinerja sangat rendah, yaitu ≤50%. Predikat ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 2 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 4 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 3 indikator capaian kinerja 0%-50% = 42 indikator.

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Long Ikis

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Paser, maka Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

Tugas : melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.

Fungsi :
1) pengoordinasian penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan otonomi daerah;
2) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa;
3) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4) pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
5) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

6) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7) pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
8) pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan; dan
9) penyusunan program, pembinaan adminsitrasi dan pengelolaan ketatausahaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Kecamatan Long Ikis adalah:

1. Pelayanan pembuatan akta kelahiran dan surat keterangan lahir
   Sampai dengan triwulan II tahun 2025 telah terealisasi pembuatan akta kelahiran sebanyak 42 dokumen dan surat keterangan lahir sebanyak 4 dokumen (kelurahan).
2. Pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK)
   Sampai dengan triwulan II tahun 2025 telah terealisasi pembuatan Kartu Keluarga sebanyak 185 dokumen.
3. Pelayanan pembuatan/perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP)
   Sampai dengan triwulan II tahun 2025 telah terealisasi pembuatan/perekaman KTP sebanyak 0 dokumen dikarenakan alat perekaman KTP tidak berfungsi/rusak.
4. Pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)
   Sampai dengan triwulan II tahun 2025 telah terealisasi pembuatan KIA sebanyak 251 dokumen.
5. Pelayanan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   Sampai dengan triwulan II tahun 2025 telah terealisasi pembuatan IMB sebanyak 0 dokumen dikarenakan perijinan IMB telah diambil alih oleh Kabupaten (Dinas Penanaman Modal).
6. Pelayanan pembuatan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
   Sampai dengan triwulan II tahun 2025 telah terealisasi pembuatan IUMK sebanyak 3 dokumen (kecamatan) dan 29 dokumen (kelurahan).
7. Pelayanan pembuatan surat pindah
   Sampai dengan triwulan II tahun 2025 telah terealisasi pembuatan surat pindah

sebanyak 19 dokumen (kecamatan) dan 9 dokumen (kelurahan).

8. Pelayanan pembuatan surat keterangan ahli waris

   Sampai dengan triwulan II tahun 2025 telah terealisasi pembuatan surat keterangan ahli waris sebanyak 81 dokumen (kecamatan) dan 5 dokumen (kelurahan).

9. Pelayanan pembuatan surat dispensasi dan pengantar nikah

   Sampai dengan triwulan II tahun 2025 telah terealisasi pembuatan surat dispensasi sebanyak 31 dokumen dan pengantar nikah sebanyak 11 dokumen (kelurahan).

10. Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

    Sampai dengan triwulan II tahun 2025 telah terealisasi pembuatan SKTM sebanyak 22 dokumen (kecamatan) dan 38 dokumen (kelurahan).

11. Pelayanan pembuatan surat rekomendasi

    Sampai dengan triwulan II tahun 2025 telah terealisasi pembuatan surat rekomendasi sebanyak 19 dokumen.

12. Pelayanan pembuatan Surat Kepemilikan Tanah (SKT)

    Sampai dengan triwulan II tahun 2025 telah terealisasi pembuatan SKT sebanyak 0 dokumen (kelurahan).

13. Pelayanan pembuatan surat keterangan kematian

    Sampai dengan triwulan II tahun 2025 telah terealisasi pembuatan akta kematian sebanyak 29 dokumen (kecamatan) dan surat keterangan kematian sebanyak 2 dokumen (kelurahan).

14. Pelayanan pembuatan surat keterangan domisili

    Sampai dengan triwulan II tahun 2025 telah terealisasi pembuatan surat keterangan domisili sebanyak 60 dokumen (kecamatan) dan sebanyak 20 dokumen (kelurahan).

15. Pelayanan pembuatan surat keterangan lainnya (kelurahan)

    - Keterangan belum terdaftar pajak : 10 dokumen
    - Keterangan belum menikah : 6 dokumen
    - Keterangan kehilangan : 2 dokumen
    - Keterangan pelepasan hak : 0 dokumen

Upaya Kecamatan Long Ikis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Indikator Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai hasil evaluasi SAKIP atas implementasi sistem akuntabilitas	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP atas implementasi sistem akuntabilitas dari Inspektorat	Kasubbag Program dan Keuangan
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey indeks kepuasan masyarakat setiap tahun	Dokumen IKM	Kasi Pemerintahan dan Kependudukan & Kasi Kesejahteraan Masyarakat
3.	Meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif	Angka kriminalitas	Jumlah kriminalitas setahun dibagi jumlah penduduk tahun ybs dikalikan 100.000	Data kriminalitas dari kepolisian setempat	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4.	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan dibagi jumlah desa	Data lembaga kemasyarakatan per desa	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Long Ikis Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Kecamatan Long Ikis terdapat dalam Tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.2.2
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Long Ikis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026		
Tujuan 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	Penilaian mandiri pelaksanaa reformasi birokrasi	60	65	70	75	80	-	-

Sasaran: 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP dari Inspektorat	B/65	B/70	BB/72	BB/75	A/81	-	-
2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80	84	85	90	95	-	-
3) Meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif	Angka kriminalitas	52	51	50	49	48	-	-
Tujuan 2: Meningkatnya kemandirian masyarakat	Persentase desa mandiri di wilayah Kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	-	-
Sasaran: Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%

Berdasarkan Tabel 2.2.2 di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Long Ikis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas"** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu *"Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi"*, belum mencapai target karena belum dilakukan penilaian mandiri atas pelaksanaan reformasi birokrasi, dimana realisasinya sebesar 0 dari target sebesar 0% dengan capaian kinerja sebesar 0,00%.
b. Tujuan **"Meningkatnya kemandirian masyarakat desa"** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu *"Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan"*, belum mencapai target karena belum dilakukan penilaian atas desa mandiri, dimana realisasinya sebesar 40% dari target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 40,00%. Hasil ini sesuai dengan data IDM Kecamatan Long Ikis

tahun 2024, dimana terdapat 10 desa mandiri dari 25 desa yang ada di Kecamatan Long Ikis berdasarkan Berita Acara Penetapan Status Desa, sebagai berikut:

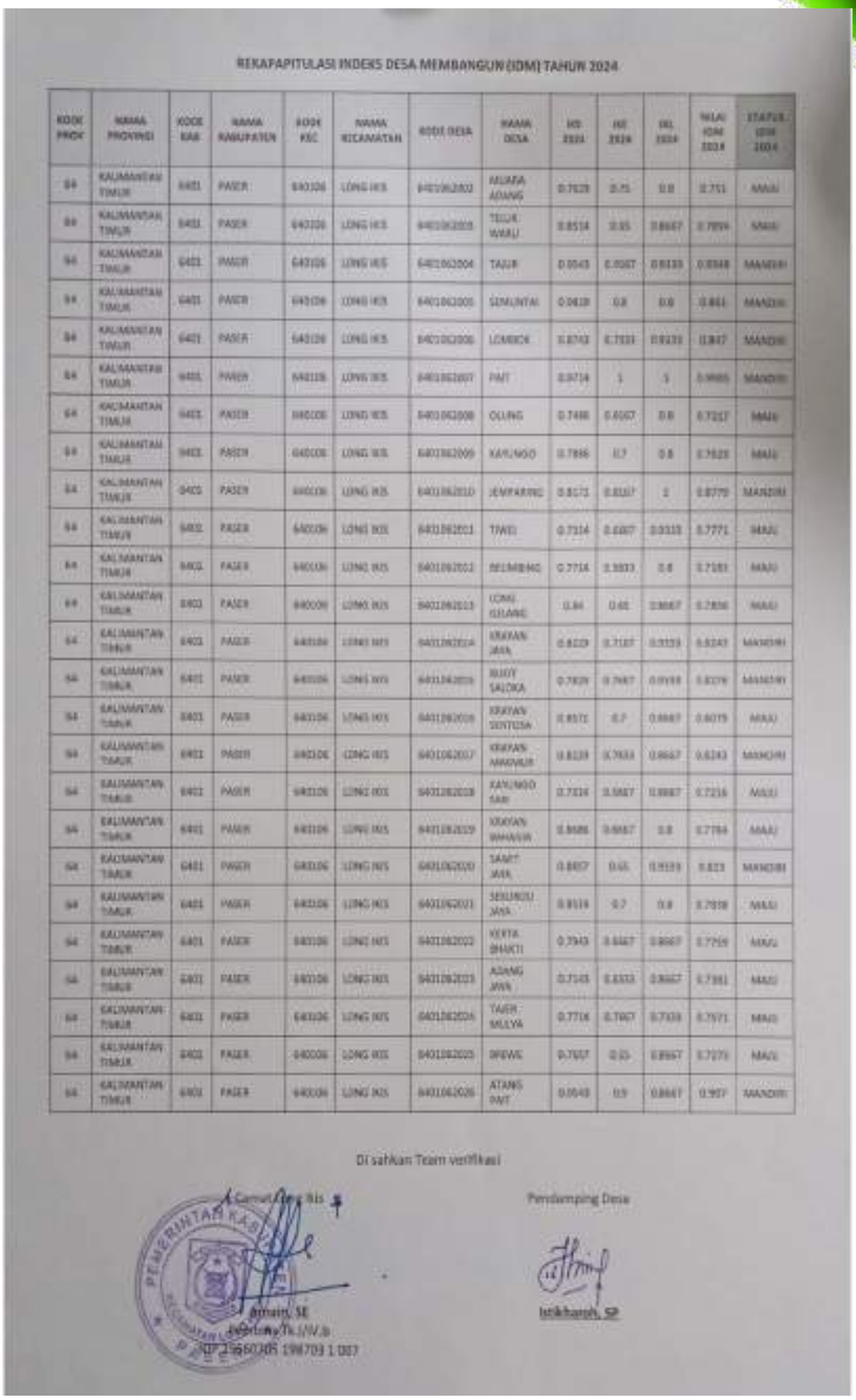

REKAPAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2024

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	640106	LONG IKIS	6401062002	MUARA ADANG	0.7029	0.75	0.8	0.751	MAJU
64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	640106	LONG IKIS	6401062003	TEGUK WARU	0.8514	0.95	0.8667	0.7899	MAJU
64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	640106	LONG IKIS	6401062004	TAJUR	0.0043	0.0067	0.8333	0.0348	MANDIRI
64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	640106	LONG IKIS	6401062005	SEMUNTAI	0.0429	0.8	0.8	0.861	MANDIRI
64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	640106	LONG IKIS	6401062006	LOMBOK	0.8743	0.7333	0.9333	0.847	MANDIRI
64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	640106	LONG IKIS	6401062007	PAIT	0.9714	1	1	0.9905	MANDIRI
64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	640106	LONG IKIS	6401062008	OLING	0.7486	0.6667	0.8	0.7217	MAJU
64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	640106	LONG IKIS	6401062009	KAYUNGO	0.7886	0.7	0.8	0.7629	MAJU
64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	640106	LONG IKIS	6401062010	JEMPARING	0.8171	0.8167	1	0.8779	MANDIRI
64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	640106	LONG IKIS	6401062011	TWEI	0.7314	0.6667	0.9333	0.7771	MAJU
64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	640106	LONG IKIS	6401062012	BELIMBING	0.7714	0.9333	0.8	0.7181	MAJU
64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	640106	LONG IKIS	6401062013	LONG GELANG	0.84	0.65	0.8667	0.7836	MAJU
64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	640106	LONG IKIS	6401062014	KRAYAN JAYA	0.8229	0.7167	0.9333	0.8243	MANDIRI
64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	640106	LONG IKIS	6401062015	BUGIS SALOKA	0.7829	0.7667	0.9333	0.8276	MANDIRI
64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	640106	LONG IKIS	6401062016	KRAYAN SENTOSA	0.8571	0.7	0.8667	0.8079	MAJU
64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	640106	LONG IKIS	6401062017	KRAYAN MAKMUR	0.8229	0.7333	0.8667	0.8243	MANDIRI
64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	640106	LONG IKIS	6401062018	KAYUNGO SARI	0.7314	0.9667	0.8667	0.7216	MAJU
64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	640106	LONG IKIS	6401062019	KRAYAN BHAKTI	0.8686	0.6667	0.8	0.7784	MAJU
64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	640106	LONG IKIS	6401062020	TANJUNG JAYA	0.8857	0.65	0.9333	0.823	MANDIRI
64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	640106	LONG IKIS	6401062021	SEKUMOU JAYA	0.8514	0.7	0.8	0.7938	MAJU
64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	640106	LONG IKIS	6401062022	KERTA BHAKTI	0.7943	0.6667	0.8667	0.7759	MAJU
64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	640106	LONG IKIS	6401062023	ADANG JAYA	0.7143	0.8333	0.8667	0.7381	MAJU
64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	640106	LONG IKIS	6401062024	TAJUR MULYA	0.7714	0.7667	0.7333	0.7571	MAJU
64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	640106	LONG IKIS	6401062025	BREWIL	0.7657	0.65	0.8667	0.7271	MAJU
64	KALIMANTAN TIMUR	6401	PASER	640106	LONG IKIS	6401062026	ATANG PAIT	0.0543	0.9	0.8667	0.907	MANDIRI

Di sahkan Team verifikasi

Pendamping Desa

Ismain, SE

Ishlahuddin, SP

c. Sasaran **"Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah"** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu *"Nilai SAKIP dari Inspektorat"*, dimana capaian Nilai SAKIP tahun 2023 adalah 69,24 dari target 72 dengan capaian kinerja sebesar 96,17%. SAKIP tahun 2024 belum dilakukan evaluasi oleh Inspektorat.

d. Sasaran **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan"** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu *"Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat"*, dimana capaian IKM tahun 2024 adalah 85,59 dengan capaian kinerja 101,89%, melebihi target yang ditetapkan yaitu 84.

e. Sasaran **"Meningkatnya lingkungan Daerah yang Kondusif"** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu *"Angka Kriminalitas"*, dimana capaian tahun 2024 adalah 50,19 dengan capaian 99,62%. Sedangkan angka kriminalitas tahun 2025 belum mencapai target, dimana realisasinya belum terukur karena belum dilakukan pengukuran tingkat kriminalitas dari target sebesar 49 dengan capaian kinerja sebesar 0,00%.

f. Sasaran **"Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan"** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu *"Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan"*, telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Periode Januari - Juni 2025:

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan.
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai.
4. Tersedianya SOP pelayanan.

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Belum terlaksananya seluruh kegiatan pada triwulan I dan II tahun berjalan.

2. Pelaksanaan kegiatan OPD dimana capaian kinerja belum dibarengi dengan realisasi capaian keuangan sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun.
3. Kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan surat edaran Efisiensi Anggaran Nomor: 900.1.1/198/II/BKAD tanggal 14 Februari 2025, sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
4. Terdapat beberapa belanja sub kegiatan yang direncanakan untuk dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun 2025 sehingga tidak direalisasikan sesuai anggaran kas.

Implikasi yang timbul akibat kondisi di atas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2025.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Long Ikis sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang kewilayahan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.1

Target Tahunan Tujuan dan Sasaran

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025
Tujuan 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	75	75
Sasaran: 1). Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP dari Inspektorat	Nilai hasil evaluasi SAKIP atas Implementasi Sistem Akuntabilitas	75	75
2).Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil penghitungan survey indeks kepuasan masyarakat setiap tahun	86	86
3).Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	jumlah kriminalitas setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun ybs dikalikan 100.000	49	49
Tujuan 2: Meningkatnya kemandirian masyarakat desa	Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan		100 persen	100 persen
Sasaran: Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan dibagi jumlah desa/kelurahan	100 persen	100 persen

Memperhatikan tabel 3.1.1 di atas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Tahun 2025 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Long Ikis mendukung pencapaian sasaran ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-10, yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3. Meningkatnya lingkungan Daerah yang Kondusif
4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Kecamatan Long Ikis telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel. 3.2.1
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Long Ikis

Tahun Anggaran: 2025
Organisasi: Kecamatan Long Ikis

Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Anggaran Perubahan	Bertambah/Berkurang	Keterangan/Alasan Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Pemerintahan Umum	2.01.01 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7,867,369,969	7,867,369,969	-	7,867,369,969	-	
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					68,746,000	68,746,000	-	68,746,000	-	
			7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	40,115,000	40,115,000	-	40,115,000	-	
			7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	28,631,000	28,631,000	-	28,631,000	-	
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6,719,942,669	6,719,942,669	-	6,719,942,669	-	
			7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	393	Orang/bulan	6,542,370,032	6,542,370,032	-	6,542,370,032	-	
			7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan dokumen SKPD	235	Dokumen	173,750,450	173,750,450	-	173,750,450	-	
			7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35	Laporan	3,770,000	3,770,000	-	3,770,000	-	
		7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					62,298,500	62,298,500	-	62,298,500	-	
			7.01.01.2.05.0003 Perlatihan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Perlatihan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	22	Dokumen	62,298,500	62,298,500	-	62,298,500	-	
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					319,589,719	319,589,719	-	319,589,719	-	
			7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1	paket	2,189,300	2,189,300	-	2,189,300	-	
			7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	paket	128,898,281	128,898,281	-	128,898,281	-	
			7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	paket	25,865,975	25,865,975	-	25,865,975	-	
			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	2,802,000	2,802,000	-	2,802,000	-	
			7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100	laporan	160,000,000	160,000,000	-	160,000,000	-	
		7.01.01.2.09 Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					185,601,219	185,601,219	-	185,601,219	-	
			7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	75,801,110	75,801,110	-	75,801,110	-	

			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	110.800.000	110.800.000	-	110.680.000	-	
		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					119.000.000	119.000.000	-	119.000.000	-	
			7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	110.800.000	110.800.000	-	110.680.000	-	
			7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Unit	8.120.000	8.120.000	-	8.120.000	-	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						353.614.452	353.614.452	-	353.614.452	-	
		7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Telah Diserahkan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					87.350.000	87.350.000	-	87.350.000	-	
			7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	laporan	87.350.000	87.350.000	-	87.350.000	-	
		7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diilimpahkan kepada Camat					266.264.452	266.264.452	-	266.264.452	-	
			7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	266.264.452	266.264.452	-	266.264.452	-	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						329.680.190	329.680.190	-	329.680.190	-	
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					329.680.190	329.680.190	-	329.680.190	-	
			7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Masyarakat Perencanaan	1	lembaga	10.835.584	10.835.584	-	10.835.584	-	
			7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	308.854.606	308.854.606	-	309.854.606	-	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						468.130.000	468.130.000	-	468.130.000	-	
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					429.810.000	429.810.000	-	429.810.000	-	
			7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	429.810.000	429.810.000	-	429.810.000	-	
		7.01.04.2.02 Koordinasi Penegakan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah					8.320.000	8.320.000	-	8.320.000	-	
			7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	4	Laporan	8.320.000	8.320.000	-	8.320.000	-	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						132.122.260	132.122.260	-	172.122.260	40.000.000	
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum termasi Penugasan Kepada Daerah					132.122.260	132.122.260	-	172.122.260	40.000.000	

			7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia	48	Orang	67.122.260	67.122.260	-	67.122.260	-	
			7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrakulo, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Nasional Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Nasional Lokal, Regional, dan Nasional	58	Orang	67.000.000	65.000.000	-	165.000.000	+2.000.000	Kegiatan Perbaikinnya
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSULAN PEMERINTAH DESA						116.377.499	116.377.499	-	116.377.499		
		7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					116.377.499	116.377.499	-	116.377.499	-	
			7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	dokumen	20.650.000	20.650.000	-	20.650.000	-	
			7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa	75	dokumen	90.877.499	90.877.499	-	90.877.499	-	
			7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3	dokumen	4.850.000	4.850.000	-	4.850.000	-	
			JUMLAH				8.857.894.370	8.857.894.370	-	8.857.894.370	40.000.000	

Sub Organisasi:	*Kelurahan Long Ikis*											
Dasar Kewilayahan	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						106.678.454	106.678.454		106.678.454		
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100.230.926	100.230.926	-	100.230.926	-	
			7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	60	dokumen	100.230.926	100.230.926	-	100.230.926	-	
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					86.135.663	86.135.663	-	86.135.663	-	
			7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	2	paket	3.477.274	3.477.274	-	3.477.274	-	
			7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	30.091.307	30.091.307	-	30.091.307	-	
			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	5.202.892	5.202.892	-	5.202.892	-	
			7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	60	laporan	40.454.000	40.454.000	-	40.454.000	-	
		7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					32.748.903	32.748.903	-	32.748.903	-	
			7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	32.748.903	32.748.903	-	32.748.903	-	
		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					18.594.968	18.594.968	-	18.594.968	-	

			7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	bulan	18,594,968	18,594,968	-	18,594,968	-	
		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10,760,000	10,760,000	-	10,760,000	-	
			7.01.01.2.09.0004 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Unit	10,760,000	10,760,000	-	10,760,000	-	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						849,612,615	849,612,615	-	849,612,615	-	
		7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Keluraban					849,612,615	849,612,615	-	849,612,615	-	
			7.01.03.2.02.001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di keluraban	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Keluraban	5	Lembaga Kemasyarakatan	5,700,000	5,700,000	-	5,700,000	-	
			7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Keluraban	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Keluraban	4	Pokmas / Ormas	820,422,615	820,422,615	-	820,422,615	-	
			7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Keluraban	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Keluraban	1	Laporan	23,490,000	23,490,000	-	23,490,000	-	
JUMLAH							1,336,091,069	1,336,091,069	-	1,336,091,069	-	
JUMLAH KECAMATAN DAN KELURAHAN							10,193,985,439	10,193,985,439	-	10,233,985,439	40,000,000	

3.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Rancangan Perubahan RKPD 2025 tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kecamatan Long Ikis baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Paser.

Tabel. 3.3.1
Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tahun 2025 pada Kecamatan Long Ikis

No	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nama OPD										
	Urusan ……..										
1	Program …..										
	Kegiatan ….										
	Sub Kegiatan										
2.	Program …..										
	Kegiatan ….										
	Sub Kegiatan										
3.	Program …..										
	Kegiatan ….										
	Sub Kegiatan										

NIHIL

3.4. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Long Ikis pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4.1
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KANTOR CAMAT LOKOP KAB. PASER
TAHUN 2025

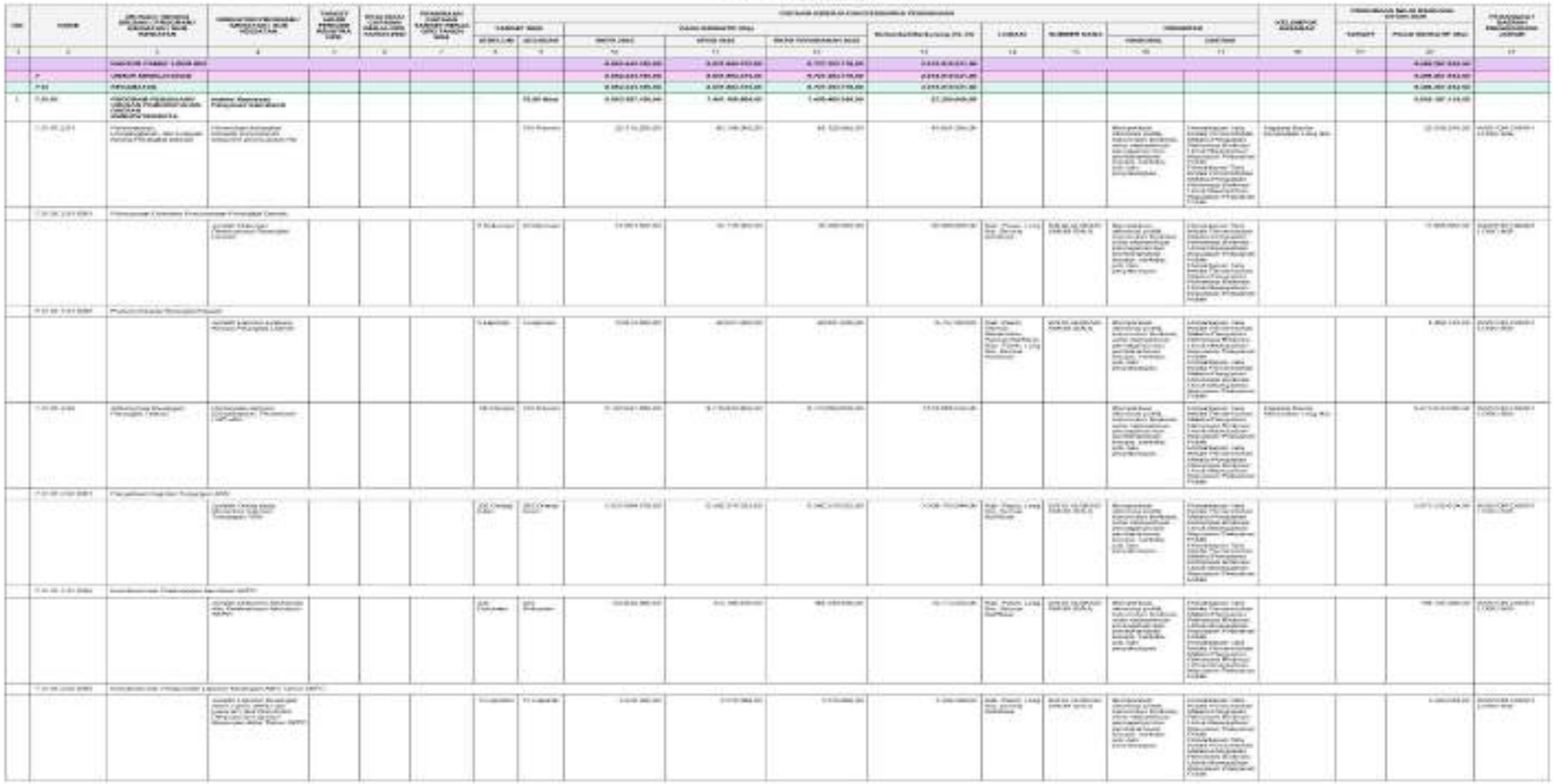

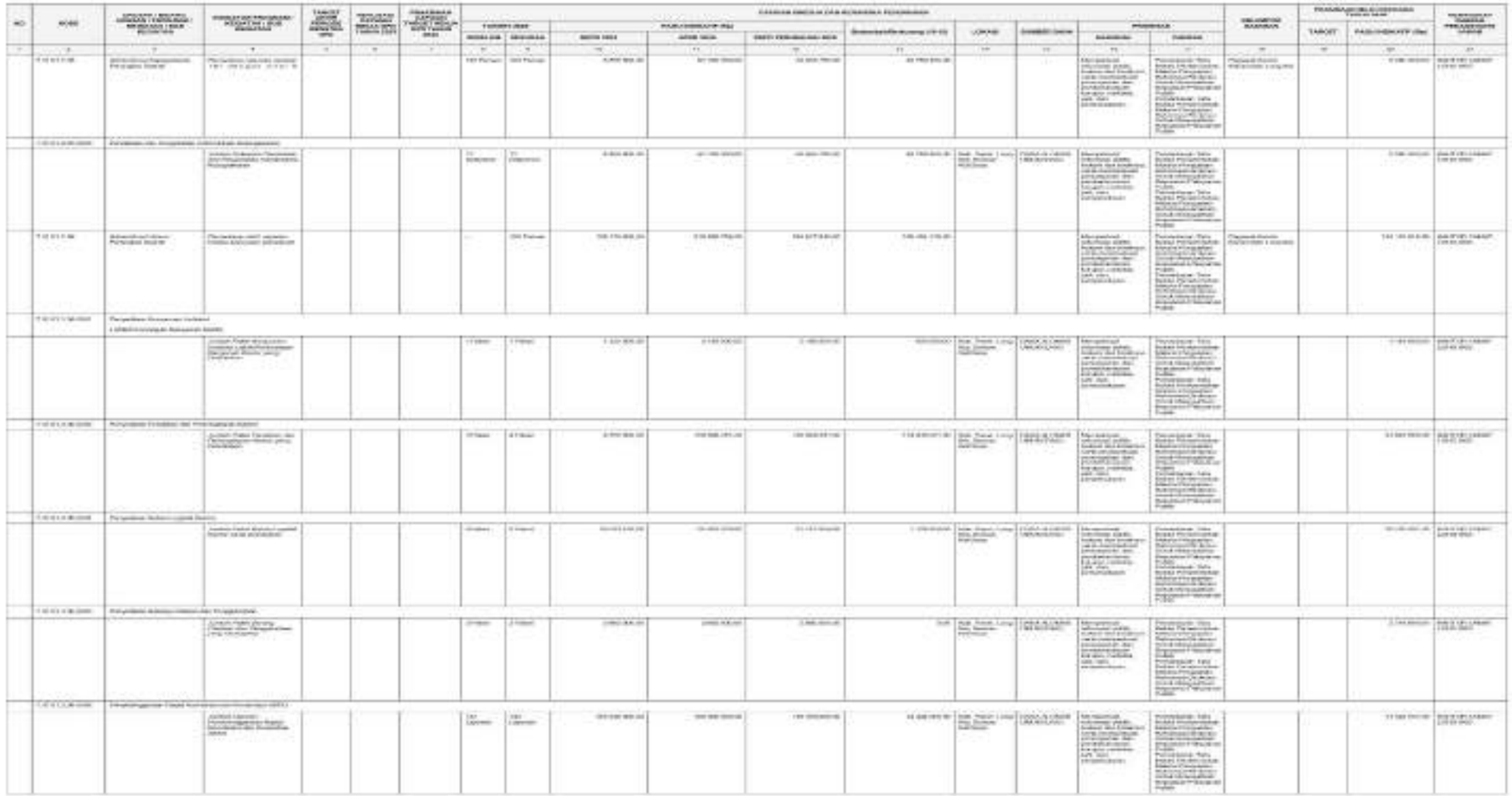

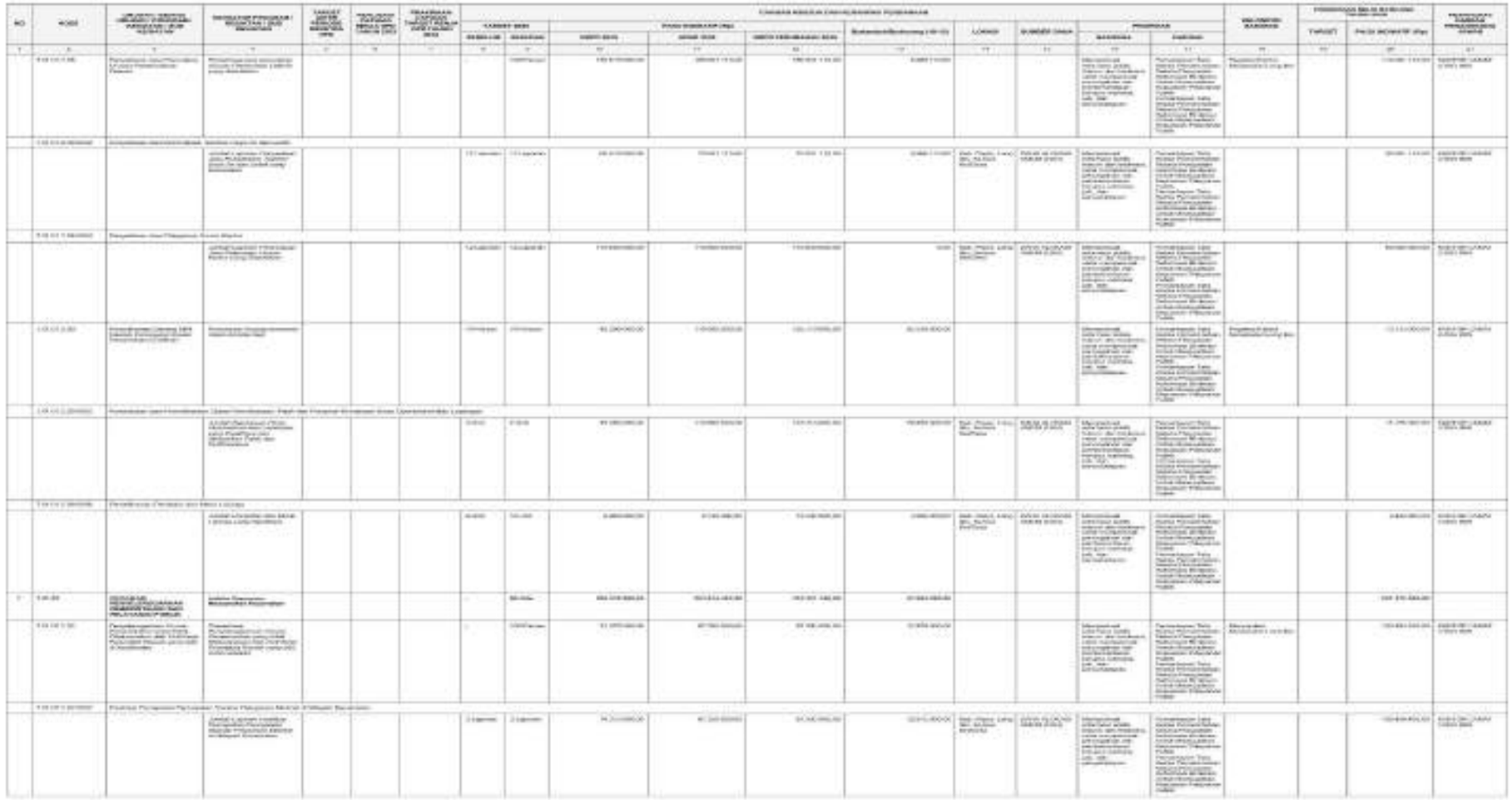

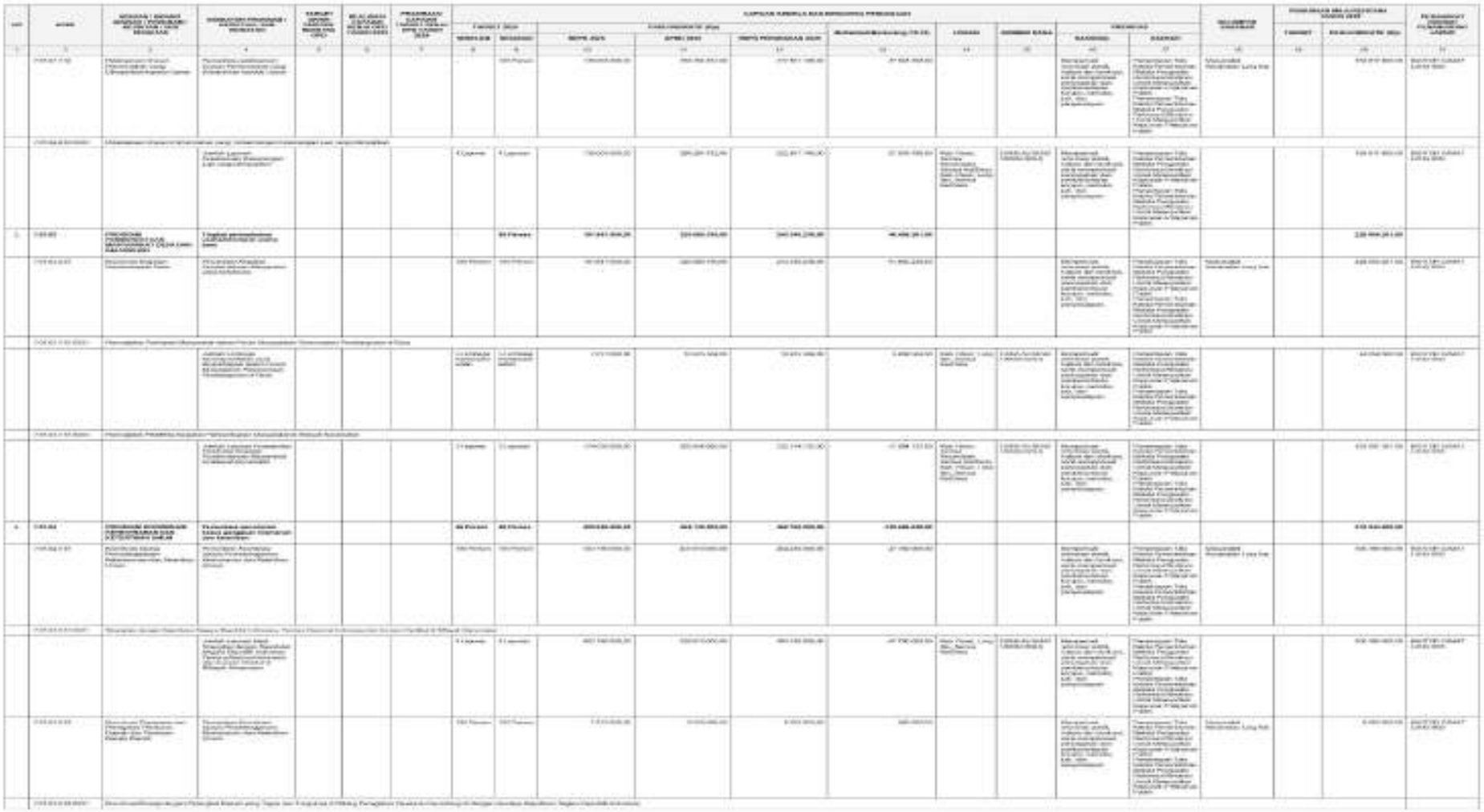



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET MASIH PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PENUGASAN WAJU/KEWENANGAN TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023		PAGU INDIKATIF (Rp)			Sebelumnya/Berlarutan (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	INDIKATOR 2025	APBD 2025	INDIKATOR PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	8.281.537,00	1.00	0.00	8.220.537,00	Kab. Pasuruan, Lang ka, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DAU-BAGI HASIL	Mempunyai referensi pokok, rukun dan tindakan, serta mempelajari pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, dll, dan penyalahgun	Pelaksanaan Tata Kerja Pemerintahan Melalui Perpaduan Reformasi Birokrasi Untuk Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Publik Pelaksanaan Tata Kerja Pemerintahan Melalui Perpaduan Reformasi Birokrasi Untuk Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Publik			8,00	8.281.537,00	
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Pemilihan, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kepala Desa serta Perangkat dan Penggunaan Kolas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pemilihan Pemberhentian, dan Pengangkatan Kepala Desa serta Perangkat dan Penggunaan Kolas Desa				1 Dokumen	2 Dokumen	8.825.000,00	8.800.300,00	8.800.300,00	(200.000,00)	Kab. Pasuruan, Lang ka, Semua Kecamatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempunyai referensi pokok, rukun dan tindakan, serta mempelajari pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, dll, dan penyalahgun	Pelaksanaan Tata Kerja Pemerintahan Melalui Perpaduan Reformasi Birokrasi Untuk Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Publik Pelaksanaan Tata Kerja Pemerintahan Melalui Perpaduan Reformasi Birokrasi Untuk Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Publik			17.300.300,00	8.800.300,00	
			JUMLAH						8.402.443.169,00	8.847.994.353,00	8.707.254.716,00	2.074.859.031,00							8.406.281.974,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KELURAHAN LONGIKIS KAB. PASER
TAHUN 2022

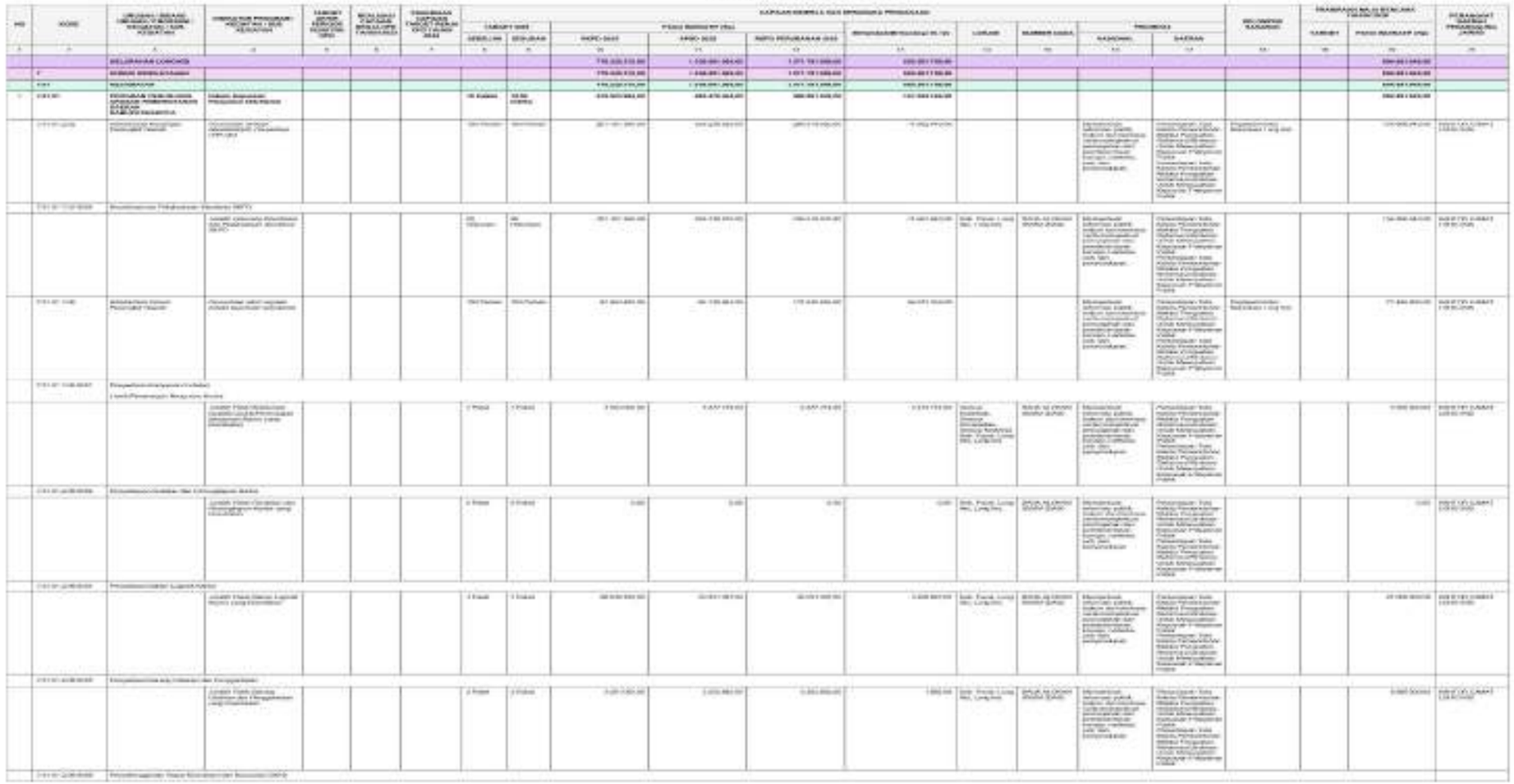

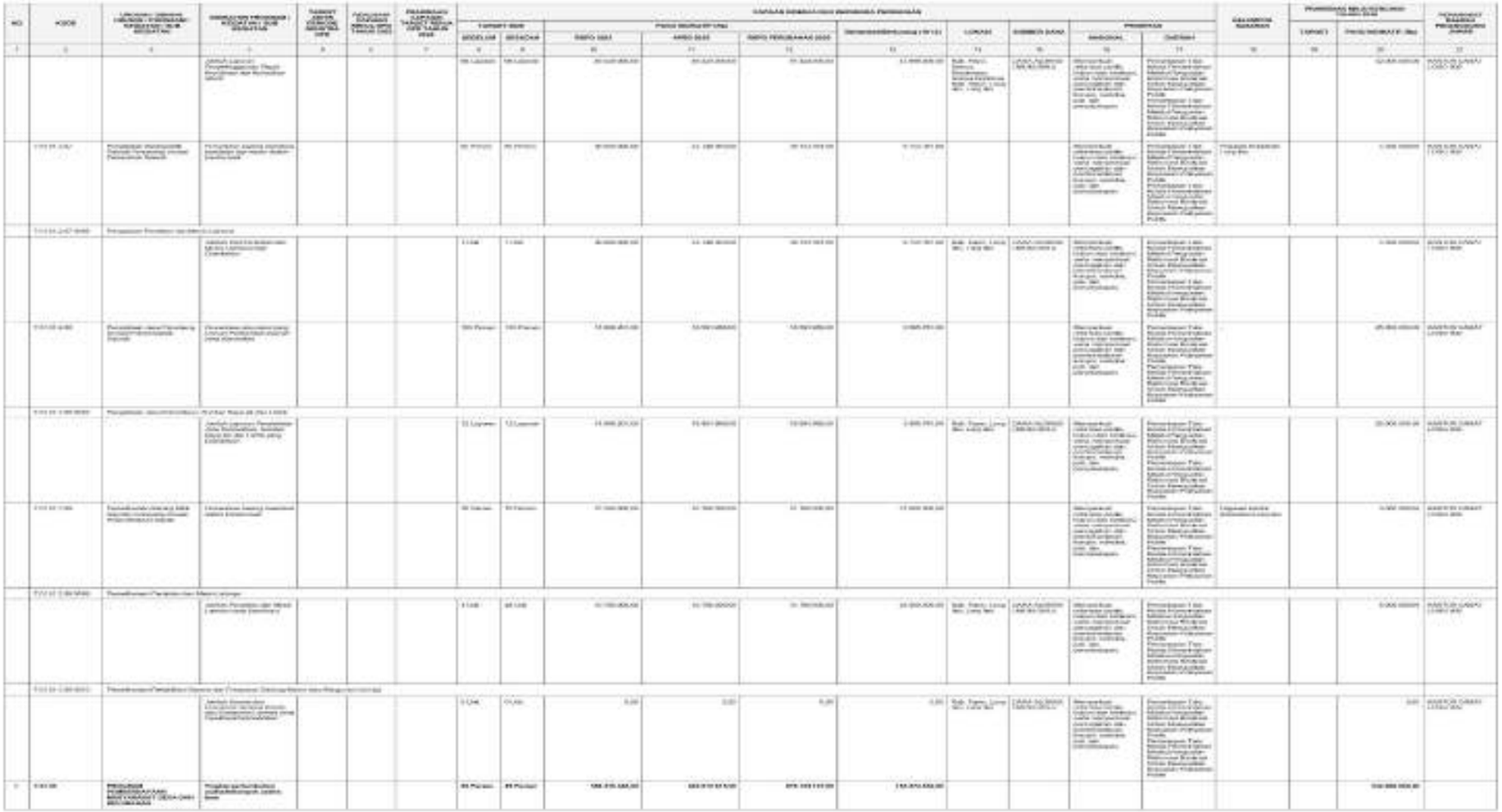

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET HASIL PROGRAM RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Kerangka Ekonomi Keuangan 25-13	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kecamatan Long Ikis mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

1.2. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan pelaksanaan program dan kegiatan terhadap dinamika pembangunan, hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan, serta penyesuaian terhadap kebijakan terbaru baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai

acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Rencana tindak lanjut dilaksanakan dengan strategi sinkronisasi program & kegiatan (memastikan seluruh program dan kegiatan telah selaras dengan RKPD Perubahan Tahun 2025), pemutakhiran data dan informasi (menginput hasil revisi kegiatan ke dalam sistem e-planning atau aplikasi perencanaan daerah lainnya serta menyelaraskan pagu indikatif dengan rencana perubahan anggaran), penguatan koordinasi (menyelenggarakan rapat koordinasi teknis lintas unit), serta melakukan monitoring dan evaluasi (menyusun jadwal monitoring berkala atas implementasi RENJA Perubahan).

Rencana tindak lanjut ini bertujuan untuk memastikan implementasi dari RENJA Perubahan Kecamatan Long Ikis Tahun 2025 dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Long Ikis, 22 Agustus 2025

Plt. Camat Long Ikis,

PEMERINTAH KABUPATEN PASER KECAMATAN LONG IKIS

Husni, S.Sos

Pembina

NIP. 19671008 199203 1 015

RENCANA KERJA PERUBAHAN

KECAMATAN LONG KALI

TAHUN 2025

KABUPATEN PASER
KALIMANTAN TIMUR

OLo Manin Aso Buen Siolondo

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai
dengan aslinya:
BAGIAN HUKUM,

AN
NIP. 1968081 99803
DI AZIS
61 1007

KEPALA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan k aruniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kantor Camat Long Kali Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja Perubahan Kantor Camat Long Kali Tahun Anggaran 2025merupakan tahun ke lima dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalan Renstra 2021-2026, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Kantor Camat Long Kali Tahun Anggaran 2025 sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Kantor Camat Long Kali Tahun Anggaran 2025. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Long Kali, September 2025

CAMAT

M.ARFAH, S.STP

NIP. 19850811 200312 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 8
2.2 Analisis Capaian Kinerja 21
2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025 25
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 27
3.1 Tujuan dan Sasaran 27
3.2 Review Terhadap Rencana Kerja Perubahan RKPD Tahun 2025 28
3.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 39
3.4 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025 39
BAB IV PENUTUP 57
4.1 Kaidah Pelaksanaan 57
4.2 Rencana Tindak Lanjut 57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Long Kali Semester I Tahun 2025 9
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Long Kali sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.....24
Tabel 3.1 Target Tahunan Tujuan dan Sasaran 27
Tabel 3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kantor Kecamatan Long Kali.....30
Tabel 3.3 Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2025 pada Kantor Kecamatan Long Kali.....39
Tabel 3.4 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025.....40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Perubahan Kantor Camat Long Kali Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kantor Camat Long Kali Tahun Anggaran 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Renstra Kantor Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kantor Kecamatan Long Kali, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Long Kali sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Kantor Camat Long Kali Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKA-P) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kantor Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2025 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kecamatan;

24. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Paser Nomor Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.
26. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser tahun 2026
27. Keputusan Bupati NOMOR : 100.3.3.2/KEP-741/2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Kantor Camat Long Kali Tahun Anggaran 2025 ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Kantor Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;
Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Kantor Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Kantor Camat Long Kali Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Kantor Kecamatan Long Kali, proses penyusunan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Long Kali, keterkaitan antara Renja Bappedalitbang

dengan dokumen RKPD, Renstra Kantor Kecamatan Long Kali, serta tindak

lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalampenulisan Renja Kantor Kecamatan Long Kali, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2025

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2025 hingga Triwulan I I baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Long Kali

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2025 yang disertai perubahan target.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan

RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025
Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja Kantor Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Long Kali

Periode Pelaksanaan : s/d Triwulan II Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA tahun 2025 (%)		Predikat	
1	2	5		6		7		8		9	
		K	Rp		Rp	K	Rp	K	%	K	%
UR KEWILAYAHAN			9.597.912.848,00		5.516.602.694,00		5.516.602.694,00				
AMATAN			9.597.912.848,00		5.516.602.694,00		5.516.602.694,00				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Pelaksanaan Sekretariat (%)	84	8.011.803.809,00	70	4.900.280.947,00	70	4.900.280.947,00	83	61	T	SR
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Reviu Renstra, Ranwa Renja, Rancangan Renja, Rencana Kerja , Profil Kecamatan) (Persentase)	100	11.056.450,00	80	9.500.000,00	80	9.500.000,00	80	86	T	T
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	5.422.150,00	5	4.180.000,00	5	4.180.000,00	71	77	R	R
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP, Evaluasi Renja, SPIP, Laporan TEPRA) (Laporan)	7	5.634.300,00	7	5.320.000,00	7	5.320.000,00	100	94	T	T

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%) (%)**	**100**	**7.401.044.869,00**	**100**	**4.431.056.499,00**	**100**	**4.431.056.499,00**	**100**	**60**	**T**	**R**
Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan Gajidan Tunjangan ASN (bulan)	38	7.240.061.294,00	38	4.350.560.075,00	38	4.350.560.075,00	**100**	**60**	T	R
Koordinasidan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen keuangan (SPM, SPP) (Dokumen)	324	154.651.640,00	324	80.496.424,00	324	80.496.424,00	**100**	**52**	ST	SR
Koordinasidan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan (Laporan)	1	6.331.935,00	0	-	0	-	-			-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Presentase rata rata capaian IKI dengan nilai 75 (%)**	**75**	**117.854.268,00**	**74**	**42.628.800,00**	**74**	**42.628.800,00**	**99**	**36**	**T**	SR
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	117.854.268,00	1	42.628.800,00	1	42.628.800,00	**100**	**36**	T	SR
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Presentase Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)**	**85**	**158.130.349,00**	**80**	**151.339.627,00**	**80**	**151.339.627,00**	**94**	**96**	**T**	T
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen yang disediakan (Buah)	3	4.207.500,00	0	4.193.500,00	0	4.193.500,00	-	**100**	-	T
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	-	0	-	0	-	-		-	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	29	35.161.790,00	29	35.161.790,00	29	35.161.790,00	**100**	**100**	T	**T**

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	3.943.659,00	0	3.926.500,00	0	3.926.500,00	-	**100**	-	T
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	286	114.817.400,00	286	108.057.837,00	286	108.057.837,00	**100**	**94**	T	T
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Presentase Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)**	**80**	**196.486.462,00**	**80**	**177.605.000,00**	**80**	**177.605.000,00**	**100**	**90**	**T**	**T**
1		10	5.203.000,00	0	3.100.000,00	0	3.100.000,00	-	**60**		**R**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	191.283.462,00	1	174.505.000,00	1	174.505.000,00	**100**	**91**	T	T
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor (%)**	**85**	**91.652.051,00**	**85**	**56.830.401,00**	**85**	**56.830.401,00**	**100**	**62**	**T**	**R**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	250.000,00	12	250.000,00	12	250.000,00	**100**	**100**	T	**T**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	91.402.051,00	24	56.580.401,00	24	56.580.401,00	**100**	**62**	T	**R**

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Bulan)	12	-	0	-	0	-	-	-		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase Barang Inventaris dalam kondisi baik (%)**	**80**	**35.579.360,00**		**31.320.620,00**		**31.320.620,00**	**-**	**88**		**T**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	26.288.960,00	7	23.220.620,00	7	23.220.620,00	**100**	**88**	T	T
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	8.100.000,00	0	8.100.000,00	0	8.100.000,00	-	**100**		T
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1.190.400,00	0	-	0	-	-	-		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat (%)**	**85**	**622.570.106,00**	**85**	**205.270.671,00**	**85**	**205.270.671,00**	**100**	**33**	**T**	**SR**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Persentase)**	**83**	**165.523.736,00**	**82**	**64.059.671,00**	**82**	**64.059.671,00**	**99**	**39**	**T**	**SR**

Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	79.430.000,00	12	31.574.671,00	12	31.574.671,00	**100**	**40**	T	**SR**
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	86.093.736,00	4	32.485.000,00	4	32.485.000,00	**100**	**38**	T	**SR**
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Presentase Sarana dan Prasarana pelayanan umum yang layak (%)**	**70**	**116.543.250,00**	**70**	**23.400.000,00**	**70**	**23.400.000,00**	**100**	**20**	**T**	**SR**
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	12	116.543.250,00	12	23.400.000,00	12	23.400.000,00	**100**	**20**	T	SR
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Jumlah Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0	-	0	-	0	-	-	-		

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada camat (%)**	**82**	**340.503.120,00**	**80**	**117.811.000,00**	**80**	**117.811.000,00**	**98**	**35**	**T**	**SR**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12	340.503.120,00	12	117.811.000,00	12	117.811.000,00	**100**	**35**	T	**SR**
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)**	**100**	**231.335.688,00**	**100**	**75.355.576,00**	**100**	**75.355.576,00**	**100**	**33**	**T**	**SR**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)**	**100**	**231.335.688,00**	**100**	**75.355.576,00**	**100**	**75.355.576,00**	**100**	**33**	**T**	**SR**
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga)	23	23.592.800,00	23	13.320.000,00	23	13.320.000,00	**100**	**56**	T	**SR**
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	207.742.888,00	4	62.035.576,00	4	62.035.576,00	**80**	**30**	T	SR

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban (%)**	**68**	**404.556.875,00**	**65**	**168.974.000,00**	**65**	**168.974.000,00**	**96**	**42**	**T**	SR
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)**	**100**	**404.556.875,00**	**65**	**168.974.000,00**	**65**	**168.974.000,00**	**65**	**42**	**R**	SR
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	347.929.375,00	12	113.004.000,00	12	113.004.000,00	**100**	**32**	T	SR
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1	56.627.500,00	1	55.970.000,00	1	55.970.000,00	**100**	**99**	T	T

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan (%)**	**100**	**193.905.507,00**	**0**	**98.171.500,00**	**0**	**98.171.500,00**	-	**51**		SR
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan (Kegiatan)**	**2**	**193.905.507,00**	**0**	**98.171.500,00**	**0**	**98.171.500,00**	-	**51**		SR
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar 1945 pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI(orang)	40	131.430.500,00	0	61.380.500,00	0	61.380.500,00	-	**47**		SR
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional(Orang)	60	62.475.007,00	0	36.791.000,00	0	36.791.000,00	-	**59**		SR

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu (%)**	**100**	**133.740.863,00**	**50**	**68.550.000,00**	**50**	**68.550.000,00**	**50**	**51**	**SR**	SR
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	**Jumlah Desa yang terfasilitasi (Desa)**	**22**	**133.740.863,00**	**22**	**68.550.000,00**	**22**	**68.550.000,00**	**100**	**51**	**T**	SR
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	22	80.929.315,00	22	39.052.000,00	22	39.052.000,00	**100**	**48**	**T**	SR
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	5	7.505.000,00	5	4.862.000,00	5	4.862.000,00	**100**	**65**	**T**	R
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	22	22.864.048,00	22	18.610.000,00	22	18.610.000,00	**100**	**81**	**T**	T
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			-	0	-	0	-	-			-
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	5	22.442.500,00	5	6.026.000,00	5	6.026.000,00	**100**	**27**	**T**	SR
SUB TOTAL KECAMATAN			**9.597.912.848,00**		**5.516.602.694,00**		**5.516.602.694,00**				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2025 (%)		Predikat	
1	2	3		4		5		6		7	
		K	RP	K	RP	K	RP	K	%	K	%
KELURAHAN LONG KALI			**Rp 2.247.099.447**		**Rp 430.296.809**		**Rp 430.296.809**				
			Rp 2.247.099.447		**Rp 430.296.809**		**Rp 430.296.809**				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**100**	**Rp 881.481.628**	**100**	**Rp 214.920.189**	**100**	**Rp 214.920.189**	**100**	**24**	**ST**	**SR**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu**	**100**	**Rp 5.576.634**	**80**	**Rp -**	**80**	**Rp -**	**80**	**0**	**T**	**-**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Rp 5.576.634	0	Rp -	0	Rp -	**0**	**0**	-	-

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase temuan ditindak lanjuti**	**100**	**Rp**	**393.751.600**	**100**	**Rp**	**118.639.710**	**100**	**Rp**	**118.639.710**	**100**	**30**	**ST**	**SR**
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	106	Rp	393.751.600	51	Rp	118.639.710	51	Rp	118.639.710	**48**	**30**	SR	SR
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**85**	**Rp**	**211.168.413**	**80**	**Rp**	**67.073.233**	**80**	**Rp**	**67.073.233**	**94**	**32**	**T**	**SR**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Rp	2.751.925	0		-	0		-	**48**	**0**	SR	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Rp	42.822.743	3	Rp	23.237.613	3	Rp	23.237.613	**60**	54	R	SR
	Jumlah kebutuhan ATK													
	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih													
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	Rp	15.424.745	0		-	0		-	0	0	-	-

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138	Rp	150.169.000	69	Rp	43.835.620	69	Rp	43.835.620	50	29	-	SR
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase barang inventaris dalam kondisi baik**	**15**	**Rp**	**197.861.181**	**1**	**Rp**	**16.671.600**	**1**	**Rp**	**16.671.600**	7	8	**SR**	**SR**
Pengadaaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	10	Rp	95.267.432	0		-	0		-	0	0	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	Rp	102.593.749	1		Rp16.671.600,00	1		Rp16.671.600,00	20	16	SR	SR
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Indeks Kepuasan Pelayanan di Sekretariat**	**124**	**Rp**	**65.323.800**	**62**	**Rp**	**12.535.646**	**62**	**Rp**	**12.535.646**	50	19	**SR**	**SR**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Rp	1.310.000	0		-	0		-	0	0	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp	53.723.800	6	Rp	12.535.646	6	Rp	12.535.646	50	23	SR	SR
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp	10.290.000	0		-	0		-	0	0	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang inventaris dalam kondisi baik**	**100**	**Rp**	**7.800.000**	**0**	**Rp**	**-**	**0**	**Rp**	**-**	0	0	-	-

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Rp 7.800.000	0	-	0	-	0	0	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase desa yang menyampaikan LKP Desa tepat waktu**	**85**	**Rp 492.460.922**	**50**	**Rp 129.934.000**	**50**	**Rp 129.934.000**	59	26	**SR**	**SR**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**83**	**Rp 30.745.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	**-**	**-**
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	Rp 30.745.772	0	-	0	-	0	0	-	-
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Presentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang Layak**	**85**	**Rp 461.715.150**	**50**	**Rp 129.934.000**	**50**	**Rp 129.934.000**	59	28	**SR**	**SR**

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	Rp	461.715.150	1	Rp	129.934.000	1	Rp	129.934.000	100	28	ST	SR
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru**	**100**	**Rp**	**860.646.897**	**50**	**Rp**	**85.442.620**	**50**	**Rp**	**85.442.620**	50	10	**SR**	**SR**
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Presentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Terlaksana**	**100**	**Rp**	**787.044.163**	**50**	**Rp**	**60.549.886**	**50**	**Rp**	**60.549.886**	50	8	**SR**	**SR**
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	Rp	6.321.936	1	Rp	2.621.886	1	Rp	2.621.886	100	41	ST	SR
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	3	Rp	208.059.523	0		-	0		-	0	0	-	-

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Rp	523.103.068	3	Rp	57.928.000	3	Rp	57.928.000	100	11	ST	SR
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1	Rp	49.559.636	0		-	0		-	0	0	-	-
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Presentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Terlaksana**	**100**	**Rp**	**73.602.734**	**50**	**Rp**	**24.892.734**	**50**	**Rp**	**24.892.734**	50	34	**SR**	**SR**
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Rp	73.602.734	1	Rp	24.892.734	1	Rp	24.892.734	100	34	ST	SR
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Presentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu**	**100**	**Rp**	**12.510.000**	**0**	**Rp**	-	**0**	**Rp**	-	0	0	-	-
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Desa yang terfasilitasi**	**22**	**Rp**	**12.510.000**	**0**		-	**0**		-	0	0	-	-

Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penempatan dan Penegasan Batas Desa	1	Rp 12.510.000	0	-	0	-	0	0	-	-
			Rp 2.247.099.447		**Rp 430.296.809**		**Rp 430.296.809**				

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Triwulan II Tahun 2025 dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga Triwulan II adalah 50,20%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 5.946.899.503 (Lima milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ratus ribu lima ratus tiga rupiah) dari total pagu RKPD sebesar Rp. 13.580.207.901 (Tiga belas milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus satu rupiah)
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Kantor Kecamatan Long Kali dengan predikat kinerja rendah, yaitu ≤60% untuk Triwulan II.

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Long Kali

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Paser, maka Kantor Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

Tugas : melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.

Fungsi :
1) pengoordinasian penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan otonomi daerah;
2) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa;
3) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4) pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
5) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

7) pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
8) pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan; dan
9) penyusunan program, pembinaan adminsitrasi dan pengelolaan ketatausahaan

Upaya Kantor Kecamatan Long Kali dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kantor Kecamatan Long Kali Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Kantor Kecamatan Long Kali terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Kantor Kecamatan Long Kali sampai dengan Triwulan II
Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator	TargetRenstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026		
Tujuan1: Mewujudkantata kelola pemerintahan yang responsif dantangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	60	65	70	75	80	-	-
Sasaran: 1).Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Jumlahtemuan penyimpangan pengelolaan BMDdan keuanganyang material dari BPK(Badan APIPEksternal)	0 temuan	0 temuan	0 temuan	0 temuan	0 temuan	0 temuan	50
	NilaiSAKIPdari Inspektorat	B	B	BB	BB	B	-	80
2).Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80	84	85	90	95	46,04	387,2
3).Meningkatnya lingkungan DaerahYang Kondusif	Angka Kriminalitas	52	51	50	49	48	-	-
Tujuan2: Meningkatnya kemandirian masyarakat desa	PersentaseDesa Mandiri di Wilayah Kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	-	-
Sasaran: Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	-

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Long Kali sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas"** memiliki 1 indikator kinerja yaitu *"Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi"*, belum mencapai target karena belum dilakukan penilaian mandiri atas pelaksanaan reformasi birokrasi, dimana realisasinya sebesar 0 dari target sebesar 82 dengan capaian kinerja sebesar 0,00%.
b. Tujuan **"Meningkatnya kemandirian masyarakat desa"** memiliki 1 indikator kinerja yaitu *"Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan"*, belum mencapai target karena belum dilakukan penilaian atas desa mandiri, dimana realisasinya sebesar 0% dari target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar

0,00%.

c. Sasaran **"Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah"** memiliki 2 indikator kinerja yaitu *"Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK (Badan APIP Eksternal)"*, telah mencapai target, dimana realisasinya tidak ada temuan penyimpangan atau sebesar 0 temuan dari target sebesar 0 temuan dengan capaian kinerja sebesar 50%; dan indikator *"Nilai SAKIP dari Inspektorat"*, belum mencapai target karena belum dilakukan penilaian SAKIP oleh Inspektorat dimana realisasinya 0 dari target B dengan capaian kinerja sebesar 80%.
d. Sasaran **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan"** memiliki 1 indikator kinerja yaitu *"Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat"*, belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 46,04 (mutu pelayanan tidak baik) dari target sebesar 80 dengan capaian kinerja sebesar 50%.
e. Sasaran **"Meningkatnya lingkungan Daerah yang Kondusif"** memiliki 1 indikator kinerja yaitu *"Angka Kriminalitas"*, belum mencapai target, dimana realisasinya belum terukur karena belum dilakukan pengukuran tingkat kriminalitas dari target sebesar 52 dengan capaian kinerja sebesar 0,00%.
f. Sasaran **"Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan"** memiliki 1 indikator kinerja yaitu *"Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan"*, telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Periode April 2025 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan.
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.

3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai.
4. Tersedianya SOP pelayanan.

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai jadwal.
2. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan perangkat daerah.
3. Perubahan pejabat/personil sehubungan dengan adanya pergantian pejabat.
4. Pelaksanaan kegiatan OPD belum sepenuhnya mengacu pada anggaran kas yang telah disusun.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Rancangan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2025.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Long Kali sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang kewilayahan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2025-2029. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser mengalami Perubahan sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Target Tahunan Tujuan dan Sasaran

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Renja 2025	Perubahan Renja 2025
Tujuan 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		60	60
Sasaran: 1). Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP dari Inspektorat	Nilai hasil evaluasi SAKIP atas Implementasi Sistem Akuntabilitas	BB	BB
2).Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil penghitungan survey indeks kepuasan masyarakat setiap tahun	82	82
3).Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	jumlah kriminalitas setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun ybs dikalikan 100.000	52	52
Tujuan 2: Meningkatnya kemandirian masyarakat desa	Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan		100 persen	100 persen
Sasaran: Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan dibagi jumlah desa/kelurahan	100 persen	100 persen

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Kantor Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Tahun 2025 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan target kinerja dan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025, hal ini dikarenakanperubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 yaitu "PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**"** yang dijabarkan ke dalam 4 (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Penguatan Ekonomi Daerah.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Long Kali mendukung pencapaian sasaran ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-10, yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

3. Meningkatnya lingkungan Daerah yang Kondusif
4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Kantor Kecamatan Long Kali telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan Tujuan, sasaran dan indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Review terhadap Renja Perubahan RKPD Tahun 2025 Kantor Camat Long Kali

Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	**Program Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja Program**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja Program**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kantor Camat Long Kali				**10.303.531.993,00**	Kantor Camat Long Kali				10.974.563.840,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**10.303.531.993,00**	UNSUR KEWILAYAHAN				10.974.563.840,00	
	KECAMATAN				**10.303.531.993,00**	KECAMATAN				10.974.563.840,00	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai Evaluasi SAKIP**	**70 Angka**	**8.245.200.637,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai Evaluasi SAKIP**	**70 Angka**	**8.857.363.859,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi (Persen)**	**80 Persen**	**22.112.900,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi (Persen)**	**80 Persen**	**39.141.350,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali		5 Dokumen	27.240.450,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali		5 Dokumen	27.558.450,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	16.902.900,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	11.582.900,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Presentase Temuan yang di Tindaklanjuti**	**100 Persen**	**7.451.301.805,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Presentase Temuan yang di Tindaklanjuti**	**100 Persen**	**7.482.834.740,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	7.240.061.294,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	7.240.061.294,0 0	

	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	324 Dokumen	170.801.640,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	409 Dokumen	235.619.574,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14.475.806,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.153.872,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Presentase Rata-rata capaian IKI >80**	**85 Persen**	**150.471.800,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Presentase Rata-rata capaian IKI >80**	**85 Persen**	**170.943.531,00**	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	124.254.268,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	170.943.531,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi perkantoran (Persen)**	**80 Persen**	**276.891.408,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi perkantoran (Persen)**	**80 Persen**	**341.722.341,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser, Long Kali, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.415.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser, Long Kali, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.415.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	29 Paket	39.074.908,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	29 Paket	39.074.908,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7.887.318,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7.887.318,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	286 Laporan	166.817.400,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	415 Laporan	286.345.115,00	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase barang inventaris dalam kondisi baik (Persen)**	**80 Persen**	**196.486.462,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase barang inventaris dalam kondisi baik (Persen)**	**80 Persen**	**368.892.537,00**	
	Pengadaan Mebel	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5.203.000,00	Pengadaan Mebel	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit	30.203.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	191.283.462,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	338.689.537,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan (Persen)**	**85 Persen**	**91.652.051,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan (Persen)**	**85 Persen**	**103.250.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	250.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	250.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	196.953.831,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	103.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Presentase Barang Inventaris dalam kondisi baik**	**80 %**	**35.579.360,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Presentase Barang Inventaris dalam kondisi baik**	**80 %**	**350.579.360,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	26.288.960,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	26.288.960,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	8.100.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	8.100.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.190.400,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	316.190.400,00	

2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Presentase layanan administrasi yang diselesaikan sesuai SOP**	**85 Persen**	**677.631.828,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Presentase layanan administrasi yang diselesaikan sesuai SOP**	**85 Persen**	**513.819.788,00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**85 %**	**194.447.472,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**85 %**	**219.258.418,00**	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	94.930.000,00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	156.171.760,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	107.089.208,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	63.086.658,00	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		**Presentase Sarana dan Prasarana pelayanan umum yang layak**	**70 %**	**118.509.500,00**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		**Presentase Sarana dan Prasarana pelayanan umum yang layak**	**70 %**	**49.878.250,00**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	118.509.500,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	49.878.250,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Persen)**	**83 Persen**	**365.866.700,00**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Persen)**	**83 Persen**	**244.683.120,00**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	357.103.120,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	244.683.120,00	

3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100 %**	**306.870.065,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100 %**	**676.804.749,00**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana**	**100 %**	**424.401.377,00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana**	**100 %**	**676.804.749,00**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23 Lembaga Kemasyarakatan	43.394.400,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23 Lembaga Kemasyarakatan	24.394.400,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	263.475.665,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	652.410.349,00	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan diwilayah Kecamatan**	**65 %**	**469.515.625,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan diwilayah Kecamatan**	**65 %**	**214.068.875,00**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kerentraman dan Ketertiban Umum**	**65 %**	**487.113.750,00**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kerentraman dan Ketertiban Umum**	**65 %**	**214.068.875,00**	
	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	**12 Laporan**	**373.858.750,00**	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	**12 Laporan**	157.441.375,00	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	83.627.500,00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	56.627.500,00	

5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Presentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan diwilayah Kecamatan (%)**	**65 Persen**	**402.409.249,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Presentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan diwilayah Kecamatan (%)**	**65 Persen**	**415.244.545**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan**	**2 Kegiatan**	**274.070.042,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan**	**2 Kegiatan**	**415.244.545**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40 Orang	257.417.228,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40 Orang	270.252.524,00	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60 Orang	144.992.021,00	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60 Orang	144.992.021,00	

6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Presentase desa yang menerapkan administrasi desa sesuai ketentuan**	**50 Persen**	**201.904.589,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Presentase desa yang menerapkan administrasi desa sesuai ketentuan**	**50 Persen**	**297.262.024,00**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase desa yang menyampaikan laporan tepat waktu**	**70 %**	**200.281.726,00**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase desa yang menyampaikan laporan tepat waktu**	**70 %**	**297.262.024,00**	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	22 Dokumen	99.491.945,00	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	22 Dokumen	86.222.630,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan	5 Dokumen	22.515.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan	5 Dokumen	53.029.750,00	

			Desa					Desa			
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 Dokumen	38.172.144,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 Dokumen	62.684.144,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0,00	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	00	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5 Dokumen	41.725.500,00	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5 Dokumen	95.325.500,00	
					10.303.531.993,00					**10.974.563.840,00**	

Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	**Program Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja program**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja program**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kelurahan Longkali				**2.247.099.447,00**	**Kelurahan Longkali**				**2.605.644.061,00**	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2.247.099.447,00**	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.605.644.061,00**	
	KECAMATAN				**2.247.099.447,00**	**KECAMATAN**				**2.605.644.061,00**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**.Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**85 %**	**881.481.628,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**.Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**85 %**	1.006.911.609,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu**	**100 %**	**5.576.634,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu**	**100 %**	**5.576.634,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.576.634,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.576.634,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Presentase Temuan yang ditindaklanjuti**	**100 %**	393.751.600,00	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Presentase Temuan yang ditindaklanjuti**	**100 %**	**232.271.600,00**	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	106 Dokumen	393.751.600,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	106 Dokumen	232.271.600,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Presentase Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**80 %**	211.168.413,00	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Presentase Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**80 %**	**306.547.413,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	2.751.925,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	2.751.925,00	

	Bangunan Kantor		Bangunan Kantor yang Disediakan			Bangunan Kantor		Disediakan			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	42.822.743,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	78.081.743,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.424.745,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.424.745,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Long Kali, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163 Laporan	150.169.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Long Kali, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163 Laporan	210.289.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Presentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik**	**80 %**	197.861.181,00	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Presentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik**	**80 %**	**222.695.962,00**	
	Pengadaan Mebel	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	95.267.432,00	Pengadaan Mebel	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	95.267.432,00	
	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya yang disediakan.	5 Unit	102.593.749	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya yang disediakan.	5 Unit	127.428.530,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Presentase penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor**	**85 %**	65.323.800,00	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Presentase penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor**	**85 %**	**232.020.000,00**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	1.310.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	1.310.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	53.723.800,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.420.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	10.290.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	190.290.000,00	

			Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		**Presentase Barang Inventaris dalam kondisi**	**80 %**	7.800.000,00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**		**Presentase Barang Inventaris dalam kondisi baik**	**80 %**	**7.800.000,00**	
	Pemerintahan Daerah		**baik**			**Daerah**					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	7.800.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	7.800.000,00	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Kecamatan**	**85 %**	492.460.922,00	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Kecamatan**	**85 %**	**515.660.922,00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**85 %**	30.745.772,00	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**85 %**	**30.745.772,00**	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	30.745.772,00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	30.745.772,00	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		**Presentase Sarana dan Prasarana pelayanan umum yang layak**	**80 %**	461.715.150,00	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		**Presentase Sarana dan Prasarana pelayanan umum yang layak**	**80 %**	**484.915.150,00**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan	1 Dokumen	461.715.150,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1 Dokumen	484.915.150,00	

	Umum		Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					Pelayanan Umum			
3	**PROGRAM**		**Persentase**	**100 %**	860.646.897,00	**PROGRAM**		**Persentase lembaga**	**100 %**	**1.070.561.530,00**	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**lembaga kemasyarakatan yang aktif**			**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**kemasyarakatan yang aktif**			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana**	**100 %**	73.602.734,00	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana**	**100 %**	**73.602.734,00**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	73.602.734,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	73.602.734,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana**	**100 %**	787.044.163,00	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana**	**100 %**	**996.958.796,00**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan	6.321.936,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan	6.275.415,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	208.059.523,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	230.991.097,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	523.103.068,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	710.132.648,00	
	Evaluasi Kelurahan	Kab. Paser, Long Kali,	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	1 Laporan	49.559.636,00	Evaluasi Kelurahan	Kab. Paser, Long Kali, Long	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	49.559.636,00	

		Long Kali	Kelurahan				Kali				
4	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu**	**100 %**	12.510.000,00	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu**	**100 %**	**12.510.000,00**	

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Jumlah Desa yang terfasilitasi**	**22 Desa**	12.510.000,00	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Jumlah Desa yang terfasilitasi**	**22 Desa**	**12.510.000,00**	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	12.510.000,00	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	12.510.000,00	
					2.247.099.447,00					**2.605.644.061,00**	

3.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Renja Perubaha RKPD-P 2025 tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kantor Kecamatan Long Kali baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Paser.

Tabel. 3.3

Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tahun 2025 pada Kantor Kecamatan Long Kali

No	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Nama OPD										
	Urusan ……..										
1	Program …..										
	Kegiatan ….										
	Sub Kegiatan										
2.	Program …..										
	Kegiatan ….										
	Sub Kegiatan										
2.	Program …..										
	Kegiatan ….										
	Sub Kegiatan										

3.4. Penetapan Program dan Kegiatan Renja Perubahan PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2025, maka pada dokumen Rencana Kerja Perubahan Kantor Camat Long Kali Tahun 2025 ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kantor Kecamatan Long Kali pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Kecamatan Long Kali Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kantor Camat Long Kali							7.238.226.733,00	10.289.186.353,00	10.303.531.993,00							9.780.010.350,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							7.238.226.733,00	10.289.186.353,00	10.303.531.993,00							9.780.010.350,00	
	7	01				KECAMATAN							7.238.226.733,00	10.289.186.353,00	10.303.531.993,00							9.780.010.350,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP				-	70 Angka	5.845.540.776,00	8.224.495.786,00	8.245.200.637,00							7.685.157.950,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi (Persen)	-			-	80 Persen	21.845.300,00	22.112.900,00	22.112.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Longkali		27.300.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	10.576.700,00	10.844.300,00	27.240.450,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			12.650.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	11.268.600,00	11.268.600,00	16.902.900,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			14.650.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Temuan yang di Tindaklanjuti	-			-	100 Persen	5.386.757.858,00	7.451.301.805,00	7.451.301.805,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Long Kali		6.808.548.250,00	KANTOR CAMAT LONG KALI

	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	5.195.915.018,00	7.240.061.294,00	7.240.061.294,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			6.572.321.550,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				324 Dokumen	324 Dokumen	178.576.640,00	198.576.640,00	170.801.640,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			215.970.500,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.266.200,00	12.663.871,00	14.475.806,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			20.256.200,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Rata-rata capaian IKI >80	-			-	85 Persen	89.356.000,00	150.471.800,00	150.471.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Long Kali		106.490.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	89.356.000,00	150.471.800,00	124.254.268,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			106.490.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI

	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi perkantoran (Persen)	-			-	80 Persen	247.008.618,00	276.891.408,00	276.891.408,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Long Kali		331.050.700,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4.207.500,00	4.207.500,00	8.415.000,00	Kab. Paser, Long Kali, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			8.207.500,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			12.275.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				29 Paket	29 Paket	21.524.000,00	35.161.790,00	39.074.908,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			34.450.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.642.318,00	7.887.318,00	7.887.318,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			10.228.200,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				286 Laporan	286 Laporan	218.634.800,00	229.634.800,00	166.817.400,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			265.890.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI

	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik (Persen)	-			-	80 Persen	0,00	196.486.462,00	196.486.462,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Long Kali		175.085.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	5.203.000,00	5.203.000,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			49.525.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	191.283.462,00	191.283.462,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			125.560.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan (Persen)	-			-	85 Persen	79.814.000,00	91.652.051,00	91.652.051,00			-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Long Kali		122.080.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			1.500.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI

	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	79.564.000,00	91.402.051,00	196.953.831,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			120.580.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Inventaris dalam kondisi baik	-			80 %	80 %	20.759.000,00	35.579.360,00	35.579.360,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Long Kali		114.604.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	17.099.000,00	26.288.960,00	26.288.960,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			27.544.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	3.660.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			8.740.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	1.190.400,00	1.190.400,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			78.320.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase layanan administrasi yang diselesaikan sesuai SOP				85 %	85 Persen	597.285.520,00	678.823.672,00	677.631.828,00							772.874.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI

	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-			85 %	85 %	170.289.800,00	194.447.472,00	194.447.472,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Long Kali		238.089.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	73.970.000,00	93.060.000,00	94.930.000,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			112.870.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	96.319.800,00	101.387.472,00	107.089.208,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			125.219.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Presentase Sarana dan Prasarana pelayanan umum yang layak	-			70 %	70 %	116.639.500,00	118.509.500,00	118.509.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Long Kali		124.890.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	116.639.500,00	118.509.500,00	118.509.500,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			124.890.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI

	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Persen)	-			-	83 Persen	310.356.220,00	365.866.700,00	365.866.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Long Kali		409.895.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	12 Laporan	310.356.220,00	365.866.700,00	357.103.120,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			409.895.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif				100 %	100 %	174.758.711,00	424.401.377,00	306.870.065,00							506.285.300,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	-			100 %	100 %	174.758.711,00	424.401.377,00	424.401.377,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Long Kali		506.285.300,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				23 Lembaga Kemasyarakatan	23 Lembaga Kemasyarakatan	24.468.024,00	31.390.600,00	43.394.400,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			56.192.500,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	12 Laporan	150.290.687,00	393.010.777,00	263.475.665,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			450.092.800,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada yang				100 %	65 %	361.853.750,00	487.113.750,00	469.515.625,00							459.236.100,00	

	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kerentraman dan Ketertiban Umum	-			100 %	65 %	361.853.750,00	487.113.750,00	487.113.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Long Kali		459.236.100,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	349.958.750,00	373.858.750,00	385.888.125,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			367.459.600,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	11.895.000,00	113.255.000,00	83.627.500,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			91.776.500,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase kasus konflik sosial yang tertangani/tersel esaikan diwilayah Kecamatan (%)				100 %	65 Persen	90.299.500,00	274.070.042,00	402.409.249,00							140.835.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	-			2 Kegiatan	2 Kegiatan	90.299.500,00	274.070.042,00	274.070.042,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Long Kali		140.835.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara				40 Orang	40 Orang	40.244.500,00	166.720.028,00	257.417.228,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			70.025.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI

	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas				60 Orang	60 Orang	50.055.000,00	107.350.014,00	144.992.021,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			70.810.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase desa yang menerapkan administrasi desa sesuai ketentuan				-	50 Persen	168.488.476,00	200.281.726,00	201.904.589,00							215.622.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan tepat waktu	-			100 %	70 %	168.488.476,00	200.281.726,00	200.281.726,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Pemerintah Desa		215.622.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				22 Dokumen	22 Dokumen	91.158.630,00	94.658.630,00	99.491.945,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			95.789.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	11.468.750,00	15.010.000,00	22.515.000,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			13.519.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				22 Dokumen	22 Dokumen	36.876.096,00	45.728.096,00	38.172.144,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			40.519.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI

	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			0,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	28.985.000,00	44.885.000,00	41.725.500,00	Kab. Paser, Long Kali, Long Kali	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik			65.795.000,00	KANTOR CAMAT LONG KALI
	J U M L A H												**7.238.226.733,00**	**10.289.186.353,00**	**10.303.531.993,00**							**9.780.010.350,00**	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Kantor Camat Long Kali Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perubahan (OPD) Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kantor Kecamatan Long Kali mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Long Kali, September 2025

CAMAT



M. ARFAH, S.STP

NIP. 19850811 200312 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN BATU SOPANG

PERUBAHAN RENCANA KINERJA(RENJA) TAHUN 2025

"Olo Manin Aso Buen Siolondo"
Hari Esok Lebih Baik dari Hari Ini

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Perkenan-Nya Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Sopang Tahun 2025, dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan. Sesuai dengan kedudukannya, dokumen ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja di Tahun 2025 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran di Tahun 2025. Sedangkan sasarannya adalah terjabarkannya Rencana Strategis Kecamatan Batu Sopang Tahun 2021 – 2026 khususnya Rencana Kerja di Tahun 2025.

Rencana Kerja ini memuat Program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025. Semoga Perubahan Rencana Kerja ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II TAHUN 2025 ..... **9**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Batu Sopang 22

2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Kecamatan Batu Sopang Triwulan II Tahun 2025 24

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN **26**

3.1 Tujuan dan Sasaran 26

3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 28

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan PD Tahun 2025 32

PENUTUP **37**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangkapendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Batu Sopang Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Kantor Camat Batu Sopang Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Renstra Kantor Camat Batu Sopang Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kantor Camat Batu Sopang hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kantor Camat Batu Sopang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Renja Kantor Camat Batu Sopang Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Camat Batu Sopang Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
22. Peraturan Bupati Paser Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser;
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024
25. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Tanggal 20 September 2024
26. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah.
27. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Tanggal 20 September 2024.
28. Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 100.3.3.2/KEP-741/2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Kantor Kecamatan Batu Sopang, proses penyusunan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Batu Sopang, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Kantor Kecamatan Batu Sopang, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025 Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2025 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Batu SopangMenyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025 Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2025.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TW II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kantor Camat Batu Sopang maka melalui APBD Kabupaten Paser tahun 2025 (Anggaran Pergeseran) disediakan dana sebesar Rp 6.957.803.973,00 (Enam Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah). Adapun Realisasi Anggaran Kantor Camat Batu Sopang TW II tahun 2025 sebesar Rp 2.459.695.286,00 (Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 35,38 % dari pagu yang tersedia.

Berikut akan disajikan Tabel Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Batu Sopang tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatab Batu Sopang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahhun – tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Batu Sopang tahun berjalan (Tahun 2025). Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Batu Sopang sampai dengan tahun 2025, disajikan sebagaimana table 1 berikut:

Pencapaian Target Kinerja dan Anggaran secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 2.2

IKHTISAR REALISASI ANGGARAN TARGET KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT BATU SOPANG TAHUN 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KEUANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PenyusunanDokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,00	0
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,00	0
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dantunjangan ASN	61.34	38,72
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	50,00	46,87
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	50,00	0
		Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	50,00	20.81
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	66,67	0
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,00	4,64
			Penyelenggaraan rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,00	53,04
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50,00	31,34

			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	50,00	34,36
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	50,00	49,96
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,00	49,74
			Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50,00	10,64
2	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	50,00	26.87
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	50,00	31.05
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	50,00	19.17
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifiitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50,00	2.46
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50,00	93.02
		Koordinasi upaya	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50,00	33,64

4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50,00	0
		Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	50,00	40,45
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umumsesuai penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50,00	0
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50,00	0
			Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	44,44	35,34
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	55,56	0
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	50,00	30,38
			Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya	50	0
			Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas	50	0

			Desa		
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	55,56	0

Adapun hasil analisa yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja dan keuangan dapat dikategorikan sebagai berikut :

1) **Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:**

Secara keseluruhan program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 TW II telah memenuhi target kinerja yang direncanakan. Adapun realisasi capaian program yang telah memenuhi target kinerja dan keuangan adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KEUANGAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,00	0
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,00	0
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dantunjangan ASN	61.34	38,72
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	50,00	46,87
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	50,00	0

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	50,00	20.81
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	66,67	0
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,00	4,64
			Penyelenggaraan rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,00	53,04
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50,00	31,34
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	50,00	34,36
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	50,00	49,96
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,00	49,74
			Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50,00	10,64
2	PROGRAM PENYELENGG ARAAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	50,00	26.87
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	50,00	31.05

	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	50,00	19.17
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifiitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50,00	2.46
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50,00	93.02
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50,00	33,64
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50,00	0
		Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	50,00	40,45
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50,00	0

5	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umumsesuai penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50,00	0
			Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	44,44	35,34
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	55,56	0
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	50,00	30,38
			Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya	50	0
			Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	50	0
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	55,56	0

2) Faktor penyebab keberhasilan

- Faktor penyebab keberhasilan:

Secara umum tidak ada hambatan dan kendala yang berarti dalam pencapaian target kinerja dan keuangan.

Keberhasilan capaian kinerja dan keuangan yang dicapai disebabkan karena pelaksanaan program maupun kegiatan dibarengi dengan peng-spj-an yang tepat waktu

3) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi atau dampak langsung yang timbul dari pencapaian target realisasi capaian kinerja terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan desa/kelurahan
- Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis
- Terselenggaranya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Meningkatnya Keberdayaan masyarakat perdesaan
- Meningkatnya percepatan pembangunan kecamatan

4) Kebijakan untuk menindaklanjuti kegagalan pencapaian target

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk mengantisipasi kegagalan pencapaian kinerjaprogram/kegiatan adalah:

- Dengan melakukan perencanaan dan penganggaran yang lebihmatang
- Melakukan efisiensi serta efektifitas anggaran yang disesuaikandengan kebutuhan di lapangan.
- Evaluasi dan estimasi serapan anggaran secara berkala sebagai bahan pertimbangan pada saat penyusunan anggaran perubahan di tahun berjalan.Sehingga tidak terjadi kelebihan anggaran di satu program atau kegiatan yang pada akhirnya tidak mampu terserap secara maksimal.

- Perlu adanya pembinaan dan peningkatan keterampilan serta kompetensi aparatur Kecamatan
- Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana serta pembuatan aplikasi pelayanan guna peningkatan kualitas pelayanan di Kecamatan

TC. 29 Rincian ikhtisar realisasi anggaran target kinerja keuangan pada Kantor Kecamatan Sopang dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi (Efisiensi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV						
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	Kantor Camat Batu Sopang			**Rp 6,957,803,973**						**Rp -**		**Rp -**		**Rp 2,459,695,286**			
	Kantor Camat Batu Sopang			**Rp 6,957,803,973**						**Rp -**		**Rp -**		**Rp 2,459,695,286**			
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**76**	**Rp 5,426,008,734**	**16**	**Rp 844,966,020**	**22**	**Rp 1,250,090,608**					**38**	**Rp 2,095,056,628**	**50.00**	**38.61**	**Kantor Camat Batu Sopang**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu**	**80**	**Rp 8,979,300**	**20**	**Rp -**	**20**	**Rp -**					**40**	**Rp -**	**50.00**	**0.00**	**Kantor Camat Batu Sopang**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Rp 2,816,000	2	Rp -	1	Rp -					3	Rp -	50.00	0.00	Kantor Camat Batu Sopang
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Rp 6,163,300	1	Rp -	1	Rp -					2	Rp -	50.00	0.00	Kantor Camat Batu Sopang
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase temuan ditindak lanjuti**	**85**	**Rp 4,988,668,983**	**25**	**Rp 754,978,478**	**18**	**Rp 1,188,731,679**					**43**	**Rp 1,943,710,157**	**50.00**	**38.96**	**Kantor Camat Batu Sopang**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238	Rp 4,831,704,812	48	Rp 722,072,278	98	Rp 1,148,694,038					146	Rp 1,870,766,316	61.34	38.72	Kantor Camat Batu Sopang
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	125	Rp 155,614,171	25	Rp 32,906,200	38	Rp 40,037,641					63	Rp 72,943,841	50.00	46.87	Kantor Camat Batu Sopang
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Rp 1,350,000	0	Rp -	1	Rp -					1	Rp -	50.00	0.00	Kantor Camat Batu Sopang
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Presentase rata rata capaian IKI dengan nilai ≥ 75**	**75**	**Rp 24,359,505**	**15**	**Rp 5,068,000**	**23**	**Rp -**					**38**	**Rp 5,068,000**	**50.00**	**20.81**	**Kantor Camat Batu Sopang**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15	Rp 24,359,505	3	Rp 5,068,000	5	Rp -					8	Rp 5,068,000	50.00	20.81	Kantor Camat Batu Sopang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**100**	**Rp 123,066,700**	**25**	**Rp 30,950,020**	**25**	**Rp 22,776,956**					**50**	**Rp 53,726,976**	**50.00**	**43.66**	**Kantor Camat Batu Sopang**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Rp 3,305,199	0	Rp -	2	Rp -					2	Rp -	66.67	0.00	Kantor Camat Batu Sopang
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26	Rp 20,233,902	0	Rp -	13	Rp 938,256					13	Rp 938,256	50.00	4.64	Kantor Camat Batu Sopang
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Rp 99,527,599	25	Rp 30,950,020	25	Rp 21,838,700					50	Rp 52,788,720	50.00	53.04	Kantor Camat Batu Sopang
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase barang inventaris dalam kondisi baik**	**100**	**Rp 181,000**	**0**	**Rp -**	**50**	**Rp -**					**50**	**Rp -**	**50.00**	**0.00**	**Kantor Camat Batu Sopang**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Rp 181,000	0	Rp -	3	Rp -					3	Rp -	60.00	0.00	Kantor Camat Batu Sopang

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Indeks Kepuasan Pelayanan di Sekretariat**	**85**	**Rp**	**234,283,000**	**0**	**Rp**	**46,877,884**	**42**	**Rp**	**31,449,372**					**42**	**Rp**	**78,327,256**	**49.41**	**33.43**	**Kantor Camat Batu Sopang**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Rp	71,883,000	3	Rp	9,677,884	3	Rp	12,849,372					6	Rp	22,527,256	50.00	31.34	Kantor Camat Batu Sopang
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp	162,400,000	1	Rp	37,200,000	5	Rp	18,600,000					6	Rp	55,800,000	50.00	34.36	Kantor Camat Batu Sopang
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang inventaris dalam kondisi baik**	**85**	**Rp**	**46,470,246**	**15**	**Rp**	**7,091,638**	**28**	**Rp**	**7,132,601**					**43**	**Rp**	**14,224,239**	**50.00**	**30.61**	**Kantor Camat Batu Sopang**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Rp	11,520,000	2	Rp	5,754,910	1	Rp	-					3	Rp	5,754,910	50.00	49.96	Kantor Camat Batu Sopang
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19	Rp	12,150,000	0	Rp	-	10	Rp	6,043,500					10	Rp	6,043,500	50.00	49.74	Kantor Camat Batu Sopang
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Rp	22,800,246	1	Rp	1,336,728	1	Rp	1,089,101					2	Rp	2,425,829	50.00	10.64	Kantor Camat Batu Sopang
2	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang menyampaikan LKP Desa tepat waktu**	**100**	**Rp**	**114,677,200**	**25**	**Rp**	**19,200,000**	**25**	**Rp**	**4,800,000**					**50**	**Rp**	**24,000,000**	**50.00**	**20.93**	**Kantor Camat Batu Sopang**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Desa yang terfasilitasi**	**9**	**Rp**	**114,677,200**	**1**	**Rp**	**19,200,000**	**4**	**Rp**	**4,800,000**					**5**	**Rp**	**24,000,000**	**50.00**	**20.93**	**Kantor Camat Batu Sopang**
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa	9	Rp	27,076,000	0	Rp	-	5	Rp	-					5	Rp	-	55.56	0.00	Kantor Camat Batu Sopang
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9	Rp	79,004,000	1	Rp	19,200,000	4	Rp	4,800,000					5	Rp	24,000,000	50.00	30.38	Kantor Camat Batu Sopang
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9	Rp	5,425,000	0	Rp	-	5	Rp	-					5	Rp	-	55.56	0.00	Kantor Camat Batu Sopang
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2	Rp	2,283,000	0	Rp	-	1	Rp	-					1	Rp	-	50.00	0.00	Kantor Camat Batu Sopang
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9	Rp	889,200	0	Rp	-	5	Rp	-					5	Rp	-	50.00	0.00	Kantor Camat Batu Sopang
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan**	**80**	**Rp**	**701,672,228**	**20**	**Rp**	**126,800,000**	**30**	**Rp**	**38,404,050**					**50**	**Rp**	**165,204,050**	**62.50**	**23.54**	**Kantor Camat Batu Sopang**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100**	**Rp**	**123,220,000**	**20**	**Rp**	**28,400,000**	**30**	**Rp**	**4,706,000**					**50**	**Rp**	**33,106,000**	**50.00**	**26.87**	**Kantor Camat Batu Sopang**
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	258	Rp	123,220,000	58	Rp	28,400,000	71	Rp	4,706,000					129	Rp	33,106,000	50.00	26.87	Kantor Camat Batu Sopang
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100**	**Rp**	**178,684,199**	**25**	**Rp**	**35,200,000**	**25**	**Rp**	**20,281,050**					**50**	**Rp**	**55,481,050**	**50.00**	**31.05**	**Kantor Camat Batu Sopang**
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4	Rp	178,684,199	1	Rp	35,200,000	1	Rp	20,281,050					2	Rp	55,481,050	50.00	31.05	Kantor Camat Batu Sopang
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada camat**	**100**	**Rp**	**399,768,029**	**25**	**Rp**	**63,200,000**	**25**	**Rp**	**13,417,000**					**50**	**Rp**	**76,617,000**	**50.00**	**19.17**	**Kantor Camat Batu Sopang**

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	Rp	399,768,029	1	Rp	63,200,000	1	Rp	13,417,000					2	Rp	76,617,000	50.00	19.17	Kantor Camat Batu Sopang
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban**	**65**	**Rp**	**384,922,597**	**15**	**Rp**	**93,600,000**	**17**	**Rp**	**35,970,608**					**32**	**Rp**	**129,570,608**	**49.23**	**33.66**	**Kantor Camat Batu Sopang**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**Rp**	**360,334,098**	**25**	**Rp**	**93,600,000**	**25**	**Rp**	**26,024,608**					**50**	**Rp**	**119,624,608**	**50.00**	**33.20**	**Kantor Camat Batu Sopang**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Rp	355,558,099	1	Rp	93,600,000	5	Rp	26,024,608					6	Rp	119,624,608	50.00	33.64	Kantor Camat Batu Sopang
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5	Rp	4,775,999	0	Rp	-	3	Rp	-					3	Rp	-	50.00	0.00	Kantor Camat Batu Sopang
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	**Presentase penyelenggaraan Penerapan dan PenegakanPeraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100**	**Rp**	**24,588,499**	**0**	**Rp**	**-**	**50**	**Rp**	**9,946,000**					**50**	**Rp**	**9,946,000**	**50.00**	**40.45**	**Kantor Camat Batu Sopang**
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan koordinasi bidang penegakkan peraturan yang dilaksanakan	12	Rp	24,588,499	0	Rp	-	6	Rp	9,946,000					6	Rp	9,946,000	50.00	40.45	Kantor Camat Batu Sopang
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan**	**100**	**Rp**	**203,034,222**	**25**	**Rp**	**24,914,000**	**25**	**Rp**	**1,631,000**					**50**	**Rp**	**26,545,000**	**50.00**	**13.07**	**Kantor Camat Batu Sopang**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**Rp**	**203,034,222**	**25**	**Rp**	**24,914,000**	**25**	**Rp**	**1,631,000**					**50**	**Rp**	**26,545,000**	**50.00**	**13.07**	**Kantor Camat Batu Sopang**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60	Rp	74,732,922	0	Rp	-	30	Rp	-					30	Rp	-	50.00	0.00	Kantor Camat Batu Sopang
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	65	Rp	53,181,300	0	Rp	-	33	Rp	-					33	Rp	-	50.00	0.00	Kantor Camat Batu Sopang
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Kantor Camat Batu Sopang)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	9	Rp	75,120,000	1	Rp	24,914,000	3	Rp	1,631,000					4	Rp	26,545,000	44.44	35.34	Kantor Camat Batu Sopang
6	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru**	**85**	**Rp**	**127,488,992**	**0**	**Rp**	**-**	**43**	**Rp**	**19,319,000**					**43**	**Rp**	**19,319,000**	**50.00**	**15.15**	**Kantor Camat Batu Sopang**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana**	**87**	**Rp**	**127,488,992**	**0**	**Rp**	**-**	**44**	**Rp**	**19,319,000**					**44**	**Rp**	**19,319,000**	**50.00**	**15.15**	**Kantor Camat Batu Sopang**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Rp	17,865,800	0	Rp	-	3	Rp	16,619,000					3	Rp	16,619,000	50.00	93.02	Kantor Camat Batu Sopang
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Rp	109,623,192	0	Rp	-	2	Rp	2,700,000					2	Rp	2,700,000	50.00	2.46	Kantor Camat Batu Sopang
		Rata-rata capaian kinerja (%)				**17.32%**		**14.78%**	**33.99%**		**17.98%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**51.31%**		**32.76%**			
		Predikat Kinerja																			

2.2 Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Kecamatan Batu Sopang, merupakan lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Di sisi lain, Kabupaten Paser sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara, merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Paser dan masyarakat Kecamatan Batu Sopang khususnya.

Kecamatan Batu Sopang selaku lembaga teknis di bidang perencanaan harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dappat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/implementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah – ubahnya regulasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Kecamatan Batu Sopang yang berfungsi sebagai Peranggkat Daerah Koordinatif dan pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelatyanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Batu Sopang dapat dicapai bila indeks kepuasan masyarakat tercapai sesuai dengan target RPJMD Kanbupataen Paser Tahun 2021 – 2026.

TABEL TC-30

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TW 1 TAHUN 2025

KECAMATAN BATU SOPANG

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi		Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	
I. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi								
1).Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP dari Inspektorat	65	65	65	65	65	64,91	0	
2).Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	80	80	81	82	82	85,66	0	
3). Meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif	Angka Kriminalitas	20	67	57	50	50	50	0	
II.Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan								
4). Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	80	80	85	85	85	100	0	

Melihat kondisi tersebut di atas, Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser selaku lembaga teknis mencoba untuk terus meningkatkan proses perencanaan, baik tingkat kabupten maupun tingkat Kecamatan dalam rangka :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan,
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat,
4. Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat secara umum.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya maka isu – isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Batu Sopang antara lain sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan public yang berbasis teknologi informasi.
2. Masih Kurangnya sarana dan prasarana pelayanaan public guna mendukung pelaksanaan pelayanan public yang berkualitas.
3. Belum semua system pelayanaan public terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruuhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.
4. Masih banyaknya pelanggran PERDA tentang ketentraman dan ketertiban umum.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

6. Masih banyaknya infrastruktur dasar baik jalan, jembatan, saluran drainas, sarana Pendidikan dan sarana Kesehatan yang kurang baik dan mendesak untuk dibangun.
7. Perlunya peningkatan kualitas tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan, guna menciptakan pelayyanan publik yang berkualitas di Desa dan Kelurahan.
8. Masih kurang memadai anggaran yang diterima oleh Kecamatan dalam mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di Kecamatan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Batu Sopang sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang pelayanan publik perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser tidak mengalami perubahan sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2025	Renja Perubahan 2024
Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai hasil evaluasi SAKIP atas Implementasi Sistem Akuntabilitas	65	65

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil penghitungan survey indeks kepuasan masyarakat setiap tahun	82	82
Sasaran : Meningkatnya lingkungan daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	Jumlah kriminalitas setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun ybs dikalikan 10.000	50	50
Tujuan : Meningkatnya kemandirian masyarakat desa	Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan			
Sasaran : Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dibagi Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang ada dikalikan 100	85	85

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Kantor Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Tahun 2025 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 yaitu ““PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DI SELURUH KABUPATEN PASER”**”** yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana

8. Meningkatnya kualitas Pendidikan

9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Batu Sopang mendukung pencapaian sasaran ke-1 s.d 4, yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan
3. Meningkatnya lingkungan Daerah yang kondusif
4. Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Kecamatan Batu Sopang telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut

Tabel. 3.3

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Kecamatan Batu Sopang

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	RKPD 2025	RKPD Perubahan 2025		
						Kantor Camat Batu Sopang			5.481.397.213,00	7.282.558.714,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			5.481.397.213,00	7.282.558.714,00		
	7	01				KECAMATAN			5.481.397.213,00	7.282.558.714,00		
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76 Nilai	4.107.535.759,38	5.562.718.927,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	80 Persen	17.958.600,00	17.958.600,00		KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.632.000,00	17.635.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	12.326.600,00	15.914.978,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindak lanjuti	84 Persen	3.599.315.623,20	5.043.520.435,00		KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 Orang/bulan	3.387.500.000,00	4.831.704.812,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	125 Dokumen	209.115.623,20	177.724.355,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.700.000,00	7.691.500,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase rata rata capaian IKI dengan nilai ≥ 75	75 Persen	16.079.010,00	38.719.010,00		KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15 Dokumen	16.079.010,00	41.525.996,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen	205.465.226,53	231.974.424,00		KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi						
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.305.199,96	3.305.199,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Paket	23.582.826,62	30.271.242,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	178.577.199,95	151.527.599,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	100 Persen	0,00	362.000,00		KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	181.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan di Sekretariat	85 Persen	219.613.000,00	234.283.000,00		KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	57.213.000,00	73.367.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	162.400.000,00	162.400.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	85 Persen	49.104.299,65	58.988.599,00		KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	9.910.000,00	14.520.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	8.930.000,00	12.150.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	30.264.299,65	22.800.246,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80 %	595.775.254,95	761.623.568,00		
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	122.040.000,00	147.040.000,00		KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	258 Laporan	122.040.000,00	143.020.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	170.679.394,99	178.684.199,00		KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	170.679.394,99	192.465.539,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada camat	100 Persen	303.055.859,96	460.511.859,00		KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	303.055.859,96	426.138.029,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	85 Persen	91.229.599,50	167.636.500,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	87 Persen	91.229.599,50	253.164.000,00		KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	29.749.600,00	33.731.600,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	61.479.999,50	133.904.900,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	65 Persen	389.915.399,67	384.922.597,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	361.069.399,77	370.540.798,00		KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	351.517.399,97	355.558.099,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Laporan	9.551.999,80	4.775.999,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase penyelenggaraan Penerapan dan PenegakanPeraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	28.845.999,90	49.176.999,00		KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	28.845.999,90	24.588.499,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 Persen	200.901.200,00	253.034.222,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	200.901.200,00	263.621.300,00		KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun						
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 Orang	46.047.200,00	74.732.922,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	65 Orang	73.246.000,00	103.181.300,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal						
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	9 Dokumen	81.608.000,00	75.120.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 Persen	96.039.999,50	152.622.900,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi	9 Desa	96.039.999,50	159.354.400,00		KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	4.600.000,00	44.621.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	81.850.000,00	90.808.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9 Dokumen	4.500.000,00	10.850.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa						
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	3.824.999,50	4.565.500,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9 Laporan	1.265.000,00	1.778.400,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
								J U M L A H	**5.481.397.213,00**	**7.282.558.714,00**		

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kantor Kecamatan Batu Sopang pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

TABEL 3.3

TC -33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Batu Sopang

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
						Kantor Camat Batu Sopang				5.481.397.213,00	7.282.558.714,00						5.987.864.676,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				5.481.397.213,00	7.282.558.714,00						5.987.864.676,00	
	7	01				KECAMATAN				5.481.397.213,00	7.282.558.714,00						5.987.864.676,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76 Nilai	76 Nilai	4.107.535.759,38	5.562.718.927,00						4.825.968.597,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	80 Persen	80 Persen	17.958.600,00	17.958.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Kecamatan Batu Sopang	15.147.312,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5.632.000,00	17.635.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		4.991.816,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	12.326.600,00	15.914.978,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		10.155.496,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindak lanjuti	84 Persen	84 Persen	3.599.315.623,20	5.043.520.435,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Kecamatan Batu Sopang	4.397.957.877,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 Orang/bulan	238 Orang/bulan	3.387.500.000,00	4.831.704.812,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		4.248.432.828,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	125 Dokumen	125 Dokumen	209.115.623,20	177.724.355,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		146.622.455,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2.700.000,00	7.691.500,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		2.902.594,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase rata rata capaian IKI dengan nilai ≥ 75	75 Persen	75 Persen	16.079.010,00	38.719.010,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Kecamatan Batu Sopang	12.859.619,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian												
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15 Dokumen	15 Dokumen	16.079.010,00	41.525.996,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		12.859.619,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	205.465.226,53	231.974.424,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Kecamatan Batu Sopang	115.334.914,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3.305.199,96	3.305.199,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		2.082.557,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Paket	26 Paket	23.582.826,62	30.271.242,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		30.330.631,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	178.577.199,95	151.527.599,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		82.921.726,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen	0,00	362.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Kecamatan Batu Sopang	14.199.918,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	0,00	181.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		14.199.918,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan di Sekretariat	85 Persen	85 Persen	219.613.000,00	234.283.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Kecamatan Batu Sopang	225.662.029,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	57.213.000,00	73.367.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		77.307.242,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	162.400.000,00	162.400.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		148.354.787,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	85 Persen	85 Persen	49.104.299,65	58.988.599,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Kecamatan Batu Sopang	44.806.928,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	9.910.000,00	14.520.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		23.543.260,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	19 Unit	8.930.000,00	12.150.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		8.426.229,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	30.264.299,65	22.800.246,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		12.837.439,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80 Persen	80 %	595.775.254,95	761.623.568,00						567.963.015,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	100 %	122.040.000,00	147.040.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Kecamatan Batu Sopang	86.842.055,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan												
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	258 Laporan	258 Laporan	122.040.000,00	143.020.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		86.842.055,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	100 %	170.679.394,99	178.684.199,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Kecamatan Batu Sopang	240.897.428,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum												
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	4 Dokumen	170.679.394,99	192.465.539,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		240.897.428,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada camat	100 Persen	100 Persen	303.055.859,96	460.511.859,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Kecamatan Batu Sopang	240.223.532,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan												
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	303.055.859,96	426.138.029,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		240.223.532,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	85 Persen	85 Persen	91.229.599,50	167.636.500,00						98.672.865,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	87 Persen	87 Persen	91.229.599,50	253.164.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Kecamatan Batu Sopang	98.672.865,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	29.749.600,00	33.731.600,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		42.624.857,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	61.479.999,50	133.904.900,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		56.048.008,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	65 Persen	65 Persen	389.915.399,67	384.922.597,00						348.679.116,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	100 Persen	361.069.399,77	370.540.798,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Kecamatan Batu Sopang	326.882.519,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	351.517.399,97	355.558.099,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		323.913.004,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat												
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Laporan	5 Laporan	9.551.999,80	4.775.999,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		2.969.515,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase penyelenggaraan Penerapan dan PenegakanPeraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	100 %	28.845.999,90	49.176.999,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Kecamatan Batu Sopang	21.796.597,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia												
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	28.845.999,90	24.588.499,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		21.796.597,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 Persen	100 Persen	200.901.200,00	253.034.222,00						66.280.189,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	100 Persen	200.901.200,00	263.621.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Kecamatan Batu Sopang	66.280.189,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun												
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 Orang	60 Orang	46.047.200,00	74.732.922,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		7.895.055,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional												
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	65 Orang	65 Orang	73.246.000,00	103.181.300,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		3.692.744,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal												
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	9 Dokumen	9 Dokumen	81.608.000,00	75.120.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		54.692.390,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG

6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 Persen	100 Persen	96.039.999,50	152.622.900,00						80.300.894,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi	9 Desa	9 Desa	96.039.999,50	159.354.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik	Kecamatan Batu Sopang	80.300.894,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	4.600.000,00	44.621.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		4.816.155,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa												
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	81.850.000,00	90.808.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		58.621.642,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	4.500.000,00	10.850.000,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		4.735.786,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa												
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	3.824.999,50	4.565.500,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		8.706.551,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya												
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9 Laporan	9 Laporan	1.265.000,00	1.778.400,00	Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik		3.420.760,00	KANTOR CAMAT BATU SOPANG
									J U M L A H	**5.481.397.213,00**	**7.282.558.714,00**						**5.987.864.676,00**	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Batu Sopang Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kecamatan Batu Sopang mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

5.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Batu Kajang, 22 Agustus 2025

MISRAN, SE. MM
Pembina TK.I/Ivb
NIP 19720210 199303 1 006

Paser TUNTAS

Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil dan Sejahera

RENCANA KERJA PERUBAHAN

Kecamatan Muara Komam

Olo Manin Aso Buen Si Olo Ndo

2025

Pemerintah Kabupaten Paser

Kecamatan Muara Komam
Jl. Negara KM 171 Kode Pos 70123
e-mail :
kantorcamatmuarakomam@gmail.com

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

RENCANA KERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025



KANTOR KECAMATAN MUARA KOMAM
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan Visi Kantor Camat Muara Komam serta menyesuaikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, maka disusunlah Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kantor Camat Muara Komam Tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan ini memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika pelaksanaan pembangunan pada Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini sekaligus menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas serta acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025.

Masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen ini. Semoga Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat serta menjadi landasan yang kuat dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan di Kecamatan Muara Komam.

Muara Komam, 22 Agustus 2025

CAMAT,

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN MUARA KOMAM
PASER

MUSTAFA, S.Sos
Pembina
NIP.197505272003121007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR II

DAFTAR ISI III

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 5
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA 6

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025 8

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025 8
2.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR KECAMATAN MUARA KOMAM 14
2.3 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT KEBERHASILAN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 17

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 19

3.1 TUJUAN DAN SASARAN 19
3.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 21

BAB IV PENUTUP 30

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan

darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;

4) Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perubahan Kantor Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Renstra Kantor Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kantor Kecamatan Muara Komam, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Muara Komam sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Selanjutnya Renja perubahan Kantor Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kantor Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah 2025 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 Tentang incian Tugas dan Fungsi Kecamatan;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Kantor Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Kantor Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Sistematika Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Muara Komam Tahun 2025 adalah sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Kantor Kecamatan Muara Komam, proses penyusunan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Muara Komam, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan Dokumen RKPD, Renstra Kantor Kecamatan Muara Komam, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2025 hingga Triwulan I baik dari capaian tujuan, sasaran, program kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Muara Komam
Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut

2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat dan Solusi Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025
Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta Solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2025 yang disertai perubahan target

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun

2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/ tidak tercapai kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/ perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Hasil evaluasi Renja Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut :

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Muara Komam Triwulan I Tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 * 100		15
KECAMATAN MUARA KOMAM			**37.231.260.860**		**7.669.122.356**		**9.412.645.836**		**1.413.304.666**		**1.919.775.949**	-	**3.333.080.615**	-	**11.002.202.971**		**29,55**	
KANTOR KECAMATAN MUARA KOMAM			**37.231.260.860**		**7.669.122.356**		**9.412.645.836**		**1.413.304.666**		**1.919.775.949**	-	**3.333.080.615**	-	**11.002.202.971**		**29,55**	
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Indeks)**	**372**	**24.203.226.212**	**70**	**4.658.334.181**	**74**	**7.037.899.500**	**19,51**	**1.037.875.916**	**-**	**1.748.203.551**	**19,5**	**2.786.079.467**	**90**	**7.444.413.648**	**24**	**30,76**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD (Persen)**	**500**	**106.865.835**	**100**	**32.712.000**	**100**	**20.715.000**	**0**	**5.090.000**	**-**	**1.945.000**	**-**	**7.035.000**	**100**	**39.747.000**	**20**	**37,19**	
□ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	53.350.544			2	10.330.000	0	-	1	-	1	-	1	-	13	0,00	**Kecamatan Muara Komam**
□ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	25	53.515.291			5	10.385.000	1	5.090.000	2	1.945.000	3	7.035.000	3	7.035.000	12	13,15	**Kecamatan Muara Komam**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Temuan Ditindaklanjuti**	**500**	**20.197.002.656**	**100**	**3.964.353.540**	**100**	**6.298.704.601**	**19,65**	**923.112.133**	**-**	**1.482.903.119**	**20**	**2.406.015.252**	**120**	**6.370.368.792**	**24**	**31,54**	
□ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	121	17.613.757.158			17	5.887.834.851	17	834.388.133	17	1.434.730.679	17	2.269.118.812	17	2.269.118.812	14	12,88	**Kecamatan Muara Komam**
□ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	60	1.427.194.519			12	233.351.750	3	54.134.000	3	26.886.920	6	81.020.920	6	81.020.920	10	5,68	**Kecamatan & Kelurahan Muara Komam**
						10	165.018.000	2	34.590.000	2	21.285.520	4	55.875.520	4	55.875.520			
□ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	10	763.750.500			2	12.500.000	0	-			-	-	-	-	0	0,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80 (Persen)**	**500**	**386.112.500**	**12**	**5.227.000**	**90**	**43.540.400**		**9.560.000**		1.185.000	**-**	10.745.000	**12**	15.972.000	**2**	**4,14**	
□ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	30	36.900.000	12	5.227.000	12	5.400.000		-		-	-	-	12	5.227.000	40	14,17	**Kelurahan Muara Komam**
□ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	174	349.212.500			36	38.140.400	9	9.560.000	9	1.185.000	18	10.745.000	**18**	10.745.000	10	3,08	**Kecamatan Muara Komam**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 * 100		15
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Rata2 Capaian Indeks Kepauasan Sekretariat**	**500**	**1.048.313.123**	**100**	**372.026.023**	**100**	**307.239.184**	**24,19**	**93.656.500**	**-**	**66.257.770**	**24**	**159.914.270**	**124**	**531.940.293**	**25**	**50,74**	
□ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	17	29.773.759			3	4.275.000	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0,00	**Kecamatan Muara Komam**
□ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	39	27.628.156			8	5.788.000	2	1.931.332	2	3.198.175	4	5.129.507	4	5.129.507	10	18,57	
□ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	160	414.572.884			34	96.573.876	8	26.418.000	8	19.383.256	16	45.801.256	16	45.801.256	10	11,05	**Kecamatan & Kelurahan Muara Komam**
						10	33.937.818			2	6.767.108	2	6.767.108	2	6.767.108			
□ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	28	78.308.385			6	7.548.000	1	1.355.032	2	2.502.871	3	3.857.903	3	3.857.903	11	4,93	**Kecamatan & Kelurahan Muara Komam**
							3.753.990			1	1.330.576	1	1.330.576	1	1.330.576			
□ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	950	470.572.119			199	60.886.000	150	45.993.000	49	14.800.000	199	60.793.000	199	60.793.000	21	12,92	**Kecamatan & Kelurahan Muara Komam**
						6	91.610.000	3	17.959.136	3	18.275.784	6	36.234.920	6	36.234.920			
□ Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	50	27.457.820			10	2.866.500					-		-		0	0,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik**	**430**	**124.787.938**	**80**	**161.970.500**	**85**	**212.520.362**	0	-	-	**181.456.925**	-	**181.456.925**	**80**	**343.427.425**	**19**	**275,21**	
□ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	17	124.787.938			12	196.090.362	0	-	11	181.456.925	11	181.456.925	11	181.456.925	65	145,41	**Kecamatan dan Kelurahan Muara Komam**
						2	16.430.000											
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Disediakan**	**500**	**1.233.080.653**	**100**	**69.885.618**	**100**	**65.882.828**	**20,25**	**4.757.283**	**-**	**10.221.439**	**20**	**14.978.722**	**120**	**84.864.340**	**24**	**6,88**	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 * 100		15
□ Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	10	16.100.000			2	2.000.000	0	500.000	0	-	-	500.000	-	500.000	0	3,11	Kecamatan & Kelurahan Muara Komam
						2	600.000											
□ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	120	283.369.997			24	49.999.816	6	4.257.283	6	8.848.725	12	13.106.008	12	13.106.008	10	4,63	Kecamatan & Kelurahan Muara Komam
						24	13.283.012			8	1.372.714	8	1.372.714	8	1.372.714			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang inventaris dalam kondisi baik (Persen)**	**228**	**1.107.063.507**		**52.159.500**	**47**	**89.297.125**		**1.700.000**	**-**	**4.234.298**	**-**	5.934.298	**-**	58.093.798	**0**	**5,25**	
□ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	40	209.973.988		52.159.500	6	62.671.750	0		1	1.264.298	1	1.264.298	1	53.423.798	3	25,44	
□ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	66	127.089.519			14	26.625.375	3	1.700.000	4	2.970.000	**7**	4.670.000	**7**		11	0,00	
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	**432**	**4.210.403.946**	**80**	**1.111.589.587**	**87**	**654.822.350**	**9,9**	**78.818.750**	**-**	**25.173.498**	**9,9**	**103.992.248**	**90**	**1.215.581.835**	**21**	**28,87**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan**	**500**	**1.056.952.991**	**100**	**223.799.287**	**100**	**194.864.000**	**11,33**	**49.908.000**	**-**	**11.673.498**	**11**	**61.581.498**	**111**	**285.380.785**	**22**	**27,00**	
□ Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60	915.860.947			12	179.236.500	3	49.540.000	3	5.190.000	6	54.730.000	6	54.730.000	10	5,98	Kecamatan Muara Komam
□ Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60	141.092.044			12	15.627.500	0	368.000	4	6.483.498	4	6.851.498	4	6.851.498	7	4,86	Kecamatan & Kelurahan Muara Komam
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**500**	**745.840.755**	**100**	**151.314.600**	**100**	**64.784.541**	**9,64**	**12.020.750**	**-**	**675.000**	**10**	**12.695.750**	**110**	**164.010.350**	**22**	**21,99**	
□ Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	5	745.840.755			1	64.784.541	1	12.020.750	0	675.000	1	12.695.750	1	12.695.750	20	1,70	Kecamata Muara Komam

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 * 100		15
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**500**	**2.407.610.200**	**100**	**736.475.700**	**100**	**395.173.809**	**9,4**	**16.890.000**	**-**	**12.825.000**	**9**	**29.715.000**	**109**	**766.190.700**	**22**	**31,82**	
□ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	20	2.407.610.200			4	226.103.909	1	10.950.000	1	11.735.000	2	22.685.000	2	22.685.000	10	0,94	**Kecamatan & Kelurahan Muara Komam**
						5	169.069.900	1	5.940.000		1.090.000	1	7.030.000	1	7.030.000			
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif**	**100**	**4.004.097.633**	**100**	**1.139.099.332**	**100**	**783.929.548**	**7,74**	**94.600.000**	**-**	**121.153.900**	**7,7**	**215.753.900**	**108**	**1.354.853.232**	**108**	**33,84**	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan**	**500**	**1.234.649.036**	**100**	**352.153.470**	**100**	**102.305.398**	**5,91**	**26.800.000**	**-**	**8.250.000**	**6**	**35.050.000**	**106**	**387.203.470**	**21**	**31,36**	
□ Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	75	319.622.572			15	26.800.000	15	26.800.000		-	15	26.800.000	15	26.800.000	20	8,38	**Kecamatan Muara Komam**
□ Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	915.026.464			3	75.505.398	0	-	1	8.250.000	1	8.250.000	1	8.250.000	6	0,90	**Kecamatan Muara Komam**
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana**	**500**	**2.769.448.597**	**100**	**786.945.862**	**100**	**681.624.150**	**2**	**67.800.000**	**-**	**112.903.900**	**2**	**180.703.900**	**102**	**967.649.762**	**20**	**34,94**	
□ Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	85	74.376.769			17	11.203.900	0	-	17	11.203.900	17	11.203.900	17	11.203.900	20	15,06	**Kelurahan Muara Komam**
□ Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	90	1.037.382.453			18	670.420.250	4	67.800.000	4	101.700.000	8	169.500.000	8	169.500.000	9	16,34	**Kelurahan Muara Komam**
KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase pelanggaran perda dan perkada yang terselesaikan di wilayah kecamatan**		**3.302.896.302**	**100**	**436.512.800**	**100**	**699.711.050**	11,35	**163.600.000**	**-**	**16.125.000**	**11**	**179.725.000**	**111**	**616.237.800**			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**500**	**1.728.014.313**	**100**	**133.798.100**	**100**	**419.865.000**		**89.200.000**	**-**	**9.225.000**	**-**	**98.425.000**	**100**	**232.223.100**	**20**	**13,44**	
□ Sinergisitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60	1.564.332.675			12	372.935.000	3	89.200.000	3	1.375.000	6	90.575.000	6		10	0,00	
□ Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	10	163.681.638			2	46.930.000	0	-	0	7.850.000	-	7.850.000	-	7.850.000	0	4,80	**Kecamatan Muara Komam**
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	**Jumlah kegiatan Koordinasi Bidang Penegakan Peraturan yang dilaksanakan**	**45**	**1.574.881.989**	**9**	**302.714.700**	**9**	**279.846.050**	**2**	**74.400.000**	**-**	**6.900.000**	**2**	**81.300.000**	**11**	**384.014.700**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
□ Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	45	1.574.881.989			9	279.846.050	2	74.400.000	2	6.900.000	4	81.300.000	4	81.300.000	9	5,16	**Kecamatan Muara Komam**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I		II								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 * 100		15
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Kasus Konflik Sosial Yang Tertangani/ Terselesaikan di Wilayah Kecamatan**	**500**	**532.084.013**	**100**	**151.345.878**	**100**	**157.216.520**	**-**	**-**	**-**	**3.380.000**	**-**		**100**	**151.345.878**	**20**	**28,44**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan**	**10**	**532.084.013**	**2**	**151.345.878**	**2**	**157.216.520**	**-**	**-**	**-**	**3.380.000**	**-**	**3.380.000**	**2**	**154.725.878**	**20**	**29,08**	
□ Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	1700	406.144.813			350	139.008.770	0	-	0	1.390.000	-	1.390.000	-	1.390.000	0	0,34	**Kecamatan Muara Komam**
□ Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	660	125.939.200			150	18.207.750	0	-	0	1.990.000	-	1.990.000	-	1.990.000	0	1,58	**Kecamatan Muara Komam**
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa Yang Menyampaikan LKP Desa Tepat Waktu**	**500**	**978.552.754**	**100**	**172.240.578**	**100**	**79.066.868**	**12,24**	**38.410.000**	**19,4**	**5.740.000**	**32**	**44.150.000**	**132**	**216.390.578**	**26**	**22,11**	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Desa Yang Terfasilitasi dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**45**	**978.552.754**	**9**	**172.240.578**	**9**	**79.066.868**	**2**	**38.410.000**	**2**	**5.740.000**	**4**	**44.150.000**	**13**	**216.390.578**	**29**	**22,11**	
□ Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	45	111.341.414			9	10.406.372					-		-		0	0,00	
□ Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	5	142.008.723			1	17.680.000	0	11.680.000	1	-	1	11.680.000	1	11.680.000	20	8,22	**Kecamatan Muara Komam**
□ Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	60	417.185.159			12	32.490.496	3	26.730.000	3	5.740.000	6	32.470.000	6	32.470.000	10	7,78	**Kecamatan Muara Komam**
□ Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	12	71.889.000			-	-	0	-	0	-	-		-		0	0,00	
□ Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	30	42.731.364			6	15.210.000	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0,00	**Kecamatan Muara Komam**
□ Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	10	193.397.094			2	3.280.000	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0,00	**Kecamatan Muara Komam**

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dapat dijelaskan bahwa :

1. Total realisasi kinerja hingga Triwulan I adalah 40.00%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp**3.333.080.615** (Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) dari total pagu RKPD sebesar Rp9.412.645.836 (Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah).
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Kantor Kecamatan Muara Komam sebesar 40.00% dengan predikat kinerja Rendah (R).
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 0 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 3 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 4 indikator capaian kinerja 0%-50% = 20 indikator.

2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Muara Komam

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Dan Fungsi Kecamatan, maka Kantor Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kecamatan mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Pemerintahan Umum dan otonomi daerah;
b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas an/ atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan;

i. Penyusunan program, pembinaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Kantor Kecamatan Muara Komam adalah :

1. Pelayanan Kependudukan
2. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Pelayanan Pertanahan

Upaya Kantor Kecamatan Muara Komam dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kantor Kecamatan Muara Komam Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Kantor Kecamatan Muara Komam terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Muara Komam sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2022	2024	2024	2025	2026		
Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	70	73	75	80	85		
Sasaran: 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat	65	65	70	70	85	60,28	86,11
2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	80	83	87	90	92	0	
3)Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	12	10	10	8	8	10	100
Tujuan Meningkatnya kemandirian masyarakat desa	Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan	100	100	100	100	100		
Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan yang aktif	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Muara Komam sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. *Tujuan "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Penilaian Mandiri*

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi", belum mencapai target, dimana realisasinya belum dapat dilaksanakan karena belum adanya jadwal penilaian dari pemerintah daerah.

b. *Sasaran "Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat" hampir mencapai target, dimana realisasinya sebesar 60,28 dari target sebesar 70 dengan capaian kinerja sebesar 86,11 %.*

c. *Sasaran "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan", belum mencapai target, dikarenakan belum selesainya penilaian SKM tersebut di Kecamatan.*

d. *Sasaran "Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Menurunnya Angka Kriminalitas", sudah mencapai target, dimana realisasinya adalah 10*

e. *Tujuan "Meningkatnya kemandirian masyarakat desa" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan", telah melampaui target dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100 dengan capaian kinerja sebesar 100 %.*

2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025

1. Faktor Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025

   Berikut di bawah ini adalah faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Muara Komam sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 :

   a. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan.
   b. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik.
   c. Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang membuat manajemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi berjalan sinergis.
   d. Sebagian besar belanja yang tertuang dalam anggaran kas Triwulan I Tahun Anggaran 2025 telah direalisasikan sesuai dengan rencana anggaran kas.
   e. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai.

2. Faktor Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025

   Berikut di bawah ini adalah faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Muara Komam sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 :

   a. Implementasi sistem Ecatalog yang beralih dari versi 5 ke versi 6 yang belum siap. Perubahan versi ini mengakibatkan ketidaksiapan sistem yang berdampak pada efisiensi dan kelancaran proses perencanaan serta pengadaan barang/jasa di lingkungan perangkat daerah.

3. Rekomendasi Tindak Lanjut yang Diperlukan

   a. Diperlukan peningkatan koordinasi yang lebih sistematis dan terstruktur antara Perangkat Daerah dan Unit Pengelola Barang dan Jasa terkait transisi ke Ecatalog versi 6. Hal ini penting untuk memastikan pemahaman yang komprehensif mengenai perubahan fitur dan prosedur dalam sistem baru, serta untuk menyusun langkah-langkah strategis yang dapat mendukung kelancaran implementasi dan meminimalkan potensi gangguan dalam proses pengadaan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Muara Komam sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025
Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			
Sasaran: 1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat	Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat	70	70
2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat selama 1 Tahun	87	87
3.Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	Jumlah peristiwa kriminal/gangguan keamanan/ketertiban selama setahun dibagi jumlah penduduk tahun ybs dikalikan 100.000	10	10
Tujuan: Meningkatnya kemandirian masyarakat desa	Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan			
Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah desa yang memiliki lembaga kemasyarakatan yang aktif/100 %	100	100

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Kantor Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Tahun 2025 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025, hal ini dikarenakan

perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 yaitu "PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT" yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Penguatan Ekonomi Daerah.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Adapun Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Muara Komam Tahun Anggaran 2024 terinci dalam Tabel 3.2.1 ini :

TABEL TC.33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN PASER

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
KANTOR KECAMATAN MUARA KOMAM													
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**Kec. Muara Komam**	**76**	**6.982.834.897**	**APBD**		**76**	**6.780.304.851**
7	**1**	**1**	**201**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Evaluasi SAKIP**	**Kec. Muara Komam**	**81**	**61.756.000**	**APBD**		**81**	**40.770.000**
7	1	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Muara Komam	2 Dokumen	42.776.000	APBD		7 Dokumen	20.000.000
7	1	1	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Muara Komam	5 Laporan	18.980.000	APBD		6 Laporan	20.770.000
7	**1**	**1**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Temuan di Tindaklanjuti**	**Kec. Muara Komam**		**6.137.686.629**	**APBD**			**6.102.834.851**
7	1	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Muara Komam	24 Orang	5.887.834.851	APBD		49 Orang	5.887.834.851
7	1	1	202	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Muara Komam	12 Dokumen	224.851.778	APBD		12 Dokumen	180.000.000
7	1	1	202	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Muara Komam	2 Laporan	25.000.000	APBD		2 Laporan	35.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	**1**	**1**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**36 Dokumen**	**51.653.089**	**APBD**		**36 Dokumen**	**65.000.000**
7	1	1	205	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Muara Komam	36 Dokumen	51.653.089	APBD		12 Dokumen	65.000.000
7	**1**	**1**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**394.351.876**	**APBD**			**288.200.000**
7	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Muara Komam	3 Paket	4.275.000	APBD		3 Paket	4.200.000
7	1	1	206	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kec. Muara Komam	8 Paket	5.788.000	APBD		8 Paket	10.000.000
7	1	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Muara Komam	34 Paket	149.573.876	APBD		15 Paket	130.000.000
7	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Muara Komam	6 Paket	15.096.000	APBD		6 Paket	15.000.000
7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Muara Komam	199 Laporan	213.886.000	APBD		199 Laporan	120.000.000
7	1	1	206	10	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kec. Muara Komam	10 Dokumen	5.733.000	APBD		10 Dokumen	9.000.000
7	**1**	**1**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**4 Unit**	**196.090.362**	**APBD**		**4 Unit**	**140.000.000**
7	1	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Muara Komam	4 Unit	196.090.362	APBD		4 Unit	140.000.000
7	**1**	**1**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**51.999.816**	**APBD**			**57.000.000**
7	1	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Muara Komam	2 laporan	2.000.000	APBD		2 laporan	2.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Muara Komam	24 Laporan	49.999.816	APBD		24 Laporan	55.000.000
7	**1**	**1**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**89.297.125**	**APBD**			**86.500.000**
7	1	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya dan perijinannya	Kec. Muara Komam	8 Unit	62.671.750	APBD		8 Unit	60.000.000
7	1	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	Kec. Muara Komam	14 Unit	26.625.375	APBD		15 Unit	26.500.000
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**502.205.883**	**APBD**			**714.700.247**
7	**1**	**2**	**202**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**				**124.864.000**	**APBD**			**270.000.000**
7	1	2	202	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Muara Komam	12 Laporan	75.616.500	APBD		12 Laporan	120.000.000
7	1	2	202	3	Peningkatan Efektfitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	Kec. Muara Komam	12 Laporan	49.247.500	APBD		12 Laporan	150.000.000
7	**1**	**2**	**203**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**				**82.244.936**	**APBD**			**94.700.247**
7	1	2	203	1	Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Muara Komam	1 Dokumen	82.244.936	APBD		1 Dokumen	94.700.247

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	**1**	**2**	**204**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**				**295.096.947**	**APBD**			**350.000.000**
7	1	2	204	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yeng terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kec. Muara Komam	4 Laporan	295.096.947	APBD		4 Laporan	350.000.000
7	**1**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**199.148.398**	**APBD**			**115.000.000**
7	**1**	**3**	**201**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**199.148.398**	**APBD**			**115.000.000**
7	1	3	201	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Muara Komam	15 Lembaga Kemasyarakatan	31.800.000	APBD		15 Lembaga Kemasyarakatan	35.000.000
7	1	3	201	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Muara Komam	3 Laporan	167.348.398	APBD		3 Laporan	80.000.000
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**295.962.100**	**APBD**			**744.002.100**
7	**1**	**4**	**201**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**193.470.000**	**APBD**			**540.000.000**
7	1	4	201	1	Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia Tentarana Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Muara Komam	12 Laporan	125.390.000	APBD		12 Laporan	260.000.000
7	1	4	201	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Kec. Muara Komam	2 Laporan	68.080.000	APBD		2 Laporan	280.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Masyarakat							
7	**1**	**4**	**204**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah**				**102.492.100**	**APBD**			**204.002.100**
7	1	4	202	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Muara Komam	9 Laporan	102.492.100	APBD		9 Laporan	204.002.100
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**241.969.300**	**APBD**			**144.211.800**
7	**1**	**5**	**201**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**241.969.300**	**APBD**			**144.211.800**
7	1	5	201	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Muara Komam	350 Orang	160.803.800	APBD		150 Orang	84.211.800
7	1	5	201	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Kec. Muara Komam	150 Orang	81.165.500	APBD		70 Orang	60.000.000
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**				**163.797.934**	**APBD**			**142.414.132**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	**1**	**6**			**Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**163.797.934**	**APBD**			**142.414.132**
7	1	6	201	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Muara Komam	9 Dokumen	19.475.146	APBD		9 Dokumen	30.000.000
7	1	6	201	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Muara Komam	1 Dokumen	17.832.292	APBD		1 Dokumen	20.000.000
7	1	6	201	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Muara Komam	12 Dokumen	42.490.496	APBD		12 Dokumen	37.414.132
7	1	6	201	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Muara Komam	6 Dokumen	15.210.000	APBD		6 Dokumen	20.000.000
7	1	6	201	15	Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Muara Komam	2 Dokumen	68.790.000	APBD		2 Dokumen	35.000.000
JUMLAH									**8.385.918.512**				**8.640.633.130**

KANTOR KELURAHAN MUARA KOMAM													
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**				**342.469.780**	**APBD**			**398.700.000**
7	**1**	**1**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**93.018.000**	**APBD**			**155.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	1	1	202	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kel. Muara Komam	10 Dokumen	93.018.000	APBD		10 Dokumen	155.000.000
7	1	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.400.000				10.000.000
7	1	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Kel. Muara Komam	12 Paket	5.400.000	APBD		12 Paket	10.000.000
7	1	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah				213.738.768	APBD			199.000.000
7	1	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel. Muara Komam	10 Paket	33.937.818	APBD		10 Paket	95.000.000
7	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kel. Muara Komam	6 Paket	3.753.990	APBD		6 Paket	4.000.000
7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Muara Komam	6 Laporan	176.046.960	APBD		6 Laporan	100.000.000
7	1	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kel. Muara Komam		16.430.000	APBD			20.000.000
7	1	1	207	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang di sediakan	Kel. Muara Komam	2 Unit	16.430.000	APBD		2 Unit	20.000.000
7	1	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				13.883.012	APBD			14.700.000
7	1	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Muara Komam	2 laporan	600.000	APBD		2 laporan	700.000
7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kel. Muara Komam	24 Laporan	13.283.012	1,3E+07		24 Laporan	14.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				187.369.900	APBD			187.369.900
7	1	2	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				187.369.900	APBD			187.369.900
7	1	2	204	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kel. Muara Komam	5 Laporan	187.369.900	APBD		5 Laporan	187.369.900
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				706.366.750	APBD			717.000.000
7	1	3	202		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				706.366.750	APBD			717.000.000
7	1	3	202	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Muara Komam	17 Lembaga Kemasyarakatan	11.203.900	APBD		17 Lembaga Kemasyarakatan	17.000.000
7	1	3	202	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Muara Komam	18 Pokmas	695.162.850	APBD		18 Pokmas	700.000.000
JUMLAH									1.236.206.430				1.303.069.900

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser merupakan pedoman penentuan, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, seluruh aparatur Kecamatan Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser wajib menerapkan prinsip - prinsip efektif, efesien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program - program yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser.

Selain itu dalam pelaksanaan Renstra diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program, kegiatan dan sub kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahun an sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Muara Komam, 22 Agustus 2025
CAMAT,

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN MUARA KOMAM
PASER

MUSTAFA, S.Sos
Pembina
NIP. 197505272003121007

PENETAPAN

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

KANTOR KECAMATAN MUARA SAMU
KABUPATEN PASER

SALINAN

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER

NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**
BAB I PENDAHULUAN **3**
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penyusunan 7
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025 ..... **9**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 9
2.2 Analisis Capaian Kinerja 12
2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 15
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **17**
3.1 Tujuan dan Sasaran 17
3.2 Review Terhadap Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025 18
3.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 27
3.4 Rencana Program & Kegiatan Perubahan Renja Thn 2025 27
BAB IV PENUTUP **49**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Penetapan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Renstra Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kantor Kecamatan Muara Samu, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Muara Samu sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Selanjutnya Penetapan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Penetapan Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 Tentang incian Tugas dan Fungsi Kecamatan;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Paser Nomor Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Penetapan Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Kantor Kecamatan Muara Samu, proses penyusunan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Muara Samu, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Kantor Kecamatan Muara Samu, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

2.1 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

3.1 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

4.1 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2025 hingga Triwulan I baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Muara Samu

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2025 yang disertai perubahan target

3.2 Review Terhadap Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta

perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Penetapan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Muara Samu Triwulan II Tahun 2025

Periode Pelaksanaan: April s.d Juni Tahun 2025

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Predikat	
					I		II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		4	5		6		7		8 = 6+7		9 = 8 : 5 * 100		10	
	Kantor Camat Muara Samu		**100**	**5.740.364.296**	**19**	**932.395.513**		**1.142.103.383**	**19**	**2.074.498.896,00**	**19,00**	**36,14**		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**76**	**4.327.392.607**	**72**	**734.725.513**	**72**	**1.073.518.383**	72	**1.808.243.896**	**94,74**	**41,79**	**ST**	**SR**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kualitas pelaksanaan SPIP Perangkat Daerah**	**3**	**55.462.052**	**3**	**3.760.000**	**3**	**12.868.000**	**3**	**16.628.000**	**100**	**29,98**	**ST**	**ST**
		Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	**80**		**69,87**		**69,87**		**69,87**		**87,34**		**T**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Reviu renstra, renwal renja,	5	40.000.000	2	0	1	12.868.000	3	12.868.000	60	32,17	R	SR
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	15.462.052	1	3.760.000	0	0	1	3.760.000	20	24	SR	SR
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase temuan ditindaklanjuti**	**100**	**3.617.019.330**	**0**	**625.645.694**		**987.941.236**	**0**	**1.613.586.930**	**0**	**44,61**	**SR**	**ST**
		Persentase LHP nihil	**100**		**100**		**100**		**200**		**100**		**ST**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144	3.484.470.348	36	583.759.334	36	978.195.116	72	1.561.954.450	50,00	44,83	SR	SR
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (SPP,SPM,E-Billing)	200	85.142.369	63	26.860.000	66	0	129	26.860.000	64,5	31,55	R	SR
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15	47.406.613	3	15.026.360	3	9.746.120	6	24.772.480	40	52,26	SR	R
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80**	**100**	**119.188.748**	**25**	**21.520.000**	**25**	**9.720.000**	**50**	**31.240.000**	**50,00**	**26,21**	**SR**	**SR**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	119.188.748	3	21.520.000	3	9.720.000	6	31.240.000	50	26,21	SR	SR
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat**	**100**	**194.236.967**	**72**	**37.806.962**		**29.607.200**	**72**	**67.414.162**	**72**	**34,71**	**S**	**SR**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	2.050.450	0	0	0	0	0	0	0	0,00	SR	SR
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2.050.450	0	0	0	0	0	0	0	0,00	SR	SR
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	28.010.075	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	SR	SR
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4.954.867	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	SR	SR
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130	150.000.000	33	37.806.962	28	29.607.200	61	67.414.162	47	44,94	SR	SR
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	7.151.125	0	0	0	0	0	0	0	0,00	SR	SR
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik**	**85**	**24.210.288**	**70**	**0**		**3.400.000**	**70**	**3.400.000**	**82**	**14,04**	**T**	**SR**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	24.210.288	0	0	2	3.400.000	2	3.400.000	33	14,04	SR	SR
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	**100**	**163.517.090**	**25**	**42.975.107**	**25**	**29.799.207**	**50**	**72.774.314**	**50**	**44,51**	**SR**	**SR**

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	1.015.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	SR	SR
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	33.379.290	6	8.475.107	6	9.099.207	12	17.574.314	50	52,65	SR	R
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	129.122.800	3	34.500.000	3	20.700.000	6	55.200.000	50	42,75	SR	SR
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang inventaris dalam kondisi baik**	**70**	**153.758.132**	**60**	**3.017.750**		**182.740**	**65**	**3.200.490**	**92,86**	**2,08**	**ST**	**SR**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	113.000.000	3	3.017.750	0	182.740,00	3	3.200.490	37,50	2,83	SR	SR
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	20.153.632	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	SR	SR
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	7	20.604.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	SR	SR
2	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu**	**100**	**244.185.926**	**44**	**44.870.000**	**44**	**25.440.000**	**88**	**70.310.000**	**44**	**28,79**	**SR**	**SR**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Desa yang terfasilitasi**	**9**	**244.185.926**	**9**	**44.870.000**	**0**	**25.440.000**	**9**	**70.310.000**	**100**	**28,79**	**ST**	**SR**
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18	30.711.613	9	13.430.000	0	5.570.000	9	19.000.000	50	61,87	SR	R
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3	10.891.524	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	27	180.349.709	9	31.440.000	4	19.870.000	13	51.310.000	48	28,45	SR	SR
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2	22.233.080	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	**85**	**489.039.675**	**85,7**	**48.005.000**	**0**	**23.955.000**	**0**	**71.960.000**	**85,70**	**14,71**	**T**	**SR**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100**	**158.409.275**	**25**	**35.255.000**	**25**	**7.055.000**	**50**	**42.310.000**	**50**	**26,71**	**SR**	**SR**
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3	141.467.107	1	34.130.000	0	4.880.000	1	39.010.000	33	27,57	SR	SR
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	16.922.168	0	1.125.000	1	2.175.000	1	3.300.000	50,00	19,50	SR	SR
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum**	**100**	**37.936.400**	**25**	**10.400.000**	**25**	**7.800.000**	**50**	**18.200.000**	**50**	**48**	**SR**	**SR**
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12	37.936.400	3	10.400.000	3	7.800.000	6	18.200.000	50	48	SR	SR
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100**	**292.694.000**	**25**	**2.350.000**	**25**	**9.100.000**	**50**	**11.450.000**	**50**	**3,91**	**SR**	**SR**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	292.694.000	0	2.350.000	1	9.100.000	1	11.450.000	50	3,91	SR	SR

4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban**	**65**	**309.357.388**	**0**	**81.290.000**		**10.190.000**	**0**	**91.480.000**	**0**	**29,57**	**SR**	**SR**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**299.249.644**	**25**	**81.290.000**	**25**	**10.190.000**	**50**	**91.480.000**	**50**	**30,57**	**SR**	**SR**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	282.468.751	3	76.000.000	3	10.190.000	6	86.190.000	50	30,51	SR	SR
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	16.780.893	1	5.290.000	0	0,00	1	5.290.000	50	31,52	SR	SR
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan**	**100**	**10.107.744**	**25**	**0,00**	**25**	**0,00**	**50**	**0**	**50**	**0,00**	**SR**	**ST**
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9	10.107.744	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	SR	SR
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/ terselesa ikan di wilayah kecamatan**	**100**	**112.625.276**	**25**	**0,00**	**25**	**0,00**	**50**	**0**	**50**	**0,00**	**SR**	**SR**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**2**	**112.625.276**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**SR**	**SR**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20	52.225.776	0	0	0	0	0	0	0	0,00	SR	SR
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	30	60.399.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	SR	SR
6	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru**	**35**	**257.763.424**	**0**	**23.505.000**	**0**	**9.000.000**	**0**	**32.505.000**	**0**	**12,61**	**SR**	**SR**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana**	**100**	**257.763.424**	**25**	**23.505.000**	**25**	**9.000.000**	**50**	**32.505.000**	**50**	**12,61**	**SR**	**SR**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	29.433.990	6	9.850.000	0	0,00	6	9.850.000	100	33,46	ST	SR
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	228.329.434	0	13.655.000	1	9.000.000	1	22.655.000	33	9,92	SR	SR

Berdasarkan Tabel 2.2 Realisasi RKPD Tahun 2025 Triwulan II dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 19 %, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 932.395.513 (Sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga belas rupiah) dari total pagu sebesar Rp.5.740.364.296 (lima milyar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh empat dua ratus Sembilan puluh enam rupiah) atau sebesar 16,24%.
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Kantor Kecamatan Muara Samu sebesar 19 % dengan predikat kinerja Rendah (R) untuk triwulan 1.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 1 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 0 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 0 indikator capaian kinerja 0%-50% = 33 indikator

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Muara Samu

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Dan Fungsi Kecamatan, maka Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kecamatan mempunyai fungsi:

a) pengoordinasian penyelenggaraan tugas Pemerintahan Umum dan otonomi daerah;
b) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
c) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d) pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
e) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
g) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
h) pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas an/ atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan;
i) Penyusunan program, pembinaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Kantor Kecamatan Muara Samu adalah:

1. Pelayanan Kependudukan
2. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Pelayanan Pertanahan

Upaya Kantor Kecamatan Muara Samu dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kantor Kecamatan Muara Samu Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Kantor Kecamatan Muara Samu terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Muara Samu sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
		2022	2023	2024	2025	2026		
Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	70	73	75	80	85		
Sasaran:								
1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat	65	70	70	75	80	69,87	93,16
2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	80	82	84	84	85	85,7	102
3) Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	41,85	27,90	13,95	13,95	0	0	
Tujuan Meningkatnya kemandirian masyarakat desa	Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan	73,03	73,4	74	74,5	75		
Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan yang aktif	55%	70	80	90	100	81,48	90,53

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Muara Samu sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi”, belum mencapai target, dimana realisasinya belum dapat dilaksanakan karena belum adanya jadwal penilaian dari pemerintah daerah.
b. Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat” hampir mencapai target, dimana realisasinya sebesar 69,87 dari target sebesar 75 dengan capaian kinerja sebesar 93,16 %.
c. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan”, telah mencapai target, tetapi masih menggunakan nilai tahun 2024.
d. Sasaran “Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Menurunnya Angka Kriminalitas”, belum dapat dihitung dikarenakan masih triwulan 1 dan belum ada kejadian sepanjang tahun 2025 di triwulan 1.
e. Tujuan “Meningkatnya kemandirian masyarakat desa” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan”, hamper mencapai target dimana realisasinya sebesar 81,48% dari target sebesar 90 dengan capaian kinerja sebesar 90,53 %.

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Periode April 2025 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Adanya efisiensi anggaran sebesar 50% yang menyebabkan beberapa kegiatan masih menunggu jadwal anggaran perubahan untuk penambahan anggaran kembali.
2. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan perangkat daerah.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2025.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Muara Samu sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
			Renja 2025	Perubahan Renja 2025
Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			
Sasaran: 1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat	Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat	75	72
2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat selama 1 Tahun	84	85,7
3.Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	Jumlah peristiwa kriminal/gangguan keamanan/ketertiban selama setahun dibagi jumlah penduduk tahun ybs dikalikan 100.000	13,95	13,95
Tujuan: Meningkatnya kemandirian masyarakat desa	Persentase Desa Mandiri di Wilayah Kecamatan			
Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah desa yang memiliki lembaga kemasyarakatan yang aktif/100 %	90%	81,48%

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Tahun 2025 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan target kinerja dan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025, hal ini dikarenakan

perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 yaitu "PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT" yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Penguatan Ekonomi Daerah.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Muara Samu mendukung pencapaian sasaran ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-10 yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Lingkungan Daerah Yang Kondusif
4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Kantor Kecamatan Muara Samu telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Penetapan Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Penetapan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 3.2
Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025 Kantor Kecamatan Muara Samu

No	Penetapan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kantor Kecamatan Muara Samu				**5.212.422.955**					**5.771.947.991**	
	Urusan Kewilayahan										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Muara Samu	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76	**4.169.978.911**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76	**4.327.392.607**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	80	**20.409.198**			Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	69,87	**55.462.052**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Muara Samu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Reviu renstra, ranwal renja, ranc. renja, renja, profil kecamatan)	5	15.028.143			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Reviu renstra, ranwal renja, ranc. renja, renja, profil kecamatan)	5	40.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Muara Samu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP, Evaluasi Renja, SPIP, Laporan TEPRA)	5	5.381.055			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP, Evaluasi Renja, SPIP, Laporan TEPRA)	5	15.462.052	

	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase LHP nihil	100	**3.605.383.308**			Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	**3.617.019.330**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Muara Samu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang	3.484.470.348			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang	3.484.470.348	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Muara Samu	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (SPP,SPM,E-Billing)	200 Dokumen	73.827.433			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (SPP,SPM,E-Billing)	200 Dokumen	85.142.369	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Muara Samu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	47.085.527			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	47.406.613	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80	70 %	**96.794.442**			Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80	90%	**119.188.748**	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Muara Samu	Jumlah pegawai yang diperbarui datanya	12 Orang	96.794.442			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Orang	119.188.748	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat	100 %	**105.906.453**			Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat	100 %	**194.236.967**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Muara Samu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.060.450			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.060.450	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Muara Samu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.060.450			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.060.450	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Muara Samu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	18.480.973			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	28.010.075	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Muara Samu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2.477.434			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4.954.867	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Muara Samu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	75.001.500			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	200.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	5.825.646			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	7.151.125	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi baik	85%	**24.210.288**			Persentase Ketersediaan BMD	85%	**47.610.863**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Muara Samu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	24.210.288			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	47.610.863	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**163.517.090**			Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	**163.517.090**	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Muara Samu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	1.015.000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	1.015.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Muara Samu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	33.379.290			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	33.379.290	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Muara Samu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	129.122.800			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	129.122.800	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	70%	**153.758.132**			Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	70%	**153.758.132**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Muara Samu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	113.000.000			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	113.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Muara Samu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	20.153.632			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	20.153.632	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Muara Samu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	7 Unit	20.604.500			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	7 Unit	20.604.500	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Muara Samu	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	85	**383.933.515**	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	85	**489.039.675**	

	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	**127.511.106**			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	**158.409.275**	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Muara Samu	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	127.511.106			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	141.487.107	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Muara Samu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	8.461.084			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	16.922.168	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum	100%	**37.930.900**			Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum	100%	**37.936.400**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Muara Samu	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Laporan	37.930.900			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Laporan	37.936.400	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	**218.491.509**			Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	**292.694.000**	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Muara Samu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	218.491.509			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	292.694.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Muara Samu	Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru	35%	**135.960.689**	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru	35%	**257.763.424**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100%	**135.960.689**			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100%	**257.763.424**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Muara Samu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	6 Lembaga	9.850.000			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	6 Lembaga	9.850.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Muara Samu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	126.110.689			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	228.329.434	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Muara Samu	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	65%	**287.700.384**	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	65%	**309.357.388**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	**282.644.964**			Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	**299.249.644**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Kec. Muara Samu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	12	274.234.611			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	12	282.468.751	

	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Muara Samu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	8.410.353			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	16.780.893	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	**5.055.420**			Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	**10.107.744**	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Muara Samu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9 Laporan	5.055.420			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9 Laporan	10.107.744	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Muara Samu	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100%	**74.883.857**	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100%	**112.625.276**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	**74.883.857**			Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	**112.625.276**	

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	Kec. Muara Samu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20 Orang	41.294.080			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 Orang	52.225.776	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Muara Samu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30 Orang	33.589.777			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	10 Orang	60.399.500	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Muara Samu	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100%	**159.965.599**	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100%	**244.185.926**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100%	**159.965.599**			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100%	**244.185.926**	

	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Muara Samu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18 Dokumen	22.925.287			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18 Dokumen	30.711.613	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Muara Samu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	7.950.382			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	10.891.524	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Muara Samu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	27 Dokumen	129.089.740			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	27 Dokumen	180.349.709	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Muara Samu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	190			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0 Dokumen	190	

3.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Perubahan Penetapan RKPD 2025 tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kantor Kecamatan Muara Samu baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Paser.

Tabel. 3.3
Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2025 pada Kantor Kecamatan Muara Samu

No	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Nama OPD										
	Urusan ……..										
1	Program …..										
	Kegiatan ….										
	Sub Kegiatan										
2.	Program …..										
	Kegiatan ….										
	Sub Kegiatan										
2.	Program …..										
	Kegiatan ….										
	Sub Kegiatan										

NIHIL

3.4. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Penetapan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kantor Kecamatan Muara Samu pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

TABEL TC.33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN PASER

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
KANTOR KECAMATAN MUARA SAMU													
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**Kec. Muara Samu**	**76**	**4.334.245.445**	**APBD**		**76**	**4.334.245.445**
7	**1**	**1**	**201**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Evaluasi SAKIP**	**Kec. Muara Samu**	**80**	**88.234.710**	**APBD**		**80**	**88.234.710**
7	1	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Muara Samu	5 Dokumen	52.172.715	APBD		5 Dokumen	52.172.715
7	1	1	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Muara Samu	5 Laporan	36.061.995	APBD		5 Laporan	36.061.995
7	**1**	**1**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Temuan di Tindaklanjuti**	**Kec. Muara Samu**		**3.652.897.308**	**APBD**			**3.652.897.308**
7	1	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Muara Samu	144 Orang	3.534.470.348	APBD		144 Orang	3.534.470.348
7	1	1	202	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Muara Samu	200 Dokumen	67.775.433	APBD		200 Dokumen	67.775.433
7	1	1	202	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Muara Samu	15 Laporan	50.651.527	APBD		15 Laporan	50.651.527

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	**1**	**1**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**100%**	**72.177.748**	**APBD**		**100%**	**72.177.748**
7	1	1	205	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Muara Samu	12 Dokumen	72.177.748	APBD		12 Dokumen	72.177.748
7	**1**	**1**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**193.999.387**	**APBD**			**193.999.387**
7	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Muara Samu	10 Paket	2.060.450	APBD		10 Paket	2.060.450
7	1	1	206	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kec. Muara Samu	2 Paket	2.060.450	APBD		2 Paket	2.060.450
7	1	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Muara Samu	20 Paket	18.480.973	APBD		20 Paket	18.480.973
7	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Muara Samu	4 Paket	4.954.868	APBD		4 Paket	4.954.868
7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Muara Samu	130 Laporan	160.617.000	APBD		130 Laporan	160.617.000
7	1	1	206	10	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kec. Muara Samu	5 Dokumen	5.825.646	APBD		5 Dokumen	5.825.646
7	**1**	**1**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**85%**	**43.290.288**	**APBD**		**85%**	**43.290.288**
7	1	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Muara Samu	6 Unit	43.290.288	APBD		6 Unit	43.290.288
7	**1**	**1**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**150.639.844**	**APBD**			**150.639.844**
7	1	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Muara Samu	100 laporan	1.015.000	APBD		100 laporan	1.015.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Muara Samu	24 Laporan	43.502.044	APBD		24 Laporan	43.502.044
7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah	Kec. Muara Samu	12 Laporan	106.122.800	APBD		12 Laporan	106.122.800
7	**1**	**1**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**168.758.132**	**APBD**			**168.758.132**
7	1	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya dan perijinannya	Kec. Muara Samu	8 Unit	128.000.000	APBD		8 Unit	128.000.000
7	1	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	Kec. Muara Samu	8 Unit	20.153.632	APBD		8 Unit	20.153.632
7	1	1	209	6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kec. Muara Samu	4 Unit	20.604.500	APBD		4 Unit	20.604.500
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**366.224.110**	**APBD**			**366.224.110**
7	**1**	**2**	**202**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**				**71.253.691**	**APBD**			**71.253.691**
7	1	2	202	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Muara Samu	3 Laporan	59.875.107	APBD		3 Laporan	59.875.107
7	1	2	202	3	Peningkatan Efektfitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	Kec. Muara Samu	2 Laporan	11.378.584	APBD		2 Laporan	11.378.584
7	**1**	**2**	**203**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**				**37.930.900**	**APBD**			**37.930.900**

7	1	2	203	1	Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Muara Samu	12 Dokumen	37.930.900	APBD		12 Dokumen	37.930.900

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	**1**	**2**	**204**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**				**257.039.519**	**APBD**			**257.039.519**
7	1	2	204	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yeng terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kec. Muara Samu	2 Laporan	257.039.519	APBD		2 Laporan	257.039.519
7	**1**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**164.532.470**	**APBD**			**164.532.470**
7	**1**	**3**	**201**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**164.532.470**	**APBD**			**164.532.470**
7	1	3	201	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Muara Samu	6 Lembaga Kemasyarakatan	9.850.000	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	9.850.000
7	1	3	201	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Muara Samu	3 Laporan	154.682.470	APBD		3 Laporan	154.682.470
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**144.744.247**	**APBD**			**144.744.247**
7	**1**	**4**	**201**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**123.879.104**	**APBD**			**123.879.104**

7	1	4	201	1	Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia Tentarana Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Muara Samu	12 Laporan	115.468.751	APBD		12 Laporan	115.468.751
7	1	4	201	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Kec. Muara Samu	2 Laporan	8.410.353	APBD		2 Laporan	8.410.353

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Masyarakat							
7	**1**	**4**	**204**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**20.865.143**	**APBD**			**20.865.143**
7	1	4	202	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Muara Samu	9 Laporan	20.865.143	APBD		9 Laporan	20.865.143
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**246.115.418**	**APBD**			**246.115.418**
7	**1**	**5**	**201**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**246.115.418**	**APBD**			**246.115.418**
7	1	5	201	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Muara Samu	22 Orang	162.525.641	APBD		22 Orang	162.525.641

7	1	5	201	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Kec. Muara Samu	10 Orang	83.589.777	APBD		10 Orang	83.589.777
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**				**211.840.599**	**APBD**			**211.840.599**

Kode					**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Rencana Perubahan Tahun 2025**				**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026**	
							Lokasi	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**	**Sumber Dana**		**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**
7	**1**	**6**			**Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**211.840.599**	**APBD**			**211.840.599**
7	1	6	201	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Muara Samu	18 Dokumen	34.550.287	APBD		18 Dokumen	34.550.287
7	1	6	201	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Muara Samu	3 Dokumen	12.200.382	APBD		3 Dokumen	12.200.382
7	1	6	201	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Muara Samu	27 Dokumen	115.089.740	APBD		27 Dokumen	115.089.740
7	1	6	201	15	Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Muara Samu	2 Dokumen	50.000.190	APBD		2 Dokumen	50.000.190
JUMLAH									**5.503.454.261**				**8.640.633.130**

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kantor Kecamatan Muara Samu mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dokumen Penetapan Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Muara Samu, 22 Agustus 2025
Camat

A. Rusdiansyah, S.Sos
Pembina Tk. I/IVb
NIP.19720423 199803 1 009